



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 44);
7. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2025 Nomor 84, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II
RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif.
- (3) Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

BAB III SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika, meliputi:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
 - c. BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
 - d. BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
 - e. BAB V : PENUTUP.
- (2) Uraian sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah di lingkungan masing-masing.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui Kepala Badan.
- (3) Pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 Nomor 570); dan
- b. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2024 Nomor 577),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 19 September 2025



WALI KOTA TARAKAN,

KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 19 September 2025



SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

MALUDIN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2025 NOMOR 648

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Tarakan disusun sebagai pedoman kerja dan arah kebijakan untuk periode 2025–2029. Penyusunannya merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dinas/badan/kantor dan perangkat-perangkat daerah lainnya.

Perencanaan strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namun tetap berada pada tatanan sistem manajemen nasional. Dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah selama lima tahun ke depan yang didalamnya juga mencakup perencanaan penganggaran responsif gender, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Sekretariat Daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Tarakan.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan selama lima tahun yang disusun sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah, berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Renstra PD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Proses penyusunan Renstra PD melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

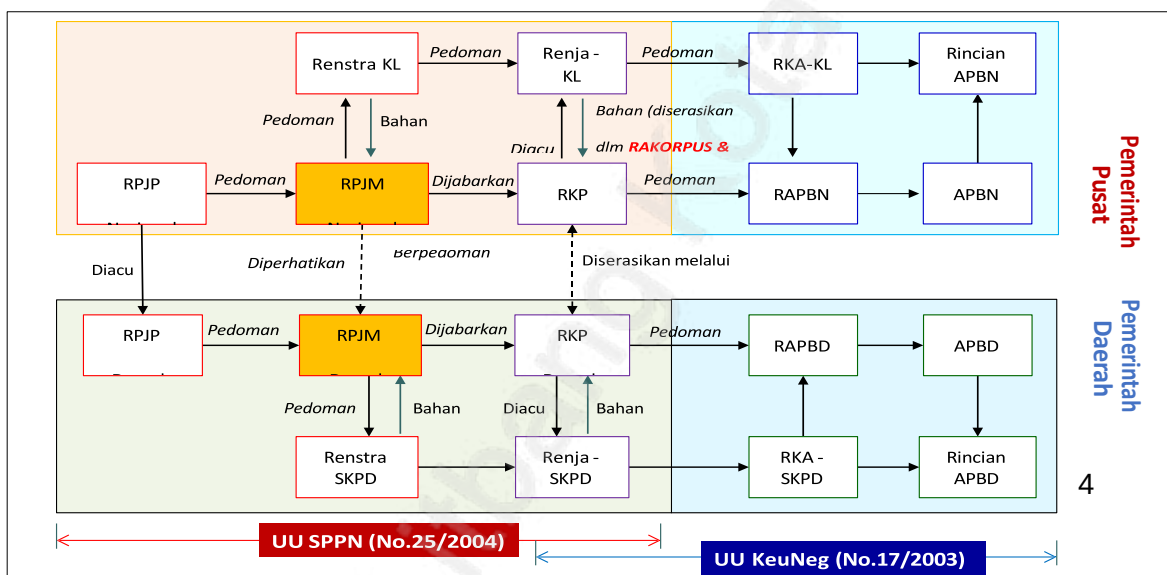
- Persiapan penyusunan Renstra PD;
- Penyusunan rancangan Renstra PD;
- Penyusunan rancangan akhir Renstra PD; dan
- Penetapan Renstra PD.

Renstra PD menjawab 3 (tiga) pertanyaan dasar, antara lain :

- Kemana pelayanan perangkat daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun,
- Bagaimana mencapainya
- Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Adapun hubungan antara Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagai berikut :

Gambar 1.1.
Hubungan RPJMD dengan Renstra PD dalam Dokumen
Perencanaan Penganggaran



1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 –3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050–5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Tarakan;
21. Surat Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 100.3.3.3/HK-IV/229/2025 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Tarakan dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Sekretariat Daerah Kota Tarakan. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Tarakan tahun 2025-2029 adalah :

1. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah Kota Tarakan dengan Sekretariat Daerah Kota Tarakan, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Sekretariat Daerah Kota Tarakan.
2. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tarakan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Tarakan, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tarakan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tarakan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

Bab I	Pendahuluan Berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.
Bab II	Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah Memuat tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Sekretariat Daerah; sumber daya yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah.
Bab III	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah.
Bab V	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Memuat rencana program dan kegiatan Sekretariat Daerah selama 5 (lima) tahun yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
Bab VII	Penutup Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Sekretariat Daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun oleh Sekretariat Daerah.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN UMUM

2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pembentukan organisasi Sekretariat Daerah Kota Tarakan ditetapkan berdasarkan Peraturan Kota tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Madiun, dan Peraturan Walikota Madiun Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah terakhir diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 21 Tahun 2018.

2.1.1. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tarakan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, Sekretariat Daerah Kota Tarakan memiliki uraian struktur organisasi berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah kota Tarakan adalah sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 1. Bagian Pemerintahan
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat,
 3. Bagian Hukum;
- c. Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
 1. Bagian Perekonomian,
 2. Bagian Administrasi Pembangunan,
- d. Asisten Administrasi Umum ;
 1. Bagian Organisasi
 2. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 3. Bagian Umum membawahkan:
- e. Kelompok jabatan fungsional.

2.1.2. Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Tarakan

A. Sekretaris Daerah

Sekretaris Daerah Kota Tarakan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan lembaga lainnya serta pelayanan administratif, Untuk menyelenggarakan tugasnya Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan lembaga Perangkat Daerah lainnya;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. Pengendalian layanan pengadaan barang dan jasa;
- e. Pelayanan administratif perangkat daerah dan lembaga perangkat daerah lainnya;
- f. Pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan dan penyusunan kebijakan, melakukan pemantauan, pembinaan dan fasilitasi bidang pemerintahan.

a) Bagian Pemerintahan

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas menyusun rumusan kebijakan, pengoordinasian dan analisa urusan pemerintahan dan pengembangan otonomi Daerah, pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, penanggulangan bencana serta pembinaan pemerintahan kecamatan dan pembinaan pemerintahan kelurahan sebagai perangkat kecamatan.

b) Bagian Hukum

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, pengendalian dan perumusan peraturan perundang-undangan, telaahan hukum, pemberian bantuan hukum, publikasi dan pendokumentasian produk hukum serta pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

c) Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan petunjuk teknis, monitoring dan evaluasi dibidang kesejahteraan rakyat dan sosial.

C. Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan dan menyusun kebijakan, serta melakukan pembinaan dan fasilitasi bidang perekonomian, bidang pembangunan dan bidang kesejahteraan rakyat. Untuk menyelenggarakan tugasnya Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian, perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di bidang: perencanaan, penelitian dan pengembangan, perhubungan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, pertanian, pangan, perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, koperasi dan Usaha mikro, Kecil dan Menengah, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, pengembangan BUMD, pengendalian pembangunan dan pengadaan barang/jasa;
- b. Pengendalian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas urusan di bidang: perencanaan, penelitian dan pengembangan, perhubungan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, pertanian, pangan, perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, koperasi dan Usaha mikro, Kecil dan Menengah, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, pengembangan BUMD, pengendalian pembangunan dan pengadaan barang/jasa;
- c. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas urusan di bidang: perencanaan, penelitian dan pengembangan, perhubungan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesehatan, sosial,

tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, pertanian, pangan, perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, koperasi dan Usaha mikro, Kecil dan Menengah, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, pengembangan BUMD, pengendalian pembangunan dan pengadaan barang/jasa;

- d. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas urusan di bidang: perencanaan, penelitian dan pengembangan, perhubungan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesehatan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, pertanian, pangan, perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, koperasi dan Usaha mikro, Kecil dan Menengah, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, pengembangan BUMD, pengendalian pembangunan dan pengadaan barang/jasa.

a) Bagian Perekonomian

Bagian Perekonomian mempunyai tugas menyusun rumusan kebijakan dan analisa bidang sarana prasarana dan produksi perekonomian Daerah, pengembangan perekonomian Daerah serta pengawasan Badan Usaha Milik Daerah serta koordinasi dan pemantauan perkembangan Badan Usaha Milik Negara dan perbankan di Daerah.

b) Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengoordinasikan serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan urusan pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, perencanaan, penelitian dan pengembangan, serta melaksanakan pengendalian, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pembinaan, pelaksanaan dan penatausahaan, pengembangan manajemen serta advokasi dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan dan menyusun kebijakan, serta melakukan pembinaan dan fasilitasi urusan bidang : kearsipan, perpustakaan, keuangan dan barang milik Daerah, pembinaan aparatur, pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintah dan penyelenggaraan pemerintah daerah, organisasi dan ketatalaksanaan dan umum dan perlengkapan. Untuk melaksanakan tugasnya Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian, perumusan kebijakan, perumusan pedoman dan perumusan petunjuk teknis penyelenggaraan pelaksanaan urusan bidang: kearsipan, perpustakaan, keuangan dan barang milik Daerah, pembinaan aparatur, pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintah dan penyelenggaraan pemerintah daerah, organisasi dan ketatalaksanaan dan umum dan perlengkapan.
- b. Pengendalian, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas urusan bidang: kearsipan, perpustakaan, keuangan dan barang milik Daerah, pembinaan aparatur, pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintah dan penyelenggaraan pemerintah daerah, organisasi dan ketatalaksanaan dan umum dan perlengkapan.
- c. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas urusan bidang: kearsipan, perpustakaan, keuangan dan barang milik Daerah, pembinaan aparatur, Pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintah dan penyelenggaraan pemerintah daerah, organisasi dan ketatalaksanaan dan umum dan perlengkapan.
- d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a) Bagian Umum

Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan perumusan kebijakan bidang keuangan, barang milik Daerah, pendapatan, pengendalian dan pengoordinasian penyusunan anggaran, pembukuan dan pelaporan pelaksanaan anggaran dan pembinaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah. Bagian Umum dan Perlengkapan Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengoordinasian dalam pelaksanaan penatausahaan Sekretariat Daerah, perjalanan dinas sesuai kewenangannya, pengelolaan kearsipan, urusan rumah tangga, dan perlengkapan Sekretariat Daerah

b) Bagian Organisasi

Bagian Organisasi mempunyai tugas merumuskan kebijakan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, analisa jabatan, pembinaan sistem kinerja organisasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah.

c) Bagian Humas dan Protokol

Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, fasilitasi dan analisa dalam perumusan kebijakan urusan informasi dan komunikasi, statistik, persandian, serta melaksanakan administrasi layanan hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan

2.1. Sumber Daya Sekretariat Daerah Kota Tarakan

2.1.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh

potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman dan sejahtera.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah Kota Tarakan didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan prasarana.

2.1.2. Sarana Prasarana

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Tarakan tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja Sekretariat Daerah sumber daya manusia/aparat sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Tarakan.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Tarakan periode jangka menengah berdasarkan Renstra Tahun 2020-2024 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Tarakan berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2020-2024 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD yang telah ditetapkan dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Setda Kota Tarakan. Untuk Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah dari Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 disajikan pada Tabel sebagai berikut :

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Sakip Kota Ta rakan				62.00 (B)	62.00 (B)	66.00 (B)	70.00	68.00	0	63.41 (B)	66.00 (B)	64.53 (B)	64.84 (B)	0	115,8%	100%	117%	95,36
2	Nilai LPPD				3,5	3.7	3,9	4,1	Sedang	0	3,1	3,1 Sedang	Sedang	Sedang	0	Rendah	Sedang	Sedang	Hasil Evaluasi LPPD 2024 akan dirilis Tahun 2025
3	Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti				100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	100%	100%	100 %	0	100%	100%		100
4	Persentase Rekomendasi LHP Inpektorat yang ditindaklanjuti				100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	100%	100%	100%	0	100%	100%		100
5	Nilai IKM				79.59	84,50	84,75	85	87.50	0	81.59	86,81	86,78	87,78	0	102.51	102.73	102.09	100,32
6	Nilai Inflasi				108 IHK	108 IHK	111 IHK	114 IHK	2.5±1	0	108,15 IHK	110,6 IHK	114	1.60	0	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai

Pada tahun akhir perencanaan, yaitu 2024, capaian kinerja secara umum menunjukkan hasil yang positif. Sebagian besar indikator telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra. Indeks Reformasi Birokrasi mencatat lonjakan signifikan dengan capaian lebih dari 120 persen dari target, menandakan percepatan yang kuat dalam agenda reformasi birokrasi.

2.1.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Untuk melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tarakan, sumber daya keuangan merupakan salah satu faktor yang menentukan di samping juga sumber daya manusia dan sarana prasarana. Berikut tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Tarakan:

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Rencana Strategik Sekretariat Daerah Kota Tarakan merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Tarakan sehingga perumusan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah tidak boleh bertentangan dengan dan harus mendukung tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2030.

Tujuan dan sasaran dalam RPJMD menjadi landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kota Tarakan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.1.

3.2. Strategi

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam program dan kegiatan.

Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikator untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/ tindakan untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan Sekretariat Daerah Kota Tarakan merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai visi dan misi OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Sekretariat Daerah Kota Tarakan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisa terhadap gambaran pelayanan, permasalahan, isu strategi, serta pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Tarakan. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun.

Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip: menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang, didasarkan pada capaian kinerja pembangunan, layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah, dan terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Ketentuan Umum Pasal 1 disebutkan bahwa:

- Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran
- Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi

Perumusan strategi untuk diawali dengan berbagai tahapan untuk pencapaian indikator sasaran, sebagaimana pada uraian berikut :

Tabel 3.2
Tahapan Strategi Pencapaian Indikator Sasaran

TAHAP 1	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Penerapan Tata Kelola Pemerintahan	Pemantapan Penerapan Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Penerapan Tata Kelola Pemerintahan	Percepatan Penerapan Tata Kelola Pemerintahan	Perwujudan Penerapan Tata Kelola Pemerintahan

3.3. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
	PP No. 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB No. 53 Tahun 2014	Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Tata Kelola Pemerintahan	Fasilitasi pelaporan kinerja perangkat daerah
	Permenpan RB No. 182 Tahun 2014	Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Pemerintahan	Fasilitasi penyusunan Rencana Aksi RB
	Undang-undang No. 25 Tahun 2009	Peningkatan Responsivitas Terhadap Isu Sosial dan Keamanan	Koordinasi pelayanan publik dan tata laksana
	Permenpan RB No. 1 Tahun 2020	Pengelolaan Ketertiban Umum dan Penegakan Hukum	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
	Undang-undang No. 13 Tahun 2022	Peningkatan Koordinasi Antara Pemerintah Kota dan Pusat	Penetapan dan pengundangan produk hukum
	PP No. 33 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 8 Tahun 2019	Pemantauan, Evaluasi, dan Transparansi Kebijakan	Dokumentasi dan sosialisasi produk hukum
	UU No. 16 Tahun 2011, PP No 42 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 4 Tahun 2021		Fasilitasi bantuan hukum
	PP No. 46 Tahun 2025		Pengadaan barang dan jasa
	UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 25 Tahun 2004 dan UU No. 30 Tahun 2014		Fasilitasi administrasi pembangunan
	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017		Pengendalian dan evaluasi administrasi pembangunan
	Peraturan Menteri Koordinator Bid. Perekonomian No 10/2017, Inmedagri No. 027/1696/Sj Tahun 2013 dan Permenkeu No. 67 Tahun 2023		Koordinasi TPID
	PP No. 54 Tahun 2017		Pembinaan BUMD dan BLUD
	Kementrian Koord. Bid. Perekonomian No. 4 Tahun 2021		Koordinasi TPKAD
	UU No. 20 Tahun 2008		Pembinaan terhadap Kebijakan UMKM
	UU No 32 Tahun 2009 dan UU No. 23 Tahun 2014		Pembinaan terhadap Kebijakan SDA
	PP No 13 Tahun 2019		Koordinasi penyusunan LPPD
	PP No. 2 Tahun 2018 dan Permendagri No. 59 Tahun 2021		Fasilitasi Penerapan SPM
	UU No. 23 Tahun 2014 dan PP 28 Tahun 2018		Fasilitasi permohonan kerjasama daerah
	UU No 23 Tahun 2014, UU No. 4 Tahun 2011 dan UU No. 6 Tahun 2014		Fasilitasi administrasi kewilayahan
	PP No. 87 Tahun 2017 dan Permenko PMK No. 6 Tahun 2021.		Pelaksanaan kegiatan bina mental spiritual
	PMK No. 14 tahun 2024 dan Permendagri No. 77 Tahun 2020		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab IV Renstra Perangkat Daerah menyajikan rencana program dan kegiatan yang direncanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kota Tarakan dalam mendukung visi misi Walikota Tarakan. Rencana program selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan serta penganggaran. Penyusunan program dan kegiatan berdasarkan pada strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Rencana program dilengkapi dengan indikator atau outcome program beserta target capaiannya dan pagu indikatif yang mencerminkan kebutuhan anggaran dalam melaksanakan program yang direncanakan. Sedangkan untuk rencana kegiatan juga dilengkapi dengan indikator atau output kegiatan beserta target capainnya dan pagu indikatif. Indikator atau outcome program merupakan suatu keluaran yang dapat langsung digunakan atau hasil nyata dari suatu keluaran dan juga mencerminkan berfungsinya keluaran (output) dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pada Ketentuan Umum Pasal 1 disebutkan bahwa :

- Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi
- Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD
- Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program
- Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
- Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). 59. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud. 60. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
- Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program Dalam rangka mendukung pelaksanaan program- program yang tertuang dalam visi yang tercantum dalam RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2030, Sekretariat Daerah Kota Tarakan membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Sekretariat Daerah Kota Tarakan. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat ditampilkan pada tabel berikut :

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME ASISTEN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.		
meningkatkan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya penerapan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya tata kelola yang efektif dan akuntabel				IRB General IRB Tematik				
						1. Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP minimal BB 2. Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik				
meningkatkan kualitas digitalisasi pelayanan publik			Meningkatnya kualitas pelaporan SAKIP Kota	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Capaian Komponen pelaporan SAKIP Kota				
			Meningkatnya kualitas pelaporan SAKIP perangkat daerah			Rata-rata nilai komponen pelaporan SAKIP perangkat daerah	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
						Terfasilitasinya pelaporan kinerja perangkat daerah	X.XX.01.2.13 Penataan Organisasi			
						Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	X.XX.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah		
						Terfasilitasinya penyusunan Rencana Aksi RB		X.XX.01.2.13 Penataan Organisasi		
						Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	X.XX.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		
				Meningkatnya kualitas layanan pada unit pelayanan publik			Persentase Unit Lokus Pelayanan Publik dengan Predikat Minimal B			
						IKM Kota				
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah dan kepatuhan penerapan kebijakan ketatalaksanaan			Persentase Unit Pelayanan Publik dengan Predikat IKM Minimal B	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
								X.XX.01.2.13 Penataan Organisasi		
						Terkoordinirnya pelayanan publik dan tata laksana				
						Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	X.XX.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		
						Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	X.XX.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		
			Meningkanya kualitas kelembagaan perangkat daerah	Meningkatnya kualitas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya			Rata-rata capaian nilai tingkat kematangan organisasi	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
							Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		X.XX.01.2.13 Penataan Organisasi	
							Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	X.XX.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
		Meningkatnya kualitas				1. Indeks Kualitas Kebijakan, 2. Skor EPPD. 3. Indeks Pencapaian SPM				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME ASISTEN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
		penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatnya Transparansi dan Kepastian Hukum.			Indeks Reformasi Hukum		
				Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan		1. Persentase produk hukum yang harmonis dengan peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi 2. persentase produk hukum yang terdokumentasi dan tersosialisasi	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
					Terlaksananya penetapan dan pengundangan produk hukum		4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
					Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	
					Terlaksananya dokumentasi dan sosialisasi produk hukum		4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
					Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	
				Tertanganinya pengaduan kasus hukum		Persentase kasus hukum yang tertangani	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
					Terfasilitasinya bantuan hukum		4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	
					Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum	
			Meningkatnya kualitas tata kelola pembangunan			1. Persentase capaian pembangunan 2. indeks tata kelola pengadaan	(baseline 61)	
				Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa		Tingkat kematangan UKPBJ	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
					Terlaksananya pengadaan barang dan jasa		4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
					Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
					Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
			Meningkatnya efektivitas kebijakan perekonomian			Persentase efektivitas kebijakan perekonomian		
				Meningkatnya kualitas pelaksanaan administrasi pembangunan		Persentase realisasi fisik Persentase realisasi keuangan	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
					Terfasilitasi administrasi pembangunan		4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
					Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	
					Terlaksananya pengendalian dan evaluasi administrasi pembangunan		4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	
					Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	
					Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan	4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME ASISTEN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
					Pelaksanaan Pembangunan	Pembangunan		
				Meningkatnya kinerja TPID		Persentase rekomendasi kebijakan TPID yang dilaksanakan	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
					Terlaksananya koordinasi TPID		4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
					Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
				Meningkatnya BUMD dan BLUD yang berkinerja sehat		Persentase BUMD dan BLUD yang sehat	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
					Terlaksananya pembinaan BUMD dan BLUD		4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
					Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	
					Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	4.01.03.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	
					Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	4.01.03.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	
				meningkatnya kinerja TPKAD		persentase capaian rencana aksi TPKAD	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
					terlaksananya koordinasi TPKAD		4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
					Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	4.01.03.2.01.0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	
				meningkatnya kualitas kebijakan UMKM		Persentase kebijakan UMKM yang terlaksana	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
					Terlaksananya Pembinaan terhadap Kebijakan UMKM		4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	
					Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	
			Meningkatnya efektivitas kebijakan SDA	meningkatnya kualitas kebijakan SDA		Persentase efektivitas kebijakan SDA	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
					Terlaksananya Pembinaan terhadap Kebijakan SDA		4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	
					Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	ASTACITA
					Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo,	4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME ASISTEN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
					Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Perhubungan, Statistik, Persandian		
					Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	4.01.03.2.04.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	
			Meningkatnya efektivitas kebijakan Pemerintahan			Persentase efektivitas kebijakan pemerintahan		
				Meningkatnya kualitas data LPPD		Persentase keterisian data IKK LPPD	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
					Terlaksananya koordinasi penyusunan LPPD		4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	
				Meningkatnya kualitas data Standar Pelayanan Minimal	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
						Persentase keterisian data Standar Pelayanan Minimal		
				Meningkatnya fasilitasi kerjasama daerah	Terfasilitasinya Penerapan SPM			
					Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan	
						Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
					Terlaksananya fasilitasi permohonan kerjasama daerah		4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
					Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	
					Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	4.01.02.2.04.0002 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	
					Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	
			Meningkatnya administrasi kewilayahan		1. persentase ketersediaan data toponim kota tarakan 2. penetapan batas wilayah kelurahan dan kecamatan (SKP) 3. persentase kecamatan dan kelurahan yang difasilitasi		4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
					Terlaksananya fasilitasi administrasi kewilayahan		4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	
					Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	
			Meningkatnya efektivitas kebijakan kesejahteraan rakyat			Persentase efektivitas kebijakan kesejahteraan rakyat		
				Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat		Persentase kebijakan kesra yang terlaksana	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
					Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME ASISTEN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
					Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4.01.02.2.02.0001 Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
					Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	
					Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	
		Meningkatnya tata kelola sekretariat daerah	Meningkatnya kualitas administrasi umum sekretariat daerah	Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja		Nilai SAKIP Sekreariat Daerah		
						IKM Sekretariat Daerah		
						Capaian kinerja administrasi umum		
						LHE Akip yang ditindaklanjuti	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu		X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	X.XX.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	X.XX.01.2.01.08 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa	X.XX.01.2.01.09 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME ASISTEN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
						Lingkup Perangkat Daerah		
					Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	X.XX.01.2.01.10 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	X.XX.01.2.01.11 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
					Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	X.XX.01.2.01.12 Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	
					Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	X.XX.01.2.01.13 Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	
					Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP		X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Tersedianya Dokumen Adm. Barang Milik Daerah		X.XX.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	X.XX.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	X.XX.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	X.XX.01.2.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	X.XX.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	X.XX.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME ASISTEN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
					Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	X.XX.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	X.XX.01.2.03.07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
					Tersedianya layanan administrasi kepegawaian		X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	X.XX.01.2.05.01 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	X.XX.01.2.05.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	X.XX.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	X.XX.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	X.XX.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	X.XX.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	X.XX.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	X.XX.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Tersedianya layanan administrasi umum		X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	X.XX.01.2.06.06 Fasilitasi Kunjungan Tamu	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME ASISTEN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
					Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	X.XX.01.2.06.07 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	X.XX.01.2.06.08 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	X.XX.01.2.06.09 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
					Terkelolanya data Barang Milik Daerah dalam aplikasi		X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	X.XX.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	X.XX.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	X.XX.01.2.07.04 Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
					Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	
					Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	X.XX.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
					Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	X.XX.01.2.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud	
					Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	X.XX.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	X.XX.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Tersedianya layanan jasa penunjang		X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME ASISTEN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
					Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Terpeliharanya Barang Milik Daerah		X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	X.XX.01.2.09.04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
					Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	
					Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	X.XX.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
					Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	X.XX.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
					Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	X.XX.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	X.XX.01.2.09.11 emeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	X.XX.01.2.09.12. Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	
					Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional KDH/WKDH		X.XX.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	X.XX.01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME ASISTEN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
					Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	X.XX.01.2.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	X.XX.01.2.11.03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	X.XX.01.2.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat		X.XX.01.2.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
					Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	X.XX.01.2.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	
					Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	X.XX.01.2.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	
					Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	X.XX.01.2.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	
				Meningkatnya kualitas layanan pimpinan		Indeks Kepuasan Layanan Pimpinan	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Terlaksananya pelayanan keprotokolan		X.XX.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
					Terlaksananya Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	X.XX.01.2.14.0001 Fasilitas Keprotokolan	
					Terlaksananya pelayanan komunikasi dan dokumentasi tugas pimpinan		X.XX.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
					Terlaksananya Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	X.XX.01.2.14.0002 Fasilitas Komunikasi Pimpinan	
					Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	X.XX.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	

4.1. Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kota Tarakan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Sekretariat Daerah Kota Tarakan menetapkan beberapa indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan pemerintah. Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKJiP) tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKJiP) lima tahunan akhir masa jabatan Kepala Daerah.

Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kota Tarakan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel
Indikator Kinerja Sekretariat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	IRB General		66,09	68.92	69,70	70,60	71,50	72,40	73,30	Tujuan
2	IRB Tematik		11,08	11,08	11,30	11,40	11,50	11,60	11,70	Tujuan
3	Persentase Perangkat Daerah dengan Predikat SAKIP minimal BB		90.32	90.32	90.32	93.55	93.55	96.77	100	Sasaran
4	Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik		91.02	91.02	91.03	91.04	91.05	91.06	91.10	Sasaran
5	Skor EPPD		90.32	90.32	90.32	93.55	93.55	96.77	100	Sasaran
6	Indeks Kualitas Kebijakan		79.64	79.65	80,00	80,10	80,15	80,20	80,25	Sasaran
7	Nilai SAKIP		79.64	79.65	80,00	80,10	80,15	80,20	80,25	Sasaran
9	IKM		88,08	90,07 (Mutu Pelayanan Baik)	90,07 (Mutu Pelayanan Baik)	90,07 (Mutu Pelayanan Baik)	90,07 (Mutu Pelayanan Baik)	90,07 (Mutu Pelayanan Baik)	90,07 (Mutu Pelayanan Baik)	Sasaran

4.1.1. Kinerja pelayanan perangkat daerah

Tinjauan terhadap kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Tarakan periode jangka menengah berdasarkan Renstra Tahun 2020-2024 dapat diketahui dari tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Kota Tarakan berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2020-2024 menurut indikator kinerja pelayanan SKPD yang telah ditetapkan dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Setda Kota Tarakan. Untuk Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah dari Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel
Indikator Kinerja Utama

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Sakip Kota Tarakan	62.00 (B)	62.00 (B)	66.00 (B)	70.00	68.00	0	63.41 (B)	66.00 (B)	64.53 (B)	64.84 (B)	0	115.8%	100%	117%	95,36
2	Nilai LPPD	3,5	3.7	3,9	4,1	Sedang	0	3,1	3,1 Sedang	Sedang	Sedang	0	Rendah	Sedang	Sedang	Hasil Evaluasi LPPD 2024 akan dirilis Tahun 2025
3	Persentase Rekomendasi LHP BPK yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	100%	100%	100 %	0	100%	100%		100
4	Persentase Rekomendasi LHP Inpektorat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%	100%	100%	100%	0	100%	100%		100
5	Nilai IKM	79.59	84,50	84,75	85	87.50	0	81.59	86,81	86,78	87,78	0	102.51	102.73	102.09	100,32
6	Nilai Inflasi	108 IHK	108 IHK	111 IHK	114 IHK	2.5±1	0	108,15 IHK	110,6 IHK	114	1.60	0	sesuai	sesuai	sesuai	sesuai

Tabel
Rencana Program/Kegiatan/SubKegiatan dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kota Tarakan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				51.405.779.913,00		49.803.133.656,00		49.620.986.856,00		49.710.986.856,00		51.283.442.856,00		
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				34.430.779.913,00		32.778.133.656,00		32.545.133.656,00		32.625.133.656,00		33.987.589.656,00		
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)		93	15.023.652.257,00	96	13.353.462.000,00	99	13.105.462.000,00	100	13.085.462.000,00	100	14.435.462.000,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah	
4.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				15.000.000,00		153.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	2		0		0		0		0			
4.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				15.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	2	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
4.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		153.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	126	0	0,00	180	153.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
4.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				4.510.000.000,00		4.530.000.000,00		4.515.000.000,00		4.615.000.000,00		4.815.000.000,00		
Tersedianya layanan administrasi umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	216	12	4.510.000.000,00	12	4.530.000.000,00	12	4.515.000.000,00	12	4.615.000.000,00	12	4.815.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	92	46		46		46		46		46			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	24	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	21	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	0		1		0		0		0			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	24	12		12		12		12		12			
4.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	21	12	75.000.000,00	12	75.000.000,00	12	75.000.000,00	12	75.000.000,00	12	75.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
4.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00		
4.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		550.000.000,00		
4.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	24	12	125.000.000,00	12	125.000.000,00	12	125.000.000,00	12	125.000.000,00	12	125.000.000,00		
4.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
4.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				1.900.000.000,00		1.900.000.000,00		1.900.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	24	12	1.900.000.000,00	12	1.900.000.000,00	12	1.900.000.000,00	12	2.000.000.000,00	12	2.000.000.000,00		
4.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	216	12	2.000.000.000,00	12	2.000.000.000,00	12	2.000.000.000,00	12	2.000.000.000,00	12	2.000.000.000,00		
4.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
4.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0,00		15.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	1	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
4.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.550.000.000,00		1.550.000.000,00		1.425.000.000,00		1.350.000.000,00		2.500.000.000,00		
Terkelolanya data Barang Milik Daerah dalam aplikasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	10	3.550.000.000,00	0	1.550.000.000,00	6	1.425.000.000,00	0	1.350.000.000,00	0	2.500.000.000,00		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	83	1		0		0		0		0			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	4	3		1		1		1		2			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	98	32		32		27		27		27			
4.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1.500.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		1.500.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	4	3	1.500.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	2	1.500.000.000,00		
4.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				700.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
4.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				150.000.000,00		0,00		75.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	10	150.000.000,00	0	0,00	6	75.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
4.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	98	32	1.200.000.000,00	32	1.200.000.000,00	27	1.000.000.000,00	27	1.000.000.000,00	27	1.000.000.000,00		
4.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.943.462.000,00		3.943.462.000,00		3.943.462.000,00		3.943.462.000,00		3.943.462.000,00		
Tersedianya layanan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	6	4	3.943.462.000,00	4	3.943.462.000,00	4	3.943.462.000,00	4	3.943.462.000,00	4	3.943.462.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	31	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	9	6		6		6		6		6			
4.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	6	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00		
4.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.915.550.000,00		1.915.550.000,00		1.915.550.000,00		1.915.550.000,00		1.915.550.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24	12	1.915.550.000,00	12	1.915.550.000,00	12	1.915.550.000,00	12	1.915.550.000,00	12	1.915.550.000,00		
4.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	31	12	175.000.000,00	12	175.000.000,00	12	175.000.000,00	12	175.000.000,00	12	175.000.000,00		
4.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.847.912.000,00		1.847.912.000,00		1.847.912.000,00		1.847.912.000,00		1.847.912.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	9	6	1.847.912.000,00	6	1.847.912.000,00	6	1.847.912.000,00	6	1.847.912.000,00	6	1.847.912.000,00		
4.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.653.190.257,00		1.825.000.000,00		1.825.000.000,00		1.825.000.000,00		1.825.000.000,00		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	42	5	1.653.190.257,00	5	1.825.000.000,00	5	1.825.000.000,00	5	1.825.000.000,00	5	1.825.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	64	21		23		23		23		23			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	33	25		25		25		25		25			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	9	5		5		5		5		5			
4.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	42	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00		
4.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.128.190.257,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	64	21	1.128.190.257,00	23	1.300.000.000,00	23	1.300.000.000,00	23	1.300.000.000,00	23	1.300.000.000,00		
4.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	11	12	25.000.000,00	10	25.000.000,00	10	25.000.000,00	10	25.000.000,00	10	25.000.000,00		
4.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	33	25	100.000.000,00	25	100.000.000,00	25	100.000.000,00	25	100.000.000,00	25	100.000.000,00		
4.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	9	5	250.000.000,00	5	250.000.000,00	5	250.000.000,00	5	250.000.000,00	5	250.000.000,00		
4.01.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				812.000.000,00		812.000.000,00		857.000.000,00		812.000.000,00		812.000.000,00		
Tersedianya Administrasi Keuangan dan Operasional KDH/WKDH	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	2	2	812.000.000,00	2	812.000.000,00	2	857.000.000,00	2	812.000.000,00	2	812.000.000,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	2	0		0		2		0		0			
	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00		
4.01.01.2.11.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				0,00		0,00		45.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	2	0	0,00	0	0,00	2	45.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
4.01.01.2.11.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		
Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	2	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00		
4.01.01.2.11.0004 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		
Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	2	2	600.000.000,00	2	600.000.000,00	2	600.000.000,00	2	600.000.000,00	2	600.000.000,00		
4.01.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				540.000.000,00		540.000.000,00		540.000.000,00		540.000.000,00		540.000.000,00		
Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	79	67	540.000.000,00	67	540.000.000,00	67	540.000.000,00	67	540.000.000,00	67	540.000.000,00		
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	67	67		67		67		67		67			
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	47	35		35		35		35		35			
4.01.01.2.12.0001 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	79	67	250.000.000,00	67	250.000.000,00	67	250.000.000,00	67	250.000.000,00	67	250.000.000,00		
4.01.01.2.12.0002 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	67	67	225.000.000,00	67	225.000.000,00	67	225.000.000,00	67	225.000.000,00	67	225.000.000,00		
4.01.01.2.12.0003 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	47	35	65.000.000,00	35	65.000.000,00	35	65.000.000,00	35	65.000.000,00	35	65.000.000,00		
Meningkatnya kualitas layanan pimpinan	Indeks Kepuasan Layanan Pimpinan (%)		91	600.000.000,00	91	600.000.000,00	92	600.000.000,00	93	700.000.000,00	94	700.000.000,00		
4.01.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		
Terlaksananya pelayanan keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan (Laporan)	1	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
4.01.01.2.14.0001 - Fasilitas Keprotokolan				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya pelayanan komunikasi dan dokumentasi tugas pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan (Laporan)	1	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	450.000.000,00	1	450.000.000,00		
	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
4.01.01.2.14.0002 - Fasilitas Komunikasi Pimpinan				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan (Laporan)	1	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00		
4.01.01.2.14.0003 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
Meningkatnya kualitas pelaporan SAKIP perangkat daerah	Rata-rata nilai komponen pelaporan SAKIP perangkat daerah (Nilai)	12,95	13,05	75.000.000,00	13,10	80.000.000,00	13,15	90.000.000,00	13,20	90.000.000,00	13,25	105.000.000,00		
4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi				245.000.000,00		260.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		290.000.000,00		
Terfasilitasinya penyusunan Rencana Aksi RB	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	7	3	70.000.000,00	3	75.000.000,00	3	85.000.000,00	3	85.000.000,00	3	100.000.000,00		
4.01.01.2.13.0003 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				70.000.000,00		75.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	7	3	70.000.000,00	3	75.000.000,00	3	85.000.000,00	3	85.000.000,00	3	100.000.000,00		
Terfasilitasinya pelaporan kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	2	30	5.000.000,00	30	5.000.000,00	30	5.000.000,00	30	5.000.000,00	30	5.000.000,00		
4.01.01.2.13.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	2	30	5.000.000,00	30	5.000.000,00	30	5.000.000,00	30	5.000.000,00	30	5.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah dan kepatuhan penerapan kebijakan ketatalaksanaan	Persentase Unit Pelayanan Publik dengan Predikat IKM Minimal B (%)	100	100	120.000.000,00	100	120.000.000,00	100	120.000.000,00	100	120.000.000,00	100	120.000.000,00		
4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi				245.000.000,00		260.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		290.000.000,00		
Terkoordinirnya pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	51	4	120.000.000,00	6	120.000.000,00	8	120.000.000,00	11	120.000.000,00	11	120.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	4	2		2		2		2		2			
4.01.01.2.13.0002 - Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	51	4	100.000.000,00	6	100.000.000,00	8	100.000.000,00	11	100.000.000,00	11	100.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)	4	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00		
Meningkatnya kualitas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya	Rata-rata capaian nilai tingkat kematangan organisasi (Nilai)	33	36	50.000.000,00	37	60.000.000,00	39	65.000.000,00	43	65.000.000,00	46	65.000.000,00		
4.01.01.2.13 - Penataan Organisasi				245.000.000,00		260.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00		290.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	63	4	50.000.000,00	8	60.000.000,00	12	65.000.000,00	16	65.000.000,00	16	65.000.000,00		
4.01.01.2.13.0001 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				50.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	63	4	50.000.000,00	8	60.000.000,00	12	65.000.000,00	16	65.000.000,00	16	65.000.000,00		
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	18.562.127.656,00	100	18.564.671.656,00	100	18.564.671.656,00	100	18.564.671.656,00	100	18.562.127.656,00		
4.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		
Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
4.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00		
4.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
4.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
4.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				18.553.127.656,00		18.555.671.656,00		18.555.671.656,00		18.555.671.656,00		18.553.127.656,00		
Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	18.553.127.656,00	12	18.555.671.656,00	12	18.555.671.656,00	12	18.555.671.656,00	12	18.553.127.656,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	160	160		160		160		160		160			
4.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				18.428.171.656,00		18.428.171.656,00		18.428.171.656,00		18.428.171.656,00		18.428.171.656,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	160	160	18.428.171.656,00	160	18.428.171.656,00	160	18.428.171.656,00	160	18.428.171.656,00	160	18.428.171.656,00		
4.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				124.956.000,00		127.500.000,00		127.500.000,00		127.500.000,00		124.956.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	124.956.000,00	12	127.500.000,00	12	127.500.000,00	12	127.500.000,00	12	124.956.000,00		
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				15.890.000.000,00		15.940.000.000,00		15.975.000.000,00		15.975.000.000,00		16.045.000.000,00		
Meningkatnya administrasi kewilayahan	Persentase ketersediaan data toponim kota tarakan (%)	0	20	85.000.000,00	50	85.000.000,00	80	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah	
	Persentase kecamatan dan kelurahan yang difasilitasi (%)	100	100		100		100		100		100			
4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan				735.000.000,00		785.000.000,00		805.000.000,00		805.000.000,00		875.000.000,00		
Terlaksananya fasilitasi administrasi kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	5	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
4.01.02.2.01.0002 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				85.000.000,00		85.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	5	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
Meningkatnya fasilitasi kerjasama daerah	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti (%)	100	100	540.000.000,00	100	540.000.000,00	100	555.000.000,00	100	555.000.000,00	100	555.000.000,00		
4.01.02.2.04 - Fasilitasi Kerja Sama Daerah				540.000.000,00		540.000.000,00		555.000.000,00		555.000.000,00		555.000.000,00		
Terlaksananya fasilitasi permohonan kerjasama daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)	0	1	540.000.000,00	1	540.000.000,00	1	555.000.000,00	1	555.000.000,00	1	555.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	9	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	47	1		1		1		1		1			
4.01.02.2.04.0001 - Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				495.000.000,00		495.000.000,00		495.000.000,00		495.000.000,00		495.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dokumen)	47	1	495.000.000,00	1	495.000.000,00	1	495.000.000,00	1	495.000.000,00	1	495.000.000,00		
4.01.02.2.04.0002 - Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				35.000.000,00		35.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri (Dokumen)	0	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Laporan)	9	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
Meningkatnya kualitas data LPPD	Persentase keterisian data IKK LPPD (%)	100	100	600.000.000,00	100	650.000.000,00	100	650.000.000,00	100	650.000.000,00	100	700.000.000,00		
4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan				735.000.000,00		785.000.000,00		805.000.000,00		805.000.000,00		875.000.000,00		
Terlaksananya koordinasi penyusunan LPPD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	6	1	600.000.000,00	1	650.000.000,00	1	650.000.000,00	1	650.000.000,00	1	700.000.000,00		
4.01.02.2.01.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				600.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		700.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	6	1	600.000.000,00	1	650.000.000,00	1	650.000.000,00	1	650.000.000,00	1	700.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya kualitas data Standar Pelayanan Minimal	Persentase Keterisian Data Standar Pelayanan Minimal (%)	100	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	55.000.000,00	100	55.000.000,00	100	75.000.000,00		
4.01.02.2.01 - Administrasi Tata Pemerintahan				735.000.000,00		785.000.000,00		805.000.000,00		805.000.000,00		875.000.000,00		
Terfasilitasinya Penerapan SPM	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	5	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00	1	75.000.000,00		
4.01.02.2.01.0001 - Penataan Administrasi Pemerintahan				50.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	5	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00	1	75.000.000,00		
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Persentase kebijakan Kesra yang terlaksana (%)	94	100	14.000.000.000,00	100	14.000.000.000,00	100	14.000.000.000,00	100	14.000.000.000,00	100	14.000.000.000,00		
4.01.02.2.02 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				14.000.000.000,00		14.000.000.000,00		14.000.000.000,00		14.000.000.000,00		14.000.000.000,00		
Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	1	1	14.000.000.000,00	1	14.000.000.000,00	1	14.000.000.000,00	1	14.000.000.000,00	1	14.000.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
4.01.02.2.02.0001 - Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	1	1	1.500.000.000,00	1	1.500.000.000,00	1	1.500.000.000,00	1	1.500.000.000,00	1	1.500.000.000,00		
4.01.02.2.02.0002 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial				7.500.000.000,00		7.500.000.000,00		7.500.000.000,00		7.500.000.000,00		7.500.000.000,00		
Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	1	1	7.500.000.000,00	1	7.500.000.000,00	1	7.500.000.000,00	1	7.500.000.000,00	1	7.500.000.000,00		
4.01.02.2.02.0003 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat				5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		
Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	1	1	5.000.000.000,00	1	5.000.000.000,00	1	5.000.000.000,00	1	5.000.000.000,00	1	5.000.000.000,00		
Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase produk hukum yang harmonis dengan peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi (%)	100	100	265.000.000,00	100	265.000.000,00	100	265.000.000,00	100	265.000.000,00	100	265.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Persentase produk hukum yang terdokumentasi dan tersosialisasi (%)	100	100		100		100		100		100			
4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				615.000.000,00		615.000.000,00		615.000.000,00		615.000.000,00		615.000.000,00		
Terlaksananya penetapan dan pengundangan produk hukum	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	650	620	200.000.000,00	620	200.000.000,00	620	200.000.000,00	620	200.000.000,00	620	200.000.000,00		
4.01.02.2.03.0001 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	650	620	200.000.000,00	620	200.000.000,00	620	200.000.000,00	620	200.000.000,00	620	200.000.000,00		
Terlaksananya dokumentasi dan sosialisasi produk hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	1.100	620	65.000.000,00	620	65.000.000,00	620	65.000.000,00	620	65.000.000,00	620	65.000.000,00		
4.01.02.2.03.0003 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum				65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	1.100	620	65.000.000,00	620	65.000.000,00	620	65.000.000,00	620	65.000.000,00	620	65.000.000,00		
Tertanganinya pengaduan kasus hukum	Persentase kasus hukum yang tertangani (%)	100	100	350.000.000,00	100	350.000.000,00	100	350.000.000,00	100	350.000.000,00	100	350.000.000,00		
4.01.02.2.03 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				615.000.000,00		615.000.000,00		615.000.000,00		615.000.000,00		615.000.000,00		
4.01.02.2.03.0002 - Fasilitasi Bantuan Hukum				350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	24	15	350.000.000,00	15	350.000.000,00	15	350.000.000,00	15	350.000.000,00	15	350.000.000,00		
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				1.085.000.000,00		1.085.000.000,00		1.100.853.200,00		1.110.853.200,00		1.250.853.200,00		
Meningkatnya BUMD dan BLUD yang berkinerja sehat	Persentase BUMD dan BLUD yang sehat (%)	66,67	66,7	145.000.000,00	66,8	145.000.000,00	66,8	145.000.000,00	66,8	145.000.000,00	66,8	235.000.000,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah	
4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				630.000.000,00		630.000.000,00		630.000.000,00		630.000.000,00		720.000.000,00		
Terlaksananya pembinaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	2	1	145.000.000,00	1	145.000.000,00	1	145.000.000,00	1	145.000.000,00	1	235.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
4.01.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	2	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	50.000.000,00		
4.01.03.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		135.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD (Dokumen)	2	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	135.000.000,00		
4.01.03.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD (Dokumen)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	50.000.000,00		
Meningkatnya kinerja TPID	Persentase rekomendasi kebijakan TPID yang dilaksanakan (%)	100	100	135.000.000,00	100	135.000.000,00	100	135.000.000,00	100	135.000.000,00	100	135.000.000,00		
4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				630.000.000,00		630.000.000,00		630.000.000,00		630.000.000,00		720.000.000,00		
Terlaksananya koordinasi TPID	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	24	1	135.000.000,00	1	135.000.000,00	1	135.000.000,00	1	135.000.000,00	1	135.000.000,00		
4.01.03.2.01.0002 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				135.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		
Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	24	1	135.000.000,00	1	135.000.000,00	1	135.000.000,00	1	135.000.000,00	1	135.000.000,00		
4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				630.000.000,00		630.000.000,00		630.000.000,00		630.000.000,00		720.000.000,00		
terlaksananya koordinasi TPKAD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD (Dokumen)		1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
4.01.03.2.01.0006 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD (Dokumen)		1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
meningkatnya kualitas kebijakan SDA	Persentase kebijakan SDA yang terlaksana (%)	100	100	135.000.000,00	100	135.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	200.000.000,00		
4.01.03.2.04 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				135.000.000,00		135.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan terhadap Kebijakan SDA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)	2	1	135.000.000,00	1	135.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	200.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			
4.01.03.2.04.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dokumen)	2	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	50.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian (Dokumen)	2	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	50.000.000,00		
4.01.03.2.04.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				85.000.000,00		85.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan (Dokumen)	2	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
meningkatnya kualitas kebijakan UMKM	Persentase kebijakan UMKM yang terlaksana (%)	100	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00		
4.01.03.2.01 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				630.000.000,00		630.000.000,00		630.000.000,00		630.000.000,00		720.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan terhadap Kebijakan UMKM	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	2	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
4.01.03.2.01.0003 - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	2	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat kematangan UKPBJ (Poin)	100	100	210.000.000,00	100	210.000.000,00	100	210.000.000,00	100	210.000.000,00	100	210.000.000,00		
4.01.03.2.03 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		
Terlaksananya pengadaan barang dan jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	30	3	210.000.000,00	3	210.000.000,00	3	210.000.000,00	3	210.000.000,00	3	210.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			
4.01.03.2.03.0001 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		
Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	2	2	85.000.000,00	2	85.000.000,00	2	85.000.000,00	2	85.000.000,00	2	85.000.000,00		
4.01.03.2.03.0002 - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	2	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
4.01.03.2.03.0003 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	30	3	25.000.000,00	3	25.000.000,00	3	25.000.000,00	3	25.000.000,00	3	25.000.000,00		
Meningkatnya kualitas pelaksanaan administrasi pembangunan	Persentase realisasi fisik (%)	96,13	100	110.000.000,00	100	110.000.000,00	100	110.853.200,00	100	120.853.200,00	100	120.853.200,00		
	Persentase realisasi keuangan (%)	93,36	100		100		100		100		100			
Terfasilitasi administrasi pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	4	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00		
4.01.03.2.02.0001 - Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	4	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00		
Terlaksananya pengendalian dan evaluasi administrasi pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	24	12	70.000.000,00	12	70.000.000,00	12	70.853.200,00	12	80.853.200,00	12	80.853.200,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
4.01.03.2.02.0002 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	24	12	40.000.000,00	12	40.000.000,00	12	40.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00		
4.01.03.2.02.0003 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				30.000.000,00		30.000.000,00		30.853.200,00		30.853.200,00		30.853.200,00		
Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.853.200,00	1	30.853.200,00	1	30.853.200,00		

BAB V PENUTUP

Renstra Sekretariat Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2030 ini disusun untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah sebagai unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi dalam kerangka visi dan misi Daerah Kota Tarakan yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2030.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kota Tarakan. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Sekretariat daerah Kota Tarakan. Karena itu Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tarakan selaku unsur staf dan atau target kinerja sasaran Sekretariat Daerah Kota Tarakan.

Harus diperhatikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran Rencana Kerja dan RKA di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tarakan merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan tugas pokok fungsi Sekretariat Daerah Kota Tarakan dan atau target sasaran Sekretariat Daerah Kota Tarakan.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal dan internal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Sekretariat Daerah Kota Tarakan juga tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dilakukan evaluasi yang hasilnya dituangkan dalam rencana ulang perumusan renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Tarakan setiap tahunnya dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kota Tarakan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari hasil pelaksanaan perencanaan kerja setiap tahunnya.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Sekretariat Daerah Kota Tarakan.

2. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Tarakan Tahun 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahun 2025–2029 menjadi instrumen penting dalam menjabarkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam sistem perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, sekaligus sebagai penjabaran visi, misi, dan program strategis Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2025–2029.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan bersifat indikatif. Renstra Sekretariat DPRD Kota Tarakan memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD. Selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Tarakan serta penyusunan anggaran 5 (lima) tahun kedepan.

Selanjutnya rancangan akhir renstra Sekretariat DPRD disahkan dengan keputusan Walikota menjadi Renstra Sekretariat DPRD. Berdasarkan keputusan Walikota tentang pengesahan Renstra Sekretariat DPRD tersebut, Sekretariat DPRD menetapkan Renstra Sekretariat DPRD yang lebih lanjut akan menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD dalam menyusun Rancangan Renja Sekretariat DPRD.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
2. Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah
3. Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
4. Rancangan Renstra Perangkat Daerah
5. Rumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah
6. Penetapan Renstra Perangkat Daerah

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan program dan kegiatan perangkat daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029, arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah selaras dengan arah kebijakan pemerintah provinsi, arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah dan arah kebijakan pemerintah provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat. Dengan mengacu pada alur tersebut, maka dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kota Tarakan disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Pembangunan Jangk Panjang Daerah (RPJPD).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Rencana Strategis Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029;
17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
21. Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Tarakan Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. Maksud dari Renstra Sekretariat DPRD Kota Tarakan adalah :
 - a. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan urusan Sekretariat DPRD Kota Tarakan serta menyediakan tolak ukur dalam penetapan kinerja selama 5 (lima) tahun.
 - b. Menjamin keterkaitan, keserasian serta harmonisasi antara perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan program kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ke depan.
 - c. Memberikan arah dan pedoman bagi Aparatur Sipil Negara Sekretariat DPRD Kota Tarakan dalam melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan program prioritas sesuai dengan urusan Sekretariat DPRD Kota Tarakan sehingga tujuan program dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.
 - d. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana pembangunan tahunan.
 - e. Menjadi kerangka dasar bagi Sekretariat DPRD Kota Tarakan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
2. Tujuan dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 adalah :
 - a. Sebagai kerangka acuan dalam menyusun rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Tarakan selama 5 (lima) tahun.
 - b. Sebagai dasar penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi serta penilaian kinerja Sekretariat DPRD dalam menjalankan dan melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
 - c. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Tarakan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Sekretariat DPRD Kota Tarakan
- 2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD Kota Tarakan
- 2.3 Kinerja Layanan Sekretariat DPRD Kota Tarakan
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan Sekretariat DPRD Kota Tarakan
- 2.5 Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Tarakan
- 2.6 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Tarakan Tahun 2025- 2029
- 3.2 Startegi Sekretariat DPRD Kota Tarakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025 – 2029
- 3.3 Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Kota Tarakan Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025 – 2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Program
- 4.2 Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif
- 4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD menyebutkan bahwa tugas Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Sekretariat DPRD Kota Tarakan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD.
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Secara khusus tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Kota Tarakan diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2020, seperti yang terurai di bawah ini:

1. Bagian Umum dan Keuangan

Bagian Umum dan Keuangan merupakan unsur pembantu Sekretaris DPRD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Tugas:

Membantu Sekretaris DPRD dalam penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, program dan keuangan DPRD.

Fungsi:

- a. Penyelenggaraan ketatausahaan;
- b. Pengelolaan kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga;
- d. Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
- e. Penyusunan perencanaan anggaran;
- f. Pelaksanaan evaluasi bahan perencanaan anggaran;
- g. Penyelenggaraan penatausahaan keuangan;
- h. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- i. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan anggaran;
- j. Pelaksanaan verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga;
- k. Pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- l. Pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan;

- m. Pelaksanaan evaluasi pengadaan barang dan jasa;
- n. Pelaksanaan evaluasi laporan keuangan;
- o. Pelaksanaan evaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- p. Pelaksanaan evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan;
- q. Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Sekretariat DPRD; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi diatas tadi, Bagian Umum dan Keuangan dibantu oleh 2 Sub Bagian, yaitu :

- a) Sub Bagian Umum; dan
- b) Sub Bagian Program dan Keuangan.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan Keuangan.

- a) Sub Bagian Umum Tugas:

Membantu Bagian Umum dan Keuangan dalam penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian Sekretariat DPRD.

Fungsi:

- a. melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan Pimpinan DPRD;
- b. melaksanakan kearsipan;
- c. menyusun administrasi kepegawaian;
- d. menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
- e. menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
- f. menganalisis kebutuhan dan perencanaan penyediaan Tenaga Ahli;
- g. menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar Urut kepangkatan dan formasi pegawai;
- h. mengatur dan memelihara kebersihan kantor kompleks Sekretariat DPRD;
- i. mengatur dan memelihara halaman dan taman di kompleks Sekretariat DPRD;
- j. mengatur dan mengelola keamanan kompleks Sekretariat DPRD;
- k. memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;
- l. mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
- m. mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan;
- n. merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan;
- o. menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- p. mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD;
- q. mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- r. melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung; dan

- b) Sub Bagian Program dan Keuangan Tugas:

Membantu Bagian Umum dan Keuangan dalam penyelenggaraan perencanaan, administrasi keuangan dan rumah tangga Sekretariat DPRD.

Fungsi:

- a. menyusun bahan perencanaan;
 - b. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaa Anggaran/DPA baik murni maupun perubahannya;
 - c. menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
 - d. merencanakan kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
 - e. merencanakan verifikasi keuangan;
 - f. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan;
 - g. mengkoordinasikan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara dan pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk pengajuan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Permintaan Menyediakan Uang Panjar/Ganti Uang/Tambah Uang/Langsung;
 - h. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga;
 - i. memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD;
 - j. merencanakan penatausahaan keuangan;
 - k. menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
 - l. mengkoordinasikan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggung jawaban keuangan;
 - m. melaksnakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
 - n. menganalisis laporan keuangan;
 - o. menganalisis laporan kinerja;
 - p. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
2. Bagian Pengakajian Perundang-Undangan dan Persidangan
- Bagian Pengkajian Perundang-Undangan dan Persidangan merupakan unsur pembantu Sekretaris DPRD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- Tugas:
- Membantu Sekretaris DPRD dalam penyelenggaraan dukungan tugas dan fungsi DPRD pada bidang hukum dan persidangan.
- Fungsi:
- a. penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik;
 - c. pelaksanaan verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - d. pengumpulan bahan penyiapan draf rancangan Perda Inisiatif;
 - e. pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi pembahasan rancangan perda;
 - f. pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi risalah rapat pembahasan perda;
 - g. pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi daftar Inventaris masalah;
 - h. penyelenggaraan persidangan;
 - i. penyusunan risalah;
 - j. penyelenggaraan hubungan masyarakat;
 - k. penyelenggaraan publikasi;
 - l. penyelenggaraan keprotokolan; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi diatas tadi, Bagian Pengkajian Perundang-Undangan dan Persidangan dibantu oleh 2 Sub Bagian, yaitu:

- a. Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan;dan
- b. Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perundang-Undangan dan Persidangan.

a. Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan Tugas:

Membantu bagian Perundang-Undangan dan Persidangan dalam Penyelenggaraan dukungan tugas dan fungsi DPRD pada bidang pengkajian perundang-undangan.

Fungsi:

- a. melaksanakan kajian perundang-undangan;
- b. membuat konsep bahan penyusunan naskah akademik;
- c. menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang-undangan;
- d. membuat konsep bahan penyiapan rancangan Perda inisiatif;
- e. merancang bahan pembahasan Perda;
- f. menyusun bahan Daftar Inventarisir Masalah; dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengkajian Perundang-Undangan dan Persidangan.

b. Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi Tugas:

Membantu Bagian Pengkajian Perundang-Undangan dan Persidangan dalam Penyelenggaraan dukungan tugas dan fungsi DPRD pada bidang persidangan, risalah dan publikasi.

Fungsi:

- a. perencanaan program dan jadwal rapat dan sidang;
- b. menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat;
- c. penyiapan materi/bahan rapat DPRD;
- d. memfasilitasi rapat-rapat DPRD;
- e. menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana kerja DPRD;
- f. menyusun bahan komunikasi dan publikasi;
- g. merancang administrasi kunjungan kerja DPRD;
- h. menyusun bahan keprotokolan Pimpinan DPRD;
- i. merencanakan kegiatan DPRD;
- j. merencanakan keprotokolan pimpinan DPRD
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengkajian Perundang-Undangan dan Persidangan.

3. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan merupakan unsur pembantu Sekretaris DPRD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Tugas:

Membantu Sekretaris DPRD dalam penyelenggaraan dukungan tugas dan fungsi DPRD pada bidang penganggaran dan pengawasan.

Fungsi:

- a. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, koordinasi pembahasan KUA PPAS /KUA PPAS Perubahan;
- b. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, koordinasi Pembahasan APBD/APBDP;
- c. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, koordinasi pembahasan Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, koordinasi pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- e. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, koordinasi pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
- f. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, koordinasi pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK;

- g. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan mengkoordinasikan aspirasi masyarakat;
- h. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan evaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- i. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- j. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan mengkoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- k. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan mengkoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan
- l. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan mengkoordinasikan penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD;
- m. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi, dan mengkoordinasikan kerjasama daerah; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD

Dalam menjalankan tugas dan fungsi diatas tadi, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dibantu oleh 2 Sub Bagian, yaitu

- a. Sub Bagian Kebijakan Anggaran; dan
- b. Sub Bagian Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

- a. Sub Bagian Kebijakan Anggaran Tugas:

Membantu bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan dalam penyelenggaraan dukungan tugas dan fungsi DPRD pada bidang kebijakan penganggaran.

Fungsi:

- a. merencanakan pembahasan KUA PPAS / KUA PPAS Perubahan;
- b. Menyusun bahan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan;
- c. menyusun bahan pembahasan rancangan perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. menyusun bahan pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
- e. menyusun bahan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
- f. menyusun bahan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

- b. Sub Bagian Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Tugas:

membantu bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan dalam penyelenggaraan dukungan tugas dan fungsi DPRD pada bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah.

Fungsi:

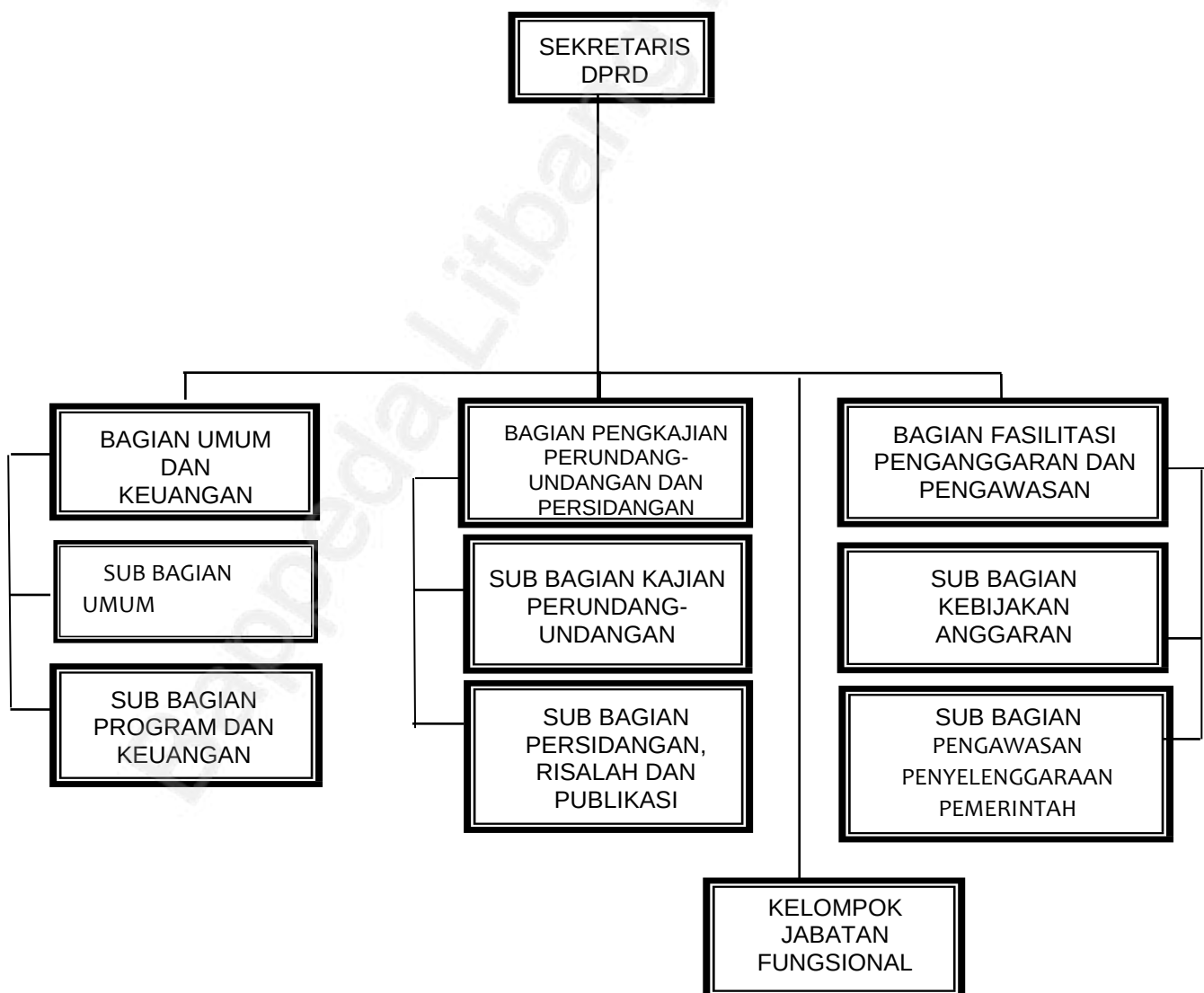
- a. Mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- b. merancang bahan rapat-rapat internal DPRD;
- c. menganalisa bahan dalam pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- d. menganalisa bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
- e. menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan pada bidang pengawasan;
- f. memfasilitasi reses DPRD;

- g. merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
- h. menganalisa data / bahan dukungan jaringan aspirasi;
- i. menyusun pokok-pokok pikiran DPRD;
- j. melaksanakan kerjasama Sekretariat DPRD dan DPRD; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Tarakan sesuai Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 61 Tahun 2020 terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Kepala Bagian Umum dan Keuangan;
 - a) Sub Bagian Umum
 - b) Sub Bagian Program dan Keuangan
- c. Kepala Bagian Pengkajian Perundang-Undangan dan Persidangan;
 - a) Sub Bagian Kajian Perundang-Undangan
 - b) Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi
- d. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
 - a) Sub Bagian Kebijakan Anggaran
 - b) Sub Bagian Pengawasan Penyelenggaraan Pengawasan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

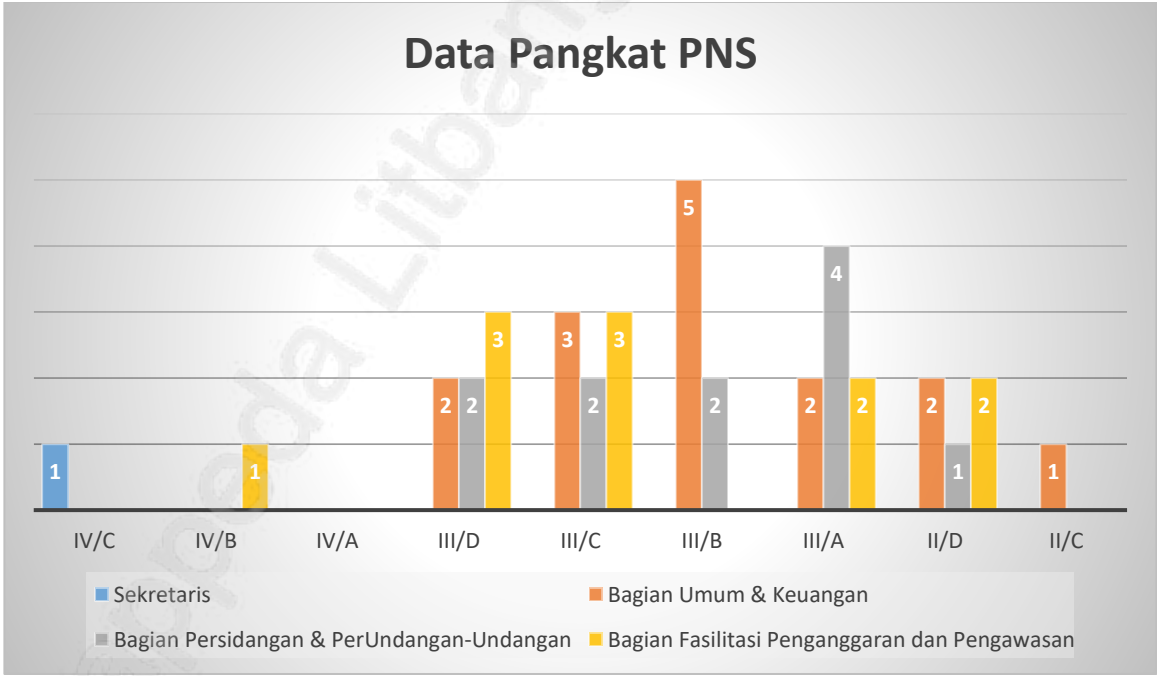
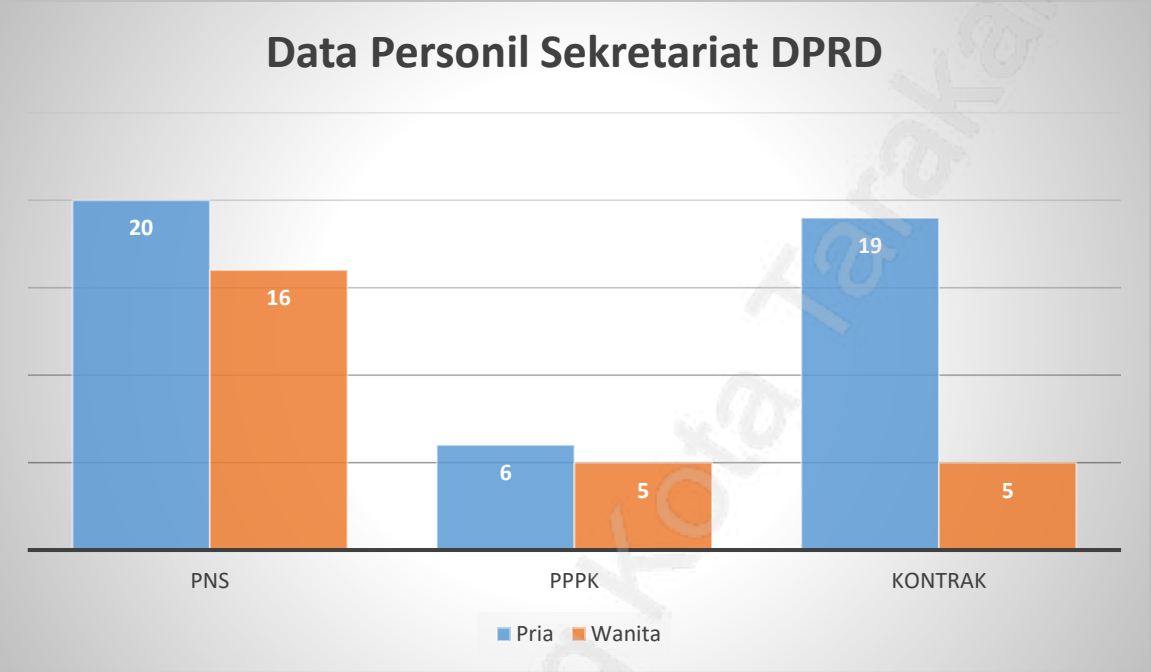
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD
KOTA TARAKAN

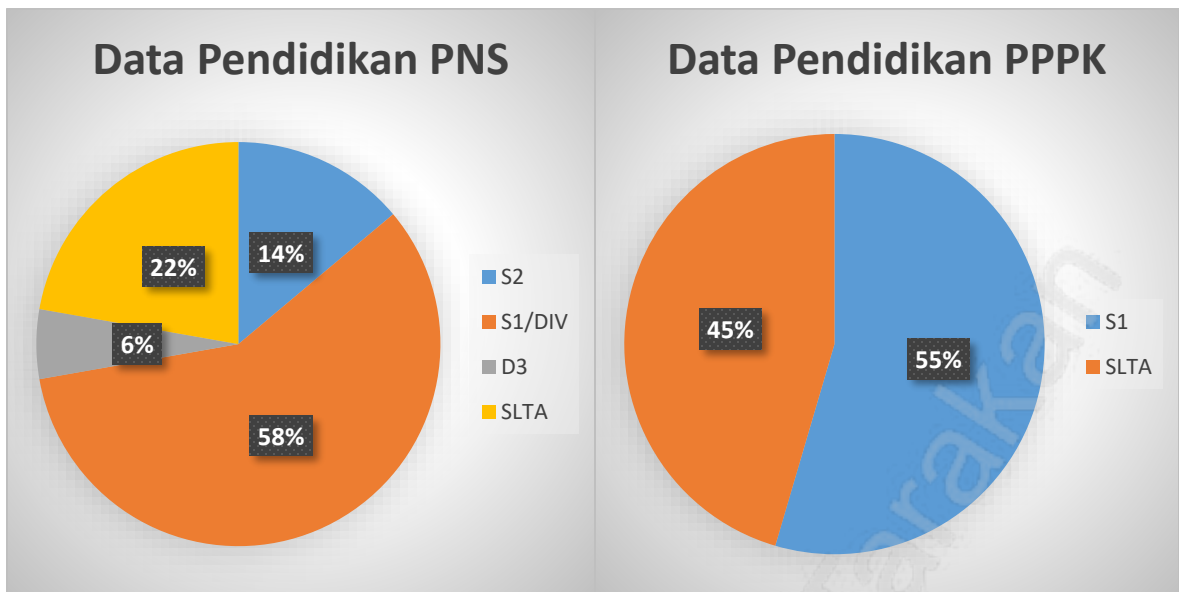


2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Data Kepegawaian Sekretariat DPRD sampai dengan bulan agustus Tahun 2025, secara keseluruhan jumlah PNS sebanyak 36 orang dan PPPK sebanyak 11 orang serta Tenaga Kontrak sebanyak 24 orang , dengan komposisi pegawai sebagai berikut :

Tabel 2.1
Data Personil Sekretariat DPRD Kota Tarakan





2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kota Tarakan berdasarkan Renstra Sekretariat DPRD Kota Tarakan 2019-2025, dimana Sekretariat DPRD memiliki 2 (dua) Sasaran yaitu Terfasilitasinya Fungsi DPRD dan Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat DPRD yang Baik.

Sasaran Terfasilitasinya Fungsi DPRD dengan indikator:

1. Persentase fasilitasi rapat-rapat DPRD yang terpenuhi; dan
2. Persentase persetujuan bersama raperda menjadi perda

Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat DPRD yang Baik, dengan indikator:

1. Nilai Sakip PD;
2. Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Guna mendukung sasaran di atas, Sekretariat DPRD mempunyai 2 (dua) program yaitu :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Adapun capaian kinerja pelayanan berdasarkan sasaran dengan indikator di atas serta penggunaan anggaran untuk kedua program dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Tarakan

No	Indikator Kinerja Sekretariat DPRD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terfasilitasinya Fungsi DPRD																		
	a. Persentase Fasilitasi Rapat – rapat DPRD yang Terpenuhi				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	127%	120%	109%	105 %	100%	127%	120%	109%	105 %
	b. Persentase Persetujuan Bersama Perda menjadi Raperda				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	62,5%	87%	120%	60%	100%	62,5%	87%	120%	60%	100%
2.	Terpenuhinya Tata Kelola Pemerintahan Sekretariat DPRD yang Baik																		
	a. Nilai SAKIP/Predikat				64/B	64/B	70,01/B	72,01/BB	72/BB	60,09/B	67,36/B	71,83/B	72,46/BB	73,95/BB	100%	-	-	-	-
	b. Persentase Tindak Lanjut LHP (laporan Hasil Pemeriksaan)				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Tarakan

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Anggaran pada Tahun ke – (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke – (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke – (%)					Rata – Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	20.619.035.002	24.595.133.362	23.576.637.203	24.813.682.133	26.342.572.159	19.832.994.280	22.491.862.697	22.430.123.297	23.293.797.332	24.786.126.061	96,1	91,5	95,1	93,9	94,1		
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		15.616.279.120	18.494.912.920	20.221.678.920	26.049.828.360		13.086.410.717	18.215.159.115	20.044.838.227	25.823.893.706		83,8	98,5	99,1	99,1		
JUMLAH		40.211.412.482	42.071.550.123	45.035.361.063	52.392.400.519		35.578.273.414	40.658.495.412	43.338.635.832	50.610.019.767		87,7	96,8	96,5	96,6		

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan, sehingga kelompok sasaran yang menjadi fokus pelayanan dari Sekretariat DPRD adalah seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tarakan. Dimana jumlah seluruh anggota DPRD Kota Tarakan sebanyak 30 (tiga puluh) anggota yang terbagi menjadi 3 (tiga) Komisi dan 7 (tujuh) Fraksi.

2.5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan hal yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi yang ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal. Sekretariat DPRD dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh perkembangan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness), serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu peluang (opportunity) dan ancaman / tantangan (threath), pendekatan ini juga dikenal dengan sebutan SWOT.

Mengenai kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity) dan tantangan (threath) dalam menjalankan pelayanan dan dukungan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Tarakan bisa digambarkan melalui pelayanan penyelenggaraan kegiatan kedewanan yang menjadi bidang tugas Sekretariat DPRD Kota Tarakan. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan isu-isu strategis yang terkait proses demokratisasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi sebagai dinamika kompleks dalam penyelenggaraan pemerintah daerah pada umumnya.

Dinamika tersebut telah berdampak pada (1) makin meningkatnya tuntutan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat guna mendukung pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik serta penyerapan aspirasi publik, (2) meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) antara lain transparansi, akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik, ketaatan pada hukum dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan ilustrasi diatas, maka dapat diprediksi Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Tarakan selama beberapa waktu kedepan akan selalu dipengaruhi oleh faktor / kondisi Internal dan eksternal. Kondisi – kondisi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kondisi internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan :

a. Kekuatan (Strengths)

Pada sisi kekuatan terdapat faktor-faktor strategis antara lain:

1. Eksistensi Sekretariat DPRD kedudukannya semakin baik dan strategis melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan anggota DPRD;
3. Tersedianya tata tertib dan rencana kerja hasil Badan Musyawarah DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

4. Adanya jalinan kerjasama dalam wadah ASDEKSI (Asosiasi Sekretaris DPRD Kota Seluruh Indonesia)
- b. Kelemahan (Weaknesses)
Pada sisi kelemahan terdapat faktor-faktor strategis antara lain:
 1. Belum optimalnya sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan dukungan kerja DPRD
 2. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
 3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung tugas – tugas pelayanan kedewanan.
 4. Belum tersedianya SOP/pedoman pelayanan guna penyelenggaraan tugas-tugas kedewanan.
2. Kondisi eksternal yang terdiri atas peluang dan tantangan :
 - a. Peluang (Opportunities)
Pada sisi peluang terdapat faktor-faktor strategis antara:
 1. Tingginya standar pelayanan dan dukungan yang dibutuhkan anggota DPRD
 2. Adanya peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat
 3. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah
 4. Semakin pesatnya perkembangan teknologi Informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
 5. Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD
 - b. Tantangan/Ancaman (Threats)
Pada sisi tantangan/ancaman, terdapat faktor-faktor strategis antara lain:
 1. Cepatnya perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan adanya perubahan peraturan dari pemerintah pusat;
 2. Masih ada inkonsistensi dalam pelaksanaan Rencana Kerja DPRD yang telah disusun dan disetujui.
 3. Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD
 4. Kinerja dari Sekretariat DPRD juga dipengaruhi oleh kebijakan politik yang terjadi.
3. Pilihan Langkah Strategis
 - a. Langkah Strategis Kekuatan (Strengths) – Peluang (Opportunities)
 1. Memenuhi tuntutan standar pelayanan dan dukungan yang dibutuhkan guna meningkatkan kinerja DPRD yang semakin tinggi melalui optimalisasi fungsi Sekretariat DPRD, pemanfaatan anggaran yang tersedia serta pemanfaatan teknologi informasi, dan tenaga ahli.
 2. Memanfaatkan hubungan harmonis dengan DPRD, rencana kerja dan tata tertib DPRD untuk mewujudkan pelayanan dan dukungan terhadap penyaluran aspirasi masyarakat secara prima berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- b. Langkah Strategis Kekuatan (Strengths) – Tantangan / Ancaman (Threats)
 - 1. Menjadikan Rencana Kerja dan Tata Tertib DPRD serta terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan anggota DPRD sebagai wahana untuk mengatasi masih adanya campur tangan pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal dan untuk perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD;
 - 2. Mengoptimalkan kedudukan Sekretariat DPRD yang strategis dan sharing informasi sesama anggota ASDEKSI untuk mengantisipasi campur tangan pihak eksternal dalam pencapaian kinerja dan perumusan kebijakan Sekretariat DPRD.
- c. Langkah Strategis Kelemahan (Weaknesses) – Peluang (Opportunities)
 - 1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 2. Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada serta pengembangan kelembagaan lembaga perwakilan
- d. Langkah Strategis Kekuatan (Strengths) – Kelemahan (Weaknesses)
 - 1. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Sekretariat DPRD;
 - 2. Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk meningkatkan pelayanan terhadap Anggota DPRD.

Dari hasil telaahan di atas dapat ditemukan permasalahan dalam pelayanan Sekretariat DPRD adalah:

- 1. Inkonsistensi dalam pelaksanaan kegiatan yang telah disusun dan ditetapkan.
- 2. Belum Optimalnya pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung tugas – tugas kedewanan
- 3. Masih kurangnya kompetensi dan kemampuan sumber daya aparatur yang dimiliki Sekretariat DPRD
- 4. Belum adanya standarisasi dan prosedur kerja (SP-SOP) guna mendukung pelaksanaan fungsi DPRD
- 5. Kurangnya pemahaman dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- 6. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern.

2.6 Isu-isu Strategis

Dalam menentukan isu-isu yang dihadapi Sekretariat DPRD Kota Tarakan yang dapat dijadikan acuan, antara lain Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Tarakan.

Sekretariat DPRD Kota Tarakan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 61 Tahun 2020 dengan struktur organisasi yang baru mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi terhadap fungsi, tugas dan wewenang Anggota DPRD yang secara tegas tertuang dalam Peraturan DPRD Kota Tarakan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Tarakan, dimana fungsi DPRD yaitu Sebagai Lembaga Legislasi, Anggaran

dan Pengawasan, DPRD Kota Tarakan juga melaksanakan tugas dan wewenang antara lain:

1. Membentuk peraturan daerah bersama Walikota;
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan Walikota;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
4. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian walikota dan/atau wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
5. Memilih wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil walikota;
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah daerah;
8. Meminta laporan keterangann pertanggung jawaban walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dari uraian di atas guna menunjang kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, maka peran Sekretariat DPRD sangatlah penting sebagai lembaga yang bertugas memfasilitasi semua kegiatan anggota DPRD sehingga kinerja yang dihasilkan benar-benar optimal.

Di dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan prima, Sekretariat DPRD Kota Tarakan tentunya tidak lepas dari adanya hambatan maupun tantangan yang terjadi saat ini, namun berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka pembenahan pada lembaga tersebut.

Berdasarkan identifikasi selama pelaksanaan tugas pada Sekretariat DPRD Kota Tarakan dengan mengacu pada gambaran pelayanan kinerja Sekretariat DPRD yang merupakan faktor kunci keberhasilan upaya pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD, maka isu strategisnya adalah:

1. Peningkatan standarisasi layanan dan prosedur kerja (SOP) untuk mendukung pelaksanaan fungsi DPRD.
2. Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana untuk peningkatan dan tugas-tugas kedewanan.
3. Optimalisasi pemetaan kebutuhan pelayanan terhadap pimpinan dan anggota DPRD.
4. Peningkatan sumber daya aparatur Sekreatriat DPRD
5. Sinkronisasi Rencana Kerja DPRD dan Rencana Kerja Sekretariat DPRD
6. Penguatan kerjasama antar Sekretariat DPRD
7. Peningkatan efektifitas sistem pengendalian intern dan pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Tarakan pada periode tahun 2025-2029. NSPK yang diterapkan merupakan acuan utama yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai dasar dalam menjalankan berbagai kebijakan, program, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Konsep Renstra PD



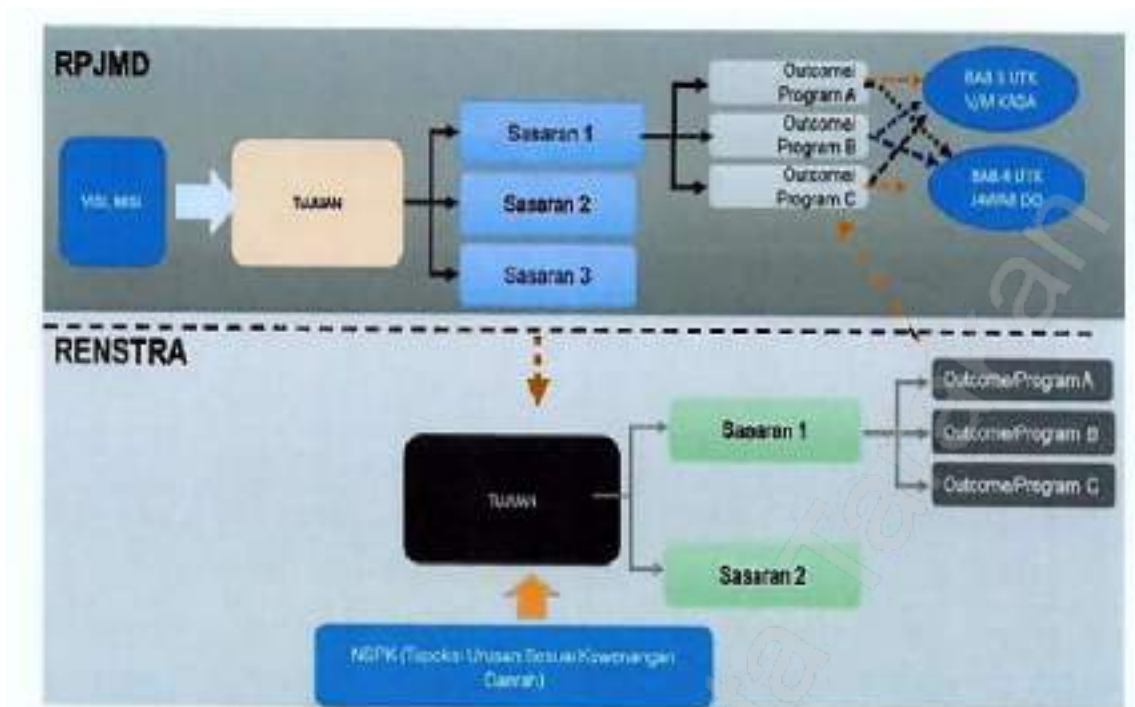
Sumber: Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi Kota Tarakan.

Sasaran merupan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan yaitu berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) Program Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan Capaian Strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Sumber: Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 dilaksanakan adalah dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tarakan periode Tahun 2025-2029. Visi yang diusung Walikota dan Wakil Walikota Tarakan adalah

“Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Cerdas yang bertumpu pada sektor Jasa, Perdagangan, Perikanan Kelautan dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Maju menuju Masyarakat Sejahtera”.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Tarakan di atas, rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Kota Tarakan terangkum dalam 5 (lima) misi, yaitu:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar yang handal;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui dukungan kemudahan berusaha yang berkeadilan dan bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, perikanan kelautan, ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan (UMKM);
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif serta menjaga stabilitas ketertiban dan ketentraman kota; dan
5. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh menghadapi bencana.

Dari visi dan misi Kota Tarkan di atas, keterkaitan antara Sekretariat DPRD Kota Tarakan dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Tarakan yang tertuang di dalam RPJMD Kota Tarakan adalah:

Visi: Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Cerdas yang bertumpu pada sektor Jasa, Perdagangan, Perikanan Kelautan dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Maju menuju Masyarakat Sejahtera

Misi: Misi ke 4 (empat), yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif serta menjaga stabilitas ketertiban dan ketentraman kota.

Tujuan: Tujuan ke 4 (empat), yaitu Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan.

Sasaran: Sasaran ke-10 (sepuluh) yaitu “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah” dan Sasaran ke-11 (sebelas) yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan publik”.

Dalam upaya mewujudkan visi misi Pemerintah Kota Tarakan dan meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD terhadap fasilitasi dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, maka Sekretariat DPRD Kota Tarakan menetapkan tujuan “*Terwujudnya kualitas layanan Sekretariat DPRD*”.

Sebagai indikator keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, Sekretariat DPRD menggunakan “*Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD*” sebagai ukuran utama. Indikator ini mencerminkan sejauh mana Sekretariat mampu memberikan layanan yang responsif, profesional, dan sesuai dengan kebutuhan anggota DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislatif, penganggaran, dan pengawasan.

3.2. Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029

Untuk mencapai tujuan dan indikator tersebut, telah ditetapkan beberapa sasaran strategis yang menjadi fokus pengembangan dan peningkatan kinerja Sekretariat DPRD, yaitu:

Tabel 3.1
Sasaran Sekretariat DPRD Kota Tarakan

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Terwujudnya kualitas layanan Sekretariat DPRD	Meningkatnya Dukungan pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Nilai Capaian kinerja Sekretariat DPRD terhadap dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP
		Indek Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD (Nilai IKM)

Keterkaitan yang erat antara tujuan, indikator, dan sasaran ini menciptakan kerangka kerja yang sinergis bagi Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam menyusun dan melaksanakan rencana strategisnya. Dengan mengedepankan tingkat kepuasan anggota DPRD sebagai indikator kunci, seluruh sasaran yang telah ditetapkan diarahkan untuk menghasilkan pelayanan yang profesional dan mendukung ketercapaian tujuan utama. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat peran Sekretariat DPRD sebagai unit pendukung yang handal dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Setiap sasaran tersebut akan dievaluasi menggunakan indikator yang telah ditentukan, yang akan memberikan gambaran jelas tentang pencapaian kinerja. Berikut adalah penjelasan mengenai indikator sasaran Nilai Capaian kinerja Sekretariat DPRD terhadap dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan rumus pengukurannya:

Untuk indikator sasaran Nilai capaian kinerja Sekretariat DPRD terhadap dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD merupakan nilai rata-rata kinerja outcome yang terdiri dari :

1. Meningkatnya Kajian Peraturan Perundang-undangan
2. Meningkatnya Kualitas Persidangan
3. Meningkatnya kualitas pembahasan APBD
4. Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan
5. Meningkatnya Kualitas Penyerapan aspirasi dan penghimpunan aspirasi masyarakat.

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Outcome Sekretariat DPRD Kota Tarakan

NO	Outcome	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Formulasi	Satuan	Sumber Data
1	Meningkatnya Kajian Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Indikator ini mengukur efektivitas dan produktivitas DPRD dan pemerintah daerah dalam menetapkan Ranperda menjadi Perda dalam satu tahun anggaran	%	Rekapitulasi hasil penetapan Raperda
2	Meningkatnya Kualitas Persidangan	Persentase rapat-rapat DPRD	Indikator ini mengukur fasilitasi antara rapat - rapat yang direncanakan dengan realisasi rapat yang dilaksanakan	%	Rekapitulasi hasil pelaksanaan rapat – rapat yang dilaksanakan DPRD
3	Meningkatnya kualitas pembahasan APBD	Ketepatan penetapan Perda APBD Tahun N	Indikator ini mengukur apakah Perda APBD ditetapkan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Penetapan Perda tentang APBD tepat waktu.	Tepat Waktu / Tidak Tepat Waktu	Hasil Penetapan Perda APBD
4	Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Indikator ini mengukur fasilitasi pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	%	Hasil Pelaksanaan Kegiatan
5	Meningkatnya Kualitas Penyerapan aspirasi dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Persentase pelaksanaan Penyerapan aspirasi dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Indikator ini fasilitasi pelaksanaan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat yang direncanakan dengan yang dilaksanakan	%	Hasil Pelaksanaan kegiatan Reses

3.3. Strategi Sekretariat DPRD Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi merupakan rumusan perencanaan pembangunan yang komprehensif dalam upaya mencapai tujuan dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Tarakan, yang harus relevan dan ada konsistensi dengan perencanaan induk daerah yaitu RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029.

Dalam rangka mewujudkan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, Sekretariat DPRD merumuskan strategi yang terintegrasi dan berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan. Strategi ini disusun berdasarkan 2 (dua) program

utama yang mencakup outcome dan indikator yang relevan, serta sejalan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

Program 1: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Outcome:

1. Meningkatnya akuntabilitas tata kelola Sekretariat DPRD;
2. Meningkatnya kualitas layanan Kesekretariatan;

Indikator Kinerja Utama:

1. Nilai AKIP Sekretariat DPRD
 2. Indek Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD (Nilai IKM)
- Program 2: Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Outcome:

1. Meningkatnya Kajian Peraturan Perundang-undangan;
2. Meningkatnya Kualitas Persidangan;
3. Meningkatnya kualitas pembahasan APBD;
4. Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan;
5. Meningkatnya Kualitas Penyerapan aspirasi dan penghimpunan aspirasi Masyarakat

Indikator Kinerja Utama:

Nilai Capaian kinerja Sekretariat DPRD terhadap dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

Indikator Kinerja Kunci:

1. Ketepatan penetapan Perda APBD Tahun N;
2. Persentase penetapan Raperda Tahun N; serta

Dengan menerapkan strategi ini, Sekretariat DPRD berkomitmen untuk memberikan dukungan maksimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sejalan dengan arahan dan ketentuan yang ditetapkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Serta diharapkan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas, dan pengawasan dapat meningkat, memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

3.4. Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan yang diambil oleh Sekretariat DPRD diawali dengan dilakukan penahapan prioritas tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD. Tahapan rencana program dimulai dari peningkatan kualitas pelayanan, optimalisasi tata kerja dan tata kelola, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana, serta pemanfaatan teknologi informasi dan penyebarluasan informasi.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Tarakan Tahun 2025-2029, dirumuskan strategi dan arah kebijakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Tarakan sebagaimana dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

VISI KOTA TARAKAN :			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kualitas layanan Sekretariat DPRD	Meningkatnya Dukungan pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatkan Fasilitasi Fungsi Legislasi dan Persidangan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pembahasan Raperda menjadi Perda
			Meningkatkan kualitas pelayanan rapat-rapat DPRD
			Pemanfaatan Teknologi Informasi guna penyelenggaraan Fungsi DPRD
		Meningkatkan Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan	Meningkatkan kualitas fasilitasi penyelenggaraan pengawasan dan penganggaran
			Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kegiatan penyerapan aspirasi Masyarakat
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sekretariat DPRD	Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan akuntabilitas Sekretariat DPRD	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan keuangan
			Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana kantor
			Meningkatkan kualitas dan kompetensi sumberdaya aparatur
			Optimalisasi tata kerja dan tata kelola melalui evaluasi dan penyempurnaan Strandar Operasional Prosedur (SOP)

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program

Program-program yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Tarakan selama periode Tahun 2025-2029 merupakan turunan (cascading) logis dari tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah yang telah ditetapkan. Program-program ini didesain untuk mencapai outcome dan output yang terukur, yang pada akhirnya berkontribusi pada dukungan optimal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan.

Nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan yang digunakan dalam Renstra ini sepenuhnya mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhiran terakhir, sehingga menjamin keselarasan dengan sistem perencanaan dan penganggaran daerah secara nasional.

Dalam upaya mencapai kinerja Perangkat Daerah yang optimal, Sekretariat DPRD Kota Tarakan akan melaksanakan program-program yang terstruktur dan terukur mulai Tahun 2025 hingga Tahun 2029, dan bahkan mempertimbangkan kesinambungan hingga Tahun 2030 sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2030.

Adapun program-program utama Sekretariat DPRD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program ini secara umum bertujuan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRD.
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD:
Program ini secara khusus dirancang untuk memperkuat kemampuan DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Program-program ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam uraian kegiatan dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator kinerja, target, dan pagu indikatif untuk setiap tahun anggaran selama periode 2025-2029. Selain itu, akan diidentifikasi pula sub kegiatan yang secara spesifik mendukung program prioritas pembangunan daerah Kota Tarakan.

4.2. Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Kegiatan:
 - 1) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 3) Penyelenggaraan validasi pendukung statistik sektoral daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan:
 - 1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
 - 2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - 3) Penyediaan bahan logistik kantor
 - 4) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 5) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - 6) Fasilitasi kunjungan tamu
 - 7) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pengadaan Mebel
 - 4) Pengadaan Aset Tak Berwujud
 - 5) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 6) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
 - 1) Penyediaan jasa surat menyurat
 - 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 3) Pemeliharaan mebel
 - 4) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.
 - h. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD:
 - 1) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD,
 - 2) Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD
 - 3) Pelaksanaan medical check-up DPRD.
 - i. Layanan Administrasi DPRD:
 - 1) Fasilitasi Fraksi DPRD
 - 2) Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD.
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD:
- a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD:
 - 1) Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah
 - 2) Pembahasan rancangan peraturan daerah
 - 3) Penyelenggaraan kajian perundang-undangan
 - 4) Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan naskah akademik
 - 5) Penyusunan tata tertib DPRD
 - 6) Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
 - b. Pembahasan Kebijakan Anggaran:
 - 1) Pembahasan KUA dan PPAS
 - 2) Pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS
 - 3) Pembahasan APBD

- 4) Pembahasan APBD perubahan
 - 5) Pembahasan laporan semester
 - 6) Pembahasan pertanggungjawaban APBD.
- c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan:
- 1) Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum
 - 2) Pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur
 - 3) Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat
 - 4) Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian
 - 5) Pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK
 - 6) Pengawasan penggunaan anggaran
 - 7) Pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah.
- d. Peningkatan Kapasitas DPRD:
- 1) Orientasi DPRD
 - 2) Pendalaman tugas DPRD
 - 3) Publikasi dan Dokumentasi Dewan
 - 4) Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli
 - 5) Penyediaan tenaga ahli fraksi
 - 6) Penyelenggaraan hubungan masyarakat
 - 7) Penyusunan program kerja DPRD
- e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat:
- 1) Kunjungan kerja dalam daerah,
 - 2) Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD
 - 3) Pelaksanaan reses
- f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD:
- 1) Penyusunan Kode Etik DPRD
 - 2) Pengawasan kode etik DPRD.
- g. Fasilitasi Tugas DPRD:
- 1) Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD
 - 2) Penyusunan laporan kinerja DPRD
 - 3) Fasilitasi pelaksanaan tugas Badan Musyawarah
 - 4) Fasilitasi tugas Pimpinan DPRD.
 - 5) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja sasaran dan pendanaan indikatif dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Sekretariat DPRD yang meliputi tujuan program kegiatan, sasaran, indikator sasaran, program kegiatan, indikator kinerja yang dilengkapi dengan data capaian pada tahun awal kegiatan serta dilengkapi oleh target kinerja program selama 2 (dua) tahun kedepan dan penanggung jawab setiap program masing-masing sebagaimana yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rencana Program & Kegiatan Serta Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Tarakan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
4.02 - SEKRETARIAT DPRD				44.323.606.771,00		44.323.606.771,00		44.323.606.771,00		44.323.606.771,00		44.323.606.771,00		
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				26.782.736.127,00		25.852.736.127,00		27.382.736.127,00		25.252.736.127,00		25.327.736.127,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
Meningkatnya Kualitas Layanan Keseekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan (Indeks)	100	100	21.020.955.953,00	100	20.090.955.953,00	100	21.620.955.953,00	100	19.490.955.953,00	100	19.565.955.953,00		
4.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				39.375.000,00		39.375.000,00		39.375.000,00		39.375.000,00		39.375.000,00		
Jumlah layanan Administrasi kepegawaian yang terpenuhi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	63	39.375.000,00	63	39.375.000,00	63	39.375.000,00	63	39.375.000,00	63	39.375.000,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	10				10				10			
4.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				39.375.000,00		39.375.000,00		39.375.000,00		39.375.000,00		39.375.000,00		
4.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00	10	0,00		
4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				578.501.548,00		578.501.548,00		578.501.548,00		578.501.548,00		578.501.548,00		
Jumlah Layanan Administrasi Umum yang terpenuhi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	578.501.548,00	12	578.501.548,00	12	578.501.548,00	12	578.501.548,00	12	578.501.548,00		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	60	60				60				60			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	9	9				9				9			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2				2				2			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	8				8				8			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4	4				4				4			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	15				15				15			15

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
4.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				9.996.043,00		9.996.043,00		9.996.043,00		9.996.043,00		9.996.043,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	9.996.043,00	12	9.996.043,00	12	9.996.043,00	12	9.996.043,00	12	9.996.043,00		
4.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	8	80.000.000,00	8	80.000.000,00	8	80.000.000,00	8	80.000.000,00	8	80.000.000,00		
4.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				70.380.805,00		70.380.805,00		70.380.805,00		70.380.805,00		70.380.805,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	60	60	70.380.805,00	60	70.380.805,00	60	70.380.805,00	60	70.380.805,00	60	70.380.805,00		
4.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				63.124.700,00		63.124.700,00		63.124.700,00		63.124.700,00		63.124.700,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	9	9	63.124.700,00	9	63.124.700,00	9	63.124.700,00	9	63.124.700,00	9	63.124.700,00		
4.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	4	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00		
4.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	15	200.000.000,00	15	200.000.000,00	15	200.000.000,00	15	200.000.000,00	15	200.000.000,00		
4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.603.000.000,00		723.000.000,00		2.203.000.000,00		73.000.000,00		73.000.000,00		
Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	1.603.000.000,00	1	723.000.000,00	1	2.203.000.000,00	1	73.000.000,00	1	73.000.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1				1		1					
	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		0		0			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
4.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				900.000.000,00		20.000.000,00		1.500.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	900.000.000,00	1	20.000.000,00	1	1.500.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
4.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				650.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	650.000.000,00	1	650.000.000,00	1	650.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
4.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
4.02.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
4.02.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
4.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				472.600.000,00		472.600.000,00		472.600.000,00		472.600.000,00		472.600.000,00		
Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemda yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	472.600.000,00	4	472.600.000,00	4	472.600.000,00	4	472.600.000,00	4	472.600.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	2		2				2		2			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
4.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
4.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				408.000.000,00		408.000.000,00		408.000.000,00		408.000.000,00		408.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	408.000.000,00	12	408.000.000,00	12	408.000.000,00	12	408.000.000,00	12	408.000.000,00		
4.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00		
4.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				9.600.000,00		9.600.000,00		9.600.000,00		9.600.000,00		9.600.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	2	9.600.000,00	2	9.600.000,00		9.600.000,00	2	9.600.000,00	2	9.600.000,00		
4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				424.638.450,00		374.638.450,00		424.638.450,00		424.638.450,00		424.638.450,00		
Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6	6	424.638.450,00	6	374.638.450,00	6	424.638.450,00	6	424.638.450,00	6	424.638.450,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	33	33		33		33		33					
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0		0		0		0					
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1					
4.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		
4.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				179.638.450,00		179.638.450,00		179.638.450,00		179.638.450,00		179.638.450,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6	6	179.638.450,00	6	179.638.450,00	6	179.638.450,00	6	179.638.450,00	6	179.638.450,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
4.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
4.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				150.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	150.000.000,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				17.471.340.955,00		17.471.340.955,00		17.471.340.955,00		17.471.340.955,00		17.546.340.955,00		
Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang dilaksanakan	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	30	30	17.471.340.955,00	30	17.471.340.955,00	30	17.471.340.955,00	30	17.471.340.955,00	30	17.546.340.955,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	30	30		30		30		30		30			
	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	30	30		30		30		30		30			
4.02.01.2.15.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD				17.276.340.955,00		17.276.340.955,00		17.276.340.955,00		17.276.340.955,00		17.276.340.955,00		
Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	30	30	17.276.340.955,00	30	17.276.340.955,00	30	17.276.340.955,00	30	17.276.340.955,00	30	17.276.340.955,00		
4.02.01.2.15.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		120.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	30	30	45.000.000,00	30	45.000.000,00	30	45.000.000,00	30	45.000.000,00	30	120.000.000,00		
4.02.01.2.15.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	30	30	150.000.000,00	30	150.000.000,00	30	150.000.000,00	30	150.000.000,00	30	150.000.000,00		
4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD				431.500.000,00		431.500.000,00		431.500.000,00		431.500.000,00		431.500.000,00		
Jumlah Layanan Administrasi DPRD yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	137	175	431.500.000,00	175	431.500.000,00	175	431.500.000,00	175	431.500.000,00	175	431.500.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan)	7	7		7		7		7		7			
4.02.01.2.16.0002 - Fasilitasi Fraksi DPRD				3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan)	7	7	3.500.000,00	7	3.500.000,00	7	3.500.000,00	7	3.500.000,00	7	3.500.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	137	175	428.000.000,00	175	428.000.000,00	175	428.000.000,00	175	428.000.000,00	175	428.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya Penguatan Internal Akuntabilitas Kinerja	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	5.761.780.174,00	100	5.761.780.174,00	100	5.761.780.174,00	100	5.761.780.174,00	100	5.761.780.174,00		
4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		
Tersedianya dokumen perencanaan Anggaran dan evaluasi kinerja	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00		
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	11		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	4.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
4.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
4.02.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	11	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.753.780.174,00		5.753.780.174,00		5.753.780.174,00		5.753.780.174,00		5.753.780.174,00		
Jumlah Layanan Administrasi keuangan yang terpenuhi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	11	11	5.753.780.174,00	11	5.753.780.174,00	11	5.753.780.174,00	11	5.753.780.174,00	11	5.753.780.174,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	43	54		54		54		54		54			
4.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.689.274.174,00		5.689.274.174,00		5.689.274.174,00		5.689.274.174,00		5.689.274.174,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	43	54	5.689.274.174,00	54	5.689.274.174,00	54	5.689.274.174,00	54	5.689.274.174,00	54	5.689.274.174,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
4.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				64.506.000,00		64.506.000,00		64.506.000,00		64.506.000,00		64.506.000,00	4.02.0.00.0.00.01.00 00 - Sekretariat DPRD	
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				17.540.870.644,00		18.470.870.644,00		16.940.870.644,00		19.070.870.644,00		18.995.870.644,00		
Meningkatnya Kajian Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (%)	100	100	1.802.918.400,00	100	1.802.918.400,00	100	1.802.918.400,00	100	1.802.918.400,00	100	1.805.418.400,00		
4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				1.802.918.400,00		1.802.918.400,00		1.802.918.400,00		1.802.918.400,00		1.805.418.400,00		
Terfasilitasinya Pembahasan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	5	5	1.802.918.400,00	5	1.802.918.400,00	5	1.802.918.400,00	5	1.802.918.400,00	5	1.805.418.400,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	1	0		0		0		0		1			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah (Orang)	0	30		30		30		30		30			
4.02.02.2.01.0001 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				597.218.400,00		597.218.400,00		597.218.400,00		597.218.400,00		597.218.400,00		
Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	5	5	597.218.400,00	5	597.218.400,00	5	597.218.400,00	5	597.218.400,00	5	597.218.400,00		
4.02.02.2.01.0004 - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	2	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
4.02.02.2.01.0005 - Penyusunan Tata Tertib DPRD				0,00		0,00		0,00		0,00		2.500.000,00		
Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2.500.000,00		
4.02.02.2.01.0006 - Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah				1.204.700.000,00		1.204.700.000,00		1.204.700.000,00		1.204.700.000,00		1.204.700.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah (Orang)	0	30	1.204.700.000,00	30	1.204.700.000,00	30	1.204.700.000,00	30	1.204.700.000,00	30	1.204.700.000,00		
Meningkatnya Kualitas Pembahasan APBD	Ketepatan penetapan Perda APBD Tahun N (%)	100	100	951.000.000,00	100	951.000.000,00	100	951.000.000,00	100	951.000.000,00	100	951.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran				951.000.000,00		951.000.000,00		951.000.000,00		951.000.000,00		951.000.000,00		
Terfasilitasinya pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	1	1	951.000.000,00	1	951.000.000,00	1	951.000.000,00	1	951.000.000,00	1	951.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	1	1				1		1					
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	1	1				1		1					
4.02.02.2.02.0001 - Pembahasan KUA dan PPAS				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
4.02.02.2.02.0003 - Pembahasan APBD				375.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00		
Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	1	1	375.000.000,00	1	375.000.000,00	1	375.000.000,00	1	375.000.000,00	1	375.000.000,00		
4.02.02.2.02.0004 - Pembahasan APBD Perubahan				375.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00		
Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	1	1	375.000.000,00	1	375.000.000,00	1	375.000.000,00	1	375.000.000,00	1	375.000.000,00		
4.02.02.2.02.0006 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	1	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	100	100	678.000.000,00	100	678.000.000,00	100	678.000.000,00	100	678.000.000,00	100	678.000.000,00		
4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				0		0		0		0		0		
4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran				0		0		0		0		0		
4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				678.000.000,00		678.000.000,00		678.000.000,00		678.000.000,00		678.000.000,00		
Jumlah layanan Pengawasan Pemerintahan yang di fasilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	0	1	678.000.000,00	1	678.000.000,00	1	678.000.000,00	1	678.000.000,00	1	678.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)	0	1				1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	0	1		1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	0	1		1		1		1							
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	0	1		1		1		1							
	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	0	1		1		1		1							
	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1							
4.02.02.2.03.0001 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00				
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	0	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00				
4.02.02.2.03.0002 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00				
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	0	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00				
4.02.02.2.03.0003 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00				
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	0	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00				
4.02.02.2.03.0004 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00				
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	0	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00				
4.02.02.2.03.0005 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Laporan)	0	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00		
4.02.02.2.03.0006 - Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)	0	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00		
4.02.02.2.03.0007 - Pengawasan Penggunaan Anggaran				375.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00		
Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	0	1	375.000.000,00	1	375.000.000,00	1	375.000.000,00	1	375.000.000,00	1	375.000.000,00		
4.02.02.2.03.0008 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	0	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD				0		0		0		0		0		
4.02.02.2.06 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		3.000.000,00		
4.02.02.2.07 - Pembahasan Kerja Sama Daerah				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD				0		0		0		0		0		
Meningkatnya Kualitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Penyerapan Aspirasi dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (%)	100	100	3.122.350.000,00	100	3.122.350.000,00	100	3.122.350.000,00	100	3.122.350.000,00	100	3.122.350.000,00		
4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				3.122.350.000,00		3.122.350.000,00		3.122.350.000,00		3.122.350.000,00		3.122.350.000,00		
Terlaksnanya pelaksanaan penyerapan dan penghimpunan asjirasi	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan)	0	12	3.122.350.000,00	12	3.122.350.000,00	12	3.122.350.000,00	12	3.122.350.000,00	12	3.122.350.000,00		
	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	3	3		3		3		3					
	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	0	30		30		30		30					
4.02.02.2.05.0001 - Kunjungan Kerja dalam Daerah				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan)	0	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00		
4.02.02.2.05.0002 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	0	30	500.000,00	30	500.000,00	30	500.000,00	30	500.000,00	30	500.000,00		
4.02.02.2.05.0003 - Pelaksanaan Reses				3.121.350.000,00		3.121.350.000,00		3.121.350.000,00		3.121.350.000,00		3.121.350.000,00		
Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	3	3	3.121.350.000,00	3	3.121.350.000,00	3	3.121.350.000,00	3	3.121.350.000,00	3	3.121.350.000,00		
Meningkatnya Kualitas Persidangan	Persentase Rapat-Rapat DPRD (%)	100	100	10.986.602.244,00	100	11.916.602.244,00	100	10.386.602.244,00	100	12.516.602.244,00	100	12.439.102.244,00		
4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD				1.143.579.400,00		1.143.579.400,00		1.143.579.400,00		1.143.579.400,00		1.872.158.800,00		
Jumlah Layanan Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	0	1	1.143.579.400,00	1	1.143.579.400,00	1	1.143.579.400,00	1	1.143.579.400,00	1	1.872.158.800,00		
	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	0	7		7		7		7		7			
	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)	1	0		0		0		0		1			
4.02.02.2.04.0001 - Orientasi DPRD				0,00		0,00		0,00		0,00		728.579.400,00		
4.02.02.2.04.0002 - Pendalaman Tugas DPRD				728.579.400,00		728.579.400,00		728.579.400,00		728.579.400,00		728.579.400,00		
Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	1	1	728.579.400,00	1	728.579.400,00	1	728.579.400,00	1	728.579.400,00	1	728.579.400,00		
4.02.02.2.04.0004 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
4.02.02.2.04.0005 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi				360.000.000,00		360.000.000,00		360.000.000,00		360.000.000,00		360.000.000,00		
Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	0	7	360.000.000,00	7	360.000.000,00	7	360.000.000,00	7	360.000.000,00	7	360.000.000,00		
4.02.02.2.04.0006 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)	0	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00		
4.02.02.2.04.0007 - Penyusunan Program Kerja DPRD				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	0	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00		
4.02.02.2.04.0008 - Publikasi dan Dokumentasi DPRD				49.000.000,00		49.000.000,00		49.000.000,00		49.000.000,00		49.000.000,00		
Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	0	1	49.000.000,00	1	49.000.000,00	1	49.000.000,00	1	49.000.000,00	1	49.000.000,00		
4.02.02.2.06 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		3.000.000,00		
Terselenggaranya Layanan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	0	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	3.000.000,00		
	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	1	0		0		0		0		1			
4.02.02.2.06.0001 - Penyusunan Kode Etik DPRD				0,00		0,00		0,00		0,00		2.500.000,00		
Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2.500.000,00		
4.02.02.2.06.0002 - Pengawasan Kode Etik DPRD				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	0	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00		
4.02.02.2.07 - Pembahasan Kerja Sama Daerah				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terselenggaranya Pembahasan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen)	0	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (Dokumen)	0	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00		
4.02.02.2.07.0002 - Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen)	0	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00	12	500.000,00		
4.02.02.2.08 - Fasilitasi Tugas DPRD				9.841.522.844,00		10.771.522.844,00		9.241.522.844,00		11.371.522.844,00		10.562.943.444,00		
Terselenggaranya layanan fasilitasi tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dokumen)	0	1	9.841.522.844,00	1	10.771.522.844,00	1	9.241.522.844,00	1	11.371.522.844,00	1	10.562.943.444,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	1	1		1		1		1							
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	36	36		36		36		36							
	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)	0	1		1		1		1							
4.02.02.2.08.0001 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				9.739.022.844,00		10.669.022.844,00		9.139.022.844,00		11.269.022.844,00		10.460.443.444,00				
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	36	36	9.739.022.844,00	36	10.669.022.844,00	36	9.139.022.844,00	36	11.269.022.844,00	36	10.460.443.444,00				
4.02.02.2.08.0002 - Penyusunan Laporan Kinerja DPRD				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00				
Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00				
4.02.02.2.08.0003 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00				
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00				
4.02.02.2.08.0004 - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00				
Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00				
4.02.02.2.08.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00				
Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dokumen)	0	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00				

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

IKU merupakan ukuran keberhasilan strategis yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Penetapan IKU ini didasarkan pada tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, serta kontribusinya terhadap prioritas pembangunan daerah Kota Tarakan. IKU yang terukur dan relevan akan menjadi acuan penting dalam menilai akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD selama periode perencanaan. Dengan adanya IKU dan target yang terstruktur, diharapkan kinerja Sekretariat DPRD dapat dipantau secara efektif dan terarah.

Tabel berikut ini memberikan gambaran komprehensif mengenai fokus kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung fungsi-fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD, serta dalam memberikan pelayanan administrasi yang optimal. IKU yang ditetapkan mencakup aspek-aspek kunci seperti efektivitas fasilitasi pembentukan peraturan daerah, tingkat kepuasan layanan administrasi DPRD, kualitas dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Melalui pemantauan berkala terhadap IKU ini, Sekretariat DPRD dapat mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan untuk mencapai kinerja yang lebih baik.

Capaian target IKU Sekretariat DPRD Kota Tarakan akan menjadi tolok ukur penting dalam laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan akan digunakan sebagai dasar untuk perbaikan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas di Kota Tarakan.

Tabel 4.2
Target Keberhasilan Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Tarakan Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terwujudnya kualitas layanan Sekretariat DPRD	Meningkatnya Dukungan pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Nilai Capaian kinerja Sekretariat DPRD terhadap dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95	95	97	100	100	100
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP PD	73,95	73,95	73,95	74	74	74
		Indek Kepuasan Layanan Sekretariat DPRD (Nilai IKM)	80	80	83	83	85	85

4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

IKK merupakan sejumlah kecil indikator kinerja yang dianggap paling kritikal dan strategis dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan utamanya. Pemilihan IKK didasarkan pada kemampuan indikator tersebut dalam merepresentasikan dampak signifikan dari kinerja Sekretariat DPRD terhadap pencapaian visi dan misi organisasi serta prioritas pembangunan daerah. Dengan fokus pada indikator-indikator kunci ini, diharapkan pengukuran kinerja menjadi lebih terarah dan efektif dalam pengambilan keputusan strategis.

IKK ini dipilih berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rentsra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, dan juga karena kemampuannya dalam memberikan gambaran ringkas namun komprehensif mengenai area-area kinerja yang paling menentukan keberhasilan Sekretariat DPRD. Dengan ditetapkannya IKK ini, diharapkan Sekretariat DPRD dapat terus meningkatkan kualitas layanan dan dukungannya kepada DPRD, serta berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan Kota Tarakan secara keseluruhan.

Tabel berikut menyajikan daftar Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat DPRD Kota Tarakan. Setiap IKK dilengkapi dengan definisi yang jelas, satuan pengukuran yang terukur, target kinerja tahunan selama periode 2025-2029, serta keterkaitannya dengan program dan kegiatan utama yang mendukung pencapaiannya.

Tabel 4.3
Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Tahun 2025-2029

NO	Indikator kinerja Kunci (IKK)	Baseline 2024	Target Kinerja					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Ketepatan penetapan Perda APBD Tahun N	-	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat

BAB V PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Sekretariat DPRD Kota Tarakan untuk Periode 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Sekretariat DPRD untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Pemerintah Kota Tarakan yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Sekretariat DPRD Kota Tarakan serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kota Tarakan. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Sekretariat DPRD Kota Tarakan merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Sekretariat DPRD dan target kinerja sasaran Sekretariat DPRD Kota Tarakan.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi, misi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kota Tarakan dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kota Tarakan 2025-2029 dengan pencapaian target kinerja Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Tarakan ini.

3. Rencana Strategis Inspektorat Kota Tarakan Tahun 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Renstra berfungsi sebagai dokumen perencanaan lima tahunan perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan, sekaligus menjadi penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sejalan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kota Tarakan diarahkan untuk memperkuat peran pengawasan internal yang adaptif terhadap perubahan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan berorientasi pada hasil. Dokumen ini juga disusun dengan mempertimbangkan dinamika pembangunan global, nasional, dan regional, yang menuntut peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar mampu menjaga integritas dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan daerah.

Dengan demikian, Renstra Inspektorat Daerah Kota Tarakan Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman strategis dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan selama lima tahun ke depan, serta sebagai instrumen akuntabilitas publik yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas sesuai arah pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029;
17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Tarakan;
21. Surat Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 100.3.3.3/HK-IV/229/2025 Tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kota Tarakan adalah untuk memberikan pedoman perencanaan program dan kegiatan pengawasan internal pemerintah daerah. Renstra ini disusun dengan tetap mengakomodir kebijakan nasional maupun kebijakan daerah, serta diarahkan untuk merumuskan strategi, arah kebijakan, dan program pengawasan yang lebih terarah, efektif, efisien, dan terpadu. Dengan demikian, Renstra Inspektorat berfungsi sebagai acuan dalam memperkuat peran pengawasan, pembinaan, dan konsultasi guna mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, adaptif, dan responsif.

Tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kota Tarakan adalah untuk mewujudkan output dan outcome pengawasan yang direncanakan secara

bertahap, terukur, dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra dapat dilihat melalui pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Dengan demikian, pelaksanaan rencana, program, dan kegiatan pengawasan Inspektorat diharapkan dapat berjalan terpadu, efektif, efisien, serta memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kota Tarakan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini paling sedikit memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KOTA TARAKAN

Bab ini membahas gambaran pelayanan Inspektorat Daerah Kota Tarakan yang paling sedikit memuat tugas, fungsi, dan struktur; sumber daya; kinerja pelayanan; dan kelompok sasaran layanan. Selain itu juga membahas permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah Kota Tarakan dan Isu Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini paling sedikit memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah Kota Tarakan.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini paling sedikit memuat uraian program; uraian kegiatan; uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator target dan pagu indikatif; uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah; target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama; dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci.

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH KOTA TARAKAN

2.1 Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Tarakan

Inspektorat Daerah Kota Tarakan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Tarakan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pengawasan yang menjadi kewenangan Daerah. Inspektorat Daerah Kota Tarakan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Inspektorat Daerah Kota Tarakan

Tugas Inspektorat Daerah Kota Tarakan membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pengawasan yang menjadi kewenangan Daerah yang diberikan kepada daerah.

Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugasnya Inspektorat Daerah Kota Tarakan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kota Tarakan

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kota Tarakan dilengkapi dengan perangkat organisasi dapat dilihat pada Gambar II-1, adapun susunan organisasi sebagai berikut:

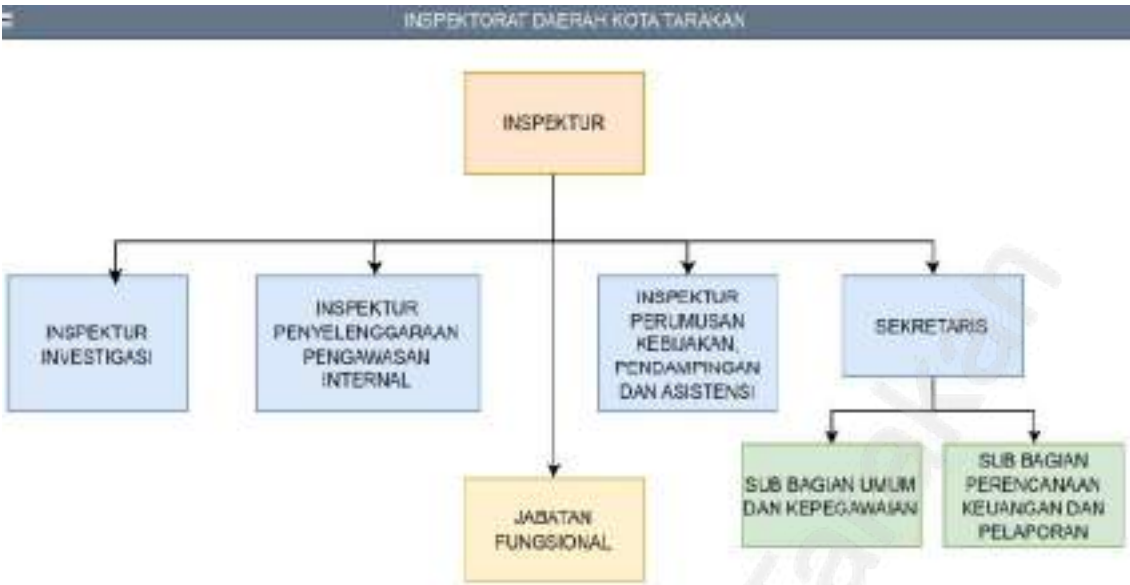
1. Inspektur, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkondisikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat dan menyiapkan bahan koordinasi pengawasan. Sekretariat terdiri dari :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam pengkoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.
 - Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam koordinasi kegiatan Inspektorat, koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran, pengkoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan, menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.
3. Inspektur Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
 4. Inspektur Penyelenggaraan Pengawasan Internal, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perekonomian dan pembangunan.
 5. Inspektur Investigasi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektur dalam menyiapkan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja, bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian pelaksanaan tugas, melaksanakan kebijakan teknis pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Investigasi.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional :
 - Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya;
 - Dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.



2.1.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah Kota Tarakan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur penting dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan, karena kualitas kinerja pegawai akan menentukan keberhasilan perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Inspektorat Daerah Kota Tarakan menempatkan penguatan sumber daya manusia sebagai faktor utama untuk mendukung efektivitas pengawasan, pembinaan, dan konsultasi yang menjadi mandat organisasi.

Hingga Agustus 2025, jumlah pegawai pada Inspektorat Daerah Kota Tarakan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Rincian jumlah pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Data Personil Inspektorat

Gol/ Ruang	Tingkat Pendidikan							Jumlah
	SD	SMP	SMA	DIII	DIV/S1	S2	S3	
IV/c	-	-	-	-	-	1	-	1
IV/b	-	-	-	-	1	1	-	2
IV/a	-	-	-	-	2		-	2
III/d	-	-	-	3	11	1	-	15
III/c	-	-	-	1	4	-	-	5
III/b	-	-	-	1	3	-	-	4
III/a	-	-	-	-	10	-	-	10
Jumlah	0	0	0	5	31	3	0	39

Aset/Modal

Aset atau modal Inspektorat Daerah Kota Tarakan merupakan sarana dan prasarana penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, yang seluruhnya dibiayai melalui APBD. Inspektorat Daerah menempati Gedung Kantor Inspektorat Kota Tarakan sebagai pusat kegiatan

kerja dan pelayanan pengawasan intern. Selain gedung kantor, Inspektorat juga memiliki berbagai inventaris berupa kendaraan dinas dan operasional, peralatan kantor, perangkat komputer, perlengkapan komunikasi, serta peralatan laboratorium.

Tabel 2.2
Aset Inspektorat

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Tanah	1	1		
2	Gedung Dan Bangunan	2	2		
3	Peralaan Mesin	529	499	30	
4	Kendaraan	8	8		
5	Jalan Irigasi Dan Jaringan	1	1		
6	Aset Tetap Lain	372	372		

2.1.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Tarakan

Inspektorat Daerah Kota Tarakan telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawabnya sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Reformasi Birokrasi	-	58	59	60	61	-		58.26	71.99	77.17	-		97.10%	119.98%	126.51%
Persentase SOP untuk Setiap Jenis Kegiatan Pengawasan dalam PKPT	-	96%	97%	98%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	103.09%	102.04%	102.04%	100.00%
Persentase Auditor dan APIP yang Bersertifikat Pengawasan	-	95%	96%	97%	98%	-	75%	81.25%	100%	100%	-	78.13%	83.76%	103.09%	102.04%
Pencapaian Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	-	3	3.1	3.2	3.3	-	2	3	3	3	-	64.52%	93.75%	93.75%	90.91%
Persentase Realisasi Pengawasan sesuai PKPT	-	97%	98%	99%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	102.04%	101.01%	101.01%	100.00%
Persentase Temuan hasil Pemeriksaan APIP yang Selesai Ditindaklanjuti	-	87%	88%	89%	90%	-	87.40%	87.07%	89%	89%	-	100.46%	98.94%	100.00%	98.89%
Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Selesai Ditindaklanjuti	-	88%	89%	89.5%	90%	-	91.55%	90.47%	87.50%	87.55%	-	104.03%	101.65%	97.77%	97.28%
Persentase PD dengan Kriteria Baik dalam Evaluasi SAKIP	-	95%	96%	97%	98%	-	61.29%	90%	100%	96.88%	-	64.52%	93.75%	103.09%	98.86%
Manajemen Risiko Indeks (MRI)	-	3	3.1	3.2	3.3	-	3	3	3	3	-	100.00%	96.77%	93.75%	90.91%

Pada tahun akhir perencanaan, yaitu 2024, capaian kinerja secara umum menunjukkan hasil yang positif. Sebagian besar indikator telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra. Indeks Reformasi Birokrasi mencatat lonjakan signifikan dengan capaian lebih dari 120 persen dari target, menandakan percepatan yang kuat dalam agenda reformasi birokrasi. Indikator yang bersifat kepatuhan prosedural seperti penerapan SOP PKPT dan realisasi pengawasan menunjukkan konsistensi penuh dengan capaian 100 persen, yang berarti sistem pengawasan berjalan sesuai dengan perencanaan tanpa adanya backlog. Selain itu, tindak lanjut hasil pengawasan baik dari APIP maupun BPK juga menunjukkan capaian mendekati sempurna, sehingga responsivitas dan akuntabilitas dapat dikatakan terjaga dengan baik.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang belum sepenuhnya mencapai target. Kapabilitas APIP dan Manajemen Risiko Indeks (MRI) hanya mencapai sekitar 90,91 persen dari target yang ditetapkan, memperlihatkan adanya gap pada penguatan kapasitas kelembagaan. Evaluasi SAKIP juga menunjukkan perbaikan signifikan dibandingkan tahun-tahun awal, namun capaian 96–97 persen masih sedikit di bawah target penuh yang diharapkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun kinerja umum sudah solid, aspek kelembagaan dan manajemen risiko masih memerlukan perhatian khusus agar tidak menjadi titik lemah di periode perencanaan berikutnya.

Dengan demikian, pada akhir 2024 kinerja Inspektorat Daerah Kota Tarakan dapat dinilai berhasil secara keseluruhan. Keberhasilan ini terutama terlihat pada indikator kepatuhan yang konsisten tercapai, namun untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas tata kelola ke depan, fokus perbaikan perlu diarahkan pada penguatan kapabilitas APIP, penerapan manajemen risiko yang lebih matang, serta peningkatan kualitas manajemen kinerja melalui SAKIP.

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Pertumbuhan 2021-2022		Pertumbuhan 2022-2023		Rata-rata Pertumbuhan	
***)	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
BELANJA DAERAH	5,582,794,778	7,327,897,152	7,372,696,025	7,858,972,685	5,274,158,627	6,495,281,809	6,877,766,990	8,157,351,476	94.47	88.64	93.29	103.80	31.26	23.15	0.61	5.89	15.93	14.52
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,688,366,978	5,164,569,312	5,388,990,225	5,438,787,485	4,468,176,827	4,736,135,386	5,207,363,264	6,067,160,494	95.30	91.70	96.63	111.55	10.16	6.00	4.35	9.95	7.25	7.97
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,459,602,241	4,652,265,988	4,683,982,825	4,835,987,485	4,252,163,432	4,275,777,595	4,579,483,367	5,351,583,734	95.35	91.91	97.77	110.66	4.32	0.56	0.68	7.10	2.50	3.83
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9,600,000	-	11,200,000	-	9,576,000		11,200,000		99.75		100.00		- 100.00	- 100.00			- 50.00	- 50.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	128,723,427	251,516,284	320,690,900	212,000,000	120,128,255	237,259,427	279,076,392	493,956,397	93.32	94.33	87.02	233.00	95.39	97.51	27.50	17.62	61.45	57.57
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46,540,000	74,300,000	74,300,000	74,300,000	44,074,040	53,644,564	55,925,855	65,959,188	94.70	72.20	75.27	88.77	37.36	21.71	-	4.25	18.68	12.98
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43,901,310	186,487,040	298,816,500	316,500,000	42,235,100	169,453,800	281,677,650	155,661,175	96.20	90.87	94.26	49.18	76.46	301.22	60.23	66.23	68.35	183.72
Program Penyelenggaraan Pengawasan	805,834,400	1,638,330,000	1,504,631,690	1,884,960,000	726,221,900	1,382,986,250	1,290,351,000	1,514,945,339	90.12	84.41	85.76	80.37	50.81	90.44	- 8.16	- 6.70	21.33	41.87
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	674,324,400	1,389,110,000	1,286,318,990	1,400,000,000	647,569,400	1,279,235,000	1,109,312,500	1,259,063,440	96.03	92.09	86.24	89.93	51.46	97.54	- 7.40	- 13.28	22.03	42.13
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	131,510,000	249,220,000	218,312,700	484,960,000	78,652,500	103,751,250	181,038,500	255,881,899	59.81	41.63	82.93	52.76	47.23	31.91	- 12.40	74.49	17.41	53.20
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	88,593,400	524,997,840	479,074,110	535,225,200	79,759,900	376,160,173	380,052,726	575,245,643	90.03	71.65	79.33	107.48	83.12	371.62	- 8.75	1.03	37.19	186.33
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	8,063,400	286,971,000	274,404,600	310,225,200	6,454,900	239,235,944	234,435,737	385,498,695	80.05	83.37	85.43	124.26	97.19	3,606.27	- 4.38	- 2.01	46.41	1,802.13
Pendampingan dan Asistensi	80,530,000	238,026,840	204,669,510	225,000,000	73,305,000	136,924,229	145,616,989	189,746,948	91.03	57.52	71.15	84.33	66.17	86.79	- 14.01	6.35	26.08	46.57

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Inspektorat Daerah Kota Tarakan

Kelompok sasaran layanan Inspektorat Daerah Kota Tarakan pada dasarnya adalah semua pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan tugas pengawasan, pembinaan, dan konsultansi Inspektorat sebagai Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Kelompok sasaran ini secara umum dikelompokkan menjadi:

- 1) Kepala Daerah (Wali Kota) sebagai pengguna utama hasil pengawasan untuk pengambilan keputusan;
- 2) Perangkat Daerah (OPD) yaitu dinas, badan, kecamatan, kelurahan, unit kerja lainnya yang wajib diawasi dan dibina;
- 3) Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah individu/pegawai yang perlu dibina agar patuh aturan, berintegritas, dan profesional;
- 4) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dan kinerja usaha.

2.1.5 Mitra Inspektorat Daerah Kota Tarakan dalam memberikan layanan

Mitra Inspektorat Daerah Kota Tarakan dalam memberikan pelayanan merupakan pihak yang bekerja sama, berkoordinasi, atau menerima manfaat dari hasil pengawasan program dan kegiatan secara langsung maupun tidak langsung guna meningkatkan kapasitasnya. Kelompok sasaran ini dalam Renstra Inspektorat Daerah Kota Tarakan, secara umum dikelompokkan menjadi:

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menggunakan hasil pengawasan untuk fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan;
- 2) Masyarakat/Publik sebagai penerima manfaat akhir dari tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel;
- 3) Lembaga Pengawas Eksternal meliputi BPK, BPKP, KPK, Ombudsman, serta aparat penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian);
- 4) Pihak Swasta/LSM/Media Massa terutama yang terkait proyek pemerintah, pengadaan barang/jasa, dan kontrol sosial;
- 5) Kementerian/Lembaga terkait dalam rangka sinergi kebijakan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat Daerah Kota Tarakan

Sebelum merumuskan tujuan dan sasaran, Inspektorat Daerah Kota Tarakan perlu melakukan analisis permasalahan dan isu strategis yang relevan. Analisis ini penting agar langkah yang ditempuh selaras dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat serta menjawab harapan pemangku kepentingan. Permasalahan dan isu strategis tersebut dapat bersumber dari faktor internal maupun eksternal, sehingga pemetaan diperlukan untuk menetapkan prioritas pengawasan.

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa persoalan pengawasan tidak hanya terkait dengan pelaksanaan audit, reviu, dan evaluasi, tetapi juga menyangkut aspek pendampingan, pemantauan tindak lanjut, asistensi manajemen risiko, serta penguatan integritas melalui program anti korupsi dan pembangunan Zona Integritas. Di sisi lain, masih terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme APIP. Pemetaan mengenai masalah pokok, masalah turunan, dan akar masalah ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.5 Pemetaan Permasalahan

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Belum efektifnya pengawasan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Belum optimalnya pemantauan kinerja pemerintah daerah
			Belum optimalnya pemantauan kinerja perangkat daerah
			Belum optimalnya pemantauan kinerja BUMD
		Belum efektifnya pengawasan keuangan Pemerintah Daerah	Belum optimalnya pemantauan tindak lanjut
			Belum optimalnya audit/evaluasi/reviu laporan keuangan
			Belum optimalnya asistensi manajemen risiko
			Belum optimalnya pendampingan Reformasi Birokrasi
		Belum tingginya integritas pemerintah daerah	Belum optimalnya pemantauan program anti korupsi
			Belum optimalnya pendampingan Zona Integritas
		Belum tingginya kapabilitas APIP	Belum tingginya kompetensi dan profesionalitas APIP
		Belum tingginya akuntabilitas kinerja Inspektorat	Belum efektifnya pendampingan pengawasan dan QA
			Belum optimalnya penguatan internal akuntabilitas kinerja
			belum optimalnya layanan kesekretariatan

Selain pemetaan masalah internal, Inspektorat Daerah Kota Tarakan juga perlu mengantisipasi isu-isu strategis yang berkembang dari dinamika eksternal. Isu tersebut muncul dari level global, nasional, maupun regional, yang keseluruhannya menuntut penerapan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pencegahan korupsi. Bagi Inspektorat, hal ini menghadirkan potensi sekaligus tantangan, baik berupa peluang sinergi dengan lembaga pengawas eksternal maupun meningkatnya ekspektasi publik terhadap kualitas pengawasan. Hasil identifikasi isu strategis tersebut disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.6 Isu Strategis

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pd	Permasalahan Pd	Isu Klhs Yang Relevan Dengan Pd	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Pd			Isu Strategis Pd
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sinergi pembinaan dan pengawasan dengan BPKP, KPK, dan Ombudsman	Belum tingginya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	-	Tuntutan internasional terhadap penerapan prinsip good governance, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan	Implementasi reformasi birokrasi nasional dan SPIP terintegrasi oleh BPKP.	Transparansi dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
Keterlibatan Masyarakat dalam pengawasan.			Perkembangan standar internasional dalam audit berbasis risiko dan integritas publik.	Peningkatan tuntutan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBD.	Perlu pengawasan terkait potensi korupsi sektor perizinan.	
				Maraknya kasus tindak pidana korupsi di daerah yang menjadi perhatian KPK, BPK, dan aparat penegak hukum.		
				Penguatan sistem pengawasan melalui Peraturan Presiden No. 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.		
				Tuntutan publik terhadap pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan bebas maladministrasi (sejalan dengan Ombudsman RI).		

Dengan mempertimbangkan hasil analisis permasalahan dan isu strategis di atas, dapat disimpulkan bahwa fokus utama Inspektorat Daerah Kota Tarakan ke depan adalah memperkuat peran pengawasan intern, meningkatkan kapabilitas APIP, serta memperluas strategi pencegahan korupsi. Hal ini akan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan Kota Tarakan yang adaptif, responsif, dan akuntabel sesuai dengan visi dan misi kepala daerah

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Hasil analisis terhadap permasalahan dan isu strategis pada Bab II menunjukkan bahwa tantangan utama Inspektorat Daerah Kota Tarakan terletak pada peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Tantangan tersebut meliputi penguatan akuntabilitas kinerja, efektivitas pengawasan keuangan, peningkatan integritas aparatur, serta pengembangan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dengan memahami kondisi tersebut, maka arah pembangunan Inspektorat perlu dirumuskan secara lebih terarah melalui tujuan dan sasaran yang jelas untuk lima tahun mendatang.

Tujuan Inspektorat Daerah Kota Tarakan adalah Terwujudnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Tujuan ini menjadi pijakan utama dalam melaksanakan misi wali kota, khususnya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, responsif, dan akuntabel, sekaligus menjawab isu-isu strategis yang telah diidentifikasi.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Inspektorat menetapkan beberapa sasaran strategis yang terukur dan dapat dicapai dalam periode Renstra 2025–2029, yaitu:

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
2. Meningkatnya efektivitas pengawasan keuangan pemerintah daerah.
3. Meningkatnya integritas dan penurunan potensi korupsi di pemerintah daerah.
4. Meningkatnya kapabilitas Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
5. Meningkatnya tata kelola Inspektorat.

Dengan penetapan tujuan dan sasaran tersebut, Inspektorat Daerah Kota Tarakan diharapkan dapat berperan lebih optimal sebagai pengawas internal pemerintah daerah, memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, dan mendukung terwujudnya visi Kota Tarakan sebagai kota cerdas yang berdaya saing menuju masyarakat sejahtera. Rumusan tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan target tahunan Inspektorat Kota Tarakan periode 2025–2029 secara lengkap tercantum pada tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3. 1
Tujuan dan Sasaran

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						Ket
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
6.01.0.00.0.00.01.0000 – Inspektorat											
- Meningkatnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah - Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah - Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terwujudnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	3	3	3	3	3	3	3	
		Meningkatnya efektivitas pengawasan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Nilai)	14,72	14,73	15,7	16,74	16,75	16,76	16,77	
		Meningkatnya efektivitas pengawasan keuangan Pemerintah Daerah	Level MRI (Level)	3	3	3	3	3	3	3	
			Level IEPK (Level)	2	3	3	3	3	3	3	
		Meningkatnya integritas dan penurunan potensi korupsi di pemda	Persentase Unit Kerja yang berhasil mendapatkan predikat WBK/WBBM (%)	0	0	6.67	6.67	6.67	13.33	13.33	
		Meningkatnya kapabilitas APIP	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	
		Meningkatnya tata kelola Inspektorat	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	87,92	87,95	88	88,05	88,10	88.15	88,20	
			Nilai SAKIP PD (Nilai)	80,26	84,57	85,6	85,7	85,8	85,9	86	

3.2 Strategi

Tahapan strategi pengawasan 2026–2030 menggambarkan tujuan bertingkat yang ingin dicapai Inspektorat dalam lima tahun ke depan. Setiap tahapan memuat arah pencapaian yang semakin meningkat, dimulai dari penguatan dasar sistem pengawasan pada tahun 2026, pemantapan sistem pemantauan dan evaluasi pada tahun 2027, peningkatan efektivitas pengawasan dan integritas pada tahun 2028, percepatan transformasi menuju tata kelola yang terbuka dan responsif pada tahun 2029, hingga pada akhirnya mewujudkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas pada tahun 2030.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra

TAHAP 1	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan dasar sistem pengawasan	Pemantapan Sistem Pemantauan dan Evaluasi	Peningkatan Efektivitas Pengawasan dan Integritas	Percepatan Transformasi Pengawasan Menuju Tata Kelola yang Adaptif dan Responsif	Perwujudan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah yang Berkualitas

Untuk mencapai tahapan tersebut, seluruh arah kebijakan dilaksanakan secara simultan dan berkesinambungan setiap tahun. Penguatan sistem pemantauan dan evaluasi, peningkatan efektivitas audit, penguatan manajemen risiko, peningkatan profesionalisme APIP, pembangunan Zona Integritas, penguatan layanan pengawasan berbasis respon masyarakat, pemantauan terhadap kebijakan dan tindak lanjut, optimalisasi pengendalian internal, serta transparansi hasil pengawasan, semuanya merupakan instrumen kerja yang secara konsisten dijalankan dari awal hingga akhir periode. Dengan cara ini, arah kebijakan berfungsi sebagai fondasi operasional yang menopang tahapan strategi, sehingga pada akhirnya seluruh tujuan yang ditetapkan Inspektorat dapat diwujudkan secara bertahap hingga mencapai puncak sasaran di tahun 2030.

3.3 Arah Kebijakan

Arah kebijakan pengawasan disusun sebagai rangkaian kerja yang bersifat menyeluruh dan berkesinambungan dalam setiap tahun perencanaan. Seluruh kebijakan diarahkan untuk memperkuat fungsi pengawasan, meningkatkan kualitas akuntabilitas, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan berintegritas. Upaya ini mencakup penguatan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja perangkat daerah dan BUMD, peningkatan efektivitas audit serta reviu keuangan, serta penguatan manajemen risiko yang berjalan seiring dengan pendampingan reformasi birokrasi.

Arah kebijakan pengawasan Inspektorat Daerah Kota Tarakan disusun sebagai satu rangkaian kerja yang menyeluruh, konsisten, dan berkesinambungan setiap tahun perencanaan. Seluruh kebijakan diarahkan untuk memperkuat fungsi pengawasan, meningkatkan kualitas akuntabilitas, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan berintegritas. Fokus kebijakan tersebut mencakup penguatan sistem pemantauan dan evaluasi, peningkatan efektivitas audit dan reviu keuangan, penguatan manajemen risiko, serta pendampingan reformasi birokrasi.

Selain itu, peningkatan profesionalisme dan kompetensi APIP menjadi prioritas agar kapasitas pengawasan semakin handal dan mampu menjawab

dinamika kebutuhan. Komitmen integritas perangkat daerah juga terus dibangun melalui implementasi Zona Integritas, disertai dengan penguatan mekanisme quality assurance yang adaptif terhadap aduan masyarakat. Pada saat yang sama, pengendalian internal terhadap kinerja dan keuangan dioptimalkan agar pelaksanaan program tetap berjalan sesuai jalurnya. Transparansi hasil pengawasan diperkuat melalui publikasi capaian kinerja, sehingga pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai kontrol internal, melainkan juga sebagai instrumen akuntabilitas publik.

Rangkaian arah kebijakan tersebut diselaraskan dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pengawasan serta kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3
Arah Kebijakan

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(1)	(3)	(4)	(5)
1	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Tata Kelola Pemerintahan	Penguatan sistem pemantauan dan evaluasi kinerja perangkat daerah dan BUMD	
2	Permendagri Nomor 19 Tahun 2023 mengenai Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan efektivitas audit/reviu keuangan	
3	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Peningkatan Koordinasi Antara Pemerintah Kota dan Pusat	Penguatan manajemen risiko dan pendampingan reformasi birokrasi	
4	Peraturan Asosiasi Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Ketaatan Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Urusan Pemerintahan Konkuren	Pemantauan, Evaluasi, dan Transparansi Kebijakan	Peningkatan profesionalisme dan kompetensi APIP	
5	PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia		Peningkatan integritas dan komitmen perangkat daerah dalam pembangunan Zona Integritas	
6			Peningkatan efektivitas layanan pengawasan dan QA berbasis respon terhadap aduan masyarakat	
7			Peningkatan efektivitas pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan dan tindak lanjut	
8			Optimalisasi pengendalian internal terhadap kinerja dan keuangan	
9			Peningkatan transparansi hasil pengawasan dan publikasi capaian kinerja	

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN INSPEKTORAT

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Program, kegiatan, dan subkegiatan Inspektorat Daerah Kota Tarakan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Seluruhnya disusun berdasarkan nomenklatur resmi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta hasil pemutakhiran kodefikasi dan klasifikasi pembangunan daerah. Dengan pendekatan tersebut, perencanaan operasional ini mampu menggambarkan keterhubungan antara arah kebijakan dengan implementasi program secara lebih terstruktur.

Untuk menjamin konsistensi pencapaian target, daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dirancang tidak hanya untuk periode 2025–2029, tetapi juga diarahkan sebagai bagian dari kesinambungan perencanaan hingga tahun 2030 sebagai pijakan penyusunan rencana kerja Inspektorat tahun 2030. Rangkaian perumusan tersebut dituangkan dalam Tabel 4.1 yang memuat keterkaitan antara tujuan, sasaran, outcome, dan output dengan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan perangkat daerah.

Selanjutnya, guna mendukung kejelasan alokasi sumber daya, rencana ini dilengkapi dengan kerangka pendanaan indikatif. Tabel 4.2 menyajikan rincian nomenklatur program, indikator kinerja, target tahunan, serta pagu indikatif sebagai dasar pengelolaan pembiayaan yang berkesinambungan.

Tabel 4.1
Perumusan Program/kegiatan/Subkegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
6.01.0.00.0.00.01.0000 – Inspektorat							
- Meningkatnya kualitas pelayanan public - Meningkatnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah - Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Terwujudnya kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya efektivitas pengawasan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah			Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		
					Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		
			Meningkatnya efektivitas evaluasi kinerja		Persentase tindaklanjut evaluasi SAKIP	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
				Terlaksananya pemantauan kinerja pemerintah daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja	
		Meningkatnya efektivitas pengawasan keuangan Pemerintah Daerah			Level MRI		
			Meningkatnya efektivitas pengendalian internal perangkat daerah		Persentase PD yang menerapkan manajemen risiko	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				Terlaksananya evaluasi manajemen risiko	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
				Terlaksananya evaluasi RB	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
			Meningkatnya efektivitas tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Keuangan APIP		Persentase tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Keuangan APIP oleh PD	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
				Terlaksananya audit/evaluasi/reviu laporan keuangan	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan	
					Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal	
		Meningkatnya efektivitas pemantauan tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan auditor eksternal			Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
				Terlaksananya pemantauan tindak lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
				Terlaksananya pemantauan tindak lanjut	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
					Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
					Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
		Meningkatnya integritas dan penurunan potensi korupsi di pemda			Level IEPK		
					Persentase Unit Kerja yang berhasil mendapatkan predikat WBK/WBBM		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
			Meningkatnya efektivitas pencegahan korupsi		Indeks MCP (Monitoring Center for Prevention) Area Intervensi APIP	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				Terlaksananya pemantauan program anti korupsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
			Meningkatnya komitmen PD dalam pembangunan Zona Integritas		Persentase PD yang berhasil diusulkan ke penilaian ZI Nasional	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				Terlaksananya evaluasi Pembangunan Zona Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	
		Meningkatnya kapabilitas APIP			Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		
			Meningkatnya kompetensi dan profesionalitas APIP		Persentase APIP yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai kebutuhan	6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase pelaksanaan PKPT sesuai rencana dan tepat waktu	6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya pemenuhan persyaratan sertifikasi APIP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan dan Quality Assurance (QA) serta pelayanan konsultasi		Survey kepuasan pelaksanaan pengawasan dan QA serta pelayanan konsultasi	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				Terlaksananya	Jumlah Rekomendasi Kebijakan	6.01.03.2.01 - Perumusan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
		Meningkatnya tata kelola Inspektorat		pendampingan pengawasan dan QA	Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	
					Indeks Kepuasan Masyarakat		
					Nilai SAKIP PD		
		Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja			Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti	6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	6.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kinerja dan kompetensi ASN	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	6.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	6.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Tersedianya layanan administrasi umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	6.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terkelolanya data Barang Milik Daerah dalam aplikasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya layanan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH				15.846.121.227,00		15.587.760.477,00		15.496.121.227,00		15.587.760.477,00		15.496.121.227,00		
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10.307.682.837,00		10.049.322.087,00		9.957.682.837,00		10.049.322.087,00		9.957.682.837,00		
Meningkatnya kompetensi dan profesionalitas APIP	Persentase pelaksanaan PKPT sesuai rencana dan tepat waktu (%)	100	100	1.506.067.800,00	100	1.506.067.800,00	100	1.506.067.800,00	100	1.506.067.800,00	100	1.506.067.800,00	6.01.0.00.0.00.01.000 0 - Inspektorat	
	Persentase APIP yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai kebutuhan (%)	0	100		100		100		100		100			
6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.506.067.800,00		1.597.707.050,00		1.506.067.800,00		1.597.707.050,00		1.506.067.800,00		
Terlaksananya pemenuhan persyaratan sertifikasi APIP	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	42	1.506.067.800,00	42	1.506.067.800,00	42	1.506.067.800,00	42	1.506.067.800,00	42	1.506.067.800,00		
6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				1.506.067.800,00		1.506.067.800,00		1.506.067.800,00		1.506.067.800,00		1.506.067.800,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	42	1.506.067.800,00	42	1.506.067.800,00	42	1.506.067.800,00	42	1.506.067.800,00	42	1.506.067.800,00		
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	0	86,5	2.083.132.900,00	87	1.824.772.150,00	87,5	1.733.132.900,00	88	1.824.772.150,00	88	1.733.132.900,00		
6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.506.067.800,00		1.597.707.050,00		1.506.067.800,00		1.597.707.050,00		1.506.067.800,00		
Tersedianya layanan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4	4	0,00	4	91.639.250,00	4	0,00	4	91.639.250,00	4	0,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0		47		0		47		0			
6.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		91.639.250,00		0,00		91.639.250,00		0,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0,00	47	91.639.250,00	0	0,00	47	91.639.250,00	0	0,00		
6.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	4	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00		
6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				360.730.800,00		360.730.800,00		360.730.800,00		360.730.800,00		360.730.800,00		
Tersedianya layanan administrasi umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	33	16	360.730.800,00	16	360.730.800,00	16	360.730.800,00	16	360.730.800,00	16	360.730.800,00		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	10		10		10		10		10			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	27	57		57		57		57		57			
6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				5.488.900,00		5.488.900,00		5.488.900,00		5.488.900,00		5.488.900,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	4	5.488.900,00	4	5.488.900,00	4	5.488.900,00	4	5.488.900,00	4	5.488.900,00		
6.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				6.632.500,00		6.632.500,00		6.632.500,00		6.632.500,00		6.632.500,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	33	16	6.632.500,00	16	6.632.500,00	16	6.632.500,00	16	6.632.500,00	16	6.632.500,00		
6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				17.352.100,00		17.352.100,00		17.352.100,00		17.352.100,00		17.352.100,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	6	17.352.100,00	6	17.352.100,00	6	17.352.100,00	6	17.352.100,00	6	17.352.100,00		
6.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00		
6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				321.257.300,00		321.257.300,00		321.257.300,00		321.257.300,00		321.257.300,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	27	57	321.257.300,00	57	321.257.300,00	57	321.257.300,00	57	321.257.300,00	57	321.257.300,00		
6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.361.643.990,00		911.643.990,00		911.643.990,00		911.643.990,00		911.643.990,00		
Terkelolanya data Barang Milik Daerah dalam aplikasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	6	1.361.643.990,00	6	911.643.990,00	6	911.643.990,00	6	911.643.990,00	6	911.643.990,00		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	2		0		0		0		0			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	14		14		14		14		14			
6.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				600.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	2	600.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
6.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				180.991.230,00		180.991.230,00		180.991.230,00		180.991.230,00		180.991.230,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	6	180.991.230,00	6	180.991.230,00	6	180.991.230,00	6	180.991.230,00	6	180.991.230,00		
6.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				580.652.760,00		730.652.760,00		730.652.760,00		730.652.760,00		730.652.760,00		
6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				103.077.600,00		103.077.600,00		103.077.600,00		103.077.600,00		103.077.600,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya layanan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	9	12	103.077.600,00	12	103.077.600,00	12	103.077.600,00	12	103.077.600,00	12	103.077.600,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	38	12		12		12		12		12			
6.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	38	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00		
6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				98.077.600,00		98.077.600,00		98.077.600,00		98.077.600,00		98.077.600,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	9	12	98.077.600,00	12	98.077.600,00	12	98.077.600,00	12	98.077.600,00	12	98.077.600,00		
6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				257.680.510,00		357.680.510,00		357.680.510,00		357.680.510,00		357.680.510,00		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1	257.680.510,00	1	357.680.510,00	1	357.680.510,00	1	357.680.510,00	1	357.680.510,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7	3		3		3		3		3			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	54	4		4		4		4		4			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
6.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.563.000,00		40.563.000,00		40.563.000,00		40.563.000,00		40.563.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	40.563.000,00	1	40.563.000,00	1	40.563.000,00	1	40.563.000,00	1	40.563.000,00		
6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				142.602.510,00		242.602.510,00		242.602.510,00		242.602.510,00		242.602.510,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7	3	142.602.510,00	3	242.602.510,00	3	242.602.510,00	3	242.602.510,00	3	242.602.510,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
6.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				24.515.000,00		24.515.000,00		24.515.000,00		24.515.000,00		24.515.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	54	4	24.515.000,00	4	24.515.000,00	4	24.515.000,00	4	24.515.000,00	4	24.515.000,00		
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)		100	6.718.482.137,00	100	6.718.482.137,00	100	6.718.482.137,00	100	6.718.482.137,00	100	6.718.482.137,00		
6.01.01.2.01 - Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.040.000,00		8.040.000,00		8.040.000,00		8.040.000,00		8.040.000,00		
Tersedianya dokumen Perencanaan, Panganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	2	8.040.000,00	2	8.040.000,00	2	8.040.000,00	2	8.040.000,00	3	8.040.000,00		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	3	0,00		
6.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
6.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
6.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
6.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
6.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
6.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
6.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				4.040.000,00		4.040.000,00		4.040.000,00		4.040.000,00		4.040.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1	4.040.000,00	1	4.040.000,00	1	4.040.000,00	1	4.040.000,00	1	4.040.000,00		
6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.710.442.137,00		6.710.442.137,00		6.710.442.137,00		6.710.442.137,00		6.710.442.137,00		
Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	4	6.710.442.137,00	4	6.710.442.137,00	4	6.710.442.137,00	4	6.710.442.137,00	4	6.710.442.137,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	9	7		7		7		7		7			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	42	42		47		47		47		47			
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	42	42	6.619.926.137,00	47	6.619.926.137,00	47	6.619.926.137,00	47	6.619.926.137,00	47	6.619.926.137,00		
6.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				90.516.000,00		90.516.000,00		90.516.000,00		90.516.000,00		90.516.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	9	7	90.516.000,00	7	90.516.000,00	7	90.516.000,00	7	90.516.000,00	7	90.516.000,00		
6.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
6.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	4	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00		
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				3.258.076.530,00		3.258.076.530,00		3.258.076.530,00		3.258.076.530,00		3.258.076.530,00		
Meningkatnya efektivitas evaluasi kinerja	Persentase tindakanlajut evaluasi SAKIP (%)	0	62,50	230.000.000,00	65	230.000.000,00	67,50	230.000.000,00	70	230.000.000,00	72,50	230.000.000,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat	
6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal				2.809.699.130,00		2.809.699.130,00		2.809.699.130,00		2.809.699.130,00		2.809.699.130,00		
Terlaksananya pemantauan kinerja pemerintah daerah	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	51	30	230.000.000,00	30	230.000.000,00	30	230.000.000,00	30	230.000.000,00	30	230.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	12	4		4		4		4		4			
6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				123.500.000,00		123.500.000,00		123.500.000,00		123.500.000,00		123.500.000,00		
Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	12	4	123.500.000,00	4	123.500.000,00	4	123.500.000,00	4	123.500.000,00	4	123.500.000,00		
6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja				106.500.000,00		106.500.000,00		106.500.000,00		106.500.000,00		106.500.000,00		
Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	51	30	106.500.000,00	30	106.500.000,00	30	106.500.000,00	30	106.500.000,00	30	106.500.000,00		
Meningkatnya efektivitas pemantauan tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan auditor eksternal	Tindakanlajut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	87,55	87,57	700.563.200,00	87,58	700.563.200,00	87,59	700.563.200,00	87,60	700.563.200,00	87,61	700.563.200,00		
6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal				2.809.699.130,00		2.809.699.130,00		2.809.699.130,00		2.809.699.130,00		2.809.699.130,00		
6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				252.185.800,00		252.185.800,00		252.185.800,00		252.185.800,00		252.185.800,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	34	2	252.185.800,00	2	252.185.800,00	2	252.185.800,00	2	252.185.800,00	2	252.185.800,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				448.377.400,00		448.377.400,00		448.377.400,00		448.377.400,00		448.377.400,00		
Terlaksananya pemantauan tindak lanjut	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	10	10	448.377.400,00	10	448.377.400,00	10	448.377.400,00	10	448.377.400,00	10	448.377.400,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	10	10		10		10		10		10			
6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah				213.123.600,00		213.123.600,00		213.123.600,00		213.123.600,00		213.123.600,00		
Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	10	10	213.123.600,00	10	213.123.600,00	10	213.123.600,00	10	213.123.600,00	10	213.123.600,00		
6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				235.253.800,00		235.253.800,00		235.253.800,00		235.253.800,00		235.253.800,00		
Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	10	10	235.253.800,00	10	235.253.800,00	10	235.253.800,00	10	235.253.800,00	10	235.253.800,00		
Meningkatnya efektivitas tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Keuangan APIP	Persentase tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Keuangan APIP oleh PD (%)	0	70	2.327.513.330,00	85	2.327.513.330,00	90	2.327.513.330,00	95	2.327.513.330,00	100	2.327.513.330,00		
6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal				2.809.699.130,00		2.809.699.130,00		2.809.699.130,00		2.809.699.130,00		2.809.699.130,00		
Terlaksananya audit/evaluasi/reviu laporan keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	14	9	2.327.513.330,00	9	2.327.513.330,00	9	2.327.513.330,00	9	2.327.513.330,00	9	2.327.513.330,00		
	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	10	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	32	30		30		30		30		30			
6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				1.656.184.630,00		1.656.184.630,00		1.656.184.630,00		1.656.184.630,00		1.656.184.630,00		
Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	32	30	1.656.184.630,00	30	1.656.184.630,00	30	1.656.184.630,00	30	1.656.184.630,00	30	1.656.184.630,00		
6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan				397.369.700,00		397.369.700,00		397.369.700,00		397.369.700,00		397.369.700,00		
Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	14	9	397.369.700,00	9	397.369.700,00	9	397.369.700,00	9	397.369.700,00	9	397.369.700,00		
6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal				273.959.000,00		273.959.000,00		273.959.000,00		273.959.000,00		273.959.000,00		
Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	10	2	273.959.000,00	2	273.959.000,00	2	273.959.000,00	2	273.959.000,00	2	273.959.000,00		
Meningkatnya efektivitas pencegahan korupsi	Indeks MCP (Monitoring Center for Prevention) Area Intervensi APIP (Indeks)	86,52	87,5	466.757.500,00	88	466.757.500,00	88	466.757.500,00	89	466.757.500,00	89,5	466.757.500,00	6.01.0.00.0.00.01.000 0 - Inspektorat	
6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi				1.221.304.260,00		1.221.304.260,00		1.221.304.260,00		1.221.304.260,00		1.221.304.260,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya pemantauan program anti korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	1	1	466.757.500,00	1	466.757.500,00	1	466.757.500,00	1	466.757.500,00	1	466.757.500,00		
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	30	30		30		30		30		30			
6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				27.835.000,00		27.835.000,00		27.835.000,00		27.835.000,00		27.835.000,00		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	30	30	27.835.000,00	30	27.835.000,00	30	27.835.000,00	30	27.835.000,00	30	27.835.000,00		
6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				438.922.500,00		438.922.500,00		438.922.500,00		438.922.500,00		438.922.500,00		
Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	1	1	438.922.500,00	1	438.922.500,00	1	438.922.500,00	1	438.922.500,00	1	438.922.500,00		
Meningkatnya efektivitas pengendalian internal perangkat daerah	Persentase PD yang menerapkan manajemen risiko (%)	100	100	992.529.360,00	100	992.529.360,00	100	992.529.360,00	100	992.529.360,00	100	992.529.360,00		
6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				1.059.057.600,00		1.059.057.600,00		1.059.057.600,00		1.059.057.600,00		1.059.057.600,00		
Terlaksananya evaluasi manajemen risiko	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	32	30	266.682.600,00	30	266.682.600,00	30	266.682.600,00	30	266.682.600,00	30	266.682.600,00		
6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan				266.682.600,00		266.682.600,00		266.682.600,00		266.682.600,00		266.682.600,00		
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	32	30	266.682.600,00	30	266.682.600,00	30	266.682.600,00	30	266.682.600,00	30	266.682.600,00		
6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi				1.221.304.260,00		1.221.304.260,00		1.221.304.260,00		1.221.304.260,00		1.221.304.260,00		
Terlaksananya evaluasi RB	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	3	1	725.846.760,00	1	725.846.760,00	1	725.846.760,00	1	725.846.760,00	1	725.846.760,00		
6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				725.846.760,00		725.846.760,00		725.846.760,00		725.846.760,00		725.846.760,00		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	3	1	725.846.760,00	1	725.846.760,00	1	725.846.760,00	1	725.846.760,00	1	725.846.760,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi				1.221.304.260,00		1.221.304.260,00		1.221.304.260,00		1.221.304.260,00		1.221.304.260,00		
Terlaksananya evaluasi Pembangunan Zona Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	1	1	28.700.000,00	1	28.700.000,00	1	28.700.000,00	1	28.700.000,00	1	28.700.000,00		
6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				28.700.000,00		28.700.000,00		28.700.000,00		28.700.000,00		28.700.000,00		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	1	1	28.700.000,00	1	28.700.000,00	1	28.700.000,00	1	28.700.000,00	1	28.700.000,00		
Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengawasan dan Quality Assurance (QA) serta pelayanan konsultasi	Survey kepuasan pelaksanaan pengawasan dan QA serta pelayanan konsultasi (Angka)		86,5	792.375.000,00	87	792.375.000,00	87,5	792.375.000,00	88	792.375.000,00	88,5	792.375.000,00		
6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				1.059.057.600,00		1.059.057.600,00		1.059.057.600,00		1.059.057.600,00		1.059.057.600,00		
Terlaksananya pendampingan pengawasan dan QA	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	4	2	792.375.000,00	2	792.375.000,00	2	792.375.000,00	2	792.375.000,00	2	792.375.000,00		
6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan				792.375.000,00		792.375.000,00		792.375.000,00		792.375.000,00		792.375.000,00		
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	4	2	792.375.000,00	2	792.375.000,00	2	792.375.000,00	2	792.375.000,00	2	792.375.000,00		

Program Prioritas

Meskipun Inspektorat Daerah tidak memiliki program prioritas secara khusus, peran pengawasan tetap diarahkan untuk mendukung pencapaian program prioritas

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas

N O	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
-1	-2	-3	-4	-5
6.01.0.00.0.00.01.0000 – Inspektorat				
1.	NIHIL			

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Inspektorat

Indikator Kinerja Utama

Untuk mengukur capaian dari tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah Kota Tarakan merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai tolok ukur keberhasilan.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3	3	3	3	3	3	3
2	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai	14,72	14,73	15,7	16,74	16,75	16,76	16,77
3	Level MRI	Level	3	3	3	3	3	3	3
4	Level IEPK	Level	2	3	3	3	3	3	3
5	Persentase Unit Kerja yang berhasil mendapatkan predikat WBK/WBBM	%	0	0	6,67	6,67	6,67	13,33	13,33
6	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)
7	Nilai SAKIP PD	Nilai	80,26	84,57	85,6	85,7	85,8	85,9	86
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87,92	87,95	88	88,05	88,10	88.15	88,20

Indikator Kinerja Kunci

Jika Indikator Kinerja Utama (IKU) berfungsi sebagai tolok ukur strategis untuk mengukur keberhasilan Inspektorat dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, maka Indikator Kinerja Kunci (IKK) lebih menekankan pada penilaian capaian kinerja urusan pemerintahan sesuai kewenangan daerah. Adapun Indikator Kinerja Kunci urusan Inspektorat pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	positif	Nilai	3	3	3	3	3	3	3
2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	positif	Level	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)
3	Level MRI	positif	Level	3	3	3	3	3	3	3
4	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	positif	Persentase	87.55	87.56	87.57	87.58	87.59	87.60	87.61

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kota Tarakan Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman sekaligus arah strategis bagi seluruh kegiatan Inspektorat Daerah, serta acuan bagi para pemangku kepentingan dalam mendukung fungsi pengawasan.

Pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang termuat dalam Renstra ini tentu sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya pendanaan yang memadai. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen, semangat, tekad, dan kedisiplinan untuk memprioritaskan setiap program sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia.

Selain sebagai panduan kerja, Renstra ini juga berfungsi sebagai tolok ukur evaluasi tahunan terhadap kinerja Inspektorat Daerah Kota Tarakan dalam melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, Renstra ini diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

4. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tarakan Tahun 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan (Renstra DISDIK) Kota Tarakan Tahun 2025–2029. Berdasarkan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada tahun 2029. Rencana strategis ini memuat arah kebijakan, tujuan, strategi, sasaran, program dan indikator kinerja tahunan. Ruang lingkup Rencana Strategis Dinas Pendidikan mencakup semua kegiatan Dinas yang dibiayai dari APBD Kota Tarakan dan disusun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tarakan ini sejalan dengan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan aturan pelaksanaannya, dimana Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, pengoptimalan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program Pemerintah Kota Tarakan, Dinas Pendidikan Kota Tarakan sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan dalam menyusun Rencana Strategis perangkat daerah memfokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Adapun program yang disusun berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan memperhatikan aturan yang berlaku, penyusunan Rencana Strategis dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, sesuai pendekatan yang dimaksud, maka Rencana Strategis ini merupakan manifestasi dari berbagai pikiran segenap pemangku kepentingan. Proses penyusunan Rencana Strategis dilakukan melalui Forum Group Discussion (FGD) dan koordinasi dengan bidang – bidang dan pihak yang terkait.

1.1.1 Pengertian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra-PD memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang hendak dilakukan. Tujuan, strategi dan kebijakan sebagaimana dimaksud di atas, dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Renstra-PD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Tarakan Tahun 2025-2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025- 2029.

1.1.2 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Renstra-PD Tahun 2025-2029 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2029. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dimana tahapan dan tata cara penyusunan Renstra-PD ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam Permendagri 54 Tahun 2010 Pasal 11 Ayat (1) bahwa program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra-PD dan Renja-PD disusun berdasarkan:

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
- c. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

1.1.3 Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD

Renstra-PD Tahun 2025 - 2029 merupakan penjabaran dari RPD Kota Tarakan periode yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra-PD. Pada lingkup pemerintahan Rencana Strategis (Renstra) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Adapun gambaran tentang hubungan antara Rencana Strategis dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tarakan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Instruksi Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
21. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tarakan;
22. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
23. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2045;
25. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tarakan Tahun 2025–2029 *dimaksudkan* sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan bidang pendidikan, guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, khususnya di sektor pendidikan.

Tujuan:

1. Memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan pendidikan di Kota Tarakan selama lima tahun (2025–2029), agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
2. Menetapkan program dan kegiatan prioritas beserta indikator kinerja utama (IKU) Dinas Pendidikan yang terukur dan realistis.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan program dan anggaran pendidikan agar lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
4. Menjadi dasar evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pendidikan, serta sebagai alat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kepada publik.
5. Mendukung terwujudnya sistem pendidikan yang inklusif, bermutu, dan berdaya saing, sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Tarakan dan tantangan pembangunan nasional.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tarakan Tahun 2025-2029, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tarakan Tahun 2025-2029.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pendidikan Kota Tarakan

Bab ini memuat Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Tarakan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta memuat Permasalahan dan Isu Strategis yang akan dihadapi Dinas Pendidikan Kota Tarakan dalam periode Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat Rumusan Pernyataan Tujuan dan Sasaran serta memuat Rumusan Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Kota Tarakan.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Dinas Pendidikan Kota Tarakan

Bab ini memuat Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun disertai pendanaannya Kinerja Penyelenggaraan Dinas Pendidikan Kota Tarakan yang diwakili oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai.

BAB V Penutup

Bab ini memuat hal-hal yang perlu untuk dilaksanakan dan diperhatikan untuk pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tarakan Tahun 2025-2029 secara terpadu dan berkesinambungan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Tarakan

Dinas Pendidikan Kota Tarakan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Tarakan merupakan Perangkat Daerah Kota Tarakan sebagai unsur Pelaksana Teknis di bidang pendidikan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Tarakan. Dinas Pendidikan Kota Tarakan berkedudukan di jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan.

2.1.1. Tugas dan Fungsi

Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud maka Dinas Pendidikan Kota Tarakan memiliki Fungsi adalah sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan non formal, pendidikan dasar, serta pembinaan ketenagaan dan sarana prasarana yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan non formal, pendidikan dasar, serta pembinaan ketenagaan dan sarana prasarana yang menjadi kewenangan Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan non formal, pendidikan dasar, serta pembinaan ketenagaan dan sarana prasarana yang menjadi kewenangan Daerah.
- d. pelaksanaan administrasi dinas
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan

Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
 - a) Sub Bagian Umum
 - b) Sub Bagian Kepegawaian
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
 - a) Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
 - b) Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal
- d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar;
 - a) Seksi Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar
 - b) Seksi Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- e. Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Sarana Prasarana;
 - a) Seksi Pembinaan Ketenagaan
 - b) Seksi Pembinaan Sarana Prasarana
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

Sekretariat

- (1) Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- Koordinasi kegiatan Dinas;
- Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas;
- Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;
- Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas;
- Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada Dinas;
- Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Dinas;
- Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Dinas; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri atas :

a) Sub Bagian Umum;

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam pengkoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan sebagian fungsi Sekretariat dalam:

- ❖ Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;
- ❖ Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada Dinas;
- ❖ Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Dinas;
- ❖ Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
- ❖ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

b) Sub Bagian Kepegawaian;

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam pengkoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas, dan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas.

Sub Bagian Kepegawaian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan sebagian fungsi Sekretariat dalam :

- ❖ Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian;
- ❖ Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas; dan
- ❖ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

c) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, dan pengkoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan sebagian fungsi Sekretariat dalam :

- ❖ Koordinasi kegiatan Dinas;
- ❖ Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas;
- ❖ Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
- ❖ Penyiapan bahan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Dinas; dan
- ❖ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal sesuai dengan kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik, dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- Pelaksanaan penetapan kurikulum muatan lokal, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- Pelaksanaan penerbitan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- Pelaksanaan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah;
- Penyusunan bahan dan pelaksanaan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, terdiri atas :

a) Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini;

Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana merupakan unsur pelaksana di bidang pendidikan anak usia dini yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal. Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini.

Seksi Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- ❖ Perumusan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini;
- ❖ Pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik, dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini;
- ❖ Penyiapan bahan dan pelaksanaan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini;
- ❖ Penyiapan bahan dan pelaksanaan penerbitan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban izin pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- ❖ Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah;
- ❖ Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini;
- ❖ Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini;
- ❖ Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini; dan
- ❖ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

b) Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal.

Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal merupakan unsur pelaksana di bidang pendidikan non formal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal. Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pendidikan non formal.

Seksi Pembinaan Pendidikan Non Formal dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- ❖ Perumusan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan non formal;
- ❖ Pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik, dan pembangunan karakter pendidikan non formal;
- ❖ Penyiapan bahan dan pelaksanaan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan non formal;
- ❖ Penyiapan bahan dan pelaksanaan penerbitan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban izin pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- ❖ Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah;
- ❖ Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan non formal;
- ❖ Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan non formal;
- ❖ Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan non formal; dan
- ❖ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pembinaan pendidikan dasar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pembinaan pendidikan dasar sesuai dengan kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan dasar;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik, dan pembangunan karakter pendidikan dasar;
- Pelaksanaan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar;
- Pelaksanaan penerbitan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- Pelaksanaan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah;
- Penyusunan bahan dan pelaksanaan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan dasar;
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter dasar;

- Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan dasar; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri atas :

a) Seksi Pembinaan Sekolah Dasar;

Seksi Pembinaan Sekolah Dasar merupakan unsur pelaksana di bidang pendidikan dasar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar. Seksi Pembinaan Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pendidikan dasar.

Seksi Pembinaan Sekolah Dasar dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- ❖ Perumusan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan sekolah dasar;
- ❖ Pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik, dan pembangunan karakter pendidikan sekolah dasar;
- ❖ Penyiapan bahan dan pelaksanaan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan sekolah dasar;
- ❖ Penyiapan bahan dan pelaksanaan penerbitan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban izin pendidikan sekolah dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- ❖ Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah;
- ❖ Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan sekolah dasar;
- ❖ Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan sekolah dasar;
- ❖ Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan sekolah dasar; dan
- ❖ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.

b) Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama merupakan unsur pelaksana di bidang pendidikan dasar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pembinaan Sekolah Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan seksi pembinaan sekolah menengah pertama.

Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- ❖ Perumusan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan sekolah menengah pertama;
- ❖ Pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik, dan pembangunan karakter pendidikan sekolah menengah pertama;
- ❖ Penyiapan bahan dan pelaksanaan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan sekolah menengah pertama;
- ❖ Penyiapan bahan dan pelaksanaan penerbitan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban izin pendidikan sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- ❖ Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah;
- ❖ Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan sekolah menengah pertama;
- ❖ Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan sekolah menengah pertama;
- ❖ Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan sekolah menengah pertama;
- ❖ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.

Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Sarana Prasarana

- (1) Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Sarana Prasarana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pembinaan ketenagaan dan sarana prasarana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Sarana Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ketenagaan dan sarana prasarana sesuai dengan kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ketenagaan dan sarana prasarana;
- Penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan ketenagaan, penyusunan bahan dan pelaksanaan rencana kebutuhan bidang ketenagaan dan sarana prasarana;
- Penyusunan bahan dan pelaksanaan pembinaan ketenagaan dan sarana prasarana;
- Pelaksanaan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah;
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan ketenagaan dan sarana prasarana;

- Pelaporan di bidang pembinaan ketenagaan dan sarana prasarana; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Sarana Prasarana, terdiri atas :

a) Seksi Pembinaan Ketenagaan;

Seksi Pembinaan Ketenagaan merupakan unsur pelaksana di bidang ketenagaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketenagaan dan Sarana Prasarana. Seksi Pembinaan Ketenagaan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan seksi pembinaan ketenagaan.

Seksi Pembinaan Ketenagaan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- ❖ Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal serta pendidikan dasar;
- ❖ Penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal serta pendidikan dasar;
- ❖ Penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal serta pendidikan dasar;
- ❖ Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal serta pendidikan dasar;
- ❖ Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan;
- ❖ Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal serta pendidikan dasar;
- ❖ Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal serta pendidikan dasar; dan
- ❖ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketenagaan dan Sarana Prasarana.

b) Seksi Pembinaan Sarana Prasarana.

Seksi Pembinaan Sarana dan Prasarana merupakan unsur pelaksana di bidang ketenagaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketenagaan dan Sarana Prasarana. Seksi Pembinaan Sarana Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Pembinaan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan Seksi Pembinaan Sarana Prasarana.

Seksi Pembinaan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi :

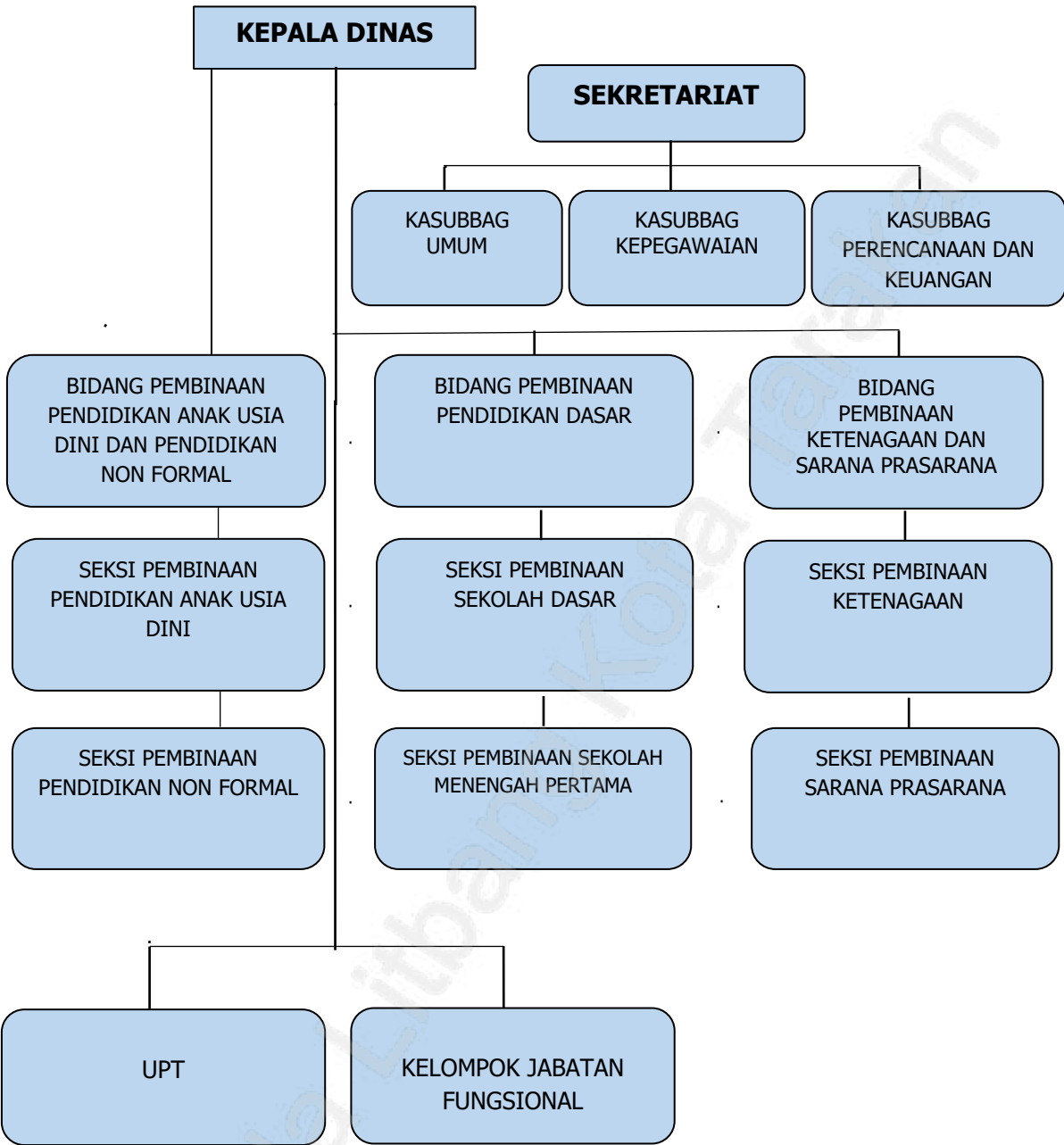
- ❖ Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pendidikan dasar serta ;

- ❖ Penyusunan bahan kebijakan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pendidikan dasar serta ;
- ❖ Penyusunan bahan rencana kebutuhan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pendidikan dasar serta ;
- ❖ Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pendidikan dasar serta ;
- ❖ Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pendidikan dasar serta ;
- ❖ Pelaporan di bidang pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pendidikan dasar serta ; dan
- ❖ Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketenagaan dan Sarana Prasarana.

2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Tarakan yang mencerminkan upaya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang maksimal, sehingga disusun struktur organisasi yang terdiri dari Seorang Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang, Unit Pelaksana Teknis, dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan Gambar sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Dinas Pendidikan dan Kota Tarakan



2.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan

Sumber daya Dinas Pendidikan terdiri dari sumber daya manusia (pegawai) dan sumber daya asset. Masing-masing sumber daya tersebut dijelaskan melalui uraian di bawah ini:

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya aparatur pada Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Tarakan sebagaimana diatur dengan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas tercatat sejumlah 1.586 pegawai yang terdiri dari 188 orang PNS golongan IV, 639 orang PNS golongan III, 56 orang PNS golongan II, 1 orang PNS golongan I dan 702 orang PPPK golongan IX dengan perincian sebagai berikut: selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:

TABEL 2.1
Komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan
Menurut Kelompok Umur

No	Unit Kerja	Usia (Tahun)							Jumlah
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	≤50	
1	Sekretariat	0	0	0	1	4	5	6	16
2	Bidang Pendidikan Dasar	0	0	0	0	3	3	1	7
3	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nor Formal	0	0	0	0	0	3	4	7
4	Bidang Ketenagaaan dan Sarana Prasarana	0	0	0	1	5	1	1	8
5	Unit Pelaksana Teknis SKB	0	0	0	0	2	1	1	4
6	Kelompok Jabatan Fungsional	0	0	0	0	0	1	21	22
7	Satuan Pendidikan	21	227	185	225	270	192	402	1522
Total		21	227	185	227	284	206	436	1586

Sumber data : Umum dan Kepegawaian

TABEL 2.2
Komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan
Menurut Golongan

No	Unit Kerja	Golongan					Jumlah
		I	II	III	IV	IX	
1	Sekretariat	0	2	12	2	0	16
2	Bidang Pendidikan Dasar	0	0	7	0	0	7
3	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nor Formal	0	1	5	1	0	7
4	Bidang Ketenagaaan dan Sarana Prasarana	0	0	8	0	0	8
5	Unit Pelaksana Teknis SKB	0	0	2	2	0	4
6	Kelompok Jabatan Fungsional	0	0	6	16	0	22
7	Satuan Pendidikan	1	53	599	167	702	1522
Total		1	56	639	188	702	1586

Sumber data : Umum dan Kepegawaian

TABEL 2.3
Komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan
Menurut Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan							Jumlah
		SD	SMP	SMA	D1-D3	S1	S2	S3	
1	Sekretariat	0	1	2	2	8	3	0	16
2	Bidang Pendidikan Dasar	0	0	0	0	5	2	0	7
3	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nor Formal	0	0	2	1	2	2	0	7
4	Bidang Ketenagaaan dan Sarana Prasarana	0	0	1	1	4	2	0	8
5	Unit Pelaksana Teknis SKB	0	0	0	0	3	1	0	4
6	Kelompok Jabatan Fungsional	0	0	0	0	14	8	0	22
7	Satuan Pendidikan	0	0	51	8	1435	28	0	1522
Total		0	1	56	12	1471	46	0	1586

Sumber data : Umum dan Kepegawaian

Berdasarkan data tersebut diatas, struktur pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tarakan cukup baik, karena sebagian besar berpendidikan S1 sebanyak 1.471 orang, tingkat pendidikan S-2 sebanyak 46 orang, D-3 sebanyak 12 orang, SMA sebanyak 56 orang dan SMP sebanyak 1 orang.

TABEL 2.4
Komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan
Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	9
5	Kepala Unit Pelaksana Teknis SKB	1
6	Kelompok Jabatan Fungsional	24
7	Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Negeri	65
Total		104

Sumber data : Umum dan Kepegawaian

TABEL 2.5
Komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan
Menurut Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sekretariat	8	8	16
2	Bidang Pendidikan Dasar	4	3	7
3	Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nor Formal	5	2	7
4	Bidang Ketenagaaan dan Sarana Prasarana	4	4	8
5	Unit Pelaksana Teknis SKB	2	2	4
6	Kelompok Jabatan Fungsional	13	9	22
7	Satuan Pendidikan	440	1082	1522
Total		476	1110	1586

Sumber data : Umum dan Kepegawaian

TABEL 2.6
Komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan
Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II	1		1
2	Eselon III	3	1	4
3	Eselon IV	6	3	10
Total		10	5	15

Sumber data : Umum dan Kepegawaian

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sumber daya aset prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Tarakan yang tersebar pada kantor induk Dinas Pendidikan Kota Tarakan, SKB dan Sekolah. Adapun rincian data aset Dinas Pendidikan Kota Tarakan adalah sebagai berikut.Sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki Dinas Pendidikan berdasarkan kondisi akhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebagaimana tabel berikut:

TABEL 2.7
Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan

No	Jenis Aset	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1	Alat-alat Angkutan				
a	Kendaraan Roda 6	4 Unit	4	0	
b	Kendaraan Roda 4	6 Unit	4	2	Kepala Dinas Sekretaris Kabid Dikdas Koordinator Pengawas
c	Kendaraan Roda 2	170 Unit	109	61	Disdik 27 Unit Sekolah 61 Unit Pengawas 21 Unit
2	Tanah Kantor Pemerintah	1 Bidang	1	0	
6	Gedung Dinas Pendidikan	1 Gedung	1	0	
7	Tanah Sekolah	65 Lahan	65	0	Bersertifikat 54 Lahan Dokumen Lain 11 Lahan
8	Gedung Sekolah	65 Gedung	65	0	Permanen 34 Gedung SD, 14 Gedung SMP dan 4 Gedung PAUD Belum Permanen 11 Gedung SD Di Klaim Pihak lain 6 Gedung SD
9	Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga				
	A.C. Split	40	-	-	-
	A.C. Window	3	-	-	-
	Air Conditioning (AC)	1	-	-	-
	Alat Hiasan	27	-	-	-
	Alat Kantor Lainnya Lain-Lain	15	-	-	-
	Alat Pemadam/Portable	4	-	-	-
	Alat Pendingin Lain-Lain	6	-	-	-
	Alat Penghancur Kertas	2	-	-	-
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home use) Lain-Lain	14	-	-	-
	Amplifier	1	-	-	-
	Audio Tape Reel Recorder	2	-	-	-
	Audio/Vidio Comunication	1	-	-	-
	Brandkas	3	-	-	-
	Bus (Penumpang 30 Orang Keatas)	4	-	-	-
	Cable	1	-	-	-
	Camera Electronic	1	-	-	-
	Camera film	5	-	-	-
	CPU (Peralatan Mainframe)	4	-	-	-
	CPU (Peralatan Mini Komputer)	16	-	-	-
	CPU (Peralatan Personal Komputer)	27	-	-	-
	Dispenser	10	-	-	-
	Display	6	-	-	-
	Drum Stainless Steel	1	-	-	-
	Facsimile	2	-	-	-
	Filing Cabinet Besi	17	-	-	-
	Handy Cam	1	-	-	-
	Handy Talky (HT)	12	-	-	-

No	Jenis Aset	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
	Hard Disk	5	-	-	-
	Jam Mekanis	1	-	-	-
	Kasur/Spring Bed	1	-	-	-
	Komputer Unit Lainnya	16	-	-	-
	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	-	-	-
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	8	-	-	-
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	13	-	-	-
	Kursi Kerja Pejabat Lain- Lain	1	-	-	-
	Kursi Putar	5	-	-	-
	Kursi Rapat	5	-	-	-
	Kursi Tamu	27	-	-	-
	Lain Lain Alat Peraga Olah Raga	2	-	-	-
	lain-lain Alat Dapur	2	-	-	-
	Lain-lain Alat Komunikasi Telephone	12	-	-	-
	Lain-Lain Alat Laboratorium lain (Alat Tes HbA1C)	1	-	-	-
	Lain-lain Alat Penyimpanan	1	-	-	-
	Lain-lain Alat Peraga Bidang Studi IPA Dasar	1	-	-	-
	Lain-lain Komputer Jaringan	2	-	-	-
	Lain-lain Meja Kerja Pejabat	36	-	-	-
	Lain-lain Meja Rapat	1	-	-	-
	Lain-Lain Peralatan Olahraga Lainnya	1	-	-	-
	Lap Top	41	-	-	-
	LAPTOP	2	-	-	-
	LAPTOP ASUS	2	-	-	-
	Layar Film/Projector	3	-	-	-
	Lemari Besi/Metal	4	-	-	-
	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	14	-	-	-
	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	1	-	-	-
	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	1	-	-	-
	Lemari Es	1	-	-	-
	Lemari Kayu	15	-	-	-
	Lemari Makan	1	-	-	-
	Lemari Penyimpan	3	-	-	-
	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	-	-	-
	Meja Kerja Pejabat Eselon III	10	-	-	-
	Meja Komputer	6	-	-	-
	Meja Panjang	6	-	-	-
	Meja Podium	2	-	-	-
	Meja Rapat	44	-	-	-
	Meja Resepsionis	1	-	-	-
	Meja Telepon	2	-	-	-
	Mesin Absensi	5	-	-	-
	Mesin Ketik Lain-Lain	2	-	-	-

No	Jenis Aset	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
	Mesin Ketik Listrik Potable (11-13 Inchi)	1	-	-	-
	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	2	-	-	-
	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	8	-	-	-
	Mesin Pemotong Rumput	1	-	-	-
	Mesin Penghitung Uang	1	-	-	-
	Mesin Scanning	1	-	-	-
	Mic Conference	30	-	-	-
	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2	-	-	-
	Monitor	65	-	-	-
	Note Book	39	-	-	-
	P.C Unit	5	-	-	-
	Papan Nama Instansi	1	-	-	-
	Papan Pengumuman	5	-	-	-
	Papan Tulis	1	-	-	-
	Papan Visual/Papan Nama	6	-	-	-
	PENGADAAN PERALATAN KANTOR (PRINTER)	2	-	-	-
	Peralatan Jaringan Lain-Lain	2	-	-	-
	Peralatan Komputer Lainnya Lain-lain	2	-	-	-
	Peralatan Personal Komputer Lain-Lain	2	-	-	-
	Pesawat Telephone	1	-	-	-
	Pisau Lempar	3	-	-	-
	Pompa Air	1	-	-	-
	Pompa Lain-Lain	1	-	-	-
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	51	-	-	-
	PRINTER EPSON	2	-	-	-
	PRINTER EPSON	2	-	-	-
	PRINTER EPSON L3210	2	-	-	-
	Rak Peralatan	1	-	-	-
	Rak-Rak Penyimpan	1	-	-	-
	RAM DAN SSD	1	-	-	-
	Recorder Display Lain-Lain	4	-	-	-
	Rice Cooker (Alat Dapur)	4	-	-	-
	Rotary Filling	5	-	-	-
	Router	6	-	-	-
	Scanner (Assembly/counting System)	1	-	-	-
	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	6	-	-	-
	Server	5	-	-	-
	Sofa	1	-	-	-
	Sound System	5	-	-	-
	Station Wagon	6	-	-	-
	Switch Rak	1	-	-	-
	Tangga Aluminium	1	-	-	-
	Tele Recorder	2	-	-	-
	Telecine	1	-	-	-
	Televisi	10	-	-	-

No	Jenis Aset	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
	Tenda	149	-	-	-
	Uninterruptible Power Supply (UPS)	32	-	-	-
	Uninterrupted Power Supply (UPS)	1	-	-	-
	Unit Power Supply	13	-	-	-
	Unit Tranceiver Ssb Transportable	1	-	-	-
	White Board	1	-	-	-
	Wireless	4	-	-	-

Sumber data : Umum dan Kepegawaian

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja didefinisikan sebagai ukuran keberhasilan (baik kuantitatif maupun kualitatif) yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah sasaran telah tercapai. Karena itu, pencapaian sasaran Dinas Pendidikan Kota Tarakan dapat dilakukan dengan menilai seberapa jauh indikator kinerja utama (IKU) sasaran Dinas Pendidikan Kota Tarakan yang telah tercapai.

Pendidikan menempati posisi strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermartabat. Pendidikan pada hakekatnya bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Sejalan dengan tujuan tersebut Dinas Pendidikan Kota Tarakan bertekad mewujudkan Profil Pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif yang dibangun melalui pendidikan formal dan pendidikan non formal yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Berikut kinerja Dinas Pendidikan Kota Tarakan.

2.3.1 Aspek Pelayanan Umum

➤ Angka Partisipasi Sekolah 5-6 Tahun

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Sehingga semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah (APS) semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan.

Selain sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan, Angka Partisipasi Sekolah (APS) juga merupakan Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan.

Berdasarkan tabel 2.8 dapat diketahui bahwa capaian kinerja Angka Partisipasi Sekolah (5-6) tahun untuk tahun 2024 mengalami peningkatan dengan capaian 85.58% kategori tinggi (76%-90%). Di bandingkan dengan 2 tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dan tahun 2023 Angka Partisipasi Sekolah (5-6) tahun yang mengalami penurunan. Selanjutnya untuk capaian kinerja tahun 2024 yang diukur melalui target akhir RENSTRA Perubahan (2019-2024) maka capaian kinerja yang dicapai 80,45% dengan kategori tinggi (76%-90%). Realisasi Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 tahun Kota Tarakan selama 5 tahun terakhir, dari keseluruhan capaian masih terlihat sangat kecil, hal tersebut dapat dimaknai bahwa partisipasi siswa yang bersekolah pada usia 5-6 tahun masih sangat kurang. Sebagai gambaran bisa dilihat pada realisasi capaian di tahun 2024 adalah 58,92% sehingga bisa diperkirakan ada sekitar 41,04% anak usia 5-6 tahun yang tidak berpartisipasi dalam pendidikan. Hal ini disebabkan kurangnya keinginan orang tua untuk menyekolahkan anaknya di usia 5-6 tahun karena keterbatasan ekonomi. Namun selain hal tersebut bisa juga disebabkan oleh karena peserta didik pada usia 5-6 tahun bersekolah di sekolah yang belum terdaftar di DAPODIK sehingga tidak terbaca di sistem DAPODIK.

Tabel 2.8
Capaian Indikator Angka Partisipasi Sekolah (5-6) Tahun Tahun 2024

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2020 (%)	Realisasi Tahun 2021 (%)	Realisasi Tahun 2022 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	2024			Target Akhir Renstra (2024) (%)	Capaian s/d Th. 2024 thd Target Renstra (%)
						Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
Angka Partisipasi Sekolah (5-6) Tahun	%	91.75	85.10	66.76	69.39	68.85	58.92	85.58	68.85	80.45

Sumber Data : LKIP tahun 2020-2024

➤ Angka Partisipasi Sekolah 7-12 Tahun

Berdasarkan tabel 2.9 dapat diketahui bahwa capaian kinerja Angka Partisipasi Sekolah (7-12) tahun untuk tahun 2024 mengalami peningkatan dengan capaian 99,62% kategori sangat tinggi (90%-100%). Di bandingkan dengan 2 tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dan tahun 2023 Angka Partisipasi Sekolah (7-12) tahun yang mengalami penurunan. Selanjutnya untuk capaian kinerja tahun 2024 yang diukur melalui target akhir RENSTRA Perubahan (2019-2024) maka capaian kinerja yang dicapai 99,62% dengan kategori sangat tinggi (90%-100%).

Realisasi Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 tahun Kota Tarakan selama 5 tahun terakhir, dari keseluruhan capaian juga terlihat bahwa Angka Partisipasi Sekolah 7-12 tahun sudah sangat tinggi, sehingga dapat dimaknai bahwa pada rata-rata anak usia 7-12 tahun telah mengenyam pendidikan. Sebagai gambaran bisa dilihat pada realisasi capaian di tahun 2024 adalah 99,62% sehingga bisa diperkirakan ada sekitar 0,38% anak usia 7-12 tahun yang tidak berpartisipasi dalam pendidikan. Hal ini kemungkinan disebabkan keinginan orang tua untuk menyekolahkan anaknya di Pondok Pesantren, Sekolah di Luar Daerah atau bisa karena bersekolah di sekolah yang belum terdaftar di DAPODIK sehingga tidak terbaca di sistem DAPODIK.

Tabel 2.9

Capaian Indikator Angka Partisipasi Sekolah (7-12) Tahun Tahun 2024

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2020 (%)	Realisasi Tahun 2021 (%)	Realisasi Tahun 2022 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	2024			Target Akhir Renstra (2024) (%)	Capaian s/d Th. 2024 thd Target Renstra (%)
						Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
Angka Partisipasi Sekolah (7-12) Tahun	%	98.67	89.65	95.54	87.74	100	99.62	99.62	100	99.62

Sumber data : LKIP tahun 2020 s/d 2024

➤ **Angka Partisipasi Sekolah 13-15 Tahun**
Berdasarkan tabel 2.10 dapat diketahui bahwa capaian kinerja Angka Partisipasi Sekolah (13-15) tahun untuk tahun 2024 mengalami peningkatan dengan capaian 98,68% kategori sangat tinggi (90%-100%). Di bandingkan dengan 2 tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dan tahun 2022 Angka Partisipasi Sekolah (13-15) tahun yang mengalami penurunan. Selanjutnya untuk capaian kinerja tahun 2024 yang diukur melalui target akhir RENSTRA Perubahan (2019-2024) maka capaian kinerja yang dicapai 98,68% dengan kategori sangat tinggi (90%-100%).

Realisasi Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun Kota Tarakan selama 5 tahun terakhir, dari keseluruhan capaian terlihat bahwa Angka Partisipasi Sekolah 13-15 tahun sudah sangat tinggi, sehingga dapat dimaknai bahwa pada rata-rata anak usia 13-15 tahun telah mengenyam pendidikan. Sebagai gambaran bisa dilihat pada realisasi capaian di tahun 2024 adalah 98,68% sehingga bisa diperkirakan ada sekitar 1,32% anak usia 13-15 tahun yang tidak berpartisipasi dalam pendidikan. Hal ini bisa disebabkan karena keinginan orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di Pondok Pesantren, Sekolah di Luar Daerah atau bisa karena bersekolah di sekolah yang belum terdaftar di DAPODIK sehingga tidak terbaca di sistem DAPODIK.

Tabel 2.10
Capaian Indikator Angka Partisipasi Sekolah (13-15) Tahun Tahun 2024

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2020 (%)	Realisasi Tahun 2021 (%)	Realisasi Tahun 2022 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	2024			Target Akhir Renstra (2024) (%)	Capaian s/d Th. 2024 thd Target Renstra (%)
						Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
Angka Partisipasi Sekolah (13-15) Tahun	%	89.23	89.48	73.59	81.45	100	98,68	98,68	100	98,68

Sumber data : LKIP tahun 2020 s/d 2024

➤ **APS 7-18 Tahun Kesetaraan**
Berdasarkan tabel 2.11 dapat diketahui bahwa capaian kinerja Angka Partisipasi Sekolah (7-18) tahun Kesetaraan untuk tahun 2024 capaian masih 49,24% kategori Sangat Rendah (0%-50%). Perbandingan Untuk Angka Partisipasi Sekolah (7-18) Tahun Kesetaraan belum dapat dibandingkan karena Indikator tersebut baru dimasukkan ke dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan di Tahun 2024.

Realisasi Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 tahun Kesetaraan Kota Tarakan adalah 49,24% masih sangat rendah dan dapat diperkirakan ada sekitar 50,76% anak usia 7-18 tahun yang putus

sekolah atau tidak melanjutkan sekolah yang tidak berpartisipasi dalam pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C), hal tersebut dapat dimaknai bahwa rata-rata anak usia 7-18 tahun yang tidak mengenyam pendidikan (putus sekolah atau tidak melanjutkan) yang tidak bersekolah di pendidikan non formal bisa dikarenakan ada beberapa hal, diantaranya 1) siswa masih belum terdata dengan baik, 2) faktor ekonomi, 3) faktor sosial dan 4) faktor pendidikan.

Tabel 2.11
Capaian Indikator Angka Partisipasi Sekolah (7-18) Tahun Kesetaraan Tahun 2024

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2020 (%)	Realisasi Tahun 2021 (%)	Realisasi Tahun 2022 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	2024			Target Akhir Renstra (2024) (%)	Capaian s/d Th. 2024 thd Target Renstra (%)
						Targe t (%)	Realisasi (%)	Capaia n (%)		
Angka Partisipasi Sekolah (7-18) Tahun Kesetaraan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	100	49,24	49,24	100	49,24

Sumber data : LKIP tahun 2020 s/d 2024

- **Angka Partisipasi Kasar PAUD**
Berdasarkan tabel 2.12 dapat diketahui bahwa capaian kinerja Angka Partisipasi Kasar PAUD untuk tahun 2024 mengalami peningkatan dengan capaian 75,18% kategori Sedang (66%-75%). Di dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dan tahun 2021 Angka Partisipasi Kasar PAUD yang mengalami penurunan. Selanjutnya untuk capaian kinerja tahun 2024 yang diukur melalui target akhir RENSTRA Perubahan (2019-2024) maka capaian kinerja yang dicapai 74,66% dengan kategori Sedang (66%-75%).

Realisasi Angka Partisipasi Kasar PAUD Kota Tarakan selama 5 tahun terakhir terlihat bahwa Angka Partisipasi Kasar PAUD masih dalam kategori Rendah, sehingga dapat dimaknai bahwa pada usia PAUD masih banyak yang belum mengenyam pendidikan di PAUD. Sebagai gambaran bisa dilihat pada realisasi capaian di tahun 2024 adalah 55,27% sehingga bisa diperkirakan ada sekitar 44,73% anak usia PAUD yang tidak berpartisipasi dalam pendidikan PAUD, hal ini bisa disebabkan karena kurangnya minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya di jenjang Pendidikan PAUD.

Tabel 2.12
Capaian Indikator Angka Kasar PAUD Tahun 2024

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2020 (%)	Realisasi Tahun 2021 (%)	Realisasi Tahun 2022 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	2024			Target Akhir Renstra (2024) (%)	Capaian s/d Th. 2024 thd Target Renstra (%)
						Targe t (%)	Realisasi (%)	Capaia n (%)		
Angka Partisipasi Kasar Paud	%	72,79	63,51	75,62	70,10	73,52	55,27	75,18	74,02	74,66

Sumber data : LKIP tahun 2020 s/d 2024

- **Angka Partisipasi Kasar SD/MI**
Berdasarkan tabel 2.13 dapat diketahui bahwa capaian kinerja Angka Partisipasi Kasar SD/MI untuk tahun 2024 mengalami

peningkatan dengan capaian 104,06% kategori Sangat Tinggi (90%-100%). Di bandingkan dengan 2 tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dan tahun 2022 Angka Partisipasi Kasar SD/MI yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Selanjutnya untuk capaian kinerja tahun 2024 yang diukur melalui target akhir RENSTRA Perubahan (2019-2024) maka capaian kinerja yang dicapai juga telah melebihi target sebesar 104,06% kategori Sangat Tinggi (90%-100%).

Realisasi Angka Partisipasi Kasar SD/MI Kota Tarakan selama 5 tahun terakhir terlihat bahwa Angka Partisipasi Kasar SD/MI masuk dalam kategori Sangat Tinggi karena telah mencapai target, sehingga dapat dimaknai bahwa pada jenjang pendidikan SD/MI siswa yang terdaftar terdapat siswa yang usianya masih di bawah 7 tahun dan di atas 12 tahun sehingga angka partisipasi kasar jenjang SD/MI bisa melebihi target 100%. Sebagai gambaran bisa dilihat pada realisasi capaian di tahun 2024 adalah 104,06% sehingga bisa diperkirakan ada sekitar 4,06% anak usia di bawah 7 tahun dan di atas 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan SD/MI.

Tabel 2.13
Capaian Indikator Angka Partisipasi Kasar SD/MI Tahun 2024

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2020 (%)	Realisasi Tahun 2021 (%)	Realisasi Tahun 2022 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	2024			Target Akhir Renstra (2024) (%)	Capaian s/d Th. 2024 thd Target Renstra (%)
						Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
Angka Partisipasi Kasar SD/MI	%	94,58	87,36	84,68	81,96	100	104,06	104,06	100	104,06

Sumber data : LKIP tahun 2020 s/d 2024

- **Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs**
Berdasarkan tabel 2.14 dapat diketahui bahwa capaian kinerja Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs untuk tahun 2024 mengalami peningkatan dengan capaian 109,92% kategori Sangat Tinggi (90%-100%). Di bandingkan dengan 2 tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dan tahun 2021 Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Selanjutnya untuk capaian kinerja tahun 2024 yang diukur melalui target akhir RENSTRA Perubahan (2019-2024) maka capaian kinerja yang dicapai juga telah melebihi target sebesar 109,92% kategori Sangat Tinggi (90%-100%).

Realisasi Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Kota Tarakan selama 5 tahun terakhir terlihat bahwa Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs masuk dalam kategori Sangat Tinggi karena telah mencapai target, sehingga dapat dimaknai bahwa pada jenjang pendidikan SMP/MTs siswa yang terdaftar terdapat siswa yang usianya masih di bawah 13 tahun dan di atas 15 tahun sehingga angka partisipasi kasar jenjang SMP/MTs bisa melebihi target 100%. Sebagai gambaran bisa dilihat pada realisasi capaian di tahun 2024 adalah 109,92% sehingga bisa diperkirakan ada sekitar 9,92% anak usia di bawah 13 tahun dan di atas 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan SMP/MTs.

Tabel 2.14
Capaian Indikator Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Tahun 2024

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2020 (%)	Realisasi Tahun 2021 (%)	Realisasi Tahun 2022 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	2024			Target Akhir Renstra (2024) (%)	Capaian s/d Th. 2024 thd Target Renstra (%)
						Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS	%	92,38	83,27	86,06	83,98	100	100,92	109,92	100	109,92

Sumber data : LKIP tahun 2020 s/d 2024

➤ **Angka Partisipasi Murni PAUD**
Berdasarkan tabel 2.15 dapat diketahui bahwa capaian kinerja Angka Partisipasi Murni PAUD untuk tahun 2024 mengalami peningkatan dengan capaian 72,21% kategori Sedang (66%-75%). Di dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dan tahun 2021 Angka Partisipasi Murni PAUD yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Selanjutnya untuk capaian kinerja tahun 2024 yang diukur melalui target akhir RENSTRA Perubahan (2019-2024) maka capaian kinerja yang dicapai adalah 71,63% kategori Sedang (66%-75%).

Realisasi Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 tahun Kota Tarakan selama 5 tahun terakhir, dari keseluruhan capaian masih terlihat sangat kecil, hal tersebut dapat dimaknai bahwa partisipasi siswa yang bersekolah pada usia 5-6 tahun di jenjang PAUD masih sangat kurang. Sebagai gambaran bisa dilihat pada realisasi capaian di tahun 2024 adalah 45,13% sehingga bisa diperkirakan ada sekitar 54,87% anak usia 5-6 tahun yang tidak berpartisipasi dalam pendidikan PAUD. Hal ini bisa disebabkan karena kurangnya keinginan orang tua untuk menyekolahkan anaknya di usia 5-6 tahun karena keterbatasan ekonomi, selain hal tersebut bisa juga disebabkan karena peserta didik pada usia 6 tahun ada yang telah melanjutkan pendidikannya di jenjang pendidikan SD/MI, dan bisa jadi pada anak usia 5-6 tahun bersekolah di sekolah yang belum terdaftar di DAPODIK sehingga tidak terbaca di sistem DAPODIK.

Tabel 2.16
Capaian Indikator Angka Partisipasi Murni PAUD Tahun 2024

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2020 (%)	Realisasi Tahun 2021 (%)	Realisasi Tahun 2022 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	2024			Target Akhir Renstra (2024) (%)	Capaian s/d Th. 2024 thd Target Renstra (%)
						Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
Angka Partisipasi Murni PAUD	%	69,25	58,43	58,11	65,13	62,50	45,13	72,21	63,00	71,63

Sumber data : LKIP tahun 2020 s/d 2024

➤ **Angka Partisipasi Murni SD/MI**
Berdasarkan tabel 2.17 dapat diketahui bahwa capaian kinerja Angka Partisipasi Murni SD/MI tahun untuk tahun 2024 mengalami peningkatan dengan capaian 110,74% kategori sangat tinggi (90%-100%). Di dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dan tahun 2022 Angka Partisipasi Murni SD/MI yang mengalami penurunan. Selanjutnya untuk capaian kinerja tahun 2024 yang diukur melalui target akhir RENSTRA Perubahan (2019-2024) maka capaian kinerja yang dicapai 97,62% dengan kategori sangat tinggi (90%- 100%).

Realisasi Angka Partisipasi Murni SD/MI Kota Tarakan selama 5 tahun terakhir, dari keseluruhan capaian juga terlihat bahwa Angka Partisipasi Murni SD/MI sudah sangat tinggi bahkan melebihi target yang telah dijanjikan, sehingga dapat dimaknai bahwa pada rata-rata anak usia 7-12 tahun telah mengenyam pendidikan di jenjang SD/MI. Sebagai gambaran bisa dilihat pada realisasi capaian di tahun 2024 adalah 97,62% sehingga bisa diperkirakan ada sekitar 2,38% anak usia 7-12 tahun yang tidak berpartisipasi dalam pendidikan SD/MI. Hal ini kemungkinan disebabkan karena 1)anak usia 7 maupun 12 tahun yang belum/tidak bersekolah di jenjang SD/MI, 2)orang tua ingin menyekolahkan anaknya di Pondok Pesantren, 3)Sekolah di Luar Daerah atau bisa karena 4)bersekolah di sekolah yang belum terdaftar di DAPODIK sehingga tidak terbaca di sistem DAPODIK.

Tabel 2.17
Capaian Indikator Angka Partisipasi Murni SD/MI Tahun 2024

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2020 (%)	Realisasi Tahun 2021 (%)	Realisasi Tahun 2022 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	2024			Target Akhir Renstra (2024) (%)	Capaian s/d Th. 2024 thd Target Renstra (%)
						Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
Angka Partisipasi Murni SD/MI	%	94,06	99,67	98,26	84,27	88,15	97,62	110,74	100	97,62

Sumber data : LKIP tahun 2020 s/d 2024

- **Angka Partisipasi Murni SMP/MTs**
Berdasarkan tabel 2.18 dapat diketahui bahwa capaian kinerja Angka Partisipasi Murni SMP/MTs untuk tahun 2024 mengalami peningkatan dengan capaian 94,25% kategori sangat tinggi (90%-100%). Di dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dan tahun 2022 Angka Partisipasi Murni SMP/MTs yang mengalami penurunan. Selanjutnya untuk capaian kinerja tahun 2024 yang diukur melalui target akhir RENSTRA Perubahan (2019-2024) maka capaian kinerja yang dicapai 94,25% dengan kategori sangat tinggi (90%- 100%).

Realisasi Angka Partisipasi Murni SD/MI tahun Kota Tarakan selama 5 tahun terakhir, dari keseluruhan capaian terlihat bahwa Angka Partisipasi Murni SD/MI tahun sudah sangat tinggi, sehingga dapat dimaknai bahwa pada rata-rata anak usia 13-15 tahun telah mengenyam pendidikan di jenjang pendidikan SMP/MTs. Sebagai gambaran bisa dilihat pada realisasi capaian di tahun 2024 adalah 82,25% sehingga bisa diperkirakan ada sekitar 17,75% anak usia 13-15 tahun yang tidak berpartisipasi dalam jenjang pendidikan SMP/MTs . Hal ini kemungkinan disebabkan karena 1)anak usia 13 maupun 15 tahun yang belum/tidak bersekolah di jenjang SMP/MTs, 2)orang tua ingin menyekolahkan anaknya di Pondok Pesantren, 3)Sekolah di Luar Daerah atau bisa karena 4)bersekolah di sekolah yang belum terdaftar di DAPODIK sehingga tidak terbaca di sistem DAPODIK.

Tabel 2.18
Capaian Indikator Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Tahun 2024

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2020 (%)	Realisasi Tahun 2021 (%)	Realisasi Tahun 2022 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	2024			Target Akhir Renstra (2024) (%)	Capaian s/d Th. 2024 thd Target Renstra (%)
						Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	%	98.58	93.84	89.38	87,09	87,27	82,25	94,25	100	94,25

Sumber data : LKIP tahun 2020 s/d 2024

➤ PAUD Terakreditasi Minimal B
Berdasarkan tabel 3.19 dapat diketahui bahwa capaian kinerja PAUD Terakreditasi pada tahun 2024 tercapai 71,90% dengan kategori sedang (66% s/d <75%), dan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang telah tercapai 104,21% dengan kategori sangat tinggi (90%-100%). Dikarenakan pada tahun 2023 target telah melebihi realisasi dan perhitungan dan rumus yang digunakan adalah seluruh PAUD yang telah terakreditasi sementara tahun 2024 hanya mengkhususkan PAUD yang telah terakreditasi B sehingga terjadi penurunan kinerja pada tahun 2024. Jika kinerja tahun 2024 yang diukur melalui target akhir RENSTRA maka capaian kinerja sudah mencapai 71,90% dengan kategori sedang (66% s/d <75%).

Capaian Indikator PAUD Terakreditasi Minimal B Kota Tarakan pada Tahun 2024 mencapai 71,90% dengan target 100% sehingga jika dilihat dari hasil tersebut dapat dimaknai bahwa Sekolah PAUD masih ada yang berstatus belum Terakreditasi dan sudah Terakreditasi namun belum mencapai Akreditasi B di Tahun 2024.

Tabel 2.19
Capaian Indikator PAUD Terakreditasi Tahun 2024

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2020 (%)	Realisasi Tahun 2021 (%)	Realisasi Tahun 2022 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	2024			Target Akhir Renstra (2024) (%)	Capaian s/d Th. 2024 thd Target Renstra (%)
						Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
PAUD Terakreditasi minimal B	%	118,53	116,92	95,93	104,21	100	71,90	71,90	100	71,90

Sumber data : LKIP tahun 2020 s/d 2024

➤ SD/MI Terakreditasi
Berdasarkan tabel 2.20 dapat diketahui bahwa capaian kinerja SD/MI Terakreditasi Minimal B pada tahun 2024 tercapai 94,59% dengan kategori sangat tinggi (90%-100%), jika di bandingkan dengan tahun 2023 yang tercapai 96,00% dengan kategori sangat tinggi (90%-100%). Jika kinerja tahun 2024 yang diukur melalui target akhir RENSTRA maka capaian kinerja yang dicapai 94,59% dengan kategori sangat tinggi (90%-100%). Dikarenakan pada tahun 2023 target telah melebihi realisasi dan perhitungan dan rumus yang di gunakan adalah seluruh SD/MI yang telah terakreditasi sementara tahun 2024 hanya mengkhususkan perhitungan pada SD/MI yang telah terakreditasi B sehingga terjadi penurunan kinerja pada tahun 2024. Jika kinerja tahun 2024 yang diukur melalui target akhir RENSTRA maka capaian kinerja sudah mencapai 94,59% dengan kategori sedang (90%- 100%).

Capaian Indikator SD/MI Terakreditasi Minimal B Kota Tarakan pada Tahun 2024 mencapai 94,59% dengan target 100% sehingga jika dilihat dari hasil tersebut dapat dimaknai bahwa Sekolah SD/MI masih ada yang berstatus belum Terakreditasi dan sudah Terakreditasi namun belum mencapai Akreditasi B di Tahun 2024.

Tabel 2.20
Capaian Indikator SD/MI Terakreditasi Minimal B Tahun 2024

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun	Realisasi Tahun	Realisasi Tahun	Realisasi Tahun	2024			Target Akhir	Capaian s/d Th. 2024
		2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Renstra (2024) (%)	thd Target Renstra (%)
SD/MI Terakreditasi minimal B	%	107,14	106,48	95,21	96,00	100	94,59	94,59	100	94,59

Sumber data : LKIP tahun 2020 s/d 2024

➤ SMP/MTs Terakreditasi
Berdasarkan tabel 2.21 dapat diketahui bahwa capaian kinerja SMP/MTs Terakreditasi Minimal B pada tahun 2024 tercapai 91,67% dengan kategori sangat tinggi (90%-100%), jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercapai 100,90% dengan kategori sangat tinggi (90%-100%). Jika kinerja tahun 2024 yang diukur melalui target akhir RENSTRA maka capaian kinerja yang dicapai 91,67% dengan kategori sangat tinggi (90%-100%). Dikarenakan pada tahun 2023 target telah melebihi realisasi dan perhitungan dan rumus yang digunakan adalah seluruh SMP/MTs yang telah terakreditasi sementara tahun 2024 hanya mengkhususkan perhitungan pada SMP/MTs yang telah terakreditasi B sehingga terjadi penurunan kinerja pada tahun 2024.

Capaian Indikator SMP/MTs Terakreditasi Minimal B Kota Tarakan pada Tahun 2024 mencapai 91,67% dengan target 100% sehingga jika dilihat dari hasil tersebut dapat dimaknai bahwa Sekolah SD/MI masih ada yang berstatus belum Terakreditasi dan sudah Terakreditasi namun belum mencapai Akreditasi B di Tahun 2024.

Tabel 2.21
Capaian Indikator SMP/MTs Terakreditasi Minimal B Tahun 2024

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun	Realisasi Tahun	Realisasi Tahun	Realisasi Tahun	2024			Target Akhir	Capaian s/d Th. 2024
		2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Renstra (2024) (%)	thd Target Renstra (%)
SD/MI Terakreditasi minimal B	%	94,24	96,50	98,61	100,90	100	91,67	91,67	100	91,67

Sumber data : LKIP tahun 2020 s/d 2024

➤ Persentase Pendidik Berkualifikasi S1/D4
Berdasarkan tabel 2.22 dapat diketahui bahwa capaian kinerja tahun 2024 tercapai 75,78% dengan kategori sedang (66% s/d <75%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sudah mencapai 86,94% dengan kategori tinggi (76%-90%).

Capaian Indikator Persentase Pendidik Berkualifikasi S1/D4 Kota Tarakan pada Tahun 2024 mencapai 75,78% dengan target 100% yang merupakan target akhir RENSTRA tahun 2019-2024. Jika dilihat dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa masih sekitar 24,22%

Pendidik yang belum berkualifikasi S1/D4 di Tahun 2024, itu pun banyak terdapat di sekolah swasta atau madrasah.

Tabel 2.22
Capaian Indikator Persentase Pendidik Berkualifikasi S1/D4 Tahun 2024

Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun 2020 (%)	Realisasi Tahun 2021 (%)	Realisasi Tahun 2022 (%)	Realisasi Tahun 2023 (%)	2024			Target Akhir Renstra (2024) (%)	Capaian s/d Th. 2024 thd Target Renstra (%)
						Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
SD/MI Terakreditasi minimal B	%	119,51	100,87	88,49	86,94	98,15	74,38	75,78	100	75,78

Sumber data : LKIP tahun 2020 s/d 2024

- Rata-Rata Kemampuan Literasi SD & SMP berdasarkan Asesmen Nasional
- Berdasarkan tabel 2.23 dapat diketahui bahwa capaian kinerja Rata-Rata Kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional tahun 2024 tercapai 129,89% dengan kategori sangat tinggi (90%-100%) namun belum bisa di bandingkan dengan tahun sebelumnya yang tidak dapat di ukur karna tidak di dasari dengan target kegiatan, begitu juga dengan Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional tahun 2024 tercapai 199,49% dengan kategori sangat tinggi (90%-100%).

Jika dilihat dari capaian indikator Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional tahun 2024 tercapai 81,34% dan Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional tahun 2024 tercapai 83,33% dengan definisi capaian bahwa sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca.

Tabel 2.23
Capaian Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja tahun 2023 (%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja tahun 2024(%)	Target Akhir RENSTRA	Capaian s/d 2024 terhadap target akhir RENSTRA (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi			
Rata-Rata Kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	%	N/A	76,86	76,86	62,62	81,34	129,89	81,34	100
Rata-Rata Kemampuan Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	N/A	80,8	80,8	76,11	83,33	109,49	83,33	100

Sumber : Raport Pendidikan Kota Tarakan, 2024

- Rata-Rata Kemampuan Numerasi berdasarkan Asesmen Nasional
- Berdasarkan tabel 3.30 dapat diketahui bahwa capaian kinerja Rata-Rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional tahun 2024 tercapai 154,19% dengan kategori sangat tinggi (90%-100%) namun belum bisa di bandingkan dengan tahun sebelumnya yang tidak dapat di ukur karna tidak di dasari dengan target kegiatan, begitu juga dengan Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional tahun 2024 tercapai 126,43% dengan kategori sangat tinggi (90%-100%).

Jika dilihat dari capaian indikator Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional tahun 2024 tercapai 67,29% dengan definisi capaian bahwa sekitar 40%-70% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk Numerasi namun masih perlu upaya untuk mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum. Untuk capaian indikator Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional tahun 2024 tercapai 77,12% dengan definisi capaian sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk numerasi.

Tabel 2.24
Capaian Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja tahun 2023 (%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja tahun 2024(%)	Target Akhir RENSTRA	Capaian s/d 2024 terhadap target akhir RENSTRA (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi			
Rata-Rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	%	N/A	54,14	54,14	43,64	67,29	154,19	67,29	100
Rata-Rata Kemampuan Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	N/A	53,39	53,39	61,00	77,12	126,43	77,12	100

Sumber : Raport Pendidikan Kota Tarakan, 2024

➤ Iklim Keamanan

Berdasarkan tabel 2.25 dapat diketahui bahwa capaian kinerja Iklim Keamanan SD tahun 2024 tercapai 78,44% dengan kategori tinggi (76%-90%) namun belum bisa di bandingkan dengan tahun sebelumnya yang tidak dapat di ukur karna tidak di dasari dengan target kegiatan, begitu juga dengan Iklim Keamanan SMP tahun 2024 tercapai 79,05% dengan kategori tinggi (76%-90%).
Jika dilihat dari capaian indikator Iklim Keamanan SD tahun 2024 tercapai 72,29% dan Iklim Keamanan SMP tercapai 70,78% dengan definisi capaian bahwa satuan pendidikan memiliki lingkungan satuan pendidikan yang aman, terlihat dari kesejahteraan psikologis yang baik dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba.
Satuan Pendidikan juga dapat mempertahankan kualitas warga satuan pendidikan dalam mencegah dan menangani kasus untuk menciptakan iklim keamanan di lingkungan satuan pendidikan.

Tabel 2.25
Capaian Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja tahun 2023 (%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja tahun 2024(%)	Target Akhir RENSTRA	Capaian s/d 2024 terhadap target akhir RENSTRA (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi			
Iklim Keamanan SD	%	N/A	69,68	69,68	92,16	72,29	78,44	100	78,44
Iklim Keamanan SMP	%	N/A	69,15	69,15	89,54	70,78	79,05	100	79,05

Sumber : Raport Pendidikan Kota Tarakan, 2024

➤ Iklim Kebhinekaan

Berdasarkan tabel 2.26 dapat diketahui bahwa capaian kinerja Iklim Kebhinekaan SD tahun 2024 tercapai 74,34% dengan kategori sedang (66%-75%) namun belum bisa di bandingkan dengan tahun sebelumnya yang tidak dapat di ukur karna tidak di dasari dengan target kegiatan, begitu juga dengan Iklim Kebhinekaan SMP tahun 2024 tercapai 80,27% dengan kategori tinggi (76%-90%).

Jika dilihat dari capaian indikator Iklim Keamanan SD tahun 2024 tercapai 74,34% dan Iklim Keamanan SMP tercapai 75,12% dengan definisi capaian bahwa satuan pendidikan mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama/kepercayaan dan budaya, mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas, mendukung kesetaraan agama/kepercayaan, dan budaya serta memperkuat nasionalisme.

Tabel 2.26
Capaian Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja tahun 2023 (%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja tahun 2024(%)	Target Akhir RENSTRA	Capaian s/d 2024 terhadap target akhir RENSTRA (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi			
Iklim Kebhinekaan SD	%	N/A	70,46	70,46	100	74,34	74,34	100	74,34
Iklim Kebhinekaan SMP	%	N/A	68,56	68,56	93,58	75,12	80,27	100	80,27

Sumber : Raport Pendidikan Kota Tarakan, 2024

➤ Iklim Inklusivitas

Berdasarkan tabel 2.27 dapat diketahui bahwa capaian kinerja Iklim Inklusivitas SD tahun 2024 tercapai 67,37% dengan kategori sedang (66%-75%) namun belum bisa di bandingkan dengan tahun sebelumnya yang tidak dapat di ukur karna tidak di dasari dengan target kegiatan, begitu juga dengan Iklim Inklusivitas tahun 2024 tercapai 70,03% dengan kategori sedang (66%-75%).

Jika dilihat dari capaian indikator Iklim Inklusivitas SD tahun 2024 tercapai 54,28% dan Iklim Inklusivitas SMP tercapai 57,11% dengan definisi capaian bahwa satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menyediakan layanan yang ramah bagi peserta didik dengan disabilitas dan cerdas berbakat istimewa.

Berikut rekapitulasi pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kota Tarakan Tahun 2020 - 2024 yang ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.27
Capaian Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja tahun 2023 (%)	Tahun 2024		Capaian Kinerja tahun 2024(%)	Target Akhir RENSTRA	Capaian s/d 2024 terhadap target akhir RENSTRA (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi			
Iklim Inklusivitas SD	%	N/A	55,88	55,88	80,58	54,28	67,37	100	67,37
Iklim Inklusivitas SMP	%	N/A	55,17	55,17	81,55	57,11	70,03	100	70,03

Sumber : Raport Pendidikan Kota Tarakan, 2024

Tabel 2.28
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan

INDIKATOR KINERJA		Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	APS 5-6 Tahun	67,15	57,14	85,09	67,65	45,16	66,76	68,15	47,29	69,39	68.85	58.92	85.58
2	APK PAUD	72,02	45,74	63,51	72,52	54,84	75,62	73,02	51,19	70,10	73.52	55.27	75.18
3	APM PAUD	61,00	35,64	58,43	61,50	35,74	58,11	62,00	40,38	65,13	62.50	45.13	72.21
4	APS 7-12 Tahun	97,46	87,38	89,66	98,35	93,96	95,54	99,28	87,11	87,74	100	99.62	99.62
5	APS 13-15 Tahun	94,24	84,33	89,48	94,96	69,88	73,59	98,96	80,60	81,45	100	98.68	98.68
6	APK SD/MI	101,48	88,65	87,36	106,56	90,24	84,68	111,89	91,70	81,96	100	104.06	104.06
7	APK SMP/MTs	94,24	83,27	88,36	95,75	86,06	89,88	99,49	83,98	84,41	100	100.92	100.92
8	APM SD/MI	84,24	83,96	99,67	61,50	85,24	98,26	87,49	84,27	96,32	88.15	97.62	110.74
9	APM SMP/MTs	75,39	70,75	93,85	79,16	70,75	89,38	83,12	72,39	87,09	87.27	82.25	94.25
10	APS 7-8 Tahun Kesetaraan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	49.24	49.24
11	PAUD Terakreditasi minimal B	80,50	94,12	116,92	90,00	95,93	106,59	90,50	94,31	104,21	100	71.90	71.90
12	PKBM Terakreditasi	80,50	85,71	106,47	90,00	100	111,11	90,50	100,00	110,50	100	100	100
13	SD/MI Terakreditasi	96,48	90,54	93,84	97,93	93,24	95,21	99,40	94,59	95,16	100	94.59	94.59
14	SMP/MTs Terakreditasi	97,15	93,75	96,50	98,13	96,77	98,61	99,11	100,00	100,90	100	91.67	91.67
15	Persentase pendidik yang berkualifikasi S1-/D-4	92,15	92,95	100,87	94,96	84,03	88,49	96,11	83,56	86,94	98.15	74.38	75.78
16.1	Rata-Rata Kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	62.62	81.34	129.89
16.2	Rata-Rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	43.64	67.29	154.19
17.1	Rata-Rata Kemampuan Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	76.11	83.33	109.49

INDIKATOR KINERJA		Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
17.2	Rata-Rata Kemampuan Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	61.00	77.12	126.43
18	Iklim Keamanan SD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	92.16	72.29	78.44
19	Iklim Keamanan SMP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	89.54	70.78	79.05
20	Iklim Kebhinekaan SD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	74.34	74.34
21	Iklim Kebhinekaan SMP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	93.58	75.12	80.27
22	Iklim Inklusivitas SD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80.58	54.29	67.37
23	Iklim Inklusifitas SMP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	81.55	57.11	70.03

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Struktur anggaran Dinas Pendidikan Kota Tarakan yang bersumber dari APBD Kota Tarakan pada tahun anggaran 2020 sampai dengan 2024 Tabel 2.29 menunjukkan bahwa pertumbuhan anggaran Dinas Pendidikan periode 2020 hingga 2024 pada awalnya meningkat (Tahun 2020 sampai dengan 2023) dan Tahun 2024 mengalami tren penurunan. Adapun Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Dinas Pendidikan mengalami dinamika sebagai berikut, antara Tahun 2020 - 2021 meningkat 7 %, Tahun 2022-2023 menurun 3 %, dan Tahun 2023 - 2024 kembali naik 5%.

Tabel 2.29
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pendidikan

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggar an	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	29.577.323.187					23.712.045.071					80%						53.289.368.259
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	233.544.490					55.545.532					24%						289.090.022
Program peningkatan disiplin aparatur	352.500.000					-					0%						352.500.000
Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.557.102.001					1.396.641.550					90%						2.953.743.552
Program Pengembangan Nilai Budaya	56.000.000					55.895.000					100%						111.895.001
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	81.250.000					76.752.660					94%						158.002.661
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	90.109.784.877					83.422.159.219					93%						173.531.944.097
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	175.000.000					124.800.000					71%						299.800.001
Program Pendidikan Non Formal	1.767.200.000					1.656.300.000					94%						3.423.500.001
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	387.225.000					258.415.099					67%						645.640.100
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	50.000.000					20.600.000					41%						70.600.000
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		184.019.807.635	187.934.923.852	187.073.584.603	214.731.360.119		177.322.085.420	178.470.102.478	181.225.975.560	209.651.569.652		96%	95%	97%	98%		1.520.429.409.323
Program Pengelolaan Pendidikan		107.662.477.228	109.687.838.692	144.262.569.985	101.584.031.495		104.307.238.384	104.886.721.671	124.272.815.839	96.807.182.624	-	97%	96%	86%	95%		893.470.875.921
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan		229.935.206	212.840.250	264.988.400	553.193.200		200.112.549	200.148.000	227.451.674	526.796.898		87%	94%	86%	95%		2.415.466.181
Program Pengembangan Kurikulum				200.530.900	152.985.100				96.118.850	61.411.800				48%	40%		511.046.651

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggar an	Realisasi
Program Pengembangan Bahasa dan Sastra				30.000.000	375.000.000					357.420.000				0%	95%		762.420.001
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan					24.999.940					23.700.000					95%		48.699.941
Total	124.346.929.555	291.912.220.069	297.835.602.794	331.831.673.888	317.421.569.854	110.779.154.131	281.829.436.353	283.556.972.149	305.822.361.923	307.428.080.973	89%	97%	95%	92%	97%		2.652.764.001.689

2.3.3 Kelompok Layanan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan pelayanan pendidikan yang inklusif, bermutu, dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat, Dinas Pendidikan Kota Tarakan menetapkan kelompok sasaran layanan sebagai dasar perumusan program dan kegiatan strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Penetapan kelompok sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan layanan yang diselenggarakan tepat guna, tepat sasaran, serta berdampak langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan dan penguatan sumber daya manusia di Kota Tarakan.

Berdasarkan karakteristik demografis, kondisi sosial, serta tantangan sektoral pendidikan, kelompok sasaran utama layanan Dinas Pendidikan Kota Tarakan meliputi:

1. Peserta didik pada jenjang PAUD, SD, dan SMP (negeri dan swasta), yang menjadi pusat perhatian utama dalam peningkatan mutu pembelajaran, pemenuhan hak pendidikan, penguatan karakter, serta perlindungan dan kesejahteraan anak di lingkungan sekolah.
2. Pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk guru, kepala sekolah, dan staf pendukung di satuan pendidikan, yang membutuhkan peningkatan kompetensi, pelatihan berkelanjutan, insentif kesejahteraan, serta pemenuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai, khususnya bagi pendidik di daerah terpencil dan sekolah swasta.
3. Orang tua dan keluarga peserta didik, sebagai mitra strategis dalam mendukung keberhasilan proses pembelajaran dan penguatan pendidikan karakter, yang membutuhkan edukasi, komunikasi aktif, dan keterlibatan dalam kegiatan sekolah.
4. Lembaga pendidikan dan satuan pendidikan nonformal, seperti PKBM dan lembaga kursus, yang memerlukan pembinaan, fasilitasi operasional, dan penguatan tata kelola agar mampu menyediakan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas, terutama bagi warga belajar di luar sistem sekolah formal.
5. Anak-anak dari kelompok rentan, seperti anak berkebutuhan khusus (ABK), anak dari keluarga kurang mampu, anak korban kekerasan, serta anak putus sekolah, yang memerlukan pendekatan layanan pendidikan yang adil, adaptif, dan berbasis inklusi sosial.

Dengan memperhatikan kebutuhan dari masing-masing kelompok sasaran tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto berkomitmen menyusun strategi pelayanan pendidikan yang responsif, adil, dan berkelanjutan. Penyesuaian model layanan juga akan terus dilakukan seiring perkembangan teknologi informasi, transformasi kurikulum, serta dinamika sosial masyarakat untuk menjamin tercapainya pendidikan yang berkualitas bagi semua.

2.3.4 Mitra Dinas Pendidikan dalam Pemberian Pelayanan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Tarakan tidak dapat bekerja secara mandiri. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi elemen penting dalam menciptakan pelayanan pendidikan yang terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan. Keterlibatan mitra strategis, baik dari unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan, lembaga vertikal, maupun elemen masyarakat, memperkuat pelaksanaan program dan kebijakan pendidikan di daerah.

Selama ini, Dinas Pendidikan Kota Tarakan telah menjalin kemitraan dengan berbagai pihak sebagai mitra strategis dalam mendukung pelaksanaan layanan pendidikan. Adapun mitra-mitra tersebut antara lain:

1. Dinas Kesehatan, dalam pelaksanaan program UKS, pemberian makanan tambahan bagi siswa, skrining kesehatan peserta didik, serta promosi kesehatan di lingkungan sekolah.
2. Dinas Sosial, dalam penanganan siswa dari keluarga tidak mampu, program perlindungan anak, dan integrasi data bantuan pendidikan.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam mendukung akurasi data peserta didik melalui dokumen kependudukan.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), dalam penguatan lembaga PAUD desa dan pelaksanaan program PAUD Holistik-Integratif.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam pengembangan sistem informasi pendidikan dan layanan berbasis digital.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dalam sinkronisasi program prioritas pendidikan dengan rencana pembangunan daerah.
7. Inspektorat dan BKPSDM, dalam pembinaan kinerja dan integritas tenaga pendidik serta pengelolaan sumber daya manusia pendidikan.
8. Lembaga Keamanan dan Penegak Hukum, seperti Polres dan Polsek, dalam program Sekolah Ramah Anak, pencegahan perundungan dan kekerasan di lingkungan pendidikan, serta perlindungan terhadap peserta didik.
9. Pemerintah Desa dan Kecamatan, sebagai mitra koordinatif dalam pelaksanaan program PAUD, penguatan peran komite sekolah, fasilitasi pendidikan masyarakat, serta penanganan kasus putus sekolah di tingkat lokal.
10. Lembaga Pendidikan dan Kesehatan, termasuk madrasah, PKBM, puskesmas, dan pihak perguruan tinggi, yang terlibat dalam pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan, pelatihan guru, serta pembinaan pendidikan nonformal dan inklusif.
11. Lembaga Masyarakat dan Organisasi Sosial, seperti PKK, Karang Taruna, Komite Sekolah, Forum Anak, serta organisasi profesi guru (PGRI dan sejenisnya), yang berperan aktif dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan berbasis partisipasi dan budaya lokal.

Kolaborasi antara Dinas Pendidikan Kota Tarakan dan mitra- mitra tersebut terus diperkuat dalam kerangka tata kelola pendidikan yang kolaboratif, adaptif, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Ke depan, sinergi ini akan dikembangkan melalui forum koordinasi lintas sektor, kemitraan berbasis regulasi, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendorong kualitas layanan pendidikan yang lebih inklusif dan berdaya saing di seluruh wilayah Kota Tarakan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Tantangan dan Peluang yang dihadapi Dinas Pendidikan Kota Tarakan dalam melaksanakan visi, misi, dan program unggulan Walikota Tarakan, adalah sebagai berikut :

2.4.1 Tantangan Dinas Pendidikan Kota Tarakan

1. Keterbatasan Anggaran

- Pendidikan gratis SD-SMP, beasiswa, dan pembangunan infrastruktur butuh biaya besar.
- Ketergantungan pada dana transfer pusat (DAK, DID, BOS) → jika berkurang, program bisa terganggu.

2. Kualitas dan Distribusi Guru
 - Masih banyak guru honorer/guru swasta dengan kesejahteraan rendah.
 - Distribusi guru tidak merata antara pusat kota dan daerah pinggiran/pesisir.
 - Penguasaan teknologi digital oleh guru masih bervariasi.
3. Kesenjangan Sarana & Prasarana
 - Beberapa sekolah kekurangan ruang kelas, laboratorium, dan fasilitas TIK.
 - Sekolah di pinggiran kota/pesisir masih sulit akses internet stabil.
4. Digitalisasi Pendidikan
 - Infrastruktur belum merata.
 - Tidak semua siswa punya perangkat belajar (gadget/laptop).
 - Perlu kesiapan guru, siswa, dan orang tua untuk pembelajaran berbasis digital.
5. Monitoring & Evaluasi
 - Mekanisme pengawasan beasiswa, sekolah gratis, dan pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya transparan.
 - Data pendidikan (angka putus sekolah, prestasi, distribusi guru) masih belum terbuka secara real-time.
6. Dinamika Eksternal
 - Perubahan kurikulum nasional → butuh adaptasi cepat.
 - Urbanisasi → pertambahan penduduk meningkatkan beban kapasitas sekolah.
 - Bencana banjir & kondisi geografis → bisa mengganggu akses pendidikan.

2.4.2 Peluang Dinas Pendidikan Kota Tarakan

1. Dukungan Kebijakan Nasional
 - Program Merdeka Belajar, BOS, beasiswa KIP, dan kurikulum baru bisa disinergikan dengan program daerah.
 - DAK fisik/nonfisik pendidikan dari pemerintah pusat bisa mempercepat pembangunan sekolah.
2. Perkembangan Teknologi
 - Pemanfaatan *e-learning*, *smart classroom*, perpustakaan digital → memperluas akses belajar.
 - Aplikasi pendidikan lokal bisa mendukung visi Kota Cerdas.
3. Kerja Sama dengan Swasta & CSR
 - Perusahaan migas, perbankan, dan BUMN di Tarakan bisa mendukung beasiswa, internet sekolah, atau pembangunan laboratorium.
 - Startup edutech bisa menjadi mitra digitalisasi sekolah.
4. Pendidikan Vokasi & Keterampilan
 - Potensi besar mengembangkan SMK di bidang perikanan, maritim, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
 - Bisa langsung menghubungkan lulusan dengan dunia kerja lokal.
5. Partisipasi Masyarakat
 - Orang tua & komite sekolah bisa dilibatkan dalam pengawasan penggunaan dana pendidikan.
 - Kolaborasi dengan komunitas lokal (literasi, budaya, olahraga) untuk memperkaya pendidikan non-formal.

6. Demografi Bonus Generasi Muda

- Proporsi penduduk usia muda cukup tinggi → potensi SDM unggul untuk mengisi sektor jasa, perdagangan, dan ekonomi kreatif di masa depan.

Analisis SWOT Pendidikan Kota Tarakan

Strength (Kekuatan)

- Program Sekolah Gratis SD-SMP → menekan angka putus sekolah dan menjamin pemerataan akses pendidikan dasar.
- Beasiswa berprestasi & tidak mampu → mendukung keberlanjutan pendidikan anak dari keluarga kurang mampu.
- Komitmen Pemerintah → pendidikan dijadikan prioritas utama dalam misi meningkatkan kualitas SDM.
- Dukungan menuju “Kota Cerdas” → sudah ada inisiatif digitalisasi pembelajaran dan layanan administrasi pendidikan.
- Peningkatan kesejahteraan guru & tenaga kependidikan → insentif dan perhatian terhadap guru honorer.

Weakness (Kelemahan)

- Keterbatasan anggaran daerah → pendidikan gratis & beasiswa membutuhkan biaya besar; bergantung pada transfer pusat (DAK, DID).
- Kesenjangan fasilitas sekolah → beberapa sekolah masih kekurangan ruang kelas, laboratorium, akses internet, terutama di pinggiran/pesisir.
- Kualitas guru belum merata → masih banyak guru honorer, rendahnya kompetensi digital, dan distribusi tenaga pendidik yang tidak seimbang.
- Digitalisasi pendidikan belum optimal → belum semua sekolah punya perangkat & jaringan internet stabil.
- Monitoring & transparansi → data beasiswa, angka putus sekolah, dan efektivitas program pendidikan belum sepenuhnya terbuka untuk publik.

Opportunity (Peluang)

- Dukungan nasional → program Merdeka Belajar, bantuan pusat (BOS, DAK fisik/nonfisik) bisa disinergikan dengan program daerah.
- Kerja sama dengan swasta/CSR → dukungan perusahaan migas, perbankan, dan BUMN untuk beasiswa, laboratorium, atau internet gratis.
- Perkembangan teknologi digital → peluang untuk memperluas pembelajaran daring, perpustakaan digital, dan *smart classroom*.
- Penguatan pendidikan vokasi/SMK → bisa disinergikan dengan sektor unggulan Tarakan: perikanan, jasa perdagangan, ekonomi kreatif, dan pariwisata maritim.
- Partisipasi masyarakat/komite sekolah → bisa dilibatkan dalam pengawasan penggunaan dana pendidikan.

Threat (Ancaman)

- Fluktuasi fiskal → pengurangan dana pusat (DAK/DID) bisa menghambat program gratis dan beasiswa.
- Kesenjangan sosial-ekonomi → anak dari keluarga miskin bisa tetap kesulitan mengakses pendidikan meski sekolah gratis (biaya transportasi, buku, gadget).
- Perubahan kebijakan pusat → aturan baru (kurikulum, standar akreditasi, sertifikasi guru) bisa membebani daerah.

- Disrupsi teknologi → kesenjangan digital (digital divide) bisa memperlebar ketidaksetaraan kualitas pendidikan.
- Urbanisasi & kepadatan kota → meningkatnya jumlah penduduk bisa membebani kapasitas sekolah yang ada.

2.5 Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pendidikan merupakan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Tarakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.31
Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum tingginya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Belum tingginya Partisipasi Pendidikan	Belum maksimalnya biaya pendidikan (formal)
			Belum maksimalnya prasarana pendidikan formal
			Belum Maksimalnya biaya pendidikan (non formal)
			Belum Maksimalnya prasarana pendidikan non formal
		Belum Maksimalnya Kualitas Satuan Pendidikan	Masih terbatasnya satuan pendidikan yang berijin
			Masih terbatasnya pembinaan manajemen dan kelembagaan sekolah
			Masih terbatasnya peningkatan kompetensi dan kualifikasi
			Belum Maksimalnya sosialisasi dan advokasi
			Belum Maksimalnya sarana pendidikan
			Belum maksimalnya pelaksanaan minat, bakat dan kreatifitas
		Belum Maksimalnya Pengelolaan Tata Kelola Pemerintahan	Belum Maksimalnya pelaporan kinerja

2.6 Telaahan Visi,Misi,dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan jangka menengah Kota Tarakan tahun 2025–2029 sebagaimana tertuang dalam RPJMD adalah:

"Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Cerdas yang bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, perikanan kelautan, dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan maju menuju masyarakat sejahtera."

Visi ini menekankan pada pembangunan sumber daya manusia, transformasi digital, dan penguatan sektor unggulan lokal sebagai kunci mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Dinas Pendidikan, visi tersebut menjadi dasar penguatan sistem pendidikan yang berkualitas, merata, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Untuk mencapai visi tersebut, telah dirumuskan lima misi utama sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan penguatan kapasitas masyarakat.
2. Memperkuat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar yang merata dan berkeadilan.
3. Mengembangkan sektor ekonomi unggulan melalui pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi kreatif, serta sektor jasa dan kelautan.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif dan transparan dalam rangka pelayanan publik yang prima.
5. Membangun lingkungan hidup yang lestari dan tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim.

Kelima misi tersebut merupakan landasan kebijakan yang harus diinternalisasi dan diimplementasikan oleh seluruh perangkat daerah dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan. Dari lima misi kepala daerah, terdapat beberapa misi yang secara langsung beririsan dengan urusan pendidikan, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Hal ini menjadi misi utama yang harus direspons oleh Dinas Pendidikan dengan kebijakan dan program yang mendukung akses pendidikan, peningkatan mutu, serta kompetensi peserta didik dan tenaga pendidik.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif. Termasuk dalam hal ini adalah peningkatan layanan pendidikan berbasis digital, transparansi layanan publik di sektor pendidikan, serta pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan dokumen visi-misi dan program unggulan Pemkot Tarakan:

1. Sekolah Gratis SD & SMP
 - o Membebaskan biaya pendidikan di sekolah negeri pada jenjang wajib belajar.
 - o Menjamin akses pendidikan dasar universal bagi seluruh anak di Tarakan.
2. Beasiswa
 - o Beasiswa berprestasi untuk siswa berprestasi.
 - o Bantuan pendidikan untuk siswa tidak mampu.
 - o Beasiswa jenjang lebih tinggi (SMA/SMK, perguruan tinggi) melalui mekanisme kerja sama atau APBD.
3. Peningkatan Sarana & Prasarana Pendidikan
 - o Renovasi sekolah yang rusak.
 - o Pembangunan ruang kelas baru.
 - o Penyediaan fasilitas belajar berbasis teknologi (menuju *smart education*).
4. Peningkatan Kualitas Guru & Tenaga Kependidikan
 - o Pelatihan dan sertifikasi guru.
 - o Peningkatan kesejahteraan guru honorer/pegawai kontrak.

- o Program peningkatan kompetensi digital guru.
- 5. Integrasi Pendidikan dengan Visi Kota Cerdas
 - o Digitalisasi layanan pendidikan (aplikasi pendidikan, sistem administrasi online).
 - o Literasi teknologi dan kreativitas siswa untuk mendukung sektor ekonomi kreatif.

Dari uraian diatas bisa terlihat berdasarkan Visi & misi Pemerintah Kota Tarakan sudah menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama menuju *Kota Cerdas*. Program unggulannya cukup kuat (gratis sekolah, beasiswa, guru, infrastruktur). Tantangannya ada di anggaran, kesenjangan fasilitas, kualitas guru, dan digitalisasi. Dengan penguatan strategi Dinas Pendidikan pada aspek anggaran, pemerataan, kualitas guru, dan digitalisasi, target peningkatan SDM unggul bisa lebih realistis tercapai.

2.7 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dalam periode 2020–2024, arah kebijakan Kemendikbudristek antara lain:

1. Pendidikan Berkualitas & Inklusif → mendukung wajib belajar 12 tahun, pemerataan akses, BOS, KIP.
2. Penguatan SDM Unggul → literasi, numerasi, karakter, serta Merdeka Belajar.
3. Peningkatan Mutu Guru & Tenaga Kependidikan → sertifikasi, pelatihan, kesejahteraan.
4. Penguatan Digitalisasi Pendidikan → platform belajar daring, rumah belajar, digitalisasi kurikulum.
5. Penguatan Pendidikan Vokasi → link & match dengan dunia usaha/industri.

Keterkaitan dengan Kota Tarakan:

- Program Sekolah Gratis SD-SMP dan Beasiswa → selaras dengan misi nasional akses pendidikan berkualitas.
- Peningkatan Kompetensi Guru → inline dengan Renstra Kemendikbudristek.
- Digitalisasi Sekolah → sesuai agenda nasional “Transformasi Digital Pendidikan”.
- Pengembangan SMK Maritim, Perikanan, Ekonomi Kreatif → sinkron dengan arah penguatan vokasi & link and match.

Renstra 2025-2029 (atau 2025-2030) dari Kemendikbudristek/ Kemendikdasmen belum tersedia lengkap secara publik sebagai dokumen Renstra kementerian yang disahkan. Namun, arah kebijakan yang sedang disusun untuk periode baru sudah jelas muncul dari komunikasi resmi (siaran pers). Jadi, meskipun belum ada teks papan penuh (dokumen Renstra lengkap) untuk 2025–2030, kita bisa mengambil elemen-elemen kunci dari arah kebijakan terbaru.

2.8 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penataan ruang wilayah Kota Tarakan bertujuan untuk mewujudkan Kota Tarakan sebagai kota pusat perdagangan dan jasa serta pusat pelayanan umum yang berkualitas menuju masyarakat yang berdaya saing tinggi dan sejahtera dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup demi keberlanjutan pembangunan.

Pengembangan bidang Pendidikan hendaknya harus melihat rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup terlebih dahulu. Untuk itu, Dinas Pendidikan harus mengembangkan strategi umum pengelolaan Pendidikan

yang mengacu pada lima komponen utama; peran pendidik dan tenaga kependidikan, sistem pembelajaran dan penilaian, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola.

Saat ini, akses Pendidikan dasar lebih ditekankan oleh pemenuhan akses dan peningkatan mutu, serta tata kelola yang merata di setiap wilayah kecamatan yang di Kota Tarakan.

Penguatan karakter peserta didik sejak dini akan membuat peserta didik tidak hanya cerdas, tetapi juga tangguh dan memiliki sikap-sikap baik sebagai modal dalam kehidupan. Karakter peserta didik yang baik dan kuat akan membentuk karakter dan jati diri bangsa yang kuat agar dapat bersaing di pentas global.

Kualitas Pendidikan ditentukan oleh kompetensi tenaga pendidik serta sarana dan prasarana yang mendukung Pendidikan yang terpenuhi. Sistem pembelajaran saat ini dipandang belum efektif dalam membangun peserta didik yang memiliki akhlak mulia dan karakter bangsa. Hal ini dibuktikan dengan adanya kejadian-kejadian degradasi moral seperti penyalahgunaan narkoba, radikalisme pelajar, tawuran antar pelajar, pornografi dan pornoaksi, plagiatisme, dan menurunnya nilai kebanggaan berbangsa dan bernegara. Tidak hanya itu, pengembangan Pendidikan kewirausahaan saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah, agar para lulusan sudah memiliki kompetensi mumpuni.

2.9 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis Dinas Pendidikan Kota Tarakan merupakan pokok-pokok persoalan mendasar yang harus segera ditangani secara terencana dan berkelanjutan guna mencapai visi dan misi pembangunan daerah di bidang pendidikan. Isu-isu ini mencerminkan tantangan utama yang berdampak langsung terhadap akses, mutu, pemerataan, dan tata kelola pendidikan. Isu strategis yang dihadapi Dinas Pendidikan Kota Tarakan pada periode 2025–2029 adalah peningkatan layanan dan akses pendidikan yang merata. Isu ini mencerminkan tantangan utama dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Meskipun berbagai program telah dijalankan, masih terdapat kesenjangan dalam hal pemerataan akses pendidikan, khususnya di wilayah terpencil, serta ketimpangan kualitas layanan antar satuan pendidikan. Oleh karena itu, upaya peningkatan mutu layanan pendidikan harus diiringi dengan strategi pemerataan akses, baik dari sisi infrastruktur, distribusi tenaga pendidik, maupun dukungan terhadap kelompok masyarakat rentan agar setiap anak di Kota Tarakan memiliki kesempatan yang setara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Isu – Isu Strategis yang relevan dengan Dinas Pendidikan Kota Tarakan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.32
Isu Strategis Dinas Pendidikan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
Pendidikan Dasar (SD & SMP) dan Pendidikan Anak Usia Dini & Pendidikan Non Formal	Belum Optimalnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah	Dampak revolusi industri 4.0 era disrupsi dan kurikulum abad 21 yang sangat berimplikasi terhadap dunia pendidikan	Keterbatasan mengakses pendidikan karena keterbatasan infrastruktur, jarak tempuh dan biaya pendidikan yang mahal	Memastikan seluruh anak usia sekolah memiliki akses pendidikan yang sama, termasuk anak-anak dari keluarga kurang mampu, penyandang disabilitas dan yang berada di daerah terpencil	Meningkatkan mutu pendidikan di semua jenjang, mulai dari PAUD hingga pendidikan menengah serta memastikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat kota tarakan termasuk daerah pesisir
		Restrukturisasi kewenangan pengelolaan pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan;		Pemanfaatan teknologi dalam pendidikan menghadirkan tantangan seperti kesenjangan akses dan kesiapan guru	Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru melalui pelatihan, pengembangan kurikulum dan program guru penggerak	Peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru, tenaga kependidikan, serta pemenuhan kebutuhan akan Sumber Daya Manusia yang berkualitas di bidang pendidikan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi untuk periode tahun 2024-2029. Tujuan yang ditetapkan berdasarkan misi pembangunan lima tahun ke depan Kota Tarakan yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Dinas Pendidikan adalah Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas Pendidikan.

Sementara itu yang dimaksud dengan sasaran adalah kondisi yang menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran yang ingin dicapai berdasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan adalah Meningkatnya aksesibilitas layanan pendidikan dan Meningkatnya mutu layanan pendidikan.

Dalam rencana strategis Dinas Pendidikan Kota Tarakan tujuan yang dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun maka Dinas Pendidikan Kota Tarakan menetapkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan

Tujuan dari upaya meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan adalah untuk mewujudkan sistem pendidikan yang adil, inklusif, dan bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan yang baik seharusnya dapat diakses oleh siapa saja, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, geografis, atau kondisi fisik, serta mampu memberikan pengalaman belajar yang relevan, bermakna, dan mendorong pengembangan potensi peserta didik secara optimal.

Secara lebih spesifik, peningkatan aksesibilitas bertujuan untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang menghalangi masyarakat, terutama anak-anak usia sekolah, dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak. Hambatan tersebut dapat berupa keterbatasan infrastruktur, jarak geografis yang jauh, biaya pendidikan yang tinggi, ataupun kurangnya fasilitas penunjang pembelajaran. Dengan akses yang lebih mudah dan merata, diharapkan tidak ada anak yang tertinggal dari haknya untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Sementara itu, peningkatan kualitas pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap peserta didik memperoleh proses pembelajaran yang efektif, relevan, dan mampu membentuk karakter, pengetahuan, serta keterampilan yang dibutuhkan di era modern. Hal ini mencakup peningkatan kompetensi guru, perbaikan kurikulum, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Selain itu, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan juga bertujuan untuk:

- ✓ Mengurangi kesenjangan pendidikan antarwilayah, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan atau tertinggal.
- ✓ Meningkatkan angka partisipasi sekolah, termasuk pendidikan dasar, menengah, hingga tinggi.
- ✓ Mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, baik di tingkat nasional maupun global.
- ✓ Mendorong terwujudnya keadilan sosial melalui pemberian kesempatan belajar yang setara bagi seluruh warga negara.

Secara keseluruhan, tujuan dari peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan adalah menciptakan sistem pendidikan yang tidak hanya menjangkau seluruh masyarakat, tetapi juga mampu menghasilkan lulusan yang cerdas, ber karakter, kompeten, dan siap menghadapi tantangan zaman. Pendidikan bukan hanya sebagai hak, tetapi juga sebagai kunci utama dalam menciptakan masa depan bangsa yang lebih baik. Dari Tujuan di atas terdapat 2 sasaran, sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Satuan Pendidikan

Meningkatnya kualitas satuan pendidikan adalah untuk menciptakan lembaga pendidikan yang mampu menyelenggarakan proses belajar mengajar secara efektif, efisien, dan relevan dengan tuntutan perkembangan zaman.

Satuan pendidikan yang berkualitas adalah fondasi utama dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga keterampilan, karakter, dan daya saing yang tinggi, baik di tingkat nasional maupun global. Peningkatan kualitas satuan pendidikan bertujuan agar setiap lembaga pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah, mampu memenuhi standar nasional pendidikan secara menyeluruh.

Hal ini mencakup aspek manajemen kelembagaan, kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, kurikulum yang kontekstual, proses pembelajaran yang aktif dan berpusat pada peserta didik, serta sarana prasarana yang memadai.

Dengan meningkatnya kualitas satuan pendidikan, diharapkan setiap sekolah dan lembaga Pendidikan Dengan meningkatnya kualitas satuan pendidikan, diharapkan setiap sekolah dan lembaga pendidikan lainnya dapat menjadi lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang peserta didik, serta mampu membentuk pribadi yang mandiri, berkarakter, kreatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Selain itu, kualitas satuan pendidikan yang baik juga mendorong terciptanya budaya mutu di lingkungan sekolah, di mana semua unsur — mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, hingga peserta didik — memiliki komitmen bersama untuk terus berkembang dan berinovasi.

Lebih jauh, peningkatan kualitas satuan pendidikan juga bertujuan untuk:

- Meningkatkan mutu hasil belajar peserta didik melalui proses pembelajaran yang berkualitas dan berorientasi pada kompetensi.
- Meningkatkan profesionalisme dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, agar mampu melaksanakan tugas secara optimal dan berkelanjutan.
- Mewujudkan tata kelola sekolah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, sebagai bagian dari manajemen berbasis sekolah yang efektif.
- Memastikan pemenuhan standar nasional pendidikan, baik dari aspek isi, proses, penilaian, lulusan, pendidik, sarpras, pengelolaan, hingga pembiayaan.
- Mendorong inovasi dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan global, agar satuan pendidikan tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga sebagai pusat pengembangan potensi peserta didik secara holistik.

Secara keseluruhan, tujuan dari meningkatnya kualitas satuan pendidikan adalah untuk memperkuat kapasitas lembaga pendidikan dalam memberikan layanan yang bermutu, merata, dan berkelanjutan, sehingga dapat berkontribusi langsung dalam mencetak generasi yang cerdas, unggul, dan berdaya saing tinggi demi kemajuan bangsa dan negara.

Tujuan 2 : Penguatan Tata Kelola, Integritas, Akuntabilitas dan Citra Masyarakat

Tujuan jangka panjang Dinas Pendidikan Kota Tarakan adalah mendorong kebijakan sektor agar mampu memberikan arah reformasi pendidikan secara efektif, efisien dan akuntabel. Kebijakan ini diarahkan pada pembenahan perencanaan jangka menengah dengan menetapkan kebijakan strategis serta program-program yang didasarkan pada urutan prioritas. Di samping itu, disusun pula pola-pola pendanaan bagi keseluruhan sektor berdasarkan prioritas, baik dari sumber Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, orang tua maupun lain di setiap tingkat pemerintahan.

Kebijakan tata kelola dan akuntabilitas meliputi sistem pembiayaan berbasis kinerja baik di tingkat satuan pendidikan maupun pemerintah daerah, dan manajemen berbasis sekolah (MBS), untuk membantu Pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya serta memonitor kinerja pendidikan secara keseluruhan. Di samping itu, peran serta masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan kinerja pendidikan ditingkatkan melalui peran komite sekolah/satuan pendidikan dan dewan pendidikan.

Pemerintah bertekad mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta memberikan pelayanan yang lebih bermutu, efektif, dan efisien sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintahan yang bersih dari KKN diwujudkan melalui internalisasi etos kerja serta disiplin kerja yang tinggi sebagai bentuk akuntabilitas aparatur negara serta perwujudan profesionalisme aparatur. Untuk itu, segenap aparatur yang ada di Dinas Pendidikan Kota Tarakan perlu

meningkatkan kinerjanya untuk mewujudkan pelayanan yang bermutu, merata dan adil di dalam suatu tata kelola pemerintahan yang sehat. Aparatur juga perlu mengubah atas perilaku dan sikap seorang birokrat menjadi pelayan masyarakat yang profesional.

Kebijakan perwujudan tata kelola pemerintahan yang sehat dan akuntabel dilakukan secara intensif melalui sistem pengendalian internal (SPI), pengawasan masyarakat, serta pengawasan fungsional yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat, Badan Pengawas Keuangan, dan Badan Pengawas Keuangan Provinsi, terhadap hasil pembangunan pendidikan, sedangkan pengawasan masyarakat dilakukan langsung oleh individu-individu atau anggota masyarakat yang mempunyai bukti-bukti penyalahgunaan wewenang sejalan dengan pembagian kewenangan sedangkan pemerintah daerah berperan dalam manajemen sarana/prasarana dan operasional layanan pendidikan.

Untuk peningkatan efisiensi dan mutu layanan, diperlukan pengembangan kapasitas serta penataan tata kelola pendidikan yang sehat dan akuntabel, baik pada tingkat satuan pendidikan formal maupun non formal. Dalam kaitan itu, Dinas Pendidikan Kota Tarakan lebih berperan dalam mendorong otonomi satuan pendidikan melalui pengembangan kapasitas dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang bermutu. Menata sistem terhadap penguatan tata kelola manajemen pendidikan secara baik dan akuntabel merupakan sistem pengendalian manajemen di satuan kerja Dinas Pendidikan Kota Tarakan untuk tahun-tahun berikutnya dengan dimulai sejak tahun ini. Pengaturan dan pengelolaan sistem tata kelola yang baik dapat dimulai melalui, (1) Penguatan tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di satuan kerja Dinas Pendidikan Kota Tarakan, (2) Penguatan tata kelola dan sistem pengendalian manajemen terhadap UPT Dinas Pendidikan Kota Tarakan antara lain Sekolah dan SKB (Sarana Kegiatan Belajar).

Penguatan tata kelola dan sistem pengendalian manajemen Dinas Pendidikan Kota Tarakan juga diharapkan dapat memberikan pelayanan prima dalam perencanaan dan kerja sama, perwujudan pelayanan prima di bidang pengelolaan anggaran, perwujudan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian yang andal, perwujudan layanan prima di bidang hukum dan organisasi, dan perwujudan pelayanan prima dalam menunjang fungsi pelayanan umum Dinas Pendidikan Kota Tarakan.

3.1 Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka panjang Kota Tarakan Tahun 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025–2029 merupakan tahap awal dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tarakan Tahun 2025–2045. Dokumen ini menjadi pedoman penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan, sekaligus meletakkan fondasi bagi pencapaian visi jangka panjang “Kota Tarakan sebagai kota yang cerdas, sejahtera, dan berdaya saing.”

Strategi pembangunan Kota Tarakan periode 2025–2029 diarahkan pada penguatan 20 program prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Program-program ini disusun dengan mengacu pada kebutuhan masyarakat, potensi daerah, serta sinkronisasi dengan program prioritas nasional. Beberapa program nasional yang akan diintegrasikan ke dalam perencanaan daerah antara lain Program Makan Bergizi Gratis, Program Koperasi Merah Putih, Program Swasembada Pangan, Sekolah Rakyat, serta Program Tiga Juta Rumah. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan Kota Tarakan tidak berjalan sendiri, melainkan menjadi bagian dari kerangka besar pembangunan nasional.

Dalam pelaksanaannya, arah kebijakan pembangunan Kota Tarakan 2025–2029 menekankan pada pemanfaatan sumber daya yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, serta pelatihan tenaga kerja agar masyarakat Tarakan lebih berdaya saing, khususnya menghadapi tantangan dan peluang yang muncul dari pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Selain peningkatan kualitas SDM, pemerataan pembangunan menjadi fokus penting agar manfaat pembangunan tidak hanya dirasakan di pusat kota, tetapi juga di seluruh wilayah Tarakan. Pemerataan ini diiringi dengan penguatan ekonomi daerah yang berkeadilan melalui dukungan terhadap UMKM, sektor jasa, perikanan, perdagangan, serta ekonomi kreatif yang menjadi keunggulan Kota Tarakan.

Tata kelola pemerintahan juga diarahkan untuk semakin adaptif dan responsif terhadap dinamika perubahan. Pemerintah daerah dituntut mampu menghadirkan birokrasi yang profesional, transparan, dan cepat dalam memberikan pelayanan publik. Di sisi lain, aspek lingkungan hidup yang berkelanjutan mendapatkan perhatian serius, mengingat posisi Tarakan sebagai kota pesisir yang rentan terhadap banjir, abrasi, dan dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, strategi pembangunan diarahkan untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk mitigasi bencana dan perlindungan lingkungan, dalam setiap kebijakan dan program pembangunan.

Dengan strategi dan arah kebijakan tersebut, RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025–2029 diharapkan mampu meletakkan dasar pembangunan yang kokoh. Lima tahun pertama ini bukan hanya menjadi momentum untuk menjawab kebutuhan mendesak masyarakat, tetapi juga menjadi landasan untuk mewujudkan pembangunan jangka panjang yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan menuju Tarakan yang lebih maju.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Bidang Pendidikan Tahun 2025-2029

Bidang pendidikan menjadi salah satu prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025–2029. Pendidikan dipandang sebagai fondasi penting untuk membangun sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Hal ini sejalan dengan visi jangka panjang Kota Tarakan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, sejahtera, dan produktif.

Strategi pembangunan pendidikan pada periode ini diarahkan pada peningkatan akses, pemerataan, dan kualitas layanan pendidikan. Pemerintah Kota Tarakan berkomitmen memperluas akses pendidikan dasar hingga menengah dengan memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai di seluruh wilayah, termasuk di kawasan pinggiran dan permukiman padat penduduk. Pemerataan tenaga pendidik yang profesional juga menjadi perhatian, sehingga distribusi guru dan kualitas pembelajaran dapat lebih merata.

Selain itu, arah kebijakan pendidikan difokuskan pada peningkatan mutu pembelajaran dan kompetensi peserta didik. Pemerintah daerah mendorong penerapan kurikulum yang adaptif dengan kebutuhan zaman, pemanfaatan teknologi digital dalam proses belajar mengajar, serta peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan. Program sekolah ramah anak, pendidikan inklusif, dan perhatian terhadap peserta didik dari keluarga kurang mampu juga terus diperkuat agar tidak ada anak yang tertinggal dari akses pendidikan berkualitas.

Selaras dengan program prioritas nasional, Tarakan juga akan mendukung inisiatif seperti Program Makan Bergizi Gratis di sekolah, peningkatan gizi anak, serta penguatan karakter melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan sekaligus mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, sehingga menghasilkan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif.

Ke depan, arah kebijakan pendidikan juga menekankan pada penguatan pendidikan vokasi dan keterampilan. Hal ini dimaksudkan untuk menyiapkan lulusan yang siap memasuki dunia kerja, terutama dalam mendukung sektor-sektor unggulan daerah seperti perikanan, jasa, perdagangan, dan ekonomi kreatif. Kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) akan diperluas melalui program magang, pelatihan, serta penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja.

Dengan strategi dan arah kebijakan tersebut, pembangunan pendidikan di Kota Tarakan periode 2025–2029 diharapkan mampu mencetak generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga tangguh, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global. Pendidikan yang berkualitas, merata, dan inklusif akan menjadi modal utama bagi Kota Tarakan untuk terus berkembang dan berdaya saing di masa depan.

3.3 Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Kota Tarakan

Untuk mendukung pencapaian tujuan strategis berupa meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Tarakan merumuskan strategi dan arah kebijakan yang terintegrasi, responsif terhadap isu-isu lokal, serta selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi. Strategi ini disusun dengan mempertimbangkan tantangan nyata di lapangan, seperti keterbatasan sarana prasarana, ketimpangan distribusi guru, kesenjangan mutu antar satuan pendidikan, serta kebutuhan untuk beradaptasi dengan transformasi digital di sektor pendidikan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Pendidikan Kota Tarakan mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas horison waktunya dengan serangkaian arahan kebijakan.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*) dimana perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan sebagaimana sasaran akan dicapai dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dari Dinas Pendidikan Kota Tarakan dalam menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi peserta didik maupun para pemangku kepentingan Dinas Pendidikan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran dengan batas waktu tertentu. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Strategi yang diambil diarahkan pada upaya komprehensif untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang merata, terjangkau, dan bermutu bagi seluruh warga Kota Tarakan. Strategi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini sesuai prioritas dan berikut alasan penentuan prioritas :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel
Strategi Dinas Pendidikan tahun 2025-2030
Berdasarkan Urutan Prioritas

No	Strategi	Alasan Penentuan Prioritas
1	Peningkatan Akses Pendidikan melalui pemenuhan biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu dan pendidikan inklusi bagi siswa berkebutuhan khusus (formal dan nonformal)	Paling mendasar dan mendesak untuk pemerataan. Tanpa akses, mutu tidak akan relevan. Menyentuh kelompok rentan.
2	Peningkatan Kualitas Guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional, inovasi pembelajaran, dan peningkatan kesejahteraan	Guru adalah kunci utama kualitas. Tanpa guru yang kompeten dan sejahtera, pembelajaran tidak akan efektif.
3	Pemenuhan Prasarana Pendidikan melalui pembangunan dan rehabilitasi sekolah	Infrastruktur dasar (gedung, ruang kelas) sangat penting untuk keberlangsungan belajar. Terutama di daerah pesisir/terpencil.
4	Pengembangan Pembelajaran dan Kurikulum yang berpusat pada kebutuhan dan minat siswa	Menyentuh inti proses belajar. Relevansi pembelajaran menentukan daya serap dan minat belajar siswa.
5	Pemenuhan Sarana Pendidikan melalui penyediaan fasilitas (perpustakaan, laboratorium, dll)	Mendukung pembelajaran aktif dan penguatan kompetensi siswa. Lebih berdampak setelah prasarana terpenuhi.
6	Pengembangan Sistem Evaluasi melalui penyediaan akses internet dan perangkat TIK	Mendukung asesmen dan pemantauan mutu. Perlu kesiapan infrastruktur dan SDM.
7	Meningkatkan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan yang Bermutu melalui akreditasi satuan pendidikan	Menjamin standar mutu pendidikan secara institusional. Perlu dibangun bertahap, setelah input pendidikan mulai terpenuhi.
8	Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui keterlibatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan	Partisipasi masyarakat penting, tapi dampaknya bersifat tidak langsung. Cocok dikembangkan paralel dengan pemenuhan akses.
9	Terfasilitasinya Pelaporan Kinerja	Bersifat administratif dan pendukung sistem. Penting untuk akuntabilitas, tapi bukan prioritas utama dibanding akses dan mutu pembelajaran.

Tabel
Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Pendidikan tahun 2025-2030

No	Strategi	Arah Kebijakan
1	Peningkatan Akses Pendidikan melalui pemenuhan biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu dan pendidikan inklusi bagi siswa berkebutuhan khusus (formal dan nonformal)	Pemberian bantuan pendidikan bagi siswa tidak mampu dan penguatan layanan pendidikan inklusi di semua jenjang
2	Peningkatan Kualitas Guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional, inovasi pembelajaran, dan peningkatan kesejahteraan	Implementasi Kurikulum Merdeka dan pembelajaran berdiferensiasi sesuai minat dan kemampuan siswa
3	Pemenuhan Prasarana Pendidikan melalui pembangunan dan rehabilitasi sekolah	Pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas di daerah dengan kebutuhan tinggi, termasuk wilayah pesisir.
4	Pengembangan Pembelajaran dan Kurikulum yang berpusat pada kebutuhan dan minat siswa	Penyediaan fasilitas pembelajaran seperti perpustakaan, laboratorium, dan media belajar di sekolah.
5	Pemenuhan Sarana Pendidikan melalui penyediaan fasilitas (perpustakaan, laboratorium, dll)	Penyediaan akses internet dan perangkat TIK untuk mendukung evaluasi dan pembelajaran digital.
6	Pengembangan Sistem Evaluasi melalui penyediaan akses internet dan perangkat TIK	Pelatihan guru berkelanjutan dan pemberian insentif untuk mendorong inovasi pembelajaran.
7	Meningkatkan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan yang Bermutu melalui akreditasi satuan pendidikan	Penguatan peran masyarakat dan komite sekolah dalam mendukung pelaksanaan program pendidikan.
8	Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui keterlibatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan	Pendampingan akreditasi dan pemenuhan standar mutu untuk semua satuan pendidikan.
9	Terfasilitasinya Pelaporan Kinerja	Penguatan sistem pelaporan kinerja pendidikan berbasis digital dan terintegrasi.

Strategi dan Arah kebijakan dinas pendidikan kota Tarakan dalam rangka mencapai sasaran strategis perangkat daerah dilaksanakan setiap tahun yang akan diharapkan dapat mencapai prioritas pembangunan dibidang pendidikan.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Pendidikan tahun 2025-2030

Visi : Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Cerdas yang bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, perikanan kelautan, dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan maju menuju masyarakat sejahtera			
Misi: Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (Misi 1)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Aksebilitas dan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya Partisipasi Pendidikan	Peningkatan Akses Pendidikan melalui pemenuhan biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu dan pendidikan inklusi bagi siswa berkebutuhan khusus (formal dan nonformal)	Pemberian bantuan pendidikan bagi siswa tidak mampu dan penguatan layanan pendidikan inklusi di semua jenjang
		Pemenuhan Prasarana Pendidikan melalui pembangunan dan rehabilitasi sekolah	Pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas di daerah dengan kebutuhan tinggi, termasuk wilayah pesisir.
	Meningkatnya Kualitas Satuan Pendidikan	Peningkatan Kualitas Guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional, inovasi pembelajaran, dan peningkatan kesejahteraan	Implementasi Kurikulum Merdeka dan pembelajaran berdiferensiasi sesuai minat dan kemampuan siswa
		Pengembangan Pembelajaran dan Kurikulum yang berpusat pada kebutuhan dan minat siswa	Penyediaan fasilitas pembelajaran seperti perpustakaan, laboratorium, dan media belajar di sekolah.
		Pemenuhan Sarana Pendidikan melalui penyediaan fasilitas (perpustakaan, laboratorium, dll)	Penyediaan akses internet dan perangkat TIK untuk mendukung evaluasi dan pembelajaran digital.
		Pengembangan Sistem Evaluasi melalui penyediaan akses internet dan perangkat TIK	Pelatihan guru berkelanjutan dan pemberian insentif untuk mendorong inovasi pembelajaran.
		Meningkatkan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan yang Bermutu melalui akreditasi satuan pendidikan	Penguatan peran masyarakat dan komite sekolah dalam mendukung pelaksanaan program pendidikan.
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui keterlibatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan	Pendampingan akreditasi dan pemenuhan standar mutu untuk semua satuan pendidikan.
		Terfasilitasinya Pelaporan Kinerja	Penguatan sistem pelaporan kinerja pendidikan berbasis digital dan terintegrasi.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Pendidikan dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPD Kota Tarakan 2025-2029.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Pemerintah Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Renstra Organisasi Pemerintah Daerah. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada galibnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Dinas Pendidikan dalam lima tahun mendatang. (tabel dapat dilihat pada lampiran).

4.1 Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran atau tolok ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu program, kegiatan, atau kebijakan telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam konteks pembangunan daerah, indikator kinerja berfungsi sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan strategi dan arah kebijakan, baik dari segi hasil (outcome) maupun dampak (impact). Dengan adanya indikator kinerja, pencapaian pembangunan dapat dinilai secara lebih objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam bidang pendidikan, indikator kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pendidikan. Beberapa contoh indikator kinerja yang umum digunakan antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk mengukur pemerataan akses pendidikan; Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) untuk menggambarkan capaian pendidikan masyarakat; serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) komponen pendidikan yang menjadi ukuran kualitas sumber daya manusia. Selain itu, persentase guru yang memenuhi kualifikasi akademik dan sertifikasi.

Indikator kinerja Dinas Pendidikan yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD, secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan
Tahun 2025-2030

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Rata-Rata Lama Sekolah	Persentase	10.37	10.47	10.57	10.67	10.77	10.87	10.97	
2	Angka Harapan Lama Sekolah	Persentase	14.22	14.36	14.5	14.64	14.78	14.92	15.06	
3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Kesetaraan Usia 7-18 Tahun	Persentase	22.71	26.81	30.9	35	39.1	43.2	47.3	
4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Usia 5-6 Tahun	Persentase	65.86	69.04	72.23	75.26	78.3	81.34	84,31	
5	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar Usia 7-15 Tahun	Persentase	97.72	97.99	98.25	98.52	98.78	99.04	99.31	
6	Persentase Rata-Rata Capaian Kemampuan Literasi	Persentase	71.59	75.19	76.99	78.79	80.59	82.39	82.59	
7	Persentase Rata-Rata Capaian Kemampuan Numerasi	Persentase	59.15	63.55	65.75	67.95	70.15	72.35	72.55	
8	Proporsi Jumlah Satuan Pendidikan Terakreditasi Minimal B	Persentase	53.24	55	56.1	57.22	58.36	59.52	60.68	
9	Persentase Rata-Rata Capaian Iklim Keamanan, Kebhinekaan dan Inklusivitas	Persentase	67.58	69.13	70.68	72.23	73.78	75.33	76.88	
10	Nilai SAKIP	Persentase	81.61	81.77	81.94	82.1	82.26	82.42	82.62	
11	Nilai IKM	Persentase	84.97	85.14	85.31	85.48	85.65	85.82	86.02	

4.2 Keterkaitan Indikator Kinerja Utama dengan Standar Pelayanan Minimal

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada dasarnya merupakan ukuran prioritas yang digunakan pemerintah daerah untuk menilai capaian pembangunan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan strategis yang tertuang dalam RPJMD. Sementara itu, Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam rangka menjamin hak dasar masyarakat.

Dalam bidang pendidikan, keterkaitan antara IKU dan SPM sangat erat, karena indikator kinerja yang ditetapkan pemerintah daerah harus selaras dengan standar pelayanan dasar yang diwajibkan oleh regulasi nasional. Misalnya, SPM bidang pendidikan menegaskan bahwa setiap anak usia 5-6 tahun PAUD 7–15 tahun Pendidikan Dasar dan 7-18 tahun Kesetaraan wajib mendapatkan layanan Pendidikan yang bermutu.

Dengan demikian, IKU dan SPM saling melengkapi: SPM menjadi batas minimal pelayanan yang wajib dipenuhi pemerintah daerah, sedangkan IKU berfungsi sebagai ukuran kinerja strategis yang mencerminkan pencapaian target pembangunan secara lebih luas. Kesesuaian antara keduanya memastikan bahwa pembangunan pendidikan tidak hanya memenuhi kewajiban minimal, tetapi juga mampu mendorong peningkatan kualitas layanan menuju standar yang lebih tinggi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum disebutkan Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan

SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Keterkaitan SPM dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kota Tarakan selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Keterkaitan Indikator Kinerja Utama dengan
Standar Pelayanan Minimum

No	Indikator Kinerja Utama	Standar Pelayanan Minimum (SPM)	Program	Kegiatan
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 Tahun	Jumlah Warga Negara usia 5-6tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
		Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi (S1)/ Diploma empat (D-IV)		
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-15 Tahun	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 Tahun		Pengelolaan Pendidikan Dasar
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 13-15 Tahun		Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama
3	Persentase Rata-Rata Capaian Kemampuan Literasi	Kemampuan Literasi SD		Pengelolaan Pendidikan Dasar
		Kemampuan Literasi SMP		Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama
4	Persentase Rata-Rata Capaian Kemampuan Numerasi	Kemampuan Numerasi SD		Pengelolaan Pendidikan Dasar
		Kemampuan Numerasi SMP		Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama
5	Proporsi Jumlah Satuan Pendidikan Terakreditasi Minimal B	Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Pengelolaan Pendidikan Dasar Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Non Formal
6	Persentase Rata-Rata Capaian Iklim Keamanan, Kebhinekaan dan Inklusivitas	Indeks Iklim Keamanan SD		Pengelolaan Pendidikan Dasar
		Indeks Iklim Keamanan SMP		Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama
		Indeks Iklim Kebhinekaan SD		Pengelolaan Pendidikan Dasar
		Indeks Iklim Kebhinekaan SMP		Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama
		Indeks Iklim Inklusifitas SD		Pengelolaan Pendidikan Dasar
		Indeks Iklim Inklusifitas SMP		Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama
7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Kesetaraan Usia 7-18 Tahun	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Kesetaraan Usia 7-18 Tahun		Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan

Tabel 4.3
Rencana Program/Kegiatan/SubKegiatan dan Pendanaan Dinas Pendidikan Kota Tarakan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				310.382.011.161,00		308.504.011.161,00		309.032.011.161,00		306.484.011.161,00		307.812.011.161,00		
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				217.940.031.563,00		217.217.031.563,00		217.940.031.563,00		217.217.031.563,00		217.890.031.563,00		
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	100	100	1.990.000.000,00	100	1.267.000.000,00	100	1.990.000.000,00	100	1.267.000.000,00	100	1.940.000.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	
1.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				338.000.000,00		45.000.000,00		338.000.000,00		45.000.000,00		338.000.000,00		
Tersedianya layanan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2	2	338.000.000,00	2	45.000.000,00	2	338.000.000,00	2	45.000.000,00	2	338.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	1				1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	0	60		60		60		60		60			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	991	1.586		0		1.586		0		1.586			
1.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				293.000.000,00		0,00		293.000.000,00		0,00		293.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	991	1.586	293.000.000,00	0	0,00	1.586	293.000.000,00	0	0,00	1.586	293.000.000,00		
1.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.01.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	60	5.000.000,00	60	5.000.000,00	60	5.000.000,00	60	5.000.000,00	60	5.000.000,00		
1.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	1	5.000.000,00		5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				358.000.000,00		358.000.000,00		358.000.000,00		358.000.000,00		358.000.000,00		
Tersedianya layanan administrasi umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	1	358.000.000,00		358.000.000,00	1	358.000.000,00	1	358.000.000,00	1	358.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1			1	1	1						
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1			1	1	1						
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1			1	1	1						
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1			1	1	1						
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0	1			1	1	1						
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1			1	1	1						
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1			1	1	1						
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1			1	1	1						
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1			1	1	1						
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	1			1	1	1						
1.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00		
1.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	100.000.000,00		100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	1	5.000.000,00		5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
1.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0	1	5.000.000,00		5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0	1	5.000.000,00		5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	100.000.000,00		100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1	5.000.000,00		5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1	5.000.000,00		5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				330.000.000,00		100.000.000,00		330.000.000,00		100.000.000,00		330.000.000,00		
Terkelolanya data Barang Milik Daerah dalam aplikasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	1	330.000.000,00		100.000.000,00	1	330.000.000,00	1	100.000.000,00	1	330.000.000,00		
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1		0		1		1					
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	5		5		5		5					
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1					
	1.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				200.000.000,00		0,00		200.000.000,00		0,00			200.000.000,00
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	200.000.000,00	0	0,00	1	200.000.000,00	0	0,00	1	200.000.000,00		
1.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				20.000.000,00		0,00		20.000.000,00		0,00		20.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	1	20.000.000,00		0,00	1	20.000.000,00	1	0,00	1	20.000.000,00		
1.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00		
1.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000,00		0,00		10.000.000,00		0,00		10.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	10.000.000,00	1	0,00	1	10.000.000,00	1	0,00	1	10.000.000,00		
1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				304.000.000,00		304.000.000,00		304.000.000,00		304.000.000,00		304.000.000,00		
Tersedianya layanan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	304.000.000,00	1	304.000.000,00	1	304.000.000,00	1	304.000.000,00	1	304.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00		
1.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				660.000.000,00		460.000.000,00		660.000.000,00		460.000.000,00		610.000.000,00		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	15	660.000.000,00	15	460.000.000,00	15	660.000.000,00	15	460.000.000,00	15	610.000.000,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10	117		117		117		117					
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	5		5		5		5					
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1		1		1		1					
							50.000.000,00				50.000.000,00			
1.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00		
1.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				375.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10	117	375.000.000,00	117	375.000.000,00	117	375.000.000,00	117	375.000.000,00	117	375.000.000,00		
1.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000,00		0,00		200.000.000,00		0,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	200.000.000,00	1	0,00	1	200.000.000,00	1	0,00	1	150.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00			
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	15	35.000.000,00	15	35.000.000,00	15	35.000.000,00	15	35.000.000,00	15	35.000.000,00			
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	215.950.031.563,00	100	215.950.031.563,00	100	215.950.031.563,00	100	215.950.031.563,00	100	215.950.031.563,00			
1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				215.950.031.563,00		215.950.031.563,00		215.950.031.563,00		215.950.031.563,00		215.950.031.563,00			
Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	215.950.031.563,00	1	215.950.031.563,00	1	215.950.031.563,00	1	215.950.031.563,00	1	215.950.031.563,00			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.671	1.750		1.800		1.850		1.900		1.950				
1.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				210.901.510.178,00		210.901.510.178,00		210.901.510.178,00		210.901.510.178,00		210.901.510.178,00			
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.671	1.750	210.901.510.178,00	1.800	210.901.510.178,00	1.850	210.901.510.178,00	1.900	210.901.510.178,00	1.950	210.901.510.178,00			
1.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5.048.521.385,00		5.048.521.385,00		5.048.521.385,00		5.048.521.385,00		5.048.521.385,00			
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	5.048.521.385,00	1	5.048.521.385,00	1	5.048.521.385,00	1	5.048.521.385,00	1	5.048.521.385,00			
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				92.111.979.598,00		90.956.979.598,00		90.761.979.598,00		88.936.979.598,00		89.591.979.598,00			
Meningkatnya kualitas lingkungan belajar	Persentase Rata-Rata Capaian Iklim Keamanan, Kebhinekaan dan Inklusivitas Sekolah Dasar (%)	68,85	74,43	185.000.000,00	77,22	185.000.000,00	80,01	185.000.000,00	82,80	185.000.000,00	83,00	185.000.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan		
	Persentase Rata-Rata Capaian Iklim Keamanan, Kebhinekaan dan Inklusivitas Sekolah Menengah Pertama (%)	69,40	72,68		74,32		75,96		77,60		77,80				
	Persentase Rata-Rata Capaian Iklim Keamanan, Kebhinekaan dan Inklusivitas Pendidikan Anak Usia Dini (%)	75,12	75,52		75,72		75,92		76,12		76,32				
1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				42.146.739.000,00		42.906.739.000,00		42.966.739.000,00		43.196.739.000,00		44.176.739.000,00			
Terlaksananya sosialisasi dan advokasi lingkup SD	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	0	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00			
	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	0	1				1				1			1	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.01.02.2.01.0039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	0	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
1.01.02.2.01.0043 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	0	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00		
1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				28.326.139.000,00		28.996.139.000,00		29.276.139.000,00		28.411.139.000,00		28.311.139.000,00		
Terlaksananya sosialisasi dan advokasi lingkup SMP	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	0	3	45.000.000,00	3	45.000.000,00	3	45.000.000,00	3	45.000.000,00	3	45.000.000,00		
	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
1.01.02.2.02.0052 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	0	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
1.01.02.2.02.0055 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	0	3	25.000.000,00	3	25.000.000,00	3	25.000.000,00	3	25.000.000,00	3	25.000.000,00		
1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				14.923.681.600,00		12.353.681.600,00		11.923.681.600,00		10.833.681.600,00		10.618.681.600,00		
Terlaksananya sosialisasi dan Advokasi lingkup PAUD	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)		1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	0	3		3		3		3		3			
1.01.02.2.03.0026 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	0	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00		
1.01.02.2.03.0037 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)		1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				6.715.419.998,00		6.700.419.998,00		6.595.419.998,00		6.495.419.998,00		6.485.419.998,00		
Terlaksananya sosialisasi dan Advokasi lingkup pendidikan kesetaraan	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	0	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00		
	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
1.01.02.2.04.0028 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	0	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
1.01.02.2.04.0031 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	0	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
Meningkatnya kualitas peserta didik	Persentase Rata-rata Capaian Kemampuan Literasi Sekolah Dasar (%)	64,84	69,85	6.630.836.800,00	72,35	6.630.836.800,00	74,85	6.630.836.800,00	77,35	6.630.836.800,00	79,85	6.605.836.800,00		
	Persentase Rata-rata Capaian Kemampuan Numerasi Sekolah Dasar (%)	52,29	58,09		60,99		63,89		66,79		69,69			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Persentase Rata-rata Capaian Kemampuan Literasi Sekolah Menengah Pertama (%)	78,32	80,52		81,62		82,72		83,82		84,92			
	Persentase Rata-rata Capaian Kemampuan Numerasi Sekolah Menengah Pertama (%)	66,01	69,01		70,51		72,01		73,51		75,01			
	Persentase Rata-rata Capaian Kemampuan Literasi Sekolah Kesetaraan (%)	49,11	54,96		55,16		55,36		55,56		55,76			
	Persentase Rata-rata Capaian Kemampuan Numerasi Sekolah Kesetaraan (%)	49,83	52,76		52,96		53,16		53,36		53,56			
	Persentase Capaian Proses Belajar yang Sesuai bagi Pendidikan Anak Usia Dini (%)	67,48	69,10		69,30		69,50		69,70		69,90			
1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				42.146.739.000,00		42.906.739.000,00		42.966.739.000,00		43.196.739.000,00		44.176.739.000,00		
Terbinanya minat bakat dan kreativitas siswa SD	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)		65	1.487.050.000,00	65	1.487.050.000,00	65	1.487.050.000,00	65	1.487.050.000,00	65	1.487.050.000,00		
	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)		4.153		4.153		4.153		4.153		4.153			
1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				1.448.550.000,00		1.448.550.000,00		1.448.550.000,00		1.448.550.000,00		1.448.550.000,00		
Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)		4.153	1.448.550.000,00	4.153	1.448.550.000,00	4.153	1.448.550.000,00	4.153	1.448.550.000,00	4.153	1.448.550.000,00		
1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				38.500.000,00		38.500.000,00		38.500.000,00		38.500.000,00		38.500.000,00		
Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)		65	38.500.000,00	65	38.500.000,00	65	38.500.000,00	65	38.500.000,00	65	38.500.000,00		
Tersedianya sarana pendidikan SD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)		30	1.000.000.000,00	30	1.000.000.000,00	30	1.000.000.000,00	30	1.000.000.000,00	30	1.000.000.000,00		
	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	0	250		250		250		250		250			
	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)		1.200		1.200		1.200		1.200		1.200			
	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	0	5		5		5		5		5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
1.01.02.2.01.0014 - Pengadaan Mebel Sekolah				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)		1.200	250.000.000,00	1.200	250.000.000,00	1.200	250.000.000,00	1.200	250.000.000,00	1.200	250.000.000,00		
1.01.02.2.01.0015 - Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket)	0	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00		
1.01.02.2.01.0016 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	0	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00		
1.01.02.2.01.0019 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	0	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
1.01.02.2.01.0033 - Pemeliharaan Mebel Sekolah				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.01.02.2.01.0044 - Penataan Ruang/Sudut Baca				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	0	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00		
1.01.02.2.01.0045 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	0	250	25.000.000,00	250	25.000.000,00	250	25.000.000,00	250	25.000.000,00	250	25.000.000,00		
1.01.02.2.01.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)		30	300.000.000,00	30	300.000.000,00	30	300.000.000,00	30	300.000.000,00	30	300.000.000,00		
1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				28.326.139.000,00		28.996.139.000,00		29.276.139.000,00		28.411.139.000,00		28.311.139.000,00		
Terbinanya minat bakat dan kreativitas siswa SMP	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)		28	1.189.766.800,00	28	1.189.766.800,00	28	1.189.766.800,00	28	1.189.766.800,00	28	1.189.766.800,00		
	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)		2.299		2.299		2.299		2.299		2.299			
1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				1.159.766.800,00		1.159.766.800,00		1.159.766.800,00		1.159.766.800,00		1.159.766.800,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)		2.299	1.159.766.800,00	2.299	1.159.766.800,00	2.299	1.159.766.800,00	2.299	1.159.766.800,00	2.299	1.159.766.800,00			
1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00			
Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	28	30.000.000,00	28	30.000.000,00	28	30.000.000,00	28	30.000.000,00	28	30.000.000,00	28	30.000.000,00		
Tersedianya sarana pendidikan SMP	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	15	1.579.020.000,00	15	1.579.020.000,00	15	1.579.020.000,00	15	1.579.020.000,00	15	1.579.020.000,00	15	1.579.020.000,00		
	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket)	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	250		250		250		250		250		250			
	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	50		50		50		50		50		50			
	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	864		864		864		864		864		864			
	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1		1		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	10		10		10		10		10		10			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	2		2		2		2		2		2			
	1.01.02.2.02.0025 - Pengadaan Mebel Sekolah			654.020.000,00		654.020.000,00		654.020.000,00		654.020.000,00		654.020.000,00			
Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	864	654.020.000,00	864	654.020.000,00	864	654.020.000,00	864	654.020.000,00	864	654.020.000,00	864	654.020.000,00		
1.01.02.2.02.0026 - Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket)	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
1.01.02.2.02.0027 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah			200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
1.01.02.2.02.0030 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00		
1.01.02.2.02.0046 - Pemeliharaan Mebel Sekolah			100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00		
1.01.02.2.02.0056 - Penataan Ruang/Sudut Baca			50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)		10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00		
1.01.02.2.02.0061 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)		250	25.000.000,00	250	25.000.000,00	250	25.000.000,00	250	25.000.000,00	250	25.000.000,00		
1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)		15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00		
1.01.02.2.02.0068 - Penyediaan infrastruktur TIK				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)		1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				14.923.681.600,00		12.353.681.600,00		11.923.681.600,00		10.833.681.600,00		10.618.681.600,00		
Terbinanya minat bakat dan kreativitas siswa PAUD	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik)		1.000	100.000.000,00	1.000	100.000.000,00	1.000	100.000.000,00	1.000	100.000.000,00	1.000	100.000.000,00		
1.01.02.2.03.0034 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Tersedianya sarana pendidikan PAUD	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik)		1.000	100.000.000,00	1.000	100.000.000,00	1.000	100.000.000,00	1.000	100.000.000,00	1.000	100.000.000,00		
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)		4	600.000.000,00	4	600.000.000,00	4	600.000.000,00	4	600.000.000,00	4	585.000.000,00		
	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia (Paket)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)		10		10		10		10		10			
	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara (Unit)		15		15		15		10		10			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)		2		2		2		2		2			
1.01.02.2.03.0007 - Pengadaan Mebel PAUD				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)		10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00		
1.01.02.2.03.0008 - Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia (Paket)	0	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
1.01.02.2.03.0020 - Pemeliharaan Mebel Sekolah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		35.000.000,00		
Terpeliharanya Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara (Unit)		15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	35.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1.01.02.2.03.0042 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00			
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)		2	225.000.000,00	2	225.000.000,00	2	225.000.000,00	2	225.000.000,00	2	225.000.000,00			
1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00			
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)		4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00			
1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				6.715.419.998,00		6.700.419.998,00		6.595.419.998,00		6.495.419.998,00		6.485.419.998,00			
Terbinanya minat bakat dan kreativitas siswa kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)		500	100.000.000,00	500	100.000.000,00	500	100.000.000,00	500	100.000.000,00	500	100.000.000,00			
	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)		750		750		750		750		750				
1.01.02.2.04.0035 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00			
Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)		500	50.000.000,00	500	50.000.000,00	500	50.000.000,00	500	50.000.000,00	500	50.000.000,00			
1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00			
Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)		750	50.000.000,00	750	50.000.000,00	750	50.000.000,00	750	50.000.000,00	750	50.000.000,00			
Tersedianya sarana pendidikan kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	0	50	575.000.000,00	50	575.000.000,00	50	575.000.000,00	50	575.000.000,00	50	565.000.000,00			
	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	0	100		100		100		100						
	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)		50		50		50		50						
	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	0	25		25		25		25						
	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	0	1		1		1		1		1		1		
	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	0	1		1		1		1		1		1		
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	0	1		1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.01.02.2.04.0021 - Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)		50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00		
1.01.02.2.04.0033 - Penyediaan infrastruktur TIK				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.01.02.2.04.0034 - Penataan Ruang/Sudut Baca				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.01.02.2.04.0037 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	0	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00		
1.01.02.2.04.0040 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		0,00		
Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	0,00		
1.01.02.2.04.0041 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	0	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
1.01.02.2.04.0048 - Pengadaan Mebel Sekolah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	0	25	50.000.000,00	25	50.000.000,00	25	50.000.000,00	25	50.000.000,00	25	50.000.000,00		
1.01.02.2.04.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	0	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00		
Meningkatnya manajemen satuan pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi (%)	100	100	702.000.000,00	100	682.000.000,00	100	702.000.000,00	100	612.000.000,00	100	612.000.000,00		
1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				42.146.739.000,00		42.906.739.000,00		42.966.739.000,00		43.196.739.000,00		44.176.739.000,00		
	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)		65	45.000.000,00	65	45.000.000,00	65	45.000.000,00	65	45.000.000,00	65	45.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	65	65		65		65		65		65			
1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)		65	35.000.000,00	65	35.000.000,00	65	35.000.000,00	65	35.000.000,00	65	35.000.000,00		
1.01.02.2.01.0030 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	65	65	10.000.000,00	65	10.000.000,00	65	10.000.000,00	65	10.000.000,00	65	10.000.000,00		
1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				28.326.139.000,00		28.996.139.000,00		29.276.139.000,00		28.411.139.000,00		28.311.139.000,00		
Terlaksananya pembinaan manajemen dan kelembagaan SMP	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)		28	50.000.000,00	28	50.000.000,00	28	50.000.000,00	28	50.000.000,00	28	50.000.000,00		
	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)		50		50		50		50		50			
1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)		28	30.000.000,00	28	30.000.000,00	28	30.000.000,00	28	30.000.000,00	28	30.000.000,00		
1.01.02.2.02.0043 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)		50	20.000.000,00	50	20.000.000,00	50	20.000.000,00	50	20.000.000,00	50	20.000.000,00		
1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				14.923.681.600,00		12.353.681.600,00		11.923.681.600,00		10.833.681.600,00		10.618.681.600,00		
Terlaksananya pembinaan manajemen dan kelembagaan PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)		110	537.000.000,00	110	517.000.000,00	110	537.000.000,00	110	447.000.000,00	110	447.000.000,00		
	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)		220		220		220		220		220			
1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD				517.000.000,00		497.000.000,00		517.000.000,00		427.000.000,00		427.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)		110	517.000.000,00	110	497.000.000,00	110	517.000.000,00	110	427.000.000,00	110	427.000.000,00				
1.01.02.2.03.0019 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00				
	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	220		20.000.000,00	220	20.000.000,00	220	20.000.000,00	220	20.000.000,00	220	20.000.000,00				
1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				6.715.419.998,00		6.700.419.998,00		6.595.419.998,00		6.495.419.998,00		6.485.419.998,00				
Terlaksananya pembinaan manajemen dan kelembagaan pendidikan kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	14	14	70.000.000,00	14	70.000.000,00	14	70.000.000,00	14	70.000.000,00	14	70.000.000,00				
	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang)	0	42		42		42		42		42					
1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00				
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	14	14	35.000.000,00	14	35.000.000,00	14	35.000.000,00	14	35.000.000,00	14	35.000.000,00				
1.01.02.2.04.0018 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00				
Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang)	0	42	35.000.000,00	42	35.000.000,00	42	35.000.000,00	42	35.000.000,00	42	35.000.000,00				
Meningkatnya partisipasi pendidikan formal	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A (Angka)	104,06	100	77.493.722.800,00	100	76.443.722.800,00	100	76.263.722.800,00	100	74.783.722.800,00	100	75.463.722.800,00				
	Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A (Angka)	97,82	98,22		98,42		98,62		98,82		99,02					
	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B (Angka)	100,92	100		100		100		100		100					
	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B (Angka)	82,25	82,65		82,85		83,05		83,25		83,45					
	Angka Partisipasi Kasar PAUD (Angka)	55,27	55,67		55,87		56,07		56,27		56,47					
	Angka Partisipasi Murni PAUD (Angka)	45,13	45,53		45,73		45,93		46,13		46,33					
1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				42.146.739.000,00		42.906.739.000,00		42.966.739.000,00		43.196.739.000,00		44.176.739.000,00				
Terpenuhinya biaya pendidikan SD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	0	1	35.674.189.000,00	1	35.674.189.000,00	1	35.674.189.000,00	1	35.674.189.000,00	1	35.674.189.000,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)		6.268		6.268		6.268		6.268		6.268			
	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	65	65		65		65		65		65			
1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				34.252.544.000,00		34.252.544.000,00		34.252.544.000,00		34.252.544.000,00		34.252.544.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	65	65	34.252.544.000,00	65	34.252.544.000,00	65	34.252.544.000,00	65	34.252.544.000,00	65	34.252.544.000,00		
1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	0	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
1.01.02.2.01.0046 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				1.291.645.000,00		1.291.645.000,00		1.291.645.000,00		1.291.645.000,00		1.291.645.000,00		
Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)		6.268	1.291.645.000,00	6.268	1.291.645.000,00	6.268	1.291.645.000,00	6.268	1.291.645.000,00	6.268	1.291.645.000,00		
Tersedianya prasarana pendidikan SD	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	1	3.580.500.000,00	1	4.380.500.000,00	1	4.400.500.000,00	1	4.720.500.000,00	1	5.700.500.000,00		
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)		4		4		4		4		4			
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	50	10		20		30		25		20			
	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1	1		0		1		1		0					
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1	1		1		1		1							
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1	1		2		3		2							
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	41	30		30		30		30							
	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1	1		1		1		1							
1.01.02.2.01.0001 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)				0,00		1.000.000.000,00		0,00		0,00		2.000.000.000,00				
Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1	1	0,00	1	1.000.000.000,00	1	0,00	1	0,00	1	2.000.000.000,00				
1.01.02.2.01.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				648.000.000,00		648.000.000,00		648.000.000,00		648.000.000,00		648.000.000,00				
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1	1	648.000.000,00	1	648.000.000,00	1	648.000.000,00	1	648.000.000,00	1	648.000.000,00				
1.01.02.2.01.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				200.000.000,00		0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		0,00				
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1	1	200.000.000,00	0	0,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	0	0,00				
1.01.02.2.01.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah				324.000.000,00		324.000.000,00		324.000.000,00		324.000.000,00		324.000.000,00				
Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)		1	324.000.000,00	1	324.000.000,00	1	324.000.000,00	1	324.000.000,00	1	324.000.000,00				
1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				426.500.000,00		426.500.000,00		426.500.000,00		426.500.000,00		426.500.000,00				
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	41	30	426.500.000,00	30	426.500.000,00	30	426.500.000,00	30	426.500.000,00	30	426.500.000,00				
1.01.02.2.01.0009 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00				
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)		4	250.000.000,00	4	250.000.000,00	4	250.000.000,00	4	250.000.000,00	4	250.000.000,00				
1.01.02.2.01.0010 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
1.01.02.2.01.0011 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah				112.000.000,00		112.000.000,00		112.000.000,00		112.000.000,00		112.000.000,00		
Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1	1	112.000.000,00	1	112.000.000,00	1	112.000.000,00	1	112.000.000,00	1	112.000.000,00		
1.01.02.2.01.0031 - Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.01.02.2.01.0032 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)		1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00		
1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				320.000.000,00		320.000.000,00		640.000.000,00		960.000.000,00		640.000.000,00		
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		1	320.000.000,00	1	320.000.000,00	2	640.000.000,00	3	960.000.000,00	2	640.000.000,00		
1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				500.000.000,00		500.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		500.000.000,00		
Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	50	10	500.000.000,00	20	500.000.000,00	30	1.000.000.000,00	25	1.000.000.000,00	20	500.000.000,00		
1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				28.326.139.000,00		28.996.139.000,00		29.276.139.000,00		28.411.139.000,00		28.311.139.000,00		
Terpenuhinya biaya pendidikan SMP	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	0	1	21.237.352.200,00	1	21.237.352.200,00	1	21.237.352.200,00	1	21.237.352.200,00	1	21.237.352.200,00		
	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	0	50		50		50		50					
	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	28	28		28		28		28					
	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.320	5.597		5.597		5.597		5.597					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama				1.151.300.000,00		1.151.300.000,00		1.151.300.000,00		1.151.300.000,00		1.151.300.000,00		
Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.320	5.597	1.151.300.000,00	5.597	1.151.300.000,00	5.597	1.151.300.000,00	5.597	1.151.300.000,00	5.597	1.151.300.000,00		
1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				20.006.052.200,00		20.006.052.200,00		20.006.052.200,00		20.006.052.200,00		20.006.052.200,00		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	28	28	20.006.052.200,00	28	20.006.052.200,00	28	20.006.052.200,00	28	20.006.052.200,00	28	20.006.052.200,00		
1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	0	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
1.01.02.2.02.0062 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	0	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00		
Tersedianya prasarana pendidikan SMP	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	2	3.940.000.000,00	1	4.640.000.000,00	1	4.890.000.000,00	1	4.090.000.000,00	1	3.990.000.000,00		
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	0	4		5		6		4		2			
	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)		3		3		3		3		1			
	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)		1		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)		3		3		3		3		1			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)		0		0		1		1		1			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	0	2		2		2		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
	Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat (Unit)	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun (Unit)	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	3		3		3		3		2				
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)		1		1		1		1		1				
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	3		3		3		3		2				
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)		1		2		2		2		1				
1.01.02.2.02.0001 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)				0,00		0,00		500.000.000,00		0,00		1.000.000.000,00			
Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)		0		0,00	0	0,00	1	500.000.000,00	1	0,00	1	1.000.000.000,00		
1.01.02.2.02.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				500.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		500.000.000,00			
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)		1		500.000.000,00	2	1.000.000.000,00	2	1.000.000.000,00	2	1.000.000.000,00	1	500.000.000,00		
1.01.02.2.02.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00			
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)		1		160.000.000,00	1	160.000.000,00	1	160.000.000,00	1	160.000.000,00	1	160.000.000,00		
1.01.02.2.02.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00			
Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)		1		200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
1.01.02.2.02.0006 - Pembangunan Laboratorium				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00			
Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	0	1		200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
	1.01.02.2.02.0007 - Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula				0,00		250.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)	0	1		0,00	1	250.000.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.01.02.2.02.0010 - Pembangunan Fasilitas Parkir				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Fasilitas Parkir yang Terbangun	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun (Unit)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.01.02.2.02.0011 - Pembangunan Kantin Sekolah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Kantin Sekolah yang Terbangun	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				325.000.000,00		325.000.000,00		325.000.000,00		325.000.000,00		325.000.000,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	0	1	325.000.000,00	1	325.000.000,00	1	325.000.000,00	1	325.000.000,00	1	325.000.000,00		
1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		100.000.000,00		
Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)		3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.01.02.2.02.0016 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		100.000.000,00		
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)		3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.01.02.2.02.0017 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		200.000.000,00		
Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	2	200.000.000,00		
1.01.02.2.02.0018 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		200.000.000,00		
Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	2	200.000.000,00		
1.01.02.2.02.0022 - Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	0	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
1.01.02.2.02.0023 - Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Kantin Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	0	2	600.000.000,00	2	600.000.000,00	2	600.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	0	4	500.000.000,00	5	500.000.000,00	6	500.000.000,00	4	500.000.000,00	2	500.000.000,00		
1.01.02.2.02.0063 - Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Asrama Sekolah yang terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat (Unit)	0	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
1.01.02.2.02.0064 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	2	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				14.923.681.600,00		12.353.681.600,00		11.923.681.600,00		10.833.681.600,00		10.618.681.600,00		
Terpenuhinya biaya pendidikan PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	110	110	8.661.681.600,00	110	8.661.681.600,00	110	8.661.681.600,00	110	8.661.681.600,00	110	8.661.681.600,00		
	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	100	100		100		100		100					
	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	0	6.400		6.400		6.400		6.400					
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	0	4		4		4		4					
1.01.02.2.03.0011 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD				1.167.500.000,00		1.167.500.000,00		1.167.500.000,00		1.167.500.000,00		1.167.500.000,00		
Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	0	6.400	1.167.500.000,00	6.400	1.167.500.000,00	6.400	1.167.500.000,00	6.400	1.167.500.000,00	6.400	1.167.500.000,00		
1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD				7.244.181.600,00		7.244.181.600,00		7.244.181.600,00		7.244.181.600,00		7.244.181.600,00		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	110	110	7.244.181.600,00	110	7.244.181.600,00	110	7.244.181.600,00	110	7.244.181.600,00	110	7.244.181.600,00		
1.01.02.2.03.0025 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	0	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00		
1.01.02.2.03.0041 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00		
Tersedianya prasarana pendidikan PAUD	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	0	1	4.400.000.000,00	1	1.850.000.000,00	1	1.400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	200.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0			1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	0	1		1		0		0		0			
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	0	5		4		4		0		0			
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	1		1		1		0		0			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	0	1		1		1		1		0			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	0	1		1									
	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	3		3		3		2		2			
	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	0	1											
1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		0,00		0,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	0	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		0,00		0,00		
1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		0,00		0,00		
Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	0	5	500.000.000,00	4	500.000.000,00	4	500.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
1.01.02.2.03.0033 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Perpustakaan Sekolah yang terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
1.01.02.2.03.0036 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0		0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
1.01.02.2.03.0040 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)				3.000.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	0	1	3.000.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		0,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	0	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	0	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.01.02.2.03.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		0,00		0,00		
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
1.01.02.2.03.0050 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0,00		450.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	0	1	0,00	1	450.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00		
Meningkatnya partisipasi pendidikan kesetaraan	Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0	0	5.715.419.998,00	0	5.715.419.998,00	0	5.615.419.998,00	0	5.615.419.998,00	0	5.615.419.998,00		
	Angka Putus Sekolah SMP/MTS (%)	0	0		0		0		0					
	1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			6.715.419.998,00		6.700.419.998,00		6.595.419.998,00		6.495.419.998,00		6.485.419.998,00		
Terpenuhinya biaya pendidikan kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	0	3	5.015.419.998,00	3	5.015.419.998,00	3	5.015.419.998,00	3	5.015.419.998,00	3	5.015.419.998,00		
	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	0	1		1		1		1					
	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	0	750		750		750		750					
	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	14	14		14		14		14					
1.01.02.2.04.0010 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	0	750	150.000.000,00	750	150.000.000,00	750	150.000.000,00	750	150.000.000,00	750	150.000.000,00		
1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				4.745.419.998,00		4.745.419.998,00		4.745.419.998,00		4.745.419.998,00		4.745.419.998,00		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	14	14	4.745.419.998,00	14	4.745.419.998,00	14	4.745.419.998,00	14	4.745.419.998,00	14	4.745.419.998,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.01.02.2.04.0027 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	0	3	70.000.000,00	3	70.000.000,00	3	70.000.000,00	3	70.000.000,00	3	70.000.000,00		
1.01.02.2.04.0036 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
Tersedianya prasarana pendidikan kesetaraan	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	0	2	700.000.000,00	2	700.000.000,00	1	600.000.000,00	1	600.000.000,00	1	600.000.000,00		
	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	2		2		1		1		1			
1.01.02.2.04.0039 - Pembangunan Ruang Kelas Baru				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	0	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00		
1.01.02.2.04.0061 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				200.000.000,00		200.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
Meratanya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase Guru PAUD yang Berkualifikasi S1/D4 (%)	76,57	77,07	1.385.000.000,00	77,57	1.300.000.000,00	78,07	1.365.000.000,00	78,57	1.110.000.000,00	79,07	1.110.000.000,00		
1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Terfasilitasinya peningkatan kompetensi dan kualifikasi lingkup SD				42.146.739.000,00		42.906.739.000,00		42.966.739.000,00		43.196.739.000,00		44.176.739.000,00		
	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	0	10	310.000.000,00	10	270.000.000,00	10	310.000.000,00	10	220.000.000,00	10	220.000.000,00		
	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	0	1		1		1		1					
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	0	65		65		65		65					
	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi (Orang)	0	65		65		0		0					
	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	0	2		1		2		0		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)		65		65		65		65		65			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	0	5		2		5		0		0			
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	65		65		65		65		65			
	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	65		65		65		65		65			
1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				40.000.000,00		20.000.000,00		40.000.000,00		0,00		0,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	0	5	40.000.000,00	2	20.000.000,00	5	40.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)		65	50.000.000,00	65	50.000.000,00	65	50.000.000,00	65	50.000.000,00	65	50.000.000,00		
1.01.02.2.01.0034 - Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar				25.000.000,00		15.000.000,00		25.000.000,00		0,00		0,00		
Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitas peningkatan profesi	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitas peningkatan profesi (Orang)	0	65	25.000.000,00	65	15.000.000,00	65	25.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
1.01.02.2.01.0035 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	0	65	25.000.000,00	65	25.000.000,00	65	25.000.000,00	65	25.000.000,00	65	25.000.000,00		
1.01.02.2.01.0036 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	0	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00		
1.01.02.2.01.0037 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	65	15.000.000,00	65	15.000.000,00	65	15.000.000,00	65	15.000.000,00	65	15.000.000,00		
1.01.02.2.01.0041 - Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	0	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00		
1.01.02.2.01.0042 - Penyediaan infrastruktur TIK				25.000.000,00		15.000.000,00		25.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	0	2	25.000.000,00	1	15.000.000,00	2	25.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	65	35.000.000,00	65	35.000.000,00	65	35.000.000,00	65	35.000.000,00	65	35.000.000,00		
1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				28.326.139.000,00		28.996.139.000,00		29.276.139.000,00		28.411.139.000,00		28.311.139.000,00		
Terfasilitasinya peningkatan kompetensi dan kualifikasi lingkup SMP	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	0	10	285.000.000,00	10	255.000.000,00	10	285.000.000,00	10	220.000.000,00	10	220.000.000,00		
	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	0	32		32		32		32		32			
	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi (Orang)	0	28		28		28		28		28			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	0	28		28		28		28		28		28	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	0	5		2		5		0		0			
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	53		53		53		53		53			
	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	28		28		28		28		28			
1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				40.000.000,00		20.000.000,00		40.000.000,00		0,00		0,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	0	5	40.000.000,00	2	20.000.000,00	5	40.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	0	28	50.000.000,00	28	50.000.000,00	28	50.000.000,00	28	50.000.000,00	28	50.000.000,00		
1.01.02.2.02.0047 - Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama				25.000.000,00		15.000.000,00		25.000.000,00		0,00		0,00		
Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitas peningkatan profesi	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitas peningkatan profesi (Orang)	0	28	25.000.000,00	28	15.000.000,00	28	25.000.000,00	28	0,00	28	0,00		
1.01.02.2.02.0048 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	0	32	30.000.000,00	32	30.000.000,00	32	30.000.000,00	32	30.000.000,00	32	30.000.000,00		
1.01.02.2.02.0049 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	0	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
1.01.02.2.02.0050 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	28	75.000.000,00	28	75.000.000,00	28	75.000.000,00	28	75.000.000,00	28	75.000.000,00		
1.01.02.2.02.0054 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	0	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00		
				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	53	25.000.000,00	53	25.000.000,00	53	25.000.000,00	53	25.000.000,00	53	25.000.000,00		
1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				14.923.681.600,00		12.353.681.600,00		11.923.681.600,00		10.833.681.600,00		10.618.681.600,00		
Terfasilitasinya peningkatan kompetensi dan kualifikasi lingkup PAUD	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	0	10	575.000.000,00	10	575.000.000,00	10	575.000.000,00	10	575.000.000,00	10	575.000.000,00		
	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	0	1		1		1							
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	0	110		110		110		110					
	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi (Orang)	0	110		110		110		110					
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	0	25		25		25		25					
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	0	5		5		5		5					
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	110		110		110		110		110			
	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	110		110		110		110		110			
1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	0	5	40.000.000,00	5	40.000.000,00	5	40.000.000,00	5	40.000.000,00	5	40.000.000,00		
1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD				375.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	0	25	375.000.000,00	25	375.000.000,00	25	375.000.000,00	25	375.000.000,00	25	375.000.000,00		
1.01.02.2.03.0021 - Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitas peningkatan profesi	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitas peningkatan profesi (Orang)	0	110	25.000.000,00	110	25.000.000,00	110	25.000.000,00	110	25.000.000,00	110	25.000.000,00		
1.01.02.2.03.0022 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	0	110	25.000.000,00	110	25.000.000,00	110	25.000.000,00	110	25.000.000,00	110	25.000.000,00		
1.01.02.2.03.0023 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	0	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
1.01.02.2.03.0024 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	110	30.000.000,00	110	30.000.000,00	110	30.000.000,00	110	30.000.000,00	110	30.000.000,00		
1.01.02.2.03.0029 - Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	0	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00		
1.01.02.2.03.0039 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	110	30.000.000,00	110	30.000.000,00	110	30.000.000,00	110	30.000.000,00	110	30.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				6.715.419.998,00		6.700.419.998,00		6.595.419.998,00		6.495.419.998,00		6.485.419.998,00		
Terfasilitasinya peningkatan kompetensi dan kualifikasi lingkup pendidikan kesetaraan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	0	5	215.000.000,00	5	200.000.000,00	5	195.000.000,00	0	95.000.000,00	0	95.000.000,00		
	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	0	14		14		14		14		14			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	0	4		4		4		0		0			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)	0	4		4		4		0		0			
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	14		14		14		0					
	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	14		14		14		14		14			
	Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi (Orang)	0	14		14		14		0		0			
1.01.02.2.04.0014 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		0,00		0,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)	0	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
1.01.02.2.04.0015 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				30.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		0,00		0,00		
Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	0	4	30.000.000,00	4	25.000.000,00	4	30.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
1.01.02.2.04.0024 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	0	14	25.000.000,00	14	25.000.000,00	14	25.000.000,00	14	25.000.000,00	14	25.000.000,00		
1.01.02.2.04.0025 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	0	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
1.01.02.2.04.0026 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	14	50.000.000,00	14	50.000.000,00	14	50.000.000,00	14	50.000.000,00	14	50.000.000,00		
1.01.02.2.04.0030 - Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				20.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		0,00		0,00		
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	0	5	20.000.000,00	5	15.000.000,00	5	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
1.01.02.2.04.0032 - Fasilitas sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				20.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		0,00		0,00		
Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi	Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi (Orang)	0	14	20.000.000,00	14	15.000.000,00	14	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
1.01.02.2.04.0042 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				20.000.000,00		20.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	14	20.000.000,00	14	20.000.000,00	14	0,00	0	0,00		0,00		
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatnya kualitas kurikulum muatan lokal	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal (bahasa daerah atau budaya lokal) dan/atau ekstrakurikuler kesenian (%)	0	20,20	100.000.000,00	20,40	100.000.000,00	20,60	100.000.000,00	20,80	100.000.000,00	21,00	100.000.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	
1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Kurikulum Muatan Lokal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku)		500	50.000.000,00	500	50.000.000,00	500	50.000.000,00	500	50.000.000,00	500	50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.01.03.2.01.0003 - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku)		500	50.000.000,00	500	50.000.000,00	500	50.000.000,00	500	50.000.000,00	500	50.000.000,00		
1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Kurikulum Muatan Lokal	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai (Buku)	0	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00		
	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia (Buku)	0	20				20				20			
	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	1	1				1				1			
	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun (Dokumen)	1	1				1				1			
	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	1	1				1				1			
1.01.03.2.02.0002 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.01.03.2.02.0003 - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia (Buku)	0	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00		
1.01.03.2.02.0004 - Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai/ditelaah	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai (Buku)	0	15	15.000.000,00	15	15.000.000,00	15	15.000.000,00	15	15.000.000,00	15	15.000.000,00		
1.01.03.2.02.0005 - Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.01.03.2.02.0006 - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	
Meratanya kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase PTK yang Bersertifikat (%)	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00		
	Persentase Rata-rata Capaian Rasio Siswa Per Guru (%)	100	100		100		100		100		100			
1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terfasilitasinya peningkatan kompetensi dan kualifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
1.01.04.2.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.01.04.2.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatnya manajemen satuan pendidikan	Persentase sekolah yang memiliki ijin operasional (%)	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	
1.01.05.2.01 - Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya pemberian ijin operasional	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1	1		1				1					
1.01.05.2.01.0001 - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
1.01.05.2.01.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1.01.05.2.02 - Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00			
Terlaksananya pemberian ijin operasional	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00			
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1	1		1		1		1		1				
1.01.05.2.02.0001 - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00			
Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00			
1.01.05.2.02.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00			
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00			
1.01.05.2.02.0003 - Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00			
Terlaksananya Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00			
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlestarikannya bahasa dan budaya daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	0	20,20	30.000.000,00	20,40	30.000.000,00	20,60	30.000.000,00	20,80	30.000.000,00	21,00	30.000.000,00	1.01.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan	
1.01.06.2.01 - Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota "Persentase satuan pendidikan yang menerapkan bahasa dan budaya daerah				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
	Jumlah buku berbahasa daerah yang menerapkan bahasa dan budaya daerah (Buku)		300	30.000.000,00	300	30.000.000,00	300	30.000.000,00	300	30.000.000,00	300	30.000.000,00		
1.01.06.2.01.0008 - Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah	Jumlah buku berbahasa daerah yang disusun, diterbitkan, dan didistribusikan (Buku)		300	30.000.000,00	300	30.000.000,00	300	30.000.000,00	300	30.000.000,00	300	30.000.000,00		

BAB V PENUTUP

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Tarakan Tahun 2025 - 2029 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan maka Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Tarakan Tahun 2025 - 2029. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tarakan Tahun 2025 - 2029 diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan arah bagi pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kota Tarakan. Untuk mewujudkan rencana - rencana tersebut dan dapat diimplementasikan dengan efisien dan efektif maka perlu:

1. Seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kota Tarakan berkomitmen menjadikan Rencana Strategis sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja setiap tahun, dan tidak ada satupun yang keluar dari apa yang sudah tercantum dalam Rencana Strategis tahun 2025 - 2029;
2. Seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kota Tarakan akan menjalankan seluruh komitmen dengan mencapai target optimal yang telah ditetapkan di Rencana Strategis maupun RPD tahun 2025 - 2029;
3. Seluruh jajaran Dinas Pendidikan Kota Tarakan sadar dan bertekad memahami dengan baik konsep - konsep yang tersurat maupun yang tersirat di dalam Rencana Strategis yang telah disepakati bersama;
4. Membangun koordinasi dan sinergitas dalam melaksanakan pembangunan pendidikan agar tercipta integrasi program dan kegiatan yang mampu mendukung terhadap pencapaian kualitas pendidikan;
5. Memperkuat kemampuan beradaptasi terhadap situasi yang kompetitif dan transparan yang menjadi tuntutan masyarakat, yang mampu menarik manfaat dari setiap kegiatan secara optimal dengan meminimalisasi dampak negatif. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tarakan 2025 - 2029 disusun dengan penuh dedikasi mengoptimalkan tugas, fungsi dan peran kelembagaan dan mobilisasi seluruh potensi agar dapat melaksanakan setiap rencana yang telah ditetapkan. Capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan akan menjadi motivasi bekerja dalam mewujudkan pendidikan yang makin bermartabat, merata dan berkualitas.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tarakan Tahun 2025-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Tarakan dalam menyelenggarakan pembangunan daerah Kota Tarakan selama lima tahun ke depan. Renstra Dinas Pendidikan juga berfungsi sebagai panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tarakan dalam mencapai target-target sasaran yang telah disepakati bersama. Sasaran utama dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan selaku lembaga yang mengemban tugas sebagai koordinator pembangunan daerah adalah bagaimana visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dijabarkan dalam sasaran RPD tahun 2025-2029 dapat tercapai.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan disusun untuk memberikan arah yang jelas pada pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dalam menjalankan berbagai prioritas pembangunan daerah. Selain itu, renstra tersebut juga berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya tiap tahun melalui Rencana Kerja SKPD dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2026 tidak bersifat statis namun senantiasa dinamis menyesuaikan perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama, dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari setiap jajaran lingkup Dinas Pendidikan Kota Tarakan sangat diharapkan. Dengan demikian, penting bagi Dinas Pendidikan untuk mengedepankan aspek perencanaan pembangunan daerah beserta fungsi pengendalian dan evaluasi pembangunan. Bersama dengan hal tersebut, perlu adanya harmonisasi antara Dinas Pendidikan dengan SKPD lain di kota Tarakan dengan tujuan bersama-sama mencapai sasaran RPD demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPD Kota Tarakan periode 2025-2029 yang disusun melalui berbagai tahapan seperti persiapan, penyusunan rancangan, rancangan akhir renstra, dan diakhiri dengan penetapan renstra.. Tujuan dari setiap tahapan perencanaan tersebut adalah untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Tarakan sebagaimana yang ditetapkan dalam RPD.

Setelah Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tarakan dilakukan verifikasi dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPD, maka selanjutnya diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tarakan, kepala Dinas Pendidikan menetapkan Rencana Strategis Dinas Pendidikan sebagai pedoman unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Dinas Pendidikan.

Atas dasar itulah, beberapa hal perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memprioritaskan pencapaian seluruh indikator kinerja utama (IKU) Rencana Strategis dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran RPD;
2. Mengupayakan potensi yang dimiliki baik SDM maupun sarana prasarana guna sebesar-besar mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Rencana Strategis dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran RPD;
3. Mengupayakan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit kerja internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga hasilnya akan lebih efektif dan optimal;
4. Evaluasi pencapaian sasaran Rencana Strategis Dinas Pendidikan dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun;
5. Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dilakukan melalui Rencana Kerja Dinas Pendidikan setiap tahun dan realisasinya melalui DPA-Dinas Pendidikan setiap tahun;
6. Pengendalian dan evaluasi hasil Rencana Kerja Dinas Pendidikan tiap tahun dilakukan melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA-Dinas Pendidikan tiap triwulan. Hal tersebut digunakan untuk menyusun LKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dalam mencapai sasaran Renstra Dinas Pendidikan;

7. Pasca pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja, Dinas Pendidikan memerlukan perbaikan atau revisi renstra. Maka realisasi revisi tersebut dapat dituangkan pada Rencana Kerja Dinas Pendidikan periode berikutnya atau dilakukan revisi Rencana Strategis Dinas Pendidikan jika pada kesempatan yang sama, RPD Kota Tarakan dilakukan revisi karena alasan yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan;
8. Seluruh aparatur pada Dinas Pendidikan Kota Tarakan diharapkan mampu menjalin koordinasi, kolaborasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis ini dapat tercapai;
9. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tarakan akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kota Tarakan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Tarakan wajib berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tarakan;
10. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tarakan, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Rencana Strategis secara berkala;
11. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Tarakan sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana strategi (Renstra) OPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya. Hasil proses tersebut berupa Rencana Strategis (Renstra) yang akan digunakan sebagai dasar untuk rencana dan alokasi sumber daya tahunan selama 5 (lima tahun mendatang).

Perencanaan Dinas Kesehatan Kota Tarakan diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029, yang sudah terintegrasi dan selaras dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama.

Selain untuk mensukseskan Visi dan Misi dari Pemerintah Daerah, penyusunan Renstra ini juga ditujukan untuk mendorong percepatan Reformasi Birokrasi pada umumnya dan mensukseskan pembangunan Zona Integritas di Dinas Kesehatan yang merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional dalam Urusan Kesehatan.

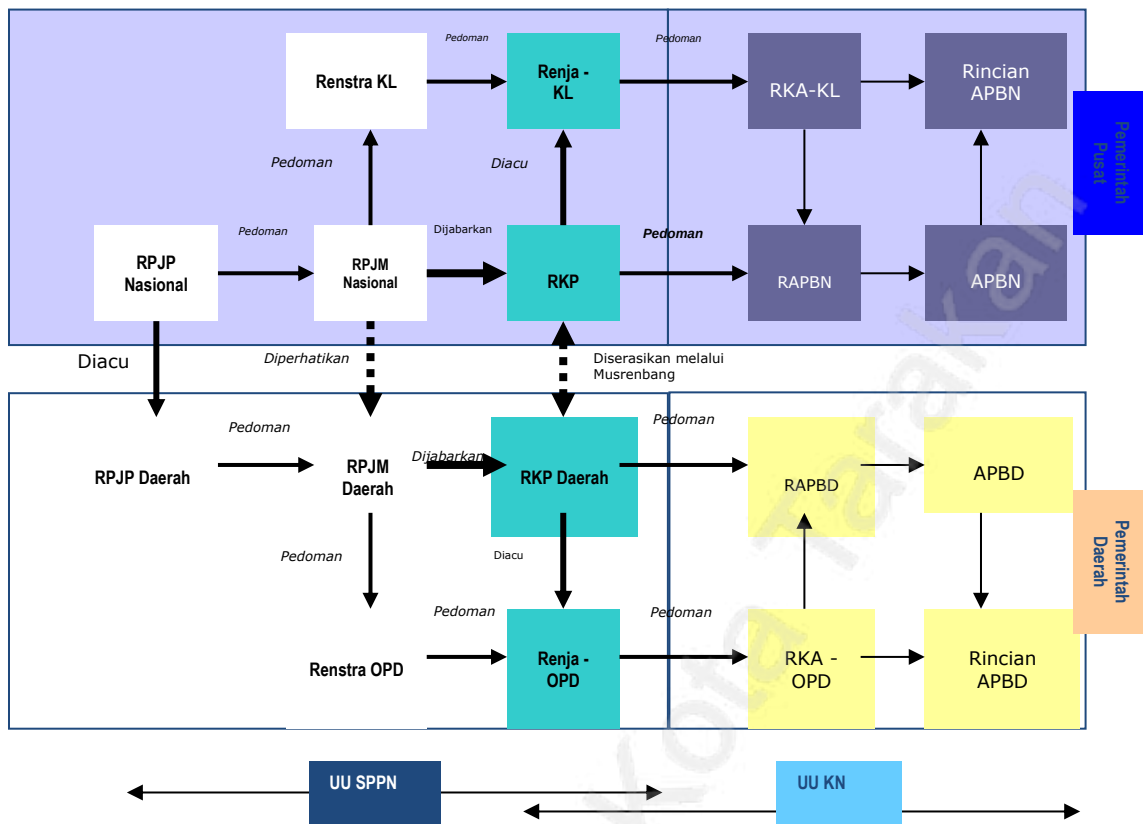
Sebagai unsur perangkat daerah maka Dinas Kesehatan Kota Tarakan mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, strategis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kota Tarakan. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Dinas Kesehatan dituntut untuk mampu menerjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan.

Secara umum Rencana strategis Perangkat Daerah secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar, yakni : (1) Kemana pelayanan Perangkat Daerah serta pengembangannya akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) Bagaimana cara mencapainya dan; (3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam system perencanaan pembangunan dan system keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1 Bangan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Dinas Kesehatan yang berpedoman pada RPJMD Kota Tarakan dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Tarakan tahun 2025-2029 terdiri atas:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perncanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
23. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
25. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Kesehatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Tarakan tahun 2025-2029 adalah :
 - a. Memberikan arah dan pedoman dalam mencapai tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam jangka lima tahun ke depan
 - b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
 - c. Menjamin keterkaitan, keserasian serta harmonisasi antara perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan program kegiatan setiap tahun anggaran.
 - d. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan
 - e. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.
2. Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Tarakan tahun 2025-2029 adalah
 - a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan kota Tarakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di bidang kesehatan;
 - b. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan selaku perangkat daerah dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan
 - c. Menjadi acuan resmi bagi dinas serta pihak terkait dalam upaya pembangunan kesehatan; dan
 - d. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
 - e. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Tarakan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2025-2029 disusun sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yang terdiri atas sekurang-kurangnya 5(lima) bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Paling sedikit memuat :

1. Latar belakang
2. Dasar hukum penyusunan
3. Maksud dan tujuan
4. Sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Subbab Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan paling sedikit memuat
 - a. Tugas, fungsi dan struktur Dinas Kesehatan Kota Tarakan
 - b. Sumber Daya Dinas Kesehatan Kota Tarakan
 - c. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
 - d. Kelompok sasaran layanan.
2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kesehatan Paling sedikit memuat :
 - a. Gambaran Pelayanan
 - b. Isus strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Paling sedikit memuat :

1. Tujuan dan Sasaran
2. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

1. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan
2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS
KESEHATAN

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan

Gambaran pelayanan Dinas Kesehatan Kota Tarakan periode 2019 -2024 diperlukan sebagai panduan dalam menyusun kebijakan strategis Dinas kesehatan Kota Tarakan 2025-2029 terutama untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan organisasi agar rumusan program dan kegiatan yang dibuat dapat mencapai tujuan Dinas Kesehatan secara efektif dan efisien. Gambaran pelayanan dijelaskan melalui analisis indikator capaian kinerja pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, sumber daya yang dimiliki, capaian program prioritas periode sebelumnya, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dan dinilai perlu diatasi dimasa mendatang.

2.1.1. Tugas, fungsi dan struktur Dinas Kesehatan

Berdasarkan peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 52 tahun 2021 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan. Dinas kesehatan merupakan unsur pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Melalui Sekretaris Daerah dengan tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Kesehatan Menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit dan bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan bidang kesehatan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan dalam Struktur Organisasi dapat dilihat dalam gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Tarakan



Adapun susunan organisasi Dinas Kesehatan Kota Tarakan ditetapkan sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkondisikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah pembantuan dibidang kesehatan.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dimaksud menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusna kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya,
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya,
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya,
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi kegiatan dinas
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran dinas
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sarna, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dinas
5. Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada dinas
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di dinas
7. Pelayanan pengadaan barang/jasa dilingkungan dinas
8. Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja dinas; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Sekretariat terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan.

i) Sub bagian umum dan kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam pengoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Sub bagian umum dan kepegawaiannya dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sarna, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas
2. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dinas
3. Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada dinas
4. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di dinas
5. Pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan dinas
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris

ii) Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam koordinasi kegiatan perencanaan dan keuangan, koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, dan pengoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi kegiatan dinas
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran dinas
3. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kesehatan
4. Penyiapan bahan dan bahan pelaksanaan Pengelolaan Penelitian Kesehatan
5. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan
6. Penyusunan perjanjian kinerja, laporan kinerja dinas dan sistem pengendalian intern Dinas; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

c. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang diberikan kepada Daerah.

Bidang Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga
3. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh daerah, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat daerah
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh KepalaDinas.

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, surveilans dan imunisasi

2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, surveilans dan imunisasi
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, surveilans dan imunisasi
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, surveilans dan imunisasi
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesejatan

Bidang pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di pelayanan dan sumber daya kesehatan
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan
3. Pelaksanaan pengelolaan Upaya Kesehatan Perorangan dan rujukan tingkat Daerah
4. Pelaksanaan pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat Tingkat Daerah
5. pelaksanaan pengelolaan Program Keperawatan Kesehatan Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan Tradisional
6. pelaksanaan penerbitan rekomendasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban izin rumah sakit kelas C, kelas D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah
7. Pelaksanaan penerbitan rekomendasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan
8. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan
9. Pelaksanaan penerbitan rekomendasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal
10. Pelaksanaan penerbitan rekomendasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban Izin Usaha Mikro Obat Tradisional
11. Pelaksanaan penerbitan rekomendasi, pembinaan, pengawasan, pengawasan, pengendalian dan penertiban sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga
12. Pelaksanaan penerbitan rekomendasi, pembinaan, pengawasan, pengawasan, pengendalian dan penertiban izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga
13. Pelaksanaan pengawasan pasca-penjualan produk makanan minuman industri rumah tangga
14. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan
15. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan
16. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

f. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas adalah

i. Instalasi Farmasi dan Pusat Pemelihara Fasilitas Pelayanan Kesehatan

UPTD Instalasi Farmasi dan Pusat Pemelihara Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan yang berkaitan dengan Instalasi Farmasi, pemeliharaan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan dan kegiatan administrasi perkantoran di lingkungan UPTD.

Dalam pelaksanaan tugas UPTD Instalasi Farmasi dan Pusat Pemelihara Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan persiapan penyusunan dan penyaluran sediaan farmasi dan alat kesehatan
2. Pelaksanaan penerimaan dan penyaluran sediaan farmasi dan alat kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan;
3. pengamanan dan pemeliharaan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan
4. Pelaksanaan penghapusan barang
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
6. Pelaksanaan pemeliharaan sarana kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan
7. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan
8. Pelaksanaan pemeliharaan peralatan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan
9. Pelaksanaan pengujian peralatan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan
10. Pelaksanaan kalibrasi peralatan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan
11. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya
12. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

ii. Laboratorium Kesehatan Daerah

UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pemeriksaan secara Laboratorium pada Dinas Kesehatan Kota Tarakan.

Dalam pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium klinik meliputi pemeriksaan mikrobiologi, kimia, patologi, imunologi, hematologi dan urinalisa
2. Pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat meliputi mikrobiologi dan kimia analisa makanan / minuman
3. Pelaksanaan pemantapan mutu meliputi Pemantapan Mutu Internal (PMI) dan Pemantapan Mutu Eksternal (PME)
4. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
5. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya
6. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris

iii. Puskesmas Karang Rejo, Puskesmas Mamburungan, Puskesmas Gunung Lingkas, Puskesmas Pantai Amal, Puskesmas Sebengkok, Puskesmas Juata

UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

Dalam melaksanakan tugas Puskesmas menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya
2. Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

iv. Rumah Sakit Umum Kota Tarakan

UPTD Rumah Sakit Umum Kota Tarakan mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara panpurna.

Untuk menjalankan tugas RSU mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit
2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis
3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan
4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kota Tarakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber daya manusia maupun sarana prasarana kesehatan. Berikut uraian singkat tentang sumber daya yang dimiliki Dinas Kesehatan Kota Tarakan sampai dengan Desember 2024

a. Sumber Daya Manusia

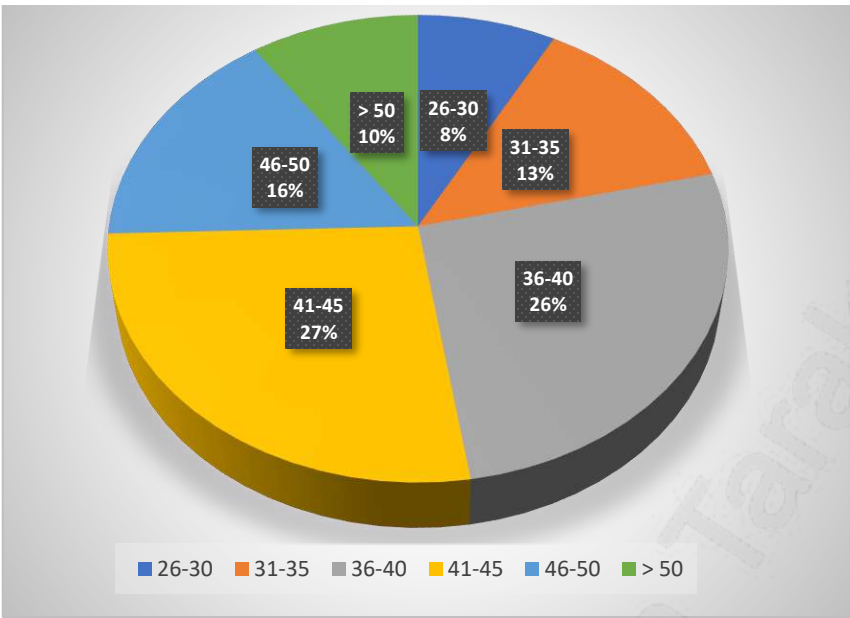
Berdasarkan data kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Tarakan memiliki pegawai/ASN sebanyak 404 orang. Pegawai tersebut ditugaskan pada Dinas kesehatan, UPTD Puskesmas, UPTD Rumah Sakit Umum Kota Tarakan, Instalasi Farmasi dan Pusat Pemelihara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Laboratorium Kesehatan Daerah. penempatan pegawai terbanyak ada di UPTD puskesmas sebanyak 252 Orang (62,2%) yang tersebar di Puskesmas.

1. Distribusi Pegawai Menurut Kelompok Umur

Pegawai Dinas Kesehatan Kota Tarakan paling banyak berada di kelompok umur 41-45 tahun, yaitu 109 (26,98%). Sedangkan kelompok umur yang paling sedikit Adalah kelompok umur 26-30 tahun yaitu 30 orang (7,92%).

Gambar 2.2. menunjukkan bahwa dalam 5 tahun yang akan datang terdapat pegawai yang akan pensiun. Jika di lihat dari kelompok usia di atas 50 tahun. Hal ini harus diantisipasi dengan menambah jumlah pegawai sesuai dengan analisis beban kerja Dinas Kesehatan Kota Tarakan periode 2025-2029.

Gambar 2.2 Distribusi pegawai Menurut Kelompok Umur dinas kesehatan Kota Tarakan Tahun 2024

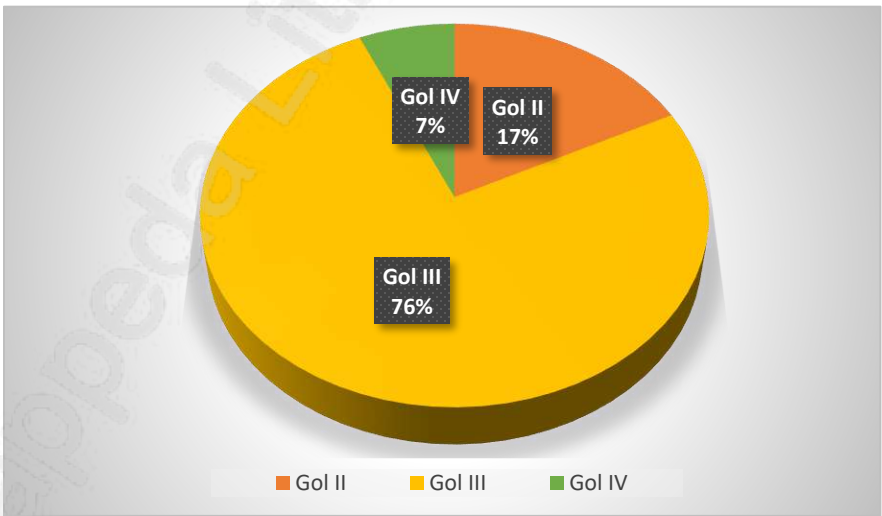


Sumber : Sub bagian Umum dan Kepegawaian Dinkes Tarakan, 2025

2. Distribusi Pegawai Menurut Golongan

Jika ditinjau berdasarkan golongan, Sebagian besar pegawai Dinas Kesehatan Kota Tarakan berada pada golongan III, yakni sebesar 75,7% dari total pegawai 404 orang. Urutan kedua terbesar Adalah golongan II sebesar 17,6%. Dari data ini menunjukkan bahwa 93,3% berada pada golongan II dan III hal ini merupakan potensi yang dimiliki Dinas kesehatan yang perlu dikembangkan melalui pembinaan pengembangan karir pegawai agar potensi pegawai dapat dimanfaatkan secara optimal.

Gambar 2.3 Distribusi Pegawai Menurut Golongan Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2024

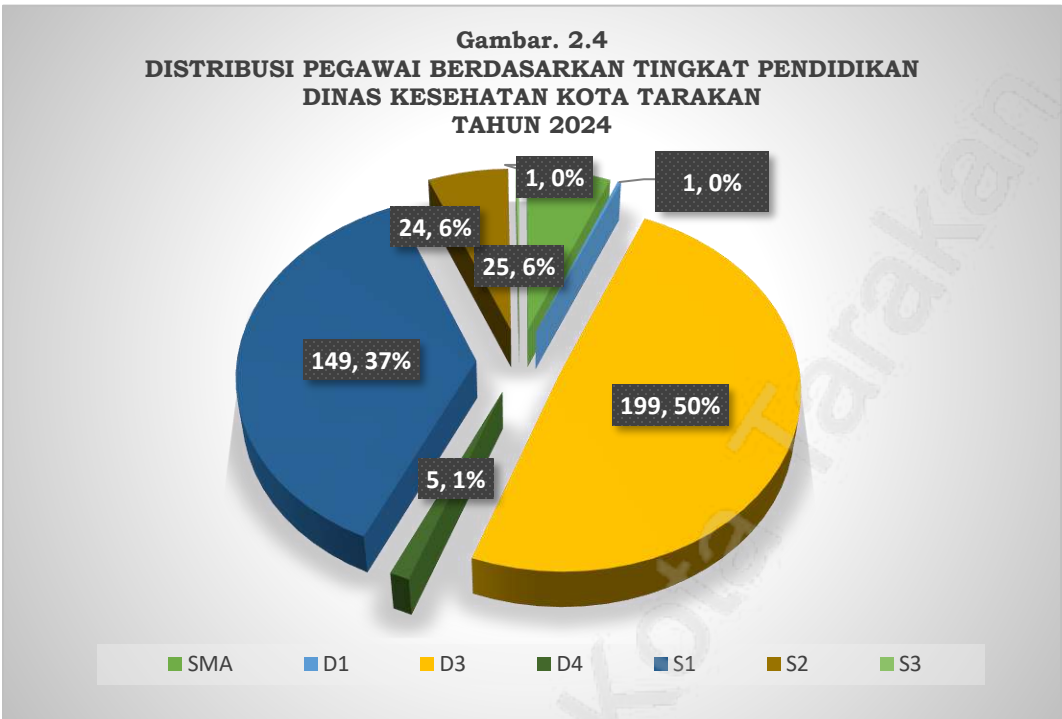


Sumber : Sub bagian Umum dan Kepegawaian Dinkes Tarakan, 2025

3. Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Distribusi pegawai Dinas Kesehatan Kota Tarakan menurut Tingkat Pendidikan menunjukkan Sebagian besar pegawai adalah aparatur yang memiliki tingkat pendidikan D3 sebesar 49%, S1 ke atas 43% ini menggambarkan Dinas kesehatan memiliki kompetensi dalam hal mengidentifikasi permasalahan, menganalisis dan menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah dengan metode ilmiah. Sementara sebanyak 6,4%

pegawai berpendidikan SMA dan D1. Pegawai berpendidikan SMA sebanyak 25 Orang dan D1 sebanyak 1 orang. Jumlah pegawai pada jenjang ini relative kecil dibandingkan dengan pegawai yang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan hingga evaluasi kinerja.



Sumber : Sub bagian Umum dan Kepegawaian Dinkes Tarakan, 2025

4. Data kebutuhan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) yang telah disusun oleh dinas kesehatan Kota Tarakan diperoleh gambaran bahwa masih terdapat beberapa jabatan yang masih belum terpenuhi kondisi ideal. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik maka diperlukan pemenuhan terhadap Sumber daya Manusia.

Adapun Gambaran kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) saat ini dan proyeksi hingga 5 Tahun kedepan.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Nama Jabatan dan Kebutuhan Berdasarkan Analisis Beban Kerja
Pada Dinas Kesehatan dan UPTD

NO	JENIS SDM	DINAS KESEHATAN		KARJO		JUATA		MAMBURUNGAN		SEBENGKOK		GUNUNG LINGKAS		PANTAI AMAL		LABKESDA		IFP2PK		TOTAL		
		B	K	B	K	B	K	B	K	B	K	B	K	B	K	B	K	B	K	B	K	%
1	Administrator Kesehatan Ahli Madya / Madya		2		0		0		0		0		0		0					0	2	0,00%
	Administrator Kesehatan Ahli Muda / Muda	3	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0					3	10	30,00%
	Administrator Kesehatan Ahli Pertama / Pertama			1	2		1		1		0		1		1					1	6	16,67%
2	Apoteker Ahli Madya / Madya			0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	1	1	100,00%
	Apoteker Ahli Muda / Muda			0	0	0	1		0		0		0		0				0	0	1	0,00%
	Apoteker Ahli Pertama / Pertama			1	2	0	1	1	1	1	2	1	1	1	1			1	2	6	10	60,00%
3	Asisten Apoteker Penyelia			2	3	1	2	1	1	1	1	0	1	1	1	0		1	2	7	11	63,64%
	Asisten Apoteker Mahir / Pelaksana Lanjutan			1	2	1	2	0	0	0	1	1	2	0	1			0	1	3	9	33,33%
	Asisten Apoteker Terampil / Pelaksana			0	2	1	3	0	1	0	1	0	1	0	1			0	0	1	9	11,11%
4	Bidan Ahli Muda / Muda				2		0		0		3		3	0	1					0	9	0,00%
	Bidan Ahli Pertama / Pertama			0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1					1	3	33,33%
	Bidan Penyelia			5	7	4	6	2	3	4	6	6	6	1	3					22	31	70,97%
	Bidan Mahir / Lanjutan			3	5	3	7	2	3	2	3	3	5	2	3					15	26	57,69%
	Bidan Terampil / Pelaksana			6	6	5	6	2	3	5	6	4	4	0	1					22	26	84,62%
5	Dokter Ahli Madya / Madya			2	2	0		1	1	1	1	1	1	0						5	5	100,00%
	Dokter Ahli Muda / Muda			0	1	1	3	0	1	0	1	0	1	0	1					1	8	12,50%
	Dokter Ahli Pertama / Pertama			2	8	1	6	2	2	2	2	2	5	1	2					10	25	40,00%
6	Dokter Gigi Ahli Madya / Madya			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1					1	1	100,00%
	Dokter Gigi Ahli Muda / Muda			0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1					0	4	0,00%
	Dokter Gigi Ahli Pertama / Pertama			0	2	1	2	1	1	1	2	2	2	1	1					6	10	60,00%
7	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya / Madya	0	1				0		0		0	0	0		0		0			0	1	0,00%

NO	JENIS SDM	DINAS KESEHATAN		KARJO		JUATA		MAMBURUNGAN		SEBENGKOK		GUNUNG LINGKAS		PANTAI AMAL		LABKESDA		IFP2PK		TOTAL		
		B	K	B	K	B	K	B	K	B	K	B	K	B	K	B	K	B	K	B	K	%
	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda / Muda	1	2	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0			5	6	83,33%
	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama / Pertama	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1			8	10	80,00%
8	Nutrisisionis Ahli Muda / Muda						0		0		0		0		0					0	0	
	Nutrisisionis Ahli Pertama / Pertama			0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0					1	3	33,33%
	Nutrisisionis Penyelia			1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	0	1					6	7	85,71%
	Nutrisisionis Mahir			0	0	0	1	0	1		1	1	1		1					0	5	0,00%
	Nutrisisionis Terampil / Pelaksana			0	2	0	2	0	0	1	1	0	1	0	1					1	7	14,29%
9	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Pertama / Kerja Pertama	1	1	0	1	0		0	1	0	1	0		0						1	4	25,00%
10	Terapis Gigi dan Mulut Penyelia			1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	0	1					5	8	62,50%
	Terapis Gigi dan Mulut Mahir			1	2	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1					3	7	42,86%
	Terapis Gigi dan Mulut Terampil			0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0					3	4	75,00%
11	Perawat Ahli Muda / Muda			0	0	0	1	0	1	0	1	0	1		1					0	5	0,00%
	Perawat Ahli Pertama			1	1	0	0	0	0	0	0	0	0		1					1	2	50,00%
	Perawat Penyelia			9	15	7	9	4	7	8	8	5	9	2	2					35	50	70,00%
	Perawat Mahir			3	7	2	4	2	4	1	5	4	4	0	2					12	26	46,15%
	Perawat Terampil			6	9	4	8	4	7	2	3	3	4	3	5					22	36	61,11%
12	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda/ Kesehatan Muda						0		0		0		0	0	0		0			0	0	
	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama / Kesehatan Pertama			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2			1	2	50,00%
	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia			0	3	2	2	1	1	0	0	1	2	1	1	3	4			8	13	61,54%
	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan / Mahir			1	1	1	2	0	1	0	1	1	1	0	1	0	4			3	11	27,27%
	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana / Terampil			0	1	0	1	1	1	2	3	0	1	0	1	0	2			3	10	30,00%
13	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Muda		2		0	0			0		0		0		0		0			0	2	0,00%

NO	JENIS SDM	DINAS KESEHATAN		KARJO		JUATA		MAMBURUNGAN		SEBENGKOK		GUNUNG LINGKAS		PANTAI AMAL		LABKESDA		IFP2PK		TOTAL		
		B	K	B	K	B	K	B	K	B	K	B	K	B	K	B	K	B	K	B	K	%
	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama			1	1	0		1	1	1	1	0	1	0	0		0			3	4	75,00%
	Tenaga Sanitasi Lingkungan Penyelia			1	2	2	2	2	2	1	1	0	1	0	0		0			6	8	75,00%
	Tenaga Sanitasi Lingkungan Mahir			0	2	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0		0			2	6	33,33%
	Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil			0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1			1	6	16,67%
14	Teknisi Elektromedis Ahli Pertama																	1		0	1	0,00%
	Teknisi Elektromedis Penyelia																	1	1	1	1	100,00%
	Teknisi Elektromedis Mahir / Pelaksana Lanjutan			0		0		0		0		0		0				0	1	0	1	0,00%
15	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Madya	0	1	0		0					0		0		0					0	1	0,00%
	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Muda	2	2	0	1	0		1	1	1	1	0	0	2	1					6	6	100,00%
	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Pertama		1	0	1	1	2	1	1	0	1	0	2	0	1					2	9	22,22%
16	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama																1			0	1	0,00%
17	Kepala Dinas Kesehatan	1	1																	1	1	100,00%
18	Sekretaris	1	1																	1	1	100,00%
19	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	1	1																	1	1	100,00%
20	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	1	1																	1	1	100,00%
21	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	1	1																	1	1	100,00%
22	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1																	1	1	100,00%
23	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	1	1																	1	1	100,00%
24	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	0		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	8	100,00%

NO	JENIS SDM K	DINAS KESEHATAN		KARJO		JUATA		MAMBURUNGAN		SEBENGKOK		GUNUNG LINGKAS		PANTAI AMAL		LABKESDA		IFP2PK		TOTAL		
		B	K	B	K	B	K	B	K	B	K	B	K	B	K	B	K	B	K	B	K	%
25	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi dan Pusat Pemelihara Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0																1	1	1	1	100,00%
26	Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah	0														1	1			1	1	100,00%
27	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100,00%
28	Pengelola Layanan Operasional	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2	50,00%
29	Pengadministrasi Perkantoran	8	8	4	18	8	11	4	9	3	7	4	7	1	5	1	5	0	2	33	72	45,83%
30	Penata Layanan Operasional	1	1	2	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	100,00%
31	Penelaah Teknis Kebijakan	12	15	2	4	0	4	0	4	1	4	1	4	0	3	0	1	0	0	16	39	41,03%
32	Pengelola Layanan Kesehatan	10	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	11	14	78,57%
33	Pengelola data dan Informasi	2	4	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2	10	20,00%
34	Penata Kelola Layanan Kesehatan	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3	3	100,00%
	Jumlah	53	73	59	128	53	102	41	71	45	81	47	86	22	53	7	23	6	14	333	631	52,77%

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Nama Jabatan dan Kebutuhan Berdasarkan
Analisis Beban Kerja
Rumah Sakit Umum Kota Tarakan

NO	NAMA JABATAN	KLS JABATAN	B	K	%
1	Dokter Madya (Spesialis Penyakit Dalam)	12		1	0%
	Dokter Muda (Spesialis Penyakit Dalam)	10		2	0%
	Dokter Pertama (Spesialis Penyakit Dalam)	9	1	3	33%
2	Dokter Madya (Spesialis Anak)	12		2	0%
	Dokter Muda (Spesialis Anak)	10	2	2	100%
	Dokter Pertama (Spesialis Anak)	9		1	0%
3	Dokter Madya (Spesialis Bedah)	12		2	0%
	Dokter Muda (Spesialis Bedah)	10		2	0%
	Dokter Pertama (Spesialis Bedah)	9		1	0%
4	Dokter Madya (Spesialis Obgyn)	12	1	2	50%
	Dokter Muda (Spesialis Obgyn)	10		2	0%
	Dokter Pertama (Spesialis Obgyn)	9		1	0%
5	Dokter Madya (Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif)	12		2	0%
	Dokter Muda (Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif)	10		2	0%
	Dokter Pertama (Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif)	9		1	0%
6	Dokter Madya (Spesialis Radiologi)	12	1	2	50%
	Dokter Muda (Spesialis Radiologi)	10		2	0%
	Dokter Pertama (Spesialis Radiologi)	9		1	0%
7	Dokter Madya (Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi)	12		1	0%
	Dokter Muda (Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi)	10	1	1	100%
	Dokter Pertama (Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi)	9		1	0%
8	Dokter Madya (Spesialis Patologi Klinik)	12	1	1	100%
	Dokter Muda (Spesialis Patologi Klinik)	10		1	0%
	Dokter Pertama (Spesialis Patologi Klinik)	9		1	0%
9	Dokter Madya (Spesialis Mata)	12		1	0%
	Dokter Muda (Spesialis Mata)	10		1	0%
	Dokter Pertama (Spesialis Mata)	9		1	0%
10	Dokter Madya (Spesialis Telinga, Hidung, Tenggorokan, Bedah tenggorokan dan Leher)	12		1	0%
	Dokter Muda (Spesialis Telinga, Hidung, Tenggorokan, Bedah tenggorokan dan Leher)	10		1	0%
	Dokter Pertama (Spesialis Telinga, Hidung, Tenggorokan, Bedah tenggorokan dan Leher)	9		1	0%
11	Dokter Madya (Spesialis Syaraf)	12		1	0%
	Dokter Muda (Spesialis Syaraf)	10		1	0%
	Dokter Pertama (Spesialis Syaraf)	9		1	0%
12	Dokter Madya Spesialis Dermatologi dan Venereologi (Kulit dan Kelamin)	12		1	0%
	Dokter Muda Spesialis Dermatologi dan Venereologi (Kulit dan Kelamin)	10		1	0%
	Dokter Pertama Spesialis Dermatologi dan Venereologi (Kulit dan Kelamin)	9		1	0%
13	Dokter Madya (Spesialis Jantung dan Pembulu Darah)	12		0	0%
	Dokter Muda (Spesialis Jantung dan Pembulu Darah)	10		1	0%

NO	NAMA JABATAN	KLS JABATAN	B	K	%
	Dokter Petama (Spesialis Jantung dan Pembulu Darah)	9		1	0%
14	Dokter Madya (Spesialis Ortopedi)	12		0	0%
	Dokter Muda(Spesialis Ortopedi)	10		1	0%
	Dokter Petama(Spesialis Ortopedi)	9		1	0%
15	Dokter Madya (Spesialis Urologi)	12		0	0%
	Dokter Muda(Spesialis Urologi)	10		1	0%
	Dokter Pertama(Spesialis Urologi)	9		1	0%
16	Dokter Madya (Spesialis Gigi)	12	3	5	60%
	Dokter Muda (Spesialis Gigi)	10		4	0%
	Dokter Pertama (Spesialis Gigi)	9		3	0%
17	Dokter Madya	12		5	0%
	Dokter Muda	10	1	5	20%
	Dokter Pertama	9	4	6	67%
18	Dokter Gigi Madya	12		1	0%
	Dokter Gigi Muda	10		1	0%
	Dokter Gigi Pertama	9		1	0%
19	Bidan Madya	11		4	0%
	Bidan Muda	9		8	0%
	Bidan Pertama	8		10	0%
20	Bidan Penyelia	8	4	14	29%
	Bidan Pelaksana Lanjutan / Mahir	7		12	0%
	Bidan Pelaksana/Terampil	6	3	19	16%
21	Perawat Madya	11	1	20	5%
	Perawat Muda	9		36	0%
	Perawat Pertama	8	1	45	2%
22	Perawat Penyelia	8	10	18	56%
	Perawat Mahir	7	1	18	6%
	Perawat Terampil	6	5	18	28%
23	Penata Anastesi Madya	11		2	0%
	Penata Anastesi Muda	9		3	0%
	Penata Anastesi Pertama	8		3	0%
24	Asisten Penata Anastesi Penyelia	8	1	2	50%
	Asisten Penata Anastesi Mahir	7	1	2	50%
	Asisten Penata Anastesi Pelaksana/Terampil	6		4	0%
25	Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8	2	2	100%
	Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7		1	0%
	Terapis gigi dan Mulut Pelaksana/Terampil	6	1	1	100%
26	Teknisi Gigi Penyelia	8		0	0%
	Teknisi Gigi Mahir	7		2	0%
	Teknisi Gigi Terampil	6		1	0%
27	Administrator Kesehatan Madya	11		0	0%
	Administrator Kesehatan Muda	9		1	0%
	Administrator Kesehatan Pertama	8		3	0%
28	Epidemiologi Ahli Muda	8		1	0%
	Epidemiologi Ahli Pertama	8		1	0%
29	Fisikawan Medis Ahli Madya	11		0	0%
	Fisikawan Medis Ahli Muda	9		1	0%
	Fisikawan Medis Ahli Pertama	8		1	0%
30	Fisioterapis Ahli Madya	11		0	0%

NO	NAMA JABATAN	KLS JABATAN	B	K	%
	Fisiotherapis Ahli Muda	9		1	0%
	Fisiotherapis Ahli Pertama	8		3	0%
31	Fisiotherapis Penyelia	8		0	0%
	Fisiotherapis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7		1	0%
	Fisiotherapis Pelaksana/Terampil	6		3	0%
32	Okupasi Terapis Penyelia	8		0	0%
	Okupasi Terapis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7		0	0%
	Okupasi Terapis Pelaksana/Terampil	6		1	0%
33	Psikolog Klinis Ahli Madya	11		0	0%
	Psikolog Klinis Ahli Muda	9		1	0%
	Psikolog Klinis Ahli Pertama	8		1	0%
34	Radiografer Madya	8		0	0%
	Radiografer Muda	7		1	0%
	Radiografer Pertama	6		1	0%
35	Radiografer Penyelia	8		2	0%
	Radiografer Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	2	2	100%
	Radiografer Pelaksana / Terampil	6		6	0%
36	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya	11		3	0%
	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda	9	1	3	33%
	Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama	8	1	4	25%
37	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	1	3	33%
	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan/Mahir	7		3	0%
	Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/Terampil	6	1	3	33%
38	Perekam Medis Muda	9		1	0%
	Perekam Medis Pertama	8		1	0%
39	Perekam Medis Penyelia	8		1	0%
	Perekam Medis Mahir	7	1	3	33%
	Perekam Medis Pelaksana	6		5	0%
40	Teknisi Transfusi Darah Penyelia	8		0	0%
	Teknisi Transfusi Darah Pelaksana Lanjutan/Mahir	7		1	0%
	Teknisi Transfusi Darah Pelaksana/Terampil	6		1	0%
41	Terapis Wicara Penyelia	8		0	0%
	Terapis Wicara Pelaksana Lanjutan/Mahir	7		1	0%
	Terapis Wicara Pelaksana/Terampil	6		1	0%
42	Apoteker Madya	11	1	3	33%
	Apoteker Muda	9	1	3	33%
	Apoteker Pertama	8	4	5	80%
43	Asisten Apoteker Penyelia	8	1	6	17%
	Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	1	6	17%
	Asisten Apoteker Pelaksana/Terampil	6		10	0%
44	Nutrisisionis Ahli Madya	11		1	0%
	Nutrisisionis Ahli Muda	9		2	0%
	Nutrisisionis Ahli Pertama	8		3	0%
45	Nutrisisionis Penyelia	8	1	2	50%
	Nutrisisionis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7		2	0%
	Nutrisisionis Pelaksana/Terampil	6		2	0%
46	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Madya	11		1	0%
	Tenaga Sanitasi Ahli Muda	9	1	1	100%

NO	NAMA JABATAN	KLS JABATAN	B	K	%
	Tenaga Sanitasi Ahli Pertama	8		1	0%
48	Tenaga Sanitasi Penyelia	8	1	2	50%
	Tenaga Sanitasi Pelaksana Lanjutan / Mahir	7		3	0%
	Tenaga Sanitasi Pelaksana/Terampil	6		6	0%
48	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Madya	11		1	0%
	Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli Muda	9	1	1	100%
	Pembimbing Kesehatan kerja Ahli Pertama	8		1	0%
49	Pranata Komputer Ahli Madya	11		0	0%
	Pranata Komputer Ahli Muda	9	1	1	100%
	Pranata Komputer Ahli Pertama	8		2	0%
50	Teknisi Elektromedis Ahli Madya	11		0	0%
	Teknisi Elektromedis Ahli Muda	9		0	0%
	Teknisi eketromedis Ahli Pertama	8		1	0%
51	Teknisi Elektromedis Penyelia	8		0	0%
	Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan / Mahir	7		5	0%
	Teknisi Eketromedis Pelaksana/Terampil	6		4	0%
Kasi Keperawatan dan kebidanan					
52	Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1	100%
53	Pengelola Layanan Kesehatan	6		1	0%
54	Pengelola Layanan Kesehatan	6		1	0%
Kasi Pelayanan Medik					
55	Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1	100%
56	Pengolah Data dan Informasi	6	1	3	33%
57	Pengelola Layanan Kesehatan	6	1	1	100%
Kasi penunjang Medik					
58	Penelaah Teknis Kebijakan	7		1	0%
59	Pengelola Layanan Kesehatan	6	1	1	100%
Kasi Penunjang Non medik					
60	Penata Kelola Layanan Kesehatan	7	1	2	50%
Kasi Pemasaran dan Kerjasama					
61	Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1	100%
62	Pengolah Data dan Informasi	6		1	0%
Kasi Informasi,Hukum dan Pengaduan					
63	Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	2	50%
Kasubbag Administrasi Umum dan Kepegawaian					
64	Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1	100%
65	Pengolah Data dan Informasi	6		2	0%
66	Pengelola Layanan Operasional	6		2	0%
67	Pengadministrasi Perkantoran	5		2	0%
Kasubbag Perencanaan Program dan penilaian Kinerja					
68	Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	2	50%
69	Pengadministrasi Perkantoran	5	1	1	100%
Kasubbag Keuangan dan Akuntansi					
70	Penelaah Teknis Kebijakan	7	2	3	67%
71	Pengolah Data dan Informasi	6		4	0%
72	Pengadministrasi Perkantoran	5	3	7	43%

Sumber : aplikasi perhitungan dan perencanaan kebutuhan SDMK di fasyankes pemerintah

b. Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia, Dinas kesehatan kota Tarakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga membutuhkan dukungan sarana dan prasaran kerja (asset/modal) . Adapun gambaran sarana dan prasarana yang tercatat dalam data inventarisasi barang milik daerah Dinas Kesehatan Kota Tarakan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3 Sarana Prasarana di
Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2025

NO	NAMA BARANG	MEREK	JUMLAH BARANG	SATUAN	KONDISI		
					B	KB	RB
1	AC Sentral	Panasonic	4	Unit	4	-	-
2	AC Split	Panasonic	20	Unit	20	-	-
3	Air Cleaner	Krisbow	1	Unit	1	-	-
4	Alat Pemadam	Global	15	Unit	15	-	-
5	Amplifaer	Aubem	1	Unit	1	-	-
6	Avometer	Sanwa	4	Unit	4	-	-
7	Blower	Krisbow	1	Unit	1	-	-
8	Bracket	Lokal	2	Unit	2	-	-
9	Brandkas	SG	2	Unit	2	-	-
10	Camera	Canon	10	Unit	10	-	-
11	CPU	Sim X	3	Unit	3	-	-
12	Dispenser	Politron	6	Unit	6	-	-
13	Filing Cabinet	Vip	18	Unit	18	-	-
14	Genset	Honda	3	Unit	3	-	-
15	Handy Cam	Samsung	5	Unit	5	-	-
16	Hardisk	Toshiba	21	Unit	21	-	-
17	HT	Firscom	5	Unit	5	-	-
18	Kipas Angin	Nasional	4	Unit	4	-	-
19	Kompur Gas	Rinnai	4	Unit	4	-	-
20	Kotak Saran	Lokal	1	Unit	1	-	-
21	Kursi Biasa	Lokal	15	Unit	15	-	-
22	Kursi Putar	Verona	113	Unit	113	-	-
23	Kursi Rapat	Chitose	22	Unit	22	-	-
24	Laptop	-	42	Unit	42	-	-
25	Layar Proyektor	Acer	7	Unit	7	-	-
26	Lemari Besi	Brother	8	Unit	8	-	-
27	Lemari Buku Perpustakaan	Lokal	18	Unit	18	-	-
28	Lemari Es	Sharp	3	Unit	3	-	-
29	Lemari Kaca	Lokal	7	Unit	7	-	-
30	Lemari Kayu	Lokal	7	Unit	7	-	-
31	Lemari Penyimpan	Lokal	22	Unit	22	-	-
32	Lemari Sorok	Lokal	1	Unit	1	-	-
33	Megapone	TOA	1	Unit	1	-	-
34	Meja Kerja	Lokal	105	Unit	105	-	-
35	Meja Komuter	Desigen	8	Unit	8	-	-
36	Meja Lipat	Lokal	10	Unit	10	-	-
37	Meja Rapat	Expo	71	Unit	71	-	-
38	Meja Resepsen	Lokal	4	Unit	4	-	-
39	Meja Tambahan	Lokal	2	Unit	2	-	-
40	Meja Tamu Ruang Tunggu	Lokal	2	Unit	2	-	-
41	Mesi Absen	Solution	1	Unit	1	-	-
42	Mesin Bor	Makita	7	Unit	7	-	-
43	Mesin Fogging	Agrofog	5	Unit	5	-	-
44	Mesin Kertas	Gamet	3	Unit	3	-	-
45	Mesin Potong Rumput	Stihl	2	Unit	2	-	-
46	Mobil Ambulance	APV	1	Unit	1	-	-
47	Mobil Penerangan	Toyota	1	Unit	1	-	-
48	Mobil Unit	Exstrada	1	Unit	1	-	-
49	Monitor	IBM	8	Unit	8	-	-
50	Papan Nama	Lokal	2	Unit	2	-	-
51	PC Komputer	Lenovo	15	Unit	15	-	-
52	Printer	Canon	40	Unit	40	-	-

NO	NAMA BARANG	MEREK	JUMLAH BARANG	SATUAN	KONDISI		
					B	KB	RB
53	Proyektor	Toshiba	2	Unit	2	-	-
54	Rak Besi	Lokal	35	Unit	35	-	-
55	Rak Penyimpan	Lokal	11	Unit	11	-	-
56	Scaner	Canon	5	Unit	5	-	-
57	Sepeda Motor	Yamaha	3	Unit	3	-	-
58	Sepeda Motor	Honda	8	Unit	8	-	-
59	Sofa	Lokal	5	Unit	5	-	-
60	Solder Listrik	Cody	3	Unit	3	-	-
61	Sound system	BMB	3	Unit	3	-	-
62	Station Wagon	Toyota	1	Unit	1	-	-
63	Station Wagon	APV	1	Unit	1	-	-
64	Station Wagon	Inova	1	Unit	1	-	-
65	Station Wagon	Avansa	1	Unit	1	-	-
66	Tabung Gas	Sheel	7	Unit	7	-	-
67	Tang Ampere	Kyoritsu	4	Unit	4	-	-
68	Televisi	Sony	3	Unit	3	-	-
69	Tempat Tidur Besi	Lokal	2	Unit	2	-	-
70	Tenda Lipat	Lokal	7	Unit	7	-	-
71	Troli	Poly	2	Unit	2	-	-
72	Vakum Cleaner	Krisbow	2	Unit	2	-	-
73	Wireless	ACI	1	Unit	1	-	-

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinkes Kota Tarakan, 2025

Dari tabel di atas menunjukkan Dinas kesehatan Kota Tarakan memiliki 73 jenis barang dengan jumlah barang sebanyak 791 unit dengan keseluruhan barang dalam kondisi baik.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

Capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Tarakan periode Tahun 2019-2024 dapat dilihat dari capaian indicator kinerja, yaitu dengan membandingkan realisasi target indicator dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu capaian kinerja pelayanan juga dinilai dari perencanaan anggaran dan realisasinya selama kurun waktu 2019-2024. Adapun capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

a. Capaian Indikator Kinerja

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2021-2024

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		RPJMD Perubahan																	
1	Angka Kematian Ibu		IKU/IKK		42	42	42	42	41	42	63	42	126	89,3	100	150	100	300	217,8
2	Angka Kematian Bayi		IKU/IKK		12	6	6	6	6	6	4	7	6	6,9	50	66,7	116,7	100	115
3	Persentase Pemenuhan Sumber Daya Kesehatan Sesuai Kebutuhan		IKU		60	60	65	70	75	60	60	80,00	84,80	N/A	100	100	123	121	N/A
4	Indeks Keluarga Sehat		IKU		0,1	0,1	0	0,3	0,5	N/A	N/A	0,21	0,43	0,35	N/A	N/A	105	143	70
5	Persentase Pelaksanaan Pembudayaan GERMAS		IKU		100	100	100	100	100	100	100	200	100	N/A	100	100	200	100	N/A
6	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	SPM			100	100	100	100	100	127	91,22	97	98	87	127	91,22	97,3	98	87,4
7	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	SPM			100	100	100	100	100	133,8	93,11	98	98	93,5	133,8	93,11	98,40	98,4	93,5
8	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	SPM			100	100	100	100	100	137,8	94,64	100	98	95	137,8	94,64	100	98	95
9	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	SPM			100	100	100	100	100	20	25,7	43,65	100	108	20	25,7	43,65	100	108
10	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	SPM			100	100	100	100	100	93,6	38,5	90,69	86	96,9	93,6	38,5	90,69	86	96,9
11	Persentase Orang Usia 15 - 59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	SPM			100	100	100	100	100	16,08	19	23,04	80	75	16,08	19	23,04	80	75
12	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	SPM			100	100	100	100	100	4,81	5,46	13,35	100	122	4,81	5,46	13,35	100	122

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
13	Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	SPM			100	100	100	100	100	10,5	15,89	17,48	46	67,4	10,5	15,89	17,48	46	67,4
14	Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	SPM			100	100	100	100	100	31,54	46,09	55,09	71	108	31,54	46,09	55,09	71	108
15	Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	SPM			100	100	100	100	100	63,12	67,86	70	78	95	63,12	67,86	70	78	95
16	Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standar	SPM			100	100	100	100	100	56,85	118	145	100	140	56,85	118	145	100	140
17	Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV Sesuai Standar	SPM			100	100	100	100	100	100	119	110	100	109	100	119	110	100	109
18	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat dan Vaksin Esensial		LAKIP	DALEV	100	100	100	100	100	100	94,9	100	100	100	100	94,9	100	100	100
19	Persentase Alat Kesehatan di UPT yang telah Terkalibrasi			IKP	100	100	100	100	100	98	98	0	78,86	87,6	98	98	0	78,86	87,6
20	Jumlah UPT yang Terakreditasi			IKP	4	3	6	4	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0	100
21	Cakupan Pneumonia Balita			IKP	100	100	100	100	100	52,5	88,08	92,5	75	108	52,5	88,08	92,5	75	108
22	Cakupan Penemuan Diare Semua Umur			IKP	100	100	100	100	100	52	169,6	2,60	44	18,04	52	169,6	2,6	44	18,04
23	Persentase Perempuan Usia 30-50 tahun yang Dideteksi Dini Kanker Serviks dan Payudara			IKP	40	40	40	40	40	5,5	0,7				13,75	1,75	0	0	0
24	Persentase Puskesmas yang Melaksanakan Kebijakan			IKP	50	50	50	50	50	28	28	39		100	56	56	78	0	200

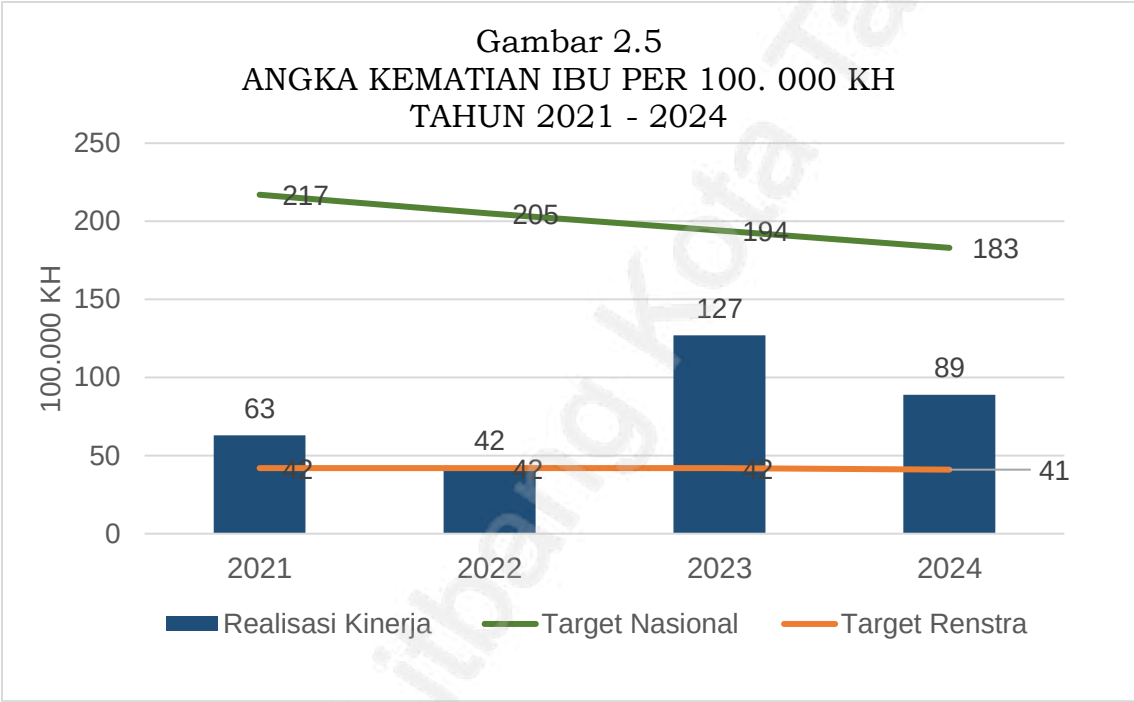
NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Kawasan Tanpa Rokok Minimal 50% Sekolah																		
25	Cakupan Kelurahan UCI			IKP	85	90	95	97	100	40	25	25	15%	5	47,1	27,8	26,32	0,155	5
26	Cakupan Kelurahan yang Mengalami KLB dilakukan PE < 24 Jam			IKP	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
27	Persentase Posyandu Aktif			IKP	25	30	35	35	45	23,84	30,41	24,30	69,60	69,60	95,36	101,4	69,43	198,9	154,7
28	Persentase PHBS Tatanan Rumah Tangga			IKP	50	55	60	65	65	39,6	39,68	53,11	47,84	45,67	79,2	72,15	88,52	73,6	70,26
29	Cakupan Kepesertaan JKN		IKU	IKP	50	96	97	98	98	95	98,52	97,53	99,51	101	190	102,6	100,5	101,5	103,1
30	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan		IKU		70/B	70/B	70/B	70/B	77/BB	67/B	76,57/BB	79,49/BB	84/A	83,61/A	85,7	109,3	113,6	120	108
31	Indeks Kepuasan masyarakat		IKU		70	71	72	73	75	80,25	85	85,24	85,80	86,77	114,6	119,7	118,4	117,5	115,7
32	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita		IKU	IKP	14,8	10	9,5	7,5	6	14,8	8,15	6,39	4,50	3,8	100	81,5	67	60	63
33	Persentase Tindak lanjut kasus gigitan hewan penular rabies (anjing, kucing, dan kera)			IKP	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
34	Cakupan Kelurahan yang mengalami KLB dilakukan PE < 24 jam			IKP	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
35	Angka Kesakitan (IR) DBD			IKP	<48	<48	<48	<48	<48	46,9	25,4	267	165	107	97,7	52,9	556,6	343,8	222,9

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tarakan, 2025

a. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan program kesehatan ibu dan anak. Angka Kematian Ibu (AKI) adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau penanganannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan dan terjatuh. Hal ini menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan Masyarakat.

AKI mengacu pada jumlah kematian ibu yang terkait dengan masa kehamilan, tingkat pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas. Selain itu juga menggambarkan tingkat kesadaran masyarakat. Oleh karena itu diperlukan peningkatan peran aktif bidan dalam mengantisipasi masalah-masalah tersebut.



Sumber : LAKIP,2024

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa angka kematian ibu selama 4 (Empat) tahun mengalami penurunan di tahun 2020-2022 dan tahun 2023 terjadi peningkatan kematian ibu dua kali lebih banyak dari tahun 2022 dan terjadi penurunan di tahun 2024. Bila dibandingkan dengan target Nasional menunjukkan kondisi yang baik. Namun bila di bandingkan dengan target renstra hingga tahun 2024 belum mencapai target.

Adapun Faktor Penyebab yang mempengaruhi kematian Ibu :

1. Penyebab langsung kematian ibu adalah eklamsi, penyakit menular dan parasit pada ibu yang dapat diklasifikasikan di tempat lain tetapi mempersulit kehamilan serta komplikasi obstetri lain(peripartum cardiomyopathy)
2. Ibu masuk dalam kategori 4T
 - 4 terlalu : terlalu muda dibawah 20 tahun, terlalu tua diatas 35 tahun, jarak kehamilan terlalu dekat kurang dari 2 tahun dan kehamilan terlalu banyak lebih dari 3 anak
 - 4 terlambat : terlambat mengambil keputusan, terlambat sampai ke fasilitas kesehatan, terlambat mendapat penanganan dan terlambat merujuk.
3. Masih ditemukan ibu hamil tidak ANC sesuai standar
4. Masih banyaknya Ibu hamil dengan anemia

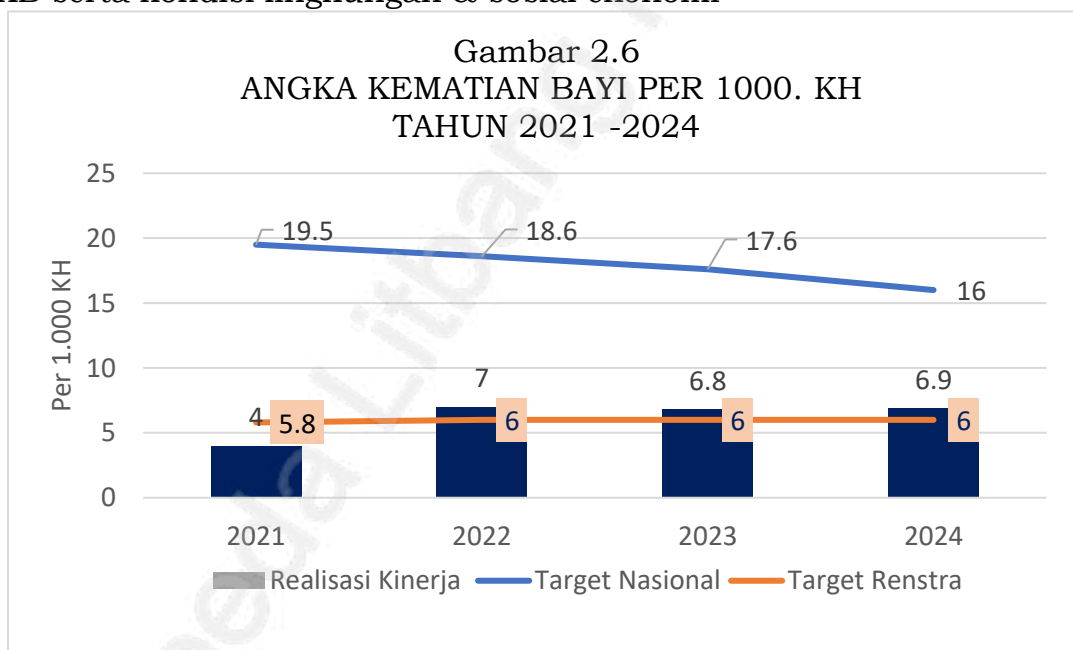
5. Kesadaran ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan kehamilan secara berkala rendah

Upaya yang telah dilakukan dalam menurunkan angka kematian ibu :

1. Melakukan orientasi pelaksanaan kelas ibu hamil dan kelas ibu balita untuk meningkatkan pengetahuan ibu
2. Pendampingan Tim Ahli (Sp.A dan Sp.OG) ke Puskesmas dalam pelayanan KIA, kegawatdaruratan dan sistem rujukan maternal neonatal
3. Refreshing penggunaan Maternal Perinatal Death Notification (MPDN)
4. Audit Maternal Perinatal
5. Upgrading / Peningkatan kapasitas bidan dalam penurunan AKI AKB
6. Pembinaan Pelayanan ANC, Persalinan, PNC dan Bayi oleh Sp.OG dan Sp.A.
7. Rapat Evaluasi Jejaring layak hamil, ANC dan Stunting
8. Koordinasi Evaluasi Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil (termasuk pelayanan kontrasepsi)
9. Pemeriksaan SHK (skrining Hipotiroid Kongenital) pada bayi baru lahir
10. Pemeriksaan penyakit jantng bawaan (PJB) kritis

b. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Bayi menunjukkan gambaran tingkat permasalahan kesehatan yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA & KB serta kondisi lingkungan & sosial ekonomi



Sumber : LAKIP,2024

Gambar di atas menunjukkan realisasi kinerja angka kematian bayi dari tahun 2021 hingga 2024 jika dibandingkan dengan target nasional menunjukkan realisasi kinerja yang baik karena realisasi kinerja Kota Tarakan lebih kecil. Namun berbeda bila dibandingkan dengan target renstra dimana dari empat tahun terakhir hanya di tahun 2021 realisasi kinerja mencapai target.

Adapun Faktor penyebab yang mempengaruhi terjadinya kematian bayi :

1. Adapun penyebab langsung nya adalah BBLR, Asfiksia berat, Kelainan Kongenital/Bawaan, Diare, sesak dan kejang, dan distosia bahu
2. Masih ditemukan ibu hamil tidak ANC sesuai standar
3. Adanya penolakan terhadap kader untuk edukasi kehamilan

4. Masih banyaknya Ibu hamil dengan anemia
5. Ibu yang masuk dalam kategori 4T (Terlalu banyak/ jarak anak-anak dekat)
6. Pemantauan patograf belum optimal (kemajuan proses persalinan)
7. Pemanfaatan pemeriksaan USG yang belum optimal
8. Keterbatasan Ventilator dan tidak adanya ketersediaan surfaktan di ruang NICU.
9. Penolong persalinan tidak lengkap di FKTP (tidak ada dokter)
10. Rendahnya penggunaan kb pada ibu hamil resiko tinggi.
11. Kepatuhan terhadap penerapan SOP untuk kasus-kasus emergensi dan sering penyebab kematian bayi di RS belum optimal

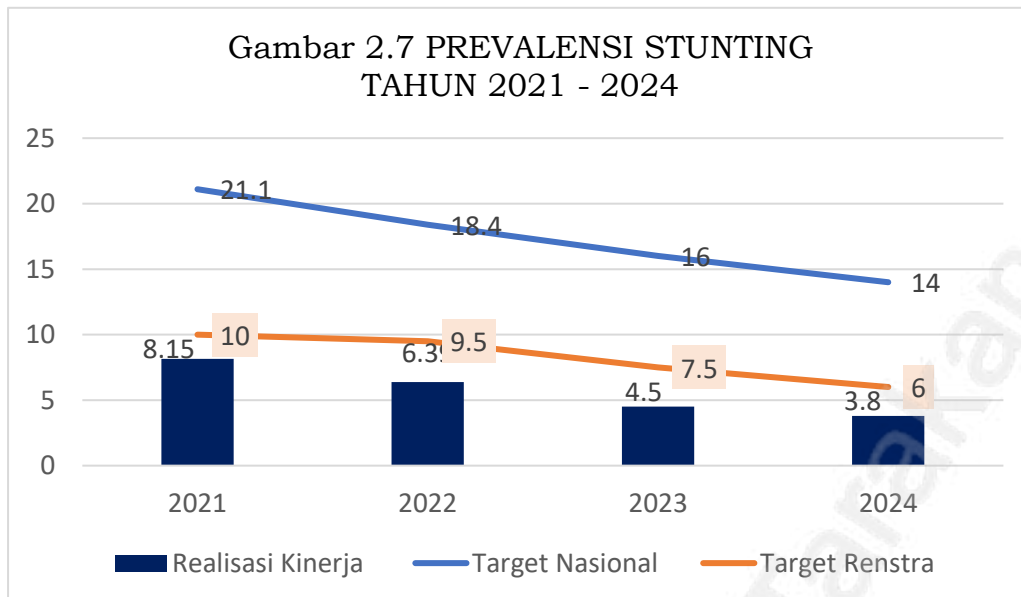
Upaya yang telah dilakukan dalam menurunkan angka kematian Bayi :

1. Melakukan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) dan skrining Penyakit Jantung Bawaan (PJB) pada bayi baru lahir
2. Melakukan orientasi pelaksanaan kelas ibu hamil dan kelas ibu balita untuk meningkatkan pengetahuan ibu
3. Pendampingan Tim Ahli (Sp.A dan Sp.OG) ke Puskesmas dalam pelayanan KIA, kegawat daruratan dan system rujukan maternal neonatal
4. Refresing penggunaan Maternal Perinatal Death Notification (MPDN)
5. Audit Maternal Perinatal
6. Up greading / Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam penurunan AKI AKB
7. Menyusun perencanaan pengadaan CPAP, ventilator dan sarpras NICU pada RS
8. Penyusunan SOP emergengy pada bayi
9. Melakukan perbaikan dan memastikan sistem rujukan maternal, neonatal berfungsi dengan baik (SIRUTE)
10. Melakukan Kerjasama lintas sektor Lurah/ RT terhadap pemantauan ibu hamil resiko tinggi

c. Prevalensi Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Pencegahan Stunting penting dilakukan sedini mungkin untuk membebaskan setiap anak dari risiko terhambatnya perkembangan otak yang menyebabkan tingkat kecerdasan anak tidak maksimal.

Pemerintah kota Tarakan telah melakukan Upaya dalam penurunan stunting di kota Tarakan sehingga dari tahun ke tahun menagali penurunan kasus sehingga di tahun 2024 prevalensi stunting sebesar 3,83%, (data EPPBGM).



Sumber : LAKIP,2024

Gambar di atas menunjukkan realisasi kinerja prevalensi stunting dari tahun 2021 hingga 2024 jika dibandingkan dengan target nasional menunjukkan realisasi kinerja yang baik karena realisasi kinerja Kota Tarakan lebih kecil. Begitu pula bila dibandingkan dengan target renstra. Adapun faktor penyebab yang mempengaruhi prevalensi stunting adalah :

1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita di posyandu. Pemantauan pertumbuhan mandiri di rumah belum bisa dilakukan oleh semua ibu balita karena ibu balita tidak memiliki timbangan dan alat ukur panjang/tinggi badan Kasus BBLR menyebabkan pertumbuhan bayi terlambat
2. Masih rendahnya cakupan balita ditimbang yang naik berat badannya (N)
3. Belum semua balita bermasalah gizi datang ke puskesmas untuk dilakukan validasi dan *assesment*
4. Kurangnya kebersihan hygiene dan sanitasi menyebabkan anak sering sakit
5. Terbatasnya kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia pelaksana;
6. Kurangnya edukasi perilaku hidup sehat ke masyarakat
7. Belum maksimal kerjasama dengan LS dalam penanganan stunting
8. Pelaksanaan intervensi/pelaksanaan program belum optimal, sehingga akses layanan dari sisi kelompok penerima manfaat terbatas.

Upaya penurunan stunting :

1. Kampanye Tablet tambah Darah dan screening Anemia pada Remaja Putri
2. Pemeriksaan Kesehatan bagi Calon pengantin (catin)
3. Pemberian Tablet Tambah Darah pada Catin
4. Pemberian TTD pada Ibu hamil
5. Pemeriksaan Antenatal care dengan menggunakan USG di Puskesmas
6. Homecare bagi Ibu Hamil Resti
7. Kelas Ibu Hamil dan kelas ibu balita
8. Verifikasi dan validasi balita Stunting
9. Pemberian PMT pada Ibu Hamil KEK
10. Pemberian PMT pada Balita Gizi Kurang
11. Pemberian Vitamin A
12. Pemberian F100 pada balita gizi buruk
13. Pemberian Obat cacing pada Balita
14. Pemberian Protein bagi balita gizi kurang dan balita Underweight

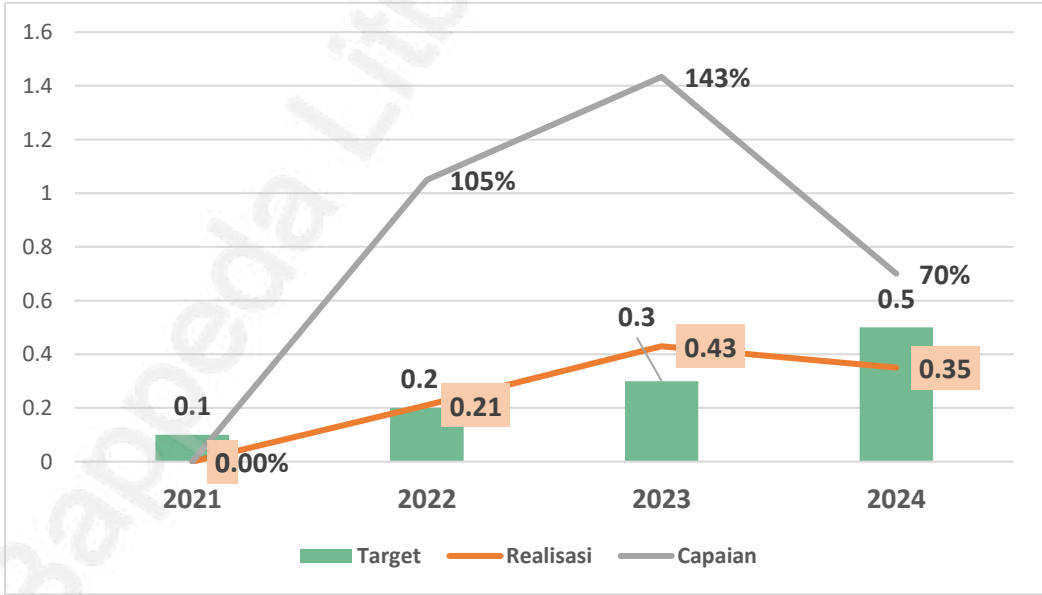
- 15. Pemberian Vitamin Zinc bagi balita dengan Berat badan Kurang dan Weight walfetering
- 16. Orientasi SDIDTK dan PMBA bagi Kader dan nakes
- 17. Rembuk stunting TK Kota
- 18. Lomba Inovasi penurunan Stunting TK Kota Tarakan
- 19. Melakukan Rujukan Stunting ke RS
- 20. Pendampingan Tim Ahli (SPA dan SPOG ke Puskesmas
- 21. Lomba Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bagi Balita
- 22. Pendampingan MP ASI dan ASI k
- 23. Pemeriksaan SHK
- 24. Pemeriksaan garam Beryodium Tingkat Rumah tangga

d. Indeks Keluarga sehat

Program Indonesia Sehat merupakan salah satu program dari agenda ke 5 Nawa Cita, yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia. Program ini didukung oleh program sektoral lainnya yaitu Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Kerja, dan Program Indonesia Sejahtera. Program Indonesia Sehat selanjutnya menjadi program utama pembangunan kesehatan yang direncanakan pencapaiannya melalui Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015.

Berdasarkan data yang terkumpul IKS Kota Tarakan berada pada nilai 0,35 kategori Keluarga tidak sehat.. Realisasi IKS tidak mencapai target yang di tetapkan sebesar 0,5. Bila dilihat tren perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja beberapa tahun tahun diperoleh Gambaran realisasi mengalami kenaikan dan mencapai target sepanjang tahun 2021 – 2023 sedangan dan pada tahun 2024

Gambar 2.8
CAPAIAN INDEKS KESEHATAN KELUARGA
TAHUN 2021 -2024



Adapun faktor penyebab yang mempengaruhi capaian IKS :

- 1. Wilayah kerja yang luas dan jumlah penduduk yang banyak
- 2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia untuk intervensi lanjutan
- 3. Adanya data yang bergerak yang akan dilakukan intervensi lanjutan
- 4. Anggaran khusus untuk program PIS PK tidak ada
- 5. Tidak adanya pelatihan khusus untuk pemegang program PIS PK baik di Tingkat Dinas maupun Puskesmas

- 6. Pendataan belum dilakukan semua
- 7. Beberapa rumah masyarakat yang sulit diakses
- 8. Aplikasi IKS yang sampai sekarang tidak dapat digunakan

Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan IKS :

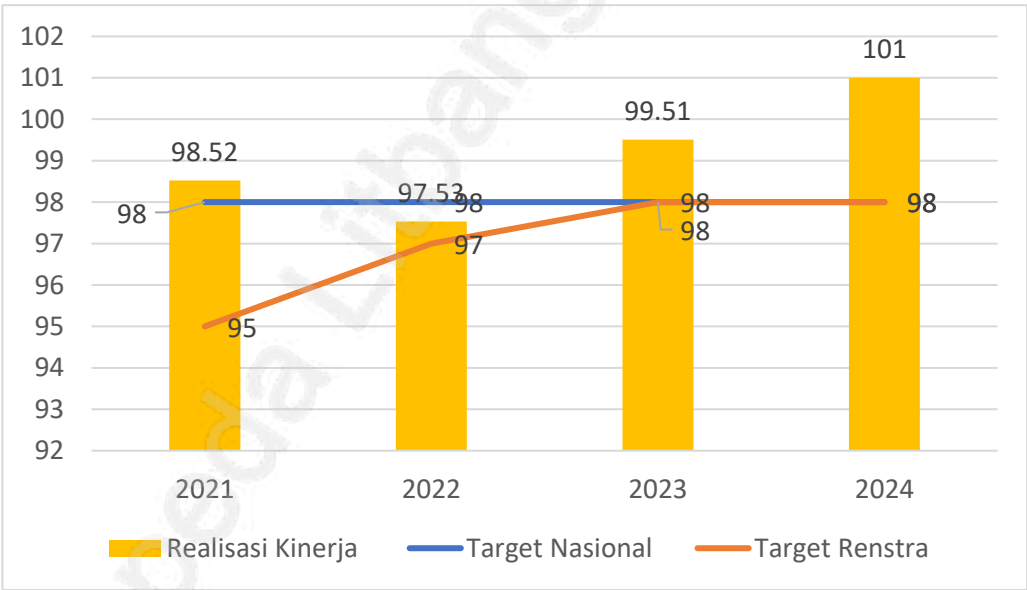
- 1. Membuat usulan terkait anggaran PIS PK
- 2. Memberikan pelatihan bagi petugas
- 3. Menyelesaikan pendataan
- 4. Penambahan tenaga atau dibantu dengan kader
- 5. Berkoordinasi dengan linsek terkait
- 6. Menyampaikan permasalahan ke provinsi dan tingkat pusat terkait permasalahan aplikasi IKS yang tidak dapat digunakan sampai sekarang

e. Persentase Capaian UHC

Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta, merupakan sistem penjaminan kesehatan yang bertujuan memastikan seluruh penduduk memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan berkualitas tanpa kesulitan finansial.

Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kota Tarakan di tahun 2024 telah mencapai 101% dengan Tingkat Keaktifan peserta 80,74%. dari total seluruh penduduk. Tren perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2021 sampai 2024 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan target Nasional dari target 98% telah mencapai target.

Gambar 2.5
CAPAIAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC)
TAHUN 2021 - 2024



Sumber: LAKIP,2024

b. Realisasi Anggaran

Tabel. 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Dinas kesehatan kota Tarakan Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata -Rata pertumbuhan	
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Belanja Operasi:																	
Belanja Pegawai	29.916.947.203	40.673.893.639	39.007.201.264	30.467.490.906	34.373.468.276	28.205.134.441	37.400.052.259	36.042.292.344	28.602.675.582	32.346.046.552	94,28	91,95	92,40	93,88	94,10	4,3	5,83
belanja Barang dan Jasa	38.973.396.803	89.846.850.003	88.705.536.383	49.692.021.609	52.134.652.188	27.709.278.538	67.103.356.927	75.757.218.375	37.692.716.908	44.373.939.575	71,10	74,69	85,40	75,85	85,11	30,5	38,30
Belanja Hibah	3.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	300.000.000	-	250.000.000	245.438.000	250.000.000	298.045.077	-	100,00	98,18	100,00	99,35	1.631,0	- 16,15
Belanja Bantuan Sosial	0	260.000.000	290.804.000	290.000.000	290.000.000	-	138.336.575	290.580.482	271.497.009	181.451.586	-	53,21	99,92	93,62	62,57	2,3	14,06
Belanja Modal	4.543.902.073	31.845.237.084	49.996.939.740	8.830.345.928	11.561.576.825	3.827.556.059	22.565.416.001	28.795.599.954	6.549.460.200	9.552.950.607	84,24	70,86	57,59	74,17	82,63	131,3	107,90
TOTAL	73.437.246.079	162.875.980.726	178.250.481.387	89.529.858.443	98.659.697.289	59.741.969.038	127.457.161.762	141.131.129.155	73.366.349.699	86.752.433.396	81,35	78,25	79,18	81,95	87,93	23,8	25,3

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran merupakan kelompok orang-orang atau organisasi/instansi yang akan menerima layanan program dan kegiatan pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat.

Kelompok sasaran layanan Dinas Kesehatan Kota Tarakan adalah UPTD Rumah Sakit, UPTD Puskesmas, UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, UPTD Instalasi Farmasi Pusat Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (IFP2FPK) dilingkungan Dinas kesehatan Kota Tarakan serta unit layanan lain di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan pemerintah kota Tarakan. sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Kesehatan, bahwa Dinas Kesehatan Kota Tarakan layanan yang dapat diberikan antara lain:

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan dan sumber daya kesehatan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit dan bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan bidang kesehatan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas kesehatan

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang kesehatan Dinas Kesehatan Kota Tarakan memiliki kendala dan tantangan yang beragam. Adapun permasalahan pelayanan kesehatan yang diidentifikasi berdasarkan hasil analisis dan capaian kinerja selama tahun 2019- 2024 mencakup berbagai aspek, mulai dari keterbatasan sumber daya, sarana prasarana, system dan proses pelayanan serta masih tingginya angka kesakitan dan kematian. Namun secara umum permasalahan utama pembangunan kesehatan masih didominasi angka kesakitan dan kematian. Permasalahan ini tidak terlepas dari masih adanya kematian ibu, kematian bayi, permasalahan gizi, penyakit menular dan penyakit tidak menular serta mutu pelayanan kesehatan.

Adapun akar masalah yang menjadi factor belum tingginya kualitas kesehatan Masyarakat adalah

1. Permasalahan terkait Kompetensi dan Ketersediaan Sumber Daya Manusia Yang belum sesuai standar.

Pemenuhan SDM di bidang Kesehatan di Kota Tarakan berdasarkan Standar Minimal Standar Ketenagaan dan Analisis Kebutuhan Tenaga Kesehatan Berdasarkan ABK kesehatan menunjukkan masih terdapat kekurangan tenaga kesehatan di puskesmas kota Tarakan. pada setiap jenis jabatan masih di temukan adanya jenjang Pertama tenaga yang masih kurang dari 50% diantaranya jabatan Dokter (28,%), Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku (28,5%), Bidan (33,33%), Dokter Gigi (40%) dan untuk jenis SDM Kesehatan Kerja belum tersedia di ketiga puskesmas yang membutuhkan jenis tenaga tersebut.

Untuk jenjang jabatan terampil, jenis jabatan yang masih di bawah 50 % pemenuhan tenaganya yaitu Tenaga Teknis Kefarmasian (11,11%), Nutrisionis (14,29%), Tenaga Sanitasi Lingkungan (25%) dan Pranata Laboratorium Kesehatan (42,86%. Sedangkan untuk jenis tenaga yang

dibutuhkan rumah sakit berdasarkan ABK maka standar minimal tenaga dokter spesialis 4 dasar (Anak, Bedah, Kandungan dan Penyakit dalam dan 3 penunjang (Radiologi, Anestesi dan Patologi klinik telah terpenuhi. Namun seiring dengan kebijakan Kementerian Kesehatan dalam hal pemenuhan rumah sakit berdasarkan KJSU KIA dengan kompetensi madya maka rumah sakit kota Tarakan wajib menyiapkan sumber daya dokter spesialis dengan kompetensi tertentu sesuai sehingga diperlukan minimal dua dokter spesialis.

2. Permasalahann terkait Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan

Pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan di RSUD Kota Tarakan pada tahun 2025 telah mencapai 70%. Untuk mendukung program kementerian kesehatan dalam pemenuhan KJSU KIA, maka RSUD Kota Tarakan dalam pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan mendapatkan dukungan dari Kementerian Kesehatan melalui Shiren. sedangkan kelengkapan ASPAK untuk 5 puskesmas masih dibawah 60% hanya 1 puskesmas yang mencapai 63%.

Sarana dan prasarana kesehatan merupakan faktor penentu kualitas pelayanan. Tingkat pemenuhan yang rendah dapat mencerminkan kurangnya fasilitas esensial, yang berpotensi menurunkan mutu pelayanan dan membahayakan keselamatan pasien.

3. Permasalahann terkait Kesehatan Ibu dan anak

Adanya kasus kematian ibu sebanyak 89 per 100.000. KH, adanya kematian bayi sebanyak 6,9 per 1.000 KH, kasus stunting masih terdapat di kota Tarakan, serta masih adanya masalah kasus gizi buruk.

4. Permasalahann terkait Pencegahan dan pengendalian penyakit :

Belum optimalnya pelayanan kesehatan dalam dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Masih Tingginya kasus penyakit menular (TB, HIV, Hepatitis, Shipilis, diare Kusta, Pneumonia, DBD) dan penyakit tidak menular kususnya penyakit katarastopik (DM, Jantung, Ginjal, stroke)

5. Permasalahann terkait Mutu pelayanan Kesehatan :

Belum semua layanan kesehatan memiliki status akreditasi paripurna. Dari 6 Puskesmas yang ada di kota Tarakan terdapat 4 puskesmas yang terakreditasi paripurna dan 2 yang terakreditasi utama. Sedangkan dari 11 klinik yang telah diakreditasi, terdapat 2 klinik yang status akreditasinya masih utama yaitu Klinik Pratama Bhuwana dan Klinik Kimia Farma. Untuk 6 Rumah Sakit di kota Tarakan, masih terdapat 1 Rumah sakit yang status akreditasinya Madya yaitu RS Bhayangkara. Dengan meningkatnya status akreditasi pada pelayanan kesehatan ini mengartikan bahwa meningkatnya mutu dan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Masyarakat di kota Tarakan.

6. Permasalahann terkait Penggunaan Sistem informasi kesehatan dan integrasi data di semua layanan yang belum maksimal.

Implementasi Sistem Informasi Kesehatan di Dinas Kesehatan masih terkendala oleh kualitas data, keterbatasan SDM, kurangnya integrasi sistem, dan infrastruktur yang belum merata. Banyak sistem informasi kesehatan yang dikembangkan secara terpisah oleh berbagai instansi (puskesmas, rumah sakit, BPJS, Kemenkes), sehingga data tidak saling terhubung, serta Tidak adanya standar interoperabilitas yang diterapkan secara konsisten menyebabkan kesulitan dalam integrasi data antar sistem.

7. Belum semua mayarakat memiliki jaminan Kesehatan yang aktif

Tujuan utama dari jaminan kesehatan aktif (seperti Program Jaminan Kesehatan Nasional/JKN di Indonesia yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan) adalah untuk memberikan perlindungan kesehatan dan

jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia secara adil dan merata, sedangkan capaian di akhir tahun 2024 kepesertaan JKN aktif masih berada pada angka 80,7% ini menunjukkan masih terdapat 19,3% yang terdaftar namun tidak konsiten dalam pembayaran premi.

Dari permasalahan diatas menjadi dasar penyusunan strategi dan kebijakan untuk pengembangan pelayanan demi mendukung tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Tarakan dalam mencapai tujuan dan sasaran periode 2025-2029.

Berikut adalah pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan, yang tergambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 2.6 Pemetaan Permasalahan Layanan
Dinas Kesehatan Kota Tarakan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
Belum tingginya derajat kesehatan Masyarakat	Belum tingginya kualitas kesehatan masyarakat	1	Masih Kurangnya Kompetensi teknis Sumber daya manuasia kesehatan (Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis)
		2	Masih Kurangnya Jumlah tenaga kesehatan, tenaga medis dan tenaga penunjang lainnya
		3	Belum terpenuhinya sarana, prasarana dan perbekalan kesehatan
		4	Belum terpenuhinya mutu dan standar pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Keseahtan Tingkat Lanjut (FKTL)
		5	Belum terintegrasinya penggunaan Sistem informasi kesehatan di semua layanan
		6	Belum semua layanan kesehatan memiliki status akreditasi paripurna
		7	Belum terpenuhinya kebijakan kesehatan yang mendukung pelayanan kesehatan
		8	Tingginya kasus penyakit menular dan tidak menular
		9	Belum terpenuhinya standar pelayanan Siklus Hidup (ibu hamil, ibu bersalin, Bayi, Balita, anak sekolah, usia produktif, lansia)
		10	Tingginya masalah Gizi di masyarakat
		11	Rendahnya Kualitas kesehatan lingkungan berbasis masyarakat
		12	Belum semua mayarakat memiliki jaminan Kesehatan yang aktif

Sumber: Data Diolah, 2025

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah merupakan kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan Pembangunan karna memiliki dampak yang signifikan bagi perangkat daerah di masa yang akan datang. Gambaran kondisi yang menjadi isu strategis

adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan dampak yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal jika tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada Masyarakat dalam jangka Panjang.

2.2.2.1. Isu Global

Isu global kesehatan mengacu pada tren, tantangan dan prioritas kesehatan lintas negara yang diperkirakan akan memiliki dampak paling signifikan terhadap populasi di seluruh dunia dan memerlukan kolaborasi dalam penanganannya, Adapun isu global

1. Perubahan iklim sebagai ancaman terbesar bagi kesehatan global
2. Penyakit tidak menular (PTM), yang terus menjadi penyebab utama kematian secara global.
3. Kesiapsiagaan Keamanan Kesehatan (Health Security Preparedness): Mencegah, memitigasi, dan mempertahankan respons efektif terhadap semua keadaan darurat kesehatan secara cepat, termasuk ancaman pandemi global, resistensi antimikroba, dan penyakit berisiko tinggi lainnya.
4. Transformasi Digital Kesehatan; Tren global digitalisasi layanan kesehatan (telemedicine, Health Information System)
5. Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage - UHC)
6. Masalah kesehatan mental yang signifikan pada kelompok usia tertentu, seperti remaja.
7. Kebijakan Ekonomi Global yang dapat berdampak pada bidang kesehatan (Gangguan rantai pasok, Kenaikan iaya Alkes dan Perbekalan Kesehatan, perlambatan pembangunan kesehatan)

2.2.2.2. Isu Nasional

Analisis terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan dilakukan untuk mendukung sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan secara terintegrasi. Isu strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan merupakan bagian integral dari isu nasional yang bersumber dari kebijakan, program prioritas, dan arah strategis nasional. Isu-isu tersebut mencerminkan fokus kerja sektoral yang memiliki implikasi terhadap pembangunan di daerah. Adapun isu strategis kementerian yang relevan dengan tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya masalah Kesehatan dasar, seperti malnutrisi, Kesehatan ibu, PM, PTM, dan NTD
2. Timbulnya masalah Kesehatan baru seperti masalah kejiwaan pada remaja (mental health)
3. Transisi epidemiologi sejalan dengan menuanya populasi Indonesia di masa yang akan datang
4. Minimnya cara berpikir dan tingkat literasi kesehatan Masyarakat
5. Harga, akses, dan kualitas layanan di Indonesia yang masih kurang optimal dan timpang di berbagai daerah
6. Risiko adanya ancaman Kesehatan di masa mendatang, melihat tren lingkungan (perubahan iklim) dan juga potensi adanya pandemi berikutnya setelah COVID-19
7. Pembiayaan dan belanja Kesehatan yang masih belum optimal bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor kesehatan
8. Minimnya inovasi dan teknologi untuk dapat memberikan layanan Kesehatan yang lebih optimal dan efisien

9. Beberapa tantangan Kesehatan masa depan seperti aging population yang perlu dipersiapkan penanganannya
10. Tantangan yang signifikan dalam meningkatkan infrastruktur kesehatan dan tenaga kesehatan

2.2.2.3. Isu Regional

Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan memetakan gambaran kondisi pelayanan, potensi daerah yang menjadi kewenangan Dinas Kesehatan provinsi Kalimantan utara, permasalahan perangkat daerah, isu KLHS yang relevan dengan Dinas Kesehatan serta isu lingkungan yang dinamis (isu global, nasional dan regional) yang relevan dengan Dinas Kesehatan, maka dirumuskanlah Isu Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara, yaitu:

1. Status Kesehatan dan Gizi berbasis siklus hidup (Ibu, Bayi, Anak Balita, Remaja, Lansia) belum optimal;
2. Masih rendahnya kualitas dan akses layanan kesehatan di Kalimantan Utara;
3. Peningkatan Pencegahan dan penanggulangan penyakit baik Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular maupun penyakit berpotensi wabah dan kejadian luar biasa (KLB) yang belum optimal.

Adapun isu strategis Dinas kesehatan Kota Tarakan dianalisis berdasarkan gambaran kondisi pelayanan dan permasalahan perangkat daerah serta lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional). dapat diuraikan pada Tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7
Isu Strategis Dinas Kesehatan Kota Tarakan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD		PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD						ISU STRATEGIS PD
				GLOBAL		NASIONAL		REGIONAL		
1	Dukungan lintas sektor, tokoh masyarakat dalam mendukung pelayanan kesehatan	Belum tingginya derajat kesehatan Masyarakat	Perlunya peningkatan akses informasi dan layanan kesehatan masyarakat;	1	Perubahan iklim sebagai ancaman terbesar bagi kesehatan global	1	Masih tingginya masalah Kesehatan dasar, seperti malnutrisi, Kesehatan ibu, PM, PTM, dan NTD	1.	Status Kesehatan dan Gizi berbasis siklus hidup (Ibu, Bayi, Anak Balita, Remaja, Lansia) belum optimal	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
2	Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan swasta			2	Penyakit tidak menular (PTM), yang terus menjadi penyebab utama kematian secara global.	2	Timbulnya masalah Kesehatan baru seperti masalah kejiwaan pada remaja (mental health)	2.	Masih rendahnya kualitas dan akses layanan kesehatan di Kalimantan Utara	
3	Dukungan kebijakan pusat			3	Kesiapsiagaan Keamanan Kesehatan (Health Security Preparedness): Mencegah, memitigasi, dan mempertahankan respons efektif terhadap semua keadaan darurat kesehatan secara cepat, termasuk ancaman pandemi global, resistensi antimikroba, dan penyakit berisiko tinggi lainnya.	3	Transisi epidemiologi sejalan dengan menuanya populasi Indonesia di masa yang akan datang	3	Peningkatan Pencegahan dan penanggulangan penyakit baik Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular maupun penyakit berpotensi wabah dan kejadian luar biasa (KLB) yang belum optimal.	
4	Dukungan Dana di luar APBD (DAK, CSR)			4	Transformasi Digital Kesehatan; Tren global digitalisasi layanan Kesehatan (telemedicine, Health Information System)	4	Minimnya cara berpikir dan tingkat literasi kesehatan Masyarakat			
				5	Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage - UHC)	5	Harga, akses, dan kualitas layanan di Indonesia yang masih kurang optimal dan timpang di berbagai daerah			

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD		PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD						ISU STRATEGIS PD
				GLOBAL		NASIONAL		REGIONAL		
				6	Kebijakan Ekonomi Global yang dapat berdampak pada bidang kesehatan (Gangguan rantai pasok, Kenaikan iaya Alkes dan Perbekalan Kesehatan, perlambatan pembangunan kesehatan)	6	Risiko adanya ancaman Kesehatan di masa mendatang, melihat tren lingkungan (perubahan iklim) dan juga potensi adanya pandemi berikutnya setelah COVID-19			
				7.	Masalah kesehatan mental yang signifikan pada kelompok usia tertentu, seperti remaja.	7.	Pembiayaan dan belanja Kesehatan yang masih belum optimal bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor kesehatan			
						8.	Minimnya inovasi dan teknologi untuk dapat memberikan layanan Kesehatan yang lebih optimal dan efisien			
						9.	Beberapa tantangan Kesehatan masa depan seperti aging population yang perlu dipersiapkan penanganannya			
						10.	Tantangan yang signifikan dalam meningkatkan infrastruktur kesehatan dan tenaga kesehatan.			

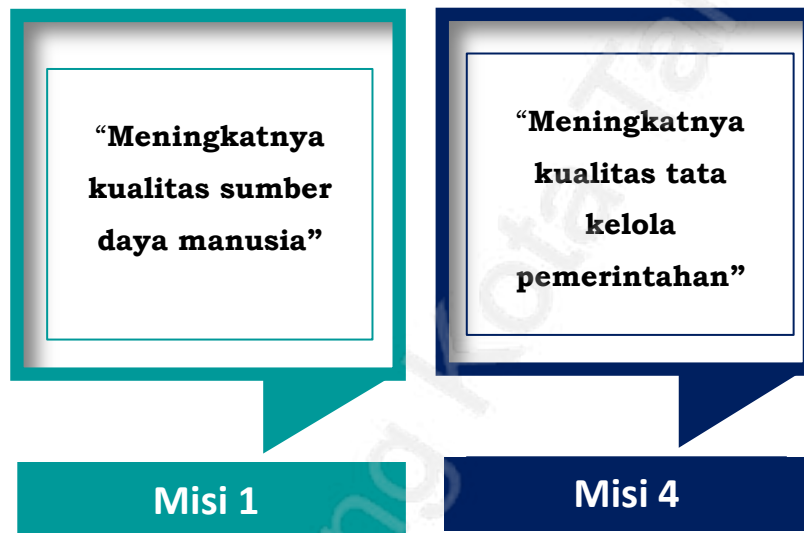
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Rencana Strategis Dinas Kesehatan 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah Kota Tarakan yaitu : “Terwujudnya Tarakan sebagai kota cerdas yang bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, perikanan kelautan dan ekonomi kreatif yang berdaya saingdan maju menuju Masyarakat Sejahtera”.

Dan Misi 1 yang tercantum pada RPJMD 2025-2029 yaitu “Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing”. Serta Misi ke empat: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif serta menjaga stabilitas ketertiban dan ketentraman kota.

Tujuan Pembangunan kota tarakan bidang kesehatan terkait pada :



3.2. Sasaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan 2025-2029

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan di capai secara nyata, spesifik dan terukur dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan, selama kurun waktu 5 tahun secara berkesinambungan dari satu program atau keluaran yang di harapkan dari suatu kegiatan.

Adapun sararan pembangunan bidang kesehatan untuk kota Tarakan yang merupakan tujuan Dinas Kesehatan Kota Tarakan berada pada:

Misi 1 :

“ Meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat”

Misi 4 :

“ Meningkatkan akuntabilitas kinerja “

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Kesehatan menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat yang bermutu, adil dan terjangkau, dengan indikator sasaran adalah
 - Angka Kematian Ibu,(AKI) per 100.000 KH (kelahiran hidup)
 - Angka Kematian Balita (AKB) per 1.000 KH (kelahiran hidup)
 - Prevalensi stunting,
 - Persentase cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis
 - Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna
 - Rasio Tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi.

2. Meningkatnya tatakelola Dinas Kesehatan dengan indikator sasaran Adalah
 - Nilai SAKIP
 - Indeks Kepuasan Masyarakat

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kesehatan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Tarakan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat yang bermutu, adil dan terjangkau	Usia Harapan Hidup	74,30	74,66	75,01	75,37	75,72	76,08	
			1. Angka Kematian Ibu	89,4	89	86	84	77	75	
			2. Angka Kematian Balita	6,7	6,5	6,4	6,3	6,3	6,2	
			3. Prevalensi Stunting	12	11,8	11,5	11,2	10,9	10,6	
			4. Persentase Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	35	46	55	61	70	80	
			5. Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	80,75	81,00	81,50	82,50	83,50	84,00	
			6. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	75	75	75	91	91	91	
			7. Rasio Tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	4,3 : 1.000	4,3 : 1.000	4,3 : 1.000	4,3 : 1.000	4,3 : 1.000	4,3 : 1.000	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Meningkatnya tatakelola Dinas Kesehatan	1. Nilai SAKIP	86,3	86,5	86,7	86,9	87,1	87,3	
			2. Indeks Kepuasan Masyarakat	86,9	87,10	87,30	87,50	87,70	87,90	

3.3. Startegis Dinas Kesehatan dalam mencapai tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2025 –2029.

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2025 - 2029 yang telah ditetapkan.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan 2025-2029 diperlukan rencana tindakan yang komperhensif berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Adapun strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas kesehatan adala sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
- b. Peningkatan pemenuhan standar pelayanan minimal kesehatan
- c. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan
- d. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, tenaga medis dan tenaga penunjang lainnya melalui BLUD
- e. Pemenuhan Sarana prasarana dan perbekalan kesehatan
- f. Dukungan kebijakan terkait kesehatan
- g. Pengintegrasian sistem informasi kesehatan berbasis digital

Adapun penahapan strategi untuk memenuhi pencapaian target tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Dinas Kesehatan 2025-2029

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Peningkatan Kualitas layanan kesehatan melalui tata kelola, pemenuhan dan penguatan Sumber daya Manusia	Peguatan sistem kesehatan melalui pemerataan tenaga kesehatan dan kemandirian perbekalan kesehatan	Peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan melalui promotif, preventif dan transformasi layanan kesehatan	Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan	Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat

Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Gambaran pertahapan npembangunan selama lima tahun kedepan di sajikan untjtk menunjukkan arah pencapaian tujuan dan pembangunan secara bertahap, sejalan dengan porioritas pembangunan daerah dan kapasitas pelaksanan program, kegiatanb dan sub kegiatanb Perangkat Daerah.

3.4. Arah kebijakan Dinas Kesehatan dalam mencapai tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2025 –2029.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada perangkat daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan urusan kesehatan yang tertuang dalam RPJMD Kota Tarakan 2025-2029 menjadi dasar untuk penetapan pernyataan strategi dan arah kebijakan yang lebih khusus agar dapat menjawab permasalahan dan isu-isu strategis terkait urusan kesehatan di kota Tarakan.adapun arah kebijakan Dinas Kesehatan Kota Tarakan dalam perencanaan program dan kegiatan Tahun 2025-2029;

Tabel 3.3
Arah kebijakan Renstra Dinas Kesehatan 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Undang - Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan	Peningkatan Kulaitas kesehatan dan Gizi untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)	Peningkatan sarana, prasarana dan perbekalan kesehatan	
			Pemenuhan mutu dan standar pelayanan FKTP, FKTL	
			peningkatan standar pelayanan Siklus Hidup (ibu hamil, ibu bersalin, Bayi, Balita, anak sekolah, usia produktif, lansia)	
			Penurunan kasus penyakit menular dan tidak menular	
			Penurunan masalah Gizi di masyarakat	
			Peningkatan Keaktifan jaminan Kesehatan	
			Terintegrasinya penggunaan sistem informasi pelayanan kesehatan	
			Peningkatan status akreditasi layanan kesehatan	
			Pemenuhan kebijakan kesehatan yang mendukung pelayanan kesehatan	
			Tersedianya regulasi pelaporan pelayanan kesehatan	
			Peningkatan Kompetensi teknis Sumber daya manusia kesehatan (Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis)	
			Peningkatan Jumlah tenaga kesehatan, tenaga medis dan tenaga penunjang lainnya	
			Terlaksananya penilaian kinerja BLUD	

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program

Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi dinas Kesehatan.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan tahun 2025-2029, maka program yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan 2025-2029 dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah Wajib dibidang kesehatan sesuai dengan tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

4.2. Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Berdasarkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang telah dirumuskan maka program yang dipilih dan kegiatan yang disusun merujuk pada Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Adapun uraian program dan kegiatan yang dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun 2025-2029.

Tabel 4.1
Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra dinas Kesehatan 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR (Sasaran Perangkat Daerah)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
DINAS KESEHATAN							
Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat				Usia Harapan Hidup (UHH)		
		Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat yang bermutu, adil dan terjangkau			1. Angka Kematian Ibu, 2. Angka Kematian Balita, 3. Prevalensi Stunting, 4. Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis, 5. Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Aktif, 6. Persentase fasyankes terakreditasi paripurna, 7. Rasio Tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi,		
			Meningkatnya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau		1. Indeks Pencapaian SPM 2. Persentase Kelurahan Mencapai target STBM 3. Cakupan imunisasi bayi lengkap 4. Angka keberhasilan Pengobatan TB (Success Rate) 5. Persentase cakupan JKN	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersedianya sarana, prasarana dan perbekalan kesehatan	1. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar 3. Persentase ASPAK	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang dibangun	1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas	
					Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR (Sasaran Perangkat Daerah)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
						Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
					Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	
					Jumlah Distribusi alat kesehatan, obat, bahan habis pakai, bahan medis hbis pakai, vaksin, makanan dan minuman ke fasilitas kesehatan lainnya	1.02.02.2.02.0026 Distribusi alat kesehatan, obat, bahan habis pakai, bahan medis hbis pakai, vaksin, makanan dan minuman ke fasilitas kesehatan lainnya	
				1. Terlaksananya Pelayanan Siklus Hidup (ibu hamil, ibu bersalin, Bayi, Balita, anak sekolah, usia produktif, lansia) sesuai standar 2.Terlaksananya Survey Akreditasi	1. Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2. Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin 3. Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 4. Persentase Pelayanan Kesehatan Balita 5. Persentasa Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar 6. Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 7. Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut 8. Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 9. Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 10. Persentase Pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat 11. Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis 12. Persentase Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia atau human immunodeficiency virus	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR (Sasaran Perangkat Daerah)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
					Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
					Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
					Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
					Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
					Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
					Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
					Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR (Sasaran Perangkat Daerah)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
					Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.02.02.2.02.0025 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular dan Tidak menular	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
					Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	1.02.02.2.02.0027 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	
					Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan / Kota sehat	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR (Sasaran Perangkat Daerah)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	
					Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	
					Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1.02.02.2.02.0050 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	
				Terlaksananya penggunaan sistem informasi pelayanan kesehatan bagi semua fasyankes	Persentase Fasyankes yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
				Terpenuhinya target Indikator Nasional Mutu pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Fasilitas kesehatan yang mencapai target INM	1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
			Meningkatnya Mutu dan distribusi tenaga Kesehatan		Persentase Fasyankes yang terpenuhi SDM kesehatan sesuai standar	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR (Sasaran Perangkat Daerah)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Praktek tenaga kesehatan	Persentase Praktek tenaga kesehatan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
				Tersedianya dokumen perencanaan tenaga kesehatan, tenaga medis dan tenaga penunjang lainnya	Persentase perencanaan kebutuhan named nakes di kota tarakan	1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
					Jumlah dokumen hasil Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	
					Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
				Terlaksananya peningkatan Kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan (Pelatihan)	Persentase tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (pelatihan)	1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan,dan makanan minuman		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Pelayanan kefarmasian sesuai standar	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR (Sasaran Perangkat Daerah)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksana pengendalian dan pengawasan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1.Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
				Terlaksana pengendalian dan pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT	1.Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP IRT sesuai standar 2. Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu 2. Persentase sarana IRT yang memenuhi ketentuan	1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
				Terlaksana pengendalian dan pengawasan Industri Rumah Tangga dan Produk makanan minuman Industri Rumah Tangga	1.Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	
					Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR (Sasaran Perangkat Daerah)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		1. Persentase Puskesmas dan Pustu yang menyelenggarakan program aktifitas fisik 2. Persentase Kader Kesehatan yang diberdayakan	1.02. 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
				Terpenuhinya 75% posyandu siklus hidup aktif dan starata madya	1. Persentase Kab/Kota dengan minimal 75% Posyandu Siklus Hidup yang Aktif 2. Persentase kader posyandu strata madya	1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraandan Pemberdayaan Masyarakat	1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
				Terlaksananya kampanye kesehatan (pembudayaan Germas)	Persentase kota yang melakukan kampanye kesehatan (pembudayaan Germas)	1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka promotiv Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Promosi Hasil penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan hidup Bersih dan Sehat	1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan promosi Kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat	
					Persentase UKBM yang dilakukan Bimbingan teknis dan supervisi	1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan			Nilai SAKIP		
			Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja		1. Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti	1.02.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR (Sasaran Perangkat Daerah)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.02..01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	1.02.01.2.01.0008 Penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	
				Tersedianya Dokumen administrasi keuangan sesuai SAP	Jumlah dokumen administrasi keuangan sesuai SAP	1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan perangkat daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Meningkatnya layanan kesekretariatan		1. Indeks Layanan Kesekretariatan		
				Tersedianya layanan Administrasi Kepegawaian	Persentase layanan administrasi kepegawaian yang tersedia	1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1.02.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Tersedianya layanan administrasi umum	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR (Sasaran Perangkat Daerah)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1.02.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terkelolannya data Barang Milik Daerah dalam Aplikasi	Persentase BMD yang terinput dalam e-BMD	1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Layanan Jasa Penunjang	Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia	1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang mendapat Pemeliharaan	1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR (Sasaran Perangkat Daerah)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	1.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan			Indeks Kepuasan Masyarakat		
RUMAH SAKIT UMUM KOTA TARAKAN							
			Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja		Tingkat Kepuasan Pasien terhadap layanan kesehatan (RIBK OPD)	1.02.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.02..01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR (Sasaran Perangkat Daerah)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya Dokumen administrasi keuangan sesuai SAP	Jumlah dokumen administrasi keuangan sesuai SAP	1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan perangkat daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Tersedianya Nilai Survei IKM	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan RSUD	1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan RSUD	
					Jumlah RSUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10. 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan RSUD Rumah Sakit Umum Kota Tarakan	
			Meningkatnya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau			1.02.02(RS) PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Tersedianya sarana, prasarana dan perbekalan kesehatan	1. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar 3. Persentase ASPAK	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	
					Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
					Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio	1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit	
PUSKESMAS KARANG REJO							
			Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja			1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR (Sasaran Perangkat Daerah)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya Nilai Survey IKM	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan Puskesmas Karang Rejo	1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10. 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karang Rejo	
			Meningkatnya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Terlaksananya Pelayanan Siklus Hidup	1. Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2. Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar 3. Persentase Pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat 4..Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR (Sasaran Perangkat Daerah)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.02.02.2.02.0025 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular dan Tidak menular	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan			1.02. 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
					Persentase UKBM yang dilakukan Bimbingan teknis dan supervisi	1.02. 05.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.02. 05.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR (Sasaran Perangkat Daerah)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
PUSKESMAS JUATA							
			Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja			1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya Nilai Survei IKM	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan Puskesmas Juata	1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10. 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Juata	
			Meningkatnya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Terlaksananya Pelayanan Siklus Hidup	1. Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2. Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar 3. Persentase Pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat 4..Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR (Sasaran Perangkat Daerah)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.02.02.2.02.0025 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular dan Tidak menular	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan usia	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan usia	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan			1.02. 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR (Sasaran Perangkat Daerah)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
					Persentase UKBM yang dilakukan Bimbingan teknis dan supervisi	1.02. 05.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.02. 05.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
PUSKESMAS SEBENGKOK							
			Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja			1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya Nilai Survei IKM	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan Puskesmas Sebangkok	1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10. 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sebangkok	
			Meningkatnya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Terlaksananya Pelayanan Siklus Hidup	1. Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2. Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar 3. Persentase Pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat 4. Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR (Sasaran Perangkat Daerah)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.02.02.2.02.0025 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular dan Tidak menular	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan			1.02. 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR (Sasaran Perangkat Daerah)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
					Persentase UKBM yang dilakukan Bimbingan teknis dan supervisi	1.02. 05.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.02. 05.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
PUSKESMAS PANTAI AMAL							
			Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja			1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya Nilai Survei IKM	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan Puskesmas Pantai Amal	1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10. 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Pantai Amal	
			Meningkatnya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Terlaksananya Pelayanan Siklus Hidup	1. Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2. Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar 3. Persentase Pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat 4. Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR (Sasaran Perangkat Daerah)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.02.02.2.02.0025 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular dan Tidak menular	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR (Sasaran Perangkat Daerah)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan			1.02. 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
					Persentase UKBM yang dilakukan Bimbingan teknis dan supervisi	1.02. 05.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.02. 05.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
PUSKESMAS GUNUNG LINGKAS							
			Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja			1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya Nilai Survei IKM	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan Puskesmas Gunung Lingkas	1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10. 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Gunung Lingkas	
			Meningkatnya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Terlaksananya Pelayanan Siklus Hidup	1. Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2. Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar 3. Persentase Pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat 4. Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR (Sasaran Perangkat Daerah)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.02.02.2.02.0025 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular dan Tidak menular	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR (Sasaran Perangkat Daerah)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan			1.02. 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
					Persentase UKBM yang dilakukan Bimbingan teknis dan supervisi	1.02. 05.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.02. 05.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
PUSKESMAS MAMBURUNGAN							
			Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja			1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya Nilai Survy IKM	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan Puskesmas Mamburungan	1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10. 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Mamburungan	
			Meningkatnya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR (Sasaran Perangkat Daerah)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Pelayanan Siklus Hidup	1. Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2. Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar 3. Persentase Pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat 4..Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
					Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.02.02.2.02.0025 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular dan Tidak menular	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas	
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR (Sasaran Perangkat Daerah)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan			1.02. 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
					Persentase UKBM yang dilakukan Bimbingan teknis dan supervisi	1.02. 05.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1.02. 05.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH							
			Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja			1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya Nilai Survey IKM	Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Layanan Kesehatan Laboratorium kesehatan daerah	1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1.02.01.2.10. 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUDLaboratorium Kesehatan Daerah	

4.3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

Dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kota Tarakan, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif menjembatani dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Tarakan.

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				168.360.638.149,00		168.360.638.149,00		168.360.638.149,00		168.360.638.149,00		168.360.638.149,00		
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				132.650.568.932,00		132.369.032.714,00		133.169.032.714,00		132.369.032.714,00		132.519.032.714,00		
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	0	71	3.274.500.000,00	72	3.128.500.000,00	73	3.928.500.000,00	73	3.128.500.000,00	74	3.278.500.000,00	1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kesehatan	
1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0,00		234.000.000,00		234.000.000,00		234.000.000,00		234.000.000,00		
Tersedianya dokumen layanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	66	0	0,00	600	234.000.000,00	600	234.000.000,00	600	234.000.000,00	600	234.000.000,00		
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1	0		4		4		4		4			
1.02.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0,00		24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1	0	0,00	4	24.000.000,00	4	24.000.000,00	4	24.000.000,00	4	24.000.000,00		
1.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	66	0	0,00	600	210.000.000,00	600	210.000.000,00	600	210.000.000,00	600	210.000.000,00		
1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				410.000.000,00		390.000.000,00		390.000.000,00		390.000.000,00		390.000.000,00		
Tersedianya dokumen layanan administrasi umum	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	1	410.000.000,00	1	390.000.000,00	1	390.000.000,00	1	390.000.000,00	1	390.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3	20		20		20		20		20			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	2		2		2		2		2			
1.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
1.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				153.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	4	153.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00		
1.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				32.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	2	32.000.000,00	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00	2	60.000.000,00		
1.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				5.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3	20	200.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00		
1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				867.000.000,00		517.000.000,00		1.117.000.000,00		517.000.000,00		667.000.000,00		
Terlaksananya Pengadaan aset/BMD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	0	867.000.000,00	0	517.000.000,00	1	1.117.000.000,00	0	517.000.000,00	0	667.000.000,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	21	100		100		100		100		100			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
1.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		500.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	0	0,00	0	0,00	1	500.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				500.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		300.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	21	100	500.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	300.000.000,00		
1.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				267.000.000,00		267.000.000,00		267.000.000,00		267.000.000,00		267.000.000,00		
1.02.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.297.500.000,00		1.307.500.000,00		1.307.500.000,00		1.307.500.000,00		1.307.500.000,00		
Terlaksanya Layanan Jasa Penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	1.297.500.000,00	1	1.307.500.000,00	1	1.307.500.000,00	1	1.307.500.000,00	1	1.307.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	37		37		37		37		37			
1.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	10.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				610.000.000,00		610.000.000,00		610.000.000,00		610.000.000,00		610.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	610.000.000,00	1	610.000.000,00	1	610.000.000,00	1	610.000.000,00	1	610.000.000,00		
1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				677.500.000,00		677.500.000,00		677.500.000,00		677.500.000,00		677.500.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	37	677.500.000,00	37	677.500.000,00	37	677.500.000,00	37	677.500.000,00	37	677.500.000,00		
1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				700.000.000,00		680.000.000,00		880.000.000,00		680.000.000,00		680.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	2	700.000.000,00	2	680.000.000,00	2	880.000.000,00	2	680.000.000,00	2	680.000.000,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	13		13		13		13		13			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	16	24		24		24		24		24			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	2		0		0		0		0			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	181	58		58		58		58		58			
1.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	16	24	20.000.000,00	24	20.000.000,00	24	20.000.000,00	24	20.000.000,00	24	20.000.000,00		
1.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	5	13	300.000.000,00	13	300.000.000,00	13	300.000.000,00	13	300.000.000,00	13	300.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)													
1.02.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				20.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	2	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	181	58	60.000.000,00	58	60.000.000,00	58	60.000.000,00	58	60.000.000,00	58	60.000.000,00		
1.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00		
1.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000,00		100.000.000,00		300.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	300.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	129.376.068.932,00	100	129.240.532.714,00	100	129.240.532.714,00	100	129.240.532.714,00	100	129.240.532.714,00		
1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		
Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
1.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
1.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
1.02.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				38.637.500.838,00		38.637.500.838,00		38.637.500.838,00		38.637.500.838,00		38.637.500.838,00		
Tersedianya dokumen layanan administrasi keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	72	12	38.637.500.838,00	12	38.637.500.838,00	12	38.637.500.838,00	12	38.637.500.838,00	12	38.637.500.838,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	4.458	374		408		408		408		408			
1.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				35.489.704.701,00		35.489.704.701,00		35.489.704.701,00		35.489.704.701,00		35.489.704.701,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	4.458	374	35.489.704.701,00	408	35.489.704.701,00	408	35.489.704.701,00	408	35.489.704.701,00	408	35.489.704.701,00		
1.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3.147.796.137,00		3.147.796.137,00		3.147.796.137,00		3.147.796.137,00		3.147.796.137,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	72	12	3.147.796.137,00	12	3.147.796.137,00	12	3.147.796.137,00	12	3.147.796.137,00	12	3.147.796.137,00		
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja				129.376.068.932,00		129.240.532.714,00		129.240.532.714,00		129.240.532.714,00		129.240.532.714,00	1.02.0.00.0.00.0 1.0002 - Puskesmas Karang Rejo	
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				7.400.136.218,00		7.264.600.000,00		7.264.600.000,00		7.264.600.000,00		7.264.600.000,00		
Tersedianya Nilai Survey IKM	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	7.400.136.218,00	1	7.264.600.000,00	1	7.264.600.000,00	1	7.264.600.000,00	1	7.264.600.000,00		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				7.400.136.218,00		7.264.600.000,00		7.264.600.000,00		7.264.600.000,00		7.264.600.000,00		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	7.400.136.218,00	1	7.264.600.000,00	1	7.264.600.000,00	1	7.264.600.000,00	1	7.264.600.000,00		
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja				129.376.068.932,00		129.240.532.714,00		129.240.532.714,00		129.240.532.714,00		129.240.532.714,00	1.02.0.00.0.00.0 1.0003 - Puskesmas Juata	
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				2.747.108.792,00		2.747.108.792,00		2.747.108.792,00		2.747.108.792,00		2.747.108.792,00		
Tersedianya Nilai Survey IKM	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	2.747.108.792,00	1	2.747.108.792,00	1	2.747.108.792,00	1	2.747.108.792,00	1	2.747.108.792,00		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				2.747.108.792,00		2.747.108.792,00		2.747.108.792,00		2.747.108.792,00		2.747.108.792,00		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	2.747.108.792,00	1	2.747.108.792,00	1	2.747.108.792,00	1	2.747.108.792,00	1	2.747.108.792,00		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				2.277.389.088,00		2.277.389.088,00		2.277.389.088,00		2.277.389.088,00		2.277.389.088,00		
Tersedianya Nilai Survey IKM	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	2.277.389.088,00	1	2.277.389.088,00	1	2.277.389.088,00	1	2.277.389.088,00	1	2.277.389.088,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				2.277.389.088,00		2.277.389.088,00		2.277.389.088,00		2.277.389.088,00		2.277.389.088,00		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	2.277.389.088,00	1	2.277.389.088,00	1	2.277.389.088,00	1	2.277.389.088,00	1	2.277.389.088,00		
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja				129.376.068.932,00		129.240.532.714,00		129.240.532.714,00		129.240.532.714,00		129.240.532.714,00	1.02.0.00.0.00.0 1.0005 - Puskesmas Pantai Amal	
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				915.783.620,00		915.783.620,00		915.783.620,00		915.783.620,00		915.783.620,00		
Tersedianya Nilai Survey IKM	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	915.783.620,00	1	915.783.620,00	1	915.783.620,00	1	915.783.620,00	1	915.783.620,00		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				915.783.620,00		915.783.620,00		915.783.620,00		915.783.620,00		915.783.620,00		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	915.783.620,00	1	915.783.620,00	1	915.783.620,00	1	915.783.620,00	1	915.783.620,00		
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja				129.376.068.932,00		129.240.532.714,00		129.240.532.714,00		129.240.532.714,00		129.240.532.714,00	1.02.0.00.0.00.0 1.0006 - Puskesmas Gunung Lingkas	
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				2.986.321.842,00		2.986.321.842,00		2.986.321.842,00		2.986.321.842,00		2.986.321.842,00		
Tersedianya Nilai Survey IKM	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	2.986.321.842,00	1	2.986.321.842,00	1	2.986.321.842,00	1	2.986.321.842,00	1	2.986.321.842,00		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				2.986.321.842,00		2.986.321.842,00		2.986.321.842,00		2.986.321.842,00		2.986.321.842,00		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	2.986.321.842,00	1	2.986.321.842,00	1	2.986.321.842,00	1	2.986.321.842,00	1	2.986.321.842,00		
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja				129.376.068.932,00		129.240.532.714,00		129.240.532.714,00		129.240.532.714,00		129.240.532.714,00	1.02.0.00.0.00.0 1.0007 - Puskesmas Mamburungan	
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				2.091.637.573,00		2.091.637.573,00		2.091.637.573,00		2.091.637.573,00		2.091.637.573,00		
Tersedianya Nilai Survey IKM	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	2.091.637.573,00	1	2.091.637.573,00	1	2.091.637.573,00	1	2.091.637.573,00	1	2.091.637.573,00		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				2.091.637.573,00		2.091.637.573,00		2.091.637.573,00		2.091.637.573,00		2.091.637.573,00		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	2.091.637.573,00	1	2.091.637.573,00	1	2.091.637.573,00	1	2.091.637.573,00	1	2.091.637.573,00		
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja				129.376.068.932,00		129.240.532.714,00		129.240.532.714,00		129.240.532.714,00		129.240.532.714,00	1.02.0.00.0.00.0 1.0008 - Laboratorium Kesehatan Daerah	
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				1.723.966.504,00		1.723.966.504,00		1.723.966.504,00		1.723.966.504,00		1.723.966.504,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1.723.966.504,00		1.723.966.504,00		1.723.966.504,00		1.723.966.504,00		1.723.966.504,00		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	1.723.966.504,00	1	1.723.966.504,00	1	1.723.966.504,00	1	1.723.966.504,00	1	1.723.966.504,00		
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja				129.376.068.932,00		129.240.532.714,00		129.240.532.714,00		129.240.532.714,00		129.240.532.714,00	1.02.0.00.0.00.0 1.0009 - Rumah Sakit Umum Kota Tarakan	
1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai standar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00		
1.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00		
1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				19.082.224.457,00		19.082.224.457,00		19.082.224.457,00		19.082.224.457,00		19.082.224.457,00		
Tersedianya Dokumen layanan administrasi keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	19.082.224.457,00	12	19.082.224.457,00	12	19.082.224.457,00	12	19.082.224.457,00	12	19.082.224.457,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	98	99		99		99		99		99			
1.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				13.092.846.457,00		13.092.846.457,00		13.092.846.457,00		13.092.846.457,00		13.092.846.457,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	98	99	13.092.846.457,00	99	13.092.846.457,00	99	13.092.846.457,00	99	13.092.846.457,00	99	13.092.846.457,00		
1.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5.989.378.000,00		5.989.378.000,00		5.989.378.000,00		5.989.378.000,00		5.989.378.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	5.989.378.000,00	12	5.989.378.000,00	12	5.989.378.000,00	12	5.989.378.000,00	12	5.989.378.000,00		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				51.500.000.000,00		51.500.000.000,00		51.500.000.000,00		51.500.000.000,00		51.500.000.000,00		
Tersedianya Nilai Survey IKM	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	51.500.000.000,00	1	51.500.000.000,00	1	51.500.000.000,00	1	51.500.000.000,00	1	51.500.000.000,00		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				51.500.000.000,00		51.500.000.000,00		51.500.000.000,00		51.500.000.000,00		51.500.000.000,00		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	51.500.000.000,00	1	51.500.000.000,00	1	51.500.000.000,00	1	51.500.000.000,00	1	51.500.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya Masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau	Indeks Pencapaian SPM (%)	92,56	100	31.833.976.834,00	100	32.151.224.461,00	100	31.111.798.461,00	100	32.108.838.175,00	100	31.892.277.175,00	1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kesehatan	
	Persentase Kelurahan Mencapai target STBM (%)	5	30		35		40		45		50			
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	52,80	85		90		93		95		95			
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	71,22	90		90		90		90		90			
	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ((%))	100	100		100		100		100		100			
1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				5.955.000.000,00		5.019.972.534,00		4.543.519.541,00		5.004.308.256,00		5.284.342.756,00		
Tersedianya sarana, prasarana dan perbekalan kesehatan	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	508	500	5.955.000.000,00	500	5.019.972.534,00	500	4.543.519.541,00	500	5.004.308.256,00	500	5.284.342.756,00		
	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1	85		88		90		93		95			
	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	0	1		1		0		1		0			
	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	5	6		6		6		6		6			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	1	1		0		0		0		0			
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	7	7		7		7		7		7			
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	7	7		7		7		7		7			
	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	6	6		6		6		6		6			
1.02.02.2.01.0002 - Pembangunan Puskesmas				200.000.000,00		500.000.000,00		0,00		150.000.000,00		0,00		
1.02.02.2.01.0006 - Pengembangan Puskesmas				50.000.000,00		300.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		300.000.000,00		
Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	5	6	50.000.000,00	6	300.000.000,00	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00	6	300.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.02.02.2.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas				1.500.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	1	1	1.500.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				1.200.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	7	7	1.200.000.000,00	7	1.000.000.000,00	7	1.000.000.000,00	7	1.000.000.000,00	7	1.000.000.000,00		
1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				300.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	7	7	300.000.000,00	7	500.000.000,00	7	500.000.000,00	7	500.000.000,00	7	500.000.000,00		
1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				2.650.000.000,00		2.650.000.000,00		2.843.519.541,00		3.154.308.256,00		3.384.342.756,00		
Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1	85	2.650.000.000,00	88	2.650.000.000,00	90	2.843.519.541,00	93	3.154.308.256,00	95	3.384.342.756,00		
1.02.02.2.01.0024 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga				5.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	508	500	5.000.000,00	500	18.000.000,00	500	20.000.000,00	500	20.000.000,00	500	20.000.000,00		
1.02.02.2.01.0026 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan				50.000.000,00		51.972.534,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	6	6	50.000.000,00	6	51.972.534,00	6	80.000.000,00	6	80.000.000,00	6	80.000.000,00		
Terlaksananya Pelayanan Siklus Hidup (ibu hamil, ibu bersalin, Bayi, Balita, anak sekolah, usia produktif, lansia) sesuai standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	37.527	39.730	23.627.359.034,00	40.127	25.051.938.127,00	40.528	24.168.661.920,00	40.934	25.025.216.119,00	41.343	24.412.642.619,00		
	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	10.867	25.621		25.621		25.621		25.621		25.621			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4.470	4.800		5.000		5.100		5.200		5.300			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	10	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	2	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	22	6		6		7		8		9			
	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	150	150		150		150		150		150			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	37	33		36		40		45		45			
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	15	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	30	12		12		12		12		12			
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	2	2		2		2		2		3			
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4.372	4.700		4.900		5.000		5.100		5.200			
	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	118	118		116		114		114		114			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	26.747	33.742		56.237		67.485		67.485		67.485			
	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	775	817		654		599		558		558			
	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	7.468	7.118		7.167		7.192		7.216		8.621			
	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	8.092	5.780		6.372		6.690		7.024		7.024			
	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	1.858	2.103		2.103		2.103		2.103		2.103			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	406	462		462		462		462		462			
	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Orang)	295	500		500		500		500		500			
	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	5.513	5.195		5.195		5.195		5.195		5.498			
	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	17.813	16.541		16.541		16.541		16.541		18.397			
	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	9.159	17.573		18.000		18.100		18.200		18.300			
	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	45.304	167.964		167.964		167.964		167.964		170.964			
	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	184	18		18		18		18		18			
1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				130.000.000,00		234.225.000,00		243.225.000,00		252.225.000,00		261.225.000,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4.372	4.700	130.000.000,00	4.900	234.225.000,00	5.000	243.225.000,00	5.100	252.225.000,00	5.200	261.225.000,00		
1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				126.960.000,00		128.160.000,00		129.360.000,00		130.800.000,00		132.600.000,00		
1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				200.000.000,00		200.503.500,00		214.070.000,00		227.636.500,00		247.388.000,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4.470	4.800	200.000.000,00	5.000	200.503.500,00	5.100	214.070.000,00	5.200	227.636.500,00	5.300	247.388.000,00		
1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				150.000.000,00		374.200.000,00		380.700.000,00		387.200.000,00		393.700.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	10.867	25.621	150.000.000,00	25.621	374.200.000,00	25.621	380.700.000,00	25.621	387.200.000,00	25.621	393.700.000,00		
1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				150.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	37.527	39.730	150.000.000,00	40.127	200.000.000,00	40.528	200.000.000,00	40.934	200.000.000,00	41.343	200.000.000,00		
1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				160.755.450,00		185.250.755,00		190.255.750,00		190.255.750,00		190.255.750,00		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	45.304	167.964	160.755.450,00	167.964	185.250.755,00	167.964	190.255.750,00	167.964	190.255.750,00	170.964	190.255.750,00		
1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				100.164.468,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	9.159	17.573	100.164.468,00	18.000	100.000.000,00	18.100	100.000.000,00	18.200	100.000.000,00	18.300	100.000.000,00		
1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				305.700.000,00		305.700.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	17.813	16.541	305.700.000,00	16.541	305.700.000,00	16.541	350.000.000,00	16.541	400.000.000,00	18.397	400.000.000,00		
1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				160.000.000,00		300.000.000,00		200.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	5.513	5.195	160.000.000,00	5.195	300.000.000,00	5.195	200.000.000,00	5.195	400.000.000,00	5.498	400.000.000,00		
1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				40.445.000,00		40.445.000,00		40.445.000,00		50.345.000,00		80.345.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	406	462	40.445.000,00	462	40.445.000,00	462	40.445.000,00	462	50.345.000,00	462	80.345.000,00		
1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				2.772.133.305,00		3.233.000.000,00		2.765.568.346,00		3.233.000.000,00		1.334.000.000,00		
1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV				115.000.000,00		156.526.375,00		156.526.375,00		156.826.375,00		156.826.375,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	7.468	7.118	115.000.000,00	7.167	156.526.375,00	7.192	156.526.375,00	7.216	156.826.375,00	8.621	156.826.375,00		
1.02.02.2.02.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				144.000.000,00		332.520.000,00		348.120.000,00		369.120.000,00		378.120.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	22	6	144.000.000,00	6	332.520.000,00	7	348.120.000,00	8	369.120.000,00	9	378.120.000,00		
1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				47.350.000,00		69.750.000,00		82.250.000,00		93.625.000,00		105.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	1	4	47.350.000,00	4	69.750.000,00	4	82.250.000,00	4	93.625.000,00	4	105.000.000,00		
1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	37	33	150.000.000,00	36	150.000.000,00	40	150.000.000,00	45	150.000.000,00	45	150.000.000,00		
1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				69.344.000,00		69.344.000,00		69.344.000,00		69.344.000,00		80.344.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	15	3	69.344.000,00	3	69.344.000,00	3	69.344.000,00	3	69.344.000,00	3	80.344.000,00		
1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan				150.508.280,00		106.855.300,00		107.830.430,00		153.433.280,00		153.433.280,00		
Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	30	12	150.508.280,00	12	106.855.300,00	12	107.830.430,00	12	153.433.280,00	12	153.433.280,00		
1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				50.000.000,00		54.500.000,00		54.500.000,00		54.500.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	26.747	33.742	50.000.000,00	56.237	54.500.000,00	67.485	54.500.000,00	67.485	54.500.000,00	67.485	75.000.000,00		
1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1.412.418.932,00		1.323.941.332,00		912.418.932,00		912.418.932,00		1.044.395.872,00		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	10	5	1.412.418.932,00	5	1.323.941.332,00	5	912.418.932,00	5	912.418.932,00	5	1.044.395.872,00		
Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	2	12	15.727.606.799,00	12	15.727.606.799,00	12	15.727.606.799,00	12	15.727.606.799,00	12	16.727.606.799,00		
1.02.02.2.02.0027 - Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah				91.497.200,00		95.497.200,00		95.497.200,00		95.497.200,00		95.497.200,00		
Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Orang)	295	500	91.497.200,00	500	95.497.200,00	500	95.497.200,00	500	95.497.200,00	500	95.497.200,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.02.02.2.02.0028 - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional				116.900.800,00		127.422.226,00		156.379.448,00		167.897.393,00		167.897.393,00		
Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	184	18	116.900.800,00	18	127.422.226,00	18	156.379.448,00	18	167.897.393,00	18	167.897.393,00		
1.02.02.2.02.0029 - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				21.000.000,00		19.476.940,00		19.476.940,00		19.476.940,00		50.000.000,00		
Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	2	2	21.000.000,00	2	19.476.940,00	2	19.476.940,00	2	19.476.940,00	3	50.000.000,00		
1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				417.374.000,00		582.626.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	2	2	417.374.000,00	2	582.626.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00		
1.02.02.2.02.0036 - Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				38.282.800,00		38.282.800,00		38.282.800,00		38.282.800,00		38.282.800,00		
Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	1	1	38.282.800,00	1	38.282.800,00	1	38.282.800,00	1	38.282.800,00	1	38.282.800,00		
1.02.02.2.02.0037 - Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				75.000.000,00		78.000.000,00		81.000.000,00		81.000.000,00		81.000.000,00		
Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	0	2	75.000.000,00	2	78.000.000,00	2	81.000.000,00	2	81.000.000,00	2	81.000.000,00		
1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis				100.000.000,00		150.000.000,00		175.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	775	817	100.000.000,00	654	150.000.000,00	599	175.000.000,00	558	180.000.000,00	558	180.000.000,00		
1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)				69.025.000,00		71.952.500,00		71.952.500,00		75.172.750,00		75.172.750,00		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang)	118	118	69.025.000,00	116	71.952.500,00	114	71.952.500,00	114	75.172.750,00	114	75.172.750,00		
1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				50.000.000,00		105.259.400,00		112.959.400,00		108.659.400,00		108.659.400,00		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	1.858	2.103	50.000.000,00	2.103	105.259.400,00	2.103	112.959.400,00	2.103	108.659.400,00	2.103	108.659.400,00		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	6	6	31.495.000,00	6	31.495.000,00	6	31.495.000,00	6	31.495.000,00	6	31.495.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				387.880.000,00		392.880.000,00		397.880.000,00		402.880.000,00		407.880.000,00		
Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	4	4	387.880.000,00	4	392.880.000,00	4	397.880.000,00	4	402.880.000,00	4	407.880.000,00		
1.02.02.2.02.0050 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji				41.518.000,00		41.518.000,00		41.518.000,00		41.518.000,00		41.518.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji (Dokumen)	150	150	41.518.000,00	150	41.518.000,00	150	41.518.000,00	150	41.518.000,00	150	41.518.000,00		
Terlaksananya Survey Akreditasi	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	6	8	250.539.800,00	8	167.913.800,00	8	446.339.000,00	8	167.913.800,00	8	167.913.800,00		
1.02.02.2.02.0035 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				250.539.800,00		167.913.800,00		446.339.000,00		167.913.800,00		167.913.800,00		
Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	6	8	250.539.800,00	8	167.913.800,00	8	446.339.000,00	8	167.913.800,00	8	167.913.800,00		
1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi				90.678.000,00		100.000.000,00		90.878.000,00		100.000.000,00		90.678.000,00		
Terlaksananya penggunaan sistem informasi pelayanan kesehatan bagi semua fasyankes	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1	1	90.678.000,00	1	100.000.000,00	1	90.878.000,00	1	100.000.000,00	1	90.678.000,00		
1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				90.678.000,00		100.000.000,00		90.878.000,00		100.000.000,00		90.678.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	1	1	90.678.000,00	1	100.000.000,00	1	90.878.000,00	1	100.000.000,00	1	90.678.000,00		
1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terpenuhinya taget Indikator Nasional Mutu pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	25	27	200.000.000,00	29	200.000.000,00	31	200.000.000,00	33	200.000.000,00	35	200.000.000,00		
1.02.02.2.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Unit)	25	27	200.000.000,00	29	200.000.000,00	31	200.000.000,00	33	200.000.000,00	35	200.000.000,00		
Meningkatnya Masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau				31.833.976.834,00		32.151.224.461,00		31.111.798.461,00		32.108.838.175,00		31.892.277.175,00	1.02.0.00.0.00.0 1.0002 - Puskesmas Karang Rejo	
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				62.000.000,00		49.500.000,00		58.500.000,00		49.500.000,00		68.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0	27		27		27		27		27			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	0	6		6		6		6		6			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	0	3		3		3		3		3			
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	0	13		13		13		13		13			
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	0	6		6		6		6		6			
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0	1.357		1.357		1.357		1.357		1.357			
	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	0	1.622		1.622		1.622		1.622		1.622			
	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	0	114		114		114		114		114			
1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				2.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0	1.357	2.000.000,00	1.357	2.000.000,00	1.357	5.000.000,00	1.357	2.000.000,00	1.357	5.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0	8.474	2.000.000,00	8.474	2.000.000,00	8.474	5.000.000,00	8.474	2.000.000,00	8.474	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				2.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	0	114	2.000.000,00	114	2.000.000,00	114	5.000.000,00	114	2.000.000,00	114	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	0	1.622	5.000.000,00	1.622	5.000.000,00	1.622	5.000.000,00	1.622	5.000.000,00	1.622	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				30.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	0	6	30.000.000,00	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1.500.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	0	1	1.500.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	0	3	2.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	0	13	2.000.000,00	13	5.000.000,00	13	5.000.000,00	13	5.000.000,00	13	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				2.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	0	1	2.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0	27	2.000.000,00	27	2.000.000,00	27	2.000.000,00	27	2.000.000,00	27	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	0	6	2.000.000,00	6	2.000.000,00	6	2.000.000,00	6	2.000.000,00	6	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	0	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	1.000.000,00		
1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	0	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
1.02.02.2.02.0047 - Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	0	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00		
1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	0	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
Meningkatnya Masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau				31.833.976.834,00		32.151.224.461,00		31.111.798.461,00		32.108.838.175,00		31.892.277.175,00	1.02.0.00.0.00.0 1.0003 - Puskesmas Juata	
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				72.100.000,00		57.600.000,00		66.600.000,00		57.600.000,00		75.600.000,00		
Terlaksananya Pelayanan Siklus Hidup (ibu hamil, ibu bersalin, Bayi, Balita, anak sekolah, usia produktif, lansia) sesuai standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0	8.379	72.100.000,00	8.379	57.600.000,00	8.379	66.600.000,00	8.379	57.600.000,00	8.379	75.600.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0	22		22		22		22		22			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	0	6		6		6		6		6			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	0	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	0	14		14		14		14		14			
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0	916		916		916		916		916			
	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	0	1.126		1.126		1.126		1.126		1.126			
	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	0	79		79		79		79		79			
1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				5.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0	916	5.000.000,00	916	2.000.000,00	916	5.000.000,00	916	2.000.000,00	916	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				2.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0	8.379	2.000.000,00	8.379	2.000.000,00	8.379	5.000.000,00	8.379	2.000.000,00	8.379	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				2.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	0	79	2.000.000,00	79	2.000.000,00	79	5.000.000,00	79	2.000.000,00	79	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	0	1.126	5.000.000,00	1.126	5.000.000,00	1.126	5.000.000,00	1.126	5.000.000,00	1.126	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				30.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	0	1	1.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	0	3	2.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	0	14	2.000.000,00	14	5.000.000,00	14	5.000.000,00	14	5.000.000,00	14	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				1.500.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	0	1	1.500.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0	22	2.000.000,00	22	2.000.000,00	22	2.000.000,00	22	2.000.000,00	22	2.000.000,00		
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	0	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00		
1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	0	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00		
1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	0	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				600.000,00		600.000,00		600.000,00		600.000,00		600.000,00		
Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0	1	600.000,00	1	600.000,00	1	600.000,00	1	600.000,00	1	600.000,00		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	0	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	0	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	5.000.000,00		
Meningkatnya Masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau				31.833.976.834,00		32.151.224.461,00		31.111.798.461,00		32.108.838.175,00		31.892.277.175,00	1.02.0.00.0.00.0 1.0004 - Puskesmas Sebengkok	
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				70.550.000,00		55.550.000,00		61.550.000,00		55.550.000,00		70.550.000,00		
Terlaksananya Pelayanan Siklus Hidup (ibu hamil, ibu bersalin, Bayi, Balita, anak sekolah, usia produktif, lansia) sesuai standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0	5.299	70.550.000,00	5.299	55.550.000,00	5.299	61.550.000,00	5.299	55.550.000,00	5.299	70.550.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0	46		46		46		46		46			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	0	6		6		6		6		6			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	0	7		7		7		7		7			
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	0	13		13		13		13		13			
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	0	7		7		7		7		7			
	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	0	967		967		967		967		967			
	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	0	75		75		75		75		75			
1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				5.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0	821	5.000.000,00	821	2.000.000,00	821	5.000.000,00	821	2.000.000,00	821	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				2.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0	5.299	2.000.000,00	5.299	2.000.000,00	5.299	5.000.000,00	5.299	2.000.000,00	5.299	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	0	75	2.000.000,00	75	2.000.000,00	75	2.000.000,00	75	2.000.000,00	75	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	0	967	5.000.000,00	967	5.000.000,00	967	5.000.000,00	967	5.000.000,00	967	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				30.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	0	6	30.000.000,00	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	0	1	1.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	0	7	2.000.000,00	7	5.000.000,00	7	5.000.000,00	7	5.000.000,00	7	5.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	0	13	2.000.000,00	13	5.000.000,00	13	5.000.000,00	13	5.000.000,00	13	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				2.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	0	1	2.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0	46	2.000.000,00	46	2.000.000,00	46	2.000.000,00	46	2.000.000,00	46	2.000.000,00		
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	0	7	10.000.000,00	7	10.000.000,00	7	10.000.000,00	7	10.000.000,00	7	10.000.000,00		
1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	0	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00		
1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	0	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00	1	250.000,00		
1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	0	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00		
1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00		300.000,00		
Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00	1	300.000,00		
1.02.02.2.02.0047 - Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	0	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	0	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	5.000.000,00		
Meningkatnya Masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau				31.833.976.834,00		32.151.224.461,00		31.111.798.461,00		32.108.838.175,00		31.892.277.175,00	1.02.0.00.0.00.0 1.0005 - Puskesmas Pantai Amal	
Terlaksananya Pelayanan Siklus Hidup (ibu hamil, ibu bersalin, Bayi, Balita, anak sekolah, usia produktif, lansia) sesuai standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0	1.577	66.750.000,00	1.577	48.750.000,00	1.577	57.750.000,00	1.577	48.750.000,00	1.577	75.750.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0	36		36		36		36		36			
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	0	9		9		9		9		9			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	0	4		4		4		4		4			
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	0	13		13		13		13		13			
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0			1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	0	8		8		8		8		8			
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0	204		204		204		204		204			
	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	0	260		260		260		260		260			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	0	18		18		18		18		18			
1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				5.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0	204	5.000.000,00	204	2.000.000,00	204	5.000.000,00	204	2.000.000,00	204	5.000.000,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0	1.577	2.000.000,00	1.577	2.000.000,00	1.577	5.000.000,00	1.577	2.000.000,00	1.577	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				2.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	0	18	2.000.000,00	18	2.000.000,00	18	5.000.000,00	18	2.000.000,00	18	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	0	260	5.000.000,00	260	5.000.000,00	260	5.000.000,00	260	5.000.000,00	260	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				30.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	0	9	30.000.000,00	9	5.000.000,00	9	5.000.000,00	9	5.000.000,00	9	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	0	1	1.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	0	4	2.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	0	13	2.000.000,00	13	5.000.000,00	13	5.000.000,00	13	5.000.000,00	13	5.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				2.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	0	1	2.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0	36	2.000.000,00	36	2.000.000,00	36	2.000.000,00	36	2.000.000,00	36	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	0	8	2.000.000,00	8	2.000.000,00	8	2.000.000,00	8	2.000.000,00	8	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				750.000,00		750.000,00		750.000,00		750.000,00		750.000,00		
1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	0	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	0	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				5.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0		5.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0047 - Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	0	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	5.000.000,00		
Meningkatnya Masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau				31.833.976.834,00		32.151.224.461,00		31.111.798.461,00		32.108.838.175,00		31.892.277.175,00	1.02.0.00.0.00.0 1.0006 - Puskesmas Gunung Lingkas	
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				69.200.000,00		49.200.000,00		58.200.000,00		49.200.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Pelayanan Siklus Hidup (ibu hamil, ibu bersalin, Bayi, Balita, anak sekolah, usia produktif, lansia) sesuai standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0	8.790	69.200.000,00	8.790	49.200.000,00	8.790	58.200.000,00	8.790	49.200.000,00	8.790	75.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0	25		25		25		25		25			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	0	9		9		9		9		9			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	0	4		4		4		4		4			
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	0	9		9		9		9		9			
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	0	7		7		7		7		7			
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0	957		957		957		957		957			
	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	0	1.148		1.148		1.148		1.148		1.148			
	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	0	92		92		92		92		92			
1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				5.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0	957	5.000.000,00	957	2.000.000,00	957	5.000.000,00	957	2.000.000,00	957	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				2.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0	8.790	2.000.000,00	8.790	2.000.000,00	8.790	5.000.000,00	8.790	2.000.000,00	8.790	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				2.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	0	92	2.000.000,00	92	2.000.000,00	92	5.000.000,00	92	2.000.000,00	92	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	0	1.148	5.000.000,00	1.148	5.000.000,00	1.148	5.000.000,00	1.148	5.000.000,00	1.148	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				30.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	0	9	30.000.000,00	9	5.000.000,00	9	5.000.000,00	9	5.000.000,00	9	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	0	4	2.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	0	9	2.000.000,00	9	5.000.000,00	9	5.000.000,00	9	5.000.000,00	9	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				2.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	0	1	2.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0	25	2.000.000,00	25	2.000.000,00	25	2.000.000,00	25	2.000.000,00	25	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	0	7	2.000.000,00	7	2.000.000,00	7	2.000.000,00	7	2.000.000,00	7	5.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	0	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	0	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	0	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				5.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0	1	5.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
1.02.02.2.02.0047 - Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	0	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	0	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
Meningkatnya Masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau				31.833.976.834,00		32.151.224.461,00		31.111.798.461,00		32.108.838.175,00		31.892.277.175,00	1.02.0.00.0.00.0 1.0007 - Puskesmas Mamburungan	
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				69.800.000,00		50.800.000,00		59.800.000,00		50.800.000,00		71.800.000,00		
Terlaksananya Pelayanan Siklus Hidup (ibu hamil, ibu bersalin, Bayi, Balita, anak sekolah, usia produktif, lansia) sesuai standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0	6.224	69.800.000,00	6.224	50.800.000,00	6.224	59.800.000,00	6.224	50.800.000,00	6.224	71.800.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0	29		29		219		29		29			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	0	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	0	9		9		9		9		9			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	0	4		4		4		4		4			
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	0	13		13		13		13		13			
	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	0	7		7		7		7		7			
	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0	545		545		545		545		545			
	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	0	657		657		657		657		657			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	0	46		46		46		46		46			
1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				5.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0	545	5.000.000,00	545	2.000.000,00	545	5.000.000,00	545	2.000.000,00	545	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				2.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		
Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	0	6.224	2.000.000,00	6.224	2.000.000,00	6.224	5.000.000,00	6.224	2.000.000,00	6.224	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				2.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	0	46	2.000.000,00	46	2.000.000,00	46	5.000.000,00	46	2.000.000,00	46	5.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	0	657	5.000.000,00	657	5.000.000,00	657	5.000.000,00	657	5.000.000,00	657	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				30.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	0	9	30.000.000,00	9	5.000.000,00	9	5.000.000,00	9	5.000.000,00	9	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	0	2	2.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				2.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	0	4	2.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	0	13	2.000.000,00	13	5.000.000,00	13	5.000.000,00	13	5.000.000,00	13	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)				2.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	0	1	2.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	0	29	2.000.000,00	29	2.000.000,00	219	2.000.000,00	29	2.000.000,00	29	2.000.000,00		
1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	0	7	2.000.000,00	7	2.000.000,00	7	2.000.000,00	7	2.000.000,00	7	2.000.000,00		
1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	0	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00		
1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria				800.000,00		800.000,00		800.000,00		800.000,00		800.000,00		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang)	0	1	800.000,00	1	800.000,00	1	800.000,00	1	800.000,00	1	800.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	0	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				5.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	0	1	5.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0047 - Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan (Dokumen)	0	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	5.000.000,00		
1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	0	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	5.000.000,00		
Meningkatnya Masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau				0		0		0		0		0	1.02.0.00.0.00.0 1.0008 - Laboratorium Kesehatan Daerah	
1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		1.300.000.000,00		
Tersedianya sarana, prasarana dan perbekalan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1	1	1.300.000.000,00	1	1.300.000.000,00	1	1.300.000.000,00	1	1.300.000.000,00	1	1.300.000.000,00		
	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	1	1		1		1		1		1			
1.02.02.2.01.0008 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		
Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1	1	750.000.000,00	1	750.000.000,00	1	750.000.000,00	1	750.000.000,00	1	750.000.000,00		
1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit				450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		
Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	1	1	450.000.000,00	1	450.000.000,00	1	450.000.000,00	1	450.000.000,00	1	450.000.000,00		
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				643.956.771,00		678.345.714,00		855.547.714,00		666.258.000,00		766.258.000,00		
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Fasyankes yang terpenuhi SDM kesehatan sesuai standar (%)	0	18,18	643.956.771,00	18,18	678.345.714,00	18,18	855.547.714,00	36,36	666.258.000,00	36,36	766.258.000,00	1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kesehatan	
1.02.03.2.01 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota				94.365.000,00		94.365.000,00		94.365.000,00		94.365.000,00		94.365.000,00		
1.02.03.2.01.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				94.365.000,00		94.365.000,00		94.365.000,00		94.365.000,00		94.365.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	26	35	94.365.000,00	45	94.365.000,00	55	94.365.000,00	65	94.365.000,00	75	94.365.000,00		
1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				129.043.000,00		129.043.000,00		306.245.000,00		129.043.000,00		129.043.000,00		
Tersedianya dokumen perencanaan tenaga kesehatan, tenaga medis dan tenaga penunjang lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	1	129.043.000,00	1	129.043.000,00	1	306.245.000,00	1	129.043.000,00	1	129.043.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.02.03.2.02.0001 - Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				99.043.000,00		99.043.000,00		100.000.000,00		99.043.000,00		99.043.000,00		
Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	10	10	99.043.000,00	10	99.043.000,00	10	100.000.000,00	10	99.043.000,00	10	99.043.000,00		
1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar				20.000.000,00		20.000.000,00		48.560.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	48.560.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
1.02.03.2.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				10.000.000,00		10.000.000,00		157.685.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	157.685.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				420.548.771,00		454.937.714,00		454.937.714,00		442.850.000,00		542.850.000,00		
Terlaksananya peningkatan Kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	63	65	420.548.771,00	70	454.937.714,00	75	454.937.714,00	80	442.850.000,00	85	542.850.000,00		
1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				420.548.771,00		454.937.714,00		454.937.714,00		442.850.000,00		542.850.000,00		
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				169.624.612,00		232.909.260,00		235.159.260,00		237.409.260,00		239.659.260,00		
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar (%)	100	100	169.624.612,00	100	232.909.260,00	100	235.159.260,00	100	237.409.260,00	100	239.659.260,00	1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kesehatan	
1.02.04.2.01 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				50.000.000,00		35.121.190,00		35.121.190,00		35.121.190,00		35.121.190,00		
Terlaksanya pengendalian dan pengawasan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	0	1	50.000.000,00	1	35.121.190,00	1	35.121.190,00	1	35.121.190,00	1	35.121.190,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.02.04.2.01.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				50.000.000,00		35.121.190,00		35.121.190,00		35.121.190,00		35.121.190,00		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	0	1	50.000.000,00	1	35.121.190,00	1	35.121.190,00	1	35.121.190,00	1	35.121.190,00		
1.02.04.2.03 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				100.000.000,00		83.897.150,00		83.897.150,00		83.897.150,00		83.897.150,00		
Terlaksananya pengendalian dan pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	19	19	100.000.000,00	19	83.897.150,00	19	83.897.150,00	19	83.897.150,00	19	83.897.150,00		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	19	19	100.000.000,00	19	83.897.150,00	19	83.897.150,00	19	83.897.150,00	19	83.897.150,00		
1.02.04.2.06 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				19.624.612,00		113.890.920,00		116.140.920,00		118.390.920,00		120.640.920,00		
Terlaksananya pengendalian dan pengawasan Industri Rumah Tangga dan Produk makanan minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	2	38	19.624.612,00	38	113.890.920,00	38	116.140.920,00	38	118.390.920,00	38	120.640.920,00		
1.02.04.2.06.0001 - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan				19.624.612,00		113.890.920,00		116.140.920,00		118.390.920,00		120.640.920,00		
Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	2	38	19.624.612,00	38	113.890.920,00	38	116.140.920,00	38	118.390.920,00	38	120.640.920,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan														
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				3.062.511.000,00		2.929.126.000,00		2.989.100.000,00		2.979.100.000,00		2.943.411.000,00		
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase kader kesehatan yang diberdayakan (%)	100	100	3.062.511.000,00	100	2.929.126.000,00	100	2.989.100.000,00	100	2.979.100.000,00	100	2.943.411.000,00	1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Kesehatan	
1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2.765.500.000,00		2.550.026.000,00		2.600.000.000,00		2.600.000.000,00		2.600.000.000,00		
Terpenuhinya 75% posyandu siklus hidup aktif dan strata madya	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	2	5	2.765.500.000,00	5	2.550.026.000,00	5	2.600.000.000,00	5	2.600.000.000,00	5	2.600.000.000,00		
1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				2.765.500.000,00		2.550.026.000,00		2.600.000.000,00		2.600.000.000,00		2.600.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	2	5	2.765.500.000,00	5	2.550.026.000,00	5	2.600.000.000,00	5	2.600.000.000,00	5	2.600.000.000,00		
1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				211.311.000,00		250.000.000,00		260.000.000,00		250.000.000,00		211.311.000,00		
Terlaksananya kampanye kesehatan (pembudayaan Germas)	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	3	5	211.311.000,00	5	250.000.000,00	5	260.000.000,00	5	250.000.000,00	5	211.311.000,00		
1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				211.311.000,00		250.000.000,00		260.000.000,00		250.000.000,00		211.311.000,00		
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				76.200.000,00		76.200.000,00		76.200.000,00		76.200.000,00		76.200.000,00		
Terlaksananya kampanye kesehatan (pembudayaan Germas)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	17	6	76.200.000,00	6	76.200.000,00	6	76.200.000,00	6	76.200.000,00	6	76.200.000,00		
1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				76.200.000,00		76.200.000,00		76.200.000,00		76.200.000,00		76.200.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	17	6	76.200.000,00	6	76.200.000,00	6	76.200.000,00	6	76.200.000,00	6	76.200.000,00		
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan				3.062.511.000,00		2.929.126.000,00		2.989.100.000,00		2.979.100.000,00		2.943.411.000,00	1.02.0.00.0.00.0 1.0002 - Puskesmas Karang Rejo	
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
Terlaksananya kampanye kesehatan (pembudayaan Germas)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	0	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00		
1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	0	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00		
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan				3.062.511.000,00		2.929.126.000,00		2.989.100.000,00		2.979.100.000,00		2.943.411.000,00	1.02.0.00.0.00.0 1.0003 - Puskesmas Juata	
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya kampanye kesehatan (pembudayaan Germas)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	0	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	5.000.000,00		
1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	0	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	5.000.000,00		
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya kampanye kesehatan (pembudayaan Germas)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)													
1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan				3.062.511.000,00		2.929.126.000,00		2.989.100.000,00		2.979.100.000,00		2.943.411.000,00	1.02.0.00.0.00.0 1.0005 - Puskesmas Pantai Amal	
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.000.000,00		7.700.000,00		7.700.000,00		7.700.000,00		7.700.000,00		
Terlaksananya kampanye kesehatan (pembudayaan Germas)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	0	2	1.000.000,00	2	7.700.000,00	2	7.700.000,00	2	7.700.000,00	2	7.700.000,00		
1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1.000.000,00		7.700.000,00		7.700.000,00		7.700.000,00		7.700.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	0	2	1.000.000,00	2	7.700.000,00	2	7.700.000,00	2	7.700.000,00	2	7.700.000,00		
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan				3.062.511.000,00		2.929.126.000,00		2.989.100.000,00		2.979.100.000,00		2.943.411.000,00	1.02.0.00.0.00.0 1.0006 - Puskesmas Gunung Lingkas	
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2.000.000,00		24.500.000,00		24.500.000,00		24.500.000,00		24.500.000,00		
Terlaksananya kampanye kesehatan (pembudayaan Germas)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	0	2	2.000.000,00	2	24.500.000,00	2	24.500.000,00	2	24.500.000,00	2	24.500.000,00		
1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				2.000.000,00		24.500.000,00		24.500.000,00		24.500.000,00		24.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	0	2	2.000.000,00	2	24.500.000,00	2	24.500.000,00	2	24.500.000,00	2	24.500.000,00		
1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				2.000.000,00		16.200.000,00		16.200.000,00		16.200.000,00		16.200.000,00		
Terlaksananya kampanye kesehatan (pembudayaan Germas)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	0	2	2.000.000,00	2	16.200.000,00	2	16.200.000,00	2	16.200.000,00	2	16.200.000,00		
1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				2.000.000,00		16.200.000,00		16.200.000,00		16.200.000,00		16.200.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	0	2	2.000.000,00	2	16.200.000,00	2	16.200.000,00	2	16.200.000,00	2	16.200.000,00		

4.4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Dalam rangka mendukung tercapaiannya Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan tahun 2025-2029, maka sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan umum pembangunan daerah yang diarahkan untuk melaksanakan program prioritas dalam pembangunan daerah dan dalam rangka penanganan permasalahan kesehatan yang ada maka berikut daftar sub kegiatan prioritas Dinas Kesehatan Kota Tarakan.

Tabel 4.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah Dinas Kesehatan Kora Tarakan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
Dinas Kesehatan				
1.	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.01.0002 - Pembangunan Puskesmas	
			1.02.02.2.01.0006 - Pengembangan Puskesmas	
			1.02.02.2.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	
			1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
			1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
			1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	
			1.02.02.2.01.0024 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	
			1.02.02.2.01.0026 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	
			1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
			1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
			1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
			1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	
			1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
			1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
			1.02.02.2.02.0007 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
			1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
			1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
			1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
			1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
			1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	
			1.02.02.2.02.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	
			1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
			1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
			1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
			1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
			1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
			1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
			1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
			1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	
			1.02.02.2.02.0027 - Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
			1.02.02.2.02.0028 - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	
			1.02.02.2.02.0029 - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	
			1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			1.02.02.2.02.0035 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0036 - Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	
			1.02.02.2.02.0037 - Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	
			1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	
			1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	
			1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	
			1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	
			1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
			1.02.02.2.02.0050 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	
			1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	
			1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
			1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
2.	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	1.02.03.2.01 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	
			1.02.03.2.01.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	
			1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
			Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	
			1.02.03.2.02.0001 - Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	
			1.02.03.2.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
			1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
3.	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman	1.02.04.2.01 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
			1.02.04.2.01.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
			1.02.04.2.03 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
			1.02.04.2.03.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
			1.02.04.2.06 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	
			1.02.04.2.06.0001 - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
			Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	
4.	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	
			1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	
			1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
Puskesmas Karang Rejo				
1	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
			1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
2	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
			1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
			1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
			1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
			1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
			1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
			1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
			1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
			1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
			1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
			1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
			1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	
			1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	
			1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
			1.02.02.2.02.0047 - Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	
			1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi	
3	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
Puskesmas Juata				
1	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
			1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
2	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
			1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
			1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
			1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
			Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
			1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
			1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
			1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
			1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
			1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
			1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
			1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
			1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	
			1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	
			1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
			1.02.02.2.02.0047 - Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	
			1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi	
3	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
Puskesmas Sebangkok				
1	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
			1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
2	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
			1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
			1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
			1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
			1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
			1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
			1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
			1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
			1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
			1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
			1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
			1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	
			1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	
			1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
			1.02.02.2.02.0047 - Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	
			1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi	
3	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
Puskesmas Pantai Amal				
1	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN		1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
2	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
			1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
			1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
			1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
			1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
			1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
			1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
			1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
			1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
			1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
			1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
			1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	
			1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	
			1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
			1.02.02.2.02.0047 - Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	
3	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
			1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
Puskesmas Gunung Lingkas				
1	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
			1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
2	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
			1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
			1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
			1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
			1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
			1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
			1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
			1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
			1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
			1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
			1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
			1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	
			1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
			1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
			1.02.02.2.02.0047 - Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	
			1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi	
3	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
			1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
Puskesmas Mamburungan				
1	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
			1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
2	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
			1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
			1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	
			1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
			1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
			1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	
			1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
			1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
			1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	
			1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
			Penyakit Menular dan Tidak Menular	
			1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas	
			1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	
			1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	
			1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	
			1.02.02.2.02.0047 - Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	
			1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi	
3	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
Laboratorium Kesehatan Daerah				
1	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
			1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
Rumah Sakit Umum Kota Tarakan				
1	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
			1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
2	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			1.02.02.2.01.0008 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	
			1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
			1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit	

4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dinas kesehatan

Indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Tarakan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kesehatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Perumusan indikator kinerja Dinas Kesehatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi dalam tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD sesuai tabel 4.5. Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Tarakan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	89,4	89,4	89	86	84	77	75	
2	Angka Kematian Balita	Per 1000 kelahiran hidup	6,9	6,7	6,5	6,4	6,3	6,3	6,2	
3	Prevalensi Stunting	%	12,6	12	11,8	11,5	11,2	10,9	10,6	
4	Persentase Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	%	0	35	46	55	61	70	80	
5	Cakupan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	80,7	80,75	81,00	81,50	82,50	83,50	84,00	
6	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	%	75	75	75	75	91	91	91	
7	Rasio Tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	Per 1000 penduduk	4,0 : 1000	4,3 : 1.000	4,3 : 1.000	4,3 : 1.000	4,3 : 1.000	4,3 : 1.000	4,3 : 1.000	
8	Nilai SAKIP	Angka	86,05	86,3	86,5	86,7	86,9	87,1	87,3	
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	86,77	86,9	87,10	87,30	87,50	87,70	87,90	

4.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Adapun Penentuan Target Keberhasilan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2030 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kesehatan Kota Tarakan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Kesehatan Kota Tarakan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Persen	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita	Persen	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persen	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persen	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Persen	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persen	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persen	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	Persen	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persen	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persen	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase Lanjut Usia yang mandiri	Persen	74,3	75	77	79	81	83	
14	Persentase tempat pengeloaan pangan memenuhi syarat	Persen	70	72	74	76	78	80	
15	Prevalensi depresi pada usia > 15 tahun	Persen	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	
16	Prevalensi obesitas pada usia > 18 tahun	Persen	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	
17	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	Persen	12,4	11,4	10,4	9,4	8,4	7,4	
18	Cakupan penemuan Kasus TB	Persen	90	90	90	90	90	90	
19	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Persen	50	50	65	75	80	90	
20	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terinegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	Persen	23	30	35	40	45	50	
21	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan Kesehatan sesuai standar	Persen	83	86	89	92	95	95	
22	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	Persen	0,00	0,00	16,67	16,67	33,33	33,33	
23	Persentase Rumah Sakit Pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	Persen	0	20	20	40	40	40	
24	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP IRT sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100	100	
25	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	Persen	75	76	77	78	79	80	
26	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	Persen	78	79	81	83	85	87	
27	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	Persen	100	100	100	100	100	100	
28	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	Persen	50	60	65	70	75	80	
29	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	Persen	65	66,1	67,9	67,9	80	82	
30	Persentase ASPAK	Persen	95	95	95	95	95	95	

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun secara sistematis berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis di bidang kesehatan, potensi daerah, serta permasalahan aktual yang mempengaruhi kualitas layanan kesehatan. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman utama dalam penyusunan rencana kerja tahunan perangkat daerah, sekaligus menjadi alat kendali dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kesehatan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk mewujudkan visi-misi pembangunan daerah melalui peningkatan mutu dan layanan kesehatan.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan merupakan pedoman umum yang berfungsi untuk menjamin konsistensi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Tarakan. Kaidah ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi program dan kegiatan perangkat daerah berjalan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, baik jangka menengah maupun jangka Panjang

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2025–2029 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Seluruh program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini harus disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada RPJPD dan RPJMD Kota Tarakan
2. Perencanaan dan penganggaran tahunan melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mengacu pada target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra ini, dengan menjamin keterkaitan yang konsisten antara input, output, dan outcome.
3. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan Renstra ini harus didasarkan pada data yang sah, akurat, dan mutakhir.
4. Dalam hal terjadi perubahan regulasi, nomenklatur, struktur organisasi, atau dinamika strategis lainnya, maka Renstra ini dapat disesuaikan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan nasional dan daerah

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Pengendalian dan evaluasi merupakan bagian krusial dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2025–2029. Keduanya berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta berkontribusi nyata terhadap peningkatan mutu layanan Kesehatan. Beberapa mekanisme pengendalian dan evaluasi yang diterapkan antara lain monitoring berkala, evaluasi kinerja tahunan, audit internal dan eksternal.

Akhir kata, Pembangunan kesehatan merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan sinergi antara perencanaan yang matang, pelaksanaan yang disiplin, serta sistem pengendalian dan evaluasi yang efektif. Dengan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan, peningkatan derajat kesehatan Masyarakat dapat terwujud.

6. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan pada Pemerintah Kota Tarakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan telah menyusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2025-2029 sebagai pedoman perencanaan program dan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan dari Tahun 2025 sampai 2029. Pada perjalanannya, renstra yang telah ditetapkan tersebut perlu ditinjau kembali, karena terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yaitu berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Perubahan peraturan perundang-undangan tersebut berdampak pada perubahan pembagian urusan dan kewenangan pemerintah daerah pada setiap perangkat daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 11) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 60) dan peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan. Bersamaan dengan penataan organisasi perangkat daerah, Pemerintah Kota Tarakan juga telah merumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU). Oleh sebab itu, maka setiap perangkat daerah perlu untuk menginterpretasikan target dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam Renstra perangkat daerah, dengan menyesuaikan bentuk dan susunan perangkat daerah yang baru, tugas pokok dan fungsi yang baru, dan perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan baik pada tingkatan pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Interpretasi target dan indikator kinerja tersebut tetap berpedoman dan mengarah pada pencapaian visi dan misi dalam RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan. Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) ke depan, dan

menjadi tolok ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja yang mengarah pada capaian IKU.

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029, dengan menyelaraskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis perangkat daerah di tingkat provinsi dan rencana strategis pemerintah yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Perumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2025-2029 harus menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran dari RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029. Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan daerah di tingkat provinsi dan pembangunan nasional di tingkat pusat. Analisis terhadap Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2025-2029 dilakukan dalam tahapan penyusunan RPJMD untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan RPJMD Kota Tarakan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2045;
 20. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
 21. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 22. Surat Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 226 Tahun 2025 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun tujuan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan adalah:

1. Menerjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kota Tarakan serta merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan.
2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja.
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja.
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, fungsi Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, keterkaitan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa sumber daya yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya baik itu berupa sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana, mengemukakan kinerja pelayanan dengan menjabarkan target maupun capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas tantangan atau hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini, serta memuat identifikasi permasalahan, telaahan kebijakan serta penentuan isu-isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dan mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini mengemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB V Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang bina marga, bidang cipta karya dan penataan ruang, dan bidang pengairan sumber daya air;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang bina marga, bidang cipta karya dan penataan ruang dan bidang pengairan sumber daya air;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang bina marga, bidang cipta karya dan penataan ruang dan bidang pengairan sumber daya air;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk kelancaran tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan, masing-masing bagian dan bidang mempunyai tugas dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tarakan tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

a) Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi kegiatan Dinas;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran Dinas;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;
4. Pembinaan dan penyusunan organisasi dan tata laksana Dinas;
5. Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada Dinas;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Dinas;

7. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
8. Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Dinas; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

b) Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga sebagaimana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Marga yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Bina Marga yang meliputi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pembangunan jalan dan jembatan, preservasi jalan dan jembatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan jalan dan jembatan, preservasi jalan dan jembatan;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan jalan kota;
4. Pelaksanaan penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
5. Pelaksanaan penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan dan jembatan;
6. Pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
7. Pelaksanaan perencanaan teknik jalan dan jembatan;
8. Pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
9. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
10. Pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan, leger jalan, serta pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan;
11. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan perencanaan teknik, pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
12. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan jalan dan jembatan, preservasi jalan dan jembatan; dan
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Bina Marga terdiri dari:

- a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- b. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan; dan
- c. Seksi Jasa Konstruksi.

c) Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang

Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang sebagaimana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang

pekerjaan umum dan penataan ruang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, pengelolaan dan pengembangan sistem air minum, air limbah dan persampahan, dan penataan ruang;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang bangunan gedung, prasarana perkotaan, dan penataan ruang;
3. Pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
4. Pelaksanaan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kota;
5. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum di daerah;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan permukiman, penataan bangunan dan lingkungan, pengelolaan dan pengembangan sistem air minum, air limbah dan persampahan, dan penataan ruang; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang terdiri dari:

- a. Seksi Pengembangan Permukiman, Penataan Bangunan dan Lingkungan;
- b. Seksi Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Minum, Air Limbah dan Persampahan; dan
- c. Seksi Penataan Ruang.

d) Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air

Bidang Pengelolaan dan Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengairan Sumber daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang Pengairan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengairan sumber daya air yang melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan sumber daya air, pengendalian daya rusak air;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan sumber daya air, pengendalian daya rusak air;
3. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dan pantai dalam 1 (satu) Daerah;
4. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah;
5. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah;
6. Pelaksanaan penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dan pantai;
7. Pelaksanaan penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dan pantai;
8. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/ penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air;
9. Pelaksanaan penyusunan studi kelayakan dan perencanaan teknis/desain/pengembangan sumber daya air;
10. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
11. Pelaksanaan penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja;
12. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai dan pantai;
13. Pelaksanaan pengelolaan sistem hidrologi;
14. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi sumber daya air;
15. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai dan pantai;
16. Pelaksanaan penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dan Pantai;
17. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air dan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air;
18. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase kota;
19. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan sumber daya air, pengendalian daya rusak air; dan
20. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pengairan Sumber Daya Air terdiri dari:

- a. Seksi Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
- b. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.

2.1.2. Sumber daya Perangkat Daerah

Sebagai salah satu unit kerja yang akan melahirkan berbagai kebijakan untuk Pemerintah Daerah, maka sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan. Dalam

melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana bidang infrastruktur, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan wajib didukung oleh Sumber Daya Manusia yang handal dan berkualitas.

Aparat Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan yang ada di dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

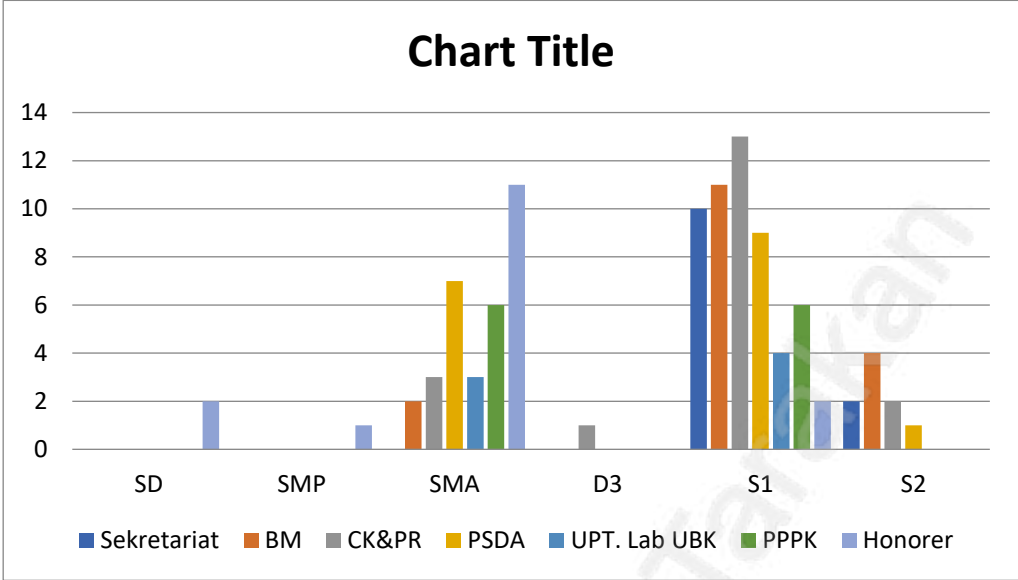
Tabel 2.1
Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Bagian/Bidang	Jumlah	L	P	TINGKAT PENDIDIKAN							
					SD	SMP	SMA	D3	D4	S1	S2	S3
1	Sekretariat	12	4	8	0	0	0	0	0	10	2	-
2	Bina Marga	17	15	2	0	0	2	0	0	11	4	-
3	Cipta Karya dan Penataan Ruang	19	13	6	0	0	3	1	0	13	2	-
4	Pengairan Sumber Daya Air	17	13	4	0	0	7	0	0	9	1	-
5	UPT. Lab UBK	7	7	0	0	0	3	0	0	4	0	-
6	PPPK	12	10	2	0	0	6	0	0	6	0	-
7	Tenaga Honorer	16	12	4	2	1	11	0	0	2	0	-
Jumlah		100	74	26	2	1	32	1	0	55	9	-

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Apabila ditinjau berdasarkan jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan memiliki jumlah tenaga ASN dan honorer sebanyak 102 orang yang dapat dilihat dalam grafik dibawah ini.

Grafik Pegawai DPUPR Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber: DPUPR, 2025

Guna menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut sebagian dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi kurang baik. Namun, diharapkan semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal. Sarana dan prasarana penunjang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Sarana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan

No	Sarana Kerja yang Tersedia	Keterangan Kondisi			
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	Jumlah
1	Bangunan Gedung	-	1	-	1
2	Sepeda Motor	6	7	2	15
3	Dump Truck	0	2	2	4
4	Mobil	0	7	1	8
5	Pick Up	0	0	1	1
6	Grader	0	0	1	1
7	Mesin Kompresor	0	0	1	1
8	Mesin Las Listrik	0	0	1	1
9	Picnometer	0	0	1	1
10	Uninterruptible Power Supply (UPS)	0	0	8	8
11	Laptop	8	12	4	24
12	Note Book	1	3	2	6
13	Printer	0	12	18	30
14	Scanner	8	0	0	8
15	CPU	0	5	3	8
16	Monitor	0	1	3	4
17	Lemari Es	0	0	1	1
18	Camera Film	0	0	0	0
19	Camera Video	0	0	9	9

No	Sarana Kerja yang Tersedia	Keterangan Kondisi			
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	Jumlah
20	Alat Penghancur Kertas	7	0	1	8
21	Waterpass	0	0	1	1
22	Theodolite	1	0	1	2
23	AC Central	0	0	9	9
24	AC Split	8	8	9	25
25	Televisi	1	1	4	6
26	Proyektor + Attachment	0	2	1	3
27	Lemari Arsip	0	89	7	96
28	Meja	95	0	34	129
29	Kursi	165	0	16	181
30	Pembersih Debu	0	0	0	0
31	Mesin Rumput	3	0	7	10
32	Mesin Absen	2	0	4	6

Sumber: DPUPR, 2025

2.1.3. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan dapat dilihat pada pencapaian indikator-indikator kinerja dan variabelnya yang telah ditetapkan. Adapun indikator yang berkaitan dengan kinerja pelayanan meliputi:

- Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- Indikator Kinerja Kunci (IKK)
- *Sustainable Development Goal's (SDG's)*

Indikator-indikator kinerja ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Penilaian kinerja dimulai dengan penentuan indikator-indikator kinerja dan variabelnya, dapat dilihat pada tabel pencapaian kinerja berikut ini:

Tabel 2.3 (T.C-23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan
Tahun 2025-2029

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				n/a	80,00	81,50	81,50	81,50	n/a	81,26	83,69	80,02		n/a	102%	103%	98%	
1	Nilai SAKIP				74,93	74,93	75	75	75		74,44	79,82	81,85		0,00%	99%	106%	109%	
2	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Mutu Pelaksanaan Kegiatan Lab Uji Bahan Konstruksi sesuai Standar SNI				n/a	n/a	100%	100%	100%	n/a	n/a	100%	100%		n/a	n/a	100%	100%	
3	Persentase Rumah Tangga yang Dapat Mengakses Air Minum				74,05%	Acer AIO: rev renstra 86,52 tiwi : sebaiknya gunakan 74,05%		95,62%	95,96%	55,79%	86,80%	92,89%	98,77%		75,34%	116,70%	100,60%	103%	
4	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik				72,63%			72,99%	73,11%	DPRKPP	74,31%	74,17%	74,12%		n/a	102,14%	101,78%	102%	
5	Persentase Penambahan Bangunan Pemerintah dan Fasilitas Umum				16,67%	57,58%	72,73%	87,88%	100%	16,67%	60,60%	110,61%	86,54%		100%	105,24%	152,08%	98%	
6	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertata				21,12%	45,00%	58,75%	82,50%	100%	21,12%	63,50%	59,01%	100%		100%	141,11%	100,44%	121%	
7	Persentase Panjang Jalan dengan Kondisi Mantap				70,08%	60,65%	64,14%	65,63%	65,94%	70,08%	65,97%	67,38%	69,57%		100%	108,77%	105,05%	106%	

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 2.4 (T.C-24)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2025-2029

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Rp 38 027 489 191	Rp 45 779 396 848	Rp 42 597 471 500	Rp 47 317 583 150		Rp 37 805 294 267	Rp 44 582 787 509	Rp 39 140 778 753			99,42%	97,39%	91,89%			
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Rp 21 196 250 447	Rp 23 889 282 900	Rp 2 450 000 000	Rp 21 674 082 309		Rp 20 966 008 566	Rp 23 748 578 009	Rp 2 382 671 316			98,91%	99,41%	97,25%			
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Rp 16 879 523 528	Rp 25 084 518 239	Rp 31 995 320 000	Rp 8 600 000 000		Rp 16 672 823 400	Rp 24 328 270 855	Rp 31 327 967 172			98,78%	96,99%	97,91%			
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		Rp 1 350 585 000	Rp 1 288 602 720	Rp 20 793 706 000	Rp 2 000 000 000		Rp 1 337 507 000	Rp 1 249 219 775	Rp 20 747 757 000			99,03%	96,94%	99,78%			
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Rp 811 198 370	Rp 2 153 300 000	Rp 515 000 000	Rp 1 130 000 000		Rp 792 350 500	Rp 2 128 500 000	Rp 496 171 000			97,68%	98,85%	96,34%			
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Rp 18 137 034 368	Rp 38 601 607 625	Rp 102 621 275 754	Rp 813 500 842		Rp 17 409 144 869	Rp 37 858 096 824	Rp 102 066 995 702			95,99%	98,07%	99,46%			
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		Rp 27 245 483 903	Rp 43 974 326 543	Rp 34 717 009 353	Rp 29 500 000 000		Rp 27 242 153 064	Rp 43 786 844 544	Rp 34 717 009 353			99,99%	99,57%	100,00%			
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Rp 60 509 967 378	Rp 62 061 088 990	Rp 76 112 979 528	Rp 55 867 583 151		Rp 59 527 018 619	Rp 54 161 146 591	Rp 72 293 324 914			98,38%	87,27%	94,98%			
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		Rp 30 062 267	Rp 4 988 440	Rp 4 996 880	Rp 50 000 000		Rp 6 480 000	Rp 2 000 000	Rp 4 792 000			21,56%	40,09%	95,90%			
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Rp 234 473 505	Rp 801 129 420	Rp 762 638 440	Rp 800 000 000		Rp 184 058 540	Rp 765 298 594	Rp 710 650 589			78,50%	95,53%	93,18%			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Rp 10 242 226 168	Rp 12 254 175 972	Rp 11 631 023 431	Rp 12 085 043 548		Rp 9 712 696 068	Rp 10 459 600 436	Rp 10 610 399 710			94,83%	85,36%	91,22%			

Sumber: Hasil Olahan Data DPUPR, 2025

Berdasarkan tabel TC. 23 dan tabel 2.4 yang disajikan diatas, dapat diketahui bahwa capaian indikator pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan tahun 2021-2023 menunjukkan peningkatan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis DPUPR

2.2.1. Permasalahan

Permasalahan diperlukan dalam perumusan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang selanjutnya akan dituangkan dalam dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diverifikasi dari informasi pada gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing bidang, serta kesepakatan dari pemangku kepentingan. Permasalahan pembangunan yang mendesak yang akan dihadapi akan menentukan agenda sasaran serta program dan kegiatan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Permasalahan yang akan dihadapi 2 tahun ke depan antara lain:

Tabel 2. 5
Permasalahan dan Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD (1)	PERMASALAHAN PD (2)	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD (3)	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD (7)
			GLOBAL (4)	NASIONAL (5)	REGIONAL (6)	
	Masih rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur dasar Urusan Pekerjaan Umum			Keterbatasan anggaran dan tata kelola infrastruktur yang belum optimal memperlambat perbaikan pelayanan publik.	Ketimpangan kualitas dan cakupan infrastruktur antar wilayah dalam satu daerah menjadi sumber ketidakpuasan masyarakat.	
Kota Tarakan memiliki sumber daya air yang melimpah, baik air permukaan maupun air tanah, yang dapat dimanfaatkan untuk penyediaan air minum.	Belum optimalnya pelayanan air minum bagi masyarakat		Perubahan iklim global menyebabkan bencana alam lebih sering terjadi (banjir, kekeringan, tanah longsor) yang menguji ketahanan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, dan sistem air bersih.			
	Masih rendahnya rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi					
	Terbatasnya Kapasitas Unit pengambilan air baku perlu ditambah untuk suplai ke IPA					
	Ketersediaan Air Baku Belum dimanfaatkan secara maksimal					
Pemerintah daerah atau pusat memiliki potensi anggaran untuk dialokasikan pada perbaikan dan pemeliharaan drainase.	Masih adanya titik banjir di Kota Tarakan					
	Masih kurangnya proporsi dimensi saluran dan tingginya sedimentasi sehingga mengurangi kapasitas saluran untuk mengalirkan air serta semakin berkurang daerah resapan air	Belum terpenuhi dan meratanya infrastruktur air bersih dan sanitasi secara menyeluruh				
	Banyak Perambahan Hutan/ Penanaman Pohon di bagian Hulu Pemukiman yang semakin banyak di pinggir sungai.					
	Masyarakat banyak yang belum sadar tentang kebersihan membuang sampah di dalam sungai					
	Masih rendahnya sanitasi Kota Tarakan					
	Masih rendahnya kinerja pelayanan pengelolaan air limbah domestik bagi masyarakat					
Teknologi pengolahan air limbah domestik yang efektif dan efisien sudah tersedia, baik skala rumah tangga maupun komunal	Belum optimalnya Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik					
	Belum optimalnya sarana-prasarana persampahan					
	Belum optimalnya Pengelolaan Persampahan					
Pemerintah kota memiliki potensi anggaran untuk dialokasikan pada perbaikan jalan	Masih adanya jalan yang tidak dalam kondisi mantap					
	Masih rendah ruas jalan dan jembatan kota dalam kondisi mantap					
	Belum optimalnya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya					
	Masih rendahnya pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung yang memenuhi standar teknis					
	Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang					
	Belum optimalnya pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang					
	Belum optimalnya penyelenggaraan jasa konstruksi					
	Masih rendahnya tingkat tertib penyelenggaraan jasa Konstruksi					
	Belum optimalnya Akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
	Belum optimalnya kuantitas dan kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah					
						Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur urusan pekerjaan umum

Sumber: Hasil Analisis DPUPR, 2025

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai berikut:

- a. Pembangunan jalan lingkar Tarakan menjadi jalan strategis nasional (JSN) guna percepatan pembangunan ekonomi dan wisata
- b. Pembangunan jembatan Bulungan-Tarakan.
- c. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan.
- d. Belum optimalnya koordinasi kelembagaan penyelenggaraan jalan antara penyelenggaraan jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota
- e. Belum optimalnya penanggulangan masalah banjir
- f. Belum optimalnya pembangunan tanggul pengaman pantai untuk melindungi aset pemerintah dan masyarakat
- g. Belum Optimalnya pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat
- h. Belum optimalnya penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
- i. Belum optimalnya pengelolaan air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
- j. Belum optimalnya pembinaan jasa konstruksi
- k. Masih belum optimalnya penataan lingkungan dan bangunan
- l. Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra DPUPR Kota Tarakan Tahun 2025-2029

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam kurun waktu tahun 2025-2029 adalah “Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Perkotaan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang”.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diperoleh dari pencapaian outcome program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra DPUPR

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Baseline	TARGET TAHUN						KET.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	T-1 Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Perkotaan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		T-1 Indeks Kepuasan masyarakat	0	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	
S-5 Meningkatkan Pemenuhan infrastruktur dasar daerah		S-1 Meningkatnya pemenuhan cakupan pelayanan air minum bagi masyarakat	S-1 Persentase jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota (IKK)	83,21%	87,73%	89,92%	92,01%	93,99%	95,87%	97,64%	
		S-2 16 Juni : Berkurangnya lokasi banjir	S-2 Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (IKK)	66,12	68,37	74,56	79,90	84,80	86,45	88,17	
		S-3 Meningkatnya pemenuhan layanan sanitasi bagi masyarakat	S-3 Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	53,55%	54,00%	54,81%	55,57%	56,31%	57,01%	57,67%	
		S-4 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jalan kota	S-4 Tingkat Kematapan Jalan Kabupaten/ Kota	73,23 %	73,75%	74,28%	74,80%	75,32%	75,84%	76,36%	
S-6 Meningkatnya layanan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan		S-5 Meningkatnya pembangunan yang sesuai rencana tata ruang	S-5 Indeks Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Indikator Baru	84,05	85,08	86,05	87,08	88,05	89,08	
		S-6 16 Juni : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi	S-6 Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/ teknisi/ analis	63,88%	14,17%	29,92%	45,67%	61,42%	77,17%	92,91%	
S-10 Meningkatnya akuntabilitas kinerja		S-7 Meningkatnya tata kelola DPUPR 22 Juli : perubahan oleh Bappeda Meningkatnya tata kelola OPD	S-7 Nilai/ Predikat SAKIPOP	86,39/ A	87,13/ A	88,87/ A	89,61/ A	90,35/ A A	91,09/ A A	92,83/ A A	

Sumber: Hasil Analisis DPUPR, 2025

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Renstra DPUPR Kota Tarakan Tahun 2025-2029

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Terdapat 5 strategi yang digunakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemenuhan cakupan pelayanan air minum bagi masyarakat melalui:
 - Peningkatan akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum
 - Peningkatan Kapasitas Layanan Unit Air Baku
2. Berkurangnya lokasi banjir melalui:
 - Peningkatan layanan pengendalian banjir
 - Peningkatan kinerja layanan drainase lingkungan
3. Meningkatnya pemenuhan layanan sanitasi bagi masyarakat melalui:
 - Peningkatan kinerja pelayanan pengelolaan air limbah bagi masyarakat
 - Peningkatan pemenuhan fasilitas pengelolaan sampah
4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jalan kota melalui :
 - Peningkatan kinerja penyelenggaraan jalan kota
5. Meningkatnya pembangunan yang sesuai rencana tata ruang melalui:
 - Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang
 - Peningkatan kawasan bangunan dan lingkungan yang tertata
 - Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung yang memenuhi standar teknis
6. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi melalui :
 - Peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi

7. Meningkatnya tata kelola DPUPR melalui :
- Peningkatan penguatan internal akuntabilitas kinerja
 - Peningkatan kualitas layanan kesekretariatan

Strategi dan penahapan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam 5 (lima) tahun mendatang dicantumkan pada tabel 3. 2 dan table 3. 3 berikut ini.

Tabel 3. 2
Strategi Renstra DPUPR Kota Tarakan
Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Perkotaan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatnya pemenuhan cakupan pelayanan air minum bagi masyarakat	Peningkatan akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum
		Peningkatan Kapasitas Layanan Unit Air Baku
	Berkurangnya lokasi banjir	Peningkatan layanan pengendalian banjir
		Peningkatan kinerja layanan drainase lingkungan
	Meningkatnya pemenuhan layanan sanitasi bagi masyarakat	Peningkatan kinerja pelayanan pengelolaan air limbah bagi masyarakat
		Peningkatan pemenuhan fasilitas pengelolaan sampah
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jalan kota	Peningkatan kinerja penyelenggaraan jalan kota
	Meningkatnya pembangunan yang sesuai rencana tata ruang	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang
		Peningkatan kawasan bangunan dan lingkungan yang tertata
		Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung yang memenuhi standar teknis
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi	Peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi
	Meningkatnya tata kelola DPUPR	Peningkatan penguatan internal akuntabilitas kinerja
		Peningkatan kualitas layanan kesekretariatan

Sumber: Hasil Analisis DPUPR, 2025

Tabel 3. 3
Penahapan Renstra DPUPR Kota Tarakan
Tahun 2025-2029

TAHAP 1	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perluasan program pemenuhan layanan infrastruktur dasar dan hunian layak serta pembangunan kawasan pemerintahan terpadu	Perluasan program pemenuhan layanan infrastruktur dasar dan hunian layak serta pembangunan kawasan pemerintahan terpadu	Perluasan program pemenuhan layanan infrastruktur dasar dan hunian layak serta pembangunan kawasan pemerintahan terpadu	Peningkatan layanan infrastruktur dasar dan hunian layak yang berkelanjutan	Peningkatan layanan infrastruktur dasar dan hunian layak yang berkelanjutan

Sumber: Hasil Analisis DPUPR, 2025

Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2. Pelaksanaan Pembangunan Unit Layanan Air Baku
3. Penyediaan pelayanan pengendalian banjir
4. Penyediaan layanan pengelolaan drainase lingkungan
5. Penyelenggaraan pelayanan pengelolaan air limbah bagi masyarakat
6. Peningkatan ketersediaan layanan pengolahan sampah
7. Peningkatan penyelenggaraan jalan dan jembatan kota
8. Peningkatan kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi
9. Peningkatan Penataan Bangunan dan Lingkungan
10. Peningkatan Bangunan Gedung yang memenuhi standar teknis
11. Peningkatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang
12. Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Tata Kelola Pemerintahan

Tabel 3. 4
Arah Kebijakan Renstra DPUPR Kota Tarakan Tahun 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	- Permen PU dan Perumahan Rakyat No. 13 Th. 2023 ttg Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat	1. Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur 2. Penguatan Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Handal	Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
	- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air - PP Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air - PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai		Pelaksanaan Pembangunan Unit Layanan Air Baku	
			Penyediaan pelayanan pengendalian banjir	
	- Permen PU dan Perumahan Rakyat No. 13 Th. 2023 ttg Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat		Penyediaan layanan pengelolaan drainase lingkungan	
			Penyelenggaraan pelayanan pengelolaan air limbah bagi masyarakat	
			Peningkatan ketersediaan layanan pengolahan sampah	
	- PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan		Peningkatan penyelenggaraan jalan dan jembatan kota	
	- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang		Peningkatan kinerja penyelenggaran jasa konstruksi	
	- PP no.16 th. 2021 ttg Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Th. 2002 ttg Bangunan Gedung		Peningkatan Penataan Bangunan dan Lingkungan	
			Peningkatan Bangunan Gedung yang memenuhi standar teknis	
	- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang		Peningkatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang	
		Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	
			Peningkatan dokumen administrasi keuangan sesuai SAP	
			Peningkatan kinerja dan kompetensi ASN	
			Peningkatan Layanan Administrasi Umum	
			Peningkatan pendataan Barang Milik Daerah	
			Peningkatan Layanan Jasa Penunjang	
			Peningkatan Pendataan barang Milik Daerah	

Sumber: Hasil Analisis DPUPR, 2025

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Perumusan, Rencana Pendanaan dan Sub Kegiatan Prioritas

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategi pemerintah Kota Tarakan dengan tetap mengacu pada RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029.

Program kegiatan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*). Dimana penyusunan program kegiatan dan sub kegiatan menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen pada instansi untuk pencapaian pada tahun tertentu. Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 1
Perumusan Renstra DPUPR Kota Tarakan Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	T-1 Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Perkotaan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				T-1 Indeks Kepuasan masyarakat		KADIS
S-5 Meningkatnya Pemenuhan infrastruktur dasar daerah		S-1 Meningkatnya pemenuhan cakupan pelayanan air minum bagi masyarakat			S-1 Persentase jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota (IKK)		KADIS
			OC-1.1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum		OC-1.1 Persentase peningkatan layanan air minum melalui jaringan perpipaan	1.03.03 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	KABID CKPR
				OT-1.1.1 Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	OT-1.1.1 Jumlah SR yang terpasang (akumulasi)	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	JF CKPR
				OT-1.1.1.5 Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	OT-1.1.1.5 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	JF CKPR
				OT-1.1.1.1 Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	OT-1.1.1.1 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	JF CKPR
				OT-1.1.1.2 Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	OT-1.1.1.2 Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	JF CKPR
				OT-1.1.1.4 Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	OT-1.1.1.4 Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	1.03.03.2.01.0031 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	JF CKPR
				OT-1.1.1.3 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	OT-1.1.1.3 Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	JF CKPR
			OC-1.2 Meningkatnya Kapasitas Layanan Unit Air Baku		OC-1.2 Rasio produksi unit air baku terhadap ketersediaan air baku	1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	KABID PSDA
				OT-1.2.1 Terlaksananya Pembangunan Unit Layanan Air Baku	OT-1.2.1 Debit air baku yang tersedia	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	JF PSDA
				OT-1.2.1.2 Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	OT-1.2.1.2 Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	1.03.02.2.01. 0101 Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	JF PSDA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				OT-1.2.1.4 Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	OT-1.2.1.4 Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	1.03.02.2.01.0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	JF PSDA
				OT-1.2.1.1 Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya	OT-1.2.1.1 Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1.03.02.2.01.0121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	JF PSDA
				OT-1.2.1.3 Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	OT-1.2.1.3 Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	1.03.02.2.01.0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	JF PSDA
				OT-1.2.1.5 Terehabilitasinya embung	OT-1.2.1.5 Jumlah Embung yang Direhabilitasi	1.03.02.2.01.0129 Rehabilitasi Embung	JF PSDA
		S-2 Berkurangnya lokasi banjir			S-2 Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (IKK)		KADIS
			OC-2.1 Meningkatnya layanan pengendalian banjir		OC-2.1 Luas genangan yang tertangani (ha)	1.03.06 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	KABID PSDA
				OT-2.1.1 Terlaksananya pelayanan pengendalian banjir	OT-2.1.1 Jumlah titik banjir yang tertangani	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	JF PSDA
				OT-2.1.1.2 Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	OT-2.1.1.2 Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	JF PSDA
				OT-2.1.1.1 Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	OT-2.1.1.1 Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	JF PSDA
				OT-2.1.1.3 Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	OT-2.1.1.3 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	JF PSDA
			OC-2.2 Meningkatnya kinerja layanan drainase lingkungan		OC-2.2 Persentase panjang drainase lingkungan dengan kondisi baik	1.03.06 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	KABID CKPR
				OT-2.2.1 Terlaksananya layanan pengelolaan drainase lingkungan	OT-2.2.1 Panjang drainase lingkungan dengan kondisi baik	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	JF CKPR
				OT-2.2.1.1 Teroptimalisasinya Sistem Drainase Lingkungan	OT-2.2.1.1 Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	1.03.06.2.01.0020 Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan	JF CKPR
		S-3 Meningkatnya pemenuhan layanan sanitasi bagi masyarakat			S-3 Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik		KADIS

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			OC-3.1 Meningkatnya kinerja pelayanan pengelolaan air limbah bagi masyarakat		OC-3.1 Persentase peningkatan rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	1.03.05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	KABID CKPR
				OT-3.1.1 Terselenggaranya pelayanan pengelolaan air limbah bagi masyarakat	OT-3.1.1 Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	JF Air Limbah
				OT-3.1.1.5 Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	OT-3.1.1.5 Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi	1.03.05.2.01.0029 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	JF CKPR
				OT-3.1.1.1 Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	OT-3.1.1.1 Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	1.03.05.2.01.0033 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	JF CKPR
				OT-3.1.1.6 Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	OT-3.1.1.6 Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	1.03.05.2.01.0036 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	JF CKPR
				OT-3.1.1.3 Tersedianya Unit pengolahan setempat	OT-3.1.1.3 Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	1.03.05.2.01.0044 Penyediaan Unit pengolahan setempat	JF CKPR
				OT-3.1.1.2 Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	OT-3.1.1.2 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1.03.05.2.01.0045 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	JF CKPR
				OT-3.1.1.4 Tersedianya Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	OT-3.1.1.4 Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Toilet dan Tangki Septik sesuai dengan standar	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	JF CKPR
			OC-3.2 Meningkatnya pemenuhan fasilitas pengelolaan sampah		OC-3.2 Persentase ketersediaan layanan pengolahan sampah (TPS3R)	1.03.04 Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	KABID CKPR
				OT-3.2.1 Meningkatnya ketersediaan layanan pengolahan sampah	OT-3.2.1 Jumlah layanan pengolahan sampah yang tersedia	1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	JF Persampahan
				OT-3.2.1.1 Teroptimalisasinya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	OT-3.2.1.1 Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	1.03.04.2.01.0016 Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	JF CKPR
				OT-3.2.1.2 Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R	OT-3.2.1.2 Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	CKPR
		S-4 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jalan kota			S-4 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota		KADIS
			OC-4.1 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan jalan kota		OC-4.1 1. Persentasi jalan dan jembatan dengan kondisi baik 2. Persentasi jalan dan jembatan dengan kondisi sedang	1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan	KABID BM

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					3. Persentasi jalan dan jembatan dengan kondisi rusak 4. Persentasi jalan dan jembatan dengan kondisi rusak berat		
				OT-4.1.1 Terlaksananya penyelenggaraan jalan dan jembatan kota	OT-4.1.1 Rekapitulasi panjang jalan & jembatan yang dipelihara, direkonstruksi dan dibangun	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	JF BM
				OT-4.1.1.1 Terkelolanya Leger Jalan	OT-4.1.1.1 Terkelolanya Leger Jalan	1.03.10.2.01.0028 Pengelolaan Leger Jalan	JF BM
				OT-4.1.1.2 Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	OT-4.1.1.2 Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	JF BM
				OT-4.1.1.3 Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	OT-4.1.1.3 Panjang Jalan/Jembatan yang di survey	1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	JF BM
				OT-4.1.1.9 Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	OT-4.1.1.9 Panjang Jalan yang dipelihara secara rutin	1.03.10.2.01.0051 Pemeliharaan Rutin Jalan	JF BM
				OT-4.1.1.4 Terlaksananya Pembangunan Jalan	OT-4.1.1.4 Panjang Jalan yang Dibangun	1.03.10.2.01.0053 Pembangunan Jalan	JF BM
				OT-4.1.1.7 Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	OT-4.1.1.7 Panjang Jalan yang terpelihara Berkala	1.03.10.2.01.0056 Pemeliharaan Berkala Jalan	JF BM
				OT-4.1.1.8	OT-4.1.1.8 Panjang Jembatan yang di rehabilitasi	1.03.10.2.01.0058 Rehabilitasi Jembatan	JF BM
				OT-4.1.1.6 Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	OT-4.1.1.6 Panjang Jalan yang di rekonstruksi	1.03.10.2.01.0059 Rekonstruksi Jalan	JF BM
				OT-4.1.1.5 Terlaksananya Pembangunan Jembatan	OT-4.1.1.5 Panjang Jembatan yang di bangun	1.03.10.2.01.0069 Pembangunan Jembatan	JF BM
S-6 Meningkatnya layanan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan		S-5 Meningkatnya pembangunan yang sesuai rencana tata ruang			S-5 Indeks Kesesuaian Pemanfaatan Ruang		KADIS
				OC-5.1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	OC-5.1 Persentase Kepatuhan Pelaksanaan KKPR	1.03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	KABID CKPR
				OT-5.1.1 Terselenggaranya pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang	OT-5.1.1 dokumen rencana tata ruang yang ditetapkan menjadi Perda/Perkada 16 juni : Jumlah rencana tata ruang yang Ditetapkan	1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	JF Tata Ruang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				OT-5.1.1.1 Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	OT-5.1.1.1 Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	JF CKPR
				OT-5.1.1.2 Terpenuhiya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	OT-5.1.1.2 Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.0005 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	JF CKPR
				OT-5.1.1.3 Terpenuhiya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	OT-5.1.1.3 Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	JF CKPR
				OT-5.1.1.4 Terpenuhiya dokumen persyaratan untuk rapat koordinasi lintas sektor	OT-5.1.1.4 dokumen persyaratan untuk melaksanakan rapat koordinasi lintas sektor	1.03.12.2.01.0008 Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota	JF CKPR
				OT-5.1.1.5 Terpenuhiya dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	OT-5.1.1.5 dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	1.03.12.2.01.0009 Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	JF CKPR
				OT-5.1.1.6 Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	OT-5.1.1.6 Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.0010 Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	JF CKPR
				OT-5.1.1.7 Tersedianya Perda RTRW Kabupaten/Kota	OT-5.1.1.7 Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.0011 Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	JF CKPR
				OT-5.1.1.8 Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	OT-5.1.1.8 Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1.03.12.2.01.0013 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	JF CKPR
				OT-5.1.2 Terselenggaranya pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang	OT-5.1.2 Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang yang disusun	1.03.12.2.02 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	JF Tata Ruang
				OT-5.1.2.1 Tersedianya orthorektifikasi citra dari raw citra ke format ECW dan tersedianya data SHP Peta Dasar	OT-5.1.2.1 Jumlah data SHP Peta Dasar	1.03.12.2.02.0004 Penyusunan Peta Dasar	JF CKPR
				OT-5.1.2.2 Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	OT-5.1.2.2 Jumlah Dokumen Materi Teknis RDTR	1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	JF CKPR
				OT-5.1.2.3 Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM perencana tata ruang	OT-5.1.2.3 Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	1.03.12.2.02.0006 Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	JF CKPR
				OT-5.1.2.4 Tersedianya materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	OT-5.1.2.4 Jumlah materi teknis, ranperda RTRW Kabupaten/Kota dan KLHS RTRW	1.03.12.2.02.0007 Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	JF CKPR
				OT-5.1.3 Terselenggaranya pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang	OT-5.1.3 Jumlah Dokumen KKPR yang diterbitkan	1.03.12.2.03 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	JF Tata Ruang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				OT-5.1.3.1 Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antar pemangku kepentingan	OT-5.1.3.1 Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1.03.12.2.03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	JF CKPR
				OT-5.1.3.1 Terlayannya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	OT-5.1.3.1 Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	1.03.12.2.03.0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	JF CKPR
				OT-5.1.3.2 Tersedianya dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	OT-5.1.3.2 Jumlah dokumen SPPR	1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	JF CKPR
				OT-5.1.3.3 Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	OT-5.1.3.3 Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1.03.12.2.03.0007 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	JF CKPR
				OT-5.1.4 Terselenggaranya pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang	OT-5.1.4 16 Juni : Jumlah Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	JF Tata Ruang
				OT-5.1.4.1 Terlaksananya Audit Tata Ruang	OT-5.1.4.1 Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	1.03.12.2.04.0006 Pelaksanaan Audit Tata Ruang	JF CKPR
				OT-5.1.4.2 Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif	OT-5.1.4.2 Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	1.03.12.2.04.0007 Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	JF CKPR
				OT-5.1.4.3 Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	OT-5.1.4.3 Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1.03.12.2.04.0008 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	JF CKPR
				OT-5.1.4.4 Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	OT-5.1.4.4 Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	1.03.12.2.04.0009 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	JF CKPR
				OT-5.1.4.5 Terlaksananya Penilaian Perwujudan RTR	OT-5.1.4.5 Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	1.03.12.2.04.0012 Penilaian Perwujudan RTR	JF CKPR
				OT-5.1.4.6 Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	OT-5.1.4.6 Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penataan ruang	1.03.12.2.04.0013 Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	JF CKPR
				OT-5.1.4.7 Terlaksananya Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	OT-5.1.4.7 Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	1.03.12.2.04.0014 Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	JF CKPR
			OC-5.2 Peningkatan kawasan bangunan dan lingkungan yang tertata		OC-5.2 Persentase Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan yang sesuai rencana penataan bangunan dan lingkungan	1.03.09 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	KABID CKPR
				OT-5.2.1 Terselenggaranya Penataan Bangunan dan Lingkungan	OT-5.2.1 Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	JF Bangunan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				OT-5.2.1.1 Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	OT-5.2.1.1 Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	JF CKPR
				OT-5.2.1.2 Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	OT-5.2.1.2 Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	1.03.09.2.01.0011 Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	JF CKPR
				OT-5.2.1.3 Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan penataan dan lingkungan	OT-5.2.1.3 Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	1.03.09.2.01.0012 Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	JF CKPR
						1.03.09.2.01.0007 Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	JF CKPR
						1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	JF CKPR
			OC-5.3 Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung yang memenuhi standar teknis		OC-5.3 Persentase Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung yang memenuhi standar teknis	1.03.08 Program Penataan Bangunan Gedung	KABID CKPR
				OT-5.3.1 Tersedianya Bangunan Gedung yang memenuhi standar teknis	OT-5.3.1 Jumlah Bangunan Gedung yang Terbangun dan Terpelihara	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	JF Bangunan
				OT-5.3.1.1 Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala	OT-5.3.1.1 Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	JF CKPR
				OT-5.3.1.2 Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	OT-5.3.1.2 Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	JF CKPR
				OT-5.3.1.3 Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	OT-5.3.1.3 Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	JF CKPR
		S-6 16 Juni : Meningkatnya kualitas penyelenggaran jasa konstruksi			S-6 Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/tekhnisi/ analis		KADIS
			OC-6.1 Meningkatnya kinerja penyelenggaran jasa konstruksi		OC-6.1 Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi (IKK)	1.03.11 Program Pengembangan Jasa Konstruksi	KABID BM

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				OT-6.1.1 Terselenggaranya pembinaan jasa konstruksi	OT-6.1.1 Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang terlatih	1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	JF Jakon
				OT-6.1.1.1 Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	OT-6.1.1.1 Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Seksi Jakon
				OT-6.1.1.3 Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	OT-6.1.1.3 Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	1.03.11.2.01.0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Seksi Jakon
				OT-6.1.1.4 Tersedianya Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	OT-6.1.1.4 Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	1.03.11.2.01.0012 Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Seksi Jakon
				OT-6.1.1.5 Tersedianya SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	OT-6.1.1.5 Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan	1.03.11.2.01.0015 Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Seksi Jakon
				OT-6.1.2 Terselenggaranya pembinaan jasa konstruksi	OT-6.1.2 Jumlah sistem informasi jasa konstruksi yang tersedia	1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	JF Jakon
				OT-6.1.2.1 Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	OT-6.1.2.1 Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1.03.11.2.02.0012 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Seksi Jakon
				OT-6.1.2.2 Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	OT-6.1.2.2 Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kota	1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Seksi Jakon
				OT-6.1.2.3 Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	OT-6.1.2.3 Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1.03.11.2.02.0014 Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Seksi Jakon
				OT-6.1.2.4 Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	OT-6.1.2.4 Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1.03.11.2.02.0015 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Seksi Jakon
				OT-6.1.3 Terselenggaranya pembinaan jasa konstruksi	OT-6.1.3 Jumlah dokumen Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	JF Jakon
				OT-6.1.3.1 Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	OT-6.1.3.1 Jumlah kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi yang terlaksana	1.03.11.2.04.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Seksi Jakon
				OT-6.1.3.2 Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	OT-6.1.3.2 Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	1.03.11.2.04.0005 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Seksi Jakon
				OT-6.1.3.3 Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	OT-6.1.3.3 Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	1.03.11.2.04.0006 Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Seksi Jakon

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				OT-6.1.3.4 Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha	OT-6.1.3.4 Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	1.03.11.2.04.0007 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Seksi Jakon
				OT-6.1.3.5 Tersusunnya Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	OT-6.1.3.5 Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	1.03.11.2.04.0010 Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Seksi Jakon
S-10 Meningkatkan akuntabilitas kinerja		S-7 Meningkatnya tata kelola DPUPR 22 Juli : perubahan oleh Bappeda Meningkatnya tata kelola OPD			S-7 Nilai/Predikat SAKIP OPD		KADIS
			OC-7.1 Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja		OT-7.1 Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti	1.03.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretaris
				OT-7.1.1 Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	OT-7.1.1 Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kasubbag PRK
				OT-7.1.1.1 Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	OT-7.1.1.1 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kasubbag PRK
				OT-7.1.1.2 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	OT-7.1.1.2 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.03.01.2.01.0007Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kasubbag PRK
				OT-7.1.1.3 Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	OT-7.1.1.3 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1.03.01.2.01.0008Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kasubbag PRK
				OT-7.1.2 Tersedianya dokumen administrasi keuangan sesuai SAP	OT-7.1.2 Laporan Keuangan sesuai SAP	1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kasubbag PRK
				OT-7.1.2.1 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	OT-7.1.2.1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kasubbag PRK
				OT-7.1.2.2 Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	OT-7.1.2.2 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.03.01.2.02.0002Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kasubbag PRK
			OC-7.2 Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan		OC-7.2 Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	1.03.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sekretaris
				OT-7.2.1 Meningkatnya kinerja dan kompetensi ASN	OT-7.2.1 Rasio peningkatan kompetensi ASN	1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Kasubbag Umum
				OT-7.2.1.1 Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	OT-7.2.1.1 Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1.03.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kasubbag Umum
				OT-7.2.1.2 Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	OT-7.2.1.2 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kasubbag Umum
				OT-7.2.1.3 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	OT-7.2.1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kasubbag Umum

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				OT-7.2.2 Tersedianya Layanan Administrasi Umum	OT-7.2.2 Presentase Layanan Administrasi Umum yang Tersedia	1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kasubbag Umum
				OT-7.2.2.1 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	OT-7.2.2.1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kasubbag Umum
				OT-7.2.2.2 Tersedianya Bahan Logistik Kantor	OT-7.2.2.2 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kasubbag Umum
				OT-7.2.2.3 Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	OT-7.2.2.3 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kasubbag Umum
				OT-7.2.2.4 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	OT-7.2.2.4 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kasubbag Umum
				OT-7.2.3 Terkelolanya pendataan Barang Milik Daerah	OT-7.2.3 Jumlah barang yang terinventarisasi	1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kasubbag Umum
				OT-7.2.3.1 Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	OT-7.2.3.1 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1.03.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kasubbag Umum
				OT-7.2.3.2 Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	OT-7.2.3.2 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kasubbag Umum
				OT-7.2.3.3 Tersedianya Alat Besar	OT-7.2.3.3 Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1.03.01.2.07.0003 Pengadaan Alat Besar	Kasubbag Umum
				OT-7.2.3.4 Tersedianya Mebel	OT-7.2.3.4 Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Kasubbag Umum
				OT-7.2.3.6 Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OT-7.2.3.6 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kasubbag Umum
				OT-7.2.4 Tersedianya Layanan Jasa Penunjang	OT-7.2.4 Presentase Layanan Jasa Penunjang yang Tersedia	1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Kasubbag Umum
				OT-7.2.4.1 Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	OT-7.2.4.1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kasubbag Umum
				OT-7.2.4.2 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	OT-7.2.4.2 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kasubbag Umum
				OT-7.2.5 Terkelolanya Pendataan barang Milik Daerah	OT-7.2.5 Jumlah barang yang terinventarisasi	1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubbag Umum
				OT-7.2.5.1 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	OT-7.2.5.1 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kasubbag Umum

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				OT-7.2.5.2 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	OT-7.2.5.2 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kasubbag Umum
				OT-7.2.5.3 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	OT-7.2.5.3 Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kasubbag Umum
				OT-7.2.5.5 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	OT-7.2.5.5 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kasubbag Umum
				OT-7.2.5.6 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OT-7.2.5.6 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kasubbag Umum
				OT-7.2.6 Tersedianya Laporan Uji Bahan Konstruksi	OT-7.2.5 Jumlah Laporan Uji Bahan Konstruksi	1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ka. UPT
				OT-7.2.3.5 Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	OT-7.2.3.5 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabag Umum UPT
				OT-7.2.7 Tersedianya Laporan Alat Laboratorium yang Terkalibrasi dan Terakreditasi	OT-7.2.5 Jumlah Alat Laboratorium yang terkalibrasi dan terakreditasi	1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ka. UPT
				OT-7.2.5.4 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	OT-7.2.5.4 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabag Umum UPT

Sumber: Hasil Analisis DPUPR, 2025

Tabel 4. 2
Rencana Pendanaan Renstra DPUPR Kota Tarakan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				342.184.254.783,00		419.434.879.923,00		357.109.021.130,00		141.693.253.730,00		142.167.299.771,00		
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				14.650.665.718,00		14.896.472.358,00		14.411.296.898,00		13.633.804.498,00		13.633.804.498,00		
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	84,00	86,00	3.942.827.800,00	87,00	4.188.634.440,00	88,00	3.703.458.980,00	89,00	2.925.966.580,00	90,00	2.925.966.580,00	1.03.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				187.100.000,00		134.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatnya kinerja dan kompetensi ASN	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	85	187.100.000,00	85	134.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20	10		10		10		10		6			
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	2											
1.03.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				10.600.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	2	10.600.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				76.500.000,00		34.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	85	76.500.000,00	85	34.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
1.03.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	6	100.000.000,00		
1.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				284.175.720,00		278.175.720,00		278.175.720,00		278.175.720,00		278.175.720,00		
Tersedianya Layanan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)		1	284.175.720,00	1	278.175.720,00	1	278.175.720,00	1	278.175.720,00	1	278.175.720,00		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	45	47		47		47		47		47			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6	5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	3		3		3		3		3			
	1.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00		
1.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				110.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	45	47	110.000.000,00	47	130.000.000,00	47	130.000.000,00	47	130.000.000,00	47	130.000.000,00		
1.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				63.000.000,00		37.000.000,00		37.000.000,00		37.000.000,00		37.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6	5	63.000.000,00	5	37.000.000,00	5	37.000.000,00	5	37.000.000,00	5	37.000.000,00		
1.03.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)		1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00		
1.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.175.720,00		100.175.720,00		100.175.720,00		100.175.720,00		100.175.720,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20	13	100.175.720,00	13	100.175.720,00	13	100.175.720,00	13	100.175.720,00	13	100.175.720,00		
1.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.526.667.760,00		1.464.668.200,00		1.050.028.600,00		239.475.000,00		239.475.000,00		
Terkelolanya pendataan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	5	1.451.667.760,00	5	1.364.668.200,00		950.028.600,00		139.475.000,00		139.475.000,00		
	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	0			1									
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2	1				1							
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1											
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	13				13		11		11			11
1.03.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				655.087.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	655.087.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2	1	650.000.000,00	1	0,00	1	792.000.000,00		0,00		0,00		
1.03.01.2.07.0003 - Pengadaan Alat Besar				0,00		1.200.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	0		0,00	1	1.200.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
1.03.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				17.500.000,00		17.500.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	5	17.500.000,00	5	17.500.000,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.03.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				129.080.760,00		147.168.200,00		158.028.600,00		139.475.000,00		139.475.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	13	129.080.760,00	13	147.168.200,00	11	158.028.600,00	11	139.475.000,00	11	139.475.000,00		
Tersedianya Laporan Uji Bahan Konstruksi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	12	29	75.000.000,00	29	100.000.000,00	29	100.000.000,00	29	100.000.000,00	29	100.000.000,00		
1.03.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				75.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	12	29	75.000.000,00	29	100.000.000,00	29	100.000.000,00	29	100.000.000,00	29	100.000.000,00		
1.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				200.500.000,00		200.500.000,00		200.500.000,00		200.500.000,00		200.500.000,00		
Tersedianya Layanan Jasa Penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	200.500.000,00	12	200.500.000,00	12	200.500.000,00	12	200.500.000,00	12	200.500.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
1.03.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00		
1.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00		
1.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.744.384.320,00		2.111.290.520,00		2.074.754.660,00		2.107.815.860,00		2.107.815.860,00		
Terkelolanya Pendataan barang Milik Daerah	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	0	3	1.644.384.320,00	4	2.011.290.520,00	4	1.969.754.660,00	4	1.977.815.860,00	4	1.977.815.860,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0		1		0		0		0			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	41	20		22		21		18		18			
1.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
1.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.353.931.720,00		1.135.931.720,00		1.194.435.860,00		1.194.435.860,00		1.194.435.860,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	26	16	1.353.931.720,00	16	1.135.931.720,00	16	1.194.435.860,00	15	1.194.435.860,00	15	1.194.435.860,00		
1.03.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				275.812.600,00		759.948.800,00		759.948.800,00		770.000.000,00		770.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya (Unit)	0	3	275.812.600,00	4	759.948.800,00	4	759.948.800,00	4	770.000.000,00	4	770.000.000,00		
1.03.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				13.640.000,00		14.410.000,00		14.370.000,00		12.380.000,00		12.380.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	41	20	13.640.000,00	22	14.410.000,00	21	14.370.000,00	18	12.380.000,00	18	12.380.000,00		
Tersedianya Alat Laboratorium yang Terkalibrasi dan Terakreditasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	45	100.000.000,00	45	100.000.000,00	45	105.000.000,00	50	130.000.000,00	50	130.000.000,00		
1.03.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000,00		100.000.000,00		105.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12	45	100.000.000,00	45	100.000.000,00	45	105.000.000,00	50	130.000.000,00	50	130.000.000,00		
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	10.707.837.918,00	100	10.707.837.918,00	100	10.707.837.918,00	100	10.707.837.918,00	100	10.707.837.918,00		
1.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	4		4		4		4		3			
1.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00		
1.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	3	2.000.000,00		
1.03.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.698.837.918,00		10.698.837.918,00		10.698.837.918,00		10.698.837.918,00		10.698.837.918,00		
Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	10.698.837.918,00	12	10.698.837.918,00	12	10.698.837.918,00	12	10.698.837.918,00	12	10.698.837.918,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	74	84		84		84		84		84			
1.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.812.638.644,00		9.812.638.644,00		9.812.638.644,00		9.812.638.644,00		9.812.638.644,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	74	84	9.812.638.644,00	84	9.812.638.644,00	84	9.812.638.644,00	84	9.812.638.644,00	84	9.812.638.644,00		
1.03.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				886.199.274,00		886.199.274,00		886.199.274,00		886.199.274,00		886.199.274,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	886.199.274,00	12	886.199.274,00	12	886.199.274,00	12	886.199.274,00	12	886.199.274,00		
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				12.100.000.000,00		17.600.000.000,00		21.450.000.000,00		22.280.000.000,00		23.180.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Layanan Unit Air Baku	Rasio produksi unit air baku terhadap ketersediaan air baku (Rasio)	1,33	1,46	12.100.000.000,00	1,65	17.600.000.000,00	1,72	21.450.000.000,00	1,90	22.280.000.000,00	1,88	23.180.000.000,00		
1.03.02.2.01 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				12.100.000.000,00		17.600.000.000,00		21.450.000.000,00		22.280.000.000,00		23.180.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)	0	1		0		0		0		0			
	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)	12	4		5		3		1		1			
	Jumlah Embung yang Direhabilitasi (Unit)	1	2		2		2		2		2			
	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM)	0	4,8		4,0		4,0		4,0		4,8			
1.03.02.2.01.0101 - Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing				1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		
Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan (KM)	0	4,8	1.500.000.000,00	4,0	1.500.000.000,00	4,0	3.000.000.000,00	4,0	3.000.000.000,00	4,8	3.000.000.000,00		
1.03.02.2.01.0120 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai				750.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dokumen)	0	1	750.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.03.02.2.01.0121 - Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya				8.770.000.000,00		14.900.000.000,00		17.750.000.000,00		18.580.000.000,00		19.080.000.000,00		
Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)	12	4	8.770.000.000,00	5	14.900.000.000,00	3	17.750.000.000,00	1	18.580.000.000,00	1	19.080.000.000,00		
1.03.02.2.01.0128 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya				480.000.000,00		1.000.000.000,00		300.000.000,00		100.000.000,00		500.000.000,00		
Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun (Dokumen)	2	5	480.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	300.000.000,00	1	100.000.000,00	1	500.000.000,00		
1.03.02.2.01.0129 - Rehabilitasi Embung				600.000.000,00		200.000.000,00		400.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		
Terehabilitasinya embung	Jumlah Embung yang Direhabilitasi (Unit)	1	2	600.000.000,00	2	200.000.000,00	2	400.000.000,00	2	600.000.000,00	2	600.000.000,00		
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		4.740.000.000,00		4.740.000.000,00		5.000.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase peningkatan layanan air minum melalui jaringan perpipaan (%)	0	11,88	5.000.000.000,00	16,59	5.000.000.000,00	21,29	4.740.000.000,00	26,00	4.740.000.000,00	30,71	5.000.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	1	1	5.000.000.000,00	0	5.000.000.000,00	0	4.740.000.000,00	0	4.740.000.000,00	1	5.000.000.000,00		
	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	1.903	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (Unit)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)	0	0		1		0		0		0			
	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	0	0		0		0		0		0			
1.03.03.2.01.0022 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.03.03.2.01.0025 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				260.000.000,00		0,00		0,00		0,00		260.000.000,00		
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	1	1	260.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	260.000.000,00		
1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.03.03.2.01.0031 - Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				0,00		260.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi (Unit)	0	0	0,00	1	260.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				4.740.000.000,00		4.740.000.000,00		4.740.000.000,00		4.740.000.000,00		4.740.000.000,00		
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (SR)	1.903	1.000	4.740.000.000,00	1.000	4.740.000.000,00	1.000	4.740.000.000,00	1.000	4.740.000.000,00	1.000	4.740.000.000,00		
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				10.299.000.000,00		12.032.000.000,00		10.699.000.000,00		5.000.000.000,00		5.100.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Meningkatnya pemenuhan fasilitas pengelolaan sampah	Persentase ketersediaan layanan pengolahan sampah (%)	19,28	21,67	10.299.000.000,00	22,88	12.032.000.000,00	24,08	10.699.000.000,00	25,29	5.000.000.000,00	26,49	5.100.000.000,00		
1.03.04.2.01 - Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota				10.299.000.000,00		12.032.000.000,00		10.699.000.000,00		5.000.000.000,00		5.100.000.000,00		
	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari)	152,42	2,5		2,5		2,5		2,5		2,5			
1.03.04.2.01.0016 - Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Teroptimalisasinya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi (Unit)	3	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00		
1.03.04.2.01.0020 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R				9.899.000.000,00		11.632.000.000,00		10.299.000.000,00		4.600.000.000,00		4.700.000.000,00		
Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun (Ton/hari)	152,42	2,5	9.899.000.000,00	2,5	11.632.000.000,00	2,5	10.299.000.000,00	2,5	4.600.000.000,00	2,5	4.700.000.000,00		
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				5.600.000.000,00		7.175.000.000,00		5.500.000.000,00		5.200.000.000,00		5.400.000.000,00		
Meningkatnya kinerja pelayanan pengelolaan air limbah bagi masyarakat	Persentase peningkatan rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik (%)	0	4,10	5.600.000.000,00	8,20	7.175.000.000,00	12,30	5.500.000.000,00	16,40	5.200.000.000,00	20,49	5.400.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.05.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				5.600.000.000,00		7.175.000.000,00		5.500.000.000,00		5.200.000.000,00		5.400.000.000,00		
Terselenggaranya pelayanan pengelolaan air limbah bagi masyarakat	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	1	1	5.600.000.000,00	1	7.175.000.000,00	1	5.500.000.000,00	0	5.200.000.000,00	1	5.400.000.000,00		
	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit	0	400		400		400		400		400			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
	pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)														
	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Rumah Tangga)	67	50				50				50				50
	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi (Unit)	1	1				1				1				1
	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (M ³ /Hari)	0	0				1.021,24				0				0
1.03.05.2.01.0029 - Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman				200.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00			
Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi (Unit)	1	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00			
1.03.05.2.01.0033 - Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
1.03.05.2.01.0036 - Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)				200.000.000,00		1.575.000.000,00		0,00		0,00		0,00			
Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun (M ³ /Hari)	0	0	200.000.000,00	1.021,24	1.575.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			
1.03.05.2.01.0044 - Penyediaan Unit pengolahan setempat				5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00			
Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	0	400	5.000.000.000,00	400	5.000.000.000,00	400	5.000.000.000,00	400	5.000.000.000,00	400	5.000.000.000,00			
1.03.05.2.01.0045 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				200.000.000,00		400.000.000,00		200.000.000,00		0,00		200.000.000,00			
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	1	1	200.000.000,00	1	400.000.000,00	1	200.000.000,00	0	0,00	1	200.000.000,00			
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				52.959.605.626,00		58.432.321.126,00		52.180.029.460,00		33.117.635.710,00		31.617.158.730,00			
Meningkatnya kinerja layanan drainase lingkungan	Persentase panjang drainase lingkungan dengan kondisi baik (%)	75,77	79,95	5.800.000.000,00	80,65	4.225.000.000,00	81,62	5.800.000.000,00	82,45	5.000.000.000,00	83,45	6.000.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				52.959.605.626,00		58.432.321.126,00		52.180.029.460,00		33.117.635.710,00		31.617.158.730,00			
Tersedianya layanan pengelolaan drainase lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi (M)	62.139,62	2.900	5.800.000.000,00	2.113	4.225.000.000,00	2.900	5.800.000.000,00	2.500	5.000.000.000,00	3.000	6.000.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET			
			2026		2027		2028		2029		2030						
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU					
1.03.06.2.01.0020 - Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan				5.800.000.000,00		4.225.000.000,00		5.800.000.000,00		5.000.000.000,00		6.000.000.000,00					
Teroptimalisasinya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi (M)	62.139,62	2.900	5.800.000.000,00	2.113	4.225.000.000,00	2.900	5.800.000.000,00	2.500	5.000.000.000,00	3.000	6.000.000.000,00					
Meningkatnya layanan pengendalian banjir	Luas genangan yang tertangani (Hektar)	101,41	114,36	47.159.605.626,00	122,55	54.207.321.126,00	130,07	46.380.029.460,00	132,59	28.117.635.710,00	135,23	25.617.158.730,00					
1.03.06.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				52.959.605.626,00		58.432.321.126,00		52.180.029.460,00		33.117.635.710,00		31.617.158.730,00					
Tersedianya pelayanan pengendalian banjir	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen)	1	2	47.159.605.626,00	1	54.207.321.126,00	0	46.380.029.460,00	0	28.117.635.710,00	0	25.617.158.730,00					
	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	0	9				10		7					5		5	
1.03.06.2.01.0028 - Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan				12.125.600.000,00		5.115.000.000,00		4.000.000.000,00		5.450.000.000,00		5.950.000.000,00					
Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	0	8	12.125.600.000,00	7	5.115.000.000,00	5	4.000.000.000,00	5	5.450.000.000,00	5	5.950.000.000,00					
1.03.06.2.01.0029 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan				34.834.005.626,00		48.892.321.126,00		42.380.029.460,00		22.667.635.710,00		19.667.158.730,00					
	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	0	9	34.834.005.626,00	10	48.892.321.126,00	7	42.380.029.460,00	5	22.667.635.710,00	5	19.667.158.730,00					
1.03.06.2.01.0030 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan				200.000.000,00		200.000.000,00		0,00		0,00		0,00					
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen)	1	2	200.000.000,00	1	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00					
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				149.195.752.813,00		199.036.252.813,00		156.045.752.813,00		10.244.252.813,00		10.724.252.813,00					
Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung yang memenuhi standar teknis	Persentase Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung yang memenuhi standar teknis (%)	466,67	21,88	149.195.752.813,00	39,06	199.036.252.813,00	59,38	156.045.752.813,00	79,69	10.244.252.813,00	100,00	10.724.252.813,00	1.03.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1.03.08.2.01 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				149.195.752.813,00		199.036.252.813,00		156.045.752.813,00		10.244.252.813,00		10.724.252.813,00					
Tersedianya Bangunan Gedung yang memenuhi standar teknis	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)	2	4	149.195.752.813,00	4	199.036.252.813,00	4	156.045.752.813,00	4	10.244.252.813,00	4	10.724.252.813,00					
	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	136	23				16				57			22		22	
	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis	251	350				350				350			350		350	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	(TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)													
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan Gedung)	2	4	800.000.000,00	4	800.000.000,00	4	800.000.000,00	4	800.000.000,00	4	800.000.000,00		
1.03.08.2.01.0021 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				147.795.752.813,00		197.636.252.813,00		154.645.752.813,00		8.844.252.813,00		9.324.252.813,00		
Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	136	23	147.795.752.813,00	16	197.636.252.813,00	57	154.645.752.813,00	22	8.844.252.813,00	22	9.324.252.813,00		
	1.03.08.2.01.0023 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG			600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		
Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dokumen)	251	350	600.000.000,00	350	600.000.000,00	350	600.000.000,00	350	600.000.000,00	350	600.000.000,00		
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				25.310.000.000,00		30.810.000.000,00		24.355.000.000,00		1.675.000.000,00		1.175.000.000,00		
Meningkatnya kawasan bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan yang sesuai rencana penataan bangunan dan lingkungan (%)	100,00	33,33	25.310.000.000,00	73,33	30.810.000.000,00	80,00	24.355.000.000,00	86,67	1.675.000.000,00	100,00	1.175.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.09.2.01 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				25.310.000.000,00		30.810.000.000,00		24.355.000.000,00		1.675.000.000,00		1.175.000.000,00		
Terselenggaranya penataan bangunan dan lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	25.310.000.000,00	1	30.810.000.000,00	1	24.355.000.000,00	2	1.675.000.000,00	0	1.175.000.000,00		
	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	3	5		6		3		1		1			
	Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan (Orang)	0	120		120		120		120		120			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	2	1.000.000.000,00	0	0,00		
1.03.09.2.01.0011 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota				24.635.000.000,00		30.135.000.000,00		23.680.000.000,00		500.000.000,00		1.000.000.000,00		
Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan (Kawasan)	3	5	24.635.000.000,00	6	30.135.000.000,00	3	23.680.000.000,00	1	500.000.000,00	1	1.000.000.000,00		
	1.03.09.2.01.0012 - Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan			175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan penataan dan lingkungan	Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan (Orang)	0	120	175.000.000,00	120	175.000.000,00	120	175.000.000,00	120	175.000.000,00	120	175.000.000,00		
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				63.889.305.626,00		71.212.908.626,00		64.538.016.959,00		42.662.635.709,00		43.197.158.730,00		
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan jalan kota	Persentasi jalan dan jembatan dengan kondisi sedang (%)	16,81	17,05	63.889.305.626,00	17,17	71.212.908.626,00	17,29	64.538.016.959,00	17,41	42.662.635.709,00	17,53	43.197.158.730,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Persentasi jalan dan jembatan dengan kondisi baik (%)	56,42	57,23		57,63		58,03		58,43		58,83			
	Persentasi jalan dan jembatan dengan kondisi rusak (%)	15,39	14,79		14,49		14,19		13,89		13,59			
	Persentasi jalan dan jembatan dengan kondisi rusak berat (%)	11,38	10,93		10,71		10,49		10,27		10,05			
1.03.10.2.01 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				63.889.305.626,00		71.212.908.626,00		64.538.016.959,00		42.662.635.709,00		43.197.158.730,00		
Terlaksananya penyelenggaraan jalan dan jembatan kota	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen)	0	1	63.889.305.626,00	1	71.212.908.626,00	1	64.538.016.959,00	1	42.662.635.709,00	1	43.197.158.730,00		
	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	232,558	233,272		233,272		233,272		233,272		233,272			
	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	0,6	2,80		0,73		1,07		0,67		0,62			
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	5,80	3,37		4,09		4,56		0,70		2,58			
	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	1,53	1		1		1		1		1			
	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	17,27	2,28		1,55		2,10		3,70		3,00			
	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	0	0		14		0		0		0			
1.03.10.2.01.0028 - Pengelolaan Leger Jalan				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terkelolanya Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola (Dokumen)	0	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00		
1.03.10.2.01.0029 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.03.10.2.01.0043 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan				350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	232,558	233,272	350.000.000,00	233,272	350.000.000,00	233,272	350.000.000,00	233,272	350.000.000,00	233,272	350.000.000,00		
1.03.10.2.01.0051 - Pemeliharaan Rutin Jalan				3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	1,53	1	3.000.000.000,00	1	3.000.000.000,00	1	3.000.000.000,00	1	3.000.000.000,00	1	3.000.000.000,00		
1.03.10.2.01.0053 - Pembangunan Jalan				27.709.157.047,00		31.400.000.000,00		29.706.720.996,00		10.750.337.244,00		10.000.000.000,00		
Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	0,6	2,80	27.709.157.047,00	0,73	31.400.000.000,00	1,07	29.706.720.996,00	0,67	10.750.337.244,00	0,62	10.000.000.000,00		
1.03.10.2.01.0056 - Pemeliharaan Berkala Jalan				9.823.026.968,00		14.395.584.882,00		16.153.729.842,00		2.190.584.152,00		11.362.086.464,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (KM)	5,80	3,37	9.823.026.968,00	4,09	14.395.584.882,00	4,56	16.153.729.842,00	0,70	2.190.584.152,00	2,58	11.362.086.464,00		
1.03.10.2.01.0058 - Rehabilitasi Jembatan				6.099.000.000,00		1.000.000.000,00		1.600.000.000,00		5.778.000.000,00		3.210.000.000,00		
Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi (Meter)	76	16	6.099.000.000,00	6	1.000.000.000,00	16	1.600.000.000,00	16	5.778.000.000,00	8	3.210.000.000,00		
1.03.10.2.01.0059 - Rekonstruksi Jalan				16.408.121.611,00		14.967.323.744,00		13.227.566.121,00		20.093.714.313,00		14.775.072.266,00		
Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	17,27	2,28	16.408.121.611,00	1,55	14.967.323.744,00	2,10	13.227.566.121,00	3,70	20.093.714.313,00	3,00	14.775.072.266,00		
1.03.10.2.01.0069 - Pembangunan Jembatan				0,00		5.600.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	0	0	0,00	14	5.600.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				950.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi	Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi (%)	100	100	950.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	1.03.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Terselenggaranya pembinaan jasa konstruksi	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan (Dokumen)	0	0	560.000.000,00	0	570.000.000,00	0	570.000.000,00	0	570.000.000,00	0	570.000.000,00		
	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan (Orang)	0	5		5		5		5		5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	0	30		30		30		30		30			
	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	0	150		150		150		150		150			
1.03.11.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis			360.000.000,00		370.000.000,00		370.000.000,00		370.000.000,00		370.000.000,00			
Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Orang)	0	150	360.000.000,00	150	370.000.000,00	150	370.000.000,00	150	370.000.000,00	150	370.000.000,00		
1.03.11.2.01.0011 - Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi			150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00			
Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	0	30	150.000.000,00	30	150.000.000,00	30	150.000.000,00	30	150.000.000,00	30	150.000.000,00		
1.03.11.2.01.0012 - Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis			50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00			
Tersedianya Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan (Orang)	0	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00		
1.03.11.2.01.0015 - Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Tersedianya SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.03.11.2.02 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		275.000.000,00		275.000.000,00			
Terselenggaranya pembinaan jasa konstruksi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	0	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	275.000.000,00	1	275.000.000,00		
	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi)	0	1		1		1		1					
	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan (Perangkat Pendukung)	0	1		1		1		1					
1.03.11.2.02.0012 - Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi			50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan (Perangkat Pendukung)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.03.11.2.02.0013 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.03.11.2.02.0014 - Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	0	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	75.000.000,00	5	75.000.000,00		
1.03.11.2.02.0015 - Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan (Layanan Informasi)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.03.11.2.04 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				140.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		155.000.000,00		155.000.000,00		
Terselenggaranya pembinaan jasa konstruksi	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)	150	15	140.000.000,00	35	180.000.000,00	35	180.000.000,00	20	155.000.000,00	20	155.000.000,00		
	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk (Bangunan Konstruksi)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga)	0	27		50		50		35		35			
	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Paket Pekerjaan)	0	7		10		10		10		10			
	Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
1.03.11.2.04.0004 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota				40.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
1.03.11.2.04.0005 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk (Bangunan Konstruksi)	0	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00		
1.03.11.2.04.0006 - Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk (Lembaga)	0	27	15.000.000,00	50	15.000.000,00	50	15.000.000,00	35	15.000.000,00	35	15.000.000,00		
1.03.11.2.04.0007 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota				70.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Badan Usaha)	150	15	70.000.000,00	35	100.000.000,00	35	100.000.000,00	20	75.000.000,00	20	75.000.000,00		
1.03.11.2.04.0010 - Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersusunnya Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				2.229.925.000,00		2.239.925.000,00		2.189.925.000,00		2.139.925.000,00		2.139.925.000,00	1.03.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Kepatuhan Pelaksanaan KKPR (%)	0	33,33	2.229.925.000,00	50,00	2.239.925.000,00	66,67	2.189.925.000,00	83,33	2.139.925.000,00	100,00	2.139.925.000,00		
1.03.12.2.01 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				740.000.000,00		539.925.000,00		289.925.000,00		689.925.000,00		400.000.000,00		
Terselenggaranya pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	740.000.000,00	1	539.925.000,00	1	289.925.000,00		689.925.000,00		400.000.000,00		
	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)						1		1		1			
	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi (Dokumen)		1		1									
	dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi (Dokumen)		1		1									
	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)		1		1									
	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1											
	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)							1		1				
1.03.12.2.01.0003 - Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang				50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
1.03.12.2.01.0005 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota				0,00		0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)			0,00		0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.03.12.2.01.0006 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota				100.000.000,00		50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)		1	100.000.000,00	1	50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
1.03.12.2.01.0008 - Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota				200.000.000,00		100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi (Dokumen)		1	200.000.000,00	1	100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
1.03.12.2.01.0009 - Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota				100.000.000,00		100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi (Dokumen)		1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
1.03.12.2.01.0010 - Penetapan RDTR Kabupaten/Kota				250.000.000,00		250.000.000,00		100.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	100.000.000,00		0,00		0,00		
1.03.12.2.01.0011 - Penetapan RTRW Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		500.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Perda RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)			0,00		0,00		0,00	1	500.000.000,00	1	200.000.000,00		
1.03.12.2.01.0013 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang				40.000.000,00		39.925.000,00		89.925.000,00		89.925.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan)		1	40.000.000,00	1	39.925.000,00	1	89.925.000,00	1	89.925.000,00	1	100.000.000,00		
1.03.12.2.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				630.000.000,00		900.000.000,00		350.000.000,00		250.000.000,00		239.925.000,00		
Terselenggaranya pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang	Jumlah data SHP Peta Dasar (Peta)		3	630.000.000,00		900.000.000,00	1	350.000.000,00	1	250.000.000,00	1	239.925.000,00		
	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)		1											
	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Orang)		3				5		5		5			
1.03.12.2.02.0004 - Penyusunan Peta Dasar				350.000.000,00		0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya orthorektifikasi citra dari raw citra ke format ECW dan tersedianya data SHP Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar (Peta)		3	350.000.000,00		0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.03.12.2.02.0005 - Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota				250.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)		1	250.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
1.03.12.2.02.0006 - Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang				30.000.000,00		0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00			
Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM perencana tata ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Orang)		3	30.000.000,00		0,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00			
1.03.12.2.02.0007 - Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota				0,00		900.000.000,00		200.000.000,00		100.000.000,00		89.925.000,00			
Tersedianya materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota (Dokumen)			0,00	2	900.000.000,00	1	200.000.000,00	1	100.000.000,00	1	89.925.000,00			
1.03.12.2.03 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				380.000.000,00		300.000.000,00		550.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00			
Terselenggaranya pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Dokumen)		5	380.000.000,00	5	300.000.000,00	5	550.000.000,00	5	400.000.000,00	5	450.000.000,00			
	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	3	1				1				1				
	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)		100				100				100				
	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Sistem Informasi)		1				1				1				
1.03.12.2.03.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang				150.000.000,00		150.000.000,00		250.000.000,00		200.000.000,00		150.000.000,00			
Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Dokumen)		5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	5	250.000.000,00	5	200.000.000,00	5	150.000.000,00			
1.03.12.2.03.0004 - Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				30.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00			
Terlayannya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)		100	30.000.000,00	100	50.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00			
Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	3	1	100.000.000,00		0,00	1	100.000.000,00		0,00	1	100.000.000,00			
1.03.12.2.03.0007 - Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00			
Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang 1.03.12.2.04 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Sistem Informasi)		1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00			
				479.925.000,00		500.000.000,00		1.000.000.000,00		800.000.000,00		1.050.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terselenggaranya pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang (Dokumen)			479.925.000,00	1	500.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	800.000.000,00	1	1.050.000.000,00		
	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)	2			2		2		2		2			
	Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang (Berita Acara)	1			1		1		1		1			
	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR (Dokumen)													
	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang (Kasus)	1			1		1		1		1			
	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif (Kasus)	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang (Laporan)		1		1		1		1		1			
	1.03.12.2.04.0006 - Pelaksanaan Audit Tata Ruang			49.925.000,00		0,00		200.000.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang (Kasus)	1	49.925.000,00		0,00	1	200.000.000,00	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00			
1.03.12.2.04.0007 - Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR			40.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00			
Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif (Kasus)	1	40.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00			
1.03.12.2.04.0008 - Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK			300.000.000,00		200.000.000,00		400.000.000,00		300.000.000,00		400.000.000,00			
Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)	2	300.000.000,00	2	200.000.000,00	2	400.000.000,00	2	300.000.000,00	2	400.000.000,00			
1.03.12.2.04.0009 - Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang			40.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00			
Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang (Laporan)	1	40.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00			
Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR (Dokumen)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
1.03.12.2.04.0013 - Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang			50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00			
Terselesaikan sengketa penataan ruang	Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang (Berita Acara)	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00			
1.03.12.2.04.0014 - Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang			0,00		100.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00			
Terlaksananya pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang (Dokumen)		0,00	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00			

Sumber: Hasil Analisis DPUPR, 2025

Tabel 4. 3
Sub Kegiatan Prioritas Renstra DPUPR
Kota Tarakan Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1.03.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			1.03.01.2.01.0007Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan		1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	
			1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			1.03.01.2.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
			1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			1.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatnya Kapasitas Layanan Unit Air Baku	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.02.2.01.0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	
			1.03.02.2.01.0121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1.03.02.2.01.0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	
			16 juni : 1.03.02.2.01.0129 Rehabilitasi Embung	
	1.03.03 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
			1.03.03.2.01.0031 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
			1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
	1.03.04 Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Meningkatnya pemenuhan fasilitas pengelolaan sampah	1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.04.2.01.0016 Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	
			1.03.04.2.01.0020 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	
	1.03.05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya kinerja pelayanan pengelolaan air limbah bagi masyarakat	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.05.2.01.0029 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	
			1.03.05.2.01.0036 Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	
			1.03.05.2.01.0044 Penyediaan Unit pengolahan setempat	
			1.03.05.2.01.0045 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
	1.03.06 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Meningkatnya kinerja layanan drainase lingkungan	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.06.2.01.0020 Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan	
		Meningkatnya layanan pengendalian banjir	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	
			1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	1.03.08 Program Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung yang memenuhi standar teknis	1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	
			1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
			1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
	1.03.09 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Peningkatan kawasan bangunan dan lingkungan yang tertata	1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.09.2.01.0011 Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.09.2.01.0012 Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	
	1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan jalan kota	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
			1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
			1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	
			1.03.10.2.01.0051 Pemeliharaan Rutin Jalan	
			1.03.10.2.01.0053 Pembangunan Jalan	
			1.03.10.2.01.0056 Pemeliharaan Berkala Jalan	
			1.03.10.2.01.0058 Rehabilitasi Jembatan	
			1.03.10.2.01.0059 Rekonstruksi Jalan	
			1.03.10.2.01.0069 Pembangunan Jembatan	
	1.03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	
			1.03.12.2.01.0010 Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	
			1.03.12.2.01.0011 Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	
			1.03.12.2.02 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	
			1.03.12.2.02.0007 Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	
			1.03.12.2.03 Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.12.2.03.0007 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	
			1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
			1.03.12.2.04.0008 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	
			1.03.12.2.04.0012 Penilaian Perwujudan RTR	

Sumber: Hasil Analisis DPUPR, 2025

Rencana program prioritas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja individu ASN Kota Tarakan dengan memperkuat internal akuntabilitas kinerja dan meningkatkan kualitas layanan kesekretariatan DPUPR Kota Tarakan, melalui kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian perangkat daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Melalui program ini ditargetkan untuk nilai atau predikat SAKIP DPUPR bisa dipertahankan pada predikat A dengan nilai yang diharapkan terus meningkat tiap tahunnya. Predikat SAKIP DPUPR ini menggambarkan hasil dan dampak nyata dari kegiatan yang dilakukan oleh DPUPR terhadap masyarakat.

Agar supaya kegiatan yang dilakukan oleh DPUPR dapat dilihat hasil dan dampak nyatanya oleh masyarakat, maka program ini juga merupakan nomenklatur program dari salah satu program unggulan Wali Kota, yaitu program nomor 9 program perbaikan kesejahteraan ASN, Tenaga Honor, Pensiunan, Kader Dasa Wisma dan Posyandu, melalui Jaminan kelancaran pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) dan uang lauk pauk (ULP) untuk ASN serta untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja (P3K) lingkup Pemerintah Kota Tarakan sesuai kemampuan daerah

b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dengan meningkatkan kapasitas layanan unit air baku melalui pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana SDA yang menjadi kewenangan Kota; peningkatan bangunan perkuatan tebing untuk pencegahan longsor; penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi prasarana dan sarana sumber daya air (SDA).

Melalui program ini ditargetkan untuk dapat menambah jumlah long storage di tahun 2027 dan 2028 sebesar 4000 m³ pertahun melalui Sungai Bidang dan Sungai Indulung, dan penambahan volume air baku pada Embung Maya sebesar 125.000 m³ di tahun 2029.

c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dengan meningkatkan pemenuhan cakupan pelayanan air minum bagi masyarakat melalui kegiatan pembangunan, perluasan dan optimalisasi serta penyusunan rencana sistem penyediaan air minum (SPAM) Perkotaan.

Melalui program ini ditargetkan untuk tiap tahun dapat melakukan penambahan sambungan rumah (SR) sebanyak 1.000 unit pertahun dan penambahan jaringan perpipaan sebanyak 5.800 m pertahun. Program ini juga merupakan program yang *tertagging* sebagai program untuk menjawab SPM urusan pekerjaan umum.

Program ini juga merupakan nomenklatur program dari salah satu program unggulan Wali Kota, yaitu program nomor 07 program gratis pemasangan sambungan rumah air PDAM.

d. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Program ini dimaksudkan meningkatkan kepuasan masyarakat melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sampah melalui pembangunan dan optimalisasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah dalam rangka meningkatkan pemenuhan fasilitas pengelolaan sampah untuk mencapai target indikator kinerja yaitu persentase ketersediaan layanan pengolahan sampah.

Melalui program ini ditargetkan untuk penambahan TPS3R sebanyak 1 unit pertahun, pemeliharaan TPS3R juga 1 unit pertahun, serta pengembangan TPA Juata Kerikil juga dilakukan bertahap tiap tahun.

Program ini juga merupakan nomenklatur program dari salah satu program unggulan Wali Kota, yaitu program nomor 18 optimalisasi pengoperasian TPA Sampah Juata Kerikil dan TPS3R menuju Tarakan zero waste (bebas sampah).

e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dengan meningkatkan kinerja pelayanan pengelolaan air limbah bagi masyarakat melalui kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik melalui penyediaan prasarana dan sarana tangki septik individual, pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S), dan penyusunan rencana sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD), serta pembangunan dan pemeliharaan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT). Program ini juga merupakan program yang *tertagging* sebagai program untuk menjawab SPM urusan pekerjaan umum.

Pembangunan tangki septik individual ditargetkan dapat dipenuhi sebanyak 400 rumah pertahun untuk membantu dalam mengatasi rumah BABS dan rumah dengan sistem sanitasi yang belum layak.

Pembangunan instalasi lumpur tinja (IPLT) direncanakan akan dibangun pada tahun 2027 untuk dapat mencapai sanitasi aman karena hasil

penyedotan dari tiap rumah sudah bisa diolah sebelum dibuang ke badan air.

f. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini dimaksudkan meningkatkan kepuasan masyarakat dengan mengendalikan banjir dan meningkatkan kinerja layanan drainase lingkungan melalui kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sistem drainase perkotaan, optimalisasi sistem drainase lingkungan serta penyusunan rencana kebijakan strategis mengenai sistem drainase perkotaan.

Melalui program ini ditargetkan untuk menangani banjir dari tahun 2025 hingga tahun 2030 seluas 33,82 ha yang tersebar di beberapa titik dengan melakukan pembebasan lahan, pembangunan dan pemeliharaan saluran yang melalui 10 daerah aliran sungai (DAS) yang ada di Kota Tarakan.

Terdapat 6 dokumen rencana kebijakan strategis yang ditargetkan bisa diselesaikan hingga tahun 2030, salah satunya adalah penyusunan revisi raperda GSS.

Meningkatkan kinerja layanan drainase lingkungan dilakukan dengan kegiatan optimalisasi drainase-drainase permukiman baik yang kondisinya rusak maupun yang butuh perpanjangan pembangunan drainase lanjutan. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah panjang drainase lingkungan dalam keadaan baik, ditargetkan penambahan panjangnya sebesar 2.000 – 3.000 m tiap tahun.

Program ini juga merupakan nomenklatur program dari dua program unggulan Wali Kota, yaitu program nomor 5 program pemberdayaan rukun tetangga melalui dana alokasi khusus 50-200 juta per-RT pertahun untuk perbaikan infrastruktur drainase dan program nomor 11 program penuntasan masalah banjir

g. Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini dimaksudkan untuk mendukung dalam peningkatan layanan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan dengan meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang memenuhi standar teknis termasuk memberikan perizinan dalam membangun bagi masyarakat, melalui kegiatan pembangunan dan pemeliharaan bangunan strategis daerah dan kegiatan penyelenggaraan penerbitan izin persetujuan pembangunan bagi masyarakat.

Pembangunan dan pemeliharaan bangunan strategis daerah melalui pembangunan dan pemeliharaan kantor-kantor pelayanan publik yang dalam 5 tahun ini difokuskan pada wilayah pusat pemerintah baru di Kelurahan Juata Laut.

Kegiatan penyelenggaraan penerbitan izin persetujuan pembangunan bagi masyarakat ditargetkan dapat dikeluarkan 350 izin tiap tahunnya, mengingat beberapa hal sudah dimudahkan melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Program ini juga merupakan nomenklatur program dari salah satu program unggulan Wali Kota, yaitu program nomor 20 pembangunan kawasan terpadu pusat pemerintahan Kota Tarakan.

h. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Program ini dimaksudkan untuk mendukung dalam peningkatan layanan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan dengan menyelenggarakan kawasan bangunan dan lingkungan yang tertata, dalam artian memiliki dokumen perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang adaptif, penataan yang dilakukan sesuai dengan perencanaannya, serta

terselenggaranya pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan.

Selama 5 tahun ini ditargetkan untuk menyelesaikan 10 dokumen perencanaan tata bangunan dan lingkungan, 18 kawasan yang tertata, serta 120 dokumen pembinaan/pengawasan yang dikeluarkan tiap tahunnya.

i. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan jalan kota yang meliputi kegiatan pengelolaan leger jalan, survey kondisi jalan/jembatan, pembangunan jalan, pembangunan jembatan, rekonstruksi jalan, pemeliharaan berkala jalan, rehabilitasi jembatan, pemeliharaan rutin jalan, dan penyusunan rencana kebijakan strategi pengembangan jaringan jalan.

Melalui program ini ditargetkan untuk penambahan jalan dalam kondisi mantap sebesar 1,2 km pertahun, penambahan jalan dalam kondisi baik sebesar 0,93 km pertahun, penambahan jalan dalam kondisi baik sedang sebesar 0,278 km pertahun, pengurangan jalan dalam kondisi rusak sebesar 0,698 km pertahun.

Program ini juga merupakan nomenklatur program dari salah satu program unggulan Wali Kota, yaitu program nomor 12 program kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan kota dan jembatan.

j. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas layanan infrastruktur perkotaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi, melalui kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota, dan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Melalui program ini ditargetkan peningkatan tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di Kota Tarakan sebanyak 100 orang pertahun, yang akan dilayani melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan bagi tenaga kerja konstruksi, dan penyelenggaraan sistem informasi, pembinaan serta pengawasan bagi usaha jasa konstruksi.

k. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini dimaksudkan untuk mendukung dalam peningkatan layanan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan dengan meningkatkan pembangunan yang sesuai rencana tata ruang melalui kegiatan penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang (RRTR) kabupaten/kota, kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota, kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota, serta koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota.

Melalui program ini ditargetkan kepatuhan pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) sebesar 100 dokumen tiap tahun, agar kegiatan pembangunan atau usaha tidak bertentangan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan pemerintah, mencegah terjadinya konflik antar pengguna ruang sehingga pembangunan dapat berjalan harmonis

l. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas tenaga kerja, serta profesional di sektor jasa konstruksi, termasuk pelatihan,

seminar, dan workshop, untuk menghasilkan bangunan yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Program ini juga mencakup peningkatan penerapan standar dan regulasi, fasilitasi sertifikasi tenaga kerja, dan pengembangan teknologi serta produk dalam negeri.

4.2. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Tabel 4. 4
Indikator Kinerja Utama Renstra DPUPR Kota Tarakan Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)		(3)	(4)	(6)	(8)	(10)	(12)	
1	Indeks Kepuasan masyarakat	Indeks	NA	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00
2	Persentase jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota (IKK)	Persen	83,21%	87,73%	89,92%	92,01%	93,99%	95,87%	97,64%
3	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir (IKK)	Persen	66,12	68,37	74,56	79,90	84,80	86,45	88,17
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	Persen	53,55%	54,00%	54,81%	55,57%	56,31%	57,01%	57,67%
5	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Persen	73,23 %	73,75%	74,28%	74,80%	75,32%	75,84%	76,36%
6	Indeks Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Indeks	Indikator Baru	84,05	85,08	86,05	87,08	88,05	89,08
7	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	Persen	63,88%	14,17%	29,92%	45,67%	61,42%	77,17%	92,91%
8	Nilai/Predikat SAKIP OPD	Nilai	86,39/A	87,13/A	88,87/A	89,61/A	90,35/AA	91,09/AA	92,83/AA

Sumber: Hasil Analisis DPUPR, 2025

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi atau program, yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. IKK berfungsi sebagai cerminan prioritas strategis organisasi, mengukur sejauh mana kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat dicapai secara terukur dan relevan.

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci Renstra DPUPR Kota Tarakan Tahun 2025-2029

NO	IKK	SATUAN	Base Line	TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	%	66,12	68,37	74,56	79,90	84,80	86,45	88,17	IKU
2	Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten/Kota	%	80,52%	75,38%	75,38%	81,88%	88,38%	88,38%	96,92%	Penurunan target karena ada penambahan kawasan rawan banjir ROB
3	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota	%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Tidak ada Daerah Irigasi (DI) kewenangan provinsi
4	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	%		5,74%	5,74%	5,74%	8,55%	8,55%	19,98%	
5	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	%	83,21%	87,73%	89,92%	92,01%	93,99%	95,87%	97,64%	IKU
6	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	69,08%	71,44%	73,02%	74,52%	75,94%	77,29%	78,56%	
7	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	%		87,50%	87,50%	87,50%	87,50%	87,50%	87,50%	
8	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	73,23 %	73,75%	74,28%	74,80%	75,32%	75,84%	76,36%	IKU
9	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	%	63,88%	14,17%	29,92%	45,67%	61,42%	77,17%	92,91%	IKU
10	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	0,00%	17,78%	35,55%	53,33%	71,11%	85,55%	100,00%	2024 belum ada
11	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	Hari		20 hari	20 hari	20 hari	20 hari	20 hari	20 hari	sesuai SOP dan standar pelayanan penerbitan KKPR
12	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	%		0,00%	12,50%	31,25%	43,75%	62,50%	81,25%	Target berdasarkan hasil audit Tata Ruang

Sumber: Hasil Analisis DPUPR, 2025

BAB V PENUTUP

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan tahun 2025-2029 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2029. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tarakan sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

7. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan Tahun 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1 ayat (7) dan pasal 7 menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra. Dokumen Renstra 2025-2029 Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Tarakan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perumahan Rakyat dan Pertanahan sesuai Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renstra OPD menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman dan panduan OPD dalam melaksanakan program, kegiatan dan Sub kegiatan setiap tahunnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada masa kepemimpinan Kepala Daerah terpilih.

Sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode 2025–2029 wajib dilakukan secara serentak dengan RPJMD, sehingga terdapat sinergi yang kuat dengan RPJPN dan RPJMN 2025–2029. Instruksi ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Secara khusus, Inmendagri tersebut menekankan beberapa poin penting:

- Kewajiban penyusunan RPJMD/Renstra dilakukan dalam jangka waktu maksimal enam bulan pasca pelantikan kepala daerah.
- Keselarasan dengan RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029, termasuk misi nasional (“Asta Cita”) harus menjadi acuan utama, diimbangi dengan mempertimbangkan potensi dan kearifan lokal.
- Penataan struktur Renstra PD menjadi lebih sederhana dan efisien, dari delapan bab menjadi lima bab, dengan pendekatan penyusunan yang lebih tematik, holistik, integratif, spasial (“THIS”), serta berbasis integrasi digital dan partisipatif masyarakat

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Instruksi Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2045;
14. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan;
16. Surat Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 100.3.3.3/HK-IV/202/2025 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Tahun 2025-2029;

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan disusun dalam kerangka Menindaklanjuti Inmendagri No 2 Tahun 2025, dengan maksud untuk memberikan arah strategis yang jelas, terukur, dan adaptif terhadap visi pembangunan daerah. Dokumen ini ditujukan untuk:

1. Menjawab kebutuhan peningkatan infrastruktur perumahan, permukiman, dan pertanahan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

2. Menjamin kesinambungan program dan kebijakan, terutama pasca periode kepemimpinan, sehingga pembangunan tidak sekadar bersifat jangka pendek.
3. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan operasional Dinas agar lebih efisien, responsif, dan terintegrasi melalui pendekatan multi-arah dan terhubung dengan RPJMN.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan;
- 1.3. Maksud dan Tujuan;
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

- 2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan
 - a) Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas;
 - b) Sumberdaya;
 - c) Kinerja Pelayanan;
 - d) Kelompok Sasaran Layanan;
 - e) Mitra Dinas dalam pemberian pelayanan;
 - f) Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja.
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan
 - a) Permasalahan Pelayanan;
 - b) Isu Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Renstra Tahun 2025-2029;
- 3.2 Sasaran Renstra Tahun 2025-2029;
- 3.3 Strategi;
- 3.4 Arah Kebijakan.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Uraian Keterkaitan Program, Kegiatan, Subkegiatan;
- 4.2 Uraian Subkegiatan Program Prioritas;
- 4.3 Target IKU Tahun 2025-2029;
- 4.4 Target IKK Tahun 2025-2029.

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan

a. Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 54 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan.

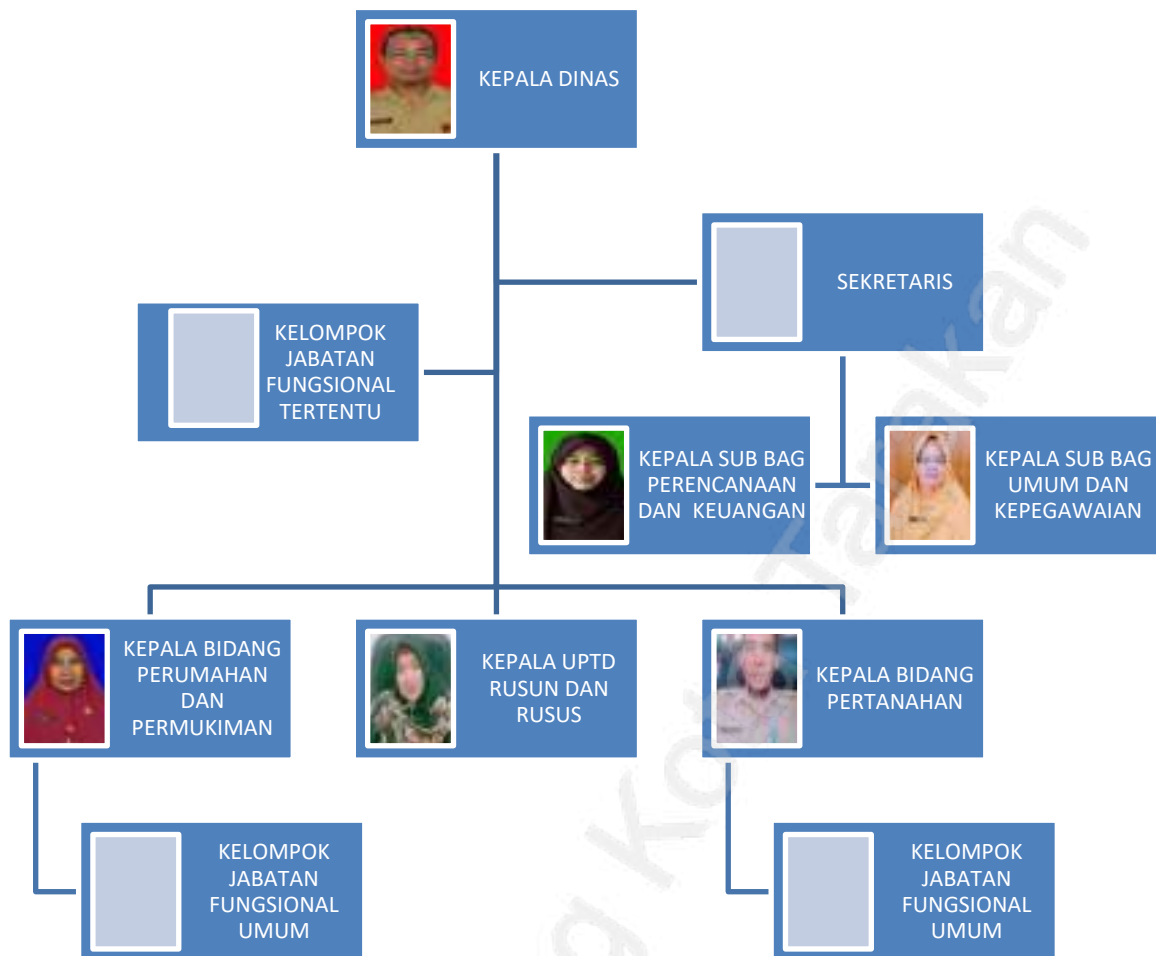
Tugas pokok Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
 1. Sekretariat, yang membawahkan:
 2. Sub bagian perencanaan dan keuangan; dan
 3. Sub bagian umum dan kepegawaian.
- b. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang membawahkan:
 - o Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Pertanahan, yang membawahkan:
 - o Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang terdiri dari :
 1. UPTD Rusunawa dan Rusus
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi

Uraian Tugas dan Fungsi :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanian;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanian;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanian;
- Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi kegiatan Dinas;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran Dinas;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas;
5. Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada Dinas;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Dinas;
7. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
8. Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Dinas; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bantu oleh:

- 2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

Kepala sub bagian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretaris dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian, pengelolaan dan pemberian bimbingan di bidang administrasi umum, ketatalaksanaan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan, pengelolaan barang, kepegawaian, fasilitasi kegiatan analisis jabatan dan budaya kerja.

- 2.2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris mempunyai tugas menyusun perencanaan program anggaran rutin dinas, dan pengelola administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan.

3. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan, kawasan permukiman dan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan;
 3. Pelaksanaan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana di daerah;
 4. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
 5. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
 6. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban sertifikat kepemilikan bangunan gedung;
 7. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh;
 8. Pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah;
 9. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
4. Bidang Pertanahan
- Bidang Pertanahan sebagaimana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pertanahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- Bidang Pertanahan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- Bidang Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:
1. Perumusan kebijakan di bidang penataan pertanahan, infrastruktur pertanahan, fasilitasi pengadaan tanah dan hubungan hukum pertanahan, dan penanganan masalah pertanahan;
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penataan pertanahan, infrastruktur pertanahan,fasilitasi pengadaan tanah dan hubungan hukum pertanahan, dan penanganan masalah pertanahan;
 3. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah.
 4. Pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong di Daerah;
 5. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban izin membuka tanah;
 6. Pelaksanaan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah;
 7. Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
 8. Pelaksanaan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* dalam Daerah;
 9. Pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah garapan di Daerah;
 10. Pelaksanaan penyelesaian masalah tanah kosong di Daerah;

- 11. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan pertanahan, infrastruktur pertanahan, fasilitasi pengadaan tanah dan hubungan hukum pertanahan, dan penanganan masalah pertanahan; dan
- 12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 13.
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas. Jabatan Fungsional Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan adalah sbb:
- 6. Kepala UPTD RUSUNAWA dan RUSUS
Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa dilakukan untuk mendukung program pemerintah pusat terkait masalah pembebasan kawasan kumuh yang berada di perkotaan dan Kota Tarakan masuk dalam program tersebut. Rumah Susun Sederhana Sewa di Kota Tarakan merupakan hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) kepada Pemerintah Kota Tarakan, tepatnya pada tanggal 4 September 2016.

b. Sumber Daya

b.1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia ada 40 Pegawai, adapun rincian pegawai per jenis kelamin dan tingkat pendidikan selengkapnya disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

NO	Unit Kerja	Umur (Tahun)					Jumlah
		31-35	36-40	41-45	46-50	51-60	
1	Bidang Sekretariat		1	3	1	6	11
2	Bidang Perumahan	1		1		2	4
3	Bidang Permukiman			1	6	3	10
4	Bidang Pertanahan		1	1	3	5	10
5	UPTD Rusunawa		1		2	2	5
	TOTAL	1	3	6	12	18	40

Sumber: Sub Bagian Umum Kepegawaian DPRKPP

Komposisi pegawai menunjukkan Kelompok usia 51-60 tahun mendominasi (18 orang = 45%) yang signifikan. Tanpa rekrutmen dan pengembangan pegawai muda, dalam 5-10 tahun ke depan dapat terjadi penurunan kinerja layanan publik, terutama di bidang teknis dan operasional. Upaya regenerasi, transfer pengetahuan, dan perencanaan formasi menjadi prioritas agar kontinuitas pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan tetap terjaga.

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

NO	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Bidang Sekretariat			8	3	11
2	Bidang Perumahan			2	1	3
3	Bidang Permukiman		2	7	2	11
4	Bidang Pertanahan		1	8	1	10
5	UPTD Rusunawa		2	3		5
	TOTAL	0	5	28	7	40

Sumber: Sub Bagian Umum Kepegawaian DPRKPP

Struktur Golongan III: 28 pegawai (70%) → mayoritas pegawai berada pada level staf/penyelia. Golongan IV: 7 pegawai (17,5%) → posisi struktural/pimpinan, relatif sedikit. Golongan II: 5 pegawai (12,5%) → level pelaksana dasar. Golongan I: Tidak ada pegawai (0%), artinya tidak ada tenaga kerja level sangat dasar. Struktur golongan pegawai didominasi Golongan III, menunjukkan Sumber Daya Manusia (SDM) berpengalaman namun minim pimpinan (Gol. IV) dan tanpa tenaga dasar (Gol. I). Untuk menjaga efektivitas pelayanan dan kesinambungan organisasi, perlu perencanaan formasi SDM baru, pengembangan karier internal, dan penguatan jenjang struktural terutama di UPTD Rusunawa dan Bidang Perumahan dan Permukiman.

Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

NO	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		I	II	III			IV	
		SD	SMP	SMA/SMK	D3	S1	S2	
1	Bidang Sekretariat			1	2	5	3	11
2	Bidang Perumahan					5	1	6
3	Bidang Permukiman			5		2	1	8
4	Bidang Pertanahan			2		6	2	10
5	UPTD Rusunawa			4		1		5
	TOTAL	0	0	12	2	19	7	40

Sumber: Sub Bagian Umum Kepegawaian DPRKPP

Komposisi pendidikan pegawai cukup baik (65% S1/S2), namun masih ada 30% pegawai SMA/SMK yang terkonsentrasi di Bidang Permukiman dan UPTD Rusunawa. Untuk menjaga kualitas pelayanan dan mendorong inovasi, perlu peningkatan kapasitas pegawai menengah, distribusi mentor dari unit berpendidikan tinggi, serta rekrutmen baru dengan kualifikasi lebih tinggi. Ini akan memperkuat kompetensi teknis dan kesiapan menghadapi tuntutan kerja masa depan.

Struktur jabatan didominasi Fungsional Pelaksana (57,5%), dengan proporsi pejabat struktural (Eselon II–IV) sekitar 32,5%, dan Fungsional Tertentu relatif sedikit (10%). Untuk mendukung visi peningkatan layanan hunian dan pengelolaan permukiman, perlu penguatan jabatan fungsional teknis, pengembangan kompetensi staf, serta perencanaan suksesi agar kesinambungan kepemimpinan dan kualitas layanan tetap terjaga. Komposisi Pegawai menurut Jabatan ada pada Tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2. 4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No	Unit Kerja	Jabatan
1	Eselon II	1
2	Eselon III	3
3	Eselon IV	6
4	Fungsional Tertentu	4
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	23
TOTAL		40

Sumber: Sub Bagian Umum Kepegawaian DPRKPP

Tabel 2. 5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

NO	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Bidang Sekretariat	8	2	10
2	Bidang Perumahan	2	2	4
3	Bidang Permukiman		11	11
4	Bidang Pertanahan	1	8	9
5	UPTD Rusunawa	2	3	5
TOTAL		12	28	40

Sumber: Sub Bagian Umum Kepegawaian DPRKPP

Struktur pegawai masih didominasi laki-laki (70%), terutama di Bidang Perumahan dan Permukiman dan Bidang Pertanahan (90% laki-laki). Sekretariat dan Perumahan menunjukkan komposisi lebih seimbang. Untuk memastikan layanan lebih inklusif dan responsif, perlu rekrutmen yang memperhatikan kesetaraan gender, pengembangan kompetensi teknis bagi pegawai perempuan, dan internalisasi perspektif gender dalam perencanaan dan pelaksanaan program dinas.

Tabel 2. 6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

NO	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II		1	1
2	Eselon III	1	2	3
3	Eselon IV	4	5	9
TOTAL		5	8	13

Sumber: Sub Bagian Umum Kepegawaian DPRKPP

Berdasarkan data tabel-tabel diatas, dengan jumlah Pegawai sebanyak 40 orang dengan komposisi tingkat Pendidikan yang cukup baik, dan Tenaga Honorer sebanyak 15 orang maka diharapkan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal serta menjalankan perannya sebagai pengampu urusan Perumahan Rakyat dan Pertanahan serta urusan Penataan Pertanahan dengan baik.

b. 2. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan menunjukkan kecenderungan penurunan, terutama pada AC, Laptop, Printer, dan Mobil. Barang yang paling bermasalah adalah Kursi (70% baik tanpa perbaikan empat tahun berturut-turut). Dengan pemeliharaan berkala dan pengadaan bertahap yang terencana, kualitas sarana kerja dapat ditingkatkan sehingga menunjang produktivitas dan kenyamanan pegawai, selengkapnya disajikan pada tabel 2.7 dibawah ini.

Tabel 2. 7 Sarana dan Prasarana

NO	NAMA BARANG	JUMLAH (UNIT)	KONDISI BAIK (%) TAHUN			
			2020	2021	2022	2023
1	AC	13		38%	30%	23%
2	P.C. UNIT	14	100%	100%	100%	100%
3	LAPTOP	7	100%	100%	85,71%	71,42%
4	PRINTER	12	100%	100%	91%	83,33%
5	MOBIL	5	80%	80%	80%	60%
6	SEPEDA MOTOR	12	91,66%	83,33%	83,33%	83,33%
7	MEJA KERJA	60	91%	91%	91%	91%
8	MEJA PEJABAT	2	100%	100%	100%	100%
9	KURSI	90	70%	70%	70%	70%
10	KURSI SANDARAN RENDAH	6	100%	100%	83,33%	83,33%
11	KURSI SANDARAN TINGGI	2	100%	100%	100%	100%

c. Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan

Pelaksanaan Renstra Tahun 2020–2024 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Tarakan secara umum telah menunjukkan capaian yang positif. Sebagian besar indikator kinerja tujuan, sasaran, program, dan kegiatan dapat dicapai bahkan melampaui target. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang mengalami fluktuasi atau belum stabil pencapaiannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembangunan perumahan, kawasan permukiman, PSU, serta administrasi pertanahan telah berjalan, tetapi tetap memerlukan penguatan tata kelola, konsistensi implementasi, serta dukungan lintas sektor. Analisa rasio capaian kinerja sebagai berikut:

1. Capaian Sasaran Renstra
1. Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
- Indikator kinerja ini menunjukkan capaian yang relatif stabil dan konsisten tinggi. Persentase rumah MBR yang terbangun maupun direnovasi melampaui target hampir di setiap tahun, dengan capaian tertinggi pada 2021 (128,35%). Program pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana maupun relokasi juga menunjukkan capaian nyaris sempurna (99–100% setiap tahun). Pada aspek pengelolaan rumah susun (rusunawa), rasio capaian penghunian unit kamar mengalami dinamika. Tahun 2021–2022 relatif stagnan di angka 40%, namun pada 2023 melonjak hingga 150% yang menunjukkan adanya peningkatan hunian pasca intervensi program atau kebijakan tarif. Walaupun demikian, pada 2024 capaian kembali menurun, sehingga ke depan diperlukan kebijakan pengelolaan rusunawa yang lebih profesional, berkelanjutan, dan berpihak pada MBR.

2. Menurunnya Luas Kawasan Kumuh

Indikator penurunan kawasan kumuh merupakan salah satu yang paling menantang. Target Renstra cukup ambisius, yaitu menurunkan luas kumuh dari 47,33% pada 2020 menjadi 6,87% di 2024. Namun, capaian lapangan cenderung fluktuatif. Pada 2020, realisasi cukup baik (42,44%), tetapi pada 2022 rasio kembali menurun di 65,31%. Pada 2023 capaian membaik melampaui target (101,19%), namun kembali turun pada 2024 (63,61%).

Subkegiatan penataan kawasan kumuh di bawah 10 hektar menunjukkan capaian yang sangat bervariasi. Beberapa capaian bahkan mencapai lebih dari 200% dari target (contohnya 2022 dan 2024), yang menunjukkan efektivitas program di wilayah tertentu. Namun demikian, ketidakstabilan capaian antar tahun menandakan adanya masalah dalam konsistensi implementasi program. Faktor yang memengaruhi antara lain keterbatasan lahan, resistensi masyarakat terhadap relokasi, serta kurangnya sinergi lintas sektor (sanitasi, air minum, sosial, dan ekonomi), serta belum matangnya penentuan target awal renstra.

3. Meningkatnya Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Didukung PSU.

Indikator persentase PSU yang ditingkatkan menunjukkan capaian yang relatif baik dan stabil. Sejak 2021 hingga 2024, realisasi berada pada kisaran 83–100%. Hal ini menggambarkan bahwa penyediaan prasarana jalan lingkungan, serta utilitas pendukung kawasan permukiman telah berjalan sesuai target.

4. Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan dalam Pembangunan

Aspek pertanahan merupakan salah satu tantangan utama. Penyelesaian sengketa tanah menunjukkan capaian yang sangat fluktuatif. Pada 2020 capaian bahkan melampaui target (163,62%), namun pada 2023 hanya mencapai 33,33%. Hal ini menggambarkan bahwa penyelesaian konflik pertanahan sangat dipengaruhi oleh kompleksitas kasus di lapangan, kapasitas mediasi, serta koordinasi dengan BPN dan aparat hukum.

Indikator ganti rugi dan santunan tanah juga mengalami dinamika, dari capaian rendah di 2020 (45,94%) hingga meningkat stabil di atas 85% pada 2022–2024. Sementara itu, tindak lanjut dokumen Surat Penggunaan Lahan (SPL) relatif stabil tinggi, dengan capaian konsisten $\geq 97\%$ sejak 2021. Kondisi ini menunjukkan bahwa administrasi teknis berjalan baik, namun aspek resolusi konflik pertanahan masih menghadapi hambatan besar.

5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan (SAKIP)

Indikator nilai SAKIP menunjukkan tren positif dan meningkat. Target Renstra ditetapkan pada level “B” dengan skor 64, namun realisasi sejak 2020 hingga 2023 selalu melampaui target, bahkan mencapai predikat “BB” dengan skor 77,28 pada 2023. Rasio capaian terhadap target berada pada kisaran 115–125%. Pada sisi layanan penunjang perangkat daerah, sebagian besar indikator tercapai penuh (100%), seperti administrasi keuangan dan perencanaan. Namun, terdapat beberapa indikator yang belum konsisten, seperti layanan kepegawaian dan jasa penunjang yang hanya tercapai 0–67%. Sebaliknya, pemeliharaan barang milik daerah justru menunjukkan over-achievement hingga 220%, menandakan adanya peningkatan kapasitas pada aspek pengelolaan aset.

2. Capaian umum

Dari uraian capaian di atas, dapat ditarik beberapa pola umum:

1. Program rumah layak huni, termasuk penanganan rumah korban bencana dan relokasi, berhasil dan konsisten mencapai target.
2. Penanganan kawasan kumuh masih menjadi tantangan utama karena capaian sangat fluktuatif antar tahun.
3. Penyediaan dan peningkatan PSU relatif stabil, meskipun ada gap pada awal periode.
4. Administrasi pertanahan masih menghadapi kendala serius dalam penyelesaian sengketa, walaupun administrasi teknis (SPL) relatif baik.
5. Akuntabilitas kinerja (SAKIP) menunjukkan perbaikan signifikan, menandakan peningkatan tata kelola dan sistem akuntabilitas di perangkat daerah.

3. Rencana Langkah Perbaikan

Berdasarkan hasil evaluasi, beberapa langkah perbaikan yang perlu menjadi perhatian pada periode perencanaan berikutnya adalah:

1. Penguatan Integrasi Program Penanganan Kawasan Kumuh
 - o Melalui sinergi lintas sektor perumahan, PSU, air minum, sanitasi, dan pemberdayaan masyarakat.
 - o Fokus pada kawasan prioritas dengan pendekatan berbasis masyarakat.
2. Perbaikan Tata Kelola Administrasi Pertanahan
 - o Peningkatan kapasitas mediasi dan koordinasi dengan BPN, aparat hukum, serta lembaga adat.
 - o Penyusunan regulasi yang lebih jelas terkait penyelesaian sengketa dan kompensasi lahan.
3. Profesionalisasi Pengelolaan Rusunawa
 - o Penetapan regulasi tarif yang berkeadilan.
 - o Penyediaan fasilitas sosial ekonomi untuk penghuni.
 - o Sistem pengelolaan berbasis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau kerja sama pengelolaan.
4. Konsistensi Layanan Administrasi Penunjang
 - o Perencanaan, kepegawaian, dan jasa penunjang perlu dipastikan berjalan konsisten tiap tahun, bukan parsial.
 - o Penguatan digitalisasi layanan penunjang.
5. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Inovasi
 - o Melanjutkan tren positif SAKIP dari “BB” menuju “A”
 - o Mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan dengan indikator yang lebih *outcome-oriented*.
 - o Mendorong inovasi pelayanan publik yang mendukung peningkatan kualitas perumahan dan permukiman.

Kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan berdasarkan Renstra Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.8 di bawah ini:

Tabel 2. 8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun					Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Pelayanan Infrastruktur Lingkungan yang Merata dan Berkualitas dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Kota Tarakan				Cakupan Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Administrasi Pertanahan	NA%	100%	100%	100%	100%		101,8%	78,92%	100%	99,79%		101,80%	78,92%	100%	99,79%
	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni untuk MBR			Persentase Rumah untuk MBR yang terbangun dan terenovasi	20%	40%	60%	80%	100%	21,40%	51,34%	66,52%	88,96%	98,17%	106,99%	128,35%	110,87%	111,20%	98,17%
		1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase ketersediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana / relokasi	100%	100%	100%	100%	100%	99,75%	100%	100%	100%	100%	99,75%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Cakupan rumah korban bencana yang dibangun dan/atau direhab	NA %	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase penghunian rumah khusus	NA %	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase penghunian unit kamar rusunawa	NA %	33,84%	38,38%	40,91%	43,43%		41,92%	40,91%	40,91%	65,15%		123,87%	106,59%	100,00%	150,01%
		1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase layanan ketersediaan rumah layak huni untuk MBR	20%	40%	60%	80%	100%	21,398%	51,34%	66,52%	88,96%	98,17%	106,99%	128,35%	110,87%	111,20%	98,17%
		1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RTLH yang terfasilitasi	NA Unit	250 Unit	250 Unit	250 Unit	250 Unit		200 Unit	270 Unit	250 Unit	122 Unit		80,00%	108,00%	100,00%	48,80%
	Menurunnya luas kawasan kumuh			Persentase lingkungan pemukiman kumuh	47,33%	49,17%	31,74%	17,64%	6,87%	42,44%	49,17%	42,75%	17,43%	9,37%	89,67%	100,00%	65,31%	101,19%	63,61%
		1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	47,33%	49,17%	31,74%	17,64%	6,87%	42,44%	49,17%	42,75%	17,43%	9,37%	89,67%	100,00%	65,31%	101,19%	63,61%

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun					Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase ijin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang diterbitkan	NA %	NA %	100%	100%	100%			100%	100%				100,00%	100,00%	0,00%
		1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	persentase kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang tertata	NA %	NA %	25,00%	50%	75%			24,03%	50%	46,25%			96,12%	100,00%	61,67%
		1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah luasan kumuh dibawah 10 Ha yang tertangani (Ha)	NA Ha	4,11 Ha	5,34 Ha	7,45 Ha	4,42 Ha		4,11 Ha	13,36 Ha	7,45 Ha	10,48 Ha		100,00%	250,19%	100,00%	237,10%
	Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)			Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang ditingkatkan	NA %	100%	100%	100%	100%		83,33%	100,00%	98,67%	100%		83,33%	100,00%	98,67%	100,00%
		1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang ditingkatkan	NA %	100%	100%	100%	100%	0,00%	83,33%	100,00%	98,67%	100%	0,00%	83,33%	100,00%	98,67%	100,00%
		1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Panjang Jalan Lingkungan yang dibangun	NA %	100%	100%	100%	100%		83,33%	100,00%	98,67%	100%		83,33%	100,00%	98,67%	100,00%
	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan dalam pembangunan			Persentase konflik/sengketa tanah yang terselesaikan	50%	100%	100%	100%	100%	81,81%	96,77%	50,00%	33,33%	100%	163,62%	96,77%	50,00%	33,33%	100,00%
				Persentase ganti kerugian dan/atau santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	94,60%	0%	100%	100%	100%	43,46%	0%	100%	85,71%	100%	45,94%		100,00%	85,71%	100,00%
				Persentase dokumen SPL yang ditindaklanjuti	11%	100%	100%	100%	100%	13,69%	97,44%	100%	100,00%	100%	124,45%	97,44%	100,00%	100,00%	100,00%
		2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	100%	100%	100%	100%	62,73%	-	50,00%	33,33%	100%	62,73%	0,00%	50,00%	33,33%	100,00%
		2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelesaian sengketa tanah garapan	NA %	100%	100%	100%	100%		-	50,00%	33,33%	100%		0,00%	50,00%	33,33%	100,00%
		2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN	Persentase ganti kerugian dan/atau santunan tanah untuk	100%	0%	100%	100%	100%	0%	-	100%	85,71%	100%	0,00%		100,00%	85,71%	100,00%

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun					Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
			DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	pembangunan yang terselesaikan															
		2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerima ganti kerugian dan santunan tanah yang terselesaikan	NA %	NA %	100%	100%	100%			100%	85,71%	100%			100,00%	85,71%	100,00%
		2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase dokumen SPL yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	93,82%	100%	100%	100%	100%	93,82%	100%	100%	100%	100%
		2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen SPL yang ditindaklanjuti	NA %	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan			NILAI SAKIP	NA	64/B	64/B	64/B	64/B		74/B	74/B	79,91/B	77,28/B B		115,98%	115,98%	124,86%	120,75%
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	NA persen	100%	100%	100%	100%		100%	100%	94,15%	100%		100%	100%	94,15%	100%
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja	NA Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 dokumen				100%	0%	0%	0%
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi Keuangan	NA Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan		2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan		100%	100%	100%	100%
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan kepegawaian	NA Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan		1 Layanan		1 Layanan			100%	0%	100%	0%
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	NA Layanan	5 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	5 Layanan		4 Layanan	4 Layanan	5 Layanan	5 Layanan		80%	80%	100%	100%
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	NA Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan		2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan		66,67%	66,67%	66,67%	66,67%
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	NA Unit	16 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit		15 Unit	15 Unit	32 Unit	33 Unit		93,75%	100,00%	213,33%	220,00%

Selanjutnya kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan berdasarkan penyerapan anggaran, dapat dilihat pada Tabel 2.9 sebagai berikut :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 2. 9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun					Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Pelayanan Infrastruktur Lingkungan yang Merata dan Berkualitas dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Kota Tarakan				Cakupan Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Administrasi Pertanahan	-	38.614.543.905	47.988.724.303	31.832.329.000	31.835.449.000	-	37.761.237.080	46.277.412.815	60.965.418.527	50.947.705.807	-	97,79%	96,43%	191,52%	160,03%
	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni untuk MBR			Persentase Rumah untuk MBR yang terbangun dan terenovasi	-	1.347.276.921	1.289.999.000	1.340.000.000	1.340.000.000	-	1.336.267.064	1.185.332.440	1.125.580.397	2.708.538.920	-	99,18%	91,89%	84,00%	202,13%
		1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase ketersediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana / relokasi	-	59.203.238	189.999.030	140.000.000	140.000.000	-	51.703.499	89.943.610	86.496.840	145.017.900	-	87,33%	47,34%	61,78%	103,58%
		1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	Cakupan rumah korban bencana yang dibangun dan/atau direhab	-	19.999.739	150.000.000	100.000.000	100.000.000	-	13.500.000	49.999.580	46.889.640	89.999.320	-	67,50%	33,33%	46,89%	90,00%
		1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase penghunian rumah khusus	-	39.203.499	39.999.030	40.000.000	40.000.000	-	38.203.499	39.944.030	39.607.200	55.018.580	-	97,45%	99,86%	99,02%	137,55%
		1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase penghunian unit kamar rusunawa	-	-	-	-	-	-	-				-				
		1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase layanan ketersediaan rumah layak huni untuk MBR	-	1.288.073.683	1.099.999.970	1.200.000.000	1.200.000.000	-	1.284.563.565	1.095.388.830	1.039.083.557	2.563.521.020	-	99,73%	99,58%	86,59%	213,63%
		1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah RTLH yang terfasilitasi	-	1.288.073.683	1.099.999.970	1.200.000.000	1.200.000.000	-	1.284.563.565	1.095.388.830	1.039.083.557	2.563.521.020	-	99,73%	99,58%	86,59%	213,63%
	Menurunnya luas kawasan kumuh			Persentase lingkungan pemukiman kumuh	-	125.000.000	404.983.870	1.405.000.000	1.405.000.000	-	124.495.000	263.824.887	228.475.124	922.633.244	-	99,60%	65,14%	16,26%	65,67%
		1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	-	125.000.000	404.983.870	1.405.000.000	1.405.000.000	-	124.495.000	263.824.887	228.475.124	922.633.244	-	99,60%	65,14%	16,26%	65,67%
		1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase ijin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang diterbitkan	-	-	200.000.000	200.000.000	200.000.000	-		134.411.837	147.368.000		-		67,21%	73,68%	0,00%
		1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	persentase kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha yang tertata	-	-	54.999.810	5.000.000	5.000.000	-		54.793.050	2.449.915	99.365.145	-		99,62%	49,00%	1987,30%
		1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah luasan kumuh dibawah 10 Ha yang tertangani (Ha)	-	125.000.000	149.984.060	1.200.000.000	1.200.000.000	-	124.495.000	74.620.000	78.657.209	823.268.099	-	99,60%	49,75%	6,55%	68,61%
	Meningkatnya lingkungan perumahan dan permukiman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)			Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang ditingkatkan	-	26.561.457.007	35.820.903.383	19.876.654.167	19.876.654.167	-	26.225.443.100	35.617.238.659	47.831.953.537	36.378.399.962	-	98,73%	99,43%	240,64%	183,02%
		1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang ditingkatkan	-	26.561.457.007	35.820.903.383	19.876.654.167	19.876.654.167	-	26.225.443.100	35.617.238.659	47.831.953.537	36.378.399.962	-	98,73%	99,43%	240,64%	183,02%
		1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Panjang Jalan Lingkungan yang dibangun	-	26.561.457.007	35.820.903.383	19.876.654.167	19.876.654.167	-	26.225.443.100	35.617.238.659	47.831.953.537	36.378.399.962	-	98,73%	99,43%	240,64%	183,02%

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun					Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan dalam pembangunan			Persentase konflik/sengketa tanah yang terselesaikan	-	-	39.985.400	30.000.000	30.000.000	-	-	28.952.000	21.939.000	25.518.300	-	0,00%	72,41%	73,13%	85,06%
				Persentase ganti kerugian dan/atau santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	-	-	4.388.194.980	3.200.000.000	3.200.000.000	-	-	3.551.812.105	5.862.922.425	4.282.346.597	-		80,94%	183,22%	133,82%
				Persentase dokumen SPL yang ditindaklanjuti	-	4.993.900.510	19.999.750	20.000.000	20.000.000	-	4.694.698.110	19.530.760	9.932.920	15.555.550	-	94,01%	97,66%	49,66%	77,78%
		2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	-	-	39.985.400	30.000.000	30.000.000	-	-	28.952.000	21.939.000	25.518.300	-	0,00%	72,41%	73,13%	85,06%
		2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penyelesaian sengketa tanah garapan	-	-	39.985.400	30.000.000	30.000.000	-		28.952.000	21.939.000	25.518.300	-	0,00%	72,41%	73,13%	85,06%
		2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase ganti kerugian dan/atau santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	-	-	4.388.194.980	3.200.000.000	3.200.000.000	-	-	3.551.812.105	5.862.922.425	4.282.346.597	-		80,94%	183,22%	133,82%
		2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerima ganti kerugian dan santunan tanah yang terselesaikan	-	-	4.388.194.980	3.200.000.000	3.200.000.000	-		3.551.812.105	5.862.922.425	4.282.346.597	-		80,94%	183,22%	133,82%
		2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase dokumen SPL yang ditindaklanjuti	-	4.993.900.510	19.999.750	20.000.000	20.000.000	-	4.694.698.110	19.530.760	9.932.920	15.555.550	-	94,01%	97,66%	49,66%	77,78%
		2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen SPL yang ditindaklanjuti	-	4.993.900.510	19.999.750	20.000.000	20.000.000	-	4.694.698.110	19.530.760	9.932.920	15.555.550	-	94,01%	97,66%	49,66%	77,78%
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan			NILAI SAKIP	-	5.586.909.467	6.024.657.920	5.960.674.833	5.963.794.833	-	5.380.333.806	5.610.721.964	5.884.615.124	6.614.713.234	-	96,30%	93,13%	98,72%	110,91%
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	-	5.586.909.467	6.024.657.920	5.960.674.833	5.963.794.833	-	5.380.333.806	5.610.721.964	5.884.615.124	6.614.713.234	-	96,30%	93,13%	98,72%	110,91%
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja	-	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-			-		-				
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi Keuangan	-	5.340.777.730	5.497.520.957	5.422.000.000	5.422.000.000	-	5.194.994.499	5.156.908.179	5.314.922.423	5.764.457.263	-	97,27%	93,80%	98,03%	106,32%
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan kepegawaian	-	13.200.000	-	40.000.000	40.000.000	-	13.200.000		14.268.000		-	100,00 %	0,00%	35,67%	0,00%
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	52.070.167	69.812.130	115.000.000	115.000.000	-	50.707.998	67.005.491	82.720.717	194.579.730	-	97,38%	95,98%	71,93%	169,20%
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	-	168.140.640	268.530.000	173.000.000	173.000.000	-	111.919.609	208.688.234	172.560.144	182.796.221	-	66,56%	77,72%	99,75%	105,66%
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	-	12.720.930	183.794.833	205.674.833	208.794.833	-	9.511.700	178.120.060	300.143.840	472.880.020	-	74,77%	96,91%	145,93%	226,48%

Secara keseluruhan, rasio kinerja Anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kota Tarakan selama periode 2020–2024 menunjukkan pola yang bervariasi antara capaian yang sangat tinggi (melebihi 100%) dan capaian yang masih rendah (<70%). Beberapa indikator mencatat capaian yang sangat tinggi, misalnya Persentase Rumah MBR yang terbangun dan direnovasi tahun 2024 (202,13%), Penataan kawasan kumuh di bawah 10 Ha tahun 2023 (1987,30%), Pemeliharaan barang milik daerah tahun 2024 (226,48%). Namun, terdapat pula indikator yang konsisten rendah, misalnya Penurunan luas kawasan kumuh (16,26% di 2022, naik sedikit ke 65,67% di 2024), Cakupan rumah korban bencana yang direhabilitasi (hanya 33–67% pada 2021–2023) Penyelesaian konflik tanah (0% pada 2021, lalu perlahan meningkat). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perangkat daerah masih belum merata, ada program yang sangat efektif dan ada yang masih lemah dalam perencanaan, penganggaran, atau implementasi. Berikut penjelasannya:

- a. Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni untuk MBR
 - Rata-rata capaian di atas 90%, bahkan menembus 202,13% pada 2024. Program rehabilitasi RTLH cukup berhasil. Lonjakan capaian 2024 menandakan adanya intervensi tambahan dari Pemerintah Propinsi serta Pemerintah Pusat diawal Tahun Renstra. Namun capaian menurun di 2022–2023 (84%).
- b. Penanganan Korban Bencana/Relokasi
 - Persentase capaian rendah pada 2021 (87%) dan turun ke 33–61% pada 2022–2023. Menunjukkan bahwa Rendahnya capaian menunjukkan keterbatasan data korban bencana yang terverifikasi, lambannya proses pengadaan lahan/material, atau lemahnya koordinasi dengan BPBD dan instansi lain.
- c. Penanganan Kawasan Kumuh
 - Ada inkonsistensi indikator. Pada satu sisi, luas kumuh yang tertangani sangat kecil (rendah capaian), tapi di sisi lain program penataan kecil-kecilan sangat tinggi. Hal ini menunjukkan adanya mismatch antara indikator luas kumuh (outcome makro) dengan kegiatan lapangan (output mikro)
- d. PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas)
 - Realisasi melampaui target (240% di 2022, 183% di 2024). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja PSU sangat baik, terutama pembangunan jalan lingkungan. Kelebihan capaian menandakan kebutuhan masyarakat sangat tinggi sehingga ada prioritas politik/anggaran. Namun, capaian yang terlalu tinggi bisa menimbulkan kesan bahwa perencanaan awal kurang akurat.
- e. Administrasi Pertanahan
 - Penyelesaian konflik tanah meningkat perlahan (0% → 85%).
 - Ganti rugi tanah sempit sangat tinggi (183% di 2023).
 - Dokumen SPL sempit drop di 2022 (49%).
 - Analisis: Perbaikan ada, tetapi inkonsistensi realisasi antar tahun menunjukkan lemahnya basis data pertanahan. Persoalan teknis verifikasi dan mediasi sering membuat target tidak tercapai.
- f. Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)
 - Capaian relatif stabil (93–110%). Perangkat daerah telah cukup konsisten menjaga akuntabilitas, meski capaian bukan faktor utama pembangunan fisik.

Rekomendasi Perbaikan sebagai acuan penyusunan dokumen Perencanaan selanjutnya antara lain:

a. Perencanaan dan Targeting

- Menyusun target berbasis baseline data yang valid agar tidak terlalu rendah yang menyebabkan terjadi capaian berlebihan maupun terlalu tinggi sehingga capaian yang rendah terus berulang.
- Memperkuat integrasi *planning-budgeting* dengan mempertimbangkan tren realisasi tahun sebelumnya.

b. Penanganan Kawasan Kumuh

- Melakukan sinkronisasi indikator outcome dan output: target penurunan luas kumuh harus linier dengan volume kegiatan penataan kawasan.
- Fokus pada penyelesaian kawasan prioritas daripada kegiatan kecil yang membuat capaian semu.

c. Rumah Korban Bencana/Relokasi

- Memperbaiki mekanisme pendataan penerima manfaat (kolaborasi dengan BPBD, Disdukcapil, dan kecamatan).
- Membentuk skema pembiayaan alternatif (CSR, dana cadangan) agar capaian tidak bergantung penuh pada APBD.

d. Administrasi Pertanahan

- Membangun sistem database pertanahan digital untuk mendukung penyelesaian konflik dan ganti rugi tanah.
- Meningkatkan kapasitas mediasi melalui kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN.

e. PSU dan Infrastruktur

- Menetapkan target yang lebih realistis dengan mempertimbangkan proyeksi kebutuhan 5 tahun ke depan.
- Memprioritaskan kawasan padat penduduk dan rusunawa untuk peningkatan PSU.

f. Akuntabilitas Kinerja

- Mempertahankan capaian SAKIP dengan mendorong budaya kinerja berbasis outcome, bukan hanya output administratif.
- Mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam SAKIP, agar capaian lebih konsisten.

Secara umum Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan tujuan OPD menunjukkan bahwa Anggaran relatif besar (di atas Rp30 miliar/tahun), dengan realisasi mencapai hingga 191,52% (2022) dan 160,03% (2024). Hal ini menunjukkan bahwa Realisasi yang jauh di atas target menandakan fleksibilitas fiskal atau adanya tambahan anggaran (refocusing, DAK tambahan, atau bantuan pusat). Namun, hal ini juga menunjukkan lemahnya *planning and budgeting*, karena target awal tidak realistis dibanding kebutuhan lapangan.

Tabel 2. 10 Capaian IKU, IKK dan SPM Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	IKU/IKK	REALISASI		TARGET				TARGET AKHIR	REALISASI				RASIO			
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan Pelayanan Infrastruktur Perumahan, Permukiman dan Sarana Prasarana dan Utilitas Umum	%	IKU	100	100	100	100	100	100	100	101,80	78,21	100	99,79	102	78	100	100
2	Persentase Rumah untuk MBR yang terbangun dan terenovasi	%	IKU	20,15	21,39	40	60	80	100	100	51,34	66,52	88,96	98,17	128	111	111	98
3	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	%	IKU	52,72	42,44	49,17	31,74	17,64	6,87	6,87	49,17	31,77	17,43	9,37	100	100	99	136
4	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang ditingkatkan	%	IKU	-	-	100	100	100	100	100	83,33	100	98,67	100,00	83	100	99	100
5	Persentase konflik/sengketa tanah yang terselesaikan	%	IKU	25,00	81,81	100	100	100	100	100	96,77	50	33,33	100,00	97	50	33	100
6	Persentase ganti kerugian dan/atau santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	%	IKU	50,00	43,46	100	100	100	100	100	0	100	85,71	100,00	0	100	86	100
7	Persentase dokumen SPL yang ditindaklanjuti	%	IKU	50	100	100	100	100	100	100	97,44	100	100	100	97	100	100	100
8	NILAI SAKIP	Nilai	IKU	-	-	64/B	64/B	64/B	64/B	64/B	74/B	74,23/B	79,91/BB	77,28/BB	116	116	125	121
9	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	IKK	NA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	80,95	100	100	100	81
10	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	IKK	NA	100	100	100	100	100	100	100	100	0,00	0,00	100	100	0	0
11	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	IKK	NA	0,00	19,00	25,00	35,00	21,00	21,00	19,29	24,03	45,15	46,24	102	96	129	220
12	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	IKK	NA	4,95	3,07	2,17	1,37	0,65	0,65	1,61	1,06	1,97	0,23	148	151	56	165
13	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	IKK	NA	100	51,99	68,94	83,06	100	100	1,63	66.56	24,25	1,38	3	0	29	1

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	IKU/IKK	REALISASI		TARGET				TARGET AKHIR	REALISASI				RASIO			
				2019	2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
14	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	IKK	NA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
15	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	IKK	NA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
16	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	%	IKK	NA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100	100	100	0
17	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	IKK	NA	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,75	100	0	0	104	556	0	0
18	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	IKK	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0	100%	100%	100%	0%
19	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	IKK	NA	81,82	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	22,22	50,00	33,33	100,00	28%	63%	42%	125%
20	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	SPM	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00	50%	100%	100%	100%
20	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	SPM	NA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	50,00	100,00	0,00	0,00	50%	100%	0%	0%

Sebagai bagian dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta berpedoman pada RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019–2024, dilakukan evaluasi capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) periode tahun 2019–2024.

Cakupan pelayanan infrastruktur perumahan, permukiman, serta prasarana dan utilitas umum pada periode evaluasi secara konsisten mendekati target 100 persen. Meskipun demikian, pada tahun 2022 terjadi penurunan rasio capaian menjadi 78,21 persen, yang menunjukkan adanya kendala operasional atau keterlambatan penyelesaian program. Kondisi ini berhasil dipulihkan pada tahun-tahun berikutnya dengan capaian kembali sesuai target.

Persentase rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang terbangun dan direnovasi memperlihatkan tren peningkatan signifikan, mencapai 88,96 persen pada tahun 2023 dan 98,17 persen pada tahun 2024. Walaupun capaian tersebut tergolong tinggi, rasio tahun 2024 sedikit di bawah target, mengindikasikan perlunya peningkatan efektivitas pembiayaan dan manajemen pelaksanaan kegiatan yang lebih baik.

Penurunan kawasan permukiman kumuh menunjukkan hasil yang sangat baik. Persentase kawasan kumuh berhasil diturunkan drastis dari 49,17 persen pada tahun 2021 menjadi hanya 6,87 persen pada tahun 2024. Capaian ini melampaui target yang telah ditetapkan (rasio 136 persen pada 2024), yang menandakan keberhasilan program pengentasan kumuh.

Indikator peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum secara umum stabil, meskipun sempat mengalami penurunan capaian menjadi 83,33 persen pada tahun 2021. Di sisi lain, indikator penyelesaian sengketa tanah memperlihatkan fluktuasi signifikan, dengan capaian terendah hanya 33,33 persen pada tahun 2022. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan mekanisme mediasi dan koordinasi lintas sektor. Situasi serupa juga terjadi pada indikator penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah, yang sempat tidak mencapai capaian pada tahun 2021 namun membaik kembali pada tahun 2023.

Penilaian akuntabilitas kinerja (SAKIP) menunjukkan tren perbaikan, dari nilai B (64) pada awal periode menjadi BB (77–79) pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan dalam sistem manajemen kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah.

Pada tingkat IKK, indikator penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana secara umum stabil, meskipun terjadi penurunan capaian menjadi 80,95 persen pada tahun 2024. Indikator fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi menunjukkan capaian nol persen pada tahun 2023 dan 2024, yang mengindikasikan hambatan serius baik dalam perencanaan, pendanaan, maupun pelaksanaan program relokasi.

Indikator penanganan kawasan kumuh di bawah 10 hektar menunjukkan keberhasilan yang signifikan, dengan capaian yang melampaui target hingga rasio 220 persen pada tahun 2024. Penurunan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) juga menunjukkan arah yang positif, meskipun fluktuasi capaian antar tahun memperlihatkan perlunya penyesuaian target agar lebih realistis dan konsisten.

Sebaliknya, indikator penyediaan PSU untuk perumahan menunjukkan capaian yang menurun tajam, dengan rasio hanya 29 persen pada tahun 2023 dan 1 persen pada tahun 2024. Hal ini menandakan adanya kendala koordinasi dengan pengembang maupun keterbatasan

pendanaan. Indikator tanah obyek landreform juga menunjukkan ketidakstabilan, dengan capaian melonjak tajam pada tahun 2022 (556 persen) namun tidak menunjukkan realisasi pada tahun 2023 dan 2024, yang mengindikasikan lemahnya pengelolaan data dan kebijakan redistribusi tanah.

Secara keseluruhan, capaian positif terlihat pada indikator penurunan kawasan kumuh, pembangunan rumah untuk MBR, serta perbaikan nilai SAKIP. Namun demikian, tantangan masih terdapat pada penyediaan PSU, fasilitasi relokasi, penanganan sengketa tanah, dan pelaksanaan landreform. Hambatan-hambatan tersebut kemungkinan disebabkan oleh lemahnya koordinasi lintas perangkat daerah, keterbatasan pendanaan, serta belum optimalnya pemutakhiran data dasar.

Sebagai tindak lanjut, beberapa langkah strategis yang direkomendasikan adalah:

1. Memperkuat basis data RTLH dan MBR melalui survei lapangan yang akurat dan sistem informasi terintegrasi.
2. Membentuk tim kerja lintas perangkat daerah dan BPN untuk mempercepat penyediaan PSU, relokasi, dan penyelesaian sengketa tanah.
3. Mengintegrasikan pengendalian risiko ke dalam dokumen Renja dan Renja Perubahan.
4. Memanfaatkan teknologi digital, seperti dashboard pemantauan capaian triwulanan, untuk memperkuat monitoring dan evaluasi.
5. Meninjau kembali target indikator yang tidak relevan atau terlalu tinggi, khususnya terkait relokasi dan landreform, agar lebih selaras dengan kapasitas riil dan kondisi lapangan.

Dengan pelaksanaan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Tarakan semakin konsisten dan berkelanjutan, serta mampu mendukung pencapaian sasaran RPJMD dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan dan kawasan permukiman.

d. Kelompok Sasaran Layanan

Berdasarkan bidang urusannya, secara garis besar kelompok sasaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan terbagi menjadi:

1) Masyarakat

Kelompok sasaran masyarakat dapat dikelompokkan lagi menjadi, a) masyarakat umum di perumahan dan permukiman, terkait penyelenggaraan jalan lingkungan, dan penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan, b) masyarakat khusus, seperti kelompok swadaya masyarakat untuk korban bencana dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), terkait penyelenggaraan pembangunan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana serta perbaikan rumah tidak layak huni dan bedah rumah.

2) Stakeholder

Kelompok sasaran stakeholder merupakan pihak-pihak, baik itu kelompok masyarakat, pihak swasta ataupun instansi pemerintahan lain yang berkepentingan, terkait penyelenggaraan sengketa status pertanahan, pembentukan tim/satuan petugas pascabencana, dan kelompok swadaya masyarakat dalam penyadaran pencegahan permukiman kumuh serta perangkat daerah lain yang memiliki kepentingan dalam urusan kewenangan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan

e. Mitra Dinas dalam pemberian pelayanan

Mitra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan dalam pemberian pelayanan antara lain:

1. Bersama dengan Kantor Pertanahan/ATR-BPN memfasilitasi sengketa tanah baik tanah masyarakat maupun tanah asset Pemerintah Daerah, karena saat ini tanah-tanah yang penguasaannya belum didasarkan pada bukti kepemilikan formal seperti sertifikat dan bukti-bukti dasar penguasaan, rentan menjadi objek konflik atau sengketa karena adanya klaim dari pihak-pihak lain.
2. Komitmen Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Pertanahan bersama Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan pendekatan dari Desa/Kelurahan Lengkap (PTSL) secara berjenjang hingga Kabupaten/Kota, serta pensertifikatan tanah asset Pemerintah Daerah.

f. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja

Dukungan BUMD dalam Pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan yaitu:

1. Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana melalui dukungan bagi masyarakat terdampak bencana oleh Pemerintah melalui Kementerian PUPR RI, CSR dari BUMN/BUMD dan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara.
2. Dukungan dan fasilitasi bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni atau BSPS dari kementerian PUPR RI, Rutilahu dari Disperkim Provinsi Kalimantan Utara, hal ini karena ketidakmampuan masyarakat secara ekonomi untuk meningkatkan kualitas rumahnya sehingga masih ada masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni, serta fasilitasi optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pengembangan perumahan berbasis komunitas/kelompok masyarakat dan perumahan swadaya bagi MBR.
3. Melalui Kementerian PUPR juga melakukan upaya pengoptimalan peran stakeholder non-Pemerintah dan Pemda dalam melaksanakan penyediaan perumahan di Indonesia, diantara Upaya tersebut adalah pembentukan dan pembinaan Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, dan pembinaan kepada pemda yang melaksanakan pembangunan perumahan dari sumber Dana Alokasi Khusus (DAK).

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan

a. Permasalahan

Permasalahan dalam pelayanan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan teridentifikasi sebagai berikut:

1. Layanan Perumahan Terdampak Bencana & Relokasi

Permasalahan:

- Rendahnya mutu layanan rumah terdampak bencana/relokasi dan Data potensi rawan bencana belum ada.
Ketidadaan basis data rawan bencana dan kebutuhan rumah terdampak membuat penanganan bencana bersifat reaktif, bukan preventif. Mutu layanan rendah karena tidak ada standar teknis yang konsisten, keterbatasan anggaran, serta koordinasi lintas sektor belum optimal.

Arah Solusi:

- Penyusunan peta rawan bencana dan kebutuhan hunian terdampak.
- Penetapan standar layanan minimum hunian pascabencana.

2. Basis Data Perumahan & Permukiman

Permasalahan:

- Data kebutuhan jalan lingkungan yang harus diperbaiki belum ada dan Data RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) & MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) belum ada sehingga hal ini menyulitkan perencanaan, penganggaran, hingga evaluasi. Program perbaikan RTLH, PSU, maupun peningkatan jalan lingkungan sulit diukur keberhasilannya.

Arah Solusi:

- Pembangunan sistem informasi perumahan & permukiman terintegrasi.
- Pendataan periodik berbasis RT/RW hingga spasial GIS.

3. Keterjangkauan Perumahan bagi MBR

Permasalahan:

- Masih rendahnya keterjangkauan MBR untuk membangun/membeli rumah Dan Backlog perumahan meningkat. Hal ini disebabkan karena Harga rumah tidak sebanding dengan daya beli MBR. Skema subsidi/FLPP belum cukup menjangkau kebutuhan lokal. Lahan strategis semakin terbatas dan mahal.

Arah Solusi:

- Optimalisasi program rumah subsidi, insentif pengembang, dan kolaborasi Kementerian-Pemkot.
- Skema kredit ringan atau bantuan stimulan.

4. Permukiman & PSU

Permasalahan:

- Belum tuntasnya penanganan kawasan kumuh.
- Masih kurangnya perumahan dengan PSU.
- Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan perumahan layak & PSU.
- Masih banyak jalan lingkungan belum ditingkatkan.
- Masih rendahnya standar layanan dasar permukiman.

Arah Solusi:

- Program peremajaan/peningkatan kualitas kawasan permukiman.
- Penyediaan PSU wajib oleh pengembang dengan pengawasan ketat.

5. Pengelolaan Rusunawa

Permasalahan:

- Masih rendahnya aksesibilitas & kelayakan hunian Rusunawa.
- Banyak Rusunawa kondisinya tidak layak.

Arah Solusi:

- Revitalisasi rusunawa secara bertahap.
- Skema manajemen pengelolaan berbasis BLUD atau kerja sama swasta.
- Penyesuaian tarif dengan daya beli MBR.

6. Pengelolaan Pertanahan & Aset

Permasalahan:

- Belum optimalnya pengelolaan pertanahan.
- Rendahnya pengamanan aset lahan pemkot.
- Banyak tanah pemerintah diklaim masyarakat.

- Tanah pemerintah belum dipatok.
- Masih ada utang tanah.

Arah Solusi:

- Sertifikasi tanah pemkot.
- Inventarisasi aset berbasis GIS.
- Penyelesaian utang tanah melalui skema negosiasi dan anggaran bertahap.

b. Isu Strategis

Isu Strategis Peningkatan layanan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Kota Tarakan menjadi semakin mendesak karena berbagai faktor struktural dan dinamis yang saling berkaitan.

Pertama, dari sisi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan dan permukiman, pemerintah daerah memiliki kewajiban dasar untuk menjamin masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan rumah layak dan lingkungan permukiman yang sehat. Artinya, penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) dan pengurangan kawasan kumuh bukan lagi sekadar program, melainkan kewajiban hukum yang harus dipenuhi dengan target terukur setiap tahunnya.

Kedua, Kota Tarakan yang merupakan pulau kecil, menghadapi tantangan serius dari sisi keterbatasan lahan. Urbanisasi yang cepat, arus migrasi, serta pertumbuhan penduduk meningkatkan kebutuhan hunian, sementara ketersediaan lahan semakin terbatas. Akibatnya, harga tanah terus naik dan hunian layak semakin sulit dijangkau oleh MBR. Tanpa strategi pengembangan hunian vertikal seperti rumah susun, backlog perumahan akan semakin membesar, dan risiko tumbuhnya permukiman kumuh baru tidak dapat dihindari.

Ketiga, faktor perubahan iklim dan risiko bencana. Kota Tarakan sebagai kota pesisir, rentan terhadap banjir rob, abrasi pantai, curah hujan ekstrem, dan kebakaran di kawasan padat. Banyak permukiman kumuh berdiri di sempadan pantai atau bantaran, sehingga warganya hidup dalam kondisi rawan. Jika tidak ada upaya adaptasi melalui infrastruktur permukiman tahan iklim, proteksi pesisir, dan perencanaan berbasis mitigasi risiko, kerugian sosial dan ekonomi akan terus meningkat.

Keempat, dari sisi kebijakan nasional, RPJPN dan RPJMN menargetkan pengurangan backlog, penanganan RTLH, dan percepatan penghapusan kawasan kumuh, termasuk kumuh pesisir. Kota Tarakan melalui DPRKPP harus menyesuaikan strategi daerah dengan agenda nasional ini agar bisa memperoleh dukungan program pusat seperti BPS, DAK Perkim, dan pembangunan rumah susun. Dengan demikian, keberhasilan daerah sangat ditentukan oleh kemampuan menyelaraskan rencana lokal dengan arah pembangunan nasional.

Kelima, transformasi digital menjadi kebutuhan mendesak. Saat ini, data RTLH, MBR, kawasan kumuh, dan PSU masih tersebar di berbagai unit dan sering kali tidak mutakhir. Akibatnya, penentuan prioritas program kurang tepat sasaran. Dengan membangun Satu Data Perumahan dan Kawasan Permukiman berbasis NIK dan spasial, pemerintah dapat memastikan setiap intervensi tepat sasaran, transparan, dan dapat dipantau masyarakat. Sistem digital juga memungkinkan layanan lebih cepat, mulai dari usulan bantuan rumah, verifikasi, hingga pengawasan proyek.

Keenam, isu SDGs 11 dan urbanisasi memperkuat urgensi tersebut. SDGs menekankan pentingnya kota yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Target global seperti mengurangi proporsi penduduk yang

tinggal di kawasan kumuh, meningkatkan akses sanitasi, dan memperluas ruang publik harus diterjemahkan ke dalam program lokal. Tarakan sebagai kota yang berkembang cepat perlu memastikan bahwa pertumbuhan penduduk dan migrasi tidak justru memperburuk ketimpangan akses hunian.

Ketujuh, persoalan keterbatasan fiskal menjadi tantangan utama. Kapasitas APBD tidak cukup untuk menutup seluruh kebutuhan hunian dan PSU, sementara backlog dan luas kawasan kumuh masih besar. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembiayaan campuran (*blended finance*) dengan menggabungkan APBD, APBN, kemitraan swasta (KPBU), CSR, hingga pemanfaatan nilai tambah lahan (*land value capture*). Tanpa inovasi pembiayaan, target SPM maupun RPJMN tidak akan tercapai.

Permasalahan dan Isu Strategis dalam pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan terdapat pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 2. 11 Pemetaan Permasalahan dan Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ketersediaan Lahan yang Dapat Dialokasikan untuk Relokasi	Rendahnya mutu layanan rumah terdampak bencana/relokasi			Pemenuhan SPM bidang perumahan & permukiman		Peningkatan layanan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan
Dorongan digitalisasi layanan pemerintah	Data potensi rawan bencana belum ada		Perubahan iklim & risiko bencana			
	Data kebutuhan jalan yang harus diperbaiki belum ada			Transformasi digital		
	Data RTLH & MBR belum ada			Transformasi digital		
Program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dari Kementerian PUPR	Masih rendahnya keterjangkauan MBR untuk membangun/membeli rumah			RPJPN/RPJMN: Hunian layak, pengurangan kumuh, backlog		
Dukungan program DAK bidang permukiman	Belum tuntasnya penanganan kawasan kumuh	Perlunya peningkatan kualitas hidup masyarakat pemukiman pesisir		RPJPN/RPJMN: Hunian layak, pengurangan kumuh, backlog	Kawasan kumuh perkotaan & pesisir	
Kewenangan daerah untuk mengalokasikan DAK dan APBD dalam pembangunan PSU perumahan.	Masih kurangnya perumahan dengan PSU			RPJPN/RPJMN: Hunian layak, pengurangan kumuh, backlog	Keterbatasan lahan Kota Tarakan (pulau kecil)	
	Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan perumahan layak & PSU		SDGs 11 & urbanisasi			
	Masih banyak jalan lingkungan belum ditingkatkan			Pemenuhan layanan perumahan & permukiman		
Peluang kemitraan swasta/CSR dalam peningkatan kualitas permukiman	Masih rendahnya standar layanan dasar permukiman		SDGs 11 & urbanisasi			
	Masih rendahnya aksesibilitas & kelayakan hunian Rusunawa			Pemenuhan layanan perumahan & permukiman	Keterbatasan lahan Kota Tarakan (pulau kecil)	

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Digitalisasi data pertanahan	Belum optimalnya pengelolaan pertanahan			Reforma agraria & pengelolaan pertanahan		
	Rendahnya pengamanan aset lahan pemkot			Reforma agraria & pengelolaan pertanahan		
Kebijakan reforma agraria	Banyak tanah pemerintah diklaim masyarakat			Reforma agraria & pengelolaan pertanahan		
	Tanah pemerintah belum dipatok			Reforma agraria & pengelolaan pertanahan		
	Masih ada utang tanah			Reforma agraria & pengelolaan pertanahan		
Ketersediaan lahan pemerintah untuk hunian vertikal	Banyak Rusunawa kondisinya tidak layak			Pemenuhan layanan perumahan & permukiman		
Dukungan program sejuta rumah nasional yang masih berjalan	Backlog perumahan meningkat				Pertumbuhan penduduk & migrasi	
Fasilitas pembiayaan perumahan dari Perbankan	Masih rendahnya keterjangkauan MBR			Keterbatasan fiskal		

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan Tahun 2025-2029 pada prinsipnya merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Kota Tarakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Penjabaran tersebut terutama pada misi yang terkait langsung dengan tugas, pokok, dan fungsinya (Tupoksi) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan.

3.1. Tujuan Renstra Tahun 2025-2029

Berdasarkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan, tujuan jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan yaitu:

Tujuan : “Meningkatnya layanan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan”

Tujuan ini mencerminkan mandat utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, yaitu memastikan setiap warga khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat mengakses hunian yang memenuhi standar kelayakan, harga yang wajar, serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Tujuan ini memiliki 2 (dua) indikator yaitu :

Indikator Tujuan 1:

Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan

Indikator ini bersifat outcome utama karena langsung mencerminkan capaian kualitas hidup masyarakat. Mengintegrasikan aspek layak (fisik rumah dan kelengkapan PSU), terjangkau (keterjangkauan biaya pembangunan/pembelian/penyewaan), dan berkelanjutan (ramah lingkungan, aman bencana, serta berkelanjutan sosial-ekonomi).

Indikator Tujuan 2:

Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator ini menekankan peran strategis pertanahan dalam mendukung pengembangan kawasan perumahan dan permukiman. Konsolidasi tanah bukan hanya soal legalitas, tetapi juga instrumen perencanaan ruang yang dapat mengurangi konflik lahan, meningkatkan nilai tanah, dan mempercepat penyediaan lahan untuk perumahan rakyat. Relevan dengan isu keterbatasan lahan di perkotaan.

3.2. Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Sasaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Periode Renstra Tahun 2025-2029 ada 3 (tiga) Sasaran, yaitu:

Sasaran 1:

“Meningkatnya Aksesibilitas dan Keterjangkauan Sarana Prasarana Permukiman”

Sasaran ini mempertegas bahwa Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan mempunyai tugas untuk menjadikan kawasan permukiman tidak hanya memiliki rumah layak, tetapi juga dilengkapi PSU (jalan lingkungan, drainase, air bersih, listrik, persampahan, dan ruang terbuka hijau).

Indikator Sasaran 1:

Persentase Permukiman yang Sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum).

Indikator ini mengukur pemerataan pembangunan, sekaligus mendukung pencapaian pemenuhan layanan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Sasaran 1 ini relevan dengan Sasaran ke-6 RPJMD yaitu Meningkatkan layanan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan

Sasaran 2:

“Meningkatnya aset tanah pemerintah yang berkepastian hukum”

Sasaran ini mempunyai makna bahwa Kepastian hukum atas tanah menjadi pondasi penting untuk pembangunan fasilitas publik, rumah susun, permukiman baru, serta investasi pemerintah.

Indikator Sasaran 2:

Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah

Indikator ini mendukung tata kelola pertanahan, mengurangi potensi sengketa, dan memberikan jaminan legalitas Pembangunan.

Sasaran 2 ini relevan dengan Sasaran ke-11 RPJMD yaitu Meningkatkan akuntabilitas keuangan.

Sasaran 3:

“Meningkatnya Tata Kelola OPD”

Sasaran ini bermakna tata kelola yang baik merupakan syarat mutlak agar seluruh program perumahan, permukiman, dan pertanahan berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.

Indikator Sasaran 3:

Nilai SAKIP, Mengukur sejauh mana kinerja berbasis perencanaan, penganggaran, dan pelaporan terintegrasi.

2. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), Mengukur kualitas pelayanan publik dari sisi penerima layanan, terutama masyarakat penerima manfaat program perumahan dan PSU.

Sasaran 3 ini relevan dengan Sasaran ke-10 RPJMD yaitu Meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Matriks Tujuan dan Sasaran serta target Kinerja Tahun 2025-2029 Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan terdapat pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	T1: Meningkatnya layanan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (Sasaran RPJMD)		T1: Indikator Tujuan 1: Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan	71.08%	73.51%	75.82%	78.01%	80.11%	82.11%	
S-6 Meningkatnya layanan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan		S1.1: Sasaran 1: Meningkatnya Aksesibilitas dan Keterjangkauan Sarana Prasarana Permukiman	S1.1: Indikator Sasaran 1: Persentase Permukiman yang Sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	34.00%	38.24%	42.32%	46.26%	50.07%	53.75%	
S-10 Meningkatnya akuntabilitas kinerja		S1.2: Sasaran 3: Meningkatnya Tata Kelola OPD	S1.2.1: Nilai SAKIP	84,23	84,24	84.26	84.28	84.30	84.40	
			S1.2.2: IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	88	88.5	89	89.5	90	90.5	
	T1: Meningkatnya layanan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (Sasaran RPJMD)		T2: Indikator Tujuan 2: Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota	39.29%	39.57%	39.71%	39.85%	39.99%	40.13%	
S-11 Meningkatnya akuntabilitas keuangan		S2.1: Sasaran 2: Meningkatnya aset tanah pemerintah yang berkepastian hukum	S2.1: Indikator Sasaran 2: Persentase Penetapan Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	28.10%	28.80%	30.75%	57.12%	76.12%	85.76%	

3.3. Strategi

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 serta tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan, dirumuskan strategi pembangunan sebagai langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi dan kebijakan dilandasi oleh pertimbangan mengenai konsep dan pendekatan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemilahan urusan yang menjadi kewenangan dan dijadikan dasar dalam menyusun program-program, kegiatan dan sub kegiatan dalam lima tahun ke depan.

Strategi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan yaitu:

Tahap 1 (2026)

Fokus pada pendataan, legalisasi, dan penyiapan dasar kebijakan antara lain: percepatan pendataan RTLH, baseline kawasan kumuh, inventarisasi aset dan lahan pemerintah, serta penyusunan SOP penanganan bencana dan relokasi. Layanan dasar sekretariat diperkuat dengan standar SOP, serta mulai dilakukan tindak lanjut LHE AKIP secara terukur.

Tahap II (2027)

Mengutamakan implementasi awal dan kolaborasi lintas pihak antara lain: penanganan RTLH meningkat lewat dukungan APBN/APBD, perbaikan jalan lingkungan diprioritaskan di kawasan padat, redistribusi tanah tahap awal dilakukan, serta percepatan sertifikasi aset tanah Pemda. Layanan sekretariat mulai terdigitalisasi dan rencana tindak lanjut LHE diintegrasikan ke perencanaan.

Tahap III (2028)

Masuk fase penguatan dan inovasi berbasis masyarakat dan teknologi antara lain: penanganan RTLH dengan model *community-based housing*, intervensi kumuh berbasis partisipasi warga, pengawasan aset tanah berbasis GIS, serta pengembangan hunian transisi ramah lingkungan. Layanan kesekretariatan mulai berbasis survei kepuasan dan sistem e-SAKIP diterapkan untuk tindak lanjut LHE.

Tahap IV (2029)

Difokuskan pada integrasi program dan perluasan capaian antara lain: RTLH dikaitkan dengan program PSU, kawasan kumuh dihubungkan dengan kawasan strategis kota, penyelesaian sengketa tanah dipercepat hingga 75%, serta redistribusi tanah tahap lanjutan disertai pendampingan usaha produktif. Layanan kesekretariatan beralih ke *office automation system*, sedangkan LHE AKIP ditindaklanjuti melalui audit internal tahunan.

Tahap V (2030)

Menjadi fase pemantapan dan pencapaian target penuh yaitu backlog RTLH diminimalisasi <5%, seluruh relokasi dan korban bencana memperoleh hunian layak, kawasan kumuh <10 ha tuntas, dan 100% aset tanah pemerintah sah serta aman secara hukum. Reforma agraria terpadu selesai dilaksanakan, rekomendasi LHE ditindaklanjuti 100%, dan indeks layanan kesekretariatan mencapai kategori "Sangat Baik".

Tabel 3 2 Strategi Dinas

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendataan, legalisasi, dan penyiapan dasar kebijakan	Implementasi awal dan kolaborasi lintas pihak	Inovasi berbasis masyarakat dan teknologi	Integrasi program dan perluasan capaian	Pencapaian target

3.4. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Dinas Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan dalam mengimplementasikan strategi yang selaras dengan Arah kebijakan RPJMD ada pada Tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3 3 Arah Kebijakan

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(1)	(3)	(4)	(5)
1	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penurunan jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Penyelenggaraan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	
		Pemenuhan rumah bagi korban bencana dan terdampak program pemerintah	Penyediaan data dan informasi lahan potensial yang aman, sesuai ruang dan layak secara sosial-ekonomi sebagai lokasi relokasi perumahan	
			Peningkatan aksesibilitas dan keterjangkauan rusus dan rusunawa	
		Peningkatan wilayah permukiman terlayani PSU dasar	Pelaksanaan operasional PSU Perumahan	
			Pelaksanaan peningkatan jalan lingkungan permukiman sesuai rencana teknis	
		Penurunan luas kawasan kumuh	Pelaksanaan kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha sesuai standar teknis	
			Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha sesuai standar teknis	
2	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat		Penyediaan data dan informasi lahan potensial yang aman, sesuai ruang dan layak secara sosial-ekonomi sebagai lokasi relokasi perumahan	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(1)	(3)	(4)	(5)
3	Permen ATR/BPN No 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan	Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Tata Kelola Pemerintahan	Pelaksanaan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan masyarakat	
4	Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah		Penyelesaian Pembayaran ganti kerugian Tanah untuk Pembangunan	
5	Permen ATR/BPN No 19 Tahun 2021 tentang Juknis Pengadaan Tanah		Penyediaan Lahan yang siap bangun	
6	Perpres No.62 tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria		Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pemanfaatan redistribusi tanah dan penataan aset reforma agraria	

Dalam rangka mewujudkan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Kota Tarakan, penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan berpedoman pada berbagai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Pemerintah Pusat, serta diarahkan oleh kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Seluruh arah kebijakan Renstra PD diturunkan secara langsung dari amanat NSPK dan prioritas RPJMD, sehingga pelaksanaan program/kegiatan/Subkegiatan dapat menjamin keterpaduan, kepastian hukum, dan efektivitas pelayanan publik.

Pertama, PP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi dasar utama dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pemenuhan rumah bagi korban bencana, penyediaan rumah susun sederhana (rusus) dan rumah susun sewa (rusunawa), serta penataan kawasan permukiman kumuh. Dalam kerangka RPJMD, kebijakan ini diwujudkan melalui penurunan jumlah RTLH, penurunan luas kawasan kumuh, peningkatan wilayah permukiman terlayani prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) dasar, serta pemenuhan rumah bagi korban bencana dan program relokasi. Arah kebijakan Renstra PD kemudian diformulasikan dalam bentuk penyelenggaraan rehabilitasi RTLH, penyediaan data dan informasi lahan potensial relokasi yang aman dan sesuai rencana tata ruang, pelaksanaan operasional PSU, peningkatan jalan lingkungan permukiman, serta kegiatan penataan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh sesuai standar teknis.

Kedua, Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat menegaskan kewajiban pemerintah daerah dalam memenuhi pelayanan dasar bidang perumahan. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan memastikan penyediaan data dan informasi lahan potensial untuk relokasi perumahan dengan validasi lapangan secara berkala.

Ketiga, dalam aspek pertanahan, Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, PP Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah, serta Permen ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 tentang Juknis Pengadaan Tanah

mengarahkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas tata kelola pertanahan. Arah kebijakan Renstra PD mencakup penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan masyarakat, penyediaan lahan siap bangun, serta penyelesaian pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan. Implementasi kebijakan ini mendukung pencapaian sasaran RPJMD berupa peningkatan kualitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan, serta memastikan kelancaran pembangunan infrastruktur perumahan.

Keempat, Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Reforma Agraria memberikan dasar hukum untuk pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi redistribusi tanah dan penataan aset. Melalui kebijakan ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan berperan aktif mendukung redistribusi tanah sebagai upaya pemerataan akses lahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan pemanfaatannya untuk pengembangan kawasan permukiman yang sesuai rencana tata ruang dan kebutuhan PSU dasar.

Integrasi seluruh kebijakan tersebut memastikan bahwa arah pembangunan perumahan dan permukiman di Kota Tarakan selaras dengan RPJMD, SPM, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Renstra PD tidak hanya menitikberatkan pada output fisik seperti jumlah rumah yang direhabilitasi atau panjang jalan lingkungan yang ditingkatkan, tetapi juga pada *outcome* strategis: penurunan backlog perumahan, pengurangan kawasan kumuh, peningkatan keterjangkauan hunian, dan penguatan ketahanan permukiman terhadap bencana dan perubahan iklim.

Dengan pendekatan ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan diharapkan mampu menyediakan pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan permukiman yang aman, sehat, produktif, dan berdaya saing sesuai visi pembangunan Kota Tarakan.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan menggunakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada urusan pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan pemerintahan Bidang Pertanahan. Adapun program di dalamnya memuat kegiatan dan sub kegiatan yang secara keseluruhan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Uraian Program/kegiatan/sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan Pagu indikatif Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan terdapat pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 dibawah ini.

Tabel 4. 1 Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rencana Strategis

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	T1: Meningkatnya layanan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (Sasaran RPJMD)				T1: Indikator Tujuan 1: Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan		
S-6 Meningkatnya layanan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan		S1.1: Sasaran 1: Meningkatnya Aksesibilitas dan Keterjangkauan Sarana Prasarana Permukiman			S1.1: Indikator Sasaran 1: Persentase Permukiman yang Sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		
			OC1.1.1: Menurunnya Jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (LPPD)		OC1.1.1: Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani (IKK Outcome 1.d.4)	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Kabid
				OT1.1.1.1: Terselenggaranya Rehabilitasi terhadap Rumah tidak Layak Huni	OT1.1.1.1: Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhabilitasi	1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	JF
				OS1.1.1.1.1: Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	OS1.1.1.1.1: Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Staf
				OS1.1.1.1.2: Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	OS1.1.1.1.2: Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	1.04.04.2.01.0004 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Staf
			OC1.1.2: Pemenuhan rumah bagi korban bencana dan terdampak program pemerintah		OC1.1.2: 1. Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni (IKK Outcome 1.d.1)	1.04.02: PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kabid
					OC1.1.2: 2. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (IKK Outcome 1.d.2)		Kabid
				OT1.1.2.1: Tersedianya data dan informasi lahan potensial yang aman, sesuai ruang dan layak secara sosial-ekonomi sebagai lokasi relokasi perumahan	OT1.1.2.1: Jumlah dokumen database rumah terdampak bencana atau program relokasi	1.04.02.2.01: Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	JF
				OS1.1.2.1.1: Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	OS1.1.2.1.1: Jumlah lokasi lahan potensial yang teridentifikasi dan terdokumentasi	1.04.02.2.01.0002: Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Staf
				OT1.1.2.2: Tersedianya data dan informasi lahan potensial yang aman, sesuai ruang dan layak secara sosial-ekonomi sebagai lokasi relokasi perumahan	OT1.1.2.2: Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	1.04.02.2.03: Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	JF
					OT1.1.2.2: Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah		
				OS1.1.2.2.1: Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	OS1.1.2.2.1: Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Staf
				OS1.1.2.2.2: Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	OS1.1.2.2.2: Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1.04.02.2.01.0006 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Staf

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				OS1.1.2.2.3: Terasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	OS1.1.2.2.3: Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah	1.04.02.2.03.0008 Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Staf
				OT1.1.2.3: Meningkatnya aksesibilitas dan keterjangkauan rusus dan rusunawa	OT1.1.2.3: 1. PAD urusan rusus dan rusunawa	1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kepala UPTD
					OT1.1.2.3: 2. jumlah rusus yang layak dan memadai		
					OT1.1.2.3: 3. jumlah rusunawa yang layak dan memadai		
				OS1.1.2.3.1: Terlaksananya operasional dan pemeliharaan rumah susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota	OS1.1.2.3.1: Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	1.04.02.2.05.0008 Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota	Staf
			OC1.1.3: Meningkatnya wilayah permukiman terlayani PSU dasar		OC1.1.3: Persentase jalan lingkungan yang layak	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Kabid
				OT1.1.3.1: 2. Terlaksananya operasional PSU Perumahan	OT1.1.3.1: 2. Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (IKK Outcome 1.d.5)	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	JF
				OS1.1.3.1.1: Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	OS1.1.3.1.1: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Staf
				OS1.1.3.1.2: Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	OS1.1.3.1.2: Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	1.04.05.2.01.0011 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Staf
				OT1.1.3.2: 1. Terlaksananya peningkatan jalan lingkungan permukiman sesuai rencana teknis	OT1.1.3.2: 1. Panjang jalan lingkungan yang layak	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	JF
				OS1.1.3.2.1: Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	OS1.1.3.2.1: Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1.04.05.2.01.0010 Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Staf
				OS1.1.3.2.2: Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	OS1.1.3.2.2: Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1.04.05.2.01.0012 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Staf
			OC1.1.4: Menurunnya luas kawasan kumuh		OC1.1.4: Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (IKK Outcome 1.d.3)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Kabid
				OT1.1.4.1: Terlaksananya kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha sesuai standar teknis	OT1.1.4.1: Luas kawasan kumuh dengan Luas Di bawah 10 Ha yang ditangani	1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	JF
				OS1.1.4.1.1: Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	OS1.1.4.1.1: Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Staf
				OS1.1.4.1.2: Terlaksananya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	OS1.1.4.1.2: Jumlah Dokumen Hasil Survey dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1.04.03.2.02.0014 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Staf

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				OT1.1.4.2: Terlaksananya kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha sesuai standar teknis	OT1.1.4.2: Luas kawasan kumuh dengan Luas Di bawah 10 Ha yang ditangani	1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	JF
				OS1.1.4.2.1: Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	OS1.1.4.2.1: Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Staf
				OS1.1.4.2.2: Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	OS1.1.4.2.2: Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran /Peremajaan Permukiman Kumuh	1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran /Peremajaan Permukiman Kumuh	Staf
				OS1.1.4.2.3: Terlaksananya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh	OS1.1.4.2.3: Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Staf
S-10 Meningkatnya akuntabilitas kinerja		S1.2: Sasaran 3: Meningkatnya Tata Kelola OPD		S1.2.1: Nilai SAKIP			
				S1.2.2: IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)			
			OC1.2.1:1. Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja		OC1.2.1: 1. Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretaris
				OT1.2.1.1: Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	OT1.2.1.1: Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kasubag PRK
				OS1.2.1.1.1: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	OS1.2.1.1.1: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.04.01.2.01.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Staf
				OS1.2.1.1.2: Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	OS1.2.1.1.2: Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.04.01.2.01.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Staf
				OS1.2.1.1.3: Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	OS1.2.1.1.3: Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.04.01.2.01.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Staf
				OS1.2.1.1.4: Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	OS1.2.1.1.4: Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.04.01.2.01.4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Staf
				OS1.2.1.1.5: Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	OS1.2.1.1.5: Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.04.01.2.01.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Staf
				OS1.2.1.1.6: Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	OS1.2.1.1.6: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.04.01.2.01.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Staf
				OS1.2.1.1.7: Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	OS1.2.1.1.7: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.04.01.2.01.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Staf
				OS1.2.1.1.8: Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	OS1.2.1.1.8: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1.04.01.2.01.8 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Staf

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				OS1.2.1.1.9: Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	OS1.2.1.1.9: Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1.04.01.2.01.9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Staf
				OS1.2.1.1.10: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	OS1.2.1.1.10: Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1.04.01.2.01.11 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Staf
				OT1.2.1.2: Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP	OT1.2.1.2: Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP	1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kasubag PRK
				OS1.2.1.2.1: Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	OS1.2.1.2.1: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.04.01.2.02.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Staf
				OS1.2.1.2.2: Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	OS1.2.1.2.2: Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.04.01.2.02.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Staf
				OS1.2.1.2.3: Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	OS1.2.1.2.3: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.04.01.2.02.5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Staf
				OS1.2.1.2.4: Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	OS1.2.1.2.4: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.04.01.2.02.7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Staf
				OS1.2.1.2.5: Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	OS1.2.1.2.5: Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.04.01.2.02.8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Staf
				OC1.2.2: 2. Meningkatnya layanan kesekretariatan	OC1.2.2: 2. Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretaris
				OT1.2.2.1: Meningkatnya kinerja dan kompetensi ASN	OT1.2.2.1: Nilai IP ASN Perangkat Daerah	1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kasubag Umum
				OS1.2.2.1.1: Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	OS1.2.2.1.1: Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1.04.01.2.05.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Staf
				OS1.2.2.1.2: Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	OS1.2.2.1.2: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1.04.01.2.05.2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Staf
				OS1.2.2.1.4: Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	OS1.2.2.1.4: Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.04.01.2.05.5 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Staf
				OS1.2.2.1.6: Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	OS1.2.2.1.6: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1.04.01.2.05.9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Staf
				OS1.2.2.1.8: Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	OS1.2.2.1.8: Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.04.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Staf
				OT1.2.2.2: Tersedianya layanan administrasi umum dan jasa penunjang	OT1.2.2.2: Jumlah ASN yang terlayani	1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kasubag Umum

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				OS1.2.2.2.1: Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	OS1.2.2.2.1: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1.04.01.2.06.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Staf
				OS1.2.2.2.3: Tersedianya Bahan Logistik Kantor	OS1.2.2.2.3: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.04.01.2.06.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Staf
				OS1.2.2.2.4: Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	OS1.2.2.2.4: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1.04.01.2.06.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Staf
				OS1.2.2.2.7: Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	OS1.2.2.2.7: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.04.01.2.06.9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Staf
				OS1.2.2.2.9: Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	OS1.2.2.2.9: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.04.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Staf
				OT1.2.2.3: Terkelolanya Pendataan barang Milik Daerah	OT1.2.2.3: Persentase Barang Milik Daerah yang terinput dalam aplikasi e-BMD	1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kasubag Umum
				OS1.2.2.3.1: Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	OS1.2.2.3.1: Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1.04.01.2.07.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Staf
				OS1.2.2.3.2: Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	OS1.2.2.3.2: Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1.04.01.2.07.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Staf
				OS1.2.2.3.3: Tersedianya Mebel	OS1.2.2.3.3: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1.04.01.2.07.5 Pengadaan Mebel	Staf
				OS1.2.2.3.5: Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OS1.2.2.3.5: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1.04.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Staf
				OT1.2.2.4: Tersedianya layanan jasa penunjang	OT1.2.2.4: Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia	1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubag Umum
				OS1.2.2.4.1: Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	OS1.2.2.4.1: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.04.01.2.08.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Staf
				OS1.2.2.4.2: Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	OS1.2.2.4.2: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.04.01.2.08.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Staf
				OS1.2.2.4.4: Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	OS1.2.2.4.4: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.04.01.2.08.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Staf
				OT1.2.2.5: Terkelolanya Pendataan barang Milik Daerah	OT1.2.2.5: Persentase Barang Milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan	1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubag Umum
				OS1.2.2.5.1: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	OS1.2.2.5.1: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.04.01.2.09.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Staf
				OS1.2.2.5.2: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	OS1.2.2.5.2: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.04.01.2.09.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Staf
				OS1.2.2.5.3: Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	OS1.2.2.5.3: Jumlah Mebel yang Dipelihara	1.04.01.2.09.5 Pemeliharaan Mebel	Staf
				OS1.2.2.5.5: Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OS1.2.2.5.5: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.04.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Staf

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				OS1.2.2.5.6: Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OS1.2.2.5.6: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.04.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Staf
S-11 Meningkatnya akuntabilitas keuangan	T1: Meningkatnya layanan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (Sasaran RPJMD)			T2: Indikator Tujuan 2: Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota (IKK Baru 8)			
		S2.1: Sasaran 2: Meningkatnya aset tanah pemerintah yang berkepastian hukum		S2.1: Indikator Sasaran 2: Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah (IKK OUTCOME TANAH 7)			
			OC2.1.1: Meningkatnya kinerja layanan pengamanan aset tanah pemerintah daerah	OC2.1.1: Persentase luas aset tanah Pemerintah Kota yang bersengketa dan diselesaikan melalui mediasi	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Kabid	
			OT2.1.1.1: Terselesaikannya sengketa dan konflik pertanahan masyarakat	OT2.1.1.1: Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi (IKK Outcome Tanah 5)	2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	JF	
			OS2.1.1.1.1: Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	OS2.1.1.1.1: Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan	2.10.04.2.01.0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Staf	
			OC2.1.2: Meningkatnya kinerja layanan pengamanan aset tanah pemerintah daerah	OC2.1.2: Persentase aset tanah pemda yang ditindaklanjuti pengamanannya	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Kabid	
			OT2.1.2.1: Terselesaikannya Pembayaran ganti kerugian Tanah untuk Pembangunan	OT2.1.2.1: Persentase bidang tanah yang telah dibayarkan ganti ruginya dibandingkan dengan total bidang tanah yang direncanakan dalam tahun berjalan	2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	JF	
			OS2.1.2.1.1: Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	OS2.1.2.1.1: Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah	2.10.05.2.01.0003 Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Staf	
			OS2.1.2.1.2: Terselesaikannya Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	OS2.1.2.1.2: Jumlah laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	2.10.05.2.01.0004 Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Staf	
			OS2.1.2.1.3: Terselesaikannya permasalahan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	OS2.1.2.1.3: Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	2.10.05.2.01.0005 Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Staf	
			OC2.1.3: Optimalisasi Pelayanan Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	OC2.1.3: Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Kabid	
			OT2.1.3.1: Tersedianya Lahan yang siap bangun	OT2.1.3.1: Jumlah Surat Keputusan Penetapan Lokasi	2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	JF	
			OS2.1.3.1.1: Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	OS2.1.3.1.1: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	2.10.10.2.01.0004 Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Staf	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			OC2.1.4: Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah BA rakortek		OC2.1.4: 1. Jumlah bidang tanah yang didistribusi 2. Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria Indikator Rakortekbang	2.10.06 Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Kabid
				OT2.1.4.1: Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pemanfaatan redistribusi tanah dan penataan aset reforma agraria	OT2.1.4.1: Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/ Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran (IKK Outcome Tanah 1)	2.10.06.2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	JF
				OS2.1.4.1.1: Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	OS2.1.4.1.1: Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	2.10.06.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Staf
				OS2.1.4.1.2: Terlaksananya Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	OS2.1.4.1.2: Jumlah laporan Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria.	2.10.06.2.01.0006 Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Staf

Tabel 4.1 tersebut menunjukkan keterkaitan yang kuat antara sasaran strategis RPJMD, NSPK, dan program/kegiatan/subkegiatan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan. Setiap tahapan dari tujuan hingga output tersusun hierarkis dan saling mendukung. Program teknis berfokus pada penyediaan/perbaikan hunian dan penataan lingkungan, sedangkan program penunjang memperkuat tata kelola, akuntabilitas, dan pengelolaan aset. Sinergi ini memastikan pencapaian tujuan RPJMD secara terukur, berkelanjutan, dan sesuai standar pelayanan minimal.

Keterkaitan Sasaran, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keterkaitan Vertikal yang Jelas

Sasaran RPJMD ke-6 yaitu Meningkatnya layanan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan dijabarkan ke sasaran perangkat daerah menjadi Sasaran 1 Meningkatnya Aksesibilitas dan Keterjangkauan Sarana Prasarana Permukiman, serta Sasaran 2 Meningkatnya aset tanah pemerintah yang berkepastian hukum kemudian diterjemahkan menjadi *outcome* kunci seperti:

- Penurunan jumlah rumah tidak layak huni (RTLH).
- Pemenuhan rumah bagi korban bencana dan relokasi program pemerintah.
- Peningkatan wilayah permukiman terlayani PSU.
- Penurunan luas kawasan kumuh.
- Pengamanan aset tanah pemerintah.

Outcome tersebut diturunkan lagi ke *output* dan indikator spesifik yaitu jumlah rumah yang direhabilitasi, dokumen data lahan potensial, panjang jalan lingkungan yang layak, dll yang menjadi dasar perencanaan program dan kegiatan.

2. Konsistensi dengan NSPK dan Kewenangan Daerah

Seluruh program utama yaitu Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, Program Pengembangan Perumahan, Program Kawasan Permukiman, dan Program Peningkatan PSU telah sesuai dengan NSPK nasional dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang perumahan, permukiman, serta pertanahan. Kegiatan seperti Perbaikan RTLH, Pembangunan Rumah Baru Layak Huni, Penataan Kawasan Kumuh, dan Pendataan Lahan Potensial mendukung pemenuhan SPM serta RPJMN/RPJPN.

3. Pendukung Akuntabilitas dan Tata Kelola

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (perencanaan, penganggaran, keuangan, kepegawaian, administrasi umum, dan pengelolaan aset) memastikan kualitas tata kelola, mendukung nilai SAKIP, IKM, dan penyediaan sarana-prasarana penunjang. Subkegiatan seperti penyusunan RKA/DPA, walidata statistik sektoral, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah, serta penyediaan jasa penunjang menjamin kelancaran operasional perangkat daerah.

4. Sinergi Lintas Bidang

Kegiatan PSU (peningkatan jalan lingkungan, penyediaan sarana prasarana) terhubung langsung dengan program penataan kawasan kumuh dan perbaikan RTLH. Data dan informasi lahan relokasi mendukung pembangunan rumah baru dan rehabilitasi bagi korban bencana serta meminimalkan sengketa aset tanah. Pengelolaan rusunawa dan rumah khusus berkontribusi terhadap aksesibilitas hunian bagi MBR dan masyarakat terdampak relokasi.

5. Penguatan *Outcome* dan Dampak

Kegiatan berorientasi pada dampak nyata: berkurangnya permukiman kumuh, meningkatnya akses PSU, terjaminnya hunian layak bagi korban bencana, dan meningkatnya kepastian hukum aset tanah. Adanya indikator kuantitatif (persentase, jumlah unit, panjang jalan) memungkinkan evaluasi kinerja yang objektif dan akuntabel.

Selanjutnya Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan disajikan pada Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				42.711.397.784,00		44.357.477.784,00		44.308.077.784,00		45.024.397.784,00		46.071.637.784,00		
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.795.581.784,00		8.795.581.784,00		8.710.581.784,00		8.710.581.784,00		8.710.581.784,00		
Meningkatnya layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	0	90	1.361.521.545,00	90,10	1.361.521.545,00	90,20	1.276.521.545,00	90,30	1.276.521.545,00	90,40	1.276.521.545,00	1.04.2.10.0.00.01.0 000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
1.04.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				345.379.155,00		345.379.155,00		310.379.155,00		310.379.155,00		310.379.155,00		
Meningkatnya Kinerja dan Kompetensi ASN	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	345.379.155,00	1	345.379.155,00	1	310.379.155,00	1	310.379.155,00	1	310.379.155,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	8		24		24		24		24			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	10		10		10		10		10			
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	3	3		3		3		3		3			
1.04.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				5.000.000,00		5.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	3	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00		
1.04.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				25.000.000,00		25.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
1.04.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				210.379.155,00		210.379.155,00		210.379.155,00		210.379.155,00		210.379.155,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	10	210.379.155,00	10	210.379.155,00	10	210.379.155,00	10	210.379.155,00	10	210.379.155,00		
1.04.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	8	100.000.000,00	24	100.000.000,00	24	100.000.000,00	24	100.000.000,00	24	100.000.000,00			
1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				138.745.820,00		138.745.820,00		138.745.820,00		138.745.820,00		138.745.820,00			
Tersedianya layanan administrasi umum dan jasa penunjang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	138.745.820,00	1	138.745.820,00	1	138.745.820,00	1	138.745.820,00	1	138.745.820,00			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8	8		8		8		8						
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1				
1.04.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.984.200,00		3.984.200,00		3.984.200,00		3.984.200,00		3.984.200,00			
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	3.984.200,00	1	3.984.200,00	1	3.984.200,00	1	3.984.200,00	1	3.984.200,00			
1.04.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				37.921.380,00		37.921.380,00		37.921.380,00		37.921.380,00		37.921.380,00			
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	37.921.380,00	1	37.921.380,00	1	37.921.380,00	1	37.921.380,00	1	37.921.380,00			
1.04.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.472.040,00		6.472.040,00		6.472.040,00		6.472.040,00		6.472.040,00			
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	6.472.040,00	1	6.472.040,00	1	6.472.040,00	1	6.472.040,00	1	6.472.040,00			
1.04.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				85.368.200,00		85.368.200,00		85.368.200,00		85.368.200,00		85.368.200,00			
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8	8	85.368.200,00	8	85.368.200,00	8	85.368.200,00	8	85.368.200,00	8	85.368.200,00			
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00			
1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				260.638.930,00		260.638.930,00		210.638.930,00		210.638.930,00		210.638.930,00			
Terkelolanya Pendataan barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	1	260.638.930,00	1	260.638.930,00	1	210.638.930,00	1	210.638.930,00	1	210.638.930,00			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	10		10		10		10		10			
1.04.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.04.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50.000.000,00		50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
1.04.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				54.535.130,00		54.535.130,00		54.535.130,00		54.535.130,00		54.535.130,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	1	54.535.130,00	1	54.535.130,00	1	54.535.130,00	1	54.535.130,00	1	54.535.130,00		
1.04.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				106.103.800,00		106.103.800,00		106.103.800,00		106.103.800,00		106.103.800,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	10	106.103.800,00	10	106.103.800,00	10	106.103.800,00	10	106.103.800,00	10	106.103.800,00		
1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				256.439.500,00		256.439.500,00		256.439.500,00		256.439.500,00		256.439.500,00		
Tersedianya layanan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	256.439.500,00	12	256.439.500,00	12	256.439.500,00	12	256.439.500,00	12	256.439.500,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12					
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1					
1.04.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
1.04.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				240.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00		
1.04.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				13.439.500,00		13.439.500,00		13.439.500,00		13.439.500,00		13.439.500,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	13.439.500,00	12	13.439.500,00	12	13.439.500,00	12	13.439.500,00	12	13.439.500,00		
1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				360.318.140,00		360.318.140,00		360.318.140,00		360.318.140,00		360.318.140,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
Terkelolanya Pendataan barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	3	360.318.140,00	3	360.318.140,00	3	360.318.140,00	3	360.318.140,00	3	360.318.140,00			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	14	14		14		14		14		14				
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	25		25		25		25		25				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5		5		5		5		5				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10	10		10		10		10		10				
1.04.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00			
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	14	14	5.000.000,00	14	5.000.000,00	14	5.000.000,00	14	5.000.000,00	14	5.000.000,00			
1.04.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				52.898.340,00		52.898.340,00		52.898.340,00		52.898.340,00		52.898.340,00			
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	3	52.898.340,00	3	52.898.340,00	3	52.898.340,00	3	52.898.340,00	3	52.898.340,00			
1.04.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00			
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	25	5.000.000,00	25	5.000.000,00	25	5.000.000,00	25	5.000.000,00	25	5.000.000,00			
1.04.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				276.509.800,00		276.509.800,00		276.509.800,00		276.509.800,00		276.509.800,00			
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5	276.509.800,00	5	276.509.800,00	5	276.509.800,00	5	276.509.800,00	5	276.509.800,00			
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10	10	20.910.000,00	10	20.910.000,00	10	20.910.000,00	10	20.910.000,00	10	20.910.000,00			
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	7.434.060.239,00	100	7.434.060.239,00	100	7.434.060.239,00	100	7.434.060.239,00	100	7.434.060.239,00			
1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				19.000.000,00		19.000.000,00		19.000.000,00		19.000.000,00		19.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	1	19.000.000,00	1	19.000.000,00	1	19.000.000,00	1	19.000.000,00	1	19.000.000,00			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			1	1
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			1	1
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			3	3
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			2	2
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			1	1
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			1	1
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			1	1
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			1	1
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4			4	4
1.04.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00	3	0,00			
1.04.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.04.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00			
1.04.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
1.04.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
1.04.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
1.04.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00		
1.04.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.04.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.04.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	2	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00		
Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	24	24	7.415.060.239,00	24	7.415.060.239,00	24	7.415.060.239,00	24	7.415.060.239,00	24	7.415.060.239,00		
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1		1		1							
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1							
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)													
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	62	62		62		62		62		62			
1.04.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.807.974.239,00		5.807.974.239,00		5.807.974.239,00		5.807.974.239,00		5.807.974.239,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	62	62	5.807.974.239,00	62	5.807.974.239,00	62	5.807.974.239,00	62	5.807.974.239,00	62	5.807.974.239,00		
1.04.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.607.086.000,00		1.607.086.000,00		1.607.086.000,00		1.607.086.000,00		1.607.086.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	24	24	1.607.086.000,00	24	1.607.086.000,00	24	1.607.086.000,00	24	1.607.086.000,00	24	1.607.086.000,00		
1.04.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
1.04.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00		
1.04.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				1.075.576.000,00		725.576.000,00		725.576.000,00		725.576.000,00		725.576.000,00		
	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	80,95	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				350.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya data dan informasi lahan potensial yang aman, sesuai ruang dan layak secara sosial-ekonomi sebagai lokasi relokasi perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)	0	1	350.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)	0	1		0		0		0		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.04.02.2.01.0002 - Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)	0	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.04.02.2.01.0006 - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus				100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dokumen)	0	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				150.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		
Tersedianya data dan informasi lahan potensial yang aman, sesuai ruang dan layak secara sosial-ekonomi sebagai lokasi relokasi perumahan	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	17	40	230.000.000,00	40	230.000.000,00	40	230.000.000,00	40	230.000.000,00	40	230.000.000,00		
	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	0	5		1		1		1		1			
1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
1.04.02.2.03.0008 - Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah (Rumah Tangga)	0	5	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
1.04.02.2.05 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				495.576.000,00		495.576.000,00		495.576.000,00		495.576.000,00		495.576.000,00		
Meningkatnya aksesibilitas dan keterjangkauan rusus dan rusunawa	Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal))	2	2	495.576.000,00	2	495.576.000,00	2	495.576.000,00	2	495.576.000,00	2	495.576.000,00		
1.04.02.2.05.0008 - Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota				495.576.000,00		495.576.000,00		495.576.000,00		495.576.000,00		495.576.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya operasional dan pemeliharaan rumah susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan (Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal))	2	2	495.576.000,00	2	495.576.000,00	2	495.576.000,00	2	495.576.000,00	2	495.576.000,00		
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				6.328.000.000,00		6.178.000.000,00		5.178.000.000,00		1.528.000.000,00		1.178.000.000,00		
Menurunnya luas kawasan kumuh	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	41,66	29,73	6.328.000.000,00	43,08	6.178.000.000,00	57,04	5.178.000.000,00	71,25	1.528.000.000,00	100,00	1.178.000.000,00	1.04.2.10.0.00.01.0 000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				160.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		360.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha sesuai standar teknis	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dokumen)	1	1	160.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	360.000.000,00	1	10.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi (Dokumen)	0	1		0		0		2		0			
1.04.03.2.02.0008 - Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP				150.000.000,00		0,00		0,00		350.000.000,00		0,00		
Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi (Dokumen)	0	1	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	2	350.000.000,00	0	0,00		
1.04.03.2.02.0014 - Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				6.168.000.000,00		6.168.000.000,00		5.168.000.000,00		1.168.000.000,00		1.168.000.000,00		
Terlaksananya kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha sesuai standar teknis	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Laporan)	1	2	6.168.000.000,00	2	6.168.000.000,00	2	5.168.000.000,00	2	1.168.000.000,00	2	1.168.000.000,00		
	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	203	183		173		163		153		143			
	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)	1,82	1,90		4,19		2,02		0,63		2			
1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	203	183	1.000.000.000,00	173	1.000.000.000,00	163	1.000.000.000,00	153	500.000.000,00	143	500.000.000,00		
1.04.03.2.03.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan				168.000.000,00		168.000.000,00		168.000.000,00		168.000.000,00		168.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh															
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Laporan)	1	2	168.000.000,00	2	168.000.000,00	2	168.000.000,00	2	168.000.000,00	2	168.000.000,00			
1.04.03.2.03.0013 - Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh				5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		4.000.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00			
Terlaksananya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)	1,82	1,90	5.000.000.000,00	4,19	5.000.000.000,00	2,02	4.000.000.000,00	0,63	500.000.000,00	2	500.000.000,00			
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH				5.870.000.000,00		5.470.000.000,00		5.870.000.000,00		5.470.000.000,00		5.470.000.000,00			
Menurunnya Jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani (%)	2,40	2,78	5.870.000.000,00	3,03	5.470.000.000,00	3,29	5.870.000.000,00	3,54	5.470.000.000,00	3,79	5.470.000.000,00	1.04.2.10.0.00.01.000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan		
1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota				5.870.000.000,00		5.470.000.000,00		5.870.000.000,00		5.470.000.000,00		5.470.000.000,00			
	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	0	9				9				9				
	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	122	200				200				200				
1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				4.600.000.000,00		4.200.000.000,00		4.600.000.000,00		4.200.000.000,00		4.200.000.000,00			
	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	122	200		4.600.000.000,00		200		4.200.000.000,00		200			4.600.000.000,00	200
1.04.04.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru				1.250.000.000,00		1.250.000.000,00		1.250.000.000,00		1.250.000.000,00		1.250.000.000,00			
Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	0	9	1.250.000.000,00	9	1.250.000.000,00	9	1.250.000.000,00	9	1.250.000.000,00	9	1.250.000.000,00			
1.04.04.2.01.0007 - Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET			
			2026		2027		2028		2029		2030						
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU					
berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru																	
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru (Laporan)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00					
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				20.642.240.000,00		23.188.320.000,00		23.823.920.000,00		28.590.240.000,00		29.987.480.000,00					
Meningkatnya wilayah permukiman terlayani PSU dasar	Persentase jalan lingkungan yang layak (%)	22,86	30,66	20.642.240.000,00	34,56	23.188.320.000,00	38,46	23.823.920.000,00	42,36	28.590.240.000,00	46,26	29.987.480.000,00	1.04.2.10.0.00.01.0 000 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan				
	Panjang jalan lingkungan yang layak (Meter)	116.535	156.282				176.157				196.037				215.917		235.797
	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	5,10	6,10				6,57				7,04				7,66		7,96
1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				20.642.240.000,00		23.188.320.000,00		23.823.920.000,00		28.590.240.000,00		29.987.480.000,00					
Terlaksananya peningkatan jalan lingkungan permukiman sesuai rencana teknis	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	1	1	19.722.240.000,00	1	22.138.320.000,00	1	22.773.920.000,00	1	27.540.240.000,00	1	28.937.480.000,00					
	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	447	447		447		447		447		447						
Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00					
1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				19.692.240.000,00		22.108.320.000,00		22.743.920.000,00		27.510.240.000,00		28.907.480.000,00					
Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	447	447	19.692.240.000,00	447	22.108.320.000,00	447	22.743.920.000,00	447	27.510.240.000,00	447	28.907.480.000,00					
Terlaksananya operasional PSU Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	1	3		920.000.000,00		3		1.050.000.000,00		3			1.050.000.000,00	3	1.050.000.000,00	
	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	0	5				5				5				5		5
1.04.05.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00					
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	1	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00					
1.04.05.2.01.0011 - Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan				870.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00					
Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	0	5	870.000.000,00	5	1.000.000.000,00	5	1.000.000.000,00	5	1.000.000.000,00	5	1.000.000.000,00					

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan

Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan pada Tabel 4.2 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Rencana program prioritas urusan perumahan dan permukiman yang akan dilaksanakan adalah:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja individu ASN Kota Tarakan dengan memperkuat internal akuntabilitas kinerja dan meningkatkan kualitas layanan kesekretariatan DPRKPP Kota Tarakan, melalui kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian perangkat daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Melalui program ini ditargetkan untuk nilai atau predikat SAKIP DPRKPP bisa mempertahankan predikat A dengan nilai yang diharapkan terus meningkat tiap tahunnya. Predikat SAKIP DPRKPP ini menggambarkan hasil dan dampak nyata dari kegiatan yang dilakukan oleh DPRKPP terhadap masyarakat.

Agar supaya kegiatan yang dilakukan oleh DRPKPP dapat dilihat hasil dan dampak nyatanya oleh masyarakat, maka program ini juga merupakan nomenklatur program dari salah satu program unggulan Wali Kota, yaitu program nomor 9 program perbaikan kesejahteraan ASN, Tenaga Honor, Pensiunan, Kader Dasa Wisma dan Posyandu, melalui Jaminan kelancaran pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) dan uang lauk pauk (ULP) untuk ASN serta untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja (P3K) lingkup Pemerintah Kota Tarakan sesuai kemampuan daerah.

b. Program Pengembangan Perumahan

Program ini dimaksudkan untuk mendukung dalam peningkatan layanan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan dengan pemenuhan mutu pelayanan bagi korban bencana dan terdampak pemerintah, melalui kegiatan pendataan rumah masyarakat yang lokasinya merupakan area rawan bencana dan area yang bisa digunakan untuk melakukan relokasi korban bencana maupun yang terdampak program pemerintah. Selain itu, juga melalui kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana, fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota, dan kegiatan operasional dan pemeliharaan rumah susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota. Program ini juga merupakan program yang tertagging sebagai program untuk menjawab SPM urusan perumahan permukiman.

Kegiatan rehabilitasi dan fasilitasi korban rawan bencana dan relokasi program pemerintah diarahkan dengan upaya pemberian bantuan sebagai rumah tidak layak huni bagi korban bencana yang sesuai persyaratan, juga dengan memberikan bantuan subsidi sewa bagi masyarakat yang rumah tinggalnya terdampak program relokasi pemerintah.

c. Program Kawasan Permukiman

Program ini dimaksudkan untuk mendukung dalam peningkatan layanan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan dengan menurunkan luas kawasan kumuh, melalui kegiatan penyusunan

dokumen kebijakan tentang PKP, survei lokasi kumuh, perbaikan rumah tidak layak huni, dan pelaksanaan pemugaran kawasan permukiman kumuh.

Kegiatan penyusunan dokumen kebijakan tentang PKP ditargetkan 3 dokumen selama 5 tahun perencanaan, perbaikan rumah tidak layak huni di area kumuh ditargetkan sebesar 150 – 200 unit pertahun berdasarkan data e-rtlh dan kesesuaian persyaratan. Untuk penanganan kawasan kumuh, dalam 5 tahun perencanaan ditargetkan seluas 35,33 ha yang berkolaborasi dengan dinas lain, melalui upaya perbaikan jalan lingkungan, perbaikan rumah tidak layak huni, penyediaan air minum, perbaikan drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, dan pengamanan kebakaran.

Program ini juga merupakan nomenklatur program dari salah satu program unggulan Wali Kota, yaitu program nomor 06 program pembangunan perumahan untuk masyarakat, melalui kebijakan berpenghasilan rendah (MBR) tanpa uang muka (DP 0%) atau bantuan perbaikan rumah tidak layak huni.

d. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program ini dimaksudkan untuk mendukung dalam peningkatan layanan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan dengan menurunkan jumlah unit rumah tidak layak huni, melalui kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni di luar kawasan permukiman kumuh yang ditargetkan 200 unit pertahun, dan pembangunan rumah baru layak huni di luar kawasan permukiman kumuh yang ditargetkan 9 unit pertahun. Kegiatan pembangunan rumah baru layak huni ini merupakan kegiatan untuk mengakomodir hasil rakortekrenbang provinsi dan program prioritas nasional serta harus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. Kedua kegiatan ini bertujuan untuk mencegah bertumbuhnya kumuh baru.

Program ini juga merupakan nomenklatur program dari salah satu program unggulan Wali Kota, yaitu program nomor 06 program pembangunan perumahan untuk masyarakat, melalui kebijakan berpenghasilan rendah (MBR) tanpa uang muka (DP 0%) atau bantuan perbaikan rumah tidak layak huni.

e. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini dimaksudkan untuk mendukung dalam peningkatan layanan hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan dengan meningkatkan wilayah permukiman yang terlayani PSU dasar, melalui kegiatan perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan, dan juga verifikasi dan penyerahan PSU perumahan dari pengembang. Fokus utama dari kegiatan ini adalah rehabilitasi jalan lingkungan dan pemeliharaan makam yang menjadi bagian dari PSU permukiman.

Perbaikan jalan lingkungan ditargetkan sebesar 27.000an meter tiap tahun, sedangkan pemeliharaan makam dilakukan sebanyak 5 lokasi pertahunnya. Koordinasi dengan pengembang juga dilakukan pada program ini, agar pendataan dan penyerah terimaan perumahan antara pengembang dan pemerintah bisa terdata dengan baik.

Program ini juga merupakan nomenklatur program dari salah satu program unggulan Wali Kota, yaitu program nomor 05 Program pemberdayaan rukun tetangga melalui dana alokasi khusus 50-200 juta perRT pertahun untuk perbaikan infrastruktur berupa jalan lingkungan

Rencana program prioritas urusan pertanahan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dengan meningkatkan kinerja layanan pengamanan aset tanah pemerintah daerah, melalui kegiatan mediasi penyelesaian kasus pertanahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota. Fokus utama kegiatan mediasi ini adalah koordinasi penanganan kasus tanah dan inventarisasi kasus pertanahan pemerintah dengan masyarakat. Program ini digunakan untuk menjawab salah satu indikator kunci urusan pertanahan yaitu terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi. Kasus sengketa tanah garapan jika dilihat dari tren-nya selama 5 tahun ke belakang, tiap tahunnya dapat diselesaikan 3-5 kasus.

Program ini juga merupakan nomenklatur program dari salah satu program unggulan Wali Kota, yaitu program nomor 13 program penuntasan masalah pertanahan.

b. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dengan meningkatkan kinerja layanan pengamanan aset tanah pemerintah daerah, melalui kegiatan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Kegiatan ini berfokus pada koordinasi, santunan tanah dan ganti rugi tanah, serta yang paling utama adalah pengamanan tanah.

Program ini juga merupakan nomenklatur program dari salah satu program unggulan Wali Kota, yaitu program nomor 13 program penuntasan masalah pertanahan.

c. Program Redistribusi Tanah dan ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum dan tanah Absentee

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan aset tanah pemerintah yang berkepastian hukum dengan mewujudkan pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah, melalui koordinasi dan sinkronisasi penataan akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah dalam 1 (satu) kabupaten/kota, serta koordinasi dalam rangka penataan aset reforma agraria. Kedua kegiatan ini merupakan kegiatan yang berkolaborasi dengan Badan Pertanahan Negara (BPN) di Tarakan. Program ini juga merupakan program yang menjawab hasil rakortekrenbang provinsi dan program prioritas nasional. Terdapat 12 bidang tanah pemkot yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian dengan 17 KK penerima akses pemanfaatan lahan pertanian.

d. Program Penatagunaan Tanah

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dengan meningkatkan kinerja layanan pengamanan aset tanah pemerintah daerah, melalui kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan penyelenggaraan konsolidasi tanah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Fokus utama kegiatan koordinasi ini adalah koordinasi permohonan penunjukan lokasi (SPL) dan penerbitan dokumen surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah (SKPFBT).

Koordinasi permohonan penunjukan lokasi merupakan kegiatan verifikasi tanah pemerintah yang digunakan membangun sarana

prasarana publik. Ditargetkan tiap tahunnya ada 5 dokumen SPL yang bisa diterbitkan.

Program ini juga merupakan nomenklatur program dari salah satu program unggulan Wali Kota, yaitu program nomor 13 program penuntasan masalah pertanahan

Alokasi anggaran program/kegiatan akan diprioritaskan pada:

1. Lokasi strategis dan kawasan kumuh prioritas untuk mencapai target tahunan RPJMD.
2. Kegiatan seperti rehabilitasi RTLH dan penataan PSU, dengan penetapan *milestone* tahunan untuk memudahkan pengendalian kinerja.
3. Koordinasi lintas sektor dengan OPD teknis lain, kelurahan, dan swasta (CSR) agar capaian *outcome* lebih optimal.

Seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada:

- RPJMD Kota Tarakan 2026–2030.
- NSPK Kementerian PUPR tentang Penanganan Kumuh, PSU, dan Perumahan MBR.
- Permendagri tentang Pedoman Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- Dokumen tata ruang dan rencana pembangunan lain yang relevan.

4.2 Uraian Subkegiatan Program Prioritas

Subkegiatan (*output*) yang mendukung Program Prioritas (*outcome*) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan terdapat pada Tabel 4.4, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (1.04.01)
Program ini berperan sebagai pondasi tata kelola seluruh layanan perumahan, permukiman, dan pertanahan. Outcome utamanya adalah penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan layanan kesekretariatan. Melalui kegiatan seperti perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, administrasi keuangan, penyediaan logistik dan jasa penunjang, serta pemeliharaan aset kantor, program ini memastikan setiap proses berjalan tertib, transparan, dan efisien. Dengan pengelolaan internal yang baik, kegiatan teknis di lapangan dapat terlaksana lebih efektif dan akuntabel.
2. Program Pengembangan Perumahan (1.04.02)
Fokus utama program ini adalah pemenuhan rumah bagi korban bencana dan masyarakat terdampak relokasi. Rehabilitasi rumah, fasilitasi penyediaan hunian baru, serta pembinaan dan pemeliharaan rusunawa memastikan kelompok rentan memiliki tempat tinggal layak. Kegiatan ini selaras dengan misi pemerintah untuk mengurangi backlog perumahan dan menjaga kualitas hidup masyarakat pascabencana.
3. Program Kawasan Permukiman (1.04.03)
Outcome yang dikejar adalah penurunan luas kawasan kumuh. Penataan, pemugaran, perbaikan RTLH, dan legalisasi kebijakan bidang PKP dilakukan untuk memperbaiki kualitas lingkungan permukiman sekaligus mencegah terbentuknya kawasan kumuh baru. Program ini mendukung pencapaian target RPJMD dalam mempercantik wajah kota dan meningkatkan kualitas layanan dasar.
4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh (1.04.04)
Program ini menitikberatkan pada penurunan jumlah unit rumah tidak layak huni (RTLH). Kegiatan pencegahan dan perbaikan RTLH di luar kawasan kumuh, serta pembangunan rumah baru layak huni, menutup celah munculnya perumahan kumuh baru. Pendekatan

preventif dan kuratif yang diambil mempercepat penanganan RTLH sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan hunian.

5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)(1.04.05)

Outcome yang dituju adalah meningkatnya wilayah permukiman yang terlayani PSU dasar. Penyediaan dan perbaikan PSU seperti jalan lingkungan, drainase, air bersih, dan sanitasi menjadi kunci memastikan kawasan perumahan yang sudah tertangani tetap layak huni dan berkelanjutan.

6. Program Pertanahan: Penyelesaian Sengketa, Ganti Rugi, Redistribusi, dan Penatagunaan Tanah (2.10.04–2.10.10)

Seluruh program pertanahan ini memiliki *outcome* pengamanan aset tanah pemerintah, pemerataan penguasaan tanah, dan optimalisasi penetapan tanah untuk fasilitas umum. Kegiatan mediasi sengketa, penyelesaian santunan/ganti rugi, redistribusi tanah, penataan aset dan akses, serta konsolidasi tanah membantu mencegah konflik sosial, mempercepat proyek strategis, dan menjamin ketersediaan lahan legal untuk perumahan rakyat serta PSU.

Bentuk keterkaitan antara Program Prioritas dengan subkegiatan yang akan menyelaraskan kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Serta Pertanahan adalah sebagai berikut:

- Keterkaitan Vertikal yang Solid
Bahwa Setiap program prioritas memiliki *outcome* yang jelas, dan *outcome* tersebut diwujudkan melalui kegiatan serta subkegiatan yang spesifik. Dari penguatan tata kelola hingga penyediaan rumah dan penataan tanah, seluruh elemen saling mendukung dalam mencapai sasaran RPJMD bidang perumahan dan permukiman.
- Sinergi Program/kegiatan/Subkegiatan Teknis dan Pendukung
Program penunjang menyediakan sistem perencanaan, penganggaran, logistik, dan pemeliharaan yang menjadi motor penggerak. Sementara itu, program teknis dan pertanahan menangani langsung isu di lapangan, dari RTLH, kawasan kumuh, PSU, hingga konflik pertanahan.
- Fokus pada Dampak Nyata bagi Masyarakat
Penurunan RTLH, pemenuhan hunian pascabencana, dan penataan PSU menunjukkan orientasi hasil yang konkret yaitu meningkatnya kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah, korban bencana, dan warga di kawasan kumuh.
- Penguatan Tata Kelola dan Kepastian Hukum
Program pertanahan dan penunjang menjamin keberlanjutan layanan, kepastian aset, dan keadilan penguasaan tanah, sehingga mencegah hambatan dalam pembangunan perumahan dan permukiman di masa depan.

Seluruh program prioritas Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan bukan hanya berdiri sendiri, tetapi membentuk rantai logis dari kebijakan hingga dampak di lapangan serta mewujudkan kota yang lebih tertata, layak huni, dan berkeadilan.

Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			1.04.01.2.01.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			1.04.01.2.01.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			1.04.01.2.02.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
		2. Meningkatnya layanan kesekretariatan	1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			1.04.01.2.06.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			1.04.01.2.06.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			1.04.01.2.08.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			1.04.01.2.09.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			1.04.01.2.09.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			1.04.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			1.04.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pemenuhan rumah bagi korban bencana dan terdampak program pemerintah	1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
			1.04.02.2.03.0008 Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	
			1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	
			1.04.02.2.05.0008 Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota	
3	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Menurunnya luas kawasan kumuh	1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			1.04.03.2.02.0008 Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	
			1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	
			1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran /Peremajaan Permukiman Kumuh	
			1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	
4	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Menurunnya Jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (LPPD)	1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
			1.04.04.2.01.0004 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	
5	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya wilayah permukiman terlayani PSU dasar	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	
			1.04.05.2.01.0011 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
			1.04.05.2.01.0012 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	
6	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Meningkatnya kinerja layanan pengamanan aset tanah pemerintah daerah	2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.10.04.2.01.0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
7	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Meningkatnya kinerja layanan pengamanan aset tanah pemerintah daerah	2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.10.05.2.01.0003 Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.10.05.2.01.0004 Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.10.05.2.01.0005 Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
8	2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah (BA rakortek)	2.10.06.2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.10.06.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	
			2.10.06.2.01.0006 Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	
9	2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Optimalisasi Pelayanan Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum	2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	
			2.10.10.2.01.0004 Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	

4.3 Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Tarakan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan menetapkan indikator kinerja utama dan indikator sasaran yang terukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Penetapan indikator ini dimaksudkan untuk memastikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, program, dan kegiatan dengan target pembangunan daerah serta kebijakan nasional.

Indikator-indikator yang dipilih mencerminkan prioritas pembangunan lima tahun ke depan, antara lain: peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan; peningkatan cakupan permukiman yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) dasar; penguatan tata kelola kinerja dan pelayanan publik melalui SAKIP serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); peningkatan konsolidasi tanah yang didukung oleh pembangunan kewenangan daerah; serta percepatan penetapan hak atas tanah yang menjadi aset pemerintah daerah.

Target capaian indikator ditetapkan secara bertahap dari tahun 2025 hingga 2030 dengan memperhatikan kondisi eksisting, potensi, serta keterbatasan sumber daya yang ada. Sebagian indikator ditetapkan dengan pola peningkatan gradual, seperti nilai SAKIP, IKM, dan konsolidasi tanah. Sementara itu, indikator yang berhubungan dengan pelayanan dasar dan pengamanan aset tanah didesain dengan pola akseleratif, khususnya pada tahun-tahun akhir periode perencanaan, seiring dengan rencana percepatan penyelesaian backlog perumahan, penanganan kawasan kumuh, dan penyelesaian persoalan pertanahan.

Dengan demikian, indikator kinerja ini tidak hanya menjadi alat ukur keberhasilan Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan, tetapi juga menjadi instrumen akuntabilitas yang dapat memberikan gambaran capaian pembangunan daerah secara komprehensif.

4.4 Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Kunci (IKK) juga merupakan parameter pengukuran kinerja penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Tarakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap pemerintah daerah wajib menyusun LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) yang dibuat dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan dan gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. LPPD menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah, untuk itu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah daerah harus mengisi realisasi capaian dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Dalam menyusun LPPD, kepala daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD. Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi atau divalidasi oleh Inspektorat dan BPKP daerah yang bersangkutan. Terdapat 14 (empat belas) IKK Outcome yang harus dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan di Tahun 2025 dan 2029 mendatang.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersebut menjadi acuan strategis untuk memantau kemajuan pembangunan bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan di Kota Tarakan periode 2025–2030. Melalui

pengukuran yang sistematis, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memberi dampak nyata bagi masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan RPJMD serta agenda pembangunan nasional.

Pada aspek pelayanan hunian pasca-bencana dan relokasi, indikator persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan persentase warga yang terkena relokasi program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas rumah layak huni ditargetkan sebesar 100% setiap tahun. Target ini menunjukkan komitmen penuh pemerintah untuk tidak membiarkan korban bencana maupun keluarga yang terkena relokasi tanpa solusi hunian yang memadai. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan jumlah penerima manfaat terhadap total rencana penanganan tahunan, dan bobot masing-masing sebesar 20% menegaskan prioritas layanan ini.

Penanganan permukiman kumuh dan rehabilitasi rumah tidak layak huni juga menjadi perhatian utama. Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektare yang ditangani meningkat progresif dari 18,79% pada 2025 hingga mencapai 100% pada 2030. Sementara itu, persentase rumah tidak layak huni (RTLH) yang tertangani tumbuh dari 2,52% menjadi 3,79% pada akhir periode, menunjukkan upaya bertahap untuk mengurangi backlog perumahan. Dalam waktu yang sama, persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) juga naik stabil dari 5,62% menjadi 7,96%, yang berarti semakin banyak lingkungan hunian yang memiliki infrastruktur dasar memadai.

Di bidang pertanahan dan reforma agraria, indikator seperti luas tanah yang ditetapkan sebagai objek landreform, luas tanah potensi TORA, luas tanah ganti kerugian yang ditindaklanjuti redistribusi, dan jumlah subjek penerima redistribusi tanah memegang peranan penting. Meskipun bobotnya berada di kisaran 11–12%, target yang dipatok sebesar 100% setiap tahun menunjukkan kewajiban pemerintah daerah untuk menuntaskan redistribusi tanah demi pemerataan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya agraria.

Penataan aset daerah dan konsolidasi tanah juga tercermin dalam persentase hak atas tanah pemerintah daerah yang ditetapkan dan persentase luas lokasi konsolidasi tanah yang mendapat dukungan pembangunan kewenangan kabupaten/kota. Peningkatan persentase hak atas tanah dari 28,10% menjadi 85,76% sepanjang 2025–2030 mengindikasikan penguatan pengelolaan aset publik dan pengamanan lahan strategis milik pemerintah kota. Konsolidasi tanah yang didukung pembangunan juga naik secara bertahap, menggambarkan kesinambungan antara penataan ruang dan investasi infrastruktur.

Selain itu, indikator lain seperti persentase peta nilai tanah yang dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB, persentase desa atau kelurahan lengkap berkualitas, serta penyelesaian kasus tanah garapan belum bersertipikat melalui mediasi dipatok pada level 100% setiap tahun. Hal ini menegaskan pentingnya transparansi data pertanahan, pelayanan publik yang akuntabel, dan penyelesaian sengketa lahan secara damai.

Secara keseluruhan, tabel IKK ini menunjukkan kerangka kerja pengukuran kinerja yang menyeluruh, meliputi pelayanan sosial-hunian (penanganan bencana, relokasi, RTLH, PSU), penataan ruang dan penguasaan tanah (kumuh, TORA, landreform, konsolidasi tanah, pengamanan aset daerah), serta penguatan tata kelola pertanahan (peta nilai tanah, sengketa tanah, kelurahan lengkap). Kombinasi target bertahap, bobot yang proporsional, dan capaian tahunan yang ambisius

memastikan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Tarakan tetap fokus pada peningkatan kualitas layanan publik sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan daerah hingga tahun 2030.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan dan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan Rakyat tersaji pada Tabel 4. 4 dan Tabel 4.5 dibawah ini.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	T1: Indikator Tujuan 1: Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak terjangkau dan berkelanjutan	Persentase	71.08%	73.51%	75.82%	78.01%	80.11%	82.11%	
2	S1.1: Indikator Sasaran 1: Persentase Permukiman yang Sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persentase	34.00%	38.24%	42.32%	46.26%	50.07%	53.75%	
3	S1.2.1: Nilai SAKIP	Nilai	84,23	84,24	84.26	84.28	84.30	84.40	
4	S1.2.2: IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Indeks	88	88.5	89	89.5	90	90.5	
5	T2: Indikator Tujuan 2: Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase	39.29%	39.57%	39.71%	39.85%	39.99%	40.13%	
6	S2.1: Indikator Sasaran 2: Persentase Penetapan Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	Persentase	28.10%	28.80%	30.75%	57.12%	76.12%	85.76%	

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO	IKK	RUMUS		BOBOT	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun-N}}{\text{Jumlah total rencana warga negara korban bencana kabupaten/kota yang akan ditangani pada tahun-N}} \times 100\%$	x 100%	20%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	$\frac{\text{Jumlah warga negara terkena relokasi program kabupaten/kota yang mendapatkan layanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni pada tahun-N}}{\text{Jumlah total rencana warga negara terkena relokasi program provinsi yang akan ditangani pada tahun-N}} \times 100\%$	x 100%	20%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
3	Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	$\frac{\text{Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani tahun N (Ha)}}{\text{target luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha pada tahun N}} \times 100\%$	x 100%	20%	18.79%	34.36%	50.21%	66.35%	82.76%	100.00%
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	$\frac{\text{jumlah RTLH yang tertangani pada Tahun-N}}{\text{jumlah RTLH pada Tahun-N}} \times 100\%$	x 100%	20%	2.52%	2.78%	3.03%	3.29%	3.54%	3.79%
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	$\frac{\text{Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan PSU di tahun N}}{\text{Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan PSU di tahun N}} \times 100\%$	x 100%	20%	5.62%	6.10%	6.57%	7.04%	7.66%	7.96%
1	Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/ Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran	$\frac{\text{Luas realisasi dari target luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee}}{\text{Realisasi dari target jumlah subjek yang ditetapkan}} \times 100\%$	x 100%	12%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

NO	IKK	RUMUS		BOBOT	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran	luas realisasi dari target luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah Target jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat	$\times 100\%$	11%	SURAT PERNYAT AAN	SURAT PERNYAT AAN	SURAT PERNYAT AAN	SURAT PERNYAT AAN	SURAT PERNYAT AAN	SURAT PERNYATA AN
3	Luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran	Luas realisasi tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah. target luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah	$\times 100\%$	11%	SURAT PERNYAT AAN	SURAT PERNYAT AAN	SURAT PERNYAT AAN	SURAT PERNYAT AAN	SURAT PERNYAT AAN	SURAT PERNYATA AN
4	Jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran	realisasi jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi tanah yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah target jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi tanah yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah	$\times 100\%$	11%	SURAT PERNYAT AAN	SURAT PERNYAT AAN	SURAT PERNYAT AAN	SURAT PERNYAT AAN	SURAT PERNYAT AAN	SURAT PERNYATA AN
5	Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah kasus tanah garapan belum bersertipikat yang ditangani Jumlah pengaduan kasus tanah garapan belum bersertipikat	$\times 100\%$	11%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
6	Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas	Jumlah desa atau kelurahan lengkap berkualitas Jumlah desa atau kelurahan dalam satu kabupaten atau kota	$\times 100\%$	11%	SURAT PERNYAT AAN	SURAT PERNYAT AAN	SURAT PERNYAT AAN	SURAT PERNYAT AAN	SURAT PERNYAT AAN	SURAT PERNYATA AN
7	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	Luas Tanah yang telah bersertipikat dalam penguasaan Pemerintah Daerah Luas seluruh tanah yang masuk dalam aset Pemerintah Daerah	$\times 100\%$	11%	28.10%	28.80%	30.75%	57.12%	76.12%	85.76%

NO	IKK	RUMUS		BOBOT	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
8	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota}}{\text{Luas Lokasi Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	x 100%	11%	39.29%	39.57%	39.71%	39.85%	39.99%	40.13%
9	Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB	$\frac{\text{Luas Peta Nilai Tanah yang telah dikerjasamakan untuk dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB}}{\text{Luas Peta Nilai Tanah pada wilayah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	x 100%	11%	SURAT PERNYATAAN	SURAT PERNYATAAN	SURAT PERNYATAAN	SURAT PERNYATAAN	SURAT PERNYATAAN	SURAT PERNYATAAN

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Tarakan Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang memadukan arah kebijakan nasional, provinsi, dan kondisi faktual Kota Tarakan. Dokumen ini menegaskan komitmen Pemerintah Kota Tarakan untuk mewujudkan hunian layak, terjangkau, berkelanjutan, serta penataan kawasan permukiman yang tertib, aman, dan tangguh bencana.

Penyusunan Renstra ini telah mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis global, nasional, dan regional, termasuk tantangan perubahan iklim, urbanisasi pesisir, ketimpangan keterjangkauan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta tuntutan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan dan kawasan permukiman. Selain itu, analisis potensi daerah mulai dari optimalisasi pemanfaatan aset lahan, peluang pembangunan Rusunawa, penguatan PSU, hingga penanganan rumah bencana menjadi dasar untuk menyusun program dan kegiatan yang responsif, efektif, dan berkelanjutan.

Melalui Renstra ini, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan bertekad meningkatkan mutu pelayanan publik, memperkuat tata kelola pertanahan yang adil dan akuntabel, serta mendorong inovasi berbasis digital dan kemitraan multipihak. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan dalam lima tahun ke depan Kota Tarakan mampu mengurangi backlog perumahan, memperluas akses PSU, menata kawasan kumuh, serta memastikan penanganan hunian pascabencana yang cepat dan tepat.

Renstra ini bukanlah dokumen statis, tetapi pedoman dinamis yang dapat disesuaikan dengan perkembangan kebijakan, kondisi sosial-ekonomi, dan kebutuhan masyarakat. Dengan komitmen, transparansi, dan kolaborasi yang kuat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan optimistis bahwa visi “Hunian Layak, Terjangkau, dan Permukiman Berkelanjutan Menuju Tarakan Maju” dapat terwujud, memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga Kota Tarakan.

8. Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan merupakan salah satu Instansi Pemerintah yang melayani masyarakat yaitu melalui Program dan Kegiatan, seperti Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana, Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, Program Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Pelayanan tersebut diberikan dengan memberikan motivasi, kesempatan dan dukungan, menjadi perwakilan masyarakat, memediasi konflik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat.

Sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dimana setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan teknis operasional Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra PD memuat tentang visi, misi Kepala Daerah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan/sub kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana Strategis Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan merupakan rangkaian kegiatan yang berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas organisasi, efisiensi anggaran, optimalisasi SDM, dan pengawasan kinerja.

Dalam rencana strategis ini diformulasikan perwujudan pandangan ideal yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Untuk itu dibutuhkan dukungan dari seluruh komponen, dari unsur pimpinan dan staf, dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Untuk merealisasikan keinginan dan harapan, rencana tersebut dituangkan dalam visi, misi, tujuan, dan pengukuran kinerja yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, secara jelas dan praktis, serta didasarkan pada hasil pengujian faktor internal dan eksternal, sehingga didapatkan rumusan tujuan, alokasi sumber daya, dan pencapaian sasaran yang berguna bagi organisasi dalam kurun waktu yang ditentukan.

Dimana urusan sosial adalah urusan wajib pelayanan dasar bagi Pemerintah Kota Tarakan.

Urusan wajib pelayanan dasar sosial tercakup pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Kota Tarakan adalah layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan keberfungsian sosial luar panti bagi :

1. Disabilitas Terlantar
2. Anak Terlantar
3. Lansia Terlantar

4. Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)

5. Korban Bencana Alam/Sosial

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, diperlukan upaya peningkatan kapasitas SDM, peningkatan sarana dan prasarana, perbaikan kualitas kinerja dan penyempurnaan sistem, serta intensitas koordinasi dan sosialisasi untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal diperlukan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai pedoman dan arah dalam melaksanakan tujuan dan sasaran, sehingga Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat didasarkan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2029 serta Renstra K/L, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi:

1. Persiapan penyusunan renstra
2. Penyusunan rancangan awal renstra perangkat daerah
3. Penyusunan rancangan renstra perangkat daerah
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah
5. Perumusan rancangan akhir renstra perangkat daerah
6. Penetapan renstra perangkat daerah

Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis dan renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Selain itu Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai acuan dalam pengendalian dan evaluasi terhadap kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat baik berupa Dokumen Sakip dan Laporan Dalev Renja.

Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keberadaan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan akan menjadi pedoman bagi penyusunan rancangan RKA Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rancangan APBD).

Gambaran tentang hubungan antara Renstra Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.

[illegible]

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2021 - 2041;
27. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2025 – 2045;
28. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2025 - 2029;
29. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan;
30. Surat Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 100.3.3.3/HK-IV/204/2025 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025-2029.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan tahun 2025 – 2029 adalah :

1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan urusan pemerintahan di bidang pelayanan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat serta menyediakan tolak ukur dalam penetapan kinerja selama 5 (lima) tahun.
2. Menjamin keterkaitan, keserasian serta harmonisasi antara perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan program kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan
3. Menyesuaikan rencana target capaian Renstra PD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029 yang mengalami perubahan dan penyesuaian dengan kemampuan Anggaran Pemerintah daerah
4. Penyesuaian Regulasi dan Kebijakan Program Prioritas Pemerintahan

5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana pembangunan tahunan
6. Memberikan arah dan pedoman bagi Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan program prioritas sesuai dengan urusan pemerintahan di bidang pelayanan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat sehingga tujuan program dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut :

1. Menterjemahkan dan menjabarkan yang termuat dalam Rancangan Perangkat Daerah Kota Tarakan periode 2025-2029 dalam bentuk tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang lebih spesifik dan terarah serta yang bersifat operasional
2. Sebagai kerangka acuan dalam menyusun rencana kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat selama 5 (lima) tahun
3. Sebagai dasar penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi serta penilaian kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menjalankan dan melaksanakan kegiatan sesuai tupoksinya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Perencanaan Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Dasar hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

- 2.1 Gambaran Pelayanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB. V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1 Gambaran Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tarakan dan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan adalah melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat.

1. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Dinas.
2. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan Kebijakan di Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan
 - e. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Susunan Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
 - a) Kepala Dinas
 - b) Sekretariat
 - c) Bidang Sosial
 - d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - e) Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Kepala Dinas Mempunyai tugas Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkondisikan, dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya;
5. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas dipimpin oleh Sekretaris. Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. Koordinasi Kegiatan dinas;
 - b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran dinas;
 - c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas;
 - d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dinas;
 - e. Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada dinas;
 - f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di dinas;
 - g. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas;
 - h. Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja dinas; dan

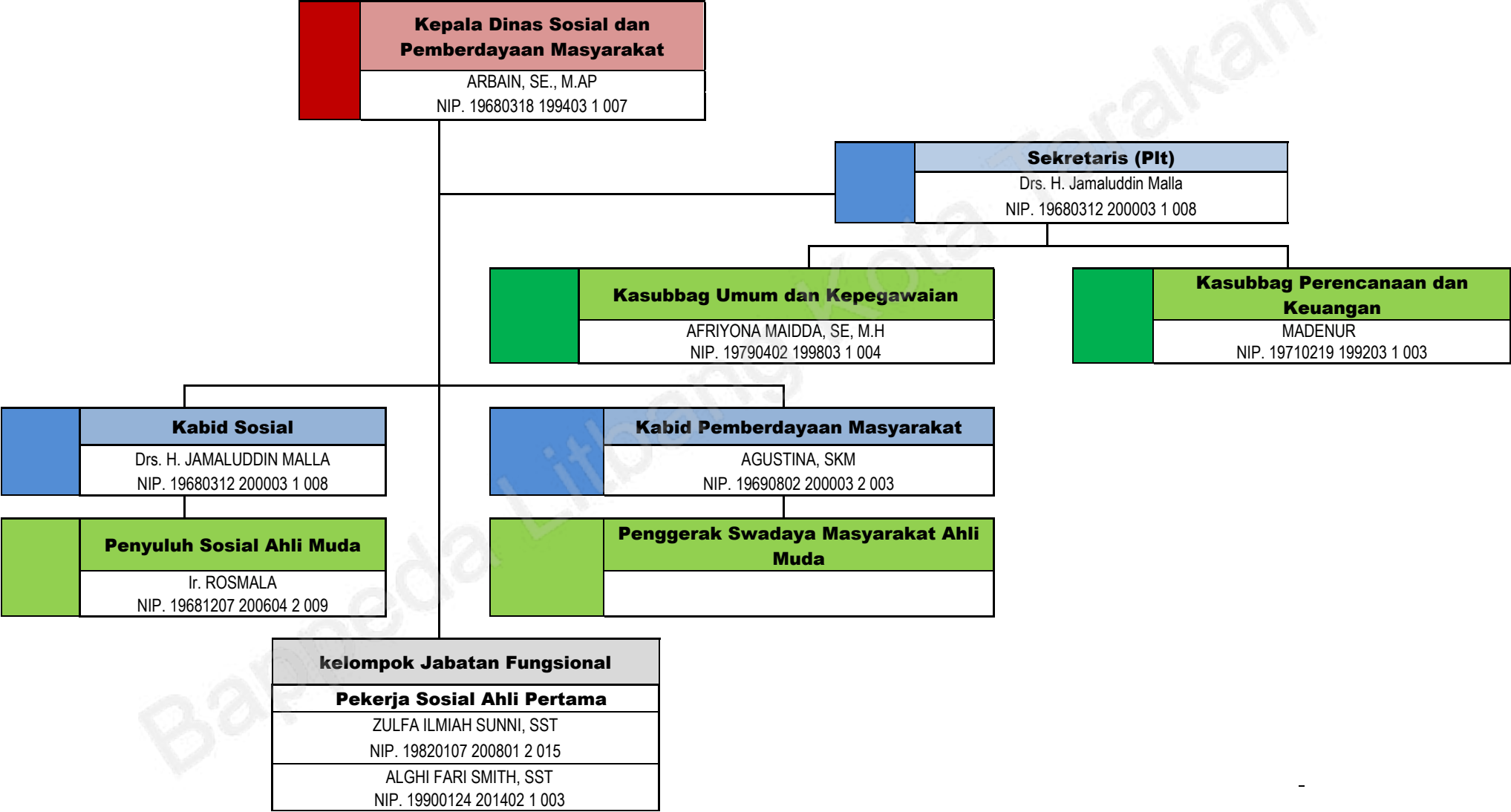
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
6. Sekretaris terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
7. Sekretaris dipimpin oleh Sekretaris
8. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam pengkoordinasian pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi dinas;
 - b. Pembinaan dan penataan organisasi tata laksana dinas;
 - c. Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada dinas;
 - d. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah didinas;
 - e. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris.
9. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
10. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam koordinasi kegiatan dinas, koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, dan pengkoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Dinas;
 - b. Pelaksanaan Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran dinas;
 - c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
 - d. Penyiapan bahan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja dinas; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.
11. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
12. Bidang Sosial adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Sosial yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh Kepala Bidang. Kepala Bidang yang dimaksud membawahi kelompok jabatan fungsional dan pelaksana. Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, serta penanganan bencana rehabilitasi sosial dan penanganan warga Negara migran korban tindak kekerasan, dan pemberdayaan sosial dan pengelolaan taman makam pahlawan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan warga Negara migran korban tindak kekerasan, dan pemberdayaan sosial dan pengelolaan taman makam pahlawan;
 - c. Pelaksanaan pemeliharaan anak-anak terlantar;
 - d. pelaksanaan penanganan fakir miskin;
 - e. Pelaksanaan penanganan warga Negara migran korban tindak kekerasan;
 - f. Pelaksanaan layanan dan rujukan sosial;

- g. Pelaksanaan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah;
 - h. Pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemberian layanan dukungan psikososial bagi korban bencana daerah;
 - i. Pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Daerah;
 - j. Pelaksanaan di bidang rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis di luar panti sosial, anak berhadapan dengan hukum, tuna sosial, korban perdagangan orang, anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK), anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired immunoDeficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitas pada panti;
 - k. Pelaksanaan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah untuk dipulangkan ke kelurahan asal;
 - l. Pelaksanaan pemberdayaan, peningkatan kapasitas dan pendampingan sosial Komunitas Adat Terpencil;
 - m. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penertiban izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang dalam daerah;
 - n. Pelaksanaan, penerbitan, pengawasan, pengendalian dan penerbitan izin pengumpulan sumbangan Daerah;
 - o. Pemutakhiran data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
 - p. Pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
 - q. Pelaksanaan pembinaan lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang wilayah kegiatannya di Daerah;
 - r. Pelaksanaan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional dalam Daerah;
 - s. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan bencana, rehabilitasi sosial dan warga Negara migran korban tindak kekerasan, dan pemberdayaan sosial dan pengelolaan taman makam pahlawan di Daerah;
 - t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
13. Bidang Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang Sosial
14. Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang yang dimaksud membawahi kelompok jabatan fungsional dan pelaksana. Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Pemberdayaan Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah dan menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
 - c. Pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan kelurahan dan lembaga adat tingkat kota

- dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama di daerah;
- d. Pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat kelurahan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat, dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
15. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 16. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan No 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan



2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.

2.1.2.1. Sumber Daya Aparatur

Dalam upaya Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat perlu didukung dengan tersedianya sumber daya yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan, alokasi anggaran sumber daya manusia dan lain sebagainya. Sumber daya aparatur yang memadai baik dari sisi jumlah maupun kompetensi memegang peranan penting dalam memberikan pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kepada masyarakat, selain itu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dengan memperhatikan perkembangan permasalahan sosial dan kelembagaan masyarakat merupakan faktor lain yang berpengaruh dalam upaya Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan Data Kepegawaian per 31 Desember 2024 Jumlah pegawai keseluruhan sebanyak 61 Orang yang terdiri dari ASN 20 Orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 41 Orang untuk selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut: (catatan Sesuaikan dengan Pelantikan P3k Data Terbaru)

Tabel Data Pegawai Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Jumlah Pegawai :	28	33	61
	a. PNS	10	10	20
	b.Honor Kontrak	8	1	9
2.	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan :	10	10	20
	a. Golongan IV	4	1	5
	b. Golongan III	6	9	15
	c. Golongan II	-	-	-
	d. Golongan I	-	-	-
3.	Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan :	6	4	10
	a. Kepala Dinas	1	-	1
	b. Sekretaris	1	-	1
	c. Kepala Bidang	1	1	2
	d. Kepala Sub Bagian	2	-	2
	e. JFT	1	3	4
	f. Kepala UPT	-	-	-
4	Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan :	10	13	23
	a. S2	2	1	3
	b. S1	5	9	13
	c. D3	-	2	2
	d. SLTA	2	1	3
	e. SLTP	-	-	-
5	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Penjenjangan	4	1	5
	a. Diklat Pim II	1	-	1
	b. Spama/Diklat Pim III	1	1	2
	c. Adum/Adumla/Diklat PIM IV	2	-	2

Tabel Data Tenaga PPPK/Honor menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan

No	Uraian	Jenis Kelamin		Pendidikan								Ket
		L	P	TS	SD	SLTP	SLTA	D1	D3	S1	S2	
1	Administrasi	2	2	-	-	-	-	-	2	2	-	
2	Petugas Keamanan	5	-	-	-	2	3	-	-	-	-	
3	Petugas Kebersihan	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-	
4	Pendamping PKH	2	2	-	-	-	-	-	2	2	-	

No	Uraian	Jenis Kelamin		Pendidikan								Ket
		L	P	TS	SD	SLTP	SLTA	D1	D3	S1	S2	
5	Tenaga Sosial Kesejahteraan Kecamatan/TKSK	5	-	-	-	2	3	-	-	-	-	
6	Tenaga Sosial Kesejahteraan Kelurahan/PSM	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-	
7	TAGANA	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-	
Jumlah		8	4	-	-	3	5	-	2	2	-	

Tabel Data Pegawai menurut Perhitungan Standar Kebutuhan Struktur Organisasi

No	Susunan Organisasi	Jumlah Pegawai	Standar Kebutuhan	Perhitungan Analisis Beban Kerja	Kekurangan
1	Kepala Dinas	1	1	1	0
2	Sekretariat	7	9	9	2
3	Bidang Sosial	6	10	10	4
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	3	7	7	4
5	Kelompok Jabatan Fungsional	2	3	3	1

2.1.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan kondisi akhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1

Sarana Dan Prasarana
Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat

NO	NAMA BARANG	ANALISA KEBUTHAN	JUMLAH BARANG	KONDISI BARANG			KURANG
				BAIK	KURANG BAIK (KB)	RUSAK BERAT (RB)	
1	Mesin Genset/Compresor		2	1	-	1	
2	Lemari Besil/Metal		1	-	1	-	
3	Lemari Kayu		4	2	2	-	
4	Rak Kayu		5	-	4	1	
5	Filling cabinet Besi		3	3	-	-	
6	Lemari Kaca		2	2	-	-	
7	Lemari Makan		1	-	1	-	
8	Alat Penghancur Kertas		1	-	-	1	
9	Mesin absensi		2	1	-	1	
10	Alat Kantor Lainnya (Proyektor)	2	1	1	-	-	1
11	Meja Kerja		9	4	5	-	
12	Kursi Besi/Metal	6	3	1	2	-	3
13	Meja Rapat		1	-	1	-	1
14	Tempat Tidur Besi		4	-	2	2	2
15	Meja Resepsionis		1	1	-	-	
16	Meja Panjang		1	1	-	-	
17	Meja ½ Biro		30	15	5	10	
18	Kursi Rapat		24	10	6	8	
19	Kursi Lipat		25	8	3	14	

NO	NAMA BARANG	ANALISA KEBUTHAN	JUMLAH BARANG	KONDISI BARANG			KURANG
				BAIK	KURANG BAIK (KB)	RUSAK BERAT (RB)	
20	KursiTamu		8	4	4		
21	Kursi Putar		10	3	5	2	
22	Meja Komputer		3	-	1	2	
23	Sofa		1	-	1	-	
24	Mesin Potong Rumput		2	1	-	1	
25	Lemari Es		1	-	1	-	
26	Ac. Split		20	14	4	2	
27	Televisi		5	1	3	1	
28	Sound System		3	2	1	-	
29	Warless		1	-	1	-	
30	Mega phone		1	1	-	-	
31	Tustel		1	1	-	1	
32	Dispenser		1	1	-	-	
33	Handycam		2	1	1	-	
34	Meja Kerja Eselon IV		5	3	2	-	
35	Meja Tamu		3	-	3	-	
36	Kursi Kerja Eselon II		1	1	-	-	
37	Kursi Kerja Eselon III		3	1	2	-	
38	Kursi Kerja Eselon IV		8	4	2	2	
39	Lemari Buku Pejabat		3	1	2	1	
40	Lemari Arsip		4	1	1	2	
41	Camera		2	1	-	1	
42	Alat Studio		1	1	-	-	
43	Telepon Mobile		2	2	-	-	
44	P.C Unit		12	9	-	3	
45	Laptop		7	4	1	2	
46	Note book		10	4	2	4	
47	Monitor		3	1	-	2	
48	Printer		18	6	4	8	
49	External / Hardisk		2	2	-	-	
50	Scanner		1	1	-	-	

Rencana Kebutuhan Barang
Tahun 2026-2030

No	Nama Barang	Tahun						Keterangan
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Meja 1/2 Biro	3	2	2	2	2	3	
2	A.C Split	2	1	4	-	-	1	
3	Lap Top	2	1	1	1	1	1	
4	Kursi Putar	15	-	5	3	2	5	
5	Printer	5	2	-	1	2	1	
6	P.C Unit	1	1	1	1	-	1	
7	Cctv	-	-	5	2	-	-	
8	Kursi Besi	-	1	-	1	1	-	
9	Alat Pemadam Api	-	-	-	1	2	-	
10	Meja Pejabat Eselon	-	2	2	1	1	1	
11	Kendaraan Roda 2	-	-	2	-	-	-	

Tabel Rencana Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Dinsospm Th. 2026-2030

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT			BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
		DO	FORMULASI		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat						177.240.900		337.236.500		537.236.500		337.236.500		337.236.500		537.236.500	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						177.240.900		337.236.500		537.236.500		337.236.500		337.236.500		537.236.500	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						177.240.900		337.236.500		537.236.500		337.236.500		337.236.500		537.236.500	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan				6 Jenis	161.970.900	8 Jenis	321.966.500	8 Jenis	321.966.500	8 Jenis	321.966.500	8 Jenis	321.966.500	8 Jenis	321.966.500	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		di dapat dari pencatatan saat pengadaan barang				10 Unit	100.000.000	10 Unit	100.000.000	10 Unit	100.000.000	10 Unit	100.000.000	10 Unit	100.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		di dapat dari pencatatan saat pengadaan barang	32 Unit	32 Unit	161.970.900	35 Unit	161.966.500	35 Unit	161.966.500	35 Unit	161.966.500	35 Unit	161.966.500	35 Unit	161.966.500	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		di dapat dari pencatatan saat pengadaan barang				5 Unit	60.000.000	5 Unit	60.000.000	5 Unit	60.000.000	5 Unit	60.000.000	5 Unit	60.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara			-	58 Unit	15.270.000	68 Unit	15.270.000	68 Unit	215.270.000	68 Unit	15.270.000	68 Unit	15.270.000	68 Unit	215.270.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		di dapat dari pendokumentasian saat kegiatan pemeliharaan	16 Unit	23 Unit	15.270.000											
Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si		di dapat dari pendokumentasian saat kegiatan pemeliharaan	2 unit	1 unit				1 unit	200.000.000					1 unit	200.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		di dapat saat pencatatan logistik dan inventarisasi saat pengadaan barang.				50 Unit	15.270.000	50 Unit	15.270.000	50 Unit	15.270.000	50 Unit	15.270.000	50 Unit	15.270.000	

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Sebagaimana diketahui Kota Tarakan adalah kota transit bagi kabupaten kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, yang merupakan kota jasa, perdagangan dan perikanan, sehingga merupakan daerah tujuan bagi pencari kerja dan pendatang dari daerah-daerah lain dan akan menimbulkan masalah-masalah sosial.

Dalam hal ini Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu Perangkat Daerah menangani masyarakat yang mengalami permasalahan sosial sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sasaran program pembangunan bidang sosial adalah masyarakat kelas bawah yang dalam kehidupan sehari-harinya mengalami permasalahan sosial dan rentan menimbulkan masalah di lingkungan sosialnya yang disebut PPKS yaitu Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Sedangkan sasaran program pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat adalah kelembagaan masyarakat, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna yang ada di kehidupan bermasyarakat yang selama ini belum maksimal pemanfaatannya.

Di Kota Tarakan pembangunan bidang sosial yang menempatkan manusia sebagai pusat perhatian hendaknya mendapatkan tempat yang layak dan strategis dalam perencanaan pembangunan daerah sehingga keberadaan manusia layak dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sosialnya dan semua pihak pada umumnya, sehingga terhindar dari instabilitas pembangunan yang membawa pengaruh negatif antar manusia. Untuk pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat yang menempatkan kelembagaan masyarakat sebagai mitra pembangunan Kelurahan/kelurahan.

Pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya merupakan piranti dalam mewujudkan keadilan sosial secara konkrit melalui hasil pembangunan yang dicapai bagi penduduk miskin, terlantar dan rentan serta masyarakat pada umumnya.

Sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) semula 22 jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan pada tahun 2018 bertambah 4 jenis PPKS sehingga menjadi 26 PPKS, hal ini sesuai dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PPKS dan PSKS.

Adapun populasi PPKS di Kota Tarakan berdasarkan data terakhir pada tahun 2024 setelah dilakukan pemutakhiran data pada 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Data Pemuktahiran Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota
Tarakan Tahun 2019-2023

Data 2024
Kota : Kota Tarakan
Bidang : Bidang Sosial
Urusan : Urusan Pemerintahan

No.	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	PMKS yang diberikan bantuan	KPM	5.975	10.013	18.040	90.549	92.568	62.569
2	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	KPM	12.154	12.365	12.533	94.079	96.693	62.569
3	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	49,16	80,99	144	96,24	95,73	100%
4	PMKS yang diberikan bantuan	Jiwa	-	-	179812	90549	90900	62.569
5	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	Jiwa	-	-	240667	94079	96693	62.569
6	Panti Asuhan	Unit	13	13	13	9	9	9
7	Panti Jompo	Unit	1	1	1	1	1	1
8	Panti Rehabilitasi	Unit	1	1	1	1	1	1
9	Rumah Singgah	Unit	1	1	3	3	3	3
10	Sarana Sosial Lainnya	Unit	-	-	-	-	-	-
11	Jumlah Seluruh Sarana Sosial	Unit	16	16	18	15	15	15
12	Jumlah PMKS yang tertangani	Jiwa	6.259	9675	7441	133	22	343
13	Jumlah PMKS yang ada	Jiwa	12.154	12.765	8.400	133	22	343
14	Persentase PMKS yang tertangani	Persen	51,50	75,79	88,58	100	100	100%
15	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial selama 1 tahun	Jiwa	6.299	10.013	8.400	3.714	6.967	62.569
16	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	Jiwa	12.159	12.365	8.400	3.882	7,156	62.569
17	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Persen	51,8	80,99	100	95,67	97,36	100%
18	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	Jiwa	20	50	0	0	25	0
19	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	Jiwa	20	50	0	0	25	0
20	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Persen	100	100	0	0	100	0
21	Jumlah WKBSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Unit	178	178	178	13	13	13
22	Jumlah WKBSM yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Unit	178	178	178	13	13	13

No.	Uraian	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
23	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen	100	100	100	100	100	100%
24	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Jiwa	131	772	448	146	1440	268
25	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Jiwa	131	772	448	147	1440	268
26	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persen	100	100	100	99,31	100	100%
27	Jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Jiwa	131	772	448	-	-	-
28	Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Jiwa	131	772	448	-	-	-
29	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Persen	100	100	100	-	-	-
30	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Jiwa	319	430	417	749	157	16
31	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial	Jiwa	319	430	417	912	183	16
32	Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial	Persen	100	100	100	82,12	85,79	100%
33	Jumlah TP PKK Kota	Kelompok	1	1	1	1	1	1
34	Jumlah TP PKK Kecamatan	Kelompok	4	4	4	4	4	4
35	Jumlah TP PKK Kelurahan	Kelompok	20	20	20	20	20	20
36	Jumlah Kelompok PKK RT	Kelompok	n/a	n/a	n/a	450	447	447
37	Jumlah PKK Aktif se-Kota Tarakan	Kelompok	469	469	175	475	472	472
38	Jumlah Posyandu Aktif	Unit	147	148	149	178	178	182
39	Jumlah Posyandu	Unit	147	148	149	178	178	182
40	Persentase Posyandu Aktif	Unit	100	100	100	100,00	100	100%

Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2024

Keterangan

- Data 2022 dalam bentuk jiwa
- data 2017-2020 dalam satuan KPM

Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Menerima Bantuan Sosial dan Tertangani Tahun 2024

No	BANTUAN SOSIAL		JUMLAH		NO	TERTANGANI	
	FAKIR MISKIN		JIWA	KK			JIWA
	Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) (APBN)			3960	1	Rekomendasi Bantuan Pembiayaan Berobat Warga Miskin APBD II	31
2	Fasilitasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) (APBN)			5622	2	Bantuan Pembiayaan Perawatan Medis Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	9
3	Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) (APBN)		52.431		3	Data Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Mendapatkan Layanan PENELUSURAN KELUARGA Dan REUNIFIKASI KELUARGA	10
4	Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK Pemerintah Provinsi Kaltara)				4	Data Anak Terlantar yang Mendapatkan Layanan PENELUSURAN KELUARGA Dan REUNIFIKASI KELUARGA	24
5	Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK Daerah Kota Tarakan)				5	Lanjut Usia Terlantar yang Dirujuk Ke Panti Sosial Tresna Werda Marga Rahayu Tanjung Selor	68
6	Bantuan Bagi DISABILITAS				6	Pekerja Sosial/Pendamping Sosial Melakukan RESPON KASUS berdasarkan Pengaduan dari Masyarakat/ Lembaga	183
	a	Alat Bantu Disabilitas (APBD)	7		7	Bantuan Biaya Transportasi Pemulangan Bagi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (APBN)	16
	b	Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (APBN) Bantuan Permakanan	9		8	Rekomendasi Bantuan Pembiayaan Berobat Warga Miskin APBN	2
7	Bantuan Bagi LANSIA						
	a	Asistensi Lansia (APBN) Bantuan Berupa Permakanan	51				
	b	Alat Bantu Lansia (APBD)	4				
	c	Bantuan Kedaruratan Lansia (APBD) senilai Rp. 200.000,00	17				
8	KORBAN BENCANA ALAM		62				

No	BANTUAN SOSIAL		JUMLAH		NO	TERTANGANI	
	FAKIR MISKIN		JIWA	KK			JIWA
9	KORBAN BENCANA SOSIAL		206				
10	KEGIATAN REUNIFIKASI (APBD)		7				
11	Korban Penyalahgunaan Napza						
	a	Pelatihan Barista Coffee (APBN)	10				
	b	Bantuan Kebutuhan Dasar (Beras, Biskuit,Susu,Minyak,Telur dan Vitamin) (APBN)	40				
12	FAKIR MISKIN						
	Asistensi YAPI (Bantuan Sosial Bagi Anak-anak Miskin Yatim Piyatu bantuan sebesar Rp.200.000/Bulan untuk Pemenuhan Kebutuhan Permakanan (APBN)		126				
13	Bantuan Layanan Kedaruratan Bagi Anak Fakir Miskin bantuan senilai Rp.200.000,00/Bulan untuk Pemenuhan Kebutuhan Permakanan (APBD)		17				
JUMLAH			52.987	9582			
			62.569				
					343		

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya dengan baik program penanggulangan kemiskinan daerah dan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) baik dana yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota.
2. Dilakukannya verifikasi dan validasi KPM langsung oleh PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) atau TKSM (Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat) yang berada di masing-masing kelurahan sehingga penerima bantuan tepat sasaran.
3. Dilakukannya pendampingan KPM, BPNT/PKH sehingga Penyaluran bantuan dapat tepat waktu.
4. Tersedianya petugas Satuan Bakti Pekerja Sosial Anak (Sakti Peksos Anak), petugas pendamping untuk lanjut Usia/Penyandang Disabilitas/ Day Care
5. Terlaksananya monitoring dan reviu secara berkala sehingga pencapaian sasaran terpenuhinya kebutuhan dasar PMKS/PPKS tepat waktu.

Tabel Data Capaian SPM Dinas Sosial 2020-2024

No	Jenis Pelayanan	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rehabiltasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	0%	100%	100%	100%	100%
2	Rehabiltasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti	Jumlah Pneyndang Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	35.99 %	100%	100%	100%	100%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah Penyandang Lnjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	0%	100%	100%	100%	100%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Penegmis di Luar Panti	Jumlah Penyandang Gelandangan dan Penegemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	0%	100%	100%	100%	100%
5	Perlindungan dan Jmaninan Sosial pada saat Tanggap Darurat dan Psca Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bncana Alam dan Sosail yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%

Pelayanan yang diberikan mencakup berbagai aspek penting penyediaan makanan, sandang, kesehatan, dan layanan sosial lainnya seperti alat bantu, bimbingan fisik, mental, spritual, dan sosial diperbaiki secara optimal. Pada kelompok anak terlantar, secara khusus tercatat sebanyak 1035 orang yang menerima layanan penuh termasuk fasilitas pembuatan NIK, akses ke layanan pendidikan, dan kesehatan dasar, serta pelayanan reunifikasi keluarga. Selama 5 (lima) tahun terakhir, korban bencana alam dan sosial juga tertangani dengan baik. Namun masih terdapat kekurangan pada beberapa layanan seperti penanganan khusus bagi kelompok rentan dan dukungan psikososial bagi korban bencana.

Dalam rangka penanganan berbagai permasalahan sosial yang ada, di daerah ini telah terdapat sejumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang menjadi mitra utama pemerintah, dengan data sebagai berikut :
Data Pemuktahiran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2023

No	Jenis PMKS	Jumlah
1	Pekerja Sosial Profesional	2 Orang
2	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	64 Orang
3	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	12 Orsos
4	Karang Taruna (KT)	21 Lembaga
5	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	0 Orsos
6	Keluarga Pioner	0 KK
7	Wahana Keluarga Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	0 Orsos
8	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	0 Orang
9	Penyuluh Sosial	0 Orang
10	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	0 Orang
11	Dunia Usaha	0 Orang

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial tersebut dilihat dari segi jumlah dan kualitasnya masih perlu ditingkatkan untuk dapat menjadi mitra pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan sosial.

Dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penanganan PPKS di daerah maka dilaksanakan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Penanganan PPKS di daerah yang merupakan program bantuan sosial dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI, dengan data sebagai berikut :

Rekapitulasi Dtsen Bulan September Tahun 2025

KELURAHAN	KELUARGA	ANGGOTA KELUARGA	DESIL 1		DESIL 2		DESIL 3		DESIL 4		DESIL 5		DESIL 6-10		BELUM PEMERINGKATAN		NONAKTIF	
			Keluarga	Anggota	Keluarga	Anggota	Keluarga	Anggota	Keluarga	Anggota	Keluarga	Anggota	Keluarga	Anggota	Keluarga	Anggota	Keluarga	Anggota
Tarakan Barat	28792	86884	1719	4381	2737	9376	3269	11356	3524	12213	3164	10831	9377	30009	4337	8424	665	294
Karang Anyar	11182	33666	563	1402	818	2676	970	3350	1239	4277	1243	4229	4444	14269	1643	3346	262	117
Karang Rejo	2831	8324	198	495	352	1233	461	1604	410	1387	329	1116	628	1787	375	660	78	42
Karang Anyar Pantai	7559	22847	583	1521	889	3165	1069	3821	1035	3607	816	2839	1795	5681	1185	2135	187	78
Karang Balik	2792	7725	152	355	204	560	242	773	321	1041	314	965	996	3049	505	955	58	27
Karang Harapan	4428	14322	223	608	474	1742	527	1808	519	1901	462	1682	1514	5223	629	1328	80	30
Tarakan Tengah	24355	71187	1587	3821	2448	8165	2874	9708	2805	9330	2623	8681	7797	24363	3609	6871	612	248
Kampung I Skip	4648	13793	269	700	398	1326	414	1355	420	1316	430	1435	1939	6282	649	1343	129	36
Pamusian	5360	15549	245	545	329	944	406	1385	480	1552	577	1963	2421	7650	762	1461	140	49
Sebengkok	5716	16751	399	1019	650	2213	728	2375	667	2204	650	2122	1603	4961	880	1804	139	53
Selumit	2338	6606	179	428	297	936	301	954	278	881	240	757	638	1974	362	653	43	23
Selumit Pantai	6293	18488	495	1129	774	2746	1025	3639	960	3377	726	2404	1196	3496	956	1610	161	87
Tarakan Timur	20544	63083	1264	3334	2250	7816	2912	10189	2810	9818	2418	8130	5904	18765	2462	4813	524	218
Lingkas Ujung	4279	12569	277	632	402	1345	596	1967	624	2236	539	1812	1084	3334	645	1193	112	50
Gunung Lingkas	3117	9472	165	367	299	965	376	1326	391	1411	377	1288	1068	3369	379	710	62	36
Kampung Empat	1736	5269	72	220	92	308	133	440	171	583	203	613	849	2736	181	357	35	12
Kampung Enam	2490	7837	107	291	191	667	227	791	264	870	316	1137	1088	3561	241	482	56	38
Mamburungan	3651	11602	193	524	448	1561	560	1995	564	2010	411	1376	996	3275	394	822	85	39
Pantai Amal	3991	11896	342	973	617	2139	727	2527	606	1991	407	1338	625	1799	540	1099	127	30
Mamburungan Timur	1280	4438	108	327	201	831	293	1143	190	717	165	566	194	691	82	150	47	13
Tarakan Utara	12261	37250	813	2270	1531	5264	1664	5711	1485	5185	1325	4569	3531	11164	1577	2971	335	116
Juata Laut	5512	16996	438	1218	885	3191	972	3480	737	2586	599	2106	1024	3005	710	1350	147	60
Juata Permai	4170	12316	240	691	384	1205	416	1335	476	1617	461	1549	1550	4914	521	971	122	34
Juata Kerikil	2579	7938	135	361	262	868	276	896	272	982	265	914	957	3245	346	650	66	22
Total	85952	258404	5383	13806	8966	30621	10719	36964	10624	36546	9530	32211	26609	84301	11985	23079	2136	876

Urusan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kemandirian masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan memotivasi dan fasilitasi kepada masyarakat dan aparatur pemerintah Kelurahan/kelurahan untuk dapat mengembangkan segala potensi yang ada dalam diri dan lingkungannya. Cara yang dilakukan adalah melalui pembinaan, pelatihan, bimbingan teknis, fasilitasi bantuan langsung masyarakat, fasilitasi bantuan permodalan, dan pelayanan informasi kebutuhan teknologi tepat guna.

Kinerja pelayanan pemberdayaan masyarakat meliputi 7 (tujuh) jenis kelembagaan masyarakat, hal ini sesuai dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Lembaga Adat Kelurahan. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna, yang antara lain adalah :

Data Potensi Kelembagaan Masyarakat Kota Tarakan
Tahun 2024

No	Jenis Kelembagaan	Jumlah
1	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	25
2	Rukun Tetangga (RT)	447
3	Rukun Warga (RW)	19
4	Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	148
5	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	21
6	Karang Taruna	21
7	Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek)	4
8	Lembaga Adat Tidung	1

Untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 pada dasarnya bahwa Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan telah melaksanakan pencapaian indikator Renstra yang telah diinginkan. Adapun capaian indikator Renstra empat tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial		v		76,00	76,00	80,00	82,00	85,00	80,99	100	82,39	95,43	85,00	106,56	131,57	102,99	116,38	100,00
2	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis diluar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	v			100	100	100	100	100	100	100	88,28	100	100	100,00	100,00	88,28	100,00	100,00
3	Perentse korban bencana alam dan sosial yag terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	v			100	100	100	100	100	100	100	99,31	100	100	100,00	100,00	99,31	100,00	100,00
4	Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan			v	-	100	100	100	100	-	99,89	99,56	100	100	-	99,89	99,56	100	100
5	Persentase PSKS yg terlatih			v	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100
6	Persentse penerbitan ijin dan rekomendasi			v	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100,00	-
7	Persentase lembaga masyarakat yang aktif			v	96,00	96,00	100	100	100	96,00	100	98,71	98,41	100	100	104,16	98,71	98,41	100
8	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) diberdayanan			v	75	80	85	90	95	100	100	100	100	100	133,33	125,00	117,65	111,11	105,26
9	Persentase Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) aktif			v	100	80	85	90	95	100	100	100	100	100	100,00	125,00	117,65	111,11	105,26
10	Persentase posyandu aktif			v	100	80	85	90	95	100	80	85	90	95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Persentase pemberdayaan usaha ekonomi lomba posyantek dan TTG			v	-	50	55	60	65	50	55	60	65	50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber Data : Bagian Perencanaan dan Keuangan DinsosPM

Berdasarkan data capaian pada masing-masing indikator pada tabel 2.3, menunjukkan pola kinerja yang dinamis dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, hal tersebut didasari oleh beberapa faktor yang mempengaruhi nilai tersebut yang telah dianalisa pada masing-masing indikator sebagai berikut :

1. Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial Rasio capaian PPKS yang memperoleh bantuan sosial dengan rasio capaian tertinggi pada tahun 2021 sebesar 131,57% dan rasio capaian terendah pada tahun 2024 yaitu sebesar 100,00%. Selama periode Renstra 2019-2024, semua indikator kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena adanya sistem pelayanan yaitu SIKSNG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation).
2. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis diluar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
Rasio capaian penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gelandangan dan pengemis diluar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan rasio capaian tertinggi pada tahun 2020,2021,2023 dan tahun 2024 yaitu sebesar 100% dan rasio capaian terendah pada tahun 2022 yaitu sebesar 88,28%. Selama periode Renstra 2019-2024, semua indikator kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan adanya sistem pelayanan yaitu SPM (Standar Pelayanan Minimum).
3. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat Rasio capaian Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat dengan rasio capaian tertinggi pada tahun 2020,2021,2023 dan tahun 2024 yaitu sebesar 100% dan rasio capaian terendah pada tahun 2022 yaitu sebesar 99,31%. Selama periode Renstra 2019-2024. Selama periode Renstra 2019-2024, semua indikator kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun Rasio Capaian Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat karena didukung oleh kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, Bahwa dalam Kegiatan ini telah terlaksana melalui kegiatan Penanganan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Fasilitasi Bantuan Sosial terhadap korban bencana alam dan sosial.
4. Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
Rasio capaian Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan rasio capaian tertinggi pada tahun 2023 dan tahun 2024 yaitu sebesar 100% dan rasio capaian terendah pada tahun 2022 yaitu sebesar 99,56%. %. Selama periode Renstra 2019-2024, semua indikator kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan didukung oleh Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, Bahwa dalam Kegiatan ini telah terlaksana pemeliharaan dan perawatan TMP secara berkala.
5. Persentase PSKS yang terlatih.
Rasio capaian Persentase PSKS yg terlatih dengan rasio capaian tertinggi pada tahun 2023 S/d tahun 2024 yaitu sebesar 100%, Selama periode Renstra 2019-2024, semua indikator kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan. Meskipun rasio capaian PSKS yg terlatih mengalami penurunan pada Tahun 2024 tetapi rasio capaian telah melebihi target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan Pelatihan yang tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan kualitas dan jumlah PSKS yang terlatih.

6. Persentase Penerbitan Ijin dan Rekomendasi

Rasio capaian penerbitan ijin dan rekomendasi dengan rasio capaian tertinggi pada tahun 2023 yaitu sebesar 100%. Selama periode Renstra 2019-2024, semua indikator kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan adanya peningkatan kapasitas SDM, Proses pengajuan izin yang lebih cepat dan mudah, serta pengurangan persyaratan yang tidak perlu, dapat meningkatkan produktivitas penerbitan izin dan rekomendasi.

7. Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif

Rasio capaian lembaga masyarakat yang aktif dengan rasio capaian tertinggi pada tahun 2021 sebesar 104,16% dan rasio capaian terendah pada tahun 2023 yaitu sebesar 98,41%, meskipun capaian Tahun 2020 terendah namun capaian ini melebihi dari target yang telah ditentukan. Sedangkan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 Rasio Capaian lembaga masyarakat yang aktif lebih rendah dari target yang ditetapkan. Selama periode Renstra 2019-2024, target yang terpenuhi adalah pada tahun 2020, sedangkan pada tahun setelahnya tidak mencapai target akan tetapi capaian pada tiga tahun terakhir hampir mendekati target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pembinaan dan peningkatan kapasitas petugas pelayanan yang belum optimal, serta belum adanya sinkronisasi antar sistem data yang menyebabkan rendahnya partisipasi dan aktivitas masyarakat.

8. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) diberdayakan.

Rasio capaian lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) diberdayakan dengan rasio capaian tertinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar 133.33% dan terendah tahun 2024 sebesar 105.26%, Selama periode Renstra 2019-2024, semua indikator kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan. Meskipun rasio capaian lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) diberdayakan mengalami penurunan pada Tahun 2021 sampai dengan 2024 tetapi rasio capaian telah melebihi target yang telah ditetapkan, hal ini karena didukung oleh profesionalisme pengurus LPM, ketersediaan data dan informasi yang akurat, sarana dan prasarana yang memadai, koordinasi dan komunikasi yang efektif antarpihak, serta motivasi kerja yang tinggi di dalam lembaga itu sendiri. Faktor-faktor eksternal seperti dukungan komunikasi, sumber daya, disposisi pemerintah dan masyarakat, dan struktur birokrasi yang mendukung juga sangat berperan dalam keberhasilan pemberdayaan masyarakat.

9. Persentase Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) aktif.

Rasio capaian Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) aktif dengan rasio capaian tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebesar 125,00% dan terendah tahun 2020 sebesar 100.00%, Selama periode Renstra 2019-2024, semua indikator kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan. Meskipun rasio capaian Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) aktif mengalami penurunan pada Tahun 2021 sampai dengan 2024 tetapi rasio capaian telah melebihi target yang telah ditetapkan, hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah, kolaborasi lintas instansi, partisipasi aktif masyarakat melalui gerakan seperti Dasawisma, peningkatan kapasitas kader, penyediaan sumber daya dana (APBD), serta pelaksanaan Program Pokok PKK yang komprehensif dan tepat sasaran.

10. Persentase Posyandu Aktif

Rasio capaian posyandu aktif dengan rasio capaian tertinggi pada tahun 2020 s/d 2024 yaitu sebesar 100.00%, Selama periode Renstra 2019-2024, indikator kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini karena adanya partisipasi aktif masyarakat, ketersediaan kader yang berpengetahuan dan berdaya, pelaksanaan kegiatan rutin yang sesuai

standar (minimal 10 kali/tahun) serta penyelenggaraan layanan kesehatan yang lengkap (KIA, gizi, imunisasi, KB) dengan cakupan yang baik. Selain itu, dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk insentif, peningkatan kesadaran masyarakat, dan pemanfaatan teknologi turut mendukung pencapaian target tersebut.

11. Persentase Pemberdayaan Usaha Ekonomi Lomba Posyantek dan TTG.

Rasio capaian pemberdayaan usaha ekonomi lomba posyantek dan TTG dengan rasio capaian tertinggi pada tahun 2020 s/d 2024 yaitu sebesar 100%, Selama periode Renstra 2019-2024, semua indikator kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan berkat penerapan TTG yang meningkatkan kualitas dan daya saing produk, perluasan pasar, serta dukungan anggaran dan kerja sama instansi terkait. Posyantek sebagai lembaga pelayanan teknis juga berperan penting dalam penyediaan informasi, promosi, dan orientasi mengenai TTG, sehingga usaha ekonomi dapat berkembang secara efektif.

Dalam peningkatan pelayanan faktor faktor yang dapat mempengaruhi pelayanan baik eksternal maupun internal dalam mencapai tujuan dan sasaran yaitu Menurunnya Tingkat kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat memiliki Tantangan, Kekuatan, peluang, Kelemahan, Ancaman dan juga strategi dalam meningkatkan Pelayanan yaitu :

1. Tantangan (Threats)

Tantangan dalam penyelenggaraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Tarakan yang diidentifikasi berpotensi menghambat pencapaian target kinerja antara lain :

- a. Semakin mendesaknya kebutuhan dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di luar panti.
- b. Adanya peningkatan jumlah penduduk miskin yang dinamis seiring gejolak setiap waktu yang berubah-ubah sehingga seringkali penyerahan bantuan sosial dianggap tidak merata oleh masyarakat.
- c. Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang tidak optimal dikarenakan belum langsung menyentuh dan melibatkan pihak kelurahan dan tokoh masyarakat secara langsung yang akan memudahkan PPKS menerima pelayanan yang dibutuhkan.
- d. Tuntutan masyarakat untuk memperoleh Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang cepat, akurat, tepat dan terpadu semakin tinggi, sehingga rentan terhadap berbagai keluhan sehingga dapat dengan mudah menimbulkan ketidakpercayaan akan layanan permasalahan sosial.
- e. Masih rendahnya kesadaran dan motivasi masyarakat untuk bersama pemerintah memecahkan masalah sosial yang ada di masyarakat.
- f. Terbatasnya Anggaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sehingga Program Kegiatan tidak berjalan dengan maksimal.
- g. Terbatasnya Sarana dan Prasarana sebagai penunjang Layanan Kesejahteraan Sosial.
- h. Kompleksitas permasalahan PPKS dan kehidupan bermasyarakat sebagai dampak kemajuan dan pembangunan.
- i. Tingginya intensitas perpindahan PPKS antar wilayah baik antar Kabupaten/Kota/Kelurahan maupun lintas Provinsi yang berdampak pada kesulitan pendataan PPKS.
- j. Sudah berjalannya Program Sistem Layanan Rujukan Terpadu tetapi tidak maksimal karena tidak didukung oleh anggaran dan SDM yang Penguatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum simultan dengan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

- k. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kelurahan belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan amanah peraturan tersebut.
 - l. Pengaruh globalisasi yang mengedepankan sifat rasionalitas, materialistik dan individualistik.
 - m. Kuatnya arus kemajuan teknologi komunikasi dan informasi global yang mempengaruhi perilaku dan tatanan kehidupan sosial masyarakat.
 - n. Kecenderungan heterogenitas sosial masyarakat.
 - o. Tuntutan pelayanan pemberdayaan masyarakat yang lebih transparan, responsif, konsisten dan akuntabel.
 - p. Tuntutan ketersediaan data yang terkait dengan informasi berbagai jenis pelayanan pemerintahan Kelurahan dan kelembagaan masyarakat.
 - q. Belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelenggaraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, sarana dan prasarana serta program dan kegiatan yang mendukung semakin berkualitasnya pelayanan kesejahteraan sosial dan kelembagaan masyarakat.
 - r. Anggaran pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang tersedia belum dapat mendukung penyelenggaraan usaha sosial yang berkualitas bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan kelembagaan masyarakat yang aktif.
 - s. Koordinasi dan kemitraan strategis antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendorong percepatan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan kelembagaan masyarakat khusus melalui alokasi APBD Kabupaten/Kota maupun stakeholder belum berjalan optimal dan belum adanya data yang mendukung penanganan PPKS dan kelembagaan masyarakat melalui Corporate Social Responsibility (CSR) bidang sosial dan kemasyarakatan oleh Dunia Usaha.
2. Kekuatan dan Peluang
- Kekuatan dan peluang yang dimiliki Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :
- a. SDM yang berkompeten.
 - b. Adanya dukungan Inovasi pelayanan.
 - c. Sistem Database yang terintegrasi.
 - d. Regulasi yang mendukung untuk perbaikan pelayanan.
 - e. Perkembangan Teknologi dan Informasi.
 - f. Kerjasama Lintas Sektoral.
 - g. Dukungan Pemerintah Daerah (Pimpinan/Walikota) terhadap penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Pembangunan Kelurahan melalui pemberian bantuan stimulan.
 - h. Kesadaran ASN Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat untuk terus meningkatkan kemampuan/keahlian dalam pelaksanaan tugas
3. Kelemahan
- Kelemahan yang ada di dalam meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :
- a. Kurangnya sarana dan Prasarana
 - b. Kuantitas dan kualitas SDM yang berkompeten.
 - c. Kurangnya peluang untuk berinovasi.
 - d. Ketergantungan dengan Pusat.
4. Ancaman.
- Beberapa Ancaman yang mungkin terjadi dalam peningkatan pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Adanya perubahan kebijakan dari Pusat.
 - b. Tumpang tindihnya kebijakan pada program kebijakan daerah dan program dekonsentrasi.
 - c. Krisis ekonomi global yang berpengaruh pada kehidupan sosial masyarakat saat ini.
 - d. Rusaknya ekosistem lingkungan hidup yang mengakibatkan bencana alam dan bencana sosial.
 - e. Menurunnya kesadaran serta kepedulian masyarakat dalam pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
5. Strategi
- Strategi yang dimiliki oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat untuk mencapai tujuan dan sasaran Meningkatkan Kualitas Layanan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut:
- a. Meningkatkan sistem informasi yang berbasis IT.
 - b. Meningkatkan kerja sama lintas sektor melalui Inovasi.
 - c. Penguatan SDM.
 - d. Memperkuat sistem keamanan data penerima bantuan sosial dan keamanan informasi.
 - e. Memperbarui sistem secara berkala.
 - f. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan.
 - g. Melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif untuk kesadaran masyarakat.
 - h. Peningkatan pembinaan dan pengawasan SDM secara berkala.
 - i. Peningkatan sarana dan prasarana Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

DATA DTSEN

Pencapaian kinerja pelayanan yang dimaksud didukung dengan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah Kota Tarakan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dengan rata-rata capaian realisasi selama Tahun 2019-2024 menunjukkan hasil yang sangat baik.

Adapun anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Sosial Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata	
												Tahun Ke-					Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	BELANJA DAERAH	4.390.244.680	5.050.173.310	5.176.219.306	6.192.151.492	7.393.559.206	3.945.557.489	4.621.740.622	4.958.785.649	5.730.817.442	6.486.724.616	89,87	91,52	95,80	92,55	87,73	14,14%	13,30%
1	BELANJA OPERASI	4.301.874.680	4.954.387.173	5.157.429.316	6.079.276.525	7.239.242.566	3.858.194.689	4.526.794.272	4.940.090.649	5.619.426.442	6.338.447.916	89,69	91,37	95,79	92,44	87,56	14,06%	13,25%
	Belanja Pegawai	3.357.358.500	3.435.721.000	3.386.472.150	3.426.522.787	3.559.808.911	3.128.579.740	3.106.509.042	3.252.420.408	3.125.060.999	3.171.103.589	93,19	90,42	96,04	91,20	89,08	1,49%	0.39%
	Belanja Barang dan Jasa	820.016.180	666.666.173	640.957.166	682.753.738	1.334.818.085	617.339.049	568.285.230	568.882.541	583.284.443	1.122.428.904	75,28	85,24	88,76	85,43	84,09	19,87%	21,78%
	Belanja Hibah	124.500.000	852.000.000	1.130.000.000	1.970.000.000	2.344.615.570	112.275.900	852.000.000	1.118.787.700	1.911.081.000	2.044.915.423	90,18	100,00	99,01	97,01	87,22	177,58%	191,99%
2	BELANJA MODAL	88.370.000	95.786.137	18.789.990	112.874.967	154.316.640	87.362.800	94.946.350	18.695.000	111.391.000	148.276.700	98,86	99,12	99,49	98,69	96,09	116,36%	205,63%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.280.000	61.786.137	11.589.990	112.874.967	154.316.640	68.362.800	61.744.350	11.500.000	111.391.000	148.276.700	98,68	99,93	99,22	98,69	96,09	204,64%	202,67%
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.090.000	32.000.000	7.200.000			19.000.000	31.820.000	7.195.000			99,53	99,44	99,93			27,47%	-27,48%
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	2.000.000	-	-	-	-	1.382.000	-	-	-						0,00	0

2.1.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai sasaran layanan sosial yaitu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terdiri dari:

- 1) Anak Terlantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) sampai 18 (delapan belas) tahun yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Kriteria:
 - Berasal dari keluarga fakir miskin
 - Anak yang mengalami perlakuan salah (kekerasan dalam rumah tangga)
 - Ditelantarkan oleh orang tua/keluarga, atau
 - Anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga
 - Anak yang tidak pernah sekolah atau tidak sekolah lagi dan tidak tamat SMP
 - Makan makanan pokok kurang dari 2 kali sehari
 - Memiliki pakaian kurang dari 4 stel layak pakai
 - Bila sakit tidak diobati
 - Yatim, Piatu, Yatim piatu
 - Tinggal bersama dengan bukan orang tua kandung yang miskin
 - Anak yang berusia kurang dari 18 tahun dan bekerja.
- 2) Anak Balita Terlantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
Kriteria:
 - Yatim piatu atau tidak dipelihara, ditinggalkan oleh orang tuanya pada orang lain, di tempat umum, rumah sakit, dan sebagainya.
 - Tidak pernah/tidak cukup diberi ASI dan/atau susu tambahan/pengganti
 - Makan makanan pokok tidak mencukupi
 - Anak dititipkan atau ditinggal sendiri yang menimbulkan ketelantaran
 - Apa bila sakit tidak mempunyai akses kesehatan modern (dibawa ke Puskesmas dan lain-lain)
 - Mengalami eksploitasi.
- 3) Anak Yang Mengalami Masalah Hukum adalah seorang anak yang berusia 6 (enam) sampai 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah,
 - 1) yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana;
 - 2) yang menjadi korban tindak pidana atau melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.Kriteria:
 - Anak diindikasikan (terlaporkan di kepolisian) melakukan pelanggaran hukum;
 - Anak yang mengikuti proses peradilan
 - Anak yang berstatus diversi (pengalihan hak asuh anak kepada pihak lain atas keputusan pengadilan); dan
 - Anak yang telah menjalani masa hukuman pidana atau sedang mengikuti pembinaan dalam bimbingan kemasyarakatan lapas; serta
 - Anak yang menjadi korban perbuatan pelanggaran hukum
 - Anak yang menjadi korban sengketa hukum akibat perceraian orang tua:

Perdata

- Anak yang karena suatu sebab menjadi saksi tindak pidana

- 4) Anak Jalanan adalah seorang anak yang berusia 5-18 tahun, dan anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan, dan/ atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Kriteria:

- Anak yang rentan bekerja di jalanan karena suatu sebab
- Anak yang melakukan aktivitas di jalanan
- Anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan
- Jangka waktu di jalanan lebih dari 6 jam per hari dan dihitung untuk 1 bulan yang lalu

- 5) Anak dengan Kedisabilitas (ADK) adalah seseorang yang berusia 18 tahun kebawah yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Kriteria:

- Anak dengan disabilitas fisik: tubuh, netra, rungu wicara
- Anak dengan disabilitas mental: mental retardasi dan eks psikotik
- Anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda
- Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari.

- 6) Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak usia 0-18 tahun dalam situasi darurat, anak korban perdagangan/penculikan, anak korban kekerasan baik fisik dan /atau mental, anak korban eksploitasi, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi serta dari komunitas adat terpencil, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta anak yang terinfeksi HIV/AIDS.

Kriteria:

- Anak dalam situasi darurat;
- Anak korban perdagangan;
- Anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental;
- Anak korban eksploitasi;
- Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas adat terpencil;
- Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta
- Anak yang terinfeksi HIV/AIDS

- 7) Lanjut Usia terlantar adalah seseorang berusia 60 tahun atau lebih yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Kriteria:

- Tidak ada keluarga yang mengurusnya.
- Keterbatasan kemampuan keluarga yang mengurusnya,
- Tidak terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari
- Menderita minimal 1 jenis penyakit yang dapat mengganggu pemenuhan kebutuhan hidupnya.
- Lanjut usia yang hidup dalam keluarga fakir miskin

Untuk Lanjut Usia Terlantar terbagi menjadi 2 kriteria yaitu :

- LUT Potensial : yaitu lanjut usia terlantar yang masih mampu melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan barang dan/jasa.

- LUT Tidak Potensial : yaitu lanjut usia terlantar yang tidak berdaya untuk mencari nafkah sehingga hidupnya tergantung pada bantuan orang lain
- 8) Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas fisik dan mental.
- Kriteria:
- Mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari.
 - Mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari
 - Tidak mampu memecahkan masalah secara memadai
 - Penyandang disabilitas fisik: tubuh, netra, rungu wicara
 - Penyandang disabilitas mental: mental retardasi dan eks psikotik
 - Penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda
- 9) Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
- Kriteria:
- Seorang (laki-laki / perempuan) usia 18 – 59 tahun
 - Menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran (bordil), dan tempat terselubung (warung remang-remang, hotel, mall dan diskotik).
- 10) Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
- Kriteria:
- Seorang (laki-laki/perempuan) usia 18-59 tahun, tinggal di sembarang tempat dan hidup mengembara atau menggelandang di tempat-tempat umum, biasanya di kota-kota besar
 - Tidak mempunyai tanda pengenal atau identitas diri, berperilaku kehidupan bebas/liar, terlepas dari norma kehidupan masyarakat pada umumnya
 - Tidak mempunyai pekerjaan tetap, meminta-minta atau mengambil sisa makanan atau barang bekas, dll.
- 11) Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dengan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
- Kriteria:
- Seorang (laki-laki/perempuan) usia 18 – 59 tahun
 - Meminta-minta di rumah-rumah penduduk, pertokoan, persimpangan jalan (lampu lalu lintas), pasar, tempat ibadah dan tempat umum lainnya
 - Bertingkah laku untuk mendapatkan belas kasihan berpura-pura sakit, merintih, dan kadang-kadang mendoakan dengan bacaan-bacaan ayat suci, sumbangan untuk organisasi tertentu
 - Biasanya mempunyai tempat tinggal tertentu atau tetap, membaur dengan penduduk pada umumnya.
- 12) Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara mengais langsung dan mendaur ulang barang-barang bekas. Kriteria:
- Tidak mempunyai pekerjaan tetap atau mengais langsung dan mendaur ulang barang bekas, dll.

- 13) Kelompok Minoritas adalah individu atau kelompok yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk seperti waria, gay dan lesbian.
- Kriteria:
- Tidak dominan dengan ciri khas, suku bangsa, agama atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk
 - Mempunyai perilaku menyimpang
- 14) Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan adalah seseorang yang telah selesai atau dalam 3 bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
- Kriteria:
- Seorang (laki-laki/perempuan) usia 18 – 59 tahun
 - Telah selesai atau segera keluar dari lembaga pemasyarakatan karena masalah pidana
 - Kurang diterima/dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat
 - Sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap
 - Berperan sebagai kepala keluarga/pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya
- 15) Orang Dengan HIV/AIDS adalah seseorang yang telah terinfeksi HIV dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.
- Kriteria:
- Seorang (laki-laki/perempuan) usia 18 – 59 tahun
 - Telah terinfeksi HIV/AIDS
- 16) Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan NAPZA karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan NAPZA.
- Kriteria:
- Seorang (laki-laki / perempuan)
 - Pernah menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya termasuk minuman keras, yang dilakukan sekali, lebih sekali atau dalam taraf coba-coba
 - Secara medik sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan obat oleh dokter yang berwenang
 - Tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya
- 17) Korban Trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. (Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang)
- Kriteria:
- Mengalami tindak kekerasan
 - Mengalami eksploitasi seksual
 - Mengalami penelantaran
 - Mengalami pengusiran (deportasi)
 - Ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu
- 18) Korban Tindak Kekerasan adalah orang (baik individu, keluarga maupun kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat dari penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan

bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Kriteria:

- Individu, kelompok maupun kesatuan masyarakat yang mengalami tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi, diskriminasi, dan bentuk- bentuk tindak kekerasan lainnya
- Berakibat terganggunya fungsi sosial

- 19) Pekerja Migran Bermasalah Sosial adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial seperti tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengusiran (deportasi), ketidakmampuan menyesuaikan diri ditempat kerja baru atau di negara tempatnya bekerja, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi sosial.

Kriteria:

- Calon pekerja migran,
- pekerja migran internal,
- pekerja migran lintas negara,
- eks pekerja migran
- Mengalami masalah sosial dalam bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengusiran (deportasi), ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

- 20) Korban Bencana Alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Kriteria:

- Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

- 21) Korban Bencana Sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Kriteria:

- Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

- 22) Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adalah seorang perempuan dewasa berusia 18-59 tahun belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kriteria:

- Perempuan berusia 18 – 59 tahun
- Istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan.
- Menjadi pencari nafkah utama keluarga
- Berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak.

- 23) Fakir Miskin adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.

Kriteria:

- Penghasilan rendah atau berada dibawah garis sangat miskin yang dapat diukur dari tingkat pengeluaran per orang per bulan berdasarkan standar BPS per wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
 - Ketergantungan pada bantuan pangan untuk penduduk miskin (seperti zakat/beras untuk orang miskin/santunan sosial)
 - Keterbatasan kepemilikan pakaian untuk setiap anggota keluarga per tahun (hanya mampu memiliki 1 stel pakaian lengkap per orang per tahun).
 - Tidak mampu membiayai pengobatan jika ada salah satu anggota keluarga sakit.
 - Tidak mampu membiayai pendidikan dasar 9 tahun bagi anak-anaknya.
 - Tidak memiliki harta (aset) yang dapat dimanfaatkan hasilnya atau dijual untuk membiayai kebutuhan hidup selama tiga bulan atau dua kali batas garis sangat miskin.
 - Tinggal di rumah yang tidak layak huni.
 - Sulit memperoleh air yang bersih
- 24) Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar
- Kriteria:
- Suami atau istri sering tanpa saling memperhatikan atau anggota keluarga kurang berkomunikasi
 - Suami dan istri sering bertengkar, hidup sendiri-sendiri walaupun masih dalam ikatan keluarga
 - Hubungan dengan tetangga kurang baik, sering bertengkar tidak mau bergaul/berkomunikasi
 - Kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosial kurang terpenuhi
- 25) Keluarga Berumah Tidak Layak Huni adalah keluarga yang kondisi rumah dan lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial.
- Kriteria:
- Kondisi Rumah:
 - a. Luas lantai perkapita < 4>
 - b. Sumber air tidak sehat, akses memperoleh air bersih terbatas
 - c. Tidak mempunyai akses MCK
 - d. Bahan bangunan tidak permanen atau atap/dinding dari bambu, rumbia
 - e. Tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara
 - f. Tidak memiliki pembagian ruangan
 - g. Lantai dari tanah dan rumah lembab atau pengap
 - h. Letak rumah tidak teratur dan berdempetan
 - i. Kondisi rusak
 - Kondisi lingkungan:
 - a. Lingkungan kumuh dan becek
 - b. Saluran pembuangan air tidak memenuhi standar
 - c. Jalan setapak tidak teratur
 - Kondisi keluarga:
 - a. Kebanyakan keluarga miskin (di bawah garis kemiskinan)
 - b. Kesadaran untuk ikut serta memiliki dan memelihara lingkungan pada umumnya rendah (ikut bersih kampung, ikut kerja bakti, membuang sampah sembarangan di sungai)

- 26) Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok orang atau masyarakat yang hidup dalam kesatuan – kesatuan sosial kecil yang bersifat lokal dan terpencil, dan masih sangat terikat pada sumber daya alam dan habitatnya secara sosial budaya terasing dan terbelakang dibanding dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga memerlukan pemberdayaan dalam menghadapi perubahan lingkungan dalam arti luas.

Kriteria:

- Berbentuk komunitas relatif kecil, tertutup dan homogen.
- Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan.
- Pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau.
- Pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem.
- Peralatan dan teknologinya sederhana.
- Ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi.
- Terbatasnya akses pelayanan sosial ekonomi dan politik.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah

Adapun Mitra Perangkat Daerah yang telah atau sedang memiliki Kerjasama dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD) dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan (LAD).

Sesuai dengan Permendagri nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa maka Bupati/Walikota melalui Perangkat Daerah melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pembentukan, Pemberdayaan, dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD) dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan (LAD) sebagai mitra pemerintah Desa/Kelurahan di wilayahnya.

- a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa/ Kelurahan, Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.
- b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat Pelaku Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD) terdiri dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

2. Taruna Siaga Bencana (TAGANA)

Taruna Siaga Bencana atau yang kita sering sebut TAGANA adalah Relawan Sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari masyarakat dan memiliki kepedulian serta aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial. TAGANA mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana, baik pada pra bencana, saat tanggap darurat, maupun pasca bencana, dan tugas tugas penanganan permasalahan sosial lainnya yang terkait dengan penanggulangan bencana.

3. Dukungan Lintas Sektor Pencatatan Sipil (CAPIL)

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat memfasilitasi warga masyarakat yang terlantar dan tidak memiliki identitas atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan melakukan pemadanan data Nomor induk

Kependudukan (NIK) bagi masyarakat miskin (DTSEN) Dukungan Lintas Sektor Dinas Sosial

Dinas Kesehatan adalah sebagai penyedia anggaran pembayaran dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pelayanan kesehatan masyarakat di Posyandu, kelurahan, kecamatan, dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak bantuan hukum, BPJS sebagai jaminan kesehatan PBI pusat, provinsi, dan Daerah.

2.1.6 POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang dibina Dinas Sosial sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, terdiri dari:

- 1) Penyuluh sosial yaitu tenaga yang memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai program-program kesejahteraan sosial dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosial.
- 2) Pekerja Sosial Profesional yaitu tenaga profesional yang memiliki kompetensi dan sertifikasi dalam bidang pekerjaan sosial, berperan dalam memberikan layanan rehabilitasi sosial dan pendampingan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- 3) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yaitu tenaga pendamping sosial yang ditugaskan di setiap kecamatan untuk membantu koordinasi dan pelaksanaan program-program sosial serta menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
- 4) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
- 5) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yaitu relawan sosial dari masyarakat yang membantu pelaksanaan program kesejahteraan sosial di tingkat desa/kelurahan, termasuk dalam pendataan dan fasilitasi bantuan sosial.
- 6) Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yaitu Relawan yang terlatih dalam penanggulangan bencana, berperan dalam kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi pasca bencana di wilayah Kabupaten Mojokerto.
- 7) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yaitu organisasi sosial yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial, seperti panti asuhan, panti jompo, dan lembaga rehabilitasi sosial lainnya.
- 8) Karang Taruna yaitu organisasi kepemudaan di tingkat desa/kelurahan yang berperan dalam pemberdayaan sosial ekonomi pemuda dan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan kewirausahaan.

Adapun jenis-jenis pelayanan sosial yang diselenggarakan Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan sesuai tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

Tabel Jenis-Jenis Pelayanan Sosial
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan

NO	JENIS PELAYANAN	SASARAN
1	PENGURUSAN SURAT REKOMENDASI BIAKESMASKIN	1. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang belum memiliki nomor induk kependudukan
		2. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
		yang belum memiliki nomor induk kependudukan
		3. Terdampak bencana pada masa tanggap darurat dan/atau wabah pada kejadian luar biasa dalam skala Provinsi
		4. Telah menjadi peserta JKN, tetapi manfaat pelayanan kesehatan tidak ditanggung
		5. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), tetapi masih dalam proses integrasi ke dalam program
		JKN, sehingga manfaat pelayanan tidak diterima
2	PENGURUSAN SURAT KETERANGAN PENGURUSAN/PENGGANTIAN BUKU TABUNGAN/KKS	MASYARAKAT YANG MASUK DALAM DTKS
3	Memfasilitasi untuk mendapatkan alat bantu	Penyandang Disabilitas Fisik
4	Penanganan Orang dengan T4/	- Anak Terlantar
	OT	- Lansia Terlantar
		- Disabilitas Terlantar
		- Orang Terlantar
5	Rehabilitasi Ex ODGJ / Mr. X	Ex Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) / Orang Terlantar (OT) tanpa identitas atau Mr. X
6	Pendampingan ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum)	Anak Korban / Anak Saksi yang Berhadapan dengan Hukum
7	Pendampingan Tindak Pidana	- Orang dengan dugaan Tindak Pidana Ringan
	Ringan (Tipiring)	- Anak dengan dugaan Tindak Pidana Ringan
8	Pelayanan Adopsi Anak	Calon Orang Tua Anak (COTA)
9	Penyaluran Bantuan YAPI	- Anak Yatim
		- Anak Piatu
		- Anak Yatim Piatu
10	Penyaluran Bantuan Sosial	- Kluster Disabilitas
	ATENSI	- Kluster Lanjut Usia
		- Kluster Kelompok Rentan
		- Kluster Anak
11	Reunifikasi / Pemulangan PPKS	- Orang Terlantar
		- Anak Terlantar
		- Disabilitas Terlantar

Sedangkan jenis-jenis bantuan sosial yang diselenggarakan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, baik oleh pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh daerah maupun program bantuan sosial dari APBD daerah antara lain:

Tabel
Jenis-jenis Bantuan Sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Tarakan

NO	JENIS BANTUAN	SUMBER PENDANAAN	KRITERIA	SASARAN
1	PKH	APBN	FAKIR MISKIN	1. Fakir Miskin
				2. Masuk DTKS
2	SEMPAKO	APBN	FAKIR MISKIN	1. Fakir Miskin
				2. Masuk DTKS
3	BANTUAN	APBN	1. ANAK	1. Fakir Miskin
	ATENSI		2. LANSIA	2. Masuk DTKS
			3. DISABILITAS	
4	BANTUAN ATENSI YAPI	APBN	1. YATIM	1. Fakir Miskin
			2. PIATU	2. Masuk DTKS
			3. YATIM PIATU	3. Usia 1-18 Tahun
				4. tidak menerima bansos PKH
5	PENYERAHAN ALAT BANTU	APBD KOTA & APBD PROVINSI	Penyandang Disabilitas	1. Fakir Miskin
				2. Masuk DTKS
6	Bantuan Sosial Permakanan anak	APBD KOTA (Kesra) dan APBD PROVINSI	FAKIR MISKIN USIA PRODUKTIF	1. Fakir Miskin
				2. Masuk DTKS
7	Bantuan Sosial Atensi Permakanan Lanjut Usia Tunggal	APBN	FAKIR MISKIN USIA PRODUKTIF	1. Fakir Miskin
				2. Masuk DTKS
8	Bantuan Sosial Atensi Permakanan Penyandang Disabilitas	APBN	FAKIR MISKIN USIA PRODUKTIF	1. Fakir Miskin
				2. Masuk DTKS
9	PKH +	APBD PROVINSI	KPM PKH LANSIA	USIA MINIMAL 70 TAHUN
10	BANMAS PKH GRADUASI	APBN	Penyandang Disabilitas dan Lansia	1. Fakir Miskin 2. Masuk DTKS
11	Bantuan Sosial (Hibah) Karang Taruna	APBD PROVINSI	KARANG TARUNA	- Karang Taruna Desa/Kel.
				- Ada SK Pengurus Karang Taruna
				- Ada Kegiatan Usaha Ekonomis
				- LKS dikuatkan dengan Akte
12	Bantuan Sosial (Hibah) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	APBD PROVINSI	LKS	Pendirian (Notaris)
				Sudah Terdaftar di Dinas Sosial (STP)

2.2.1 Permasalahan dan Isu Strategis.

Tugas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan adalah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan daerah, dimana fungsi dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan antara lain adalah merumuskan kebijakan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat. Perumusan penyusunan perencanaan program kebijakan teknis pembinaan, pengembangan dan peningkatan dalam kegiatan pelayanan umum kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat sesuai norma, standar dan prosedur yang berlaku searah kebijakan umum daerah. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan administrasi dinas; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait tugas dan fungsinya.

Permasalahan dan tantangan merupakan titik awal dalam merumuskan arah kebijakan, strategi implementasi dan penetapan indikator keberhasilan pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Koreksi antara masalah dan peta kebutuhan menjadi simpul keterkaitan sebagai landasan penyusunan arah kebijakan dan langkah operasional pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 2.1
Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Menurunnya tingkat kemiskinan	Masih tingginya angka kemiskinan menyebabkan rendahnya kualitas Kesejahteraan masyarakat	Perlunya peningkatan kualitas hidup masyarakat pemukiman pesisir	Penetapan SDG's (tanpa kemiskinan ,tanpa kelaparan, berkurangnya kesenjangan) masih menjadi prioritas.	Tantangan pada tata kelola birokrasi, partisipasi masyarakat, serta isu-isu sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan budaya.	Masih tingginya angka kemiskinan yang berdampak pada berkembangnya PPKS jalanan	Penurunan Angka Kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat
	Belum memadainya sarana pelestarian nilai kepahlawanan TMP		Perubahan iklim dan polusi isu sosial ekonomi termasuk kemiskinan, kesenjangan dan migrasi	Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) belum Valid		
	Belum Optimalnya keberadaan Lembaga Masyarakat yang inovatif dalam pembangunan			Penanggulangan kemiskinan melalui berbagai macam program (PKH, BPNT, JKN, YAPI, dll)		

Beberapa permasalahan yang teridentifikasi sebagai simpulan hambatan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan urusan sosial dan urusan pemberdayaan masyarakat di Kota Tarakan yang dihadapi oleh

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk melakukan rehabilitasi sosial.
Pemerintah Kota Tarakan telah ada Rumah Singgah/Shelter tetapi belum didukung sarana prasarana dan sumber daya manusia dalam upaya rehabilitasi sosial bagi Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di luar panti.
2. Belum akuratnya Data Kemiskinan Kota Tarakan yang dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan.
Penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran dan tidak merata sehingga membuat permasalahan dan kecemburuan sosial di masyarakat. Pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi di setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap data kemiskinan yang dinamis melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-New Generation (SIKS-NG). Masih rendahnya kapasitas SDM Sosial dalam pelaksanaan pendataan dikarenakan belum diterapkannya Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pendataan kemiskinan.
3. Belum optimalnya fungsi pelayanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dan kurangnya sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan dan pembinaan masyarakat sehingga masih terpusat pada Dinas Sosial.
Selama ini tempat pengaduan ataupun konsultasi bagi mereka yang mempunyai permasalahan sosial dimana melakukan fungsi dalam memberikan pelayanan dan pembinaan masih belum optimal dan disisi lain mereka juga kurang dalam penyediaan sarana prasarana sebagai ruang khusus untuk sehingga masyarakat dapat melaporkannya langsung ke Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan yang mana di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan sangat memerlukan ruangan khusus untuk pelayanan konsultasi LK3 yang dilengkapi sarana yang memadai dan yang seharusnya juga ada home visit yang dilakukan untuk petugas LK3 yang anggotanya sesuai Juknis Kemensos RI.
4. Belum sebandingnya proporsi penerima bantuan bagi PPKS dan pemberian bantuan sosial belum mengarah pada upaya pemberdayaan dan kemandirian agar terbebas dari masalah kesejahteraan sosial.
Dalam perkembangan dan pertumbuhan PPKS di Kota Tarakan belum sepenuhnya sebanding dengan program pemberian bantuan sosial sehingga dimasa yang akan datang diharapkan pertumbuhan PSKS harus lebih besar lagi yang mana kedepannya dalam penanganan PMKS dapat terlaksana dengan maksimal dan secara profesional. Belum berkembangnya usaha bagi masyarakat miskin sebagai upaya pemberdayaan dan kemandirian masyarakat miskin agar terbebas dari masalah kesejahteraan sosial.
5. Rendahnya kepedulian masyarakat dalam mencegah bencana terhadap kesiapsiagaan bencana Kota Tarakan.
 - a. Perlunya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kepedulian lingkungan dalam keluarga maupun masyarakat tentang bahaya yang dapat menimbulkan terjadinya bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial.
 - b. Kurangnya kesiapsiagaan masyarakat Kota Tarakan dalam mengantisipasi terjadinya bencana, sehingga kajadian dapat diminimalisir baik korban harta benda dan jiwa.

- c. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengetahuan tanggap bencana.
6. Belum adanya Peraturan Walikota yang mengatur penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota.
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dalam hal pengumpulan uang dan barang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang, karena belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur hal pengumpulan uang dan barang dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian.
7. Belum memadainya persediaan sandang dan pangan terhadap kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana di Kota Tarakan.
8. Belum optimalnya penampungan sementara bagi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten kota untuk dipulangkan ke Kelurahan/kelurahan asal.
Penampungan sementara bagi pemulangan warga negara migran, korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Kelurahan/kelurahan asal. Perlu peningkatan sarana untuk penampungan bagi korban tindak kekerasan dan pekerja migran terkait dana operasional untuk makan/konsumsi bagi korban tindak kekerasan dan bagi pekerja migran yang bermasalah.
9. Belum optimalnya koordinasi antara instansi kota dalam menangani korban tindak kekerasan.
Dalam penanganan korban tindak kekerasan perlu penguatan melalui koordinasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dengan instansi terkait atau lembaga-lembaga yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan seperti LSM dan panti-panti. Dan kesemuanya itu hendaknya diatur dengan kesepakatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dengan Kepolisian, Kejaksaan, Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan Kota Tarakan, Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan maupun dengan lembaga sosial yang ada di masyarakat.
10. Masih kurangnya sumber daya manusia baik dari sisi jumlah maupun kualitas dalam penanganan masalah sosial di Kota Tarakan.
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan jumlah pegawai/alumni pekerja sosial sangat kurang sedangkan permasalahan sosial di Kota Tarakan sangat tinggi, adapun pelatihan-pelatihan tentang Pekerjaan Sosial juga kurang baik itu terhadap pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan maupun pada mitra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat seperti; Organisasi Karang Taruna, PSM, PKH, TKSK dan lain-lain.
11. Masih kurangnya sarana dan prasarana serta rendahnya tingkat pengelolaan data PPKS di Kota Tarakan.
Untuk mempermudah pengolahan data masih sangat diperlukan tambahan sarana komputerisasi dan sistem (penerapan teknologi informasi) sehingga perencanaan program di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan menjadi Bank Data Permasalahan Sosial, Pembangunan Sosial.
12. Masih tingginya kelompok keluarga miskin di Kota Tarakan dan kurangnya pemberdayaan masyarakat miskin agar dapat keluar dari garis kemiskinan secara mandiri.

- a. Kota Tarakan sebagai Kota Transit sudah tentu banyak penduduk imigrasi yang mana mereka belum tentu memiliki ketrampilan.
 - b. Disebabkan banyaknya tutup lapangan pekerja atau terjadinya PHK sektor industri pengolahan.
 - c. Kurangnya pembiayaan bantuan sosial yang dapat digunakan sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin.
Keterbatasan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), mereka tidak mampu mengembangkan karena keterbatasan pengetahuan, pendidikan dan keterampilan.
13. Masih tingginya jumlah disabilitas yang belum terampil. Dengan masih tingginya jumlah penyandang disabilitas yang belum terampil, maka dari pihak Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan berusaha melakukan pemberian pendidikan dan ketrampilan guna memenuhi kebutuhan agar dapat mandiri dan berdayaguna baik itu sendiri maupun untuk sesama penyandang disabilitas.
 14. Belum adanya payung hukum terkait Gelandangan dan Pengemis.
 15. Belum optimalnya ketersediaan Profil Kelurahan di Kota Tarakan sehingga penyajian data potensi dan tingkat perkembangan kelurahan sulit untuk diketahui sebagai bahan dasar perencanaan kelurahan. Ketersediaan data Profil Kelurahan sangat membantu dalam menentukan rencana intervensi kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
 16. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang ada di kelurahan sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan termasuk pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan cenderung menurun.
 17. Kelembagaan ekonomi mikro (BUMDES dan Pasar Kelurahan) masyarakat masih terbatas (relatif sedikit) sehingga kelompok usaha ekonomi masyarakat masih sulit melaksanakan pengembangan usaha dan jaringan produktif.
 18. Pengembangan produksi dan hasil usaha masyarakat belum optimal sehingga daya saing produksi dan hasil usaha kelompok usaha ekonomi masyarakat masih rendah.
 19. Penyebarluasan teknologi tepat guna per kelurahan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia belum optimal.

2.2.2 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam penentuan isu-isu strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dapat diambil sari sesuai dengan tugas dan pokok Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat di dalam identifikasi permasalahan yang disebut sebelum dan yang juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 55 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, yang bertugas membantu Walikota Tarakan selaku Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai langkah tindak lanjut dalam pelaksanaan Strategi Kebijakan secara teknis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berusaha melakukan analisis terhadap faktor-faktor kunci keberhasilan

(*key success factor*) baik faktor-faktor internal maupun eksternal pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

Berdasarkan identifikasi masalah, telaahan visi dan misi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), telaahan Renstra K/L dan Provinsi Kaltara serta telaahan tata ruang wilayah, maka dapat diidentifikasi 6 (enam) Isu Strategis sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Penanganan dan Pelayanan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan belum memiliki sarana dan prasarana yang optimal untuk penanganan dan pelayanan sosial karena :

- a. Perbedaan permasalahan sosial di setiap wilayah kecamatan/kelurahan yang ada di Kota Tarakan dan belum memiliki kerjasama dan sarana sosial yang memadai dan merata.
- b. Rendahnya kesadaran dan motivasi masyarakat untuk bersama pemerintah memecahkan masalah sosial di masyarakat. catatan : Sosialisasi dan Informasi ke masyarakat sudah disampaikan oleh pemerintah daerah???
- c. Belum tersedianya data kemiskinan yang rinci sebagai acuan terbaik untuk pemberian bantuan sosial bagi PPKS sehingga pemberian bantuan belum mengarah pada upaya pemberdayaan dan kemandirian agar terbebas dari masalah kesejahteraan sosial. Sebenarnya data sudah ada namun dalam pemberian bantuan masih terpusat oleh data kementerian dan indikator kemiskinan daerah belum ditetapkan. (catatan : Kalimatnya mohon di perbaiki karena Data Kemiskinan ada di DTSEN tindak lanjutnya belum ada seperti Tim Kemiskinan sudah jalan apa belum, SK atau regulasi daerah serta proses validasi DTSEN

2. Belum Optimalnya Pelayanan Rehabilitasi Sosial Luar Panti

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan memiliki Rumah Singgah/Shelter namun belum optimal digunakan sebagai sarana prasarana Rehabilitasi Sosial di Luar Panti karena :

- a. Minimnya penganggaran untuk operasional dan pelayanan Rumah Singgah/Shelter melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. catatan : Kolaborasi Anggaran antara Provinsi, pusat dan CSR seperti apa
- b. Belum terpenuhinya tenaga Pekerja Sosial Profesional (Peksos).
- c. Kelengkapan sarana penunjang Rumah Singgah/Shelter hendaknya dilengkapi ruang konseling, lemari pakaian, pakaian, ruang administrasi perkantoran dan alat-alat perkantoran.

3. Belum Optimalnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Pembangunan Kesos

Partisipasi PSKS dalam pembangunan sosial telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat khususnya pihak pemerintah.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan belum optimalnya partisipasi PSKS dalam pembangunan adalah kurangnya sosialisasi PSKS didalam melaksanakan pembangunan sosial baik itu pada masyarakat kelas atas maupun masyarakat kelas bawah terutama pada masyarakat penyandang masalah sosial yang mana PSKS adalah merupakan pilar dari pada pembangunan sosial dan juga sebagai mitra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan sebagai sumber pelayanan sosial terhadap pembangunan kesos.

Partisipasi PSKS dalam pembangunan kesejahteraan sosial merupakan elemen utama sebagai pekerja yang melayani masyarakat dimana kedudukan PSKS berada di tengah-tengah masyarakat yang mempunyai masalah yang bermacam-macam dan hal inilah yang bermuara dari belum optimalnya partisipasi PSKS dalam pembangunan sosial, dengan belum optimalnya partisipasi PSKS dapat mengakibatkan masyarakat masih banyak yang belum memahami dan mengerti arti peran dan pentingnya keberadaan PSKS di dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat Kota Tarakan.

Sumber data dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan menyebutkan bahwa jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di Kota Tarakan pada tahun 2018 adalah sebesar 12 PSKS yang merupakan mitra dari pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dengan berbagai macam kegiatan diantaranya pemberdayaan keluarga miskin dengan cara Bimbingan Wirausaha dan pemberian bantuan melalui KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dan dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk pemberdayaan keluarga miskin agar mereka bisa mendapatkan keterampilan untuk berusaha mandiri dan hidup sebagaimana layaknya masyarakat di lingkungan sekitarnya.

4. Belum Maksimalnya Pemberdayaan dan Pembinaan PPKS

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan belum optimal memberikan pelayanan kepada PPKS secara keseluruhan :

1. Karena keterbatasan sumber daya manusia, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan yang memiliki disiplin ilmu tentang sosial antara lain; SMPS (Sekolah Menengah Pekerja Sosial), STKS (Sekolah Tinggi Sosial), juga kurangnya tenaga terampil yang terdidik melalui pelatihan dari Kementerian Sosial RI.
2. Minimnya penganggaran untuk penanganan PPKS yang dialokasikan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, perlu adanya pelatihan keterampilan bagi PPKS, perlu adanya dukungan pendanaan yang cukup dari Pemerintah Kota dalam pelayanan dan penanganan PPKS sebagai upaya pemberdayaan dan kemandirian agar PPKS terbebas dari masalah kesejahteraan sosial.

5. Belum Maksimalnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat/ Swadaya Masyarakat

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan belum optimal memberikan pelayanan dan pembinaan kepada kelembagaan masyarakat secara keseluruhan dikarenakan sebagai berikut :

1. Keterbatasan sumber daya manusia, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan yang memiliki disiplin ilmu tentang pemberdayaan masyarakat.
2. Belum terlaksananya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat yang ada di kelurahan sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan termasuk pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan cenderung menurun.
3. Belum terlaksananya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat Kelurahan, peran perempuan dalam pembangunan, dan tata kelola pemerintahan Kelurahan.
4. Belum terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Permendagri No.19 Tahun 2007.
5. Belum terlaksananya pengembangan pendidikan dan pelatihan bidang pemberdayaan masyarakat berdasarkan kompetensi, jenis

dan variasi pelatihan terkait dengan ketersediaan modul pelatihan yang sesuai dengan kemajuan jaman masih relatif sedikit/terbatas baik untuk kelembagaan masyarakat, pemerintahan daerah maupun pemerintahan Kelurahan.

- 6. Minimnya penganggaran untuk penanganan Kelembagaan Masyarakat yang dialokasikan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.
- 6. Belum Optimalnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
 - 1. Masih rendahnya kualitas dan efektifitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
 - 2. Belum terlaksananya pembakuan manajemen mutu dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - 3. Belum terselenggaranya penyusunan dan pemanfaatan dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja.
 - 4. Belum terlaksananya pembakuan penilaian kinerja individu melalui perjanjian kinerja.

Dari keenam hal diatas merupakan isu-isu strategis yang dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dan juga merupakan isu nasional dalam pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan yang teridentifikasi Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1. di bawah ini, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perumasan Masalah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih tingginya angka kemiskinan menyebabkan rendahnya kualitas Kesejahteraan masyarakat	Belum terpenuhinya kebutuhan dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Bantuan sosial yang diberikan belum sepenuhnya tepat sasaran
		Belum optimal verifikasi dan validasi data kemiskinan
		Kurangnya Kompetensi Peksos dan pendamping Kelurahan
		Belum terpenuhinya bantuan bencana sesuai dengan kebutuhan
		Kurang aktifnya anggota Tagana dalam penanganan bencana
		kurang kemampuan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam kesejahteraan sosial
	belum memadainya sarana pelestarian nilai kepahlawanan TMP	Belum optimalnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP)

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum Optimalnya keberdayaan Lembaga Masyarakat yang inovatif dalam pembangunan	kurangnya peran aktf kelembagaan Masyarakat
		Belum optimal kapasitas Sumber Daya kelembagaan kemasyarakatan

Sumber Data: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

ISU STRATEGIS

Isu Strategis adalah salah satu yang perlu diperhatikan dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan perangkat Daerah secara teknokratik, selain mempedomani Prioritas Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Lembaga terkait. Dengan telah ditentukannya isu – isu strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan tahun 2025 – 2029, maka hal ini akan menjadi fokus utama Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota untuk bisa menangani Isu – isu strategis tersebut dengan strategi dan arah kebijakan yang didukung dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta sub kegiatan yang tertuang dalam Renstra Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

Perumusan isu strategis dilakukan dengan acuan berdasarkan kewenangan, permasalahan yang dihadapi, serta dinamika lingkungan global, nasional, dan regional. KLHS tidak dijadikan acuan karena tidak ada rencana yang berdampak atau berkaitan langsung dengan lingkungan hidup. Tabel berikut menyajikan teknik penyimpulan isu strategis Dinsos Provinsi.

Berdasarkan hasil review dari penjelasan pada poin-poin sebelumnya maka diperoleh informasi untuk menentukan isu strategis. Maka ditentukan isu strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan tahun 2025 – 2029 adalah seperti pada tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Identifikasi Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Kota Tarakan Tahun 2025-2029

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Menurunnya tingkat kemiskinan	Masih tingginya angka kemiskinan menyebabkan rendahnya kualitas Kesejahteraan masyarakat	Perlunya peningkatan kualitas hidup masyarakat pemukiman pesisir	Penetapan SDG's (tanpa kemiskinan ,tanpa kelaparan, berkurangnya kesenjangan) masih menjadi prioritas.	Tantangan pada tata kelola birokrasi, partisipasi masyarakat, serta isu-isu sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan budaya.	Masih tingginya angka kemiskinan yang berdampak pada berkembangnya PPKS jalanan	Penurunan Angka Kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat
	Belum memadainya sarana pelestarian nilai kepahlawanan TMP		Perubahan iklim dan polusi isu sosial ekonomi termasuk kemiskinan, kesenjangan dan migrasi	Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) belum Valid		
	Belum Optimalnya keberdayaan Lembaga Masyarakat yang inovatif dalam pembangunan			Penanggulangan kemiskinan melalui berbagai macam program (PKH, BPNT, JKN, YAPI, dll)		

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

Visi dan misi adalah dua komponen penting dalam perencanaan strategis suatu organisasi. Visi adalah gambaran ideal atau tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau pemerintahan di masa depan. Misi adalah langkah-langkah strategis atau cara-cara yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Misi lebih operasional dan konkret, karena biasanya dijabarkan dalam bentuk program, kebijakan, atau kegiatan nyata. Visi bersifat inspiratif dan memberikan arah umum dari semua kebijakan dan program yang dijalankan.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja PD selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Baik tujuan maupun sasaran, keduanya merupakan bagian penting dari dokumen perencanaan untuk mengarahkan kinerja dan pelaksanaan program secara sistematis dan terukur dalam periode tertentu.

Walikota dan Wakil Walikota Tarakan telah menetapkan Visi dan Misi yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Cerdas yang bertumpu pada sektor Jasa, Perdagangan, Perikanan Kelautan dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Maju menuju Masyarakat Sejahtera.

Dalam mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah maka ditetapkan beberapa Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Tarakan Tahun 2025 – 2029 yaitu :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
2. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar yang handal
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui dukungan kemudahan berusaha yang berkeadilan dan bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, perikanan kelautan, ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan (UMKM)
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif serta menjaga stabilitas ketertiban dan ketentraman kota
5. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh menghadapi bencana

Berdasarkan pada lima Misi di atas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan melaksanakan misi ke 1 (satu) yaitu Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang diterjemahkan dalam pencapaian dan penyelarasan tujuan dan Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)

Kota Tarakan Tahun 2025–2029. Tujuan dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Tarakan Tahun 2025 – 2029 adalah pada tujuan ke 1 yaitu Menurunnya Tingkat kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan sasaran Menurunnya angka kemiskinan.

Dalam menentukan tujuan dan sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat maka telah dirumuskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah Menurunnya angka kemiskinan dengan Indikator Tujuan yaitu :

1. Tingkat Kemiskinan
2. Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos)

Berdasarkan tujuan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025 – 2029 maka ditetapkan sasaran Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2025 – 2029 yaitu :

1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), dengan indikator :
 - a. Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial
2. Meningkatnya sarana pelestarian nilai kepahlawanan TMP dengan indikator :
 - a. Indeks kepuasan pengunjung TMP.
3. Meningkatnya keberdayaan lembaga kemasyarakatan yang inovatif dalam pembangunan dengan indikator :
 - a. Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pembangunan yang inovatif
4. Meningkatnya Tata Kelola Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat dengan Indikator :
 - a. Nilai SAKIP
 - b. Indeks kepuasan masyarakat (IKM)

Sebagaimana dengan indikator tujuan yaitu :

1. Tingkat Kemiskinan
2. Indeks kesejahteraan sosial (Ikesos)

Telah menetapkan target dari Indikator terhadap Tujuan dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tabel 3.1 di bawah ini :

TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN
TAHUN 2025 – 2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	RUMUSAN	DEFINIS OPERASIONAL	Baseline	TARGET TAHUN							
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET.	
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Menurunnya angka kemiskinan	Menurunnya Tingkat kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat		Indeks Kesejahteraan Sosial	Nilai Ikesos Kota di hitung sebagai rata-rata tertimbang dari Nilai Dimensi. Nilai Penimbangan atau Bobot dihitung berdasarkan Analytical Hierarchy Process (AHP)	DO : Adalah PPKS yang seharusnya menerima bantuan sosial yang sesuai desil 1 s,d desil 5	n.a	57,60	57,89	58,32	58,84	59,23	59,87		
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan Sosial	rumus PPKS yg memperoleh bantuan sosial di bagi dengan jumlah PPKS yg seharusnya menerima bantuan sosial	DO : Adalah PPKS yang seharusnya menerima bantuan sosial yang sesuai desil 1 s,d desil 5	54,78	55,25	55,88	56,35	56,97	57,25	57,82		
		Meningkatnya sarana pelestarian nilai kepahlawanan TMP	Indeks kepuasan pengunjung TMP	Nilai Indeks x Nilai Dasar $X \times 25 = y$	Survey kepuasan masyarakat	74,84	75,45	76,15	76,93	77,35	77,98	78,25		
		Meningkatnya Keberdayaan lembaga kemasyarakatan yang inovatif dalam pembangunan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pembangunan yang inovatif	rumusnya : Jumlah lembaga kemasyakatan yg memiliki inovasi di bagi jumlah lembaga kemasyarakatan	DO : Adalah lembaga kemasyarakatan yg memiliki inovasi dalam pembangunan atau pelayanan	8,92	10,07	14,39	21,58	28,78	35,97	43,17		
		Meningkatnya Tata Kelola Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Nilai SAKIP	Nilai perencanaan kinerja (30%) + Nilai pengukuran kinerja (25%) + nilai pelaporan kinerja (15%) + nilai evaluasi internal (10%) + nilai capaian kinerja (20%)	rentang skor kinerja yang mencerminkan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dan dikategorikan berdasarkan predikat tertentu	67,65	70,01	70,26	70,51	70,75	71,00	71,25		
			Nilai IKM	Nilai Indeks x Nilai Dasar $X \times 25 = y$	tingkat kepuasan masyarakat yang diukur berdasarkan perbandingan antara harapan dan kenyataan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diterima, melalui data kuantitatif dan kualitatif atas beberapa komponen pelayanan seperti prosedur, waktu, biaya, sarana, dan kompetensi petugas pada Dinas Sosial PM	84,37	84,94	85,43	85,98	86,45	86,98	87,43		

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan.

3.2.1. Strategi Dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal.

Faktor-faktor kunci keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan pencapaian Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Faktor penentu keberhasilan ini ditetapkan dengan menganalisis faktor lingkungan internal maupun lingkungan eksternal dengan menggunakan pendekatan SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threats).

Dari hasil analisis SWOT dapat diuraikan strategi yang dapat ditindak lanjuti oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat tahun 2025-2026.

Kebijakan adalah merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi Pemerintah Kota Tarakan.

Penjabaran Visi itu sendiri dapat diinterpolasikan kedalam Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan sehingga dapat menghasilkan misi-misi Pemerintah Kota Tarakan yang diinginkan.

Disamping itu, langkah selanjutnya adalah penahapan Pembangunan yang merupakan prioritas Pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial. Penahapan Renstra Dinas Sosial disajikan pada tabel 3.4 berikut :

TABEL 3.4
PENAHAPAN RENSTRA PD

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan koordinasi dan sistem data yang akurat dan terintegrasi untuk identifikasi warga miskin yang tepat sasaran	Penguatan sistem kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan SDM , pemberdayaan lembaga masyarakat	penguatan data basic sosial melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan ekonomi Nasional (DTSEN) oleh lembaga kemasyarakatan	penguatan data basic sosial melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan ekonomi Nasional (DTSEN) oleh sistem informasi kesejahteraan sosial sehingga bantuan sosial tepat sasaran	Menurunkan Angka Kemiskinan

Selanjutnya, dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra, perlu ditetapkan juga strategi dan arah kebijakan yang akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan program kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat selama 5 (lima) tahun mendatang.

Arah dan kebijakan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025-2029 ini menjadi rangkaian kerja operasionalisasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) dimana dimaksud tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat selaras dengan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan

strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

Berikut teknik dalam merumuskan arah kebijakan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat disajikan pada tabel 3.5 dibawah ini :

TABEL 3.5
ARAH KEBIJAKAN

OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
Menurunya angka kemiskinan	Pemberdayaan ekonomi dan kesenjangan sosial	Peningkatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	
		Peningkatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
		Penguatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	
		Peningkatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	
		Peningkatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana	
		Peningkatan pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	
		Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan	
		Penguatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, sub kegiatan.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Lingkungan Hidup dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Tarakan 2025- 2029.

Bab ini menyajikan arah operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi kebijakan yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya, serta mengacu pada struktur program yang ditetapkan secara nasional. Penyusunan komponen ini bertujuan untuk memastikan keterpaduan antara rencana strategis perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta untuk mendorong pencapaian target kinerja secara terukur dan efektif dalam periode perencanaan.

Sebagai tindak lanjut dari rumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, perangkat daerah menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai bentuk implementasi operasional. Setiap program disertai dengan indikator kinerja dan target yang jelas, serta didukung oleh kegiatan dan sub kegiatan yang relevan.

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, maka disusunlah Program dan Kegiatan beserta Pendanaannya yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 sebagai berikut :

TABEL 4.2
TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1.06.2.13.1.06.01.0000 - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat							
- Menurunnya angka kemiskinan	Menurunnya Tingkat kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Meningkaatnya Pemberdayaan Sosial		Tingkat Kemiskinan ((%))		
					Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)		
					Persentase PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial (%)		
					Persentase PSKS yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				Terlaksananya koordinasi lembaga / organisasi yang menyelenggarakan undian dan pengumpulan uang / barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	1.06.02.2.02 - Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	1.06.02.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	
				Terlaksanayan Pengembangan Potensi PPKS	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	1.06.02.2.03.0003 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.02.2.03.0012 - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	
					Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Persentase penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar serta gelandangan pengemis terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
			Meningkatnya Rehabilitasi Sosial		Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
				Terpenuhinya layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan	
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0004 – Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
					Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0009 – Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0010 – Pemberian Layanan Kedaruratan	
					Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0012 – Pemberian Layanan Rujukan	
			Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Terpenuhinya Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan sosial	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02.0004 - Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
					Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02.0006 - Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02.0009 - Fasilitas Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	
			Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				Tersedianya layanan bagi korban bencana alam dan sosial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.0005 – Pelayanan Dukungan Psikososial	
				Terselenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	
					Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	1.06.06.2.02.0003 - Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	
		Meningkatnya sarana pelestarian nilai kepahlawanan TMP			Indeks kepuasan pengunjung TMP (Indeks)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
			Meningkatnya Tatakelola Taman Makam Pahlawan	Tersedianya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persentase layanan pengelolaan taman makam pahlawan (%)	1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
					Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
					Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.06.07.2.01.0001 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
					Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	1.06.07.2.01.0002 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Keberdayaan lembaga kemasyarakatan yang inovatif dalam pembangunan	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Kelurahan	Terlaksananya lomba administrasi Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pembangunan yang inovatif (%)		
					Kategori kelurahan ()	2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	2.13.04.2.01.0018 - Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan		Persentase lembaga masyarakat yang aktif (%)	2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
				Terfasilitasinya pengembangan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Unit)	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Unit)	2.13.05.2.01.0004 - Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	2.13.05.2.01.0005 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	2.13.05.2.01.0006 - Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	2.13.05.2.01.0009 - Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
		Meningkatnya Tata Kelola Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat			Nilai SAKIP (Nilai)		
					Indeks kepuasan masyarakat (Indeks)		
			Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja		Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.06.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.06.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.06.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1.06.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Wali Data Pendukung Statistik Sektoral Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
			Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.06.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya layanan administrasi kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.06.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Tersedianya layanan administrasi umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1.06.01.2.06 – Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.06.01.2.06 – Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06 – Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06 – Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06 – Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06 – Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.06.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.06.01.2.06.0008 – Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terkelolanya data Barang Milik Daerah dalam aplikasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07 – Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07 – Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07 – Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07.0005 – Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07.0006 – Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.06.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya layanan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.06.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.06.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.06.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.06.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.06.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.06.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Bappeda Litbang Kota

4.2 URAIAN KEGIATAN

Kegiatan yang mendukung program kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui intervensi langsung terhadap kelompok rentan miskin. Setiap kegiatan dirancang sebagai langkah operasional untuk mencapai tujuan-tujuan strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Tarakan 2025–2029.

Beberapa bentuk kegiatan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Taraka antara lain:

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dan Non tunai
Menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat miskin dan rentan sebagai bentuk jaminan sosial dasar.
- (2) Pemutakhiran dan Verifikasi DTKS
Melakukan pembaruan dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar program sosial tepat sasaran dan berbasis data yang akurat.
- (3) Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial untuk Penyandang Disabilitas dan Lansia
Memberikan layanan langsung dan tidak langsung untuk mendukung keberfungsian sosial lansia, penyandang disabilitas, serta anak terlantar.
- (4) Penguatan Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan sosial melalui pelatihan dan pemberian bantuan operasional untuk LKS dan Karang Taruna.
- (5) Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi Produktif
Mendukung kemandirian ekonomi keluarga miskin melalui pemberian bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan kerja.
- (6) Penanganan Bencana Sosial dan Alam menyediakan bantuan logistik darurat, layanan dapur umum, dan pendampingan psikososial bagi korban bencana alam maupun konflik sosial.
- (7) Pengelolaan dan Perawatan Taman Makam Pahlawan (TMP)
Melakukan pemeliharaan TMP, pendataan veteran, dan pelaksanaan upacara nasional sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa pahlawan.

4.3 URAIAN SUB KEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET DAN PAGU INDIKATIF

Perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel 4.3. berikut:

TABEL 4.3
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Dan Pendanaan Tahun 2025-2029
Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				7.730.796.698,00		8.114.671.698,00		7.700.671.698,00		7.750.796.698,00		8.114.671.698,00		
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.890.147.158,00		6.046.022.158,00		5.840.022.158,00		5.890.147.158,00		6.046.022.158,00		
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	100	100	848.654.510,00	100	998.529.510,00	100	798.529.510,00	100	848.654.510,00	100	998.529.510,00	1.06.2.13.1.06.01.000 0 - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	
1.06.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				47.125.000,00		0,00		0,00		47.125.000,00		0,00		
Tersedianya layanan administrasi kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	47.125.000,00	0	0,00	0	0,00	1	47.125.000,00	0	0,00		
1.06.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				47.125.000,00		0,00		0,00		47.125.000,00		0,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	47.125.000,00	0	0,00	0	0,00	1	47.125.000,00	0	0,00		
1.06.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				217.009.380,00		214.009.380,00		214.009.380,00		217.009.380,00		214.009.380,00		
Tersedianya layanan administrasi umum	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	4	217.009.380,00	4	214.009.380,00	4	214.009.380,00	4	217.009.380,00	4	214.009.380,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	23		23		23		23		23			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	1		0		0		1		0			
1.06.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				4.978.700,00		4.978.700,00		4.978.700,00		4.978.700,00		4.978.700,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	4.978.700,00	1	4.978.700,00	1	4.978.700,00	1	4.978.700,00	1	4.978.700,00		
1.06.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				3.000.000,00		0,00		0,00		3.000.000,00		0,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	1	3.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	3.000.000,00	0	0,00		
1.06.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				72.340.280,00		72.340.280,00		72.340.280,00		72.340.280,00		72.340.280,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	72.340.280,00	2	72.340.280,00	2	72.340.280,00	2	72.340.280,00	2	72.340.280,00		
1.06.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				23.750.000,00		23.750.000,00		23.750.000,00		23.750.000,00		23.750.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	23.750.000,00	2	23.750.000,00	2	23.750.000,00	2	23.750.000,00	2	23.750.000,00		
1.06.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	4	6.000.000,00	4	6.000.000,00	4	6.000.000,00	4	6.000.000,00	4	6.000.000,00		
1.06.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				106.940.400,00		106.940.400,00		106.940.400,00		106.940.400,00		106.940.400,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	23	106.940.400,00	23	106.940.400,00	23	106.940.400,00	23	106.940.400,00	23	106.940.400,00		
1.06.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				321.966.500,00		321.966.500,00		321.966.500,00		321.966.500,00		321.966.500,00		
Terkelolanya data Barang Milik Daerah dalam aplikasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	10	321.966.500,00	10	321.966.500,00	10	321.966.500,00	10	321.966.500,00	10	321.966.500,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	35		35		35		35					
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	5		5		5		5					
1.06.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00		
1.06.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				161.966.500,00		161.966.500,00		161.966.500,00		161.966.500,00		161.966.500,00		
1.06.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	5	60.000.000,00	5	60.000.000,00	5	60.000.000,00	5	60.000.000,00	5	60.000.000,00		
1.06.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				103.700.000,00		103.700.000,00		103.700.000,00		103.700.000,00		103.700.000,00		
Tersedianya layanan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	103.700.000,00	12	103.700.000,00	12	103.700.000,00	12	103.700.000,00	12	103.700.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1					
1.06.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1.800.000,00	1	1.800.000,00	1	1.800.000,00	1	1.800.000,00	1	1.800.000,00		
1.06.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				101.900.000,00		101.900.000,00		101.900.000,00		101.900.000,00		101.900.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	101.900.000,00	12	101.900.000,00	12	101.900.000,00	12	101.900.000,00	12	101.900.000,00		
1.06.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				158.853.630,00		358.853.630,00		158.853.630,00		158.853.630,00		358.853.630,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	0	158.853.630,00	1	358.853.630,00	0	158.853.630,00	0	158.853.630,00	1	358.853.630,00				
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9	15		15		15		15		15					
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8	2		2		2		2		2					
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	14														
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	50		50		50		50		50					
1.06.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			65.560.000,00		65.560.000,00		65.560.000,00		65.560.000,00		65.560.000,00					
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8	2	65.560.000,00	2	65.560.000,00	2	65.560.000,00	2	65.560.000,00	2	65.560.000,00				
1.06.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			78.023.630,00		78.023.630,00		78.023.630,00		78.023.630,00		78.023.630,00					
1.06.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	14		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
1.06.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			0,00		200.000.000,00		0,00		0,00		200.000.000,00					
	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	0	0,00	1	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	200.000.000,00				
1.06.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			15.270.000,00		15.270.000,00		15.270.000,00		15.270.000,00		15.270.000,00					
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	50	15.270.000,00	50	15.270.000,00	50	15.270.000,00	50	15.270.000,00	50	15.270.000,00				
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	5.041.492.648,00	100	5.047.492.648,00	100	5.041.492.648,00	100	5.041.492.648,00	100	5.047.492.648,00				
1.06.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			8.940.000,00		14.940.000,00		8.940.000,00		8.940.000,00		14.940.000,00					
Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	3	8.940.000,00	3	14.940.000,00	3	8.940.000,00	3	8.940.000,00	3	14.940.000,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	0		1		0		0		1					
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	3		3		3		3							
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	3		3		3		3							
1.06.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		6.000.000,00		0,00		0,00		6.000.000,00				
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	0	0,00	1	6.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	6.000.000,00				
1.06.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.980.000,00		1.980.000,00		1.980.000,00		1.980.000,00		1.980.000,00				
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	3	1.980.000,00	3	1.980.000,00	3	1.980.000,00	3	1.980.000,00	3	1.980.000,00				
1.06.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.980.000,00		1.980.000,00		1.980.000,00		1.980.000,00		1.980.000,00				
1.06.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				4.980.000,00		4.980.000,00		4.980.000,00		4.980.000,00		4.980.000,00				
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	3	4.980.000,00	3	4.980.000,00	3	4.980.000,00	3	4.980.000,00	3	4.980.000,00				
1.06.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.032.552.648,00		5.032.552.648,00		5.032.552.648,00		5.032.552.648,00		5.032.552.648,00				
Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4	4	5.032.552.648,00	4	5.032.552.648,00	4	5.032.552.648,00	4	5.032.552.648,00	4	5.032.552.648,00				
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	312	52		52		52		52		52					
1.06.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.970.496.648,00		4.970.496.648,00		4.970.496.648,00		4.970.496.648,00		4.970.496.648,00				
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	312	52	4.970.496.648,00	52	4.970.496.648,00	52	4.970.496.648,00	52	4.970.496.648,00	52	4.970.496.648,00				
1.06.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				62.056.000,00		62.056.000,00		62.056.000,00		62.056.000,00		62.056.000,00				
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	4	4	62.056.000,00	4	62.056.000,00	4	62.056.000,00	4	62.056.000,00	4	62.056.000,00				
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				84.016.700,00		84.016.700,00		84.016.700,00		84.016.700,00		84.016.700,00				
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	100	100	84.016.700,00	100	84.016.700,00	100	84.016.700,00	100	84.016.700,00	100	84.016.700,00	1.06.2.13.1.06.01.000 0 - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.06.02.2.02 - Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya koordinasi lembaga / organisasi yang menyelenggarakan undian dan pengumpulan uang / barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.06.02.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				74.016.700,00		74.016.700,00		74.016.700,00		74.016.700,00		74.016.700,00		
	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	0	14		14		14		14		14			
	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	118	124		124		124		124		124			
	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	20		20		20		20		20			
1.06.02.2.03.0003 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	0	4	6.000.000,00	4	6.000.000,00	4	6.000.000,00	4	6.000.000,00	4	6.000.000,00		
1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	0	14	3.600.000,00	14	3.600.000,00	14	3.600.000,00	14	3.600.000,00	14	3.600.000,00		
1.06.02.2.03.0012 - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00		
1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota				44.416.700,00		44.416.700,00		44.416.700,00		44.416.700,00		44.416.700,00		
Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	118	124	44.416.700,00	124	44.416.700,00	124	44.416.700,00	124	44.416.700,00	124	44.416.700,00		
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				266.865.840,00		286.865.840,00		286.865.840,00		286.865.840,00		286.865.840,00		
1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				266.865.840,00		286.865.840,00		286.865.840,00		286.865.840,00		286.865.840,00		
Terpenuhinya layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	5	266.865.840,00	5	286.865.840,00	5	286.865.840,00	5	286.865.840,00	5	286.865.840,00		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	11	22		22		22		22		22			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	2.600		2.600		2.600		2.600		2.600			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	34	24		24		24		24		24			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	7	25		25		25		25		25			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	200	200		200		200		200		200			
	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	64		64		64		64		64			
1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan				49.956.420,00		49.956.420,00		49.956.420,00		49.956.420,00		49.956.420,00		
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	200	200	49.956.420,00	200	49.956.420,00	200	49.956.420,00	200	49.956.420,00	200	49.956.420,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00		
1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu				100.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	11	22	100.000.000,00	22	120.000.000,00	22	120.000.000,00	22	120.000.000,00	22	120.000.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	7	25	45.000.000,00	25	45.000.000,00	25	45.000.000,00	25	45.000.000,00	25	45.000.000,00		
1.06.04.2.01.0005 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		
Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	64	12.000.000,00	64	12.000.000,00	64	12.000.000,00	64	12.000.000,00	64	12.000.000,00		
1.06.04.2.01.0009 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	2.600	10.000.000,00	2.600	10.000.000,00	2.600	10.000.000,00	2.600	10.000.000,00	2.600	10.000.000,00		
1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	34	24	30.000.000,00	24	30.000.000,00	24	30.000.000,00	24	30.000.000,00	24	30.000.000,00		
1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan				9.909.420,00		9.909.420,00		9.909.420,00		9.909.420,00		9.909.420,00		
Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	5	9.909.420,00	5	9.909.420,00	5	9.909.420,00	5	9.909.420,00	5	9.909.420,00		
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				1.297.777.000,00		1.305.777.000,00		1.297.777.000,00		1.297.777.000,00		1.305.777.000,00	1.06.2.13.1.06.01.0000 - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	27,81	30	1.297.777.000,00	32	1.305.777.000,00	34	1.297.777.000,00	36	1.297.777.000,00	38	1.305.777.000,00		
1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				1.297.777.000,00		1.305.777.000,00		1.297.777.000,00		1.297.777.000,00		1.305.777.000,00		
Terpenuhinya Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan sosial	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	184.733	2.022	1.297.777.000,00	2.022	1.305.777.000,00	2.022	1.297.777.000,00	2.022	1.297.777.000,00	2.022	1.305.777.000,00		
	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	12.899	10		10		10		10		10			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	5.909		5.909		5.909		5.909		5.909					
	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	9.208	3.447		3.447		3.447		3.447		3.447					
	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	0	0		3		0		0		3					
1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00				
1.06.05.2.02.0004 - Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00				
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	12.899	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00				
1.06.05.2.02.0006 - Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				53.977.000,00		53.977.000,00		53.977.000,00		53.977.000,00		53.977.000,00				
Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	9.208	3.447	53.977.000,00	3.447	53.977.000,00	3.447	53.977.000,00	3.447	53.977.000,00	3.447	53.977.000,00				
1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				0,00		8.000.000,00		0,00		0,00		8.000.000,00				
Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	0	0	0,00	3	8.000.000,00	0	0,00	0	0,00	3	8.000.000,00				
1.06.05.2.02.0009 - Fasilitas Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin				1.108.800.000,00		1.108.800.000,00		1.108.800.000,00		1.108.800.000,00		1.108.800.000,00				
Terpenuhinya Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	5.909	1.108.800.000,00	5.909	1.108.800.000,00	5.909	1.108.800.000,00	5.909	1.108.800.000,00	5.909	1.108.800.000,00				
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA				114.990.000,00		114.990.000,00		114.990.000,00		114.990.000,00		114.990.000,00				
Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	100	100	114.990.000,00	100	114.990.000,00	100	114.990.000,00	100	114.990.000,00	100	114.990.000,00	1.06.2.13.1.06.01.000 0 - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat			
1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	552			54.990.000,00		54.990.000,00		54.990.000,00		54.990.000,00		54.990.000,00				
Tersedianya layanan bagi korban bencana alam dan sosial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	100	54.990.000,00	100	54.990.000,00	100	54.990.000,00	100	54.990.000,00	100	54.990.000,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	363	298		298		298		298		298			
1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan				49.990.000,00		49.990.000,00		49.990.000,00		49.990.000,00		49.990.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	363	298	49.990.000,00	298	49.990.000,00	298	49.990.000,00	298	49.990.000,00	298	49.990.000,00		
Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00		
1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Terselenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaa n Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	64	60.000.000,00	64	60.000.000,00	64	60.000.000,00	64	60.000.000,00	64	60.000.000,00		
	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	0	64		64		64		64		64			
1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	64	30.000.000,00	64	30.000.000,00	64	30.000.000,00	64	30.000.000,00	64	30.000.000,00		
1.06.06.2.02.0003 - Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	0	64	30.000.000,00	64	30.000.000,00	64	30.000.000,00	64	30.000.000,00	64	30.000.000,00		
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				77.000.000,00		277.000.000,00		77.000.000,00		77.000.000,00		277.000.000,00		
Meningkatnya Tatakelola Taman Makam Pahlawan	Persentase layanan pengelolaan taman makam pahlawan (%)	100	100	77.000.000,00	100	277.000.000,00	100	77.000.000,00	100	77.000.000,00	100	277.000.000,00	1.06.2.13.1.06.01.000 0 - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	
1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				77.000.000,00		277.000.000,00		77.000.000,00		77.000.000,00		277.000.000,00		
Tersedianya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	77.000.000,00	1	277.000.000,00	0	77.000.000,00	0	77.000.000,00	1	277.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	1	1		1		1		1		1			
1.06.07.2.01.0001 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				0,00		200.000.000,00		0,00		0,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0,00	1	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	200.000.000,00		
1.06.07.2.01.0002 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				77.000.000,00		77.000.000,00		77.000.000,00		77.000.000,00		77.000.000,00		

Sebagai kelanjutan dari Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang telah disajikan sebelumnya, daftar sub kegiatan prioritas berikut disusun untuk memperjelas fokus pelaksanaan dalam rangka pencapaian sasaran strategis. Pemilihan sub kegiatan ini didasarkan pada tingkat urgensi, dampak terhadap peningkatan kualitas layanan, serta ketersediaan sumber daya yang dimiliki.

Tabel 4.4
Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra
Pemerintah Kota Tarakan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.06.2.13.1.06.01.0000 - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat				
1.	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			1.06.05.2.02.0009 - Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	
2.	2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pembangunan	2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.13.05.2.01.0004 - Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
			2.13.05.2.01.0009 - Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	

- 4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- 4.2.1. Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah.
- Indikator Kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis opsional dan merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Indikator Kinerja utama (IKU) akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Penetapan Indikator Kinerja

Dinas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan telah menetapkan Indikator Kinerja yang akan dicapai untuk 5 (Lima) tahun mendatang, yang ditampilkan dalam tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Renstra Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran Rpjmd Tahun 2025-2029

NO.	INDIKATOR	Definisi operasional	Rumusan	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)			(3)	(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan Sosial	DO : Adalah PPKS yang seharusnya menerima bantuan sosial yang sesuai desil 1 s,d desil 5	Nilai Ikesos Kota di hitung sebagai rata-rata tertimbang dari Nilai Dimensi. Nilai Penimbangan atau Bobot dihitung berdasarkan Analytical Hierarchy Process (AHP)	%	54,78	55,25	55,88	56,35	56,97	57,25	57,82	IKU
2	Indeks kepuasan pengunjung TMP	Survey kepuasan masyarakat	Nilai IKM	Nilai	74,84	75,45	76,15	76,93	77,35	77,98	78,25	IKU
3	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam pembangunan yang inovatif	DO : Adalah lembaga kemasyarakatan yg memiliki inovasi dalam pembangunan atau pelayanan	rumusnya : Jumlah lembaga kemasyakatan yg memiliki inovasi di bagi jumlah lembaga kemasyarakatan	%	8,92	8,92	14,39	21,58	28,78	35,97	43,17	IKU
4	Nilai SAKIP		Hasil Penilaian implementasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	67.65	70,01	70,26	70,51	70,75	71,00	71,25	IKU
5	Nilai IKM		(Jumlah NRR Tertimbang x 25) NRR = Jumlah Nilai Perunsur dibagi Jumlah Kuisioner Terisi	Nilai	84,37	84,94	85,43	85,98	86,45	86,98	87,43	IKU

4.2.2 Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator Kinerja Kunci atau disebut juga IKK adalah Indikator Kerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan keberhasilan suatu urusan Pemerintah. Indikator kinerja juga dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu target, baik dengan menggunakan ukuran kualitatif maupun kuantitatif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dapat ditampilkan pada tabel 4.6 berikut :

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci (Ikk) Renstra
Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat

NO.	INDIKATOR	RUMUS	SATUAN	BaseLine 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	$\frac{\text{jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti}} \times 100\%$	%	100	100	100	100	100	100	100	Sumber Data Bidang Sosial/Rehsos
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	$\frac{\text{jumlah anak terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{populasi anak terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti}} \times 100\%$	%	100	100	100	100	100	100	100	Sumber Data Bidang Sosial/Rehsos
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	$\frac{\text{jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti}} \times 100\%$	%	100	100	100	100	100	100	100	Sumber Data Bidang Sosial/Rehsos
4	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	$\frac{\text{jumlah gelandangan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{populasi gelandangan pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti}} \times 100\%$	%	100	100	100	100	100	100	100	Sumber Data Bidang Sosial/Rehsos
5	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	$\frac{\text{Jumlah sarana prasarana yang disediakan untuk pelayanan sosial penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis di luar panti sesuai standar}}{\text{Jumlah sarana prasarana untuk pelayanan sosial di luar panti yang disediakan}} \times 100\%$	%	70	72	73	74	75	77	79	Sumber Data Bidang Sosial/Rehsos
6	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar}}{\text{Jumlah pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti}} \times 100\%$	%	100	66,13	66,13	65,32	65,32	65,32	65,32	Sumber Data Bidang Sosial/Dayasos

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026. Secara umum isi dokumen ini merupakan rangkaian rencana Tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin di capai.

Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L dan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kota Tarakan. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja atau RKA serta digunakan sebagai bahan penyusunan dokumen RKPD Kota Tarakan. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaran bidang / urusan dan atau target kinerja sasaran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

9. Rencana Strategis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025–2029 menjadi instrumen penting dalam menjabarkan arah kebijakan pembangunan daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dokumen ini disusun sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, sekaligus sebagai penjabaran visi, misi, dan program strategis Walikota dan Wakil Walikota Kota Tarakan Tahun 2025–2029.

Visi Walikota dan Wakil Walikota Kota Tarakan Tahun 2025–2029 adalah “Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Cerdas yang bertumpu pada sektor Jasa, Perdagangan, Perikanan Laut dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Maju menuju Masyarakat Sejahtera. Visi ini sejalan dengan peran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan dalam melaksanakan fungsi pelayanan, perlindungan, serta pemberdayaan perempuan dan anak kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tarakan Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Tarakan.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025-2029 sebagai sebuah Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2025–2029. Untuk mewujudkannya maka diperlukan upaya untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan melalui pengembangan reformasi birokrasi sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima dan efisien.

Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada tahun 2025-2029 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan tahun 2025-2029.

Dokumen Renstra ini merupakan rencana menengah pembangunan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan 2025–2029 juga merupakan bagian dari komitmen Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan untuk mewujudkan *good governance* melalui perencanaan berbasis data dan bukti. Perencanaan ini diharapkan mampu menyinergikan program pusat, provinsi, dan kabupaten serta memperkuat peran masyarakat dan lembaga sosial dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan.

Dengan demikian, penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025–2029 diharapkan mampu menjadi dokumen perencanaan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dan visioner. Renstra ini akan menjadi acuan bagi seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan dalam mewujudkan visi daerah dan menjawab tantangan sosial secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan merupakan rangkaian kegiatan yang berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas organisasi, efisiensi anggaran, optimalisasi SDM, dan pengawasan kinerja. Dalam rencana strategis ini diformulasikan perwujudan pandangan ideal yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Untuk itu dibutuhkan dukungan dari seluruh komponen, dari unsur pimpinan dan staf, dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan.

Untuk merealisasikan capaian kinerja dari rencana tersebut dituangkan dalam visi, misi, tujuan, dan pengukuran kinerja yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, secara jelas dan praktis, serta didasarkan pada hasil pengujian faktor internal dan eksternal, sehingga didapatkan rumusan tujuan, alokasi sumber daya, dan pencapaian sasaran yang berguna bagi organisasi dalam kurun waktu yang ditentukan.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, diperlukan upaya peningkatan kapasitas SDM, peningkatan sarana dan prasarana, perbaikan kualitas kinerja dan penyempurnaan sistem, serta intensitas koordinasi dan sosialisasi untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya urusan serta program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal diperlukan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai pedoman dan arah dalam melaksanakan tujuan dan sasaran, sehingga Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana didasarkan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan adanya kekuatan, kelemahan peluang yang ada, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.

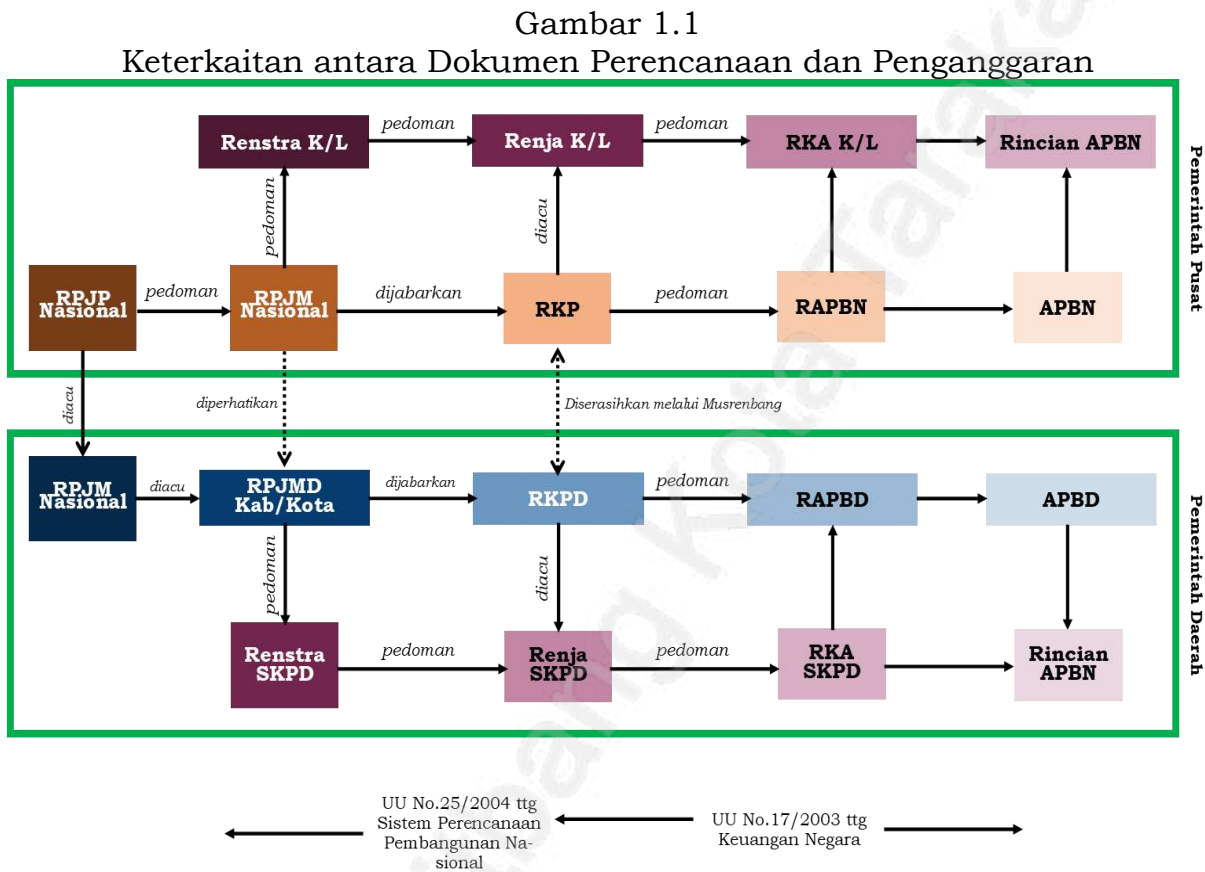
Proses penyusunan renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah; (4) Pelaksanaan Forum Pemerintah Daerah; (5) Penyusunan Rencana Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (6) Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan, Peraturan Kepala Daerah Kota Tarakan tentang Tugas dan Fungsi DPPPAPPKB, RPJMD Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Tarakan.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang disusun setiap tahun selama kurun waktu dua tahun. Selain itu Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

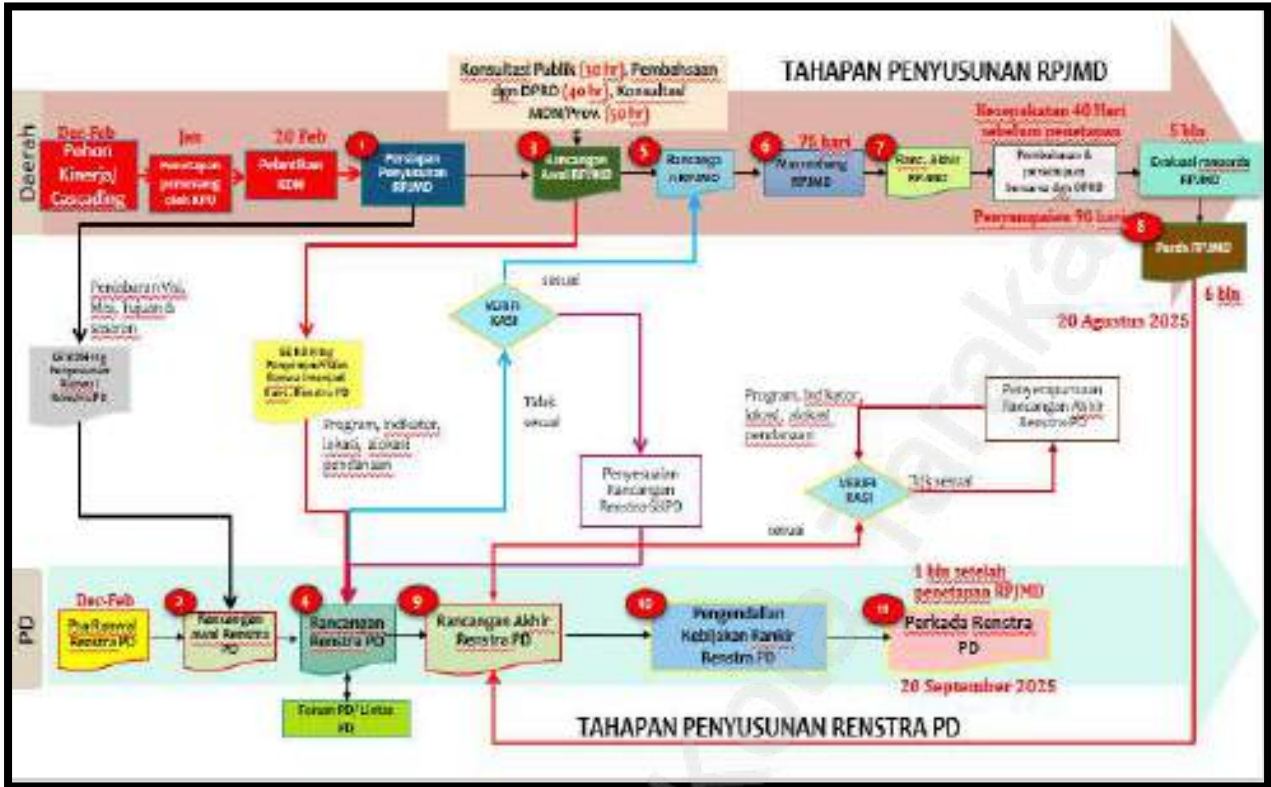
Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keberadaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan akan menjadi pedoman bagi

penyusunan rancangan RKA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
Gambaran tentang hubungan antara Renstra Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan berikut ini:



Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.2
Bagan Alir Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD)



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Perlindungan Penduduk dan Keluarga Berencana, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
18. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029;
25. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

26. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2045;
27. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
29. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 68 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
30. Surat Keputusan Walikota Tarakan Nomor 100.3.3.3/HK-IV/214/2025 tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
31. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana periode tahun anggaran 2025 – 2026 adalah:

Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan tolak ukur kinerja selama lima tahun.

Menjamin keterkaitan, keserasian serta harmonisasi antara perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan program kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan.

Menyajikan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan

Menyesuaikan rencana target capaian Renstra PD dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan periode Tahun Anggaran 2025 - 2029 yang mengalami perubahan dan penyesuaian dengan kemampuan Anggaran Pemerintah daerah.

Memberikan arah dan pedoman bagi Aparatur Sipil Negara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan program prioritas sesuai dengan urusan pemerintahan di bidang administrasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana sehingga tujuan program dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana pembangunan tahunan.

Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan periode Tahun Anggaran 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

Menterjemahkan dan menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang termuat dalam RPD Kota Tarakan periode Tahun Anggaran 2025-2029 dalam

bentuk tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang lebih spesifik dan terarah serta yang bersifat operasional.

Sebagai kerangka acuan dalam menyusun rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama 2 (dua) tahun

Sebagai dasar penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi serta penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menjalankan dan melaksanakan kegiatan sesuai tupoksinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Perencanaan Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

Bab II. Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Stretegis DP3APPKB

- 2.1 Gambaran Pelayanan DP3APPKB
- 2.2 Sumber daya DP3APPKB
- 2.3 Kinerja Pelayanan DP3APPKB
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan DP3APPKB
- 2.5 Permasalahan dan Strategis
- 2.6 Identifikasi Permasalahan
- 2.7 Isu Strategis

Bab III. Tujuan, Sasaran, Stretegi dan Arah Kebijakan DP3APPKB

- 3.1 Tujuan dan Sasaran DP3APPKB
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan DP3APPKB

Bab IV. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

- 4.1 Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
- 4.2 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indicator, target dan pagu indikatif
- 4.3 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas daerah
- 4.4 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra DP3APPKB Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) DP3APPKB
- 4.5 Target kinerja urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Bab V. Penutup

Berisi uraian tentang kesimpulan, kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029, khususnya arahan agar Renstra dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja atau Rencana Kinerja Tahunan dan sebagai dasar untuk evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas Pokok

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 68 tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2.1.2. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 68 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

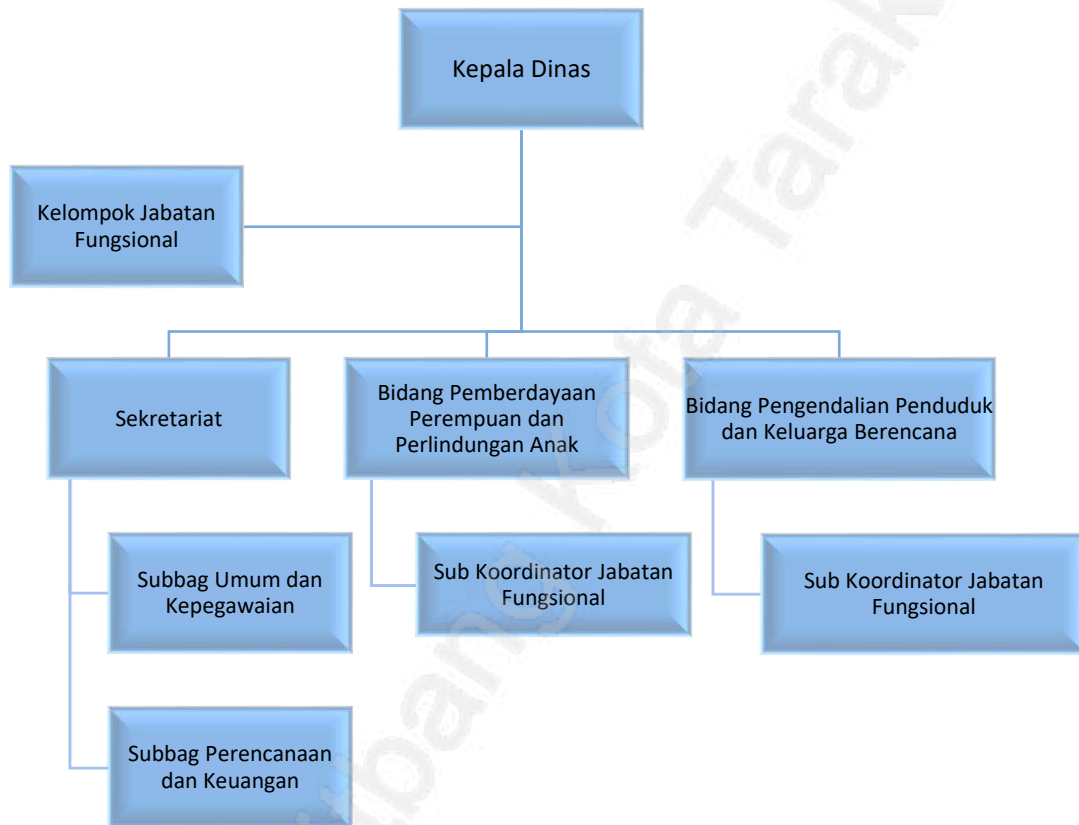
2.1.3 Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Nomor 58 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat;
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Penduduk dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:



1. Kepala Dinas

a. Tugas

- 1). Memimpin merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkondisikan dan bertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

b. Fungsi

- 1). Perumusan kebijakan teknis sesuai ruang lingkup tugasnya
- 2). Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3). Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 4). Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya;
- 5). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

a. Tugas

- 1). Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

b. Fungsi

- 1). Koordinasi kegiatan dinas;
- 2). Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran dinas;
- 3). Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;
- 4). Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dinas;
- 5). Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada dinas;
- 6). Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di dinas;
- 7). Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas;
- 8). Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja dinas;
- 9). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam menjalankan fungsi diatas, sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Sub Bagian yaitu :

- 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan
- 2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian masing-masing dipimpin seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Tugas

Melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam pengkoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.

b. Fungsi

- 1). Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas;
- 2). Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dinas;
- 3). Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada dinas;
- 4). Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di dinas;
- 5). Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas;
- 6). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

a. Tugas

Melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam koordinasi kegiatan dinas, koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, dan pengkoordinasian pembinaan dan

pemberian dukungan administrasi keuangan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.

b. Fungsi

- 1). Koordinasi Kegiatan Dinas;
- 2). Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas;
- 3). Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan.
- 4). Penyiapan bahan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja dinas
- 5). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah unsur pelaksana di bawah kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

a. Tugas

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

b. Fungsi

- 1). Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, dan peningkatan kualitas keluarga;
- 2). Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, dan peningkatan kualitas keluarga;
- 3). Pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah di daerah.
- 4). Pelaksanaan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan di daerah;
- 5). Pelaksanaan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di daerah;
- 6). Pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah ;
- 7). Pelaksanaan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi di daerah;
- 8). Pelaksanaan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di daerah;
- 9). Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan, perlindungan dan pemenuhan hak anak, dan peningkatan kualitas keluarga;
- 10). Pelaksanaan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah;
- 11). Pelaksanaan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi di daerah;
- 12). Pelaksanaan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus di daerah;
- 13). Pelaksanaan upaya pelembagaan Perlindungan Hak Anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha di daerah;

- 14). Pelaksanaan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di daerah;
- 15). Pelaksanaan upaya peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak di daerah;
- 16). Pelaksanaan penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak di daerah;
- 17). Pelaksanaan penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak di daerah;
- 18). Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dalam kelembagaan data di daerah;
- 19). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah unsur pelaksana dibawah Kepala Dinas dan dipimpin oleh Kepala Bidang yang membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

a. Tugas

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

b. Fungsi

- 1). Perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- 2). Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- 3). Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah di Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- 4). Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan di daerah;
- 5). Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal;
- 6). Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
- 7). Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah ;
- 8). Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
- 9). Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- 10). Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di daerah dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- 11). Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan

12). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari beberapa pejabat fungsional dapat diberikan tugas tambahan yang melaksanakan tugas sebagai Sub Koordinator melalui penetapan surat tugas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

Kelompok Jabatan Fungsional yang merupakan hasil penyetaraan Jabatan Pengawas diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator. Kelompok Jabatan Fungsional di bawah koordinasi Kepala Bidang bertanggung jawab langsung dengan Kepala Dinas.

2.2. Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya (Manusia)

Berdasarkan data kepegawaian per 23 September 2025 jumlah pegawai keseluruhan sebanyak 25 orang yang terdiri dari ASN 21 orang dan tenaga kontrak sebanyak 4 orang untuk selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.2.1.1
Jumlah Pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan per Tahun 2025.

Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah Pegawai			
PNS	8	13	21
Honor Kontrak	3	1	4
Jumlah	11	14	25
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan :			
Golongan IV	2	2	4
Golongan III	6	11	17
Golongan II			
Golongan I			
Jumlah	8	13	21
Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan:			
Kepala Dinas	1		1
Sekretaris		1	1
Administrator		1	1
Kapala Sub Bagian	1	1	2
Jabatan Fungsional Tertentu	1	2	3
Jumlah	4	8	12
Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan:			
S2	2	1	3
S1	4	13	17
D3	2		2
SMA			

Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
SMP			
Jumlah	8	14	22
Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Penjenjangan:			
Spamen			
Spama/Diklat PIM III	1		1
Adum/Adumla/Diklat PIM IV	2	2	4
Jumlah	3	2	5

Sumber: Data Kepegawaian DP3APPKB Kota Tarakan 2025

Jumlah pegawai ideal Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan sesuai analisa jabatan adalah sebanyak 38 orang, namun pegawai ASN yang ada 25 orang, tenaga bantuan 6 orang, sehingga baru terpenuhi sebesar 31 orang atau 83,78%.

Tabel 2.2.1.2

Analisa kebutuhan ASN Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan 2025

No	Susunan Organisasi	Jumlah Pegawai	Standar Kebutuhan	Perhitungan Analisis Beban Kerja	Kekurangan
1.	Kepala Dinas	1	1	-	-
2.	Sekretariat	7	10	-	3
3.	Bidang PPA	7	11	-	4
4.	Bidang KB	6	12	-	4
5.	Kelompok Jabatan Fungsional	0	2	-	2

Sumber: Data Kepegawaian DP3APPKB Kota Tarakan 2025

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Aset)

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan dilengkapi dengan sarana dan prasarana kantor.

Jumlah jenis sarana dan prasarana berdasarkan kondisinya di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan tampak pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.2.1
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan
per 2025.

Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
	Baik	Rusak	
Mobil Dinas	6 buah	0	6 buah
Sepeda Motor	13 buah	3 rusak	16 buah
Lemari Besi	17 buah	0	17 buah
Lemari Kaca	5 buah	0	5 buah
Lemari Kayu	1 buah	0	1 buah
Rak Kayu	2 buah	0	2 buah
Kursi lipat	213 buah	9 rusak	204 buah
Kursi putar	3 buah	5 buah	8 buah
Meja 1/2 Biro	32 buah	0 buah	32 buah
Meja Komputer	3 buah	4 buah	7 buah
AC Split	7 buah	0	7 buah
Telivisi	2 buah	0	2 buah
Note book	12 buah	6 buah	18 buah
Printer	10 buah	0	10 buah
Server	1 buah	0	1 buah
Kursi kerja eselon	18 buah	4 buah	22 buah
UPS	5 buah	0	5 buah
Personal Computer	5 buah	4 buah	9 buah
Proyektor + peralatan	9 buah	8 rusak	1 buah
Layar	3 buah	2 buah	1 buah
Handycam	2 buah	0	2 buah
Mesin Ketik Manual	3 buah	0	3 buah
Wireless Amplifier	1 buah	0	1 buah
Lemari makan	1 buah	0	1 buah
Facsimile	1 buah	0	1 buah
Spring balance	2 buah	0	2 buah
Lemari pakaian	1 buah	0	1 buah
Kompor gas	1 buah	0	1 buah
Mesin potong rumput	1 buah	0	1 buah
Generator	1 buah	0	1 buah
Kamera	2 buah	0	2 buah
Trolly Car/Lori	4 buah	0	4 buah
Rak besi	10 buah	0	10 buah
Filling Cabinet	6 buah	0	6 buah
Kursi biasa	18 buah	0	18 buah
Kursi tamu	3 buah	0	3 buah

Sumber : Laporan Aset DP3APPKB Kota Tarakan Tahun September 2025

2.3. Kinerja Perangkat Daerah

2.3.1 Capaian Kinerja Tahun 2020-2024

Pada bagian ini di sajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Perangkat Daerah.

Tabel.2.3.1.1
Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2020-2024 (Renstra Periode yang Lalu)

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (permen 86. realisasi/target*100%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	IPG			✓	91,90	92,00	92,10	92,29	92,30	86,67	87,30	87,85	88,46	89,04	94,31	94,89	95,39	95,85	96,47
2	IDG			✓	59,72	59,73	59,93	60,13	60,33	59,72	58,92	59,15	58,86	67,83	100,00	98,64	98,70	97,89	112,43
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 Perempuan			✓	18,89	18,72	18,50	17,20	17,95	0,04	0,07	2,63	6,63	9,69	0,21	0,37	176	166	175
4	Rasio Kekerasan terhadap Anak			✓	18,89	18,72	18,50	17,20	17,95	0,04	0,07	0,10	0,40	1,78	0,21	0,37	0,54	2,33	14,26
5	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)			✓	63,13	63,15	64,15	65,15	66,15	69,22	58,20	57,40	51,04	56,80	109,65	92,16	89,48	78,34	85,87
6	Nilai SAKIP			✓	65,82	68,00	70,00	71,00	72,00	61,11	70,30	77,79	70,06	85,87	92,84	103,38	111,13	98,68	119,26
7	Cakupan PUG yang aktif			✓	10,00	23,33	33,33	43,33	53,33	n.a	23,33	n.a	96,67	100,00	n.a	100,00	n.a	223,10	187,51
8	Persentase ARG pada belanja langsung APBD			✓	n.a	10,00	10,00	11,00	12,00	n.a	15,04	53,72	30,51	21,84	n.a	n.a	537,20	277,36	182,00
9	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang terlayani			✓	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Persentase Keluarga yang mendapatkan informasi tentang Kesetaraan Gender dan Hak Anak			✓	30,00	30,00	30,00	35,00	35,00	10,00	0,20	0,20	35,00	35,00	33,33	0,67	0,67	100,00	100,00
11	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak			✓	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	n.a	100,00	100,00	100,00

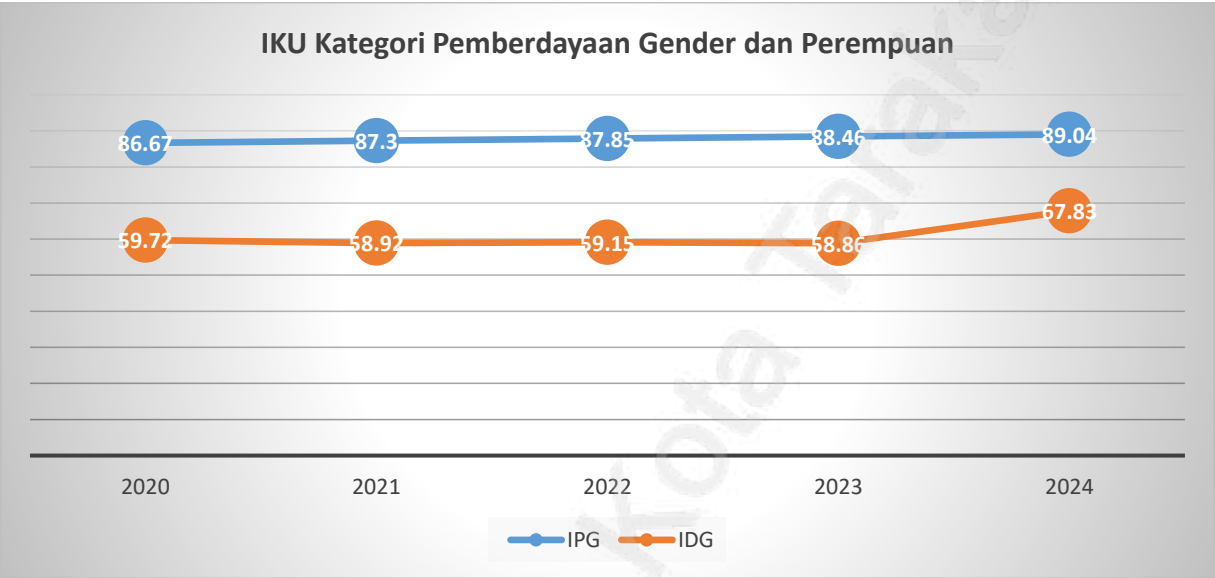
No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (permen 86. realisasi/target*100%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
12	Persentase pemenuhan indikator KLA			✓	n.a	20,83	33,33	50,00	62,50	n.a	n.a	50,00	58,00	62,50	n.a	n.a	150,02	116,00	100,00
13	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait			✓	n.a	0,02	0,02	0,02	0,02	n.a	35,00	2,60	0,04	n.a	n.a	152.173,91	11.818,18	185,71	n.a
14	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani			✓	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Persentase keluarga yang terdata			✓	4,00	8,88	17,77	26,65	35,53	4,00	91,92	75,31	100,00	100,00	100,00	1.035,14	423,80	375,23	281,45
16	TFR (Angka Kelahiran Total)			✓	2,30	2,29	2,28	2,25	2,24	2,30	2,07	2,24	2,28	2,27	100,00	90,39	98,03	101,33	101,34
17	Median (nilai tengah) usia kawin pertama perempuan seluruh wanita umur 25-49 tahun			✓	-	25,00	25,00	25,00	25,00	n.a	n.a	21,26	22,06	22,20	n.a	n.a	85,04	88,24	88,80
18	Persentase peserta KB aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			✓	25,98	63,15	64,15	65,15	66,15	n.a	n.a	31,30	22,25	26,30	n.a	n.a	48,79	34,15	39,76
19	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unneed need)			✓	25,98	24,50	24,25	24,00	23,50	n.a	n.a	20,53	15,25	14,60	n.a	n.a	84,66	63,54	62,13
20	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)			✓	n.a	50,00	55,00	60,00	65,00	100,00	99,38	99,38	81,58	87,00	n.a	198,76	180,69	135,97	133,85
21	Persentase Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina			✓	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah TA. 2020-2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mengalami peningkatan dan penurunan yang dapat disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut :

Grafik 2.3.1

IKU Kategori Pemberdayaan Gender dan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan 2020-2024



Trend capaian kinerja Indeks Pembangunan Gender Kota Tarakan dari tahun ke tahun selalu meningkat. Namun pada Indeks Pemberdayaan Gender adanya penurunan trend dari tahun 2020 hingga 2023 dan naik tajam di tahun 2024. Hal ini didukung oleh jumlah perwakilan Perempuan di parlemen daerah yang meningkat.

Grafik 2.3.2

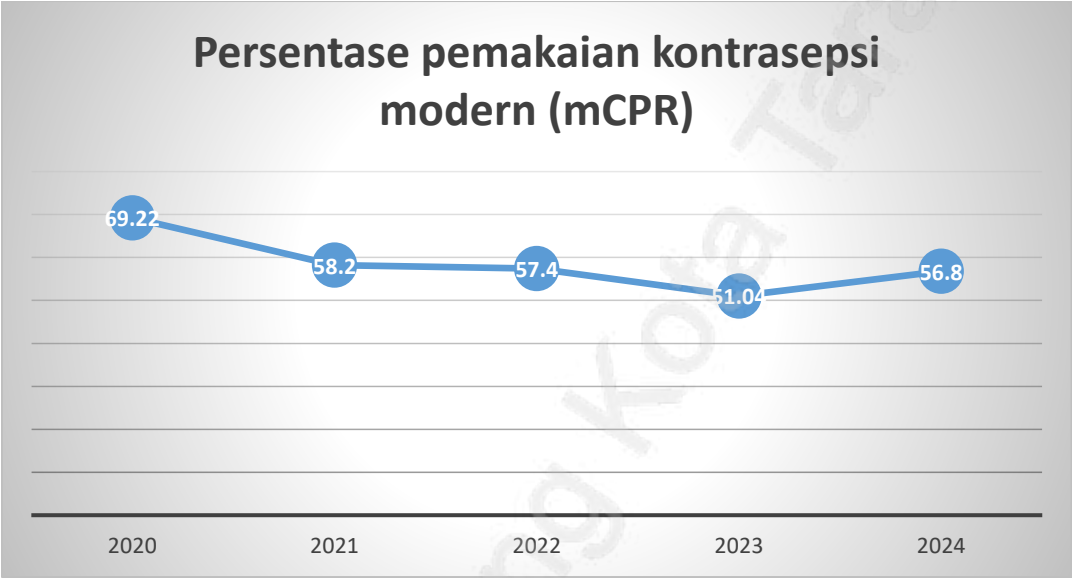
IKU Kategori Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan 2020-2024



Trend capaian kinerja rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO per 100.000 perempuan Kota Tarakan dari tahun ke tahun selalu meningkat begitu juga pada kasus anak. Hal ini dikarenakan masifnya kegiatan pencegahan dan sosialisasi tentang kekerasan pada perempuan dan anak sehingga masyarakat berani *speak up* tentang kasus perempuan dan anak. Selain itu aktifnya peran forum anak daerah dan adanya tim pencegahan kekerasan anak di sekolah.

Grafik 2.3.3

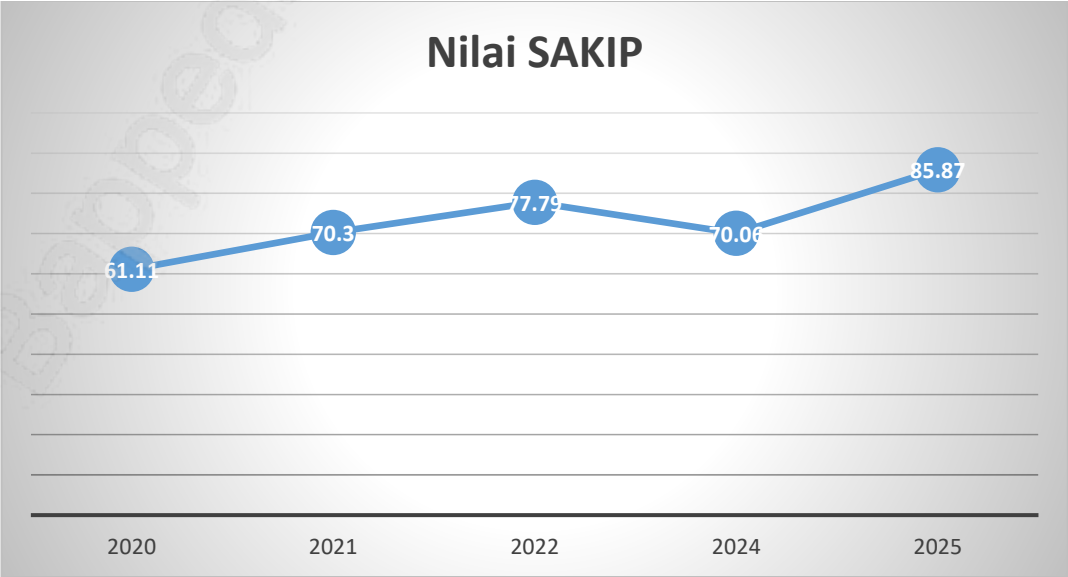
IKU Kategori Pengendalian Penduduk dan KB di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan 2020-2024



Trend capaian kinerja persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) Kota Tarakan dari tahun ke tahun selalu menurun dari target yang ditetapkan. Ini mengisyaratkan perlunya intervensi strategis memperkuat partisipasi pemakaian kontrasepsi modern.

Grafik 2.3.4

IKU Kategori Pengendalian Penduduk dan KB di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan 2020-2024



Trend capaian kinerja persentase Nilai SAKIP DP3APPKB Kota Tarakan dari tahun 2020 ke tahun 2022 selalu meningkat namun tahun 2023 sempat turun dan tahun 2024 meningkat lagi setelah adanya perbaikan pada sistem pengumpulan, pengolahan data, evaluasi dan pelaporan.

2.3.3. Capaian Kinerja Anggaran SKPD 2020 – 2024

Gambaran anggaran dan realisasi pendanaan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan selama tahun 2020 – 2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 2.3.3.1
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Tarakan Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggar an	Realisasi
BELANJA OPERASI	5.037.044.587,00	5.331.179.696,00	6.918.860.679,00	6.731.197.688,00	7.659.396.250,00	3.759.433.285,00	4.727.368.874,00	5.431.662.454,00	6.143.332.431,00	6.990.199.088,00	74,64	88,67	78,51	91,27	91,26	11,67	3,51
Belanja Pegawai	3.610.498.278,00	3.561.001.585,00	3.582.639.978,00	3.567.039.978,00	3.716.214.978,00	3.169.327.723,00	3.432.945.430,00	3.161.761.817,00	3.264.185.535,00	3.602.828.383,00	87,78	96,40	88,25	91,51	96,95	0,75	184,03
Belanja Barang dan Jasa	916.746.309,00	1.570.178.111,00	3.086.220.701,00	2.914.157.710,00	3.693.181.272,00	362.955.562,00	1.098.773.444,00	2.022.345.637,00	2.629.146.896,00	3.137.370.705,00	39,59	69,98	65,53	90,22	84,95	147,25	103,41
Belanja Hibah	509.800.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	227.150.000,00	195.650.000,00	247.555.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	44,56	97,83	99,02	100,00	100,00	91,06	142,35
BELANJA MODAL	1.004.299.999,00	1.527.298.019,00	889.674.000,00	671.744.096,00	1.720.176.970,00	845.522.849,00	1.437.836.200,00	888.503.350,00	642.708.455,00	1.704.563.440,00	84,19	94,14	99,87	95,68	99,09	135,48	69,80
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.004.299.999,00	240.698.019,00	0,00	671.744.096,00	1.642.884.910,00	845.522.849,00	219.994.500,00	0,00	642.708.455,00	1.627.278.000,00	84,19	91,40	#DIV/0!	95,68	99,05	67,13	69,80
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	1.286.600.000,00	889.674.000,00	0,00	77.292.060,00	0,00	1.217.841.700,00	888.503.350,00	0,00	77.285.440,00	0,00	94,66	99,87	0,00	99,99	17,29	18,24
TOTAL	6.041.344.586,00	6.858.477.715,00	7.808.534.679,00	7.402.941.784,00	9.379.573.220,00	4.604.956.134,00	6.165.205.074,00	6.320.165.804,00	6.786.040.886,00	8.694.762.528,00	76,22	89,89	80,94	91,67	92,70	52,57	117,97

Tabel. 2.3.3.2
Anggaran dan Realisasi Serapan Pendanaan Program Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Tarakan Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	33.088.000,00	214.986.233,00	250.000.000,00	264.981.730,00	263.842.640,00	22.664.000,00	208.474.560,00	247.555.000,00	262.742.700,00	263.053.800,00	68,50	96,97	99,02	99,16	99,70	142,90	-27,70
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	0,00	289.746.407,00	199.765.204,00	54.852.700,00	283.388.190,00	0,00	84.455.393,00	102.682.708,00	44.391.280,00	244.040.307,00	0,00	29,15	51,40	80,93	86,12	78,26	7,94
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	0,00	0,00	24.868.690,00	29.500.240,00	45.649.290,00	0,00	0,00	23.643.800,00	29.193.550,00	44.658.150,00	0,00	0,00	95,07	98,96	97,83	18,34	-13,41
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	0,00	0,00	9.994.440,00	0,00	5.451.960,00	0,00	0,00	7.226.600,00	0,00	4.605.750,00	0,00	0,00	72,31	0,00	84,48	-25,00	0,00
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	0,00	14.925.169,00	9.993.330,00	149.938.200,00	265.251.100,00	0,00	12.249.200,00	9.460.000,00	139.385.480,00	252.373.633,00	0,00	82,07	94,66	92,96	95,15	361,06	-27,12
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	0,00	269.065.587,00	426.871.094,00	109.991.186,00	434.099.817,00	0,00	54.851.992,00	290.621.546,00	101.115.675,00	342.597.017,00	0,00	20,39	68,08	91,93	78,92	69,77	8,95
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	0,00	186.906.202,00	81.434.954,00	313.676.403,00	435.027.440,00	0,00	177.740.640,00	74.639.508,00	264.670.927,00	394.901.486,00	0,00	95,10	91,66	84,38	90,78	66,86	8,34
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.449.606.962,00	796.516.598,00	877.430.823,00	1.879.367.792,00	2.825.152.250,00	914.602.149,00	749.033.303,00	632.127.079,00	1.744.352.565,00	2.600.603.512,00	63,09	94,04	72,04	92,82	92,05	32,41	-14,02
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA(KS)	0,00	103.200.000,00	1.323.580.000,00	948.088.101,00	862.951.450,00	0,00	103.200.000,00	768.666.000,00	744.155.271,00	754.472.921,00	0,00	100,00	58,07	78,49	87,43	286,30	-21,16
PRAGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI	16.744.000,00	0,00	0,00	0,00		16.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEDLAYANAN KB/KR YANG MANDIRI	124.911.040,00	0,00	0,00	0,00		85.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA	56.163.078,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Laporan Keuangan DP3APPKB Kota Tarakan TA. 2020-2024

Dari tabel 2.3.3.1 di atas terlihat bahwa penyerapan anggaran belanja pada tahun 2024 sebesar 92,70% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 86.40%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 94.25%.

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 telah mencukupi.

2.3.4. Tantangan dan Peluang

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

a. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

- Minimnya Keterlibatan OPD dalam Analisis Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (GAP dan GBS) berakibat capaian Anggaran Responsif Gender (ARG) yang rendah.
- Kurangnya SDM terlatih yang kompeten di Pengarustamaan Gender (PUG) mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan pemantauan, serta evaluasi.
- Masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan
- Minimnya ruang bermain edukatif dan fasilitas ramah anak di tempat-tempat strategis
- Kurangnya sistem informasi terintegrasi untuk pemantauan pengasuhan dan perkembangan anak.
- Proses legalisasi dokumen GDPK melalui Peraturan Walikota (Perwali) atau Peraturan Daerah (Perda) belum tuntas.
- Masih terdapat sekolah ramah anak yang belum memenuhi target kinerja pada tahap paripurna.
- Rendahnya cakupan pembinaan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di tingkat SMP.
- Kualitas pendataan keluarga belum optimal, sehingga memerlukan validasi dan verifikasi intensif.
- Minimnya pemanfaatan data RDK oleh stakeholder dan mitra kerja untuk perencanaan program.
- Cakupan verifikasi dan validasi data KRS belum memenuhi target akurasi. Proses pencatatan dan pelaporan Program Bangga Kencana belum terdigitalisasi secara optimal.
- Pemanfaatan data hasil pendataan keluarga dan KRS untuk intervensi stunting belum maksimal.
- Pelaksanaan kegiatan Kampung KB belum efektif, berdampak pada kualitas pelaporan dan capaian program.
- Ketersediaan data dan informasi akurat untuk pembinaan Kampung Keluarga Berkualitas masih terbatas.

- Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembinaan Kampung Keluarga Berkualitas.
- Komitmen dan sinergi stakeholder dalam mendukung Kampung KB belum optimal.
- Kebutuhan peningkatan kompetensi kader Ikatan Masyarakat Peduli (IMP) dalam implementasi program.
- Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung kegiatan IMP dan lini lapangan.
- Peran stakeholder dalam pembinaan IMP dan lini lapangan belum terkoordinasi secara maksimal.
- Sebanyak 22 Faskes belum memiliki tenaga terlatih untuk pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
- Koordinasi dan komitmen pemangku kebijakan dalam percepatan penurunan stunting perlu diperkuat.
- Jumlah penyuluh KB belum ideal, dengan rasio 1 penyuluh per kelurahan yang belum tercapai.

b. Peluang

Sedangkan peluang bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

- Tim Driver Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) telah terlatih dan komitmen mengumpulkan Analisis Gender berupa GAP dan GBS
- Sosialisasi kepada Masyarakat terkait Perlindungan Perempuan dan Anak
- Ketersediaan 22 Fasilitas Kesehatan (Faskes) Mitra dan tenaga khusus KB MKJP menjadi peluang untuk optimalisasi akses kontrasepsi berkualitas, termasuk percepatan pencapaian target MKJP.
- Adanya fasilitasi pelayanan kontrasepsi mandiri bagi Pasangan Usia Subur (PUS) membuka peluang penguatan kemandirian masyarakat melalui edukasi dan kolaborasi dengan swasta/CSR.
- Keberadaan Poktan Tribina, PIK-R, dan UPPKA menjadi basis penguatan program ketahanan keluarga berbasis komunitas, termasuk integrasi dengan isu stunting dan SDM unggul.
- Pembinaan PIK Remaja dan BKR yang telah berjalan dapat dikembangkan menjadi model intervensi holistik untuk pencegahan perkawinan anak, penyalahgunaan narkoba, dan kesehatan reproduksi remaja.
- Pelaksanaan 7 dimensi lansia tangguh di kelompok BKL menjadi peluang
- Pengintegrasian layanan lanjut usia dengan sistem kesehatan daerah dan jaminan sosial.
- Adanya 3 penyuluh KB per kecamatan memungkinkan penguatan sistem pendampingan keluarga melalui integrasi dengan kader desa dan teknologi informasi.
- Dokumen GDPK yang telah tersusun menjadi landasan perencanaan berbasis bukti untuk program pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga.

- Pembinaan sekolah SSK (Sekolah Sehat dan Kreatif) dapat dikembangkan menjadi model integrasi pendidikan kesehatan reproduksi dalam kurikulum adaptif.
- Keberadaan Kampung KB di 20 kelurahan menjadi peluang replikasi model pembangunan keluarga terintegrasi (kesehatan, ekonomi, lingkungan).
- Bantuan alokasi dana dari DAK dan CSR

2.4. Kelompok Sasaran dan Mitra DP3APPKB

2.4.1. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran layanan dalam konteks Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) adalah segmentasi atau pengelompokan masyarakat yang menjadi target utama dalam pemberian layanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan program keluarga berencana. Penentuan kelompok sasaran ini bersifat strategis untuk memastikan bahwa program dan layanan yang diberikan tepat sasaran dan dapat memberikan dampak yang maksimal sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing kelompok.

Kelompok Sasaran Pemberdayaan Perempuan

- Perempuan Usia Produktif

Kelompok sasaran utama dalam pemberdayaan perempuan adalah perempuan usia produktif yang mencakup berbagai kategori. Berdasarkan program yang dijalankan Kementerian PPPA, terdapat fokus khusus pada tiga kelompok perempuan dengan kerentanan ganda, yaitu perempuan prasejahtera, perempuan kepala keluarga, serta perempuan penyintas bencana dan tindak kekerasan

- Organisasi Perempuan

Penguatan organisasi kelompok perempuan di segala tingkat mulai dari tingkat Kota hingga nasional, seperti GOW (Gabungan Organisasi Wanita), dan DWP (Dharma Wanita Persatuan) menjadi sasaran untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan

Kelompok Sasaran Perlindungan Anak

- Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021, terdapat 15 hingga 20 kategori anak yang memerlukan khusus, antara lain :

- a. Anak dalam situasi darurat (pengungsi, korban kerusuhan, korban bencana alam, dan anak dalam situasi konflik bersenjata)
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
- e. Anak korban penyalahgunaan narkoba
- f. Anak korban pornografi
- g. Anak dengan HIV/AIDS
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis
- j. Anak korban kejahatan seksual
- k. Anak korban jaringan terorisme
- l. Anak penyandang disabilitas
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang
- o. Anak korban stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi orang tuanya

- Anak Usia Sekolah Kelompok sasaran ini mencakup anak usia 13-17 tahun yang berpotensi mengalami kekerasan dan memerlukan perlindungan khusus.
- Anak dalam Lembaga Layanan Anak-anak yang berada dalam berbagai lembaga penyedia layanan ramah anak, termasuk satuan pendidikan, lembaga rehabilitasi, dan lembaga penanganan anak berhadapan dengan hukum

Kelompok Sasaran Program Keluarga Berencana

- Pasangan Usia Subur (PUS)
Pasangan Usia Subur (PUS) merupakan kelompok sasaran utama program KB, didefinisikan sebagai pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid BKKBN menyarankan usia 21 hingga 35 tahun sebagai waktu ideal untuk menikah dan hamil, karena pada usia tersebut pasangan telah siap secara fisik maupun mental
- Kelompok Sasaran Berdasarkan Status KB
 - a. PUS Peserta KB Aktif - pasangan yang sedang menggunakan salah satu alat atau cara kontrasepsi modern
 - b. PUS Bukan Peserta KB - pasangan yang tidak menggunakan kontrasepsi
 - c. PUS dengan Unmet Need - pasangan yang ingin ber-KB tetapi tidak terpenuhi kebutuhannya
- Sasaran Khusus Program KB Program KB juga menargetkan kelompok khusus seperti:
 - a. Remaja dan generasi muda melalui program Generasi Berencana (GenRe)
 - b. Laki-laki melalui program peningkatan kesertaan KB pria
 - c. Masyarakat di wilayah khusus yang memerlukan pendekatan dan strategi khusus

Kelompok Sasaran Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Masyarakat Usia Reproduksi
Kelompok ini menjadi sasaran utama dalam program pengendalian kuantitas penduduk, dengan fokus pada pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahan mobilitas penduduk.
- Keluarga Berkualitas
Program pengendalian menargetkan berkualitas terbentuknya yang tidak penduduk keluarga hanya mempertimbangkan jumlah anak, tetapi juga kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga termasuk lansia.

2.4.2. Mitra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melakukan pelayanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Tarakan menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Proses bisnis perangkat daerah ini melibatkan kolaborasi lintas sektor yang mencakup organisasi perangkat

daerah internal, lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, dan organisasi masyarakat.

Kemitraan pada Internal Organisasi Perangkat Daerah menjadi tulang punggung dalam implementasi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kemitraan ini melibatkan BappedaLitbang, BPKPAD, dan Inspektorat dalam program pengarusutamaan gender, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, DinsosPM, Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat (penurunan stunting). Koordinasi yang intensif juga dilakukan dengan Camat dan Lurah sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Kemitraan dengan Instansi Vertikal Nasional melibatkan Kementerian PPPA dalam program perlindungan khusus anak dan pencegahan kekerasan terhadap anak. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang berperan dalam program Sekolah Siaga Kependudukan dan peningkatan kualitas keluarga. BNN, Departemen Agama, RSUD Tarakan dan Polres mendukung program perlindungan khusus anak dan perempuan melalui koordinasi dalam penanganan kasus-kasus yang memerlukan intervensi khusus.

Tabel. 2.4.2.1

Mitra dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
1.	Dinas Kesehatan	Pelayanan Ramah Anak di PUSKESMAS	Meningkatkan layanan Sarana Prasarana PUSKESMAS Ramah Anak
2.	Disdikbud	Pelayanan Ramah Anak di Sekolah (pemenuhan dan perlindungan hak anak)	Meningkatkan layanan Sekolah Ramah Anak
3.	Kementrian Agama	Pelayanan Ramah Anak di Sekolah (pemenuhan dan perlindungan hak anak)	Meningkatkan layanan Sekolah Ramah Anak
4.	TPPKSP (Tim Pencegahan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan)	Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas SDM	Meningkatkan Kapasitas SDM Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan
7.	Dinas Kesehatan, BKKBN, Kementrian Agama, Dinas Pendidikan	Sebagai Narasumber kegiatan Sosialisasi	Meningkatkan Pengetahuan dan Kapasitas Masyarakat dalam Kependudukan, KB dan Penurunan Stunting
8.	Bappeda, BPKPAD, dan Inspektorat	Motor penggerak ARG	Meningkatkan program pengarusutamaan gender
9.	DinsosPM, Satpol PP, Dinkes	Pelayanan Perlindungan dan Pendampingan Anak dan Perempuan	Meningkatnya perlindungan dan pencegahan kekerasan pada anak dan perempuan
10.	Dinkes, DPUPR, DLH, DinsosPM, Disdik	Penurunan stunting	Menurunkan stunting
11.	Equator TV	Pelayanan Sosialisasi tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemenuhan Hak Anak.	Pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak, perlindungan pada perempuan dan anak serta pengetahuan tentang hak-hak anak
12.	Tarakan TV	Pelayanan Sosialisasi tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemenuhan Hak Anak.	Pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak, perlindungan pada perempuan dan anak serta pengetahuan tentang hak-hak anak
13.	RRI Kota Tarakan	Pelayanan Sosialisasi tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemenuhan Hak Anak.	Pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak, perlindungan pada perempuan dan anak serta pengetahuan tentang hak-hak anak
14.	PKBH Universitas Borneo	Bantuan Hukum bagi Korban Kekerasan	Layanan Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak
15.	HIMPSI (Himpunan Psikologi)	Layanan pendampingan psikologis korban	Pemulihan dan Rehabilitasi bagi Korban kekerasan

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
16.	POLRI	Pendampingan Penanganan secara Hukum terhadap Korban dan Pelaku Kekerasan	Layanan penjangkauan kasus
17.	RSUD Tarakan	Pendampingan dari segi medis	Layanan medikolegal bagi korban kekerasan perempuan dan anak
18.	PT. Telkom	Penyediaan paket data buat kader	Penurunan stunting
19.	Ikatan Bidan Indonesia	Pelayanan KB pada masyarakat (MKJP)	Peningkatan akseptor KB
20.	Bunda Paud	Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Anak	Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Anak

Keseluruhan kemitraan ini dijalankan berdasarkan MOU, PKS, dan Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati, dengan mayoritas program telah berjalan mencerminkan komitmen yang berkelanjutan dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan gender.

2.5. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Tarakan diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Tarakan.

2.5.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan

Peraturan Walikota Kota Tarakan Nomor 56 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan dan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Pemberdayaan dan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan dan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu :

Rendahnya Kualitas Keluarga, dan dapat dijabarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 2.5.1.1
Rumusan Masalah Rendahnya Kualitas Keluarga
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya layanan inklusi sosial dan kesetaraan gender	Masih rendahnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Lemahnya penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender.
	Belum optimalnya Perlindungan Perempuan, anak dan pemberdayaan keluarga	Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
		Kurangnya sumberdaya pelayanan kasus kekerasan pada perempuan dan anak
		Belum terpenuhinya hak anak di Kota Tarakan
		Masih rendahnya partisipasi lembaga penyedia layanan (puspa dan puspaga)
	Rendahnya kesejahteraan keluarga	Belum optimalnya pemutakhiran data keluarga
		Tingginya angka unmetneed
		Belum optimalnya peran kader dalam pembangunan keluarga

2.5.2. Telaah Dokumen Lainnya
Telaahan RPJMN 2025-2029

RPJMN 2025-2029 secara eksplisit mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) sebagai bagian integral dari transformasi sosial-ekonomi. Untuk urusan pemberdayaan perempuan, dengan target SDG 5 tentang kesetaraan gender melalui penguatan peran perempuan dalam ekonomi, pendidikan, dan pengambilan keputusan. Sementara itu, isu pengendalian penduduk merujuk pada SDG 3 (kesehatan dan kesejahteraan). khususnya dalam konteks mengoptimalkan bonus demografi melalui program keluarga berencana yang terintegrasi

Sebagai dasar hukum penyusunan Renstra OPD, RPJMN 2025-2029 mengamanatkan tiga prinsip utama: Koherensi Vertikal antara prioritas nasional dan program daerah. Responsivitas Gender dalam alokasi anggaran dan layanan publik, serta. Integrasi Data Kependudukan dalam perencanaan spasial.

OPD terkait harus melakukan disagregasi data berdasarkan jenis kelamin, usia, dan status perkawinan untuk memastikan ketepatan intervensi. Misalnya, analisis data Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Gender (SIPBM) dapat mengidentifikasi kantong kemiskinan perempuan kepala keluarga yang memerlukan program pemberdayaan ekonomi spesifik.

RPJMN 2025-2029 mengidentifikasi empat isu kritis dalam bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu:

- Maraknya Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)
- Rendahnya Representasi Perempuan dalam Posisi Kepemimpinan

- Tingginya Angka Perkawinan Anak
- Kesenjangan Akses Pelayanan Kesehatan Reproduksi.

Selanjutnya, tantangan utama dalam bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi:

Stagnasi Partisipasi Pria dalam KB (hanya 4,3% pengguna kontrasepsi pria), Peningkatan Angka Perceraian yang berdampak pada Ketahanan Keluarga, Serta Disparitas Angka Unmet Need KB antar wilayah (12% di perkotaan vs 18% di pedesaan)

Renstra OPD perlu merancang program yang mengadopsi pendekatan 3C yaitu: *Coordination* (sinergi lintas sektor), *Capacity* (penguatan kelembagaan), dan *Community* (pemberdayaan berbasis masyarakat).

Renstra OPD juga perlu mengembangkan sistem informasi geografis (SIG) yang memetakan daerah dengan angka stunting tinggi, TFR tinggi, dan cakupan KB rendah. Selain itu, pelibatan organisasi keagamaan dan tokoh adat dalam sosialisasi KB menjadi kunci keberhasilan program di daerah konservatif.

Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Tarakan serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Walikota yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kota Tarakan pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kota Bontang menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Tarakan baik aparat pemerintah, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, Vvisi Kota Tarakan untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

"TERWUJUDNYA TARAKAN SEBAGAI KOTA CERDASYANG BERTUMPU PADA SEKTOR JASA PERDAGANGAN, PERIKANAN, KELAUTAN DAN EKONOMI KREATIF YANG BERDAYA SAING DAN MAJU MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA"

Dalam rangka mewujudkan pembangunan dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah "Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia "

Tabel. 2.5.2.1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD 2025-2029 Kota Tarakan

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR SASARAN
Tujuan 1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	IPM	Sasaran 3	Meningkatnya kesetaraan gender dan kualitas keluarga	Indeks ketimpangan gender dan Indeks pembangunan keluarga
Tujuan 4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks RB	Sasaran 10	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai akuntabilitas kinerja terus meningkat Indikator : Nilai SAKIP

Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2025-2029

Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 TAHUN 2024 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029. Program yang dilaksanakan oleh Kemen PPPA tahun 2020-2024 beserta sasaran program dan indikator kinerja program diuraikan sebagai berikut:

- 1). Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - SP 1.1. Meningkatkan kesetaraan gender melalui peningkatan kapasitas kelembagaan PUG di K/L dan pemda.
 - SP 1.2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi, sosial dan politik.
 - SP 1.3. Meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak.
 - SP 1.4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak anak.
 - SP 1.5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - SP1.6. Meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak.
 - SP 1.7. Meningkatkan akses dan kualitas layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk TPPO.
 - SP 1.8. Meningkatkan Kelembagaan dan layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus
- 2). Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - SP 2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kemen PPPA

Telaah Renstra Kementrian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN 2025-2029

Rencana Strategis Kementerian Kependudukan dan Pembangunan/BKKBN sebagaimana tertuang dalam dalam Peraturan Menteri Kementerian Kependudukan dan Pembangunan/BKKBN Program yang dilaksanakan oleh Kemendukbangga tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), memiliki sasaran program “Meningkatnya kualitas

penyelenggaraan Program Bangga Kencana dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia, serta mewujudkan Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”

Program Dukungan Manajemen Kemendukbangga memiliki sasaran program “Meningkatnya kualitas pengelolaan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya di lingkungan Kemendukbangga dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel. 2.5.2.2
Isu Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2025-2029 Kota Tarakan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Tingginya komitmen daerah terhadap perlindungan perempuan dan anak	Rendahnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	Perlunya peningkatan kualitas hidup masyarakat pemukiman pesisir;	SDG 5.2: 0 kasus kekerasan per 10.000 penduduk pada 2030 SDG 5.3: 0% perkawinan anak pada 2030	< 5 kasus per 10.000 penduduk per tahun (RPJMN 2024) < 8,74% (2024), < 6% (2030)	< 10% (2029)	Peningkatan kesetaraan gender dan kualitas keluarga
Komitmen daerah pada kesetaraan gender	Rendahnya Perlindungan Perempuan, anak dan pemberdayaan keluarga		SDG 5.5: 50% perempuan di parlemen	30% perempuan di DPR/DPRD (RPJMN)	30% perempuan di DPRD Provinsi (2029)	
Pengendalian penduduk dan pengelolaan lingkungan	Belum tercipta Kesejahteraan Keluarga	Perlunya peningkatan akses informasi dan layanan kesehatan masyarakat;	SDG 3.2: < 12 per 1.000 kelahiran hidup pada 2030	< 16 per 1.000 kelahiran hidup (RPJMN 2024)	< 10 per 1.000 kelahiran hidup (2029)	
Ketersediaan layanan KB dan kesehatan reproduksi			SDG 3.7: Unmet need KB < 5% pada 2030	Unmet need KB < 7% (RPJMN 2024)	Unmet need KB < 8% (2029)	
Program gizi dan kesehatan anak			SDG 2.2: Prevalensi stunting < 20% pada 2025, < 14% pada 2030	< 14% pada 2024 (RPJMN), < 7% pada 2030	< 14% pada 2029	
Sistem data terpadu dan Pengalokasian anggaran spesifik			SDG 17.18: 100% data terpilah gender, usia, dsb pada 2030	100% sistem data terpilah di seluruh provinsi (RPJMN)	100% sistem data terpilah di seluruh kabupaten/kota (2029)	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan.

Sesuai dengan arahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Tarakan berpedoman pada visi dan misi Walikota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi OPD.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2025- 2029 visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra menerjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan.

Walikota dan Wakil Walikota Tarakan telah menetapkan Visi dan Misi yang di tuangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Cerdas yang bertumpu pada sektor Jasa, Perdagangan, Perikanan Kelautan dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Maju menuju Masyarakat Sejahtera.

Dalam mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah maka ditetapkan beberapa Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 yaitu :

- 1). Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
- 2). Meningkatkan pemerataan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar yang handal
- 3). Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui dukungan kemudahan berusaha yang berkeadilan dan bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, perikanan kelautan, ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan (UMKM)
- 4). Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif serta menjaga stabilitas ketertiban dan ketentraman kota
- 5). Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh menghadapi bencana

Berdasarkan pada lima Misi di atas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan melaksanakan misi pertama yaitu Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dan misi ke-empat yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif serta menjaga stabilitas ketertiban dan ketentraman kota yang diterjemahkan dalam pencapaian dan penyelarasan tujuan dan sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Tarakan Tahun 2025–2029. Tujuan dari RPJMD

(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Tarakan Tahun 2025–2029 adalah pada tujuan pertama yaitu meningkatnya sumber daya manusia dan tujuan ke-empat yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan.

Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Walikota dalam mencapai visi dan misi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

TUJUAN : Meningkatnya Kesenjangan Gender dan Kualitas Keluarga

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

SASARAN :

- 1). Meningkatkan Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- 2). Meningkatkan Perlindungan Perempuan, Anak dan Pemberdayaan Keluarga
- 3). Terwujudnya Kesejahteraan Keluarga
- 4). Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel. 3.1.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-						KET.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Kualitas Keluarga		IK.T.1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	INDEKS	0,352	0,351	0,35	0,34	0,332	0,331	0,3	Pengukur ketimpangan gender dalam tiga dimensi, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi di pasar tenaga kerja
		S.1. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	IK.S.1.1 Indeks Pembangunan Gender	INDEKS	92,79	92,8	93	93,5	94	94,5	95	Pengukur tingkat keberhasilan pembangunan yang sudah mengakomodasi persoalan gender.
			IK.S.1.2 Indeks Pemberdayaan Gender	INDEKS	68,54	68,6	68,8	69	69,5	69,64	69,74	Pengukur sejauh mana peran aktif perempuan
			IK.T.2. Predikat Kota Layak Anak		Pratama	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Utama	Utama	Predikat yang menunjukkan komitmen dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak.
		S.2. Meningkatkan Perlindungan Perempuan, anak dan pemberdayaan keluarga	IK.S2.1. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan (KtP)	Persentase	0,00026	0,00025	0,00024	0,00023	0,00022	0,00021	0,0002	Proporsi perempuan berusia 15-64 tahun yg mengalami kekerasan fisik dan atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan selama 12 bulan terakhir
			IK.S2.2. Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak (KtA)	Persentase	0,00098	0,00097	0,00096	0,00095	0,00094	0,00093	0,00092	Proporsi anak yg mengalami kekerasan paling tidak salah satu atau lebih tindakan kekerasan fisik, seksual dan psikis yg dialami oleh anak setidaknya satu bentuk kekerasan
			IK.T.3. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	INDEKS	66,67	66,9	67,12	67,35	67,68	68,68	69,68	Pengukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga
		S.3. Terwujudnya Kesejahteraan Keluarga	IK.S.3.1. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2,16	2,24	2,23	2,22	2,21	2,20	2,19	Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita selama masa usia subur (15-49 tahun).

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-						KET.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			IK.S3.2. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Persentase	60,4	62	62,5	62,8	63	63,3	63,5	Prevalensi kontrasepsi modern adalah persentase PUS yang sedang menggunakan metode kontrasepsi modern, dengan tujuan untuk menunda dan mengatur jarak kelahiran atau membatasi jumlah kelahiran, terhadap seluruh PUS.
		S.4. Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	IK.S.4.1. Nilai SAKIP	Angka	85,87	85,9	86	86,5	87	87,5	88	Penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja.
			IK.S4.2. Indeks Kepuasan Masyarakat	INDEKS	88,74	88,74	88,75	88,76	88,77	88,78	88,79	Pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan.

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

A. Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi dan Kebijakan untuk mencapai masing- masing sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dijelaskan dalam tahapan per tahun yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel. 3.2.1.1

Tahapan Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan kelembagaan dan sinergi program dengan lintas sektor dan stake holder terkait	Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta kualitas keluarga	Penguatan basis data melalui pemutakhiran serta pengolahan data dan penanganan serta pendampingan kasus secara tepat sasaran	Pemberdayaan perempuan dan keluarga melalui program dan bantuan berbasis komunitas	Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Keluarga yang Berkualitas

Tahapan strategis 2026-2030 yang tertuang dalam tabel di atas memerlukan penjabaran operasional berbasis lokasi spesifik. Oleh karena itu, ditetapkan lokus prioritas per tahap yang menjadi fokus implementasi, dengan narasi yang mengonversi kerangka strategis menjadi aksi terukur. Penentuan lokus mempertimbangkan kompleksitas isu, urgensi layanan, dan prinsip pemerataan, sehingga setiap tahap membangun fondasi untuk tahap berikutnya secara berjenjang.

Tahap I (2026)

Fokus pada penguatan kelembagaan dan sinergi program dengan lintas sektor dan *stakeholder* terkait. Target: terbentuknya kelembagaan yang kuat dan sinergi program dengan lintas sektor serta *stakeholder* sehingga meningkatnya partisipasi.

Tahap II (2027)

Fokus pada penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta kualitas keluarga. Target: SDM terlatih meningkat sebanyak 30%.

Tahap III (2028)

Fokus pada penguatan basis data melalui pemutakhiran serta pengolahan data dan penanganan serta pendampingan kasus secara tepat sasaran. Target: data yang tersedia akurat serta penurunan kasus sebesar 5%.

Tahap IV (2029)

Fokus pemberdayaan perempuan dan keluarga melalui program dan bantuan berbasis komunitas. Target: peningkatan 25% kemitraan dengan institusi swasta/LSM.

Tahap V (2030)

Terwujudnya kesetaraan gender dan keluarga yang berkualitas. Target: partisipasi perempuan/anak naik 400% dalam forum perencanaan daerah, dan sistem evaluasi berkelanjutan.

B. Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Tabel. 3.2.2.1
Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Tarakan 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1.	Meningkatnya kesetaraan gender dan kualitas keluarga	Mendorong Keterlibatan Perempuan dan Kelompok Rentan	Penguatan Pelatihan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Perangkat Daerah	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	
			Penguatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	
			Penyediaan media KIE yang memuat informasi kesetaraan gender dan hak anak	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	
			Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	
			Peningkatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak	
			Peningkatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	
			Peningkatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak	
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	
			Peningkatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	
			Peningkatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
			Peningkatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
			Peningkatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB	
			Peningkatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
			Peningkatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
			Penguatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN KIA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program dan Kegiatan

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029) meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kota Tarakan dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Tarakan 2025-2029.

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Untuk menyelaraskan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja ke dalam Program, Kegiatan, dan Sub-Kegiatan, maka perlu dirumuskan, Tujuan perumusan Program, Kegiatan, dan Sub- Kegiatan adalah merencanakan dan mengimplementasikan kegiatan yang efektif, efisien, serta berfokus pada pencapaian tujuan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Perumusan ini membantu penentuan prioritas, alokasi sumber daya, dan pemantauan kemajuan. Perumusan tersebut disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1.1
Rumusan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja dengan Pelaksanaan Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan
Tahun 2025 -2029

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
Meningkatnya kesetaraan gender dan Kualitas Keluarga				IK. T.1. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		
	<i>S.1. Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan</i>			<i>IK.S.1.1. Indeks Pembangunan Gender</i>		
		OC.1. Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
			<i>Terlaksananya Pelatihan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang dilatih PUG</i>	<i>Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	
				Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	
				Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang dilatih PUG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota	2026
				<i>IK.S.1.2. Indeks Pemberdayaan Gender</i>		
			<i>Terlaksananya Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah lembaga yang dibina</i>	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	2026
		OC.2. Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak		Persentase PUSPAGA yang Aktif	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
			<i>Tersedianya media KIE yang memuat informasi kesetaraan gender dan hak anak yang terdistribusi</i>	<i>Jumlah media KIE yang memuat informasi kesetaraan gender dan hak anak yang terdistribusi</i>	<i>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	
				Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	2026
				Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
			<i>Terlaksananya Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah organisasi yang dikuatkan dan dikembangkan</i>	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	
				Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				<i>Jumlah layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak</i>	<i>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	
				Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
		OC.3. Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak		Persentase Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
			<i>Terlaksananya Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah dokumen responsif gender</i>	<i>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	
				Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	
				Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dan anak	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	2026
				Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan	Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan	2026

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	
	<i>S.2. Meningkatkan Perlindungan Perempuan, Anak dan Pemberdayaan Keluarga</i>			<i>IK. S.2.1. Prevalensi kekerasan terhadap perempuan (KtP)</i>		
		OC.4. Menurunnya kekerasan terhadap perempuan		Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
			<i>Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan</i>	<i>Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota</i>	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	
				Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/ Kota	2026
			<i>Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan</i>	<i>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/ Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	
				Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/ Kota	Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan	2026

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
					Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2026
				Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2026
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2026
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2026
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2026
				Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2026

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang didampingi	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	
				IK. T.2. Predikat Kota Layak Anak		
				IK. S2.2. Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA)		
		OC.5. Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif		Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
			<i>Terlaksananya Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah gugus tugas KLA yang terbentuk</i>	<i>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	
				Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2026
				jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2026
				jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2026
				jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2026
			<i>Terlaksananya Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak yang aktif</i>	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota</i>	
				Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2026
				Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2026
				Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2026
				jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2026
				jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2026
		OC.6. Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak		1. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif 2. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
			<i>Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak</i>	<i>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota</i>	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	
				jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	2026
				Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA Tingkat Kab/Kota	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	2026
				jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	2026
				Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	2026
				Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	2026
				Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota	Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	2026
			<i>Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah kasus anak</i>	<i>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	
				Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	
				Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2026
				Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0009 layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2026
				Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0010 layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2026
				Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0011 layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2026
				Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0012 layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2026
				Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0013 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2026
				Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0014 layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2026
				Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.0015 layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	2026

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
			<i>Terlaksananya Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah lembaga penyedia Layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan yang mendapatkan pendampingan</i>	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	
				Jumlah Laporan Hasil Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten	
				Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus (anak berkasus, anak mengalami bencana)	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	
				Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	2026
				jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	2026
				jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2026
				Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2026
				Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2026

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2026
				jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2026
				IK. T3. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		
	S.3. Terwujudnya Kesejahteraan Keluarga			IK. S.3.1. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun		
				IK.S.3.2. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)		
		OC.7. Terkendalnya pertambahan jumlah penduduk		1. Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19)	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
			Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen data keluarga	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	
				Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	
				Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	
				Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	
				Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	
		OC.8. Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)		1. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
			<i>Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>	<i>Jumlah Layanan advokasi dan KIE Pengendalian Penduduk dan KB</i>	<i>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>	
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Pengendalian Program KKBPK	
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	
				Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	
				Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	
				Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	
				Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		
			<i>Terlaksananya Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</i>	<i>Jumlah tenaga penyuluh KB dan petugas lapangan KB yang aktif</i>	<i>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</i>	
				Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
			<i>Terlaksananya Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah pelayanan KB</i>	<i>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota</i>	
				Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
				Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
				Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
			<i>Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i>	<i>Jumlah stakeholder atau pemangku kepentingan atau mitra kerja yg berperan scr aktif dlm pengelolaan program KKBPK</i>	<i>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i>	
				Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	
		OC.9. Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)		Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
			<i>Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	<i>Jumlah kegiatan</i>	<i>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	
				Jumlah laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
				Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor(UPPKA))	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor(UPPKA))	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Jumlah Laporan Hasil Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
				Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja(PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja(PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	
			<i>Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	<i>Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang ikut berperan dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	<i>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	
				Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS,Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS,Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
				Jumlah Hasil Laporan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
	<i>S.4. Meningkatnya Tata Kelola Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</i>			<i>IK. S.4.1. Nilai SAKIP</i>		
		OC. 10. Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja		Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			<i>Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu</i>	<i>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
			<i>Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP</i>	<i>Laporan keuangan SKPD</i>	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				<i>IK. S.4.2. Indeks Kepuasan Masyarakat</i>		
			<i>Terlaksananya administrasi kepegawaian</i>		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	
			Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
		OC. 11. Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan		2. Indeks Layanan Kesekretariatan		
			<i>Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum</i>	<i>Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana</i>	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Tersedianya Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Tersedianya Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Terlaksananya Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu	
			Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			<i>Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah aset/BMD yang diadakan</i>	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			<i>Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia</i>	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			<i>Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah aset/BMD yang dipelihara</i>	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

Perumusan ini tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya pendanaan. Kerangka pendanaan merupakan instrumen strategis dalam mengelola perencanaan anggaran perangkat daerah secara efektif dalam jangka menengah. Melalui kerangka ini, perangkat daerah memastikan bahwa sumber daya keuangan yang tersedia dialokasikan secara optimal untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah serta menjalankan prioritas pembangunan daerah. Kerangka pendanaan juga dapat mengidentifikasi kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah, menentukan skala prioritas belanja daerah, serta mengantisipasi tantangan fiskal yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaannya.

Rencana pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan disusun untuk lima tahun ke depan seperti yang disajikan pada tabel 4.1.2 dibawah ini. Adapun pagu pendanaan merupakan angka sementara dan masih dapat berubah setelah melalui proses evaluasi dan penetapan lebih lanjut.

Tabel 4.1.2.
Rencana Pendanaan Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan
Tahun 2025 -2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				5.511.963.820,00		5.450.104.620,00		5.450.104.620,00		5.450.104.620,00		5.465.104.620,00		
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.233.891.043,00		4.187.034.843,00		4.187.034.843,00		4.187.034.843,00		4.187.034.843,00		
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	100	100	499.960.022,00	100	453.103.822,00	100	453.103.822,00	100	453.103.822,00	100	453.103.822,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				5.300.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya administrasi kepegawaian	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	1	5.300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.08.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				5.300.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	1	5.300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				132.608.220,00		142.052.020,00		142.052.020,00		142.052.020,00		142.052.020,00		
Terlaksananya Administrasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	132.608.220,00	1	142.052.020,00	1	142.052.020,00	1	142.052.020,00	1	142.052.020,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7	7		7		7		7		7			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	0		1		1		1		1			
2.08.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	0	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.08.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				27.628.720,00		27.072.520,00		27.072.520,00		27.072.520,00		27.072.520,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	27.628.720,00	1	27.072.520,00	1	27.072.520,00	1	27.072.520,00	1	27.072.520,00		
2.08.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				4.979.500,00		4.979.500,00		4.979.500,00		4.979.500,00		4.979.500,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	4.979.500,00	1	4.979.500,00	1	4.979.500,00	1	4.979.500,00	1	4.979.500,00		
2.08.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
2.08.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7	7	100.000.000,00	7	100.000.000,00	7	100.000.000,00	7	100.000.000,00	7	100.000.000,00		
2.08.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				213.721.650,00		174.721.650,00		174.721.650,00		174.721.650,00		174.721.650,00		
Terkelolanya data Barang Milik Daerah dalam aplikasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	3	213.721.650,00	3	174.721.650,00	3	174.721.650,00	3	174.721.650,00	3	174.721.650,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8	5		4		4		8		8			
2.08.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				140.943.800,00		130.443.800,00		130.443.800,00		130.443.800,00		130.443.800,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	3	140.943.800,00	3	130.443.800,00	3	130.443.800,00	3	130.443.800,00	3	130.443.800,00		
2.08.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				72.777.850,00		44.277.850,00		44.277.850,00		44.277.850,00		44.277.850,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8	5	72.777.850,00	4	44.277.850,00	4	44.277.850,00	8	44.277.850,00	8	44.277.850,00		
2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				77.931.218,00		77.931.218,00		77.931.218,00		77.931.218,00		77.931.218,00		
Tersedianya layanan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	77.931.218,00	1	77.931.218,00	1	77.931.218,00	1	77.931.218,00	1	77.931.218,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.08.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	75.931.218,00	1	75.931.218,00	1	75.931.218,00	1	75.931.218,00	1	75.931.218,00		
2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				70.398.934,00		58.398.934,00		58.398.934,00		58.398.934,00		58.398.934,00		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	14	14	70.398.934,00	14	58.398.934,00	14	58.398.934,00	14	58.398.934,00	14	58.398.934,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8	8		8		8		8		8			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	11	11		11		11		11		11			
2.08.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	8	8	500.000,00	8	500.000,00	8	500.000,00	8	500.000,00	8	500.000,00		
2.08.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				60.028.934,00		48.028.934,00		48.028.934,00		48.028.934,00		48.028.934,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	14	14	60.028.934,00	14	48.028.934,00	14	48.028.934,00	14	48.028.934,00	14	48.028.934,00		
2.08.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				9.870.000,00		9.870.000,00		9.870.000,00		9.870.000,00		9.870.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	11	11	9.870.000,00	11	9.870.000,00	11	9.870.000,00	11	9.870.000,00	11	9.870.000,00		
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	3.733.931.021,00	100	3.733.931.021,00	100	3.733.931.021,00	100	3.733.931.021,00	100	3.733.931.021,00		
2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		
Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	2		2		2		2		2			
2.08.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00		
2.08.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	3.726.931.021,00	1	3.726.931.021,00	1	3.726.931.021,00	1	3.726.931.021,00	1	3.726.931.021,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25	34		34		34		34		34			
2.08.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.668.005.021,00		3.668.005.021,00		3.668.005.021,00		3.668.005.021,00		3.668.005.021,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25	34	3.668.005.021,00	34	3.668.005.021,00	34	3.668.005.021,00	34	3.668.005.021,00	34	3.668.005.021,00		
2.08.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				58.926.000,00		58.926.000,00		58.926.000,00		58.926.000,00		58.926.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	58.926.000,00	1	58.926.000,00	1	58.926.000,00	1	58.926.000,00	1	58.926.000,00		
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				124.832.000,00		124.832.000,00		124.832.000,00		124.832.000,00		124.832.000,00		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	10	11	124.832.000,00	12	124.832.000,00	13	124.832.000,00	14	124.832.000,00	15	124.832.000,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				47.832.000,00		47.832.000,00		47.832.000,00		47.832.000,00		47.832.000,00		
Terlaksananya Pelatihan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan)	0	1	47.832.000,00	1	47.832.000,00	1	47.832.000,00	1	47.832.000,00	1	47.832.000,00		
	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	0	30		30		30		30		30			
	jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	0	60		60		60		60		60			
2.08.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan)	0	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00		
2.08.02.2.01.0013 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota				25.332.000,00		25.332.000,00		25.332.000,00		25.332.000,00		25.332.000,00		
2.08.02.2.01.0014 - Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
terlaksananya bimtek penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	0	60	20.000.000,00	60	20.000.000,00	60	20.000.000,00	60	20.000.000,00	60	20.000.000,00		
2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				77.000.000,00		77.000.000,00		77.000.000,00		77.000.000,00		77.000.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan PerempuanKewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	1	77.000.000,00	1	77.000.000,00	1	77.000.000,00	1	77.000.000,00	1	77.000.000,00		
2.08.02.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota				77.000.000,00		77.000.000,00		77.000.000,00		77.000.000,00		77.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	1	77.000.000,00	1	77.000.000,00	1	77.000.000,00	1	77.000.000,00	1	77.000.000,00		
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				269.820.690,00		269.820.690,00		269.820.690,00		269.820.690,00		269.820.690,00		
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	269.820.690,00	100	269.820.690,00	100	269.820.690,00	100	269.820.690,00	100	269.820.690,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				70.014.320,00		70.014.320,00		70.014.320,00		70.014.320,00		70.014.320,00		
Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	0	2	70.014.320,00	2	70.014.320,00	2	70.014.320,00	2	70.014.320,00	2	70.014.320,00		
	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	0	30		40		40		50		50			
2.08.03.2.01.0003 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
2.08.03.2.01.0004 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00		
2.08.03.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota				60.014.320,00		60.014.320,00		60.014.320,00		60.014.320,00		60.014.320,00		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	0	30	60.014.320,00	40	60.014.320,00	40	60.014.320,00	50	60.014.320,00	50	60.014.320,00		
2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				199.806.370,00		199.806.370,00		199.806.370,00		199.806.370,00		199.806.370,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	0	15	199.806.370,00	20	199.806.370,00	25	199.806.370,00	30	199.806.370,00	30	199.806.370,00		
	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten/Kota (Orang)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	0	15		20		25		30		30			
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	0	40		40		40		40		40			
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	0	3		3		3		3		3			
&Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	2	2.250.000,00	2	2.250.000,00	2	2.250.000,00	2	2.250.000,00	2	2.250.000,00		
2.08.03.2.02.0004 - layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten/Kota (Orang)	0	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00		
2.08.03.2.02.0005 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				41.400.000,00		41.400.000,00		41.400.000,00		41.400.000,00		41.400.000,00		
Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	0	15	41.400.000,00	20	41.400.000,00	25	41.400.000,00	30	41.400.000,00	30	41.400.000,00		
2.08.03.2.02.0006 - layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				52.153.770,00		52.153.770,00		52.153.770,00		52.153.770,00		52.153.770,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	2	52.153.770,00	2	52.153.770,00	2	52.153.770,00	2	52.153.770,00	2	52.153.770,00		
2.08.03.2.02.0007 - layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota				71.378.000,00		71.378.000,00		71.378.000,00		71.378.000,00		71.378.000,00		
Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	0	40	71.378.000,00	40	71.378.000,00	40	71.378.000,00	40	71.378.000,00	40	71.378.000,00		
2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				17.124.600,00		17.124.600,00		17.124.600,00		17.124.600,00		17.124.600,00		
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	0	15	17.124.600,00	20	17.124.600,00	25	17.124.600,00	30	17.124.600,00	30	17.124.600,00		
2.08.03.2.02.0009 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				14.500.000,00		14.500.000,00		14.500.000,00		14.500.000,00		14.500.000,00		
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				45.463.680,00		45.463.680,00		45.463.680,00		45.463.680,00		45.463.680,00		
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase PUSPAGA yang Aktif (%)	25	25	45.463.680,00	50	45.463.680,00	75	45.463.680,00	100	45.463.680,00	100	45.463.680,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				12.878.380,00		12.878.380,00		12.878.380,00		12.878.380,00		12.878.380,00		
Tersedianya media KIE yang memuat informasi kesetaraan gender dan hak anak yang terdistribusi	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	30	12.878.380,00	30	12.878.380,00	30	12.878.380,00	30	12.878.380,00	30	12.878.380,00		
2.08.04.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.				12.878.380,00		12.878.380,00		12.878.380,00		12.878.380,00		12.878.380,00		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentinganKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	30	12.878.380,00	30	12.878.380,00	30	12.878.380,00	30	12.878.380,00	30	12.878.380,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				17.145.300,00		17.145.300,00		17.145.300,00		17.145.300,00		17.145.300,00		
Terlaksananya Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluargadalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	2	17.145.300,00	2	17.145.300,00	2	17.145.300,00	2	17.145.300,00	2	17.145.300,00		
	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	1		1		1		1		1			
2.08.04.2.02.0004 - monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00		
2.08.04.2.02.0005 - pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terlaksananya pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
2.08.04.2.02.0007 - peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				8.645.300,00		8.645.300,00		8.645.300,00		8.645.300,00		8.645.300,00		
Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)	0	1	8.645.300,00	1	8.645.300,00	1	8.645.300,00	1	8.645.300,00	1	8.645.300,00		
2.08.04.2.02.0008 - Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	0	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				15.440.000,00		15.440.000,00		15.440.000,00		15.440.000,00		15.440.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang WilayahKerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	0	5	15.440.000,00	5	15.440.000,00	5	15.440.000,00	5	15.440.000,00	5	15.440.000,00		
	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	0	5		5		5		5		5			
2.08.04.2.03.0002 - layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
Terlaksananya layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	0	5	1.500.000,00	5	1.500.000,00	5	1.500.000,00	5	1.500.000,00	5	1.500.000,00		
2.08.04.2.03.0003 - layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terlaksananya layanan rujukan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	0	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00		
2.08.04.2.03.0004 - layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota				7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		
Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	0	5	7.000.000,00	5	7.000.000,00	5	7.000.000,00	5	7.000.000,00	5	7.000.000,00		
2.08.04.2.03.0005 - Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota				440.000,00		440.000,00		440.000,00		440.000,00		440.000,00		
Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	0	5	440.000,00	5	440.000,00	5	440.000,00	5	440.000,00	5	440.000,00		
2.08.04.2.03.0006 - Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota				3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		
Terlaksananya Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	0	5	3.500.000,00	5	3.500.000,00	5	3.500.000,00	5	3.500.000,00	5	3.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				5.454.400,00		5.451.400,00		5.451.400,00		5.451.400,00		5.451.400,00		
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak (%)	0	100	5.454.400,00	100	5.451.400,00	100	5.451.400,00	100	5.451.400,00	100	5.451.400,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				5.454.400,00		5.451.400,00		5.451.400,00		5.451.400,00		5.451.400,00		
	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA (Dokumen)	0	1		2		2		2		2			
	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak (Lembaga)	0	17		17		17		17		17			
2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2.08.05.2.01.0004 - Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak				2.520.000,00		2.520.000,00		2.520.000,00		2.520.000,00		2.520.000,00		
Terlaksananya Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak (Lembaga)	0	17	2.520.000,00	17	2.520.000,00	17	2.520.000,00	17	2.520.000,00	17	2.520.000,00		
2.08.05.2.01.0005 - Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA				2.934.400,00		2.931.400,00		2.931.400,00		2.931.400,00		2.931.400,00		
Terlaksananya penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA (Dokumen)	0	1	2.934.400,00	2	2.931.400,00	2	2.931.400,00	2	2.931.400,00	2	2.931.400,00		
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				416.000.000,00		416.000.000,00		416.000.000,00		416.000.000,00		416.000.000,00		
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Skor Penilaian Mandiri Evaluasi KLA (Skor)	854,56	855	416.000.000,00	860	416.000.000,00	870	416.000.000,00	880	416.000.000,00	890	416.000.000,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Terlaksananya Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	0	2	93.000.000,00	2	93.000.000,00	2	93.000.000,00	2	93.000.000,00	2	93.000.000,00		
	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan	0	30		30		30		30		30			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)													
	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	0	30		30		30		30		30			
	jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	100		150		150		150		150			
2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	0	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00		
2.08.06.2.01.0004 - Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	100	30.000.000,00	150	30.000.000,00	150	30.000.000,00	150	30.000.000,00	150	30.000.000,00		
Terlaksananya Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	0	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00		
2.08.06.2.01.0006 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan	0	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)													
2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				323.000.000,00		323.000.000,00		323.000.000,00		323.000.000,00		323.000.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	0	2	323.000.000,00	2	323.000.000,00	2	323.000.000,00	2	323.000.000,00	2	323.000.000,00		
	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	15		20		25		30		35			
	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	0	2		2		2		2		2			
	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	0	50		50		50		50		50			
2.08.06.2.02.0005 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				15.500.000,00		15.500.000,00		15.500.000,00		15.500.000,00		15.500.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	0	50	15.500.000,00	50	15.500.000,00	50	15.500.000,00	50	15.500.000,00	50	15.500.000,00		
Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	15	301.500.000,00	20	301.500.000,00	25	301.500.000,00	30	301.500.000,00	35	301.500.000,00		
2.08.06.2.02.0007 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	0	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00		
2.08.06.2.02.0008 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	0	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00		
2.08.06.2.02.0009 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00		
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				416.502.007,00		401.502.007,00		401.502.007,00		401.502.007,00		416.502.007,00		
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	100	100	416.502.007,00	100	401.502.007,00	100	401.502.007,00	100	401.502.007,00	100	416.502.007,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				97.100.000,00		82.100.000,00		82.100.000,00		82.100.000,00		97.100.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup DaerahKabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	0	4	97.100.000,00	4	82.100.000,00	4	82.100.000,00	4	82.100.000,00	4	97.100.000,00		
	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Laporan)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota (Kebijakan)	0	1		0		0		0		1			
	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	0	40		40		40		40		40			
	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Orang)	0	50		50		50		50		50			
2.08.07.2.01.0006 - koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota				12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	0	4	12.500.000,00	4	12.500.000,00	4	12.500.000,00	4	12.500.000,00	4	12.500.000,00		
2.08.07.2.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota				44.700.000,00		44.700.000,00		44.700.000,00		44.700.000,00		44.700.000,00		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	0	40	44.700.000,00	40	44.700.000,00	40	44.700.000,00	40	44.700.000,00	40	44.700.000,00		
2.08.07.2.01.0008 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Laporan)	0	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00		
2.08.07.2.01.0009 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Dokumen)	0	15	1.500.000,00	20	1.500.000,00	25	1.500.000,00	30	1.500.000,00	35	1.500.000,00		
2.08.07.2.01.0010 - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota				21.900.000,00		21.900.000,00		21.900.000,00		21.900.000,00		21.900.000,00		
Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Orang)	0	50	21.900.000,00	50	21.900.000,00	50	21.900.000,00	50	21.900.000,00	50	21.900.000,00		
2.08.07.2.01.0011 - Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota				15.000.000,00		0,00		0,00		0,00		15.000.000,00		
Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota (Kebijakan)	0	1	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	15.000.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang MemerlukanKoordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	5	246.172.597,00	5	246.172.597,00	6	246.172.597,00	6	246.172.597,00	7	246.172.597,00		
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	23		25		27		28		29			
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	47		50		51		52		53			
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	3		3		4		4		5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	23		25		27		28		29			
	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	3		3		4		4		5			
2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				23.500.000,00		23.500.000,00		23.500.000,00		23.500.000,00		23.500.000,00		
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	23	23.500.000,00	25	23.500.000,00	27	23.500.000,00	28	23.500.000,00	29	23.500.000,00		
2.08.07.2.02.0009 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				40.400.000,00		40.400.000,00		40.400.000,00		40.400.000,00		40.400.000,00		
Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	23	40.400.000,00	25	40.400.000,00	27	40.400.000,00	28	40.400.000,00	29	40.400.000,00		
2.08.07.2.02.0010 - layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				78.939.000,00		78.939.000,00		78.939.000,00		78.939.000,00		78.939.000,00		
2.08.07.2.02.0011 - layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	5	1.500.000,00	5	1.500.000,00	6	1.500.000,00	6	1.500.000,00	7	1.500.000,00		
2.08.07.2.02.0012 - layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				54.083.597,00		54.083.597,00		54.083.597,00		54.083.597,00		54.083.597,00		
Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	3	54.083.597,00	3	54.083.597,00	4	54.083.597,00	4	54.083.597,00	5	54.083.597,00		
2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				1.750.000,00		1.750.000,00		1.750.000,00		1.750.000,00		1.750.000,00		
Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	5	1.750.000,00	5	1.750.000,00	5	1.750.000,00	5	1.750.000,00	5	1.750.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.08.07.2.02.0014 - layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	0	3	3.000.000,00	3	3.000.000,00	4	3.000.000,00	4	3.000.000,00	5	3.000.000,00		
2.08.07.2.02.0015 - layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				43.000.000,00		43.000.000,00		43.000.000,00		43.000.000,00		43.000.000,00		
Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	0	2	43.000.000,00	2	43.000.000,00	2	43.000.000,00	2	43.000.000,00	2	43.000.000,00		
2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				73.229.410,00		73.229.410,00		73.229.410,00		73.229.410,00		73.229.410,00		
	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)	8	10		12		15		18		20			
	Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	17	20		20		25		25		25			
	jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	17	20		20		25		25		25			
	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	50	50		50		50		50		50			
2.08.07.2.03.0007 - Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)	8	10	10.000.000,00	12	10.000.000,00	15	10.000.000,00	18	10.000.000,00	20	10.000.000,00		
2.08.07.2.03.0009 - koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota				15.000.000,00		18.000.000,00		20.000.000,00		22.000.000,00		25.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen)	2	5	15.000.000,00	6	18.000.000,00	7	20.000.000,00	8	22.000.000,00	10	25.000.000,00		
2.08.07.2.03.0011 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000,00		5.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	17	20	5.000.000,00	20	5.000.000,00	25	8.000.000,00	25	8.000.000,00	25	8.000.000,00		
2.08.07.2.03.0013 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				22.290.440,00		19.290.440,00		14.290.440,00		12.290.440,00		9.290.440,00		
2.08.07.2.03.0014 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				20.938.970,00		20.938.970,00		20.938.970,00		20.938.970,00		20.938.970,00		
terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	17	20	20.938.970,00	20	20.938.970,00	25	20.938.970,00	25	20.938.970,00	25	20.938.970,00		

Berdasarkan Kerangka Pendanaan tersebut, telah ditetapkan program-program prioritas. Program prioritas merupakan program strategis yang dirancang oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD berdasarkan evaluasi kinerja. Adapun program prioritas yang tercantum dalam RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 merupakan sarana mewujudkan pembangunan daerah terarah dan berkelanjutan. Khususnya pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, program prioritas yang dijabarkan langsung ke dalam sub-kegiatan meliputi:

Tabel 4.1.3.
Daftar Sub Kegiatan dalam mendukung Program Prioritas Daerah
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan
Tahun 2025 -2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
2.08.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
1.	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.01.0013 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.01.0014 - Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
2.	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.01.0003 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.01.0004 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			2.08.03.2.02.0003 - & layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.02.0004 - layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.02.0005 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.02.0006 - layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.02.0007 - layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.03.2.02.0009 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
3.	2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.04.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	
			2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.04.2.02.0004 - monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.04.2.02.0005 - pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.04.2.02.0007 - peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.04.2.02.0008 - Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.04.2.03.0002 - layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
			2.08.04.2.03.0003 - layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota	
			2.08.04.2.03.0004 - layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
			2.08.04.2.03.0005 - Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
			2.08.04.2.03.0006 - Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	
4.	2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	
			2.08.05.2.01.0004 - Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	
			2.08.05.2.01.0005 - Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	
5.	2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, NonPemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.06.2.01.0004 - Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.06.2.01.0005 - Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			2.08.06.2.01.0006 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.06.2.02.0005 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.06.2.02.0006 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.06.2.02.0007 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.06.2.02.0008 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.06.2.02.0009 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
6.	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.01.0006 - koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	
			2.08.07.2.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.01.0008 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.01.0009 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.01.0010 - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.01.0011 - Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.02.0009 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.02.0010 - layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.02.0011 - layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.02.0012 - layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.02.0014 - layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.02.0015 - layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.03.0007 - Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	
			2.08.07.2.03.0009 - koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	
			2.08.07.2.03.0011 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.07.2.03.0013 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			2.08.07.2.03.0014 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
7.	2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terkendalnya pertambahan jumlah penduduk	2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.14.02.2.02.0011 - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	
			2.14.02.2.02.0012 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	
			2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	
			2.14.02.2.02.0023 - Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga	
8.	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga Berencana (KB)	2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	
			2.14.03.2.01.0008 - Pengendalian Program KKBPK	
			2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	
			2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	
			2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	
			2.14.03.2.01.0013 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	
			2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	
			2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
			2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	
			2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
			2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
			2.14.03.2.03.0006 - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	
			2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	
			2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
			2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	
			2.14.03.2.04.0007 - Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	
9.	2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
			2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
			2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
			2.14.04.2.01.0019 - Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	
			2.14.04.2.01.0028 - Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	
			2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KETERANGAN
			2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	
			2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama *entitas*. *Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan alat ukur kuantitatif untuk mengetahui keberhasilan pencapaian target indikator tujuan daerah (impact) yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Pencapaian indikator sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator sasaran. Target IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4.2.1.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan
Tahun 2025 -2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KE T
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Tujuan									
1.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	indeks	0.352	0.351	0.35	0.34	0.332	0.331	0.3	
2.	Predikat Kota Layak Anak		Pratama	Madya	Madya	Nindya	Nindya	Utama	Utama	
3.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	indeks	66.67	66.9	67.12	67.35	67.68	68.68	69.68	
	Sasaran									
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	92.79	92.8	93	93.5	94	94.5	95	
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	68.54	68.6	68.8	69	69.5	69.64	69.74	
3.	Prevalensi kekerasan terhadap perempuan (KtP)	persentase	0.00026	0.00025	0.00024	0.00023	0.00022	0.00021	0.0002	
4.	Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak (KtA)	persentase	0.00098	0.00097	0.00096	0.00095	0.00094	0.00093	0.00092	
5.	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2.16	2.24	2.23	2.22	2.21	2.20	2.19	
6.	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	persentase	60.4	62	62.5	62.8	63	63.3	63.5	
7.	Nilai SAKIP	angka	85.87	85.9	86	86.5	87	87.5	88	
8.	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	88.74	88.74	88.75	88.76	88.77	88.78	88.79	

4.2.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Utama (IKK) merupakan alat ukur kuantitatif untuk mengetahui keberhasilan pencapaian target indikator sasaran daerah (*outcome*) yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Pencapaian indikator sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dicantumkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2.2.1
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan
Tahun 2025 -2029

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	Capaian 2024	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	$IPM = \sqrt[3]{(I \text{ Kesehatan} \times I \text{ Pendidikan} \times I \text{ Pengeluaran})} \times 100$ $IPG = \frac{(IPM \text{ Perempuan})}{(IPM \text{ Laki-laki})} \times 100$ $I \text{ Kesehatan} = \frac{\text{Umur Harapan Hidup Saat Lahir}}{\text{I Pendidikan} = \text{Pengabungan 2 Indikator (Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah)}}$ $I \text{ Pengeluaran} = \frac{\text{Rata-rata pengeluaran riil yang disesuaikan}}{\text{IPM} = \frac{\text{Indeks Pembangunan Manusia}}{\text{IPM Perempuan} = \frac{\text{Indeks Pembangunan Manusia Perempuan}}{\text{IPM Laki-laki} = \frac{\text{Indeks Pembangunan Manusia Laki-laki}}{\text{IPG} = \text{Indeks Pembangunan Gender}}}}$	Indeks	92	92,8	93	93,5	94	94,5	95
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	$IKG = 1 - \frac{HARM(GF,GM)}{GF,M}$ Keterangan: HARM (GF ,GM) : Agregasi harmonis indeks laki-laki dan perempuan $GF,M = \sqrt[3]{Kesehatan \cdot Pemberdayaan \cdot IPK}$ GF,M : Indeks dimensi Rumus Indeks Kesehatan adalah: $Kesehatan = \frac{\sqrt{\frac{0,01.0,01}{faskes.ulp}}}{2}$ Rumus Indeks pemberdayaan adalah: $Pemberdayaan = (\sqrt{PRF.SF + PRM.SM})/2$ Rumus indeks pasar tenaga kerja adalah $IPK = (TPAK_F + TPAK_M) / 2$ Dimana:	Indeks	0,352	0,35	0.34	0.33	0,32	0,31	0,30

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	Capaian 2024	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Kesehatan : Indeks kesehatan reproduksi Pemberdayaan: indeks pemberdayaan IPK : Indeks Pasar Kerja Indeks Perempuan dihitung dengan formula: $GF = \sqrt{\left(\frac{0,01}{f_{askes\ ULP}}\right)^{\frac{1}{2}} \cdot (PRF.SF).TAPKF}$ formula untuk Indeks Laki-laki: $GM = \sqrt[3]{1.(PRM.SEM)^{1/2}.TAPKM}$ Keterangan G_F : Indeks Perempuan G_M:Indeks Laki-laki Faskes:Proporsi persalinan tidak di fasilitas kesehatan ULP: Proporsi wanita berusia 15-49 tahun yang pernah kawin dan saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun PR_F: Persentase perempuan yang duduk di parlemen PR_M: Persentase perempuan yang duduk di parlemen SE_F : Persentase perempuan dengan pendidikan minimal SMA SE_M : Persentase laki-laki dengan pendidikan minimal SMA TPAK_F : Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja Persentase laki-laki yang duduk di parlemen TPAK_M : Persentase laki - laki terhadap penduduk kerja								
3	Persentase ARG Daerah	% Anggaran Responsif Gender dibandingkan Belanja Operasi (Barang Jasa dan Bansos) dan Belanja Modal OPD yang dibuktikan dengan adanya dokumen GBS / KAK RG	%	10	10,5	11	12	13	14	15
4	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan	Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif $\frac{\text{Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif}}{\text{Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus}} \times 100\%$ Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) Layanan komprehensif sesuai hasil asesmen mencakup: a. Pengaduan masyarakat;	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	Capaian 2024	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	layanan komprehensif	b. Penjangkauan korban; c. Pengelolaan kasus; d. Penampungan sementara; e. Mediasi; dan f. Pendampingan korban.								
5	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif	$\frac{\text{Jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif}}{\text{Jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO}} \times 100\%$		100	100	100	100	100	100	100

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	Capaian 2024	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	$\frac{\text{Total Fertility Rate(TFR) Kabupaten/Kota}}{\text{Target Fertility Rate (TFR) Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terhi}}$	%	2,16	2,24	2,23	2,22	2,21	2,20	2,19
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	$\frac{\text{Banyaknya Peserta KB aktif modern}}{\text{Banyaknya pasangan usia subur (PUS)}} \times 100\%$ PA Modern : Peserta KB Aktif modern PUS : Pasangan Usia Subur usia 15-49 tahun	%	60,4	62	62,5	62,8	63	63,3	63,5
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	$\frac{\text{Persentase kebutuhan ber – KB yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota}}{\text{Target Prosentase kebutuhan ber – KB yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota yang bersangkutan}} \times 100\%$	%	14,6	14	13,6	13	12,6	12	11,6
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	$ASFRx = \frac{Px}{Pfx} \times 1000$ ASFRx = umur Perempuan dalam kelompok umur 5 tahunan (misal: 15-19; 20-24; dst) Px = jumlah kelahiran dari perempuan kelompok umur x Pfx = jumlah Perempuan kelompok umur x	Kelahir an per 1000 WUS 15 -19 tahun	26	25,5	25	24	23	22	21

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	Capaian 2024	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Nilai Komposit dari 3 dimensi dengan mempertimbangkan bobot tertentu, yaitu: (a) Dimensi Ketentraman dengan indikator antara lain (1) kegiatan ibadah; (2) legalitas keluarga; (3) jaminan kesehatan; (4) jaminan keuangan; dan (5) keharmonisan keluarga; (b) Dimensi Kemandirian dengan indikator antara lain (1) pemenuhan kebutuhan dasar; (2) keberlangsungan pendidikan; (3) kesehatan kelaurga; (4) akses informasi; (c) Dimensi Kebahagiaan dengan indikator antara lain (1) interaksi keluarga; (2) interaksi sosial Formula iBangga = 1/3 (Indeks ketentraman + Indeks kemandirian + Indeks kebahagiaan) x 100	Nilai 0-100	65.45	66,69	67.12	67.35	67.68	68.68	69.68

BAB V PENUTUP

Rencana Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kota Tarakan untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggung jawab Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan.

Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan 2025-2029. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan. Permasalahan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan.

Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan. Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana secara optimal dan terpadu. Semoga Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kota Tarakan.

10. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan Tahun 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan setiap daerah diwajibkan menyusun rencana pembangunan jangka panjang meliputi 20 (dua puluh) tahun berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah meliputi 5 (lima) tahun berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana pembangunan tahunan meliputi 1 (satu) tahun berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 pasal (1) adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Pasal 272 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dipakai sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra PD sebagai dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun oleh Perangkat Daerah merupakan dokumen penjabatan teknis dari RPJMD yang disusun melalui proses yang sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah serta berintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 sebagai tindak lanjut dari RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah yang merupakan tindak lanjut dari dokumen RKPD. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 pasal (1) adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, dimana memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan merupakan bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan. Guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan, penyusunan Renstra Perangkat Daerah difokuskan pada bidang dan kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Program yang disusun menurut kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 32 ayat (1) yang berbunyi klasifikasi belanja

menurut urusan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) terdiri dari belanja Urusan Wajib dan belanja Urusan Pilihan. Urusan Wajib adalah Urusan Pangan sedangkan yang menjadi Urusan Pilihan yaitu Urusan Pertanian.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dan untuk menjawab isu-isu strategis yang berkembang selama 5 tahun ke depan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian membutuhkan perencanaan yang memuat strategi dan kebijakan dalam melaksanakan pembangunan yang disusun dalam bentuk Perencanaan Strategis (RENSTRA). Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian disusun melalui proses yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan, dengan memanfaatkan sebanyak – banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis segala usaha untuk melaksanakan keputusan dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terarah dan sistematis.

Renstra sebagai pedoman perencanaan 5 (lima) tahunan berfungsi:

- a. Sebagai pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan di masa depan
- b. Sebagai acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan sebagai dokumen operasional tahunan Perangkat Daerah

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
24. Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 100.3.3.3/HK- IV/236/2025 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan Tahun 2025-2029 Kota Tarakan adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas jangka menengah.
2. Memberikan arah bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Kota Tarakan dalam menentukan indikator dan target kinerja jangka menengah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota,

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas permasalahan serta isu strategis yang terjadi dalam pembangunan ketahanan pangan dan yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan ini.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan.

BAB IV Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja penyelenggaraan bidang urusan .

Bab ini mengemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai.

BAB V Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA TARAKAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pangan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan kepada Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan sebagai berikut:

1) Tugas

Tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan adalah membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan dan bidang pertanian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang diberikan kepada Daerah.

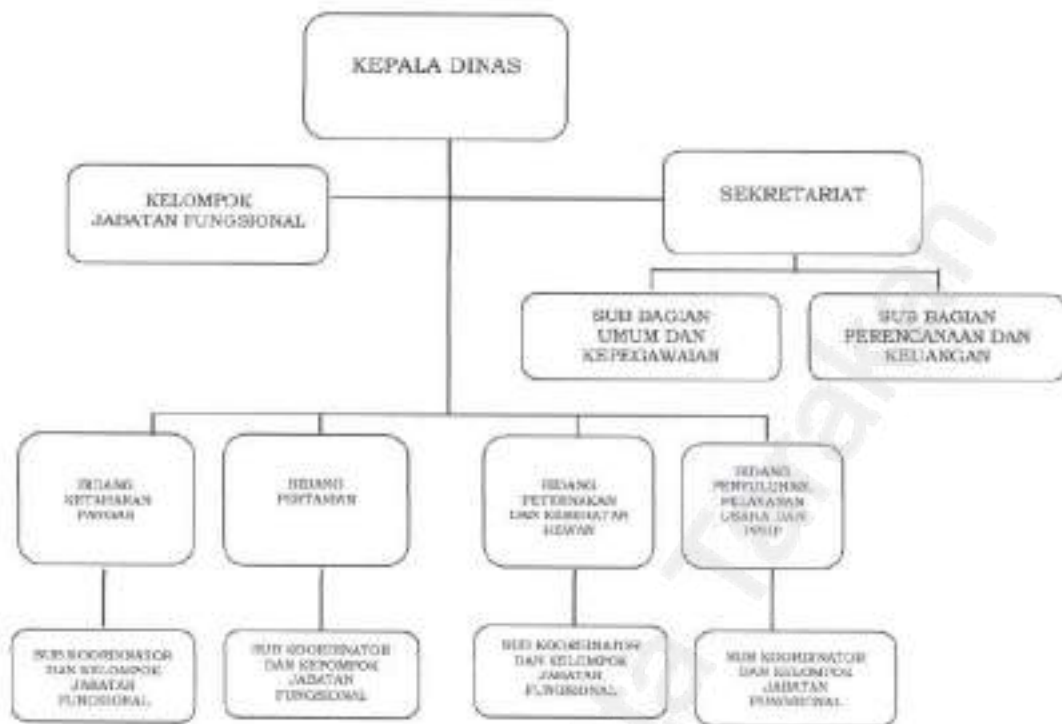
2) Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugasnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian, bidang peternakan dan kesehatan hewan, bidang penyuluhan, pelayanan usaha dan PPHP;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian, bidang peternakan dan kesehatan hewan, bidang penyuluhan, pelayanan usaha dan PPHP;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan, bidang pertanian, bidang peternakan dan kesehatan hewan, bidang penyuluhan, pelayanan usaha dan PPHP;
- d) Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3) Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menurut Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian seperti yang tertera dibawah ini yaitu :



A. Kepala Dinas

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkondisikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Pertanian, Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Perternakan dan Kesehatan Hewan, Bidang Penyuluhan, Pelayanan Usaha dan PPHP.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian membawahi :

- Sekretariat
- Bidang Pertanian
- Bidang Ketahanan Pangan
- Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- Bidang Penyuluhan, Pelayanan Usaha dan PPHP

B. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Koordinasi kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- Koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;

- Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- Koordinasi dan penyusunan produk hukum Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian meliputi :

➤ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam pengoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- Koordinasi dan penyusunan produk hukum Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

➤ Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam koordinasi kegiatan perencanaan dan keuangan, koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, dan pengoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;

- Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
- Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
- Penyiapan bahan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

C. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Ketahanan Pangan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di bidang ketersediaan, distribusi dan kerawanan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Bidang Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang ketersediaan, distribusi, kerawanan pangan dan panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, distribusi, kerawanan pangan dan panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- Pelaksanaan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah;
- Pelaksanaan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilitas pasokan dan harga pangan;
- Pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan;
- Pelaksanaan penentuan harga minimum Daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi;
- Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- Pelaksanaan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan;
- Pelaksanaan penanganan kerawanan pangan Daerah;
- Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah;
- Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan, distribusi, kerawanan pangan dan panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

D. Bidang Pertanian

Bidang Pertanian dipimpin oleh Kepala Bidang Pertanian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Bidang Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian.

Bidang Pertanian dalam melaksanakan tugas dimaksud, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- Pelaksanaan pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- Pelaksanaan pengembangan prasarana pertanian;
- Pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Daerah;
- Pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, bencana alam dan dampak perubahan iklim bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Kepala Bidang Pertanian membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

E. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyiapan bahan dan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- Pelaksanaan pengelolaan Sumberdaya Genetik Hewan di Daerah;
- Pelaksanaan pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan di Daerah;
- Pelaksanaan pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak di Daerah;
- Pelaksanaan penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam Daerah provinsi lain;
- Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis penerapan peningkatan produksi ternak;
- Pelaksanaan penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan Daerah wabah penyakit hewan menular di Daerah;
- Pelaksanaan pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
- Pelaksanaan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner di Daerah;
- Pelaksanaan pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah;

- Pelaksanaan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
- Pelaksanaan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

F. Bidang Penyuluhan, Pelayanan Usaha dan PPHP

Bidang Penyuluhan, Pelayanan Usaha dan PPHP dipimpin oleh Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan Usaha dan PPHP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Bidang Penyuluhan, Pelayanan Usaha dan PPHP mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penyuluhan, Pelayanan Usaha dan PPHP.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penyuluhan, Pelayanan Usaha dan PPHP mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyiapan bahan dan pelaksanaan rencana dan anggaran di bidang penyuluhan, pelayanan usaha dan PPHP;
- Pelaksanaan pembinaan dan penggalangan kemitraan usaha di bidang pertanian;
- Pelaksanaan penerbitan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya di Daerah;
- Pelaksanaan pelayanan usaha dan bimbingan agribisnis;
- Pelaksanaan bimbingan permodalan untuk usaha di bidang pertanian;
- Pelaksanaan pelayanan rekomendasi atau izin usaha bidang pertanian;
- Pelaksanaan penyebaran informasi pasar komoditas pertanian;
- Pelaksanaan inventarisasi usaha di bidang pertanian;
- Pelaksanaan pembinaan, pengembangan kelompok tani dan kelembagaan ekonomi petani;
- Pelaksanaan penyuluhan, bimbingan teknis, pengadaan dan pengembangan materi penyuluhan;
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi hasil bimbingan dan penyuluhan bidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang penyuluhan, pelayanan usaha dan PPHP; dan
- Pelaksanaan tugas fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan Usaha dan PPHP membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

G. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari beberapa pejabat fungsional dapat diberikan tugas tambahan yang melaksanakan tugas

sebagai Sub Koordinator melalui penetapan Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya serta dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional yang merupakan hasil penyetaraan jabatan pengawas diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator.

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah koordinasi kepala bidang bertanggung jawab langsung dengan Kepala Dinas.

Jumlah tenaga fungsional ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja, berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

2.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan

1) Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Perangkat Daerah membutuhkan sumber daya pembangunan yang memadai, baik itu Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana maupun sumber daya penunjang/pendukung lainnya.

Pegawai di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan per 31 Desember 2024 sebanyak 43 orang ASN dan 30 orang Non ASN dengan rincian sebagai berikut :

❖ Berdasarkan Jenis Kepegawaian :

JENIS KEPEGAWAIAN	JUMLAH PEGAWAI
Struktural	8
Jabatan Fungsional Umum	21
Jabatan Fungsional Khusus	16
Non ASN Daerah	30
TOTAL	75

❖ Berdasarkan Golongan

GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI
Golongan IV	11
Golongan III	39
Golongan II	2
TOTAL	43

❖ Berdasarkan Pendidikan

JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
S3	-
S2	5

S1	30
D3	4
SLTA	2
TOTAL	43

❖ Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

JABATAN	JUMLAH PEGAWAI
Eselon II b	1
Eselon III a	1
Eselon III b	4
Fungsional Khusus	5
Fungsional Umum	34
TOTAL	43

Berdasarkan analisis beban kerja dan dibandingkan dengan banyaknya jumlah pegawai, jumlah SDM tersebut sudah cukup memadai. Namun ditinjau dari kualitas SDM masih diperlukan peningkatan pendidikan dan keahlian serta keterampilan pegawai melalui pelatihan dan pendidikan formal yang sesuai dengan bidang kerja masing-masing pegawai

2) Aset/Modal

Peralatan dan perlengkapan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

DAFTAR BMD PADA PENGGUNA BARANG
ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN
INTRA KOMPAGEL
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2024

Accepted for publication: 11 May 2016
 Published online: 15 May 2016

[illegible]

COL. 818.832

[illegible]

element 2% of 1

DAFTAR ISM PADA PENGGUNA BARANG
ASET TETAP TANAH
INTRANSAKTABEL
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2024

Integration: Einzelne	1.000
Integration: Einzelne	1.000

[illegible]

DAFTAR EMD PADA PENGGUNA BARAM
ASSET TERAP PERALATAN & MESIN
INTRAKOMPTASER
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
14 JUN 2023

Temperature	20-25°C
Humidity	50-60%

[illegible]

Min grosses Δ in $\bar{g}$	(Min. absolute change in $\bar{g}$)
$\Delta g = 0.0001$	(0.0001)

[illegible]

Project Number:	Work Structure / Approval System
Ref: L-100	CS-000

[illegible]

DAFTAR HMBI PADA PENGUSAHA (BARAMI)
A SET TETAP PERALATAN & MESIN
INTRAADAPTABEL
PEMERINTAH KOTA TARRAKAN
TAHUN 2024

Downloaded from <http://www.jstor.org/stable/2346122> on Tue, 20 Jun 2016 12:02:05 UTC
All use subject to [JSTOR Terms and Conditions](#)

1999-2000 Page 1 of 10
 000000

[illegible]

DAFTAR BENDAHARA PENGUNA BARANG
ASSET TETAP PERALATAN & MESIN
STRASIKAPTEL
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
TRILAK 2024

Program Studi : Ilmu Komunikasi (Kelas Baru)
Nama : ...

[illegible]

DAFTAR ISI
ASPEK TETAP PERALATAN & MESIN
INTRACORPORAL
Pemerintah Kota Takarum
Tahun 2024

Original source: <http://www.ck12.org/Book-Search/Book-Search.aspx?c=1&q=biology%20textbook%20pdf%20download&v=1>
 Date added: 06/11/2012

[illegible]

DAFTAR ISI PADA PENGUNA BARANG
ASSET TETAP PERALATAN & MESIN
KITANO MPAREL
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2024

Fragebogen-Nr.	00000000000000000000
Fragebogen-Nr.	00000000000000000000

[illegible]

DUJASTA IMD PADA PENGGUNA BARANG
ASSET TETAP PERALATAN & MESIN
INTERKOMPTASOL
PEMERINTAH KOTA TANGERAN
TAHUN 2020

Revisiting Literacy: Skills, Knowledge, Pardon, and the Social Imagination

[illegible]

Keywords: *workplace spirituality; organizational commitment; turnover intention*

[illegible]

Model 1	Model 2
Model 3	Model 4

[illegible]

DAFTAR RUMAH PAJAK PENGUNA BAHANG
ASSET TETAP PERALATAN & MESIN
INTRAKORPORASI
PERBENTAHAN NOTA TAWARAN
TAHAP 2004

Religione (breve)	Cristo - Evangelico - Presbitero (na Igreja)
Endereço	112/23.50

[illegible]

[illegible][illegible]

Fragestellung	Wie hoch sind die Kosten für einen Tag?
Gegebene Werte	100 Euro

[illegible]

Page: 1 of 1
Date: 1/1/2017

[illegible]

Manuscript accepted: 12 May 2005
 Manuscript accepted: 12 May 2005

Kategori		Detail		Spesifikasi		Karakteristik		Performa		Keamanan		Ketersediaan		Dukungan		Harga	
Item	Detail	Spesifikasi	Karakteristik	Performa	Keamanan	Ketersediaan	Dukungan	Harga	Detail	Spesifikasi	Karakteristik	Performa	Keamanan	Ketersediaan	Dukungan	Harga	Detail
1	Item 1	Spesifikasi 1	Karakteristik 1	Performa 1	Keamanan 1	Ketersediaan 1	Dukungan 1	1000000	Detail 1	Spesifikasi 1	Karakteristik 1	Performa 1	Keamanan 1	Ketersediaan 1	Dukungan 1	1000000	Detail 1
2	Item 2	Spesifikasi 2	Karakteristik 2	Performa 2	Keamanan 2	Ketersediaan 2	Dukungan 2	2000000	Detail 2	Spesifikasi 2	Karakteristik 2	Performa 2	Keamanan 2	Ketersediaan 2	Dukungan 2	2000000	Detail 2
3	Item 3	Spesifikasi 3	Karakteristik 3	Performa 3	Keamanan 3	Ketersediaan 3	Dukungan 3	3000000	Detail 3	Spesifikasi 3	Karakteristik 3	Performa 3	Keamanan 3	Ketersediaan 3	Dukungan 3	3000000	Detail 3
4	Item 4	Spesifikasi 4	Karakteristik 4	Performa 4	Keamanan 4	Ketersediaan 4	Dukungan 4	4000000	Detail 4	Spesifikasi 4	Karakteristik 4	Performa 4	Keamanan 4	Ketersediaan 4	Dukungan 4	4000000	Detail 4
5	Item 5	Spesifikasi 5	Karakteristik 5	Performa 5	Keamanan 5	Ketersediaan 5	Dukungan 5	5000000	Detail 5	Spesifikasi 5	Karakteristik 5	Performa 5	Keamanan 5	Ketersediaan 5	Dukungan 5	5000000	Detail 5
6	Item 6	Spesifikasi 6	Karakteristik 6	Performa 6	Keamanan 6	Ketersediaan 6	Dukungan 6	6000000	Detail 6	Spesifikasi 6	Karakteristik 6	Performa 6	Keamanan 6	Ketersediaan 6	Dukungan 6	6000000	Detail 6
7	Item 7	Spesifikasi 7	Karakteristik 7	Performa 7	Keamanan 7	Ketersediaan 7	Dukungan 7	7000000	Detail 7	Spesifikasi 7	Karakteristik 7	Performa 7	Keamanan 7	Ketersediaan 7	Dukungan 7	7000000	Detail 7
8	Item 8	Spesifikasi 8	Karakteristik 8	Performa 8	Keamanan 8	Ketersediaan 8	Dukungan 8	8000000	Detail 8	Spesifikasi 8	Karakteristik 8	Performa 8	Keamanan 8	Ketersediaan 8	Dukungan 8	8000000	Detail 8
9	Item 9	Spesifikasi 9	Karakteristik 9	Performa 9	Keamanan 9	Ketersediaan 9	Dukungan 9	9000000	Detail 9	Spesifikasi 9	Karakteristik 9	Performa 9	Keamanan 9	Ketersediaan 9	Dukungan 9	9000000	Detail 9
10	Item 10	Spesifikasi 10	Karakteristik 10	Performa 10	Keamanan 10	Ketersediaan 10	Dukungan 10	10000000	Detail 10	Spesifikasi 10	Karakteristik 10	Performa 10	Keamanan 10	Ketersediaan 10	Dukungan 10	10000000	Detail 10

Free online version: <http://www.elsevier.com/locate/bsc>
and 0167-6369

[illegible]

Free online edition: <http://www.elsevier.com/locate/jmb>
 Print edition: 0022-270X/01/0000-0000\$10.00

[illegible]

DAFTAR RMD PADA PENGGUNA BARANG
ANAK TETAP PENALATAN & MESIN
INTRADUPTED
PEMERINTAH KOTA TARAMAN
TAHUN 2024

[illegible][illegible]

DAFTAR BMD PADA PENGGUNA BARANG
ASET TETAP PERALATAN & MESIN
(STRANSMPFZRC)
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2024

File name (name):	State Relation of Religion and Politics
File # (code):	000000

[illegible]

**DAFTAR RMD PADA PENGGUNA BARANG
ASET TETAP PERALATAN & MESIN
INTRAKOMPTASSEL
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
Tahun 2020**

Teilgruppenbildung	Wiederholungs- und Folgebildung
94 x 1000	100000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Unit Usaha yang Masih Operasional

Unit-unit usaha Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan yang masih beroperasi, antara lain :

- Kebun Percontohan di Pesemaian
- Rumah Pemotongan Hewan (Sapi)
- Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)
- Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan)
- Laboratorium Klinik Hewan

- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan
Pada tahun 2019 - 2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan memiliki 6 sasaran kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Akuntabilitas Perangkat Daerah	67,20	67,50	67,75	67,85	68,00	63,00	63,00	72,05	72,05	65,2	93,75	93,333	106,35	106,19	95
2	Produksi Hasil Pertanian (Ton)	68.173,1	70.704	72.686,5	75.061,5	77.645,6	73.560	71.074	73.042	79.281	89.587,8	107,9	100,52	100,49	105,62	115
3	Produksi Hasil Peternakan (Ton)															
	- Daging (Kg)	7.199.920	7.180.520	7.781.380	7.850.000	7.898.179	7.759.890	8.025.310	9.002.200	9.418.885	7.917.817	107,78	111,77	115,69	119,99	100
	- Telur	775.387,5	775.389	1.050.000	2.000.000	2.100.000	741.946	753.058	912.060	1.414.486	1.768.758	95,687	97,12	86,863	70,724	84
4	Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH)	82,3	83	84	85	86	87,4	84	78,3	80,7	77,7	106,2	101,2	93,214	94,941	90
5	Pendapatan Petani															
	- Pendapatan Keluarga Petani Miskin (Rp./KK/Bulan)	1.900.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000	1.900.000	2.000.000	2.200.000	2.200.000	-	100	100	104,76	100	-
	- Nilai Tukar Petani	97,67	98,10	99,63	100,59	101,58	97,31	98,10	108,67	101,95	-	99,631	100	109,07	101,35	-
6	Rasio Suplai dan Demand Bahan Pangan Penyumbang Inflasi	112	113	114	115	116	116	151	167,8	188,06	181,73	103,57	133,63	147,19	163,53	156

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		5,894,448,839	5,979,396,702	6,336,741,048	6.809.009.783		5,746,394,968	5,818,101,988	6,202,579,124	6.694.620.915		97.49	97.30	97.88	98	4.43	4.55
Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan		0	0	10,000,380	11.939.360		0	0	10,000,380	10.952.000		0.00	0.00	100.00	91	0.00	0.00
Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		350,000,000	876,543,930	114,995,172	222.427.290		345,403,565	848,669,930	110,037,770	217.718.190		98.69	96.82	95.69	98	107.00	102.19
Penanganan Kerawanan Pangan		0	0	39,978,000	40.515.670		0	0	38,369,814	38.534.700		0.00	0.00	95.98	95	0.00	0.00
Pengawasan Keamanan Pangan		20,000,000	0	19,999,000	52.404.230		20,000,000	0	19,874,000	50.424.800		100.00	0.00	99.37	96	-100.00	-100.00
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		200,000,000	325,043,001	1,497,913,726	4.849.338.320		188,718,500	318,868,675	1,477,945,270	4.783.037.856		94.36	98.10	98.67	99	242.94	250.71
Pengembangan Prasarana Pertanian		430,000,000	1,043,802,676	1,072,543,730	1.237.674.060		428,719,000	1,043,491,346	1,066,617,180	1.236.245.562		99.70	99.97	99.45	100	144.12	144.51
Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		75,000,000	838,065,000	268,860,437	165.900.770		71,797,000	834,665,500	209,127,552	156.136.160		95.73	99.59	77.78	94	983.46	1,025.06
Perizinan Usaha Pertanian		0	10,004,000	7,582,000	13.294.000		0	9,614,500	7,260,000	12.890.000		0.00	96.11	95.75	97	-12.11	-12.24
Penyuluhan Pertanian		137,000,000	784,101,922	1,122,207,168	956.972.380		130,955,400	778,470,104	977,220,341	948.513.660		95.59	99.28	87.08	99	493.90	507.22

Tabel 2.2
Populasi Ternak Kota Tarakan Tahun 2019– 2024

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018)	Capaian 2029 s.d 2024					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Populasi Sapi	Ekor	2.594	2.794	2.852	2.986	2.679	2.873	3.144
2	Populasi Babi	Ekor	8.445	5.464	5.504	5.798	5.616	6.357	7.793
3	Populasi Kambing	Ekor	1.223	1.184	1.160	1.208	542	626	819
4	Populasi Ayam Ras	Ekor	3.753.915	4.437.576	3.760.216	3.480.859	3.777.492	3.843.340	3.303.050
5	Populasi Ayam Buras	Ekor	520.810	537.735	519.676	661.645	571.556	412.012	246.926
6	Populasi Itik	Ekor	8.947	3.037	3.046	3.500	2.199	10.276	10.540

Tabel 2.3
Produksi Telur Kota Tarakan Tahun 2019– 2024

No.	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018)	Capaian 2029 s.d 2024					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi Telur Ayam Ras	Ton	524,69	209,62	209,49	320,68	493,82		
2	Produksi Telur Ayam Buras	Ton	229,62	537,60	569,87	580,97	753,20		
3	Produksi Telur Itik	Ton	10,24	15,73	12,96	12,96	11,64		

Tabel 2.4
Produksi Daging Kota Tarakan Tahun 2019 – 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018)	Capaian 2019 s/d 2024					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi Sapi (daging)	Ton	269,38	302,05	311,19	383,27	298,10	311.813	360.724
2	Produksi babi (daging)	Ton	107,66	110,97	136,16	73,05	118,58	124.035	90.922
3	Produksi Kambing (daging)	Ton	15,29	68,48	70,06	77,19	58,15	60.825	0.133
4	Produksi Ayam Ras (daging)	Ton	6.450,44	7.087,24	6.624,07	6.856,11	7.870,20	8.162.806	6.899.060
5	Produksi Ayam Buras (daging)	Ton	781,26	640.920	582.496	640.919	635.890	665.141	443.547
6	Produksi Itik (daging)	Ton	4,56	1.850	1.634	3.646	4.270	11.447	9.879

Produksi daging terdiri dari : daging sapi, daging kerbau, daging domba, daging kuda, daging babi, daging kambing, daging kelinci, daging ayam ras, daging ayam buras, daging ayam petelur, daging itik, daging itik manila dan daging merpati.

Kenaikan produksi daging di Kota Tarakan ini didominasi dari daging ayam potong. Sedangkan produksi daging sapi mengalami penurunan karena adanya larangan pemasukan sapi dan kambing yaitu Surat Edaran Satuan Tugas Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengendalian Lalu Lintas Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan.

Telur yang ada di Kota Tarakan adalah : telur ayam ras, telur ayam kampung dan telur itik. Kenaikan produksi telur ini disebabkan karena bertambahnya layer siap produksi (regenerasi) dan adanya peternak layer baru.

Faktor – faktor penting yang mempengaruhi kenaikan produksi ini karena secara terus menerus dilakukan surveylans untuk memantau kesehatan hewan, jadi apabila ditemukan gejala suatu gejala penyakit dapat langsung diambil langkah – langkah dengan cara pemeriksaan laboratorium, vaksinasi untuk mencegah terjangkitnya penyakit pada ternak. Dengan dilakukannya vaksinasi dan pengawasan lalu lintas ternak dari luar daerah, Kota Tarakan masih merupakan zona hijau dari PMK (Penyakit Mulut dan Kuku). Selain itu juga dilakukan penyuluhan, pendampingan dan diberikan bantuan berupa sarana dan prasarana kepada kelompok tani juga sangat membantu pada keberhasilan peningkatan produksi daging telur.

Tabel 2.5
Data Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Tahun 2019 – 2024

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018)	Capaian 2019 s.d 2024					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi Padi	Ton	285,7	118,8	82,8	90,2	131,0	83,31	102,9
2	Produksi Ubi Kayu	Ton	5.653	28.899,7	1.616,7	1.086,7	1.105,8	1.305	1.305
3	Produksi Ubi Jalar	Ton	266	226,7	73,9	124	96,5	-	
4	Produksi Sawi	Ton	3.392,1	3.902	622,1	1.196,7	1.378,8	1.190	1.190
5	Produksi Bawang Daun	Ton	206,7	241	767,8	119,9	137,8	1.301	1.301
6	Produksi Kacang Panjang	Ton	1.920,5	1.962	5.138,2	4.554,6	3.070,1	2.448	2.448
7	Produksi Cabai Besar	Ton	1.249,8	1.665,6	220,7	3.016,9	3.500,0	4.209	4.209
8	Produksi Cabai Kecil	Ton	1.475,3	2.043,2	172,8	2.736,3	2.998,1	4.024,8	3.747
9	Produksi Tomat	Ton	1.766,1	999	837,4	4.392,5	4.657,0	8.125	7.021
10	Produksi Terong	Ton	2.291,1	2027	12.794,7	5.679,8	5.762,6	6.045,5	6.020
11	Produksi Buncis	Ton	846,4	1.004	91,55	2.310,8	2.498,6	3.326	2.554
12	Produksi Ketimun	Ton	4.124,7	4.984	2.385,5	2.159,2	2.531,2	3.508	3.172
13	Produksi Pare	Ton	1.006,1	1.001	655,6	289	249,1	187,5	144
14	Produksi Gambas	Ton	1.462	1.351	1.035,4	1.272,3	1.286,2	590	150
15	Produksi Kangkung	Ton	2.999,6	2.678	2.116	1.981,1	1.919,4	220,7	185
16	Produksi Bayam	Ton	1.897	2.018	1.645,1	2.145,7	1.572,8	903,5	698
17	Produksi Sayuran Lainnya	Ton	7.158,8	5.475	5.960,3	4.706,3	5040,8	-	-
18	Produksi Salak	Ton	794,2	930	408	168,9	5,6	429,2	3.324
19	Produksi Pepaya	Ton	9.778,5	10.232,8	10.987,9	11.765	13.563,4	2.702,1	1.991

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018)	Capaian 2019 s.d 2024					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
20	Produksi Pisang	Ton	758,9	1.168,9	5.647,7	10.007,1	10.874,7	13.389,8	23.666
21	Produksi Jeruk	Ton	1.394,2	1.399,2	524,8	31,4	51,7	2.249,1	1.075
22	Produksi Durian/ Elai	Ton	466,5	456,4	1.628,2	292	309,5	1.717,6	1.688
23	Produksi Mangga/ Kuweni	Ton	3.883,2	4.032,9	4.908,9	3.189,2	2.417,9	6.063,1	5.568
24	Produksi Nangka	Ton	1.017,9	1.130,8	3.612,3	3.878,8	2.483,9	2.493,3	2.229
25	Produksi Rambutan	Ton	1.840,8	1.859,9	2.202,2	196,8	291,7	1.303,1	892
26	Produksi Nenas	Ton	26,5	29,0	39,8	34,4	20,3	132,4	89
27	Produksi Sukun	Ton	365,2	393,7	51,89	55,5	36	381,7	466
28	Produksi Sirsak	Ton	42	35,9	34	28,1	7,5	143,4	111
29	Produksi Semangka	Ton	644,5	644,3	337,3	406,4	1.100	1.100	2.960
30	Produksi Terap	Ton	669	670,7	388,8	346,8	356,7	247,7	208

Penggunaan benih sangat berpengaruh kepada produktifitas padi. Di Tarakan benih yang ditanam adalah Inpari dan Sentana. Selain itu juga tercukupinya air. Dengan adanya bantuan irigasi perpompaan sangat membantu dalam pengairan tanaman padi. Dari segi produktifitas, mengalami peningkatan produktifitas padi. Peningkatan produktifitas dari 3,6 ton/Ha menjadi 4,1 ton/Ha ini salah satunya dipengaruhi dengan penggunaan benih unggul, pemupukan yang cukup serta pengairan yang cukup.

Meningkatkan produksi palawija dengan cara melaksanakan intensifikasi pertanian, kegiatan penyediaan sarana produksi pertanian seperti bibit unggul, pupuk dan peralatan pertanian.

Komoditas sayuran yang ada di Tarakan adalah : sayuran bawang daun, sawi, kacang panjang, lombok besar, lombok kecil, tomat, terong, buncis, ketimun, pare, gambas, kangkung, bayam, labu, jagung muda dan nangka muda. Peningkatan produksi sayuran dilakukan dengan cara memberikan saprodi serta penyuluhan yang terus menerus dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan.

Peningkatan produksi biofarmaka dilakukan dengan cara memberikan saprodi serta penyuluhan yang terus menerus dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan. Selain hal tersebut juga diharapkan usaha yang menggunakan bahan baku biofarmaka lebih ditingkatkan, sehingga hal ini akan memotivasi petani biofarmaka lebih semangat dalam meningkatkan produksinya.

Penurunan Skor PPH disebabkan oleh karena konsumsi masyarakat menurun dari segi keragamannya. Keragaman konsumsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh pola atau kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi makanan. Kebanyakan mereka kurang mempertimbangkan apakah makanan yang dikonsumsi sudah beragam, bergizi dan seimbang atau belum. Sedangkan dari segi jumlah konsumsi, terdapat beberapa penyebab, diantaranya ada yang memang menghindari makanan tertentu karena alasan kesehatan yang memang harus dihindari, ada juga dengan alasan menjaga berat badan sehingga jumlah konsumsinya dikurangi.

Peningkatan Rasio Suplai Demand bahan pangan penyumbang inflasi dipengaruhi oleh beberapa hal yang sudah dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yaitu: Dilakukan sosialisasi tentang diversifikasi makanan kepada masyarakat agar masyarakat mengurangi ketergantungan pada satu bahan makanan dan menggantikannya dengan bahan yang ada saja. Dilakukan pemantauan stok dan harga pasar bahan pangan setiap hari ke pasar dan toko-toko atau tempat penjualan lainnya. Berdasarkan data lapangan, dilakukan koordinasi dengan stakeholder terkait (BPS, Bank Indonesia, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Pertamina, Bulog, para Distributor, para peternak, perwakilan petani, perwakilan nelayan, perwakilan petambak, perwakilan pedagang).

2.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan menghadapi beberapa masalah yang mampu mempengaruhi pelayanan. Permasalahan – permasalahan ini yang menjadi penyebab terjadinya kesenjangan antara capaian kinerja dan target yang telah ditentukan. Guna penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025 – 2029, maka dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan permasalahan mendasar yang menghambat capaian kinerja pada periode 2019 – 2024.

Indentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh DPKP dianalisis berdasarkan faktor-faktor internal dan eksternal yang sangat dominan mempengaruhi pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Utara. Permasalahan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan berkaitan erat dengan rendahnya produksi komoditi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan juga komoditi perkebunan yang menjadi tanggung jawab DPKP.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain:

- (1). Belum tercukupinya ketersediaan pangan
- (2). Masih rendahnya kualitas konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian diatas, berikut masalah pokok, masalah dan akar masalah disajikan pada table 2.6 berikut :

Tabel 2.6
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum terpenuhi nya Ketahanan Pangan yang berkelanjutan	Belum tercukupinya ketersediaan pangan	Alih fungsi lahan pertanian Belum memadainya sarana dan prasarana pertanian Tingginya serangan hama dan penyakit Budidaya pertanian masih di kelola secara konvensional Kurang optimalnya layanan Penyuluhan Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan usaha pertanian pengolahan, pemasaran, hasil pertanian dan usaha pengecer obat-obat pertanian Harga bahan pangan yang fluktuatif Masih tinggi nya ketergantungan pasokan bahan pangan dari luar daerah Masih terdapat daerah rentan pangan Belum optimalnya faksilitasi layanan ijin usaha dan akses permodalan usaha pertanian, pengolahan, pemasaran, dan hasil pertanian Masih rendahnya pelayanan usaha PPHP Tingginya produk luar yang beredar di unit usaha pengecer Masih kurangnya update data
	Masih rendahnya keragaman dan kualitas pangan Masih rendahnya kualitas konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha kecil dan mikro serta petani terhadap penting nya jaminan keamanan pangan Belum optimalnya pengawasan keamanan pangan Belum optimalnya sarana dan prasarana pengujian keamanan pangan

2.5 Isu Strategis pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Isu strategis adalah kondisi atau permasalahan krusial yang memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi dan oleh karena itu perlu mendapatkan perhatian. Dengan memperhatikan permasalahan yang dihadapi dan capaian kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian lima tahun terakhir, dan mandat RPJMD 2025-2029 Kota Tarakan, serta memperhatikan ketahanan pangan dan perkembangan produksi pangan pada tingkat provinsi dan nasional, maka isu-isu strategis yang relevan diangkat dalam pembangunan ketahanan pangan dan pertanian di Kota Tarakan untuk lima tahun mendatang, diantaranya :
Capaian kinerja DKPP 5 (lima) tahun terakhir dan berbagai masalah yang dihadapi;

- Tersedianya transportasi udara dan transportasi laut;
Untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan dari luar Tarakan sudah tersedia fasilitas transportasi darat dan udara untuk mengangkut bahan pangan tersebut.
- Menu pangan masyarakat yang beragam;
Menu pangan yang beragam dapat merupakan peluang pola konsumsi pangan masyarakat yang memenuhi B2SA
- Masih terdapat lahan beres;
Masih banyaknya lahan beres merupakan peluang untuk dapat dipergunakan untuk penambahan luas lahan pertanian, sehingga akan dapat meningkatkan produksi pertanian.
- Intensitas hujan tinggi;
Intensitas hujan yang tinggi dapat dimanfaatkan untuk pengairan budidaya sayuran.
- Banyak rumput liar;
Rumput liar yang banyak tumbuh di Tarakan bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak tanpa harus membeli, jadi dapat untuk menghemat pengeluaran pembelian pakan.
- Struktur tanah berpasir;
Struktur tanah berpasir pada lahan pertanian ada segi baiknya pada budidaya pertanian, akan tetapi banyak diperlukan pemupukan untuk mencukupi kebutuhan unsur hara yang diperlukan tanaman.
- Alih fungsi lahan pertanian;
Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk meningkat juga kebutuhan perumahan sehingga hal ini berpengaruh pada berkurangnya luas lahan pertanian.
- Kurangnya sarana dan prasarana pertanian;
diperlukan dukungan pembangunan dan peningkatan infrastruktur dari sentra produksi ke pasar atau tempat penjualan untuk menekan beban pengeluaran yang harus ditanggung oleh petani
- Tingginya serangan hama dan penyakit;
Intensitas hujan yang tinggi akan menimbulkan kelembaban udara yang tinggi sehingga hal ini memicu perkembangan jamur yang menjadi penyebab tingginya penyakit tanaman.
- Budidaya pertanian masih dikelola secara konvensional;
Budaya lokal para petani sangat mempengaruhi pada bagaimana cara mereka bertani.

2.6 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Renstra DKPP merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sektor bidang ketahanan pangan dan pertanian yang mengacu pada RPJMD, untuk mewujudkan visi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dan tercantum dalam Dokumen RPJMD Kota Tarakan. Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 - 2029 Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA TARAkan SEBAGAI KOTA CERDAS YANG BERTUMPU PADA SEKTOR JASA, PERDAGANGAN, PERIKANAN KELAUTAN DAN EKONOMI KREATIF YANG BERDAYA SAING DAN MAJU MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA”

Untuk Mewujudkan visi tersebut ditetapkan 5 (lima) misi Walikota sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar yang andal
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui dukungan kemudahan berusaha yang berkeadilan dan bertumpu pada sector jasa, perdagangan, perikanan kelautan ,ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan (UMKM).
4. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang adaptif dan responsif serta menjaga stabilitas ketertiban dan ketentraman kota
5. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh menghadapi bencana.

Dalam mendukung Walikota untuk mewujudkan visinya, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mendukung Misi ketiga yaitu “Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui dukungan kemudahan berusaha yang berkeadilan dan bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, perikanan kelautan, ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan (UMKM).”

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA TARAKAN

3.1. Telaahan Renstra Provinsi

Penyusunan Tujuan dan Sasaran kinerja pembangunan dalam Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026 berpedoman pada dokumen RPJMD 2021 - 2026 Provinsi Kalimantan Utara, dengan misi yang menjadi rujukan utama adalah Misi ke-6 yaitu ; “Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota.”

Kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara dalam melaksanakan pembangunan pertanian di Provinsi Kalimantan Utara adalah mewujudkan ketahanan pangan yang berorientasi kepada masyarakat. Perwujudan peningkatan perekonomian rakyat yang berkelanjutan akan diawali dengan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan ekonomi hijau (*green economy*) dan meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Dengan peningkatan pertumbuhan dan sarana prasarana perekonomian wilayah yang ditekankan pada perekonomian masyarakat dan bersifat berkelanjutan, akan lebih tersedia berbagai kemudahan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat disamping berbagai upaya pendukung lainnya, seperti:

- a. Peningkatan angka pertumbuhan ekonomi sebagai penanda meningkatnya pertumbuhan ekonomi secara umum di masyarakat perlu diawali dengan upaya peningkatan infrastruktur fisik Pertanian upaya peningkatan ketersediaan sarana produksi Pertanian upaya peningkatan pemanfaatan lahan Pertanian upaya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Pertanian upaya peningkatan pengelolaan dan kelembagaan perekonomian rakyat, upaya peningkatan pengelolaan perikanan budidaya dan perikanan tangkap, upaya peningkatan produktivitas perikanan budidaya, upaya peningkatan pengelolaan pesisir, pulau-pulau kecil dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, upaya peningkatan daya tarik pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan, upaya peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan kepariwisataan, upaya pengembangan sistem informasi manajemen dan pemasaran pariwisata, upaya peningkatan produksi pertambangan, upaya peningkatan kualitas hasil pertambangan, meningkatkan SDM pertambangan, upaya peningkatan pengelolaan dan pengendalian lingkungan, serta upaya peningkatan teknologi pengembangan ekonomi yang berdaya saing.
- b. Meningkatnya infrastruktur fisik dan ekonomi wilayah merupakan cara untuk meningkatkan perekonomian wilayah. Peningkatan infrastruktur ini perlu diawali dengan upaya pengendalian sistem penataan ruang wilayah yang terintegrasi sehingga indikasi programnya terlaksana dan rencana struktur ruang dapat terwujud; upaya pengembangan sarana prasarana fisik utama transportasi darat, laut dan udara yang secara riil akan memudahkan pengembangan perekonomian wilayah; upaya pembangunan

infrastruktur dasar wilayah seperti air baku, air minum, fasilitas permukiman, dan lainnya yang terkait; serta upaya penyediaan sarana prasarana fisik energi sebagai upaya keterjaminan tersedianya energi yang diperlukan untuk pengembangan ekonomi wilayah.

- c. Meningkatnya konektivitas antardaerah dan negara tetangga juga merupakan arah pembangunan yang dituju untuk memudahkan pengembangan perekonomian daerah. Peningkatan konektivitas ini diharapkan dapat dicapai dengan upaya peningkatan prasarana jalan dan transportasi internal provinsi dan antar negara yang keduanya mendukung kegiatan perekonomian intra wilayah dan antar wilayah - bahkan antar Negara yang sangat diperlukan dalam pengembangan perekonomian wilayah; sangat diperlukan juga upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa komunikasi dan informatika untuk percepatan pengembangan perekonomian rakyat yang merupakan bagian pengembangan perekonomian daerah secara keseluruhan.
- d. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup harus dikedepankan dalam pengembangan perekonomian daerah. Arah pembangunan ini penting untuk mendukung keberlanjutan pengembangan ekonomi di masa selanjutnya. Jadi walaupun diusahakan terjadinya peningkatan perekonomian wilayah, tetap tidak mengesampingkan pertimbangan aspek keberlanjutan. Harapan ini akan dicapai melalui upaya peningkatan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup; dan upaya peningkatan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara :

- 1) Meningkatnya Produktivitas Pertanian
- 2) Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian

Sasaran Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara :

- 1) Meningkatnya ketahanan pangan dengan indikator kinerja Skor PPH;
- 2) Meningkatnya produksi komoditi pertanian dengan indikator kinerja:
 - Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan,
 - Persentase Peningkatan Produksi tanaman hortikultura,
 - Persentase Peningkatan Produksi tanaman perkebunan,
 - Persentase Peningkatan Produksi Peternakan.

Tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan adalah Terwujudnya Ketahanan Pangan yang berkelanjutan.

Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan juga mengacu pada sasaran pembangunan pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara, adapun sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya ketersediaan pangan
- 2) Meningkatnya kualitas konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)
- 3) Meningkatnya Tata Kelola DKPP

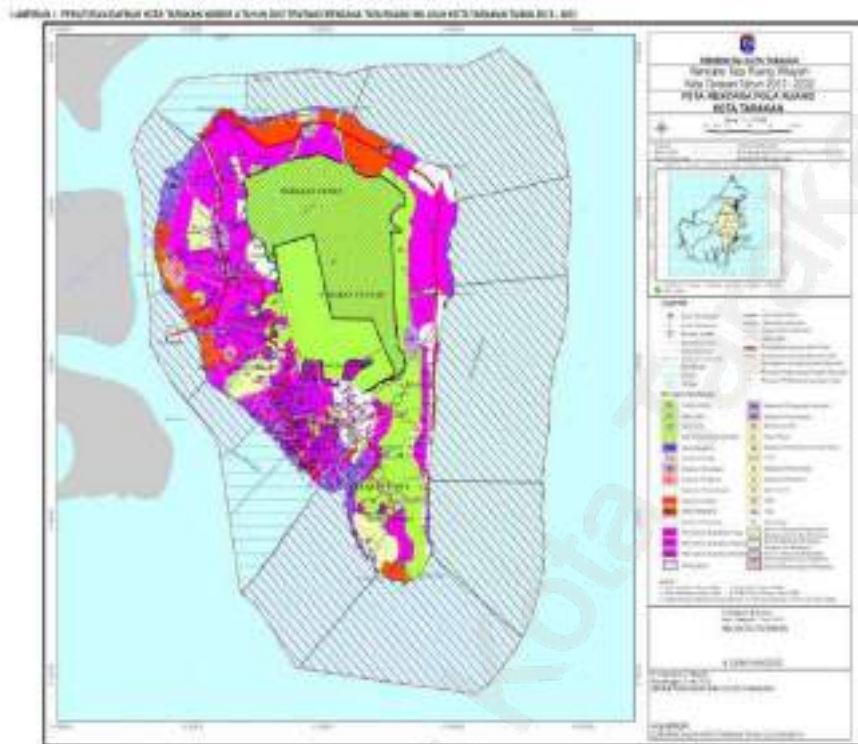
3.2. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penataan ruang wilayah Kota Tarakan bertujuan untuk mewujudkan Kota Tarakan sebagai pusat perdagangan dan jasa serta pusat pelayanan umum yang berkualitas menuju masyarakat yang berdaya saing tinggi dan

sejahtera dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup demi keberlanjutan pembangunan.

Gambar 3.1

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan 2012-2032



Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Tarakan terdiri atas :

1. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan sistem pusat pelayanan kota yang merata dan berhirarki;
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana kota yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota;
3. Pelestarian kawasan hutan lindung;
4. Pengembangan kawasan budidaya;
5. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan;
6. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perekonomian kota yang produktif, efisien dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional;
7. Pengendalian kawasan yang berkepadatan tinggi.

Pengembangan kawasan budidaya di wujudkan dengan :

1. Menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis kota untuk pemanfaatan sumber daya alam secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
2. Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;
3. Mengembangkan kawasan budidaya untuk menunjang aspek sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi ;
4. Mengembangkan kegiatan pengelolaan sumberdaya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi untuk meningkatkan perekonomian.

Adapun perbandingan penggunaan lahan eksisting tahun 2008 dengan pola ruang rencana pemanfaatan lahan RTRW Kota Tarakan 2010 – 2030 di Kota Tarakan sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Perbandingan Penggunaan Lahan Eksisting pada RTRW Kota Tarakan 2010 – 2030ww

PEMANFAATAN LAHAN EKSISTING (TAHUN 2008)				POLA RUANG RTRW KOTA TARAKAN 2010 -2030				
No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%	No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%	Ket.
Kawasan Budidaya				Kawasan Budidaya				
1	Hutan/Kebun Campuran	4.308,86	17,18	1	Kawasan Pemukiman			
2	Industry	40,65	0,16		1.Pemukiman kepadatan tinggi	1.768,79	7,05	
3	Kawasan Terbangun	1.197,64	4,78		2.Pemukiman kepadatan sedang	3.007,37	11,99	
4	Kebun Campuran	215,90	0,86		3.Pemukiman kepadatan rendah	93,09	0,37	
5	Bandar Udara	151,90	0,61	2	Kawasan Perdagangan Jasa	459,19	1,83	
6	Pelabuhan	7,89	0,03	3	Kawasan Bandar udara	517,11	2,06	
7	Perkebunan	87,34	0,35	4	Kawasan Perikanan	324,00	1,29	
8	Pertanian Lahan Kering	978,91	3,90	5	Kawasan Perkantoran	136,08	0,54	
9	Rawa	16,21	0,06	6	Kawasan Pendidikan	55,44	0,22	
10	Sarana Olah Raga	25,94	0,10	7	Kawasan Industry dan Pergudangan			
11	Semak Belukar	5.976,99	23,8		1.Industri	1.220,49	4,87	
12	Tambak	1.707,91	6,81		2.Pergudangan	123,37	0,49	
13	Tanah Kosong	1.814,55	7,24	8	Kawasan wisata			
14	TPA Aki Babu	0,70	000		1.Wisata Pantai	710,13	2,83	
15	UPDN Pertamina	22,68	0,09		2.Wisata agro (agrowisata)	87,40	0,35	
16	Kolam	7,59	0,03	9	Kawasan Pertambangan			
					1.Wilayah Pertambangan	9,94	0,04	
					2.UPDN Pertamina	24,73	0,10	
Kawasan Budidaya				Kawasan Budidaya				
					3.Penggunaan Lainnya	884,10	3,53	
				10	Kawasan Pertanian			
					1.Kawasan Peternakan	150,72	0,60	
					2.Kawasan Perikanan	19,01	0,08	
				11	Sarana Prasarana/ Fasum-fasos			
					Fasum-fasos	31,94	0,13	
					Sport Center	37,00	0,15	
					TPA Sampah	70,00	0,28	
	Jumlah Kawasan Budidaya	16.516,66			Jumlah Kawasan Budidaya	9.729,80		
	TOTAL KOTA TARAKAN	25.080,00			TOTAL KOTA TARAKAN	25.080,00		

Kawasan Peternakan berdasarkan RTRW Kota Tarakan Tahun 2010 – 2030 hanya seluas 150,72 Ha atau 0,6% dari luas daratan Pulau Tarakan. Sedangkan untuk kawasan pertanian tidak disebutkan secara pasti berapa

luas dan lokasinya, karena pertanian di Kota Tarakan bukan merupakan hamparan, akan tetapi tersebar secara terpisah.

3.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan dan isu utama serta pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan.

Tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan adalah "Terwujudnya Ketahanan Pangan yang berkelanjutan."

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Sasaran diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria "SMART". Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).

Adapun sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Ketersediaan Pangan
- 2) Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
- 3) Meningkatnya Tata Kelola DKPP

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam table 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	RUMUS	Baseline	TARGET TAHUN						KET.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan		Indeks Ketahanan Pangan		86,06	87,53	87,6	87,7	87,8	87,9	88	
	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Persentase Ketersediaan terhadap Kebutuhan Bahan Pangan Strategis (%)	$\frac{\text{Jumlah ketersediaan bahan strategis total}}{\text{kebutuhan bahan pangan strategis}} \times 100\%$	172,42	125	130	135	140	145	150	
		Persentase Peningkatan Produksi Pertanian (%)	$\frac{\text{Produksi Tahun ini} - \text{Produksi Tahun Sebelumnya}}{\text{Produksi Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$	10	0,01	1	1	1	1	1	
		Persentase Peningkatan Produksi Daging (%)	$\frac{\text{Produksi Tahun ini} - \text{Produksi Tahun Sebelumnya}}{\text{Produksi Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$	5	1,52	1,52	1,54	1,55	1,55	1,55	
		Persentase Peningkatan Produksi Telur (%)	$\frac{\text{Produksi Tahun ini} - \text{Produksi Tahun Sebelumnya}}{\text{Produksi Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$	2,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
	Meningkatnya Keragaman dan kualitas konsumsi pangan (B2SA)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		77,7	77	78	79	80	81	82	
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja DKPP	Nilai SAKIP DKPP		65,2	73,67	73,75	73,85	73,95	74,00	74,15	
		Indeks Kepuasan Masyarakat		81,41	86	86	86	86	86	86	

3.4 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah suatu cara atau pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang berpengaruh yaitu: kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang. Analisa SWOT Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan:

1. Kelemahan (W)
 - Kurang koordinasi antar OPD
 - Belum optimalnya pelaporan pelaku usaha
 - Adanya rantai distribusi yang terputus
 - Kelompok Tani/petani masih konvensional
 - Kurangnya sinergi dengan organisasi masyarakat
 - Lemah pengawasan satgas pangan
 - Kurangnya penanganan pangan segar pre dan post market
2. Peluang (O)
 - Tersedianya transportasi udara dan laut
 - Banyaknya distributor bahan pangan
 - Tersedianya akses distribusi pangan
 - Masih terdapat lahan beres
 - Intensitas air hujan tinggi
 - Banyak rumput
 - Struktur tanah berpasir
 - Bervariasinya jenis dan harga bahan pangan
 - Beragamnya variasi menu masyarakat
 - Bervariasinya jenis bahan pangan segar yang beredar
 - Tersedianya pasar tradisional dan modern
 - Adanya peluang peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan pemasaran hasil pertanian
3. Kekuatan (S)
 - Adanya TPID
 - SDM ASN
 - Pelaku Usaha yang beragam
 - Adanya Kelompok Tani, petani
 - Adanya organisasi masyarakat
 - Peraturan Keamanan Pangan
 - Tim Satgas Pangan
 - Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemangku Kepentingan lainnya
4. Ancaman
 - Konversi lahan pertanian menjadi non pertanian masih tinggi.
 - Minat tenaga kerja di bidang pertanian menurun.
 - Kemandirian petani masih rendah.
 - Fluktuasi harga produk pertanian sangat tinggi.
 - Produk pangan impor di pasar domestik sangat meningkat terus.

Selanjutnya dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman sehingga dapat diambil keputusan strategis pembangunan ketahanan pangan dan pertanian Kota Tarakan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

STRATEGI S-O

- Penguatan koordinasi antara anggota TPID
- Peningkatan sarana pendukung distribusi pangan
- Peningkatan budidaya tanaman
- Peningkatan budidaya ternak sapi
- Peningkatan promosi pangan B2SA
- Peningkatan pengetahuan anggota organisasi masyarakat sebagai agen perubahan pola konsumsi

STRATEGI W-O

- Penguatan koordinasi antara anggota TPID
- Melakukan pengambilan data secara berkala
- Peningkatan budidaya komoditas sesuai iklim dan struktur tanah
- Meningkatkan sinergi dengan organisasi masyarakat
- Menambah sarana pendukung komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)
- Peningkatan sosialisasi peraturan keamanan pangan kepada masyarakat
- Peningkatan kordinasi dengan satgas pangan
- Peningkatan kordinasi dengan satgas pangan dalam rangka pengawasan keamanan pangan
- Menambah sarana pendukung komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)

Strategi Kekuatan – Peluang

- Optimalisasi potensi pertanian pemanfaatan lahan kosong untuk meningkatkan produksi pertanian
- Peningkatan produksi, nilai tambah, dan daya saing produk pertanian

Strategi Kelemahan – Peluang

- Optimalisasi lahan kosong untuk meningkatkan produksi pertanian
- Penerapan manajemen tanaman sehat dengan pengendalian hama terpadu
- Peningkatan pengetahuan dan kemampuan petani melalui pelatihan, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka peningkatan pengetahuan petani

Strategi Kelemahan – Ancaman

- Penyediaan infrastruktur dan sarana termasuk sarana produksi untuk peningkatan produktifitas
- Akses pasar dan pendapatan petani serta penguatan kelembagaan petani.

Dari analisa SWOT diatas, strategi yang digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan koordinasi antara anggota TPID
- b. Peningkatan sarana pendukung distribusi pangan
- c. Melakukan pengambilan data dari pelaku usaha secara berkala/rutin
- d. Peningkatan produksi lokal
- e. Pencegahan penularan penyakit ternak
- f. Pengendalian organisme pengganggu tanaman
- g. Peningkatan promosi pangan B2SA
- h. Meningkatkan sinergi dengan organisasi masyarakat Meningkatkan sinergi dengan organisasi masyarakat
- i. Memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan
- j. Mengoptimalkan pengawasan keamanan pangan
- k. Peningkatan kordinasi dengan satgas pangan dalam rangka pengawasan keamanan pangan.
- l. Sosialisasi keamanan pangan, memperbanyak pengambilan dan pengujian sampel
- m. Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait
- n. Menjaga Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan
- o. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian
- p. Gerakan Pengendalian OPT
- q. Peningkatan populasi ternak
- r. Peningkatan produktifitas ternak
- s. Peningkatan Pelayanan Kesehatan reproduksi pada ternak

t. Penurunan kasus penyakit hewan

Kebijakan merupakan ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman/petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan, sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Kebijakan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Mengacu kepada sasaran dan strategi diatas, maka disusun kebijakan sebagai berikut:

1. Menstabilkan Harga dan pasokan pangan
2. Melakukan up date data
3. Menyediakan sarana dan prasarana pertanian
4. Mengendalikan serangan hama dan penyakit
5. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman
6. Menambah sarana pendukung komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)
7. Memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan
8. Peningkatan intensitas sosialisasi pola konsumsi pangan B2SA
9. Memberikan sarana produksi pertanian dan bimbingan pemanfaatan pekarangan
10. Peningkatan sosialisasi peraturan keamanan pangan kepada masyarakat
11. Mengoptimalkan pengawasan keamanan pangan
12. Menambah sarana pendukung komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)
13. Menerapkan sistem budidaya pertanian yang baik (GAP)
14. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keamanan pangan segar
15. Pendekatan persuasif kepada pelaku usaha agar bersedia mengurus ijin edar
16. Peningkatan peran penyuluh pertanian lapangan (PPL) terkait GAP
17. Peningkatan intensitas sosialisasi kepada masyarakat tentang keamanan pangan

Tabel 3.3
Arah dan Kebijakan Perangkat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Meningkatnya pertumbuhan dan stabilitas ekonomi	Pembangunan Sektor Pertanian, Perikanan dan Kelautan	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian	
			Pelaksanaan pengembangan prasarana pertanian	
			Pelaksanaan pembangunan prasarana pertanian	
			Pelaksanaan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak	
			Pelaksanaan penanganan hama dan penyakit tanaman	
			Pemenuhan bibit ternak dan pakan ternak dalam kota yang berkualitas	
			Pelaksanaan pengawasan kualitas bibit dan pakan ternak	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
			Penyediaan bibit ternak dan pakan ternak dari luar	
			Penjaminan kesehatan hewan dari wabah penyakit menular	
			Pelaksanaan pengawasan peredaran hewan dan bahan asal hewan	
			Pelaksanaan penanganan penyakit hewan	
			Pelaksanaan pembinaan pelaku usaha asal hewan	
			Pelaksanaan penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian	
			Pelaksanaan pengawasan izin usaha pengecer obat hewan	
			Pelaksanaan penyuluhan pertanian dengan baik	
			Pelaksanaan peta kerentanan dan ketahanan pangan	
			Penanganan kerawanan pangan	
			Penyediaan pangan strategis	
			Pelaksanaan fasilitasi bagi pelaku distribusi	
			Pelaksanaan intervensi peningkatan konsumsi gizi masyarakat	
			Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar	

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan.

Program, Kegiatan dan sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2025-2029 yang terdiri dari 1 (satu) program urusan Sekretariat dan 10 (sepuluh) program bidang, dimana program dan kegiatan ini didistribusikan pada (1) Bidang Ketahanan Pangan, (2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, (3) Bidang Pertanian, (4) Bidang Penyuluhan, Pelayanan Usaha dan PPPH.

Berikut merupakan rencana program , kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029 :

4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD
 - c) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - d) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b) Pengadaan Mebel
 - c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- b. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
 1. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik
- c. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
 - a) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
 - b) Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota
 - c) Pemantauan Stok Pangan
 2. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
 - a) Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun
 - b) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- d. Program Penanganan Kerawanan Pangan
 1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
 - a) Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
 2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a) Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota
- e. Program Pengawasan Keamanan Pangan
 1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
- f. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
 1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 - a) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
 - b) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
 2. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a) Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
- b) Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak
- 3. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan
 - b) Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
 - c) Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak
 - d) Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
- 4. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
 - a) Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
 - b) Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
- g. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - 1. Pengembangan Prasarana Pertanian
 - a) Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
 - b) Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
 - c) Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota
 - 2. Pembangunan Prasarana Pertanian
 - a) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
 - b) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - c) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
 - d) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
 - e) Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas
 - f) Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan
 - 3. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
 - b) Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
- h. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - 1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular
 - b) Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan
 - c) Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Pengawasan Peredaran Produk Hewan
 3. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium
 - b) Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
 4. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - a) Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - b) Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan
 - c) Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Kesejahteraan Hewan
 - d) Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan
 - i. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
 - a) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
 - j. Program Perizinan Usaha Pertanian
 1. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian
 - b) Sertifikasi Unit Usaha Pembibitan/ Budidaya Ternak
 - c) Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar dan Izin Usaha Pertanian
 2. Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan
 - a) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
 - b) Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan
 - k. Program Penyuluhan Pertanian
 1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
 - a) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
 - b) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
 - c) Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
 - d) Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
 - e) Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani
 - f) Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan bidang urusan.

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan

pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Tarakan. Target indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan selama 5 (lima) tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(3)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.09.3.27.0.00.01.0000 – Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian										
Meningkatnya Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi	Terwujudnya Ketahanan Pangan yang berkelanjutan		Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	86,06	87,53	87,6	87,7	87,8	87,9	88
		Meningkatnya ketersediaan pangan	Persentase ketersediaan terhadap kebutuhan bahan pangan strategis (%)	172,42	125	130	133	140	145	150
			Persentase Peningkatan Produksi Pertanian (%)	10	0,01	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
			Persentase Peningkatan produksi daging (%)	5	1,52	1,52	1,54	1,55	1,55	1,55
			Persentase Peningkatan Produksi Telur (%)	2,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
		Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Skor Pola Pangan Harapan	77,7	77	78	79	80	81	82
		Meningkatnya Tata Kelola DKPP	Nilai SAKIP DKPP	65,2	73,67	73,75	73,85	73,95	74,00	74,15
			Indeks Kepuasan Masyarakat	81,41	86	86	86	86	86	86

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/SubKegiatan dan Pendidikan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				7.673.000.000,00		7.673.000.000,00		7.678.000.000,00		7.683.000.000,00		7.688.000.000,00		
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.273.000.000,00		7.273.000.000,00		7.273.000.000,00		7.273.000.000,00		7.273.000.000,00		
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	70	71	538.500.000,00	72	538.500.000,00	73	538.500.000,00	74	538.500.000,00	75	538.500.000,00	2.09.3.27.0.00.01.00 00 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2.09.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Layanan Administrasi kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	5		5		5		5		5			
2.09.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
2.09.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00		
2.09.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				119.000.000,00		119.000.000,00		119.000.000,00		119.000.000,00		119.000.000,00		
Tersedianya layanan administrasi umum	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	5	119.000.000,00	5	119.000.000,00	5	119.000.000,00	5	119.000.000,00	5	119.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	14	10		10		10		10		10			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
2.09.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
2.09.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00		
2.09.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	5	3.000.000,00	5	3.000.000,00	5	3.000.000,00	5	3.000.000,00	5	3.000.000,00		
2.09.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	14	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00		
2.09.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terkelolanya data Barang Milik Daerah dalam aplikasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	14	4		4		4		4		4			
2.09.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
2.09.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.09.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	14	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00		
2.09.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				86.000.000,00		86.000.000,00		86.000.000,00		86.000.000,00		86.000.000,00		
Tersedianya layanan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	86.000.000,00	12	86.000.000,00	12	86.000.000,00	12	86.000.000,00	12	86.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
2.09.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.09.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	85.000.000,00	12	85.000.000,00	12	85.000.000,00	12	85.000.000,00	12	85.000.000,00		
2.09.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				223.500.000,00		223.500.000,00		223.500.000,00		223.500.000,00		223.500.000,00		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18	18	223.500.000,00	18	223.500.000,00	18	223.500.000,00	18	223.500.000,00	18	223.500.000,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	32	23				23				23			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1				1				1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	25	30				30				30			
2.09.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	32	23	8.500.000,00	23	8.500.000,00	23	8.500.000,00	23	8.500.000,00	23	8.500.000,00		
2.09.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18	18	150.000.000,00	18	150.000.000,00	18	150.000.000,00	18	150.000.000,00	18	150.000.000,00		
2.09.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00		
2.09.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	25	30	25.000.000,00	30	25.000.000,00	30	25.000.000,00	30	25.000.000,00	30	25.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)													
2.09.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00		8.500.000,00		
Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	8.500.000,00	1	8.500.000,00	1	8.500.000,00	1	8.500.000,00	1	8.500.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3		3		3		3					
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5		5		5		5					
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	6		6		6		6					
2.09.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	3	500.000,00	3	500.000,00	3	500.000,00	3	500.000,00	3	500.000,00		
2.09.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5	1.500.000,00	5	1.500.000,00	5	1.500.000,00	5	1.500.000,00	5	1.500.000,00		
2.09.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	6	1.500.000,00	6	1.500.000,00	6	1.500.000,00	6	1.500.000,00	6	1.500.000,00		
2.09.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
2.09.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.726.000.000,00		6.726.000.000,00		6.726.000.000,00		6.726.000.000,00		6.726.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	6.726.000.000,00	1	6.726.000.000,00	1	6.726.000.000,00	1	6.726.000.000,00	1	6.726.000.000,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	6	6		6		6		6					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)													
2.09.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.650.000.000,00		6.650.000.000,00		6.650.000.000,00		6.650.000.000,00		6.650.000.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	43	55	6.650.000.000,00	55	6.650.000.000,00	55	6.650.000.000,00	55	6.650.000.000,00	55	6.650.000.000,00		
2.09.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00		
2.09.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00		
2.09.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	6	6	500.000,00	6	500.000,00	6	500.000,00	6	500.000,00	6	500.000,00		
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		
Meningkatnya kapasitas pelaku distribusi pangan daerah.	Persentase pelaku distribusi yang difasilitasi (%)	0	50	20.000.000,00	50	20.000.000,00	50	25.000.000,00	50	30.000.000,00	50	35.000.000,00	2.09.3.27.0.00.01.00 00 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya fasilitasi bagi pelaku distribusi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00		
2.09.02.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik				20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00		
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		
	Angka kecukupan protein (Angka)	0	62		63		64		65		66			
2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan				115.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi														
Terlaksananya intervensi peningkatan konsumsi gizi masyarakat	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	1	1	115.000.000,00	1	115.000.000,00	1	115.000.000,00	1	115.000.000,00	1	115.000.000,00		
	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.09.03.2.04.0001 - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	1	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00		
Meningkatnya ketersediaan bahan pangan strategis	Angka ketersediaan pangan strategis (Rasio)	116	130	95.000.000,00	135	95.000.000,00	140	95.000.000,00	145	95.000.000,00	150	95.000.000,00		
2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		
Tersedianya pangan strategis	Informasi Stok Pangan (Dokumen)	1	1	95.000.000,00	1	95.000.000,00	1	95.000.000,00	1	95.000.000,00	1	95.000.000,00		
	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)		10		10		10		10		10			
2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)		10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00		
2.09.03.2.01.0008 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota (laporan)	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
2.09.03.2.01.0011 - Pemantauan Stok Pangan				55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya aksesibilitas pangan	Presentase Kelurahan yang Tahan Pangan (%)	90	90	80.000.000,00	90	80.000.000,00	90	80.000.000,00	90	80.000.000,00	90	80.000.000,00	2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya peta kerentanan dan ketahanan pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Tertanganinya kerawanan pangan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	0	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00		
	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.09.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00		
2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	0	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		
Meningkatnya keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	95	90	90.000.000,00	90	90.000.000,00	90	90.000.000,00	90	90.000.000,00	90	90.000.000,00	2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		
2.09.05.2.01.0007 - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		
Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	1	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00		

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk periode 5 (lima) tahun, disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Ketahanan Pangan dan Pertanian Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan Tahun 2025-2029.

Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara dan Rencana Pembangunan Daerah Kota Tarakan tahun 2025-2029. Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan DPA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan DPA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan pangan dan pertanian dan atau target kinerja sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang telah dijabarkan dalam Renja dan DPA Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun melalui Laporan Kinerja (LKIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan. Laporan Kinerja (LKIP) itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan di masa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan.

11. Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025–2029 merupakan amanat dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan lima tahunan sebagai acuan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan secara efektif, efisien, dan terarah.

Renstra Dinas Perikanan ini disusun sebagai bagian dari dokumen turunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025–2029, yang memuat visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah terpilih. Renstra ini menjadi pedoman dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kota Tarakan selama lima tahun ke depan, dengan fokus pada peningkatan produktivitas, keberlanjutan sumber daya, serta peningkatan daya saing.

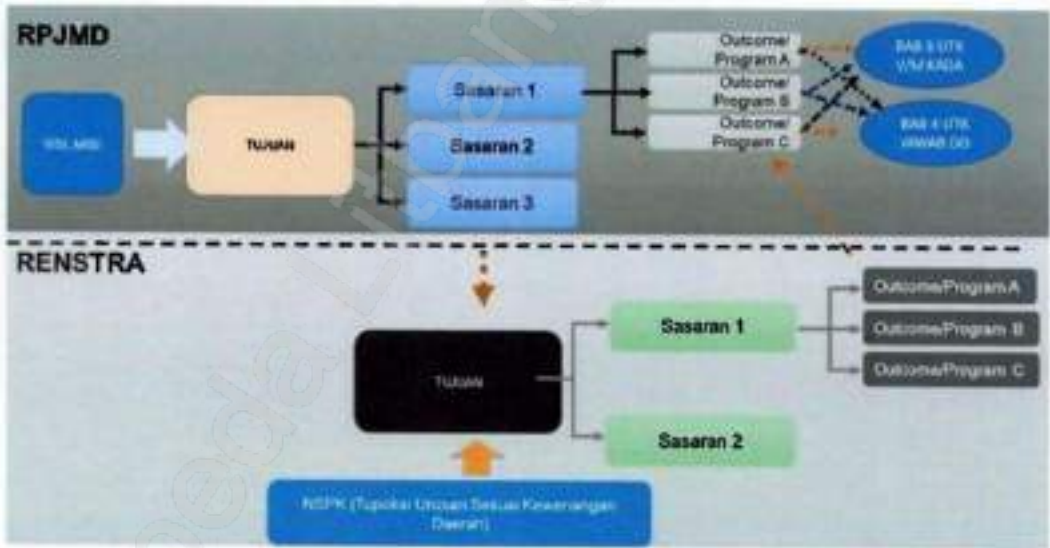
Mengikuti pendekatan perencanaan berbasis kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, penyusunan dokumen ini dilakukan dengan prinsip keterpaduan, keterukuran, dan berorientasi pada capaian hasil. Oleh karena itu, Renstra ini memuat indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja kunci (IKK), serta indikator kegiatan dan subkegiatan yang menjadi dasar dalam proses pengendalian dan evaluasi pembangunan. Selain sebagai instrumen perencanaan, Renstra ini juga berfungsi sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan tahunan, yaitu Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) perangkat daerah. Dengan demikian, Renstra menjadi jembatan antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi program secara terpadu.

Proses penyusunan Renstra dilaksanakan secara sistematis dan partisipatif, dengan mempertimbangkan kondisi aktual, tantangan strategis, serta arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan kota. Tahapan penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kota Tarakan digambarkan pada Gambar 1.1.

Kegiatan	Bulan ke-a						Keterangan (sejak pelantikan)
	B-1	B-2	B-3	B-4	B-5	B-6	
PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJMD DAN RENSTRA PD	Pembentukan Tim Penyusun RPJMD dan Renstra PD						
	Orientasi Penyusunan RPJMD dan Renstra PD						
	Penyusunan Agenda Kerja						
	Penyiapan Data dan Informasi						
PENGUSULAN DRAFT RPJMD KAB/KOTA	Pembahasan Visi dan Misi secara Telekonferensi						
	Penyusunan Rancangan						
	Konsultasi Publik						
	Penyampaian Rancangan ke DPRD						Paling lambat 40 hari
	Pembahasan dan Kesepakatan						Dibahas dalam 10 hari kerja
	Konsultasi Rancangan ke Gubernur						
	Penyusunan Rancangan						
	Musrenbang						Paling lambat 75 hari
PROSEDUR PENETAPAN RPJMD KAB/KOTA	Penyusunan Rancangan						Ditentukan dalam 5 hari kerja
	Berita Acip						Paling lambat 90 hari
	Penyampaian Rancangan kepada DPRD						
	Pembahasan dengan DPRD						
	Persetujuan Bersama						Paling lambat 40 hari sebelum penetapan RPJMD
	Evaluasi Rancangan RPJMD						Paling lambat 5 bulan
	Penetapan Perda RPJMD						Paling lambat 6 bulan (Penetapan daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 ditetapkan setelah penetapan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 atau paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik)

Gambar 1. 1 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Selanjutnya, hubungan antara dokumen RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah, serta keterkaitannya dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, dijelaskan dalam Gambar 1.2 dan Gambar 1.3.



Gambar 1. 2 Hubungan Dokumen RPJMD dengan Dokumen Renstra Perangkat Daerah

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029;
20. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan;
24. Surat Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah Dinas Perikanan.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025–2029 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan secara sistematis, terukur, dan berorientasi hasil.

b. Tujuan

Penyusunan Renstra ini bertujuan untuk:

1. Menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan sektor perikanan Kota Tarakan yang selaras dengan RPJMD dan NSPK;
2. Menyediakan arah kebijakan, strategi, dan prioritas pembangunan yang terukur dan berbasis kinerja (IKU dan IKK);

3. Mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan Renja PD dan RKA tahunan;
4. Menjadi dasar evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan perikanan berdasarkan;
5. Mendukung penguatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan kesejahteraan masyarakat perikanan di Kota Tarakan.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025–2029 disusun mengacu pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025. Secara sistematis, dokumen ini memuat lima bab utama sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan: berisi latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
- Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis: memuat deskripsi pelayanan Dinas Perikanan, termasuk tugas dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya, capaian kinerja, serta permasalahan dan isu strategis.
- Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan: menjelaskan tujuan dan sasaran pembangunan sektor perikanan beserta strategi dan arah kebijakan untuk mencapainya.
- Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan: menguraikan program dan kegiatan prioritas Dinas Perikanan beserta indikator kinerja, target, dan pagu indikatif.
- Bab V Penutup: berisi kesimpulan, kaidah pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi Renstra.

Dengan sistematika tersebut, Renstra ini diharapkan menjadi dokumen yang komprehensif dan operasional dalam mengarahkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan secara terencana, akuntabel, dan berkelanjutan di Kota Tarakan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Perikanan Kota Tarakan merupakan lembaga teknis daerah yang berperan sebagai unsur penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Tarakan melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Perikanan Kota Tarakan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kota Tarakan. Peraturan ini menjadi dasar dalam pelaksanaan berbagai program strategis guna mendukung pembangunan sektor perikanan di Kota Tarakan secara berkelanjutan.

a. Tugas

Tugas Dinas Perikanan Kota Tarakan adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan sub urusan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas perbantuan yang diberikan kepada Daerah.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugasnya Dinas Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang perikanan;
- 2) Merencanakan dan menyelenggarakan urusan perikanan dan pelayanan umum;
- 3) Pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha pembudidaya perikanan;
- 4) Pembinaan teknis operasional berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- 5) Bimbingan teknis bidang perikanan;
- 6) Pembinaan dan penyuluhan bidang perikanan;
- 7) Pelaksanaan dan pendampingan program dan kegiatan teknis berdasarkan tugas pembantuan teknis yang terkait;
- 8) Pelaksanaan dan penataan operasional Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- 9) Pelaksanaan dan penataan pengujian, penerbitan dan pembinaan serta pengawasan perizinan usaha perikanan
- 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

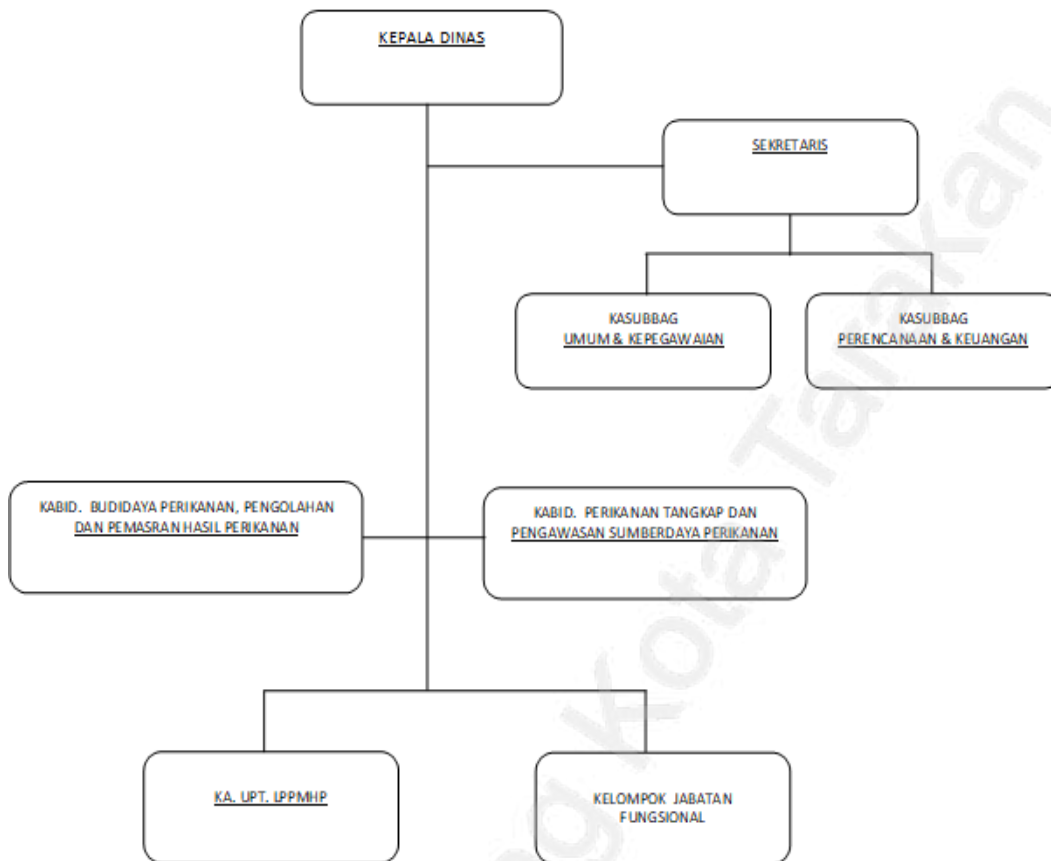
c. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kota Tarakan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Tarakan. Sementara itu, tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kota Tarakan mengacu pada Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 75 Tahun 2020 yang mengatur tentang Tugas Pokok, Fungsi, serta Tata Kerja Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Perikanan.

Struktur organisasi ini dirancang untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dalam mengembangkan serta mengelola sektor perikanan di Kota Tarakan. Adapun susunan organisasi Dinas Perikanan Kota Tarakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1). Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
- 2). Unsur Pembantu Pimpinan :
 1. Sekretariat
 2. Bidang Perikanan Budidaya Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 3. Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan
 4. Unit Pelaksana Teknis
 5. Kelompok Jabatan Fungsional
- a) Sekretariat :
 - a.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - a.2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- b) Bidang Perikanan Budidaya dan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan :
 - b.1. Seksi Pemberdayaan Usaha Budidaya
 - b.2. Seksi Produksi dan Kesehatan Ikan
 - b.3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- c) Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan :
 - c.1. Seksi Sarana dan Prasarana
 - c.2. Seksi Pelayanan Perikanan Tangkap
 - c.3. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Nelayan
 - c.3. Seksi Pengawasan Sumberdaya Perikanan

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kota Tarakan



d. Kedudukan Tugas Dan Fungsi Dinas

- 1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah
- 2) Dinas sebagaimana maksud di pimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah tanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.
- 3) Dinas sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Walikota Tarakan melaksanakan urusan pemerintah di bidang perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah.

Dinas Perikanan Kota Tarakan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Merumuskan kebijakan teknis daerah di bidang perikanan.
- 2) Merencanakan dan menyelenggarakan urusan perikanan dan pelayanan umum
- 3) Pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha pembudidayaan perikanan
- 4) Pembinaan teknis oprasional berdasarkan kebijakan yang di tetapkan oleh kepala daerah
- 5) Pembimbingan teknis bidang perikanan
- 6) Pembinaan dan penyuluhan bidang perikanan
- 7) Pelaksanaan dan pendampingan program dan kegiatan teknis berdasarkan tugas pembantuan teknis terkait
- 8) Pelaksanaan dan penataan pengujian ,penerbitan dan pembinaan serta pengawasan perizinan usaha ikan

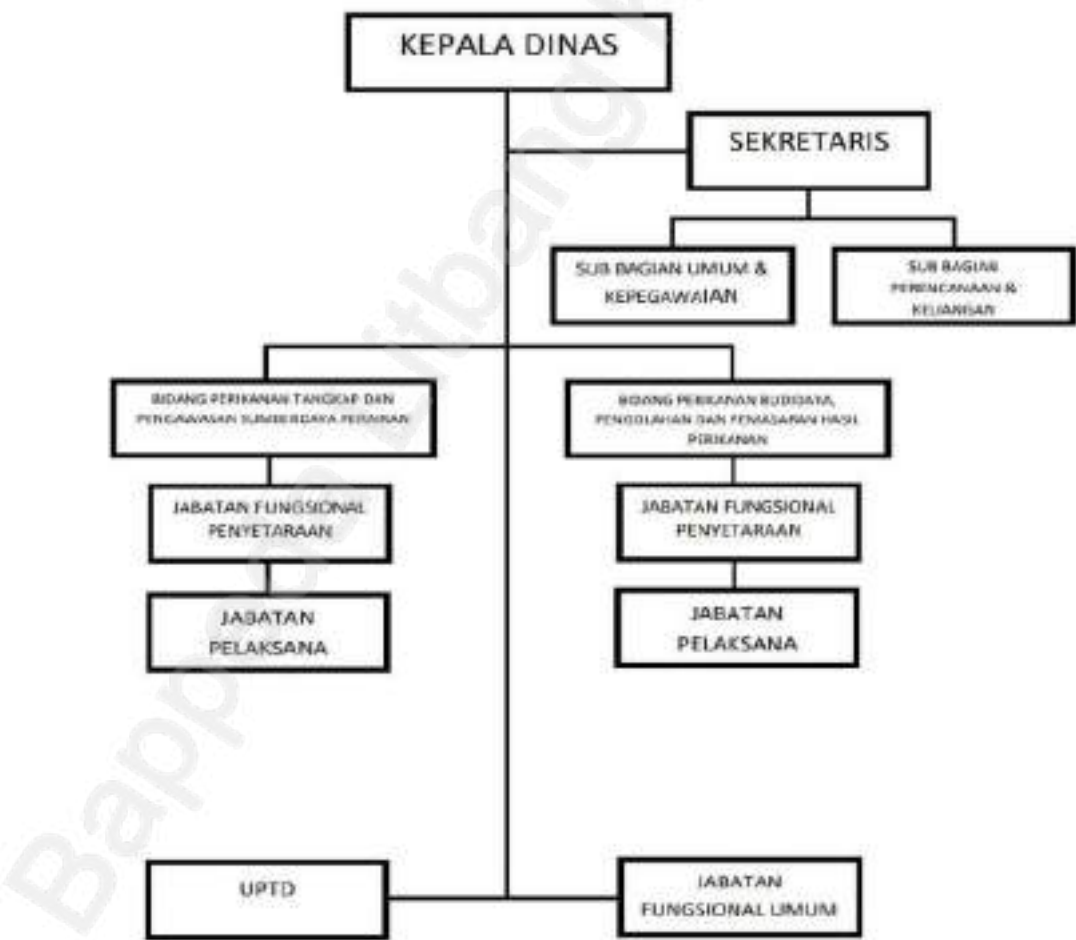
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsi
- 10) Pelaksanakan fungsi lain yang di berikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

e. Perubahan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kota Tarakan

Pada awal tahun 2023, struktur organisasi Dinas Perikanan Kota Tarakan mengalami penyesuaian seiring dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian ini mengacu pada:

- 1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah.
- 2) PermenPAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.
- 3) Surat Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 100.3.3.3/HK-VI/356/2024 tertanggal 26 Juni 2024 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

Dengan diberlakukannya regulasi tersebut, jabatan struktural eselon IV dihapus, kecuali untuk jabatan tertentu di sekretariat serta unit pelaksana teknis daerah (UPTD). Sementara itu, jabatan kepala seksi dialihkan menjadi pejabat fungsional penyetaraan. Adapun struktur organisasi yang berlaku pada Dinas Perikanan Kota Tarakan saat ini dapat dilihat pada gambar 2.2



Gambar 2.2
Struktur Organisasi Penyesuaian Dinas Perikanan Kota Tarakan

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Dinas Perikanan Kota Tarakan didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari ASN dan Non-ASN dengan berbagai latar belakang pendidikan dan jabatan. Per 31 Desember 2024, jumlah pegawai yang bertugas di Dinas Perikanan Kota Tarakan sebanyak 49 orang, yang terdiri dari 30 ASN, 19 Non-ASN daerah, dan 2 ASN pusat. Dari segi komposisi jabatan, terdapat pegawai pada jabatan struktural, fungsional, serta tenaga non-struktural yang mendukung operasional dinas.

Meskipun jumlah SDM yang tersedia cukup untuk menjalankan tugas-tugas dinas, masih terdapat tantangan dalam optimalisasi kinerja dan peningkatan kompetensi pegawai. Beberapa pegawai dari kalangan ASN dan Non-ASN daerah, masih memerlukan peningkatan motivasi dan keterampilan untuk dapat berkontribusi lebih optimal dalam penyelenggaraan layanan publik. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan SDM, termasuk pelatihan teknis, pembinaan berkala, serta mekanisme evaluasi yang lebih sistematis guna meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pegawai, Dinas Perikanan Kota Tarakan juga berencana untuk memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi pegawai yang memerlukan pendampingan lebih lanjut serta memberikan penghargaan bagi pegawai yang berprestasi. Selain itu, pendekatan pembinaan yang lebih terarah, seperti mentoring dan pelatihan berbasis kompetensi, akan diterapkan untuk meningkatkan profesionalisme dan motivasi kerja, terutama bagi tenaga Non-ASN daerah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan seluruh pegawai dapat berkontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian Kinerja Dinas Perikanan Kota Tarakan

Tabel 2. 1
Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No	Unit Kerja	Usia (Tahun)								Jumlah (Orang)
		20-25	26- 30	31- 35	36- 40	41- 45	46- 50	51- 55	56- 60	
1.	Kepala Dinas								1	1
2.	Sekretariat		3		2	2	5	1		13
3.	Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumberdaya Perairan		1		1	2	4			8
4	Bidang Perikanan Budidaya, Penolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		2		1	3	2	2		10
5.	UPTD LPMHP				1	3	2	1		7
6.	Jabatan Fungsional (Umum & Penyetaraan)			1	2		3	1		7
7.	Penyuluh Perikanan		1	1	1					3
TOTAL			7	2	8	10	16	5	1	49

Berdasarkan Tabel 2.1. struktur pegawai Dinas Perikanan Kota Tarakan saat ini didominasi oleh kelompok usia 41-45 tahun sebesar 32,65%, diikuti oleh pegawai usia 36-40 tahun (20,41%) dan 31-35 tahun (16,33%). Kelompok usia muda, yaitu di bawah 30 tahun, hanya mencapai 18,37%, menunjukkan bahwa regenerasi pegawai masih terbatas. Sementara itu, pegawai berusia 51 tahun ke atas sangat

sedikit (2,04%) dan tidak ada pegawai dalam kelompok usia 56-60 tahun, yang mengindikasikan sebagian besar pegawai pensiun sebelum mencapai usia tersebut.

Dengan komposisi ini, diperlukan strategi perencanaan sumber daya manusia yang lebih baik, terutama dalam rekrutmen pegawai muda dan transfer pengetahuan dari pegawai senior. Upaya ini penting agar keberlanjutan pelayanan dan pengelolaan sektor perikanan tetap berjalan optimal seiring dengan potensi pensiunnya pegawai dalam beberapa tahun mendatang.

Tabel 2. 2
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah (Orang)
		I	II	III	IV	
1.	Kepala Dinas				1	1
2.	Sekretariat		1	6	1	8
3.	Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumberdaya Perairan			3		3
4	Bidang Perikanan Budidaya, Penolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan			3	1	4
5.	UPTD LPMHP		1	3		4
6.	Jabatan Fungsional (Umum & Penyetaraan)		1	5	1	7
7	Penyuluh Perikanan		1	1		2
TOTAL			4	21	4	29

Struktur pegawai Dinas Perikanan Kota Tarakan pada Tabel 2.2 didominasi oleh Golongan III sebanyak 21 orang (72,41%), diikuti oleh Golongan II dengan 4 orang (13,79%), serta Golongan IV juga sebanyak 4 orang (13,79%), sementara Golongan I tidak memiliki pegawai (0%).

Mayoritas pegawai berada pada Golongan III, yang mencerminkan dominasi tenaga teknis dan fungsional dalam struktur organisasi. Sementara itu, jumlah pegawai Golongan II yang relatif kecil (13,79%) dapat menjadi perhatian dalam perencanaan SDM ke depan, terutama dalam regenerasi tenaga kerja. Tidak adanya pegawai dalam Golongan I menunjukkan bahwa rekrutmen pegawai baru langsung diarahkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Tabel 2. 3
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah (Orang)
		SD	SLTP	SMA	D3	D4/S1	S2	
1.	Kepala Dinas					1		1
2.	Sekretariat			1	1	5	1	8
3.	Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumberdaya Perairan			1	1	2		4
4	Bidang Perikanan Budidaya, Penolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				1	2		3
5.	UPTD LPMHP			1	1	2		4

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah (Orang)
		SD	SLTP	SMA	D3	D4/S1	S2	
6.	Jabatan Fungsional (Umum & Penyetaraan)				1	4	2	7
7.	Penyuluh Perikanan				1	1		2
8.	Non ASN APD		1	11		7		19
9.	Non ASN APBN					1		1
TOTAL			1	14	6	25	3	49

Berdasarkan Tabel 2.3, tingkat pendidikan, mayoritas pegawai Dinas Perikanan Kota Tarakan memiliki latar belakang D4/S1 sebanyak 25 orang (51,02%), diikuti oleh SMA sebanyak 14 orang (28,57%), dan D3 sebanyak 6 orang (12,24%). Pegawai dengan pendidikan S2 berjumlah 3 orang (6,12%), sementara SLTP hanya 1 orang (2,04%). Tidak ada pegawai dengan tingkat pendidikan SD (0%).

Dari data ini terlihat bahwa sebagian besar pegawai memiliki pendidikan tinggi (D4/S1), sedangkan jumlah pegawai dengan pendidikan SLTP sangat sedikit. Pegawai dengan tingkat pendidikan S2 merupakan jumlah yang paling sedikit setelah SLTP

Tabel 2. 4
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1.	Eselon II b	1
2.	Eselon III a	1
3.	Eselon III b	1
4.	Eselon IV a	1
5.	Eselon IV b	1
6.	Fungsional Penyetaraan	5
7.	Fungsional Tertentu	2
8.	Fungsional Penyuluh Perikanan	2
9.	Non Eselon	15
TOTAL		29

Berdasarkan jabatan Tabel 2.4, pegawai Non Eselon mendominasi dengan 15 orang (55,56%), diikuti oleh Fungsional Penyetaraan sebanyak 5 orang (18,52%). Pegawai dengan jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional Penyuluh Perikanan masing-masing berjumlah 2 orang (7,41%).

Sementara itu, pegawai dalam jabatan struktural Eselon II b, Eselon III a, dan Eselon IV b masing-masing hanya 1 orang (3,70%). Jabatan yang saat ini kosong meliputi Eselon III b (Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumberdaya Perairan), Eselon IV a (Kasubbag Umum & Kepegawaian), serta 1 posisi Fungsional Penyetaraan (Analisis Kesehatan Ikan & Lingkungan Ahli Muda).

Sementara itu, Berdasarkan jenis kelamin Tabel 2.5, pegawai laki-laki mendominasi dengan 32 orang (65,31%), sedangkan pegawai

perempuan berjumlah 17 orang (34,69%). Dari data ini terlihat bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan di Dinas Perikanan Kota Tarakan. Selanjutnya Berdasarkan jenis kelamin dalam jabatan Tabel 2.6, pegawai laki-laki berjumlah 16 orang (57,14%), sedangkan pegawai perempuan berjumlah 12 orang (42,86%).

Dari data ini terlihat bahwa pegawai laki-laki masih mendominasi dalam berbagai jabatan di Dinas Perikanan Kota Tarakan, meskipun selisihnya tidak terlalu jauh dibandingkan pegawai perempuan

Tabel 2. 5
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1.	Kepala Dinas		1	1
2.	Sekretariat	5	3	8
3.	Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumberdaya Perairan	1	3	4
4	Bidang Perikanan Budidaya, Penolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1	2	3
5.	UPTD LPMHP	3	1	4
6.	Jabatan Fungsional (Umum & Penyetaraan)	2	5	7
7.	Penyuluh Perikanan	1	1	2
8.	Non ASN APBD	3	16	19
9.	Non ASN APBN (Penyuluh Perikanan Bantu)	1		1
TOTAL		17	32	49

Tabel 2. 6
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin & Jabatan

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1.	Eselon II b		1	1
2.	Eselon III a		1	1
3.	Eselon III b		1	1
4	Eselon IV a		1	1
5.	Eselon IV b	1		1
6.	Fungsional Penyetaraan	1	4	5
7.	Fungsional Tertentu	1	1	2
8.	Fungsional Penyuluh Perikanan	1	1	2
9.	Non Eselon	8	6	14
TOTAL		12	16	28

b. Aset/Modal

Peralatan dan perlengkapan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kota Tarakan dapat dilihat pada Tabel 2.7 sebagai berikut :

Tabel 2. 7
Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis Pada Dinas Perikanan Tahun 2024

No	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1	Alat-Alat Angkutan				
a.	Kendaraan Roda 4	7	√		
b.	Kendaraan Roda 2	19	√		
2	Alat-alat Laboratorium	370	√		
3	Alat-alat Kantor dan Alat-alat Rumah Tangga				
A	Alat Kantor	116	√		
B	Meubelair	268	√		
C	Personal Komputer	15	√		
D	Laptop/Netbook/Notebook	16	√		

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kota Tarakan dilakukan berdasarkan indikator yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta mengacu pada target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, termasuk Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), Indikator Kinerja Kunci (IKK), serta target lainnya yang relevan. Penilaian capaian ini mencerminkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perikanan dalam lima tahun terakhir, dari tahun 2020 hingga 2024.

Capaian kinerja pelayanan dievaluasi melalui perbandingan antara target Renstra tahunan dan realisasi faktual yang berhasil dicapai setiap tahun. Analisis rasio capaian digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas program, sekaligus mengidentifikasi tren capaian dan potensi perbaikan ke depan. Beberapa indikator utama yang dianalisis meliputi produksi hasil perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya, kepatuhan pelaku usaha perikanan, serta volume hasil pemasaran produk perikanan.

Secara umum, data capaian menunjukkan bahwa Dinas Perikanan Kota Tarakan telah mampu melampaui sebagian besar target yang ditetapkan, khususnya dalam indikator perikanan tangkap dan pengolahan-pemasaran hasil perikanan. Hal ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan program, meskipun masih terdapat beberapa fluktuasi pada capaian subsektor budidaya yang memerlukan penguatan kelembagaan dan sarana produksi.

Informasi selengkapnya mengenai kinerja pelayanan perangkat daerah selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.8. Berdasarkan Tabel 2.8, dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kota Tarakan dalam periode 2020–2024 secara umum menunjukkan tren capaian yang cukup baik, meskipun masih terdapat variasi antar indikator.

Untuk indikator Produksi Hasil Perikanan Tangkap, capaian realisasi selalu melebihi target pertumbuhan 4% per tahun. Tahun 2021 mencatat lonjakan signifikan sebesar 150,3% dari target, dan capaian tahun 2024 menunjukkan rasio realisasi sebesar 133%. Hal ini mencerminkan peningkatan produktivitas nelayan di lapangan, yang antara lain didukung oleh bantuan sarana tangkap, pembinaan kelompok nelayan kecil, serta pendataan hasil produksi yang lebih akurat dan terintegrasi.

Sementara itu, pada indikator Produksi Perikanan Budidaya, kinerja menunjukkan fluktuasi. Tahun 2021 masih mencatat pencapaian di atas

target sebesar 108,7%, namun mulai menurun pada 2022 hingga 2024, dengan rasio capaian di tahun terakhir sebesar 94,6%. Penurunan ini menunjukkan bahwa pengelolaan subsektor budidaya menghadapi tantangan, seperti keterbatasan akses benih dan pakan, fluktuasi harga pasar (terutama udang dan rumput laut), serta dampak kualitas lingkungan yang belum optimal. Kondisi ini menjadi perhatian dalam strategi Renstra ke depan, terutama dalam hal penguatan kelembagaan dan peningkatan dukungan sarana produksi budidaya.

Pada indikator Kepatuhan Pelaku Usaha, capaian menunjukkan hasil yang sangat positif dan konsisten, dengan rasio pencapaian 100% selama empat tahun berturut-turut dan meningkat menjadi 208% di tahun 2024. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam peningkatan pengawasan dan pembinaan pelaku usaha kecil di sektor perikanan, termasuk penerapan pelaporan usaha dan fasilitasi legalitas kegiatan mikro perikanan sesuai kewenangan daerah.

Terakhir, Produksi Pemasaran Hasil Perikanan mengalami peningkatan yang cukup progresif. Realisasi di tahun 2024 mencapai 35.866 ton, jauh di atas target sebesar 17.233 ton, dengan rasio capaian sebesar 177%. Kinerja ini mengindikasikan bahwa penguatan jaringan pemasaran, pendampingan UMKM pengolah hasil perikanan, serta fasilitasi sarana pasca panen (seperti cold storage dan promosi produk) sudah mulai menunjukkan hasil nyata. Lonjakan ini juga dipengaruhi oleh peningkatan kapasitas pelaku usaha pengolahan dan ketersediaan pasar lokal yang lebih stabil.

Secara keseluruhan, Dinas Perikanan Kota Tarakan telah menunjukkan capaian kinerja yang baik dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah melalui sektor perikanan. Namun demikian, tantangan seperti kestabilan harga komoditas, akses subsidi dan teknologi, serta kapasitas kelembagaan pelaku utama masih perlu diperkuat pada periode perencanaan lima tahun ke depan (2025–2029).

Gambar 2.3 adalah visualisasi tren rasio capaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kota Tarakan selama tahun 2020 hingga 2024 untuk empat indikator utama. Grafik ini memperlihatkan:

- Produksi perikanan tangkap menunjukkan tren fluktuatif namun positif, terutama capaian tinggi di tahun 2021 dan konsisten membaik hingga 2024.
- Produksi perikanan budidaya mengalami puncak capaian pada 2021 dan menurun pada 2024, meski tetap berada di atas baseline.
- Kepatuhan pelaku usaha konsisten di angka 100% hingga 2023 dan melonjak signifikan pada 2024.
- Produksi pemasaran hasil perikanan menunjukkan tren naik stabil dan tajam pada 2024.

Tabel 2. 8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kota Tarakan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Produksi Hasil Perikanan Tangkap		4%		13.441	13.978	14.537	15.118	15.722	13.441	21.024	16.939	17.252	20.917	100%	150,3%	116,5%	114,%	133%
2	Produksi Perikanan Budidaya		5%		185.732	195.018	204.768	215.006	225.756	185.732	211.861	201.727	22.1125	21.345	100%	108,7%	98,51%	102%	94,6%
3	Kepatuhan Pelaku Usaha		5%		5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	8,86%	100%	100%	100%	100%	177%
4	Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		2%		16.081	16.241	16.484	16.813	17.233	16.081	17.358	17.621	17.826	35.866	100%	106,9%	106,9%	106%	208%



Gambar 2. 3
Tren Rasio Capaian Pelayanan Dinas Perikanan Kota Tarakan (2020-2024)

Secara paralel, kinerja pelayanan juga tercermin dari tingkat realisasi anggaran yang digunakan untuk mendukung program-program strategis (Tabel 2.9). Selama kurun waktu 2021 hingga 2024, belanja perangkat daerah cenderung mengalami peningkatan baik dari sisi jumlah maupun efektivitas penggunaannya. Realisasi belanja pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp5,7 miliar, meningkat menjadi Rp14,1 miliar pada tahun 2024. Komposisi belanja paling dominan berasal dari belanja operasi, khususnya pada komponen belanja pegawai dan belanja hibah.

Belanja pegawai secara konsisten menjadi pengeluaran terbesar setiap tahun, menunjukkan keberlangsungan layanan publik yang bergantung pada kapasitas SDM internal. Namun demikian, peningkatan yang paling signifikan terjadi pada belanja hibah dan belanja barang dan jasa, yang mengindikasikan semakin besarnya intervensi langsung pemerintah daerah dalam mendorong produktivitas masyarakat pelaku utama sektor perikanan. Belanja barang dan jasa yang meningkat tajam dari tahun 2022 ke 2024 sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pelatihan, fasilitasi pemasaran, serta penyediaan sarana produksi dan pengolahan. Sementara itu, belanja modal seperti pengadaan peralatan dan mesin juga turut memberikan kontribusi dalam mendukung peningkatan efisiensi usaha perikanan skala kecil.

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran tersebut menunjukkan adanya hubungan yang sinergis antara pelaksanaan kegiatan dengan hasil yang diperoleh. Dinas Perikanan Kota Tarakan telah menunjukkan kemampuan dalam mengelola program prioritas secara terukur dan berorientasi pada hasil, serta menjawab kebutuhan masyarakat nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pemasar hasil perikanan secara nyata dan berkelanjutan.

Tabel 2. 9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kota Tarakan

Uraian	Anggaran Pada Tahun				Realisai Anggaran Tahun			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Asli Daerah	Rp.60.000.000	Rp.200.000.000	Rp.13.000.000	Rp. 10.000.000	Rp. 85.630.000,00	Rp. 89.285.000,00	Rp.9.245.000	Rp. 17.085.000
BELANJA	Rp.6.141.719.986	Rp.9.483.966.510	Rp.7.601.717.224	Rp.14.849.142.703	Rp.5.746.046.036	Rp. 8.949.282.929	Rp.5.788.076.105	Rp. 14.135.244.059
BELANJA OPERASI	Rp.5.516.131.555	Rp.9.240.702.390	Rp.7.425.013.377	Rp.14.369.022.149	Rp.5.222.473.526	Rp. 8.722.685.309	Rp.5.697.076.105	Rp.13.671.915.919
Belanja Pegawai	Rp.3.960.140.444	Rp.4.084.444.280	Rp.4.156.877.166	Rp.4.446.555.375	Rp.3.830.936.131	Rp.3.846.865.862	Rp.3.592.238.169	Rp.4.165.552.731
Belanja Barang dan Jasa	Rp.675.865.111	Rp.654.948.310	Rp.1.513.337.611	Rp.2.635.983.274	Rp.518.321.895	Rp.581.021.510	Rp.1050.197.936	Rp.2.316.227.741
Belanja Hibah	Rp.880.126.000	Rp.4.501.309.800	Rp.1.754.798.600	Rp.7.286.483.500	Rp.873.215.500	Rp.4.294.797.937	Rp.1.054.640.000	Rp.7.190.135.447
BELANJA MODAL	Rp.625.588.431	Rp.243.264.120	Rp.176.703.847	Rp.480.120.554	Rp.523.572.510	Rp.226.597.620	Rp.91.000000	\Rp.463.328.140
Belanja Peralatan dan Mesin	Rp.105.709.650	Rp. 91.033.460	Rp.176.703.847	Rp.430.120.554	Rp.103.707.510	Rp.86.071.620	Rp.91.000.000	Rp.415.528.140
Belanja Bangunan dan Gedung	Rp.302.665.000	Rp.152.230.660			Rp.202.665.000	Rp.140.526.000		
Belanja Jalan, Irigsi dan Jaringan	Rp.217.213.781				Rp.217.200.00			

Sumber: Laporan Keuangan Dinas Perikanan

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Perikanan Kota Tarakan merupakan pihak-pihak utama yang secara langsung menerima manfaat dari pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. Penentuan kelompok sasaran layanan ini penting sebagai dasar dalam merancang program, kegiatan, serta subkegiatan yang tepat sasaran, efisien, dan berdampak nyata.

Kelompok sasaran layanan Dinas Perikanan Kota Tarakan meliputi:

- Nelayan tangkap tradisional, baik individu maupun dalam bentuk kelompok usaha bersama (KUB), yang membutuhkan dukungan dalam bentuk bantuan sarana tangkap, pelatihan, akses permodalan, dan penguatan kelembagaan.
- Pembudidaya ikan skala kecil, yang membutuhkan akses terhadap benih, pakan, teknologi budidaya, pengendalian penyakit ikan, serta pelatihan peningkatan kapasitas produksi dan mutu hasil.
- Pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala kecil, termasuk kelompok pengolah dan pemasar (Poklahsar) berbasis hasil laut, yang menjadi target fasilitasi dalam hal standardisasi mutu, pemasaran, sertifikasi, dan pengembangan jejaring pasar.
- Masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, yang membutuhkan intervensi program pemberdayaan berbasis sumber daya lokal untuk menjaga ketahanan ekonomi dan ekosistem pesisir.
- Lembaga pendidikan dan pelatihan kejuruan bidang kelautan dan perikanan, sebagai mitra strategis dalam penyediaan tenaga kerja yang kompeten dan mendukung regenerasi SDM perikanan.
- Organisasi profesi, kelompok masyarakat, dan LSM, yang aktif dalam bidang konservasi, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat pesisir, sebagai mitra kolaboratif dalam penguatan pengelolaan sumber daya perikanan yang partisipatif.
- Pemangku kepentingan internal Pemerintah Daerah, seperti Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, dan lainnya, yang menjadi mitra dalam perencanaan terpadu lintas sektor pembangunan daerah.

Identifikasi kelompok sasaran ini menjadi landasan penting dalam proses perumusan arah kebijakan, strategi, serta penyusunan indikator kinerja program dan kegiatan, agar pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Perikanan dapat menjawab kebutuhan nyata dan menghasilkan dampak signifikan bagi pembangunan daerah, khususnya di wilayah pesisir dan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan

2.1.5. Mitra Kerja Perangkat Daerah dalam Memberikan Layanan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan jangkauan pelayanan publik, Dinas Perikanan Kota Tarakan membangun kerja sama strategis dengan berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, maupun media. Kemitraan ini diarahkan untuk mendukung pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, peningkatan produksi, pengolahan, distribusi, hingga promosi hasil perikanan.

Pendekatan kolaboratif ini memungkinkan sinergi program dan optimalisasi sumber daya, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat lebih cepat, tepat sasaran, dan berdaya guna.

Mitra perangkat daerah dan instansi/lembaga terkait yang berperan dalam mendukung kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel 2.10.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam rangka menjamin ketepatan perencanaan dan efektivitas penyusunan program serta kegiatan, diperlukan identifikasi secara cermat terhadap permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perikanan Kota Tarakan. Permasalahan dan isu strategis ini dianalisis berdasarkan capaian kinerja pelayanan, tantangan aktual, serta perubahan lingkungan strategis, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional.

Tabel 2.10
Mitra Perangkat Daerah dan Dukungan Kinerja

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
1	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)	Bantuan sarana dan prasarana perikanan	Meningkatkan ketersediaan sarana tangkap, budidaya, dan pengolahan
2	Balai Karantina Ikan Tarakan	Data ekspor/impor hasil perikanan dan pengawasan kesehatan ikan	Tersedianya data dan jaminan mutu hasil perikanan
3	Dinas Perhubungan Kota Tarakan	Pengaturan lalu lintas kapal dan pelabuhan perikanan	Kelancaran distribusi hasil tangkap dan budidaya
4	Kepolisian & TNI AL	Patroli pengawasan sumber daya kelautan	Menjaga keamanan dan ketertiban kegiatan perikanan
5	Dinas Lingkungan Hidup	Pengawasan pencemaran laut dan pesisir	Perlindungan ekosistem dan kualitas lingkungan perairan
6	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Hilirisasi, promosi, dan akses pasar	Peningkatan daya saing produk perikanan
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan infrastruktur pendukung perikanan	Dermaga, jalan akses, dan fasilitas pendukung lainnya
8	Universitas Borneo Tarakan	Riset dan pendampingan teknologi perikanan	Inovasi dan peningkatan kapasitas SDM perikanan
9	Bappeda Kota Tarakan	Sinkronisasi program dan perencanaan	Integrasi program perikanan dalam dokumen perencanaan daerah
10	Media lokal (cetak dan elektronik)	Publikasi kegiatan dan informasi perikanan	Meningkatkan transparansi dan literasi masyarakat

Permasalahan diartikan sebagai kesenjangan antara kondisi eksisting (realita/capaian saat ini) dengan kondisi ideal yang seharusnya dicapai sesuai standar pelayanan minimal, norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), serta target pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD. Sementara itu, isu strategis merujuk pada hal-hal pokok dan bersifat kritis yang berpotensi memberi dampak signifikan terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam jangka pendek maupun panjang.

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan Dinas Perikanan Kota Tarakan merupakan kesenjangan antara capaian aktual dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Permasalahan ini muncul dari hasil evaluasi capaian kinerja 2024 serta kajian potensi dan tantangan sektoral yang dihadapi oleh nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha perikanan.

Produksi sektor perikanan di Kota Tarakan menunjukkan capaian yang fluktuatif dan belum sepenuhnya konsisten dengan target Renstra. Meskipun terdapat peningkatan pada produksi perikanan tangkap—dari 13.441 ton di 2020 menjadi 20.917 ton di 2024 (133,04% dari target)—namun pada perikanan budidaya justru terjadi penurunan capaian, dari 108,68% (2021) menjadi hanya 94,55% (2024). Capaian produksi pengolahan dan pemasaran perikanan bahkan mengalami lonjakan yang tidak proporsional di tahun 2024 (208,12%), yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara produksi hulu dan hilir, serta kemungkinan kurang akuratnya target awal. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun target secara kuantitatif tercapai, secara substansi dan kesinambungan masih menghadapi berbagai persoalan struktural di lapangan.

Permasalahan utama yang mendasari rendahnya stabilitas produksi meliputi terbatasnya infrastruktur perikanan, akses permodalan yang belum memadai, serta distribusi BBM bersubsidi yang tidak merata. Selain itu, minimnya pelatihan dan pendampingan teknis kepada pelaku usaha, baik dalam budidaya maupun pengolahan, berdampak pada rendahnya produktivitas dan daya saing. Fluktuasi harga yang tinggi, serta tingginya biaya produksi, memperburuk kepastian usaha. Di sisi kelembagaan, kapasitas kelompok nelayan dan pembudidaya masih terbatas, sehingga tidak mampu menjalankan fungsi ekonomi dan tata kelola secara mandiri. Pengawasan terhadap kegiatan budidaya dan pengolahan, termasuk UPI skala kecil, juga belum optimal dalam aspek mutu, legalitas, dan keamanan pangan.

Dari aspek tata kelola internal perangkat daerah, nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perikanan Kota Tarakan dalam 4 tahun terakhir mengalami tren yang kurang stabil. Setelah bertahan pada predikat “B” di 2021 dan 2022, capaian turun menjadi “CC” di 2023 sebelum kembali ke “B” di 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya permasalahan sistemik dalam manajemen kinerja, khususnya terkait efektivitas sistem pengawasan, monitoring, dan evaluasi internal, serta rendahnya kompetensi dan motivasi SDM berbasis kinerja. Oleh karena itu, selain intervensi sektoral perikanan, perbaikan tata kelola internal perangkat daerah juga menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh.

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi, tantangan, atau permasalahan utama yang diperkirakan akan memberikan pengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam jangka menengah. Identifikasi isu strategis sangat penting untuk memastikan bahwa arah kebijakan dan prioritas pembangunan perangkat daerah selaras dengan dinamika eksternal maupun kebutuhan lokal, serta mampu menjawab tantangan yang berkembang di masa mendatang.

Penentuan isu strategis Dinas Perikanan Kota Tarakan dilakukan melalui analisis terhadap potensi dan permasalahan sektoral, hasil evaluasi capaian kinerja lima tahun terakhir, serta keterkaitan dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional, provinsi, dan kota. Secara khusus, penajaman isu strategis juga merujuk pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, RPJMD Provinsi Kalimantan Utara, serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menjadi bagian integral dalam perencanaan pembangunan daerah. Isu-isu strategis yang diidentifikasi kemudian dikelompokkan berdasarkan lingkupnya, yaitu isu global, nasional, regional, dan lokal.

Tabel 2.11
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Perikanan Kota Tarakan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya kontribusi Sektor Perikanan	Rendahnya Produksi sektor Perikanan	Terbatasnya infrastruktur perikanan
		Akses permodalan dan investasi masih terbatas
		Minimnya Pelatihan Keterampilan bagi pelaku usaha Perikanan
		Distribusi dan ketersediaan BBM bersubsidi tidak merata
		Fluktuasi harga hasil perikanan
		Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan
		Kurangnya program pelatihan dan pendampingan
		Terbatasnya kapasitas kelembagaan kelompok
		Tingginya biaya produksi perikanan
	Rendahnya Nilai akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah	Kurangnya Sistem Pengawasan dan Evaluasi yang Efektif
		Kompetensi dan Motivasi SDM berbasis kompetensi yang Kurang Optimal

2.2.2.1. Isu Global

Isu global merupakan dinamika lintas negara yang dapat memengaruhi kebijakan dan kondisi daerah secara langsung maupun tidak langsung. Perubahan yang terjadi dalam skala global seperti krisis iklim, instabilitas ekonomi dunia, pandemi, transformasi teknologi, hingga pengetatan standar perdagangan internasional, turut berdampak terhadap pembangunan sektor perikanan di tingkat lokal, termasuk Kota Tarakan. Oleh karena itu, Dalam merespons isu-isu strategis global, Dinas Perikanan Kota Tarakan perlu merancang kebijakan yang adaptif, terukur, dan selaras dengan kebijakan provinsi dan nasional.

Salah satu tantangan utama adalah perubahan iklim, yang menyebabkan anomali cuaca, gelombang tinggi, naiknya muka laut, serta degradasi habitat perairan seperti mangrove dan terumbu karang. Fenomena ini berpotensi mengganggu produktivitas perikanan tangkap dan budidaya. Selain itu, gejolak ekonomi global berdampak pada ketidakstabilan harga komoditas, fluktuasi permintaan ekspor perikanan, dan menurunnya daya beli masyarakat pesisir. Kondisi tersebut menuntut Dinas Perikanan untuk memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha lokal melalui diversifikasi produk dan pasar, serta penguatan kelembagaan ekonomi rakyat.

Isu strategis lain yang perlu diantisipasi adalah kemajuan teknologi digital, yang mendorong penggunaan sistem informasi dan otomasi dalam pengelolaan perikanan. Meskipun membawa peluang efisiensi, hal ini juga memerlukan kesiapan SDM dan infrastruktur. Selain itu, standar mutu internasional yang semakin ketat, termasuk tuntutan akan sertifikasi keamanan pangan dan traceability produk, menuntut peningkatan kapasitas Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala kecil. Dalam konteks keberlanjutan, agenda global seperti SDGs, transisi energi bersih, dan ekonomi rendah karbon juga mendorong sektor perikanan untuk lebih ramah lingkungan. Dinas Perikanan Kota Tarakan perlu mulai mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam kebijakan dan program, termasuk melalui upaya rehabilitasi mangrove, promosi

konsumsi ikan bergizi, dan dukungan terhadap penggunaan energi yang efisien di sektor perikanan.

2.2.2.2. Telaah Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmonisasi pembangunan antara pusat, provinsi, dan daerah, Dinas Perikanan Kota Tarakan melakukan telaah terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Telaah ini bertujuan untuk menyelaraskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan sektor perikanan Kota Tarakan dengan sasaran strategis nasional, sekaligus memperkuat sinergi program dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Isu-isu strategis dalam Renstra KKP merupakan bagian dari agenda nasional yang tercermin dalam *Asta Cita Presiden*, dan apabila diadopsi secara tepat akan mendukung tercapainya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing tinggi di tingkat lokal.

Salah satu pilar penting yang perlu diadopsi oleh Dinas Perikanan Kota Tarakan adalah pendekatan ekonomi biru (blue economy), yaitu pembangunan sektor perikanan yang mengedepankan produktivitas ekonomi dengan tetap menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan pesisir. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan nasional yang menempatkan ekonomi biru sebagai kerangka utama dalam pengembangan industri perikanan, khususnya melalui peningkatan nilai tambah produk perikanan, pemanfaatan sumber daya secara efisien, konservasi sumber daya pesisir, dan transformasi digital sektor kelautan dan perikanan.

Beberapa isu strategis dalam Renstra KKP yang relevan dan harus diselaraskan dengan konteks Kota Tarakan meliputi:

1. Pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan (*Asta Cita 5*), melalui konservasi, restocking, dan praktik budidaya ramah lingkungan.
2. Peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha kecil (*Asta Cita 6*), melalui pemberdayaan ekonomi lokal dan penguatan kelembagaan usaha.
3. Pengembangan industri perikanan berbasis ekonomi biru dan peningkatan nilai tambah produk (*Asta Cita 7*), dengan mendukung hilirisasi hasil tangkapan, industrialisasi rumput laut, dan penguatan UPI skala kecil.
4. Penguatan sistem logistik dan tata niaga hasil perikanan (*Asta Cita 6*), untuk efisiensi distribusi dan stabilisasi harga.
5. Perlindungan kawasan pesisir dari degradasi dan alih fungsi lahan (*Asta Cita 5*), termasuk pengelolaan ruang pesisir secara terpadu.
6. Transformasi digital dan inovasi teknologi perikanan (*Asta Cita 1 dan 3*), untuk meningkatkan efisiensi produksi dan pengelolaan data usaha.
7. Penguatan ketahanan pangan berbasis ikan (*Asta Cita 2*), melalui promosi konsumsi ikan, edukasi gizi, dan program GEMARIKAN.
8. Peningkatan tata kelola dan pengawasan usaha perikanan (*Asta Cita 4*), untuk memastikan kepatuhan, mutu, dan keberlanjutan usaha perikanan.

Dengan mengintegrasikan pendekatan ekonomi biru ke dalam perencanaan daerah, Dinas Perikanan Kota Tarakan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sektor perikanan yang tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan

dan ketahanan pangan daerah. Sinkronisasi ini menjadi dasar penting bagi perumusan program dan kegiatan strategis dinas yang responsif terhadap dinamika global, nasional, dan kebutuhan lokal.

2.2.2.3. Telaah Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

RPJMD Periode 2025–2029

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD merupakan dokumen yang memberikan arahan pembangunan berkelanjutan melalui identifikasi isu-isu strategis di bidang lingkungan, sosial, dan ekonomi. KLHS bertujuan memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip keberlanjutan serta sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Dalam konteks ini, penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kota Tarakan perlu mengacu pada isu-isu utama yang diidentifikasi dalam KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Utara, guna menjamin integrasi lintas dokumen dan arah kebijakan yang konsisten secara vertikal.

Beberapa isu strategis lingkungan yang relevan dengan urusan perikanan dan harus menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan sektor perikanan di Kota Tarakan antara lain:

1. Ancaman IUU (Illegal, Unreported, and Unregulated) Fishing yang berdampak pada keberlanjutan stok ikan, meskipun penanganannya berada di tingkat provinsi/pusat. Pemerintah kota tetap perlu mendukung pengawasan usaha budidaya dan pengolahan agar berizin, legal, dan ramah lingkungan.
 2. Budidaya perikanan di luar kawasan yang ditetapkan, seperti rumput laut atau tambak di zona tidak sesuai peruntukan, menimbulkan tekanan ekologis dan sosial. Hal ini perlu direspon melalui penataan ruang pesisir yang lebih baik di tingkat kota.
 3. Kerusakan ekosistem mangrove yang terjadi akibat konversi lahan dan aktivitas perikanan yang tidak terkendali. Kota Tarakan sebagai daerah pesisir perlu memperkuat program restorasi dan perlindungan kawasan mangrove.
 4. Pencemaran perairan pesisir akibat limbah domestik dan kegiatan usaha, yang memengaruhi kualitas air dan hasil perikanan budidaya. Hal ini menuntut penguatan pengawasan dan edukasi pelaku usaha agar menerapkan prinsip kelestarian.
 5. Pemanfaatan sumber daya perikanan yang belum ramah lingkungan, termasuk praktik budidaya dan pengolahan yang belum mempertimbangkan daya dukung ekosistem. Pendekatan ekonomi biru dan berbasis ekosistem menjadi penting untuk diarusutamakan.
- Selain itu, isu lainnya yang berkaitan langsung dengan efektivitas program perangkat daerah antara lain:

1. Belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan, seperti rendahnya nilai tambah hasil perikanan, minimnya teknologi tepat guna, serta terbatasnya akses pasar bagi pelaku usaha kecil. Ini menuntut peran aktif Dinas Perikanan Kota dalam peningkatan kapasitas dan fasilitasi pasar.
2. Ancaman terhadap habitat spesies laut kritis, meskipun sebagian besar terjadi di wilayah provinsi, tetap perlu direspons dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi dan pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan.
3. Belum optimalnya implementasi kebijakan ekologis, termasuk lemahnya penerapan regulasi teknis di bidang budidaya, pengolahan hasil, dan pengawasan kualitas lingkungan, yang dapat diatasi

melalui peningkatan tata kelola, pelatihan, dan sistem pengawasan terpadu di tingkat kota.

Dengan mengintegrasikan isu-isu dalam KLHS ke dalam dokumen Renstra, Dinas Perikanan Kota Tarakan diharapkan mampu menyusun kebijakan dan program yang tidak hanya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan, tetapi juga mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya TPB 14: Ekosistem Lautan, TPB 12: Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan, serta TPB 13: Penanganan Perubahan Iklim. Pendekatan pembangunan berkelanjutan ini penting untuk menjamin keberlanjutan sumber daya perikanan Kota Tarakan bagi generasi mendatang.

2.2.2.4. Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara

RPJMD Provinsi Kalimantan Utara merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah tingkat provinsi selama lima tahun. Dalam konteks sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, identifikasi isu strategis daerah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi menjadi dasar penting bagi perangkat daerah di tingkat kota, termasuk Dinas Perikanan Kota Tarakan, dalam merumuskan kebijakan dan program strategis. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan di daerah berjalan searah dan saling mendukung, serta berkontribusi terhadap pencapaian visi pembangunan daerah secara menyeluruh.

Beberapa isu strategis Provinsi Kalimantan Utara yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kota Tarakan antara lain:

1. Transformasi menuju ekonomi hijau dan ekonomi biru, yang mendorong pengelolaan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan pesisir. Kota Tarakan sebagai daerah kepulauan di perbatasan memiliki posisi strategis untuk mengembangkan ekonomi biru berbasis usaha perikanan tangkap, budidaya ramah lingkungan, dan pengolahan hasil yang efisien.
2. Peningkatan produktivitas ekonomi daerah yang inklusif dan bernilai tambah, termasuk melalui hilirisasi produk perikanan dan diversifikasi usaha. Kota Tarakan perlu memperkuat pelaku usaha kecil dan menengah dalam sektor pengolahan hasil perikanan agar mampu menghasilkan produk yang kompetitif dan berorientasi pasar.
3. Pemerataan konektivitas dan akses terhadap layanan dasar, termasuk distribusi hasil perikanan dan akses ke sarana produksi, infrastruktur pelabuhan perikanan, serta logistik dingin (cold chain) yang memadai.
4. Tata kelola pemerintahan dan pengelolaan wilayah perbatasan yang efektif, mengingat sebagian wilayah pesisir Kota Tarakan berhadapan langsung dengan kawasan perbatasan laut. Hal ini menuntut peningkatan pengawasan kegiatan usaha perikanan dan penguatan koordinasi kelembagaan lintas wilayah.
5. Penguatan kualitas SDM dan pemberdayaan masyarakat pesisir, melalui peningkatan kapasitas nelayan, pembudidaya, dan pelaku UPI kecil agar mampu menerapkan teknologi perikanan yang berkelanjutan, sekaligus membangun kelembagaan ekonomi lokal yang mandiri dan adaptif.

Dengan mengintegrasikan isu-isu strategis tersebut ke dalam dokumen Renstra Dinas Perikanan Kota Tarakan, maka arah kebijakan dinas akan semakin selaras dengan visi dan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Utara 2025–2029. Integrasi ini juga menjadi landasan penting dalam mendorong pembangunan sektor perikanan yang berdaya saing, inklusif, dan berbasis keberlanjutan, sejalan dengan prinsip pembangunan rendah emisi, berkeadilan sosial, dan berwawasan lingkungan.

2.2.2.5 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan terpilih menjadi acuan utama dalam perencanaan pembangunan daerah jangka menengah, termasuk dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Visi pembangunan Kota Tarakan Tahun 2025–2029 dirumuskan sebagai berikut:

“Tarakan Kota Jasa, Perdagangan, Perikanan Kelautan, dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Maju menuju Masyarakat Sejahtera.”

Visi ini menegaskan bahwa sektor perikanan dan kelautan merupakan salah satu sektor prioritas pembangunan daerah, bersama dengan jasa, perdagangan, dan ekonomi kreatif. Empat arah pembangunan yang terkandung dalam visi tersebut meliputi:

1. Pusat Jasa, Perdagangan, Perikanan, Kelautan, dan Ekonomi Kreatif
Kota Tarakan diarahkan menjadi simpul utama layanan sektor jasa yang berkualitas, penguatan industri dan perdagangan hasil perikanan, serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis sumber daya pesisir dan kelautan.
2. Berdaya Saing
Pengembangan kapasitas SDM, kelembagaan, dan inovasi diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah dalam menghadapi tantangan global dan regional.
3. Maju
Percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan yang berkualitas.
4. Sejahtera
Peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui perluasan akses terhadap layanan dasar dan pemerataan pendapatan masyarakat.

Salah satu misi kepala daerah yang relevan langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kota Tarakan adalah:

“Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui dukungan kemudahan berusaha yang berkeadilan.”

Dalam kerangka misi tersebut, Dinas Perikanan memegang peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, yakni:

“Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian daerah.”

Sasaran pembangunan yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah:

“Meningkatnya produksi sektor perikanan,”
yang kemudian dijabarkan dalam tujuan strategis Dinas Perikanan:

“Meningkatkan produksi sektor perikanan.”

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, program dan kegiatan Dinas Perikanan Kota Tarakan akan difokuskan pada:

- Peningkatan kapasitas dan produktivitas pelaku utama perikanan (nelayan kecil, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan),
- Penguatan kelembagaan dan akses pasar, serta
- Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya perikanan secara berkelanjutan.

Pendekatan ini sejalan dengan misi pembangunan daerah yang menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, serta penguatan sektor perikanan sebagai penggerak utama ekonomi lokal berbasis wilayah pesisir dan laut.

2.2.2.6. Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu strategis merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan strategis perangkat daerah. Isu strategis mencerminkan tantangan nyata dan kompleks yang dihadapi, baik dari faktor internal maupun eksternal, serta berdampak signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan sektor perikanan. Isu-isu ini ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan, potensi lokal yang menjadi kewenangan Dinas Perikanan Kota Tarakan, serta relevansinya terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dinamika lingkungan global, nasional, dan regional.

Meskipun kewenangan utama Dinas Perikanan Kota Tarakan secara normatif terbatas pada pengelolaan perairan umum daratan (PUD), namun pelaksanaan kewenangan pemberdayaan nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, serta pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala mikro dan kecil tetap menjadi fokus utama. Hal ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa sebagian besar masyarakat pesisir Kota Tarakan bermata pencaharian sebagai nelayan dan pembudidaya, meskipun aktivitasnya dilakukan di perairan laut sekitar Tarakan yang secara yuridis bukan menjadi kewenangan langsung pemerintah kota.

Di sisi lain, isu-isu penting seperti fluktuasi harga hasil perikanan budidaya (terutama udang dan rumput laut), kesulitan akses BBM bersubsidi bagi nelayan kecil, hingga lemahnya kelembagaan dan SDM pelaku usaha skala kecil juga menjadi perhatian dalam penyusunan strategi pembangunan sektor perikanan ke depan. Rangkuman secara final isu-isu strategis Dinas Perikanan Kota Tarakan dalam lima tahun ke depan dapat dilihat pada table 2.12.

Tabel 2.12
Isu Strategis Dinas Perikanan Kota Tarakan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Perikanan tangkap oleh nelayan kecil (berdomisili di Tarakan)	Rendahnya kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah	- Penangkapan berlebih - Budidaya tidak sesuai zonasi	Perubahan iklim, ketahanan pangan	Transformasi ekonomi biru	Restocking & konservasi ekosistem	Peningkatan kontribusi sektor perikanan melalui produksi berkelanjutan dan ekonomi biru
Perikanan budidaya (rumput laut dan udang)	Fluktuasi harga hasil budidaya terutama rumput laut dan udang	- Ketergantungan pasar luar - Tata niaga tidak stabil	Krisis harga pangan	Ketahanan pangan	Diversifikasi pasar dan pembeli	Penguatan nilai tambah dan stabilisasi harga komoditas unggulan perikanan budidaya
Pelaku usaha pengolahan & pemasaran hasil perikanan skala mikro dan kecil (UMKM)	Lemahnya daya saing dan akses pasar	- Pemanfaatan SDA kurang ramah lingkungan	Standar perdagangan ketat	Digitalisasi UMKM	Industri lokal berbasis perikanan	Peningkatan daya saing produk perikanan olahan berbasis UMKM local
Kelembagaan nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha perikanan kecil	Kapasitas SDM masih lemah, kelembagaan belum solid	- Kesenjangan teknologi dan literasi digital	Transformasi digital	Penguatan kelembagaan	Kolaborasi riset dan inovasi	Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM pelaku utama sektor perikanan
Nelayan kecil berbasis domisili Tarakan	Kesulitan akses BBM bersubsidi	- Ketimpangan akses sarana produksi	Akses energi tepat sasaran	Reformasi distribusi subsidi	Skema distribusi dan kuota	Peningkatan akses energi untuk mendukung produktivitas nelayan kecil

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan sektor perikanan di Kota Tarakan periode 2025–2030 dirumuskan untuk mendukung pencapaian visi pembangunan daerah, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan yang berkelanjutan serta berdaya saing.

Sejalan dengan visi “Tarakan Kota Jasa, Perdagangan, Perikanan Kelautan, dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Maju menuju Masyarakat Sejahtera.” serta misi “Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui dukungan kemudahan berusaha yang berkeadilan”, Dinas Perikanan Kota Tarakan menetapkan dua tujuan strategis utama, yaitu:

- 1). Meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap pembangunan daerah
- 2). Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah.

Kedua tujuan ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah sasaran terukur, yang disertai indikator kinerja utama, baseline tahun 2024, serta target tahunan sampai dengan 2030. Rincian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja disajikan pada Tabel 3.1.

- 1) Kontribusi PDRB sektor perikanan ditetapkan pada level stabil sebesar 10,53% sepanjang periode 2025–2030. Target ini disusun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan dihitung dalam agregat dengan sektor pertanian dan kehutanan, sesuai klasifikasi lapangan usaha dalam PDRB Kota Tarakan. Pilihan mempertahankan kontribusi pada level stabil mencerminkan pendekatan realistis dengan mempertimbangkan daya dukung sumber daya alam serta keterkaitan subsektor perikanan dengan pertanian dan kehutanan. Fokus kebijakan diarahkan pada optimalisasi nilai tambah, efisiensi produksi, dan keberlanjutan, sehingga meskipun persentase kontribusi stabil, dampak ekonomi tetap signifikan.
- 2) Produksi perikanan tangkap ditargetkan tumbuh dengan asumsi pertumbuhan moderat sebesar 2% per tahun, dari baseline 20.917 ton pada 2024 menjadi 23.556 ton pada 2030. Target ini ditetapkan dengan mempertimbangkan capaian produksi 2020–2024 yang menunjukkan pola fluktuatif namun cenderung meningkat. Penetapan proyeksi moderat mencerminkan upaya menjaga kesinambungan produksi dengan tetap memperhatikan daya dukung sumber daya ikan dan efisiensi armada tangkap.
- 3) Produksi perikanan budidaya diproyeksikan meningkat rata-rata 3% per tahun, dari 213.453 ton pada 2024 menjadi 254.875 ton pada 2030. Target ini disusun berdasarkan tren capaian 2020–2024 yang secara umum menunjukkan pertumbuhan meskipun fluktuatif. Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan teknologi budidaya, diversifikasi komoditas, serta mitigasi risiko eksternal seperti penyakit ikan dan biaya pakan.
- 4) Produksi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan ditargetkan tumbuh rata-rata 5% per tahun, dari baseline 35.866 ton pada 2024 menjadi 48.064 ton pada 2030. Target ini memperhitungkan lonjakan signifikan produksi tahun 2024 yang menjadi momentum penting bagi hilirisasi perikanan. Dengan dukungan pada peningkatan kualitas produk, standarisasi mutu, dan akses pasar yang lebih luas, pertumbuhan 5% per tahun dinilai rasional sekaligus menantang.
- 5) Nilai SAKIP ditetapkan meningkat secara gradual dari baseline 67,67 pada 2024 hingga mencapai 73 pada 2030. Target disusun untuk memastikan peningkatan kualitas tata kelola secara konsisten, baik dalam aspek

perencanaan, penganggaran, maupun pelaporan kinerja, sehingga mampu memperkuat akuntabilitas publik.

- 6) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditetapkan meningkat secara bertahap dengan kisaran $\pm 2-3$ poin per tahun, dari target 75 pada 2025 hingga 88,3 pada 2030. Penetapan target ini mengikuti standar evaluasi pelayanan publik Kementerian PANRB, dengan orientasi pada peningkatan kualitas layanan, kemudahan akses, serta kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perikanan.

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

3.2.1 Strategi Perangkat Daerah

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sektor perikanan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025–2029, telah dirumuskan strategi yang disesuaikan dengan permasalahan utama, isu strategis daerah, serta kewenangan faktual perangkat daerah. Strategi ini ditujukan untuk memastikan keterkaitan antara arah kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung pencapaian outcome prioritas pembangunan daerah secara terarah, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya pelaku usaha perikanan skala kecil.

Tabel 3. 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan											
- Meningkatnya pertumbuhan dan stabilitas ekonomi	Meningkatnya kontribusi sektor perikanan		Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (Persentase)	10,22	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	Data BPS, Target dipertahankan pada level stabil, kontribusi dihitung bersama sektor pertanian & kehutanan
		Meningkatnya produksi hasil perikanan	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	20.917	21.335	21.761	22.197	22.641	23.094	23.556	
			Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	213.453,1	219.857	226.453	233.247	240.245	247.452	254.875	
			Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Ton)	35.866	37.659	39.542	41.519	43.595	45.775	48.064	
		Meningkatnya Tata Kelola Diskan	Nilai SAKIP (Nilai)	67,67	70	70	71,5	72	72,5	73	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	-	75	78	81	84	86	88,3	

Rumusan strategi dikembangkan berdasarkan hasil identifikasi tantangan sektoral yang bersumber dari isu-isu strategis global, nasional, dan regional yang relevan, serta mempertimbangkan kondisi objektif daerah, seperti keterbatasan data, sarana prasarana, kapasitas SDM, dan dukungan anggaran. Dalam konteks kewenangan, strategi ini menitikberatkan pada pemberdayaan nelayan kecil, pembudidaya skala mikro, serta pengolah dan pemasar hasil perikanan dalam lingkup Kota Tarakan.

Berikut adalah tabel 3.2 strategi Dinas Perikanan Kota Tarakan yang disusun berdasarkan identifikasi masalah, tujuan/sasaran, dan alternatif strategi yang relevan:

Tabel 3. 2
Penentuan Strategi Dinas Perikanan Kota Tarakan

No	Masalah	Tujuan/Sasaran	Rumusan Strategi
1	Produksi perikanan tangkap belum optimal	Tujuan: Meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah Sasaran: Meningkatnya produksi perikanan tangkap	- Optimalisasi pemanfaatan sumber daya perairan umum darat sesuai kewenangan - Pemberdayaan nelayan kecil melalui penguatan kelembagaan dan penyediaan sarana usaha - Peningkatan akurasi dan ketersediaan data statistik tangkapan
2	Produktivitas perikanan budidaya rendah dan belum merata	Tujuan: Meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah Sasaran: Meningkatnya produksi perikanan budidaya	- Perluasan akses terhadap benih, pakan, dan sarana budidaya - Penguatan kelembagaan pembudidaya ikan kecil - Penyediaan prasarana, pemantauan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya
3	Fluktuasi harga dan terbatasnya pasar hasil perikanan	Tujuan: Meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah Sasaran: Meningkatnya nilai tambah hasil perikanan	- Fasilitasi pemanfaatan sistem resi gudang dan cold storage - Kemitraan antardaerah untuk distribusi hasil perikanan - Peningkatan mutu, keamanan, dan daya saing produk skala mikro dan kecil
4	Akses pelaku usaha terhadap pembiayaan masih rendah	Tujuan: Meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah Sasaran: Tersedianya dukungan pembiayaan usaha bagi pelaku skala kecil	- Fasilitasi pembiayaan dan kemitraan usaha mikro - Penguatan kelembagaan ekonomi pelaku utama - Pengembangan skema usaha inklusif dan adaptif
5	Rendahnya pengawasan pelaku usaha kecil sesuai kewenangan daerah	Tujuan: Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha perikanan	- Penguatan sistem pelaporan dan perizinan usaha mikro - Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan rutin terhadap usaha budidaya, pengolahan, dan pemasaran
6	Keterbatasan data dan informasi perikanan yang akurat dan mutakhir	Tujuan: Meningkatkan tata kelola perencanaan berbasis data Sasaran: Tersedianya sistem data dan informasi perikanan yang andal	- Digitalisasi sistem pengumpulan data sektoral - Pembaruan dan validasi basis data per subsektor - Penguatan koordinasi lintas pemangku kepentingan
7	Kualitas SDM nelayan dan pembudidaya belum memadai	Tujuan: Meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah	- Pelatihan teknis dan pendampingan berkelanjutan - Sertifikasi kompetensi pelaku utama perikanan skala kecil
8	Daya saing produk pengolahan perikanan skala kecil masih rendah	Tujuan: Meningkatkan nilai tambah produk perikanan lokal	- Pembinaan mutu, pengemasan, dan perizinan produk - Penguatan promosi dan branding produk unggulan berbasis lokalitas
9	Tata kelola kelembagaan internal belum sepenuhnya berbasis kinerja	Tujuan: Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah	- Penguatan perencanaan berbasis bukti (evidence-based planning) - Peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan pengelolaan data sektoral

3.2.2 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Arah kebijakan Perangkat Daerah merupakan penjabaran strategis dari tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025–2029. Arah kebijakan ini disusun untuk menjawab tantangan dan permasalahan sektoral perikanan, serta merespons isu-isu strategis yang berkembang baik secara global, nasional, maupun daerah.

Penyusunan arah kebijakan mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan Pemerintah Pusat, dan secara langsung mendukung arah kebijakan dalam RPJMD Kota Tarakan, khususnya pada upaya peningkatan pertumbuhan dan stabilitas ekonomi daerah.

Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan kapasitas nelayan kecil, pembudidaya ikan skala kecil, serta pelaku pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala mikro dan kecil, melalui fasilitasi sarana-prasarana, akses teknologi, pembiayaan, dan pasar. Selain itu, arah kebijakan juga menekankan pentingnya peningkatan pengawasan sesuai kewenangan daerah, penguatan sistem data dan informasi, serta peningkatan kualitas tata kelola perangkat daerah.

Dengan arah kebijakan yang tepat dan terintegrasi, Dinas Perikanan Kota Tarakan diharapkan mampu mendorong terciptanya ekonomi perikanan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing, sebagaimana dirinci dalam Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3. 3
Arah dan Kebijakan Perangkat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	Penguatan produksi dan daya saing perikanan tangkap	Meningkatnya pertumbuhan dan stabilitas ekonomi daerah	Optimalisasi sarana produksi, alat tangkap ramah lingkungan, dan manajemen usaha nelayan kecil berbasis kelompok	Mendukung pertumbuhan ekonomi daerah
2	Pengembangan budidaya perikanan berkelanjutan		Peningkatan akses terhadap benih, pakan, sarana produksi, serta penguatan kelembagaan pembudidaya skala kecil	
3	Penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat perikanan		Fasilitasi perizinan, akses pembiayaan, pelatihan, dan sertifikasi bagi nelayan, pembudidaya, dan pelaku pengolahan	
4	Penguatan sistem pengolahan dan pemasaran hasil perikanan		Penerapan GHP, pembangunan cold storage udang windu, fasilitasi SRG, dan penguatan jejaring pemasaran rumput laut	
5	Peningkatan pengawasan perikanan berbasis kewenangan daerah		Pemantauan dan pembinaan terhadap pembudidaya, pengolah, dan pemasar sesuai kewenangan kota, termasuk pelaporan dan perizinan	
6	Penguatan sistem informasi dan data sektoral perikanan		Pengembangan sistem informasi terintegrasi sektor tangkap, budidaya, dan pengolahan	
7	Penguatan tata kelola internal perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Penguatan sistem perencanaan dan pelaporan berbasis kinerja, peningkatan nilai SAKIP, dan pelayanan kesekretariatan	Mendorong organisasi yang adaptif, responsif, dan transparan

3.2.3 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

Untuk menjamin pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025–2029 secara sistematis dan terukur, telah disusun tahapan implementasi program dan kegiatan selama lima tahun

mendatang. Pentahapan ini disusun berdasarkan hasil pemetaan kondisi awal, kesiapan sumber daya, dan kebutuhan lapangan, serta mempertimbangkan kesinambungan antar tahun dan efektivitas pelaksanaan strategi.

Secara umum, kegiatan dasar yang bersifat pemetaan, identifikasi, dan penguatan awal telah mulai dilaksanakan pada tahun 2025 sebagai fondasi pelaksanaan Renstra. Adapun pelaksanaan penuh Renstra dirancang dalam lima tahapan tahunan yang terintegrasi. Setiap tahap dirancang untuk mengakselerasi kontribusi sektor perikanan terhadap pembangunan ekonomi daerah melalui intervensi yang semakin komprehensif dan adaptif terhadap dinamika sektor. Rincian pentahapan tersebut disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3. 4
Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
Implementasi Awal dan Penguatan Dukungan Lapangan	Perluasan Cakupan dan Pendalaman Intervensi	Integrasi dan Peningkatan Efisiensi	Peningkatan Daya Saing dan Nilai Tambah	Konsolidasi dan Transisi Renstra
- Pelaksanaan program berdasarkan data dan peta potensi 2025. - Penyaluran bantuan sarana dan prasarana usaha perikanan skala kecil. - Pelatihan teknis dan manajerial dasar bagi pelaku usaha perikanan kecil. - Penguatan koordinasi dan monitoring pelaksanaan awal.	- Perluasan kelompok sasaran dan wilayah intervensi (nelayan, pembudidaya, pengolah/pemasar skala kecil). - Penambahan sarpras dan infrastruktur pendukung usaha. - Penguatan kelembagaan ekonomi perikanan. - Evaluasi dan perbaikan dari pelaksanaan tahap I.	- Integrasi program lintas subsektor (tangkap, budidaya, pengolahan) dengan sistem logistik dan pemasaran. - Optimalisasi pemanfaatan SRG dan cold storage. - Digitalisasi data perikanan dan pelaporan sektoral. - Penguatan sistem jaminan mutu produk.	- Perluasan akses pasar dan penguatan branding produk unggulan lokal. - Pengembangan produk inovatif dan fasilitasi sertifikasi ekspor. - Peningkatan kerja sama antardaerah dan pelaku usaha. - Dukungan promosi dan hilirisasi hasil perikanan.	- Evaluasi capaian Renstra secara menyeluruh. - Dokumentasi praktik terbaik dan model pembinaan berkelanjutan. - Konsolidasi kelembagaan dan sistem pengelolaan sektor. - Persiapan penyusunan Renstra 2031–2035.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan Perangkat Daerah

Perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025–2029 dilakukan untuk menjamin keterkaitan langsung antara arah kebijakan, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Tarakan, serta mendukung pencapaian kinerja organisasi dalam bidang perikanan tangkap, budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta pengawasan sumber daya perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota.

Program-program yang ditetapkan disusun dengan pendekatan *cascading*, yaitu menurunkan tujuan dan sasaran ke dalam bentuk kegiatan dan subkegiatan yang memiliki output dan outcome yang terukur. Setiap program disusun berdasarkan tugas dan fungsi yang melekat pada Dinas Perikanan, serta merujuk pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, perumusan ini juga memperhatikan prioritas pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat pelaku usaha perikanan, baik nelayan, pembudidaya, maupun pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Keluaran (output) dan hasil (outcome) dari setiap subkegiatan disusun untuk memastikan kontribusi nyata terhadap peningkatan produksi, pemberdayaan pelaku usaha, peningkatan kepatuhan dan mutu, serta peningkatan kualitas pelayanan kelembagaan Dinas Perikanan. Seluruh elemen tersebut dijabarkan secara rinci dalam Tabel 4.1, yang menggambarkan keterkaitan antara NSPK dan sasaran RPJMD dengan tujuan, sasaran, outcome, output, indikator kinerja, hingga struktur program, kegiatan, dan subkegiatan.

Berdasarkan pemetaan yang diuraikan dalam Tabel 4.1, perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Perikanan Kota Tarakan dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Seluruh rencana program mengacu pada *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024* tentang perubahan kedua atas *Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021*, yang menetapkan pemutakhiran kodefikasi program dan kegiatan pembangunan daerah.

Perencanaan ini menjadi dasar dalam menentukan indikator kinerja, target capaian, serta estimasi kebutuhan anggaran atau pagu indikatif selama periode lima tahun. Dengan demikian, setiap intervensi yang dirancang bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan output dan outcome yang konkret, terukur, dan berkontribusi langsung terhadap prioritas pembangunan daerah.

Seluruh unsur dalam perencanaan program tersebut dipastikan memiliki keterkaitan logis dengan isu strategis, strategi, dan arah kebijakan perangkat daerah, sehingga menjamin konsistensi, efektivitas pelaksanaan, serta efisiensi penggunaan sumber daya.

Rincian program, kegiatan, subkegiatan, berikut target kinerja dan pembiayaan indikatifnya dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4. 1
Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perikanan Kota Tarakan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan							
Meningkatnya pertumbuhan dan stabilitas ekonomi	Meningkatnya kontribusi sektor perikanan	Meningkatnya produksi hasil perikanan			Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB (Persentase)		
					Produksi Perikanan Tangkap (Ton)		
					Produksi Perikanan Budidaya (Ton)		
					Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Ton)		
		Meningkatnya Produksi perikanan tangkap			Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
			Tersedianya data dan informasi perikanan tangkap		Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	3.25.03.2.01.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	
			Terlaksananya pemberdayaan nelayan kecil		Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
					Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	3.25.03.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	
					Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	3.25.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	3.25.03.2.02.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	
		Meningkatnya Produksi perikanan budidaya			Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
			Terlaksananya pemberdayaan pembudi daya ikan		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahnya (Kelompok)	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	3.25.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahnya (Kelompok)	3.25.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
			Tersedianya data dan informasi perikanan budidaya		Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia (Unit)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.25.04.2.04.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.25.04.2.04.0008 - Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	3.25.04.2.04.0010 - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	
					Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia (Unit)	3.25.04.2.04.0013 - Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	
			Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perikanan		Persentase peningkatan kepatuhan pelaku usaha (%)	3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
				Terlaksananya pengawasan pelaku usaha perikanan	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
						Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01.0004 - Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
					Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01.0006 - Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
					Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01.0007 - Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
			Meningkatnya produksi pengolahan dan pemasaran produk perikanan	Tersedianya data dan informasi pengolahan dan pemasaran	Persentase peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran (%)	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
					Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	
					Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Rekomendasi)	3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	
					Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Rekomendasi)	3.25.06.2.01.0003 - Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
					Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	3.25.06.2.01.0005 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	
					Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
				Terlaksananya pembinaan mutu dan keamanan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	
					Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
				Terlaksananya fasilitasi bagi pelaku usaha			

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
		Meningkatnya Tata Kelola Diskan			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Nilai SAKIP (Nilai)		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)		
					Nilai SAKIP (Nilai)	3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.25.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.25.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	3.25.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Tersedianya dokumen administrasi keuangan sesuai SAP	3.25.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.25.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.25.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.25.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Tersedianya layanan administrasi umum	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.25.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terkelolanya data barang milik daerah dalam aplikasi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.25.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.25.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya layanan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.25.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.25.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Terpeliharanya barang milik daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.25.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.25.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4. 2
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perikanan Kota Tarakan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				7.386.267.241,00		7.386.267.241,00		7.386.267.241,00		7.386.267.241,00		7.386.267.241,00		
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	88	88,3	431.691.219,00	88,3	431.691.219,00	88,3	431.691.219,00	88,3	431.691.219,00	88,3	431.691.219,00	3.25.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Perikanan	
3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				148.891.219,00		148.891.219,00		148.891.219,00		148.891.219,00		148.891.219,00		
Tersedianya layanan administrasi umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	148.891.219,00	12	148.891.219,00	12	148.891.219,00	12	148.891.219,00	12	148.891.219,00		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
3.25.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8.312.400,00		8.312.400,00		8.312.400,00		8.312.400,00		8.312.400,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	8.312.400,00	3	8.312.400,00	3	8.312.400,00	3	8.312.400,00	3	8.312.400,00		
3.25.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				35.578.819,00		35.578.819,00		35.578.819,00		35.578.819,00		35.578.819,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10	35.578.819,00	10	35.578.819,00	10	35.578.819,00	10	35.578.819,00	10	35.578.819,00		
3.25.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00		
3.25.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	95.000.000,00	12	95.000.000,00	12	95.000.000,00	12	95.000.000,00	12	95.000.000,00		
3.25.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				34.000.000,00		34.000.000,00		34.000.000,00		34.000.000,00		34.000.000,00		
Terkelolanya data barang milik daerah dalam aplikasi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	30	2	34.000.000,00	2	34.000.000,00	2	34.000.000,00	2	34.000.000,00	2	34.000.000,00		
3.25.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				34.000.000,00		34.000.000,00		34.000.000,00		34.000.000,00		34.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	30	2	34.000.000,00	2	34.000.000,00	2	34.000.000,00	2	34.000.000,00	2	34.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.25.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				97.800.000,00		97.800.000,00		97.800.000,00		97.800.000,00		97.800.000,00		
3.25.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				97.800.000,00		97.800.000,00		97.800.000,00		97.800.000,00		97.800.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	97.800.000,00	12	97.800.000,00	12	97.800.000,00	12	97.800.000,00	12	97.800.000,00		
3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				151.000.000,00		151.000.000,00		151.000.000,00		151.000.000,00		151.000.000,00		
Terpeliharanya barang milik daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	27	27	151.000.000,00	27	151.000.000,00	27	151.000.000,00	27	151.000.000,00	27	151.000.000,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	3		3		3		3		3			
3.25.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				115.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		115.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	27	27	115.000.000,00	27	115.000.000,00	27	115.000.000,00	27	115.000.000,00	27	115.000.000,00		
3.25.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				36.000.000,00		36.000.000,00		36.000.000,00		36.000.000,00		36.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	3	36.000.000,00	3	36.000.000,00	3	36.000.000,00	3	36.000.000,00	3	36.000.000,00		
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas	Nilai SAKIP (Nilai)	64,89	70,11	4.594.308.781,00	71,51	4.594.308.781,00	71,88	4.594.308.781,00	72,35	4.594.308.781,00	72,72	4.594.308.781,00		
3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
3.25.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
3.25.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
3.25.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
3.25.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.591.308.781,00		4.591.308.781,00		4.591.308.781,00		4.591.308.781,00		4.591.308.781,00		
Tersedianya dokumen administrasi keuangan sesuai SAP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	4.591.308.781,00	12	4.591.308.781,00	12	4.591.308.781,00	12	4.591.308.781,00	12	4.591.308.781,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	38	40		40		40		40		40			
3.25.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.473.672.781,00		4.473.672.781,00		4.473.672.781,00		4.473.672.781,00		4.473.672.781,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	38	40	4.473.672.781,00	40	4.473.672.781,00	40	4.473.672.781,00	40	4.473.672.781,00	40	4.473.672.781,00		
3.25.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				117.636.000,00		117.636.000,00		117.636.000,00		117.636.000,00		117.636.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	117.636.000,00	12	117.636.000,00	12	117.636.000,00	12	117.636.000,00	12	117.636.000,00		
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				940.691.400,00		940.691.400,00		940.691.400,00		940.691.400,00		940.691.400,00		
Meningkatnya Produksi perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	20.917	4	940.691.400,00	4	940.691.400,00	4	940.691.400,00	4	940.691.400,00	4	940.691.400,00	3.25.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Perikanan	
3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				2.691.400,00		2.691.400,00		2.691.400,00		2.691.400,00		2.691.400,00		
Tersedianya data dan informasi perikanan tangkap	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1	1	2.691.400,00	1	2.691.400,00	1	2.691.400,00	1	2.691.400,00	1	2.691.400,00		
3.25.03.2.01.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan				2.691.400,00		2.691.400,00		2.691.400,00		2.691.400,00		2.691.400,00		
Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1	1	2.691.400,00	1	2.691.400,00	1	2.691.400,00	1	2.691.400,00	1	2.691.400,00		
3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				938.000.000,00		938.000.000,00		938.000.000,00		938.000.000,00		938.000.000,00		
Terlaksananya pemberdayaan nelayan kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	5	12	938.000.000,00	12	938.000.000,00	12	938.000.000,00	12	938.000.000,00	12	938.000.000,00		
	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	2.600	2.600		2.600		2.600		2.600		2.600			
	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	5	5		5		5		5		5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil				560.000.000,00		560.000.000,00		560.000.000,00		560.000.000,00		560.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	2.600	2.600	560.000.000,00	2.600	560.000.000,00	2.600	560.000.000,00	2.600	560.000.000,00	2.600	560.000.000,00		
3.25.03.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil				14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	5	12	14.000.000,00	12	14.000.000,00	12	14.000.000,00	12	14.000.000,00	12	14.000.000,00		
3.25.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		
Terlaksananya Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha kepada Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	5	5	14.000.000,00	5	14.000.000,00	5	14.000.000,00	5	14.000.000,00	5	14.000.000,00		
3.25.03.2.02.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil				350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	3	3	350.000.000,00	3	350.000.000,00	3	350.000.000,00	3	350.000.000,00	3	350.000.000,00		
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				892.151.433,00		892.151.433,00		892.151.433,00		892.151.433,00		892.151.433,00		
Meningkatnya Produksi perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)	213.453	3	892.151.433,00	3	892.151.433,00	3	892.151.433,00	3	892.151.433,00	3	892.151.433,00	3.25.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Perikanan	
3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				37.500.000,00		37.500.000,00		37.500.000,00		37.500.000,00		37.500.000,00		
Terlaksananya pemberdayaan pembudi daya ikan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	12	18	37.500.000,00	18	37.500.000,00	18	37.500.000,00	18	37.500.000,00	18	37.500.000,00		
	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahnya (Kelompok)	5	7		7		7		7		7			
3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
3.25.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	12	18	15.000.000,00	18	15.000.000,00	18	15.000.000,00	18	15.000.000,00	18	15.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.25.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (Kelompok)	5	7	7.500.000,00	7	7.500.000,00	7	7.500.000,00	7	7.500.000,00	7	7.500.000,00		
3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				854.651.433,00		854.651.433,00		854.651.433,00		854.651.433,00		854.651.433,00		
Tersedianya data dan informasi perikanan budidaya	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	12	12	854.651.433,00	12	854.651.433,00	12	854.651.433,00	12	854.651.433,00	12	854.651.433,00		
	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	10	20		20		20		20		20			
	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	10	20		20		20		20		20			
	Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia (Unit)	1	1		1		1		1		1			
3.25.04.2.04.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2.651.433,00		2.651.433,00		2.651.433,00		2.651.433,00		2.651.433,00		
Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	2.651.433,00	1	2.651.433,00	1	2.651.433,00	1	2.651.433,00	1	2.651.433,00		
3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	10	20	200.000.000,00	20	200.000.000,00	20	200.000.000,00	20	200.000.000,00	20	200.000.000,00		
3.25.04.2.04.0008 - Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				367.000.000,00		367.000.000,00		367.000.000,00		367.000.000,00		367.000.000,00		
Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	10	20	367.000.000,00	20	367.000.000,00	20	367.000.000,00	20	367.000.000,00	20	367.000.000,00		
3.25.04.2.04.0010 - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	3	3	105.000.000,00	3	105.000.000,00	3	105.000.000,00	3	105.000.000,00	3	105.000.000,00		
3.25.04.2.04.0013 - Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Penyediaan Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia (Unit)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perikanan	Persentase peningkatan kepatuhan pelaku usaha (%)	70	5	75.000.000,00	5	75.000.000,00	5	75.000.000,00	5	75.000.000,00	5	75.000.000,00	3.25.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Perikanan	
3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya pengawasan pelaku usaha perikanan	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	8	9	75.000.000,00	9	75.000.000,00	9	75.000.000,00	9	75.000.000,00	9	75.000.000,00		
	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	34	40		40		40		40		40			
	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	20	22		22		22		22		22			
3.25.05.2.01.0004 - Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	34	40	35.000.000,00	40	35.000.000,00	40	35.000.000,00	40	35.000.000,00	40	35.000.000,00		
Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	8	9	15.000.000,00	9	15.000.000,00	9	15.000.000,00	9	15.000.000,00	9	15.000.000,00		
3.25.05.2.01.0007 - Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	20	22	25.000.000,00	22	25.000.000,00	22	25.000.000,00	22	25.000.000,00	22	25.000.000,00		
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				452.424.408,00		452.424.408,00		452.424.408,00		452.424.408,00		452.424.408,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya produksi pengolahan dan pemasaran produk perikanan	Persentase peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran (%)	35.866	5	452.424.408,00	5	452.424.408,00	5	452.424.408,00	5	452.424.408,00	5	452.424.408,00	3.25.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Perikanan	
3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil				152.424.408,00		152.424.408,00		152.424.408,00		152.424.408,00		152.424.408,00		
Tersedianya data dan informasi pengolahan dan pemasaran	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	1	1	152.424.408,00	1	152.424.408,00	1	152.424.408,00	1	152.424.408,00	1	152.424.408,00		
	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Rekomendasi)	24	24		24		24		24		24			
3.25.06.2.01.0003 - Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Rekomendasi)	24	24	150.000.000,00	24	150.000.000,00	24	150.000.000,00	24	150.000.000,00	24	150.000.000,00		
3.25.06.2.01.0005 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko				2.424.408,00		2.424.408,00		2.424.408,00		2.424.408,00		2.424.408,00		
Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	1	1	2.424.408,00	1	2.424.408,00	1	2.424.408,00	1	2.424.408,00	1	2.424.408,00		
Terlaksananya pembinaan mutu dan keamanan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	8	8	100.000.000,00	8	100.000.000,00	8	100.000.000,00	8	100.000.000,00	8	100.000.000,00		
3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	8	8	100.000.000,00	8	100.000.000,00	8	100.000.000,00	8	100.000.000,00	8	100.000.000,00		
3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya fasilitasi bagi pelaku usaha	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	10	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	10	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00		

Setelah penetapan program prioritas melalui Dokumen RPJMD serta perumusan kegiatan dan subkegiatan dalam Dokumen Renstra, tahapan selanjutnya adalah melakukan seleksi terhadap kegiatan dan subkegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian program prioritas dimaksud. Pemilihan ini dilakukan secara cermat dengan memperhatikan keselarasan antara program prioritas dan arah pembangunan daerah, efektivitas pemanfaatan sumber daya yang tersedia, serta kapasitas Dinas Perikanan Kota Tarakan dalam melaksanakan kegiatan secara optimal. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan kegiatan dan subkegiatan yang terpilih mampu memberikan dampak nyata dalam mendorong pencapaian sasaran dan tujuan strategis perangkat daerah secara terukur, serta berkontribusi signifikan terhadap peningkatan outcome pembangunan sektor perikanan di Kota Tarakan. Untuk lebih jelasnya, rincian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4. 3
Sub Kegiatan Prioritas

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan				
1.	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya Produksi perikanan tangkap	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
			3.25.03.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	
			3.25.03.2.02.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	
2.	3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha perikanan	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	
			3.25.05.2.01.0004 - Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
			3.25.05.2.01.0006 - Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
			3.25.05.2.01.0007 - Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perikanan Kota Tarakan dievaluasi melalui serangkaian indikator kinerja yang mencerminkan pencapaian atas pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangan yang dimiliki. Indikator-indikator tersebut disusun untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan secara terarah dan sistematis.

Indikator kinerja ini terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu *Indikator Kinerja Utama* (IKU) yang merepresentasikan capaian strategis jangka menengah perangkat daerah, serta *Indikator Kinerja Kegiatan* (IKK) yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan. Keduanya memiliki peran penting dalam menjamin konsistensi antara rencana dan pelaksanaan, sekaligus memastikan kontribusi nyata Dinas Perikanan

terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kota Tarakan dirumuskan sebagai instrumen untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan strategis perangkat daerah dalam periode 2025–2030. IKU ini mencerminkan keterkaitan antara peningkatan kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian daerah, produktivitas subsektor, serta penguatan tata kelola organisasi.

Secara umum, IKU disusun dengan mengacu pada evaluasi capaian periode 2020–2024, proyeksi potensi subsektor, serta standar evaluasi kinerja pemerintah (KemenPANRB dan BPS). Dengan pendekatan ini, target yang ditetapkan diharapkan tidak hanya realistis, tetapi juga mampu mendorong penguatan daya saing sektor perikanan secara berkelanjutan.

Penjabaran Indikator Kinerja Utama

1. Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB

Target kontribusi ditetapkan stabil pada level 10,53% sepanjang periode 2025–2030. Angka ini dihitung bersama subsektor pertanian dan kehutanan berdasarkan data BPS. Stabilitas target mencerminkan bahwa meskipun kontribusi persentase tidak bertambah, fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas, nilai tambah, serta keberlanjutan sektor perikanan agar tetap menjadi penopang struktur ekonomi daerah.

2. Produksi Perikanan Tangkap

Dari baseline 2024 sebesar 20.917 ton, target ditetapkan tumbuh moderat 2% per tahun hingga mencapai 23.556 ton pada 2030. Penetapan target ini mempertimbangkan capaian produksi 2020–2024 yang menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung meningkat. Dengan asumsi pertumbuhan moderat, kebijakan diarahkan pada peningkatan kapasitas sarana dan prasarana tangkap, produksi, serta penguatan tata kelola berbasis prinsip keberlanjutan.

3. Produksi Perikanan Budidaya

Baseline tahun 2024 sebesar 213.453 ton dijadikan acuan untuk menetapkan proyeksi pertumbuhan rata-rata 3% per tahun, sehingga pada tahun 2030 produksi diperkirakan mencapai 254.875 ton. Target ini mempertimbangkan tren capaian 2020–2024 yang meski fluktuatif tetap menunjukkan pertumbuhan positif. Fokus kebijakan diarahkan pada diversifikasi komoditas unggulan, peningkatan sarana dan prasarana budidaya ikan, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, serta peningkatan kapasitas pembudi daya kecil.

4. Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Dari baseline 2024 sebesar 35.866 ton, ditargetkan tumbuh 5% per tahun hingga mencapai 48.064 ton pada 2030. Proyeksi ini memperhitungkan lonjakan signifikan capaian 2024 sebagai momentum hilirisasi perikanan. Arah kebijakan meliputi peningkatan mutu produk, standardisasi dan sertifikasi, penguatan sarana dan prasarana, kelembagaan pelaku usaha, serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor.

5. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Nilai SAKIP ditetapkan meningkat secara bertahap dari baseline 67,67 pada 2024 menjadi 73 pada 2030, dengan capaian minimal predikat “B” (nilai ≥ 70). Target ini menunjukkan komitmen penguatan tata kelola

organisasi melalui perencanaan yang lebih terukur, integrasi penganggaran, dan pelaporan kinerja yang transparan.

6. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

IKM ditetapkan meningkat dari target awal 75 pada 2025 hingga mencapai 88,3 pada 2030. Kenaikan dilakukan secara bertahap sekitar $\pm 2-3$ poin per tahun sesuai standar evaluasi KemenPANRB. Indikator ini mencerminkan peningkatan kualitas layanan publik, terutama kepada pelaku usaha perikanan kecil dan mikro, melalui penyederhanaan prosedur, peningkatan responsivitas, dan penyediaan sarana pelayanan yang lebih baik.

Seluruh indikator kinerja utama saling terkait dan memperkuat pencapaian tujuan strategis Dinas Perikanan Kota Tarakan. Stabilitas kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB dipadukan dengan peningkatan produksi subsektor dan penguatan tata kelola organisasi akan menjadi fondasi penting dalam membangun sektor perikanan yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

Untuk rincian lebih lanjut mengenai target capaian tahunan, dapat dilihat pada Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kota Tarakan.

Tabel 4. 4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan									
2.	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	Persentase	10,22	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	Data BPS, Target dipertahankan pada level stabil, kontribusi dihitung bersama sektor pertanian & kehutanan
3.	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	20.917	21.335	21.761	22.197	22.641	23.094	23.556	Target dihitung dengan asumsi pertumbuhan moderat 2% per tahun
4.	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	213.453,1	219.857	226.453	233.247	240.245	247.452	254.875	Target ditetapkan dengan proyeksi pertumbuhan 3% per tahun
5.	Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Ton	35.866	37.659	39.542	41.519	43.595	45.775	48.064	Target disusun berdasarkan proyeksi pertumbuhan rata-rata 5% per tahun
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	-	75	78	81	84	86	88,3	Target peningkatan IKM dilakukan secara bertahap ±2-3 poin per tahun, sesuai standar evaluasi KemenPANRB.
7.	Nilai SAKIP	Nilai	67,67	70	70	71,5	72	72,5	73	Target disusun untuk memastikan peningkatan kualitas tata kelola secara gradual dan konsisten.

4.2.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Dinas Perikanan Kota Tarakan merupakan instrumen pengukuran teknis yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program dan subkegiatan secara operasional. IKK menjadi jembatan antara capaian kegiatan lapangan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), sehingga hasilnya dapat menggambarkan sejauh mana kegiatan perangkat daerah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis sektor perikanan.

Penyusunan IKK ini berlandaskan pada evaluasi capaian periode 2020–2024 dan proyeksi pertumbuhan subsektor perikanan, dengan mempertimbangkan potensi sumber daya, kapasitas pelaku usaha, serta arah kebijakan pembangunan perikanan berkelanjutan.

Penjabaran Indikator Kinerja Kegiatan

1. Produksi Perikanan Tangkap

Target produksi perikanan tangkap ditetapkan meningkat rata-rata 2% per tahun (growth rate). Dengan baseline 2024 sebagai titik acuan, target tahun 2025 sebesar 102%, kemudian meningkat secara konsisten hingga mencapai 112,62% pada tahun 2030. Proyeksi pertumbuhan moderat ini memperhitungkan fluktuasi capaian 2020–2024, sehingga fokus kegiatan diarahkan pada stabilisasi produksi melalui pemberdayaan nelayan kecil, penyediaan sarana dan prasarana penangkapan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan.

2. Produksi Perikanan Budidaya

Target produksi perikanan budidaya disusun dengan proyeksi pertumbuhan rata-rata 3% per tahun. Baseline 2024 dijadikan acuan untuk mencapai 103% pada 2025, lalu meningkat secara progresif hingga 119,41% pada tahun 2030. Penetapan target ini memperhitungkan tren capaian historis yang cenderung fluktuatif namun tumbuh positif. Kebijakan diarahkan pada penguatan sistem budidaya berkelanjutan, peningkatan akses sarana produksi, serta pengendalian risiko melalui manajemen kesehatan ikan dan kualitas lingkungan.

IKK yang ditetapkan menunjukkan adanya orientasi pada pertumbuhan terukur yang selaras dengan target IKU. Dengan pertumbuhan moderat pada perikanan tangkap (2% per tahun) dan lebih progresif pada perikanan budidaya (3% per tahun), kegiatan Dinas Perikanan diarahkan tidak hanya untuk mengejar peningkatan volume produksi, tetapi juga memastikan keberlanjutan sumber daya, efisiensi usaha, dan pemberdayaan pelaku usaha kecil.

Analisis Risiko dan Tantangan Pencapaian IKK

Meskipun target indikator kinerja kegiatan telah dirumuskan secara moderat dan berbasis data historis, terdapat sejumlah risiko dan tantangan yang berpotensi mempengaruhi pencapaiannya, antara lain:

1. Faktor Alam dan Cuaca Ekstrem

Produksi perikanan tangkap sangat dipengaruhi kondisi alam. Cuaca ekstrem, perubahan pola musim, dan fenomena iklim global (misalnya El Niño dan La Niña) dapat menyebabkan penurunan hasil tangkapan. Hal ini menuntut strategi mitigasi seperti penguatan sistem informasi cuaca bagi nelayan dan diversifikasi usaha.

2. Ketersediaan Sumber Daya Ikan

Overfishing atau eksploitasi berlebihan dapat mengancam keberlanjutan produksi perikanan tangkap. Tantangan ini harus diantisipasi melalui

pengelolaan berbasis kuota, penegakan regulasi, serta penerapan prinsip keberlanjutan.

3. Biaya Produksi dan Pakan Budidaya

Pada subsektor perikanan budidaya, fluktuasi harga pakan yang cenderung meningkat menjadi kendala utama. Tingginya biaya operasional dapat menekan margin keuntungan pembudi daya kecil. Diperlukan inovasi pakan alternatif, efisiensi manajemen usaha, serta dukungan subsidi selektif.

4. Penyakit Ikan dan Kualitas Lingkungan

Produksi budidaya juga rentan terhadap wabah penyakit ikan serta penurunan kualitas lingkungan akibat limbah atau perubahan ekosistem. Hal ini mengharuskan adanya sistem pengawasan kesehatan ikan yang terintegrasi dan penerapan teknologi budidaya ramah lingkungan.

5. Akses Pasar dan Rantai Pasok

Pada subsektor pengolahan dan pemasaran, tantangan terletak pada keterbatasan akses pasar, fluktuasi permintaan, serta ketidakstabilan harga jual produk. Diperlukan strategi penguatan kelembagaan usaha mikro, standardisasi mutu produk, serta perluasan jejaring distribusi baik domestik maupun ekspor.

6. Kapasitas SDM dan Kelembagaan

Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, baik nelayan maupun pembudi daya, dapat memperlambat adopsi teknologi baru. Di sisi lain, kelembagaan nelayan dan kelompok usaha perikanan masih memerlukan pendampingan untuk meningkatkan profesionalisme dan daya saing.

Risiko-risiko di atas menegaskan pentingnya dukungan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian angka target, tetapi juga pada daya tahan sektor perikanan terhadap ketidakpastian eksternal. Dengan mitigasi yang tepat, target IKK yang bersifat moderat-progresif dapat tercapai sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan perikanan di Kota Tarakan.

Rincian target tahunan IKK dapat dilihat pada Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Dinas Perikanan Kota Tarakan.

Tabel 4. 5
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perikanan Kota Tarakan

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
2.	Produksi Perikanan Tangkap	positif	%	100	102	104,04	106,12	108,24	110,41	112,62	Target meningkat rata-rata 2% per tahun (growth rate)
3.	Produksi Perikanan Budidaya	positif	%	100	103	106,09	109,27	112,55	115,93	119,41	Target meningkat rata-rata 3% per tahun (growth rate)

Catatan Teknis:

- Baseline tahun 2024 ditetapkan sebesar 100 sebagai tahun dasar (base year) untuk memudahkan penghitungan laju pertumbuhan.
- Nilai persentase pada 2025–2030 menunjukkan indeks pertumbuhan relatif terhadap baseline (2024 = 100).
- Data riil produksi (ton) yang menjadi acuan baseline berasal dari Dinas Perikanan Kota Tarakan.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang berfungsi sebagai pedoman operasional dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perikanan. Dokumen ini memuat arah kebijakan, strategi, tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta program dan kegiatan yang dirancang untuk mendukung pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025–2029. Renstra ini disusun dengan pendekatan teknokratik berbasis data, selaras dengan prinsip perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta memperhatikan karakteristik lokal. Penyusunan juga mengedepankan sinergi antara Dinas Perikanan dengan pemangku kepentingan di tingkat kota, provinsi, maupun pusat. Dengan demikian, Renstra diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, dokumen ini dirancang untuk memperkuat pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Dinas Perikanan Kota Tarakan sesuai ketentuan regulasi, khususnya dalam mendukung penguatan kapasitas nelayan kecil, pembudi daya ikan kecil, serta pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala mikro dan kecil. Melalui Renstra ini, diharapkan pelaksanaan pembangunan perikanan berjalan lebih terarah, terukur, sinergis, dan berkelanjutan.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Tarakan Tahun 2025–2029 berlandaskan prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan. Kaidah pelaksanaan disusun untuk memastikan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.

Kaidah utama dalam pelaksanaan dokumen ini adalah sebagai berikut:

1. Seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025–2029, serta memperhatikan kesinambungan dengan arah pembangunan jangka panjang (RPJPD).
2. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan dengan mengacu pada indikator dan target kinerja dalam Renstra, guna menjamin keterpaduan antara input, output, dan outcome pembangunan.
3. Pelaksanaan kegiatan lintas sektor dilakukan secara kolaboratif dengan perangkat daerah dan mitra terkait, untuk memperkuat sinergi, mencegah tumpang tindih, dan memaksimalkan capaian hasil.
4. Pengambilan keputusan dalam implementasi Renstra wajib berbasis data yang valid, mutakhir, dan terverifikasi. Evaluasi kinerja dilaksanakan secara periodik untuk mendorong perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan, struktur organisasi, atau nomenklatur sesuai regulasi terbaru, maka Renstra ini dapat dilakukan penyesuaian sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar perencanaan pembangunan.

5.3. Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kota Tarakan dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai rencana serta mendukung pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja.

- Pengendalian dilaksanakan secara berjenjang melalui mekanisme pemantauan dan pelaporan capaian kinerja oleh unit pelaksana teknis maupun perangkat daerah terkait.
- Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun melalui evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja Dinas. Evaluasi tengah periode dan evaluasi akhir periode digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan, menganalisis hambatan, serta menyusun rekomendasi perbaikan kebijakan.

Apabila terdapat perubahan ketentuan regulasi mengenai sistem pengendalian dan evaluasi Renstra, maka pelaksanaannya akan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan Tahun 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana strategis sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Proses penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Seluruh dokumen perencanaan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah sistem perencanaan pembangunan yang merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan keterkaitan yang erat antara satu dengan lainnya.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dengan Perda nomor 2 Tahun 2025. Sehingga harus selaras dengan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program dalam rencana kerja indikatif RPJMD. Renstra yang telah tersusun selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dokumen jangka pendek atau tahunan yang tertuang di dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup, sehingga penyusunan indikator kinerja, kelompok sasaran, program, kegiatan, pagu indikatif maupun prakiraan maju yang tertuang di dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup akan selaras dan berpedoman pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029;
19. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2045;
21. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
23. Surat Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 100.3.3/HK-IV/250/2025 Tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas

Lingkungan Hidup Kota Tarakan Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan adalah untuk memberikan pedoman perencanaan Program/ Kegiatan selama masa transisi dengan tetap mengkomodir program dan kegiatan dengan tetap mengacu pada kebijakan nasional dan kebijakan daerah. Selain itu juga untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan bidang urusan Lingkungan Hidup yang lebih terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup adalah untuk mewujudkan output dan outcome yang direncanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Tahapan tersebut dapat diukur keberhasilannya secara kuantitas dan kualitas melalui indikator yang telah ditetapkan, sehingga sasarnya diharapkan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui rencana, program, dan pelaksanaan kegiatan yang terpadu, efektif dan efisien.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	Bab ini paling sedikit memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TARAkan
	Bab ini membahas gambaran pelayanan perangkat daerah yang paling sedikit memuat tugas, fungsi, dan struktur perangkat daerah; sumber daya perangkat daerah; kinerja pelayanan perangkat daerah; dan kelompok sasaran layanan. Selain itu juga membahas permasalahan pelayanan Inspektorat Daerah Kota Tarakan dan Isu Strategis.
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	Bab ini paling sedikit memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan.
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
	Bab ini paling sedikit memuat uraian program; uraian kegiatan; uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator target dan pagu indikatif; uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah; target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama; dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci.
BAB V	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TARAKAN

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Lingkungan Hidup

Tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

1. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugasnya Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di Bidang Perencanaan, Pengaduan dan Peningkatan Kapasitas, Pengendalian Bahan dan Limbah Berbahaya Beracun (B3) serta Pengelolaan Sampah, dan Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perencanaan, Pengaduan dan Peningkatan Kapasitas, Pengendalian Bahan dan Limbah Berbahaya Beracun (B3) serta Pengelolaan Sampah, dan Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan, Pengaduan dan Peningkatan Kapasitas, Pengendalian Bahan dan Limbah Berbahaya Beracun (B3) serta Pengelolaan Sampah, dan Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan dilengkapi dengan perangkat organisasi dapat dilihat pada Gambar 1-1, adapun susunan organisasi sebagai berikut:

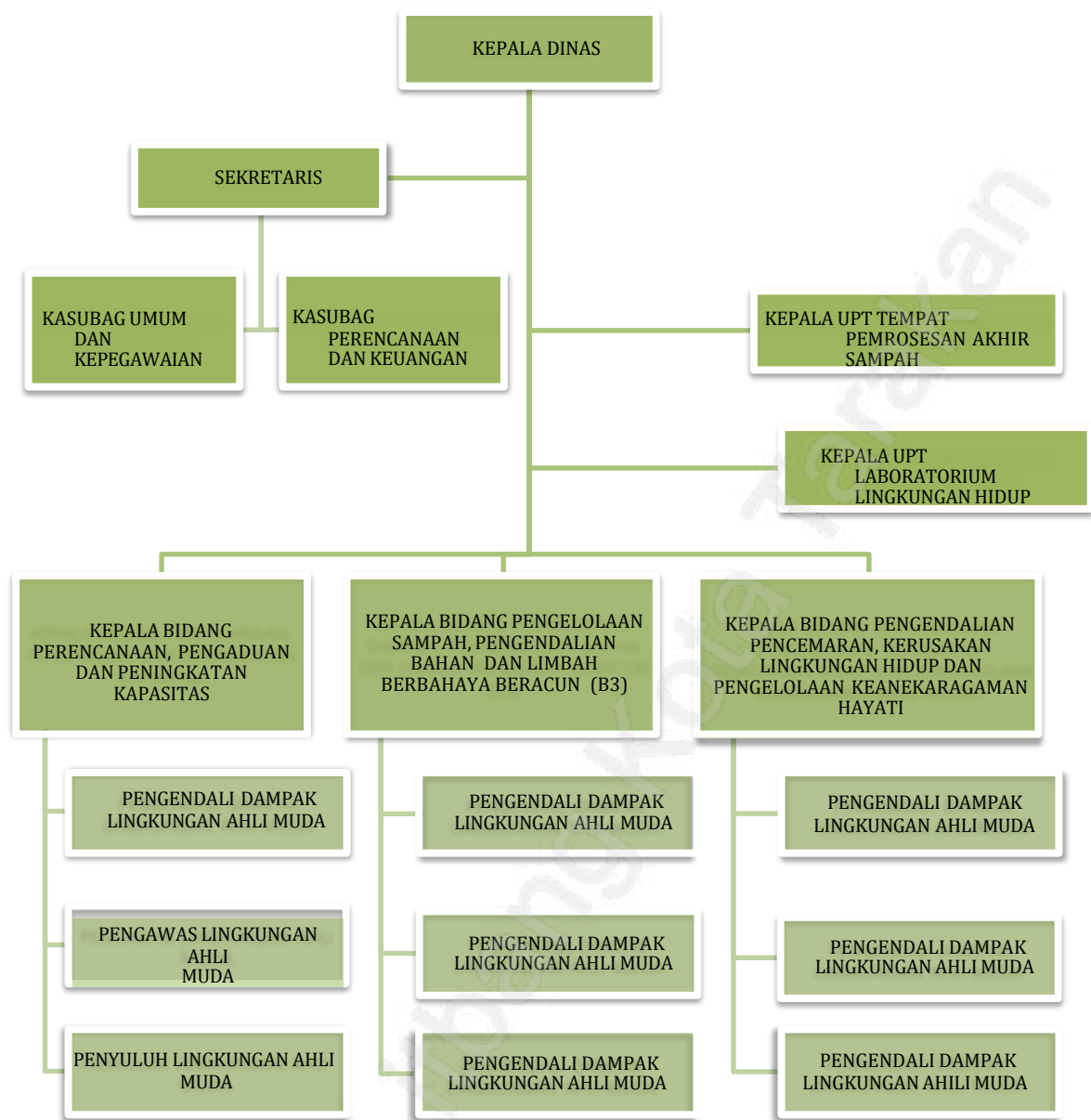
1. Kepala Dinas, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkondisikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
 - Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

- sesuai dengan lingkup tugasnya
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Sekretariat terdiri dari:
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam pengkoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam koordinasi kegiatan perencanaan dan keuangan, koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, dan pengkoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
3. Bidang Perencanaan, Pengaduan dan Peningkatan Kapasitas, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Perencanaan, Pengaduan dan Peningkatan Kapasitas yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Bidang ini membawahi:
- Sub Koordinator Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan / Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda;
 - Sub Koordinator Seksi Pengaduan, Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup/Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda;
 - Sub Koordinator Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia / Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda;
4. Bidang Pengelolaan Sampah, Pengendalian Bahan dan Limbah Berbahaya Beracun (B3) mempunyai sebagian tugas dinas di bidang Pengurangan Sampah, Penanganan Sampah dan Pengendalian Bahan dan Limbah Berbahaya Beracun (B3) yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kepala daerah. Bidang ini membawahi:
- Sub Koordinator Seksi Pengurangan Sampah/Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda;
 - Sub Koordinator Seksi Penanganan Sampah/Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda;
 - Sub Koordinator Seksi Pengendalian Bahan dan Limbah Berbahaya Beracun (B3)/Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda;
5. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kepala daerah. Bidang ini

membawahi:

- Sub Koordinator Seksi Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup/Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda;
 - Sub Koordinator Seksi Penanggulangan, Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup/Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda;
 - Sub Koordinator Seksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati/Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda;
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT), mempunyai tugas melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat atau untuk melaksanakan fungsi pendukung terhadap tugas dan fungsi dinas. UPT yang terdapat di Dinas Lingkungan Hidup antara lain:
- UPT. Lingkungan Laboratorium
 - UPT. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA)
7. Kelompok Jabatan Fungsional:
- Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Terdiri dari beberapa pejabat fungsional dapat diberikan tugas tambahan yang melaksanakan tugas sebagai Sub Koordinator melalui penetapan surat tugas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang berwenang.

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup



Sumber: Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 58 Tahun 2021

2.1.2 Sumber Daya DLH Kota Tarakan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting dalam pencapaian sasaran suatu program dan kegiatan, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja perangkat daerah tersebut. Sampai dengan bulan Agustus 2025 jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) orang dan tenaga kontrak/PTT/Tenaga lapangan sebanyak 455 (empat ratus lima puluh lima) orang yang dirincikan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai DLH

NO	BAGIAN/BIDANG	JUMLAH PNS	L	P	TINGKAT PENDIDIKAN						
					SD	SLTP	SLTA	D-3	D-4	S1	S2
1	Sekretariat	18	9	9	-	-	2	-	-	14	2
2	Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas	8	4	4	-	-	-	-	-	4	4
3	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya, Beracun (B3)	25	20	5	1	-	10	2	-	11	1
4	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	29	20	9	1	1	13	-	-	11	3
5	UPT. Tempat Pembuangan Akhir	9	8	1	1	1	4	-	-	3	-
6	UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup	4	3	1	-	-	1	-	-	3	-
TOTAL		93	64	29	3	2	30	2	-	46	10

Sumber : Dokumen Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan Tahun 2025

Tabel 2.2 Jumlah Tenaga Kontrak Dinas Llingkungan Hidup Tahun 2025

No	Tenaga Kontrak	Jumlah Orang
1	Petugas Penghijauan/ Pengaman Mangrove	11
2	Satpam DLH dan Lab Lingkungan	7
3	Petugas Perawatan Taman Kota	68
4	Petugas Cleaning Service / Tukang Kebun	3
5	Koordinator Lapangan TIS Kebal	1
6	Tenaga Kontrak dengan tugas khusus TIS Kebal	1
7	Pengawas Pengangkut Sampah	7
8	Petugas Pengangkut Sampah	64
9	Petugas Hunting Sampah	8
10	Pengawas Gelandang /Penyapuan	12
11	Petugas Gelandang	36
12	Petugas Finishing, Pemeliharaan Depo Sampah, Emergency, Pengelola rumah kompos, penyapu jalan, tabungan lingkungan	150
13	Petugas Depo 3R/TPS3R	32
14	Pengawas TPA Sampah	1
15	Petugas TPA Sampah	15
16	Sopir Operasional	32
17	Teknisi/Mekanik/Operator	7
Total		455

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DLH, 2025

Aset/Modal

Asset/modal merupakan sarana dan prasarana penunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, dimana pembiayaannya berasal dari APBD maupun APBN. Dinas Lingkungan Hidup dilengkapi dengan perlengkapan kantor berupa barang inventaris kantor. Sarana bangunan kantor serta lahan yang menjadi area kerja Dinas Lingkungan Hidup antara lain: Gedung Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, Gedung UPT. Laboratorium Lingkungan, Gedung kantor dan lahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dan Ruang Terbuka Hijau.

Tabel 2.3 Perhitungan Luas Penambahan RTH Kota

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Taman Kota	-	115,9658	19,4097	19,544992	19,544992
2	Rimba Kota	-	1,0160	1016,086258	1016,086258	1016,09
3	Jalur Hijau Di Jalan	-	1,5068	1,5068	1,5068	1,51
4	Tempat Pemakaman Umum (TPU)	-	42,9200	42,92	42,92	43,38
5	Kawasan Ekosistem Mangrove	-	269,0831	440,9420	518,6761	586,06
6	Kawasan Perlindungan Setempat	-	91,9892	92,0092	92,0092	97,85
	Total RTH	1.443,67	1.537,4649	1.612,87	1.690,74	1.764,47

Sumber: Bidangng Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Tahun 2024

Tabel 2.4 Daftar Peralatan UPT Laboratorium Lingkungan

NO	NAMA ALAT	Kondisi				Keterangan
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah	
1	GAS ASPIRATING PUMP			1 unit	1 unit	
2	PRECISION GAS DETECTORTUBES					
	A. CARBONDIOXIDE CO2			9 pcs	9 pcs	EXP. 31-07-2010
	B.SULPHURDIOXIDE SO2			9 pcs	9 pcs	EXP. 30-4-2011
	C. NITROGENDIOXIDE NO2			9 pcs	9 pcs	EXP. 31-05-2009
	D. HIDROGEN SULPHIDE H2S			9 pcs	9 pcs	EXP. 30-06-2011
	E. CARBONMONOXIDE CO			9 pcs	9 pcs	EXP. 31-05-2011
3	EXHAUST EMISSIONS ANALYZER			1 set	1 set	
4	HIGH VOLUME AIR SAMPLE	1 unit			1 unit	
5	SOUND LEVEL METER			1 unit	1 unit	
6	COD REACTOR	1 unit			1 unit	
7	PHOTOMETER SYSTEM MULTIDIRECT		1 unit		1 unit	
8	TIMBANGAN ANALITIK			1 unit	1 unit	
9	OXYGEN METER			1 unit	1 unit	
10	PH / CONDUCTIVITY METER			1 set	1 set	
11	DO METER			1 set	1 set	
12	LABORATORY OVEN	1 unit			1 unit	
13	PENGUJIAN TSS	1 unit			1 unit	
14	FITRATION VACUUM PUMP	1 unit			1 unit	
15	BOD INCUBATOR	1 unit			1 unit	

NO	NAMA ALAT	Kondisi				Keterangan
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah	
16	BOD SYSTEM 6 VELP			1 unit	1 unit	
17	LABORATORY BLENDER	1 unit			1 unit	
18	VOLUMETRIC PIPETTE 1 ml	1 unit			1 unit	
19	VOLUMETRIC PIPETTE 5 ml	1 unit			1 unit	
20	VOLUMETRIC PIPETTE 10 ml	1 unit			1 unit	
21	VOLUMETRIC PIPETTE 25 ml	1 unit			1 unit	
22	VOLUMETRIC PIPETTE 50 ml	1 unit			1 unit	
23	MEASURING PIPETTE 5 ML	1 unit			1 unit	
24	MEASURING PIPETTE 10 ML	1 unit			1 unit	
25	VOLUMETRIC FLASK 100 ml W/PE STOPPER	1 unit			1 unit	
26	VOLUMETRIC FLASK 200 ml W/PE STOPPER	1 unit			1 unit	
27	VOLUMETRIC FLASK 1000 mlW/ PE STOPPER	1 unit			1 unit	
28	VOLUMETRIC FLASK 50 ml W/PE STOPPER	1 unit			1 unit	
29	MEASURING CYLINDER GLASS 100 ml	2 unit			2 unit	
30	MEASURING CYLINDER GLASS 50 ml	2 unit			2 unit	
31	MEASURING CYLINDER GLASS 25 ml	1 unit			1 unit	
32	LAB. BOTTLE 100 ml, WITH Blue Screwcap	5 unit			5 unit	
33	LAB. BOTTLE 250 ml, WITH Blue Screwcap	5 unit			5 unit	
34	LAB. BOTTLE 1000 ml, WITH Blue Screwcap	5 unit			5 unit	
35	PETRI DISH 100 mm X 15 mm	3 unit			3 unit	
36	EVAPORATING BASIN 110 ml WITH Spout	3 unit			3 unit	
37	BOD BOTTLE,CLEAR 100 ml	1 unit			1 unit	
38	BOD BOTTLE,CLEAR 300 ml	1 unit			1 unit	
39	PIPETTE FILLER UNIVERSAL	2 unit			2 unit	
40	TEST TUBE w/o SCREW CAP 16 X 100 mm	25 unit			25 unit	
41	SCREW CAP NO.16	25 unit			25 unit	
42	SPATULA SPOON SS , 180 mm	1 unit			1 unit	
43	TEST TUBE RACK SS304, Ø 16MM,50 H	1 unit			1 unit	
44	ERLENMEYER FLASK 100 ml W/GLASS STOPPER	1unit			1unit	
45	ERLENMEYER FLASK 250 ml W/GLASS STOPPER	3 unit			3 unit	
46	BEAKER GLASS 1 L (LOWFORM)	2 unit			2 unit	
47	BEAKER GLASS 1 L (TALLFORM)	1 unit			1 unit	
48	FORCEP,BLUNT POINT, SS 130mm	1 unit			1 unit	
49	FORCEP,STRAIGHTY, SS 200MM	1 unit			1 unit	
50	ERLENMEYER FLASK 100 ml	1 unit			1 unit	
51	MICROPIPETTE VOL 100-1000 µl	1 unit			1 unit	
52	DIGITAL THERMOIHYGROMETER JUMBODISPLAY	1 unit			1 unit	

NO	NAMA ALAT	Kondisi				Keterangan
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah	
53	DIGITAL THERMOHYGROMETER THI.HP			1 unit	1 unit	
54	MAGNETIC STIRING BAR,PTFE, POLYGON 4 CM	1 unit			1 unit	
55	MAGNETIC RETRIEVERS, L457 mm	1 unit			1 unit	
56	GLASS RED L = 200, OD= 5	1 unit			1 unit	
57	Ph meter portable d.51,includeelectrode, buffer	1 unit			1 unit	
58	ANALYTICAL BALANCE	1 unit			1 unit	
59	STIRING HOT PLATE DIGITALMODEL	1 unit			1 unit	
60	TEST TUBE RACK S.S	1 pcs			1 pcs	
61	MICRO BURETTE W/SCHELBACH STRIP			1 pcs	1 pcs	
62	Dessicator OH-3S AS_ONE	1 unit			1 unit	
63	DIGITAL BURETTE 50 ml	1 unit			1 unit	
64	Lemari Asam/Fume HoodAscent Max ductless	1 unit			1 unit	
65	MICROPIPPETE ECOPIPPETE WITH STAND VOLUME 0.2-2 µl,0,5-10 µl,,2-20 µl,,5-50µl,,10-100 µl, 20-200µl,, 100-1000µl, 1-5 µl	1 set			1 set	
66	Electrode pH Meter			1 unit	1 unit	
67	Winkler Bottle for BOD	1 unit			1 unit	
68	Retort stand base	1 unit			1 unit	
69	Rods	1 unit			1 unit	
70	Burette Clamp	1 unit			1 unit	
71	Erlenmeyer butcher	1 unit			1 unit	
72	Volumetric Flask 1000 ml	1 unit			1 unit	
73	Volumetric Flask 500 ml	2 unit			2 unit	
74	Volumetric Flask 250 ml	2 unit			2 unit	
75	Volumetric Flask 100 ml	2 unit			2 unit	
76	Volumetric Flask 50 ml	1 unit			1 unit	
77	Erlenmeyer Flask 500 ml	2 unit			2 unit	
78	Erlenmeyer Flask 250 ml	2 unit			2 unit	
79	Erlenmeyer Flask 150 ml	2 unit			2 unit	
80	Beaker 1000 ml	2 unit			2 unit	
81	Beaker 600 ml	2 unit			2 unit	
82	Beaker 250 ml	2 unit			2 unit	
83	Beaker 100 ml	2 unit			2 unit	
84	Anemometer			1 unit	1 unit	
85	Gent Sampler (PM10)	1 unit			1 unit	
86	Spectrophotometer			1 unit	1 unit	
87	Gas Sampler	1 unit			1 unit	
88	Seperangkat Alat Destilasi	1 set			1 set	
89	Neraca Analitik	1 unit			1 unit	
90	Termometer	1 unit			1 unit	
91	GPS	1 unit			1 unit	

NO	NAMA ALAT	Kondisi				Keterangan
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah	
92	PH Meter	1 unit			1 unit	
93	DO Meter (DLH)	1 unit			1 unit	
94	Water Sampler Horizontal (DLH)	1 unit			1 unit	
95	CO2 Meter	1 unit			1 unit	
96	Colony Counter	1 unit			1 unit	
97	CO Meter	1 unit			1 unit	
98	Fan Anemometer	1 unit			1 unit	
99	Flue Gas Analyzer	1 unit			1 unit	
100	Portable Turbidity Meter	1 unit			1 unit	
101	Real Time Air Particulate Monitor	1 unit			1 unit	
102	Salinity Meter	1 unit			1 unit	
103	Sound Level Meter	1 unit			1 unit	
104	Portable Chlorine Meter	1 unit			1 unit	
105	Spektrofotometer UV- Visible	1 unit			1 unit	
106	Cooler Box 22 Liter	1 unit			1 unit	
107	Cooler Box 55 Liter	1 unit			1 unit	
108	Digital Buret	1 unit			1 unit	
109	Aninometer	1 unit			1 unit	
110	Sound Level Meter	1 unit			1 unit	
111	Ozon meter	1 unit			1 unit	

Sumber: Dokumen Inventarisir Peralatan UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup Tahun 2025

Tabel 2.5 Daftar Kendaraan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

NO	NAMA ALAT	Kondisi				Keterangan
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah	
1	Kendaraan Roda 2	23 unit		3 unit	26 unit	
2	Kendaraan Roda 3	3 unit			3 unit	
3	Kendaraan Roda 4	20 unit		3 unit	23 unit	
4	Kendaraan Roda 6	31 unit	1 unit	2 unit	34 unit	
5	Excavator	3 unit			3 unit	
6	Bulldozer	1 unit	1 unit		2 unit	

Sumber: Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan DLH Kota Tarakan

Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawabnya sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi. Namun harus diakui bahwa secara umum di Kota Tarakan masih belum terwujud budaya hidup bersih dan kesadaran lingkungan seperti yang diharapkan oleh semua pihak. Adapun capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)				65,8	68,83	69,28	69,74	70,19	67,07	73,15	69,38	69,6	68,27	101,900	106	100,14%	99,81%	97,3%
2	Indeks Kualitas Air (IKA)				45,56	54,82	54,92	55,02	55,12	45,56	63,33	53,33	54,44	54,44	103,55%	115,52%	97,10%	98,95%	98,77%
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)				93,42	91,45	91,55	91,66	91,77	93,42	93,27	93,24	93,14	89,51	107,38%	101,99%	101,85%	101,61%	97,54%
4	Indeks Tutupan Lahan (ITL)				55,3	51,06	52,76	54,46	56,16	55,3	52,79	52,81	52,1	52,73	99,64%	103,39%	100,09%	95,67%	93,89%
5	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melanggar dalam pengelolaan lingkungan hidup				52%	48%	45%	41%	38%	52%	22,22%	16,66%	0%	8,33%	100%	46,29%	37,02%	0%	21,92%
6	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau				50,40%	52,96%	55,52%	58,07%	60,63%	50,40%	52,97%	55,56%	58,24%	60,78%	100%	100,01%	100,08%	100,29%	100,25%
7	Persentase penanganan sampah				75%	74%	73%	72%	70%	78,32%	78,24%	79,86%	80,03%	78,80%	104,43%	105,73%	109,40%	111,15%	112,57%
8	Persentase pengurangan sampah				12,50%	24%	26%	27%	28%	12,45%	14,27%	15,28%	17,63%	18,21%	99,60%	59,46%	58,77%	65,30%	65,04%
9	Persentase penanganan limbah B3				1,75	100%	100%	100%	100%	90%	99%	93,74%	89,81%	87,85%	51,43%	100,00%	93,74%	86,96%	87,85%

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata - rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggar an	Realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	NA	24.629.673.023	26.243.566.895	27.256.117.709	28.202.036.321	NA	23.392.369.892	25.073.364.986	26.222.236.359	26.525.670.863		95%	96%	96%	94%	3%	5,88%
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	NA	200.000.000		243.126.480	256.550.000	NA	189.926.643		231.033.998	208.439.500		95%	-	95%	81%	-34%	81.25%
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	NA	280.088.000	433.266.072	473.741.555	631.031.183	NA	248.147.450	409.706.272	444.140.890	606.136.726		89%	95%	94%	96%	5%	96.05%
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	NA	1.806.451.422	1.549.869.647	2.619.985.770	1.928.038.334	NA	1.775.873.194	1.546.269.072	2.606.804.185	1.901.750.803		98%	100%	99%	92%	5%	98,64%
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	NA	1.459.000.000	49.999.180	29.038.130	68.066.940	NA	965.819.000	29.624.618	23.291.120	63.961.271		66%	59%	80%	94%	-1%	93,97%
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	NA	26.427.986	29.940.230	19.813.400	72.162.800	NA	25.107.053	28.789.225	19.703.400	43.270.863		95%	96%	99%	60%	81%	81,25%
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	NA			84.620.160	97.779.280	NA			79.637.495	92.325.275		-	-	94%	94%	16%	94,42%
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	NA	74.130.000	69.497.970	85.378.730	76.188.350	NA	73.789.800	65.595.542	79.693.555	73.302.119		100%	94%	93%	96%	-12%	96,21%
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	NA			7.768.340	16.653.000	NA			6.489.340	14.910.000		-	-	84%	90%	116%	NA
Program Pengelolaan Persampahan	NA	1.333.505.817	15.790.640.755	3.058.816.522	3.734.852.560	NA	1.305.177.823	15.692.949.920	2.972.948.130	3.650.535.561		98%	99%	97%	98%	338%	510,65%

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan DLH Kota Tarakan

Dinas Lingkungan Hidup yang menjalankan urusan wajib non pelayanan dasar memiliki sasaran pelayanan sesuai fungsi urusan lingkungan hidup serta kewenangan yang meliputi masyarakat luas, sektor usaha dan pemerintahan. Sasaran ini bertujuan untuk mencapai keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup serta membangun kesadaran dan aksi nyata dalam melindungi dan memelihara lingkungan.

Berikut adalah kelompok sasaran pelayanan yang menjadi target utama dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan selama periode perencanaan strategi.

Tabel 2.8 Kelompok Sasaran Layanan

NO	TUGAS DAN FUNGSI	PRODUK LAYANAN	SASARAN LAYANAN
1	Fungsi Perencanaan Lingkungan Hidup	Informasi Lingkungan hidup (D3TLH, RPPLH)	1. OPD Terkait 2. Masyarakat
		Penyusunan KLHS RPJMD/RPJPD	1. Semua OPD
2	Fungsi Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pemantauan kualitas air sungai, air danau, air limbah domestik IPAL komunal dan kualitas udara ambien di wilayah Kota Tarakan	1. Industri 2. Masyarakat 3. Siswa/Mahasiswa 4. Perhotelan 5. Food and Beverage (F&B)
		1. Inventarisasi penurunan emisi Gas Rumah Kaca yang ada di Kota Tarakan; 2. Penyuluhan dan pembinaan terhadap masyarakat paling rendah RW yang berpotensi diusulkan untuk program Kampung Iklim;	1. Masyarakat di Kota Tarakan
		Pengujian kualitas air dan air limbah, Pengujian kualitas udara (next 2026)	1. Industri; 2. Masyarakat; 3. Siswa/Mahasiswa 4. Perhotelan 5. Food and Beverage (F&B)
		1. Pemberian Bibit Tanaman/Rehabilitasi Lahan 2. Pemberian Informasi/Sosialisasi Terkait	1. Masyarakat
3	Fungsi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1. Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati 2. Pemeliharaan Taman aktif dan Pasif	1. Dinas PUPR 2. Dinas Pariwisata 3. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 4. Perguruan Tinggi 5. Kecamatan 6. Kelurahan
4	Fungsi Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Fasilitasi permohonan pemeriksaan rincian teknis penyimpanan sementara Limbah B3	Pelaku usaha dan/atau kegiatan di Wilayah Kota Tarakan yang menyusun rincian teknis penyimpanan Limbah B3.
5	Fungsi Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1. Berita Acara Pengawasan	1. Pelaku Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

NO	TUGAS DAN FUNGSI	PRODUK LAYANAN	SASARAN LAYANAN
6	Fungsi Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Pelatihan dan Penyuluhan (Bimtek)	1. Masyarakat 2. Kelompok Masyarakat Pelaku Usaha/Kegiatan
7	Fungsi Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Penghargaan Lingkungan Hidup	1. Masyarakat 2. Lembaga Masyarakat 3. Dunia Usaha 4. Dunia Pendidikan Filantropi
8	Fungsi Penangan Pengaduan Lingkungan Hidup	Laporan Penanganan Pengaduan	1. Masyarakat Pelaku Usaha/Kegiatan
9	Fungsi Pengelolaan Persampahan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Data Persentase Penanganan Sampah
		Fasilitas pengumpulan sampah tersedia	Masyarakat
		Sarana pemilahan dan pengolahan sampah di TPS3R, TPST dan TPA	1. Pengelola sampah permukiman dan non permukiman Para pihak terkait pengelolaan sampah
		Pembentukan dan pembinaan lembaga pengelola sampah di masyarakat	Pembentukan dan pembinaan lembaga pengelola sampah di masyarakat

Tabel diatas menggambarkan kelompok sasaran yang menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan layanan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan pada periode ini. Setiap kelompok sasaran ini memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, yang mempengaruhi desain dan implementasi layanan yang diberikan. Penyusunan dan pemilihan kelompok sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap layanan yang disediakan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak yang maksimal.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok sasaran, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan dapat menyusun strategi yang lebih terarah dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Selain itu, hal ini juga memungkinkan penyesuaian kebijakan dan program yang lebih efektif, sehingga pencapaian hasil yang diinginkan dapat lebih optimal.

1. Mitra DLH Kota Tarakan dalam memberikan layanan

Untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Kemitraan ini mencakup unsur pemerintah, BUMD, swasta, akademisi, masyarakat, dan media, yang masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan Urusan Bidang Lingkungan Hidup. Berikut ini adalah rincian mitra perangkat daerah yang berperan dalam mendukung kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan.

Tabel 2.9 Mitra Perangkat Daerah

No	Mitra Perangkat Daerah/Lainnya	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
1	PT Sucofindo	Pengujian Sampel Air dari hasil buangan IPAL Perusahaan	Hasil Pengujian Sampel Air digunakan untuk pengawasan
2	PT Mutu Agung Lestari	Pengujian Sampel Air sungai dan kalibrasi peralatan laboratorium	Hasil Pengujian Sampel Air digunakan untuk perhitungan Kualitas Air Sungai

Sumber Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan

Mitra-mitra yang tercantum dalam tabel ini memiliki peran penting dalam memperkuat penyelenggaraan layanan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan. Kolaborasi yang terjalin antara perangkat daerah dengan mitra ini menunjukkan adanya sinergi yang mendukung pencapaian tujuan bersama, serta memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan mampu tercipta pelayanan yang berkualitas, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Pemetaan mengenai masalah pokok, masalah turunan, dan akar masalah ditampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.10

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Menurunnya kualitas lingkungan hidup	Menurunnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	
		Belum optimalnya upaya pencegahan pencemaran
		Belum terpenuhinya ketersediaan data kualitas lingkungan
		Belum optimalnya upaya rencana aksi tindak lanjut pencegahan pencemaran
		Belum optimalnya pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
		Belum optimalnya rehabilitasi lahan
		Belum optimalnya pengelolaan RTH
		Belum optimalnya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		Belum optimalnya kegiatan lingkungan hidup
		Belum optimalnya adaptasi mitigasi perubahan iklim
		Belum optimalnya pendampingan penilaian kinerja
		Belum tersedianya dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
		Belum optimalnya Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
		Belum optimalnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum efektifnya pengelolaan sampah	
		Belum optimalnya pengurangan sampah melalui pembatasan, pemanfaatan kembali dan pendauran ulang
		Belum optimalnya penanganan sampah melalui pemilahan, pewadahan, pengangkutan, pengolahan sampah
		Belum optimalnya pengelolaan sampah di TPA
		Belum optimalnya pengelolaan kebersihan kota
		Belum optimalnya pengelolaan LB3
		Belum optimalnya koordinasi pengelolaan LB3
	Belum optimalnya Tata Kelola DLH	
		Belum optimalnya penyediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu
		Belum optimalnya penyediaan Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP
		Belum optimalnya penyediaan layanan administrasi kepegawaian
		Belum optimalnya penyediaan layanan administrasi umum
		Belum optimalnya pengelolaan data Barang Milik Daerah dalam aplikasi
		Belum optimalnya penyediaan layanan jasa penunjang
		Belum optimalnya pemeliharaan Barang Milik Daerah

Berdasarkan pemetaan permasalahan pelayanan yang tercantum dalam tabel di atas, dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan.

Permasalahan-permasalahan ini akan menjadi salah satu sumber utama dalam merumuskan isu-isu strategis yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Peyeleasaan terhadap isu strategis ini akan menjadi prioritas dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan perangkat daerah kedepan.

Tabel 2.11 Isu Strategis

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu Klhs Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1. Keanekaragaman Hayati	Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup	1. Belum optimalnya upaya pembangunan berkeanan iklim dan tangguh bencana berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan;	1. Perubahan Iklim dan pemanasan global dapat berdampak pada lingkungan	1. Pencemaran Air, Udara dan Tanah	1. Pencemaran Air, Udara dan Tanah	Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup
2. Ekosistem Mangrove		2. Belum optimalnya peningkatan kesadaran dan pengelolaan sampah berkelanjutan;	2. Hilangnya Keanekaragaman Hayati	2. Deforestasi dan Kerusakan Hutan	2. Deforestasi dan Kerusakan Hutan	
3. Peningkatan Wilayah Proklam		3. Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis ekologis;	3. Pencemaran Lingkungan (Air, Udara Tanah)	3. Timbunan Sampah		
4. Pengeloaan sampah TPS3R			4. Degradasi Lahan dan Tanah	4. Perubahan Iklim	4. Bencana alam seperti banjir dan abrasi pantai	

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu Klhs Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
			5. Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berlebihan	6. Bencana alam seperti banjir, abrasi pantai, kebakaran hutan dan lahan	5. Aktivitas Pertambangan	
				7. Krisis air bersih dan sanitasi	6. Konversi lahan untuk perkebunan dan industri	
					7. Penegakan Hukum Lingkungan	
					8. Timbulan sampah	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 mencerminkan kinerja yang ingin dicapai selama lima tahun, yang akan menggambarkan manfaat Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kinerja (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau dengan mempertimbangkan sasaran RPJMD.

Sementara sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Dengan ditetapkan tujuan dan sasaran maka dapat diketahui secara jelas apa yang harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam memenuhi visi dan misinya untuk lima tahun kedepan. Tujuan Dinas Lingkungan Hidup adalah *Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup*.

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Adapun Visi pembangunan Kota Tarakan dalam RPJMD Kota Tarakan tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya Tarakan Sebagai Kota Cerdas yang Bertumpu Pada Sektor Jasa, Perdagangan, Perikanan Kelautan, dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Maju Menuju Masyarakat Sejahtera”. Visi tersebut di atas memiliki substansi nilai (*value*) atau pokok-pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk menjabarkan dalam Misi Pembangunan.

Berdasarkan dari visi yang telah dirumuskan dan dijelaskan sebelumnya, Kota Tarakan memiliki 5 (lima) misi pembangunan dimana Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan mendukung Misi ke 5 Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh menghadapi bencana. Misi kelima ini mencerminkan tekad Pemerintah Kota Tarakan untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan mengelola sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan, serta Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan infrastruktur kota terhadap berbagai potensi bencana, baik bencana alam maupun non-alam.

Tujuan dari Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh menghadapi bencana adalah untuk mencegah kerusakan lingkungan dan menurunkan risiko bencana, meningkatkan kualitas hidup masyarakat lewat lingkungan yang sehat dan aman, memastikan pembangunan berjalan tanpa merusak ekosistem, dan membangun kota yang tangguh, berdaya tahan, dan siap menghadapi perubahan iklim.

Kota Tarakan memiliki karakter geografis sebagai kota pesisir dan kepulauan yang rentan terhadap abrasi pantai, banjir rob, kebakaran lahan, serta dampak perubahan iklim. Karena itu, perencanaan lingkungan dan kebencanaan harus menjadi prioritas utama agar masyarakat bisa hidup aman, nyaman, dan produktif. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh terhadap bencana di Kota Tarakan berarti menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam, sambil memastikan kesiapan seluruh elemen kota menghadapi potensi bencana secara sistematis dan berkelanjutan.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup											
- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	68,27	70,06	70,14	70,23	70,31	70,4	70,49	
		Meningkatnya kualitas air, udara dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air (Indeks)	54,44	71,88	71,98	72,08	72,18	72,28	72,38	
			Indeks Kualitas Udara (Indeks)	89,51	71,52	71,62	71,72	71,82	71,92	72,02	
			Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	52,73	64,23	64,23	64,29	64,32	64,35	64,38	
		Meningkatnya efektivitas pengelolaan sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	0	55,72	56,24	57,81	58,32	60,74	61,84	
		Meningkatnya Tata Kelola DLH	Nilai SAKIP (Nilai)	76,92	77,12	77,42	77,67	77,92	78,17	78,42	
			Indeks kepuasan masyarakat (Indeks)	85,25	85,6	85,95	86,3	86,65	87	87,31	

Perumusan tujuan dan sasaran di atas juga didasarkan pada pendekatan logical framework dan pohon kinerja. Berikut ini disajikan gambaran mengenai logical framework dan pohon kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, yang merupakan alat untuk memetakan hubungan antara input, output, outcome, dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas fungsi perangkat daerah secara sistematis dan terukur.

3.2. Strategi

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif, yang mencakup langkah-langkah dan upaya yang akan dilaksanakan, di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, penentuan tahapan, fokus, serta program/kegiatan/sub kegiatan, guna menghadapi dinamika lingkungan dan mencapai tujuan serta sasaran Renstra PD. Selain itu, strategi Perangkat Daerah juga disusun berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang dihadapi. Berikut ini adalah proses perumusan strategi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, yang meliputi antara lain:

Tabel 3.2 Penentuan Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan

TAHAP 1	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Infrastruktur Persampahan di TPA Juata Kerikil, Ruang Terbuka Hijau dan PPLH dalam rangka Pelayanan Publik dan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Insfrastruktur Pendukung Persampahan (TPST di Juata Kerikil, TPS, TPS3R dan Bank Sampah) dan Pemberdayaan Masyarakat	Penguatan Daya Saing Daerah, Sumber Daya Manusia yang Unggul, di mana SDM yang kompeten dan adaptif dapat mengoptimalkan potensi daerah, mendukung ekonomi hijau, dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan berkelanjutan serta mitigasi risiko iklim.	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Proklamasi dan Adiwiyata, melalui ekonomi sirkular mengubah sampah menjadi peluang dengan mendorong penggunaan kembali (reuse), perbaikan (repair), pembaruan (refurbishment), produksi ulang (remanufacturing), dan daur ulang (recycling), dan ekonomi hijau mendorong investasi dalam infrastruktur dan aktivitas ramah lingkungan, seperti energi terbarukan dan teknologi hijau, serta pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab	Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup yang dapat diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

3.3. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Selain itu arah kebijakan Renstra PD disusun berdasarkan akar masalah pembangunan perangkat daerah.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan memiliki arah kebijakan yang selaras dengan NSPK dan Arah Kebijakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3 Arah Kebijakan

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
	Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	Pelaksanaan pencegahan pencemaran
	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Polusi	Pemenuhan data kualitas lingkungan hidup
	Permen LHK No. 12 Tahun 2021 tentang Ukur Beban Pencemar Udara dan Pemantauan Emisi	Peningkatan Kemitraan dengan Masyarakat dan Sektor Swasta	Pelaksanaan rencana aksi tindak lanjut
	Permen LHK No. 14 Tahun 2020 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Penerapan Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim	Pelaksanaan rehabilitasi lahan
	Permen LHK No. 7 Tahun 2020 tentang Sistem Pemantauan Kualitas Air Permukaan	Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung Lingkungan Hidup Berkelanjutan	pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
	Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air		Pengelolaan RTH
	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang		Pelaksanaan rencana aksi adaptasi mitigasi perubahan iklim
	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2022		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
	Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK)		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
	Peraturan Menteri LHK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Peta Jalan Pengurangan Emisi		Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah		Pelaksanaan kegiatan lingkungan hidup
	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik		Pendampingan penilaian kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi
	Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah		Pengurangan sampah melalui pembatasan, pemanfaatan kembali dan pendauran ulang
	Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Sampah Plastik		Penanganan sampah melalui pemilahan, pewadahan, pengangkutan, pengolahan sampah
	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang		Pengelolaan sampah di TPA
	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Pengelolaan kebersihan kota
	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		Pengelolaan limbah B3
	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah		

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
	Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)		
	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Nonbahan Berbahaya Dan Beracun		
	Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Sampah Plastik		

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TARAKAN

4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Lingkungan Hidup dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029. Adapun kerangka perencanaan pada tahun 2030 disusun untuk menjaga kesinambungan perencanaan yaitu sebagai pijakan penyusunan Renja DLH pada tahun 2030. Nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 4.1.
Perumusan Program/kegiatan/Subkegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	
		Meningkatnya kualitas air, Udara dan tutupan lahan			Indeks Kualitas Air (Indeks)	
					Indeks Kualitas Udara (Indeks)	
					Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	
			Meningkatnya pemenuhan dokumen lingkungan hidup		Persentase dokumen lingkungan hidup yang disusun/ditetapkan sebagai peraturan daerah (%)	2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
				Tersedianya dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali (Dokumen)	2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
					Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan (Dokumen)	2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
					Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan yang dilakukan pemantauan dan evaluasi (Dokumen)	2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
					jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
					Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan (Dokumen)	2.11.02.2.01.0003 - Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
					Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali (Dokumen)	2.11.02.2.01.0004 - Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota
					jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	2.11.02.2.01.0006 - Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota
					Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan yang dilakukan pemantauan dan evaluasi (Dokumen)	2.11.02.2.01.0007 - Pemantauan dan Evaluasi RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan
				Tersedianya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
					Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi (Dokumen)	2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
					Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
					Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi (Dokumen)	2.11.02.2.02.0004 - Pemantauan dan Evaluasi KLHS
			Meningkatnya upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup		Indeks pencemaran air sungai (Indeks)	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
					Rata - rata NO2 (Poin)	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
					Rata - rata SO2 (Poin)	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
				Terlaksananya pencegahan pencemaran	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
					Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan (Kegiatan)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
					Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan (Kegiatan)	2.11.03.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
					Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	2.11.03.2.01.0011 - Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
				Tersedianya data kualitas lingkungan	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
					Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
					Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
					Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan (Unit)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
					Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan (Unit)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
					Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	2.11.03.2.01.0007 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
					Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan (Unit)	2.11.03.2.01.0009 - Pengoperasian dan Pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota
					Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	2.11.03.2.01.0012 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan
					Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan (Unit)	2.11.03.2.01.0013 - Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota
					Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota
			Tersedianya rencana aksi tindak lanjut		Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan (Laporan)	2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
					Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan (Laporan)	2.11.03.2.03.0014 - Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan
			Menurunnya degradasi lahan		Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan (%)	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
				Terlaksananya pemberian Informasi peringatan Pecemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
					Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	2.11.03.2.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
				Bertambahnya rehabilitasi lahan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
					Luas area yang dilakukan rehabilitasi dikabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
					Luas area yang dilakukan rehabilitasi dikabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	2.11.03.2.03.0009 - Pelaksanaan rehabilitasi
					jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	2.11.03.2.03.0013 - Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi
			Meningkatnya Kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim		Nilai Kampung Iklim (Poin)	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
				Terlaksananya rencana aksi adaptasi mitigasi perubahan iklim	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
					Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim (Laporan)	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2.11.03.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
					Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	2.11.03.2.01.0005 - Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
					Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim (Laporan)	2.11.03.2.01.0010 - Pelaksanaan upaya Mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota
			Meningkatnya ruang terbuka hijau		Persentase peningkatan RTH (%)	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
				Terkelolanya RTH kewenangan DLH	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	2.11.04.2.01.0007 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
				Terkelolanya taman Keanekaragaman hayati lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
					Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya Dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
					Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	2.11.04.2.01.0001 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
					Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya Dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)	2.11.04.2.01.0006 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
					Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	2.11.04.2.01.0008 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
			Meningkatnya Ketaatan pelaku Usaha dan/atau Kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Usaha/Kegiatan)	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Sarana Prasarana yang Disediakan untuk Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Dampak Lingkungan dan PPNS untuk Menunjang Kinerja Penegakan Hukum (Unit)	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	2.11.06.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
					Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	2.11.06.2.01.0007 - Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
					Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Usaha/Kegiatan)	2.11.06.2.01.0010 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
					Jumlah Sarana Prasarana yang Disediakan untuk Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Dampak Lingkungan dan PPNS untuk Menunjang Kinerja Penegakan Hukum (Unit)	2.11.06.2.01.0011 - Layanan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup
			Meningkatnya partisipasi kelompok masyarakat peduli lingkungan		Persentase kelompok masyarakat peduli lingkungan yang aktif (%)	2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
				Terselenggaranya kegiatan lingkungan hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
					Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2.11.08.2.01 – Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	2.11.08.2.01.0002 – Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
					Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	2.11.08.2.01.0003 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
			Meningkatnya Masyarakat yang mengelola lingkungan hidup		Persentase perusahaan yang mendapat predikat minimal biru dalam penilaian PROPER (%)	2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
					Persentase sekolah Adiwiyata (%)	2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
				Terlaksananya Pendampingan penilaian kinerja	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Optimalnya penanganan pengaduan lingkungan hidup		Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti (%)	2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
				Terlaksananya Layanan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/ kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota (Sanksi)	2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
					Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/ Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
					Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Orang)	2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
					Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola (Pengaduan)	2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
					Jumlah penerapan sanksi administratif yang Dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota (Sanksi)	2.11.10.2.01.0010 - Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
					Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Orang)	2.11.10.2.01.0011 - Pengembangan Kapasitas SDM bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
		Meningkatnya efektivitas pengelolaan sampah			Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	
			Meningkatnya pengelolaan limbah B3		Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
				Terkelolanya LB3	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen)	2.11.05.2.01 - Penyimpanan sementara Limbah B3
					Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan (Usaha)	2.11.05.2.01 - Penyimpanan sementara Limbah B3
					Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen)	2.11.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)
					Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan (Usaha)	2.11.05.2.01.0006 - Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3
				Terkelolanya LB3 di luar kewenangan kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen)	2.11.05.2.02 - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda	2.11.05.2.02.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
					Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen)	
			Meningkatnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat		persentase sampah yang terkelola (%)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
					Proporsi Rumah Tangga dengan layanan pengumpulan sampah (Persentase)	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
				Terlaksananya Pengurangan sampah melalui pembatasan, pemanfaatan kembali dan daur ulang	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah (Laporan)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
					Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah
					Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali (Ton)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah
					Jumlah sampah yang terdaur ulang (Ton)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah
					Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
					Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah (Laporan)	2.11.11.2.01.0018 - Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah
					Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali (Ton)	2.11.11.2.01.0024 - Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah
					Jumlah sampah yang terdaur ulang (Ton)	2.11.11.2.01.0030 - Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah
				Terlaksananya penanganan sampah melalui pemilahan, pewadahan, pengangkutan, pengolahan sampah	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah
					Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan
					Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	2.11.11.2.01.0016 - Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
				Terlaksananya pengelolaan sampah di TPA	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
					jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
				Terkelolanya kebersihan kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan (Unit)	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah
					Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan (Unit)	2.11.11.2.01.0028 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah
		Meningkatnya Tata Kelola DLH			Nilai SAKIP (Nilai)	
					Indeks kepuasan masyarakat (Indeks)	
			Meningkatnya Penguatan internal akuntabilitas kinerja		Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.11.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.11.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.11.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
				Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.11.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.11.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
			Meningkatnya Kualitas layanan kesekretariatan		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Tersedianya layanan administrasi kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.11.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.11.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
				Tersedianya layanan administrasi umum	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.11.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.11.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Terkelolanya data Barang Milik Daerah dalam aplikasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.11.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Tersedianya layanan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.11.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.11.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.11.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.11.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.11.01.2.09.0009 -Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.11.01.2.09.0011 -Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tabel 4.2.
Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				32.440.919.141,85		32.815.044.676,85		33.605.192.146,85		32.510.692.146,85		32.458.127.846,85		
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				22.322.915.079,85		22.281.649.086,85		22.281.649.086,85		22.231.649.086,85		22.231.649.086,85		
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	90,32	91,32	1.021.335.372,00	91,82	980.069.379,00	92,32	980.069.379,00	92,82	930.069.379,00	93,32	930.069.379,00	2.11.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				72.000.000,00		108.800.000,00		52.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya layanan administrasi kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	72.000.000,00	98	108.800.000,00	0	52.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	2		2		2		0		0			
2.11.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		49.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0,00	98	49.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.11.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				72.000.000,00		59.800.000,00		52.000.000,00		0,00		0,00		
2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				143.314.380,00		143.314.380,00		143.314.380,00		143.314.380,00		143.314.380,00		
Tersedianya layanan administrasi umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0	12	143.314.380,00	12	143.314.380,00	12	143.314.380,00	12	143.314.380,00	12	143.314.380,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
2.11.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4.014.600,00		4.014.600,00		4.014.600,00		4.014.600,00		4.014.600,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	4.014.600,00	1	4.014.600,00	1	4.014.600,00	1	4.014.600,00	1	4.014.600,00		
2.11.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				44.578.320,00		44.578.320,00		44.578.320,00		44.578.320,00		44.578.320,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	44.578.320,00	1	44.578.320,00	1	44.578.320,00	1	44.578.320,00	1	44.578.320,00		
2.11.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				49.149.100,00		49.149.100,00		49.149.100,00		49.149.100,00		49.149.100,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	49.149.100,00	1	49.149.100,00	1	49.149.100,00	1	49.149.100,00	1	49.149.100,00		
2.11.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				6.002.660,00		6.002.660,00		6.002.660,00		6.002.660,00		6.002.660,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	12	6.002.660,00	12	6.002.660,00	12	6.002.660,00	12	6.002.660,00	12	6.002.660,00		
2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				39.569.700,00		39.569.700,00		39.569.700,00		39.569.700,00		39.569.700,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5	5	39.569.700,00	5	39.569.700,00	5	39.569.700,00	5	39.569.700,00	5	39.569.700,00		
2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				117.386.900,00		80.586.900,00		117.386.900,00		117.386.900,00		117.386.900,00		
Terkelolanya data Barang Milik Daerah dalam aplikasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	38	10	117.386.900,00	6	80.586.900,00	6	117.386.900,00	6	117.386.900,00	6	117.386.900,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	30	5		5		8		8		8			
2.11.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				60.000.000,00		28.201.800,00		28.201.800,00		28.201.800,00		28.201.800,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	38	10	60.000.000,00	6	28.201.800,00	6	28.201.800,00	6	28.201.800,00	6	28.201.800,00		
2.11.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				57.386.900,00		52.385.100,00		89.185.100,00		89.185.100,00		89.185.100,00		
2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				446.872.000,00		446.872.000,00		446.872.000,00		446.872.000,00		446.872.000,00		
Tersedianya layanan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	446.872.000,00	12	446.872.000,00	12	446.872.000,00	12	446.872.000,00	12	446.872.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.11.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.11.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				445.872.000,00		445.872.000,00		445.872.000,00		445.872.000,00		445.872.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	445.872.000,00	12	445.872.000,00	12	445.872.000,00	12	445.872.000,00	12	445.872.000,00		
2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				241.762.092,00		200.496.099,00		220.496.099,00		222.496.099,00		222.496.099,00		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	1	241.762.092,00	1	200.496.099,00	1	220.496.099,00	1	222.496.099,00	1	222.496.099,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	51	56		57		57		57		57			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	19	27		27		27		27		27			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	23	36		36		36		36					
2.11.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	19	27	13.000.000,00	27	13.000.000,00	27	13.000.000,00	27	13.000.000,00	27	13.000.000,00		
2.11.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				122.173.311,00		122.173.311,00		122.173.311,00		122.173.311,00		122.173.311,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	51	56	122.173.311,00	57	122.173.311,00	57	122.173.311,00	57	122.173.311,00	57	122.173.311,00		
2.11.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				82.228.781,00		40.962.788,00		60.962.788,00		62.962.788,00		62.962.788,00		
2.11.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				24.360.000,00		24.360.000,00		24.360.000,00		24.360.000,00		24.360.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	23	36	24.360.000,00	36	24.360.000,00	36	24.360.000,00	36	24.360.000,00	36	24.360.000,00		
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	76,92	77,42	21.301.579.707,85	77,67	21.301.579.707,85	77,92	21.301.579.707,85	78,17	21.301.579.707,85	78,42	21.301.579.707,85		
2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.400.000,00		6.400.000,00		6.400.000,00		6.400.000,00		6.400.000,00		
Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validasi Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	3	6.400.000,00	3	6.400.000,00	3	6.400.000,00	3	6.400.000,00	3	6.400.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
2.11.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
2.11.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
2.11.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	3	2.400.000,00	3	2.400.000,00	3	2.400.000,00	3	2.400.000,00	3	2.400.000,00		
2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				21.295.179.707,85		21.295.179.707,85		21.295.179.707,85		21.295.179.707,85		21.295.179.707,85		
Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2	2	21.295.179.707,85	2	21.295.179.707,85	2	21.295.179.707,85	2	21.295.179.707,85	2	21.295.179.707,85		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	71	71		71		71		71		71			
2.11.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				10.158.653.774,33		10.158.653.774,33		10.158.653.774,33		10.158.653.774,33		10.158.653.774,33		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	71	71	10.158.653.774,33	71	10.158.653.774,33	71	10.158.653.774,33	71	10.158.653.774,33	71	10.158.653.774,33		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2	2	11.136.525.933,52	2	11.136.525.933,52	2	11.136.525.933,52	2	11.136.525.933,52	2	11.136.525.933,52		
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				350.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		150.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup	
Meningkatnya pemenuhan dokumen lingkungan hidup	Persentase dokumen lingkungan hidup yang disusun/ditetapkan sebagai peraturan daerah (%)	100	28,57	350.000.000,00	42,86	200.000.000,00	71,43	300.000.000,00	85,71	300.000.000,00	100	150.000.000,00		
2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				350.000.000,00		200.000.000,00		150.000.000,00		0,00		150.000.000,00		
Tersedianya dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali (Dokumen)	0	0	350.000.000,00	0	200.000.000,00	0	150.000.000,00	0	0,00	1	150.000.000,00		
	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan (Dokumen)	0	0		1		0		0		0			
	Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan yang dilakukan pemantauan dan evaluasi (Dokumen)	0	0		0		1		0		0			
	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	0	1		0		0		0		0			
2.11.02.2.01.0003 - Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota				0,00		200.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan (Dokumen)	0	0	0,00	1	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.11.02.2.01.0004 - Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota				0,00		0,00		0,00		0,00		150.000.000,00		
RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	150.000.000,00		
2.11.02.2.01.0006 - Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota				350.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
RPPLH kabupaten/kota yang disusun	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	0	1	350.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.11.02.2.01.0007 - Pemantauan dan Evaluasi RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan				0,00		0,00		150.000.000,00		0,00		0,00		
Terlaksananya pemantauan dan evaluasi RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan yang dilakukan pemantauan dan evaluasi (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	1	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				0,00		0,00		150.000.000,00		300.000.000,00		0,00		
Tersedianya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	150.000.000,00	1	300.000.000,00	0	0,00		
	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi (Dokumen)	0	0		0		1		0		0			
Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	300.000.000,00	0	0,00		
2.11.02.2.02.0004 - Pemantauan dan Evaluasi KLHS				0,00		0,00		150.000.000,00		0,00		0,00		
Terlaksananya pemantauan dan evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	1	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				830.919.200,00		1.388.828.000,00		1.800.500.000,00		861.000.000,00		870.500.000,00		
Meningkatnya kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	Nilai Kampung Iklim (Poin)	23,15	30,56	180.000.000,00	33,33	640.000.000,00	36,11	220.000.000,00	38,89	235.000.000,00	41,67	250.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				608.000.000,00		1.151.000.000,00		1.558.000.000,00		613.000.000,00		627.000.000,00		
Terlaksananya rencana aksi adaptasi mitigasi perubahan iklim	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	4	1	180.000.000,00	1	640.000.000,00	1	220.000.000,00	1	235.000.000,00	1	250.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.11.03.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah				65.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	1	1	65.000.000,00	1	70.000.000,00	1	75.000.000,00	1	80.000.000,00	1	85.000.000,00		
2.11.03.2.01.0005 - Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK				50.000.000,00		500.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		
Tersedianya dokumen hasil inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	4	1	50.000.000,00	1	500.000.000,00	1	70.000.000,00	1	75.000.000,00	1	80.000.000,00		
2.11.03.2.01.0010 - Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota				65.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00		
Terlaksananya upaya mitigasi perubahan iklim di Tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim (Laporan)	1	1	65.000.000,00	1	70.000.000,00	1	75.000.000,00	1	80.000.000,00	1	85.000.000,00		
Meningkatnya upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Indeks pencemaran air sungai (Indeks)	4,26	4,04	434.070.090,00	3,93	521.828.000,00	3,87	1.348.000.000,00	3,71	388.000.000,00	3,60	377.000.000,00		
	Rata - rata NO2 (Poin)	7,19	6,99		6,89		6,79		6,69		6,59			
2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				608.000.000,00		1.151.000.000,00		1.558.000.000,00		613.000.000,00		627.000.000,00		
Terlaksananya pencegahan pencemaran	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	0	0	44.999.690,00	0	37.172.000,00	0	40.000.000,00	0	40.000.000,00	1	55.000.000,00		
	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan (Kegiatan)	1	1		1		1		1		1			
2.11.03.2.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				44.999.690,00		37.172.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		10.000.000,00		
Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan (Kegiatan)	1	1	44.999.690,00	1	37.172.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.11.03.2.01.0011 - Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		45.000.000,00		
Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	45.000.000,00		
Tersedianya data kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	2	2	383.000.310,00	2	473.828.000,00	2	1.298.000.000,00	2	338.000.000,00	2	322.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	0	4		4		4		4		4			
	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan (Unit)	2	1		5		2		5		5			
	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan (Unit)	0	10		15		20		30		30			
2.11.03.2.01.0007 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				49.328.000,00		69.328.000,00		70.000.000,00		72.000.000,00		60.000.000,00		
2.11.03.2.01.0009 - Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota				10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Beroperasi dan berfungsinya alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan (Unit)	0	10	10.000.000,00	15	15.000.000,00	20	20.000.000,00	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00		
2.11.03.2.01.0012 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan				51.742.400,00		58.000.000,00		59.000.000,00		61.000.000,00		62.000.000,00		
	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	2	2	51.742.400,00	2	58.000.000,00	2	59.000.000,00	2	61.000.000,00	2	62.000.000,00		
2.11.03.2.01.0013 - Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota				75.000.000,00		50.000.000,00		920.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan (Unit)	2	1	75.000.000,00	5	50.000.000,00	2	920.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00		
2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota				196.929.910,00		281.500.000,00		229.000.000,00		125.000.000,00		120.000.000,00		
Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	0	1	196.929.910,00	1	281.500.000,00	1	229.000.000,00	1	125.000.000,00	1	120.000.000,00		
2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				189.336.440,00		198.828.000,00		201.500.000,00		205.000.000,00		198.500.000,00		
Tersedianya rencana aksi tindak lanjut	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan (Laporan)	1	1	6.070.090,00	1	10.828.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	0	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.11.03.2.03.0014 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan				6.070.090,00		10.828.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		0,00		
Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan (Laporan)	1	1	6.070.090,00	1	10.828.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	0	0,00		
2.11.03.2.02 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				33.582.760,00		39.000.000,00		41.000.000,00		43.000.000,00		45.000.000,00		
Terlaksananya pemberian informasi peringatan pecemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	2	1	33.582.760,00	1	39.000.000,00	1	41.000.000,00	1	43.000.000,00	1	45.000.000,00		
2.11.03.2.02.0001 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat				33.582.760,00		39.000.000,00		41.000.000,00		43.000.000,00		45.000.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	2	1	33.582.760,00	1	39.000.000,00	1	41.000.000,00	1	43.000.000,00	1	45.000.000,00		
2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				189.336.440,00		198.828.000,00		201.500.000,00		205.000.000,00		198.500.000,00		
Bertambahnya rehabilitasi lahan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	2	2	183.266.350,00	2	188.000.000,00	2	191.500.000,00	2	195.000.000,00	2	198.500.000,00		
	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	5	5		5		5		5		5			
2.11.03.2.03.0009 - Pelaksanaan rehabilitasi				164.266.650,00		167.000.000,00		169.000.000,00		171.000.000,00		173.000.000,00		
kegiatan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	5	5	164.266.650,00	5	167.000.000,00	5	169.000.000,00	5	171.000.000,00	5	173.000.000,00		
2.11.03.2.03.0013 - Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi				18.999.700,00		21.000.000,00		22.500.000,00		24.000.000,00		25.500.000,00		
kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	2	2	18.999.700,00	2	21.000.000,00	2	22.500.000,00	2	24.000.000,00	2	25.500.000,00		
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				2.587.386.002,00		2.601.524.530,00		2.845.000.000,00		2.655.000.000,00		2.905.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup	
Meningkatnya ruang terbuka hijau	Persentase peningkatan RTH (%)	1,8	3	2.587.386.002,00	3	2.601.524.530,00	3	2.845.000.000,00	3	2.655.000.000,00	3	2.905.000.000,00		
2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				2.587.386.002,00		2.601.524.530,00		2.845.000.000,00		2.655.000.000,00		2.905.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Kabupaten/Kota														
Terkelolanya RTH kewenangan DLH	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	10	11	2.067.386.002,00	11	2.231.524.530,00	11	2.325.000.000,00	11	2.325.000.000,00	11	2.325.000.000,00		
	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	1.721,29	1.826		1.880		1.937		1.995		2.055			
2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				1.685.861.472,00		1.850.000.000,00		1.943.475.470,00		1.943.475.470,00		1.943.475.470,00		
Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	1.721,29	1.826	1.685.861.472,00	1.880	1.850.000.000,00	1.937	1.943.475.470,00	1.995	1.943.475.470,00	2.055	1.943.475.470,00		
Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	10	11	381.524.530,00	11	381.524.530,00	11	381.524.530,00	11	381.524.530,00	11	381.524.530,00		
Terkelolanya taman keanekaragaman hayati lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)			520.000.000,00	1	370.000.000,00	0	520.000.000,00	0	330.000.000,00	0	580.000.000,00		
	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)		1		1		30		30		30			
	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)		1		1		1		1		1			
2.11.04.2.01.0001 - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				0,00		100.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)			0,00	1	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.11.04.2.01.0006 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Meningkatnya Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)		1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	30	20.000.000,00	30	80.000.000,00	30	80.000.000,00		
2.11.04.2.01.0008 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya				500.000.000,00		250.000.000,00		500.000.000,00		250.000.000,00		500.000.000,00		
Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)		1	500.000.000,00	1	250.000.000,00	1	500.000.000,00	1	250.000.000,00	1	500.000.000,00		
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Meningkatnya pengelolaan limbah B3	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	52,70	56,30	40.000.000,00	58,40	40.000.000,00	60,20	40.000.000,00	62,30	40.000.000,00	64,30	40.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.05.2.01 - Penyimpanan sementara Limbah B3				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terkelolanya LB3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	0	67	30.000.000,00	69	30.000.000,00	71	30.000.000,00	73	30.000.000,00	75	30.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	(Usaha)													
2.11.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terfasilitasinya Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen)	1	75	20.000.000,00	75	20.000.000,00	75	20.000.000,00	75	20.000.000,00	75	20.000.000,00		
2.11.05.2.01.0006 - Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan (Usaha)	0	67	10.000.000,00	69	10.000.000,00	71	10.000.000,00	73	10.000.000,00	75	10.000.000,00		
2.11.05.2.02 - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terkelolanya LB3 di luar kewenangan kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen)	0	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00		
2.11.05.2.02.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen)	0	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				110.000.000,00		120.000.000,00		143.000.000,00		148.000.000,00		164.000.000,00		
2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				110.000.000,00		120.000.000,00		143.000.000,00		148.000.000,00		164.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	0	3	110.000.000,00	3	120.000.000,00	3	143.000.000,00	3	148.000.000,00	3	164.000.000,00		
	Jumlah Sarana Prasarana yang Disediakan untuk Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Dampak Lingkungan dan PPNS untuk Menunjang Kinerja Penegakan Hukum (Unit)	0	1		1		1		1					
	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Usaha/Kegiatan)	0	12		12		12		12					
	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	0	2		2		3		3		4			
2.11.06.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	0	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00		
2.11.06.2.01.0007 - Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup				25.000.000,00		25.000.000,00		33.000.000,00		33.000.000,00		44.000.000,00		
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	0	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	3	33.000.000,00	3	33.000.000,00	4	44.000.000,00		
2.11.06.2.01.0010 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Usaha/Kegiatan)	0	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.11.06.2.01.0011 - Layanan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup				50.000.000,00		60.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00		
Penyediaan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Sarana Prasarana yang Disediakan untuk Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Dampak Lingkungan dan PPNS untuk Menunjang Kinerja Penegakan Hukum (Unit)	0	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	75.000.000,00	1	80.000.000,00	1	85.000.000,00		
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		
2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		
Terselenggaranya kegiatan lingkungan hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	60	100	110.000.000,00	100	110.000.000,00	100	110.000.000,00	100	110.000.000,00	100	110.000.000,00		
	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	0	4		4		4		4		4			
	2.11.08.2.01.0002 - Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup			60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	0	4	60.000.000,00	4	60.000.000,00	4	60.000.000,00	4	60.000.000,00	4	60.000.000,00		
2.11.08.2.01.0003 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat (Orang)	60	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00		
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		
Meningkatnya masyarakat yang mengelola lingkungan hidup	Persentase perusahaan yang mendapat predikat minimal biru dalam penilaian PROPER (%)	37,50	37,50	120.000.000,00	43,75	120.000.000,00	43,75	120.000.000,00	50	120.000.000,00	50	120.000.000,00	2.11.0.00.0.00.01.00 - Dinas Lingkungan Hidup	
	Persentase sekolah Adiwiyata (%)	64,60	69,03		69,61		70,80		71,68		72,57			
2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		
Terlaksananya pendampingan penilaian kinerja	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	0	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00		
2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Entitas)	0	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00		
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				74.000.000,00		74.000.000,00		86.000.000,00		86.000.000,00		86.000.000,00		
2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				74.000.000,00		74.000.000,00		86.000.000,00		86.000.000,00		86.000.000,00		
Terlaksananya Layanan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindakanljudi/dikelola (Pengaduan)	0	12	74.000.000,00	12	74.000.000,00	12	86.000.000,00	12	86.000.000,00	12	86.000.000,00		
	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Orang)	0	1		1		2		2		2			
	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota (Sanksi)	0	12		12		12		12		12			
2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindakanljudi/dikelola (Pengaduan)	0	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00		
2.11.10.2.01.0010 - Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		
Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota (Sanksi)	0	12	12.000.000,00	12	12.000.000,00	12	12.000.000,00	12	12.000.000,00	12	12.000.000,00		
2.11.10.2.01.0011 - Pengembangan Kapasitas SDM bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup				12.000.000,00		12.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		24.000.000,00		
SDM yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Orang)	0	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	2	24.000.000,00	2	24.000.000,00	2	24.000.000,00		
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				5.895.698.860,00		5.879.043.060,00		5.879.043.060,00		5.959.043.060,00		5.780.978.760,00		
Meningkatnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat	persentase sampah yang terkelola (%)	97,01	97,09	5.895.698.860,00	98,03	5.879.043.060,00	98,07	5.879.043.060,00	98,09	5.959.043.060,00	99,01	5.780.978.760,00	2.11.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Proporsi Rumah Tangga dengan layanan pengumpulan sampah (%)	0	98,24		98,36		98,48		98,64		98,83			
2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah				5.895.698.860,00		5.879.043.060,00		5.879.043.060,00		5.959.043.060,00		5.780.978.760,00		
Terlaksananya pengurangan sampah melalui pembatasan, pemanfaatan kembali dan pendauran ulang	Jumlah sampah yang terdaur ulang (Ton)	11.148,80	11.371,78	98.064.300,00	11.599,22	98.064.300,00	11.831,20	98.064.300,00	12.067,82	98.064.300,00	12.309,18	98.064.300,00		
	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	12	10		10		10		10		10			
	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				43.064.300,00		43.064.300,00		43.064.300,00		43.064.300,00		43.064.300,00		
Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	12	10	43.064.300,00	10	43.064.300,00	10	43.064.300,00	10	43.064.300,00	10	43.064.300,00		
2.11.11.2.01.0018 - Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah yang dilaksanakan	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah (Laporan)	4	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00	4	15.000.000,00		
2.11.11.2.01.0024 - Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya kegiatan pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali (Ton)	221,74	226,17	20.000.000,00	230,70	20.000.000,00	235,31	20.000.000,00	240,02	20.000.000,00	244,82	20.000.000,00		
2.11.11.2.01.0030 - Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya kegiatan pengurangan sampah melalui proses pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang (Ton)	11.148,80	11.371,78	20.000.000,00	11.599,22	20.000.000,00	11.831,20	20.000.000,00	12.067,82	20.000.000,00	12.309,18	20.000.000,00		
Terlaksananya penanganan sampah melalui pemilahan, pewadahan, pengangkutan, pengolahan sampah	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	0	14.639	4.209.418.760,00	1.493.178	4.209.418.760,00	152.304.156	4.209.418.760,00	1.553.502.391	4.209.418.760,00	1.584.572.439	4.209.418.760,00		
	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan (Ton)	0	58.753,05		59.928,11		61.126,67		62.349,21		63.596,19			
	Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	0	91		92		93		94		95			
2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan				3.200.000.000,00		3.200.000.000,00		3.200.000.000,00		3.200.000.000,00		3.200.000.000,00		
2.11.11.2.01.0016 - Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah (Persentase)	0	91	20.000.000,00	92	20.000.000,00	93	20.000.000,00	94	20.000.000,00	95	20.000.000,00		
2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				989.418.760,00		989.418.760,00		989.418.760,00		989.418.760,00		989.418.760,00		
Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)	0	14.639	989.418.760,00	1.493.178	989.418.760,00	152.304.156	989.418.760,00	1.553.502.391	989.418.760,00	1.584.572.439	989.418.760,00		
Terlaksananya pengelolaan sampah di TPA	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	0	1	671.560.000,00	1	671.560.000,00	1	671.560.000,00	1	671.560.000,00	1	671.560.000,00		
	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	0	54.647,8		54.647,8		54.647,8		54.647,8		54.647,8			
2.11.11.2.01.0007 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				661.560.000,00		661.560.000,00		661.560.000,00		661.560.000,00		661.560.000,00		
Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	0	54.647,8	661.560.000,00	54.647,8	661.560.000,00	54.647,8	661.560.000,00	54.647,8	661.560.000,00	54.647,8	661.560.000,00		
Terkelolanya kebersihan kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan (Unit)		33	916.655.800,00	31	900.000.000,00	31	900.000.000,00	31	980.000.000,00	30	801.935.700,00		
2.11.11.2.01.0028 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah				916.655.800,00		900.000.000,00		900.000.000,00		980.000.000,00		801.935.700,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan.	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan (Unit)		33	916.655.800,00	31	900.000.000,00	31	900.000.000,00	31	980.000.000,00	30	801.935.700,00		

Program Prioritas

DLH Kota Tarakan berperan mendukung Visi “Tarakan Kota Cerdas” terutama Misi 5 yaitu lingkungan hidup berkelanjutan dan tangguh bencana yang juga diarahkan untuk mendukung mandat Asta Cita khususnya ekonomi hijau–biru dan harmoni dengan alam. Dalam kerangka itu, DLH memiliki subkegiatan prioritas sebagai mesin operasional program guna mewujudkan outcome yang telah ditetapkan, yakni: meningkatnya pemenuhan dokumen lingkungan hidup; meningkatnya upaya pengendalian pencemaran; meningkatnya kapasitas adaptasi–mitigasi perubahan iklim; menurunnya degradasi lahan; meningkatnya ruang terbuka hijau; meningkatnya pengelolaan limbah B3; meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan/izin PPLH/PPU LH; meningkatnya partisipasi kelompok masyarakat peduli lingkungan; meningkatnya masyarakat yang mengelola lingkungan hidup; optimalnya penanganan pengaduan lingkungan hidup; serta meningkatnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Adapun subkegiatan prioritas sebagaimana tercantum di tabel berikut:

Tabel 4.3.

Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN
2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup			
1.	2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya pemenuhan dokumen lingkungan hidup	2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
			2.11.02.2.01.0003 - Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
			2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
			2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
2.	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
		Meningkatnya kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
		Meningkatnya upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup	2.11.03.2.01.0007 - Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		Meningkatnya kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	2.11.03.2.01.0010 - Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota
		Meningkatnya upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup	2.11.03.2.01.0012 - Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan
		Menurunnya degradasi lahan	2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
			2.11.03.2.03.0009 - Pelaksanaan rehabilitasi
3.	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya ruang terbuka hijau	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
			2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
4.	2.11.05 – PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Meningkatnya pengelolaan limbah B3	2.11.05.2.01 - Penyimpanan sementara Limbah B3
			2.11.05.2.01.0006 - Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN
5.	2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			2.11.06.2.01.0010 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6.	2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya partisipasi kelompok masyarakat peduli lingkungan	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			2.11.08.2.01.0003 - Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
7.	2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya masyarakat yang mengelola lingkungan hidup	2.11.09.2.01 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			2.11.09.2.01.0001 - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
8.	2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Optimalnya penanganan pengaduan lingkungan hidup	2.11.10.2.01 - Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
			2.11.10.2.01.0009 - Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
9.	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah
			2.11.11.2.01.0012 - Penanganan sampah melalui pengangkutan
			2.11.11.2.01.0016 - Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah
			2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
			2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional

4.2. Kinerja Penyelenggaraan DLH Kota Tarakan Indikator Kinerja Utama

Untuk mengukur capaian dari tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, DLH Kota Tarakan merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai tolok ukur keberhasilan, sebagai berikut:

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	2.11.0.00.0.00.01.0000 – Dinas Lingkungan Hidup								
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	68,27	70,06	70,14	70,23	70,31	70,4	70,49
3.	Indeks Kualitas Air	Indeks	54,44	71,88	71,98	72,08	72,18	72,28	72,38
4.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	89,51	71,52	71,62	71,72	71,82	71,92	72,02
5.	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	52,73	64,23	64,23	64,29	64,32	64,35	64,38
6.	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	0	55,72	56,24	57,81	58,32	60,74	61,84
7.	Nilai SAKIP	Nilai	76,92	77,12	77,42	77,67	77,92	78,17	78,42
8.	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	85,25	85,6	85,95	86,3	86,65	87	87,31

Indikator Kinerja Kunci

Jika Indikator Kinerja Utama (IKU) berfungsi sebagai tolok ukur strategis untuk mengukur keberhasilan DLH Kota Tarakan dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, maka Indikator Kinerja Kunci (IKK) lebih menekankan pada penilaian capaian kinerja urusan pemerintahan sesuai kewenangan daerah. Adapun Indikator Kinerja Kunci urusan Inspektorat pada tabel berikut:

Tabel 4.5. Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	2.11 – URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
2.	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	positif	poin	0	55,72	56,24	57,81	58,32	60,74	61,84
3.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	positif	%	28	40	42	45	46	48	50

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana ditetapkan dalam dokumen ini berlaku mulai tahun 2025 hingga tahun 2030.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup yang akan menjadi pedoman dan arah strategik terhadap semua kegiatan baik yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan juga para pemangku kepentingan.

Untuk dapat merealisasikan program/kegiatan/sub kegiatan yang diterapkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai sehingga memerlukan komitmen, semangat, tekad, dan kedisiplinan dalam memprioritaskan program/kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Perencanaan yang baik dan sistematis, pelaksanaan kegiatan yang akuntabel dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai akan dapat mewujudkan Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi yang kredibel dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan Kota Tarakan.

Keberhasilan dalam pelaksanaan Renstra sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh staf dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing secara optimal.

Disamping itu bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, Renstra ini merupakan tolak ukur untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup setiap tahunnya dalam penyelenggaraan pemerintah bidang Lingkungan Hidup.

13. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan Tahun 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan merupakan salah satu Instansi Pemerintah yang melayani masyarakat yaitu melalui pelayanan Publik yaitu Pelayanan terhadap Pencatatan Sipil berupa Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Kelahiran, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak dan Perubahan Status Kewarganegaraan sedangkan Dokumen Pendaftaran Penduduk yang dikeluarkan adalah Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas Anak, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI), Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan adalah dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti aotentik.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dimana setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan teknis operasional Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra PD memuat tentang visi, misi Kepala Daerah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan/sub kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Tarakan merupakan rangkaian kegiatan yang berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas organisasi, efisiensi anggaran, optimalisasi SDM, dan pengawasan kinerja. Dalam rencana strategis ini diformulasikan perwujudan pandangan ideal yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Untuk itu dibutuhkan dukungan dari seluruh komponen, dari unsur pimpinan dan staf, dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Untuk merealisasikan keinginan dan harapan, rencana tersebut dituangkan dalam visi, misi, tujuan, dan pengukuran kinerja yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, secara jelas dan praktis, serta didasarkan pada hasil pengujian faktor internal dan eksternal, sehingga didapatkan rumusan tujuan, alokasi sumber daya, dan pencapaian sasaran yang berguna bagi organisasi dalam kurun waktu yang ditentukan.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, diperlukan upaya peningkatan kapasitas SDM, peningkatan sarana dan prasarana, perbaikan kualitas kinerja dan penyempurnaan sistem, serta intensitas koordinasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal diperlukan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai pedoman dan arah

dalam melaksanakan tujuan dan sasaran, sehingga Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029 disusun sebagai dokumen perencanaan atas RENSTRA Tahun 2025-2029 sebagai upaya penyesuaian terhadap RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025 - 2029 yang mengalami perubahan. Dokumen ini menyampaikan informasi tentang hal strategis apa saja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama kurun waktu tersebut. Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan kecenderungan permasalahan yang timbul selama kurun waktu 5 tahun, kinerja pelayanan yang telah dicapai, dan mempertimbangkan kebijakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia serta kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara selama 5 tahun mendatang dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didasarkan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan dengan memperhatikan adanya kekuatan, kelemahan peluang yang ada, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi :

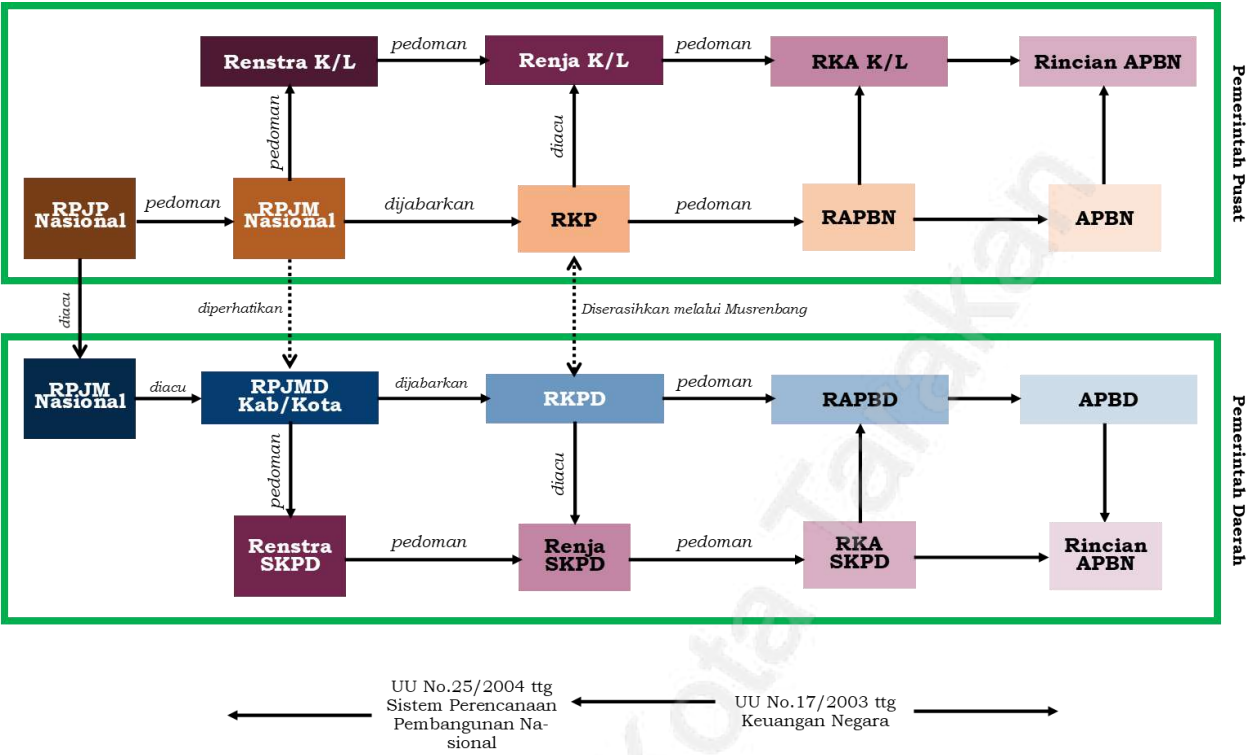
1. Persiapan penyusunan renstra
2. Penyusunan rancangan awal renstra perangkat daerah
3. Penyusunan rancangan renstra perangkat daerah
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah
5. Perumusan rancangan akhir renstra perangkat daerah
6. Penetapan renstra perangkat daerah

Renstra Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Tarakan memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis dan renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Selain itu Renstra Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil sebagai acuan dalam pengendalian dan evaluasi terhadap kinerja Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil baik berupa Dokumen Sakip dan Laporan Dalev Renja.

Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keberadaan Renja Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Tarakan akan menjadi pedoman bagi penyusunan rancangan RKA Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Tarakan yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Gambaran tentang hubungan antara Renstra Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Gambar 1.2
Bagan Alir Proses Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah



1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2021-2041;
23. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2045;
24. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029;
25. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
26. Surat Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 100.3.3.3/HK-IV/214/2025 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 – 2029 adalah:

1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan urusan pemerintahan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta menyediakan tolak ukur dalam penetapan kinerja selama 5 (lima) tahun.
2. Menjamin keterkaitan, keserasian serta harmonisasi antara perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan program kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan.
3. Menyesuaikan rencana target capaian Renstra PD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025 – 2029.
4. Memberikan arah dan pedoman bagi Aparatur Sipil Negara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan program prioritas sesuai dengan urusan pemerintahan dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga tujuan program dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.
5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana pembangunan tahunan.
6. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

1. Menterjemahkan dan menjabarkan visi misi Kepala Daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Tarakan periode 2025-2029 dalam bentuk tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang lebih spesifik dan terarah serta yang bersifat operasional.
2. Sebagai kerangka acuan dalam menyusun rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 5 (lima) tahun.
3. Sebagai dasar penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi serta penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan dan melaksanakan kegiatan sesuai tupoksinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Perencanaan Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini paling sedikit memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Latar belakang.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
 - b. Sumber daya Perangkat Daerah;
 - c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
 - d. Kelompok sasaran layanan (misalnya Bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah Perangkat Daerah).
 - e. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada);
2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - b. Isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab III paling sedikit memuat:

1. Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025 – 2029;
2. Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025 – 2029;
3. Strategi perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025 – 2029; dan
4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV paling sedikit memuat:

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD

tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan

6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1 Gambaran Pelayanan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tarakan dan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah membantu Wali Kota melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan di Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.
- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

- 1) Sekretariat terdiri atas :
 - I. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - II. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- 2) Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- 3) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Secara khusus tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2021, dengan ketentuan dapat diuraikan tersebut di bawah ini :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan

Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum dengan lingkup tugasnya ;
3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat merupakan pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dipimpin oleh seorang Sekretaris dalam pelaksanaan tugas kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi Kegiatan dinas;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran dinas;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas ;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dinas;
5. Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada dinas;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di dinas;
7. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas;
8. Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja dinas dan;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam menjalankan fungsi diatas, sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dibantu oleh 2 (Dua) Sub Bagian yaitu :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan
- 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian masing-masing dipimpin seorang Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam pengkoordinasian pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi :

1. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian,

kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas;

2. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana dinas;
3. Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada Dinas;
4. Penyelenggaraan Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Dinas;
5. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam koordinasi kegiatan dinas, koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, dan pengkoordinasian pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Dinas;
2. Pelaksanaan Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan.
4. Penyiapan bahan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja dinas dan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan pendokumentasian dokumen kependudukan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan pendokumentasian dokumen kependudukan;
3. Pelaksanaan pembinaan dan koodinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil;
4. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil;
5. Pelaksanaan penerbitan dokumen kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
6. Pelaksanaan Pendokumnetasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
7. Pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil dan;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi :

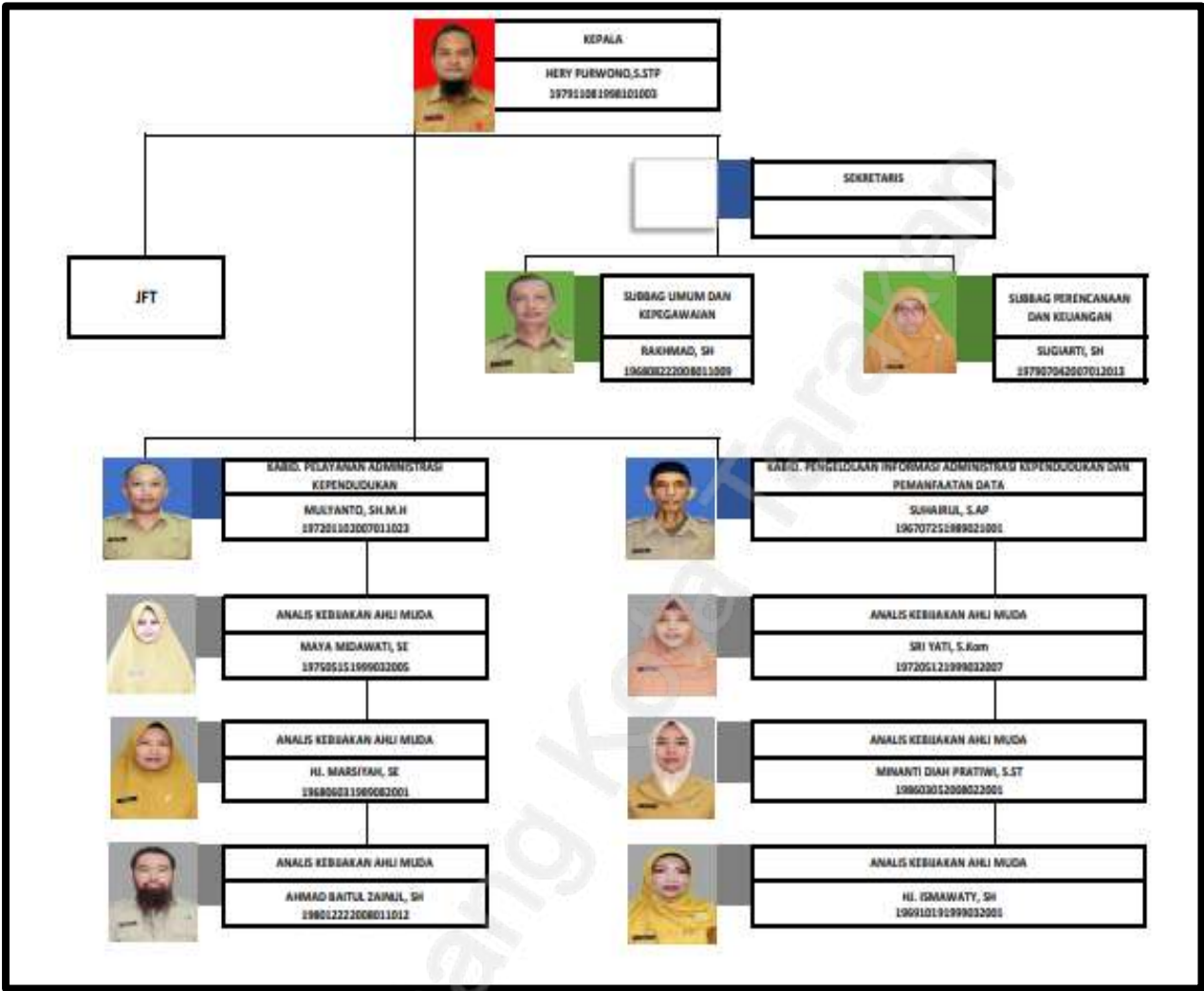
1. Penyusunan Kebijakan di bidang sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta kerjasama dan inovasi pelayanan;
2. Pelaksanaan Kebijakan di bidang sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta kerjasama dan inovasi pelayanan;
3. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
4. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
5. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
6. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
7. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan ;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dibawah koordinasi Kepala Bidang dan bertanggung jawab langsung dengan Kepala Dinas.

Berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Sumber : Data Bagian Kepegawaian Disdukcapil

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.

2.1.2.1. Sumber Daya Aparatur

Dalam upaya Penataan Administrasi Kependudukan perlu didukung dengan tersedianya sumber daya yang meliputi kelembagaan, ketata laksanaan, alokasi anggaran sumber daya manusia dan lain sebagainya. Sumber daya aparatur yang memadai baik dari sisi jumlah ,mau kompetensi memegang peranan penting dalam memberikan pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat, selain itu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi merupakan faktor lain yang berpengaruh dalam upaya Penataan Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan Data Kepegawaian per 31 Desember 2024 Jumlah pegawai keseluruhan sebanyak 41 Orang yang terdiri dari 28 (Dua Puluh Delapan) Orang yang berstatus ASN dan sebanyak 13 (Tiga belas) Orang berstatus sebagai Pegawai Honorer untuk selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut :

TABEL 2.1
DATA KEPEGAWAIAN DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

No	Uraian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Jumlah Pegawai :			
	a. ASN	12	16	28
	b. Honor Kontrak	6	7	13
	Jumlah	18	23	41
2.	Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan:			
	a. Golongan IV	3	-	3
	b. Golongan III	10	26	36
	c. Golongan II	2	-	2
	d. Golongan I	-	-	-
	Jumlah	15	26	41
3	Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan			
	a. Kepala Dinas	1	-	1
	b. Sekretaris	-	-	-
	c. Kepala Bidang	2	-	2
	d. Kepala Sub Bagian	1	1	2
	e. Jabatan Fungsional	1	5	6
	Jumlah	5	6	11
4	Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan :			
	a. S2	2	-	2
	b. S1	5	10	15
	c. D3	-	2	2
	d. SLTA	3	6	9
	e. SLTP	-	-	-
	Jumlah	10	16	28
5	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Penjenjangan			
	a. Spamen	-	-	-
	b. Spama/Diklat Pim III	2	-	2
	c. Adum/Adumla/Diklat Pim IV	3	3	6
	Jumlah	5	3	8

Sumber : Data Bagian Kepegawaian Disdukcapil

2.1.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didukung dengan sarana dan prasarana kerja.

Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sesuai dengan Standar penyelenggaraan Pelayanan Publik dan pengembangan sumber daya aparatur daerah merupakan salah satu faktor pendukung kelancaran penyelenggaraan tugas tugas pemerintahan daerah yang diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupaya untuk terus mengoptimalkan penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelayanan yang dilaksanakan di lingkungan Diinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

TABEL 2.2
SARANA DAN PRASARANA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	SARANA PRASARANA	KONDISI			
		JUMLAH	BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT
1	Kendaraan Roda Empat	4	4	0	0
2	Kendaraan Roda Dua	5	4	1	0
3	PC Unit	16	13	0	3
4	Laptop	7	5	0	2
5	Hardisk	0	0	0	0
6	CPU	0	0	0	0
7	TV Monitor	2	0	0	2
8	Printer	16	10	0	6
9	Printer ID Card	6	3	0	3
10	Scanner	1	1	0	0
11	Server SIAK	2	1	0	1
12	Tablet PC	10	10	0	0
13	Uninterruptible Power Suply (UPS)	1	1	0	0
14	Handy Talky	3	0	0	3
15	Display	0	0	0	0
16	Camera Digital	3	2	1	0
17	Televisi	3	0	0	3
18	Lemari Es	0	0	0	0
19	AC Split	9	6	0	3
20	AC Standing Floor	3	2	0	1
21	Mesin Presensi	1	1	0	0
22	Mesin Pemotong Kertas	0	0	0	0
23	Dispenser	0	0	0	0
24	Exhause Fan	0	0	0	0
25	LCD Projector	1	1	0	0
26	Loudspeaker	1	1	0	0
27	Mobile enrollment (Alat rekam e-KTP)	2	2	0	0
28	Jam Elektronik	0	0	0	0
29	Papan Pengumuman	1	0	0	0
30	Lemari :				
	a. Lemari Kayu	5	0	3	0
	b. Lemari Besi	0	0	0	0
	c .Lemari Kaca	3	0	2	1
	d. Lemari Arsip	3	3	0	0
	e. Filing Besi	3	3	0	0
31	Meja Kerja :				
	a. Meja Rapat	1	0	1	0
	b. Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	1	0	1
	c. Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	0	0	2
	d. Meja Kerja Pejabat Eselon IV	0	0	0	0
	e. Meja Kerja Staf	21	0	4	17
	f. Meja Biro	1	0	4	1
	g. Kursi Rapat	7	7	0	0
	h. Kursi Rapat Pejabat Eselon II	2	1	0	1
	i. Kursi Rapat Pejabat Eselon III	2	0	0	2
	j. Kursi Putar	41	20	6	15
	k. Sofa	1	0	1	0

Sumber : Data Pengurus Barang Disdukcapil

Adapun jenis teknologi komunikasi data SIAK yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. VPN – IP (*Virtual Private Network-Internet Protocol*)
2. Jalur Komunikasi Publik (*Smart City*)
3. LAN (*Local Area Network*)

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan untuk pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan telah ditetapkan kebijakan yang bersifat nasional sebagaimana tertuang dalam Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang secara efektif harus diberlakukan pada tahun 2014. Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari Penyelenggaraan Administrasi Negara.

Tujuan utama perubahan Undang-undang dimaksud adalah untuk meningkatkan efektifitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan terobosan dengan inovasi Pelayanan Publik “ SIKEPO ” yaitu Sistem Kependudukan *Online*. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan yaitu memberikan pelayanan administrasi kependudukan dalam kerangka pembangunan Pemerintah Kota Tarakan menuju tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan Publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

Penyelenggaraan Administrasi kependudukan bertujuan untuk :

- a. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk,
- b. Memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk,
- c. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.
- d. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara terpadu, dan
- e. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan tersebut dilakukan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk:

- a. Terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib.
- b. Terselenggaranya administrasi kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib dan berkelanjutan.
- c. Terpenuhinya hak penduduk di bidang administrasi kependudukan dengan pelayanan yang profesional.
- d. Tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara, akurat lengkap, mutakhir dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Pelayanan administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan menyangkut penerbitan Dokumen Kependudukan yang meliputi Biodata Penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP- el), Kartu Identitas Anak (KIA) , KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga,serta identitas anggota keluarga. KTP-el adalah

identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- a. Kartu Keluarga (KK);
- b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP);
- c. Kartu Identitas Anak (KIA);
- d. Surat Keterangan Pindah;
- e. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
- f. Surat Keterangan Tempat Tinggal;

Pelayanan Pencatatan Sipil

- a. Akta Kelahiran;
- b. Akta Kematian;
- c. Akta Perkawinan;
- d. Akta Perceraian;
- e. Akta Pengakuan Anak;
- f. Akta Pengangkatan Anak;

Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan

- a. Surat Keterangan Pencatatan Kelahiran WNI di Luar Wilayah NKRI;
- b. Surat Keterangan Lahir Mati WNI;
- c. Surat bukti Pencatatan perkawinan di Wilayah NKRI;
- d. Surat Keterangan pembatalan Perkawinan;
- e. Surat bukti pencatatan perceraian di luar wilayah NKRI;
- f. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- g. Surat Keterangan Kematian WNI di luar Wilayah NKRI;
- h. Surat Keterangan status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI;
- i. Surat bukti pelaporan pencatatan WNI di luar NKRI;
- j. Surat Keterangan pelaporan perjanjian perkawinan;
- k. Surat Keterangan pencatatan perubahan/pencabutan pelaporan Perjanjian perkawinan.

Data Kependudukan Meliputi :

- a. Data Perseorangan
- b. Data Agregat.

Kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan secara umum diukur melalui enam indikator utama yang mencerminkan pencapaian terhadap hak dasar penduduk atas administrasi kependudukan. Indikator tersebut mencakup persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), serta persentase anak usia 0–4 tahun memiliki akta kelahiran sebagai bentuk perlindungan identitas hukum sejak dini. Selain itu, indikator pelayanan juga mencakup Persentase Penduduk Yang Menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Bagi Penduduk Wajib KTP, IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), Persentase akses pemanfaatan data kependudukan, Keenam indikator ini menjadi tolok ukur dalam menilai kualitas, jangkauan, dan keberlanjutan pelayanan administrasi kependudukan di tingkat Kota, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan strategi peningkatan pelayanan ke depan. Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dari tahun 2020-2024 tertera pada tabel. 2.3 dan tabel 2.4 berikut di bawah ini:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada tahun ke-				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penduduk Yang Memiliki KTP Tarakan (Kaltara)	-	√	80	85	90	95	99	96	92	98	98	99	120	108	109	103	100
2	Persentase Perekaman KTP Elektronik	-	√	96	98	90	100	99	96	92	98	98	99	100	94	98	98	100
3	Persentase Anak Yang Memiliki KIA	-	√	35	64	90	92	53	53	57	46	53	61	152	89	60	57	115
4	Persentase Anak Usia 0-18 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran	-	√	87	95	90	98	96	87	91	95	96	94	100	96	98	100	98
5	Persentase Penduduk Yang Memiliki Akta Pencatatan Sipil	-	√	70	100	90	100	68	90	96	67	67	80	129	96	67	67	117
6	Persentase Akta Perkawinan Yang diterbitkan	-	√	64	100	90	100	100	64	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Akta Perceraian Yang diterbitkan	-	√	40,13	100	90	100	100	40,13	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Persentase Akta Kematian Yang diterbitkan	-	√	98,04	100	90	100	100	98,04	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	-	√	80	80	80	100	100	80	100	100	100	100	125	125	125	100	100
10	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	√	78,95	79,97	90	85	87	83,7	85,73	84,83	86,31	90,63	106	107	100	103	104

Sumber Data : Bagian Perencanaan dan Keuangan Disdukcapil

Berdasarkan data capaian pada masing-masing indikator pada tabel 2.3, menunjukkan pola kinerja yang dinamis dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, hal tersebut didasari oleh beberapa faktor yang mempengaruhi nilai tersebut yang telah dianalisa pada masing – masing indikator sebagai berikut :

1. Persentase Penduduk yang memiliki KTP Tarakan
Rasio capaian penduduk yang memiliki KTP Tarakan dengan rasio capaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 120% dan rasio capaian terendah pada tahun 2024 yaitu sebesar 100%. Selama periode Renstra 2019-2024, semua indikator kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena adanya inovasi pelayanan yaitu SIKEPO (Sistem Kependudukan Online).
2. Persentase Perekaman KTP elektronik
Rasio capaian Perekaman dengan rasio capaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 120% dan rasio capaian terendah pada tahun 2024 yaitu sebesar 100%. Selama periode Renstra 2019-2024, semua indikator kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan adanya Inovasi Pelayanan yaitu Dukcapil Goes To School dan Jempol Peduli (Jemput Bola Perekaman Penduduk Disabilitas ODGJ dan Lansia)
3. Persentase Anak yang memiliki KIA
Rasio capaian Persentase Anak Yang Memiliki KIA dengan rasio capaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 152% dan rasio capaian terendah pada tahun 2023 yaitu sebesar 53%. Selama periode Renstra 2019-2024, target yang terpenuhi pada tahun 2024 dikarenakan adanya inovasi pelayanan yaitu Jempol Peradi (Jemput Bola Untuk Percepatan Kartu Identitas Anak Usia Dini) sedangkan pada tahun sebelumnya tidak mencapai target, hal ini dikarenakan KIA tidak menjadi syarat dalam penerimaan Siswa baru sehingga masyarakat tidak akan mengurus KIA jika tidak membutuhkannya.
4. Persentase Anak usia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran
Rasio capaian Persentase Anak usia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran dengan rasio capaian tertinggi pada tahun 2020 dan tahun 2023 sebesar 100% dan rasio capaian terendah pada tahun 2021 yaitu sebesar 96%. Selama periode Renstra 2019-2024, target yang terpenuhi pada tahun 2020 dan Tahun 2022, sedangkan pada tahun sebelumnya tidak mencapai target, hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang memiliki Akta kelahiran manual yang belum terintegrasi dengan sistem atau akta kelahiran barcode yang tidak dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga tidak tercatat ke dalam sistem.
5. Persentase Penduduk yang memiliki Akta Pencatatan Sipil
Rasio capaian Persentase Penduduk yang memiliki Akta Pencatatan Sipil dengan rasio capaian tertinggi pada tahun 2020 dan tahun 2024 sebesar 129% dan rasio capaian terendah pada tahun 2022 dan Tahun 2023 yaitu sebesar 67%. Selama periode Renstra 2019-2024, target yang terpenuhi pada tahun 2020 dan Tahun 2024, sedangkan pada tahun sebelumnya tidak mencapai target, hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang memiliki Akta kelahiran manual yang belum terintegrasi dengan sistem atau akta kelahiran barcode yang tidak dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga tidak tercatat ke dalam sistem.
6. Persentase Akta Perkawinan, Perceraian dan Kematian yang diterbitkan
Rasio capaian Persentase Akta Perkawinan, Perceraian dan Kematian yang diterbitkan dengan rasio sebesar 100% capaian memenuhi target Selama periode Renstra 2019-2024, hal ini dikarenakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai Inovasi SIKEPO secara Online melalui aplikasi *WhatsApp* sehingga lebih memudahkan masyarakat untuk mengurus dokumen pencatatan sipil tanpa harus datang ke kantor.

7. Persentase OPD Yang telah memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama
Rasio Capaian Persentase OPD Yang telah memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama dengan Rasio sebesar 100% dan telah memenuhi targetPeriode Renstra 2019-2024, hal ini dikarenakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan kerjasama dengan seluruh OPD dengan membuat Mou terkait dengan pemanfaatan data kependudukan.

Dalam peningkatan pelayanan faktor faktor yang dapat mempengaruhi pelayanan baik eksternal maupun internal dalam mencapai tujuan dan sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki Kekuatan, peluang, Kelemahan, Ancaman dan juga strategi dalam meningkatkan Pelayanan yaitu :

1. Kekuatan dan Peluang
Kekuatan dan peluang yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :
 - a. SDM yang berkompeten.
 - b. Adanya dukungan Inovasi pelayanan.
 - c. Sistem Database yang terintegrasi.
 - d. Regulasi yang mendukung untuk perbaikan pelayanan.
 - e. Perkembangan Teknologi dan Infoemasi.
 - f. Kerjasama Lintas Sektoral.
 - g. Dukungan Pemerintah Pusat dalam penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - h. Kesadaran Masyarakat dalam kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Kelemahan
Kelemahan yang ada di dalam meningkatkan kualitas layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :
 - a. Kurangnya sarana dan Prasarana
 - b. Kuantitas dan kualitas SDM yang berkompeten.
 - c. Kurangnya peluang untuk berinovasi.
 - d. Ketergantungan dengan Pusat.
3. Ancaman.
Beberapa Ancaman yang mungkin terjadi dalam peningkatan pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :
 - a. Adanya perubahan kebijakan dari Pusat.
 - b. Penyalahgunaan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - c. Adanya bencana Alam dan Non Alam.
4. Strategi
Strategi yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil untuk mencapai tujuan dan sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan sistem informasi yang berbasis IT.
 - b. Meningkatkan kerja sama lintas sektor melalui Inovasi.
 - c. Penguatan SDM.
 - d. Memperkuat sistem keamanan data kependudukan dan keamanan informasi.
 - e. Memperbarui sistem secara berkala.
 - f. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan.
 - g. Melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif untuk kesadaran masyarakat.
 - h. Peningkatan pembinaan dan pengawasan SDM secara berkala.
 - i. Peningkatan sarana dan prasarana Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Meningkatnya akses pemanfaatan data kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki Kekuatan, peluang, Kelemahan, Ancaman dan juga strategi yaitu :

1. Kekuatan dan Peluang.

Kekuatan dan peluang yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

- a. SDM yang berkompeten.
- b. Adanya dukungan Inovasi pelayanan.
- c. Sistem Database yang terintegrasi.
- d. Regulasi yang mendukung untuk perbaikan pelayanan.
- e. Perkembangan Teknologi dan Infoemasi.
- f. Kerjasama Lintas Sektor.
- g. Regulasi dari pemerintah pusat
- h. Dukungan Pemerintah Pusat dalam pemberian hak akses.

2. Kelemahan

Kelemahan yang ada di dalam Meningkatnya akses pemanfaatan data kependudukan, adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya sarana dan Prasarana.
- b. Kuantitas dan kualitas SDM yang berkompeten.
- c. Kurangnya peluang untuk berinovasi.
- d. Ketergantungan dengan Pusat.
- e. Masih adanya data ganda yang tidak valid.

3. Ancaman.

Beberapa Ancaman yang mungkin terjadi dalam Meningkatnya akses pemanfaatan data kependudukan adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya koordinasi antar instansi.
- b. Perubahan regulasi.
- c. Keamanan data yang rentan.

4. Strategi

Strategi yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencapai tujuan dan sasaran Meningkatnya akses pemanfaatan data kependudukan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sistem informasi yang berbasis IT.
- b. Meningkatkan kerja sama lintas sektor melalui Inovasi.
- c. Penguatan SDM.
- d. Meningkatkan koordinasi antar instansi atas pemanfaatan data kependudukan.
- e. Memperbaharui sistem secara berkala.
- f. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan.
- g. Melakukan pemuktahiran data secara terus menerus.
- j. Peningkatan pembinaan dan pengawasan SDM secara berkala.
- k. Peningkatan sarana dan prasarana Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pencapaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, jika dilihat dari hasil capaian pada indikator kinerja selama 5 (lima) tahun masa Renstra Tahun 2019-2024 menunjukkan hasil yang sangat baik, hal ini disebabkan karena Adanya inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Inovasi tersebut antara lain adalah :

1. SIKEPO (Sistem Kependudukan Online).
2. Pelanduk Bulan (Pelayanan Adminduk bagi Ibu Baru Melahirkan).
3. Jempol Peduli (Jemput Bola Perekaman Penduduk Disabilitas ODGJ dan Lansia)
4. Jempol Peradi (Jemput Bola Untuk Percepatan Kartu Identitas Anak Usia Dini)
5. Dukcapil Goes To School.
6. Dukcapil On The Street.

Dengan adanya inovasi tersebut sangat berdampak kepada masyarakat diantara lain adalah :

1. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
2. One day service.
3. Pelayanan online dan pelayanan di hari minggu.
4. Tidak ada diskriminasi.
5. Menghindari praktek percaloan dan pungli.
6. Terintegrasi 1 layanan.
7. Mengutamakan penduduk rentan atau berkebutuhan khusus.
8. Adanya kerjasama dengan Perangkat Daerah, Lembaga Vertikal, Rumah Sakit Klinik Swasta, Puskesmas, Bidan, dan Sekolah.

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan Tahun 2000 sd 2024

NO	Uraian	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Belanja Tidak Langsung (BTL)	3.559.032.227	-	-	-	-	3.404.580.900	-	-	-	-	96	-	-	-	-
2	Belanja Pegawai	3.559.032.227	-	-	-	-	3.404.580.900	-	-	-	-	96	-	-	-	-
3	Belanja Langsung (BL)	1.297.140.000	-	-	-	-	1.154.240.493	-	-	-	-	89	-	-	-	-
4	Belanja Operasi	50.586.000	3.821.704.401	3.821.704.401	4.573.591.128	4.238.340.388	43.241.000	3.821.594.401	3.821.704.401	4.478.858.964	3.966.472.603	85	100	100	98	93
5	Belanja Barang Jasa	1.146.554.000	1.328.595.000	1.224.630.000	722.546.210	948.124.873	1.016.999.493	1.328.961.422	907.100.850	638.680.453	856.814.883	89	100	74	88	90
6	Belanja Modal	100.000.000	12.269.578	90.000.000	124.442.554	430.907.418	94.000.000	12.269.578	27.754.150	117.320.000	425.078.500	94	100	31	94	99

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan memberikan layanan Kependudukan kepada seluruh penduduk Kota Tarakan atau penduduk wilayah lain atau negara lain yang berdomisili di Kota Tarakan.

2.1.5. Mitra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan Layanan

Adapun Mitra Perangkat Daerah yang telah atau sedang memiliki Kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. Rumah sakit dan Bidan Praktek Mandiri terkait dengan Perjanjian Kerjasama Pelayanan Pencatatan Sipil dan Kependudukan.
2. Dukungan Lintas Sektoral sebagai berikut :
 - a. Dinas Sosial Kota Tarakan terkait dengan data penerima bantuan sosial pra sejahtera dan kepesertaan BPJS Kesehatan.
 - b. DP2KBP3A Kota Tarakan terkait dengan data pelayanan Adminduk pada pelaksanaan Kampung KB, Kota Layak Anak, Keluarga beresiko stunting dan bantuan hukum kekerasan terhadap anak dan Jumlah anggota perpasangan suami istri tidak subur atau pasangan subur.
 - c. Dinas Pendidikan Kota Tarakan terkait dengan data Perekaman e KTP pemula di sekolah-sekolah, data usia anak Pra Sekolah SD, SMP dan SMA.
 - d. Dinas Kesehatan Kota Tarakan terkait dengan data jumlah penduduk dan Balita Stunting, Kartu Indonesia Sehat dan Target Imunisasi Usia Balita.
 - e. Kecamatan/Kelurahan se Kota Tarakan terkait dengan data Monografi dan Demografi jumlah penduduk perkelurahan.
 - f. KPU Kota Tarakan terkait dengan data jumlah penduduk pemilu dan Data Tetap.
 - g. Pengadilan Agama Kota Tarakan terkait dengan Perubahan Status.
 - h. PDAM Kota Tarakan terkait dengan Data Kepala Keluarga untuk pemantauan pemasangan air masyarakat.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis.

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal akan berdampak terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pemahaman Masyarakat mengenai Administrasi Kependudukan selama ini adalah sekedar pengurusan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran saja. Padahal lebih daripada itu tujuan utama Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah menciptakan Data Kependudukan yang valid dan komprehensif, yang berguna sebagai basis Statistik Kependudukan, Pendaftaran Pemilih (Pemilu) dan juga sebagai dasar pembuatan Kebijakan publik maupun panduan bagi Pemerintah untuk melaksanakan kewajiban Negara dalam bentuk Pelayanan Publik.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan kinerja

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dijabarkan mengenai permasalahan pelayanan yang ditemui dalam penyelenggaraan pelayanan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dalam Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perumasan Masalah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya Kualitas Pelayanan Publik	Belum tingginya kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Belum Optimalnya Layanan Pendaftaran Penduduk
		Belum terpenuhinya dokumen kependudukan
		Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
		Belum Optimalnya Layanan Pencatatan Sipil
	Belum adanya akses pemanfaatan data kependudukan	Belum tersedianya Akses Pemanfaatan data Kependudukan
		Belum Optmalnya survei kepuasan masyarakat
		Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Belum Optimalnya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		Belum Optimalnya Laporan Profil Kependudukan

Sumber Data: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan.

ISU STRATEGIS

Isu Strategis adalah salah satu yang perlu diperhatikan dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan perangkat Daerah secara teknokratik, selain mempedomani Prioritas Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Lembaga terkait. Dengan telah ditentukannya isu – isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tahun 2025 – 2029, maka hal ini akan menjadi fokus utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan untuk bisa menangani Isu – isu strategis tersebut dengan strategi dan arah kebijakan yang didukung dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta sub kegiatan yang tertuang dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan.

Perumusan isu strategis dilakukan dengan acuan berdasarkan kewenangan, permasalahan yang dihadapi, serta dinamika lingkungan global, nasional, dan regional. KLHS tidak dijadikan acuan karena tidak ada rencana yang berdampak atau berkaitan langsung dengan lingkungan hidup. Tabel berikut menyajikan teknik penyimpulan isu strategis Disdukcapil Provinsi.

Berdasarkan hasil review dari penjelasan pada poin-poin sebelumnya maka diperoleh informasi untuk menentukan isu strategis. Maka ditentukan isu strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tahun 2025 – 2029 adalah seperti pada tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.6
Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan publik		Keamanan Siber dan Privasi Data	Pemanfaatan teknologi digital yaitu Identitas Kependudukan Digital (IKD).	Peningkatan Penggunaan IKD	Peningkatan Kualitas Pelayanan publik
				Implementasi ISOO 27001 dalam Pengelolaan SIAK	Kewajiban bagi Pengguna untuk memiliki Sertifikat ISO 27001	

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan.

Visi dan misi adalah dua komponen penting dalam perencanaan strategis suatu organisasi. Visi adalah gambaran ideal atau tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau pemerintahan di masa depan. Misi adalah langkah-langkah strategis atau cara-cara yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Misi lebih operasional dan konkret, karena biasanya dijabarkan dalam bentuk program, kebijakan, atau kegiatan nyata. Visi bersifat inspiratif dan memberikan arah umum dari semua kebijakan dan program yang dijalankan.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja PD selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Baik tujuan maupun sasaran, keduanya merupakan bagian penting dari dokumen perencanaan untuk mengarahkan kinerja dan pelaksanaan program secara sistematis dan terukur dalam periode tertentu.

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan telah menetapkan Visi dan Misi yang di tuangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Cerdas yang bertumpu pada sektor Jasa, Perdagangan, Perikanan Kelautan dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Maju menuju Masyarakat Sejahtera.

Dalam mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah maka ditetapkan beberapa Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Tarakan Tahun 2025 – 2029 yaitu :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
2. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar yang handal
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui dukungan kemudahan berusaha yang berkeadilan dan bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, perikanan kelautan, ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan (UMKM)
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif serta menjaga stabilitas ketertiban dan ketentraman kota
5. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh menghadapi bencana

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka perlu penyelarasan tujuan dan Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Tarakan Tahun 2025–2029. Tujuan dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Tarakan Tahun 2025–2029 adalah pada tujuan ke 4 yaitu Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, dengan sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Dalam menentukan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka telah dirumuskan bahwa tujuan yang ingin dicapai

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah 'Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator Tujuan yaitu Indeks Pelayanan Publik.

Berdasarkan tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 – 2029 maka ditetapkan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 – 2029 yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Indikator :
 - a. Persentase Perekaman e KTP.
 - b. Persentase Anak Berusia 0-18 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran.
 - c. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak.
 - d. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
 - e. Indeks Kepuasan Masyarakat.
2. Meningkatkan akses pemanfaatan data kependudukan dengan Indikator :
 - a. Persentase akses pemanfaatan data kependudukan.
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Indikator :
 - a. Nilai SAKIP

Sebagaimana dengan indikator tujuan yaitu Indeks pelayanan publik maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menetapkan target dari Indikator terhadap Tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan sesuai dengan tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1
Tujuan Dan Sasaran
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan Tahun 2025 – 2030

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Baseline	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik	4,06	4,10	4,15	4,20	4,35	4,45	4,51	
	Meningkatnya kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatatan Sipil	Persentase Perekaman e KTP	99,34%	99,40%	99,50%	99,60%	99,70%	99,80%	99,99%	
		Persentase Anak Berusia 0-18 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran	94,06%	95%	96%	97%	98%	99%	100%	
		Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	60,88%	62%	64%	66%	68%	70%	72%	
		Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	3%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	90,63	91,13	91,63	92,13	92,63	93,13	93,63	
	Meningkatnya akses pemanfaatan data kependudukan	Persentase akses pemanfaatan data kependudukan	0%	13%	25%	38%	50%	63%	75%	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai SAKIP	87,74	88	88,25	88,5	88,75	89,5	90	

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

3.2.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan yang ingin di capai Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan dengan strategi arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Menjamin hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut diatas, maka dirumuskan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri yaitu Meningkatnya kualitas layanan pemenuhan dokumen kependudukan berbasis teknologi dan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik, dengan indikator sasaran strategis sebagai tolak ukur ketercapaian sasaran strategis ini adalah Indeks Kualitas layanan Kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Dalam Negeri maka arah kebijakan yang difokuskan adalah:

1. Peningkatan Efektifitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Peningkatan Kualitas Data Kependudukan.
3. Peningkatan Penguatan dan Pemanfaatan Data Kependudukan
4. Terwujudnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang Inovatif.
5. Peningkatan Efektifitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil berbasis IT.

Agar pelaksanaaam renstra dapat berjalan secara terarah dan terukur maka diperlukan penahapan yang sistematis dan terencana. Penahapan dalam konteks dimaksud sebagai pengelompokan atau pengurutan pelaksanaan strategi, program, dan kegiatan kedalam tahapan tahunan yang logis dan realitis disesuaikan dengan kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya, serta dinamika lingkungan yang strategis seperti pada tabel 3.2 berikut :

TABEL 3.2
STRATEGI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TARAKAN TAHUN 2025 – 2029

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan Efektifitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Peningkatan Kualitas Data Kependudukan	Peningkatan Penguatan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Terwujudnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang Inovatif	Peningkatan Efektifitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil berbasis IT

3.2.2. Arah Kebijakan dan Strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan.

Dalam mencapai tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan memiliki beberapa Strategi dan arah kebijakan dalam lima tahun mendatang yaitu Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan Pencatatan sipil dimana kualitas pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu ditingkatkan sejalan dengan tuntutan perbaikan sistem pelayanan masyarakat dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Rendahnya kualitas pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan dipengaruhi oleh rendahnya kemampuan petugas pelayanan dalam menggunakan kewenangan diskresi, dimana aparat

pelaksana masih menunggu petunjuk dan berpedoman dari atasan. Untuk itu, strategi peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan Pencatatan sipil diharapkan dapat menjawab harapan dari masyarakat agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sebagai langkah tindak lanjut dalam pelaksanaan strategi secara teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berusaha melaksanakan kebijakan yaitu dengan cara :

1. Peningkatan Layanan Pendaftaran Penduduk
2. Pemenuhan dokumen kependudukan
3. Penguatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
4. Peningkatan Layanan Pencatatan Sipil
5. Penyediaan Akses Pemanfaatan data Kependudukan
6. Penguatan MoU dengan stekholder
7. Peningkatan survei kepuasan masyarakat
8. Penguatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
9. Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
10. Peningkatan Profil Kependudukan

Arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dituangkan dalam tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3
Arah Kebijakan

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
1	Perkuatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan	Penguatan partisipasi masyarakat dalam Tata Kelola Pemerintah	Peningkatan Layanan Pendaftaran Penduduk
			Pemenuhan dokumen kependudukan
			Penguatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
			Peningkatan Layanan Pencatatan Sipil
			Penyediaan Akses Pemanfaatan data Kependudukan
			Peningkatan survei kepuasan masyarakat
		Peningkatan kualitas dan efesiensi tata kelola pemerintah	Penguatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			Penguatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			Peningkatan Profil Kependudukan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, sub kegiatan.

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Lingkungan Hidup dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Tarakan 2025- 2029.

Bab ini menyajikan arah operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi kebijakan yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya, serta mengacu pada struktur program yang ditetapkan secara nasional. Penyusunan komponen ini bertujuan untuk memastikan keterpaduan antara rencana strategis perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta untuk mendorong pencapaian target kinerja secara terukur dan efektif dalam periode perencanaan.

Sebagai tindak lanjut dari rumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, perangkat daerah menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai bentuk implementasi operasional. Setiap program disertai dengan indikator kinerja dan target yang jelas, serta didukung oleh kegiatan dan sub kegiatan yang relevan.

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, maka disusunlah Program dan Kegiatan beserta Pendanaannya yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Perumusan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Indeks Pelayanan Publik	
	Meningkatnya kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Persentase Perekaman e KTP	
				Persentase Anak Berusia 0-18 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran	
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	
				Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	
				Indeks Kepuasan Masyarakat	
		Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk		Persentase dokumen administrasi kependudukan yang di terbitkan	PENDAFTARAN PENDUDUK
			Terlaksananya Layanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
				Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
				Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
			Terpenuhinya dokumen kependudukan	Jumlah dokumen kependudukan yang di cetak	Penataan Pendaftaran Penduduk
				Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan
			Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk
				Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk
		meningkatkan kualitas layanan pencatatan sipil	Terlaksananya Layanan Pencatatan Sipil	presentase dokumen administrasi pencatatan sipil yang di terbitkan	PENCATATAN SIPIL
				Jumlah dokumen Pencatatan Sipil yang di cetak	Pelayanan Pencatatan Sipil
				Jumlah Dokumen Pencatatan Sipil selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Pengadaan Dokumen Pencatatan Sipil selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan
				Jumlah Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
				Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil
		Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam layanan kependudukan dan pencatatan sipil		nilai SKM	PENGLOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
			Terlaksanannya survei kepuasan masyarakat	Jumlah dokumen IKM	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
				Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	Meningkatnya akses pemanfaatan data kependudukan			Persentase akses pemanfaatan data kependudukan	
		meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan		Persentase Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	PENGLOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
			Tersedianya Akses Pemanfaatan data Kependudukan	Jumlah MoU dengan Stekholder	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
				Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan kependudukan yang di laksanakan	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
			Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
				Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
				Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
				Jumlah Kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Kerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi
				Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan
			Terlaksanya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
				Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan
				Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			Tersedianya Profil Kependudukan	Cakupan Ketersediaan Profil Kependudukan	PENGLOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
				Jumlah Dokumen Profil Kependudukan yang di susun	Penyusunan Profil Kependudukan
				Jumlah Profil Data Perkembangan Dan Proyeksi Kependudukan yang di susun	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain
	Meningkatnya Tata Kelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			Nilai SAKIP	
		Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja		Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA
			Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu		Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
			Terlaksananya Adminsitasi Keuangan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Meningkatnya Layanan kesekretariatan		Indeks Layanan Kesekretariatan	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA
			Terlaksananya administrasi umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum Yang Terlaksana	Administrasi Umum Perangkat Daerah

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Terkelolanya data Barang Milik Daerah dalam aplikasi	Jumlah Aset /BMD Yang diadakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Tersedianya layanan jasa penunjang	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Yang tersedia	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Aset /BMD Yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Pendanaan Tahun 2025-2030
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				6.797.234.924,00		6.797.234.924,00		6.797.234.924,00		6.797.234.924,00		6.797.234.924,00		
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.937.360.928,00		5.937.360.928,00		5.937.360.928,00		5.937.360.928,00		5.937.360.928,00		
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	0	75	503.790.560,00	76	525.290.560,00	77	503.790.560,00	78	503.790.560,00	79	503.790.560,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0,00		21.500.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Layanan Adminstrasi Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0,00	43	21.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.12.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		21.500.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0,00	43	21.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.12.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				223.181.360,00		223.181.360,00		223.181.360,00		223.181.360,00		223.181.360,00		
Terlaksananya Layanan Administrasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	1	223.181.360,00	1	223.181.360,00	1	223.181.360,00	1	223.181.360,00	1	223.181.360,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	11	11		11		11		11		11			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
2.12.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.990.000,00		1.990.000,00		1.990.000,00		1.990.000,00		1.990.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1.990.000,00	1	1.990.000,00	1	1.990.000,00	1	1.990.000,00	1	1.990.000,00		
2.12.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				99.999.000,00		99.999.000,00		99.999.000,00		99.999.000,00		99.999.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	99.999.000,00	2	99.999.000,00	2	99.999.000,00	2	99.999.000,00	2	99.999.000,00		
2.12.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				29.149.560,00		29.149.560,00		29.149.560,00		29.149.560,00		29.149.560,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	29.149.560,00	3	29.149.560,00	3	29.149.560,00	3	29.149.560,00	3	29.149.560,00		
2.12.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
2.12.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				89.042.800,00		89.042.800,00		89.042.800,00		89.042.800,00		89.042.800,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	11	11	89.042.800,00	11	89.042.800,00	11	89.042.800,00	11	89.042.800,00	11	89.042.800,00		
Terkelolanya data Barang Milik Daerah dalam aplikasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1	131.089.400,00	1	131.089.400,00	1	131.089.400,00	1	131.089.400,00	1	131.089.400,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	6		6		6		6		6			
2.12.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
2.12.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				126.089.400,00		126.089.400,00		126.089.400,00		126.089.400,00		126.089.400,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	6	6	126.089.400,00	6	126.089.400,00	6	126.089.400,00	6	126.089.400,00	6	126.089.400,00		
2.12.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				61.569.800,00		61.569.800,00		61.569.800,00		61.569.800,00		61.569.800,00		
Tersedianya layanan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	61.569.800,00	12	61.569.800,00	12	61.569.800,00	12	61.569.800,00	12	61.569.800,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.12.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
2.12.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				55.200.000,00		55.200.000,00		55.200.000,00		55.200.000,00		55.200.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	55.200.000,00	12	55.200.000,00	12	55.200.000,00	12	55.200.000,00	12	55.200.000,00		
2.12.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.369.800,00		3.369.800,00		3.369.800,00		3.369.800,00		3.369.800,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	3.369.800,00	1	3.369.800,00	1	3.369.800,00	1	3.369.800,00	1	3.369.800,00		
2.12.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				87.950.000,00		87.950.000,00		87.950.000,00		87.950.000,00		87.950.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah				0		0		0		0		0		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	3		3		3		3		3			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10	10		10		10		10		10			
2.12.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	5	2.500.000,00	5	2.500.000,00	5	2.500.000,00	5	2.500.000,00	5	2.500.000,00		
2.12.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				56.310.000,00		56.310.000,00		56.310.000,00		56.310.000,00		56.310.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	3	56.310.000,00	3	56.310.000,00	3	56.310.000,00	3	56.310.000,00	3	56.310.000,00		
2.12.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				29.140.000,00		29.140.000,00		29.140.000,00		29.140.000,00		29.140.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10	10	29.140.000,00	10	29.140.000,00	10	29.140.000,00	10	29.140.000,00	10	29.140.000,00		
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	5.433.570.368,00	100	5.412.070.368,00	100	5.433.570.368,00	100	5.433.570.368,00	100	5.433.570.368,00		
2.12.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		
Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.12.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.12.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
2.12.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.424.570.368,00		5.403.070.368,00		5.424.570.368,00		5.424.570.368,00		5.424.570.368,00		
Terlaksananya Adminsitiasi Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	5.424.570.368,00	12	5.403.070.368,00	12	5.424.570.368,00	12	5.424.570.368,00	12	5.424.570.368,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	516	516		516		516		516		516			
2.12.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.372.464.368,00		5.350.964.368,00		5.372.464.368,00		5.372.464.368,00		5.372.464.368,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	516	516	5.372.464.368,00	516	5.350.964.368,00	516	5.372.464.368,00	516	5.372.464.368,00	516	5.372.464.368,00		
2.12.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				52.106.000,00		52.106.000,00		52.106.000,00		52.106.000,00		52.106.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	52.106.000,00	12	52.106.000,00	12	52.106.000,00	12	52.106.000,00	12	52.106.000,00		
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				670.408.141,00		670.408.141,00		670.408.141,00		670.408.141,00		670.408.141,00		
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Dokumen Administrasi Kependudukan Yang Diterbitkan (%)	100	100	670.408.141,00	100	670.408.141,00	100	670.408.141,00	100	670.408.141,00	100	670.408.141,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.02.2.01 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk				554.630.091,00		554.630.091,00		554.630.091,00		554.630.091,00		554.630.091,00		
Terlaksananya Layanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	1	1	554.630.091,00	1	554.630.091,00	1	554.630.091,00	1	554.630.091,00	1	554.630.091,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.12.02.2.01.0001 - Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				9.990.000,00		9.990.000,00		9.990.000,00		9.990.000,00		9.990.000,00		
Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)	1	1	9.990.000,00	1	9.990.000,00	1	9.990.000,00	1	9.990.000,00	1	9.990.000,00		
2.12.02.2.01.0004 - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				544.640.091,00		544.640.091,00		544.640.091,00		544.640.091,00		544.640.091,00		
Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	1	1	544.640.091,00	1	544.640.091,00	1	544.640.091,00	1	544.640.091,00	1	544.640.091,00		
Terpenuhinya dokumen kependudukan				0		0		0		0		0		
2.12.02.2.02 - Penataan Pendaftaran Penduduk				35.779.250,00		35.779.250,00		35.779.250,00		35.779.250,00		35.779.250,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terpenuhinya dokumen kependudukan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen)	1	7	35.779.250,00	7	35.779.250,00	7	35.779.250,00	7	35.779.250,00	7	35.779.250,00		
2.12.02.2.02.0002 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan				35.779.250,00		35.779.250,00		35.779.250,00		35.779.250,00		35.779.250,00		
Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen)	1	7	35.779.250,00	7	35.779.250,00	7	35.779.250,00	7	35.779.250,00	7	35.779.250,00		
2.12.02.2.03 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				79.998.800,00		79.998.800,00		79.998.800,00		79.998.800,00		79.998.800,00		
Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan)	1	1	79.998.800,00	1	79.998.800,00	1	79.998.800,00	1	79.998.800,00	1	79.998.800,00		
2.12.02.2.03.0003 - Fasilitasi Pendaftaran Penduduk				79.998.800,00		79.998.800,00		79.998.800,00		79.998.800,00		79.998.800,00		
Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan)	1	1	79.998.800,00	1	79.998.800,00	1	79.998.800,00	1	79.998.800,00	1	79.998.800,00		
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL				34.466.390,00		34.466.390,00		34.466.390,00		34.466.390,00		34.466.390,00		
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan (%)	100	100	34.466.390,00	100	34.466.390,00	100	34.466.390,00	100	34.466.390,00	100	34.466.390,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.03.2.01 - Pelayanan Pencatatan Sipil				14.165.250,00		14.165.250,00		14.165.250,00		14.165.250,00		14.165.250,00		
Terselenggaranya Kegiatan pelayanan pencatatan sipil	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Paket)	0	4	14.165.250,00	4	14.165.250,00	4	14.165.250,00	4	14.165.250,00	4	14.165.250,00		
2.12.03.2.01.0005 - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan				14.165.250,00		14.165.250,00		14.165.250,00		14.165.250,00		14.165.250,00		
Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Paket)	0	4	14.165.250,00	4	14.165.250,00	4	14.165.250,00	4	14.165.250,00	4	14.165.250,00		
2.12.03.2.02 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				20.301.140,00		20.301.140,00		20.301.140,00		20.301.140,00		20.301.140,00		
Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	1	1	20.301.140,00	1	20.301.140,00	1	20.301.140,00	1	20.301.140,00	1	20.301.140,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.12.03.2.02.0008 - Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil				20.301.140,00		20.301.140,00		20.301.140,00		20.301.140,00		20.301.140,00		
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN				139.999.825,00		139.999.825,00		139.999.825,00		139.999.825,00		139.999.825,00		
Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam layanan kependudukan dan pencatatan sipil	Nilai Rata-Rata Survey Kepuasan Masyarakat (Angka)	3,49	3,55	16.210.635,00	3,60	16.210.635,00	3,65	16.210.635,00	3,70	16.210.635,00	3,76	16.210.635,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.04.2.02 - Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				16.210.635,00		16.210.635,00		16.210.635,00		16.210.635,00		16.210.635,00		
Terlaksanannya survei kepuasan masyarakat	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun (Dokumen)	4	4	16.210.635,00	4	16.210.635,00	4	16.210.635,00	4	16.210.635,00	4	16.210.635,00		
2.12.04.2.02.0001 - Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				16.210.635,00		16.210.635,00		16.210.635,00		16.210.635,00		16.210.635,00		
Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun (Dokumen)	4	4	16.210.635,00	4	16.210.635,00	4	16.210.635,00	4	16.210.635,00	4	16.210.635,00		
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Data Kependudukan (%)	100	100	123.789.190,00	100	123.789.190,00	100	123.789.190,00	100	123.789.190,00	100	123.789.190,00		
2.12.04.2.01 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				26.472.400,00		26.472.400,00		26.472.400,00		26.472.400,00		26.472.400,00		
Tersedianya Akses Pemanfaatan data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	13	13	26.472.400,00	13	26.472.400,00	13	26.472.400,00	13	26.472.400,00	13	26.472.400,00		
2.12.04.2.01.0002 - Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				26.472.400,00		26.472.400,00		26.472.400,00		26.472.400,00		26.472.400,00		
Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	13	13	26.472.400,00	13	26.472.400,00	13	26.472.400,00	13	26.472.400,00	13	26.472.400,00		
2.12.04.2.02 - Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				16.210.635,00		16.210.635,00		16.210.635,00		16.210.635,00		16.210.635,00		
Terlaksananya survei kepuasan masyarakat				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	1	1	46.201.690,00	1	46.201.690,00	1	46.201.690,00	1	46.201.690,00	1	46.201.690,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.12.04.2.03.0001 - Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				13.441.630,00		13.441.630,00		13.441.630,00		13.441.630,00		13.441.630,00		
Terlaksananya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	1	1	13.441.630,00	1	13.441.630,00	1	13.441.630,00	1	13.441.630,00	1	13.441.630,00		
2.12.04.2.03.0003 - Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				26.526.870,00		26.526.870,00		26.526.870,00		26.526.870,00		26.526.870,00		
Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	1	1	26.526.870,00	1	26.526.870,00	1	26.526.870,00	1	26.526.870,00	1	26.526.870,00		
2.12.04.2.03.0006 - Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi				6.233.190,00		6.233.190,00		6.233.190,00		6.233.190,00		6.233.190,00		
Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi (Dokumen)	1	1	6.233.190,00	1	6.233.190,00	1	6.233.190,00	1	6.233.190,00	1	6.233.190,00		
2.12.04.2.04 - Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				51.115.100,00		51.115.100,00		51.115.100,00		51.115.100,00		51.115.100,00		
Terlaksanya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)	1	1	51.115.100,00	1	51.115.100,00	1	51.115.100,00	1	51.115.100,00	1	51.115.100,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.12.04.2.04.0001 - Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				22.610.900,00		22.610.900,00		22.610.900,00		22.610.900,00		22.610.900,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	1	1	22.610.900,00	1	22.610.900,00	1	22.610.900,00	1	22.610.900,00	1	22.610.900,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)	1	1	28.504.200,00	1	28.504.200,00	1	28.504.200,00	1	28.504.200,00	1	28.504.200,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				14.999.640,00		14.999.640,00		14.999.640,00		14.999.640,00		14.999.640,00		
Meningkatnya kualitas profil kendudukan	Cakupan Ketersediaan Profil Kependudukan (%)	100	100	14.999.640,00	100	14.999.640,00	100	14.999.640,00	100	14.999.640,00	100	14.999.640,00	2.12.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.12.05.2.01 - Penyusunan Profil Kependudukan				14.999.640,00		14.999.640,00		14.999.640,00		14.999.640,00		14.999.640,00		
Tersedianya Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	1	1	14.999.640,00	1	14.999.640,00	1	14.999.640,00	1	14.999.640,00	1	14.999.640,00		
2.12.05.2.01.0002 - Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain				14.999.640,00		14.999.640,00		14.999.640,00		14.999.640,00		14.999.640,00		
Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	1	1	14.999.640,00	1	14.999.640,00	1	14.999.640,00	1	14.999.640,00	1	14.999.640,00		

4.2. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.2.1. Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah.

Indikator Kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis opsional dan merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Indikator Kinerja utama (IKU) akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Penetapan Indikator Kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan telah menetapkan Indikator Kinerja yang akan dicapai untuk 5 (Lima) tahun mendatang, yang ditampilkan dalam tabel 4.3 berikut ;

TABEL 4.3
INDIKATOR KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Perekaman e KTP	%	99,34%	99,40%	99,50%	99,60%	99,70%	99,80%	99,90
2	Persentase Anak Berusia 0-18 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran	%	94,06%	95%	96%	97%	98%	99%	100,%
3	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	60,88%	62%	64%	66%	68%	70%	72%
4	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	3%	10%	20%	30%	40%	50%	60%
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90,63	91,13	91,63	92,13	92,63	93,13	93,63
6	Persentase akses pemanfaatan data kependudukan	%	0%	13%	25%	38%	50%	63%	75%
7	Nilai SAKIP	Nilai	87,74	88	88,25	88,5	88,75	89,5	90

4.2.2. Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator Kinerja Kunci atau disebut juga IKK adalah Indikator Kerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan keberhasilan suatu urusan Pemerintah. Indikator kinerja juga dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu target, baik dengan menggunakan ukuran kualitatif maupun kuantitatif.

Berdasarkan dokumen RPJMD Kota Tarakan maka Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat ditampilkan pada tabel 4.4 berikut :

TABEL 4.4
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	%	94,06%	95%	96%	97%	98%	99%	100%
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	60,88%	62%	64%	66%	68%	70%	72%
6	Persentase Data Profile Kependudukan yang disusun	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	3%	10%	20%	30%	40%	50%	60%

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan Tahun 2025-2029 telah disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung visi dan misi serta arah pembangunan Kota Tarakan dan Visi dan Misi Pemerintah Kota Tarakan. Dokumen ini dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan di bidang administrasi kependudukan selama lima tahun ke depan.

Tantangan dan dinamika diperkirakan akan dihadapi dalam pelaksanaan rencana ini. Oleh karena itu, dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh jajaran Dinas, pemangku kepentingan, serta masyarakat sangat diharapkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan kerja sama dan komitmen yang tinggi, pencapaian target-target strategis diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Demikianlah Rencana Strategis ini disusun dengan harapan dapat menjadi landasan yang kuat dalam mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

14. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tarakan Tahun 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini memiliki makna bahwa Pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka pembangunan Nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus bersinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan Nasional, sehingga dapat diwujudkan tujuan bernegara.

Pada dasarnya bahwa penyusunan dokumen Renstra PD yang jenjang perencanaannya selama 5 tahun merupakan suatu kewajiban Kepala SKPD selaku pengguna anggaran dan penentu kebijakan organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 untuk periode 5 tahun ke depan merupakan perencanaan jangka menengah, karena memuat tentang penjabaran visi, misi dan program Dinas Perhubungan yang akan dilaksanakan dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu masa lima tahun. Di dalam penyusunannya, Renstra Dinas Perhubungan Kota Tarakan berpedoman pada RPJMD Kota Tarakan dan RPJM Propinsi. Namun demikian substansinya tetap berdasarkan dan memperhatikan kekuatan organisasi antara lain sumber daya dan potensi yang dimiliki, juga faktor-faktor keberhasilan sebelumnya yang didasarkan atas evaluasi pembangunan dan isu-isu strategis yang mengemuka dan berkembang.

Muatan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Tarakan Tahun 2025-2029 berisi kebijakan keuangan organisasi, kebijakan umum, dan program pembangunan daerah yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029;
21. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2045;
23. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
24. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;

25. Surat Keputusan Walikota Tarakan Nomor **xxxx** Tahun 2025 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tarakan Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tarakan dimaksudkan untuk merencanakan pembangunan lima tahun dengan melanjutkan program kerja yang telah dilaksanakan. Selain itu juga sebagai panduan target dan kinerja pelaksanaan program pembangunan tahun 2025-2029 yang disesuaikan dengan kebutuhan dan usulan dari masyarakat yang menjadi skala prioritas.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Tarakan adalah:

1. Memberikan arah pembangunan di sektor perhubungan di Kota Tarakan selama 5 tahun;
2. Menjadi tolok ukur dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Tarakan;
3. Sebagai langkah penyusunan program kerja perangkat daerah yang berkelanjutan; dan
4. Membantu dalam mencapai Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Tarakan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Tarakan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I	Pendahuluan Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra DISHUB Tahun 2025-2029, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dokumen Renstra DISHUB Tahun 2025-2029.
BAB II	Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perhubungan Bab ini memuat: tugas, fungsi dan struktur DISHUB; sumber daya DISHUB; kinerja penyelenggaraan DISHUB; kelompok sasaran DISHUB; isu strategis DISHUB yang diambil dari hasil perumusan permasalahan, isu strategis sesuai lingkungan dinamis dan potensi daerah yang menjadi kewenangan DISHUB.
BAB III	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Bab ini memuat: tujuan dan sasaran Renstra DISHUB Tahun 2025-2029 yang didasarkan pada NSPK yang sesuai dengan kewenangan DISHUB dan sasaran RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029; strategi dan penahapan pembangunan Renstra DISHUB Tahun 2025-2029; arah kebijakan Renstra DISHUB Tahun 2025-2029.
BAB IV	Program, Kegiatan, Subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan Bidang Urusan Perhubungan Bab ini memuat : Perumusan tujuan, sasaran, outcome, output, indikator dan nomenklatur program, kegiatan dan subkegiatan; Rencana target dan pendanaan Tahun 2026-2030; Daftar subkegiatan prioritas yang mendukung program prioritas RPJMD; Penentuan target kinerja utama dan penyelenggaraan urusan Tahun 2025-2030
BAB V	Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah

2.1.1.1. Tugas Pokok

Dinas Perhubungan Kota Tarakan adalah lembaga teknis daerah yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah. Dinas Perhubungan Kota Tarakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Tarakan sesuai dengan Perda Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tarakan Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Dinas Perhubungan Kota Tarakan.

2.1.1.2. Fungsi

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Dinas Perhubungan Kota Tarakan atas Peraturan Walikota Tarakan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Dinas Perhubungan Kota Tarakan.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kota Tarakan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perhubungan Kota Tarakan dalam melaksanakan tugasnya telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktur. Data Organisasi Dinas Perhubungan Kota Tarakan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. Bidang Sarana dan Prasarana Pelayaran;
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah dan ;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.1.3. Uraian Tugas Jabatan Struktural

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkondisikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksana urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya

B. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi kegiatan Dinas;
- b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas;
- e. Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada Dinas;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Dinas;
- g. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Dinas; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bantu oleh 2 Sub :

a. Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta penyusunan peraturan perundang undangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;
2. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas;
3. Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada Dinas;
4. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Dinas;
5. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris;

b. Sub Bagian Perencanaan dan Program Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah, evaluasi, dan pelaporan organisasi di Lingkungan Dinas.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan sebagian fungsi:

1. Koordinasi kegiatan Dinas;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas;

3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan; dan
4. penyiapan bahan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris;

C. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lalu lintas, Angkutan Jalan dan Pengujian Kendaraan bermotor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, Angkutan Jalan dan Pengujian Kendaraan bermotor.

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam melaksanakan tugas dalam menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan jalan, dan pengujian kendaraan bermotor;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan jalan, dan pengujian kendaraan bermotor;
3. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan jalan, dan pengujian kendaraan bermotor; dan

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri atas :

a. Seksi Lalu Lintas

Seksi lalu lintas merupakan unsur pelaksana di bidang lalu lintas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Seksi Lalu Lintas dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas.

Seksi lalu lintas menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan bahan dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan
2. (LLAJ) kota, pelaksanaan penyusunan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) kota, penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) kota, pengendalian pelaksanaan rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) kota;
3. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan perlengkapan jalan di jalan kota, pembangunan prasarana jalan di jalan kota, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana Jalan, rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan Jalan;
4. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kota, Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kota, Pengadaan, Pemasangan,

Perbaikan, dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kota, Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kota dan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota;

5. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kota, Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin, Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin, Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin dan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin;
6. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan, peningkatan kapasitas auditor dan inspektor LLAJ,;dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

b. Seksi Angkutan Jalan

Seksi Angkutan Jalan merupakan unsur pelaksana di bidang Angkutan Jalan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Seksi Angkutan Jalan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Angkutan Jalan .

Seksi Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan terminal penumpang tipe C, penyusunan rencana pembangunan terminal penumpang tipe C, pembangunan gedung terminal, Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung), Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C;
2. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kota;
3. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan terminal, pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kota, pelaksanaan inspeksi, audit dan

- pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum;
4. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kota dan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kota;
 5. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kota dalam 1 (satu) Daerah Kota, Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kota dan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kota;
 6. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kota, Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kota, Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kota dan Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kota;
 7. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kota, Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kota, Sosialisasi Dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kota;
 8. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kota, Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kota, Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kota;
 9. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lalu Lintas Daerah Kota dalam 1 (satu) Kota, Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kota;

10. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kota, Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota;
11. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kota, Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kota, Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kota, dan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kota;
12. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kota, Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota; dan
13. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kota, Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kota;
14. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan kegiatan pelayanan derek kendaraan dan pemungutan retribusi derek kendaraan;
15. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan kegiatan dan memberikan dukungan operasional pada kegiatan-kegiatan pemerintah kota yang bersifat regular atau insidental ; dan
16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

c. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor

Seksi Pengujian kendaraan Bermotor merupakan unsur pelaksana di bidang Pengujian kendaraan Bermotor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas berdasarkan Perwali Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2020.

Seksi Pengujian kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengujian kendaraan Bermotor.

Seksi Pengujian kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
2. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
3. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
4. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Registrasi Kendaraan Wajib Uji Coba Berkala Kendaraan Bermotor;
5. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
6. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
7. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji;
8. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
9. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
10. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
11. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D. Bidang Sarana dan Prasarana Pelayaran.

Bidang Sarana dan Prasarana Pelayaran merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Sarana dan Prasarana

Pelayaran yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Sarana dan Prasarana Pelayaran mempunyai tugas Pembina, pengelolaan dan pengendalian sarana dan prasarana perhubungan dan Penerangan Jalan Umum

Bidang Sarana dan Prasarana Pelayaran dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Pengawasan Rencana Kerja Bidang Sarana dan Prasarana perhubungan;
2. Perumusan kebijakan Teknis Pengelolaan dan pengendalian Sarana dan Prasarana perhubungan dan Penerangan Jalan Umum ;
3. Pengelolaan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan jalan;
4. Pengelolaan dan pengendalian Penerangan Jalan Umum; dan
5. Evaluasi dan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kerja pada Sarana dan Prasarana.

Bidang Sarana dan Prasarana Pelayaran terdiri atas :

a. Seksi Sarana;

Seksi Sarana merupakan unsur pelaksana dibidang sarana pelayaran yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang sarana dan prasarana Pelayaran dan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian dan pengelolaan sarana perhubungan, seksi sarana dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja seksi sarana;
2. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pengendalian sarana perhubungan;
3. Pemasangan dan pemeliharaan fasilitas pendukung sarana perhubungan meliputi halte, tempat penyeberangan pejalan kaki, jalur sepeda, fasilitas khusus penyandang acat dan Fasilitas usia lanjut;
4. Melaksanakan Koordinasi, Pembinaan Fasilitas dan Pengendalian Teknis Sarana Perhubungan dan ;
5. Evaluasi dan Penyusunan Pelaksanaan Kerja Seksi Sarana;
6. Melakukan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala bidang Sarana dan Prasarana Pelayaran.

b. Seksi Prasarana

Seksi Prasarana merupakan unsur pelaksana di bidang Prasarana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang Sarana dan Prasarana Pelayaran. Seksi Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi.

Seksi Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan Pengendalian dan pengelolaan prasarana perhubungan.

Seksi Prasarana dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan Rencana Kerja Seksi Prasarana;
2. Perumusan kebijakan Teknis Pengelolaan dan Pengendalian Prasarana Perhubungan;
3. Pemasangan dan Pemeliharaan serta pengawasan Fasilitas Pendukung perlengkapan Lalu Lintas dan angkutan Jalan meliputi penerangan jalan umum, Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Traffic Light dan warning Light ; dan

4. Evaluasi dan Penyusunan Pelaksanaan Kerja Seksi Prasarana;
5. Melakukan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala bidang Sarana dan Prasarana Pelayaran.

E. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah dilingkungan Dinas Meliputi:
2. Pelabuhan Penyeberangan Juata.
3. Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis Daerah diatur dengan peraturan Walikota.

F. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

1. Pada Dinas dan unit pelaksana teknis Daerah dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang.
2. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari beberapa pejabat fungsional dapat diberikan tugas tambahan yang melaksanakan tugas sebagai Sub Koordinator melalui penetapan Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan yang berwenang. .Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Tarakan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya. Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, Pejabat Administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional yang merupakan hasil dari penyetaraan Jabatan Pengawas diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator. Kelompok Jabatan fungsional di bawah Koordinasi Kepala Bidang bertanggung Jawab langsung dengan Kepala Dinas. Jumlah tenaga fungsional ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja, berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

2.1.2. Sumber daya Perangkat Daerah

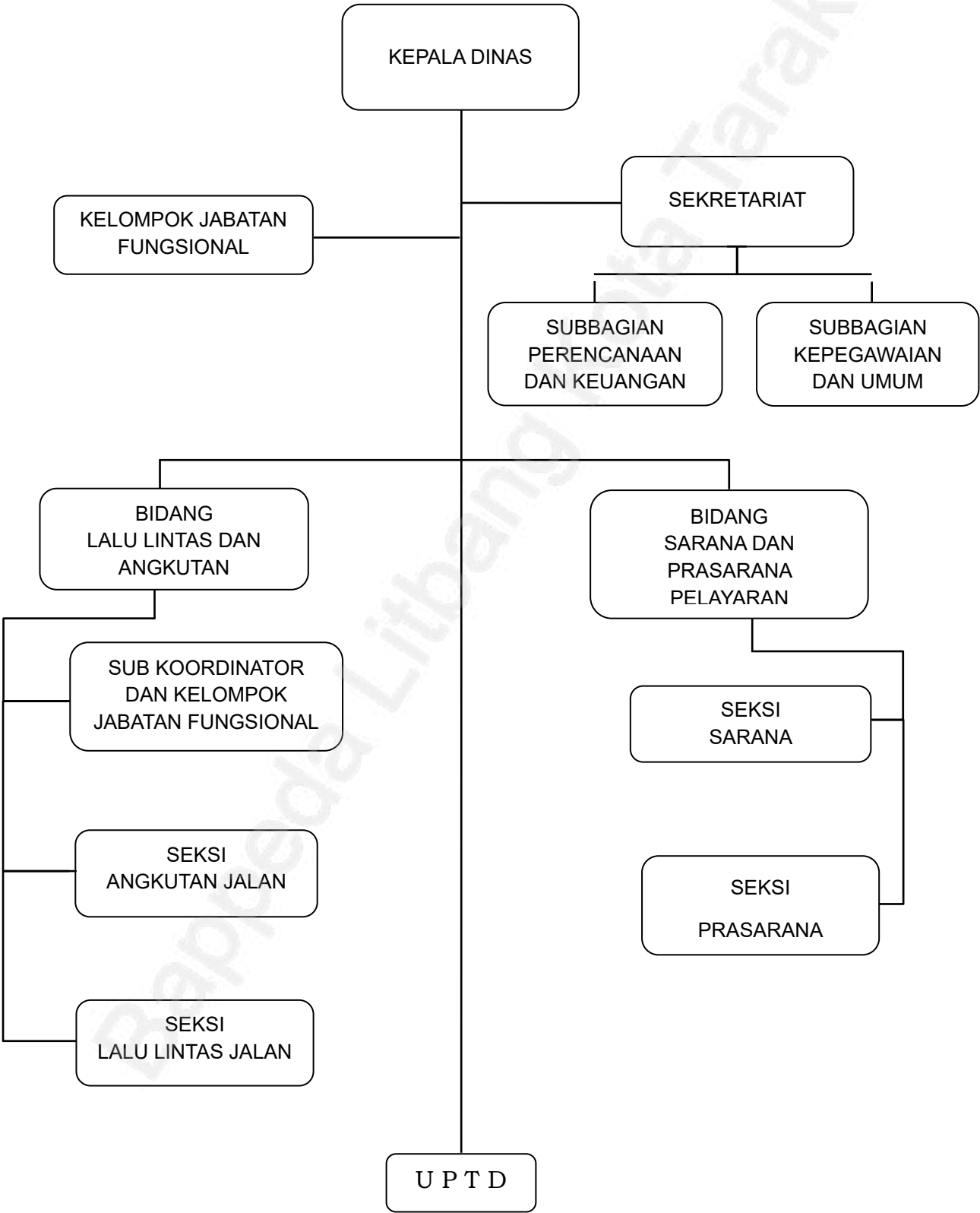
Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh Instansi/ badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi tersebut. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi. Kondisi institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif.

pegawai Dinas Perhubungan Kota Tarakan yang melaksanakan urusan perhubungan terdiri dari :

- 1. PNS 71 Orang
Pejabat Struktural 12 Orang, Pejabat Fungsional 1 Orang dan 58 Orang Staf, jumlah pegawai dengan Kualifikasi pendidikan S2 (5 Orang), S1 (26 orang), DIV (2 orang), DIII (5 orang), DII (1 orang), SLTA (32 Orang).
- 2. Honor Daerah 12 Orang
Kualifikasi pendidikan S1(4 orang),SLTA (8 Orang).

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



2.1.3. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2. 1
Pencapaian Kinerja Pelayanan DISHUB Kota Tarakan Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun					Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang merata dan berkualitas				Cakupan Layanan Infrastruktur yang merata dan berkualitas bidang Perhubungan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				100%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Meningkatnya sarana prasarana perkotaan bidang perhubungan				Jumlah titik daerah potensi dan rawan laka	18%	57 titik	44 titik	40 titik	35 titik	34%	57 titik	42 titik	30 titik	30 titik	188.89%	100.00%	95.45%	75.00%	85.71%
				Persentase Kendaraan yang Melaksanakan Wajib Uji di Kota Tarakan	25.99%	42.29%	50.75%	59.21%	67.67%	43.95%	56.23%	49.68%	53.04%	76.54%	169.10%	132.96%	97.89%	89.57%	113.10%
				Titik Kemacetan yang teratasi	36 titik	31 titik	26 titik	21 titik	17 titik	30 titik	25 titik	21 titik	26 titik	14 titik	83.33%	80.65%	80.77%	123.81%	82.35%
				Rasio Panjang Jalan dibagi Jumlah kendaraan	1.32	1.29	1.27	1.25	1.23	1.32	1.30	1.22	1.19	1.11	100.00%	100.78%	96.06%	95.20%	90.24%
				Persentase Pemeliharaan Pelabuhan	NA %	0%	30%	60%	100%		100%	29%	58%	100%					
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	jumlah titik daerah potensi dan rawan laka	18%	57 titik	44 titik	40 titik	35 titik	34%	57 titik	42 titik	30 titik	30 titik	188.89%	100.00%	95.45%	75.00%	85.71%		
		Presentase Kendaraan yang Melaksanakan Wajib Uji di Kota Tarakan	25.99%	42.29%	50.75%	59.21%	67.67%	43.95%	56.23%	49.68%	53.04%	76.54%	169.10%	132.96%	97.89%	89.57%	113.10%		
		Rasio Panjang Jalan Dibagi Jumlah Kendaraan	1.32	1.29	1.27	1.25	1.23	1.32	1.30	1.22	1.19	1.11	100.00%	100.78%	96.06%	95.20%	90.24%		
		Titik Kemacetan yang teratasi	36 titik	31 titik	26 titik	21 titik	17 titik	30 titik	25 titik	21 titik	26 titik	14 titik	83.33%	80.65%	80.77%	123.81%	82.35%		
	2.15.02.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan fasilitas kelengkapan jalan	NA %	100%	100%	100%	100%		100%		0%	0%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal yang dipelihara	NA Terminal	NA Terminal	1 Terminal	1 Terminal	1 Terminal					0 Terminal						
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	peningkatan titik parkir yang terfasilitasi	NA Kegiatan	NA Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan				1 Kegiatan	0 Kegiatan						
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase pengujian kendaraan bermotor	NA %	26.00%	26%	27%	27%		56.23%	50%	53%	76.54%	0.00%	216.27%	191.08%	196.43%	283.46%	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun					Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	NA %	NA %	33.33%	33.33%	33.33%				100.00%	0.00%					
		2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	presentase pengendalian dan pengawasan angkutan umum	NA %	100%	100%	100%	100%				100%	0%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%
		2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pemeliharaan Pelabuhan	NA %	0%	30%	60%	100%		100%	29%	58.00%	100%					
		2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Presentase Pembangunan, Penerbitan Ijin Pembangunan	NA %	NA %	100%	100%	100%										
		2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	persentase pemeliharaan pelabuhan penyeberangan Juata	NA Kegiat an	NA Kegiat an	1 Kegiat an	1 Kegiat an	1 Kegiatan			2 Kegiat an	58.00%	100.00%					
	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Perhubungan			Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100.00%	100.00%	100.00%	99.95%
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100.00%	100.00%	100.00%	99.95%
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersedia	NA Layan an	0 Layana n	1 Layana n	1 Layana n	1 Layanan		0 Layana n		1 Layana n	0 Layanan					
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	NA Layan an	2 Layana n	2 Layana n	2 Layana n	2 Layanan		2 Layana n	2 Layana n	2 Layana n	2 Layanan		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	X.XX.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumah layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	NA Layan an	0 Layana n	1 Layana n	1 Layana n	1 Layanan										
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian	NA Layan an	0 Layana n	2 Layana n	2 Layana n	2 Layanan		1 Layana n		1 Layana n			0.00%	0.00%	50.00%	0.00%

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun					Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	NA Layanan	5 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	5 Layanan		5 Layanan	4 Layanan	4 Layanan	4 Layanan		100.00%	80.00%	80.00%	80.00%
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	NA Layanan	0 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan			1 Layanan	1 Layanan	2 Layanan					
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	NA Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan		2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan		100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	NA Unit	46 Unit	46 Unit	46 Unit	46 Unit		46 Unit	61 Unit	102 Unit	124 Unit		100.00%	132.61%	221.74%	269.57%

Sumber : Dishub, 2025

Tabel 2. 2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DISHUB Kota Tarakan Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun					Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang merata dan berkualitas				Cakupan Layanan Infrastruktur yang merata dan berkualitas bidang Perhubungan.	-	20,656,236,465	25,569,352,951	19,000,000,000	19,000,000,000	701,639,600	19,322,658,401	17,081,120,472	23,893,634,342	38,088,034,235	-	93.54%	66.80%	125.76%	200.46%
	Meningkatnya sarana prasarana perkotaan bidang perhubungan			Jumlah titik daerah potensi dan rawan laka	-	2,809,719,894	8,342,832,890	1,807,505,719	2,052,759,106	-	2,775,856,434	1,811,292,836	11,695,363,578	21,889,530,029		98.79%	21.71%	647.04%	1066.35%
				Persentase Kendaraan yang Melaksanakan Wajib Uji di Kota Tarakan		382,512,800	88,700,000	150,000,000	150,000,000	290,917,600	364,335,182	88,280,000	149,573,400	611,046,009		95.25%	99.53%	99.72%	407.36%
				Titik Kemacetan yang teratasi		-	-	190,000,000	190,000,000	410,722,000	-	-	57,197,500	198,200,000					
				Rasio Panjang Jalan dibagi Jumlah kendaraan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
				Persentase Pemeliharaan Pelabuhan	-	-	70,000,000	100,000,000	100,000,000		-	69,254,000	69,937,000	681,386,506					
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	jumlah titik daerah potensi dan rawan laka	-	2,809,719,894	8,342,832,890	1,807,505,719	2,052,759,106	-	2,775,856,434	1,811,292,836	11,695,363,578	21,889,530,029		98.79%	21.71%	647.04%	1066.35%	
			Presentase Kendaraan yang Melaksanakan Wajib Uji di Kota Tarakan	-	382,512,800	88,700,000	150,000,000	150,000,000	290,917,600	364,335,182	88,280,000	149,573,400	611,046,009		95.25%	99.53%	99.72%	407.36%	
			Rasio Panjang Jalan Dibagi Jumlah Kendaraan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			Titik Kemacetan yang teratasi	-	-	-	190,000,000	190,000,000	410,722,000	-	-	57,197,500	198,200,000						
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan fasilitas kelengkapan jalan	-	2,809,719,894	8,342,832,890	1,807,505,719	2,052,759,106	-	2,775,856,434	1,811,292,836	11,695,363,578	21,889,530,029		98.79%	21.71%	647.04%	1066.35%	
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah terminal yang dipelihara	-	-		50,000,000	50,000,000					49,830,000						
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	peningkatan titik parkir yang terfasilitasi	-	-		80,000,000	80,000,000				51,572,500	75,845,000						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun					Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase pengujian kendaraan bermotor	-	382,512,800	88,700,000	150,000,000	150,000,000	-	364,335,182	88,280,000	149,573,400	611,046,009	-	95.25%	99.53%	99.72%	407.36%
		2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-		20,000,000	20,000,000				5,625,000	5,500,000					
		2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	presentase pengendalian dan pengawasan angkutan umum	-	-		40,000,000	40,000,000	-			-	67,025,000	-	0.00%	0.00%	0.00%	167.56%
		2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Pemeliharaan Pelabuhan	-	-	70,000,000	100,000,000	100,000,000	-	-	69,254,000	69,937,000	681,386,506	-				
		2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Presentase Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan	-	-	-	-	-										
		2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	persentase pemeliharaan pelabuhan penyeberangan Juata	-	-	70,000,000	100,000,000	100,000,000			69,254,000	69,937,000	681,386,506					
	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Perhubungan			Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	-	17,464,003,771	17,067,820,061	16,752,494,281	16,507,240,894		16,182,466,785	15,112,293,636	11,921,562,864	14,707,871,691		92.66%	88.54%	71.16%	89.10%
	X.XX.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	-	17,464,003,771	17,067,820,061	16,752,494,281	16,507,240,894		16,182,466,785	15,112,293,636	11,921,562,864	14,707,871,691		92.66%	88.54%	71.16%	89.10%
	X.XX.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersedia	-	-	-	-	-				-	-					
	X.XX.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	-	9,142,980,282	7,459,631,323	8,045,866,623	8,045,866,623		8,066,441,993	6,320,064,163	6,346,083,624	8,882,636,931		88.23%	84.72%	78.87%	110.40%
	X.XX.01.2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumah layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-	-	100,000,000	100,000,000										
	X.XX.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian	-	12,600,000	-	50,000,000	110,000,000		11,880,000		18,792,000			94.29%	0.00%	37.58%	0.00%

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun					Realisasi Capaian Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
		X.XX .01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	-	123,982,133	122,287,460	159,559,400	134,306,013		115,055,359	121,018,762	188,283,976	218,913,430		92.80%	98.96%	118.00%	163.00%
		X.XX .01.2 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	43,190,010	350,000,000	15,000,000			42,750,000	19,070,000	1,925,917,854					
		X.XX .01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	-	7,646,250,000	8,635,352,608	7,166,450,000	7,166,450,000		7,611,631,713	8,107,176,811	4,684,114,894	2,754,017,501		99.55%	93.88%	65.36%	38.43%
		X.XX .01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	-	538,191,356	807,358,660	880,618,258	935,618,258		377,457,720	521,283,900	665,218,370	926,385,975		70.13%	64.57%	75.54%	99.01%

Sumber : Analisis DISHUB, 2025

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis DISHUB

2.2.1. Permasalahan

Permasalahan yang masih sering di hadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Tarakan yaitu

- Belum optimalnya pelayanan transportasi di Kota
- Banyaknya titik kemacetan
- Masih kurangnya sarana prasarana perlengkapan jalan
- Masih rendahnya pembinaan dan pengawasan terhadap parkir
- Masih rendahnya pembinaan dan pengawasan terhadap parkir
- Banyaknya pelaku usaha yang tidak menyediakan lahan parkir
- Belum tingginya kesadaran pemilik kendaraan angkutan barang dan orang untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor
- Masih banyaknya angkutan umum yang tidak berizin
- Belum optimalnya Pelayanan Pelabuhan Ferry Juata Tarakan
- Belum memadainya kondisi fasilitas, sarana & prasarana di pelabuhan

2.2.2. Isu Strategis

Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam menyusun perencanaan (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Dinas Perhubungan Kota Tarakan menetapkan Isu Strategis sebagai berikut: “Optimalisasi pelayanan transportasi di Kota Tarakan “

Tabel 2. 3
Permasalahan dan Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Pengelolaan Transportasi Dishub Tarakan bertanggung jawab untuk menciptakan sistem transportasi yang aman, efisien, dan terintegrasi di kota Tarakan. Ini termasuk pengelolaan transportasi darat, laut, dan udara.	Belum optimalnya pelayanan transportasi di Kota Tarakan	Tidak ada		Kinerja Logistik Nasional: Peningkatan kinerja logistik nasional menjadi isu strategis yang perlu ditangani untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas transportasi di Kota Tarakan dan sekitarnya.		Optimalisasi pelayanan transportasi di Kota Tarakan
Pengawasan Lalu Lintas Dishub Tarakan melakukan pengawasan lalu lintas untuk memastikan keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas di kota Tarakan.	Banyaknya titik kemacetan				Kemacetan di Kota-Kota Besar: Kemacetan lalu lintas di kota-kota besar, termasuk Tarakan, dapat mempengaruhi kinerja transportasi dan produktivitas masyarakat.	
Peningkatan Keselamatan Transportasi: Dishub Tarakan berupaya meningkatkan keselamatan transportasi melalui berbagai program dan kegiatan	Masih kurangnya sarana prasarana perlengkapan jalan					
Pengelolaan Parkir Dishub Tarakan bekerja sama dengan Perumda Tarakan Aneka Usaha untuk mengelola parkir tepi jalan umum dan menarik retribusi parkir.	Masih rendahnya pembinaan dan pengawasan terhadap parkir					
	Banyaknya pelaku usaha yang tidak menyediakan lahan parkir					
Pengujian Kendaraan Bermotor: Dishub Tarakan melakukan pengujian kendaraan bermotor untuk memastikan keselamatan dan kelaikan kendaraan.	Belum tingginya kesadaran pemilik kendaraan angkutan barang dan orang untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor			Konsumsi Energi dan Emisi Sektor Transportasi: Penggunaan energi dan emisi sektor transportasi yang masih tinggi menjadi perhatian global, termasuk di Kota Tarakan, untuk mengurangi dampak lingkungan.		
Pemberian Izin dan Perizinan: Dishub Tarakan memiliki wewenang untuk memberikan izin persuratan terkait transportasi dan perhubungan, seperti izin usaha angkutan, izin angkutan penumpang umum, dan izin angkutan barang	Masih banyaknya angkutan umum yang tidak berizin				Ketimpangan Wilayah: Ketimpangan wilayah, terutama di daerah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan (3TP), menjadi isu strategis yang perlu ditangani untuk	

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
					meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas.	
Peningkatan Keselamatan Transportasi: Dishub Tarakan berupaya meningkatkan keselamatan transportasi melalui berbagai program dan kegiatan	Belum optimalnya Pelayanan Pelabuhan Ferry Juata Tarakan		Peningkatan Keselamatan Transportasi: Keselamatan transportasi darat, laut, dan udara menjadi prioritas utama untuk mengurangi angka kecelakaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat.			
	Belum memadainya kondisi fasilitas, sarana & prasarana di pelabuhan					

Sumber : Hasil Analisis DISHUB, 2025

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra DISHUB Kota Tarakan Tahun 2025-2029

Tabel 3. 1
Tujuan dan Sasaran Renstra DISHUB

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Baseline	TARGET TAHUN						KET.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		T-1 Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman dan aman	T-1 Rasio konektivitas kabupaten/kota	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	
S-5 Meningkatnya Pemenuhan infrastruktur dasar daerah		S-1 Terurainya kemacetan di Kota Tarakan	S-1 V/C Ratio	0.37	0.41	0.46	0.51	0.57	0.64	0.71	
		S-2 Meningkatnya pelayanan Pelabuhan Ferry Juata Tarakan	S-2 IKM Pelabuhan Juata Tarakan	80.82	80.89	80.92	80.95	80.98	81.01	81.04	
S-10 Meningkatnya akuntabilitas kinerja		S-3 Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah	S-3 Nilai SAKIP	68.21	68.43	68.93	69.43	69.93	70.43	70.93	

Sumber : Hasil Analisis DISHUB, 2025

Tujuan dan sasaran Restra Dinas Perhubungan Koata Tarakan tertuang dengan jelas pada Tabel 3.1 diatas yaitu terwujudnya layanan transportasi yang nyaman dan nyaman.

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dishub Kota Tarakan Tahun 2025-2029

Strategi dan arah Kebijakan Renstra Dishub Kota Tarakan, Adalah Sebagai berikut :

1. Penggatasan kemacetan di Kota Tarakan
2. Pelaksanaan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
3. Penyelenggaraan Koordinasi penertiban Parkir
4. Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum atau Tersedianya angkutan umum yang berizin
5. Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum atau Tersedianya angkutan umum yang berizin
6. Penyediaan prasarana perlengkapan jalan yang layak
7. Penyediaan prasarana perlengkapan jalan yang layak
8. Penyediaan sarana prasarana pelabuhan yang memadai
9. Penyediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu
10. Penyediaan Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP
11. Peningkatan kinerja dan kompetensi ASN
12. Penyediaan layanan administrasi umum dan jasa penunjang
13. Pengelolaan pendataan Barang Milik Daerah

Tabel 3. 2
Strategi Renstra Dishub Kota Tarakan Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman dan aman	Terurainya kemacetan di Kota Tarakan	1. Pengurangan titik kemacetan
		2. Peningkatan Kendaraan yang Melaksanakan Wajib Uji
		3. Peningkatan pemenuhan sarana prasarana perlengkapan jalan
	Meningkatnya pelayanan Pelabuhan Ferry Juata Tarakan	Peningkatan pemenuhan sarana prasarana pelabuhan yang memadai
	Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah	Peningkatan penguatan internal akuntabilitas kinerja Peningkatan layanan kesekretariatan

Sumber : Hasil Analisis Dishub, 2025

Dari Strategi dan sasaran diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa tujuan dari Dinas Perhubungan Kota Tarakan adalah Terwujudnya layanan Trasportasi yang nyaman dan Aman.

Tabel 3. 3
Penahapan Renstra Renstra DISHUB Kota Tarakan Tahun 2025-2029

TAHAP 1	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perluasan program pemenuhan layanan transportasi yang nyaman dan aman	Perluasan program pemenuhan layanan transportasi yang nyaman dan aman	Peningkatan infrastruktur layanan transportasi yang nyaman dan aman	Peningkatan infrastruktur layanan transportasi yang nyaman dan aman	Konsolidasi dan keberlanjutan layanan transportasi yang nyaman dan aman

Sumber : Hasil Analisis Dishub, 2025

Tahapan dan Arah Kebijakan Renstra DISHUB Kota Tarakan Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

- Penanganan kemacetan di Kota Tarakan
- Pelaksanaan pengelolaan terminal penumpang Tipe C
- Penyelenggaraan koordinasi penertiban parkir
- Penyelenggaraan pelayanan angkutan umum atau tersedianya angkutan umum yang berizin
- Pelaksanaan wajib uji di Kota Tarakan
- Penyediaan prasarana perlengkapan jalan yang layak
- Penyediaan fasilitas pendukung sarana jalan yang layak
- Penyediaan sarana prasarana pelabuhan yang memadai
- Penyediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu
- Penyediaan dokumen administrasi keuangan sesuai sap
- Penyediaan layanan administrasi umum dan jasa penunjang
- Pengelolaan pendataan barang milik daerah

Tabel 3. 4
Arah Kebijakan Renstra Renstra Dishub Kota Tarakan Tahun 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	UU No. 22 Tahun 2009 adalah Undang-Undang Republik Indonesia tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang bertujuan untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar.	1. Peningkatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur 2. Penguatan Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Handal	Penanganan kemacetan di Kota Tarakan	
2			Pelaksanaan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
3			Penyelenggaraan Koordinasi penertiban Parkir	
4			Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum atau Tersedianya angkutan umum yang berizin	
5			Pelaksanaan Wajib Uji di Kota Tarakan	
6			Penyediaan prasarana perlengkapan jalan yang layak	
7			Penyediaan fasilitas pendukung sarana Jalan yang layak	
8	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran adalah landasan hukum utama yang mengatur berbagai aspek pelayaran di Indonesia, termasuk angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan maritim		Penyediaan sarana prasarana pelabuhan yang memadai	
9		Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Tata Kelola Pemerintahan	Penyediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	
10			Penyediaan Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP	
11			Peningkatan kinerja dan kompetensi ASN	
12			Penyediaan layanan administrasi umum dan jasa penunjang	
13			Pengelolaan pendataan Barang Milik Daerah	

Sumber : Hasil Analisis Dishub, 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

4.1. Perumusan, Rencana Pendanaan dan Sub Kegiatan Prioritas

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Tarakan dalam kurun waktu lima tahun mulai Tahun Pertama (2025) sampai dengan Tahun Kelima (2029), maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, adalah sebagaimana diuraikan dalam table 4.1

Tabel 4. 1
Perumusan Renstra DISHUB Kota Tarakan Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
	T-1 Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman dan aman				T-1 Rasio konektivitas kabupaten/kota		Kadis
S-5 Meningkatnya Pemenuhan infrastruktur dasar daerah		S-1 Terurainya kemacetan di Kota Tarakan			S-1 V/C Ratio		Kadis
			OC-1.1. Berkurangnya titik kemacetan		OC-1.1. Jumlah titik potensi kemacetan	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kabid LLAJ
				OT-1.1.1 Teratasinya kemacetan di Kota Tarakan	OT-1.1.1 Jumlah titik-titik kemacetan yang diatasi	2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kasi LLAJ
				OTs-1.1.1.1 Ditetapkannya dan Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	OTs-1.1.1.1 Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.01.0005 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kasi LLAJ
				OT-1.1.2 Terlaksananya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	OT-1.1.2 Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kasi Angkutan
				OTs-1.1.2.1 Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	OTs-1.1.2.1 Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Kasi Angkutan
				OT-1.1.3 Terselenggaranya Koordinasi penertiban Parkir	OT-1.1.3 Jumlah Kegiatan Penertiban parkir	2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kasi Angkutan
				OTs-1.1.3.1 Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	OTs-1.1.3.1 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kasi Angkutan
				OT-1.1.4 Terselenggaranya Pelayanan Angkutan Umum atau Tersedianya angkutan umum yang berizin	OT-1.1.4 Jumlah angkutan umum yang berizin	2.15.02.2.13 Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kasi Angkutan
				OTs-1.1.4.1 Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	OTs-1.1.4.1 Jumlah laporan pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.13.0003 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kasi Angkutan
			OC-1.2. Meningkatnya Kendaraan yang Melaksanakan Wajib Uji		OC-1.2. Persentase Kendaraan yang Melaksanakan Wajib Uji di Kota Tarakan	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kabid LLAJ
				OT-1.2.1 Terlaksananya Wajib Uji di Kota Tarakan	OT-1.2.1 Jumlah Kendaraan yang Melaksanakan Wajib Uji	2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	JF Pengujian

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.	
				OTs-1.2.1.1 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	OTs-1.2.1.1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	JF Pengujian	
				OTs-1.2.1.2 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	OTs-1.2.1.2 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	JF Pengujian	
			OC-1.3. Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana perlengkapan jalan		OC-1.3. Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Kabid Sarpras	
				OT-1.3.1 Output, PK Kasi/ JF : Tersedianya prasarana perlengkapan jalan yang layak	OT-1.3.1 Jumlah prasarana Perlengkapan Jalan yang layak	2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kasi Prasarana	
				OTs-1.3.1.1 Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	OTs-1.3.1.1 Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kasi Prasarana	
				OT-1.3.2 Tersedianya fasilitas pendukung sarana Jalan yang layak	OT-1.3.2 Jumlah fasilitas pendukung sarana perhubungan yang layak	2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kasi Sarana	
				OTs-1.3.2.1 Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	OTs-1.3.2.1 Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kasi Sarana	
			S-2 Meningkatnya pelayanan Pelabuhan Ferry Juata Tarakan		S-2 IKM Pelabuhan Juata Tarakan		Kadis	
				OC-2.1 Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana pelabuhan yang memadai		OC-2.1 Persentase sarpras pelabuhan dengan kondisi memadai	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Ka. UPT
					OT-2.1.1 Tersedianya sarana prasarana pelabuhan yang memadai	OT-2.1.1 jumlah sarpras pelabuhan memadai	2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Ka. UPT
					OTs-2.1.1.1 Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	OTs-2.1.1.1 Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	2.15.03.2.13.0011 Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Ka. UPT
					OT-2.1.1 Tersedianya sarana prasarana pelabuhan yang memadai	OT-2.1.1 jumlah sarpras pelabuhan memadai	2.15.03.2.11 Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Ka. UPT
					OTs-2.1.1.2 Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	OTs-2.1.1.2 Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	2.15.03.2.11.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Ka. UPT
S-10 Meningkatnya akuntabilitas kinerja		S-3 Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah		S-3 Nilai SAKIP		Kadis		
		OC-3.1 Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja		OC-3.1 Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti	2.11.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretaris		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				OT-3.1.1 Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	OT-3.1.1 Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kasubbag PRK
				OTs-3.1.1.1 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	OTs-3.1.1.1 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kasubbag PRK
				OTs-3.1.1.2 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	OTs-3.1.1.2 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kasubbag PRK
				OTs-3.1.1.3 Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	OTs-3.1.1.3 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	2.15.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	Kasubbag PRK
				OT-3.1.2 Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP	OT-3.1.2 Jumlah Laporan Keuangan sesuai SAP	2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kasubbag PRK
				OTs-3.1.2.1 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	OTs-3.1.2.1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kasubbag PRK
				OTs-3.1.2.2 Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	OTs-3.1.2.2 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.15.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kasubbag PRK
				OC-3.2 Meningkatnya layanan kesekretariatan	OC-3.2 Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	2.11.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretaris
				OT-3.2.1 Tersedianya layanan administrasi kepegawaian	OT-3.2.1 Jumlah ASN yang terlayani	2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kasubbag UDK
				OTs-3.2.1.1 Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	OTs-3.2.1.1 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kasubbag UDK
				OTs-3.2.1.2 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	OTs-3.2.1.1 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kasubbag UDK
				OT-3.2.1 Tersedianya layanan administrasi umum dan jasa penunjang	OT-3.2.1 Jumlah ASN yang terlayani	2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kasubbag UDK
				OTs-3.2.1.1 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	OTs-3.2.1.1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kasubbag UDK
				OTs-3.2.1.2 Tersedianya Bahan Logistik Kantor	OTs-3.2.1.2 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kasubbag UDK
				OTs-3.2.1.3 Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	OTs-3.2.1.3 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kasubbag UDK
				OTs-3.2.1.4 Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	OTs-3.2.1.4 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.15.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kasubbag UDK
				OTs-3.2.1.5 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	OTs-3.2.1.5 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kasubbag UDK
				OT-3.2.1 Tersedianya layanan administrasi umum dan jasa penunjang	OT-3.2.1 Jumlah ASN yang terlayani	2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubbag UDK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				OTs-3.2.1.6 Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	OTs-3.2.1.6 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kasubbag UDK
				OTs-3.2.1.7 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	OTs-3.2.1.7 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kasubbag UDK
				OT-3.2.2 Terkelolanya pendataan Barang Milik Daerah	OT-3.2.2 Jumlah barang yang terinventarisasi	2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kasubbag UDK
				OTs-3.2.2.1 Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	OTs-3.2.2.1 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kasubbag UDK
				OTs-3.2.2.2 Tersedianya Mebel	OTs-3.2.2.2 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Kasubbag UDK
				OTs-3.2.2.3 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OTs-3.2.2.3 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.15.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kasubbag UDK
				OT-3.2.2 Terkelolanya pendataan Barang Milik Daerah	OT-3.2.2 Jumlah barang yang terinventarisasi	2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kasubbag UDK
				OTs-3.2.2.4 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	OTs-3.2.2.4 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kasubbag UDK
				OTs-3.2.2.5 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	OTs-3.2.2.5 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kasubbag UDK
				OTs-3.2.2.6 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	OTs-3.2.2.6 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kasubbag UDK
				OTs-3.2.2.7 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	OTs-3.2.2.7 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.15.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kasubbag UDK

Sumber : Hasil Analisis DISHUB, 2025

Tabel 4. 2
Rencana Pendanaan Renstra Dinas Perhubungan Kota Tarakan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				37.064.741.670,00		35.164.538.362,00		34.273.214.139,00		35.504.197.976,00		37.495.202.221,00		
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				17.519.641.660,00		16.140.604.952,00		15.949.280.729,00		16.017.797.966,00		16.893.268.811,00		
Meningkatnya layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	0	88,19	9.624.345.476,00	88,28	7.870.997.759,00	88,35	7.286.646.976,00	88,42	6.942.486.326,00	88,51	7.384.645.389,00	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan	
2.15.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				90.200.000,00		110.300.000,00		82.400.000,00		150.500.000,00		90.200.000,00		
Tersedianya layanan administrasi kepegawaian	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	5	90.200.000,00	5	110.300.000,00	5	82.400.000,00	5	150.500.000,00	5	90.200.000,00		
2.15.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				40.200.000,00		60.300.000,00		32.400.000,00		100.500.000,00		40.200.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	71	40.200.000,00	71	60.300.000,00	71	32.400.000,00	71	100.500.000,00	71	40.200.000,00		
2.15.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00		
2.15.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				255.735.600,00		255.735.600,00		255.735.600,00		255.735.600,00		255.735.600,00		
Tersedianya layanan administrasi umum dan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7	7	255.735.600,00	7	255.735.600,00	7	255.735.600,00	7	255.735.600,00	7	255.735.600,00		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	14	14		14		14		14		14			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7	7		7		7		7		7			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.15.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				48.232.000,00		48.232.000,00		48.232.000,00		48.232.000,00		48.232.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	48.232.000,00	3	48.232.000,00	3	48.232.000,00	3	48.232.000,00	3	48.232.000,00		
2.15.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	14	14	60.000.000,00	14	60.000.000,00	14	60.000.000,00	14	60.000.000,00	14	60.000.000,00		
2.15.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				91.602.000,00		91.602.000,00		91.602.000,00		91.602.000,00		91.602.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7	7	91.602.000,00	7	91.602.000,00	7	91.602.000,00	7	91.602.000,00	7	91.602.000,00		
2.15.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00		
2.15.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				49.901.600,00		49.901.600,00		49.901.600,00		49.901.600,00		49.901.600,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7	7	49.901.600,00	7	49.901.600,00	7	49.901.600,00	7	49.901.600,00	7	49.901.600,00		
2.15.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				3.028.089.617,00		1.252.141.900,00		693.628.617,00		278.049.217,00		777.614.217,00		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	56	56		56		56		56		56			
2.15.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.781.909.400,00		1.120.799.400,00		629.444.400,00		129.879.400,00		629.444.400,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	12	12	2.781.909.400,00	12	1.120.799.400,00	12	629.444.400,00	12	129.879.400,00	12	629.444.400,00		
2.15.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				145.367.300,00		47.356.900,00		47.356.900,00		47.356.900,00		47.356.900,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	56	56	145.367.300,00	56	47.356.900,00	56	47.356.900,00	56	47.356.900,00	56	47.356.900,00		
2.15.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.812.917,00		83.985.600,00		16.827.317,00		100.812.917,00		100.812.917,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	14	20	100.812.917,00	11	83.985.600,00	1	16.827.317,00	20	100.812.917,00	20	100.812.917,00		
2.15.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				5.212.333.599,00		5.214.833.599,00		5.216.896.099,00		5.220.214.849,00		5.223.108.912,00		
Tersedianya layanan administrasi umum dan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	100	100	5.212.333.599,00	100	5.214.833.599,00	100	5.216.896.099,00	100	5.220.214.849,00	100	5.223.108.912,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.15.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	100	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00	100	2.000.000,00		
2.15.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				5.210.333.599,00		5.212.833.599,00		5.214.896.099,00		5.218.214.849,00		5.221.108.912,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	5.210.333.599,00	12	5.212.833.599,00	12	5.214.896.099,00	12	5.218.214.849,00	12	5.221.108.912,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.15.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.037.986.660,00		1.037.986.660,00		1.037.986.660,00		1.037.986.660,00		1.037.986.660,00		
Terkelolanya pendataan Barang Milik Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		1.037.986.660,00	67	1.037.986.660,00	67	1.037.986.660,00	67	1.037.986.660,00	67	1.037.986.660,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	2		2		2		2		2			
2.15.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				91.715.200,00		91.715.200,00		91.715.200,00		91.715.200,00		91.715.200,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	2	91.715.200,00	2	91.715.200,00	2	91.715.200,00	2	91.715.200,00	2	91.715.200,00		
2.15.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				501.161.460,00		501.161.460,00		501.161.460,00		501.161.460,00		501.161.460,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	34	501.161.460,00	34	501.161.460,00	34	501.161.460,00	34	501.161.460,00	34	501.161.460,00		
2.15.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00		
2.15.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				45.110.000,00		45.110.000,00		45.110.000,00		45.110.000,00		45.110.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		45.110.000,00	67	45.110.000,00	67	45.110.000,00	67	45.110.000,00	67	45.110.000,00		
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	7.895.296.184,00	100	8.269.607.193,00	100	8.662.633.753,00	100	9.075.311.640,00	100	9.508.623.422,00		
2.15.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11.500.000,00		11.500.000,00		11.500.000,00		11.500.000,00		11.500.000,00		
Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	11.500.000,00	1	11.500.000,00	1	11.500.000,00	1	11.500.000,00	1	11.500.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	16	16		16		16		16		16			
2.15.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	16	16	3.500.000,00	16	3.500.000,00	16	3.500.000,00	16	3.500.000,00	16	3.500.000,00		
2.15.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
2.15.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00		
2.15.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.883.796.184,00		8.258.107.193,00		8.651.133.753,00		9.063.811.640,00		9.497.123.422,00		
Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	17	7.883.796.184,00	17	8.258.107.193,00	17	8.651.133.753,00	17	9.063.811.640,00	17	9.497.123.422,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	55	71		71		71		71		71			
2.15.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.486.220.184,00		7.860.531.193,00		8.253.557.753,00		8.666.235.640,00		9.099.547.422,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	55	71	7.486.220.184,00	71	7.860.531.193,00	71	8.253.557.753,00	71	8.666.235.640,00	71	9.099.547.422,00		
2.15.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				397.576.000,00		397.576.000,00		397.576.000,00		397.576.000,00		397.576.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	17	397.576.000,00	17	397.576.000,00	17	397.576.000,00	17	397.576.000,00	17	397.576.000,00		
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				16.145.100.010,00		16.357.933.410,00		15.627.433.410,00		16.759.400.010,00		15.644.433.410,00		
Berkurangnya titik kemacetan	Jumlah titik potensi kemacetan (Titik)	8	4	581.195.010,00	3	692.028.410,00	2	587.528.410,00	1	602.495.010,00	0	587.528.410,00	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan	
2.15.02.2.01 - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				214.800.400,00		200.633.800,00		208.633.800,00		223.600.400,00		208.633.800,00		
Teratasinya kemacetan di Kota Tarakan	Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	2	214.800.400,00	2	200.633.800,00	2	208.633.800,00	2	223.600.400,00	2	208.633.800,00		
2.15.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota				214.800.400,00		200.633.800,00		208.633.800,00		223.600.400,00		208.633.800,00		
Tersusun Rencana Aksi Keselamatan lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/kota	Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan	0	2	214.800.400,00	2	200.633.800,00	2	208.633.800,00	2	223.600.400,00	2	208.633.800,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)													
2.15.02.2.03 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				75.000.000,00		200.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	2	2	75.000.000,00	2	200.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00		
2.15.02.2.03.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)				75.000.000,00		200.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
2.15.02.2.04 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				168.174.610,00		168.174.610,00		180.674.610,00		180.674.610,00		180.674.610,00		
Terselenggarannya Koordinasi penertiban Parkir	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2	4	168.174.610,00	4	168.174.610,00	4	180.674.610,00	4	180.674.610,00	4	180.674.610,00		
2.15.02.2.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				168.174.610,00		168.174.610,00		180.674.610,00		180.674.610,00		180.674.610,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	2	4	168.174.610,00	4	168.174.610,00	4	180.674.610,00	4	180.674.610,00	4	180.674.610,00		
2.15.02.2.13 - Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				123.220.000,00		123.220.000,00		123.220.000,00		123.220.000,00		123.220.000,00		
Terselenggaranya Pelayanan Angkutan Umum atau Tersedianya angkutan umum yang berizin	Jumlah laporan pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	2	123.220.000,00	2	123.220.000,00	2	123.220.000,00	2	123.220.000,00	2	123.220.000,00		
2.15.02.2.13.0003 - Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota				123.220.000,00		123.220.000,00		123.220.000,00		123.220.000,00		123.220.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	2	123.220.000,00	2	123.220.000,00	2	123.220.000,00	2	123.220.000,00	2	123.220.000,00		
Meningkatnya Kendaraan yang Melaksanakan Wajib Uji	Persentase Kendaraan yang Melaksanakan Wajib Uji (%)	76,54	56,44	969.405.000,00	63,50	1.159.405.000,00	70,55	425.405.000,00	77,61	945.405.000,00	84,66	425.405.000,00		
2.15.02.2.05 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				969.405.000,00		1.159.405.000,00		425.405.000,00		945.405.000,00		425.405.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Wajib Uji di Kota Tarakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	0	22	969.405.000,00	17	1.159.405.000,00	17	425.405.000,00	17	945.405.000,00	17	425.405.000,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	0	7		3		1		3		1			
2.15.02.2.05.0001 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				750.000.000,00		950.000.000,00		200.000.000,00		720.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	0	7	750.000.000,00	3	950.000.000,00	1	200.000.000,00	3	720.000.000,00	1	200.000.000,00		
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	0	22	219.405.000,00	17	209.405.000,00	17	225.405.000,00	17	225.405.000,00	17	225.405.000,00		
Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana perlengkapan jalan	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota (Persentase)	21,17	26,34	14.594.500.000,00	27,86	14.506.500.000,00	29,36	14.614.500.000,00	30,88	15.211.500.000,00	32,39	14.631.500.000,00		
2.15.02.2.02 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				14.594.500.000,00		14.506.500.000,00		14.614.500.000,00		15.211.500.000,00		14.631.500.000,00		
Tersedianya prasarana perlengkapan jalan yang layak	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	232	1.035	13.169.500.000,00	846	13.206.500.000,00	836	13.189.500.000,00	846	13.786.500.000,00	846	13.206.500.000,00		
2.15.02.2.02.0002 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				13.169.500.000,00		13.206.500.000,00		13.189.500.000,00		13.786.500.000,00		13.206.500.000,00		
Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	232	1.035	13.169.500.000,00	846	13.206.500.000,00	836	13.189.500.000,00	846	13.786.500.000,00	846	13.206.500.000,00		
Tersedianya fasilitas pendukung sarana Jalan yang layak	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	0	119	1.425.000.000,00	119	1.300.000.000,00	119	1.425.000.000,00	119	1.425.000.000,00	119	1.425.000.000,00		
2.15.02.2.02.0004 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan				1.425.000.000,00		1.300.000.000,00		1.425.000.000,00		1.425.000.000,00		1.425.000.000,00		
Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	0	119	1.425.000.000,00	119	1.300.000.000,00	119	1.425.000.000,00	119	1.425.000.000,00	119	1.425.000.000,00		
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				3.400.000.000,00		2.666.000.000,00		2.696.500.000,00		2.727.000.000,00		4.957.500.000,00		
Meningkatnya pemenuhan sarpras pelabuhan yang memadai	Persentase sarana prasarana pelabuhan dengan kondisi memadai (%)	15,08	29,42	3.400.000.000,00	47,68	2.666.000.000,00	65,14	2.696.500.000,00	82,55	2.727.000.000,00	100,00	4.957.500.000,00	2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan	
2.15.03.2.11 - Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau				250.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya sarana prasarana pelabuhan yang memadai	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau (Dokumen)	0	1	250.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.15.03.2.11.0001 - Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau				250.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersusunnya rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan	0	1	250.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau (Dokumen)													
2.15.03.2.13 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau				3.150.000.000,00		2.666.000.000,00		2.696.500.000,00		2.727.000.000,00		4.957.500.000,00		
Tersedianya sarana prasarana pelabuhan yang memadai	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia (Unit)	77	20	3.150.000.000,00	21	2.666.000.000,00	21	2.696.500.000,00	21	2.727.000.000,00	22	4.957.500.000,00		
Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia (Unit)	77	20	3.150.000.000,00	21	2.666.000.000,00	21	2.696.500.000,00	21	2.727.000.000,00	22	4.957.500.000,00		

Sumber : Hasil Analisis DISHUB, 2025

Tabel 4. 3
Sub Kegiatan Prioritas Renstra DISHUB Kota Tarakan Tahun 2025-2029

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	2.11.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
		Meningkatnya layanan kesekretariatan	2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			2.15.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1. Berkurangnya titik kemacetan	2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.01.0005 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
			2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
			2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	
			2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.13 Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.13.0003 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	
		2. Meningkatnya Kendaraan yang Melaksanakan Wajib Uji	2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
			2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
		3. Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana perlengkapan jalan	2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	
			2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	
3	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana pelabuhan yang memadai	2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	
			2.15.03.2.13.0011 Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan penyeberangan	

Sumber : Hasil Analisis DISHUB, 2025

Rencana program prioritas urusan perhubungan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja individu ASN Kota Tarakan dengan memperkuat internal akuntabilitas kinerja dan meningkatkan kualitas layanan kesekretariatan DISHUB Kota Tarakan, melalui kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian perangkat daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Melalui program ini ditargetkan untuk nilai atau predikat SAKIP DISHUB bisa meningkatkan predikat B menjadi BB di Tahun 2029 dengan nilai yang diharapkan terus meningkat tiap tahunnya. Predikat SAKIP DISHUB ini menggambarkan hasil dan dampak nyata dari kegiatan yang dilakukan oleh DISHUB terhadap masyarakat.

Agar supaya kegiatan yang dilakukan oleh DISHUB dapat dilihat hasil dan dampak nyatanya oleh masyarakat, maka program ini juga merupakan nomenklatur program dari salah satu program unggulan Wali Kota, yaitu program nomor 9 program perbaikan kesejahteraan ASN, Tenaga Honor, Pensiunan, Kader Dasa Wisma dan Posyandu, melalui Jaminan kelancaran pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) dan uang lauk pauk (ULP) untuk ASN serta untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja (P3K) lingkup Pemerintah Kota Tarakan sesuai kemampuan daerah.

b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dengan mengurangi titik kemacetan, meningkatkan kendaraan yang melaksanakan wajib uji dan meningkatkan pemenuhan sarana prasarana perlengkapan jalan. Kegiatan yang dilakukan untuk menjawab maksud dari program ini adalah mengatasi kemacetan di Kota Tarakan, menyediakan prasarana perlengkapan jalan yang layak, menyediakan fasilitas pendukung sarana jalan yang layak, melaksanakan pengelolaan terminal penumpang kewenangan Kota Tarakan, menyelenggarakan koordinasi penertiban Parkir, melaksanakan wajib uji di Kota Tarakan, dan menyelenggarakan pelayanan angkutan umum atau menyediakan angkutan umum yang berizin.

Dari hasil analisis dengan OPD terkait diketahui bahwa terdapat 8 titik potensi kemacetan yang ada di Kota Tarakan dan diharapkan bisa diselesaikan di akhir tahun perencanaan. Sementara itu untuk kendaraan wajib uji diharapkan bisa mencapai 6000 unit di akhir tahun perencanaan dengan estimasi tiap tahunnya terdapat 500 unit yang melakukan wajib uji. Dan untuk pemenuhan sarana prasarana perlengkapan jalan diharapkan dapat dipenuhi sebesar 32,39% di akhir tahun perencanaan.

c. Program Pengelolaan Pelayaran

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dengan meningkatkan pemenuhan sarana prasarana pelabuhan yang memadai, melalui kegiatan pemenuhan fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan serta penyusunan dan penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau.

Dengan melaksanakan 2 kegiatan di atas diharapkan indeks atau survei kepuasan masyarakat terhadap Pelabuhan Juata Tarakan bisa mencapai nilai 81,04 di akhir tahun, dengan target penambahan angka kepuasan sebesar 0,03 tiap tahunnya

4.2. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci

Tabel 4. 4
Indikator Kinerja Utama Renstra DISHUB Kota Tarakan Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Rasio konektivitas kabupaten/ kota	Rasio	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59
2	V/C Ratio	Nilai	0.37	0.41	0.46	0.51	0.57	0.64	0.71
3	IKM Pelabuhan Juata Tarakan	Nilai	80.82	80.89	80.92	80.95	80.98	81.01	81.04
4	Nilai SAKIP	Nilai	68.21	68.43	68.93	69.43	69.93	70.43	70.93

Sumber : Hasil Analisis DISHUB, 2025

Tabel 4. 5
Indikator Kinerja Kunci Renstra DISHUB Kota Tarakan Tahun 2025-2029

NO	IKK	RUMUS		SATUAN	Baseline	TAHUN					
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)		(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Konektivitas Kabupaten/ Kota	$KT_{Daerah} = (KTD \times WTD) + (KTL \times WTL)$ KTD = Konektivitas Transportasi Darat WTD = Bobot Konektivitas Transportasi Darat (Ditentukan Daerah, dengan satuan %) KTL = Konektivitas Transportasi Laut WTL = Bobot Konektivitas Transportasi Laut (Ditentukan Daerah, dengan satuan %) Jumlah WTD + WTL = 100%		Rasio	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59
2	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/ Kota	$\frac{\text{Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang}}{\text{Jumlah kebutuhan perlengkapan jalan}}$	$\times 100\%$	%	21.17%	24.49 %	26.34 %	27.86 %	29.36 %	30.88 %	32.39 %
3	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	$\frac{\text{Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan}}{\text{Jumlah perusahaan angkutan umum}}$	$\times 100\%$	%	25.00%	25.00 %	25.00 %	25.00 %	25.00 %	40.00 %	40.00 %

Sumber : Hasil Analisis DISHUB, 2025

BAB V PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tarakan Tahun 2025 – 2029 yang memuat tujuan, sasaran dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Tarakan 5 (lima) tahun yang mengacu pada RPJMD Kota Tarakan 5 tahun 2025 – 2029 akan digunakan sebagai acuan atau panduan bagi seluruh unsur organisasi pada Dinas Perhubungan Kota Tarakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Seluruh rangkaian aktivitas yang tertuang dalam Renstra ini merupakan upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat tujuan pencapaian Visi Kota Tarakan. Dengan telah disepakatinya Renstra ini, maka untuk menjamin keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu segera melaksanakan konsolidasi ke dalam sehingga timbul persepsi yang sama dalam mengaktualisasikan pada bidang tugas masing-masing.

Rencana strategis ini diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi atau kemungkinan yang akan muncul dikemudian hari, oleh karenanya komitmen semua jajaran harus dijunjung tinggi agar tujuan akhir dalam rangka mendukung masyarakat Kota Tarakan yang lebih sejahtera, maju dan berdaya saing segera terwujud.

15. Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, penyusunan Renstra ini memiliki nilai strategis dalam mendukung transformasi digital pemerintahan dan penguatan tata kelola data daerah.

Revolusi digital dan transformasi teknologi yang terjadi secara global telah mengubah tatanan kehidupan masyarakat secara fundamental. Penerapan digitalisasi dalam berbagai sektor publik menjadi keniscayaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks ini, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian memiliki peran sentral sebagai leading sector dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Kota Tarakan.

Pada dasarnya bahwa penyusunan dokumen Renstra OPD yang jenjang perencanaannya selama 5 tahun merupakan suatu kewajiban Kepala OPD selaku pengguna anggaran dan penentu kebijakan organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025 – 2029 untuk periode 5 tahun kedepan merupakan perencanaan jangka menengah, karena memuat tentang penjabaran tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang akan dilaksanakan dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu masa lima tahun. Di dalam penyusunannya, Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berpedoman pada RPJMD Kota Tarakan dan Propinsi. Namun demikian substansinya tetap berdasarkan dan memperhatikan kekuatan organisasi antara lain sumber daya dan potensi yang dimiliki, juga faktor-faktor keberhasilan sebelumnya yang didasarkan atas evaluasi pembangunan dan isu-isu strategis yang mengemuka dan berkembang.

Muatan dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025-2029 berisi kebijakan keuangan organisasi, kebijakan umum, dan program pembangunan daerah yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Pengertian indikatif menunjukkan bahwa informasi yang ingin dicapai tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampaknya tercantum didalam Renstra ini dan sifatnya fleksibel.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 yang didalamnya telah mengacu pada

dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMN serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2025-2026 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti tertera dibawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037;
26. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2045;
27. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2021-2041;
28. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2025 2029;
29. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
30. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan;
31. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 95 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Tarakan *Command Center* pada Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2025–2029 adalah untuk:

1. Menjamin keselarasan antara tujuan, sasaran dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029 ke dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrument pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pada urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
3. Memberikan arah dan pedoman bagi Aparatur Sipil Negara Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan Program Prioritas sehingga tujuan program dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

b. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2025 -2029 adalah :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
2. Sebagai kerangka acuan dalam menyusun rencana kerja (Renja) Tahunan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
3. Sebagai Dasar Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi serta Penilaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam menjalankan dan melaksanakan kegiatan sesuai tupoksinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2025-2029, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1. Latar Belakang 2. Dasar Hukum Penyusunan 3. Maksud dan Tujuan 4. Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah b. Sumber Daya Perangkat Daerah c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah d. Kelompok Sasaran Layanan e. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan Perangkat Daerah 2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah b. Isu Strategis
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	1. Tujuan dan Sasaran Renstra DKISP Kota Tarakan Tahun 2025-2029 2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra DKISP Kota Tarakan Tahun 2025-2029
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	1. Uraian Program 2. Uraian Kegiatan 3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator dan Pagu Indikatif 4. Target keberhasilan pencapaian tujuan Renstra DKISP Tahun 2025-2029 melalui IKU dan Targetkinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2029-2030 melalui IKK
BAB V	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

1) Tugas

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan wewenang daerah yang meliputi perencanaan, pengembangan dan pengelolaan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

2) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan menyelenggarakan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

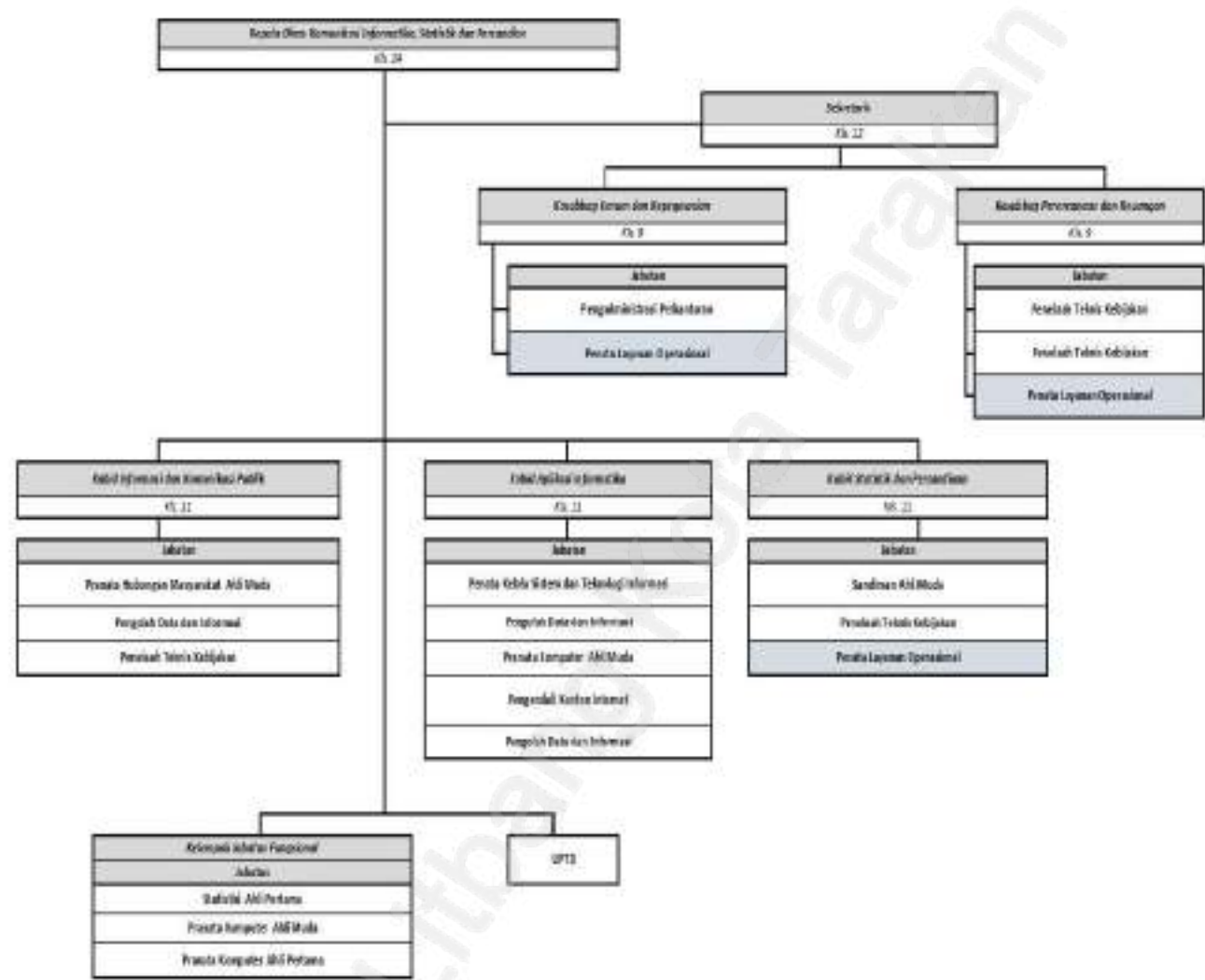
Tugas pokok dan fungsi tersebut mengacu pada ketentuan hukum yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam ketentuan hukum dimaksud, dan dalam hal klasifikasi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah merupakan urusan wajib, yang dapat diartikan bahwa urusan tersebut wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, namun wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar atau pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

3) Struktur Perangkat Daerah

Struktur atau susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terdiri atas seorang Kepala Dinas (Eselon IIb), seorang Sekretaris Dinas (Eselon IIIa), 3 (tiga) orang Kepala Bidang (Eselon IIIb), 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian (Eselon IVa), dan 6 (enam) Sub Koordinator (Eselon IVa), 1 (satu) Kepala UPT TCC (Eselon IVa) dan 1 (satu) Kasubbag TU TCC (Eselon IVb). Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Struktur organisasi tersebut secara rinci lengkap disajikan sebagai berikut :

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian



4) Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Uraian tugas dan fungsi pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai berikut :

a) Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkondisikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian .

Kepala dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya ;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya ;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b) Sekretariat

1. Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.
Sekretariat dalam melaksanakan tugas diatas juga menyelenggarakan fungsi :
 1. koordinasi kegiatan Dinas;
 2. koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran Dinas;
 3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dokumentasi Dinas;
 4. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas;
 5. koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada Dinas;
 6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Dinas;
 7. pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
 8. penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Dinas; dan
 9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

c) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

1. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas diatas juga menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;
2. monitoring opini dan aspirasi publik;
3. monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
4. pengelolaan media komunikasi publik;
5. pelayanan informasi publik;
6. koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi;
7. koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik;
8. layanan hubungan media;
9. pengelolaan pusat data Pemerintahan Daerah;
10. kemitraan dengan pemangku kepentingan;
11. manajemen komunikasi krisis;
12. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;

13. penguatan tata kelola komisi informasi di Daerah;
14. penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas; dan
15. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d) Bidang Aplikasi Informatika

1. Bidang Aplikasi Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang aplikasi informatika yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Bidang Aplikasi Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang.

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang aplikasi Informatika di lingkup Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas juga menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang aplikasi informatika
2. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah;
3. Pengembangan dan pengelolaan ekosistem *smart city*;
4. Pengelolaan *E-Government* dilingkup Pemerintah Daerah;
5. Pengembangan ekosistem Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE)
6. Penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepada bidang Aplikasi Informatika

e) Bidang Statistik dan Persandian

1. Bidang Statistik dan Persandian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang statistik dan urusan pemerintahan di bidang persandian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
2. Bidang Statistik dan Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang
Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan perencanaan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup daerah, data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengelolaan dan pengamanan informasi berbasis elektronik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi :

1. Perencanaan perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup Daerah, data informasi pemerintahan dan Pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengelolaan dan pengamanan informasi berbasis elektronik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup Daerah, data informasi pemerintahan dan Pembangunan daerah,

penyelenggaraan persandian untuk pengelolaan dan pengamanan informasi berbasis elektronik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

3. Pelaksanaan kebijakan bidang penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup daerah, data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengelolaan dan pengamanan informasi berbasis elektronik yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
4. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup Daerah, data informasi pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengelolaan dan pengamanan informasi berbasis elektronik yang menjadi kewenangan Pemerintah daerah;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan dan pengelolaan statistik sektoral di lingkup daerah, data informasi berbasis elektronik yang menjadi kewenangan pemerintahan dan pembangunan daerah, penyelenggaraan persandian untuk pengelolaan dan pengamanan informasi Pemerintah Daerah;
6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f) *UPT Tarakan Command Center (TCC)*

Dasar pembentukan *UPT Tarakan Command Center* berdasarkan Perwali Nomor 95 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas *Tarakan Command Center* pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian .

1. *UPT Tarakan Command Center* merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional yang menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan.
2. *UPT Tarakan Command Center* dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas .

UPT Tarakan Command Center mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan yang berkaitan dengan pelayanan informasi dan komunikasi publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan.

Dalam melaksanakan tugas *UPT Tarakan Command Center* juga menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan kebijakan UPT dalam pengelolaan informasi dan komunikasi
2. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan informasi dan komunikasi publik
3. Pelaksanaan layanan *call center 112*
4. Pelaksanaan kebijakan koordinasi dan integrasi layanan *call center 112*
5. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan monitoring pelaksanaan kegiatan UPT
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya
8. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris

a. Sumber Daya Perangkat Daerah

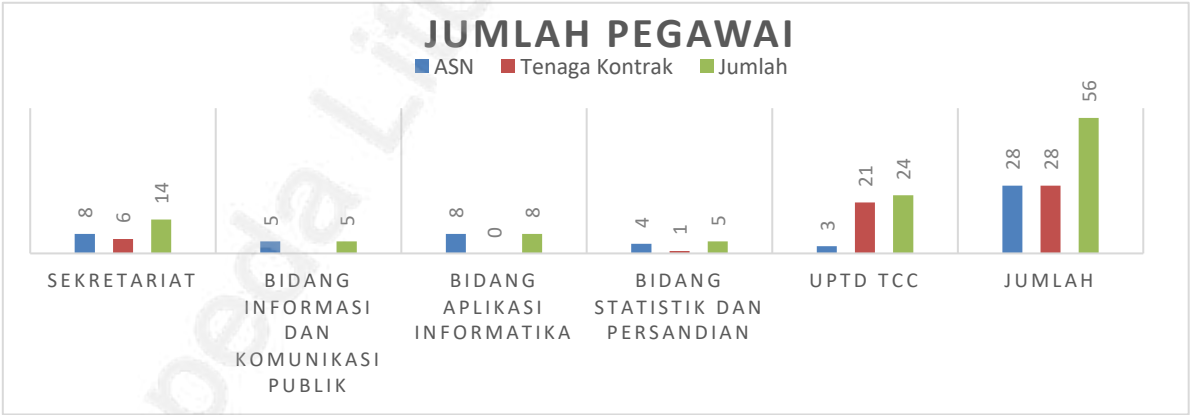
Pelaksanaan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efesien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkan berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan. Sumber daya aparatur yang ada sampai saat ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai

Sekretariat / Bidang	Jumlah PNS	Tenaga Kontrak	Jumlah
a. Sekretariat	8	6	14
b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	5	-	5
c. Bidang Aplikasi Informatika	8	-	8
d. Bidang Statistik dan Persandian	4	1	5
e. UPT TCC	3	21	24
Jumlah	28	28	56

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan

Gambar 2.2 Grafik Jumlah Pegawai



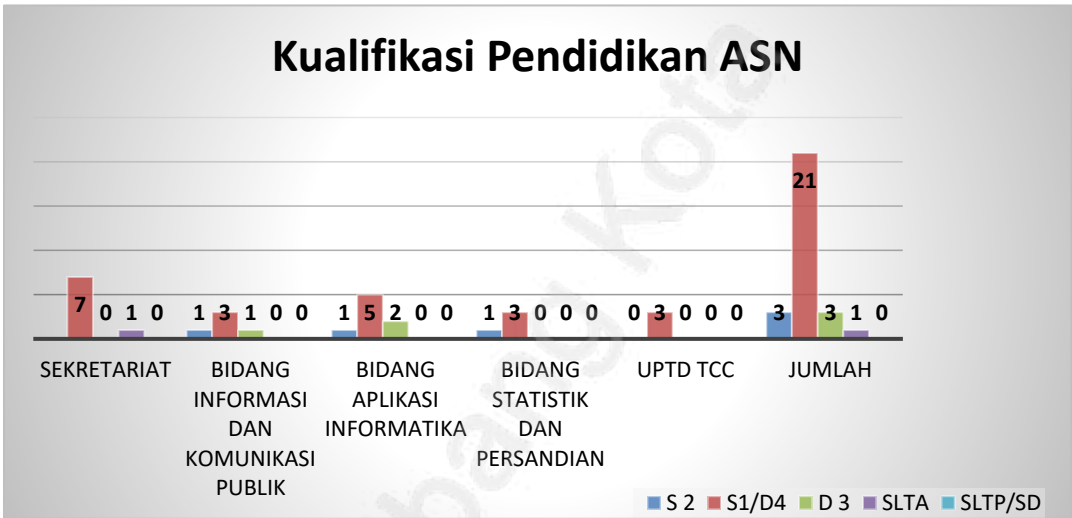
Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan

Tabel 2.2 Jumlah ASN dan Tenaga Kontrak

Sekretariat / Bidang	S 2		S1/D4		D 3		SLTA		SLTP/SD		Jumlah
	ASN	PTT	ASN	PTT	ASN	PTT	ASN	PTT	ASN	PTT	
a. Sekretariat	-	-	7	2	-	-	1	3	-	1	14
b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	5
c. Bidang Aplikasi Informatika	1	-	5	-	2	-	-	-	-	-	8
d. Bidang Statistik dan Persandian	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	5
e. UPTD TCC	-	-	3	3	-	-	-	18	-	-	24
Jumlah	3	-	21	6	3	-	1	21	-	1	56

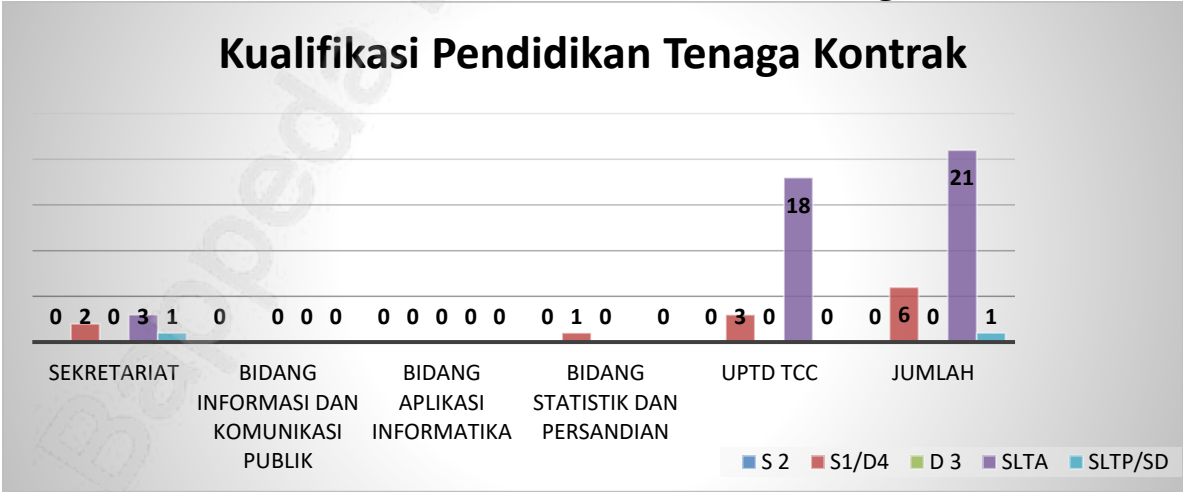
Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan

Gambar 2.3 Grafik kualifikasi Pendidikan ASN



Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan

Gambar 2.4 Grafik kualifikasi Pendidikan Tenaga Kontrak



Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan

Tabel 2.3 Daftar Inventaris Barang
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
Kota Tarakan Tahun 2024

No	Spesifikasi Barang		Tahun Perolehan	Jumlah		
	Nama/Jenis Barang	Merk/Type/Keterangan		Satuan	Kondisi	Jumlah
A. Gedung dan Bangunan						
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Bertingkat, beton	2012	Buah	B	1
2.	Tugu Peringatan Lainnya	Besi	2012	Buah	B	-
3.	Tugu Peringatan Lainnya	Besi	2012	Buah	B	3
B. Jalan, Irigasi dan Jaringan						
1.	Instalasi PLTG Kapasitas Kecil		2012		B	
2.	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Sedang		2012		B	
3.	Instalasi Jaringan Televisi		2022		B	
C. Peralatan dan Mesin						
I. Alat transportasi						
1.	Mobil	Toyota	2010-2015	Unit	B	5
2.	Motor	Yamaha, Honda	2011-2013	Unit	B	13
3.	Mobil Ambulance		1990-2019	Unit	B	7
4.	Mobil Jenazah		2007-2013	Unit	B	3
5.	Mobil Ambulance	Wuling/Formo 1.2 BV (4x2) M/T	2021	Unit	B	1
6.	Mobil Jenazah	Suzuki/ Ambulance	2022	Unit	B	1
II. Alat ukur						
1.	GPS Portable	Garmin Oregon 550	2014	Buah	B	1
III. Alat Kantor Dan Rumah Tangga						
A. Alat kantor						
1.	Rak Server	Rack	2012	Buah	B	3
2.	Filing Kabinet 4 Laci	Takashimura	2004	Buah	B	2
3.	Lemari Besi /Metal	-	2012	Buah	B	2
4.	Papan Pengumuman	-	2012	Buah	B	1
5.	Rak Kayu	-	2013	Buah	B	2
6.	Loker TCC	-	2020	Buah	B	4
7.	Alat Pemadam Kebakaran	Autofex	2023	Tabung	B	4
B. Alat kantor lainnya						
1.	LCD Proyektor	Benq	2012	Unit	B	1
2.	LCD Proyektor	Epson	2014	Unit	B	1
C. Alat rumah tangga lainnya						
1.	Wireless	-	2012	Buah	B	1
2.	Kamera DSLR	CANON	2013	Unit	B	1
3.	Handycam	Sony HDR-PJ34OE	2015	Unit	B	4
4.	Lensa Kamera DSLR	CANON Coolpix L320	2015	Unit	B	2
5.	Kamera Udara	DJI Mavic / Mini Combo	2020	Unit	B	1
6.	Pengering Tangan	Hoffmann	2012	Unit	B	5
7.	Gorden	-	2012	Buah	B	
8.	Penyemprot Tangan	-	2021	Buah	B	2
9.	Televisi	65"	2023	Unit	B	1
10.	Tangga	-	2023	Buah	B	1
11.	Standing Braket	-	2023	Buah	B	1
IV. Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat						
1.	Meja Kerja untuk Staf (Setengah Biro)	-	2012	Buah	B	47
2.	Kursi Kerja Non Eselon/Staf	Front Line	2012	Buah	B	47
3.	Meja Kerja Eselon	Meja Satu Biro	2012	Buah	B	6

No	Spesifikasi Barang		Tahun Perolehan	Jumlah		
	Nama/Jenis Barang	Merk/Type/Keterangan		Satuan	Kondisi	Jumlah
4.	Kursi Kerja Eselon	Front Line	2012	Buah	B	6
5.	Meja Kerja Eselon II		2013	Buah	B	1
6.	Kursi		2013	Buah	B	1
7.	Meja Rapat		2013	Buah	B	1
8.	Kursi Rapat		2013	Buah	B	12
9.	Kursi Lipat Rapat		2013	Buah	B	30
V. Alat pendingin						
1.	Air Conditioner 1PK		2013-2020	Unit	B	26
2.	Air Conditioner	Precession AC	2013	Unit	B	1
VI. Personal computer & peralatan personal computer						
1.	PC	Dell, Lenovo, Asus	2012-2023	Buah	B	25
2.	Laptop	Fujitsu, Toshiba,Asus	2012 - 2022	Unit	B	8
3.	Server	Dell / Power Edge R740	2019	Buah	B	1
4.	Server	Lenovo / ST-250	2020	Buah	B	1
5.	Peralatan Komputer lainnya	Logitech / M170	2020	Buah	B	1
6.	peralatan mainframe lainnya	Frame Display (Command Center)	2020	Buah	B	1
7.	peralatan mainframe lainnya	Splicer Fiber Optic	2020	Buah	B	1
8.	peralatan mainframe lainnya	Hikvision / Exir H.265	2020	Buah	B	1
9.	peralatan mainframe lainnya	TP Link	2020	Buah	B	1
10.	Server HDD 300 GB,SAS,HotSwap 2,5"		2015		B	1
11.	Server Memory 8GB ECC DDR3	PC3012800 CL11	2015		B	6
12.	Line Interactive, UPS 2200VA / 1920W, PF 0.87, Single Pase 230V, 2U Rackmount, RS-232 serial port, USB, UPS Management Software		2015		B	1
13.	Router Board Wireless Router		2015		B	1
14.	Komputer	ASUS Business	2016		B	1
15.	Printer Scanner	Epson DR-C240	2011 2020	Unit Unit	B B	5 4
16.	Webcam Video Conference	Tenveo, Webam Pro Stream	2023	Unit	B	3
17.						
18.	Laptop	Acer/Core-i5,14", apple	2023,2024	Unit	B	5
19.	Server	HikVision	2022	Unit	B	1
20.	CCTV	-	2023	Unit	B	2
21.	P.C Unit	Lenovo PC	2023	Unit	B	1
22.	Printer	Epson/ L121	2023	Unit	B	1
23.	Head Sat	Logitech/H150	2023	Unit	B	6
VII. Peralatan computer mainframe						
1.	Mikrotik Mikrobits Dinara		2016	Unit	B	1
2.	Mikrotik Console Cable Dinara		2016	Unit	B	1
3.	RouterBoard Cloud Router Switttch		2016	Unit	B	1
4.	Lenovo 69Y5326		2016	Unit	B	1
5.	IBM Server Memory (90Y3109)		2016	Unit	B	18

No	Spesifikasi Barang		Tahun Perolehan	Jumlah		
	Nama/Jenis Barang	Merk/Type/Keterangan		Satuan	Kondisi	Jumlah
6.	Lenovo Storage S2200 (6TB SAS)		2016	Unit	B	1
7.	APC SMT2200RMI2U		2016	Unit	B	2
8.	Apple iMAC With Retina Display AIO		2016	Unit	B	2
9.	APC SMC15000I		2016	Unit	B	3
10.	RouterBoard Cloud Core Router		2016	Unit	B	1
11.	Lenovo Server HDD 1.2TB SATA 2.5 Inch		2016	Unit	B	1
12.	Lenovo Server HDD 1.2TB SATA 2.5 Inch		2016	Unit	B	1
13.	Lenovo Server Power Supply (94Y6668)		2016	Unit	B	1
14.	Fluke True RMS Multimeter		2016	Unit	B	1
15.	Fluke Clam Meter (317)		2016	Unit	B	1
16.	Memory SDXC		2016	Unit	B	1
17.	UPS	500va	2023	Unit	B	1
VIII. Peralatan jaringan						
1.	Hot Spot Publik (Jaringan Hot Spot)	-	2011	Paket		1
2.	Tool Box Set	-	2007	Buah	B	1
3.	Crimping tool	-	2007	Buah	B	1
IX. Alat studio dan alat komunikasi						
A. Peralatan studio visual						
1.	Stabilizer 3000VA	DJI Osmo/Mobile 4 Combo	2015,2020	Buah	B	1
2.	Handy Talky(HT)	Inrico/T298s	2020	Buah	B	6
3.	Power Mixer	Soundbest J5-4D	2020	Buah	B	1
B. Peralatan studio video & film						
1.	Lensa Kamera	Canon 18-20mm	2014		B	1
2.	Lensa Kamera		2015		B	1
3.	Lensa camera	Nikon Tele	2016	Unit	B	1
4.	Dry Kabinet Ukuran Besar		2016	Unit	B	1
5.	Amplifier	TOA	2020	Unit	B	1
6.	Microphone	TOA,Rode PSI,Boya/BY-VM600	2020	Unit	B	5
7.	Kamera Digital	EOS/900D,Miroles/XAS	2020	Unit	B	4
8.	Tripod Kamera	Excell Travel Pro	2020	Buah	B	3
D. ASET LAINNYA						
1.	Sistem Elektronik (Website) Resmi	Software	2017	Paket	B	2
2.	Aplikasi Pengaduan Masyarakat/PPID	Software	2017	Paket	B	1
3.	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Masyarakat	Software	2017	Paket	B	1
4.	Aplikasi Layanan Publik berbasis Web (Disdukcapil)	Software	2019	Paket	B	1
5.	Aplikasi Layanan Publik berbasis Web (Kecamatan)	Software	2019	Paket	B	1
6.	Aplikasi Layanan Publik berbasis Web (Dinas Pendidikan)	Software	2020	Paket	B	1
7.	Aplikasi Layanan Publik berbasis Web (Perpustakaan dan Kearsipan)	Software	2020	Paket	B	1
8.	Aplikasi Layanan Publik berbasis Web (DPMPSTP)	Software	2020	Paket	B	1
9.	Aplikasi Layanan Publik berbasis Web (BKPSDM)	Software	2020	Paket	B	1

b. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Era keterbukaan yang lebih mengedepankan aspek efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas adalah prinsip tata pemerintahan yang baik atau Good Government merupakan isu pokok yang menjadi pusat perhatian semua institusi untuk berupaya menjadikannya sebagai sasaran capaian dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Ketatnya persaingan global menuntut setiap institusi untuk dapat menerapkan prinsip Good Government sebagai prasyarat agar tetap mampu berkiprah sejajar dengan kompetitor yang tidak hanya dalam lingkup lokal, tetapi sampai dalam lingkup global.

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah memberikan bukti mampu menciptakan media yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dalam mentransformasikan informasi dari dan ke berbagai penjuru dunia dan sebagai salah satu solusi dalam mewujudkan good governance. Namun di sisi lain kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya paham akan perlunya teknologi informasi dan komunikasi juga perlu memperoleh perhatian agar pada saatnya mereka tidak menjadi kelompok terpinggirkan hanya karena ketidaksiapan dalam memahami peran TIK dalam kehidupannya.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan melakukan upaya untuk memfasilitasi terwujudnya good government melalui electronic government (e-government), pengurangan terjadinya kesenjangan informasi, penyebarluasan informasi dan pemberdayaan kepada masyarakat di bidang TIK, serta melaksanakan tugas di bidang Statistik dan Persandian. Sebagai pengukuran kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian selama lima tahun sebelumnya, tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Renstra DKISP Tahun 2020-2024 dapat dianalisis sebagai berikut :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
DKISP Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase OPD yang terlayani infrastruktur jaringan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase kontribusi provider telekomunikasi				100%	10 %	100%	100%	0	102,3%	100,8%	99,2%	71,32%	0	102,3%	100,8%	99,2%	71,32%	0
3.	Persentase media layanan informasi publik				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase OPD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral				65%	70%	80%	90 %	100%	81,3%	90%	93,3%	96,7%	100%	125%	128,6%	116,6%	107,4%	100%
5.	Persentase aplikasi layanan publik/tata kelola pemerintah yang terintegrasi				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	133,33%	100%	100%	100%	100%	133,33%
6.	Nilai dan predikat SAKIP				60/B	60/B	70/B	70/B	79,55/BB	63,80/B	50,48/C C	65,41/B	71,03/BB	79,55/B B	106,33%	84,13%	93,44%	101,47%	100%

Catatan : Tahun 2024 Retribusi Menara telekomunikasi sudah tidak lagi dilaksanakan pemungutan karena adanya perubahan peraturan sehingga indikator persentase kontribusi provider telekomunikasi tidak ada target dan realisasinya

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke- (%)					Rata-rata pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(12)	(13)	(14)	(15)		(17)	(18)
Belanja Tidak Langsung/ Belanja Pegawai	3.661.032.105	4.136.164.687	3.958.076.000	3.961.926.000	4.118.535.561	3.573.055.666	3.619.214.686	3.815.417.041	3.831.338.157	3.947.521.336	97,60	87,50	96,40	96,70	95,85	2,99	2,52
Belanja Langsung	3.349.068.970	2.300.450.400	2.542.808.800	3.019.461.107	3.642.379.808	2.785.803.464	1.884.838.287	2.295.751.112	2.874.266.658	3.421.250.614	83,18	81,93	90,28	95,19	93,93	2,12	5,27
Toatal Anggaran	7.010.101.075	6.436.615.087	6.500.884.800	6.981.387.107	7.760.915.369	6.358.859.130	5.504.052.973	6.111.168.153	6.705.604.815	7.368.771.950	90,72	85,51	94,01	96,05	94,95	2,58	3,75

Dari Tabel 2.4 dan 2.5 berisi capaian kinerja pelayanan dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2020 – 2025, indikator kinerja pelayanan secara lengkap dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Persentase OPD yang terlayani infrastruktur jaringan.

Seluruh Perangkat Daerah sudah terhubung dengan akses internet server atau bandwidth server yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan, namun permasalahannya sampai saat ini yang mampu disediakan hanya sebatas bandwidth server sementara bandwidth internet teralokasi anggarannya di masing-masing Perangkat Daerah.

Sebagai tambahan informasi sampai dengan tahun 2024 telah terpasang jaringan Fiber Optik yang dikelola oleh Perumda Telekomunikasi dimana dari 30 Perangkat daerah telah tersambung sebanyak 21 perangkat daerah sehingga masih ada 9 Perangkat Daerah yang belum saling terkoneksi di jaringan Intra Pemerintah karena belum tersambung jaringan Fiber Optik. Pemasangan Fiber Optik ke seluruh Kota Tarakan menjadi salah satu prioritas pembangunan Kota Tarakan. Jaringan Fiber Optik sangat diperlukan guna mendapatkan manfaat seperti penggunaan bandwidth yang lebih besar, kecepatan internet yang lebih tinggi, jarak lebih jauh, gangguan yang lebih sedikit serta biaya total kepemilikan yang lebih rendah. Pemasangan Jaringan Fiber Optik mendukung Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tarakan guna menunjang nilai domain tata keola SPBE.

Berikut Perangkat Daerah yang sudah terpasang jaringan fiber optik:

1. Sekretariat Daerah
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
3. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Sekretariat Dewan
6. Dinas Pendidikan
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
8. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10. Dinas Ketahanan Pangan
11. Dinas Perikanan
12. Dinas Lingkungan Hidup
13. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
14. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
15. Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
18. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
19. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
20. Kecamatan Tarakan Barat
21. Kecamatan Tarakan Tengah

Perangkat Daerah yang belum terpasang jaringan fiber optic sebagai berikut:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Inspektorat
3. Dinas Kesehatan

- 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- 5. Dinas Perhubungan
- 6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 7. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
- 8. Kecamatan Tarakan Timur
- 9. Kecamatan Tarakan Utara

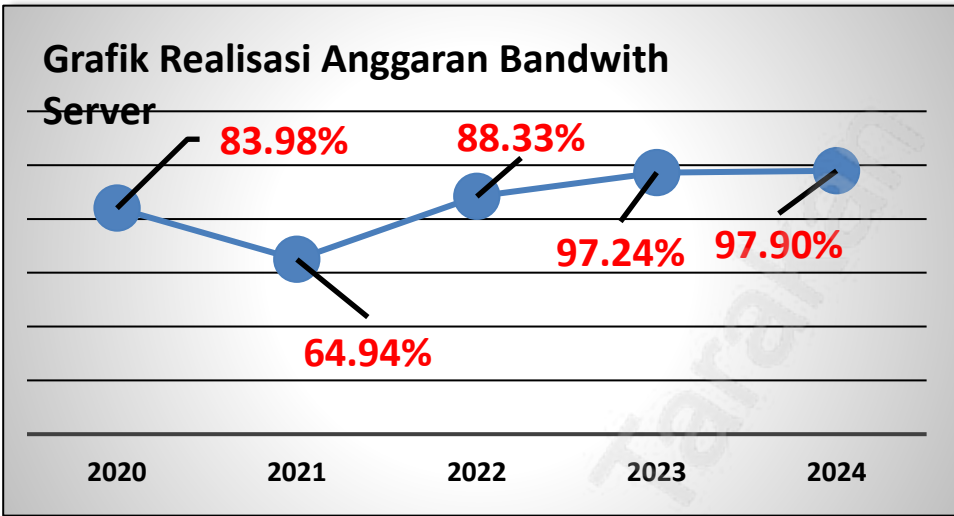
Berikut tabel perbandingan Target dan Realisasi OPD yang Terkoneksi *Bandwith Server* untuk 5 tahun terakhir (2020-2024) :

Tabel 2.6
Target dan Realisasi OPD yang terkoneksi Bandwidth Server
Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Target Jumlah OPD	Realisasi	Persentase	Kategori/Keterangan
1.	2020	32 OPD	32 OPD	100 %	Kapasitas bandwith sebesar 15 Mbps untuk layanan publik Call Center 112, Fleet Management System dan aplikasi pengaduan e-Quue
2.	2021	30 OPD	30 OPD	100 %	Kapasitas bandwith sebesar 15 Mbps untuk penyediaan bandwith server NOC yang dapat diakses oleh seluruh OPD dan Call Center 112
3.	2022	30 OPD	30 OPD	100 %	Kapasitas bandwith sebesar 15 Mbps untuk penyediaan bandwith server NOC yang dapat diakses oleh seluruh OPD dan Call Center 112
4.	2023	30 OPD	30 OPD	100 %	Kapasitas bandwith sebesar 18 Mbps untuk penyediaan bandwith server NOC yang dapat diakses oleh seluruh OPD dan Call Center 112
5.	2024	30 OPD	30 OPD	100 %	Kapasitas bandwith sebesar 18 Mbps untuk penyediaan bandwith server NOC yang dapat diakses oleh seluruh OPD dan Call Center 112

Sumber data : Laporan Konsolidasi Pembangunan Tahun 2020 – 2024

Gambar 2.5
Grafik Realisasi Anggaran Bandwidth Server
Tahun 2020-2024



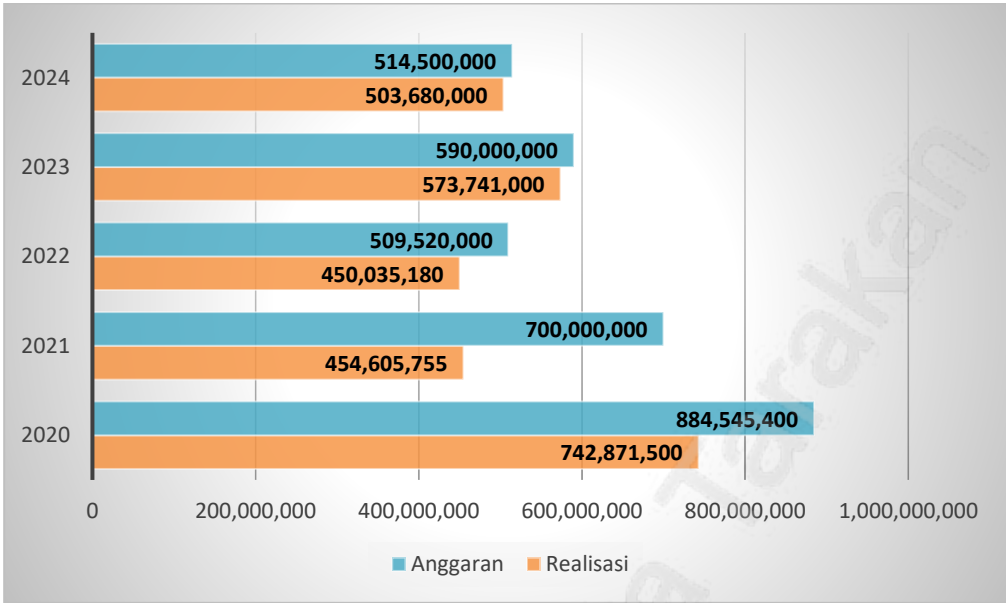
Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Bandwith untuk 5 tahun terakhir (2020-2024) disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.7
Target dan Realisasi Anggaran Bandwidth
Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	2020	884.545.400	742.871.500	83,98
2.	2021	700.000.000	454.605.755	64,94
3.	2022	509.520.000	450.035.180	88,33
4.	2023	590.000.000	573.741.000	97,24
5.	2024	514.500.000	503.680.000	97,90

Sumber data : Laporan Konsolidasi Pembangunan Tahun 2020- 2024

Gambar 2.6
Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Bandwidth
Tahun 2020-2024



- Persentase media layanan informasi publik
Capaian kinerja persentase media layanan informasi publik selalu mencapai target karena semua informasi publik pemerintah Kota Tarakan diseminasikan melalui 5 jenis media layanan informasi publik yaitu media massa (surat kabar, majalah, tabloid), media elektronik (televisi, Radio), media luar ruang (spanduk,baliho dan videotron), Media online (website, youtube, instagram, facebook), media interpersonal (studio podcast dan zoom meeting). Berikut tabel perbandingan Target dan Realisasi Media Layanan Informasi Publik 5 tahun terakhir (2020-2024) :

Tabel 2.8
Target dan Realisasi Media Layanan Informasi Publik Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)	Keterangan
1.	2020	5 jenis media	5 jenis media	100,00 %	1. Media Massa 2. Media Elektronik 3. Media luar ruang 4. Media interpersonal 5. Media baru
2.	2021	5 jenis media	5 jenis media	100,00 %	1. Media Massa 2. Media Elektronik 3. Media luar ruang 4. Media interpersonal 5. Media baru
3.	2022	5 jenis media	5 jenis media	100,00 %	1. Media Massa 2. Media Elektronik 3. Media luar ruang 4. Media interpersonal 5. Media baru
4.	2023	5 jenis media	5 jenis media	100,00 %	1. Media Massa 2. Media Elektronik 3. Media luar ruang 4. Media interpersonal 5. Media baru
5.	2024	5 jenis media	5 jenis media	100,00 %	1. Media Massa 2. Media Elektronik 3. Media luar ruang 4. Media interpersonal 5. Media baru

Sumber data : Laporan Konsolidasi Pembangunan Tahun 2020 – 2024

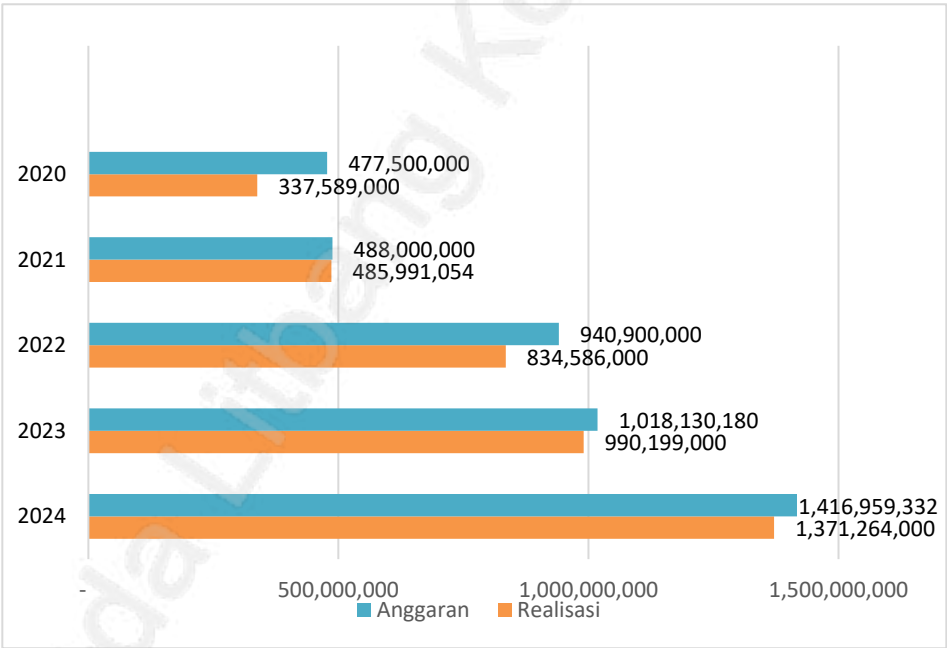
Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Media Layanan Informasi Publik untuk 5 tahun terakhir (2020-2024) disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.9
Target dan Realisasi Anggaran Media Layanan Informasi Publik
Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	2020	477.500.000	337.589.000	70,70
2.	2021	488.000.000	485.991.054	99,59
3.	2022	940.900.000	834.586.000	88,70
4.	2023	1.018.130.180	990.199.000	97,11
5.	2024	1.416.959.332	1.371.264.000	96,78

Sumber data : Laporan Konsolidasi Pembangunan Tahun 2020 – 2024

Gambar 2.7
Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran
Media Layanan Informasi Publik
Tahun 2020-2024



- Persentase OPD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral
Capaian kinerja Persentase OPD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral selalu mencapai target, hanya saja data sektoral yang dikumpulkan Perangkat Daerah ke Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai Walidata masih harus melalui verifikasi dan validasi lebih lanjut dalam rangka menjamin kebenaran data yang disajikan serta dalam pemenuhan standar data dan metadata statistik. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagai walidata bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kota Tarakan sebagai Pembina data dan Bappeda Litbang sebagai sekretariat Forum Satu Data melakukan pembinaan penguatan statistik sektoral melalui penyusunan metadata statistik pada perangkat daerah di akhir tahun 2024. Namun dari data-data statistik sektoral yang sudah dikumpulkan ke Walidata masih banyak yang belum memenuhi standar data dan metadata statistik, dan ada beberapa indikator kinerja kunci sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada perangkat daerah yang tidak ada datanya dikarenakan tidak adanya kegiatan pengumpulan data statistik sektoral.

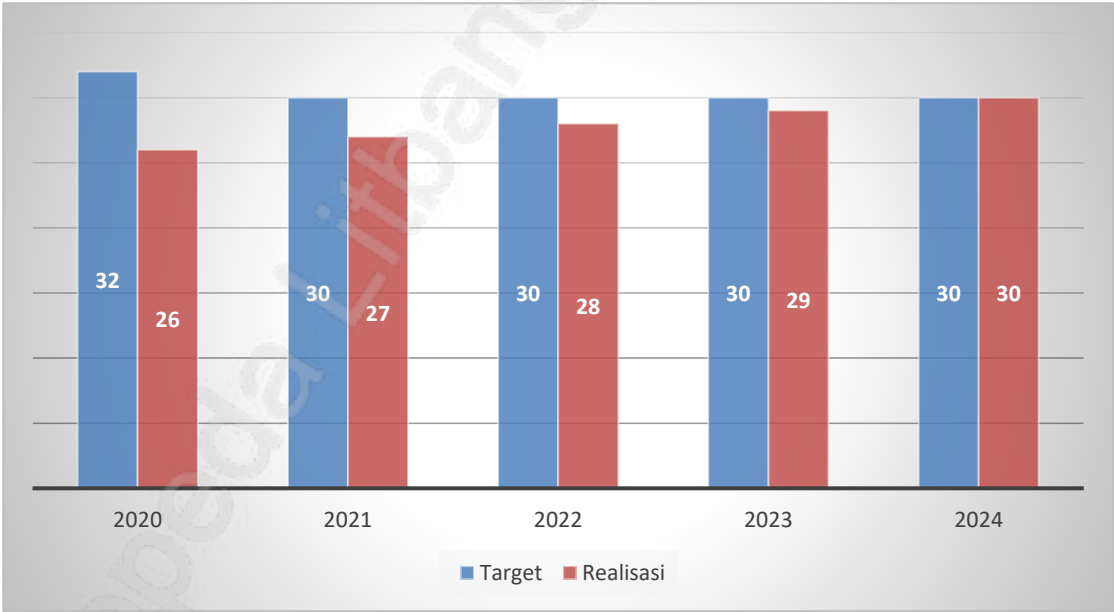
Target dan Realisasi OPD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral dalam 5 tahun terakhir (2020-2024) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.10
Target dan Realisasi OPD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Target OPD	Realisasi	Persentase (%)
1.	2020	32 OPD	26 OPD	81,25 %
2.	2021	30 OPD	27 OPD	90,00 %
3.	2022	30 OPD	28 OPD	93,33 %
4.	2023	30 OPD	29 OPD	96,67 %
5.	2024	30 OPD	30 OPD	100,00 %

Sumber data : Laporan Konsolidasi Pembangunan Tahun 2020 – 2024

Gambar 2.8
Grafik Target dan Realisasi OPD yang berkontribusi terhadap penyediaan data sektoral Tahun 2020-2024



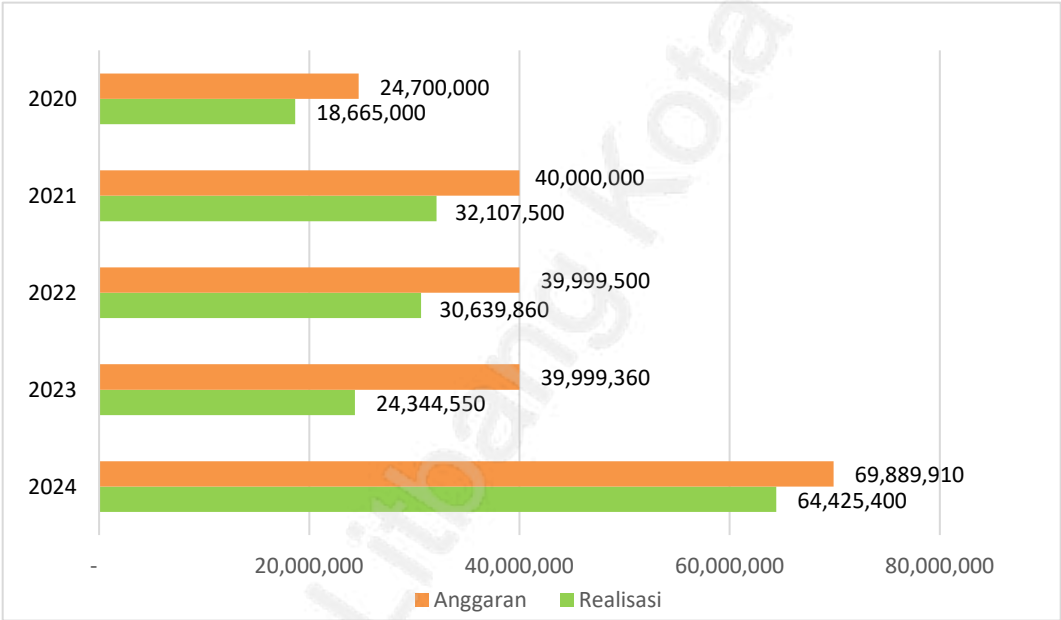
Berikut tabel perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Penyelenggaraan Statistik Sektoral untuk 5 tahun terakhir (2020-2024) :

Tabel 2.11
Target dan Realisasi Anggaran
Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	2020	24.700.000	18.665.000	75,57
2.	2021	40.000.000	32.107.500	80.27
3.	2022	39.999.500	30.639.860	76,60
4.	2023	39.999.360	24.344.550	60,86
5.	2024	69.889.910	64.425.400	92,18

Sumber data : Laporan Konsolidasi Pembangunan Tahun 2020 – 2024

Gambar 2.9
Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran
Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2020-2024



- Persentase aplikasi layanan publik/tata kelola pemerintah yang terintegrasi

Capaian kinerja Persentase aplikasi layanan publik/tata kelola pemerintah yang terintegrasi selalu mencapai target, setiap tahun Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menganggarkan kegiatan untuk melakukan inovasi Atau pembaharuan dalam pembuatan aplikasi pelayanan publik yang terintegrasi, hanya saja hasilnya masih belum optimal, karena Sumber Daya manusia di bidang IT masih sangat kurang.

Berikut tabel perbandingan Target dan Realisasi Aplikasi Layanan Publik 5 tahun terakhir (2020-2024) :

Tabel 2.12
Target dan Realisasi Aplikasi Layanan Publik Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)	Keterangan
1.	2020	5 Aplikasi	5 Aplikasi	100,00 %	1. Aplikasi PPDB Online 2. Aplikasi e – presensi 3. Aplikasi e – parkir 4. Aplikasi e – perpustakaan 5. Aplikasi Perijinan DPMPTSP
2.	2021	4 Aplikasi	4 Aplikasi	100,00 %	1. Pemeliharaan aplikasi PPDB Online 2. Aplikasi BPBD 3. Aplikasi Website BPKPAD 4. Aplikasi Call Center 112
3.	2022	4 Aplikasi	4 Aplikasi	100,00 %	1. Aplikasi E-Kinerja 2. Aplikasi Pajak Online 3. Aplikasi Video Analytic 4. Aplikasi Call Center 112
4.	2023	6 Aplikasi	6 Aplikasi	100,00 %	1. Aplikasi Dashboard TCC 2. Pengembangan Aplikasi tarakankota.go.id 3. Pengembangan Aplikasi PD 4. Pemeliharaan Aplikasi Penanaman Modal 5. Aplikasi Video Analytic 6. Aplikasi Call Center 112
5.	2024	6 Aplikasi	8 Aplikasi	133,33 %	1. Aplikasi Layanan Call Center 112 2. Aplikasi Video Analytic 3. Website Website JDIH (Pengembangan) 4. Website DKUKMP (Pengembangan) 5. PPDB Online (Pemeliharaan) 6. Aplikasi CCTV (Pengembangan) 7. Aplikasi Presensi BKPSDM (Pengembangan) 8. Aplikasi SIMPEG (Pengembangan)

Sumber Data : Laporan Bidang Aplikasi dan Informatika dan Laporan Konsolidasi Pembangunan 2024

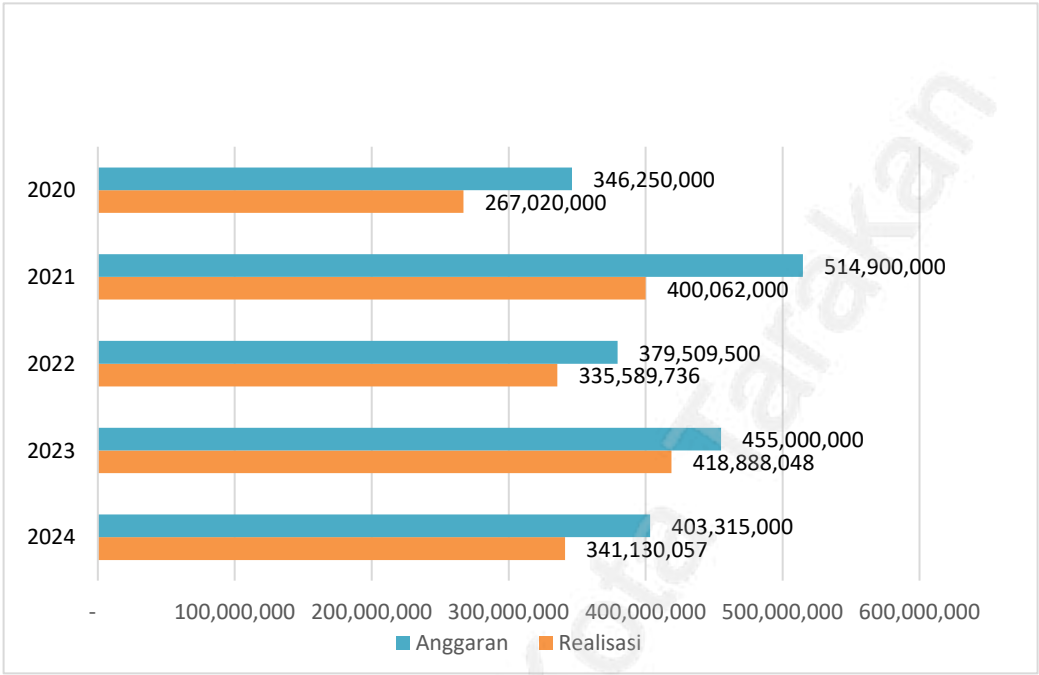
Berikut tabel perbandingan Target dan Realisasi Anggaran Aplikasi Layanan Publik untuk 5 tahun terakhir (2020-2024) :

Tabel 2.13
Target dan Realisasi Anggaran Aplikasi Layanan Publik
Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1.	2020	346.250.000	267.020.000	77,12
2.	2021	514.900.000	400.062.000	77,70
3.	2022	379.509.500	335.589.736	88,43
4.	2023	455.000.000	418.888.048	92,06
5.	2024	403.315.000	341.130.057	84,58

Sumber data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Konsolidasi Pembangunan Tahun 2020 – 2024

Gambar 2.10
Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Anggaran
Aplikasi Layanan Publik Tahun 2020-2024



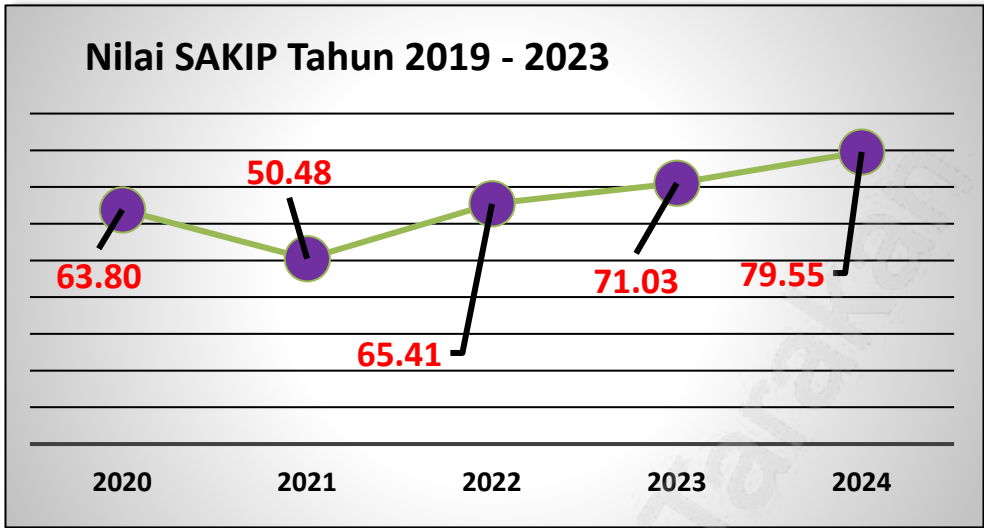
- Nilai dan predikat SAKIP
Nilai/Predikat Sakip adalah nilai atau predikat dari Laporan Hasil Evaluasi Sakip yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Tarakan Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi nilai Sakip DKISP Tahun 2024 adalah 79,55 atau dengan predikat BB dari target yang ditetapkan sebesar 79,55/BB atau tingkat capaian sebesar 100,00 %, penyebab tercapainya target LHE Sakip antara lain :
 1. Penetapan Target Keberhasilan sesuai dengan Indikator Tujuan.
 2. Dokumen perencanaan dan keuangan telah dipublikasikan pada Website resmi PD atau Website Pemerintah Kota Tarakan yang dapat memudahkan publik/masyarakat untuk mengakses .
 3. Evaluasi internal telah dilaksanakan dan sesuai dengan Rencana Aksi yang telah ditetapkan.
 4. Dokumen LKIP didukung basis data yang kompeten yang dapat diverifikasi, ditelusuri sumber datanya dan *up to date* .Target dan Realisasi Nilai Sakip dalam 5 tahun terakhir (2020-2024) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.14
Target dan Realisasi Nilai LHE SAKIP Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Target Nilai/Predikat	Realisasi Nilai/Predikat	Keterangan
1.	2020	65/B	63.80/B	Baik
2.	2021	65/B	50.48/CC	Cukup
3.	2022	70/B	65.41/B	Baik
4.	2023	70/B	71,03/BB	Sangat Baik
5.	2024	79,55	79,55/BB	Sangat Baik

Sumber data : LHE Sakip Tahun 2020 – 2024

Gambar 2.11
Grafik Realisasi Nilai LHE SAKIP Tahun 2020-2024



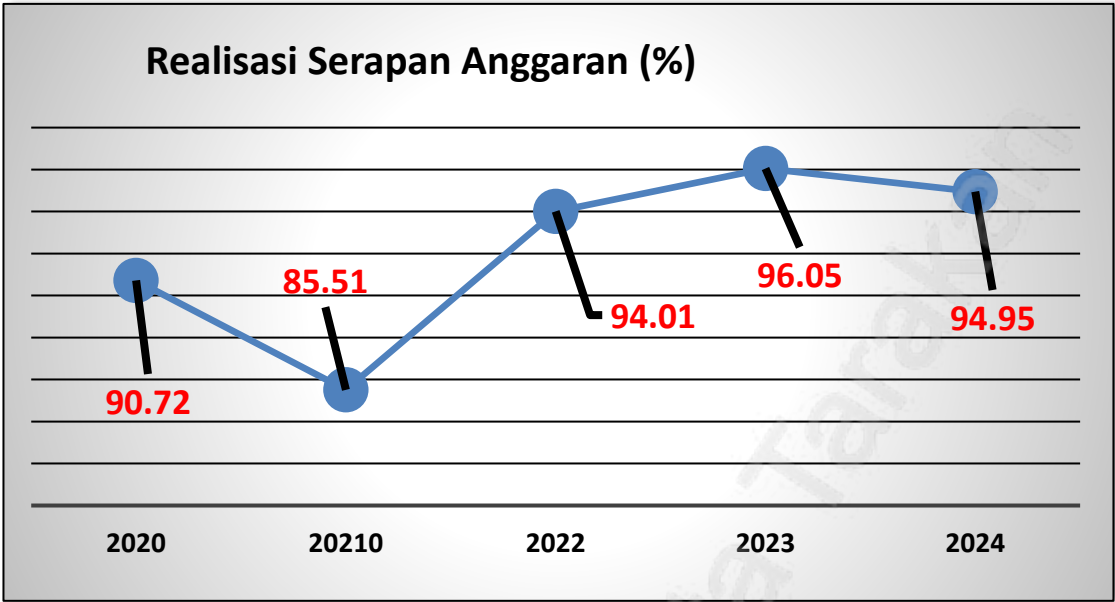
- Kesimpulan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja
Secara keseluruhan, kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan menunjukkan hasil yang sangat positif dengan sebagian besar target tercapai bahkan terlampaui.
Pencapaian yang sangat baik dan signifikan pada sebagian besar indikator-indikator utama menunjukkan adanya kapasitas dan komitmen yang kuat dalam peningkatan kualitas pelayanan yang komprehensif .
Selain keberhasilan dalam pencapaian target kinerja juga diikuti dengan pencapaian target dari realisasi keuangan atau serapan anggaran kegiatan yang cukup baik dengan rata-rata serapan diatas 85 % hal tersebut dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 2.15
Perbandingan Antara Anggaran dan Realisasi Serapan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2020 - 2024

No.	Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Persentase realisasi(%)
1	2020	7.010.101.075	6.359.277.130	650.823.945	90,72
2	2021	6.436.615.087	5.504.052.973	932.562.114	85,51
3	2022	6.500.884.800	6.111.168.153	389.716.647	94.01
4	2023	6.981.387.107	6.705.604.815	275.782.292	96,05
5	2024	7.760.915.369	7.368.771.950	392.143.419	94,95

Sumber data : Laporan Konsolidasi Pembangunan Tahun 2020 – 2024

Gambar 2.12
Grafik Persentase Realisasi Serapan Anggaran
Tahun 2020-2024



Meskipun secara umum tingkat pencapaian target kinerja dan target realisasi keuangan telah cukup baik akan tetapi tetap diperlukan perhatian khusus pada indikator yang mengalami fluktuasi atau indikator yang memiliki tingkat resiko kegagalan yang tinggi.

Pembelajaran dari fluktuasi kinerja, kesenjangan yang teridentifikasi, meskipun relatif kecil dapat menjadi bahan evaluasi, mitigasi risiko yang lebih efektif dan pengembangan strategi yang lebih baik untuk perbaikan pelayanan di masa mendatang, terutama dalam aspek konsistensi pelaksanaan program, memastikan konsistensi dan keberlanjutan capaian kinerja dan penguatan sistem monitoring dan evaluasi.

c. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan adalah kelompok yang menjadi sasaran dan penerima kemanfaatan program dan kegiatan baik secara langsung maupun tidak langsung guna peningkatan kapasitas dan kualitas dalam layanan informasi, dokumentasi, data statistik dan keamanan informasi . Kelompok sasaran layanan secara umum dikelompokkan menjadi :

- 1) ASN dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan
Kelompok sasaran layanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan mencakup ASN dan seluruh Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang berjumlah sebanyak 30 Perangkat Daerah. Adapun layanan yang disediakan antara lain sebagai berikut:
 - a) Sosialisasi peraturan bidang informasi dan komunikasi publik;
 - b) Layanan diseminasi informasi kegiatan dan layanan di Lingkungan Pemerintah Kota tarakan;
 - c) Melaksanakan pelayanan informasi publik Pemerintah Kota Tarakan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Kota Tarakan dengan menyelesaikan permohonan informasi publik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

- d) Layanan monitoring informasi, opini dan aspirasi publik dengan mengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N LAPOR) Pemerintah Kota Tarakan;
 - e) Mengelola Media Komunikasi Publik Pemerintah Kota Tarakan diantaranya: Stand Baliho, Videotron dan Media Online Pemerintah Kota Tarakan (Website, Instagram dan Facebook);
 - f) Mengelola nama domain dan subdomain di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan;
 - g) Fasilitasi kegiatan videoconference dan zoom meeting dengan penyediaan sarana, prasarana serta ruangan kegiatan;
 - h) Melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan;
 - i) Menyediakan dan mengelola NOC (Network Operation Center) dan data center Pemerintah Kota Tarakan;
 - j) Mengelola portal layanan Pemerintah Kota Tarakan yang terintegrasi diantaranya portal layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik;
 - k) Sebagai Walidata Pemerintah Kota Tarakan;
 - l) Layanan aktivasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) .
- 2) Sekolah/Universitas/Perguruan Tinggi
Memberikan kesempatan kepada Sekolah/Universitas/Perguruan Tinggi yang ingin melaksanakan pemagangan atau praktek kerja lapangan (PKL) pada siswa/mahasiswanya di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan jurusan pendidikan yang ditempuh.
- 3) Perumda
Layanan dan kerjasama dengan Perumda Tarakan Media Telekomunikasi antara lain :
- a) pengawasan penyediaan jaringan fiber optic untuk pendistribusian bandwidth kepada sebagian besar Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Tarakan
 - b) pemanfaatan jaringan fiber optic untuk pemantauan keamanan dan lalu lintas jalan/kendaraan melalui CCTV
 - c) pembuatan video kegiatan pembangunan dan layanan publik untuk desiminasi informasi dan komunikasi pada masyarakat
- 4) Masyarakat
Sasaran layanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian kepada kelompok Masyarakat antara lain:
- a) Layanan diseminasi informasi publik berupa kebijakan dan program prioritas Pemerintah Kota Tarakan melalui media komunikasi publik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara diantaranya: Stand Baliho, Videotron dan Media Online Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Website, Instagram, WhatsApp dan Facebook);
 - b) Layanan diseminasi informasi publik berupa kebijakan dan program prioritas Pemerintah Kota Tarakan melalui media komunikasi publik diantaranya: stand baliho, media cetak dan Media Online (Website, Instagram dan Facebook);
 - c) Layanan opini dan aspirasi publik melalui kanal Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N LAPOR) Pemerintah Kota Tarakan;
 - d) Layanan kegawat daruratan melalui layanan call center 112 yang merupakan layanan call center 24 jam yang menghubungkan panggilan kegawat daruratan untuk pemadam kebakaran, ambulan

- angkutan, mobil jenazah yang terintegrasi dan gratis untuk Masyarakat;
- e) Layanan video analytic atau pemantauan keamanan dan lalu lintas jalan/kendaraan melalui CCTV di titik Lokasi strategis di wilayah kota tarakan
- d. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan
- 1) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)
Pendampingan untuk transformasi layanan publik digital, pengembangan infrastruktur dan sumberdaya TIK serta peningkatan kapasitas SDM digital
 - 2) Badan Pusat Statistik (BPS)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam memberikan layanan data statistik sektoral diantaranya sebagai berikut:
 - Pembinaan penyelenggaraan (perencanaan, pengumpulan, verifikasi dan penyebarluasan data) kegiatan statistik sektoral di lingkup Pemerintah Kota Tarakan;
 - Penerbitan surat rekomendasi kegiatan statistik baik survei dan kompilasi produk administrasi;
 - Bergabung dengan tim penilai Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
 - Membantu menjadi narasumber dalam kegiatan-kegiatan di bidang Statistik.
 - 3) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam memberikan layanan keamanan informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan, diantaranya sebagai berikut:
 - CSIRT: Layanan keamanan siber, tanggap insiden siber dan membangun kapasitas sumber daya keamanan siber;
 - Penyelenggaraan sertifikat elektronik guna mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik yang aman dan terpercaya di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan. Layanan ini untuk penandatanganan dokumen elektronik yang merepresentasikan individu yang dilakukan secara aman dan legal;
 - Konsultasi dan pendampingan langsung terkait konfigurasi keamanan, audit sistem, dan penerapan standar keamanan siber di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan;
 - Narasumber Sosialisasi kegiatan di bidang persandian;
 - 4) Pemerintah Provinsi Kaltara
 - Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan serta target capaian antara Pemerintah Kota Tarakan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
 - Pelatihan dan sosialisasi dari Provinsi Kaltara untuk peningkatan kapasitas SDM dan layanan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
 - Sebagai Narasumber untuk kegiatan-kegiatan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

5) Sektor Swasta

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan bermitra dengan pihak Swasta dalam memberikan pelayanan antara lain:

- a. Bermitra dengan perusahaan-perusahaan teknologi dalam rangka penyediaan layanan pembangunan dan pengembangan aplikasi, layanan call center 112, bandwidth internet CCTV; dan
- b. Bermitra dengan pers yang terdiri dari media-media online, media cetak dan media elektronik (televisi dan radio) baik media lokal maupun media nasional.

2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan hasil capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke belakang (Tahun 2020-2024) serta tantangan dan peluang. Berikut Adalah pemetaan permasalahan utama pelayanan yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2025-2029 yang dapat dijabarkan pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.16
Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan

MASALAH POKOK	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH
Belum optimalnya tata kelola dan layanan pemerintah berbasis elektronik	1. Belum optimalnya penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik	1. Kurang optimalnya transformasi aplikasi layanan publik (pembuatan, pengembangan, pemeliharaan dan integrasi aplikasi) 2. Rendahnya tingkat keamanan dan perlindungan data center (NOC) 3. Belum optimalnya penyelenggaraan SPBE 4. Kurangnya kompetensi penyelenggara TIK seperti pemasaran digital, pemrograman dan pengembangan aplikasi, keamanan ciber, kecerdasan buatan 5. Cakupan sebaran dan kualitas pantauan dari CCTV yang belum optimal 6. Masih rendahnya waktu tanggap layanan kegawatdaruratan ambulance dan mobil jenazah
	2. Belum optimalnya Keterbukaan Informasi Publik	1. Kurangnya SDM dalam pengelolaan pelayanan informasi dan pengaduan pelayanan publik (Sp4an Lapor)

MASALAH POKOK	RUMUSAN MASALAH	AKAR MASALAH
		2. Kurangnya sinergitas antara PPID Utama dan PPID Pembantu 3. Kurangnya pemahaman akan tugas dan kewajiban Badan Publik dalam pengelolaan dan penyampaian informasi dan dokumentasi
	3. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan Data Statistik Sektoral	1. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola data statistik sektoral dalam rangka mewujudkan open government 2. Masih rendahnya data statistik sektoral perangkat daerah yang disusun berdasarkan metadata dan standar data 3. Belum terwujudnya Portal Satu Data Kota Tarakan sehingga Data Statistik Sektoral Perangkat Daerah belum terintegrasi
	4. Belum optimalnya Pengamanan Informasi Digital Pemerintah Daerah	1. Belum optimalnya implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) di lingkup Pemerintah Kota 2. Minimnya kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan keamanan informasi dan persandian dalam rangka peningkatan Cyber Security 3. Kurangnya sarana dan prasarana teknologi keamanan informasi

b. Isu Strategis

Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan fungsi Dinas, Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan serta memperhatikan analisis permasalahan yang sedang terjadi selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam Perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Dengan memperhatikan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan dapat diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra OPD tahun 2025-2029. Berdasarkan analisis tersebut berikut isu-isu strategis :

Tabel 2.17
Isu Strategis
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
- Adanya regulasi yang mendukung seperti SOTK, perwali SPBE, SOP layanan digital, perwali penyelenggaraan SDI, Penggunaan TTE terkait e-Catalog versi 6 - Mendapatkan dukungan anggaran - Ketersediaan aplikasi dari pusat yang digunakan seluruh daerah - Memiliki Media sosial, website resmi, PPID, layanan aduan digital (Sp4N LapoR) - Pengelolaan dan diseminasi data melalui satu data daerah - Kerja sama dengan penyedia layanan cloud, universitas, BUMD/BUMN TIK.	Belum optimalnya tata kelola dan layanan pemerintah berbasis elektronik	- Keterbukaan Informasi - Integrasi Data ke dalam Sistem Informasi Pemerintah - Peningkatan Akses Teknologi Informasi untuk Mendukung Partisipasi Publik - Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk Keberlanjutan - Ketahanan Informasi dan Keamanan Data	- Transformasi Digital Global - Keamanan Siber Internasional - Tuntutan Interoperabilitas Layanan Digital - Percepatan Adopsi Teknologi AI dan Big Data	- Penerapan SPBE dan Reformasi Birokrasi Digital - Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) - Digitalisasi Pelayanan Publik Terpadu - Peningkatan Literasi dan Infrastruktur Digital	- Kesiapan Infrastruktur dan SDM Daerah - Kebutuhan Layanan Publik yang Cepat dan Transparan - Integrasi Data dan Layanan Antar Perangkat Daerah - Komitmen Kepala Daerah dalam Transformasi Digital	tata kelola dan layanan pemerintah berbasis elektronik

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATGEI DAN ARAH TUJUAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah selama lima tahun.

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan telah menetapkan Visi dan Misi yang di tuangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Cerdas yang bertumpu pada sektor Jasa, Perdagangan, Perikanan Kelautan dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Maju menuju Masyarakat Sejahtera.

Dalam mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah maka ditetapkan beberapa Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Tarakan Tahun 2025 – 2029 yaitu :

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
2. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar yang handal
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui dukungan kemudahan berusaha yang berkeadilan dan bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, perikanan kelautan, ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan (UMKM)
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif serta menjaga stabilitas ketertiban dan ketentraman kota
5. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh menghadapi bencana

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka perlu penyelarasan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMPD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan tugas dan fungsinya berperan dalam mewujudkan *Misi 4 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif serta menjaga stabilitas ketertiban dan ketentraman kota*, *Tujuan 4 yaitu Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan* dan *sasaran 12 yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan publik*. Maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan merumuskan Tujuan yaitu : “Meningkatnya Tata Kelola Dan Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik”.

Electronic Government disingkat e-Gov merupakan penerapan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan dan dikembangkan oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat kapan dan dimanapun masyarakat bisa mendapatkan kemudahan akses informasi dan pelayanan publik yang diberikan pemerintah. Inti dari penerapan *e-Government* adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi bagi mewujudkan Good Governance.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan dan merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Didalamnya juga dirancang indikator sasaran sebagai ukuran keberhasilan tingkat pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Dinas secara efektif dan efisien dengan hasil yang optimal. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan

strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan.

Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai dalam periode I (satu) tahun.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan telah menetapkan sasaran dalam periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik;
2. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik;
3. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan Data Statistik Sektorial;
4. Meningkatnya Pengamanan Informasi Digital Pemerintah Daerah;
5. Meningkatnya tata kelola DKISP

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Pembangunan Kota Tarakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada table berikut :

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2025-2029

a. Strategi

Sasaran organisasi memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, karenanya harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Apabila telah tercapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah tercapai. Untuk itu diperlukan adanya strategi serta menentukan arah dari kebijakan yang dibuat.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan PD, sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis PD yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategis

Berikut rumusan pernyataan strategi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Rumusan Strategi

Tujuan		Sasaran		Strategi
Meningkatnya tata kelola dan layanan pemerintah berbasis elektronik	1.	Meningkatnya penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik	1.	Peningkatan pengelolaan digitalisasi layanan publik
			2.	Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM
			3.	Pemenuhan Sarana dan Prasarana TIK
	2.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	1.	Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM
			2.	Meningkatkan kerjasama antar PPID utama dan pembantu
	3.	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan Data Statistik Sektoral	1.	Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM
			2.	Peningkatan Kualitas dan Validitas Data Melalui Kemitraan
			3.	Membangun portal satu data indonesia
	4.	Meningkatnya Pengamanan Informasi Digital Pemerintah Daerah	1.	Penyusunan dan Penegakan Kebijakan Keamanan
			2.	Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM
			3.	Pemenuhan Sarana dan Prasarana TIK
			4.	Sosialisasi dan evaluasi implementasi TTE seluruh OPD
			5.	Kolaborasi dengan Penyedia Jasa Keamanan dan Sertifikasi
	5.	Meningkatnya Tata Kelola DKISP	1.	Mengoptimalkan sumber daya di perangkat daerah

b. Penahapan Renstra

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah serta mendukung tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) Kota Tarakan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan perencanaan pembangunan jangka menengah selama lima tahun ke depan. Untuk menjamin ketercapaian tujuan secara efektif dan

berkesinambungan, pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra DKISP dilaksanakan melalui pendekatan penahapan pembangunan.

Penahapan ini disusun secara sistematis dan terukur, dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya, kebutuhan prioritas daerah, serta dinamika perkembangan teknologi dan regulasi di bidang komunikasi dan informatika. Penahapan juga menjadi instrumen penting untuk mengatur skala prioritas tahunan, memudahkan koordinasi antarbidang, serta menjadi dasar monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik.

Penahapan pembangunan dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2025-2029 disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 3.3
Penahapan Renstra
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Pemetaan dan Penguatan Pondasi SPBE : - Pemetaan sistem/aplikasi eksisting di PD - Penataan kelembagaan SPBE (tim koordinasi, regulasi) - Penilaian awal indeks SPBE dan kebutuhan infrastruktur - Penyusunan masterplan TIK dan arsitektur SPBE daerah	Mengembangkan Standarisasi dan Digitalisasi Layanan Dasar : - Digitalisasi layanan prioritas (perizinan, kependudukan, aduan) - Penyesuaian SOP layanan digital - Peningkatan kapasitas SDM TIK - Implementasi tanda tangan elektronik dan sistem keamanan siber dasar	Integrasi Sistem dan Layanan Antar Perangkat Daerah : - Pembangunan dashboard layanan publik terpadu - Interkoneksi antar-aplikasi dinas - Penguatan data warehouse & satu data daerah - Uji coba layanan digital lintas sektor	Transformasi Digital dan Pemanfaatan Data : - Pengembangan layanan berbasis AI/data analytics - Evaluasi indeks SPBE tengah periode - Peningkatan keterlibatan masyarakat melalui kanal digital - Optimalisasi Mal Pelayanan Publik Digital	Evaluasi dan Optimalisasi Layanan Pemerintah Digital : - Penilaian akhir SPBE dan dampaknya terhadap pelayanan public - Pemutakhiran arsitektur SPBE - Penyesuaian regulasi dan kelembagaan - Penyusunan roadmap lanjutan dan replikasi praktik baik

c. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk meenyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategis. Adapun arah kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan dijelaskan dalam dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik
Dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2025-2029

OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
Peningkatan kualitas digitalisasi pelayanan publik	Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Tata Kelola Pemerintahan	1. Peningkatan transformasi aplikasi layanan publik (pembuatan, pengembangan, pemeliharaan dan integrasi aplikasi) 2. Peningkatan keamanan dan perlindungan data center (NOC) 3. Peningkatan penyelenggaraan SPBE 4. Peningkatan kompetensi penyelenggara TIK seperti pemasaran digital, pemrograman dan pengembangan aplikasi, keamanan ciber, kecerdasan buatan 5. Optimalisasi cakupan sebaran dan kualitas pantauan dari CCTV 6. Peningkatan waktu tanggap layanan kegawatdaruratan ambulance dan mobil jenazah 7. Penambahan SDM dalam pengelolaan pelayanan informasi dan pengaduan pelayanan publik (span lapor) 8. Peningkatan sinergitas antara PPID Utama dan PPID Pembantu 9. Peningkatan pemahaman akan tugas dan kewajiban Badan Publik dalam pengelolaan dan penyampaian informasi dan dokumentasi 10. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pengelola data statistik sektoral dalam rangka mewujudkan open government 11. Peningkatan data statistik sektoral perangkat daerah yang disusun berdasarkan metadata dan standar data 12. Tersedianya Portal Satu Data Kota Tarakan sehingga Data Statistik Sektoral Perangkat Daerah terintegrasi 13. Peningkatan implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) di lingkup Pemerintah Kota 14. Peningkatan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan keamanan informasi dan persandian dalam rangka peningkatan Cyber Security 15. Peningkatan sarana dan prasarana teknologi keamanan informasi

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran, serta strategi dan arah kebijakan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu 2 (dua) tahun (2025-2026), meliputi program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh PD untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Masukan (Input) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan berjalan untuk menghasilkan keluaran (output). Input kegiatan meliputi antara lain sumber daya manusia, dana dan fasilitas.

Keluaran (Output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa produk jasa fisik dan non fisik, seperti produk perencanaan pembangunan, hasil kajian strategi pembangunan, komputer, dan lain-lain.

Hasil (Outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan. Misalnya tersebar dan dimanfaatkannya produk perencanaan oleh stakeholder dan masyarakat.

Dampak (Impact) adalah ukuran pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya, pendapatan rumah tangga meningkat (%/tahun), produktivitas dan infrastruktur tingkat wilayah meningkat (%).

Secara umum indikator pencapaian kinerja yang ingin diterapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan pada periode lima tahun ke depan adalah penekanan kepada indikator keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari program dan kegiatan perencanaan dan kajian strategis pembangunan. Oleh karena itu, masing-masing kegiatan selanjutnya dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif.

1. Uraian Program

Penyusunan Program yang akan diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara selama lima tahun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara, yaitu urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian.

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program ini merupakan program yang bersifat generik dan wajib ada untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara.

Program penunjang urusan pemerintah daerah berfungsi memberikan pelayanan bagi organisasi perangkat daerah meliputi pelaksanaan fungsi perencanaan yang melengkapi dokumen Renstra,

Renja, RKA, DPA, laporan kegiatan yang meliputi Lakip, LPPD dan pelaksanaan Laporan Sakip dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Melaksanakan fungsi keuangan adalah penyediaan Gaji dan TPP, pencatatan, pelaksanaan, verifikasi administrasi keuangan PNS, membuat laporan akhir tahun, laporan akhir, LHP, laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan serta estimasi realisasi akhir tahun. Fungsi kepegawaian yaitu pelaksanaan administrasi perangkat daerah, administrasi umum, penyediaan jasa urusan, penyediaan jasa penunjang.

b. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas informasi serta komunikasi publik yang mendukung pelaksanaan Good Governance dan Smart Government. Program ini mencakup pengelolaan informasi dan media publik, hubungan masyarakat, serta komunikasi publik.

c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengelola aplikasi informatika yang mendukung pelayanan publik dan manajemen pemerintahan. Program ini mencakup pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi e-government, serta integrasi sistem informasi. Memastikan bahwa seluruh aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi berjalan optimal, aman, terintegrasi dan selaras dengan visi pembangunan daerah terutama dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan; meningkatkan kualitas pelayanan publik; mewujudkan integrasi data dan informasi; menjamin keamanan dan keandalan sistem; mengoptimalkan investasi teknologi informasi; mendorong inovasi dan pengembangan layanan baru; meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

d. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

Program ini bertujuan untuk menyediakan data statistik sektoral yang berkualitas untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah. Program ini mencakup pengumpulan, pengolahan, analisis, dan diseminasi data statistik sektoral.

Program ini sebagai fondasi krusial bagi pengambilan kebijakan yang tepat sasaran dan terukur dalam berbagai aspek pembangunan daerah dalam menyediakan data dan informasi esensial yang memungkinkan pemerintah provinsi untuk memahami kondisi riil daerah; merencanakan pembangunan yang efektif; melaksanakan program dan kegiatan yang tepat sasaran; memantau dan mengevaluasi keberhasilan pembangunan; meningkatkan akuntabilitas dan transparansi; dan memperkuat koordinasi dan sinergi antar sektor.

e. Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi

Program ini bertujuan untuk menjamin keamanan informasi pemerintah daerah melalui penyelenggaraan persandian. Program ini mencakup tata kelola persandian, operasional pengamanan persandian, dan pengelolaan sumber daya persandian.

Program ini sebagai pilar fundamental untuk menjamin keamanan informasi vital yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi dalam upaya strategis dan berkelanjutan untuk melindungi

kerahasiaan, integritas, dan autentikasi informasi sensitif melalui pemanfaatan teknologi dan manajemen persandian yang terencana dan terukur.

2. Uraian Kegiatan

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini mencakup penyusunan rencana kerja tahunan, rencana strategis, penyusunan anggaran berbasis kinerja, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta pelaporan kinerja perangkat daerah secara berkala;

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Meliputi pengelolaan administrasi keuangan seperti penyusunan laporan keuangan, pengelolaan kas daerah, verifikasi dan pencairan anggaran, serta koordinasi dengan BPKAD dalam pelaksanaan anggaran dinas;

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan operasional kantor seperti pengelolaan surat menyurat, kearsipan, keprotokolan, keamanan kantor, kebersihan, dan administrasi umum lainnya yang mendukung operasional dinas;

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan dinas, termasuk pengadaan peralatan IT, kendaraan operasional, peralatan kantor, dan sarana prasarana penunjang lainnya;

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Meliputi penyediaan jasa konsultansi, jasa pemeliharaan, jasa keamanan, jasa kebersihan, dan jasa penunjang lainnya yang diperlukan untuk mendukung tugas dan fungsi dinas;

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala terhadap aset daerah seperti gedung kantor, kendaraan dinas, peralatan IT, dan infrastruktur lainnya untuk menjaga kondisi dan fungsinya;

g. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan pengelolaan informasi publik, pelayanan informasi kepada masyarakat, pengelolaan media komunikasi pemerintah, serta sosialisasi kebijakan dan program pemerintah daerah;

h. Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah

Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pemerintahan elektronik, aplikasi pelayanan publik online, integrasi sistem antar OPD, dan pengembangan smart city/smart province;

i. Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Provinsi

Kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data statistik sektoral, survei dan sensus, serta penyediaan data untuk perencanaan dan pengambilan Keputusan;

j. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

Kegiatan pengamanan informasi dan komunikasi pemerintah melalui sistem persandian, enkripsi data, pengelolaan keamanan siber, dan pembinaan keamanan informasi;

Berikut tabel yang memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan yang akan dilaksanakan selama periode 2025-2029 :

Tabel 4.1
Program Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Pemerintah Kota Tarakan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				6.728.928.094,00		6.728.928.094,00		6.728.928.094,00		6.728.928.094,00		6.728.928.094,00	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.240.928.094,00		5.240.928.094,00		5.240.928.094,00		5.240.928.094,00		5.240.928.094,00	
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	5.240.928.094,00	100	5.240.928.094,00	100	5.240.928.094,00	100	5.240.928.094,00	100	5.240.928.094,00	2.16.2.20.2.21.01.000 0 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.200.000,00		4.200.000,00		4.200.000,00		4.200.000,00		4.200.000,00	
Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1	4.200.000,00	1	4.200.000,00	1	4.200.000,00	1	4.200.000,00	1	4.200.000,00	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.567.728.094,00		4.567.728.094,00		4.567.728.094,00		4.567.728.094,00		4.567.728.094,00	
Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25	29	4.567.728.094,00	29	4.567.728.094,00	29	4.567.728.094,00	29	4.567.728.094,00	29	4.567.728.094,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12		12		12		12		12		
2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				73.000.000,00		73.000.000,00		73.000.000,00		73.000.000,00		73.000.000,00	
Tersedianya layanan administrasi umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	73.000.000,00	5	73.000.000,00	5	73.000.000,00	5	73.000.000,00	5	73.000.000,00	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	35	35		35		35		35		35		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4		
2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terkelolanya data Barang Milik Daerah dalam aplikasi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	16	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				321.000.000,00		321.000.000,00		321.000.000,00		321.000.000,00		321.000.000,00	
Tersedianya layanan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	321.000.000,00	12	321.000.000,00	12	321.000.000,00	12	321.000.000,00	12	321.000.000,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				265.000.000,00		265.000.000,00		265.000.000,00		265.000.000,00		265.000.000,00	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	24	20	265.000.000,00	20	265.000.000,00	20	265.000.000,00	20	265.000.000,00	20	265.000.000,00	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	23	23		23		23		23		23		
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				488.000.000,00		488.000.000,00		488.000.000,00		488.000.000,00		488.000.000,00	
Meningkatnya jumlah permohonan informasi yang ditanggapi secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui media komunikasi publik pemerintah dan media massa mitra kerja pemerintah (%)	100	100	488.000.000,00	100	488.000.000,00	100	488.000.000,00	100	488.000.000,00	100	488.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				488.000.000,00		488.000.000,00		488.000.000,00		488.000.000,00		488.000.000,00	
Tersedianya informasi pemerintah yang dipublikasikan secara luas melalui media komunikasi publik dan media massa mitra kerja	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	2	1	488.000.000,00	1	488.000.000,00	1	488.000.000,00	1	488.000.000,00	1	488.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	5	5		5		5		5		5		
	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	1	1		1		1		1		1		
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Aplikasi Layanan Publik yang terealisasi (%)	100	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00	
Tersedianya Aplikasi Layanan Publik yang Dikembangkan, Dipelihara dan Siap Digunakan	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	30	30	1.000.000.000,00	30	1.000.000.000,00	30	1.000.000.000,00	30	1.000.000.000,00	30	1.000.000.000,00	
	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	6	1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	
Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Persentase data sektoral yang dipublikasikan (%)	100	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Data statistik sektoral daerah	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	100	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	
	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	100	100		100		100		100		100		
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	100	100		100		100		100		100		
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Meningkatnya Keamanan Siber dan	Persentase Perangkat Daerah yang mematuhi regulasi terkait	100	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi,

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	implementasi TTE sesuai peraturan yang berlaku (%)												Informatika, Statistik dan Persandian
2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya perangkat daerah yang telah menggunakan TTE dalam proses administrasi dan layanan pemerintahan	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	3	30		30		30		30		30		

3. Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif
- Berikut tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, subkegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara yang akan dilaksanakan selama periode 2025-2029 :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 4.2
Program/Kegiatan/SubKegiatan
Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET. (DEFINISI OPERASIONAL)
Meningkatnya kualitas digitalisasi pelayanan publik	Meningkatnya tata kelola dan layanan pemerintah berbasis elektronik				Indeks SPBE		Mengukur tingkat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya
		Meningkatnya penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik			Indeks Domain Tata Kelola SPBE		Mengukur tingkat kematangan tata kelola dalam penyelenggaraan SPBE oleh instansi pemerintah, mencakup aspek-aspek seperti kebijakan, perencanaan, kelembagaan, pengawasan, dan pengelolaan risiko yang mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan SPBE.
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika		Persentase Aplikasi Layanan Publik yang terealisasi	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Mengukur tingkat pencapaian realisasi pengembangan dan implementasi aplikasi layanan publik oleh instansi pemerintah daerah
				Tersedianya Aplikasi Layanan Publik yang Dikembangkan, Dipelihara dan Siap Digunakan	Jumlah Aplikasi Layanan Publik yang terealisasi	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Mengukur Perhitungan Jumlah Aplikasi yang telah selesai dikembangkan, diuji, dan digunakan
					Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Mengukur Perhitungan Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan
					Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Mengukur Perhitungan Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (TCC)
					Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Penyediaan Akses Internet	Mengukur Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet bandwidth server yang disediakan oleh DKISP
		Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik			Persentase Penyelesaian Permohonan Informasi Publik		Mengukur Persentase permohonan informasi publik yang telah diselesaikan oleh Badan Publik dalam periode tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
			Meningkatnya jumlah permohonan informasi yang ditanggapi secara tepat waktu dan sesuai ketentuan		Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui media komunikasi publik pemerintah dan media massa mitra kerja pemerintah	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Mengukur jenis informasi atau konten yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) yang berhasil disampaikan kepada publik melalui dua saluran utama yaitu Media Komunikasi Publik Pemerintah dan Media Massa Mitra Kerja Pemerintah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET. (DEFINISI OPERASIONAL)
				Tersedianya informasi pemerintah yang dipublikasikan secara luas melalui media komunikasi publik dan media massa mitra kerja	Jumlah Informasi Pemerintah yang di publikasikan melalui media komunikasi publik pemerintah dan media massa mitra kerja pemerintah	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Mengukur Perhitungan Jumlah Jenis Informasi Pemerintah yang di publikasikan melalui media komunikasi publik pemerintah dan media massa mitra kerja pemerintah
					Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Mengukur Perhitungan Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo
					Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Pelayanan Informasi Publik	Mengukur Perhitungan Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan
					Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Mengukur Perhitungan Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Pengelolaan media komunikasi publik	Mengukur Perhitungan Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis
		Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan Data Statistik Sektoral			Indeks Pembangunan Statistik		Mengukur tingkat penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral secara terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip Sistem Statistik Nasional
			Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)		Persentase data sektoral yang dipublikasikan	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Mengukur tingkat keterbukaan dan ketersediaan data sektoral yang berhasil dipublikasikan oleh instansi pemerintah (terutama perangkat daerah) kepada publik melalui media resmi
				Meningkatnya Kualitas Data statistik sektoral daerah	Jumlah Jenis data sektoral daerah	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Mengukur Perhitungan Jumlah Jenis Data Sektoral
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Mengukur Perhitungan Jumlah kegiatan statistik sektoral yang memenuhi standar dibandingkan Jumlah kegiatan statistik sektoral
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Mengukur Perhitungan Jumlah kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses dibandingkan Jumlah kegiatan statistik sektoral
					Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Mengukur Perhitungan Jumlah kegiatan statistik sektoral yang dilengkapi dokumen perencanaan dibandingkan dengan Jumlah kegiatan statistik sektoral
		Meningkatnya Pengamanan Informasi			Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan TTE		Mengukur Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan Tanda Tangan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET. (DEFINISI OPERASIONAL)
		Digital Pemerintah Daerah					Elektronik (TTE) tersertifikasi dalam proses administrasi pemerintahan
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah		Persentase Perangkat Daerah yang mematuhi regulasi terkait implementasi TTE sesuai peraturan yang berlaku	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Mengukur proporsi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang telah melaksanakan penggunaan TTE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
				Terlaksananya perangkat daerah yang telah menggunakan TTE dalam proses administrasi dan layanan pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan TTE	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Mengukur Perhitungan Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan TTE
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Mengukur Perhitungan Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
					Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Walikota, Keputusan Walikota maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Mengukur Perhitungan Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Walikota, Keputusan Walikota maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian
		Meningkatnya Tata Kelola DKISP			Nilai/Predikat SAKIP		Pengukuran dan penilaian secara sistematis terhadap kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah dalam mengelola perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program/kegiatan yang telah dilakukan selama periode tertentu
					IKM		Mengukur kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh DKISP
			Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja		Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Mengukur LHE AKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Tarakan
				Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Persentase Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun tepat waktu	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mengukur Perbandingan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun tepat waktu dengan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang disusun
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mengukur Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET. (DEFINISI OPERASIONAL)
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja SKPD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mengukur Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Mengukur Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
				Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP	Jumlah Dokumen Adminitrasi keuangan sesuai SAP	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Mengukur Jumlah Dokumen Adminitrasi keuangan sesuai SAP
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Mengukur Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Mengukur Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				Terlaksananya Layanan administrasi umum	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Mengukur Perbandingan Layanan Administrasi Umum Yang Terlaksana dengan Layanan Administrasi Umum
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Mengukur Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mengukur Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Mengukur Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mengukur Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Terkelolanya data Barang Milik Daerah dalam aplikasi	Persentase Barang Milik Daerah yang terinput dalam aplikasi e-BMD	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mengukur Perbandingan Barang Milik Daerah yang terinput dalam aplikasi e-BMD dan Barang Milik Daerah
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mengukur Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
				Tersedianya layanan jasa penunjang	Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mengukur Perbandingan layanan jasa penunjang yang tersedia dengan layanan jasa penunjang
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mengukur Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Mengukur Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Mengukur Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET. (DEFINISI OPERASIONAL)
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persentase Aset/BMD yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mengukur perbandingan Jumlah Aset /BMD Yang dipelihara dengan Jumlah Aset /BMD
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Mengukur Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Mengukur Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mengukur Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi

Tabel 4.3
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				6.728.928.094,00		6.728.928.094,00		6.728.928.094,00		6.728.928.094,00		6.728.928.094,00		
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.240.928.094,00		5.240.928.094,00		5.240.928.094,00		5.240.928.094,00		5.240.928.094,00		
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	5.240.928.094,00	100	5.240.928.094,00	100	5.240.928.094,00	100	5.240.928.094,00	100	5.240.928.094,00	2.16.2.20.2.21.01.000 0 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.200.000,00		4.200.000,00		4.200.000,00		4.200.000,00		4.200.000,00		
Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1	4.200.000,00	1	4.200.000,00	1	4.200.000,00	1	4.200.000,00	1	4.200.000,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	1.200.000,00	1	1.200.000,00	1	1.200.000,00	1	1.200.000,00	1	1.200.000,00		
2.16.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00		1.200.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	1.200.000,00	1	1.200.000,00	1	1.200.000,00	1	1.200.000,00	1	1.200.000,00		
2.16.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1	1.800.000,00	1	1.800.000,00	1	1.800.000,00	1	1.800.000,00	1	1.800.000,00		
2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.567.728.094,00		4.567.728.094,00		4.567.728.094,00		4.567.728.094,00		4.567.728.094,00		
Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25	29	4.567.728.094,00	29	4.567.728.094,00	29	4.567.728.094,00	29	4.567.728.094,00	29	4.567.728.094,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.505.502.094,00		4.505.502.094,00		4.505.502.094,00		4.505.502.094,00		4.505.502.094,00		
2.16.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				62.226.000,00		62.226.000,00		62.226.000,00		62.226.000,00		62.226.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	62.226.000,00	12	62.226.000,00	12	62.226.000,00	12	62.226.000,00	12	62.226.000,00		
2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				73.000.000,00		73.000.000,00		73.000.000,00		73.000.000,00		73.000.000,00		
Tersedianya layanan administrasi umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	4	73.000.000,00	4	73.000.000,00	4	73.000.000,00	4	73.000.000,00	4	73.000.000,00		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	35	35		35		35		35		35			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3			
2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	3.000.000,00	5	3.000.000,00	5	3.000.000,00	5	3.000.000,00	5	3.000.000,00		
2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	35	35	30.000.000,00	35	30.000.000,00	35	30.000.000,00	35	30.000.000,00	35	30.000.000,00		
2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00		
2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00	4	30.000.000,00		
2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terkelolanya data Barang Milik Daerah dalam aplikasi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	16	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.16.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	16	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				321.000.000,00		321.000.000,00		321.000.000,00		321.000.000,00		321.000.000,00		
Tersedianya layanan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	321.000.000,00	12	321.000.000,00	12	321.000.000,00	12	321.000.000,00	12	321.000.000,00		
2.16.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				320.000.000,00		320.000.000,00		320.000.000,00		320.000.000,00		320.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	320.000.000,00	12	320.000.000,00	12	320.000.000,00	12	320.000.000,00	12	320.000.000,00		
2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				265.000.000,00		265.000.000,00		265.000.000,00		265.000.000,00		265.000.000,00		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	265.000.000,00	1	265.000.000,00	1	265.000.000,00	1	265.000.000,00	1	265.000.000,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	24	20		20		20		20		20			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	23	23		23		23		23		23			
2.16.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				240.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	23	23	240.000.000,00	23	240.000.000,00	23	240.000.000,00	23	240.000.000,00	23	240.000.000,00		
2.16.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.16.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	24	20	15.000.000,00	20	15.000.000,00	20	15.000.000,00	20	15.000.000,00	20	15.000.000,00		
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				488.000.000,00		488.000.000,00		488.000.000,00		488.000.000,00		488.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				488.000.000,00		488.000.000,00		488.000.000,00		488.000.000,00		488.000.000,00		
Tersedianya informasi pemerintah yang dipublikasikan secara luas melalui media komunikasi publik dan media massa mitra kerja	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	1	1	488.000.000,00	1	488.000.000,00	1	488.000.000,00	1	488.000.000,00	1	488.000.000,00		
	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	1	1		1		1		1		1			
2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat				8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		
Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	1	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00		
2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	2	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik				460.000.000,00		460.000.000,00		460.000.000,00		460.000.000,00		460.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	5	5	460.000.000,00	5	460.000.000,00	5	460.000.000,00	5	460.000.000,00	5	460.000.000,00		
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Aplikasi Layanan Publik yang terealisasi (%)	100	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	
Tersedianya Aplikasi Layanan Publik yang Dikembangkan, Dipelihara dan Siap Digunakan	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	6	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	30	30		30		30		30		30			
2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE				350.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	6	1	350.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		
2.16.03.2.02.0033 - Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali (Laporan)	1	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet				450.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		550.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	30	30	450.000.000,00	30	550.000.000,00	30	550.000.000,00	30	550.000.000,00	30	550.000.000,00		

Tabel 4.4
Daftar SubKegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1.	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui media komunikasi publik pemerintah dan media massa mitra kerja pemerintah	Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Subkegiatan : Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kegiatan Rapat KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)
			Subkegiatan : Pelayanan Informasi Publik	Sosialisasi dan pembinaan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)
			Subkegiatan : Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kegiatan sp4n lapor
			Subkegiatan : Pengelolaan media komunikasi publik	publikasi, iklan, pembuatan video, cetak cover dan bongkar pasang cover baliho
2	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi Layanan Publik yang terealisasi	Kegiatan : Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Subkegiatan : Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	pengembangan aplikasi dan penyusunan masterplan/arsitektur SPBE
			Subkegiatan : Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	operasional UPT TCC (belanja uang makan petugas TCC, pemeliharaan jaringan CCTV, sewa jaringan CCTV)
			Subkegiatan : Penyediaan Akses Internet	Belanja sewa bandwidth NOC dan data center, sewa call center 112, lisensi ID Zoom, pemeliharaan jaringan NOC dan data center)
3.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data sektoral yang dipublikasikan	Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			Subkegiatan : Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	kegiatan monev walidata dan FKSD serta cetak buku statistik sektoral
			Subkegiatan : Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	kegiatan SDI, monev dan honorarium tim pelaksana SDI
			Subkegiatan : Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	kegiatan kegiatan proses bisnis statistik sektoral
4.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang mematuhi regulasi terkait implementasi TTE sesuai peraturan yang berlaku	Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Subkegiatan : Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Belanja rapat pelaksanaan layanan keamanan informasi (TTE)
			Subkegiatan : Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	belanja rapat penyusunan kebijakan keamanan informasi

4. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Target Kinerja penyelenggara urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Sektor dan Persandian Kota Tarakan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMDD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMDD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 yang diamanatkan secara khusus kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Sektor dan Persandian Kota Tarakan. Sedangkan penentuan target penyelenggaraan urusan dilakukan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). Kedua indikator tersebut berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan
Tahun 2025 - 2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian								
1	Indeks domain tatakelola SPBE	Poin	2,7	2,7	2,8	2,8	2,9	2,9	3
2.	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	%	100	100	100	100	100	100	100
3.	Indeks pembangunan statistik	Poin	2,25	2,25	2,3	2,35	2,4	2,5	2,6
4.	Presentase perangkat daerah yang mengimplementasikan TTE	%	10	100	100	100	100	100	100
5.	Nilai SAKIP PD	Nilai	71,55	79,55	79,60	79,65	79,70	79,75	79,80
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88	88,64	88,70	88,72	88,75	88,83	88,85

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci Outcome
Urusan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	94.95%	95%	95%	95%	95%	95%	
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah	Persen	69%	69.50%	69.50%	69.50%	69.50%	69.50%	
4	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang menjadi pedoman bagi seluruh unsur pelaksana di lingkungan DKISP dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun ke depan yakni periode tahun 2025 – 2029. Renstra ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta memperhatikan arah kebijakan nasional di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian dengan memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Melalui penyusunan Renstra ini, DKISP menegaskan komitmennya untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi, sejalan dengan perkembangan digitalisasi dan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Program dan kegiatan yang dirancang telah melalui proses analisis yang komprehensif terhadap tantangan, peluang, serta kapasitas kelembagaan yang ada.

Penahapan pembangunan juga dirancang secara sistematis, mulai dari penguatan pondasi SPBE, pengembangan layanan digital dasar, integrasi sistem dan data, hingga transformasi digital yang lebih luas. Semua tahapan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi birokrasi, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Tarakan Tahun 2025-2029 nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja DKISP, serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kota Tarakan. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA DKISP ini merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan atau target kinerja sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh sinergi antarperangkat daerah, keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, serta dukungan dari masyarakat. Untuk itu, diperlukan komitmen bersama dalam mewujudkan program-program strategis yang telah dirancang, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang konsisten guna memastikan ketercapaian sasaran dan tujuan pembangunan.

Sebagai penutup, perlu dipahami bahwa keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan hanya sebagian ditentukan oleh kualitas perencanaan yang disusun, selebihnya ditentukan oleh kemampuan dan kerja keras mewujudkan rencana tersebut ke dalam implementasi kegiatan.

Akhir kata, semoga dokumen Renstra DKISP ini dapat menjadi panduan yang efektif dalam mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pembangunan daerah menuju transformasi digital yang berdaya guna dan berhasil guna.

16. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan Tahun 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tarakan merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi serta penyediaan pelayanan publik yang berkualitas di bidang perizinan dan nonperizinan. Peran ini semakin penting seiring dengan arah pembangunan Kota Tarakan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, yang menekankan pada terwujudnya kota cerdas dengan daya saing tinggi dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan daerah, investasi menjadi salah satu instrumen utama dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan sektor-sektor unggulan seperti jasa, perdagangan, perikanan kelautan, serta ekonomi kreatif, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kehadiran DPMPTSP tidak hanya sebagai pintu masuk investasi, tetapi juga sebagai penggerak ekosistem pembangunan ekonomi daerah yang inklusif. Hal ini diwujudkan melalui fasilitasi investasi, simplifikasi proses perizinan, pemanfaatan teknologi digital, serta pembinaan dan pengendalian penanaman modal.

Selain peluang yang besar, terdapat pula tantangan yang harus dihadapi, antara lain fluktuasi realisasi investasi, persaingan antar daerah dalam menarik investor, kebutuhan peningkatan kualitas layanan publik, serta keterbatasan penyerapan tenaga kerja akibat disrupsi teknologi dan perubahan struktur ekonomi global. Di sisi lain, kebijakan nasional melalui penerapan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) menuntut daerah untuk beradaptasi dalam memberikan layanan perizinan berbasis risiko secara transparan, cepat, dan akuntabel. Kondisi ini menegaskan bahwa DPMPTSP harus mampu menyesuaikan strategi dan kebijakan agar dapat menjawab isu-isu strategis sekaligus mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Kota Tarakan Tahun 2025–2029 menjadi penting sebagai dokumen yang memberikan arah pembangunan lima tahunan. Renstra ini berfungsi sebagai pedoman dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan, sehingga penyelenggaraan urusan penanaman modal dapat terarah, terukur, serta selaras dengan visi, misi, dan sasaran pembangunan Kota Tarakan dalam meningkatkan investasi, memperluas lapangan kerja, memperbaiki kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029;
 18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025;
 20. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 21. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat

Daerah;

22. Surat Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 100.3.3.3/Hk-IV/249/2025 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan Tahun 2025-2029 adalah untuk menggambarkan arah dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan Sub kegiatan serta kondisi yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama kurun waktu dua tahun ke depan dalam rangka mendukung pencapaian Kota Tarakan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029.

Tujuan dari penyusunan RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan Sub kegiatan pembangunan untuk jangka waktu tiga tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka mensinkronisasi serta mensinergikan perencanaan pembangunan daerah;
2. Merumuskan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur yang menjadi pedoman pencapaian perencanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan di Pemerintah Kota Kota Tarakan ;
3. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
4. Menjadi kerangka dasar dalam rangka penyusunan RENJA yang bersifat tahunan;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DPMPTSP KOTA TARAKAN

Bab ini membahas gambaran pelayanan perangkat daerah yang paling sedikit memuat tugas, fungsi, dan struktur perangkat daerah; sumber daya perangkat daerah; kinerja pelayanan perangkat daerah; dan kelompok sasaran layanan. Selain itu juga membahas permasalahan pelayanan DPMPTSP Kota Tarakan dan Isu Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini paling sedikit memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan DPMPTSP Kota Tarakan.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini paling sedikit memuat uraian program; uraian kegiatan; uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator target dan pagu

indikatif; uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah; target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama; dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci.

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DPMPTSP KOTA TARAKAN

2.1. Gambaran Pelayanan DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tarakan dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. DPMPTSP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang urusan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, DPMPTSP Kota Tarakan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan, yang diberikan kepada Daerah.

Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugasnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan, pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
4. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya

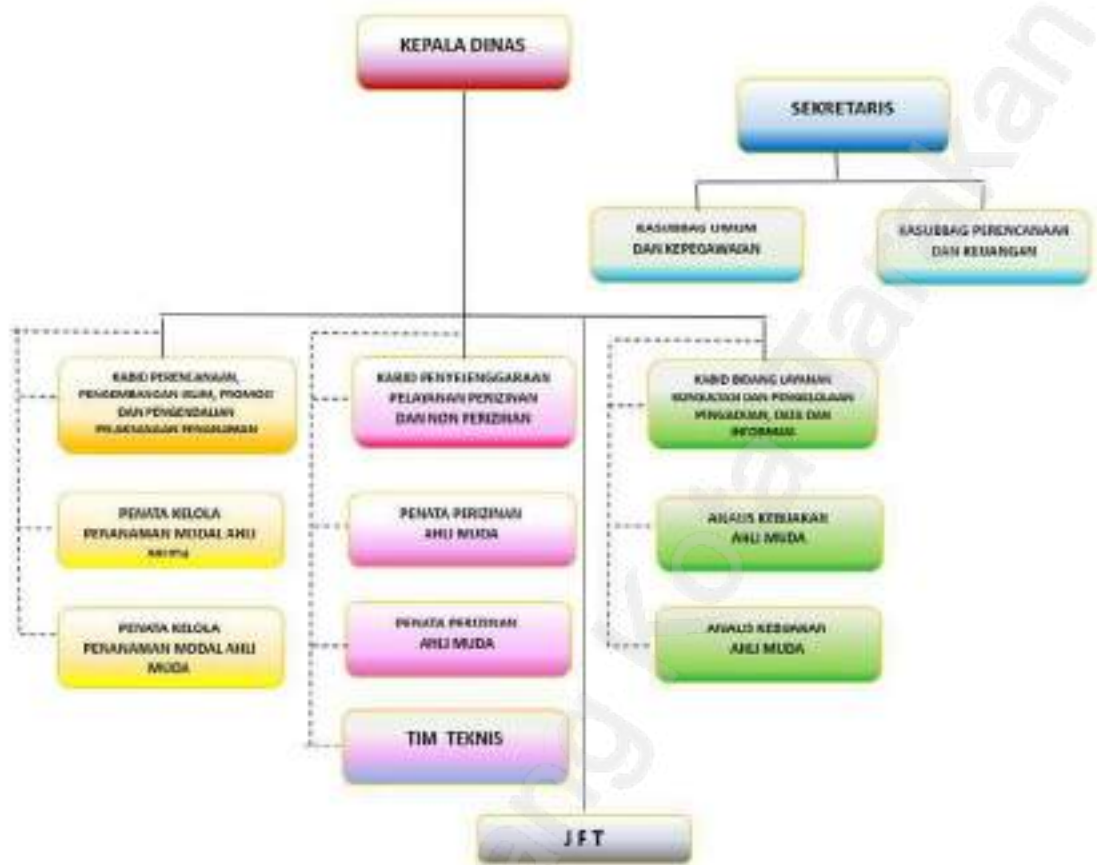
Struktur Organisasi DPMPTSP

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Nomor 62 Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, membawahi:
4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, membawahi;
 - a. Penata Perizinan Ahli Muda
 - b. Tim Teknis
5. Bidang Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan, Data dan Sistem Informasi, terdiri atas

- a. Analisis Kebijakan Ahli Muda
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Tarakan



Gambar 2.1

2.1.2 Sumber Daya DPMPTSP Kota Tarakan
Sumber Daya Manusia

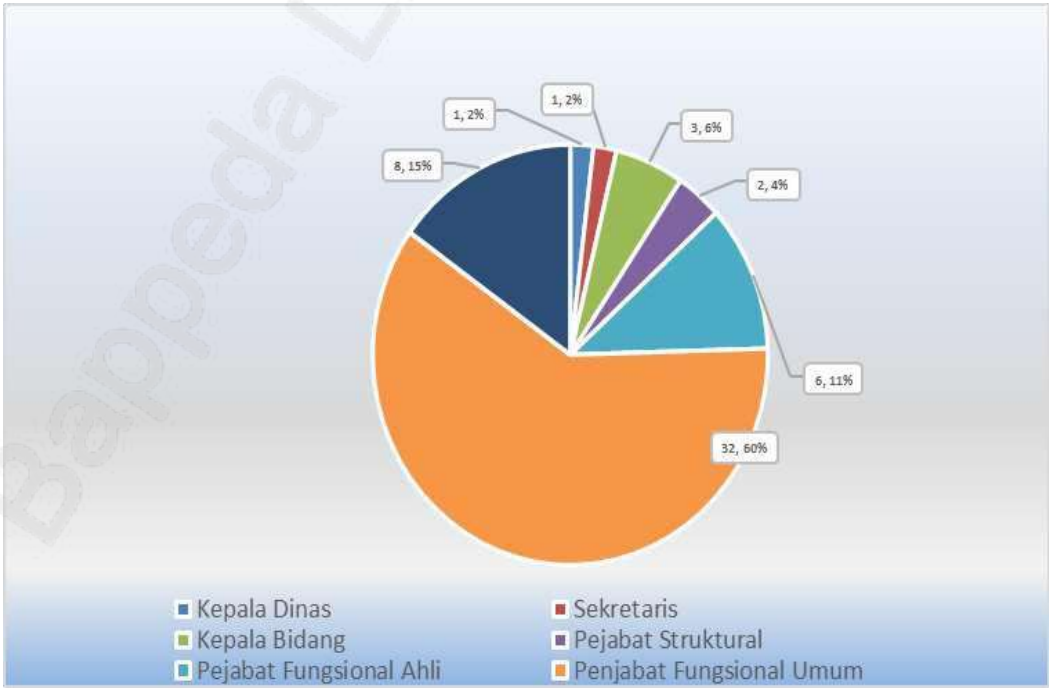
Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi. Jalannya roda suatu organisasi sangat tergantung pada kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan memiliki sumber daya manusia sampai dengan Bulan juli 2025 terdapat 41 Pegawai Negeri Sipil dan 12 tenaga kontrak dengan keadaan pegawai seperti tergambar dalam Tabel di bawah ini :

Tabel 2.1

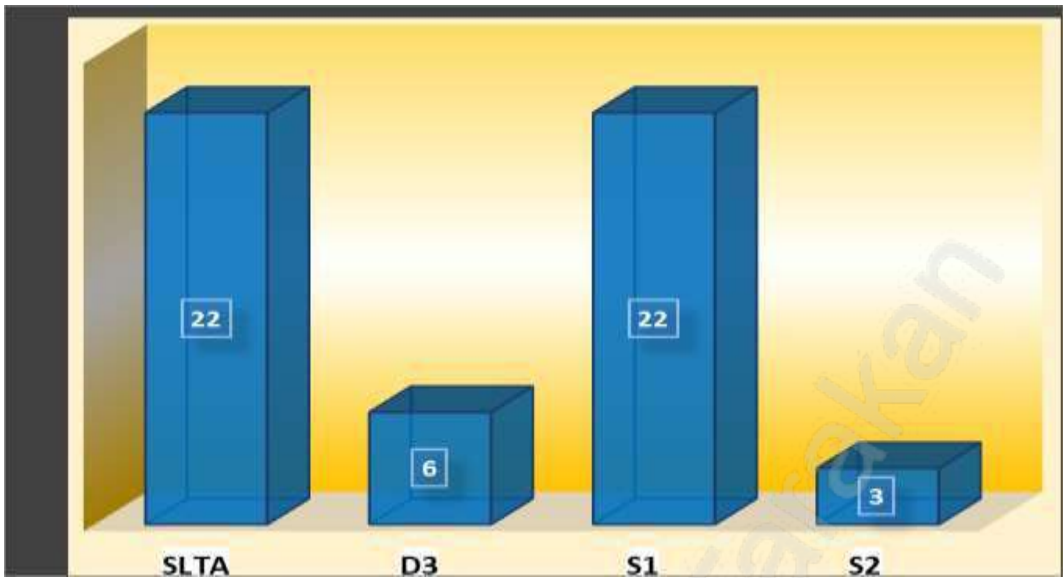
NO	BAGIAN/BIDANG	JUMLAH ASN/NON ASN	L	P	TINGKAT PENDIDIKAN							
					SD	SLTP	SLTA	D-III	D-IV	S1	S2	S3
1	KEPALA DINAS	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
2	SEKRETARIAT	8	5	3	-	-	1	2	-	4	1	-
3	BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKUM, PROMOSI DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	7	2	5	-	-	-	-	-	6	1	-
4	BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN	17	9	8	-	-	7	3	-	7	-	-
5	BIDANG LAYANAN KONSULTASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN, DATA DAN SISTEM INFORMASI	8	6	2	-	-	2	1	-	4	1	-
6	PENGADMINISTRASI UMUM (TENAGA KONTRAK)	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
6	PENIAGA KANTOR (TENAGA KONTRAK)	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
7	PENTUGAS KEBERSIHAN (TENAGA KONTRAK)	7	3	4	-	-	7	-	-	-	-	-
8	PENIAGA MALAM (TENAGA KONTRAK)	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
9	PETUGAS TAMAN (TENAGA KONTRAK)	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
TOTAL		53	31	22	-	-	22	6	-	22	3	-

Sumber data : Sub bagian Umum dan Kepegawaian 2024

Komposisi Sumber Daya Manusia DPMPTSP menurut Jabatannya meliputi 1 (satu) orang Pimpinan Tinggi Pratama yaitu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 3 (tiga) orang Pejabat Administrator yaitu Kepala Bidang Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi Dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan serta Kepala Bidang Bidang Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan, Data dan Sistem Informasi, Kasubag Umum dan Kepegawaian serta Kasubag Perencanaan dan Keuangan, 6 (enam) orang Pejabat Fungsional Tertentu (JFT) hasil Penyetaraan atau disebut juga Sub Koordinator dan 32 (tiga puluh dua) orang Pejabat Fungsional Umum dengan formasi seperti pada gambar berikut ini :



Potensi sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 1.3
Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jika melihat grafik di atas maka dapat disimpulkan bahwa potensi sumber daya manusia pada DPMPTSP cukuplah besar untuk membantu meningkatkan kinerja organisasi dan mendukung pencapaian tujuan, mengingat pegawai dengan tingkat pendidikan pasca sarjana (S2) berjumlah 3 orang atau 5 % pada DPMPTSP, strata satu (S1) berjumlah 22 orang atau sebesar 45% serta 6 Pegawai yang memiliki tingkat pendidikan D3 atau 11 % dan SLTA 22 orang atau 42 %, dari total pegawai pada DPMPTSP Kota Tarakan.

Aset/Modal

Aset/modal dan unit usaha yang masih operasional pada DPMPTSP Kota Tarakan sebagai berikut :

Daftar Inventarisasi Aset DPMPTSP Tahun 2024

NO	ASET	NILAI ASET
1	Peralatan dan Mesin	3,563,714,378,00
2	Aset tetap lainnya	183,035,000,00
3	Aset tidak berwujud	521.100.000,00
4	Aset lain-lain	522,200,000,00

Daftar inventarisasi Aset DPMPTSP Kota Tarakan tercatat per Oktober 2024 yang terdiri dari aset peralatan dan mesin, aset tetap lainnya dan aset lain-lain dapat dilihat sebagai berikut

DAFTAR ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	DPMPTSP KOTA TARAKAN	221	3,563,714,378.00
	Alat-alat Angkutan	17	1,425,108,300.00
	- Sedan	1	212,000,000.00
	- Station Wagon	4	839,504,000.00
	- Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	1	192,400,000.00
	- Sepeda Motor	11	181,204,300.00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	187	2,061,106,356.00
	- Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1	3,290,000.00
	- Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	1	4,210,000.00
	- Mesin Calculator	1	1,977,594.00
	- Lemari Besi	1	198,500,000.00
	- Rak Besi/Metal	4	28,000,000.00
	- Filling Besi/Metal	8	15,480,000.00
	- Band Kas	1	9,000,000.00
	- Rotary Filling	5	262,735,000.00
	- Lemari kayu	2	35,420,000.00
	- Papan Visuil	1	28,000,000.00
	- Alat Penghancur Kertas	2	2,900,000.00
	- White Board	1	2,000,000.00
	- Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1	7,898,861.00
	- Lemari Kayu	2	45,150,000.00
	- Rak Kayu	1	2,200,000.00
	- Meja Rapat	2	9,900,000.00
	- Meja Tulis	14	94,100,000.00
	- Meja Resepion	1	11,000,000.00
	- Meja Tambahan	1	1,000,000.00
	- Kursi Rapat	13	14,300,000.00
	- Kursi Tamu	1	5,500,000.00
	- Bangku Tunggu	4	16,240,000.00
	- Locker Katun	5	11,000,000.00
	- Meja Biro	6	30,430,000.00
	- Sofa	1	6,820,000.00
	- Moubiler Lainnya	1	3,750,000.00
	- Mesin Penghisap Debu	1	1,800,000.00
	- Lemari Es	1	3,197,000.00
	- AC Unit	10	54,700,000.00
	- Televisi	3	48,725,000.00
	- Amplifiler	1	5,400,000.00
	- Loudspeaker	5	11,196,000.00
	- Compact Disc	1	1,368,000.00
	- Unit Power Supply	1	18,000,000.00
	- Tustel	1	8,000,000.00
	- Dispenser	1	2,850,000.00
	- Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	2,000,000.00
	- Pompa Air	1	4,500,000.00
	- Alat Pemadam Portable	4	6,380,000.00

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
DAFTAR ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN			
	- Internet	1	26,780,000.00
	- P.C Unit	19	194,627,900.00
	- Lap Top	3	28,470,001.00
	- Note Book	10	113,824,000.00
	- Palm Top	1	10,000,000.00
	- Printer	1	2,650,000.00
	- Scanner	1	49,800,000.00
	- Printer	15	40,912,000.00
	- External	1	1,440,000.00
	- Server	1	48,400,000.00
	- Modem	1	1,980,000.00
	- Peralatan Jaringan Lain-lain	5	474,200,000.00
	- Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	6,000,000.00
	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1	11,440,000.00
	- Meja Rapat Pejabat Lain-lain	1	2,500,000.00
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4	8,065,000.00
	- Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	7	12,100,000.00
	- Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III	1	4,000,000.00
	- Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1	5,000,000.00
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	5	58,385,000.00
	- Camera + Attachment	1	12,000,000.00
	- Proyektor + Attachment	1	19,000,000.00
	- Microphone/Wireless Mic	1	5,300,000.00
	- Telephone (PABX)	1	19,635,000.00
	- Facsimile	1	2,450,000.00
	Alat Laboratorium	12	19,114,722.00
	- Meja Kerja	3	5,940,000.00
	- Vertical Bandsaw	9	13,174,722.00
TOTAL		221	3,563,714,378.00

DAFTAR ASET TETAP LAINNYA

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	DPMPTSP Buku dan Perpustakaan	3	183,035,000.00
	- Ilmu Pengetahuan umum	3	183,035,000.00
	- Buku Umum Lain-lain	1	5.000.000,00
		2	178.035.000,00
TOTAL		3	183,035,000.00

DAFTAR ASET LAIN- LAIN

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	DPMPTSP Alat Kantor dan Rumah Tangga	9	522,200,000.00
	- Kursi Rapat	1	1,100,000.00
	Aset Tidak Berwujud	1	1,100,000.00
	- Perangkat Lunak Sistem Operasi	8	521,100,000.00
		8	521,100,000.00
TOTAL		9	522,200,000.00

2.1.3 Kinerja Pelayanan DPMPTSP

Selama periode 2020–2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tarakan menunjukkan konsistensi yang tinggi dalam menjaga kualitas layanan publik. Penyelenggaraan layanan

perizinan maupun layanan penunjang perangkat daerah dapat terlaksana secara tepat waktu dan sesuai standar yang ditetapkan. Hal ini menandakan semakin mapannya sistem pelayanan dan semakin kuatnya dukungan kelembagaan dalam mengawal tata kelola perizinan daerah.

Upaya peningkatan kualitas layanan didorong oleh hadirnya Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan bagi masyarakat. Implementasi pelayanan juga mengalami transformasi signifikan dengan penerapan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2021. Melalui sistem perizinan berbasis risiko ini, pelaku usaha memperoleh kepastian hukum sekaligus kemudahan dalam memulai dan menjalankan kegiatan usaha. Selain OSS-RBA yang terintegrasi dengan sistem pusat, DPMPTSP Kota Tarakan juga mengembangkan aplikasi lokal SIMPELKAN (Sistem Perizinan Elektronik Tarakan) untuk memperkuat pelayanan perizinan dan nonperizinan secara lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kinerja penanaman modal pada periode ini menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Beberapa tahun mencatat lonjakan besar capaian investasi, mencerminkan daya tarik Tarakan di mata investor nasional maupun asing. Meski terdapat tahun-tahun dengan penurunan tajam akibat kondisi global dan regional, secara akumulatif investasi yang masuk tetap menunjukkan tren meningkat, didukung oleh kontribusi investasi berskala nasional (PMDN dan PMA). Jumlah investor baru yang terus bertambah menjadi indikator positif iklim usaha yang semakin kondusif, sekaligus berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja, terutama ketika proyek-proyek strategis mulai berjalan.

Kualitas pelayanan publik juga tercermin dari nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang konsisten berada pada kategori baik hingga sangat baik. Hal ini menunjukkan masyarakat dan pelaku usaha menilai positif atas kinerja pelayanan yang diberikan. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung, antara lain meningkatnya kinerja ASN DPMPTSP dalam memberikan layanan, kemudahan proses perizinan berbasis OSS-RBA, serta peningkatan kepatuhan pelaporan LKPM oleh pelaku usaha berkat pembinaan dan pengawasan yang intensif.

Selain itu, adanya percepatan realisasi investasi berskala besar, termasuk investasi Penanaman Modal Asing di bidang industri kertas, turut menjadi pendorong utama capaian kinerja di tahun 2024. Dari sisi kelembagaan, DPMPTSP juga berhasil mengelola enam program dan dua belas kegiatan prioritas dengan realisasi anggaran yang efisien, sebagian besar mencapai tingkat serapan di atas 80–95 persen. Hal ini menegaskan kemampuan DPMPTSP dalam mengelola program pembangunan dan mendayagunakan anggaran secara efektif untuk menghasilkan output yang nyata.

Secara keseluruhan, periode 2020–2024 dapat dipandang sebagai fase konsolidasi layanan perizinan berbasis risiko, penguatan kepercayaan investor, serta perbaikan kualitas tata kelola pelayanan publik. Meski masih menghadapi tantangan, seperti fluktuasi realisasi investasi dan penurunan daya serap tenaga kerja akibat PHK maupun otomatisasi teknologi, arah kebijakan yang ditempuh telah memberi dasar yang kuat bagi peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan daya saing ekonomi Kota Tarakan di masa depan. Pencapaian kinerja pelayanan DPMPTSP dapat dilihat melalui Tabel 2.2 dan Tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Tarakan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada tahun ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase penyelenggaraan layanan DPMPTSP		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%
2	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Tepat waktu		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%
3	Persentase peningkatan investasi Kota Tarakan		130,96%	13,17%	14,62%	15,44%		130,96%	785%	143%	5,91%		100%	5959%	978%	38%
4	Jumlah nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)		Rp 1,575 T	Rp 1,825 T	Rp 2,075 T	Rp 2,275 T		Rp 2,599 T	Rp 2,851 T	Rp 3,349 T	Rp 13,170 T		165%	156%	161%	579%
5	Jumlah Investor bersekala Nasional (PMDN/PMA)		4500	5900	6300	6400		5808	6743	11734	16778		129%	114%	186%	262%
6	Nilai IKM		86/B	86/B	87/B	88/B		88/B	89,63/A	90,42/A	91,18/A		102%	104%	104%	104%
7	Rasio daya serap tenaga kerja		5 T. Kerja	5 T. Kerja	5 T. Kerja	5 T. Kerja		3 T. Kerja	3 T. Kerja	12 T. Kerja	2 T. Kerja		60%	60%	240%	40%
8	Persentase peningkatan investasi Kota Tarakan		130,96%	13,17%	14,62%	15,44%		130,96%	785%	143%	5,91%		100%	5959%	978%	38%

Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DPMPTSP

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota		5.849.805.859,00	5.973.284.806,00	5.983.988.837,00			5.492.511.648,00	5.520.252.110,00	5.764.641.937,00			93,89%	92,42%	96,33%		1,15%	2,47%
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		50.000.000,00	-	24.987.400,00			49.625.000,00	-	18.686.621,00			99,25%		74,78%		-75,01%	-81,17%
Program Promosi Penanaman Modal		19.988.508,00	13.755.200,00	-			18.942.450,00	12.660.000,00	-			94,77%	92,04%			-65,59%	-66,58%
Program Pelayanan Penanaman Modal		89.978.151,00	322.824.450,00	211.585.000,00			70.368.900,00	274.568.045,00	203.907.780,00			78,21%	85,05%	96,37%		112,16%	132,22%
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		381.370.626,00	393.394.000,00	371.701.000,00			83.630.991,00	206.430.777,00	285.776.880,00			21,93%	52,47%	76,88%		-1,18%	92,64%
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		-	33.296.200,00	17.250.000,00			-	30.346.500,00	14.218.000,00			0,00%	91,14%	82,42%		-48,19%	-53,15%

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan DPMPTSP Kota Tarakan

Kelompok Sasaran layanan DPMPTSP adalah seluruh Lapisan masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Pelayanan perizinan dan non perizinan DPMPTSP terbagi dua yaitu Pelayanan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan Berusaha.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan nomor 26 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kota Tarakan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan memfasilitasi Pelayanan sebagai berikut.

**PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEWENANGAN DPMPTSP
BERDASARKAN PERWALI NO. 26/2023**

No.	Perizinan dan Nonperizinan	Sektor/Bidang	Jumlah Izin/Non Izin
A. Perizinan Berusaha			
1.	Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha		7 izin
2.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		1053 izin
3.	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)		56 izin/non izin
Total Kewenangan Perizinan Berusaha			1117 izin/nonizin
B. Nonperizinan Berusaha			
1.	Perizinan	1. Pendidikan : 2 izin 2. Kesehatan : 33 izin 3. PUTR : 1 izin 4. LH : 4 izin 5. Perdagangan : 1 izin Total : 41 izin	
2.	Nonperizinan	1. Kesehatan : 1 non izin 2. PUTR : 2 non izin 3. LH : 6 non izin 4. Perhubungan : 2 non izin 5. Wasbang : 1 non izin Total : 12 non izin	
Total Kewenangan Nonperizinan Berusaha			53 izin/non izin
TOTAL KEWENANGAN KESELURUHAN			1170 izin/nonizin

2.1.5 Mitra DPMPTSP Kota Tarakan dalam memberikan layanan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, DPMPTSP Kota Tarakan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak. Pada lingkup pemerintahan, kemitraan dijalin dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, serta perangkat daerah lingkup Kota Tarakan. Secara khusus, OPD teknis sektoral hingga kecamatan, maupun kelurahan berperan penting dalam proses teknis perizinan. Peran tersebut antara lain berupa pemberian rekomendasi, verifikasi persyaratan teknis, serta pengawasan lapangan yang menjadi dasar penerbitan perizinan oleh DPMPTSP. Dengan demikian, koordinasi yang erat dengan OPD teknis menjadi kunci agar layanan perizinan dapat berjalan tepat waktu, sesuai ketentuan, dan menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Di sisi lain, dunia usaha menjadi mitra utama sekaligus penerima manfaat layanan DPMPTSP. Investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), UMKM, asosiasi pengusaha, serta BUMD berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Kemitraan ini diwujudkan dalam bentuk fasilitasi perizinan, konsultasi investasi,

pembinaan, promosi potensi daerah, hingga pengendalian realisasi penanaman modal.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis DPMPTSP Kota Tarakan

Sebelum merumuskan tujuan dan sasaran, DPMPTSP Kota Tarakan perlu melakukan analisis permasalahan dan isu strategis yang relevan. Analisis ini penting agar langkah yang ditempuh selaras dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP serta menjawab harapan pemangku kepentingan. Permasalahan dan isu strategis tersebut dapat bersumber dari faktor internal maupun eksternal.

Pemetaan mengenai masalah pokok, masalah turunan, dan akar masalah ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum tercapainya penyerapan tenaga kerja melalui peningkatan investasi	Belum optimalnya realisasi investasi investasi	Belum optimalnya fasilitasi dan insentif
			Belum terpenuhinya peta potensi
		Belum optimalnya kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan	Belum optimalnya promosi
			Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan penanaman modal
			Belum optimlanya pengelolaan data dan informasi
			Belum optimalnya pelayanan perizinan dan non perizinan
		Belum optimalnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP	Belum optimalnya penanganan aduan penanaman modal
			Belum optimalnya penguatan internal akuntabilitas kinerja

Selain pemetaan masalah internal, DPMPTSP Kota Tarakan juga perlu mengantisipasi isu-isu strategis yang berkembang dari dinamika eksternal. Isu tersebut muncul dari level global, nasional, maupun regional. Hasil identifikasi isu strategis tersebut disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.5
Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Kota Tarakan merupakan pintu gerbang atau outlet strategis ke wilayah asia pasifik dan eropa, karena berada dijalur pelayaran nasional dan internasional alki II;	Belum terpenuhinya penyerapan tenaga kerja melalui investasi	Peningkatan kualitas tenaga kerja lokal guna mendukung iklim investasi dan hilirisasi industri;	Persaingan global dalam menarik investasi asing langsung (FDI) menuntut daerah memiliki iklim investasi yang kompetitif dan tenaga kerja yang terampil.	Agenda hilirisasi industri nasional yang mendorong daerah berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.	Posisi strategis Tarakan sebagai pintu gerbang perbatasan RI– Malaysia, sekaligus hub logistik regional.	Peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui investasi
Banyak masyarakat dan institusi yang sudah menggunakan teknologi informatika untuk pengembangan usaha		Belum optimalnya pertumbuhan sektor industri yang berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan ekonomi daerah;	Perubahan rantai pasok global dan transisi energi mendorong investasi pada industri ramah lingkungan dan berbasis teknologi.	Kebijakan pemerintah pusat terkait ease of doing business, percepatan investasi, dan implementasi OSS-RBA.	Masih adanya kesenjangan kapasitas tenaga kerja lokal dibanding kebutuhan industri, sehingga banyak perusahaan mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah.	

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALA HAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Proses penerbitan perizinan Berusaha secara digital dan terintegrasi				Program prioritas nasional dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran terbuka melalui investasi produktif.	Percepatan pembangunan kawasan industri dan proyek strategis nasional di Kaltara (misalnya Kawasan Industri dan Energi Tanah Kuning- Mangkupadi) yang berdampak langsung pada Tarakan.	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan isu strategis pada Bab II, tantangan utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tarakan terletak pada belum optimalnya penyerapan tenaga kerja melalui investasi, fluktuasi realisasi penanaman modal, kualitas pelayanan perizinan yang masih perlu ditingkatkan, serta akuntabilitas kinerja kelembagaan yang harus diperkuat. Kondisi ini menuntut arah kebijakan yang lebih terfokus untuk memperbaiki tata kelola investasi, memperluas peluang usaha, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat maupun pelaku usaha terhadap layanan pemerintah.

Sejalan dengan visi pembangunan Kota Tarakan sebagai kota cerdas yang bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, perikanan kelautan, dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan maju menuju masyarakat sejahtera, DPMPTSP menetapkan tujuan utama pada periode 2025–2029 yaitu tercapainya penyerapan tenaga kerja melalui peningkatan investasi. Tujuan ini berkontribusi langsung pada sasaran pembangunan RPJMD yaitu menurunnya pengangguran dan meningkatnya kualitas digitalisasi pelayanan publik. Dengan fokus pada investasi, DPMPTSP diarahkan untuk memperkuat sektor unggulan daerah, mendorong pengembangan kawasan industri, serta menyederhanakan proses perizinan sebagai dukungan terhadap iklim usaha yang kondusif.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, DPMPTSP menetapkan tiga sasaran strategis yang terukur, yakni: meningkatnya realisasi investasi baik PMDN maupun PMA; meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan melalui digitalisasi dan simplifikasi layanan; serta meningkatnya akuntabilitas kinerja kelembagaan melalui transparansi dan penguatan tata kelola. Dengan pencapaian sasaran ini, DPMPTSP diharapkan mampu berperan sebagai penggerak utama investasi sekaligus penguat ekosistem pembangunan ekonomi yang inklusif, yang pada akhirnya mempercepat penurunan pengangguran dan mendukung terwujudnya visi pembangunan Kota Tarakan. Tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tarakan periode 2025–2029 dirumuskan secara sistematis dan ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan PTSP										
Menurunnya pengangguran	Tercapainya penyerapan tenaga kerja melalui peningkatan investasi		Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)	5.91	0.01	1	1,09	1.20	1.25	1.50
			Rasio daya serap tenaga kerja (Nilai)	2	3	3	3	3	4	4
		Meningkatnya realisasi investasi investasi	Nilai Realisasi Penanaman Modal (triliun rupiah)	13.171	0,900	0,909	0,919	0,930	0,942	0,956
		Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan	Indeks kepuasan masyarakat (Indeks)	90.45	90.50	90.60	90.70	90.80	90.90	91
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP	Nilai SAKIP (Nilai)	88.01	88.15	88.20	88.25	88.30	88.35	88.40

3.2. Strategi

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan DPMPTSP sebagaimana telah dirumuskan, diperlukan strategi yang terarah, sistematis, dan berkesinambungan. Strategi ini disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi periode sebelumnya, isu-isu strategis yang dihadapi, serta tuntutan peningkatan investasi dan pelayanan publik di masa mendatang. Arah strategi pembangunan DPMPTSP berfokus pada penguatan kelembagaan, pemantapan standar layanan, peningkatan promosi dan kinerja investasi daerah, percepatan realisasi investasi, hingga pada akhirnya tercapainya penyerapan tenaga kerja melalui peningkatan investasi.

Strategi tersebut tidak hanya menekankan pada peningkatan nilai investasi semata, tetapi juga memastikan terbangunnya sistem pelayanan perizinan yang adaptif, akuntabel, dan berbasis digital. Dengan demikian, iklim investasi yang kondusif dapat diwujudkan sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap penciptaan lapangan kerja dan menurunnya pengangguran di Kota Tarakan.

Tahapan implementasi strategi pembangunan DPMPTSP Kota Tarakan periode 2025–2029 dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Penahapan Renstra

TAHAP 1	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
Penguatan kelembagaan dan sistem layanan perizinan	Pemantapan standar layanan	Peningkatan kinerja investasi dan promosi daerah	Percepatan realisasi investasi	Tercapainya penyerapan tenaga kerja melalui peningkatan investasi

3.3. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang disusun secara sistematis untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan DPMPTSP Kota Tarakan pada periode 2025–2029. Arah kebijakan ini memadukan ketentuan normatif yang bersumber dari NSPK, kebijakan nasional, serta arah kebijakan RPJMD Kota Tarakan, dengan kebutuhan teknis operasional di tingkat perangkat daerah. Dengan demikian, arah kebijakan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif sesuai dengan konteks lokal dan tantangan pembangunan daerah.

Secara garis besar, arah kebijakan DPMPTSP difokuskan pada upaya memperkuat pelayanan perizinan dan nonperizinan yang tepat waktu, meningkatkan fasilitasi dan insentif bagi pelaku usaha, memperkuat fungsi pengendalian dan pengawasan penanaman modal, serta mendorong promosi investasi daerah. Selain itu, arah kebijakan juga diarahkan pada penyediaan data dan peta potensi investasi yang lebih komprehensif, serta pendampingan antara perusahaan besar dengan UMKM untuk menciptakan ekosistem usaha yang inklusif.

Rangkaian arah kebijakan ini menjadi pedoman kerja yang berkesinambungan, mulai dari tahap perencanaan, implementasi, hingga evaluasi, agar seluruh program dan kegiatan DPMPTSP dapat mendukung pencapaian tujuan utama yaitu peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui investasi. Secara rinci, arah kebijakan DPMPTSP Kota Tarakan periode 2025–2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Arah Kebijakan

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(1)	(3)	(4)	(5)
1	PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kemudahan Berusaha dan Peningkatan Iklim Usaha	Peningkatan pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan yang tepat waktu	
2	Perka BKPM No. 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Penyuluhan dan Promosi untuk Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah	Peningkatan pelayanan untuk disabilitas dan rentan	
3	Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal		Peningkatan layanan pengaduan pelaku usaha dan masyarakat	
4	Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		Peningkatan fasilitasi/insentif daerah pelaku usaha	
5	PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah		Pendampingan fasilitasi antara Perusahaan besar dan UMKM	
6			Peningkatan pengendalian dan pengawasan penanaman modal	
7			Peningkatan promosi potensi investasi daerah untuk menarik minat investor	
8			Penyediaan peta potensi	
9			Pengelolaan data dan informasi	

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN DPMPTSP

4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tarakan merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, sasaran, outcome, dan output yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Seluruhnya disusun sesuai dengan nomenklatur resmi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri serta hasil pemutakhiran kodifikasi dan klasifikasi pembangunan daerah. Dengan pendekatan ini, perencanaan operasional DPMPTSP disusun secara lebih sistematis sehingga mencerminkan keterhubungan antara arah kebijakan dengan implementasi program secara terukur.

Untuk menjaga konsistensi pencapaian target, perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan tidak hanya dirancang untuk periode 2025–2029, tetapi juga diproyeksikan hingga tahun 2030 sebagai bagian dari kesinambungan perencanaan. Penyusunan ini menjadi pijakan penting dalam rencana kerja tahunan DPMPTSP, sehingga mampu memastikan kesinambungan arah pembangunan investasi dan pelayanan perizinan. Rangkaian keterkaitan antara tujuan, sasaran, outcome, dan output dengan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan perangkat daerah dituangkan dalam Tabel 4.1.

Lebih lanjut, untuk mendukung kejelasan pengelolaan sumber daya, dokumen ini juga dilengkapi dengan kerangka pendanaan indikatif. Tabel 4.2 menyajikan rincian nomenklatur program, indikator kinerja, target tahunan, serta pagu indikatif yang menjadi dasar bagi pengelolaan pembiayaan secara berkesinambungan dan akuntabel.

Tabel 4.1.
Perumusan Program/kegiatan/Subkegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
- Menurunnya pengangguran - Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Tercapainya penyerapan tenaga kerja melalui peningkatan investasi				Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	
					Rasio daya serap tenaga kerja	
		Meningkatnya realisasi investasi investasi			Nilai Realisasi Penanaman Modal	
			Terciptanya pengembangan iklim penanaman modal yang kondusif		Realisasi Total terhadap Target Investasi	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
				Terlaksananya fasilitasi dan insentif	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
					Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	2.18.02.2.01.0003 - Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
					Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	2.18.02.2.01.0004 - Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
				Tersedianya peta potensi	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
					Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
					Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	2.18.02.2.02.0003 - Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)
					Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal		Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
				Terlaksananya promosi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota
					Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal		Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
				Terlaksananya pengendalian dan pengawasan penanaman modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha
					Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal		Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
				Terkelolanya data dan informasi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
					yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	
					Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
		Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan			Indeks kepuasan masyarakat	
			Meningkatnya pelayanan perizinan berusaha		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
				Terlaksananya penerbitan perizinan dan non perizinan	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
					Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
					Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko
			Tertanganinya aduan penanaman modal		Persentase aduan yang difasilitasi	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
				Tersedianya layanan konsultasi perizinan dan pengaduan yang responsif	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
					Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP			Nilai SAKIP	
			Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja		Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti	2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Tersedianya dokumen Perencanaan,	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
				Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.18.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.18.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.18.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
			Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Tersedianya layanan administrasi kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.18.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
				Tersedianya layanan administrasi umum	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.18.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.18.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
				Terkelolanya data Barang Milik Daerah dalam aplikasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.18.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Tersedianya layanan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.18.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.18.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2.18.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.18.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.18.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tabel 4.2.
Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				8.074.048.955,00		8.110.406.462,00		8.188.506.462,00		8.198.856.462,00		8.273.856.462,00		
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.811.573.798,00		6.807.931.305,00		6.866.031.305,00		6.876.381.305,00		6.946.381.305,00		
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	0	71	1.158.523.056,00	72	1.154.880.563,00	73	1.212.980.563,00	74	1.223.330.563,00	75	1.293.330.563,00	2.18.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				25.200.000,00		0,00		25.800.000,00		25.800.000,00		25.800.000,00		
Tersedianya layanan administrasi kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	42	25.200.000,00		0,00	43	25.800.000,00	43	25.800.000,00	43	25.800.000,00		
2.18.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				25.200.000,00		0,00		25.800.000,00		25.800.000,00		25.800.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	42	25.200.000,00		0,00	43	25.800.000,00	43	25.800.000,00	43	25.800.000,00		
2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				276.950.520,00		279.300.520,00		315.800.520,00		325.800.520,00		330.800.520,00		
Tersedianya layanan administrasi umum	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	276.950.520,00	1	279.300.520,00	1	315.800.520,00	1	325.800.520,00	1	330.800.520,00		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7	9		9		10		10					
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	2		2		2		2		2			
2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00		
2.18.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	2	4.000.000,00	2	4.000.000,00	2	4.000.000,00	2	4.000.000,00	2	4.000.000,00		
2.18.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				200.000.000,00		200.000.000,00		225.000.000,00		230.000.000,00		235.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	225.000.000,00	3	230.000.000,00	3	235.000.000,00		
2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.950.520,00		7.800.520,00		8.800.520,00		8.800.520,00		8.800.520,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	1	5.950.520,00	1	7.800.520,00	1	8.800.520,00	1	8.800.520,00	1	8.800.520,00		
2.18.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				5.000.000,00		5.500.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	1	5.000.000,00	1	5.500.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00		
2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7	9	50.000.000,00	9	50.000.000,00	10	60.000.000,00	10	65.000.000,00		65.000.000,00		
2.18.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				235.680.900,00		254.642.700,00		232.680.900,00		233.030.900,00		298.030.900,00		
Terkelolanya data Barang Milik Daerah dalam aplikasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	30	0	235.680.900,00		254.642.700,00	30	232.680.900,00		233.030.900,00	30	298.030.900,00		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0							2					
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	34	14		14		14		14		14			
2.18.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		0,00		58.030.900,00		0,00		
2.18.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		0,00		57.680.900,00		0,00		48.030.900,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	30	0	0,00		0,00	30	57.680.900,00		0,00	30	48.030.900,00		
2.18.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				235.680.900,00		254.642.700,00		175.000.000,00		175.000.000,00		250.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	34	14	235.680.900,00	14	254.642.700,00	14	175.000.000,00	14	175.000.000,00	14	250.000.000,00		
2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				433.500.000,00		433.500.000,00		433.500.000,00		433.500.000,00		433.500.000,00		
Tersedianya layanan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	433.500.000,00	12	433.500.000,00	12	433.500.000,00	12	433.500.000,00	12	433.500.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	400.000.000,00	12	400.000.000,00	12	400.000.000,00	12	400.000.000,00	12	400.000.000,00		
2.18.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32.000.000,00		32.000.000,00		32.000.000,00		32.000.000,00		32.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	32.000.000,00	12	32.000.000,00	12	32.000.000,00	12	32.000.000,00	12	32.000.000,00		
2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				187.191.636,00		187.437.343,00		205.199.143,00		205.199.143,00		205.199.143,00		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	187.191.636,00		187.437.343,00		205.199.143,00		205.199.143,00		205.199.143,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	12	13		13		13		13		13			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	12		12		12		12		12			
2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				18.214.866,00		19.264.866,00		19.264.866,00		19.264.866,00		19.264.866,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	12	13	18.214.866,00	13	19.264.866,00	13	19.264.866,00	13	19.264.866,00	13	19.264.866,00		
2.18.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				93.976.770,00		95.934.277,00		95.934.277,00		95.934.277,00		95.934.277,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6	6	93.976.770,00	6	95.934.277,00	6	95.934.277,00	6	95.934.277,00	6	95.934.277,00		
2.18.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				10.000.000,00		12.238.200,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	12	10.000.000,00	12	12.238.200,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00		
2.18.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				16.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	16.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2.18.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				49.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	59	40	49.000.000,00	40	60.000.000,00	40	60.000.000,00	40	60.000.000,00	40	60.000.000,00		
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	5.653.050.742,00	100	5.653.050.742,00	100	5.653.050.742,00	100	5.653.050.742,00	100	5.653.050.742,00		
2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	3	5.000.000,00		
2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	3	5.000.000,00		
2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.648.050.742,00		5.648.050.742,00		5.648.050.742,00		5.648.050.742,00		5.648.050.742,00		
Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	5.648.050.742,00	12	5.648.050.742,00	12	5.648.050.742,00	12	5.648.050.742,00	12	5.648.050.742,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.457.860.742,00		5.457.860.742,00		5.457.860.742,00		5.457.860.742,00		5.457.860.742,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	39	42	5.457.860.742,00	42	5.457.860.742,00	42	5.457.860.742,00	42	5.457.860.742,00	42	5.457.860.742,00		
2.18.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				160.190.000,00		160.190.000,00		160.190.000,00		160.190.000,00		160.190.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	160.190.000,00	12	160.190.000,00	12	160.190.000,00	12	160.190.000,00	12	160.190.000,00		
2.18.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
2.18.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	4	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00		
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				422.475.157,00		220.000.000,00		270.000.000,00		285.000.000,00		285.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terciptanya pengembangan iklim penanaman modal yang kondusif	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	108,33	15,15	422.475.157,00	15,32	220.000.000,00	15,50	270.000.000,00	15,69	285.000.000,00	15,93	285.000.000,00	2.18.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				252.475.157,00		90.000.000,00		100.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		
Terlaksananya fasilitasi dan insentif	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	0	1	252.475.157,00	1	90.000.000,00	1	100.000.000,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00		
	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	0	1											
	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	0	1	182.475.157,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
2.18.02.2.01.0003 - Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota				30.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	0	1	30.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00		
2.18.02.2.01.0004 - Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko				40.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Ditetapkannya rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)	0	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				170.000.000,00		130.000.000,00		170.000.000,00		195.000.000,00		195.000.000,00		
Tersedianya peta potensi	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	0	1	170.000.000,00	1	130.000.000,00	1	170.000.000,00	1	195.000.000,00	1	195.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00		
2.18.02.2.02.0003 - Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)				35.000.000,00		40.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya data potensi investasi daerah yang termutakhirkan	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	0	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00		
2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				35.000.000,00		40.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	35.000.000,00	1	40.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00	1	60.000.000,00		
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				190.000.000,00		266.237.579,00		265.000.000,00		265.000.000,00		265.000.000,00		
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	1,16	1,57	190.000.000,00	1,74	266.237.579,00	1,78	265.000.000,00	1,79	265.000.000,00	1,83	265.000.000,00	2.18.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				190.000.000,00		266.237.579,00		265.000.000,00		265.000.000,00		265.000.000,00		
	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	0	2		3		3		3		3			
2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	150.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota				40.000.000,00		66.237.579,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	0	2	40.000.000,00	3	66.237.579,00	3	65.000.000,00	3	65.000.000,00	3	65.000.000,00		
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				300.000.000,00		350.000.000,00		325.000.000,00		325.000.000,00		325.000.000,00		
Meningkatnya pelayanan perizinan berusaha	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) (%)	100	100	230.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	2.18.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				300.000.000,00		350.000.000,00		325.000.000,00		325.000.000,00		325.000.000,00		
Terlaksananya penerbitan perizinan dan non perizinan	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	1.416	800	230.000.000,00	700	250.000.000,00	600	250.000.000,00	500	250.000.000,00	450	250.000.000,00		
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	3.785	10.000		11.000		11.500		12.000		12.000			
2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	3.785	10.000	100.000.000,00	11.000	150.000.000,00	11.500	150.000.000,00	12.000	150.000.000,00	12.000	150.000.000,00		
Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	1.416	800	130.000.000,00	700	100.000.000,00	600	100.000.000,00	500	100.000.000,00	450	100.000.000,00		
Tertanganinya aduan penanaman modal	Persentase aduan yang difasilitasi (%)	100	100	70.000.000,00	100	100.000.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00		
2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				300.000.000,00		350.000.000,00		325.000.000,00		325.000.000,00		325.000.000,00		
Tersedianya layanan konsultasi perizinan dan pengaduan yang responsif	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	0	200	70.000.000,00	200	100.000.000,00	200	75.000.000,00	200	75.000.000,00	200	75.000.000,00		
2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko				70.000.000,00		100.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	0	200	70.000.000,00	200	100.000.000,00	200	75.000.000,00	200	75.000.000,00	200	75.000.000,00		
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				270.000.000,00		386.237.578,00		382.475.157,00		367.475.157,00		372.475.157,00		
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	5,95	6,89	270.000.000,00	7,05	386.237.578,00	7,21	382.475.157,00	7,38	367.475.157,00	7,75	372.475.157,00	2.18.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				270.000.000,00		386.237.578,00		382.475.157,00		367.475.157,00		372.475.157,00		
Terlaksananya pengendalian dan pengawasan penanaman modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	50	50	270.000.000,00	50	386.237.578,00	50	382.475.157,00	50	367.475.157,00	50	372.475.157,00		
	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	285	300		300		300		300		300			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				40.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	15	10	40.000.000,00	10	65.000.000,00	10	65.000.000,00	10	65.000.000,00	10	65.000.000,00		
2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha				180.000.000,00		251.237.578,00		247.475.157,00		232.475.157,00		237.475.157,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	285	300	180.000.000,00	300	251.237.578,00	300	247.475.157,00	300	232.475.157,00	300	237.475.157,00		
2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal				50.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	50	50	50.000.000,00	50	70.000.000,00	50	70.000.000,00	50	70.000.000,00	50	70.000.000,00		
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	100	80.000.000,00	2.18.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Terkelolanya data dan informasi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	1	1	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00		
2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	1	1	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00		

Program Prioritas

Sasaran pembangunan RPJMD Kota Tarakan yang relevan dengan tugas dan fungsi DPMPTSP mencakup dua hal utama, yaitu menurunnya tingkat pengangguran melalui peningkatan investasi serta meningkatnya kualitas digitalisasi pelayanan publik. Kedua sasaran tersebut bersifat lintas sektor (crosscutting), namun memiliki keterkaitan erat dengan peran strategis DPMPTSP dalam mendorong penciptaan lapangan kerja dan penguatan tata kelola layanan perizinan. Untuk menjabarkan sasaran tersebut ke tingkat operasional, DPMPTSP menetapkan sejumlah subkegiatan prioritas. Penjabaran lebih lengkap mengenai subkegiatan prioritas tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3.
Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN
2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan PTSP			
1.	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Terciptanya pengembangan iklim penanaman modal yang kondusif	2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibi­dang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
			2.18.02.2.01.0001 - Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
			2.18.02.2.01.0003 - Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
			2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
			2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
			2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
2.	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
			2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
			2.18.03.2.01.0003 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota
3.	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Tertanganinya aduan penanaman modal	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di­bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
		Meningkatnya pelayanan perizinan berusaha	2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di­bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
			2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik
		Tertanganinya aduan penanaman modal	2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
		Meningkatnya pelayanan perizinan berusaha	2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko
4.	2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal	2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
			2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
			2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal

4.2. Kinerja Penyelenggaraan DPMPTSP
Indikator Kinerja Utama

Untuk mengukur capaian dari tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, DPMPTSP Kota Tarakan merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai tolok ukur keberhasilan.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan PTSP								
2.	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	5,91	0,01	1	1,09	1,2	1,25	1,5
3.	Rasio daya serap tenaga kerja	Nilai	2	3	3	3	3	4	4
4.	Nilai Realisasi Penanaman Modal	triliun rupiah	13,171	0,9	0,909	0,919	0,93	0,942	0,956
5.	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	90,45	90,5	90,6	90,7	90,8	90,9	91
6.	Nilai SAKIP	Nilai	88,01	88,15	88,2	88,25	88,3	88,35	88,4

Indikator Kinerja Kunci

Jika Indikator Kinerja Utama (IKU) berfungsi sebagai tolok ukur strategis untuk mengukur keberhasilan DPMPTSP Kota Tarakan dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, maka Indikator Kinerja Kunci (IKK) lebih menekankan pada penilaian capaian kinerja urusan pemerintahan sesuai kewenangan daerah. Adapun Indikator Kinerja Kunci urusan DPMPTSP Kota Tarakan pada tabel berikut :

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
2.	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Positif	%	5.91	0.01	1	1,09	1.20	1.25	1.50
3.	Realisasi Total terhadap Target Investasi	positif	Persentase	108.33	15	15.15	15.32	15.50	15.69	15.93

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana ditetapkan dalam dokumen ini berlaku mulai tahun 2025 hingga tahun 2030.

BAB V PENUTUP

Renstra DPMPTSP Kota Tarakan Tahun 2025–2029 disusun sebagai bentuk adaptasi strategis terhadap dinamika global, nasional, dan regional, dengan mempertimbangkan isu-isu strategis, peluang, serta tantangan pembangunan daerah. Penyusunan dokumen ini juga mengacu pada hasil evaluasi Renstra periode sebelumnya, sekaligus menampung masukan dari berbagai pemangku kepentingan melalui mekanisme top down maupun bottom up, sehingga menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah.

Dokumen ini menegaskan peran DPMPTSP sebagai motor penggerak peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta penyedia layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan berbasis digital. Seluruh strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirumuskan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kota Tarakan 2025–2029, khususnya dalam menurunkan pengangguran dan meningkatkan kualitas digitalisasi pelayanan publik.

Dengan adanya komitmen bersama antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, implementasi Renstra ini diharapkan mampu memperkuat iklim investasi, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pada akhirnya, pelaksanaan Renstra DPMPTSP 2025–2029 diharapkan berkontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tarakan sekaligus mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

17. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan Tahun 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Strategis menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah, di mana perencanaan strategis menjadi pedoman memberikan arah dalam melaksanakan program pembangunan, kegiatan dan aktifitas yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Perpustakaan merupakan salah satu sarana pembelajaran yang dapat menjadi sebuah kekuatan untuk mencerdaskan bangsa. Perpustakaan mempunyai peranan penting sebagai jembatan menuju penguasaan ilmu pengetahuan yang sekaligus menjadi tempat rekreasi. Oleh karena itu citra perpustakaan perlu dibangun agar dapat berkembang dengan baik.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 memberikan dasar hukum yang kuat terhadap pengembangan dan kemajuan perpustakaan di Indonesia. Perpustakaan adalah salah satu pembelajaran yang dapat menjadi sebuah kekuatan untuk mencerdaskan bangsa. Dalam penjelasan atas UU Nomor 43 Tahun 2007 disebutkan bahwa perpustakaan berfungsi untuk mendukung Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dengan U Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dokumen ini menyampaikan informasi tentang hal strategis apa saja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dokumen ini disusun dengan mempertimbangkan kecenderungan permasalahan yang timbul selama kurun waktu 2 tahun, kinerja pelayanan yang telah dicapai, dan mempertimbangkan kebijakan PERPUSNAS dan ANRI serta kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Kalimantan Utara selama 5 tahun mendatang dalam penyelenggaraan pelayanan perpustakaan dan kearsipan.

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan.

Demikian pula halnya dengan perkembangan serta kompleksitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan dewasa ini sudah barang tentu akan berdampak pada peningkatan volume arsip yang dihasilkan. Kenyataan yang banyak terlihat sekarang ini bahwa hampir di semua instansi pemerintah ditemukan penumpukan-penumpukan arsip yang tidak terurus sama sekali bahkan sebagian sudah rusak di makan hama.

Sehubungan dengan itu perlu upaya penyelamatan, penataan, pemeliharaan serta pelestarian arsip sebagai bahan bukti pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan sejarah kehidupan berbangsaan.

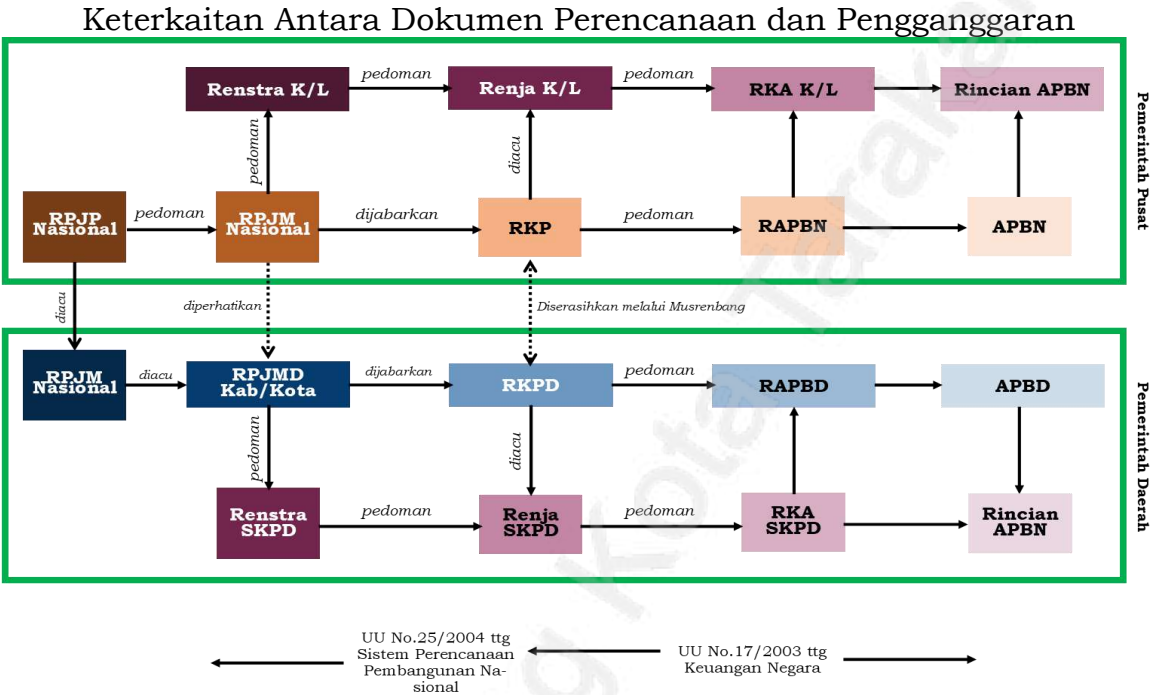
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan minat baca masyarakat kota Tarakan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraannya serta penataan arsip yang baik.

Adapun proses penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah meliputi:

1. Persiapan penyusunan renstra
2. Penyusunan rancangan awal renstra perangkat daerah
3. Penyusunan rancangan renstra perangkat daerah

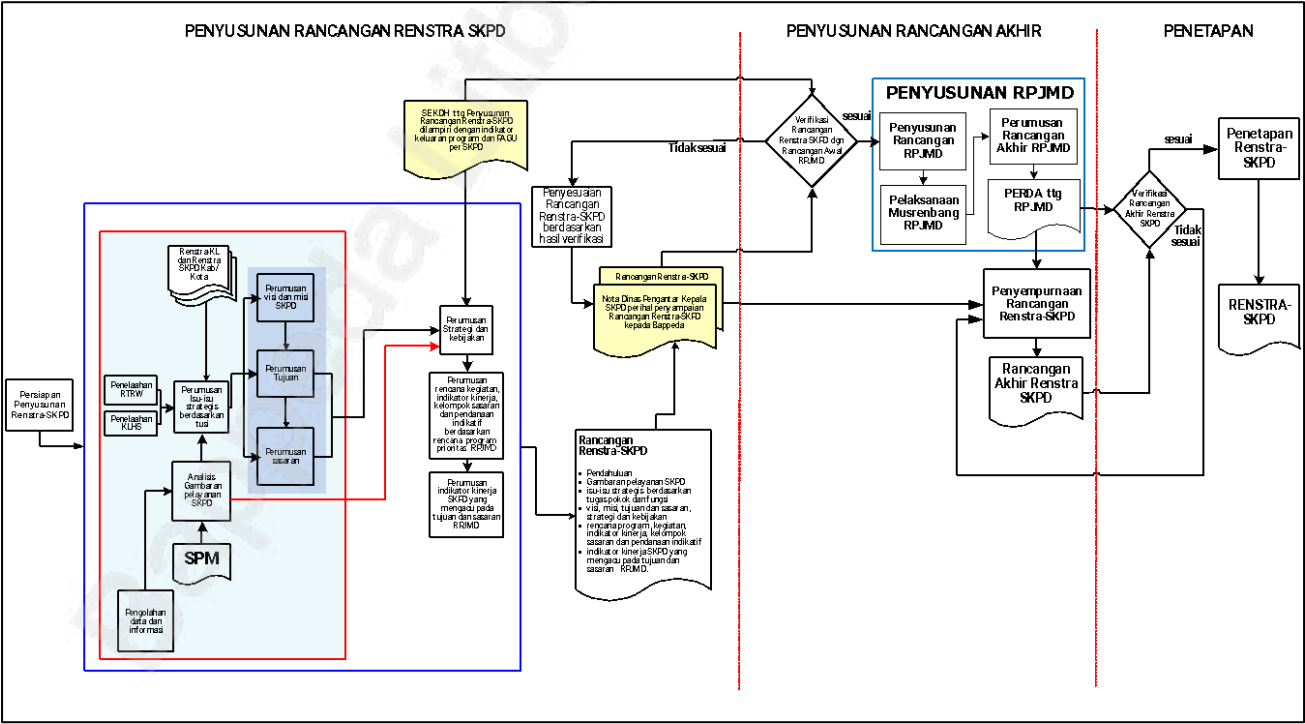
- 4. Pelaksanaan forum perangkat daerah
- 5. Perumusan rancangan akhir renstra perangkat daerah
- 6. Penetapan renstra perangkat daerah
- 7. Gambaran tentang hubungan antara Renstra Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar :

Gambar 1.1



Gambar 1.2

Bagan Alir Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD)



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029;
20. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
24. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
25. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026;
26. SK Wali Kota Nomor 100.3.3.3/HK-XI/539/2023 tentang Tim Penyusunan Rencana Strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan Tahun 2025-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DISPUSPAN) Kota Tarakan untuk menjadikan tolok ukur dan alat bantu bagi segenap pimpinan dan jajaran staf pelaksana DISPUSPAN menyelenggarakan kegiatan di dalam menyusun berbagai kebijakan dan program secara konsekuen dan konsisten sesuai dengan posisi dan peran yang di emban.

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 - 2029 dimaksudkan untuk :

1. Memberikan arah tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan bidang perpustakaan dan kearsipan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan urusan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan serta menyediakan tolak ukur dalam penetapan kinerja selama 5 (lima) tahun selama masa Wali Kota terpilih;
3. Menjamin keterkaitan, keserasian serta harmonisasi antara perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan program kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ke depan;
4. Menyesuaikan rencana target capaian Renstra PD dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tarakan Tahun 2025 - 2029 yang sesuai dengan kemampuan Anggaran Pemerintah daerah;
5. Penyesuaian Regulasi dan Kebijakan Program Prioritas Pemerintahan;
6. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana pembangunan tahunan;
7. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana pembangunan tahunan;
8. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;

9. Memberikan pedoman bagi ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam menyusun rencana kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 – 2029 adalah :

1. Menterjemahkan dan menjabarkan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang termuat dalam RPD Kota Tarakan periode 2025 – 2029 dalam bentuk tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang lebih spesifik dan terarah serta bersifat operasional;
2. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan rencana kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selama 5 (lima) tahun;
3. Sebagai dasar penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi serta Penilaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam menjalankan dan melaksanakan kegiatan sesuai tupoksinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini paling sedikit memuat:

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
 - b. Sumber daya Perangkat Daerah;
 - c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - d. Kelompok sasaran layanan.
2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - b. Isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab III paling sedikit memuat:

1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan
4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV paling sedikit memuat:

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;

4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKU) Perangkat Daerah; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

A. Tugas, Fungsi dan Struktur PD

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan, maka tugas dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan adalah “membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah”.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2021, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan mengemban fungsi antara lain:

1. Perumusan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota di bidang Perpustakaan dan Kearsipan, di pimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tarakan, Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Bidang Kearsipan;
- d. Bidang Perpustakaan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Perpustakaan adalah wahana pendidikan yang mempunyai tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh karena itu perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana maupun SDM yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan seperti penambahan koleksi bahan pustaka, bimtek di bidang pengelolaan perpustakaan serta pendidikan dan pelatihan untuk menduduki jabatan fungsional pustakawan.

Undang-undang tentang Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007 menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban menggalakkan promosi gemar membaca dan memanfaatkan perpustakaan, untuk itu perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi.

Fungsi perpustakaan adalah sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, dokumentasi dan rekreasi yang akan memperluas wawasan serta meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa, karena itu berdasarkan fungsinya di Indonesia di kenal beberapa jenis perpustakaan

diantaranya : Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Perguruan Tinggi dan Perpustakaan Sekolah, hal ini tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007.

Arsip adalah informasi yang di buat, di terima dan di simpan sebagai bukti dan informasi oleh sebuah organisasi atau orang sesuai kewajiban hukum atau dalam transaksi bisnis. Arsip adalah informasi yang terekam dan melekat pada wujud aslinya, bersifat unik, lahir, tumbuh dan berkembang secara wajar, ia legal dan kelegalannya dapat dijadikan sebagai bukti sah di pengadilan dan dijamin dengan Peraturan Perundang-undangan.

Arsip merupakan bukti otentik dan realibilitasnya dapat diandalkan dan oleh karena itu dapat dijadikan bahan bukti akuntabilitas kinerja suatu organisasi dan bukti sejarah perjalanan bangsa, maka hal ikwal kearsipan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan termasuk juga pemusnahan arsip/dokumen.

Arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, sebagai memori, acuan dan bahan pertanggung jawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, harus di kelola dan diselamatkan oleh Negara.

Sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta tuntutan paradigma modern, DISPUSPAN secara bertahap dan terus menerus berusaha meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dari sistem konvensional menuju sistem yang berbasis teknologi untuk mendorong perubahan paradigma digitalisasi.

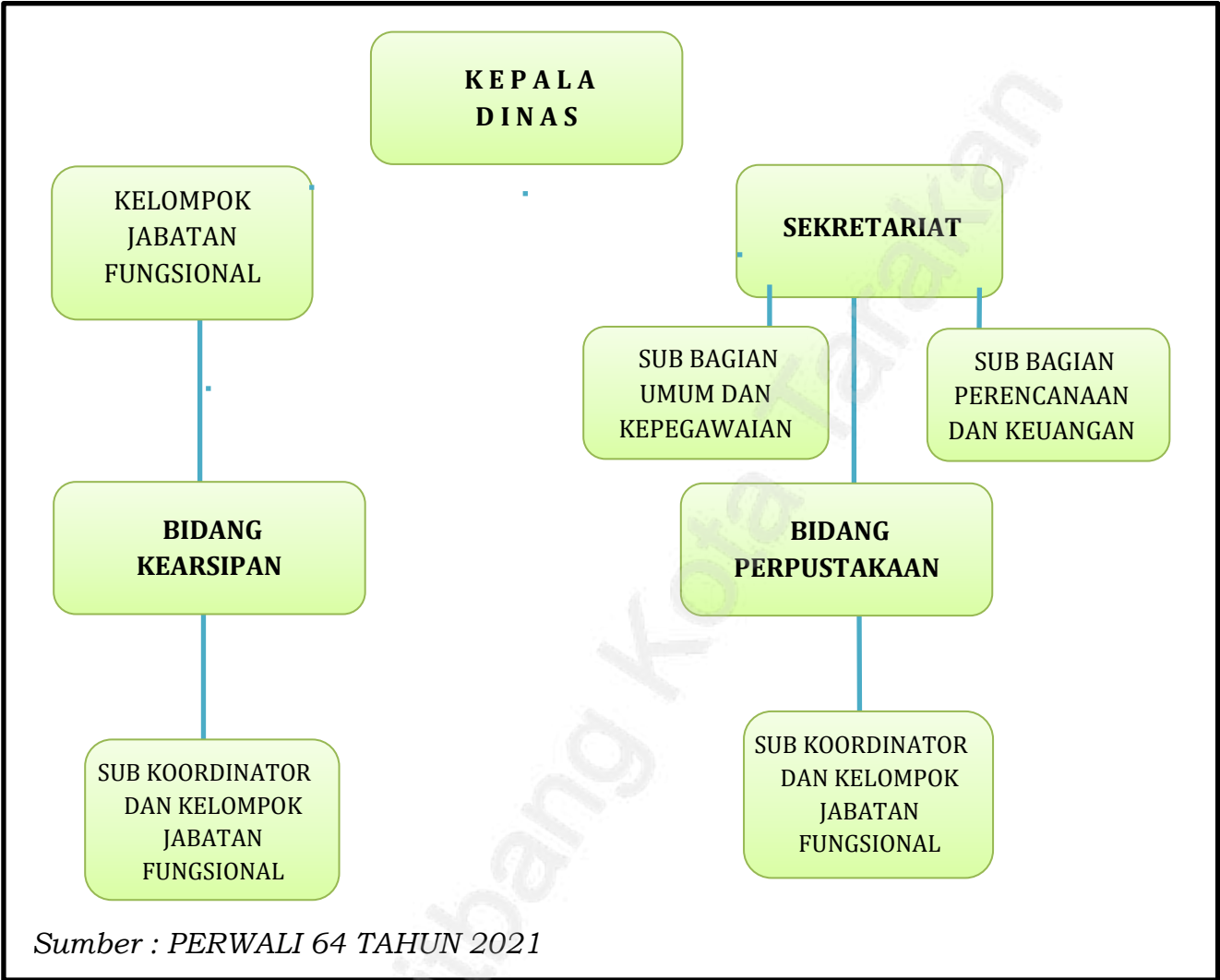
Sampai dengan 31 Desember 2024, setelah adanya mutasi maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan mempunyai Sumber Daya Manusia sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang ASN. Namun pada pertengahan tahun 2025 tepatnya bulan Juli telah diangkat 5 (lima) orang tenaga kontrak menjadi PPPK sehingga jumlah ASN bertambah menjadi 33 (tiga puluh tiga) orang yang terdiri dari pendidikan yang bervariasi dan masih terdapat 2 (dua) orang tenaga kontrak dengan pendidikan SLTA/ sederajat.

- 1) Berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan pemerintahan telah memberikan pengaruh pada cara pemerintah menyelenggarakan pemerintahannya, utamanya dalam kaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Dengan adanya otonomi daerah pada tahun 1998, maka pemerintah daerah melakukan penataan kembali mengenai yang disusun berdasarkan kedudukan dan analisis lingkungan strategis.
- 3) Dengan terbitnya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PERDA Kota Tarakan No. 09 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PERDA No. 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka terbentuklah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe B yang menangani 2 (dua) bidang yaitu bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.
- 4) Struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang saat ini membidangi 2 (dua) bidang, terkadang mengalami kendala karena dalam beberapa hal sangat bertolak belakang.
- 5) Masih belum efektif dan efisien apabila bidang perpustakaan dan kearsipan digabungkan karena walaupun objek kerjanya sama tetapi dari segi hasil akhir dari pengolahan objek tersebut sangat berbeda, oleh karena itu sebaiknya bidang perpustakaan dan bidang kearsipan harus terpisah seperti yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tarakan, Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



B. Sumber Daya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

- 1) Keadaan dan masalah yang dihadapi dalam bidang Sumber Daya Manusia Aparatur antara lain adalah: komposisi, jumlah, dan distribusi pegawai yang belum rasional; masih ada beberapa jabatan yang belum terisi walaupun sudah dilakukan perencanaan SDM yang komprehensif, terintegrasi serta berbasis kinerja.
- 2) Penguasaan teknologi informatika dan bahasa asing yang belum memadai, sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan interaksi antar bangsa dalam memanfaatkan peluang global, pemasaran investasi dan inovasi masyarakat bangsa, serta pemulihan dan peningkatan citra peradaban bangsa.

Tabel 2.1
Rincian Jumlah Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025

No.	Eselon/Pangkat/Gol.Ruang/ Penjenjangan/Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
I	Eselon	
1	II – A	1
2	II – B	-
3	III – A	1
4	III – B	2
5	IV – A	2
	Total	6
II	Pangkat/Gol.Ruang	
1	IV	7
2	III	18
3	II	3
4	I	-
	Total	28
III	Diklat/Penjenjangan	
1	PIM II	1
2	PIM III	2
3	PIM IV	2
	Total	5
IV	Tingkat Pendidikan	
1	SD	-
2	SLTP	-
3	SMU	9
4	D-I	-
5	D-II	-
6	D-III	4
7	D-IV	-
8	S-1	14
9	S-2	6
10	Tenaga Honor Kantor	2
	Total	35

C. Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan/atau indikator lainnya yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Daftarnya sebagai berikut :

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Tarakan Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya minat baca masyarakat	1	Persentase pengunjung perpustakaan	24,50%	26,74%	109,14
		2	Ratio ketercukupan koleksi perpustakaan oleh masyarakat	1,2	1,160	96,67
2	Meningkatnya pelestarian koleksi daerah	3	Persentase koleksi bahan pustaka yang dilestarikan	8,5%	9,24%	108,71
3	Meningkatnya pengelolaan perpustakaan	4	Persentase perpustakaan sesuai SNP	90%	76,97%	85,52
4	Meningkatnya pelestarian arsip/ dokumen negara	5	Persentase arsip/dokumen negara yang dilestarikan	55%	63,00%	114,55
5	Meningkatnya sistem pengelolaan arsip sesuai standar	6	Persentase PD yang mengelola arsip secara baku	66,67%	73,33%	109,99
		7	Persentase unit pengolah dan unit kearsipan yang dilakukan pengawasan	100%	79%	79,00
5	Meningkatnya minat baca masyarakat	8	Persentase pengelola kearsipan sesuai standar	73%	72%	98,63
6	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9	Nilai dan predikat SAKIP	75/BB	74,51/BB	99,35
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA						100,17%

Tabel 2. 4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya minat baca masyarakat	Persentase pengunjung perpustakaan	45,15%	45,25%	45,30%	45,40%	24,50 %	10,05%	7,08%	14,55 %	19,98%	26,74%	22,26	15,65	32,12	44,01	109,14
		Ratio ketercukupan koleksi perpustakaan oleh masyarakat	0,6	0,63	0,65	1,2	1,2	0,39	0,53	1,08	1,07	1,16	65	84,13	165,72	89,17	96,67
2	Meningkatnya pelestarian koleksi daerah	Persentase koleksi bahan pustaka yang dilestarikan	2,50%	5%	7%	8,50%	8,50%	2,33%	4,41%	6,23%	6,26%	9,24%	93,2	88,2	89	73,66	108,71
3	Meningkatnya pengelolaan perpustakaan	Persentase perpustakaan sesuai SNP (Standar nasional perpustakaan)	50%	60%	70%	80%	90%	29,41%	53,13%	61,82%	62,42%	76,97%	58,82	88,55	88,31	78,03	85,52
4	Meningkatnya pelestarian arsip / dokumen negara	Persentase arsip/dokumen negara yang dilestarikan	-	-	1,48%	18,50%	55%	-	-	1,41%	31,27%	63,00%	-	-	95,14	169,03	114,55
5	Meningkatnya sistem pengelolaan arsip sesuai standar	Persentase PD yang mengelola arsip secara baku	46,88%	62,50%	78,13%	93,75%	66,67%	37,50%	50,00%	50%	60%	73,33%	79,99	80	64	64	109,99
		Persentase unit pengolahan dan unit kearsipan yang dilakukan pengawasan	-	-	70,59%	88,24%	100%	-	-	45%	48%	79%	-	-	63,75	54,4	79
6	Terpenuhi SDM pengelola kearsipan	Persentase pengelola kearsipan sesuai standar	50%	60%	70%	80%	73%	50%	42,86%	33%	45%	72%	100	71,43	47,14	56,25	98,63
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DISPUSPAN	Nilai dan predikat SAKIP	60	70	70	75/BB	75/BB	76,25	60,49	67,09	74,22 / BB	74,51	127,08	86,42	95,84	98,96	99,35

D. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan meliputi:

- Masyarakat Umum;
- Pengguna layanan perpustakaan, seperti layanan mobil perpustakaan keliling, motor pintar, wisata buku, dan layanan lainnya;
- Masyarakat yang ingin meningkatkan minat baca dan pengetahuan;
- Pengguna Arsip;
- Masyarakat yang membutuhkan akses arsip untuk penelitian, informasi, atau keperluan lainnya;
- Anak-anak dan Remaja;
- Pengunjung perpustakaan yang mengikuti program story telling, pemutaran film pendidikan, dan kegiatan lainnya.

Tujuan utama dari kelompok sasaran ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan kearsipan, meningkatkan minat baca masyarakat, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan arsip. Beberapa sasaran yang ingin dicapai antara lain :

- Meningkatkan kualitas perpustakaan sesuai standar
- Meningkatkan minat baca masyarakat
- Meningkatkan penyelenggaraan kearsipan berbasis teknologi
- Meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

Dengan demikian, kelompok sasaran layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sangat luas dan beragam, mencakup masyarakat umum, pengguna arsip, anak-anak, dan remaja.

2.2 Permasalahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan saat ini terletak di Jalan Sei Sesayap Komplek Islamic Center Kampung Empat Tarakan, dimana saat ini lokasi di sekitar gedung sudah menjadi area sport center dan bersebelahan dengan museum kembar yaitu Museum Perang Dunia dan Museum Perminyakan.

Gedung dinas yang dimiliki saat ini bisa di bilang sudah refresentatif dan cukup memadai, hanya saja sarana dan prasarana didalamnya masih belum lengkap dikarenakan masih menggunakan sarana dan prasarana yang berasal dari gedung kantor lama sehingga ada beberapa ruangan yang masih kosong. Oleh karena itu perlu adanya sarana dan prasarana perlengkapan kantor yang baru untuk menunjang kegiatan kantor, baik untuk pelayanan perpustakaan dan kearsipan maupun kegiatan administrasi perkantoran sehingga tercipta suasana nyaman yang akan dirasakan oleh pengunjung/pemustaka dan para pegawai DISPUSPAN.

DISPUSPAN memiliki Depo Arsip dan gudang penyimpanan arsip yang masih terpisah dari gedung induk sehingga kegiatan kearsipan kurang efisien karena akan memakan waktu jika ada arsip yang segera dibutuhkan atau ketika hendak mengelola arsip.

Tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan perpustakaan dan kearsipan Kota Tarakan yang diidentifikasi berpotensi menghambat pencapaian target kinerja antara lain :

- a. Semakin mendesaknya kebutuhan dasar akan ilmu pengetahuan bagi pelajar dan mahasiswa.
- b. Layanan perpustakaan dan kearsipan yang tidak optimal dikarenakan belum langsung menyentuh dan melibatkan pihak kelurahan dan tokoh masyarakat secara langsung yang akan memudahkan masyarakat menerima pelayanan yang dibutuhkan.

- c. Masih rendahnya kesadaran dan motivasi masyarakat akan pentingnya membaca dan pentingnya arsip untuk kepentingan dimasa yang akan datang.
- d. Terbatasnya Anggaran, Sarana dan Prasarana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sehingga Program Kegiatan tidak berjalan dengan maksimal dan terbatasnya penunjang layanan ke masyarakat.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

- a. Aspek Digitalisasi dan Transformasi Digital Kearsipan
 - 1) Rendahnya tingkat implementasi transformasi digital dalam pengelolaan arsip untuk mendukung tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), yang menghambat terciptanya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan arsip di lingkungan pemerintah daerah;
 - 2) Keterbatasan dalam pelaksanaan proses alih media dari arsip fisik ke bentuk digital mencakup pengalihan arsip statis maupun dinamis ke dalam sistem berbasis elektronik, serta penerapan sistem informasi kearsipan yang terintegrasi, yang masih belum optimal di banyak perangkat daerah;
Keterkaitan dengan Misi Pemerintah Daerah : Digitalisasi arsip mendukung tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif dengan mempercepat akses informasi dan pengambilan keputusan berbasis data.
- b. Aspek Penguatan Regulasi dan Kebijakan Kearsipan
 - 1) Keterbatasan harmonisasi regulasi kearsipan antara tingkat pusat dan daerah, termasuk implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang mengakibatkan kurangnya sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan kearsipan secara efektif di berbagai tingkatan pemerintahan;
 - 2) Rendahnya penguatan regulasi di tingkat daerah, ditandai dengan belum adanya Peraturan Daerah (Perda) yang spesifik dan komprehensif terkait kearsipan, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran kearsipan. Hal ini berdampak pada rendahnya kesadaran, kepatuhan, dan standar pengelolaan arsip di lingkungan pemerintah daerah.
Keterkaitan dengan Misi Pemerintah Daerah : Regulasi yang kuat dan implementasi yang konsisten mendukung tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- c. Aspek Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Kearsipan
 - 1) Keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi khusus di bidang kearsipan, baik dalam pengelolaan arsip konvensional maupun elektronik, yang menghambat optimalisasi pengelolaan arsip sesuai dengan standar dan kebutuhan era digital;
 - 2) Kurangnya alokasi anggaran untuk pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM, termasuk melalui kegiatan pelatihan, sertifikasi, dan pembinaan, yang berdampak pada rendahnya kualitas pengelolaan arsip di lingkungan pemerintah daerah.
Keterkaitan dengan Misi Pemerintah Daerah : SDM yang kompeten mendukung tata kelola pemerintahan yang adaptif dengan kemampuan merespons perubahan dan tantangan.
- d. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis dan Statis yang Efektif
 - 1) Belum optimalnya pengelolaan arsip dinamis (arsip aktif) dan arsip statis (arsip permanen) pada perangkat daerah, baik dari segi

penyimpanan, pelestarian, maupun aksesibilitas, yang menghambat efisiensi dan efektivitas tata kelola kearsipan;

- 2) Rendahnya implementasi aplikasi SRIKANDI oleh perangkat daerah dalam penyelenggaraan tata kelola kearsipan yang berstandar baku, sehingga mengurangi potensi integrasi dan modernisasi pengelolaan arsip secara elektronik.

Keterkaitan dengan Misi Pemerintah Daerah : Pengelolaan arsip yang baik mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sehingga meningkatkan kepercayaan publik.

- e. Aspek Keamanan dan Perlindungan Arsip

Lemahnya sistem keamanan arsip di lingkungan pemerintah daerah, baik untuk arsip fisik maupun elektronik, yang meningkatkan risiko kerusakan atau kehilangan arsip akibat bencana alam, kebakaran, atau serangan siber.

Keterkaitan dengan Misi Pemerintah Daerah : Keamanan arsip mendukung tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap risiko dan krisis.

- f. Aspek Peningkatan Kesadaran dan Budaya Kearsipan

Rendahnya tingkat kesadaran perangkat daerah dan masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan kearsipan, sehingga arsip sering kali hanya dipandang sebagai urusan administratif belaka tanpa memahami nilai strategisnya dalam mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Keterkaitan dengan Misi Pemerintah Daerah : Kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya arsip mendukung tata kelola pemerintahan yang adaptif dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

- g. Aspek Kolaborasi dan Sinergi Antar Instansi

Rendahnya tingkat koordinasi lintas instansi dalam pengelolaan kearsipan, yang menghambat integrasi data dan informasi secara menyeluruh, sehingga berdampak pada kurang optimalnya sinkronisasi dan efisiensi dalam tata kelola arsip di lingkungan pemerintah daerah.

Keterkaitan dengan Misi Pemerintah Daerah : Kolaborasi yang baik mendukung tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan lintas sektor.

- h. Aspek Perluasan Pelayanan Kearsipan pada Publik

Rendahnya tingkat publikasi atas konten kearsipan yang menarik dan relevan, disertai kurangnya informasi pemanfaatan arsip yang berorientasi pada kebutuhan pengguna. Hal ini menghambat upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan arsip secara optimal; Keterkaitan dengan Misi Pemerintah Daerah tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif : Perluasan pelayanan kearsipan yang berorientasi pada publik mendukung tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif dengan memastikan bahwa arsip tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi sumber informasi yang relevan, mudah diakses, dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan.

- i. Aspek Pelestarian Arsip sebagai Warisan Budaya Bangsa

Kurangnya optimalisasi program pelestarian arsip yang terencana, sehingga arsip-arsip bersejarah berisiko hilang, rusak, atau tidak terdokumentasi dengan baik yang disebabkan oleh rendahnya perhatian terhadap arsip bernilai sejarah, minimnya alokasi anggaran untuk pelestarian, serta keterbatasan fasilitas penyimpanan yang sesuai dengan standar pelestarian arsip.

Keterkaitan dengan Misi Pemerintah Daerah: Pelestarian arsip sebagai warisan budaya mendukung tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif dengan memastikan bahwa arsip-arsip penting yang mencerminkan identitas dan sejarah daerah tetap terjaga. Arsip ini juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan pariwisata berbasis sejarah dan budaya, serta menjadi sumber pembelajaran bagi generasi mendatang.

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Kurangnya minat dan budaya baca masyarakat;
2. Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) belum dapat diterapkan secara optimal oleh seluruh Perangkat Daerah;
3. Kurangnya Anggaran yang mendukung peningkatan Sumber Daya Manusia dibidang Teknologi Informasi untuk urusan Perpustakaan dan Kearsipan;
4. Kurangnya kesadaran Perangkat Daerah akan pentingnya tata kelola kearsipan yang baik;
5. Belum disetujuinya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
6. Kurangnya Sarana dan prasarana gedung kantor yang menyebabkan tidak maksimalnya pemanfaatan ruangan;
7. Penyelamatan dan perlindungan arsip statis sebagai memori kolektif bangsa belum terlaksana secara maksimal;
8. Kurangnya tenaga Pustakawan dan Arsiparis;
9. Fungsi dan Peran Perpustakaan dan Lembaga Kearsipan Daerah belum tersosialisasikan dengan baik ke masyarakat;
10. Kurangnya armada mobil perpustakaan keliling.

Tabel 2.5
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Tujuan	Sasaran	Output
1.	Belum Tingginya Literasi Masyarakat	Masih rendahnya masyarakat yang gemar membaca	Belum Optimalnya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
			Belum Optimalnya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Belum Optimalnya Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
			Masih Rendahnya Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Belum Optimalnya Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan
			Belum Optimalnya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
			Belum Optimalnya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota
			Masih Rendahnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi
			Masih Rendahnya Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
			Belum Optimalnya Pelaksanaan Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Tujuan	Sasaran	Output
			Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
			Belum Optimalnya Pelaksanaan Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota
			Belum Optimalnya Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota
2.	Belum Tingginya Kualitas Tata Kelola Kearsipan	Masih rendahnya kualitas sistem pengelolaan arsip	Masih Rendahnya Pengelolaan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
			Masih Rendahnya Pengelolaan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
			Belum Optimalnya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
			Belum Optimalnya pengadaan prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis
			Belum Optimalnya Pengawasan kearsipan pada OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota
			Belum Terkelolanya Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI
			Belum Terlaksananya Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip
			Belum Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis
			Belum Terlaksananya Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan
			Belum Optimalnya Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun
			Belum Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
			Belum Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
			Belum Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
			Belum Terlaksananya Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan
			Belum Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
			Belum Terlaksananya Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)
		Masih rendahnya pelayanan pemanfaatan arsip	Belum Terlaksananya penyusunan data dan informasi arsiparis
			Belum Optimalnya Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN
			Belum Optimalnya Pelaksanaan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota

2.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dengan penjabaran gambaran secara umum keadaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan maka diperlukan adanya pengembangan perpustakaan dan kearsipan dengan *penambahan sarana dan prasarana perlengkapan gedung kantor yang memadai sebagaimana idealnya sebuah perpustakaan maupun kearsipan* sehingga terciptanya pelayanan yang

optimal kepada pemustaka baik pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat secara umum.

Selain itu diharapkan tata kelola kearsipan dilaksanakan dengan baik, sebagai sumber informasi, alat bukti yang sah, bahan pertanggungjawaban kinerja dan sejarah bagi kota Tarakan di masa yang akan datang.

Isu-isu Strategis Bidang Kearsipan

- a. Percepatan dan penguatan penyelenggaraan transformasi digital pengelolaan kearsipan pada Lembaga Kearsipan Daerah serta seluruh perangkat daerah pendukung untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, keamanan serta aksesibilitas arsip mendukung perwujudan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menuju tata kelola pemerintahan yang adaptif, responsif, transparan dan akuntabel;
- b. Keselarasan harmonisasi regulasi kebijakan tata kelola kearsipan di tingkat pemerintah daerah dan peningkatan sinergi kearsipan antar perangkat daerah serta lintas sektoral yang menjamin terciptanya standar pengelolaan kearsipan baku berstandar nasional pada seluruh perangkat daerah;
- c. Penyediaan SDM yang mampu memenuhi aspek kompetensi dasar dan kapabilitas pengelolaan, klasifikasi, pemeliharaan, penyimpanan dan penyusutan arsip serta peningkatan anggaran untuk menjamin pengembangan SDM kearsipan melalui kegiatan pelatihan, sertifikasi dan pembinaan;
- d. Peningkatan nilai indeks SPBE dan indeks Tingkat Digitalisasi Arsip untuk mendukung upaya reformasi birokrasi melalui pengelolaan arsip dinamis dan statis berbasis implementasi aplikasi SRIKANDI yang menjamin aksesibilitas dan keberlanjutan informasi kearsipan pada seluruh perangkat daerah;
- e. Pengembangan konten dan layanan jasa kearsipan yang menarik dan berorientasi pada kebutuhan pengguna untuk menjamin perluasan akses dan partisipasi masyarakat.

Sesuai dengan IKK dari Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan maka diharapkan di Tahun 2024 dicapainya Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan sebanyak 100.000 eksemplar, dan Peningkatan kualitas pelayanan kearsipan sampai dengan 100%.

Adapun isu-isu strategis yang muncul :

- Gedung yang representatif belum di tunjang dengan sarana dan prasarana yang lengkap;
- Belum ada tenaga IT baik di perpustakaan maupun di kearsipan;
- Ada beberapa ruangan yang masih kosong;
- Harus ada sosialisasi ke masyarakat untuk mengetahui keberadaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- Belum adanya Standar Pelayanan Minimum;
- Minat baca masyarakat yang rendah;
- Pembinaan perpustakaan yang meliputi Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus dan Perpustakaan Sekolah;
- Pembinaan perpustakaan dari Kecamatan sampai ke kelurahan;
- Pengolahan buku dan pengarsipan yang bersentuhan dengan Teknologi informasi, misalnya dalam kearsipan apakah mengalih mediakan arsip ke bentuk digital, CD, media sosial, yang penyimpanannya tidak memakan tempat dan ruang, dsbnya;
- Peningkatan aparatur perpustakaan dan kearsipan sesuai standar baik Pustakawaan maupun Arsiparis;
- Peningkatan jumlah pegawai apabila dirasakan perlu;
- Pelayanan terhadap pemustaka;
- Penerapan e-arsip terintegrasi di semua PD;

- Penataan dan pembinaan arsip di setiap PD;
- Pengadaan pelatihan kearsipan bekerjasama dengan dinas terkait;
- Penyusunan Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan; dan
- Penyusunan kerangka kerja.

3.2. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra Provinsi

Analisis Renstra K/L dan PD Provinsi (yang masih berlaku) ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra PD Kota Tarakan terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi :

- a. Apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra PD Kota Tarakan telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra PD provinsi dan Renstra K/L; dan
- b. Apakah tingkat capaian kinerja Renstra PD Kota Tarakan melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra PD provinsi atau Renstra K/L.

Jika tingkat capaian kinerja Renstra PD Kota Tarakan melebihi sasaran Renstra K/L dan Renstra PD provinsi, maka hal ini menunjukkan bahwa kinerja OPD sudah baik secara nasional/provinsi. Sedangkan jika lebih rendah, maka hal ini mengindikasikan bahwa PD tersebut memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanannya, seperti dalam perencanaan program, kegiatan, dan pendanaan, sumber daya penyelenggaraan pelayanan, proses/prosedur/mekanisme pelayanan, dan strategi/kebijakan pelayanan yang ditempuh.

Hasil review terhadap Renstra K/L dan Renstra PD provinsi yang masih berlaku, menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan PD yang akan ditangani pada Renstra PD Kota Tarakan periode berikutnya.

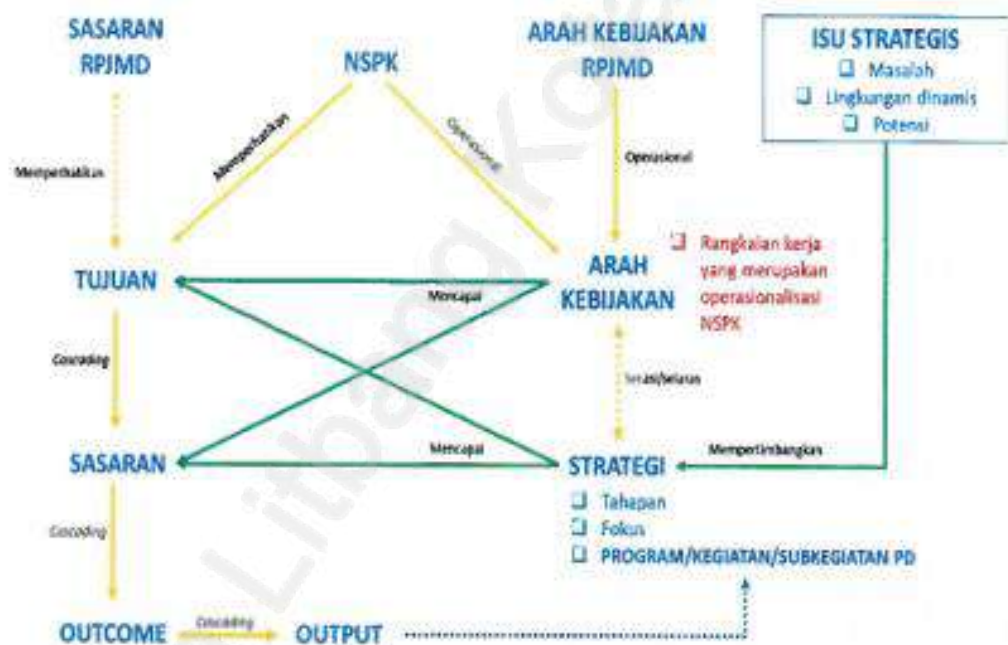
BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

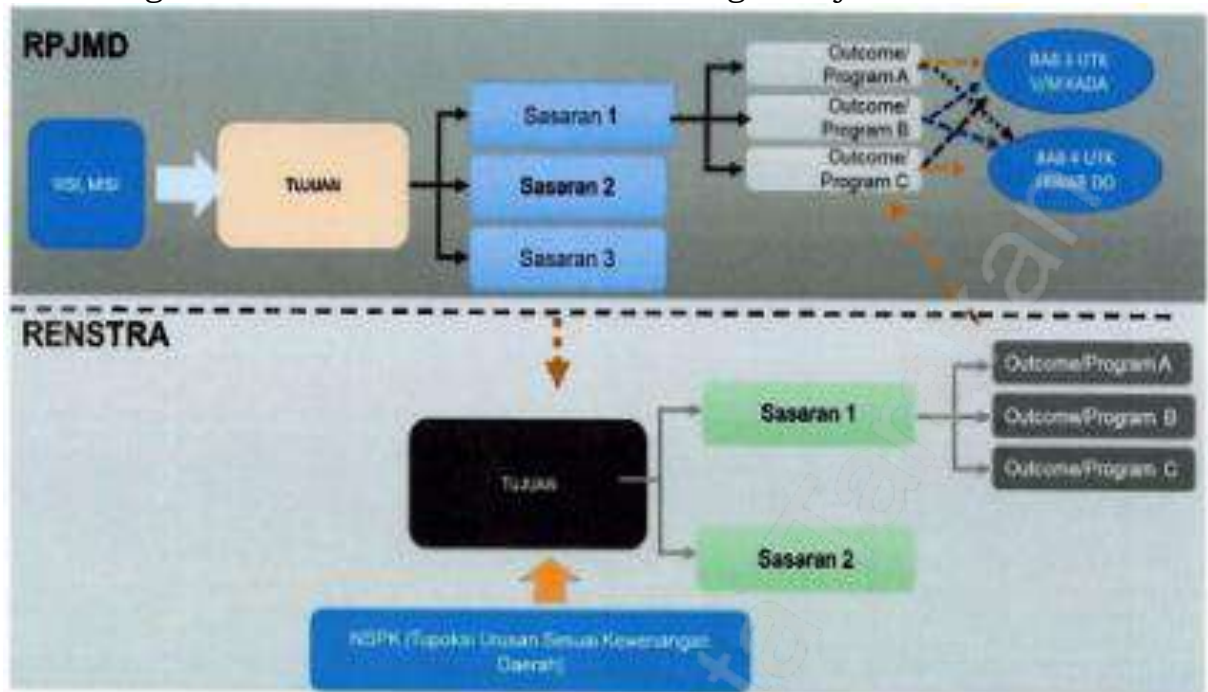
Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan selama kurun waktu kurang lebih 2 (dua) tahun ke depan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Propinsi seperti yang tertuang dalam RPD Kota Tarakan 2025-2026.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada misi RPJPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Gambar 3.1
Konsep Renstra PD



Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Adapun tujuan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Literasi Masyarakat

Untuk memaksimalkan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat maka perlu adanya peningkatan pelayanan dengan melaksanakan pembinaan dan pengembangan pengelolaan perpustakaan kepada perpustakaan-perpustakaan yang ada di kota Tarakan baik itu perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan kecamatan, kelurahan, sekolah, taman bacaan dan rumah pintar.

Menumbuhkan kebiasaan membaca harus dimulai dari keluarga, orang tua berperan penting dalam menumbuhkan kegemaran membaca buku pada anak-anaknya dan bisa mulai memperkenalkan perpustakaan kepada mereka. Perpustakaan yang memiliki koleksi bacaan yang berkualitas akan berdampak meningkatnya kualitas dari pembaca. Dengan meningkatkan motivasi dan minat serta budaya gemar baca dan sumber bacaan yang berkualitas maka masyarakat Kota Tarakan akan memiliki keinginan membaca lebih besar sehingga pemustaka akan meningkat dari segi kualitas dan kuantitas.

Saat ini sedang digalakkan pembangunan *literasi* masyarakat, dimana definisi dari *literasi* adalah kemampuan membaca dan menulis, menambah pengetahuan dan keterampilan, berpikir kritis dalam memecahkan masalah, serta kemampuan berkomunikasi secara efektif yang dapat mengembangkan potensi dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, yang mana pembangunan literasi masyarakat tersebut diatas bertujuan untuk :

- Membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca berbagai informasi bermanfaat;
- Membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang di baca;
- Meningkatkan kemampuan seseorang dalam memberikan penilaian kritis terhadap suatu karya tulis;
- Membantu menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik di dalam diri seseorang;

- e. Meningkatkan nilai kepribadian seseorang melalui membaca dan menulis;
- f. Menumbuhkan dan mengembangkan budaya literasi di tengah-tengah masyarakat secara luas;
- g. Membantu meningkatkan kualitas penggunaan waktu seseorang sehingga lebih bermanfaat.

Melihat tujuan literasi yang begitu baik, tentunya masyarakat akan mendapatkan berbagai manfaat antara lain :

- a. Menambah perbendaharaan kata (kosa kata) seseorang;
- b. Mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis;
- c. Mendapat berbagai wawasan dan informasi baru;
- d. Kemampuan memahami makna suatu informasi akan semakin meningkat;
- e. Meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir seseorang;
- f. Membantu meningkatkan daya fokus dan kemampuan konsentrasi seseorang;
- g. Meningkatkan kemampuan seseorang dalam merangkai kata yang bermakna dan menulis.

2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kearsipan

Pemenuhan kebutuhan informasi bagi pengguna arsip dapat dilakukan dengan baik dan tepat jika pengelolaan dan pelestarian arsipnya benar. Pengelolaan dan Pestaarian Arsip yang memenuhi Standar Internasional akan menjadi target dan upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi tersebut.

Salah satu fungsi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah menyiapkan informasi-informasi yang terbaru maupun yang masa lampau, informasi masa lampau dalam bentuk sejarah bangsa merupakan salah satu aspek yang mendukung rasa cinta dan bangga kepada tanah air. Penelusuran sejarah bangsa dalam bentuk arsip foto, arsip tekstual maupun peta adalah salah satu cara penyajian informasi untuk menambah pengetahuan tentang sejarah bangsa pada umumnya dan khususnya sejarah Kota Tarakan.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pustakaaan dan Kearsipan dalam jangka waktu tahunan, sampai lebih kurang 5 (lima) tahun mendatang.

Dari dua tujuan Renstra tersebut diatas dapat ditarik sasaran dalam 2 (dua) tahun. Sasaran yang efektif dinyatakan dengan baik secara spesifik dan dapat diukur. Sasaran yang ingin dicapai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan periode 2025-2029 sebagai berikut:

1. Tujuan pertama, Meningkatkan Literasi Masyarakat dengan sasaran:
 - Meningkatkan Masyarakat yang Gemar Membaca dengan indikator *Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat*.
2. Tujuan kedua, Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kearsipan dengan sasaran :
 - Meningkatkan Kualitas Sistem Pengelolaan Arsip dengan indikator *Persentase PD yang Menyelenggarakan Proses Bisnis tata Kelola Kearsipan Berstandar Baku Berbasis Instrumen Kearsipan*;
 - Meningkatkan Pelayanan Pemanfaatan Arsip dengan indikator *Indeks Kepuasan Publik terhadap Layanan Pemanfaatan Arsip*;
 - Meningkatkan Tata Kelola Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan indikator *Nilai SAKIP dan Nilai IKM*

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya Literasi Masyarakat		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	72,63	74,81	77,05	79,36	81,74	84,19
		Meningkatnya masyarakat yang gemar membaca	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	65,06	68,31	70,34	72,45	74,62	76,86
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kearsipan		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	60	65	70	75	80	85
		Meningkatnya kualitas sistem pengelolaan arsip	Persentase PD yang menyelenggarakan Proses Bisnis Tata Kelola Kearsipan berstandar baku berbasis Instrumen Kearsipan	80	90	93,33	93,75	94,12	100
		Meningkatnya pelayanan pemanfaatan arsip	Indeks Kepuasan publik terhadap layanan pemanfaatan arsip	76,61	80	84	86	88,31	90
		Meningkatnya tata kelola DISPUSPAN	Nilai SAKIP	75	80,30	80, 85	81,40	81,95	82,50
			IKM	88,25	88,78	89,31	89,84	90,37	90,90

3.2. Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Berikut ini adalah strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Minat Baca Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan gemar membaca perlu adanya ajakan kepada masyarakat, dengan meningkatkan promosi gemar membaca maka akan meningkatkan keinginan masyarakat gemar membaca dengan lebih menarik media promosinya yang akan menyadarkan akan pentingnya gemar membaca sehingga pemanfaatan perpustakaan yang optimal digunakan masyarakat Kota Tarakan sebagai media sumber informasi. Membaca harus dijadikan sebagai kebutuhan dan harus ditumbuh kembangkan mulai dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat agar bangsa Indonesia menjadi generasi yang cerdas dan berkualitas.

2. Meningkatkan Pelestarian Koleksi Daerah

Pelestarian koleksi bahan pustaka merupakan kegiatan penting untuk menjaga kondisi dan keadaan bahan pustaka yang ada agar selalu terawat dan terjaga, sehingga pemustaka bisa tetap mendapatkan informasi yang dibutuhkan walaupun sudah sangat lampau.

3. Meningkatkan Pengelolaan Perpustakaan

Sumber belajar masyarakat merupakan hal yang penting dalam mendapatkan informasi dan wawasan yang berkualitas. Pengelolaan perpustakaan yang baik dan dikelola secara profesional akan menjadikan perpustakaan sebagai pusat dan sumber informasi yang berkualitas dan dapat dipercaya sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat maksimal.

4. Meningkatkan Pelestarian Arsip/Dokumen Negara

Gerakan Sadar Arsip merupakan salah satu kebijakan pemerintah dan amanat Undang-undang yang harus kita dukung dan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Gerakan Sadar Arsip adalah suatu program yang bertujuan untuk mensosialisasikan pentingnya pengelolaan arsip yang baik dan benar serta manfaat arsip baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan berbangsa dan bernegara.

5. Meningkatkan Sistem Pengelolaan Arsip Sesuai Standar

Sebagai Lembaga Kearsipan Daerah Kota Tarakan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah melaksanakan pengelolaan arsip yang sesuai standar dan ini akan diterapkan juga kepada perangkat daerah yang ada di kota Tarakan untuk mengelola arsip secara baku sehingga sistem pengelolaan arsip dan hasil pengawasan arsip akan meningkat.

6. Terpenuhinya SDM Pengelola Kearsipan

Pelayanan yang maksimal harus di dukung oleh sumber daya manusia yang handal dan berkompetensi dibidangnya, oleh karena itu perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas baik untuk pengelola kearsipan maupun arsiparis agar akuntabilitas kinerja juga akan meningkat.

Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Literasi dan Tata Kelola Kearsipan	Pemantapan Literasi dan Tata Kelola Kearsipan	Peningkatan Literasi Masyarakat dan Kualitas Tata Kelola Kearsipan	Percepatan Peningkatan Literasi Masyarakat dan Kualitas Tata Kelola Kearsipan	Perwujudan Peningkatan Literasi Masyarakat dan Tata Kelola Kearsipan yang Berkualitas

3.3. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan untuk mencapai tujuan, dan kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Startegi pertama : Promosi Gerakan Gemar Membaca dan Pemasyarakatan Perpustakaan, dengan kebijakan :
 - Sosialisasi, workshop/seminar, penyuluhan gemar membaca dan pemanfaatan perpustakaan;
 - Pembinaan dan pemasyarakatan perpustakaan keliling;
 - Pengembangan ragam jenis layanan perpustakaan misalnya: jasa referensi, pemutaran film, penelusuran, dll;
 - Peningkatan ketersediaan koleksi bahan bacaan / bahan pustaka yang beragam dan berkualitas
 - Pelaksanaan kegiatan sosialisasi budaya baca dan literasi perpustakaan seperti lomba-lomba, tehnik menggambar, bercerita, dll; dan
 - Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial.
2. Strategi kedua : Pengembangan Kekhasan Koleksi Daerah yang Ada di Perpustakaan, dengan kebijakan :
 - Pelestarian naskah kuno milik daerah;
 - Pengembangan, pengolahan dan pengalihmediaan naskah kuno; dan
 - Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah.
3. Strategi ketiga : Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Perpustakaan, dengan kebijakan :
 - Pendidikan dan pelatihan bagi pengelola perpustakaan;
 - Pembinaan pada berbagai jenis perpustakaan yang ada di kota Tarakan;
 - Pengembangan perpustakaan di tingkat kota; dan
 - Penerapan SOP pengelolaan perpustakaan yang berstandar nasional.
4. Strategi keempat : Menelusuri dan Mengumpulkan Arsip/Dokumen Negara dan Arsip Sejarah yang Ada Di Kota Tarakan, dengan kebijakan:
 - Mengumplkan arsip/dokumen dari PD yang telah bergabung atau di likuidasi;
 - Pendataan dan penataan dokumen arsip;
 - Lomba arsip photo lampau; dan
 - Mengumpulkan arsip-arsip sejarah yang masih berada di tangan masyarakat baik lembaga maupun perorangan.

5. Strategi kelima : Pengembangan Sistem Informasi Arsip yang Baku dan Akurat, dengan kebijakan :
- Sosialisasi, penyuluhan, workshop/seminar pengelolaan kearsipan;
 - Pemeliharaan dan perawatan arsip;
 - Pengawasan pada unit pengolah dan unit kearsipan; dan
 - Penerapan SOP pengelolaan kearsipan yang berstandar Internasional.
6. Strategi keenam : Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Kearsipan, dengan kebijakan :
- Pendidikan dan pelatihan bagi pengelola kearsipan;
 - Pembinaan bagi pengelola kearsipan yang ada di kota Tarakan; dan
 - Peningkatan kapasitas arsiparis.

Arah kebijakan pengawasan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kota Tarakan disusun sebagai satu rangkaian kerja yang menyeluruh, konsisten, dan berkesinambungan setiap tahun perencanaan. Seluruh kebijakan diarahkan untuk memperkuat fungsi penanggulangan bencana (pra bencana, saat bencana dan pasca bencana). Rangkaian arah kebijakan tersebut diselaraskan dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pengawasan serta kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.5 berikut ini :

Tabel 3.5
Arah Kebijakan

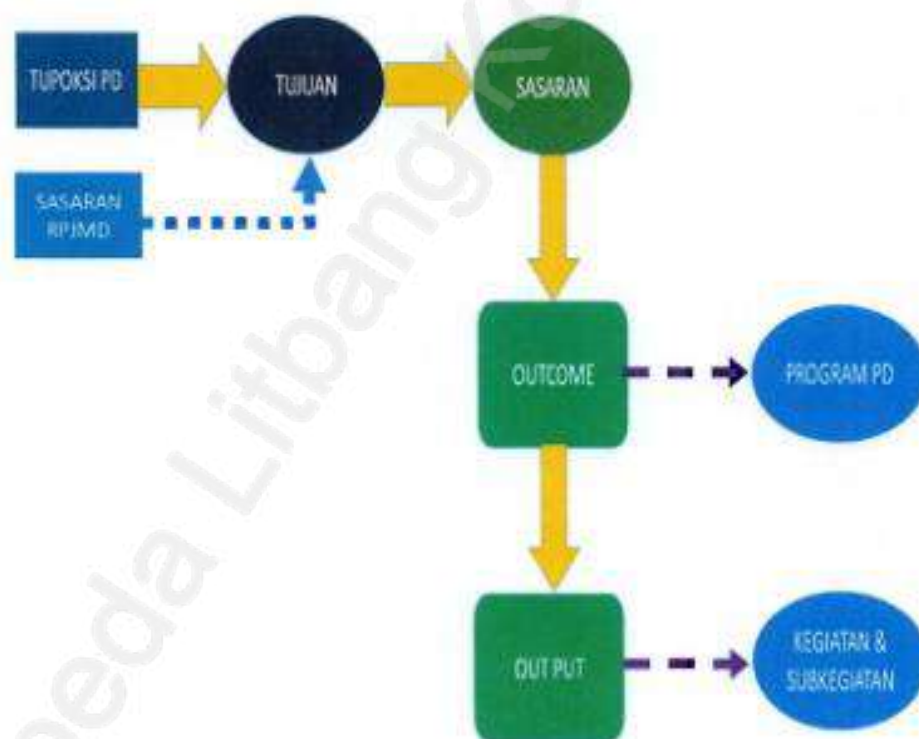
NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Peningkatan Akses Pendidikan Berkualitas dan Merata	Peningkatan budaya gemar baca	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	
3	Meingkatkan pelayanan publik	Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan akses arsip ke masyarakat (JIKN)	
			Peningkatan akses arsip tertutup ke masyarakat	
			Peningkatan kualitas dan kuantitas arsiparis	

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029), meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPD Kota Tarakan 2025-2029.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dalam hal ini sasaran Renstra PD. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai sasaran. Melalui rumusan kebijakan yang tepat, tiap program diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam 2 (dua) tahun mendatang.

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



4.1. Indikator Pencapaian Tujuan

Masukan (Input) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan berjalan untuk menghasilkan keluaran (output). Input kegiatan meliputi antara lain sumber daya manusia, dana dan fasilitas.

Keluaran (Output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa produk jasa fisik dan non fisik, seperti produk perencanaan pembangunan, hasil kajian strategi pembangunan, komputer, dan lain-lain.

Hasil (Outcome) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan. Misalnya tersebar dan dimanfaatkannya produk perencanaan oleh stakeholder dan masyarakat.

Dampak (Impact) adalah ukuran pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya, pendapatan rumah tangga meningkat (%/tahun), produktivitas dan infrastruktur tingkat wilayah meningkat (%).

Secara umum indikator pencapaian kinerja yang ingin diterapkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan pada periode lima tahun ke depan adalah penekanan kepada indikator keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari program, kegiatan, dan sub kegiatan perencanaan dan kajian strategis pembangunan. Oleh karena itu, masing-masing kegiatan selanjutnya dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif.

Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan yang direncanakan untuk Periode Tahun 2025–2026 dapat dilihat pada Tabel 4.2. (lampiran)

Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
Meningkatnya Literasi Masyarakat				Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	
	Meningkatnya masyarakat yang gemar membaca			Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	
		Meningkatnya frekuensi kunjungan perpustakaan		Persentase Pengunjung Perpustakaan	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
			Meningkatnya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung perpustakaan	2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
			Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	2.23.02.2.01.0013 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan
			Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
			Meningkatnya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan literasi yang diselenggarakan	2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
			Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
			Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat
		Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno		persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dialihmediakan	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
			Terlaksananya Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah naskah kuno yang di digitalisasi	2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
			Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	2.23.03.2.01.0003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
			Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	2.23.03.2.01.0004 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan
			Terlaksananya Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan	2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			Terlaksananya Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	2.23.03.2.02.0003 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
			Terlaksananya Pengolahan dan Penyilangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyilangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	2.23.03.2.02.0004 Pengolahan dan Penyilangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Kearsipan				Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	
	Meningkatnya kualitas sistem pengelolaan arsip			Persentase PD yang menyelenggarakan Proses Bisnis Tata Kelola Kearsipan berstandar baku berbasis Instrumen Kearsipan	
		Meningkatnya ketersediaan arsip berstandar baku		Nilai tingkat digitalisasi arsip	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
			Terlaksananya pendampingan dan monitoring pengelolaan arsip dinamis		2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
			Terkelolanya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	2.24.02.2.01.0001 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
			Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
			Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
			Terlaksananya pengadaan prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	2.24.02.2.01.0004 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis
			Terselenggaranya Pengawasan kearsipan pada OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota	Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	2.24.02.2.01.0005 Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
			Terlaksananya pendampingan dan monitoring pengelolaan arsip statis		2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
			Terkelolanya Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	2.24.02.2.02.0001 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI
			Terlaksananya Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip	Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip	2.24.02.2.02.0003 Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip
			Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	2.24.02.2.02.0004 Akusisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
			Terlaksananya Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	Jumlah Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	2.24.02.2.02.0005 Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan
		Meningkatnya penyelamatan dan perlindungan arsip sesuai NSPK		Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
			Terfasilitasinya Pemusnahan Arsip		2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
			Terlaksananya Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	2.24.03.2.01.0003 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun
			Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	2.24.03.2.01.0004 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
			Terfasilitasinya perlindungan dan penyelamatan arsip		2.24.03.2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota
			Terlaksananya Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	2.24.03.2.02.0001 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana
			Terfasilitasinya penyelamatan arsip		2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
			Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	2.24.03.2.03.0001 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
			Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran PD Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	2.24.03.2.03.0002 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
			Terlaksananya Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	2.24.03.2.03.0004 Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan
			Terlaksananya penilaian dan penetapan hasil alih media		2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
			Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	2.24.03.2.04.0002 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
			Terlaksananya pencarian arisp statis		2.24.03.2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang
			Terlaksananya Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	2.24.03.2.05.0003 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)
	Meningkatnya pelayanan pemanfaatan arsip			Indeks Kepuasan publik terhadap layanan pemanfaatan arsip	
		Meningkatnya aksesibilitas arsip		Persentase arsip yang siap diakses	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
			Tersedianya data dan informasi arsiparis		2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
			Terlaksananya penyusunan data dan informasi arsiparis	Jumlah arsiparis	2.24.02.2.01.0006 Penyusunan Database Arsiparis
			Terlaksananya pelayanan informasi kearsipan		2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
			Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN
			Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
	Meningkatnya Tata Kelola DISPUSPAN			Nilai/Predikat SAKIP	
		Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas		Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	5.03.01.2.01 Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
			Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
			Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Terlaksananya penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	5.03.01.2.01.0008 Penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	5.03.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
			Tersedianya dokumen administrasi keuangan	Laporan Keuangan sesuai SAP	5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	5.03.01.2.02.0001 Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
			Terlaksananya penyediaan pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	5.03.01.2.02.0002 Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.03.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5.03.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
		Meningkatnya layanan kesekretariatan		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
			Tersedianya dokumen administrasi kepegawaian	Nilai IP ASN Perangkat Daerah	5.03.01.2.05 Adminiatriasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	5.03.01.2.05.0001 Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai
			Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	5.03.01.2.05.0002 Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.03.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5.03.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.03.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
			Tersedianya dokumen administrasi Umum	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	5.03.01.2.06 Administrasi umum perangkat daerah

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
			Terlaksananya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5.03.01.2.06.0001 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.03.01.2.06.0006 Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koor dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.03.01.2.06.0007 Penyelenggaraan Rapat Koor dan Konsultasi SKPD
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.03.01.2.06.0008 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.03.01.2.06.0009 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
			Terkelolanya data Barang Milik Daerah dalam aplikasi	Persentase Barang Milik Daerah yang terinput dalam aplikasi e-BMD	5.03.01.2.07.0000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5.03.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5.03.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya
			Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	5.03.01.2.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5.03.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5.03.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Tersedianya dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia	5.03.01.2.08.0000 penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
			Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa surat menyurat
			Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5.03.01.2.08.0002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
			Tersedianya dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan	5.03.01.2.09.0000 pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
			Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	5.03.01.2.09.0001 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN
			Terlaksananya pemeliharaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	5.03.01.2.09.0002 Pemeliharaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5.03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5.03.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5.03.01.2.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tabel 4.3
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				4.838.367.484,00		4.828.655.884,00		4.826.505.884,00		4.824.205.884,00		4.829.455.884,00		
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.688.367.484,00		4.673.655.884,00		4.666.505.884,00		4.659.205.884,00		4.659.455.884,00		
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	60	70	384.921.600,00	75	370.630.000,00	80	363.480.000,00	85	356.180.000,00	90	356.430.000,00	2.23.2.24.0.00.01.000 0 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				77.898.000,00		81.450.000,00		81.800.000,00		82.000.000,00		82.250.000,00		
Tersedianya Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	1	77.898.000,00	1	81.450.000,00	1	81.800.000,00	1	82.000.000,00	1	82.250.000,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	35	41		41		41		41		41			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	2		5		5		5		5			
2.23.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.898.000,00		6.450.000,00		6.800.000,00		7.000.000,00		7.250.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6	2	2.898.000,00	5	6.450.000,00	5	6.800.000,00	5	7.000.000,00	5	7.250.000,00		
2.23.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	35	41	30.000.000,00	41	30.000.000,00	41	30.000.000,00	41	30.000.000,00	41	30.000.000,00		
2.23.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.000.000,00		
2.23.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
2.23.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	8	8	40.000.000,00	8	40.000.000,00	8	40.000.000,00	8	40.000.000,00	8	40.000.000,00		
2.23.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				47.512.700,00		95.000.000,00		82.500.000,00		75.000.000,00		70.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terkelolanya Data Barang Milik Daerah dalam Aplikasi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2	47.512.700,00	6	95.000.000,00	5	82.500.000,00	5	75.000.000,00	2	70.000.000,00		
2.23.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				47.512.700,00		95.000.000,00		82.500.000,00		75.000.000,00		70.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	2	47.512.700,00	6	95.000.000,00	5	82.500.000,00	5	75.000.000,00	2	70.000.000,00		
2.23.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				105.500.000,00		105.500.000,00		105.500.000,00		105.500.000,00		105.500.000,00		
Tersedianya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	105.500.000,00	12	105.500.000,00	12	105.500.000,00	12	105.500.000,00	12	105.500.000,00		
2.23.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00		
2.23.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	105.000.000,00	12	105.000.000,00	12	105.000.000,00	12	105.000.000,00	12	105.000.000,00		
2.23.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				154.010.900,00		88.680.000,00		93.680.000,00		93.680.000,00		98.680.000,00		
Tersedianya Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	154.010.900,00	1	88.680.000,00	1	93.680.000,00	1	93.680.000,00	1	98.680.000,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	13	10		10		10		10		10			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	5		5		5		5		5			
2.23.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	13	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00		
2.23.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				33.660.000,00		33.680.000,00		33.680.000,00		33.680.000,00		33.680.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	1	33.660.000,00	1	33.680.000,00	1	33.680.000,00	1	33.680.000,00	1	33.680.000,00		
2.23.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00		
2.23.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				95.350.900,00		30.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	4.303.445.884,00	100	4.303.025.884,00	100	4.303.025.884,00	100	4.303.025.884,00	100	4.303.025.884,00		
2.23.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.23.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.23.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.302.445.884,00		4.302.025.884,00		4.302.025.884,00		4.302.025.884,00		4.302.025.884,00		
Laporan Keuangan sesuai SAP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	6	4.302.445.884,00	6	4.302.025.884,00	6	4.302.025.884,00	6	4.302.025.884,00	6	4.302.025.884,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	33		33		33		33		33			
2.23.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.247.899.884,00		4.247.899.884,00		4.247.899.884,00		4.247.899.884,00		4.247.899.884,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	30	33	4.247.899.884,00	33	4.247.899.884,00	33	4.247.899.884,00	33	4.247.899.884,00	33	4.247.899.884,00		
2.23.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				54.546.000,00		54.126.000,00		54.126.000,00		54.126.000,00		54.126.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	6	54.546.000,00	6	54.126.000,00	6	54.126.000,00	6	54.126.000,00	6	54.126.000,00		
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				135.000.000,00		140.000.000,00		145.000.000,00		150.000.000,00		155.000.000,00		
Meningkatnya frekuensi kunjungan perpustakaan	Persentase Pengunjung Perpustakaan (%)	26,74	28,5	135.000.000,00	30	140.000.000,00	31,5	145.000.000,00	33	150.000.000,00	35	155.000.000,00	2.23.2.24.0.00.01.000 0 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.02.2.01 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				75.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya pendampingan dan monitoring pengelolaan arsip dinamis	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	2.000	200	75.000.000,00	250	80.000.000,00	300	85.000.000,00	300	85.000.000,00	350	90.000.000,00		
	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	30	30		30		30		30		30			
	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	8	20		20		20		20		20			
	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)	25	25		25		25		25		25			
	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	50	30		30		30		30		30			
2.23.02.2.01.0004 - Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	30	30	10.000.000,00	30	10.000.000,00	30	10.000.000,00	30	10.000.000,00	30	10.000.000,00		
2.23.02.2.01.0011 - Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya (Perpustakaan)	25	25	15.000.000,00	25	15.000.000,00	25	15.000.000,00	25	15.000.000,00	25	15.000.000,00		
2.23.02.2.01.0013 - Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota				7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		
Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	8	20	7.500.000,00	20	7.500.000,00	20	7.500.000,00	20	7.500.000,00	20	7.500.000,00		
2.23.02.2.01.0016 - Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	50	30	7.500.000,00	30	7.500.000,00	30	7.500.000,00	30	7.500.000,00	30	7.500.000,00		
2.23.02.2.01.0018 - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan				20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		
2.23.02.2.01.0020 - Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)	6	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00		
2.23.02.2.02 - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
Jumlah kegiatan literasi yang diselenggarakan	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)	5	24	60.000.000,00	24	60.000.000,00	24	60.000.000,00	24	65.000.000,00	24	65.000.000,00		
	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	4	8		8		8		8		8			
2.23.02.2.02.0007 - Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)	5	24	10.000.000,00	24	10.000.000,00	24	10.000.000,00	24	10.000.000,00	24	10.000.000,00		
2.23.02.2.02.0010 - Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	4	8	50.000.000,00	8	50.000.000,00	8	50.000.000,00	8	55.000.000,00	8	55.000.000,00		
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)		13,33	15.000.000,00	20	15.000.000,00	40	15.000.000,00	60	15.000.000,00	80	15.000.000,00	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.23.03.2.01 - Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang)	10	25	10.000.000,00	25	10.000.000,00	25	10.000.000,00	25	10.000.000,00	25	10.000.000,00		
	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan (Eksemplar)	30	10		10		10		10		10			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.23.03.2.01.0003 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
2.23.03.2.01.0004 - Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan (Eksemplar)	30	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00		
2.23.03.2.02 - Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)	3	50	5.000.000,00	50	5.000.000,00	50	5.000.000,00	50	5.000.000,00	50	5.000.000,00		
	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)	3	50		50		50		50		50			
2.23.03.2.02.0003 - Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
Terlaksananya Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)	3	50	2.500.000,00	50	2.500.000,00	50	2.500.000,00	50	2.500.000,00	50	2.500.000,00		
2.23.03.2.02.0004 - Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
Terlaksananya Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota (Eksemplar)	3	50	2.500.000,00	50	2.500.000,00	50	2.500.000,00	50	2.500.000,00	50	2.500.000,00		
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				150.000.000,00		160.000.000,00		165.000.000,00		170.000.000,00		170.000.000,00		
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				144.500.000,00		152.750.000,00		160.000.000,00		140.000.000,00		170.000.000,00		
Meningkatnya aksesibilitas arsip	persentase arsip yang siap diakses (%)	10	10	43.455.000,00	20	15.000.000,00	40	0,00	60	55.000.000,00	80	30.000.000,00	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.24.02.2.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota				117.395.000,00		110.250.000,00		125.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		
Tersedianya data dan informasi arsiparis	Jumlah arsiparis (Dokumen)	4	4	16.350.000,00	0	0,00	0	0,00	2	25.000.000,00	0	0,00		
2.24.02.2.01.0006 - Penyusunan Database Arsiparis				16.350.000,00		0,00		0,00		25.000.000,00		0,00		
Terlaksananya penyusunan data dan informasi arsiparis	Jumlah arsiparis (Dokumen)	4	4	16.350.000,00	0	0,00	0	0,00	2	25.000.000,00	0	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Pelayanan Informasi Kearsipan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	8	3	27.105.000,00	0	15.000.000,00	0	0,00	1	30.000.000,00	2	30.000.000,00		
	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna)	0	0		2		0		0		0			
2.24.02.2.03.0001 - Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				0,00		15.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN (Pengguna)	0	0	0,00	2	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.24.02.2.03.0002 - Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				27.105.000,00		0,00		0,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	8	3	27.105.000,00	0	0,00	0	0,00	1	30.000.000,00	2	30.000.000,00		
Meningkatnya ketersediaan arsip berstandar baku	Nilai tingkat digitalisasi arsip (Angka)	80,03	82,3	101.045.000,00	83,3	137.750.000,00	84,3	160.000.000,00	85,5	85.000.000,00	86,5	140.000.000,00		
2.24.02.2.01 - Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota				117.395.000,00		110.250.000,00		125.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		
Terlaksananya pendampingan dan monitoring pengelolaan arsip dinamis	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	60	30	101.045.000,00	30	110.250.000,00	30	125.000.000,00	30	85.000.000,00	30	110.000.000,00		
	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas)	15.000	45.000		45.000		5.000		5.000		5.000			
	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)	3	0		15.000		0		0		1.500			
	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis (Unit)	0	2.160		3		100		0		0			
2.24.02.2.01.0001 - Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis				28.725.000,00		35.250.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		
Terkelolanya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas)	15.000	45.000	28.725.000,00	45.000	35.250.000,00	5.000	40.000.000,00	5.000	40.000.000,00	5.000	45.000.000,00		
2.24.02.2.01.0002 - Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis				0,00		20.000.000,00		0,00		0,00		20.000.000,00		
Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)	3	0	0,00	15.000	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1.500	20.000.000,00		
2.24.02.2.01.0003 - Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				39.920.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		
Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	60	30	39.920.000,00	30	40.000.000,00	30	45.000.000,00	30	45.000.000,00	30	45.000.000,00		
2.24.02.2.01.0004 - Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis				32.400.000,00		15.000.000,00		40.000.000,00		0,00		0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya pengadaan prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis (Unit)	0	2.160	32.400.000,00	3	15.000.000,00	100	40.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
Terlaksananya pendampingan dan monitoring pengelolaan arsip statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)	0	0	0,00	0	27.500.000,00	100	35.000.000,00	0	0,00	0	30.000.000,00		
	Jumlah Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan (Dokumen)	0	0		1		0		0		0			
	Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip (Naskah)	0	0		1		0		0		0			
	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI (Arsip)	0	0		0		0		0		30			
2.24.02.2.02.0001 - Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI				0,00		0,00		0,00		0,00		30.000.000,00		
Terkelolanya Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI (Arsip)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30	30.000.000,00		
2.24.02.2.02.0003 - Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip				0,00		5.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip	Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip (Naskah)	0	0	0,00	1	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.24.02.2.02.0004 - Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis				0,00		0,00		35.000.000,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)	0	0	0,00	0	0,00	100	35.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
2.24.02.2.02.0005 - Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan				0,00		22.500.000,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	Jumlah Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan (Dokumen)	0	0	0,00	1	22.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				5.500.000,00		7.250.000,00		5.000.000,00		30.000.000,00		0,00		
Meningkatnya penyelamatan dan perlindungan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	10	10	5.500.000,00	20	7.250.000,00	40	5.000.000,00	60	30.000.000,00	80	0,00	2.23.2.24.0.00.01.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.24.03.2.01 - Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				0,00		7.250.000,00		0,00		15.000.000,00		0,00		
Terfasilitasinya Pemusnahan Arsip	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)	0	0	0,00	300	7.250.000,00	0	0,00	0	15.000.000,00	0	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.24.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun				0,00		0,00		0,00		15.000.000,00		0,00		
Terlaksananya Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan (Berkas)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100	15.000.000,00	0	0,00		
2.24.03.2.01.0004 - Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				0,00		7.250.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)	0	0	0,00	300	7.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.24.03.2.02 - Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota				5.500.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terfasilitasinya perlindungan dan penyelamatan arsip	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana (Arsip)	0	10	5.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.24.03.2.02.0001 - Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana				5.500.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana (Arsip)	0	10	5.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.24.03.2.04 - Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		15.000.000,00		0,00		
Terlaksananya penilaian dan penetapan hasil alih media	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Arsip)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	15.000.000,00	0	0,00		
2.24.03.2.04.0002 - Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				0,00		0,00		0,00		15.000.000,00		0,00		
Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Arsip)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	15.000.000,00	0	0,00		
2.24.03.2.05 - Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang				0,00		0,00		5.000.000,00		0,00		0,00		
Terlaksananya pencarian arisp statis	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman (Arsip)	0	0	0,00	0	0,00	2	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
2.24.03.2.05.0003 - Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)				0,00		0,00		5.000.000,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman (Arsip)	0	0	0,00	0	0,00	2	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00		

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RKPD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPD Kota Tarakan Tahun 2025-2026 yang diamanatkan secara khusus kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	69,17	72,63	74,81	77,05	79,36	81,74	84,19	
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	61,95	65,06	68,31	70,34	72,45	74,62	76,86	
Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	53,90	60	65	70	75	80	85	
Persentase PD yang menyelenggarakan Proses Bisnis Tata Kelola Kearsipan berstandar baku berbasis Instrumen Kearsipan	Persentase (%)	73,33	80	90	93,33	93,75	94,12	100	
Indeks Kepuasan publik terhadap layanan pemanfaatan arsip	Indeks	0	76,61	80	84	86	88,31	90	
Nilai SAKIP	Nilai	74,91	75	80,30	80, 85	81,40	81,95	82,50	
IKM	Indeks	87,72	88,25	88,78	89,31	89,84	90,37	90,90	

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	61,95	72,63	74,81	77,05	79,36	81,74	84,19	
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	69,17	65,06	68,31	70,34	72,45	74,62	76,86	
3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U43/2009)	Persentase	73,48	74,94	76,44	77,97	79,53	81,12	82,74	
4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persentase	66,67	68	69,36	70,75	72,17	73,61	75,08	

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi dan penerjemahan kebijakan RKPD Kota Tarakan 2025-2029. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana Strategis (Renstra) ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam pelaksanaan pembangunan Kota Tarakan selama lima tahun kedepan sebagai acuan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sesuai dengan RKPD Kota Tarakan tahun 2025-2029.

Renstra ini disusun untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai posisi, tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasikan dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang terdapat dalam lampiran dokumen Renstra 2025-2029.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029 ini tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi.

Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan, sehingga tujuan dan sasaran PD sesuai dengan visi dan misi daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Dengan demikian, penting bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaan dokumen tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengkoordinasikan OPD dan Kabupaten/Kota dalam bersama-sama mencapai sasaran RKPD yang pada dasarnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPD Kota Tarakan 2025-2029 yang disusun melalui berbagai tahapan: persiapan, penyusunan rancangan, rancangan akhir Renstra dan diakhiri dengan penetapan. Setelah RKPD ditetapkan dalam Peraturan Daerah maka dilakukan penyempurnaan rancangan Renstra PD menjadi Rancangan Akhir Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, tujuannya adalah untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang ditetapkan dalam RKPD.

Rancangan akhir Renstra PD telah diverifikasi oleh BAPPEDA dalam rangka penyelarasan akhir dengan RKPD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh pengesahan. Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengesahan Renstra PD, kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menetapkan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjadi pedoman unit kerja di lingkungan PD dalam menyusun rancangan Renja PD.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bertanggung jawab atas pencapaian kinerja Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
2. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dilakukan sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam 5 (lima) tahun;
3. Pelaksanaan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dilakukan melalui Renja Perpustakaan dan Kearsipan setiap tahun dan realisasinya melalui DPA-Dinas Perpustakaan dan Kearsipan setiap tahun;
4. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA-Dinas Perpustakaan per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam mencapai sasaran Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
5. Dalam hal suatu pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memerlukan perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan periode berikutnya atau dilakukan revisi Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan jika pada kesempatan yang sama RKPD Kota Tarakan dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.

18. Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Tarakan 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyebutkan bahwa setiap daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Tarakan tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kota Tarakan 2025-2029.

Renstra Disbudporapar Kota Tarakan memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib bukan pelayanan dasar kebudayaan dan kepemudaan olahraga serta urusan pilihan pariwisata sesuai tugas dan fungsi dinas.

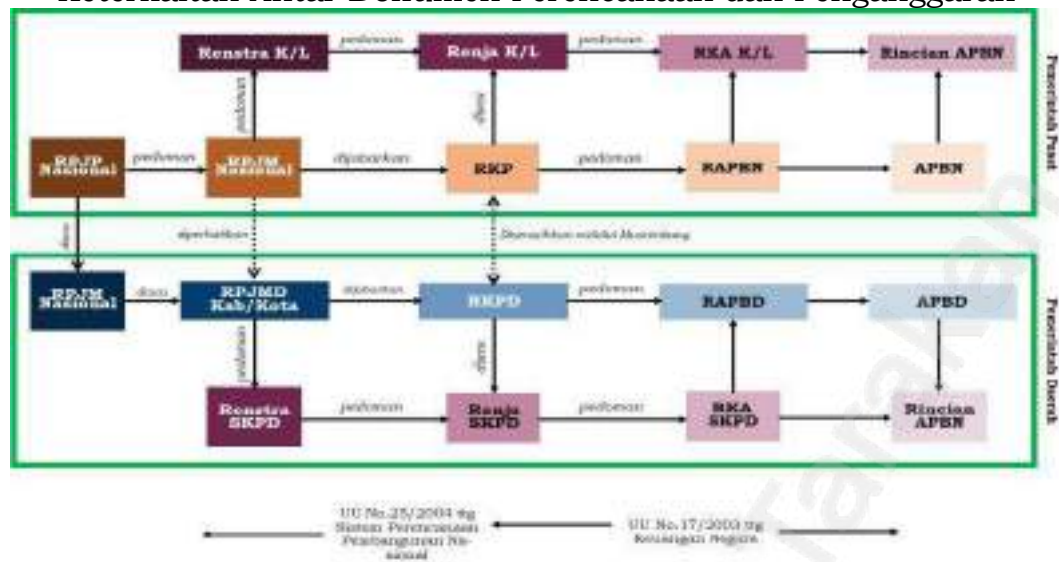
Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi :

1. Persiapan penyusunan renstra
2. Penyusunan rancangan awal renstra perangkat daerah
3. Penyusunan rancangan renstra perangkat daerah
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah
5. Perumusan rancangan akhir renstra perangkat daerah
6. Penetapan renstra perangkat daerah

Renstra Disbudporapar Kota Tarakan ini dipergunakan sebagai acuan perencanaan operasional kegiatan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Tarakan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya serta penyusunan anggaran berdasarkan kinerja yang telah ditetapkan (PK). Sedangkan penyusunan anggaran berdasar Kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang kemudian disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) guna mendukung operasional kegiatan yang telah ditetapkan dalam upaya mewujudkan Tujuan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Tarakan.

Gambaran tentang hubungan antara Renstra Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Gambar 1.2
Bagan Alir Proses Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Tarakan Tahun 2025-2029 berdasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan;
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029;
27. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2021 - 2041;
29. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2025 – 2045;
30. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
31. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
32. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Tarakan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Tarakan Tahun 2025-2029 adalah

1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan urusan pemerintahan dibidang Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata serta menyediakan tolak ukur dalam penetapan kinerja selama 5 (lima) tahun.
2. Menjamin keterkaitan, keserasian serta harmonisasi antara perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan program kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan.
3. Menyesuaikan rencana target capaian Renstra PD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025 – 2029.
4. Memberikan arah dan pedoman bagi Aparatur Sipil Negara Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata dalam melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan program prioritas sesuai dengan urusan pemerintahan dibidang Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata sehingga tujuan program dan sasaran yang

telah ditetapkan dapat tercapai.

5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana pembangunan tahunan.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Tarakan Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

1. Menterjemahkan dan menjabarkan visi misi Kepala Daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Tarakan periode 2025-2029 dalam bentuk tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang lebih spesifik dan terarah serta yang bersifat operasional
2. Sebagai kerangka acuan dalam menyusun rencana kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata selama 5 (lima) tahun
3. Sebagai dasar penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi serta penilaian kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata dalam menjalankan dan melaksanakan kegiatan sesuai tupoksinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Tarakan Tahun 2025-2029 ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
 - 2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.1.3. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah 2
 - 2.1.4. Kelompok sasaran layanan
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah
- 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGAARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja
- 4.2. Program Pendukung Prioritas
- 4.3. Indikator Kinerja Utama
- 4.4. Indikator Kinerja Kunci

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 09 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Tarakan

Berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang kebudayaan, Kepemudaan dan olahraga serta pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah, mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, kepemudaan dan olahraga serta pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang kebudayaan, kepemudaan dan olahraga serta kebudayaan dan sarana prasarana yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. pelaksanaa kebijakan di bidang kebudayaan, kepemudaan dan olahraga serta kebudayaan dan sarana prasarana yang menjadi kewenangan Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan, kepemudaan dan olahraga serta kebudayaan dan sarana prasarana yang menjadi kewenangan Daerah;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Disbudporapar Kota Tarakan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Kebudayaan, terdiri atas :
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Kepemudaan dan Olahraga, terdiri atas :
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, terdiri atas :
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Pemasaran, Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri atas :
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Adat Tidung dan Budaya Serta Museum Sejarah Tarakan
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.

Uraian Tugas dan fungsi Disbudporapar adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas

Merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Wali Kota. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkondisikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kebudayaan, kepemudaan dan olahraga serta pariwisata.

b. Sekretariat

Merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Fungsi :

- 1) Koordinasi kegiatan Dinas;
- 2) Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas;
- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;
- 4) Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas;
- 5) Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada Dinas;
- 6) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Dinas;
- 7) Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- 8) Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Dinas; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri atas :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam pengoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Fungsi :

- 1) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas;
- 2) Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas;
- 3) Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada Dinas;
- 4) Penyelenggaraan pengelolaan barangmilik/kekayaan daerah di Dinas;
- 5) Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Tugas :

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam koordinasi kegiatan Dinas, koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, dan pengoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

fungsi:

- 1) Koordinasi kegiatan Dinas;
- 2) Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas;

- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
- 4) Penyiapan bahan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Dinas; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

c. Bidang Kebudayaan

Merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang. Kepala Bidang membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Tugas :

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan sesuai dengan kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Fungsi :

- 1) Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- 2) Penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- 3) Pelaksanaan pembinaan bahan pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- 4) Pelaksanaan penerbitan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban izin membawa cagar budaya ke luar daerah dan dalam daerah provinsi;
- 5) Pelaksanaan dan pembinaan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- 6) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- 7) Pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

d. Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang. Kepala Bidang membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Tugas :

Dinas di bidang kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pembudayaan pemuda dan olahraga;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pembudayaan pemuda dan olahraga;
- 3) Pelaksanaan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda

dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor daerah, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader daerah.

- 4) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan dan olahraga tingkat daerah;
- 5) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah.
- 6) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
- 7) Pelaksanaan pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga;
- 8) Pelaksanaan pemberian pelayanan administrasi perizinan penyelenggaraan kegiatan olahraga;
- 9) Pelaksanaan peningkatan mutu, wawasan, sikap dan keterampilan teknis bagi pembina, pelatih, wasit, juri, dan tenaga pendukung;
- 10) Pelaksanaan pemantauan, pengawasan, dan pengendalian olahraga pendidikan, rekreasi, tradisional, dan layanan khusus, olahraga prestasi dan organisasi olahraga;
- 11) Pelaksanaan administrasi di bidang pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga;
- 12) Pelaksanaan pengaturan sistem penganugerahan prestasi;
- 13) Pelaksanaan aktivitas kepemudaan;
- 14) Pengelolaan sarana dan prasarana olahraga
- 15) Pelaksanaan pemberian pelayanan administrasi perizinan penyelenggaraan kegiatan pemuda;
- 16) Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan pengendalian dibidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan kepramukaan;
- 17) Pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan kepramukaan;
- 18) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan kepramukaan; dan
- 19) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

e. Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata

Merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang. Kepala Bidang membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Tugas:

Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Fungsi :

- 1) perumusan kebijakan di bidang pengembangan destinasi, daya tarik wisata, dan pengembangan industri pariwisata;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi, daya tarik wisata, dan pengembangan industri pariwisata;
- 3) penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi, daya tarik wisata dan industri pariwisata;
- 4) pelaksanaan administrasi dibidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
- 5) pelaksanaan proses rekomendasi penerbitan perijinan industri pariwisata;

- 6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang destinasi, daya tarik wisata, dan pengembangan industri pariwisata; dan
 - 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- f. Bidang Pemasaran, Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemasaran, sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pemasaran, Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala Bidang. Kepala Bidang membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- Tugas :
- Dinas di bidang pemasaran, sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- Fungsi :
- 1) perencanaan operasional program bidang Pemasaran Sumber Daya Pariwisata Ekonomi Kreatif berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
 - 2) pengelolaan dan mengatur kebijakan teknis program bidang Pemasaran sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - 3) pelaksanaan pembinaan dan pengukuran indikator kinerja bidang Pemasaran sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - 4) pengaturan dan mengelola pengembangan promosi pariwisata daerah serta peningkatan kerjasama kemitraan dalam pemasaran pariwisata;
 - 5) pengaturan dan mengelola sumber daya pariwisata serta pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
 - 6) penyediaan data untuk rujukan strategi pengembangan pemasaran pariwisata; dan
 - 7) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah
- Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas adalah Balai Adat Tidung dan Budaya Serta Museum Sejarah merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional yang menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata di bidang balai adat tidung serta museum sejarah tarakan.
- UPTD Balai Adat Tidung dan Budaya serta Museum Sejarah Tarakan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- Tugas :
- Sebagai penanggung jawab atas seluruh kegiatan di UPTD, merencanakan, merumuskan kebijakan, keuangan, pembinaan kepegawaian, pengelolaan bangunan, prasarana dan peralatan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
- Fungsi :
- 1) Penyusunan rencana program kerja UPTD;
 - 2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis UPTD;
 - 3) Pelaksanaan pengelolaan, pengendalian sarana dan prasarana UPTD;
 - 4) Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana sesuai penjabaran APBD;
 - 5) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan balai adat tidung

- dan budaya serta museum sejarah tarakan;
- 6) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan evaluasi kegiatan;
 - 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas teknis dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha. Sub Bagian Tata Usaha UPTD mempunyai tugas dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan penataan administrasi perkantoran UPTD UPTD menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan rencana program ketatausahaan UPTD;
- 2) Pelaksanaan ketatausahaan dan kepegawaian;
- 3) Pelaksanaan rumah tangga dan pengelolaan aset;
- 4) Pelaksanaan penghapusan barang;
- 5) Pelaksanaan keuangan UPTD;
- 6) Pelaksanaan penyusunan rancangan laporan kegiatan operasional UPTD
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

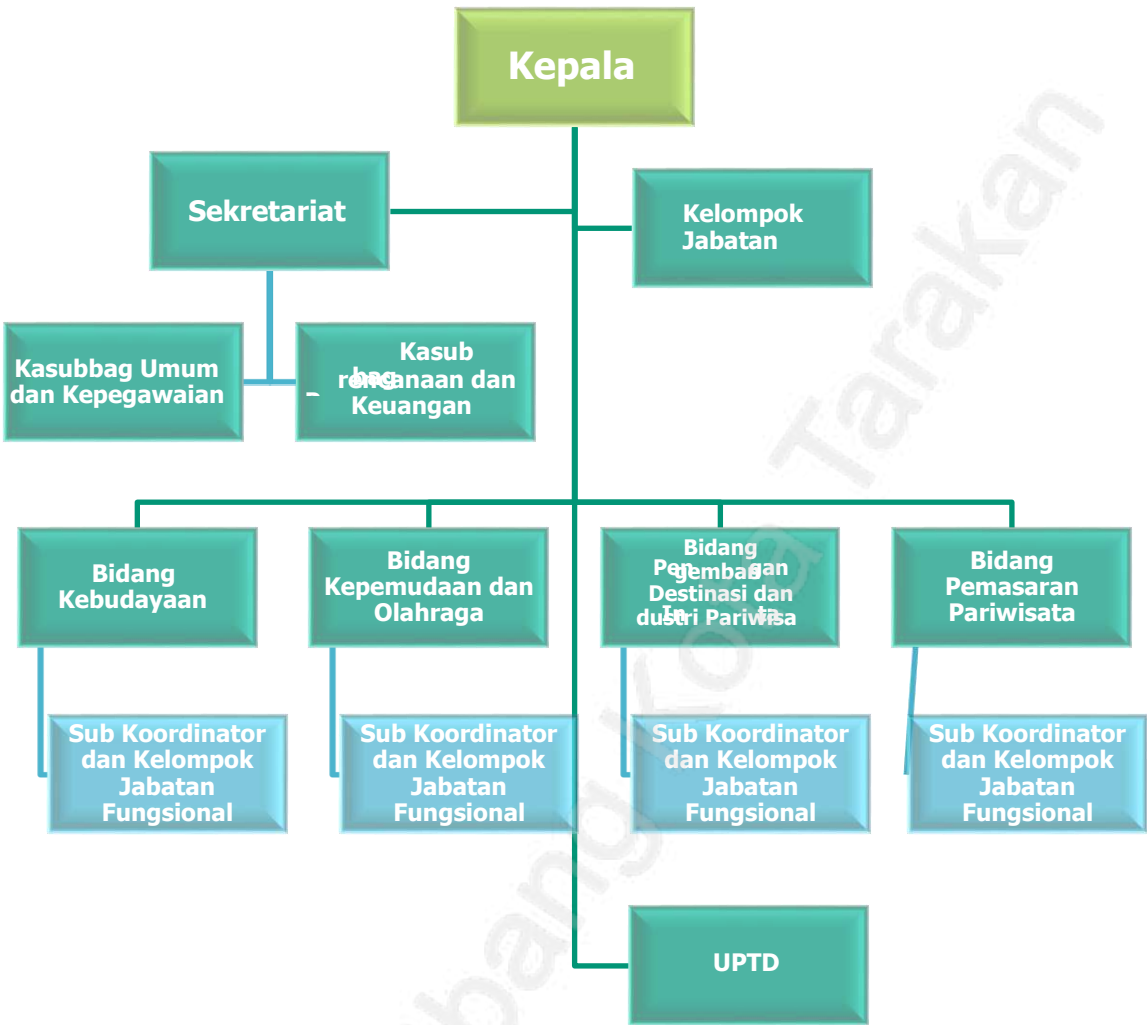
h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Tarakan, susunan organisasi sebagaimana gambar dibawah ini:

Gambar 2. 1
Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta
Pariwisata Kota Tarakan



2.1.3 Sumber Daya Perangkat Daerah
Pegawai Disbudporapar Kota Tarakan per September 2025 dengan jumlah sebanyak 41 (empat puluh satu) orang dan Pegawai UPT Balai Adat Tidung sebanyak 7 (tujuh) orang dengan susunan sebagai berikut :

Tabel 2 1
Susunan Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Eselon

No	Pangkat/Golongan Ruang	Jabatan yang Diduduki			
		Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Non Eselon
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1			
2	Pembina Tingkat I (IV/b)		1		
3	Pembina IV/a		2		
4	Penata Tingkat I (III/d)		1	3	12
5	Penata (III/c)				8
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)				6
7	Penata Muda (III/a)				3
8	Pengatur Tingkat I (II/d)				6
9	Pengatur (II/c)				3
10	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)				2
11	Pengatur Muda (II/a)				
Jumlah		1	4	3	40

Tabel 2 2
Susunan Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	SD	-	-	-
2	SMP	1		1
3	SMA/SMK	7	6	13
4	Diploma	2	2	4
5	S1	9	15	24
6	S2	3	3	6
Jumlah		22	26	48

Tabel 2 3
Susunan Pegawai Berdasarkan Pendidikan Struktural

No	Jenis Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan	Jumlah	Jabatan Struktural yang Diduduki Eselon		
			II	III	IV
1	Diklatpim Tingkat I	-	-	-	-
2	Diklatpim Tingkat II	1	1	-	-
3	Diklatpim Tingkat III	2	-	3	-
4	Diklatpim Tingkat IV	9	-	-	2
Jumlah		12	1	3	2

Tabel 2 4
Susunan Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional

No	Nama Jabatan Fungsional	Laki-laki	Perempuan
1	Pamong Budaya Ahli Muda	2	-
2	Analisis Kebijakan Ahli Muda	-	1
3	Pelatih Olahraga Ahli Muda	-	1
4	Adyatama Kepariwisata Ahli Muda	1	2
Jumlah		3	4

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Disbudporapar Kota Tarakan per September 2025 dengan jumlah sebanyak 19 (sembilan belas) orang dengan susunan sebagai berikut :

Tabel 2 5
Susunan PPPK Berdasarkan Pendidikan Formal

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	SD	-	-	-
2	SMP	-	-	-
3	SMA/SMK	9	1	10
4	Diploma	-	-	-
5	S1	3	6	9
6	S2	-	-	-
Jumlah		12	7	19

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan dengan banyaknya pegawai, jumlah sumber daya manusia tersebut terbilang masih kurang memadai. Sumber daya manusia yang memadai sangat diperlukan dalam upaya mendukung terciptanya pelayanan yang baik.

Berikut sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang tersedia pada Disbudporapar Kota Tarakan :

Tabel 2 6
Sarana dan Prasaana Penunjang

No	Uraian	Jumlah
1	A.C. Sentral	7
2	A.C. Split	14
3	A.C. Unit	5
4	A.C. Window	3
5	Alat Angkutan Apung Bermotor lainnya lain-lain	1
6	Alat Badminton	13
7	Alat bantu lainnya lain-lain	1
8	Alat Kantor Lainnya lain-lain	16
9	Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik lain-lain	1
10	Alat Penghancur Kertas	1
11	Alat Pengolah Tanah dan Tanaman lain-lain	5
12	Alat Rumah Tangga lainnya (Home use) lain-lain	489
13	Alat Studio lain-lain	5
14	Alat Tennis Meja	2
15	Alat Volley	5
16	Antena SHF Portable	1
17	Bangku Tunggu	41
18	Bidang Studi: PMP lain-lain	3
19	Boneka	2
20	Brand Mark (Plank Nama / Berupa Papan Nama Besar)	1
21	Brandkas	3
22	Buffet Kaca	1
23	Camera Digital	1
24	Camera Digital	1
25	Camera Film	3
26	CCTV - Camera Control Television System	1
27	DC/AC Standards	1
28	Digital Camera	1
29	Dispenser	12
30	Electric Generating Set lain-lain	1
31	External Portable Hardisk	1
32	Facsimile	1
33	Filing Cabinet Besi	20
34	Gergaji chain Saw	3
35	Gerobak Dorong	117
36	Gerobak Tarik	8
37	Hair Dryer	2
38	Handy Cam	7
39	Handy Talky (HT)	6

No	Uraian	Jumlah
40	Jam Elektronik	4
41	Jam Mekanis	2
42	Kamera Digital	1
43	Karpet	2
44	Kendaraan Bermotor Beroda Dua lain-lain	6
45	Keris	6
46	Keyboard (Peralatan mini komputer)	2
47	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	2
48	Kipas Angin	15
49	kursi Besi/Metal	14
50	Kursi Biasa	141
51	Kursi Fiber Glas/Plastik	204
52	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	10
53	Kursi Kayu	349
54	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1
55	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
56	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3
57	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	8
58	Kursi Kerja Pejabat lain-lain	37
59	Kursi Putar	36
60	Kursi Rapat	70
61	Kursi Tamu	1.200
62	Lain-lain Alat Olahraga	95
63	Lain-lain Alat Pemadam Kebakaran	2
64	Lain-lain Alat Pengukur Waktu	2
65	Lain-lain Alat Penyimpanan	2
66	Lain-lain Alat Peraga Bidang Studi Keterampilan	1
67	Lain-lain Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1
68	Lain-lain Meja Kerja Pejabat	79
69	Lain-lain Peralatan Komputer Main Frame	1
70	Lain-lain Peralatan Olahraga lainnya	34
71	Lain-lain Personal Komputer	6
72	Lain-lain Rambu Tidak Bersuar	1
73	Lain-lain unit Pemeliharaan Lapangan	1
74	Lampu	12
75	Laptop	1
76	Laptop	22
77	Layar Film/Projector	3
78	LCD Monitor	1
79	Lemari Besi/Metal	4
80	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	8
81	Lemari Es	5
82	Lemari Kaca	6
83	Lemari Kayu	31
84	Lemari Penyimpanan	1
85	Lensa Kamera	1
86	loud Speaker	1
87	Main Frame (Komputer Jaringan)	1
88	Megaphone	1
89	Meja 1/2 Biro	1
90	Meja Bundar	10
91	Meja Kerja	4
92	Meja Kerja Kayu	7
93	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1
94	Meja Kerja Penjabat Eselon II	1
95	Meja Kerja Penjabat Eselon III	3
96	Meja Komputer	1
97	Meja Podium	2
98	Meja Rapat	1
99	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1
100	Meja Tamu Biasa	124
101	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselone II	1
102	Mesin Absen (Time Recorder)	5
103	Mesin Absensi	3
104	Mesin Foto Copy Double Folio	1
105	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	13
106	Mesin Ketik Listrik	3
107	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	3
108	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1

No	Uraian	Jumlah
109	Mesin Komprosr	1
110	Mesin Pemotong Rumput	17
111	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	4
112	Mesin Penghitung Uang	1
113	Mesin Vacum Siler	1
114	Meubelair lain-lain	18
115	Microphone	1
116	Microphone/Wireless MIC	2
117	Note Book	14
118	Over Head Projector	1
119	P.C Unit	25
120	Pacul	3
121	Palan visual/Papan Nama	1
122	Papan Nama Instansi	2
123	Papan Panel	1
124	Papan Pengumuman	4
125	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	3
126	Peralatan Jaringan lain-lain	1
127	Peralatan Komputer lainnya lain-lain	2
128	Peralatan Personal Komputer lain-lain	9
129	Peralatan Studio Audio lain-lain	1
130	Peralatan Studio Video dan Film lain-lain	3
131	Pesawat Telephone	2
132	Peta	1
133	Pick Up	1
134	Pisau Lempar	21
135	Pistol	2
136	Pompa air	8
137	Pompa lain-lain	2
138	Pot Besar	1
139	Prape for Memory dan Typloid	1
140	Printer	2
141	Printer (Peralatan Personal Komputer)	27
142	Proyektor Romad Complet	1
143	Publik Astari (Pembatas Antrian)	30
144	Punggung	48
145	Rak kayu	3
146	Rak Sampah	14
147	Raket Tennis	6
148	Rambu Jalan	10
149	Recorder Display lain-lain	2
150	Rice Cooker (Alat Dapur)	40
151	Road Barrier	20
152	Rol Meter	2
153	Samurai	3
154	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1
155	Scanner (Peralatan Personal Kompter)	2
156	Senapan Runduk	2
157	Sepeda	14
158	Sepeda Motor	20
159	Skap	1
160	Sofa	30
161	Sound System	2
162	Speed Boat / Motor Tempel	1
163	Stabilisator	4
164	Stabilizer	1
165	Station Wagan	4
166	Tangga	4
167	Tangga Aluminium	1
168	Tangki Air	3
169	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	2
170	Telephone (PABX)	1
171	Televisi	9
172	Tenda	3
173	Tenda Sangga	5
174	Teralis	2
175	Terpal Tenda	6
176	Tiang Bendera	1
177	Timbangan Digital	2

No	Uraian	Jumlah
178	Tripod Camera	1
179	Tustel	5
180	Uninterruptible Power Supply (UPS)	8
181	Vacum Freeze Dry Chamber	2
182	Video Tape Recorder Portable	1
183	Walk Through/Portal Metal Detector	1
184	White Board	3
185	Wire Less	1

2.1.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan yang diberikan oleh Disbudporapar Kota Tarakan sebagai salah satu Perangkat Daerah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Konkuren yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pelayanan pada bidang kebudayaan termasuk dalam Urusan Pemerintahan Wajib non pelayanan dasar, sedangkan pelayanan pada bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Kebudayaan merupakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang termasuk kepada Urusan Wajib yang berkaitan dengan pengembangan kesenian dan tradisi, pelestarian dan pengelolaan cagar budaya serta pengelolaan museum.

Kepemudaan dan Olahraga merupakan penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang termasuk kepada Urusan Wajib yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pemudaan dan peningkatan prestasi olahraga.

Pariwisata merupakan penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang termasuk kepada Urusan Pilihan yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan pada bidang kepariwisataan melalui fasilitasi investasi dan promosi pariwisata, kerjasama dengan mitra pariwisata, fasilitaskegiatan/event kepariwisataan, pembinaan pengelolaan sarana wisata dan obyek wisata.

Capaian kinerja pelayanan Disbudporapar berdasarkan realisasi capaian Indikator Kinerja Utama selama kurun waktu 2019-2024 dapat dilihat selengkapnya pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2 7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata

No	Indikator	2019			2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
1	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan							50	50	100	52,6	54	103	55	55	100	58,33	58,33	100
2	Persentase agar budaya yang dilestarikan dan kelola (indikator							85	84	98,82	87	89,2	103	90	90,54	101	95	97,29	102,41
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri (indikator							0,7	0,79	112,9	0,8	0,17	213	0,9	106	138	1	156	156
4	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan							15	16,2	107,9	15	5,24	34,9	15	18,65	124	20	20	100
5	Persentase Atlet yang Berprestasi							20	69	345	30	75,5	252	40	57,14	143	80	98	122,5
6	Persentase Daya Tarik Wisata (D TW) yang dikembangkan (indikator							55,5	55,5	100,1	61	66,7	109	61	66,67	109	66	66,7	101
7	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara							15,8	30,7	192,7	5	12,2	244	8	22	275	10	1131	113,1
8	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (indikator							1	11,7	1170	2	47,36	2368	3	20,47	682	4		
9	Tingkat Hunian Akomodasi (indikator Dispar 2019,	34	29	85	-	-	-	25	25,5	102,2	26	27,8	107	27	33,54	124	28		
10	Persentase SDM Pariwisata Tersertifikasi Kompetensi (indikator							0,06	0	0	0,1	0	0	0,1	0,1	104	0,1		
11	Nilai/Predikat SAKIP oleh APIP (indikator							65/B	70,25/BB		67/B	75,93/BB		67/B			71/BB		
12	Persentase destinasi pariwisata yang dikembangkan/ditingkat				2,4	2,4	100	-			-			-			-		
13	Rate-rata lama kunjungan wisatawan (indikator dispar 2020)	-	-	-	0,3	0,2	67	-			-			-			-		
14	Persentase SDM pariwisata yang ditingkatkan kualitasnya (indikator dispar 2020)	-	-	-	0,2	0,8	400	-			-			-			-		
15	Persentase usaha pariwisata yang dibina (indikator dispar 2020)	-	-	-	75	100	133	-			-			-			-		
16	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	20	21	104	-	-	-	-			-			-			-		

Tabel 2 8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
BELANJA	12.169.579.213	20.422.932.240	32.065.773.743	34.034.601.212	10.757.045.923	18.857.627.662	30.726.312.837	31.196.590.184	88,39	92,34	95,82	91,66

2.1.5 Kelompok Sasaran Layanan

Sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 membedakan jenis pelayanan menjadi tiga kelompok. Ketiga kelompok tersebut adalah Kelompok Pelayanan Administratif, Kelompok Pelayanan Barang dan Kelompok Pelayanan Jasa. Disbudporapar Kota Tarakan memberikan pelayanan yang menghasilkan bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti Surat Ijin Penggunaan Lokasi Kawasan Wisata, Surat Ijin Penggunaan Lokasi Kawasan Olahraga, Rekomendasi Peminjaman Gedung Kepemudaan, Dokumen Perjanjian Sewa Penggunaan Tanah dan Bangunan Pemerintah, Dokumen Perjanjian Sewa Bangunan Pemerintah dan Berita Acara Pemeriksaan Ijin usaha Pariwisata serta memberikan pelayanan penyelenggaraan event kebudayaan, kesenian dan pariwisata untuk Masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata sebagai salah satu penyedia layanan publik di Provinsi Kalimantan Utara, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif. Adapun hasil Survey Pelayanan Masyarakat Disbudporapar tahun 2024 adalah senilai 83,92 dengan predikat B atau Baik. Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai.

2.1.6 Mitra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata dalam Pemberian Pelayanan

Meliputi berbagai pihak seperti masyarakat, lembaga, organisasi, atau komunitas pemuda dan olahraga, pelaku usaha pariwisata (hotel, restoran, travel agent), organisasi/lembaga kebudayaan dan pariwisata, lembaga pendidikan, dan instansi pemerintah terkait lainnya. Kemitraan ini penting untuk pengembangan keterampilan pemuda, atau pembinaan kelembagaan, penyaluran dana hibah, mengembangkan potensi, mempromosikan destinasi, menyelenggarakan acara, dan memastikan kualitas pelayanan pariwisata di suatu daerah. Berikut adalah bentuk-bentuk kemitraan Disbudporapar:

- Masyarakat:
Untuk memperluas jangkauan dan efektivitas program Disbudporapar yang melibatkan warga lokal yang memiliki potensi atau kepentingan terhadap kebudayaan daerah serta melibatkan masyarakat dalam upaya pembinaan dan pengembangan potensi pemuda dan olahraga, keterlibatan masyarakat melalui penyediaan informasi, partisipasi dalam acara, dan pengembangan kerajinan lokal.
- Pelaku Usaha:
Wirausahawan yang dapat mengemas dan memanfaatkan potensi budaya menjadi produk ekonomi. Untuk program pengembangan kewirausahaan muda, seperti pelatihan e-commerce, yang bertujuan membekali pemuda dengan keterampilan bisnis digital. melibatkan hotel, restoran, pengelola atraksi, dan penyedia jasa tur untuk menciptakan paket wisata yang menarik, meningkatkan kualitas layanan, serta mendukung kegiatan promosi.

- **Organisasi dan Lembaga:**
Bekerja sama dengan komunitas seni, budaya, kepemudaan dan olahraga, organisasi pariwisata untuk menyelenggarakan kegiatan seni dan budaya, serta kegiatan pariwisata lainnya.
- **Lembaga Pendidikan:**
Melibatkan perguruan tinggi dan sekolah untuk penelitian, pengembangan SDM di bidang kebudayaan kepemudaan dan olahraga serta pariwisata, program pelatihan bagi pelaku pariwisata.
- **Instansi Pemerintah Terkait:**
Berkoordinasi dengan instansi pemerintah daerah lain seperti dinas kebudayaan, pemuda dan olahraga, dinas pariwisata, dinas lingkungan hidup, dinas pendapatan daerah untuk mendukung pengembangan pariwisata secara holistik.

Manfaat kemitraan ini:

- **Peningkatan Kualitas Pelayanan:**
Dengan adanya kolaborasi, diharapkan pelayanan yang diberikan kepada wisatawan menjadi lebih baik dan terintegrasi.
- **Pengembangan Potensi Daerah:**
Turut serta dalam pengembangan kapasitas seniman, budayawan, dan masyarakat melalui pelatihan dan program-program lainnya. Kemitraan membantu mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempromosikan potensi objek wisata dan budaya di daerah.
- **Pengembangan Ekonomi Kreatif:**
Melalui sinergi, sektor ekonomi kreatif dapat lebih berkembang, termasuk pengembangan produk-produk unggulan daerah.
- **Peningkatan Partisipasi Masyarakat:**
Membantu menyosialisasikan dan mempromosikan kebudayaan daerah kepada publik luas, baik di tingkat lokal maupun nasional, keterlibatan masyarakat dalam kepemudaan dan olahraga agar mampu berkembang dan berdaya, serta pariwisata dapat meningkatkan rasa memiliki dan kepedulian terhadap aset daerah.

2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Serta Pariwisata

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Disbudporapar

Dalam pelaksanaan fungsi oleh Disbudporapar, masih terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan fungsi Disbudporapar secara optimal sebagaimana dapat dipetakan dalam tabel di bawah :

Tabel 2 9
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Masih rendahnya pendapatan sektor pajak hotel dan restoran terhadap PAD	Masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha
			Masih rendahnya tingkat hunian akomodasi
			Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Masih rendahnya promosi
		Masih rendahnya pendapatan sektor retribusi terhadap PAD	Masih rendahnya daya tarik wisata
			Masih rendahnya promosi pariwisata
			Masih rendahnya kepatuhan SDM pengelola retribusi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2	Rendahnya kontribusi pemajuan kebudayaan daerah	Masih rendahnya pelestarian objek pemajuan kebudayaan daerah	Masih rendahnya pelestarian objek pemajuan kebudayaan daerah Warisan Budaya Benda
			Masih rendahnya pelestarian objek pemajuan kebudayaan daerah Warisan Budaya Takbenda
3	Masih rendahnya peran pemuda	Masih rendahnya kesadaran pemuda terhadap pembangunan	Masih rendahnya upaya penyadaran pemuda
			Masih rendahnya prestasi dan inovasi pemuda
			Masih rendahnya kreativitas organisasi pemuda
			Masih rendahnya sarana dan prasarana kepemudaan
4	Masih rendahnya prestasi olahraga	Masih rendahnya prestasi olahraga di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional	Masih rendahnya pembinaan dan pengembangan atlet
			Masih rendahnya ajang kompetisi rutin yang terstruktur di tingkat daerah
			Masih rendahnya pelatih profesional dan tersertifikasi
			Masih rendahnya kreativitas organisasi keolahragaan
			Masih rendahnya sarana dan prasarana olahraga

2.2.2 Isu Strategis

Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan fungsi Disbudporapar sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundangundangan, serta dengan memperhatikan potensi permasalahan yang dapat terjadi dan khususnya berpedoman pada isu strategis daerah, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagaimana terurai dalam tabel di bawah.

Tabel 2.10
Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Masih rendahnya pendapatan sektor pajak hotel dan restoran terhadap PAD	- Peningkatan jumlah wisatawan seringkali berbanding lurus dengan peningkatan dampak lingkungan, seperti polusi dan kerusakan habitat	- Perubahan iklim memberikan dampak signifikan pada sektor pariwisata, termasuk ketersediaan sumber daya alam dan infrastruktur. - Keamanan dan keselamatan wisatawan, terutama dalam konteks geopolitik yang tidak stabil. - Pengembangan pariwisata halal menjadi potensi besar, terutama di negara dengan mayoritas penduduk Muslim, namun perlu ada penguatan ekosistem halal dan sertifikasi halal - Munculnya konsep slow tourism sebagai alternatif pariwisata berkelanjutan yang lebih menekankan pada pengalaman mendalam dan interaksi dengan budaya lokal.	- Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola dan mengembangkan produk serta layanan wisata - Kualitas dan ketersediaan infrastruktur pendukung pariwisata, seperti transportasi dan akomodasi - Efektivitas pemasaran dan promosi destinasi wisata, termasuk pemetaan pasar potensial wisatawan - inflasi dan biaya perjalanan yang lebih mahal juga mempengaruhi minat wisatawan.	- Keamanan dan keselamatan wisatawan harus menjadi prioritas utama. - Pembangunan infrastruktur yang tidak tepat dapat merusak lingkungan dan mengganggu kehidupan masyarakat. - Sampah yang dihasilkan oleh wisatawan dapat mencemari lingkungan dan merusak keindahan destinasi wisata - Pariwisata dapat mengubah nilai-nilai budaya dan tradisi lokal, serta menimbulkan konflik sosial.	Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Masih rendahnya pelestarian objek pemajuan kebudayaan daerah		- Hilangnya identitas budaya lokal - Pergeseran nilai-nilai tradisional - Konflik antar budaya	- Ancaman globalisasi, Arus budaya asing yang masuk melalui media sosial, film, dan musik dapat mengancam keberlangsungan budaya lokal. - Pelestarian bahasa dan pengetahuan tradisional: Menjaga keberlangsungan bahasa daerah dan pengetahuan tradisional yang mulai tergerus. - Pemanfaatan teknologi untuk pelestarian: Teknologi dapat dimanfaatkan untuk mendokumentasikan, mempromosikan, dan mengembangkan budaya. - Revitalisasi tradisi dan warisan budaya	- keberadaan warisan budaya belum dilestarikan dan dikembangkan secara optimal - Pemanfaatan potensi budaya untuk pariwisata dan ekonomi kreatif - Pengelolaan tata kelola warisan budaya	Rendahnya kontribusi pemajuan kebudayaan daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	Masih rendahnya upaya penyadaran pemuda	Perubahan iklim, polusi, dan degradasi lingkungan menjadi ancaman nyata bagi masa depan generasi muda	- Keterampilan Hijau untuk Masa Depan Berkelanjutan (Pemuda memiliki peran penting dalam transisi menuju ekonomi hijau dan perlu dibekali dengan keterampilan yang relevan) - Tantangan dalam akses pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang memadai, terutama di negara-negara berkembang, masih menjadi isu krusial bagi pemuda.	- Menciptakan pemuda yang berkarakter kuat, berdaya saing, dan memiliki semangat kebangsaan yang tinggi. - Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) - Sinergi Pusat dan Daerah - Pengembangan Kewirausahaan Pemuda - Penanggulangan Perilaku Negatif Pemuda	- Pemanfaatan Potensi Daerah dari potensi yang berbeda-beda dalam bidang kepemudaan.	Masih rendahnya peran pemuda
	Masih rendahnya prestasi olahraga di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional		- Transformasi Digital dalam Olahraga - Ketimpangan sumber daya antar negara dalam pembinaan atlet dan pengembangan infrastruktur olahraga	- Peningkatan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) - Mencetak atlet berprestasi di berbagai tingkatan, baik nasional maupun internasional, serta mengembangkan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup masyarakat. - Sinergi Pusat dan Daerah	- Optimalisasi Olahraga Pendidikan dan Rekreasi (menjadikan masyarakat bugar dengan gemar berolahraga dan menjadikannya bagian dari gaya hidup). - Pengembangan potensi wisata olahraga atau pembinaan atlet dari daerah tertentu.	Masih rendahnya prestasi olahraga

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Disbudporapar Tahun 2025-2029

Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan yang di tuangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

Visi:

Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Cerdas yang bertumpu pada sektor Jasa, Perdagangan, Perikanan Kelautan dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Maju menuju Masyarakat Sejahtera

Dalam mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah maka ditetapkan beberapa Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Tarakan Tahun 2025 – 2029 yaitu:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
2. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar yang handal
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui dukungan kemudahan berusaha yang berkeadilan dan bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, perikanan kelautan, ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan (UMKM)
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif serta menjaga stabilitas ketertiban dan ketentraman kota
5. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh menghadapi bencana

Berdasarkan misi diatas, Disbudporapar Kota Tarakan melaksanakan misi ke 3 (tiga) yaitu Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui dukungan kemudahan berusaha yang berkeadilan dan bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, perikanan kelautan, ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan (UMKM) yang diterjemahkan dalam pencapaian dan penyelarasan tujuan dan Sararan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Tarakan Tahun 2025–2029. Tujuan dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Tarakan Tahun 2025 – 2029 adalah pada tujuan ke 3 yaitu Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi, dengan sasaran Meningkatnya pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Tarakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Harga berlaku dan Meningkatnya Peran Pemuda serta Prestasi Olahraga dengan indikator :

1. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku
2. Persentase Pemuda Berprestasi
3. Persentase Peningkatan Perolehan Medali

Berdasarkan tujuan Renstra Disbudporapar Kota Tarakan Tahun 2025-2029 maka ditetapkan Sasaran Renstra Disbudporapar Kota Tarakan Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Warisan Budaya yang dilestarikan, indikator : Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan;
2. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam bidang pembangunan, indikator:
 - a. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam ekonomi mandiri;
 - b. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan.
3. Meningkatnya Prestasi Olahraga, indikator : Persentase Peningkatan Atlet

Berprestasi

4. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata, indikator: Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, indikator :
 - a. Nilai SAKIP
 - b. Nilai Indeks Kepuasan masyarakat

Tujuan dan Sasaran Disbudporapar Kota Tarakan sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3 1
Tujuan dan Sasaran Disbudporapar Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE	TARGET TAHUN					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Misi3 : Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi S7 : Meningkatnya Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku dan Meningkatnya Peran Pemuda serta Prestasi Olahraga		1. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku	3.38	3.39	3.4	3.41	3.42	3.43	3.44
			2. Persentase Pemuda Berprestasi	0,026	0.028	0.03	0.032	0.034	0.036	0.038
			3. Persentase Peningkatan Perolehan Medali	20	25	30	35	40	45	50
		Meningkatnya Warisan Budaya yang dilestarikan	1. Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	38.06	41.79	45.52	47.76	50.00	52.24	54.48
		Meningkatnya partisipasi pemuda dalam bidang pembangunan	2. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam ekonomi mandiri	1	1.2	1.25	1.3	1.35	1.4	1.45
			3. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	20	20.25	20.3	20.35	20.4	20.45	20.5
		Meningkatnya Prestasi Olahraga	4. Persentase Peningkatan Atlet Berprestasi	25	30	35	40	45	50	55
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata	5. Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah	19.66	19.67	19.68	19.69	19.7	19.71	19.72
		Meningktanya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata	6. Nilai SAKIP	81,06	81,5	82	82,5	83	83,5	84
			7. Nilai IKM	80	82	83	84	86	87	88

Agar pelaksanaan Renstra dapat berjalan secara terarah dan terukur, maka diperlukan penahapan yang sistematis dan terencana. Penahapan dalam konteks ini dimaksudkan sebagai pengelompokan atau pengurutan pelaksanaan strategi, program, dan kegiatan ke dalam tahapan tahunan yang logis dan realistis, disesuaikan dengan kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya, serta dinamika lingkungan strategis

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 3 2
Penahapan renstra Disbudporapar

TAHAP 1 (2026) (1)	TAHAP II (2027) (2)	TAHAP III (2028) (3)	TAHAP IV (2029) (4)	TAHAP V (2030) (5)
- Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) untuk mengelola dan mengembangkan potensi pariwisata secara terarah. - Pengembangan Destinasi Pariwisata - Peningkatan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha pariwisata - Peningkatan jangkauan promosi pariwisata - Pengembangan Pariwisata Digital - Peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif - Sinergi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	- Pengembangan Destinasi Pariwisata - Peningkatan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha pariwisata - Peningkatan jangkauan promosi pariwisata - Pengembangan Pariwisata Digital - Peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif - Sinergi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	- Pengembangan Destinasi Pariwisata - Peningkatan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha pariwisata - Peningkatan jangkauan promosi pariwisata - Pengembangan Pariwisata Digital - Peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif - Sinergi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	- Pengembangan Destinasi Pariwisata - Peningkatan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha pariwisata - Peningkatan jangkauan promosi pariwisata - Pengembangan Pariwisata Digital - Peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif - Sinergi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	- Pengembangan Destinasi Pariwisata - Peningkatan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha pariwisata - Peningkatan jangkauan promosi pariwisata - Pengembangan Pariwisata Digital - Peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif - Sinergi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Memberikan pembinaan yang berkualitas, untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan daya saing pemuda - Memfasilitasi pengembangan minat dan bakat pemuda melalui berbagai kegiatan, seperti seni, budaya, teknologi, dan kewirausahaan. - Mendorong pemuda untuk aktif dalam berbagai kegiatan sosial, politik, dan ekonomi, serta memberikan wadah bagi mereka untuk berkontribusi pada pembangunan - Melakukan upaya pencegahan terhadap perilaku berisiko pada pemuda, seperti penyalahgunaan narkoba, perundungan, dan kekerasan. - Membangun kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor untuk mendukung pengembangan kepemudaan	- Memberikan pembinaan yang berkualitas, untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan daya saing pemuda - Memfasilitasi pengembangan minat dan bakat pemuda melalui berbagai kegiatan, seperti seni, budaya, teknologi, dan kewirausahaan. - Mendorong pemuda untuk aktif dalam berbagai kegiatan sosial, politik, dan ekonomi, serta memberikan wadah bagi mereka untuk berkontribusi pada pembangunan - Melakukan upaya pencegahan terhadap perilaku berisiko pada pemuda, seperti penyalahgunaan narkoba, perundungan, dan kekerasan.	- Memberikan pembinaan yang berkualitas, untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan daya saing pemuda - Memfasilitasi pengembangan minat dan bakat pemuda melalui berbagai kegiatan, seperti seni, budaya, teknologi, dan kewirausahaan. - Mendorong pemuda untuk aktif dalam berbagai kegiatan sosial, politik, dan ekonomi, serta memberikan wadah bagi mereka untuk berkontribusi pada pembangunan - Melakukan upaya pencegahan terhadap perilaku berisiko pada pemuda, seperti penyalahgunaan narkoba, perundungan, dan kekerasan. - Membangun kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas	- Memberikan pembinaan yang berkualitas, untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan daya saing pemuda - Memfasilitasi pengembangan minat dan bakat pemuda melalui berbagai kegiatan, seperti seni, budaya, teknologi, dan kewirausahaan. - Mendorong pemuda untuk aktif dalam berbagai kegiatan sosial, politik, dan ekonomi, serta memberikan wadah bagi mereka untuk berkontribusi pada pembangunan - Melakukan upaya pencegahan terhadap perilaku berisiko pada pemuda, seperti penyalahgunaan narkoba, perundungan, dan kekerasan. - Membangun kapasitas	- Memberikan pembinaan yang berkualitas, untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan daya saing pemuda - Memfasilitasi pengembangan minat dan bakat pemuda melalui berbagai kegiatan, seperti seni, budaya, teknologi, dan kewirausahaan. - Mendorong pemuda untuk aktif dalam berbagai kegiatan sosial, politik, dan ekonomi, serta memberikan wadah bagi mereka untuk berkontribusi pada pembangunan - Melakukan upaya pencegahan terhadap perilaku berisiko pada pemuda, seperti penyalahgunaan narkoba, perundungan, dan kekerasan. - Membangun kapasitas

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
- Menyediakan dan meningkatkan fasilitas olahraga yang memadai untuk mendukung latihan dan kompetisi. - Melakukan pembinaan dan pelatihan atlet secara berkelanjutan untuk meningkatkan prestasi olahraga. - Mengadakan berbagai kompetisi olahraga, baik tingkat lokal maupun nasional, untuk menjaring dan mengembangkan bibit-bibit atlet potensial. - Mendorong masyarakat, terutama pemuda, untuk aktif dalam kegiatan olahraga - Peningkatan Kualitas Pelatih. - Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan Olahraga	- Membangun kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor untuk mendukung pengembangan kepemudaan - Menyediakan dan meningkatkan fasilitas olahraga yang memadai untuk mendukung latihan dan kompetisi. - Melakukan pembinaan dan pelatihan atlet secara berkelanjutan untuk meningkatkan prestasi olahraga. - Mengadakan berbagai kompetisi olahraga, baik tingkat lokal maupun nasional, untuk menjaring dan mengembangkan bibit-bibit atlet potensial. - Mendorong masyarakat, terutama pemuda, untuk aktif dalam kegiatan olahraga - Peningkatan Kualitas Pelatih. - Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan Olahraga	- sektor untuk mendukung pengembangan kepemudaan - Menyediakan dan meningkatkan fasilitas olahraga yang memadai untuk mendukung latihan dan kompetisi. - Melakukan pembinaan dan pelatihan atlet secara berkelanjutan untuk meningkatkan prestasi olahraga. - Mengadakan berbagai kompetisi olahraga, baik tingkat lokal maupun nasional, untuk menjaring dan mengembangkan bibit-bibit atlet potensial. - Mendorong masyarakat, terutama pemuda, untuk aktif dalam kegiatan olahraga - Peningkatan Kualitas Pelatih. - Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan Olahraga	- kelembagaan dan koordinasi lintas sektor untuk mendukung pengembangan kepemudaan - Menyediakan dan meningkatkan fasilitas olahraga yang memadai untuk mendukung latihan dan kompetisi. - Melakukan pembinaan dan pelatihan atlet secara berkelanjutan untuk meningkatkan prestasi olahraga. - Mengadakan berbagai kompetisi olahraga, baik tingkat lokal maupun nasional, untuk menjaring dan mengembangkan bibit-bibit atlet potensial. - Mendorong masyarakat, terutama pemuda, untuk aktif dalam kegiatan olahraga - Peningkatan Kualitas Pelatih. - Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan Olahraga	- kelembagaan dan koordinasi lintas sektor untuk mendukung pengembangan kepemudaan - Menyediakan dan meningkatkan fasilitas olahraga yang memadai untuk mendukung latihan dan kompetisi. - Melakukan pembinaan dan pelatihan atlet secara berkelanjutan untuk meningkatkan prestasi olahraga. - Mengadakan berbagai kompetisi olahraga, baik tingkat lokal maupun nasional, untuk menjaring dan mengembangkan bibit-bibit atlet potensial. - Mendorong masyarakat, terutama pemuda, untuk aktif dalam kegiatan olahraga - Peningkatan Kualitas Pelatih. - Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan Olahraga
- Perlindungan hukum tingkat daerah - Identifikasi dan Pendataan - Penetapan warisan budaya - Pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan warisan budaya daerah - Peningkatan kapasitas SDM, lembaga dan pranata budaya - Fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya	- Perlindungan hukum tingkat daerah - Identifikasi dan Pendataan - Penetapan warisan budaya - Pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan warisan budaya daerah - Peningkatan kapasitas SDM, lembaga dan pranata budaya - Fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya	- Penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Daerah - Perlindungan hukum tingkat daerah - Identifikasi dan Pendataan - Penetapan warisan budaya - Pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan warisan budaya daerah - Peningkatan kapasitas SDM, lembaga dan pranata budaya - Fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya	- Perlindungan hukum tingkat daerah - Identifikasi dan Pendataan - Penetapan warisan budaya - Pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan warisan budaya daerah - Peningkatan kapasitas SDM, lembaga dan pranata budaya - Fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya	- Perlindungan hukum tingkat daerah - Identifikasi dan Pendataan - Penetapan warisan budaya - Pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan warisan budaya daerah - Peningkatan kapasitas SDM, lembaga dan pranata budaya - Fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya

3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Disbudporapar dalam mencapai Tujuan dan sasaran Renstra Disbudporapar Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3 3
Arah Kebijakan Renstra Disbudporapar

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(1)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi	Pengembangan Ekonomi Kreatif	Penguatan ekonomi kreatif	
		Mendorong Keterlibatan Perempuan, pemuda dan Kelompok Rentan dalam pembangunan	Penguatan peran pemuda dalam pembangunan	
		Pengembangan Sektor Jasa dan Perdagangan	penguatan sektor pariwisata	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Disbudporapar Kota Tarakan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran rencana pembangunan Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029. Berikut disajikan tentang rencana program, kegiatan, Sub Kegiatan beserta pagu indikatif pada periode tahun Renstra (2025-2029), yang selanjutnya harus dipedomani dalam penyusunan rencana kerja tahunan Disbudporapar Kota Tarakan.

Tabel 4 1
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Disbudporapar

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
2.22.2.19.3.26.01.0000 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata						
Misi 3 : Meningkatnya pertumbuhan dan stabilitas ekonomi S.7 : Meningkatnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku dan Meningkatnya Peran Pemuda serta Prestasi Olahraga				Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku (%)	
					Persentase Pemuda Berprestasi (%)	
					Persentase Peningkatan Perolehan Medali (%)	
		Meningkatnya Warisan Budaya yang dilestarikan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Terfasilitasinya kegiatan kebudayaan bagi masyarakat	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	
					Persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan budaya per tahun (%)	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
					Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan (Dokumen)	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
					Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
					Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan (Dokumen)	2.22.02.2.01.0003 - Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi (Unit)	2.22.02.2.03 - Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi (Unit)	2.22.02.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Terfasilitasinya kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan (%)	2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
					Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan	2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
					Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	2.22.03.2.01.0001 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
					Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	2.22.03.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Terfasilitasinya pembinaan sejarah kepada masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap akses sejarah lokal (%)	2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
					Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	2.22.04.2.01 - Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah (Unit)	2.22.04.2.01 - Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	2.22.04.2.01 - Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	2.22.04.2.01.0001 - Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah (Unit)	2.22.04.2.01.0002 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
					Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	2.22.04.2.01.0003 - Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah
					Presentase cagar budaya yang ditetapkan (%)	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
			Meningkatnya cagar budaya yang ditetapkan	Terlaksananya penetapan cagar budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
					Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
					Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	2.22.05.2.01.0001 - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	2.22.05.2.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya
			Meningkatnya cagar budaya	Terkelolanya cagar budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	2.22.05.2.02.0001 - Pelindungan Cagar Budaya
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	2.22.05.2.02.0002 - Pengembangan Cagar Budaya
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	2.22.05.2.02.0003 - Pemanfaatan Cagar Budaya
			Meningkatnya tata kelola museum		Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
				Terkelolanya museum	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu (Unit)	2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
					Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Unit)	2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
					Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi (Unit)	2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
					Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
					Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Orang)	2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
					Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu (Unit)	2.22.06.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
					Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Orang)	2.22.06.2.01.0002 - Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
					Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Unit)	2.22.06.2.01.0003 - Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum
					Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	2.22.06.2.01.0004 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
					Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi (Unit)	2.22.06.2.01.0005 - Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum
		Meningkatnya partisipasi pemuda dalam bidang pembangunan			Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (% Nilai)	
					Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasional kemasyarakatan (%)	
			Meningkatnya peran serta pemuda dalam ekonomi mandiri dan organisasi Kepemudaan dan Kemasyarakatan		Persentase Wirausaha Muda yang dibina (%)	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
					Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota (Dokumen)	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
					Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan)	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
					Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
					Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
					Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
					Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Orang)	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
					Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota (Dokumen)	2.19.02.2.01.0010 - Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota
					Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	2.19.02.2.01.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota
					Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Orang)	2.19.02.2.01.0012 - Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda
					Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan)	2.19.02.2.01.0013 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota
					Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	2.19.02.2.01.0015 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota
					Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	2.19.02.2.01.0016 - Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota
				Terfasilitasinya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	2.19.02.2.02.0003 - Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota
			Meningkatnya Peran serta Pemuda dalam kepramukaan		Persentase pemuda yang mengikuti organisasi kepramukaan (%)	2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Laporan)	2.19.04.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
					Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	2.19.04.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
					Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	2.19.04.2.01.0002 - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
					Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Laporan)	2.19.04.2.01.0005 - Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
		Meningkatnya Prestasi Olahraga	Meningkatnya Prestasi Olahraga		Persentase Peningkatan Atlet Berprestasi (%)	
					Persentase Atlet Berprestasi yang Menjadi Delegasi Pemerintah Kota (%)	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar (Dokumen)	2.19.03.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	2.19.03.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	2.19.03.2.01.0005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar (Dokumen)	2.19.03.2.01.0006 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar
				Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	2.19.03.2.02.0004 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
					Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	2.19.03.2.02.0006 - Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga
				Terfasilitasinya pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)	2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
					Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota (Dokumen)	2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
					Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
					Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
					Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)	2.19.03.2.03.0006 - Seleksi Atlet Daerah
					Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	2.19.03.2.03.0007 - Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga
					Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	2.19.03.2.03.0009 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
					Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota (Dokumen)	2.19.03.2.03.0010 - pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.19.03.2.04 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
					Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional (Dokumen)	2.19.03.2.04 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
					Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional (Dokumen)	2.19.03.2.04.0005 - Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota
					Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.19.03.2.04.0006 - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait
				Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen)	2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
					Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan (Laporan)	2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan)	2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
					Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)	2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
					Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)	2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan)	2.19.03.2.05.0006 - Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi
					Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan (Laporan)	2.19.03.2.05.0007 - Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen)	2.19.03.2.05.0008 - Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat
					Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)	2.19.03.2.05.0009 - Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan
					Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)	2.19.03.2.05.0010 - Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata			Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (%)	
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata		Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan Mancanegara (%)	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
					Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan nusantara (%)	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
				Terkelolanya daya tarik wisata	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
					Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
					Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Lokasi)	3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
					Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan (Orang)	3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
					Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	3.26.02.2.01.0005 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
					Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Lokasi)	3.26.02.2.01.0006 - Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
					Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan (Orang)	3.26.02.2.01.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
					Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.26.02.2.01.0009 - Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota
				Terkelolanya kawasan strategis pariwisata	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Orang)	3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
					Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Orang)	3.26.02.2.02.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
				Terkelolanya destinasi pariwisata	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
					Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
					Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
					Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.26.02.2.03.0002 - Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
					Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	3.26.02.2.03.0003 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
				Terlaksananya pembinaan usaha pariwisata		Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
					Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	3.26.02.2.03.0006 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
					Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan (Pelaku Usaha)	3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi (Usaha)	3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi (Usaha)	3.26.02.2.04.0010 - Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)
					Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan (Pelaku Usaha)	3.26.02.2.04.0015 - Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko
				Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
					Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
					Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
					Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	3.26.03.2.01.0003 - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
					Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	3.26.03.2.01.0004 - Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
					Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	3.26.03.2.01.0006 - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
					Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	3.26.03.2.01.0007 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif		Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
				Tersedianya prasarana Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia (Unit)	3.26.04.2.01 - Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia (Unit)	3.26.04.2.01.0001 - Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif
				Terlaksananya pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan (Dokumen)	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifA
					Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif (Dokumen)	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifA
					Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah (Dokumen)	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifA
					Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah (Lembaga)	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifA
					Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif (Produk)	3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifA
					Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan (Dokumen)	3.26.04.2.02.0002 - Pengembangan Pendidikan
					Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif (Dokumen)	3.26.04.2.02.0009 - Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
					Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah (Lembaga)	3.26.04.2.02.0012 - Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah
					Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah (Dokumen)	3.26.04.2.02.0016 - Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah
					Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif (Produk)	3.26.04.2.02.0022 - Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual
			Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif		Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
				Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang)	3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
					Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
					Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang)	3.26.05.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
				Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.2.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.2.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.2.02.0001 - Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
					Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.2.02.0007 - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata			Nilai SAKIP PD (Nilai)	
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	
			Meningkatnya layanan kesekretariatan		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.26.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Tersedianya layanan administrasi kepegawaian	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	3.26.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	3.26.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
				Tersedianya layanan administrasi umum	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.26.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.26.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.26.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.26.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.26.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3.26.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.26.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	3.26.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
				Terkelolanya data Barang Milik Daerah dalam aplikasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3.26.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.26.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.26.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.26.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.26.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	3.26.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.26.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3.26.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.26.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.26.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Tersedianya layanan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.26.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.26.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.26.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.26.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.26.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.26.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.26.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.26.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.26.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.26.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.26.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.26.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.26.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.26.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja		Capaian Kinerja Organisasi (%)	3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.26.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.26.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	3.26.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
				Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.26.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.26.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.26.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.26.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Tabel 4 2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Disbudporapar Kota Tarakan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				12.952.854.954,00		12.952.854.954,00		12.952.854.954,00		12.952.854.954,00		12.952.854.954,00		
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				11.793.854.954,00		11.793.854.954,00		11.793.854.954,00		11.793.854.954,00		11.793.854.954,00		
Meningkatnya layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	0	88,35	1.716.854.954,00	88,4	1.716.854.954,00	88,45	1.716.854.954,00	88,5	1.716.854.954,00	88,55	1.716.854.954,00	2.22.2.19.3.26.01.0000 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
3.26.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
Tersedianya layanan administrasi kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00		
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	2	1		1		1		1		1			
3.26.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	2	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00	1	6.000.000,00		
3.26.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				49.000.000,00		49.000.000,00		49.000.000,00		49.000.000,00		49.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	1	49.000.000,00	1	49.000.000,00	1	49.000.000,00	1	49.000.000,00	1	49.000.000,00		
3.26.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				305.900.000,00		305.900.000,00		305.900.000,00		305.900.000,00		305.900.000,00		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	18	8		8		8		8		8			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
3.26.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.26.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00		
3.26.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00		
3.26.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				27.900.000,00		27.900.000,00		27.900.000,00		27.900.000,00		27.900.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	27.900.000,00	4	27.900.000,00	4	27.900.000,00	4	27.900.000,00	4	27.900.000,00		
3.26.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
3.26.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	18	8	100.000.000,00	8	100.000.000,00	8	100.000.000,00	8	100.000.000,00	8	100.000.000,00		
3.26.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
3.26.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				148.954.954,00		148.954.954,00		148.954.954,00		148.954.954,00		148.954.954,00		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	9	9		9		9		9		9			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	1		1		1		1		1			
3.26.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				24.477.477,00		24.477.477,00		24.477.477,00		24.477.477,00		24.477.477,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	24.477.477,00	1	24.477.477,00	1	24.477.477,00	1	24.477.477,00	1	24.477.477,00		
3.26.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				24.477.477,00		24.477.477,00		24.477.477,00		24.477.477,00		24.477.477,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	24.477.477,00	1	24.477.477,00	1	24.477.477,00	1	24.477.477,00	1	24.477.477,00		
3.26.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
3.26.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	9	9	20.000.000,00	9	20.000.000,00	9	20.000.000,00	9	20.000.000,00	9	20.000.000,00		
3.26.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
3.26.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.037.000.000,00		1.037.000.000,00		1.037.000.000,00		1.037.000.000,00		1.037.000.000,00		
Tersedianya layanan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.037.000.000,00	12	1.037.000.000,00	12	1.037.000.000,00	12	1.037.000.000,00	12	1.037.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
3.26.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00		
3.26.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.026.000.000,00		1.026.000.000,00		1.026.000.000,00		1.026.000.000,00		1.026.000.000,00		
3.26.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
3.26.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				170.000.000,00		170.000.000,00		170.000.000,00		170.000.000,00		170.000.000,00		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	170.000.000,00	1	170.000.000,00	1	170.000.000,00	1	170.000.000,00	1	170.000.000,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	22	22		22		22		22		22			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	50	50		50		50		50		50			
3.26.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	22	22	10.000.000,00	22	10.000.000,00	22	10.000.000,00	22	10.000.000,00	22	10.000.000,00		
3.26.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00	3	50.000.000,00		
3.26.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
3.26.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	50	50	60.000.000,00	50	60.000.000,00	50	60.000.000,00	50	60.000.000,00	50	60.000.000,00		
3.26.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5			5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
3.26.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5		1.000.000,00	5	1.000.000,00	5	1.000.000,00	5	1.000.000,00	5	1.000.000,00		
3.26.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	1.000.000,00	4	1.000.000,00	4	1.000.000,00	4	1.000.000,00	4	1.000.000,00		
3.26.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
3.26.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.074.000.000,00		10.074.000.000,00		10.074.000.000,00		10.074.000.000,00		10.074.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	10.074.000.000,00	12	10.074.000.000,00	12	10.074.000.000,00	12	10.074.000.000,00	12	10.074.000.000,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	59	70		70		70		70		70			
3.26.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.700.000.000,00		7.700.000.000,00		7.700.000.000,00		7.700.000.000,00		7.700.000.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	59	70	7.700.000.000,00	70	7.700.000.000,00	70	7.700.000.000,00	70	7.700.000.000,00	70	7.700.000.000,00		
3.26.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2.374.000.000,00		2.374.000.000,00		2.374.000.000,00		2.374.000.000,00		2.374.000.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	2.374.000.000,00	12	2.374.000.000,00	12	2.374.000.000,00	12	2.374.000.000,00	12	2.374.000.000,00		
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				414.000.000,00		414.000.000,00		414.000.000,00		414.000.000,00		414.000.000,00		
	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan nusantara (%)		2,42		2,46		2,49		2,51		2,71			
3.26.02.2.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		
Terkelolanya daya tarik wisata	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	180.000.000,00	1	180.000.000,00	1	180.000.000,00	1	180.000.000,00	1	180.000.000,00		
	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Lokasi)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan (Orang)	5	5		5		5		5		5			
3.26.02.2.01.0005 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	3	3	60.000.000,00	3	60.000.000,00	3	60.000.000,00	3	60.000.000,00	3	60.000.000,00		
3.26.02.2.01.0006 - Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Ditetapkannya Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Lokasi)	3	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00		
3.26.02.2.01.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan (Orang)	5	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00		
3.26.02.2.01.0009 - Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksanakannya Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
3.26.02.2.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		
Terkelolanya kawasan strategis pariwisata	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Orang)	1	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00		
3.26.02.2.02.0008 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		
3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				135.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		
Terkelolanya destinasi pariwisata	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	3	3	135.000.000,00	3	135.000.000,00	3	135.000.000,00	3	135.000.000,00	3	135.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	3	3		3		3		3		3			
3.26.02.2.03.0002 - Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
3.26.02.2.03.0003 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	3	3	45.000.000,00	3	45.000.000,00	3	45.000.000,00	3	45.000.000,00	3	45.000.000,00		
3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		
Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	3	3	45.000.000,00	3	45.000.000,00	3	45.000.000,00	3	45.000.000,00	3	45.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.26.02.2.03.0006 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
3.26.02.2.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota				87.000.000,00		87.000.000,00		87.000.000,00		87.000.000,00		87.000.000,00		
Terlaksananya pembinaan usaha pariwisata	Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan (Pelaku Usaha)	4	4	87.000.000,00	4	87.000.000,00	4	87.000.000,00	4	87.000.000,00	4	87.000.000,00		
3.26.02.2.04.0010 - Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)				37.000.000,00		37.000.000,00		37.000.000,00		37.000.000,00		37.000.000,00		
Meningkatnya jumlah usaha pariwisata yang memiliki sertifikat standar usaha dari lembaga OSS	Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi (Usaha)	60	60	37.000.000,00	60	37.000.000,00	60	37.000.000,00	60	37.000.000,00	60	37.000.000,00		
3.26.02.2.04.0015 - Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan perijinan berusaha berbasis risiko dan standar usaha pariwisata	Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan (Pelaku Usaha)	4	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00		
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				280.000.000,00		280.000.000,00		280.000.000,00		280.000.000,00		280.000.000,00		
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	2,3	2,67	280.000.000,00	2,76	280.000.000,00	2,84	280.000.000,00	3,07	280.000.000,00	3,13	280.000.000,00	2.22.2.19.3.26.01.0000 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				280.000.000,00		280.000.000,00		280.000.000,00		280.000.000,00		280.000.000,00		
Terlaksananya pemasaran pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	1	1	280.000.000,00	1	280.000.000,00	1	280.000.000,00	1	280.000.000,00	1	280.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	5	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	2	2		2		2		2		2			
3.26.03.2.01.0003 - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
3.26.03.2.01.0004 - Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
3.26.03.2.01.0006 - Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota				80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	2	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00	2	80.000.000,00		
3.26.03.2.01.0007 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		
Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	5	3	125.000.000,00	3	125.000.000,00	3	125.000.000,00	3	125.000.000,00	3	125.000.000,00		
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	0,01	0,1	225.000.000,00	0,15	225.000.000,00	0,2	225.000.000,00	0,25	225.000.000,00	0,3	225.000.000,00	2.22.2.19.3.26.01.0000 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
3.26.04.2.01 - Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota				37.500.000,00		37.500.000,00		37.500.000,00		37.500.000,00		37.500.000,00		
Tersedianya prasarana Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia (Unit)		1	37.500.000,00	1	37.500.000,00	1	37.500.000,00	1	37.500.000,00	1	37.500.000,00		
3.26.04.2.01.0001 - Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif				37.500.000,00		37.500.000,00		37.500.000,00		37.500.000,00		37.500.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia (Unit)		1	37.500.000,00	1	37.500.000,00	1	37.500.000,00	1	37.500.000,00	1	37.500.000,00		
3.26.04.2.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				187.500.000,00		187.500.000,00		187.500.000,00		187.500.000,00		187.500.000,00		
Terlaksananya pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan (Dokumen)		1	187.500.000,00	1	187.500.000,00	1	187.500.000,00	1	187.500.000,00	1	187.500.000,00		
	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif (Dokumen)		1		1		1		1		1			
	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah (Dokumen)		1		1		1		1		1			
	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah (Lembaga)	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif (Produk)		5		5		5		5		5			
3.26.04.2.02.0002 - Pengembangan Pendidikan				37.500.000,00		37.500.000,00		37.500.000,00		37.500.000,00		37.500.000,00		
3.26.04.2.02.0009 - Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif				37.500.000,00		37.500.000,00		37.500.000,00		37.500.000,00		37.500.000,00		
Tersedianya Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif (Dokumen)		1	37.500.000,00	1	37.500.000,00	1	37.500.000,00	1	37.500.000,00	1	37.500.000,00		
3.26.04.2.02.0012 - Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah (Lembaga)	0	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
3.26.04.2.02.0016 - Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah				37.500.000,00		37.500.000,00		37.500.000,00		37.500.000,00		37.500.000,00		
Tersedianya dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah (Dokumen)		1	37.500.000,00	1	37.500.000,00	1	37.500.000,00	1	37.500.000,00	1	37.500.000,00		
3.26.04.2.02.0022 - Fasilitas Pendaftaran Kekayaan Intelektual				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif (Produk)		5	40.000.000,00	5	40.000.000,00	5	40.000.000,00	5	40.000.000,00	5	40.000.000,00		
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				240.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00		
Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	0,87	0,91	240.000.000,00	0,93	240.000.000,00	0,95	240.000.000,00	0,97	240.000.000,00	0,99	240.000.000,00	2.22.2.19.3.26.01.0000 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata	
3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang)	0	30	110.000.000,00	30	110.000.000,00	30	110.000.000,00	30	110.000.000,00	30	110.000.000,00		
	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	0	30		30		30		30		30			
3.26.05.2.01.0006 - Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	0	30	40.000.000,00	30	40.000.000,00	30	40.000.000,00	30	40.000.000,00	30	40.000.000,00		
Terfasilitasinya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang)	0	30	70.000.000,00	30	70.000.000,00	30	70.000.000,00	30	70.000.000,00	30	70.000.000,00		
3.26.05.2.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif				130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang)	0	30	130.000.000,00	30	130.000.000,00	30	130.000.000,00	30	130.000.000,00	30	130.000.000,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	0	40		40		40		40		40			
3.26.05.2.02.0001 - Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksanya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	0	40	60.000.000,00	40	60.000.000,00	40	60.000.000,00	40	60.000.000,00	40	60.000.000,00		
3.26.05.2.02.0007 - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif				70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Profesi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif (Orang)	0	30	70.000.000,00	30	70.000.000,00	30	70.000.000,00	30	70.000.000,00	30	70.000.000,00		

4.2 Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas

Subkegiatan prioritas adalah langkah-langkah rinci dan tindakan spesifik yang dirancang untuk mewujudkan tujuan dari program prioritas yang lebih besar, seperti program pembangunan nasional atau daerah, berikut daftar sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah.

Tabel 4 3
Daftar Sub-Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.22.2.19.3.26.01.0000 - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata				
1.	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya peran serta pemuda dalam ekonomi mandiri dan organisasi Kepemudaan dan Kemasyarakatan	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
			2.19.02.2.01.0010 - Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	
			2.19.02.2.01.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	
			2.19.02.2.01.0012 - Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	
			2.19.02.2.01.0013 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	
			2.19.02.2.01.0015 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	
2.	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya Prestasi Olahraga	2.19.03.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.19.03.2.01.0005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
			Olahraga di tingkat kabupaten/kota	
			2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			2.19.03.2.02.0004 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	
			2.19.03.2.02.0006 - Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	
			2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	
			2.19.03.2.03.0006 - Seleksi Atlet Daerah	
			2.19.03.2.03.0007 - Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	
			2.19.03.2.03.0009 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	
			2.19.03.2.04 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	
			2.19.03.2.04.0006 - Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	
			2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
			2.19.03.2.05.0007 - Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	
3.	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	
4.	2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.22.03.2.01.0001 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	
			2.22.03.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	

4.3 Indikator Kinerja Utama

Dalam melaksanakan kinerja Disbudporapar telah ditetapkan Rumusan Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam Rumusan Tujuan dan Sasaran Disbudporapar juga telah ditetapkan indikator kinerjanya sebagai tolok ukur keberhasilan tujuan dan sasaran tersebut. Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama Disbudporapar dalam melaksanakan fungsi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan. Adapun Indikator Kinerja Utama Disbudporapar dengan target kinerja yang telah ditentukan dalam kurun waktu 2025-2029 adalah sebagaimana tabel berikut

Tabel 4 4
Indikator Kinerja Utama Disbudporapar Kota Tarakan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah	%	19,66	19,67	19,68	19,69	19,7	19,71	19,71
2	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	%	38,05	41,79	45,52	47,76	50	52,23	54,47
3	Persentase Peningkatan Atlet Berprestasi	%	25	30	35	40	45	50	55
4	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	1	1,2	1,25	1,3	1,35	1,4	1,45
5	Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasial kemasyarakatan	%	20	20,25	20,3	20,35	20,4	20,45	20,5
6	Nilai SAKIP	Nilai	81,06	81,5	82	82,5	83	83,5	84
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80	82	83	84	86	87	88

4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci atau disebut juga IKK adalah Indikator Kerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan keberhasilan suatu urusan Pemerintah. Indikator kinerja juga dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu target, baik dengan menggunakan ukuran kualitatif maupun kuantitatif. Berdasarkan pada dokumen RPJMD Kota Tarakan maka Indikator Kinerja Kunci (IKK) Disbudporapar Kota Tarakan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
I	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
1	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	positif	%	0	1	2	3	4	5	6
2	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	positif	%	1,61	1,63	1,65	1,67	1,69	1,7	1,72
II	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									
3	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	positif	%	38,05	41,79	45,52	47,76	50	52,23	54,47
4	Persentase Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifikasi profesi dibidang kebudayaan	positif	%	5,26	10,52	15,78	21,05	26,31	31,57	36,84
5	Persentase Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	positif	%	38,05	41,79	45,52	47,76	50	52,23	54,47
III	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
6	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	positif	%	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
7	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	positif	%	14,9	15	15,5	16	16,5	17	17,5
8	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	positif	%	3	3,06	3,67	4,18	4,32	4,46	4,6

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang merupakan uraian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029.

Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Renstra berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan, pelaksanaan Renstra ini akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan kebijakan nasional, dinamika pembangunan daerah, serta kebutuhan organisasi. Evaluasi tersebut juga akan menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian strategi guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dan dikendalikan kinerjanya tiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Demikian Renstra Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Tarakan tahun 2025-2029 ini disusun sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Tarakan untuk tahun 2025-2029. Semoga dapat memberi manfaat bagi semua pihak yang terkait.

19. Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Tarakan Tahun 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan dokumen perencanaan suatu perangkat daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi, terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan organisasi. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang dimaksud disini selanjutnya didefinisikan sebagai Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (DKUKMP) Kota Tarakan Tahun 2025-2029. Renstra DKUMKP Kota Tarakan Tahun 2025–2029 ini disusun sebagai bagian dari amanat regulasi perencanaan pembangunan, sekaligus penjabaran visi dan misi Wali Kota Tarakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Renstra DKUKMP Tahun 2025 – 2029 menjadi dokumen perencanaan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Tarakan periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran untuk menentukan arah dalam menetapkan strategi dan kebijakan bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan di Kota Tarakan, serta merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mewujudkan pencapaian target pembangunan daerah, memastikan keselarasan dengan RPJMD tahun 2025-2029, juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Fungsi dokumen perencanaan tersebut dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah sebagai landasan perangkat daerah dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas pokok dan fungsi DKUKMP dibidang perdagangan, perlindungan konsumen, koperasi dan UKM.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72

- Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2045;
 20. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2025 Nomor 84, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 45;
 21. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 22. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra DKUKMP tahun 2025-2029 adalah dimaksudkan untuk:

1. Sebagai sarana sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029.
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) DKUKMP Kota Tarakan guna mewujudkan suatu bentuk rumusan Perencanaan Pembangunan di wilayah dan peningkatan pelayanan masyarakat yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota Tarakan yang terpilih sebagai Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah;

3. Sebagai instrumen dalam mengukur kinerja pelayanan di Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Tarakan dalam mendukung pembangunan dengan tetap memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Utara dan RPJMD Kota Tarakan;
4. Sebagai indikator pengukuran kinerja 5 (lima) tahunan bagi DKUKMP Kota Tarakan;
5. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan penguatan dan pengembangan perdagangan, perlindungan konsumen, koperasi dan UKM di Kota Tarakan;
6. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder dalam melakukan pengawasan atas kinerja DKUKMP Kota Tarakan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Tarakan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini paling sedikit memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KOTA TARAKAN

Bab ini membahas gambaran pelayanan perangkat daerah yang paling sedikit memuat tugas, fungsi, dan struktur perangkat daerah; sumber daya perangkat daerah; kinerja pelayanan perangkat daerah; dan kelompok sasaran layanan. Selain itu juga membahas permasalahan pelayanan dan isu strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan perdagangan Kota Tarakan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KOTA TARAKAN

Bab ini memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan perdagangan Kota Tarakan.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KOTA TARAKAN

Bab ini paling sedikit memuat uraian program; uraian kegiatan; uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator target dan pagu indikatif; uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah; target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan perdagangan Kota Tarakan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama; dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KOTA TARAKAN

2.1. Gambaran Layanan DKUKMP Kota Tarakan

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DKUKMP Kota Tarakan Berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan nomor 04 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan DKUKMP (Lembaran Daerah Kota Tarakan tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 09 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan DKUKMP (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2020 Nomor 60) dan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 66 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi sebagai berikut :

A. Tugas

Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil menengah, dan perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

B. Fungsi

1. Perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil menengah, pengembangan perdagangan, dan pengembangan ekspor
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil menengah, pengembangan perdagangan, dan pengembangan ekspor
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha kecil menengah, pengembangan perdagangan, dan pengembangan ekspor
4. Pelaksanaan administrasi dinas
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Tarakan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan tentang Pembentukan dan Susunan DKUKMP Nomor 66 Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, membawahi :
 - a. Pengawas Perkoperasian
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Pengembangan Perdagangan, membawahi :
 - a. Analis Perdagangan Ahli Muda
 - b. Pengawas Kemetrolagian
5. Bidang Pengembangan Ekspor, membawahi :
 - a. Analis Perdagangan Ahli Muda
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1. Struktur Organisasi



2.1.2 Sumber Daya DKUKMP Kota Tarakan

A. Sumber Daya Aparatur

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Tahun 2025, DKUKMP diperkuat dengan sumber daya manusia sejumlah 39 orang tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 24 orang tenaga Non- ASN

Tabel 2.1 Data Personil DKUKMP

NO	BIDANG	JUMLAH ASN/NON ASN	L	P	TINGKAT PENDIDIKAN							
					SD	SLTP	SLTA	D-III	D-IV	S1	S2	S3
1	KEPALA DINAS	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
2	SEKRETARIAT	9	4	5	-	-	3	1	-	4	1	-
3	BIDANG KOPERASI DAN UKM	8	5	3	-	-	1	-	-	5	2	-
4	BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	9	5	5	-	-	2	-	-	8	-	-
5	BIDANG PENGEMBANGAN EKSPOR	11	11	-	-	-	6	-	-	2	3	-
6	TENAGA ADMINISTRASI (TENAGA KONTRAK)	6	4	2	-	-	1	5	-	-	-	-
7	PETUGAS KEAMANAN (TENAGA KONTRAK)	3	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-
8	PETUGAS KEBERSIHAN (TENAGA KONTRAK)	10	10	-	-	10	-	-	-	-	-	-
9	PENJAGA MALAM (TENAGA KONTRAK)	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
10	PRAMUNIAGA (TENAGA KONTRAK)	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-



B. Aset/Modal

Aset atau modal DKUKMP Kota Tarakan merupakan sarana dan prasarana penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, yang seluruhnya dibiayai melalui APBD. DKUKMP menempati Gedung Kantor DKUKMP Kota Tarakan di jalan Jenderal Sudirman sebagai pusat kegiatan kerja dan pelayanan pengawasan intern. Selain gedung kantor, DKUKMP juga memiliki berbagai inventaris berupa kendaraan dinas dan operasional, peralatan kantor, perangkat komputer, perlengkapan komunikasi, serta peralatan laboratorium.

Tabel 2.2 Daftar Inventaris DKUKMP

NO	NAMA ALAT	Kondisi				Keterangan
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah	
1	Kursi Rapat	50 BUAH			50 BUAH	Pengadaan Tahun2023
2	Meja Kerja Pejabat Lainnya	10 BUAH			10 BUAH	Pengadaan Tahun2023
3	KURSI KERJA PEJABAT LAINNYA	1 BUAH			1 BUAH	Pengadaan Tahun2023
4	LEMARI BESI	2 UNIT			2 UNIT	Pengadaan Tahun2023
5	PAPAN NAMA KANTOR	1 UNIT			1 UNIT	Pengadaan Tahun2023
6	MEJA 1/2 BIRO	1 UNIT			1 UNIT	Pengadaan Tahun2023
7	SOFA	2 UNIT			2 UNIT	Pengadaan Tahun2023
8	Meja Kerja Pejabat Lainnya	8 UNIT			8 UNIT	Pengadaan Tahun2023
9	Lemari Arsip Lainnya	2 UNIT			2 UNIT	Pengadaan Tahun2023
10	Komputer Unit Lainnya	4 UNIT			4 UNIT	Pengadaan Tahun2023
11	Printer Peralatan Personil Komputer	6 UNIT	3 UNIT	12 UNIT	21 UNIT	
12	Scanner Peralatan Peronil Komputer	1 UNIT	4 UNIT	6 UNIT	11 UNIT	
13	AIR CONDISIONER (AC)	7 UNIT	5 UNIT	13 UNIT	25 UNIT	
14	LAPTOP	3 UNIT	2 UNIT	10 UNIT	15 UNIT	Pengadaan Thn 2009,2014
15	NOTE BOOK		2 UNIT	3 UNIT	7 UNIT	Pengadaan Tahun 2012 Dan 2014
16	GEROBAK DORONG			88 UNIT	88 UNIT	Pengadaa N Tahun 2021
17	Kursi Tamu			4 BUAH	4 BUAH	Pengadaa N Tahun 2013

2.1.3 Kinerja Pelayanan DKUKMP Kota Tarakan

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawabnya sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi. Namun harus diakui bahwa secara umum di Kota Tarakan masih belum terwujud budaya hidup bersih dan kesadaran lingkungan seperti yang diharapkan oleh semua pihak.

Demi mencegah adanya masalah penguatan dan pengembangan perdagangan, perlindungan konsumen, akibat kegiatan suatu usaha,

Pemerintah Kota Tarakan melalui Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan Perdagangan). Kegiatan pembinaan dan pengawasan ini merupakan peran intervensi Pemerintah Kota dalam mengelola lingkungan untuk meminimalisir pelanggaran penguatan dan pengembangan perdagangan, perlindungan konsumen,

Kegiatan ini menjadi suatu hal yang penting bagi para pelaku usaha agar usaha yang dilakukan bisa berjalan lancar tanpa ada permasalahan. Pelaku usaha dan Dinas terkait yang memberikan rekomendasi perizinan harus memperhatikan kondisi lapangan dengan baik agar tidak ada masalah khususnya masalah penguatan dan pengembangan perdagangan, perlindungan konsumen, yang merugikan masyarakat sekitar.

Diharapkan pelaku usaha sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak, dapat terus berkembang hingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, serta meminimalisir potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mengakibatkan naiknya angka pengangguran.

Tingkat capaian kinerja DKUKMP berdasarkan sasaran/target Renstra DKUKMP periode 2025-2029, dapat disajikan dalam tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan DKUKMP Kota Tarakan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Tepat waktu				n/a	100%	100%	100%	100%	n/a	100%	100%	100%	100%	n/a	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Usaha Dagang				n/a	13%	14%	14%	15%	n/a	13	14	14%	26,62%	n/a	100	100	100%	177,46
3	Persentase kenaikan jumlah UTTP yang bertanda tera sah				n/a	47%	47%	47%	47%	n/a	61%	61%	61,28 %	61,26%	n/a	129,78 %	129,78 %	130,38 %	130,34%
4	Persentase pemantauan Perkembangan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting ditingkat Pasar Kabupaten/ Kota				n/a	100%	100%	100%	100%	n/a	100%	100%	100%	100%	n/a	100%	100%	100%	100%
5	Persentase kenaikan nilai ekspor bersih				n/a	0.36%	0.36%	0.36%	0.36%	n/a	0,36%	0,36%	0.36%	0.36%	n/a	100%	100%	100%	100%
6	Persentase produk lokal/unggulan yang dapat dikembangkan melalui UMKM				n/a	100%	100%	100%	100%	n/a	100%	100%	100%	100%	n/a	100%	100%	100%	100%
7	Persentase pertumbuhan UMKM				n/a	21%	22%	25%	30%	n/a	0,96%	0,96%	15,9%	18,60%	n/a	4,57%	4,36	63,6%	62%
8	Meningkatnya jumlah koperasi sehat				n/a	17.50%	20%	25%	40%	n/a	25%	43%	53%	44%	n/a	142,85%	215%	212%	110%

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

[illegible]

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan DKUKMP Kota Tarakan pada dasarnya adalah semua pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan tugas pembinaan, pengawasan maupun pelayanan terhadap koperasi, pelaku usaha UMKM dan pelaku usaha perdagangan dan masyarakat umum;

2.1.5 Mitra DKUKMP Kota Tarakan dalam Memberikan Layanan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, DKUKMP Kota Tarakan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak. Pada lingkup pemerintahan, kemitraan dijalin dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara, serta perangkat daerah, badan, kecamatan, kelurahan, unit kerja lainnya di lingkup pemerintah Kota Tarakan yang berperan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang koperasi, UKM dan perdagangan.

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN

Identifikasi permasalahan dan isu strategis yang relevan terkait koperasi, UKM dan perdagangan merupakan langkah penting yang perlu dilakukan DKUKMP Kota Tarakan sebelum merumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah. Pemetaan dan analisis permasalahan ini didasarkan pada tugas dan fungsi yang diemban DKUKMP serta mempertimbangkan faktor-faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Melalui pemetaan permasalahan tersebut, dapat menentukan langkah-langkah strategis dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan kinerja perangkat daerah. Penting bagi DKUKMP Kota Tarakan memahami permasalahan yang dihadapinya, baik internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi kemampuannya dalam mendukung tercapainya visi, misi, dan program pembangunan Kota Tarakan.

Pemetaan mengenai masalah pokok, masalah turunan, dan akar masalah ditampilkan dalam tabel 2.5.

Tabel 2.5
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum tingginya kontribusi sektor perdagangan, Koperasi dan UMKM yang mendukung pertumbuhan ekonomi	Belum tingginya aktivitas perdagangan dan jasa yang tertib niaga	Belum optimalnya fasilitasi penerbitan izin
			Belum optimalnya fasilitasi penerbitan tanda daftar gudang
			Belum optimalnya pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya
			Belum optimalnya ketersediaan dokumen penerbitan SKA
			Belum optimalnya fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan
			Belum optimalnya pembinaan pengelola pasar

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Belum optimalnya jaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting
			Belum optimalnya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
			Belum optimalnya pengawasan penyaluran pupuk dan peptisida bersubsidi
			Belum optimalnya promosi produk ekspor
			Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan UTPP legal dan pengawasan
			Belum optimalnya fasilitasnya pelaku usaha dalam peningkatan nilai produk
		Belum tingginya koperasi yang berkualitas dan berdaya saing	Belum optimalnya sosialisasi perizinan USP
			Belum optimalnya pengawasan koperasi
			Belum optimalnya penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi
			Belum optimalnya pelatihan perkoperasian
			Belum optimalnya pemberdayaan koperasi
		Belum tingginya pertumbuhan UMKM	Belum optimalnya pemberdayaan UMKM
			Belum optimalnya pengembangan UMKM
		Belum tingginya tata kelola DKUKMP	Belum optimalnya penguatan internal akuntabilitas kinerja
			belum optimalnya layanan kesekretariatan

DKUKMP Tarakan juga melakukan analisa terhadap isu-isu strategis yang untuk memberikan gambaran apa saja potensi daerah yang dapat menjadi faktor pendukung perangkat daerah, permasalahan perangkat daerah, isu KLHS yang relevan dengan perangkat daerah, isu lingkungan dinamis yang relevan dengan perangkat daerah baik di tingkat global, nasional, regional maupun isu strategis perangkat daerah. Hasil isu strategis tersebut disajikan dalam tabel 2.6

Tabel 2.6
Isu Strategis DKUKMP Kota Tarakan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Memiliki peran strategis sebagai pusat perdagangan dan jasa di Kalimantan Utara.	Belum tingginya kontribusi sektor perdagangan, Koperasi dan UMKM yang mendukung pertumbuhan ekonomi	Belum optimalnya kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sektor- sektor pertanian, perikanan dan sektor unggulan lainnya	Dominasi Ekonomi Digital: Perkembangan e-commerce dan marketplace online secara global	Peningkatan Daya Saing Produk Lokal	Penguatan UMKM yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan (misalnya, pengolahan hasil perikanan)	Peningkatan kontribusi sektor Perdagangan, Koperasi dan UMKM yang mendukung pertumbuhan ekonomi

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Memiliki Potensi Hasil Perikanan			Tren global menuju produk umkm yang berkelanjutan dan ramah lingkungan	Peran Serta UMKM dalam distribusi perdagangan Nasional	Dukungan untuk Produk Unggulan Lokal	

Dengan mempertimbangkan hasil analisis permasalahan dan isu strategis di atas, dapat disimpulkan bahwa fokus DKUKMP Kota Tarakan ke depan adalah bagaimana cara melakukan peningkatan kontribusi sektor perdagangan, koperasi dan UMKM yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini merupakan upaya mendukung Kepala Daerah dalam mencapai visi “Terwujudnya Tarakan Sebagai Kota Cerdas yang Bertumpu Pada Sektor Jasa, Perdagangan, Perikanan Kelautan, dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Maju Menuju Masyarakat Sejahtera”. Misi ke-3 (tiga) yaitu “Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui dukungan kemudahan berusaha yang berkeadilan dan bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, perikanan kelautan, ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan (UMKM)”. Dijabarkan pada Tujuan ke-3 (tiga) yaitu “Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi” melalui sasaran “Meningkatnya pertumbuhan dan stabilitas ekonomi”.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KOTA TARAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan arah yang ingin ditetapkan oleh perangkat daerah untuk mencapai visi, misi dan program pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsinya. Sementara itu, sasaran merupakan hasil konkret yang akan dicapai dalam periode waktu tertentu, yaitu 5 (lima) tahun yang secara spesifik dan terukur dirancang untuk mencapai tujuan tersebut.

Mengacu pada analisis permasalahan dan isu strategis pada bab II, maka tujuan dan sasaran pada Renstra DKUKMP Kota Tarakan tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Kota Tarakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025- 2029. Penjabaran pada Renstra tersebut merumuskan tujuan, sasaran, strategi (penahapan), arah kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah.

Tujuan DKUKMP Kota Tarakan ialah “Meningkatnya Kontribusi sektor perdagangan, Koperasi dan UMKM”. Sementara 4 (empat) sasarannya adalah, sebagai berikut :

1. Meningkatnya aktivitas perdagangan dan jasa yang tertib niaga
2. Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Berdaya Saing
3. Meningkatnya pertumbuhan UMKM
4. Meningkatnya Tata Kelola DKUKMP

Penjelasan lebih rinci terkait data awal (*baseline*) tahun 2024, indikator, target periode tahun 2025-2030 dari tujuan dan sasaran DKUKMP Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3. 1
Tujuan dan Sasaran Renstra DKUKMP Kota Tarakan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.17.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan											
Meningkatnya pertumbuhan dan stabilitas ekonomi	Meningkatnya Kontribusi sektor perdagangan, Koperasi dan UMKM		Kontribusi sektor Perdagangan, Koperasi, UMKM terhadap PDRB (%)	24,99	25	25,025	25,026	25,027	25,028	25,029	
		Meningkatnya aktivitas perdagangan dan jasa yang tertib niaga	Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan (%)	12,2	12,35	15	20	25	30	35	
			Nilai Ekspor Bersih (Rupiah)	0	50.000.000.000	200.000.000.000	300.000.000.000	400.000.000.000	500.000.000.000	600.000.000.000	
			persentase kepatuhan berusaha (Persentase)	47,35	48	50	55	60	65	70	
		Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Persentase koperasi sehat (%)	6,9	10,34	13,79	17,24	17,24	24,14	24,14	
		Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Pertumbuhan Pelaku UMKM (%)	15,16	15,6	15,63	15,64	15,8	15,82	15,85	
		Meningkatnya Tata Kelola DKUKMP	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	0	70	70,01	70,3	70,5	70,07	70,1	
			Nilai SAKIP (Nilai)	80,32	80,33	80,35	80,48	80,5	80,55	80,58	

3.2. Strategi DKUKMP Kota Tarakan

Strategi Perangkat Daerah merupakan penahapan rencana strategis yang disusun DKUKMP Kota Tarakan selama 5 (lima) tahun ke depan yaitu periode tahun 2026–2030. Setiap tahapan memuat arah pencapaian yang semakin meningkat, dimulai dari Konsolidasi regulasi dan penataan aktivitas sektor perdagangan, koperasi, dan UMKM di Tarakan pada tahun 2026, Peningkatan kapasitas dan akses terhadap sumber daya, pendanaan, dan membangun kemitraan strategis pada tahun 2027, Penguatan daya saing dan disversifikasi sektor perdagangan, koperasi, dan UMKM dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan mampu memanfaatkan teknologi tepat guna, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui kebijakan yang mendukung dan koordinasi lintas sektor. pada tahun 2028, Pengembangan digitalisasi, inovasi dan ekspansi pasar dengan mendorong adopsi teknologi digital dan inovasi dalam praktik perdagangan, pengelolaan koperasi, dan pengembangan UMKM pada tahun 2029, hingga pada akhirnya mewujudkan ekosistem perdagangan, pengelolaan koperasi, dan pengembangan UMKM yang berdaya saing pada tahun 2030.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra DKUKMP Kota Tarakan

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Konsolidasi regulasi dan penataan aktivitas sektor perdagangan, koperasi, dan UMKM di Tarakan.	Peningkatan kapasitas dan akses terhadap sumber daya, pendanaan, dan membangun kemitraan strategis	Penguatan daya saing dan disversifikasi sektor perdagangan, koperasi, dan UMKM	Pengembangan digitalisasi, inovasi dan ekspansi pasar dengan mendorong adopsi teknologi digital dan inovasi Dalam praktik perdagangan, Pengelolaan koperasi, dan pengembangan UMKM.	Terwujudnya Ekosistem perdagangan, pengelolaan koperasi, dan pengembangan UMKM yang berdaya saing

Untuk mencapai tahapan tersebut, seluruh arah kebijakan dilaksanakan secara simultan dan berkesinambungan setiap tahun.

3.3. Arah Kebijakan

Rangkaian arah kebijakan tersebut diselaraskan dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pengawasan serta kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3 Arah Kebijakan DKUKMP Kota Tarakan

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
		1. Pengembangan Sektor Jasa dan P erdagangan	1. Peningkatan penyelenggaraan promosi produk ekspor 2. Peningkatan fasilitasi pelaku usaha dalam peningkatan nilai produk 3. Penjaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
			4. Peningkatan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	
			5. Pengawasan penyaluran pupuk dan peptisida bersubsidi	
			6. Peningkatan fasilitasi penerbitan izin	
			7. Peningkatan Fasilitas penerbitan Tanda Daftar Gudang	
			8. Peningkatan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)	
			9. Peningkatan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	
			10. Pembinaan pengelola pasar	
	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2018 Tentang Unit Metrologi Legal Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Fasilitas Kegiatan Metrologi Legal		11. Peningkatan Pengawasan dan Pelaksanaan kegiatan UTP legal	
	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	2. Pemberdayaan dan Dukungan untuk UMKM dan Ekonomi Kerakyatan	12. Peningkatan sosialisasi perizinan Usaha simpan Pinjam	
	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih		13. Peningkatan pengawasan koperasi	
	Surat Menteri Dirjen Bina Pemerintahan Desa Nomor: 500.3/2076/BPD Tanggal 27 Mei 2025 Hal Kodefikasi Sub Kegiatan dan Belanja APBD dan Kodefikasi Kegiatan dan Belanja APB Desa untuk Pemberian Bantuan Pembuatan Akta Notaris Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 100.3.3.3/HK-V/275/2025 Tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih Kota Tarakan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 500.3.2/1864/Bangda tanggal 27 maret 2025 hal Dukungan Pemerintah Daerah Terhadap Pengembangan UMKM dan Sektor Kerajinan Melalui Dekranas		14. Peningkatan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi 15.Peningkatan pelatihan perkoperasian 16. Pelaksanaan pemberdayaan koperasi 17. Pelaksanaan pemberdayaan UMKM 18. Peningkatan pengembangan UMKM	

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KOTA TARAKAN

4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Tarakan telah menyusun secara sistematis program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan (2025-2029) dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran DKUKMP Kota Tarakan yang diarahkan untuk mengungkit tercapainya visi dan misi Kota Tarakan.

Keseluruhan program, kegiatan, dan subkegiatan yang digunakan DKUKMP Kota Tarakan telah mengacu nomenklatur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan adalah sebagai berikut

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Terdiri dari Kegiatan sebagai berikut :

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan rencana Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - a) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - c) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah;
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d) Penyediaan Barang Logistik Kantor
 - e) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - a) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - b) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c) Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak bermotor
 - d) Pengadaan Mebel
 - e) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - f) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - g) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c) Pemeliharaan Mebel
 - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Uraian lebih rinci terkait program/kegiatan/subkegiatan beserta kinerja (outcome dan output), indikator, target, dan pagu indikatif DKUKMP Kota Tarakan dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2

Tabel 4.1

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
2.17.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan							
- Meningkatnya pertumbuhan dan stabilitas ekonomi	Meningkatnya Kontribusi sektor perdagangan, Koperasi dan UMKM				Kontribusi sektor Perdagangan, Koperasi, UMKM terhadap PDRB (%)		
		Meningkatnya aktivitas perdagangan dan jasa yang tertib niaga			Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan (%)		
					Nilai Ekspor Bersih (Rupiah)		
					persentase kepatuhan berusaha (Persentase)		
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha		Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
				Terlaksananya fasilitasi penerbitan izin	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik (laporan)	3.30.02.2.01 - Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	
					Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik (laporan)	3.30.02.2.01.0002 - Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	
				Terlaksananya Fasilitasi penerbitan tanda daftar gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	3.30.02.2.02 - Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
					Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	3.30.02.2.02.0001 - Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
				Terlaksananya Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)	3.30.02.2.06 - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)	3.30.02.2.06.0003 - Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
				Tersedianya dokumen penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	3.30.02.2.07 - Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	
					Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	3.30.02.2.07.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien		Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
				Tersedianya fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01.0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3.30.03.2.01.0002 - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
				Terlaksananya pembinaan pengelola pasar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	3.30.03.2.02 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	3.30.03.2.02.0001 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
				Terjaminnya ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	3.30.04.2.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	3.30.04.2.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	3.30.04.2.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	3.30.04.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	3.30.04.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	3.30.04.2.01.0003 - Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
				Terlaksananya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	3.30.04.2.02.0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	3.30.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pengawasan penyaluran pupuk dan peptisida bersubsidi	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan (Dokumen)	3.30.04.2.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	3.30.04.2.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan (Dokumen)	3.30.04.2.03.0001 - Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	
					Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	3.30.04.2.03.0003 - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	
			Meningkatnya Pelaku Usaha yang berorientasi ekspor		Volume ekspor (Angka)	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
				Terselenggaranya promosi produk ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk)	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	3.30.05.2.01.0002 - Pameran Dagang Nasional	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	3.30.05.2.01.0003 - Pameran Dagang Lokal	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	3.30.05.2.01.0004 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
					Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk)	3.30.05.2.01.0005 - Peningkatan Citra Produk Ekspor	
			Meningkatnya kesesuaian UTPP sesuai standar		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
				Terlaksananya kegiatan UTPP legal dan pengawasan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
					Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
					Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	
					Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	3.30.06.2.01.0002 - Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri		Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
				Terfasilitasinya pelaku usaha dalam peningkatan nilai produk	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	3.30.07.2.01.0005 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Berdaya Saing			Persentase koperasi sehat (%)		
			Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam		Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)	2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	
				Terlaksananya sosialisasi perizinan USP	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	2.17.02.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	2.17.02.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi		Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
				Terlaksananya pengawasan koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	2.17.03.2.01.0003 - Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	
					Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi		Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
				Terlaksananya penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	2.17.04.2.01.0001 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas SDM Perkoperasian		Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
				Terlaksananya pelatihan perkoperasian	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
			Meningkatnya produktivitas koperasi		Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
				Terlaksananya pemberdayaan koperasi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha)	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya (Unit Usaha)	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan (Kelompok Masyarakat)	2.17.06.2.01.0003 - Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	
					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha)	2.17.06.2.01.0004 - Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya (Unit Usaha)	2.17.06.2.01.0007 - Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
					Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	2.17.06.2.01.0009 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya pertumbuhan UMKM			Pertumbuhan Pelaku UMKM (%)		
			Meningkatnya kapasitas UMKM		Rasio Kewirausahaan (Persentase)	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
				Terlaksananya pemberdayaan UMKM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0003 - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
					Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)	2.17.07.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	
					Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	2.17.07.2.01.0014 - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
			Meningkatnya daya saing UMKM		Persentase kemitraan UMKM yang difasilitasi (%)	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
				Terfasilitasinya pengembangan UMKM	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	2.17.08.2.01.0002 - Pengembangan Usaha Mikro	
					Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	2.17.08.2.01.0006 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	
		Meningkatnya Tata Kelola DKUKMP			Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)		
					Nilai SAKIP (Nilai)		
			Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja		Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.17.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.17.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.17.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.17.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya Layanan Administrasi Kepegawaian		2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Layanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.17.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.17.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terkelolanya data Barang Milik Daerah dalam aplikasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.17.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya layanan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.17.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.17.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.17.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.17.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				801.854.200,00		766.970.100,00		766.854.200,00		766.854.200,00		766.854.200,00		
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				50.469.100,00		50.585.000,00		50.469.100,00		50.469.100,00		50.469.100,00		
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)	11,20	11,96	50.469.100,00	12,34	50.585.000,00	12,71	50.469.100,00	13,09	50.469.100,00	13,45	50.469.100,00	2.17.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
3.30.02.2.01 - Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan				10.234.000,00		10.234.000,00		10.234.000,00		10.234.000,00		10.234.000,00		
Terlaksananya fasilitasi penerbitan izin	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik (laporan)	0	3	10.234.000,00	3	10.234.000,00	3	10.234.000,00	3	10.234.000,00	3	10.234.000,00		
3.30.02.2.01.0002 - Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik				10.234.000,00		10.234.000,00		10.234.000,00		10.234.000,00		10.234.000,00		
Tersedianya laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik (laporan)	0	3	10.234.000,00	3	10.234.000,00	3	10.234.000,00	3	10.234.000,00	3	10.234.000,00		
3.30.02.2.02 - Penerbitan Tanda Daftar Gudang				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi penerbitan tanda daftar gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	0	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00		
3.30.02.2.02.0001 - Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	0	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00		
Terlaksananya Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
3.30.02.2.06.0003 - Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
3.30.02.2.07 - Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)				20.235.100,00		20.351.000,00		20.235.100,00		20.235.100,00		20.235.100,00		
Tersedianya dokumen penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	2.162	2.170	20.235.100,00	2.170	20.351.000,00	2.170	20.235.100,00	2.170	20.235.100,00	2.170	20.235.100,00		
3.30.02.2.07.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA				20.235.100,00		20.351.000,00		20.235.100,00		20.235.100,00		20.235.100,00		
Tersedianya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	2.162	2.170	20.235.100,00	2.170	20.351.000,00	2.170	20.235.100,00	2.170	20.235.100,00	2.170	20.235.100,00		
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		140.000.000,00		
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	14	14	140.000.000,00	14	140.000.000,00	14	140.000.000,00	14	140.000.000,00	14	140.000.000,00	2.17.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		
Tersedianya fasilitas pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	1	2	110.000.000,00	2	110.000.000,00	2	110.000.000,00	2	110.000.000,00	2	110.000.000,00		
	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
3.30.03.2.01.0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
3.30.03.2.01.0002 - Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	1	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00		
3.30.03.2.02 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya pembinaan pengelola pasar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	0	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	0	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				202.085.100,00		202.085.100,00		202.085.100,00		202.085.100,00		202.085.100,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	12,80	13,75	202.085.100,00	13,75	202.085.100,00	13,75	202.085.100,00	13,75	202.085.100,00	13,75	202.085.100,00	2.17.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
3.30.04.2.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				65.608.300,00		65.608.300,00		65.608.300,00		65.608.300,00		65.608.300,00		
Terjaminnya ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	1	1	65.608.300,00	1	65.608.300,00	1	65.608.300,00	1	65.608.300,00	1	65.608.300,00		
	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
3.30.04.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				40.755.900,00		40.755.900,00		40.755.900,00		40.755.900,00		40.755.900,00		
Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	1	1	40.755.900,00	1	40.755.900,00	1	40.755.900,00	1	40.755.900,00	1	40.755.900,00		
3.30.04.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				4.787.400,00		4.787.400,00		4.787.400,00		4.787.400,00		4.787.400,00		
Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	1	1	4.787.400,00	1	4.787.400,00	1	4.787.400,00	1	4.787.400,00	1	4.787.400,00		
Tersedianya Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat (Laporan)	1	1	20.065.000,00	1	20.065.000,00	1	20.065.000,00	1	20.065.000,00	1	20.065.000,00		
3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				116.376.200,00		116.376.200,00		116.376.200,00		116.376.200,00		116.376.200,00		
Terlaksananya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	116.376.200,00	1	116.376.200,00	1	116.376.200,00	1	116.376.200,00	1	116.376.200,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
3.30.04.2.02.0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				30.071.100,00		30.071.100,00		30.071.100,00		30.071.100,00		30.071.100,00		
Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	30.071.100,00	1	30.071.100,00	1	30.071.100,00	1	30.071.100,00	1	30.071.100,00		
3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				50.153.000,00		50.153.000,00		50.153.000,00		50.153.000,00		50.153.000,00		
Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	1	1	50.153.000,00	1	50.153.000,00	1	50.153.000,00	1	50.153.000,00	1	50.153.000,00		
3.30.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				36.152.100,00		36.152.100,00		36.152.100,00		36.152.100,00		36.152.100,00		
Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	36.152.100,00	1	36.152.100,00	1	36.152.100,00	1	36.152.100,00	1	36.152.100,00		
3.30.04.2.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				20.100.600,00		20.100.600,00		20.100.600,00		20.100.600,00		20.100.600,00		
	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
3.30.04.2.03.0001 - Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlengkapinya Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan (Dokumen)	5	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00		
3.30.04.2.03.0003 - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				15.100.600,00		15.100.600,00		15.100.600,00		15.100.600,00		15.100.600,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	1	1	15.100.600,00	1	15.100.600,00	1	15.100.600,00	1	15.100.600,00	1	15.100.600,00		
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				145.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		
Meningkatnya Pelaku Usaha yang berorientasi ekspor	Volume ekspor (Angka)	12.534,27	12.659,92	145.000.000,00	12.723,22	110.000.000,00	12.786,84	110.000.000,00	12.850,77	110.000.000,00	12.915,03	110.000.000,00	2.17.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				145.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		
Terselenggaranya promosi produk ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	0	50	145.000.000,00	50	110.000.000,00	50	110.000.000,00	50	110.000.000,00	50	110.000.000,00		
	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk)	0	2		2		2		2		2			
3.30.05.2.01.0002 - Pameran Dagang Nasional				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	0	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00		
3.30.05.2.01.0003 - Pameran Dagang Lokal				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	0	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00	2	30.000.000,00		
3.30.05.2.01.0004 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan				65.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
3.30.05.2.01.0005 - Peningkatan Citra Produk Ekspor				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi (Produk)	0	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00		
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				244.300.000,00		244.300.000,00		244.300.000,00		244.300.000,00		244.300.000,00		
Meningkatnya kesesuaian UTTP sesuai standar	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	47,4	48	244.300.000,00	50	244.300.000,00	53	244.300.000,00	55	244.300.000,00	58	244.300.000,00	2.17.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				244.300.000,00		244.300.000,00		244.300.000,00		244.300.000,00		244.300.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya kegiatan UTTP legal dan pengawasan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	601	600	244.300.000,00	600	244.300.000,00	600	244.300.000,00	600	244.300.000,00	600	244.300.000,00		
	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	30	30		30		30		30		30			
3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang				214.300.000,00		214.300.000,00		214.300.000,00		214.300.000,00		214.300.000,00		
Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	601	600	214.300.000,00	600	214.300.000,00	600	214.300.000,00	600	214.300.000,00	600	214.300.000,00		
3.30.06.2.01.0002 - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	30	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00		
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	0,12	0,10	20.000.000,00	0,10	20.000.000,00	0,10	20.000.000,00	0,10	20.000.000,00	0,10	20.000.000,00	2.17.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terfasilitasinya pelaku usaha dalam peningkatan nilai produk	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	40	40	20.000.000,00	40	20.000.000,00	40	20.000.000,00	40	20.000.000,00	40	20.000.000,00		
3.30.07.2.01.0005 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	40	40	20.000.000,00	40	20.000.000,00	40	20.000.000,00	40	20.000.000,00	40	20.000.000,00		

Sasaran pembangunan RPJMD Kota Tarakan yang relevan dengan tugas dan fungsi DKUKMP ialah meningkatnya pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Untuk mencapai sasaran tersebut DKUKMP harus bersinergi bersama perangkat daerah lainnya, karena bersifat lintas sektor (*crosscutting*). Dalam upaya mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah DKUKMP merumuskan beberapa sasaran, antara lain: Meningkatnya aktivitas perdagangan dan jasa yang tertib niaga; Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Berdaya Saing; Meningkatnya pertumbuhan UMKM serta Meningkatnya Tata Kelola DKUKMP. Selanjutnya untuk menjabarkan sasaran tersebut ke tingkat operasional, DKUKMP menetapkan sejumlah subkegiatan prioritas yang mendukung program prioritas. Penjabaran lebih lengkap mengenai subkegiatan prioritas tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.3

Tabel 4.3.

Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
2.17.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan				
1.	2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			2.17.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			2.17.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			2.17.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
		Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			2.17.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
			2.17.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			2.17.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			2.17.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			2.17.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			2.17.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2.	2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	2.17.02.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.17.02.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
3.	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
			2.17.03.2.01.0003 - Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	
			2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
4.	2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.17.04.2.01.0001 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
5.	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya kualitas SDM Perkoperasian	2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
6.	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya produktivitas koperasi	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.17.06.2.01.0003 - Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	
			2.17.06.2.01.0004 - Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
			2.17.06.2.01.0007 - Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
			2.17.06.2.01.0009 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	
7.	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
			2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
			2.17.07.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	
			2.17.07.2.01.0014 - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	
			2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
8.	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
			2.17.08.2.01.0002 - Pengembangan Usaha Mikro	
			2.17.08.2.01.0006 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	
9.	3.30.02 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	3.30.02.2.01 - Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	
			3.30.02.2.01.0002 - Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	
			3.30.02.2.02 - Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
			3.30.02.2.02.0001 - Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
			3.30.02.2.06 - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
			3.30.02.2.07 - Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	
			3.30.02.2.07.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	
10.	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
			3.30.03.2.01.0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	
			3.30.03.2.01.0002 - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
11.	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	3.30.04.2.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
			3.30.04.2.01.0003 - Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
			3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar kabupaten/Kota	
			3.30.04.2.02.0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
			3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			3.30.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
12.	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya Pelaku Usaha yang berorientasi ekspor	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.30.05.2.01.0002 – Pameran Dagang Nasional	
			3.30.05.2.01.0004 - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
13.	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya kesesuaian UTTP sesuai standar	3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	
14.	3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 3.30.07.2.01.0005 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan DKUKMP Kota Tarakan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ente), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Indikator Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 yang diamanatkan secara khusus kepada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Taraka

Indikator Kinerja Utama

Untuk mengukur capaian dari tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, DKUKMP Kota Tarakan merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai tolok ukur keberhasilan.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	2.17.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan									
2.	Kontribusi sektor Perdagangan, Koperasi, UMKM terhadap PDRB	%	24,99	25	25,025	25,026	25,027	25,028	25,029	
3.	Pertumbuhan Pelaku Usaha Perdagangan	%	12,2	12,35	15	20	25	30	35	
4.	Nilai Ekspor Bersih	Rupiah	0	50.000.000.000	200.000.000.000	300.000.000.000	400.000.000.000	500.000.000.000	600.000.000.000	
5.	persentase kepatuhan berusaha	Persen tase	47,35	48	50	55	60	65	70	
6.	Persentase koperasi sehat	%	6,9	10,34	13,79	17,24	17,24	24,14	24,14	
7.	Pertumbuhan P elaku UMKM	%	15,16	15,6	15,63	15,64	15,8	15,82	15,85	
8.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	0	70	70,01	70,3	70,5	70,07	70,1	
9.	Nilai SAKIP	Nilai	80,32	80,33	80,35	80,48	80,5	80,55	80,58	

Indikator Kinerja Kunci

Jika Indikator Kinerja Utama (IKU) berfungsi sebagai tolok ukur strategis untuk mengukur keberhasilan DKUKMP Kota Tarakan dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, maka Indikator Kinerja Kunci (IKK) lebih menekankan pada penilaian capaian kinerja urusan pemerintahan sesuai kewenangan daerah. Adapun Indikator Kinerja Kunci urusan DKUKMP Kota Tarakan pada tabel berikut :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
2.	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	positif	Persentase	60	69	70	72	75	80	82	
3.	Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	positif	Persentase	15,7	13,8	12,3	11,2	10,2	9,5	8,8	
4.	Pertumbuhan Wirausaha	positif	Persentase	18,6	16	14,1	12,6	11,4	10,4	9,6	
5.	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
6.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	positif	%	47,4	47,5	48	50	53	55	58	

Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah untuk mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan visi dan misi serta mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan. IKD menjadi alat ukur untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang mencakup aspek daya saing daerah.

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.17.3.30.0.00.01.0000 - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan										
I	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persentase	60	69	70	72	75	80	82	
2	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	47,4	47,5	48	50	53	55	58	
3	Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persentase	15,7	13,8	12,3	11,2	10,2	9,5	8,8	
4	Pertumbuhan Wirausaha	Persentase	18,6	16	14,1	12,6	11,4	10,4	9,6	

BAB V PENUTUP

Penetapan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan Sasaran dan Tujuan tersebut diharapkan benar- benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan meliputi :

1. Indikator masukan adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, informasi, kebijakan atau peraturan perundang-undangan
2. Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau non-fisik
3. Indikator hasil adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah atau efek langsung
4. Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan
5. Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Pencapaian indikator-indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan pengolahan masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan program dan kegiatan yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2025-2029. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategis ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kota Tarakan 2025-2029 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Tarakan. Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa dibarengi dengan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh stakeholders yang ada di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Tarakan.

20. Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan
Tahun 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah atau lebih dikenal dengan Renstra merupakan instrumen untuk merumuskan dan mencapai tujuan organisasi serta menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pada periode rencana jangka menengah, sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas suatu institusi pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan. Renstra ini dirumuskan dalam kerangka pandangan yang strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Fungsi penyusunan Renstra adalah sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, rencana tersebut tidak semata-mata hanya disusun dan didiamkan, tapi melainkan rencana yang telah dibuat harus dilaksanakan sebagai acuan bahwa organisasi tersebut adalah organisasi yang bekerja efektif dan berkinerja, dalam menilai apakah organisasi tersebut memiliki kinerja yang baik, maka bisa dilihat dari seberapa banyak rencana strategi yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi dan misi Kepala Daerah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disusun mengacu Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis secara umum atau Rencana Strategis untuk masing-masing Perangkat Daerah. Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah salah satu Perangkat Daerah untuk Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Perindustrian yang memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis.

Keberadaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang tenaga kerja dan perindustrian. Pembangunan di bidang tenaga kerja dan perindustrian bertujuan untuk Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

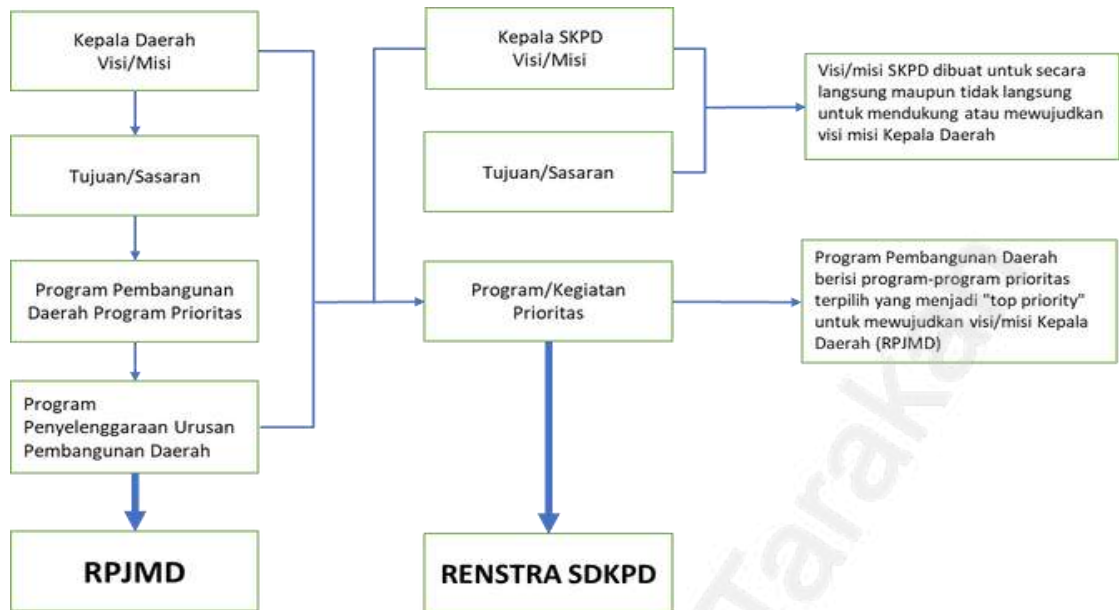


Gambar 1.1
Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Renstra OPD harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Tarakan Tahun 2025-2029, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Dalam konteks otonomi daerah, Renstra OPD juga perlu terintegrasi dengan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota. Keselarasan ini penting agar setiap level pemerintahan dapat berkolaborasi dalam mencapai tujuan pembangunan secara menyeluruh. Integrasi ini menciptakan hubungan saling mendukung antar tingkatan pemerintahan daerah. Selain itu, dalam konteks perencanaan pembangunan nasional, Renstra OPD juga harus terkait dengan Renstra Kementerian/Lembaga. Sinkronisasi ini diperlukan agar kebijakan dan program OPD dapat mendukung agenda nasional, menciptakan sinergi antar lembaga, dan memastikan keselarasan dalam pencapaian target nasional.

Penyusunan Renstra OPD juga harus mempertimbangkan karakteristik dan dinamika masyarakat setempat. Proses konsultasi dan partisipasi masyarakat akan memperkaya pemahaman dan memastikan bahwa kebijakan dan program yang dirumuskan dalam Renstra OPD benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dibawah ini merupakan ilustrasi hubungan kinerja pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD dengan Renstra OPD.



Gambar 1.2
Ilustrasi Hubungan Kinerja RPJMD dan Renstra OPD

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029;
17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Unit Pelaksana Teknis Lembaga Latihan Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan.
21. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Unit Pelaksana Teknis Lembaga Latihan Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan;
22. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
23. Surat Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 100.3.3/HK- 40/2025 Tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan adalah untuk memberikan pedoman perencanaan Program/ Kegiatan selama masa transisi dengan tetap mengakomodir program dan kegiatan dengan tetap mengacu pada kebijakan nasional dan kebijakan daerah. Selain itu juga untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan bidang urusan Perindustrian dan Tenaga Kerja yang lebih terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja antara lain:

1. menjabarkan strategi yang akan dijalankan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di bidang perindustrian dan bidang ketenagakerjaan;
2. tersedianya pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan dan pihak terkait dalam melaksanakan

pembangunan di bidang perindustrian dan bidang ketenagakerjaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan; dan

3. menjadi acuan resmi untuk penilaian, penyusunan, dan penyampaian laporan kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini paling sedikit memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA TARAKAN

Bab ini membahas gambaran pelayanan perangkat daerah yang paling sedikit memuat tugas, fungsi, dan struktur perangkat daerah; sumber daya perangkat daerah; kinerja pelayanan perangkat daerah; dan kelompok sasaran layanan. Selain itu juga membahas permasalahan pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan dan Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjabarkan tujuan dan sasaran jangka menengah sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan dan Menguraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan dalam lima tahun mendatang untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Bab ini paling sedikit memuat uraian program; uraian kegiatan; uraian sub kegiatan serta kinerja, indikator target dan pagu indikatif; uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah; target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama; dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci.

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA TARAKAN

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mencakup pemahaman menyeluruh terhadap cara OPD menyelenggarakan layanan publik. Hal ini melibatkan analisis mendalam terhadap kebutuhan masyarakat, upaya untuk meningkatkan aksesibilitas layanan, keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi, serta komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Gambaran Pelayanan diperlukan sebagai panduan dalam menyusun kebijakan strategis. Melalui analisis capaian indikator kinerja diharapkan diketahui tantangan, peluang, kelemahan, dan kekuatan organisasi sehingga rumusan strategi dan arah kebijakan yang diambil serta program dan kegiatan yang dibuat untuk periode atau tahun selanjutnya dapat mendukung upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Gambaran Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan dijelaskan melalui analisis capaian indikator kinerja pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, sumber daya yang dimiliki, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan, serta tantangan dan peluang-peluang yang dinilai perlu disikapi dengan baik dalam dua tahun mendatang.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPTK) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. DPTK merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang perindustrian dan di bidang tenaga kerja yang menjadi kewenangan Daerah. DPTK dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, DPTK mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perindustrian dan tenaga kerja yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

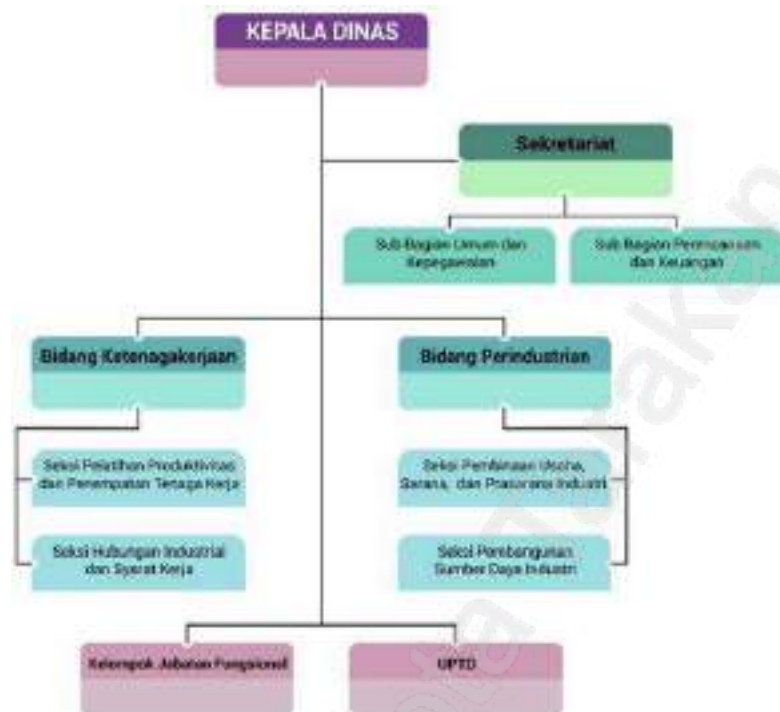
A. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi antara lain:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang ketenagakerjaan;
2. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan bidang ketenagakerjaan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan bidang ketenagakerjaan;
4. pelaksanaan administrasi dinas; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan terdiri atas Sekretariat, Bidang Perindustrian, Bidang Ketenagakerjaan, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT), serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi DPTK Kota Tarakan dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan

a. Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas untuk menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan, dan pemberian dukungan Administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Sekretariat membawahi dua Sub Bagian, yaitu:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

b. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pembinaan usaha, sarana dan prasarana industri dan di bidang pembangunan sumber daya industri yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

c. Bidang Tenaga Kerja

Bidang Ketenagakerjaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelatihan produktivitas dan penempatan tenaga kerja dan di bidang hubungan industrial dan syarat kerja yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- d. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
UPTD Lembaga Latihan Kerja (LLK) merupakan unsur pelaksana teknis operasional yang menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di bidang Lembaga Latihan Kerja. UPTD LLK dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga Latihan Kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. UPTD LLK mempunyai tugas melaksanakan urusan yang berkaitan dengan bidang Lembaga Latihan Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya dan keterampilannya.
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya;
 - 3. setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional;
 - 4. jumlah tenaga fungsional diatur sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja; jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.

2.1.2 Sumber Daya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Sumber Daya Manusia

- 1. Sumber Daya manusia
Dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diemban, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan didukung oleh sumber daya, baik berupa sumber daya manusia/pegawai maupun sarana dan prasarana kantor. Sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil dan (PNS) berdasarkan keadaan pada 1 Mei 2025 sebanyak 34 orang dan Tenaga PPPK dan tenaga kontrak sebanyak 15 orang. Rincian sumber daya manusia yang dimiliki oleh DPTK dapat dilihat pada tabel 2.1 dan 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Gender	Golongan				Jumlah
	I	II	III	IV	
Pria	1	3	11	6	21
Wanita	0	0	13	0	13
Jumlah	1	3	24	6	34

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
dan Tenaga Kontrak

Pegawai	Jumlah
PPPK	5
Tenaga Kontrak	10

2. Aset/Modal

Asset/modal merupakan sarana dan prasarana penunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan, dimana pembiayaannya berasal dari APBD maupun APBN. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dilengkapi dengan perlengkapan kantor berupa barang inventaris kantor. Sarana Bangunan Kantor serta lahan yang menjadi area kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja antara lain: Gedung Kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan dan Gedung UPT LLK seperti yang terdapat pada tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana

Uraian	Jumlah	Keterangan
Tanah	2	Bersertifikat
Bangunan/Gedung	3	Kondisi cukup baik
Kendaraan Roda- 4	2	Baik
Kendaraan Roda- 2	15	Baik
Komputer	31	Baik dan kurang baik
Mesin Tik	1	Baik
Telepon	1	Kurang baik
AC	44	Baik dan kurang baik
Printer	17	Baik dan kurang baik
Laptop	8	Baik dan kurang baik
Mesin Tik Listrik	1	Kurang baik
Peralatan Bengkel LLK	234	Baik dan kurang baik

3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan dalam periode 2019-2020 dapat dilihat dari capaian indikator kinerja, yaitu dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai. Selain itu, capaian kinerja pelayanan juga dinilai dari perbandingan perencanaan anggaran dengan realisasi penggunaan anggaran. Kedua capaian tersebut disajikan dalam Tabel 2.4 dan Tabel 2.5 dibawah ini.

Berdasarkan data evaluasi kinerja Renja Tahun 2024 untuk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan, kinerja pelayanan yang diberikan mengalami perubahan signifikan. Secara keseluruhan, terdapat perbedaan yang mencolok antara target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra (RPJM/Renstra 2021-2026) dengan realisasi capaian yang dicapai pada tahun 2024. Beberapa program menunjukkan tingkat pencapaian yang sangat tinggi, bahkan melebihi target jangka panjang. Contohnya, program Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro mencatat tingkat capaian kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran mencapai 86,91%, yang menunjukkan bahwa kinerja telah melampaui target yang ditentukan. Demikian juga, program Pengadaan Sarana Pelatihan

Kerja Kabupaten/Kota mencapai tingkat capaian kinerja 35,41%, meskipun realisasi anggarannya lebih rendah dibanding target.

Namun, di sisi lain, terdapat kecenderungan bahwa banyak kegiatan tidak mencapai target yang ditetapkan, terutama dalam hal realisasi anggaran. Banyak program yang memiliki target anggaran besar tetapi realisasi yang sangat kecil atau bahkan 0%, seperti Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro yang mencatat realisasi anggaran hanya 0%. Ini menunjukkan adanya hambatan dalam proses pengalokasian dan penyaluran dana, yang berpotensi menjadi masalah. Selain itu, ada beberapa program yang mengalami kendala dalam pencapaian kinerja, seperti Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia yang hanya mencapai 98,04% dari target kinerja, menunjukkan bahwa meskipun sudah dekat, masih ada ruang untuk peningkatan.

Realisasi kinerja pelayanan DPTK masih memerlukan koordinasi dan sinkronisasi yang kuat antara perencanaan strategis jangka panjang (Renstra) dengan pelaksanaan operasional tahunan (Renja). Realisasi yang melebihi target pada beberapa program menunjukkan potensi yang baik, namun ketidaksesuaian yang signifikan pada program lain menunjukkan bahwa sistem perencanaan dan pengawasan mungkin belum optimal. Faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya, ketidakpastian eksternal, atau kendala internal dalam implementasi harus diidentifikasi dan diatasi untuk memastikan kinerja yang lebih konsisten dan efektif di masa depan. Evaluasi ini memberikan gambaran bahwa kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam satu tahun tersebut bersifat tidak merata, dengan keberhasilan yang luar biasa pada beberapa bidang namun tantangan yang signifikan dalam bidang lain, yang memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan dan pengawasan yang lebih intensif.

Tabel 2.4
Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Pertumbuhan unit usaha industri kecil dan menengah (IKM)				23	29,53	29,57	29,58	29,59	23,00	29,53	29,57	35	32,27	100,00	100,00	100,00	118,66	109,06
2	Persentase Peningkatan Daya Saing IKM yang difasilitasi				17,10	18,30	19,00	19,10	17,91	5,60	11,11	13,91	14,10	56,55	32,75	60,71%	73,21	73,82	315,75
3	Persentase izin usaha industri yang dipantau dan dianalisis				-	-	90	90	90			92,26	92,26	91,20			102,51	102,51	101,33
4	Persentase data perusahaan industri yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan				-	32,54	40,01	46,12	51,32		32,54	39,00	39,00	36,92		100,00	97,48	84,56	71,94
5	Tingkat pengangguran terbuka				5,79	5,74	5,69	5,64	5,64	5,79	5,74	5,69	5,20	5,11	100,00	100,00	100,00	9,20	90,60
6	Persentase pencari kerja yang kompeten				93	94	95	96	96	93,00	94,00	98,00	98,00	90,00	100,00	100,00	103,16	102,08	93,75
7	Persentase tenaga kerja yang terserap				21,62	22,35	24,36	24,40	24,24	21,62	22,35	24,36	34,41	35,49	100,00	100,00	100,00	141,02	146,41
8	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan				40	50	60	70	70	40,00	50,00	60,00	100,00	105,00	100,00	100,00	100,00	142,86	150,00
9	Nilai / Predikat SAKIP				67	67	70,97	70,97	78,24	69,49	70,87	78,24	72,96	73,67	103,72	105,78	110,24	102,80	94,16

Tabel 2.4 diatas memaparkan kinerja berbagai indikator kunci dalam tugas dan fungsi perangkat daerah, dengan membandingkan target yang ditetapkan (berdasarkan NSPK, IKK, dan Renstra) terhadap realisasi capaian periode 2020–2024. Secara keseluruhan, terdapat pola peningkatan realisasi pada beberapa indikator, terutama di tahun 2023 dan 2024, meskipun tidak konsisten. Contohnya, indikator pertama, Persentase Pertumbuhan unit usaha industri kecil dan menengah (IKM), mencatat realisasi 29,57% pada 2022 dan 35% pada tahun 2023, melebihi target IKK sebesar 29,57% dan 29,58% untuk tahun tersebut. Rasio capaian mencapai 118,66% pada tahun 2023, menunjukkan keberhasilan dalam mendorong pertumbuhan IKM. Namun, pada indikator kedua, Persentase Peningkatan Daya Saing IKM yang difasilitasi, realisasi pada tahun 2024 mencapai 56,55%, jauh di atas target IKK sebesar 17,91% (rasio 315,75%), sementara tahun sebelumnya hanya mencapai 73,21%–73,82%. Hal ini mengindikasikan konsistensi rendah dalam pencapaian, dengan lonjakan ekstrem pada tahun 2024 yang mungkin disebabkan oleh fokus khusus atau adanya kebijakan baru. Di sisi lain, indikator seperti Persentase izin usaha industri yang dipantau dan dianalisis (indikator 3) mencatat realisasi 91,20–92,26% pada 2022–2024, melebihi target 90% (rasio 101,33%–102,51%), menunjukkan efisiensi dalam pengawasan izin usaha.

Pada indikator terkait ketenagakerjaan, indikator Tingkat pengangguran terbuka (indikator 5) menunjukkan penurunan dari 5,79% pada 2020 menjadi 5,11% pada 2024, meskipun rasio capaian 2023 (9,20) dan 2024 (90,60) mengindikasikan ketidaksesuaian dengan target. Hal ini mungkin karena target yang menurun (5,64% pada tahun 2023) sementara realisasi jauh lebih rendah (5,20%), sehingga rasio tidak proporsional. Sementara itu, indikator Persentase pencari kerja yang kompeten (indikator 6) mencapai 98% pada tahun 2022–2023, melampaui target 95–96% (rasio 103,16%–102,08%), menunjukkan keberhasilan dalam pelatihan atau peningkatan kualitas tenaga kerja. Begitu pula dengan Persentase tenaga kerja yang terserap (indikator 7), yang melonjak dari 24,36% pada tahun 2022 menjadi 35,49% pada tahun 2024, dengan rasio capaian 141,02%–146,41%, menggambarkan peningkatan signifikan dalam penyerapan tenaga kerja. Kondisi ini mencerminkan keberhasilan program kemitraan dengan sektor swasta atau kebijakan pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Di sisi lain, beberapa indikator menunjukkan penurunan atau ketidakstabilan dalam realisasi, seperti pada persentase data perusahaan industri yang valid (indikator 4) mengalami penurunan rasio capaian dari 100% pada tahun 2021 menjadi 71,94% pada tahun 2024, meskipun targetnya meningkat dari 32,54% hingga 51,32%. Hal ini mengindikasikan tantangan dalam pemeliharaan kualitas data, yang mungkin dipicu oleh ketidakstabilan sistem atau kurangnya sumber daya. Demikian pula, pada Nilai SAKIP" (indikator 9), realisasi mencapai 78,24% pada 2022 dengan rasio 110,24%, tetapi turun menjadi 73,67% pada 2024 dengan rasio 94,16%, menunjukkan penurunan konsistensi dalam penilaian kinerja. Sementara itu, indikator Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan mencatat peningkatan drastis dari 60% pada tahun 2022 menjadi 105% pada tahun 2024, dengan rasio 150%, yang mencerminkan efektivitas penyelesaian sengketa hubungan industrial. Namun, perbedaan signifikan ini perlu diinterpretasi dengan hati-hati, karena mungkin terkait dengan jumlah kasus yang meningkat daripada efisiensi proses.

Secara keseluruhan, pelayanan kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja kota Tarakan menunjukkan progres dalam beberapa bidang kunci seperti peningkatan daya saing IKM, penyerapan tenaga kerja, dan penyelesaian kasus industrial, terutama di tahun akhir periode. Namun,

ketidakstabilan dalam pencapaian pada indikator lain (misalnya kualitas data dan nilai SAKIP) menunjukkan kebutuhan untuk memperkuat sistem pemantauan dan pengukuran kualitas. Selain itu, lonjakan rasio capaian pada 2023–2024 perlu dikaji lebih dalam untuk memastikan keberlanjutannya, bukan sekadar hasil sementara. Keterkaitan antara target yang realistis dan sumber daya yang tersedia juga menjadi faktor krusial dalam mempertahankan kinerja yang berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan strategis yang berfokus pada peningkatan kapasitas internal dan integrasi data akan menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas kinerja di masa mendatang.

Adapun anggaran dan realisasi anggaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Anggaran

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.714.047.790	6.858.335.562	6.474.459.608	6.968.856.577	6.960.833.422	5.705.381.256	5.781.414.029	5.738.095.581	5.738.095.981	6.078.020.212	84,98%	84,30%	88,65%	82,34%	87,33%	0,905%	1,59%
2	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	24.956.317	139.977.830	199.418.700	273.394.590	281.394.590	23.956.317	114.957.557	159.169.563	155.853.566	262.977.637	96%	82,12%	79,82%	57%	93,45%	82,3%	80,6%
3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	-	23.357.920	15.335.400	34.999.500	21.851.770	-	21.465.047	13.061.838	13.936.838	19.428.020	-	91,90%	85,17%	39,82%	88,91%	-2,18%	-3,50%
4	Program Pengendalian dan Usaha Industri	-	-	3.951.500	3.998.660	3.998.660	-	-	3.889.500	3.889.580	3.948.000	-	-	98,43%	97,27%	98,73%	0,60%	0,746%
5	Program Perencanaan Tenaga Kerja	-	-	-	34.999.500	34.999.580	-	-	-	0	30.354.820	-	-	-	0%	86,73%	0,0023%	-
6	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	-	-	146.492.730	179.995.225	199.412.350	-	137.091.730	164.982.625	164.982.625	192.098.200	-	-	112,58%	91,66%	96,33%	16,6%	7,86%
7	Program Penempatan Tenaga Kerja	13.272.630	94.675.570	112.359.130	174.359.670	174.359.670	3.040.000	76.988.600	88.606.000	85.661.700	151.916.709	22,90%	81,30%	78,86%	49,13%	87,13%	898%	165%
8	Program Hubungan Industrial	49.106.592	117.368.560	107.803.660	109.167.400	109.071.400	42.953.600	91.455.850	93.421.960	97.772.585	99.305.380	87,47%	77,92%	86,67%	89,56%	91,04%	21,7%	23,4%

Berdasarkan data anggaran dan realisasi yang disajikan pada tabel 2.5 diatas, terlihat bahwa sebagian besar program mengalami rasio realisasi terhadap anggaran yang bervariasi, namun cenderung berada di atas 70% pada tahun-tahun tertentu. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan rasio realisasi yang stabil antara 82–89%, mencerminkan efisiensi penggunaan anggaran yang konsisten selama periode 2020–2024. Sementara itu, Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri menunjukkan pola yang lebih dinamis, dengan rasio realisasi yang tinggi pada awal periode (96% pada 2020) namun turun tajam menjadi 57% pada 2023, meskipun membaik kembali menjadi 93% pada 2024. Hal ini mungkin mengindikasikan tantangan dalam implementasi atau perubahan arah kegiatan pada tahun 2023.

Di sisi lain, beberapa program seperti Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dan Program Pengendalian dan Usaha Industri menunjukkan rasio realisasi yang relatif rendah pada tahun 2023 (39,82% dan 97,27%), meskipun pada tahun 2024 terdapat peningkatan signifikan. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja menarik karena realisasinya melebihi anggaran pada tahun 2022 (112,58%) yang bisa menandakan adanya penambahan dana dari sumber lain atau realokasi anggaran. Namun, hal ini juga menimbulkan pertanyaan tentang akurasi perencanaan anggaran. Di sisi lain, Program Perencanaan Tenaga Kerja hanya memiliki data realisasi pada tahun 2023 dan 2024, dengan realisasi nol pada 2023, yang menunjukkan kemungkinan hambatan operasional atau penundaan pelaksanaan kegiatan.

Rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi menunjukkan tren yang beragam. Program Penempatan Tenaga Kerja menunjukkan pertumbuhan anggaran sangat tinggi (89,8%) dan realisasi yang ekstrem (165%), yang kemungkinan besar disebabkan oleh peningkatan drastis dari angka yang sangat rendah pada 2020. Sementara itu, Program Hubungan Industrial menunjukkan pertumbuhan yang moderat namun stabil, dengan rata-rata pertumbuhan anggaran 21,7% dan realisasi 23,4%, menunjukkan konsistensi dalam pengembangan program. Sebaliknya, Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan, terutama pada realisasi (-3,5%), yang mengindikasikan kemunduran atau penurunan aktivitas dalam program tersebut. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan efisiensi dan pencapaian, masih terdapat ketidakseimbangan dalam realisasi, terutama pada program yang mengalami fluktuasi besar atau tidak memiliki data konsisten sejak awal.

Evaluasi terhadap rasio realisasi dan pertumbuhan menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan program sangat bergantung pada perencanaan yang tepat, konsistensi pendanaan, dan kemampuan adaptasi terhadap kondisi internal dan eksternal. Program dengan rasio realisasi yang tinggi dan pertumbuhan positif menunjukkan manajemen yang baik, sementara program dengan rasio rendah atau pertumbuhan negatif memerlukan evaluasi ulang terhadap strategi pelaksanaan dan alokasi sumber daya. Selain itu, data yang tidak lengkap pada tahun-tahun awal untuk beberapa program membuat analisis pertumbuhan menjadi terbatas, sehingga penting untuk memastikan keterpaduan data dari awal hingga akhir periode untuk evaluasi yang lebih akurat dan komprehensif.

2.1.3 Kelompok Sasaran Layanan dan Mitra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan

Pada bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja selama tiga tahun mendatang. Jenis-jenis layanan serta sasaran pelayanan dapat dilihat pada Tabel 2.6 dibawah ini. Keterlibatan aktif sektor swasta dan masyarakat melalui pendekatan *multi-stakeholder partnership* menjadi kunci keberhasilan program yang telah disusun. Program pelatihan kerja akan efektif hanya jika kurikulum-nya disesuaikan dengan kebutuhan industri aktual (*demand-driven training*), yang memerlukan mekanisme *feedback loop* yang kuat antara UPT Latihan Kerja dengan dunia usaha dan industri. Pembentukan *Workforce Development Board* atau Forum Kemitraan Disnaker-DUDI dapat menjadi platform untuk dialog berkelanjutan, *tracer study graduates*, dan *co-design* program pelatihan. Dalam pengembangan IKM, peran asosiasi industri, perbankan sebagai sumber pembiayaan, dan perguruan tinggi sebagai sumber inovasi dan technology transfer menjadi sangat vital. Model *Public-Private Partnership* (PPP) dapat dieksplor untuk keberlanjutan program yang ada, di mana sektor swasta tidak hanya sebagai *beneficiary* namun juga sebagai *co-investor* dan *co-implementer*. Dari sisi masyarakat, kesadaran akan pentingnya pelatihan dan *upgrading skills* perlu terus ditingkatkan melalui kampanye literasi dan *success stories* yang menginspirasi.

Tabel 2.6
Jenis dan Sasaran Layanan Serta Mitra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan

No.	Jenis Layanan	Sasaran Layanan	Keterangan
1	Pelayanan Penerbitan Kartu Pendaftaran Pencari Kerja / AK 1	Masyarakat / Pencari Kerja	
2	Pelayanan Pendaftaran Lowongan Pekerjaan	Masyarakat / Pencari Kerja	
3	Pelayanan Surat Pengantar Pemenuhan Lowongan	Masyarakat / Pencari Kerja	
4	Pelayanan Rekomendasi Paspor Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)	Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)	
5	Pelayanan Rekomendasi Paspor PMI Mandiri / UKPS	Pekerja Migran Indonesia	
6	Pelayanan Rekomendasi Paspor ABK	CPMI yang bekerja sebagai awak kapal	
7	Pelayanan Fasilitasi PMI Bermasalah	Pekerja Migran Indonesia	
8	Pelayanan Izin Mendirikan Bursa Kerja Khusus (BKK)	Pendiri / Pemohon Izin Pendirian BKK	
9	Pelayanan Penempatan Transmigran	Masyarakat yang berminat melakukan transmigrasi	
10	Pendaftaran Izin LPKS	LPKS yang ingin mendaftarkan izin	
11	Pelayanan Rekomendasi Penerima Bantuan (Program dan Peralatan Pelatihan Kerja)	Masyarakat / Pencari Kerja	
12	Pelayanan Pendaftaran Pelatihan Keterampilan Kerja	Masyarakat / Pencari Kerja	
13	Pelayanan Seleksi Peserta Pendidikan dan Pelatihan Kerja	Masyarakat / Pencari Kerja	
14	Pelayanan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kerja	Masyarakat / Pencari Kerja	
15	Pelayanan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kerja Kelompok Masyarakat	Masyarakat / Pencari Kerja	
16	Layanan Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial	Pekerja / Perusahaan	
17	Pelayanan Pencatatan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit	Perusahaan	

No.	Jenis Layanan	Sasaran Layanan	Keterangan
18	Pelayanan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)	Perusahaan dan Pekerja	
19	Pelayanan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Perusahaan dan Pekerja	
20	Pelayanan Pencatatan Serikat Pekerja / Serikat Buruh	Pekerja	
21	Pelayanan Fasilitas Pelatihan Industri Kecil	Pelaku Usaha Industri Kecil	
22	Pelayanan Fasilitas Kemasan Industri Kecil	Pelaku Usaha Industri Kecil	
23	Pelayanan Rekomendasi Hak Merek Industri Kecil	Pelaku Usaha Industri Kecil	
24	Pelayanan Perizinan Sertifikat Standar (SS) Industri	Pelaku Usaha Industri Kecil	
25	Pelayanan Fasilitas Halal Industri Kecil	Pelaku Usaha Industri Kecil	
26	Pelayanan Sertifikasi Pelatihan Berbasis Kompetensi	Pencari Kerja	

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

A. Permasalahan

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan. Sehubungan dengan itu, langkah strategis untuk mendorong upaya perbaikan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik ialah dengan memberikan stimulasi, semangat perbaikan dan inovasi pelayanan serta melakukan penilaian untuk mengetahui gambaran kinerja yang obyektif dari unit pelayanan. Agar perencanaan dapat dioperasionalkan, meningkatkan aksesibilitas prioritas pembangunan dan secara moral serta etika dapat dipertanggungjawabkan maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja telah melakukan identifikasi isu yang tepat dan strategis yang dapat dilihat pada tabel 2.7 dibawah ini.

Tabel 2.7

Pemetaan Permasalahan Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Masih tingginya pengangguran	Belum tingginya kesempatan kerja	Belum optimalnya penyusunan dokumen tenaga kerja mikro dan makro
			Belum optimalnya pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi sesuai kebutuhan industri
			Belum optimalnya fasilitas pencari kerja
			Belum Optimalnya ketersediaan data lowongan dan penempatan tenaga kerja
			Belum optimalnya perlindungan Pekerja Migran Indonesia
			Belum optimalnya perlindungan hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja
			Belum optimalnya fasilitas kasus perselisihan hubungan industrial
		Belum tingginya penyerapan tenaga kerja sektor IKM	Belum tersusunnya rencana pengembangan sentra industri
			Terlaksananya fasilitas penerbitan izin usaha
			Belum optimalnya ketersediaan data informasi industri yang valid dan akurat
		Belum tingginya tata kelola DPTK	Belum optimalnya penguatan internal akuntabilitas kinerja
			belum optimalnya layanan kesekretariatan

Berdasarkan dinamika pelaksanaan tugas fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, terdapat permasalahan pokok adalah tingkat pengangguran yang masih tinggi, sehingga terjadi masalah antara lain:

1. Belum tingginya kesempatan kerja. Keadaan ini menyebabkan tingkat pengangguran terbuka masih tinggi karena tingkat kesempatan kerja yang masih rendah. Masalah pokok tersebut terdiri dari dua permasalahan yaitu adanya fenomena bonus demografi pada usia kerja dan kurangnya kesempatan kerja. Bonus demografi adalah kondisi dimana populasi masyarakat akan didominasi oleh individu-individu dengan usia produktif. Usia produktif / usia kerja yang dimaksud adalah rentang usia 15 hingga 64 tahun. Pada saat ini di wilayah Kota Tarakan jumlah usia produktif yang berasal dari lulusan SMA/SMK semakin bertambah setiap tahunnya, namun tidak diimbangi dengan ketersediaan kesempatan kerja yang memadai. Sehingga hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya angka pengangguran. Dengan adanya bonus demografi, perusahaan berlomba membuka peluang kerja semakin selektif, sehingga kualifikasi yang ditetapkan juga semakin sulit. Dan permasalahan yang sering terjadi adalah kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pada pasar kerja. Selain itu, kesejahteraan pekerja adalah fasilitas yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja/ karyawan. Salah satu fasilitas yang wajib didapatkan pekerja salah satunya adalah upah/gaji yang sesuai dengan UMK serta jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun kondisi saat ini kesejahteraan pekerja di Kota Tarakan masih rendah yang disebabkan kurangnya perlindungan terhadap tenaga kerja. Masih ada beberapa perusahaan yang belum membayar upah para pekerja mereka sesuai dengan UMK di Kota Tarakan. Selain itu masih banyak para pekerja yang belum terdaftar dalam kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan.
2. Belum tingginya penyerapan tenaga kerja sektor IKM yang disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu belum tersusunnya rencana sentra industri dan belum terlaksananya fasilitasi penerbitan izin usaha yang memadai. Hal ini disebabkan oleh tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku terkait pelaporan berkala terkait usaha yang dijalankan, sehingga akurasi data industri yang ada belum valid.
3. Tingkat tata kelola administrasi DPTK yang belum memadai karena belum optimalnya penguatan internal akuntabilitas kinerja dan pelayanan kesekretariatan.
Permasalahan pembangunan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. DPTK Kota Tarakan dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik internal maupun eksternal, yang mempengaruhi kemampuannya dalam mendukung tercapainya visi, misi, dan program pembangunan Kota Tarakan. Secara internal, permasalahan manajemen sumber daya manusia, seperti kurangnya kapasitas dan keahlian pegawai, dapat menjadi hambatan dalam efektivitas pelaksanaan Tupoksi DPTK. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten tersebut seringkali membuat terbengkalai atau tertundanya suatu pekerjaan tertentu serta mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat dan pelaku industri. Permasalahan internal lainnya adalah terbatasnya sarana dan prasarana serta anggaran daerah untuk melaksanakan dan atau membiayai program dan kegiatan pelayanan yang telah disusun.

Disisi lain, permasalahan eksternal yang dihadapi DPTK adalah permasalahan yang berkaitan dengan kondisi objek layanan, baik tenaga kerja, pelaku industri (IKM), maupun masyarakat secara umum. Permasalahan kompetensi tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar industri merupakan tantangan serius yang mengakibatkan kurang optimalnya penempatan tenaga kerja. Sementara itu, permasalahan eksternal pada sektor industri antara lain adalah masih terbatasnya akses terhadap faktor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan SDM, dan masih rendahnya kepatuhan untuk menyampaikan laporan industri sehingga ketersediaan data yang akan menjadi basis pengambilan kebijakan pembinaan dan pengembangan kurang optimal.

Dalam konteks global, permasalahan eksternal yang dihadapi DPTK mencakup dinamika ekonomi yang tidak stabil dan berbagai perubahan kebijakan nasional. Fluktuasi pasar dan perubahan kebijakan ekonomi dapat berdampak langsung pada sektor industri dan sektor tenaga kerja. Hal ini memerlukan respons yang cepat dan adaptif agar DPTK tetap dapat mendukung pertumbuhan sektor industri dan sektor tenaga kerja sesuai dengan rencana pembangunan daerah.

B. Isu Strategis

Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kota Tarakan, maka faktor pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja kami berusaha menyikapi beberapa isu terkait Urusan Bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja. Berdasarkan pemetaan permasalahan sebagaimana tabel 2.8 dibawah ini.

Tabel 2.8
Isu Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu Klhs Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	Masih tingginya pengangguran	Peningkatan kualitas tenaga kerja lokal guna mendukung iklim investasi dan hilirisasi industri	1.transformasi digital dan otomasi industri; 2.pergeseran ke ekonomi hijau dan berkelanjutan; 3.kompetensi talenta global.	1. program hilirisasi industri nasional; 2.peningkatan kualitas SDM melalui vokasi dan <i>link-match</i> ; 3. perluasan lapangan kerja formal.	1.pengembangan kawasan ekonomi khusus kaltara; 2. kebutuhan SDM terampil untuk IKN; 3. Bonus demografi regional.	Menurunnya pengangguran
		Belum optimalnya pertumbuhan sektor industri yang berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan ekonomi daerah	1. rantai pasok global yang berubah; 2. investasi asing di sektor padat karya; 3. standar ESG dalam industri	1. akselerasi industrialisasi berbasis SDA; 2.kemudahan berusaha dan investasi; 3.pembangunan ekosistem industri.	1.pengembangan klaster industri berbasis SDA Kaltara; 2. sinergi dengan IKN sebagai pasar; 3. kolaborasi industri regional kalimantan	

Berdasarkan tabel di atas, teridentifikasi bahwa permasalahan tingginya pengangguran di daerah memiliki keterkaitan erat dengan isu strategis peningkatan kualitas tenaga kerja lokal yang dibutuhkan untuk mendukung iklim investasi dan program hilirisasi industri. Permasalahan ini tidak dapat dilepaskan dari konteks lingkungan dinamis yang terjadi pada tingkat global, dimana transformasi digital dan otomasi industri

telah mengubah lanskap ketenagakerjaan secara fundamental. Pergeseran menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan menuntut adaptasi kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan standar *Environmental, Social, and Governance* (ESG), sementara kompetisi talenta global semakin ketat seiring dengan mobilitas tenaga kerja lintas negara. Dinamika global ini menciptakan tekanan sekaligus peluang bagi daerah untuk meningkatkan daya saing tenaga kerjanya agar mampu bersaing tidak hanya di level lokal, namun juga regional dan internasional.

Pada tataran nasional, isu lingkungan dinamis yang relevan sangat sejalan dengan arah kebijakan RPJMN 2025-2029 yang menekankan pada program hilirisasi industri nasional sebagai strategi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Program ini membutuhkan dukungan SDM yang memiliki kompetensi teknis spesifik, sehingga pemerintah mendorong peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan vokasi dan penerapan konsep *link-match* antara dunia pendidikan dengan kebutuhan industri. Perluasan lapangan kerja formal menjadi prioritas untuk mengurangi tingkat pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keterkaitan antara kebijakan nasional ini dengan permasalahan daerah menunjukkan pentingnya sinkronisasi program ketenagakerjaan di level lokal dengan prioritas pembangunan nasional, khususnya dalam menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai dan sesuai dengan kebutuhan industri yang sedang berkembang.

Dimensi regional memberikan konteks yang sangat spesifik dan strategis bagi daerah, terutama dengan adanya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kalimantan Utara dan keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menciptakan ekosistem ekonomi baru dengan kebutuhan tenaga kerja yang masif dan beragam. Momentum ini merupakan peluang emas untuk menyerap pengangguran lokal melalui penyiapan SDM terampil yang dibutuhkan oleh proyek-proyek pembangunan IKN dan industri pendukungnya. Bonus demografi regional yang dimiliki Kota Tarakan dapat dioptimalkan menjadi dividen demografi apabila didukung dengan program pelatihan dan sertifikasi kompetensi yang tepat sasaran. Pengembangan klaster industri berbasis sumber daya alam Kota Tarakan, seperti perikanan, pertambangan, dan energi, memerlukan tenaga kerja dengan keterampilan khusus yang dapat dikembangkan melalui kolaborasi antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan vokasi.

Dari perspektif isu strategis, tujuan OPD bidang ketenagakerjaan difokuskan pada dua pilar utama yaitu peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja serta pendayagunaan dan perluasan kesempatan kerja. Kedua isu strategis ini merupakan respons yang tepat terhadap keseluruhan dinamika lingkungan yang ada, karena tidak hanya berupaya mengatasi permasalahan pengangguran secara kuantitatif, tetapi juga memastikan kualitas tenaga kerja yang dihasilkan mampu memenuhi standar industri modern. Pendayagunaan tenaga kerja harus diarahkan pada sektor-sektor produktif yang memiliki nilai tambah tinggi dan berkelanjutan, sementara perluasan kesempatan kerja harus mencakup upaya membuka akses ke pasar kerja yang lebih luas, baik melalui fasilitasi penempatan kerja, pengembangan kewirausahaan, maupun pembukaan sektor-sektor ekonomi baru. Dengan demikian, sinkronisasi antara isu lingkungan dinamis di berbagai level dengan isu strategis PD akan menghasilkan strategi ketenagakerjaan yang komprehensif, adaptif, dan mampu mengoptimalkan potensi daerah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan dua konsep kunci yang membentuk landasan bagi perencanaan dan pengelolaan suatu organisasi, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pemerintahan daerah. Tujuan merupakan gambaran umum yang menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi Walikota Tarakan. Sementara itu, sasaran merupakan target spesifik dan terukur yang dirancang untuk mencapai tujuan tersebut. Sasaran lebih terfokus dan terinci, mengidentifikasi hasil konkret yang diharapkan dicapai dalam periode waktu tertentu. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025-2029.

Sementara sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dengan ditetapkan tujuan dan sasaran maka dapat diketahui secara jelas apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk lima 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah Menurunnya tingkat pengangguran. Adapun sasaran DPTK antara lain meningkatnya kesempatan kerja, meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor IKM, dan meningkatnya tata kelola DPTK. Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
3.31.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja											
- Menurunnya pengangguran	Menurunnya pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,11	4,9	4,69	4,47	4,28	4,09	4,04	
		Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	63,64	64,55	64,74	64,93	64,95	64,97	64,99	
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor IKM	Rasio tenaga kerja sektor IKM (Angka)	15,22	15,29	15,36	15,38	15,72	15,78	15,82	
		Meningkatnya Tata Kelola DPTK	Indeks kepuasan masyarakat (Indeks)	0	70	70,01	70,03	70,05	70,07	70,1	
			Nilai SAKIP (Nilai)	73,67	74,38	75,09	75,8	76,51	77,22	77,93	

Program Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja periode 2024-2030 merepresentasikan sebuah kerangka perencanaan strategis yang komprehensif dengan mengintegrasikan lima indikator kinerja utama yang saling berkaitan secara sistemik. Baseline data tahun 2024 menunjukkan kondisi

ketenagakerjaan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5.11%, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 63.64%, dan rasio tenaga kerja sektor Industri Kecil Menengah (IKM) sebesar 15.22. Dinas telah mencapai nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar 73.67 yang mengindikasikan kinerja kategori "B" atau "Baik", namun masih memiliki ruang signifikan untuk peningkatan menuju kategori "A" atau "Sangat Baik". Hal yang menjadi perhatian kritis adalah Indeks Kepuasan Masyarakat yang tercatat 0 (nol) pada baseline 2024, mengindikasikan belum adanya sistem pengukuran kepuasan publik yang terstruktur, hal ini sebuah gap fundamental dalam implementasi *citizen-centric governance* yang menjadi prinsip dasar Manajemen publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Dinas telah memiliki sistem akuntabilitas internal yang cukup baik (SAKIP), namun dimensi akuntabilitas eksternal kepada masyarakat sebagai *ultimate stakeholder* masih perlu diperkuat secara substansial.

Angka-angka baseline ini perlu dipahami dalam kerangka teori pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia. TPT sebesar 5.11% berada sedikit di bawah rata-rata nasional yang mencapai 5.3% (data 2023), namun masih menunjukkan adanya inefisiensi dalam *matching* antara *supply* dan *demand* tenaga kerja. TPAK sebesar 63.64% mengindikasikan bahwa masih terdapat sekitar 36.36% penduduk usia kerja yang tidak aktif secara ekonomi, yang mencakup *discouraged workers*, *voluntary unemployment*, dan kelompok dengan *barrier* struktural untuk berpartisipasi dalam pasar kerja. Kondisi ini merepresentasikan potensi ekonomi yang belum teroptimalisasi, setiap peningkatan 1% dalam TPAK berpotensi menghasilkan peningkatan PDB regional sebesar 0.5-0.8% melalui efek pengganda konsumsi dan produktivitas. Rasio tenaga kerja IKM sebesar 15.22 menunjukkan bahwa sektor IKM menyerap proporsi yang signifikan dari total angkatan kerja yang sejalan dengan karakteristik struktur ekonomi Indonesia yang masih didominasi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah. Peningkatan bertahap rasio ini mengindikasikan strategi industrialisasi inklusif yang memprioritaskan penyerapan tenaga kerja luas (*labor-intensive*) dibandingkan dengan industrialisasi modal-intensif yang dapat menciptakan *jobless growth*.

3.2. Strategi

Strategi yang dirancang oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menunjukkan pemahaman yang matang tentang kompleksitas permasalahan ketenagakerjaan melalui pendekatan multi-dimensional yang mengintegrasikan *supply-side intervention* dan *demand-side intervention* secara simultan. Dari sisi *supply*, Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi dan Program Pemberdayaan Ekonomi Inklusif dirancang untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penawaran tenaga kerja (*labor supply*), dengan fokus pada peningkatan *employability* melalui *hard skills* (kompetensi teknis) dan *soft skills* (kewirausahaan, *digital literacy*). Implementasi sertifikasi kompetensi dan program magang menunjukkan pemahaman tentang pentingnya *signaling mechanism* dalam pasar kerja, di mana kredensial formal berfungsi sebagai *proxy* untuk kemampuan aktual pekerja.

Dari sisi *demand*, strategi Industrialisasi Berkelanjutan Sektor IKM dirancang untuk memperluas kapasitas penyerapan tenaga kerja melalui pengembangan klaster industri, modernisasi teknologi, dan fasilitasi akses pasar. Pendekatan klaster industri (*industrial cluster*) memungkinkan untuk meningkatkan produktivitas kolektif IKM dalam suatu wilayah geografis. Dengan meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi IKM, diharapkan terjadi *backward linkages* (meningkatkan permintaan terhadap supplier lokal) dan *forward linkages* (memperluas distribusi dan pasar) yang pada akhirnya menciptakan *multiplier effect* dalam penyerapan tenaga kerja. Strategi ini sangat

relevan dengan konteks ekonomi Indonesia yang memiliki struktur *dual economy* yaitu koeksistensi sektor formal-modern dengan sektor informal-tradisional sehingga pendekatan *bottom-up development* melalui penguatan IKM dapat menjadi strategi yang lebih inklusif dibandingkan dengan *trickle-down approach* yang mengandalkan investasi besar dan korporasi.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Membangun infrastruktur layanan kerja yang terintegrasi dan inklusif	Pemantapan dan digitalisasi	Peningkatan kinerja dan promosi	Mempercepat realisasi investasi dalam sektor IKM untuk menciptakan lapangan kerja baru	Tercapainya hasil nyata dalam penurunan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

Berdasarkan pada tabel 3.2 terkait penahapan Renstra dalam membangun startegi OPD dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tahap 1 (2026)

Pembentukan Pusat Informasi dan Penyediaan Lowongan Kerja Terpadu (PIP-OK). Tahap pertama ini merupakan fondasi penting dalam upaya menurunkan pengangguran dengan membangun sistem layanan kerja yang terintegrasi secara lokal. Fokus utamanya adalah pembentukan PIP-OK sebagai pusat informasi dan koneksi antara pencari kerja dan pelaku usaha, yang memungkinkan akses yang lebih dekat dan efisien terhadap peluang kerja. Pendekatan ini dirancang untuk mengatasi hambatan geografis dan kurangnya informasi yang sering menjadi penyebab utama pengangguran di daerah perdesaan atau pinggiran kota. Selain itu, pengembangan sistem digital layanan perizinan kerja akan mempercepat proses administrasi, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan transparansi. Pelatihan dasar keterampilan kerja seperti *soft skills* juga diperkenalkan untuk mempersiapkan tenaga kerja agar lebih siap menghadapi dunia kerja, sehingga memberikan landasan awal bagi peningkatan partisipasi angkatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran terbuka.

Tahap II (2027)

Pemantapan standar layanan dan pengembangan platform digital. Pada tahap kedua, fokus beralih dari pembentukan struktur ke pemantapan kualitas layanan melalui digitalisasi. Platform PIP-OK dikembangkan menjadi sistem yang dinamis, interaktif, dan *real-time*, dengan fitur seperti *update* lowongan kerja langsung, layanan konsultasi online, serta integrasi data dengan lembaga pemerintah lain seperti Dukcapil dan BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan akurasi data pencari kerja dan pelaku usaha, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem layanan. Evaluasi berkala berdasarkan umpan balik masyarakat akan membantu identifikasi kelemahan dan perbaikan prosedur, sehingga layanan menjadi lebih responsif dan efisien. Dengan pendekatan ini, tidak hanya jumlah lowongan kerja yang ditingkatkan, tetapi juga kualitas hubungan antara pencari kerja dan perusahaan yang semakin profesional, yang pada akhirnya mendukung peningkatan rasio tenaga kerja sektor IKM dan partisipasi angkatan kerja secara signifikan.

Tahap III (2028)

Peningkatan kinerja PIP-OK melalui pelatihan, promosi daerah, dan peningkatan jumlah lowongan kerja. Tahap ketiga menandai transformasi dari sistem layanan menjadi alat aktif yang memperkuat keterampilan dan kesempatan kerja. PIP-OK tidak lagi sekadar tempat informasi, tetapi menjadi pusat pelatihan teknis yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar, seperti digital marketing, manajemen keuangan, dan kualitas produk, yang sangat relevan bagi sektor industri kecil dan menengah. Program promosi daerah akan menarik investor dan pelaku usaha dari luar kota, sementara kolaborasi dengan lembaga pendidikan vokasi memastikan pasokan tenaga kerja yang terlatih. Peningkatan jumlah lowongan kerja terdaftar minimal 50% dari tahun sebelumnya menunjukkan komitmen untuk memperluas cakupan lapangan kerja, terutama bagi para pencari kerja yang memiliki keterampilan terbatas. Langkah ini juga mendukung pencapaian target penyerapan tenaga kerja secara masif, serta memperkuat tata kelola DPTK melalui sistem yang lebih terstruktur dan responsif terhadap kebutuhan pasar.

Tahap IV (2029)

Percepatan realisasi investasi dalam sektor IKM melalui fasilitasi pendanaan dan kemitraan strategis. Tahap keempat menyoroti peran kunci Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam mempercepat ekspansi sektor IKM melalui pendekatan ekonomi berbasis modal dan jaringan. Fasilitasi akses modal bagi UMKM, baik melalui pinjaman bersubsidi maupun hibah, membantu mengatasi hambatan utama dalam pengembangan usaha. Pendampingan perijinan dan legalitas usaha memastikan bahwa UMKM dapat beroperasi secara resmi, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan konsumen dan potensi ekspor. Pemasaran produk melalui marketplace lokal dan nasional membuka pasar yang lebih luas, sementara jaringan kemitraan antar pelaku usaha memperkuat daya saing dan inovasi. Dengan pendekatan ini, tidak hanya jumlah lapangan kerja baru yang tercipta, tetapi juga kualitas pekerjaan yang lebih stabil dan berkelanjutan, yang secara langsung berkontribusi pada penurunan tingkat pengangguran terbuka dan peningkatan rasio tenaga kerja sektor IKM.

Tahap V (2030)

Tercapainya penyerapan tenaga kerja melalui peningkatan investasi dan optimalisasi PIP-OK sebagai pusat integrasi kerja. Tahap terakhir merupakan puncak dari semua upaya yang telah dilakukan, di mana tujuan utama menurunkan pengangguran harus terwujud secara nyata. PIP-OK yang telah matang akan berfungsi sebagai pusat integrasi kerja yang mandiri dan berkelanjutan. Peningkatan rasio tenaga kerja sektor IKM menjadi 35% menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja sudah terlibat dalam sektor yang produktif dan berdaya saing. Penurunan tingkat pengangguran terbuka di bawah 3% mencerminkan keberhasilan dalam menciptakan kesempatan kerja yang cukup dan adil, sementara indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas mencapai 85% menunjukkan bahwa sistem telah diterima secara luas oleh warga. Tahap ini menggambarkan keberlanjutan dan hasil nyata dari program yang telah direncanakan secara matang, menjadikannya model yang dapat ditiru oleh daerah lain dalam upaya penurunan pengangguran secara terstruktur dan berkelanjutan.

3.3. Arah Kebijakan

Secara umum, arah kebijakan yang diarahkan oleh RPJMD dan Renstra PD menekankan pada peningkatan kualitas tenaga kerja dan kewirausahaan, yang tercermin dari operasionalisasi NSPK seperti penyusunan dokumen tenaga kerja

mikro oleh perusahaan. Kebijakan ini didorong oleh tujuan untuk memastikan bahwa setiap perusahaan memiliki rencana tenaga kerja yang jelas, baik skala mikro maupun makro, yang akan mendukung efisiensi dan produktivitas kerja. Selain itu, kebijakan pelatihan berbasis kompetensi sesuai kebutuhan industri (TPAK) juga merupakan bentuk konkret dari upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja agar lebih relevan dengan dinamika pasar kerja dan kebutuhan sektor industri. Dalam konteks ini, pencapaian target seperti jumlah peserta pelatihan yang berhasil ditempatkan atau terfasilitasi menjadi indikator utama keberhasilan kebijakan ini.

Tabel operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) bidang ketenagakerjaan dan perindustrian menunjukkan kerangka regulasi yang komprehensif dan berjenjang dalam mendukung pelaksanaan program peningkatan kualitas tenaga kerja dan kewirausahaan di daerah. Regulasi paling fundamental adalah UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 9 hingga 30 yang mengatur secara detail tentang pelatihan kerja sebagai basis hukum penyelenggaraan seluruh aktivitas pengembangan kompetensi tenaga kerja. Undang-undang ini menjadi payung hukum tertinggi yang mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi pelatihan kerja guna meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja. Implementasi dari amanat UU ini kemudian dioperasionalkan melalui Perpres No. 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang menjadi kebijakan strategis nasional untuk mengakselerasi transformasi sistem pelatihan vokasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan industri dan perkembangan teknologi. Perpres ini mendorong sinkronisasi dan kolaborasi antara pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi melalui pembentukan Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV), perbaikan tata kelola Balai Latihan Kerja (BLK), serta penguatan ekosistem *link and match* dengan dunia industri.

Pada tataran teknis operasional, terdapat beberapa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang memberikan panduan detail dalam pelaksanaan program pelatihan kerja. Permenaker No. 34 Tahun 2016 tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja menjadi instrumen penting untuk menjamin kualitas penyelenggaraan pelatihan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, dimana akreditasi menjadi prasyarat bagi lembaga pelatihan kerja (LPK) untuk mendapatkan pengakuan dan dapat menyelenggarakan program pelatihan berbasis kompetensi yang terstandar. Sementara itu, Permenaker No. 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional dan Permenaker No. 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional memberikan kerangka standardisasi yang jelas untuk memastikan bahwa kompetensi yang diajarkan dalam pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri dan dapat diukur secara objektif melalui sistem sertifikasi profesi. Kedua peraturan ini menjadi fondasi bagi pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang menjadi acuan dalam penyusunan kurikulum pelatihan di seluruh BLK dan LPK di Indonesia, sehingga lulusan pelatihan memiliki kompetensi yang terstandar dan diakui secara nasional maupun internasional.

Untuk memastikan kualitas implementasi pelatihan berbasis kompetensi, Kepmenaker No. 307 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi memberikan panduan teknis yang detail mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pelatihan. Keputusan Menteri ini mengatur aspek-aspek krusial seperti persyaratan instruktur, sarana prasarana pelatihan, metode pembelajaran, sistem penilaian, dan mekanisme sertifikasi kompetensi yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pelatihan. Di tingkat daerah, implementasi seluruh regulasi nasional tersebut perlu didukung oleh Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan

Pelatihan Kerja dan Produktivitas yang disesuaikan dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan spesifik daerah. Peraturan daerah ini menjadi jembatan antara kebijakan nasional dengan realitas di lapangan, mengatur mekanisme koordinasi antarlembaga, alokasi anggaran, serta pembagian peran antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas.

Keterkaitan antara kerangka NSPK ini dengan arah kebijakan RPJMD dan Renstra PD menunjukkan adanya *alignment* yang kuat antara regulasi dengan program operasional yang akan dilaksanakan. Arah kebijakan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dan Kewirausahaan dalam RPJMD diterjemahkan ke dalam berbagai program konkret dalam Renstra PD seperti penyediaan data tenaga kerja, pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi sesuai kebutuhan industri, fasilitasi pencari kerja, penempatan tenaga kerja, perlindungan pekerja, hingga pengembangan sentra industri. Keseluruhan program ini harus diselenggarakan dengan mengacu pada NSPK yang telah ditetapkan untuk memastikan legalitas, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan ketenagakerjaan. Dengan demikian, operasionalisasi NSPK bukan sekadar kepatuhan formal terhadap regulasi, melainkan instrumen untuk memastikan bahwa setiap program ketenagakerjaan yang dilaksanakan memiliki standar kualitas yang terukur, dapat dipertanggungjawabkan, dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja daerah dalam menghadapi dinamika ketenagakerjaan di era industri 4.0 dan transformasi ekonomi digital.

Regulasi dari Kementerian Perindustrian pada poin 5-7 dalam tabel operasionalisasi NSPK (tabel 3.3) dibawah ini menunjukkan adanya sinergi yang kuat antara kebijakan ketenagakerjaan dengan kebijakan pembangunan industri di daerah. Permenperin No. 14 Tahun 2021 tentang Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah di Sentra IKM melalui *One Village One Product* (OVOP) Tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi menjadi landasan hukum bagi penyusunan rencana pengembangan sentra industri yang terkoordinasi dan berbasis pada potensi lokal unggulan. Regulasi ini mengatur secara sistematis bagaimana pemerintah daerah dapat mengidentifikasi, mengembangkan, dan memberdayakan sentra-sentra IKM di wilayahnya dengan pendekatan OVOP yang telah terbukti efektif di berbagai negara seperti Jepang. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada peningkatan produktivitas industri, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja lokal yang berkelanjutan, sehingga berkaitan erat dengan upaya penurunan angka pengangguran yang menjadi isu utama dalam bidang ketenagakerjaan.

Pada aspek perizinan dan kemudahan berusaha, Permenperin No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian memberikan kerangka regulasi yang jelas untuk fasilitasi perizinan usaha industri dengan pendekatan berbasis risiko melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Regulasi ini menyederhanakan prosedur perizinan dengan mengklasifikasikan kegiatan usaha industri berdasarkan tingkat risikonya, sehingga industri berisiko rendah dapat memperoleh izin dengan lebih cepat dan mudah, sementara industri berisiko tinggi tetap mendapat pengawasan yang memadai. Hal ini sangat relevan dengan arah kebijakan Renstra PD untuk melaksanakan fasilitas penelitian izin usaha, dimana dinas ketenagakerjaan berperan dalam memberikan informasi dan asistensi kepada calon pengusaha terkait prosedur perizinan yang harus dilalui, termasuk aspek ketenagakerjaan seperti kewajiban pelaporan tenaga kerja, upah minimum, dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Untuk mendukung penyediaan data dan informasi industri yang valid dan akurat, tabel telah dilengkapi dengan dua regulasi penting yaitu PP No. 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri UU No. 13 Tahun 2003 yang mengatur

tentang perencanaan, pengembangan, dan pengendalian kawasan industri secara komprehensif di tingkat nasional hingga daerah, serta Permenperin No. 18 Tahun 2023 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Industri yang memberikan standar kualifikasi tenaga kerja industri berdasarkan KKNI. PP No. 20 Tahun 2024 memberikan arahan strategis tentang pemetaan potensi industri daerah, penetapan kawasan peruntukan industri, dan sistem informasi industri nasional yang terintegrasi, sehingga pemerintah daerah dapat menyusun database industri yang lengkap dan akurat mencakup jenis industri, skala usaha, jumlah tenaga kerja, dan kebutuhan SDM di masa mendatang. Sementara itu, Permenperin No. 18 Tahun 2023 memastikan bahwa kualifikasi tenaga kerja industri dapat distandarisasi dan diakui secara nasional melalui sistem sertifikasi berbasis KKNI, sehingga memudahkan *matching* antara kebutuhan industri dengan ketersediaan tenaga kerja terampil.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1.	UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (pasal 9-30 tentang Pelaktihan kerja)	Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja dan Kewirausahaan	Tersedianya dokumen tenaga kerja mikro dan makro	
2	Perpres No. 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.		1. Terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi sesuai kebutuhan industri 2. terbentuknya fasilitasi pencari kerja	
3	Permenaker No. 34 tahun 2016 tentang Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja		1. Tersedianya data lowongan dan penempatan tenaga kerja 2. Terbentuknya Pekerja Migran Indonesia	
4	Permenaker No. 2 tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional		1. Terfasilitasinya hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja 2. Terfasilitasinya kasus perselisihan hubungan industrial	
5	Permenperin No. 14 tahun 2021 tentang Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah di sentra IKM melalui <i>one Village one product</i> (OVOP)		Tersusunnya rencana pengembangan sentra industri	
6	Permenperin No. 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian		Terlaksananya fasilitasi penelitian izin usaha	
7	PP No. 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri Permenperin No. 18 Tahun 2023 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Industri		Tersedianya data informasi industri yang valid dan akurat	
			Tersedianya data informasi industri yang valid dan akurat	

Keseluruhan regulasi yang terintegrasi antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perindustrian ini mencerminkan pendekatan holistik dalam pembangunan ketenagakerjaan yang tidak dapat dipisahkan dari pengembangan sektor industri. Sinergi antara peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan vokasi dengan pengembangan sentra industri dan

kemudahan perizinan usaha akan menciptakan ekosistem ketenagakerjaan dan industri yang saling memperkuat. Dinas ketenagakerjaan di daerah tidak hanya berperan sebagai regulator dan fasilitator dalam aspek administrasi ketenagakerjaan, tetapi juga sebagai jembatan penghubung antara supply tenaga kerja terampil dengan demand dari sektor industri yang terus berkembang. Dengan operasionalisasi NSPK yang komprehensif ini, diharapkan program-program ketenagakerjaan yang dirumuskan dalam Renstra PD dapat diimplementasikan secara efektif, terukur, dan berkontribusi nyata terhadap penurunan pengangguran serta peningkatan daya saing industri daerah dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang semakin kompetitif.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Tarakan 2025- 2029. Dalam Renstra ini, terdapat 7 (tujuh) program, 17 kegiatan, serta 44 sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Rencana Kerja Tahun 2025-2029.

Berikut adalah perincian program, kegiatan, dan sub kegiatan dimaksud dan dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja.

- Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

- Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota

3. Program Penempatan Tenaga Kerja.

- Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota
- Pelayanan antar Kerja
- Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
- Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
- Perluasan Kesempatan Kerja
- Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
- Job Fair/Bursa Kerja.
- Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
- Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
- Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
- Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
- Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan
- Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Hubungan Industrial.

- Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
- Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,
- Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah
- Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah

5. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri.

- Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
- Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
- Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

6. Program Pengendalian Izin Usaha Industri.

- Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI

- Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).

7. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

- Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI,
- IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
- Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
- Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas.
- Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas.

Tabel 4.1
Program Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					7.536.159.726,1		7.536.159.726,1		7.536.159.726,1		7.566.159.726,1		7.536.159.726,1	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.930.961.126,1		6.930.961.126,1		6.930.961.126,1		6.930.961.126,1		6.930.961.126,1	
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	5.840.396.030,1	100	5.840.396.030,1	100	5.840.396.030,1	100	5.840.396.030,1	100	5.840.396.030,1	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	0	70	70	1.090.565.096	71	1.090.565.096	72	1.090.565.096	73	1.090.565.096	74	1.090.565.096	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					26.200.800		26.200.800		26.200.800		56.200.800		26.200.800	
Meningkatnya perusahaan yang memiliki dokumen tenaga kerja mikro	Persentase perusahaan yang melaporkan dokumen tenaga kerja mikro (%)	100	100	100	26.200.800	100	26.200.800	100	26.200.800	100	56.200.800	100	26.200.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					289.362.020		289.362.020		289.362.020		289.362.020		289.362.020	
Meningkatnya keterampilan/kompetensi tenaga kerja lokal	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	95	95	95	289.362.020	95	289.362.020	95	289.362.020	95	289.362.020	95	289.362.020	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					137.756.980		137.756.980		137.756.980		137.756.980		137.756.980	
Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang terserap (%)	24,5	24,5	24,5	137.756.980	24,5	137.756.980	24,5	137.756.980	24,5	137.756.980	24,5	137.756.980	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					151.878.800		151.878.800		151.878.800		151.878.800		151.878.800	
Terciptanya kondisi hubungan kerja yang harmonis	Persentase perusahaan yang menerapkan hak- hak tenaga kerja (%)	80	80	80	151.878.800	80	151.878.800	80	151.878.800	80	151.878.800	80	151.878.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					266.222.140		266.222.140		266.222.140		266.222.140		266.222.140	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					248.265.440		248.265.440		248.265.440		248.265.440		248.265.440	
Meningkatnya sentra industri	Persentase pertumbuhan sentra industri (%)	17	17,9 1	17,91	248.265.440	17,91	248.265.440	17,91	248.265.440	17,91	248.265.440	17,91	248.265.440	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					5.974.320		5.974.320		5.974.320		5.974.320		5.974.320	
Meningkatnya legalitas perizinan perusahaan industri	Persentase perusahaan industri berizin (%)	90	90	90	5.974.320	90	5.974.320	90	5.974.320	90	5.974.320	90	5.974.320	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					11.982.380		11.982.380		11.982.380		11.982.380		11.982.380	
Meningkatnya kepatuhan pelaku industri dalam menyampaikan data dan laporan industri melalui SIINAS	Persentase perusahaan yang melapor di SINAS (%)	85	85	85	11.982.380	85	11.982.380	85	11.982.380	85	11.982.380	85	11.982.380	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
TOTAL KESELURUHAN					7802381866.10		7802381866.10		7802381866.10		7832381866.10		7802381866.10	

4.2. Rumusan Teknis

Berdasarkan tabel 4.2 yang disajikan dibawah ini, dapat dijelaskan secara singkat dan jelas bahwa NSPK (Naskah Strategi Pelayanan Kesejahteraan) dan Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang relevan untuk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan mengarah pada tiga tujuan utama: (1) menurunkan pengangguran, (2) mendukung kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta (3) meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah.

Tujuan pertama, yaitu menurunkan pengangguran, dicapai melalui sasaran peningkatan kesempatan kerja dan perusahaan yang memiliki dokumen tenaga kerja mikro. Ini didukung oleh program seperti Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro dan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro, yang bertujuan menciptakan dokumen yang memperkuat keberlanjutan dan keamanan kerja. Untuk meningkatkan keterampilan, dilakukan pelatihan berbasis kompetensi sesuai kebutuhan industri, seperti dalam program Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, dengan indikator jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan.

Tujuan kedua adalah menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan melindungi pekerja migran. Sasaran ini diwujudkan melalui terlindunginya hak-hak pekerja dan pengusaha, serta terfasilitasinya kasus perselisihan hubungan industrial. Program-program seperti Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial dan Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan bentuk konkret dari upaya ini. Selain itu, terdapat juga fokus pada penyerapan tenaga kerja melalui fasilitasi pencari kerja dan tersedianya data lowongan kerja yang akurat, seperti dalam program Pelayanan antar Kerja dan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.

Tujuan ketiga adalah meningkatkan tata kelola internal pemerintahan, termasuk kualitas layanan kesekretariatan dan akuntabilitas kinerja. Hal ini ditunjukkan melalui sasaran terciptanya sistem administrasi yang efektif, seperti penyediaan gaji dan tunjangan ASN, serta pemeliharaan barang milik daerah. Program seperti Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah menjadi fondasi penting untuk mewujudkan tata kelola yang baik. Secara keseluruhan, semua program dan kegiatan yang tercantum dalam tabel dirancang untuk mendukung tujuan-tujuan strategis tersebut, sehingga mencerminkan arah kebijakan yang terintegrasi dan berorientasi pada hasil.

Tabel 4.2.

Rumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
3.31.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja							
- Menurunnya pengangguran	Menurunnya pengangguran				Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
		Meningkatnya kesempatan kerja			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)		
			Meningkatnya perusahaan yang memiliki dokumen tenaga kerja mikro		Persentase perusahaan yang melaporkan dokumen tenaga kerja mikro (%)	2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
				Tersedianya dokumen tenaga kerja mikro dan makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	
					Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	
					Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	
					Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	2.07.02.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	
			Meningkatnya keterampilan/kompetensi tenaga kerja lokal		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
				Terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi sesuai kebutuhan industri	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
					Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	2.07.03.2.01.0003 - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya penyerapan tenaga kerja		Persentase tenaga kerja yang terserap (%)	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
				Terlaksananya fasilitasi pencari kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD (Orang)	2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	2.07.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	
					Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD (Orang)	2.07.04.2.01.0004 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	
					Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	2.07.04.2.01.0005 - Perluasan Kesempatan Kerja	
				Tersedianya data lowongan dan penempatan tenaga kerja	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen)	2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
					Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
					Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
					Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen)	2.07.04.2.03.0001 - Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	
					Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	2.07.04.2.03.0002 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	
					Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	2.07.04.2.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja	
				Terlindunginya Pekerja Migran Indonesia	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	2.07.04.2.04.0001 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	
					Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)	2.07.04.2.04.0003 - Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	
			Terciptanya kondisi hubungan kerja yang harmonis		Persentase perusahaan yang menerapkan hak-hak tenaga kerja (%)	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
				Terlindunginya hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
						Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	2.07.05.2.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	
					Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	2.07.05.2.01.0002 - Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	
				Terfasilitasinya kasus perselisihan hubungan industrial	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan (Perkara)	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	2.07.05.2.02.0001 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan (Perkara)	2.07.05.2.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	2.07.05.2.02.0003 - Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	2.07.05.2.02.0004 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	
					Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor IKM			Rasio tenaga kerja sektor IKM (Angka)		
			Meningkatnya sentra industri		Persentase pertumbuhan sentra industri (%)	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
				Tersusunnya rencana pengembangan sentra industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
			Meningkatnya legalitas perizinan perusahaan industri		Persentase perusahaan industri berizin (%)	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
				Terlaksananya fasilitasi penerbitan izin usaha	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	
					-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	3.31.03.2.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	
			Meningkatnya kepatuhan pelaku industri dalam menyampaikan data dan laporan industri melalui SIINAS		Persentase perusahaan yang melapor di SINAS (%)	3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
				Tersedianya data informasi industri yang valid dan akurat	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen)	3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen)	3.31.04.2.01.0002 - Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	3.31.04.2.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	
		Meningkatnya Tata Kelola DPTK			Indeks kepuasan masyarakat (Indeks)		
					Nilai SAKIP (Nilai)		
			Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja		Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.07.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.07.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.07.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.07.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	2.07.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
				Tersedianya layanan administrasi umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.07.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	2.07.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.07.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terkelolanya data Barang Milik Daerah dalam aplikasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.07.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya layanan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.07.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.07.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.07.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.07.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.07.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.07.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.07.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

4.3. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Berdasarkan table 4.3 dibawah ini, menyajikan data baseline tahun 2024 dan target jangka panjang (2025-2030) untuk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, terdapat tiga aspek utama, yaitu Kesejahteraan Masyarakat, Daya Saing Daerah, dan Indikator Kinerja Kunci. Strategi yang dirancang oleh dinas berorientasi pada peningkatan kualitas tenaga kerja, penguatan sektor industri, dan pembangunan sistem informasi serta perlindungan sosial yang lebih terintegrasi.

Pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat, dua indikator utama yang diperhatikan adalah cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan tingkat pengangguran terbuka. Data menunjukkan bahwa cakupan kepesertaan Jamsostek yang pada tahun 2024 masih nol (0%) ditargetkan untuk meningkat secara signifikan menjadi 74,72% pada tahun 2030, dengan tren kenaikan yang stabil setiap tahunnya. Ini mencerminkan komitmen kuat untuk memperluas akses proteksi sosial bagi seluruh pekerja, terutama di sektor informal dan mikro. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka yang pada 2024 berada di level 5,11% direncanakan turun secara bertahap menjadi 4,04% pada 2030. Penurunan ini menunjukkan upaya untuk mengoptimalkan pasar kerja melalui penempatan tenaga kerja yang efektif dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Dua indikator ini saling mendukung, karena peningkatan kepesertaan jaminan sosial akan memberikan rasa aman dan stabilitas bagi pekerja, yang pada gilirannya dapat membantu menurunkan angka pengangguran. Dalam Aspek Daya Saing Daerah, fokus utama terletak pada pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas. Indikator Rasio PDB Industri Pengolahan yang dimulai dari nol pada 2024 ditargetkan naik menjadi 16,313% pada 2030, menunjukkan rencana strategis untuk memperkuat basis ekonomi daerah melalui industrialisasi. Selain itu, pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan juga diarahkan untuk mempertahankan tingkat positif, meskipun ada sedikit penurunan pada tahun 2028 dan 2029, yang kemungkinan disebabkan oleh kondisi eksternal atau kebijakan makro yang tidak langsung terkendali. Pertumbuhan jumlah tenaga kerja di sektor industri juga ditargetkan secara realistis, dari 18.345 ribu orang pada 2024 menjadi 19 juta pada 2030, yang menunjukkan ekspektasi peningkatan produktivitas dan perluasan lapangan kerja. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB juga direncanakan meningkat secara konsisten, mencapai 10,05% pada 2030, yang merupakan indikator penting dari ketergantungan ekonomi daerah terhadap sektor industri.

Terakhir, pada Indikator Kinerja Kunci, terlihat bahwa dinas memiliki tujuan yang sangat spesifik dan terukur dalam menjalankan program-programnya. Misalnya, target persentase kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana tenaga kerja dinaikkan dari 92,30% pada 2024 menjadi 100% pada 2026, menandakan komitmen untuk memastikan implementasi yang akurat dan terkoordinasi. Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan antar kerja diperkirakan naik dari 26,20% menjadi 35,27% pada 2030, yang menunjukkan upaya untuk memperluas jaringan penempatan kerja baik dalam maupun luar negeri. Selain itu, target persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi dan tersedianya informasi industri yang lengkap, akurat, dan terkini menunjukkan pendekatan yang berbasis pada kualifikasi dan transparansi data. Tingkat produktivitas tenaga kerja yang ditingkatkan secara halus dari 51,42% menjadi 51,48% pada 2030 mencerminkan usaha untuk memperbaiki efisiensi kerja secara berkelanjutan. Target persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (seperti PP/PKB, LKS Bipartit, dan kepesertaan BPJS) yang naik dari 4,83% menjadi 10,09% pada 2030 menunjukkan komitmen untuk memperkuat hubungan industrial yang adil dan berkelanjutan.

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				7.536.159.726,10		7.536.159.726,10		7.536.159.726,10		7.566.159.726,10		7.536.159.726,10		
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.930.961.126,10		6.930.961.126,10		6.930.961.126,10		6.930.961.126,10		6.930.961.126,10		
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	0	70	1.090.565.096,00	71	1.090.565.096,00	72	1.090.565.096,00	73	1.090.565.096,00	74	1.090.565.096,00	3.31.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				163.653.646,00		163.653.646,00		163.653.646,00		163.653.646,00		163.653.646,00		
Tersedianya layanan administrasi umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	163.653.646,00	12	163.653.646,00	12	163.653.646,00	12	163.653.646,00	12	163.653.646,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	74	74		74		74		74		74			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	9	9		9		9		9		9			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
2.07.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.113.106,00		20.113.106,00		20.113.106,00		20.113.106,00		20.113.106,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	20.113.106,00	1	20.113.106,00	1	20.113.106,00	1	20.113.106,00	1	20.113.106,00		
2.07.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				49.875.120,00		49.875.120,00		49.875.120,00		49.875.120,00		49.875.120,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	49.875.120,00	1	49.875.120,00	1	49.875.120,00	1	49.875.120,00	1	49.875.120,00		
2.07.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				49.997.030,00		49.997.030,00		49.997.030,00		49.997.030,00		49.997.030,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	74	74	49.997.030,00	74	49.997.030,00	74	49.997.030,00	74	49.997.030,00	74	49.997.030,00		
2.07.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				13.598.390,00		13.598.390,00		13.598.390,00		13.598.390,00		13.598.390,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	9	9	13.598.390,00	9	13.598.390,00	9	13.598.390,00	9	13.598.390,00	9	13.598.390,00		
2.07.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				5.100.000,00		5.100.000,00		5.100.000,00		5.100.000,00		5.100.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	5.100.000,00	12	5.100.000,00	12	5.100.000,00	12	5.100.000,00	12	5.100.000,00		
2.07.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24.970.000,00		24.970.000,00		24.970.000,00		24.970.000,00		24.970.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6	6	24.970.000,00	6	24.970.000,00	6	24.970.000,00	6	24.970.000,00	6	24.970.000,00		
Terkelolanya data Barang Milik Daerah dalam aplikasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	29	29	85.189.370,00	29	85.189.370,00	29	85.189.370,00	29	85.189.370,00	29	85.189.370,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7	7		7		7		7		7			
2.07.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				32.285.700,00		32.285.700,00		32.285.700,00		32.285.700,00		32.285.700,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	29	29	32.285.700,00	29	32.285.700,00	29	32.285.700,00	29	32.285.700,00	29	32.285.700,00		
2.07.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				52.903.670,00		52.903.670,00		52.903.670,00		52.903.670,00		52.903.670,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7	7	52.903.670,00	7	52.903.670,00	7	52.903.670,00	7	52.903.670,00	7	52.903.670,00		
2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				171.360.000,00		171.360.000,00		171.360.000,00		171.360.000,00		171.360.000,00		
Tersedianya layanan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5	5	171.360.000,00	5	171.360.000,00	5	171.360.000,00	5	171.360.000,00	5	171.360.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.07.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
2.07.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				165.560.000,00		165.560.000,00		165.560.000,00		165.560.000,00		165.560.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5	5	165.560.000,00	5	165.560.000,00	5	165.560.000,00	5	165.560.000,00	5	165.560.000,00		
2.07.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.800.000,00		3.800.000,00		3.800.000,00		3.800.000,00		3.800.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	3	3.800.000,00	3	3.800.000,00	3	3.800.000,00	3	3.800.000,00	3	3.800.000,00		
2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				670.362.080,00		670.362.080,00		670.362.080,00		670.362.080,00		670.362.080,00		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	3	670.362.080,00	3	670.362.080,00	3	670.362.080,00	3	670.362.080,00	3	670.362.080,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	5		5		5		5		5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	62	62		62		62		62		62			
2.07.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				8.073.765,00		8.073.765,00		8.073.765,00		8.073.765,00		8.073.765,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	12	12	8.073.765,00	12	8.073.765,00	12	8.073.765,00	12	8.073.765,00	12	8.073.765,00		
2.07.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				22.468.315,00		22.468.315,00		22.468.315,00		22.468.315,00		22.468.315,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	5	22.468.315,00	5	22.468.315,00	5	22.468.315,00	5	22.468.315,00	5	22.468.315,00		
2.07.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	3	600.000.000,00	3	600.000.000,00	3	600.000.000,00	3	600.000.000,00	3	600.000.000,00		
2.07.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				39.820.000,00		39.820.000,00		39.820.000,00		39.820.000,00		39.820.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	62	62	39.820.000,00	62	39.820.000,00	62	39.820.000,00	62	39.820.000,00	62	39.820.000,00		
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	5.840.396.030,10	100	5.840.396.030,10	100	5.840.396.030,10	100	5.840.396.030,10	100	5.840.396.030,10		
2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		
Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.07.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.850.800,00		1.850.800,00		1.850.800,00		1.850.800,00		1.850.800,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	1	1.850.800,00	1	1.850.800,00	1	1.850.800,00	1	1.850.800,00	1	1.850.800,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)													
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	1.850.000,00	1	1.850.000,00	1	1.850.000,00	1	1.850.000,00	1	1.850.000,00		
2.07.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				3.799.200,00		3.799.200,00		3.799.200,00		3.799.200,00		3.799.200,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1	3.799.200,00	1	3.799.200,00	1	3.799.200,00	1	3.799.200,00	1	3.799.200,00		
2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.832.896.030,10		5.832.896.030,10		5.832.896.030,10		5.832.896.030,10		5.832.896.030,10		
Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	5.832.896.030,10	12	5.832.896.030,10	12	5.832.896.030,10	12	5.832.896.030,10	12	5.832.896.030,10		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	574	580		580		580		580		580			
2.07.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.766.290.030,10		5.766.290.030,10		5.766.290.030,10		5.766.290.030,10		5.766.290.030,10		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	574	580	5.766.290.030,10	580	5.766.290.030,10	580	5.766.290.030,10	580	5.766.290.030,10	580	5.766.290.030,10		
2.07.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				66.606.000,00		66.606.000,00		66.606.000,00		66.606.000,00		66.606.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	66.606.000,00	12	66.606.000,00	12	66.606.000,00	12	66.606.000,00	12	66.606.000,00		
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				26.200.800,00		26.200.800,00		26.200.800,00		56.200.800,00		26.200.800,00		
Meningkatnya perusahaan yang memiliki dokumen tenaga kerja mikro	Persentase perusahaan yang melaporkan dokumen tenaga kerja mikro (%)	100	100	26.200.800,00	100	26.200.800,00	100	26.200.800,00	100	56.200.800,00	100	26.200.800,00	3.31.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)				26.200.800,00		26.200.800,00		26.200.800,00		56.200.800,00		26.200.800,00		
Tersedianya dokumen tenaga kerja mikro dan makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	1	0	26.200.800,00	0	26.200.800,00	0	26.200.800,00	1	56.200.800,00	0	26.200.800,00		
	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	25	25		25		25		25		25			
2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro				0,00		0,00		0,00		30.000.000,00		0,00		
Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	30.000.000,00	0	0,00		
2.07.02.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro				26.200.800,00		26.200.800,00		26.200.800,00		26.200.800,00		26.200.800,00		
Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	25	25	26.200.800,00	25	26.200.800,00	25	26.200.800,00	25	26.200.800,00	25	26.200.800,00		
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				289.362.020,00		289.362.020,00		289.362.020,00		289.362.020,00		289.362.020,00		
Meningkatnya keterampilan/kompetensi tenaga kerja lokal	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	95	95	289.362.020,00	95	289.362.020,00	95	289.362.020,00	95	289.362.020,00	95	289.362.020,00	3.31.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi sesuai kebutuhan industri	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja (Unit)	20	20	289.362.020,00	20	289.362.020,00	20	289.362.020,00	20	289.362.020,00	20	289.362.020,00		
	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	16	48		48		48		48		48			
2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				141.854.520,00		141.854.520,00		141.854.520,00		141.854.520,00		141.854.520,00		

4.4. Kegiatan Prioritas

Berdasarkan data yang disajikan pada table 4.4 dibawah ini, dapat dijelaskan bahwa Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan mengelola sejumlah program prioritas yang dirancang untuk mencapai tujuan strategis dalam tiga aspek utama: penguatan internal pemerintahan, peningkatan kualitas tenaga kerja dan ketenagakerjaan, serta pengembangan industri lokal.

Pertama, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.07.01) bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas layanan kesekretariatan. Program ini mencakup kegiatan perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, administrasi keuangan (seperti penyediaan gaji dan tunjangan ASN), serta pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana, seperti mebel, gedung, dan jasa pendukung (komunikasi, listrik, air). Kegiatan-kegiatan ini menunjukkan fokus pada efisiensi operasional dan peningkatan kapasitas internal organisasi.

Kedua, program-program yang berfokus pada tenaga kerja dan kesejahteraan dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program Perencanaan Tenaga Kerja (2.07.02) bertujuan agar perusahaan memiliki dokumen tenaga kerja mikro dan makro. Program Pelatihan Kerja (2.07.03) berfokus pada peningkatan keterampilan melalui pelatihan berbasis kompetensi dan pengadaan sarana pelatihan. Program Penempatan Tenaga Kerja (2.07.04) bertujuan meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui layanan antar kerja, bursa kerja, dan fasilitasi bagi pekerja disabilitas.

Ketiga, program-program yang mendukung pembangunan industri bertujuan untuk memperkuat basis ekonomi daerah. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (3.31.02) berfokus pada pembentukan sentra industri melalui penyusunan rencana pembangunan dan koordinasi dengan masyarakat. Program Pengendalian Izin Usaha Industri (3.31.03) bertujuan meningkatkan legalitas perusahaan melalui penerbitan izin usaha dan pengawasan terhadap perizinan. Terakhir, Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (3.31.04) berfungsi untuk memastikan kepatuhan industri dalam menyampaikan data dan laporan melalui SIINAS, yang mendukung transparansi dan pengambilan keputusan berbasis data.

Secara keseluruhan, struktur program ini menunjukkan arah kebijakan yang terintegrasi, dengan tujuan utama meningkatkan produktivitas, memperkuat hubungan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kerja serta dukungan terhadap sektor industri.

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
3.31.2.07.0.00.01.0000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja			
1.	2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			2.07.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			2.07.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			2.07.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
			2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			2.07.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
		Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			2.07.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			2.07.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			2.07.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			2.07.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			2.07.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			2.07.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			2.07.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			2.07.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			2.07.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2.	2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Meningkatnya perusahaan yang memiliki dokumen tenaga kerja mikro	2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	
			2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	
			2.07.02.2.01.0003 - Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	
3.	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya keterampilan/ kompetensi tenaga kerja lokal	2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	
			2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	
			2.07.03.2.01.0003 - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	
4.	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			2.07.04.2.01.0005 - Perluasan Kesempatan Kerja	
			2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
			2.07.04.2.03.0002 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	
			2.07.04.2.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja	
5.	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Terciptanya kondisi hubungan kerja yang harmonis	2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.07.05.2.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	
			2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	
			2.07.05.2.02.0001 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.07.05.2.02.0004 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	
			2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	
6.	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya sentra industri	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
			3.31.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
			3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
			3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
7.	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Meningkatnya legalitas perizinan perusahaan industri	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	
			3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	
			3.31.03.2.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	
8.	3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatnya kepatuhan pelaku industri dalam menyampaikan data dan laporan industri melalui SIINAS	3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
			3.31.04.2.01.0002 - Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	
			3.31.04.2.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	

4.5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dibawah ini adalah tabel 4.5 yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan sebagai acuan bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menjalankan program dan kegiatan yang ada.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	3.31.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja									
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,11	4,9	4,69	4,47	4,28	4,09	4,04	
3.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	63,64	64,55	64,74	64,93	64,95	64,97	64,99	
4.	Rasio tenaga kerja sektor IKM	Angka	15,22	15,29	15,36	15,38	15,72	15,78	15,82	
5.	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	0	70	70,01	70,03	70,05	70,07	70,10	
6.	Nilai SAKIP	Nilai	73,67	74,38	75,09	75,8	76,51	77,22	77,93	

Tabel 4.5 diatas merupakan Rencana Strategis (Renstra) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merumuskan target jangka panjang untuk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan, dengan data baseline tahun 2024 sebagai titik awal. Tabel ini menggambarkan arah kebijakan dan tujuan strategis dalam tiga aspek utama: kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, dan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

1. Persentase Pengangguran terbuka
Target ini menunjukkan komitmen untuk menurunkan angka pengangguran dari 5,11% pada 2024 menjadi 4,04% pada 2030. Penurunan ini mencerminkan upaya untuk meningkatkan kesempatan kerja dan memperkuat pasar tenaga kerja melalui program penempatan, pelatihan, dan fasilitasi pencari kerja. Ini adalah indikator langsung dari kesejahteraan masyarakat.
2. Persentase partisipasi angkatan kerja
Indikator ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah penduduk yang aktif bekerja atau mencari pekerjaan dari 63,64% pada 2024 menjadi 64,99% pada 2030. Peningkatan ini menunjukkan bahwa lebih banyak warga masyarakat terlibat dalam aktivitas ekonomi, yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan rumah tangga.
3. Rasio tenaga kerja sektor IKM
Rasio ini mengukur proporsi tenaga kerja yang bekerja di sektor Industri Kecil dan Menengah (IKM). Targetnya adalah meningkatkan rasio dari 15,22 pada 2024 menjadi 15,82 pada 2030. Peningkatan ini menunjukkan upaya untuk memperkuat basis ekonomi lokal yang berbasis industri kecil dan menengah, yang merupakan tulang punggung lapangan kerja di banyak wilayah.
4. Indeks kepuasan Masyarakat
Indikator ini mengukur persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh dinas. Dengan baseline nol pada 2024, targetnya adalah mencapai indeks 70,10 pada 2030. Peningkatan secara bertahap ini menunjukkan fokus pada peningkatan mutu pelayanan publik, transparansi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.
5. Nilai SAKIP
Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah ukuran kinerja organisasi pemerintah. Target nilai ini naik dari 73,67 pada

2024 menjadi 77,93 pada 2030. Peningkatan nilai ini mencerminkan komitmen untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas internal organisasi, serta memperkuat sistem manajemen kinerja.

Secara keseluruhan, table 4.5 ini menunjukkan bahwa strategi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja berfokus pada pembangunan manusia dan ekonomi yang inklusif. Tujuannya bukan hanya untuk menurunkan pengangguran, tetapi juga untuk membangun sistem yang lebih kuat dan lebih efisien, baik dalam hal pelayanan kepada masyarakat maupun dalam tata kelola internal. Data ini menjadi dasar bagi evaluasi kinerja jangka panjang dan perencanaan kegiatan tahunan untuk mencapai visi pembangunan Kota Tarakan.

4.6. Indikator Kinerja Kunci IKK

Berdasarkan tabel 4.6 dibawah ini, terdapat indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk menilai pencapaian target jangka panjang (2025-2030) oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan. Tabel ini menggambarkan dua aspek utama: kesejahteraan dan kualitas tenaga kerja (bagian 2.07) serta daya saing dan pertumbuhan industri (bagian 3.31), dengan semua indikator ditetapkan sebagai positif, artinya semua target adalah peningkatan dari baseline tahun 2024.

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
2.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	positif	%	4,83	5,76	6,48	7,20	8,29	9,01	10,09	
3.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	positif	%	1,39	1,40	1,50	1,63	1,79	1,96	2,09	
4.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota		%	26,20	26,44	26,66	27,21	29,97	32,68	35,27	
5.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	positif	%	51,42	51,43	51,44	51,45	51,46	51,47	51,48	
6.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	positif	%	92,30	95,00	100	100	100	100	100	
7.	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
8.	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (Juta Orang)		Orang	18.345	18.513	18.513	18.615	18.720	18.880	19.000	
9.	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB		%	10,29	10,30	10,30	9,95	9,65	9,83	10,05	
10.	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas		%	1,94	1,94	1,94	1,88	1,49	1,51	1,42	
11.	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	positif	Persentase	36,92	36,93	36,94	36,95	36,96	37,00	37,01	

Pada aspek tenaga kerja, semua indikator ditargetkan untuk meningkat secara signifikan. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik melalui peningkatan tata kelola kerja di perusahaan (dari 4,83% menjadi 10,09%), peningkatan kualitas tenaga kerja melalui sertifikasi kompetensi (dari 1,39% menjadi 2,09%), dan peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui layanan antar kerja (dari 26,20% menjadi 35,27%). Selain itu, pencapaian target 100% untuk persentase kegiatan yang mengacu pada rencana tenaga kerja menunjukkan komitmen kuat terhadap efisiensi dan keterpaduan program.

Pada aspek perindustrian, targetnya adalah memperkuat basis ekonomi daerah melalui peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas (dari 18,345 juta menjadi 19,000 juta) dan kontribusi sektor ini terhadap PDRB (berkisar antara 9,65% hingga 10,30%). Meskipun pertumbuhan PDRB sektor industri mengalami sedikit penurunan pada tahun-tahun tertentu, hal ini tidak mengurangi fokus pada pembangunan sistem informasi industri yang lengkap, akurat, dan terkini (dari 36,92% menjadi 37,01%), yang merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan dan daya saing ekonomi daerah.

BAB V PENUTUP

Program Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja periode 2024-2030 merepresentasikan *best practice* dalam perencanaan strategis sektor publik. Pendekatan holistik yang mencakup *supply-side intervention* (pelatihan dan pemberdayaan), *demand-side intervention* (pengembangan IKM), dan *institutional strengthening* (reformasi birokrasi dan SAKIP) menciptakan ekosistem yang kondusif untuk solusi jangka panjang permasalahan ketenagakerjaan. Keberhasilan implementasi akan sangat bergantung pada komitmen politik yang konsisten, koordinasi multi-stakeholder yang efektif, kapasitas organisasi yang memadai, dan adaptabilitas terhadap perubahan lingkungan eksternal. Dengan asumsi kondisi ekonomi makro yang stabil dan implementasi yang konsisten.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang akan menjadi pedoman dan arah strategik terhadap semua kegiatan baik yang dilakukan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan juga para pemangku kepentingan. Untuk dapat merealisasikan program/kegiatan/sub kegiatan yang diterapkan dalam Renstra ini tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai sehingga memerlukan komitmen, semangat, tekad, dan kedisiplinan dalam memprioritaskan program/kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Disamping itu, Renstra ini merupakan tolak ukur bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan untuk melakukan evaluasi terhadap Kinerja Pelayanan setiap tahunnya dalam penyelenggaraan pemerintah bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja.

21. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan Tahun 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 tahun yaitu 2025-2029. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program tujuan, sasaran, kebijakan, Program Kepala Daerah terpilih yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, Program Perangkat Daerah, Program Lintas Perangkat Daerah, Program Kewilayahan, rencana kerja dalam rangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam Menyusun Rencana Strategis disamping mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa:

- 1) Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD
- 2) Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah
- 3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam perubahan rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD. Pemerintah Kota Tarakan saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

Renstra Perangkat Daerah pada penyusunannya tidak dapat terlepas dari RPJMD, Renstra KIL, Renstra Provinsi Kalimantan Utara dan Renja Perangkat Daerah. Renstra 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikator program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Litbang Kota Tarakan Selain itu dalam penyusunan Renstra PD harus memperhatikan Renstra KIL dan Renstra Provinsi Kalimantan Utara untuk menyelaraskan program pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan Nasional. Pelaksanaan Renstra setiap tahunnya akan di jabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan PD yang memuat program dan kegiatan tahunan yang ada di Renstra PD. Sehingga Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan perangkat daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagaimana menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar (SPM) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 256 ayat (7) yang menjelaskan tugas, pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah :

- 1). Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah/ Walikota ;

- 2). Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 3). Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Program yang dilaksanakan adalah melaksanakan patroli lingkungan wilayah kota dan kecamatan yang meliputi gangguan yang terjadi di wilayah kota maupun kejadian-kejadian di wilayah kecamatan yang dilaporkan oleh anggota Satpol PP maupun pengaduan masyarakat yang ada di kecamatan dan kelurahan, dalam pelaksanaannya untuk menghimbau atau cegah dini dalam mengurangi gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat

Memberikan edukasi dan melaksanakan patroli rutin serta menjaga aset milik Pemerintah Kota Tarakan guna mencegah adanya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Prinsip otonomi daerah saat ini adalah prinsip pembangunan seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang telah ditetapkan. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian peranan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sangat penting sebagai aparat Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah karena daerah dituntut untuk meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029;
 19. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
 21. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 merupakan dokumen resmi perencanaan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Yang menggambarkan visi, misi, strategis, kebijakan, program dan kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dibidang pelayanan kepada masyarakat yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dokumen Renstra tahun 2025-2029 ditetapkan dengan maksud :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah serta indikator Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
2. Untuk menentukan sasaran, arah, kebijakan dan program serta kegiatan prioritas dalam jangka menengah
3. Untuk dasar penilaian kinerja yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan RENSTRA tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan dan sebagai

- pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah periode 2025-2029;
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
 3. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2025-2029.
 4. Menetapkan indikator kinerja sasaran dan tujuan daerah, serta indikator kinerja Perangkat Daerah sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kota Tarakan periode 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan Tahun 2025-2029 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum Penyusunan
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
 - b. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - d. Kelompok Sasaran Layanan
2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - a. Permasalahan pelayanan Perangkat daerah; dan
 - b. Isu Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029
2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

BAB II

Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang penegakan perundang-undangan daerah ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, sub urusan kebakaran, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. yang melaksanakan sebagai berikut:

1. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas:
 - a. Menegakkan Perda dan Perkada;
 - b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
 - c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
2. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja:
 - a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
 - c. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja:
 - a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
 - b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada; dan
 - d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
4. Sedangkan tugas bidang pemadam kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota yaitu:
 - a. melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah;
 - b. menyelenggarakan penyiapan, pengadaan, standerdisasi, dan, pemeliharaan sarana dan prasarana pemadamkebakaran dan

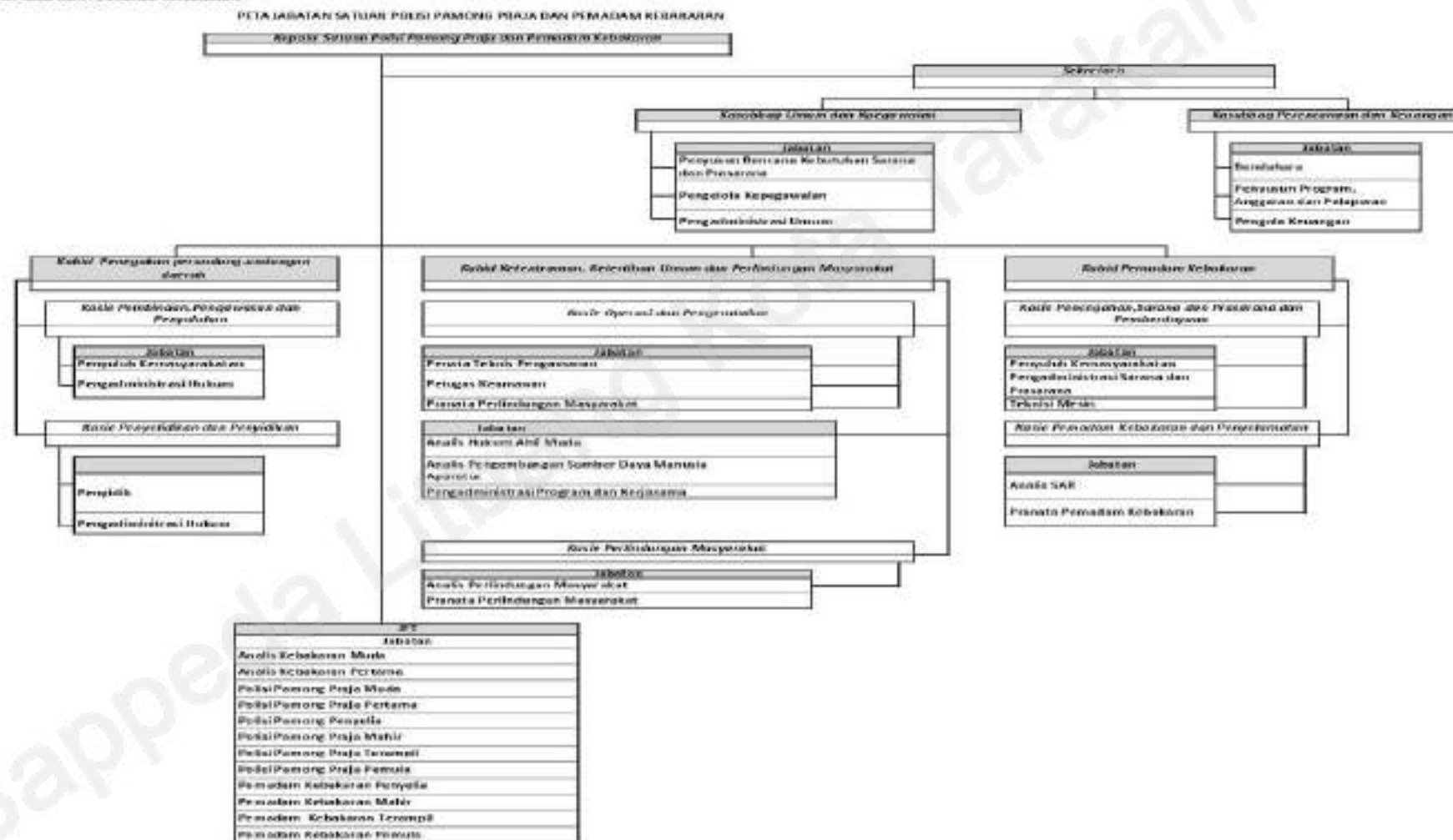
penyelamatan:

- c. menyelenggarakan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran;
- d. menyelenggarakan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;
- e. melakukan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- f. melakukan investigasi kejadian kebakaran;
- g. menyelenggarakan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan jabatan fungsional analis kebakaran;
- h. menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana;
- i. melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
- j. melakukan sosialisasi pencegahan dan pemanggilan kebakaran;
- k. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- l. melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran;
- m. Menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi, dan
- n. melakukan penyajian data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;

Selain itu dokumen Renstra menjadi pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan.

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, terdiri atas:

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- (2) Sekretariat;
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (3) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
 - 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;.
- (4) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 - 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - 2. Sub Koordinator Sumber Daya Aparatur, dan
 - 3. Seksi Perlindungan Masyarakat;
- (5) Bidang Pemadam Kebakaran;
 - 1. Seksi Pencegahan, Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 2. Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- (6) Jabatan Fungsional.



Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai:

1. Uraian Tugas Kepala Satuan sebagai berikut:

Mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub bidang urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.;

- (1) perumusan kebijakan di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- (2) pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bidang pemadam kebakaran;
- (3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan bidang pemadam kebakaran;
- (4) pelaksanaan administrasi satuan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- (5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Uraian tugas Sekretariat sebagai berikut:

- (1) koordinasi kegiatan Satuan;
- (2) koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran Satuan;
- (3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Satuan;
- (4) pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Satuan;
- (5) koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada Satuan;
- (6) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah di Satuan;
- (7) pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Satuan;
- (8) penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Satuan; dan
- (9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan

3. Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut:

- (1) koordinasi kegiatan Satuan;
- (2) koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Satuan;
- (3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
- (4) penyiapan bahan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Satuan; dan
- (5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

4. Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:

- (1) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Satuan;

- (2) pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Satuan;
 - (3) koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada Satuan;
 - (4) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah di Satuan;
 - (5) pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Satuan; dan
 - (6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.
5. Uraian tugas Bidang Penegakan Perundang - Undangan Daerah sebagai berikut:
- (1) perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan penegakan perundang-undangan daerah;
 - (2) pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan penegakan perundang-undangan daerah;
 - (3) penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan penegakan perundang-undangan daerah;
 - (4) pengoordinasian pelaksanaan tugas dibidang pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan penegakan perundang-undangan daerah;
 - (5) pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan PPNS dalam pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah, peraturan Wali Kota dan keputusan Wali Kota;
 - (6) pelaksanaan Pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan penegakan perundang-undangan daerah;
 - (7) melakukan koordinasi yustisial pelanggaran peraturan daerah, peraturan Wali Kota serta dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan instansi terkait;
 - (8) melakukan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkung berupa yustisial pelanggaran peraturan daerah, peraturan Wali Kota dan keputusan Wali Kota;
 - (9) mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - (10) fasilitasi penyelesaian masalah pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Wali Kota dan produk hukum lainnya;
 - (11) penyusunan data bidang pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan penegakan perundang-undangan daerah;
 - (12) melaksanakan tindakan yustisi penertiban dan penegakan peraturan daerah dan perundang-undangan yang lainnya;
 - (13) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan penegakan perundang-undangan daerah; dan
 - (14) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.
6. Uraian tugas Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan sebagai berikut:
- (1) penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penegakan perundang-undangan daerah;
 - (2) penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan perundang-undangan daerah;

- (3) penyiapan dan pelaksanaan program dan kegiatan, penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota;
 - (4) pelaksanaan pemeliharaan, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, peraturan daerah dan peraturan Wali Kota;
 - (5) penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan serta penindakan;
 - (6) pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan serta penindakan;
 - (7) pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, peraturan Daerah, peraturan Wali Kota dan keputusan Wali Kota;
 - (8) mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum Daerah;
 - (9) fasilitasi penyelesaian masalah pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Wali Kota dan produk hukum lainnya;
 - (10) melaksanakan pembinaan agar masyarakat dan pemangku kepentingan menaati peraturan Daerah dan peraturan Wali Kota;
 - (11) penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan Perundang-undangan Daerah; dan
 - (12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.
7. Uraian tugas Seksi Penyelidikan dan Penyidikan sebagai berikut:
- (1) penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyelidikan dan penyidikan;
 - (2) penyiapan dan pelaksanaan program dan kegiatan, penegakan peraturan Daerah dan peraturan Wali Kota;
 - (3) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan, penyidikan, penyelidikan dan penindakan;
 - (4) pelaksanaan pemeliharaan, pembinaan, pengawasan, penyidikan dan penyelidikan, pengendalian, peraturan daerah dan peraturan Wali Kota;
 - (5) pengoordinasian pelaksanaan tugas dibidang pembinaan, pengawasan, penyidikan, penyelidikan dan penindakan;
 - (6) pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan ppns dalam pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan peraturan daerah, peraturan Wali Kota dan keputusan Wali Kota;
 - (7) pelaksanaan pembinaan, dan pengawasan terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, peraturan Daerah, peraturan Wali Kota dan keputusan Wali Kota;
 - (8) melakukan koordinasi yustisial pelanggaran peraturan Daerah, peraturan Wali Kota serta dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan instansi terkait;
 - (9) melakukan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan berupa yustisial pelanggaran peraturan Daerah peraturan Wali Kota dan keputusan Wali Kota;
 - (10) mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistемasikan, mengolah data dan informasi, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas bidang penegakan perundang-undangan daerah;

- (11) mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum Daerah;
 - (12) fasilitasi penyelesaian masalah pelanggaran peraturan Daerah dan peraturan Wali Kota dan produk hukum lainnya;
 - (13) penyusunan data bidang penertiban dan penyidikan;
 - (14) melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Wali Kota ke tempat kejadian dan menyusun laporannya;
 - (15) pelaksanaan pembinaan diklat dan peningkatan kualitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) secara berkala;
 - (16) melakukan penyidikan terhadap pelanggar peraturan daerah berkoordinasi dengan koordinator pengawas (KORWAS) Kepolisian Republik Indonesia dan mengajukan ke pengadilan serta melaporkan hasil sidang pengadilan;
 - (17) melakukan eksekusi sebagai tindak lanjut dari perintah Kepala Satuan;
 - (18) penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan penyelidikan; dan
 - (19) pelaksanaan penghentian kegiatan dan /atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran peraturan Daerah, peraturan Wali Kota dan keputusan Wali Kota;
 - (20) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah.
8. Uraian tugas Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut:
- (1) perumusan kebijakan di bidang operasi, pengendalian, peningkatan sumber daya aparatur, kerja sama dan perlindungan masyarakat;
 - (2) pelaksanaan kebijakan di bidang operasi, pengendalian, peningkatan sumber daya aparatur, kerja sama dan perlindungan masyarakat;
 - (3) memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang operasi, pengendalian, peningkatan sumber daya aparatur, kerja sama dan perlindungan masyarakat;
 - (4) mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
 - (5) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang operasi, pengendalian, peningkatan sumber daya aparatur, kerja sama dan perlindungan masyarakat;
 - (6) membantu pengamanan dan pengawalan tamu VIP dan VVP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 - (7) melaksanakan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (8) membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan atau kegiatan yang berskala massal;
 - (9) menginventarisasi dan mengidentifikasi potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Wali Kota;
 - (10) melakukan pencegahan dini menjalarnya penyakit masyarakat gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelanggaran peraturan daerah;
 - (11) pelaksanaan operasi penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah serta peraturan pelaksanaannya;

- (12) penanganan laporan atau pengaduan menyangkut pelanggaran peraturan Daerah dan peraturan Wali Kota;
 - (13) pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain dibidang operasi, pengendalian, peningkatan sumber daya aparatur, kerja sama dan perlindungan masyarakat;
 - (14) menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang operasi, pengendalian, peningkatan sumber daya aparatur, kerja sama dan perlindungan masyarakat;
 - (15) pelaksanaan operasional penutupan dan pembongkaran terhadap kegiatan yang melanggar perda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (16) melaksanakan laporan realisasi anggaran operasional bidang operasi, pengendalian, peningkatan sumber daya aparatur, kerja sama dan perlindungan masyarakat;
 - (17) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang operasi, pengendalian, peningkatan sumber daya aparatur, kerja sama dan perlindungan masyarakat; dan
 - (18) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Uraian tugas Seksi Operasi dan Pengendalian sebagai berikut:
- (1) penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang operasi dan pengendalian;
 - (2) penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang operasi dan pengendalian;
 - (3) menyusun rencana program kerja, kegiatan laporan kerja dan pertanggung jawaban pelaksana tugas;
 - (4) memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas operasi dan pengendalian;
 - (5) menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan penjagaan, pengamanan, pengawalan, dan patroli;
 - (6) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang operasi dan pengendalian;
 - (7) penanganan laporan atau pengaduan menyangkut pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
 - (8) membantu pengamanan dan pengawalan tamu VIP dan VVP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 - (9) melaksanakan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (10) membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan atau kegiatan yang berskala massal;
 - (11) menginventarisasi dan mengidentifikasi potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Wali Kota;
 - (12) melakukan pencegahan dini menjalarnya penyakit masyarakat gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta pelanggaran peraturan daerah;
 - (13) pelaksanaan operasi penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah serta peraturan pelaksanaannya;
 - (14) pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain dibidang penegakan peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban umum;
 - (15) menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi operasional operasi dan pengendalian;

- (16) melaksanakan patroli wilayah secara rutin maupun sewaktu waktu apabila dibutuhkan;
 - (17) pelaksanaan operasional penutupan dan pembongkaran terhadap kegiatan yang melanggar perda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (18) menyusun laporan realisasi anggaran operasi dan pengendalian;
 - (19) penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang operasi dan pengendalian; dan
 - (20) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.
10. Uraian tugas Seksi Pertindungan Masyarakat sebagai berikut :
- (1) penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang satuan perlindungan masyarakat;
 - (2) penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan masyarakat;
 - (3) menyusun rencana kerja program dan rencana kerja anggaran seksi satuan perlindungan masyarakat;
 - (4) mengoordinasikan pelaksanaan tugas seksi perlindungan masyarakat;
 - (5) menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan satuan perlindungan masyarakat;
 - (6) menyusun rencana dan melaksanakan optimalisasi dan pengerahan/ mobilisasi anggota perlindungan masyarakat;
 - (7) menyiapkan bahan pembinaan kelembagaan, sumber daya manusia dan pelaksanaan Linmas inti kecamatan dan Linmas kelurahan;
 - (8) membina dan membekali pengetahuan serta ketrampilan terhadap Linmas kelurahan dan kecamatan untuk kegiatan pelaksanaan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil resiko akibat bencana serta memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - (9) melaksanakan simulasi potensi masyarakat dan pengamanan swakarsa;
 - (10) menginventarisir permasalahan di bidang Linmas serta menyiapkan bahan pemecahannya;
 - (11) membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahannya termasuk memberikan penilaian terhadap pekerjaannya/sasaran kinerja pegawai (SKP);
 - (12) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja di seksi perlindungan masyarakat;
 - (13) peningkatan keamanan lingkungan tingkat kelurahan dan kecamatan;
 - (14) pelaksanaan kesiapsiagaan dan pengarahan satuan Linmas dalam penanggulangan bencana, pemantauan, mitigasi, rehabilitasi dan rekonstruksi korban serta relokasi akibat bencana;
 - (15) pelaksanaan pengumpulan dan analisa data daerah rawan bencana serta pemeliharaan Trantibmas;
 - (16) pelaksanaan pembantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Wali Kota;
 - (17) melaksanakan penyusunan laporan realisasi anggaran Seksi Perlindungan Masyarakat;

- (18) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. Uraian tugas Bidang Pemadam Kebakaran sebagai berikut:

- (1) perumusan kebijakan di bidang pencegahan, sarana, prasarana, pemberdayaan masyarakat dalam pemadaman kebakaran;
- (2) pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, sarana, prasarana, pemberdayaan masyarakat dalam pemadaman kebakaran;
- (3) memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pencegahan, sarana, prasarana, pemberdayaan masyarakat dalam pemadaman kebakaran;
- (4) mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- (5) menyusun dan melaksanakan kegiatan pengembangan personil dan masyarakat berupa pelatihan dasar dan pelatihan teknis dalam pemadaman kebakaran;
- (6) pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pencegahan, sarana, prasarana, pemberdayaan masyarakat dalam pemadaman kebakaran;
- (7) penyusunan dan perumusan rencana pengembangan dan peningkatan kualifikasi aparatur pemadam kebakaran;
- (8) penyelenggaraan pengadaan, pengaturan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- (9) pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan, sarana, prasarana, pemberdayaan masyarakat dalam pemadaman kebakaran pelaksanaan program pengawasan internal bidang pemadam kebakaran;
- (10) pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang / unit dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- (11) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;
- (12) menyusun laporan realisasi anggaran operasional bidang pencegahan, sarana, prasarana dan pemberdayaan masyarakat serta pemadam dan investigasi kebakaran;
- (13) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai peraturan perundang-undangan;
- (14) membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan atau kegiatan yang berskala massal;
- (15) menginventarisasi dan mengidentifikasi potensi rawan terjadinya kebakaran;
- (16) pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pencegahan, pemberdayaan masyarakat dalam pemadaman kebakaran;
- (17) menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pencegahan, sarana, prasarana, pemberdayaan masyarakat dalam pemadaman kebakaran;
- (18) melaksanakan laporan realisasi anggaran operasional bidang operasi, pengendalian, peningkatan sumber daya aparatur, kerja sama dan perlindungan masyarakat;
- (19) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan, sarana, prasarana, pemberdayaan masyarakat dalam pemadaman kebakaran; dan
- (20) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai peraturan perundang-undangan.

12. Uraian tugas Seksi Pencegahan, Sarana, Prasarana dan Pemberdayaan sebagai berikut:
 - (1) penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pencegahan, sarana, prasarana dan pemberdayaan masyarakat;
 - (2) penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, sarana, prasarana dan pemberdayaan masyarakat;
 - (3) menyusun rencana program kerja, kegiatan laporan kerja dan pertanggung jawaban pelaksana tugas;
 - (4) memberi saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
 - (5) memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pencegahan, sarana, prasarana dan pemberdayaan masyarakat;
 - (6) mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
 - (7) melaksanakan kegiatan sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pencegahan kebakaran;
 - (8) melaksanakan pemeriksaan alat proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan;
 - (9) melaksanakan pengembangan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
 - (10) melaksanakan sosialisasi, pembinaan dan pelatihan kepada kelompok balakar, pengelola bangunan gedung dan kelompok masyarakat lainnya;
 - (11) membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat selesai dengan baik;
 - (12) melakukan monitoring, pembinaan, evaluasi dan penilaian kepada bawahan dalam rangka peningkatan kinerja sesuai peraturan yang berlaku;
 - (13) menginventarisasi dan mengidentifikasi potensi gangguan kebakaran;
 - (14) menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi pencegahan, sarana, prasarana dan pemberdayaan masyarakat;
 - (15) menyusun laporan realisasi anggaran operasional pencegahan, sarana, prasarana dan pemberdayaan masyarakat;
 - (16) penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan, sarana, prasarana dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - (17) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemadam Kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan.
13. Uraian tugas Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai berikut:
 - (1) penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pemadam kebakaran;
 - (2) menyiapkan bahan untuk merumuskan kebijakan, pedoman teknis lingkup pemadam dan investigasi kebakaran;
 - (3) melaksanakan pengembangan dan peningkatan kualifikasi aparatur pemadam kebakaran;
 - (4) mengatur jadwal kegiatan piket jaga regu pemadam kebakaran;
 - (5) melaksanakan pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa / harta benda saat terjadi kebakaran dan bencana lainnya;
 - (6) melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan pihak berwenang terkait penyelidikan penyebab terjadinya kebakaran;
 - (7) membagi tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat selesai dengan baik;
 - (8) melakukan monitoring, pembinaan, evaluasi dan penilaian kepada

bawahan dalam rangka peningkatan kinerja sesuai peraturan yang berlaku;

- (9) menyusun rencana program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- (10) memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas seksi pemadam kebakaran;
- (11) mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- (12) pelaksanaan inventarisasi permasalahan, pelaksanaan kajian dan perumusan pemecahan permasalahan terkait pemadam kebakaran;
- (13) melakukan monitoring dan evaluasi kinerja seksi pemadam kebakaran;
- (14) membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahannya termasuk memberikan penilaian terhadap Sasaran Kinerja Pegawai; dan pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bidang Kepala Pemadam Kebakaran sesuai peraturan perundang-undangan.

B. Sumber Daya Perangkat Daerah

1) Sumber Daya Manusia

Dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, kompeten, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Keberhasilan pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan dalam mengemban urusan wajib pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum akan sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing- masing.

Sumber daya Manusia yang tersedia di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan periode Juli 2025 sejumlah 245 orang, terdiri dari 109 orang Pegawai Negeri Sipil, 125 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) dan 9 orang Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kerja (PTT-PK) dengan pengklasifikaian kepegawaian sebagai berikut :

1. Jabatan

Dari jumlah Pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan yang keseluruhan berjumlah 245 orang, terdiri dari:

- 1. Struktural : 14 orang
- 2. Pelaksana : 66 orang
- 3. Fungsional : 29 orang
- 4. PPPK : 125 orang
- 5. PTT-PK : 11 orang

2. Pangkat dan Golongan

Jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan sebagai berikut:

Pangkat/Gol Ruang	Struktural	Pelaksana	Fungsional	PPPK	PTT-PK
Pembina/IV	6	-	-	-	-
Penata/III	8	42	27	20	-
Pengatur/II	-	24	2	105	-
Non Pangkat/Gol	-	-	-	-	11
Jumlah	14	66	29	125	11
Jumlah Keseluruhan	245				

3. Gender/Jenis Kelamin

Jumlah pegawai berdasarkan gender/jenis kelamin sebagai berikut:

Gender	Pegawai	Jumlah
Laki-Laki	PNS	104
	PPPK	116
	PTT-PK	10
Jumlah		230
Perempuan	PNS	5
	PPPK	9
	PTT-PK	1
Jumlah		15
Jumlah Seluruhnya		245

4. Tingkat Pendidikan

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut:

Pendidikan	PNS	PPPK	PTT-PK
S-3	-	-	-
S-2	6	-	-
S-1/D-4	77	20	3
D3	-	1	-
SMA/SMK	26	104	7
SMP	1	-	-
Jumlah			245

Memperhatikan data tersebut di atas, dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012, dalam rangka pemenuhan mutu layanan minimal SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, berkaitan kuantitas, bahwa jumlah ideal untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan adalah 300 orang, sehingga terdapat kekurangan 55 orang,

2) Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang menunjang terhadap upaya pencapaian sasaran. Sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemdam Kebakaran Kota Tarakan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Data Rekapitulasi Barang Milik Daerah

No	Objek	Keterangan	Jumlah	Nilai/Harga
1	1.3.1.01	Tanah	15	1.843.404.000,00
2	1.3.2.01	Alat Besar	12	812.564.925,00
3	1.3.2.02	Alat angkutan	49	10.425.430.289,82
4	1.3.2.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	14	61.834.450,00
5	1.3.2.04	Alat Pertanian	13	27.239.000,00
6	1.3.2.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	335	6.151.872.845,30
7	1.3.2.06	Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	198	833.508.245,00
8	1.3.2.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	10	79.853.000,00
9	1.3.2.08	Alat Laboraturium	274	1.413.237.636,00
10	1.3.2.09	Alat Persenjataan	32	341.845.000,00
11	1.3.2.10	Komputer	71	448.717.109,00

No	Objek	Keterangan	Jumlah	Nilai/Harga
12	1.3.2.15	Alat Keselamatan Kerja	6	66.450.500,00
13	1.3.3.01	Gedung dan Bangunan	38	7.846.604.860,45
Jumlah			1.067	30.352.561.860,57

Dalam rangka pemenuhan mutu minimal layanan dasar sarana dan prasarana Satpol PP pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019, dapat disajikan data kondisi sarana dan prasarana sebagai berikut :

No	Nama Barang	Alamat	Jumlah	Kondisi Sarana Dan Prasarana	
				Layak	Tidak Layak
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			38	√	-
1	BANGUNAN GEDUNG KANTOR		5	√	-
-	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Halmahera no. 117 Ladang, Kel. Pamusian, Tarakan	1	√	-
-	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Juata Laut Tarakan Utara KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	1	√	-
-	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Karang Balik Tarakan Barat KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	1	√	-
-	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kampung I Skip Tarakan Tengah KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	1	√	-
-	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Pepabri RT.6 No. 59 Kampung Satu Skip	1	√	-
2	BANGUNAN GEDUNG UNTUK BENGKEL/HANGGAR		1		
-	Bangunan Bengkel/ Hanggar Permanen	Jl. Pepabri No 49 Kampung Satu/Skip	1	√	-
3	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA		25		
-	Gedung Pos Jaga Permanen	Kel. Lingkas UJung RT. 01 Belakang Kantor Lurah	1	√	-
-	Gedung Pos Jaga Permanen	Selumit Pantai RT. 22	1	√	-
-	Gedung Pos Jaga Permanen	Kr. Anyar Pantai RT. 30	1	√	-
-	Gedung Pos Jaga Permanen	Kel. Lingkas Ujung RT. 06 Belakang Kantor Bea Cukai	1	√	-
-	Gedung Pos Jaga Permanen	Selumit Pantai RT 26	1	√	-
-	Gedung Pos Jaga Permanen	Karang Anyar Pantau RT 21 Jembatan Bongkok	1	√	-
-	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	Jl. Kusuma Bangsa RT 14, Kelurahan Gunung Lingka Belakang BNN Kotas	1	√	-
-	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	Pos PMK Mini RT 11 Jembatan Besi, Kec. Tarakan Tengah	1	√	-
-	Gedung Pos Jaga Darurat	RT 19 Tanjung Pasir, Kel. Mamburungan Timur	1	√	-
-	Lain-lain Gedung Pos Jaga	Belang Hotel Ramayana RT. 03 Kel. Sebungkok	1	√	-
-	Lain-lain Gedung Pos Jaga	Kampung Pukat RT.01 / 03 Kel. Selumit Pantai	1	√	-
-	Lain-lain Gedung Pos Jaga	Belakang Kantor Bea Cukai RT. 16 Kel. Lingkas Ujung	1	√	-
-	Lain-lain Gedung Pos Jaga	Pasar Barokah RT. 17 Kel. Selumit Pantai	1	√	-
-	Lain-lain Gedung Pos Jaga	Belakang Ktr. BRI RT. 16 Kel. Selumit Pantai	1	√	-
-	Lain-lain Gedung Pos Jaga	Jl. Yos Sudarso Jemb. Besi RT. 07 Kel. Lingkas Ujung	1	√	-
-	Lain-lain Gedung Pos Jaga	Jemabatan Bongkok RT. 25 Kel. Karang Anyar Pantai	1	√	-

No	Nama Barang	Alamat	Jumlah	Kondisi Sarana Dan Prasarana	
				Layak	Tidak Layak
-	Lain-lain Gedung Pos Jaga	Jl. Gajah Mada Depan Gusher RT. 02 Kel. Karang Anyar Pantai	1	√	-
-	Lain-lain Gedung Pos Jaga	Jl. Sebengkok Tiram RT. 10 Kel. Sebengkok	1	√	-
-	Lain-lain Gedung Pos Jaga	Pasar Beringin RT. 05 Kel. Selumit Pantai	1	√	-
-	Lain-lain Gedung Pos Jaga	Belang BRI RT. 28 Kel. Selumit Pantai	1	√	-
-	Lain-lain Gedung Pos Jaga	Sebengkok Jeruju RT. 08/12 Kel. Sebengkok	1	√	-
-	Lain-lain Gedung Pos Jaga	Jl. Kusuma Bangsa Spg. TMP RT. 15 Kel. Gunung Lingkas	1	√	-
-	Lain-lain Gedung Pos Jaga	Belakang PT. Misaya Mitra RT. 01 Kel. Juata Laut	1	√	-
-	Lain-lain Gedung Pos Jaga	Tanjung Batu RT. 22 Kel. Mamburungan	1	√	-
-	Lain-lain Gedung Pos Jaga	Belakang Hotel Taufik RT. 24 Kel. Selumit Pantai	1	√	-
4	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA		7		
-	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Jl. Aji Iskandar RT 18, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara	1	√	-
-	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	RT.15 Lingkas UjungBelakang Toko Sony	1	√	-
-	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	RT.14 Lingkas Ujung	1	√	-
-	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Jl. Adityawarman RT 11, Kel. Karang Balik	1	√	-
-	Lain-lain gedung tempat kerja lainnya	RT 03 Juata Laut	1	√	-
-	Lain-lain gedung tempat kerja lainnya	RT 04 Karang Rejo Samping PT. Gusher Tarakan	1	√	-
-	Lain-lain gedung tempat kerja lainnya	Jl. P. Aji Iskandar, Juata Laut (Sektor Utara)	1	√	-

Alat Kendaraan

No	Nama Barang	Merek/tipe	Jumlah	Satuan	Kondisi Sarana Dan Prasarana	
					Layak	Tidak Layak
1	Dump Truck	Merk: Mitsubishi	1	unit	√	-
2	Dump Truck	Merk: Mitsubishi	1	unit	√	-
3	Sedan	Merk: Daihatsu	1	unit	√	-
4	Station Wagon	Merk: TOYOTA	1	unit	√	-
5	Station Wagon	Merk: Helux	1	unit	√	-
6	Pick Up	Merk: Toyota	1	unit	√	-
7	Pick Up	Merk: Toyota	1	unit	√	-
8	Pick Up	Merk: Toyota	1	unit	√	-
9	Pick Up	Merk: Toyota	1	unit	√	-
10	Pick Up	Merk: TOYOTA	1	unit	√	-
11	Sepeda Motor	Merk: Suzuki	1	unit	√	-
12	Sepeda Motor	Merk: Yamaha	1	unit	√	-
13	Sepeda Motor	Merk: Honda	1	unit	√	-
14	Sepeda Motor	Merk: Suzuki	1	unit	√	-
15	Sepeda Motor	Merk: Honda	1	unit	√	-
16	Sepeda Motor	Merk: Suzuki	1	unit	√	-
17	Sepeda Motor	Merk: Yamaha Jupiter MX	1	unit	√	-
18	Sepeda Motor	Merk: Honda	1	unit	√	-
19	Sepeda Motor	Merk: suzuki	1	unit	√	-
20	Sepeda Motor	Merk: suzuki	1	unit	√	-
21	Sepeda Motor	Merk: Kawasaki	1	unit	√	-
22	Sepeda Motor	Merk: Kawasaki	1	unit	√	-
23	Sepeda Motor	Merk: Honda	1	unit	√	-
24	Sepeda Motor	Merk: Honda Vario	1	unit	√	-
25	Sepeda Motor	Merk: Supra X	1	unit	√	-
26	Sepeda Motor	Merk: Honda	1	unit	√	-
27	Sepeda Motor	Merk: Honda	1	unit	√	-
28	Sepeda Motor	Merk: HONDA	1	unit	√	-
29	Sepeda Motor	Merk: HONDA	1	unit	√	-
30	Sepeda Motor	Merk: NMAX 155	1	unit	√	-
31	Sepeda Motor	Merk: NMAX 155	1	unit	√	-
32	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-Lain	Merk: VIAR Tipe: KAPASITAS 300 LITER AIR	1	unit	√	-
33	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga Lain-Lain	Merk: VIAR Tipe: KAPASITAS 300 LITER AIR	1	unit	√	-
34	Mobil Pemadam Kebakaran	Merk: Isuzu/NKR-66	1	unit	√	-

No	Nama Barang	Merek/tipe	Jumlah	Satuan	Kondisi Sarana Dan Prasarana	
					Layak	Tidak Layak
35	Mobil Pemadam Kebakaran	Merk: Isuzu/NKR-67	1	unit	√	-
36	Mobil Pemadam Kebakaran	Merk: Mercy	1	unit	√	-
37	Mobil Pemadam Kebakaran	Merk: Toyota	1	unit	√	-
38	Mobil Pemadam Kebakaran	Merk: Isuzu	1	unit	√	-
39	Mobil Pemadam Kebakaran	Merk: JEEP TOYOTA HILUX DC Tipe: DOUBLE CABIN	1	unit	√	-
40	Mobil Pemadam Kebakaran	Merk: KAJAMA-HINO Tipe: DOUBLE CABIN 3000 LITER AIR - PUMP & ROLL	1	unit	√	-
41	Mobil Pemadam Kebakaran	Merk: KAJAMA-HINO Tipe: DOUBLE CABIN 3000 LITER AIR - PUMP & ROLL	1	unit	√	-
42	Mobil Tangki Air	Merk: New Dyna	1	unit	√	-
43	Mobil Tangki Air	Merk: New Dyna	1	unit	√	-
44	Mobil Tangki Air	Merk: New Dyna	1	unit	√	-
45	Mobil Tangki Air	Merk: New Dyna	1	unit	√	-
46	Mobil Tangki Air	Merk: Toyota New Dyna	1	unit	√	-
47	Mobil Tangki Air	Merk: Toyota Dina	1	unit	√	-
48	Mobil Tangki Air	Merk: Toyota Dina	1	unit	√	-
49	Mobil Tangki Air	Merk: HINO	1	unit	√	-
50	Lain-lain Kendaraan Bermotor Khusus	Merk: Isuzu	1	unit	√	-

Sarana dan Prasarana lainnya

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi Sarana Dan Prasarana	
			Layak	Tidak Layak
1	Mesin Proses Apung Lain-Lain	4	√	-
2	Air Compresor	1	√	-
3	Pompa Portable	2	√	-
4	Full Body Harness	1	√	-
5	Perlengkapan Rescue	1	√	-
6	Tali Kamantel Static	1	√	-
7	Speed Boat / Motor Tempel	1	√	-
8	Mesin Kompresor	1	√	-
9	Mesin Las Listrik	1	√	-
10	Mesin Gerinda Tangan	1	√	-
11	Perkakas Bengkel Lain-lain	1	√	-
12	Mesin Gergaji	1	√	-
13	Mesin Bor Kayu	1	√	-
14	Gergaji Chain Saw	2	√	-
15	Lain-lain Perkakas Bengkel Listrik	1	√	-
16	Tool Kit Set	1	√	-
17	Kunci Pipa	1	√	-
18	Kunci Moment	1	√	-
19	Kunci Khusus Pembuka Mur/Baut	6	√	-
20	Perkakas Khusus (Special Tool) Lain-Lain	1	√	-
21	Kunci Pas	4	√	-
22	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	4	√	-
23	Lain-lain Alat Penyimpanan	12	√	-
24	Lemari Penyimpan	10	√	-
25	Alat Penjepit dan Melukai	3	√	-
26	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1	√	-
27	Mesin Kontrol Jaga	1	√	-
28	Lain-lain Mesin Hitung/Mesin Jumlah	1	√	-
29	Lemari Besi/Metal	1	√	-
30	Lemari Kayu	5	√	-
31	Rak Besi	1	√	-
32	Rak Kayu	2	√	-
33	Filing Cabinet Besi	8	√	-
34	Brandkas	1	√	-
35	CCTV - Camera Control Television System	2	√	-
36	White Board	3	√	-
37	Mesin Absensi	6	√	-
38	Papan Nama Instansi	2	√	-
39	Papan Tulis	2	√	-
40	Mesin Fogging	3	√	-
41	Sirine	2	√	-
42	Meja Rapat	4	√	-
43	Tempat Tidur Kayu	7	√	-
44	Meja Resepsionis	3	√	-
45	Meja 1/2 Biro	13	√	-
46	Kasur/Spring Bed	22	√	-
47	Kursi Rapat	25	√	-
48	Kursi Tamu	1	√	-
49	Kursi Putar	6	√	-
50	Kursi Biasa	13	√	-
51	Bangku Tunggu	9	√	-
52	Sofa	1	√	-
53	Meubelair Lain-Lain	31	√	-
54	Jam Elektronik	5	√	-
55	Mesin Pemotong Rumput	1	√	-
56	Lemari Es	1	√	-

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi Sarana Dan Prasarana	
			Layak	Tidak Layak
57	A.C. Split	16	√	-
58	Televisi	4	√	-
59	Loudspeaker	1	√	-
60	Sound System	2	√	-
61	Wireless	1	√	-
62	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	√	-
63	Tiang Bendera	1	√	-
64	Tangga Aluminium	2	√	-
65	Kaca Hias	2	√	-
66	Handy Cam	1	√	-
67	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home use) Lain-Lain	1	√	-
68	Alat Pemadam/Portable	34	√	-
69	Pompa Kebakaran/Portable	41	√	-
70	Pipa Pemancar Kebakaran	41	√	-
71	Pakaian Panas/Lengkap	18	√	-
72	Topeng (masker) OXigen	5	√	-
73	Alat Pembantu Kebakaran	11	√	-
74	Lain-lain Alat Pemadam Kebakaran	16	√	-
75	Alat Pemadam Kebakaran Lain-Lain	6	√	-
76	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	√	-
77	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	√	-
78	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	√	-
79	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	15	√	-
80	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	√	-
81	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	√	-
82	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	8	√	-
83	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	4	√	-
84	Proyektor + Attachmen	1	√	-
85	Speaker aktif	1	√	-
86	Camera Electronic	2	√	-
87	Tripod Camera	2	√	-
88	Layar Film/Projector	1	√	-
89	Camera Digital	1	√	-
90	Handy Talky (HT)	180	√	-
91	Lain-lain Alat Komunikasi Telephone	2	√	-
92	Lain-lain Alat Komunikasi Radio HF/FM	1	√	-
93	Alat Komunikasi Radio HF/FM Lain-Lain	1	√	-
94	Unit Tranceiver VHF Transportable	14	√	-
95	Alat Komunikasi Radio VHF Lain-Lain	1	√	-
96	Alat Komunikasi Sosial Lain-Lain	1	√	-
97	Antene VHF/FM Stationary	1	√	-
98	Lain-lain Alat Kedokteran T.H.T	7	√	-
99	Tiang Keseimbangan	1	√	-
100	Alat Kesehatan Olah Raga Lain-Lain	2	√	-
101	Camera Photo Micrograph	1	√	-
102	Alat Laboratorium Umum Lain-Lain	4	√	-
103	TV Monitor	1	√	-
104	Video Printer	1	√	-
105	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	260	√	-
106	Personal Computer	1	√	-
107	Layar	1	√	-
108	Katrol	1	√	-
109	Recorder Display Lain-Lain	1	√	-
110	Sound Monitor/ Sirine	1	√	-
111	Sirine (Proteksi Lingkungan)	6	√	-
112	Wireless Data Transmission System	1	√	-
113	Alat Khusus SAR (Search And Resque)	30	√	-
114	Alat Khusus Keamanan Lainnya	36	√	-
115	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	53	√	-
116	Lain-lain Alat Keamanan	4	√	-
117	Sangkur	106	√	-
118	Pentung	100	√	-
119	Pisau Lempar	116	√	-
120	Internet	1	√	-
121	P.C Unit	14	√	-
122	Lap Top	13	√	-
123	Note Book	4	√	-
124	Komputer Unit Lainnya	1	√	-
125	Hard Disk	2	√	-
126	Lain-Lain Mini Komputer	13	√	-
127	CPU (Peralatan Personal Komputer)	4	√	-
128	Monitor	4	√	-
129	Printer (Peralatan Personal Komputer)	19	√	-
130	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	√	-
131	Peralatan Personal Komputer Lain-Lain	1	√	-
132	Peralatan Jaringan Lain-Lain	1	√	-
133	Baju Pengaman Lain-lain	1	√	-
134	Tenda	5	√	-

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat disampaikan bahwa kondisi gedung, diperlukan pembangunan baru disesuaikan dengan kebutuhan

ruang kerja yang dapat mengakomodasi sejumlah pegawai yang tersedia, dan beberapa kebutuhan ruangan yang diperlukan. Sedangkan untuk sarana dan prasarana yang tidak layak dan belum ada, juga diperlukan untuk optimalisasi kinerja pelayanan perangkat daerah.

C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1. Kinerja Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang penegakan perundang-undangan daerah ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kebakaran, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Fungsi yang dijalankan adalah merumuskan kebijakan teknis, menyiapkan dan menyusun Peraturan Daerah maka produk dan layanan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sebagai berikut:

A. Produk:

- a. Berkurangnya pelanggaran terhadap produk Hukum Perda dan Perkada yang telah di Undangkan.
- b. Adanya ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat yang lebih kondusif.
- c. Tanggapnya masyarakat terhadap bahaya bencana kebakaran
- d. Terciptanya keamanan lingkungan di RT dan RW

B. Layanan:

- a. Melakukan Penegakan Peraturan Perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum Daerah.
- b. Melakukan peningkatan pengawasan ketertiban umum di masyarakat
- c. Melakukan penanganan serta pencegahan dini terhadap bencana kebakaran.
- d. Melakukan pembinaan terhadap satlinmas dan Relawan Kebakaran (redkar)

Capaian indikator kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan 5 (lima) tahun terakhir dapat dijabarkan pada Tabel T.C-23 dan Tabel T.C-24 berikut, dengan penjelasan bahwa pada tahun 2021-2026 telah dilakukan perubahan indikator sasaran kinerja pelayanan pada tahun 2022 seiring dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Berdasarkan data tersebut, capaian kinerja layanan cenderung mengalami peningkatan, dan melampaui target yang ditentukan. Hal ini menggambarkan adanya komitmen untuk mewujudkan Kalimantan Utara yang aman, tentram dan tertib. Selanjutnya dapat dijabarkan bahwa realisasi anggaran mengalami tren positif pada setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan. Realisasi anggaran memperhatikan prinsip pengelolaan APBD. Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) menunjukan bahwa penggunaan anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Tabel T.C-23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP dan PMK Kota Tarakan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase penegakan Perda	v			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Kasus pelanggaran K3	v			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan Patroli	v			1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1095	100%	100%	100%	100%	101%
4	Cakupan petugas Linmas	v			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Pos kamling aktif	v			60	60	60	60	60	70	70	70	70	69	117%	117%	117%	117%	115%
6	Persentase kasus kebakaran yang tertangani dalam waktu tanggap (Response time)	v			100	100	100	100	70	100	100	100	100	93.3	100%	100%	100%	100%	133%
7	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Non kebakaran)	v			100	100	100	100	70	100	100	100	100	268.4	100%	100%	100%	100%	383%
8	Nilai SAKIP	v			60.1	60.1	60.1	60.1	65.71					76.67	0%	0%	0%	0%	117%
9	Nilai IKM	v			70.1	70.1	70.1	70.1	70.1	94.85	94.87	94.89	94.91	95.22	135%	135%	135%	135%	136%
10	SPM TRANTIBUMLINMAS	v			100	100	100	100	100	0	25	92.71	97.01	98.33	0.00%	25.00%	92.71%	97.01%	98.33%

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satpol PP dan PMK Kota Tarakan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Pertumbuhan 2021-2022		Pertumbuhan 2022-2023		Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	151,200,000	414,076,780	329,646,259	350,303,480	75,000,000	307,289,467	243,970,095	324,163,500	0.50	0.74	0.74	0.93	63.49	75.59	- 25.61	- 25.95	53.25	107.33
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	182,450,028	265,970,550	147,005,865	1,314,965,640	179,907,028	250,374,220	113,987,163	1,247,155,500	0.99	0.94	0.78	0.95	31.40	28.14	- 80.93	- 119.65	265.18	326.27
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18,048,628,904	18,323,433,412	18,910,132,389	24,130,931,060	17,302,444,815	17,786,560,478	17,814,438,631	22,496,681,986	0.96	0.97	0.94	0.93	1.50	2.72	3.10	0.16	10.78	9.75

D. Kelompok Sasaran Layanan

Pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat meliputi:

- i. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum se- Kota Tarakan;
- ii. Penegakan perda Pemerintah Daerah Kota Tarakan;
- iii. Pembinaan PPNS Pemerintah Daerah Kota Tarakan;
- iv. Penyelenggaraan pemetaan rawan Pelanggaran Perda dan Perkada.
- v. Pembinaan dan monitoring kinerja anggota Linmas
- vi. Pembinaan dan Pelatihan serta Monitoring anggota Relawan Kebakaran

Dengan kelompok sasaran adalah warga negara dan aparatur melalui layanan sebagai berikut:

- 1. Memfasilitasi pengaduan masyarakat terkait gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui saluran pengaduan berupa nomor telepon pengaduan, Layanan Aduan Masyarakat di WA, website, Satpol PP dan PMK dan media sosial (IG dan facebook), serta melakukan tindak lanjuti pengaduan;
- 2. Memberikan pengobatan dan ganti materil bagi warga negara yang berada pada radius 0-50 meter di lokasi penegakan hukum perda dan perkada, yang terkena dampak penegakan perda dan perkada;
- 3. Memfasilitasi pembentukan Sekretariat PPNS, melakukan peningkatan SDM dan performance melalui pelatihan dan bimbingan teknis;
- 4. Fasilitasi kegiatan anggota Linmas di kelurahan dalam rangka pemekaran fungsi POSKAMLING.
- 5. Fasilitasi kegiatan anggota Relawan Kebakaran (redkar) di tingkat kelurahan dan Kecamatan.

Tabel 2.1.4.

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Identifikasi Besaran Kebutuhan	Arah Pengembangan Pelayanan	Sasaran Layanan
1	a. Melakukan sosialisasi kanal layanan pengaduan pada setiap kegiatan yang melibatkan masyarakat	Melakukan integrasi penyelesaian pengaduan masyarakat dengan instansi terkait	Masyarakat
	b. Melakukan integrasi antar kanal pengaduan serta tindaklanjut penanganan.		Perangkat Daerah Kota Tarakan
2	Menyusun rencana aksi pengumpulan data jumlah warga negara, aset, dan fasum radius 0-50 meter di lokasi penegakan hukum dalam rangka penerapan standar pelayanan minimal (SPM)	Melakukan sosialisasi rencana penegakan perda dan perkada pada warga negara radius 0- 50 meter di lokasi penegakan hukum	Masyarakat
3	Melakukan identifikasi pengaduan masyarakat yang memerlukan tindakan yustisi	Melakukan kegiatan yustisi bersama	Masyarakat
4	Melakukan Pembinaan peningkatan fungsi LINMAS kota	Memfasilitasi peningkatan /pengembangan kapasitas anggota Linmas	Anggota Linmas se Kota Tarakan
5	Melakukan Pembinaan, peningkatan fungsi Redkar	Memfasilitasi Peningkatan/pengembangan kapasitas anggota Redkar	Anggota Redkar se Kota Tarakan

2. Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Permasalahan pelayanan Perangkat daerah;

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kebakaran, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Fungsi yang di jalankan adalah merumuskan kebijakan teknis, menyiapkan dan menyusun Peraturan Daerah. Dalam pelaksanaan tugas terdapat beberapa hambatan dan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi diantaranya :

1. Penegakan Perda dan Perkada sering kali terkendala oleh keterbatasan anggaran. Tanpa dukungan anggaran yang cukup maka akan kesulitan dalam melaksanakan tugas baik dari segi jumlah personil, fasilitas operasional maupun sarana dan prasarana pendukung
2. Penegakan Perda dan Perkada sering kali terhambat oleh kurangnya koordinasi antara berbagai Lembaga atau Instansi Pemerintah. Misalnya Peraturan yang melibatkan lebih dari satu sektor, sering kali tidak optimal dalam tindak lanjut dengan baik karena kurangnya informasi terkait data dukung pelanggaran Perda/Perkada tersebut.
3. Masih tinggi angka Pelanggaran Perda dan Perkada
4. Kurangnya Sumber daya Aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
5. Sarana dan prasarana yang belum memadai dan mendukung pelaksanaan kegiatan penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada tersebut
6. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan akan Perda dan Perkada
7. Kurangnya edukasi dan kesadaran kepada masyarakat seperti yang mempekerjakan anak di bawah umur
8. Sering di temui adanya back up dari pihak ketiga yang melegalkan kegiatan Tidak jarang timbul perlawanan dan pihak-pihak yang merasa dirugikan
9. Masih kurangnya anggota Damkar memiliki keahlian Pemadam
10. Ketersediaan tenaga Pemadam Kebakaran yang di rasa masih kurang
11. Pengisian Pos Sektor dan penunjang peralatan yang masih kurang
12. Adanya penyesuaian terhadap regulasi yang sering berubah
13. Adanya perbedaan dalam menerapkan suatu aturan atau regulasi

Berkaitan dengan hal tersebut, dijabarkan permasalahan secara detail yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan, sebagai berikut :

Tabel 2.1.4.
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah 2025-2029

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Belum Optimalnya Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Kota dan Meningkatnya efektivitas penanggulangan kebakaran	Belum Tingginya Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat	Kurangnya Pelaksanaan operasi penertiban
		Kurangnya Sarana/Prasarana Trantibum
		Belum Optimalnya Pendampingan dan Pembinaan
		Kurangnya sosialisasi Penegakan Perda/Perkada
		Belum Optimalnya SOP Penegakan Perda dan Perkada
		Kurangnya Pembinaan Terhadap Pelanggaran Perda/Perkada
		Kurangnya Pengawasan Perda/Perkada
		Belum Optimalnya Yustisi Terhadap Perda/Perkada
	Belum Optimalnya Pelayanan Pemadam Kebakaran dan non kebakaran	Belum Optimalnya pendampingan dan pembinaan relawan kebakaran
		Belum Optimalnya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran
		Kurangnya pembinaan aparatur pemadam kebakaran
		Belum Optimalnya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
		Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
		Belum Optimalnya Kegiatan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

b. Isu Strategis.

Penentuan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis di bidang ketentraman dan ketertiban umum sangat dipengaruhi oleh konteks perencanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum pada skala nasional (pemerintah pusat).

Ketentraman dan Keamanan sesungguhnya menjadi suatu isu strategis pembangunan nasional, sebagaimana ketentraman, keamanan dan ketertiban di Kota Tarakan juga menjadi isu dan permasalahan strategis daerah.

Pengembangan keamanan dan ketentraman umum bagi masyarakat di tujuan demi tercapainya masyarakat yang aman dan kondusif di atas dinamika sosial ekonomi, hukum dan politik yang demokratis dan transparan, sehingga kebebasan beraktifitas bagi masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

Sementara dari sisi perlindungan masyarakat, arah kebijakan pembangunan nasional menempatkan aspek perlindungan hak azasi manusia menjadi bagian yang integral dalam pembangunan itu sendiri baik yang menyangkut sektor-sektor ekonomi, sosial, hukum dan politik serta perlindungan masyarakat juga dikonsentrasikan pada penjaminan hak-hak dan kebebasan berkehendak dalam demokratisasi yang transparan serta penjamin kesetaraan di mata hukum.

Sehingga terkait dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan dapat disimpulkan bahwa pembangunan dibidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan

masyarakat jelas bagian yang tidak terpisahkan dari konsep pembangunan di segala bidang yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah bersama-sama masyarakat pada umumnya secara partisipatif.

Isu Strategis Satpol PP

1. Peningkatan kualitas, kuantitas, dan keterampilan sumber daya manusia Satpol PP untuk meningkatkan kinerja dalam menjaga ketertiban umum.
2. Penegakan Perda yang efektif dengan memberikan masyarakat sosialisasi terhadap perda dan perkara yang diundangkan
3. Meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat untuk menciptakan kondisi yang lebih kondusif
4. Mengubah citra Satpol PP dari sekadar represif menjadi institusi yang preventif dan pembina, yang lebih melibatkan masyarakat dalam penegakan peraturan.

Isu Strategis Pemadam Kebakaran

1. Dalam rangka memenuhi SPM maka dipandang perlu untuk membangun sektor atau pos pemadam di Kecamatan Tarakan Timur dan pos lainnya yang memiliki tingkat resiko kebakaran tinggi seperti daerah padat penduduk dan wilayah pesisir pantai.
2. Keterbatasan Sarpras dan Armada Pemadam Kebakaran serta jumlah aparatur dilapangan atau ditiap sektor dan pos pemadam kebakaran.
3. Keterbatasan aparatur yang memiliki sertifikasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
4. Dukungan dan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan pemadamam kebakaran melalui program redkar (relawan kebakaran) sangat diperlukan.
5. Kerjasama dengan perusahaan, BUMN dan objek vital lainnya yang memiliki peralatan dan armada pemadam kebakaran sangat dibutuhkan guna membantu dalam melaksanakan pemadaman dalam skala besar.

2.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Kota Tarakan

Dalam pasa 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota merupakan urusan dalam skala prioritas.

Dalam pasal 255 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja bertugas menegakkan Perda dan Perkada (Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Sesuai dengan Wali Kota Tarakan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah terkait ketentraman dan ketentraman umum, perlindungan masyarakat, kebakaran, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas-tugas kepamong prajaan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penegakan Perda serta memaksimalkan kinerja dengan baik dan optimal sebagai pendukung daripada visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pelaksanaan pembangunan baik membangun jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahunan. Serta mempertimbangkan potensi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Tarakan, maka visi yang hendak dicapai dalam periode tahun 2025-2029 adalah:

" Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Cerdas yang bertumpu pada sektor Jasa, Perdagangan, Perikanan Kelautan dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Maju menuju Masyarakat Sejahtera "

Sedangkan misi adalah rumusan upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunannya ada 5 (lima) misi adalah:

- Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
- Meningkatkan pemerataan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar yang handal
- Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui dukungan kemudahan berusaha yang berkeadilan dan bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, perikanan kelautan, ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan (UMKM)
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif serta menjaga stabilitas ketertiban dan ketentraman kota
- Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh menghadapi bencana

Berdasarkan misi di atas keterkaitan dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah adalah pada poin Empat dan Lima yaitu :

" Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif serta menjaga stabilitas ketertiban dan ketentraman kota " dan

"Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh menghadapi bencana ".

2.2. Telaahan Renstra KIL dan Renstra Provinsi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selali memuat visi, misi Kepala Daerah 2025-2029 juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 serta arah pembangunannya.

Dalam penyusunan Renstra 2025-2029 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan harus mengacu pada Renstra 2024-2026 sebelumnya karena pada bagian ini akan di jabarkan keterkaitan antar dokumen baik Penyusunan Renstra RPJMD maupun Renja RKPD. Renstra disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Selanjutnya terkait tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan adalah berada dalam wilayah koordinasi Kementerian Dalam Negeri dimana salah satu acuan

penyusunan Renstra 2025-2029 berkaitan dengan SPM yaitu Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) serta Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Damkar).

Dari Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri yaitu meningkatnya kualitas penyelenggaraan Trantibumlinmas dimana keterkaitan dengan Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan adalah meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dengan indikator persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Adanya sinergi program dalam keamanan dan ketertiban dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan,	Belum Tingginya Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat	j) Penguatan penegakan hukum dan perlindungan masyarakat.	1. Penguatan peran, tugas dan wewenang Kementerian Dalam Negeri dalam mengakhir pelaksanaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang merupakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan dalam pelaksanaannya telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum yang mengharuskan daerah mengimplementasikan penganggaran seluruh SPM termasuk trantibumlinmas dalam APBD.	1. Penguatan peran, tugas dan wewenang Kementerian Dalam Negeri dalam mengakhir pelaksanaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang merupakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan dalam pelaksanaannya telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum yang mengharuskan daerah mengimplementasikan penganggaran seluruh SPM termasuk trantibumlinmas dalam APBD.	Isu strategis Kewilayahan area Kalimantan Utara dan Kota Tarakan : Penanganan PMKS yang belum terintegrasi secara berkesinambungan (dok. Rantek RPJMN 2025- 2029)	Peningkatan Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Kota dan Peningkatan efektivitas penanggulangan kebakaran
Keterlibatan Masyarakat (Relawan Kebakaran) dalam Upaya Penanganan dan Pencegahan Bencana Kebakaran	Belum Optimalnya Pelayanan Pemadam Kebakaran dan non kebakaran		2. Misi ke 4 RPJPN 2025-2045: supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia;			

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja perangkat daerah selama 5 tahun.

Tujuan merupakan gambaran suatu kondisi yang akan di capai pada akhir suatu periode, dan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang menggambarkan kondisi maupun hasil pembangunan yang lebih spesifik dan sangat berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator yang relevan. Indikator tersebut ditetapkan dengan maksud agar proses pelaksanaan program prioritas dapat berlangsung secara focus, efektif, dan efisien. Perumusan tujuan dan sasaran serta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan rencana strategis pembangunan secara keseluruhan yang mengacu kepada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan masa jabatan 2025-2029.

Adapun Tujuan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Kota dan Meningkatnya efektivitas penanggulangan kebakaran dengan Indikator :
 - a. Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - b. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran
2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029
Sasaran dalam rangka mencapai Tujuan Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
 1. Meningkatnya Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dengan indikator :
 - (1) Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
 - (2) Persentase Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang Terselesaikan
 - (3) Persentase Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat
3. Meningkatnya Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan non Kebakaran dengan indikator :
 - (1) Persentase Kasus Kebakaran yang tertangani dalam waktu tanggap (respon time)
 - (2) Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Non Kebakaran)
4. Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Perangkat Daerah yang Akuntabel Dengan Indikator
 - (1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah
 - (2) Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Renstra 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Meningkatnya Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Kota dan Meningkatkan efektivitas penanggulangan kebakaran		Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	N/A	85	87	89	91	93	95	
			Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Persentase Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang Terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Persentase Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat	0%	70%	75%	78%	80%	85%	90%	
		Meningkatnya Pelayanan Pemadam Kebakaran dan non kebakaran	Persentase Kasus Kebakaran yang tertangani dalam waktu tanggap (resptime)	93%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Non Kebakaran)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya Tata Kelola Satpol PP dan PMK	Nilai SAKIP	76.67	76.7	76.73	76.76	76.79	76.82	76.85	
			Indeks Kepuasan Masyarakat		94,91	94,93	94,95	94,97	94,99	95	

3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi dan arah kebijakan dilakukan guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka diperlukan rumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Oleh karena itu strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dimana merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan.

Adapun sasaran yang ditargetkan untuk dapat dicapai adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan kelembagaan dalam rangka peningkatan peran sebagai penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Perda/Perkada yang tertuang dalam Peraturan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang penegakan perundang-undangan daerah ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kebakaran, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- 2) Pengembangan kapasitas dan peningkatan kualitas SOM guna mengisi jabatan Administrator, jabatan pengawas yang memiliki kemampuan manajerial, dan jabatan Fungsional sesuai kebutuhan yang memiliki keterampilan dan keahlian dibidang tugasnya seperti PPNS, Intelijen, Komunikasi dan Negosiasi, Penanggulangan huru hara, dan kerusuhan massa bela diri dan menyuluh hukum dan penertiban I penindakan pelanggaran hukum daerah sehingga secara bertahap jumlah personil akan terpenuhi.
- 3) Mewujudkan Masyarakat dan Aparatur serta Badan Hukum yang patuh dan taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tidak melanggar Perda dan Perkada dan berbagai bentuk Kebijakan Pemerintah Daerah, tidak melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta mampu menjunjung tinggi supremasi hukum. Untuk itu di perlukan kegiatan-kegiatan yang mulai dari penyuluhan dan sosialisasi, pengawasan/pemantauan dan penegakan hukum dan Peraturan Perundang-undangan secara tepat guna dan tepat sasaran.
- 4) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi terkait guna mencapai tujuan yang telah di tentukan.

Tabel 3.4
Penahapan Renstra 2025-2029

Tahap I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Penguatan sinergitas Penyelenggaraan Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat pada Sub Urusan Trantibum	Optimalisasi kegiatan penyelenggaraan Trantibumlinmas	Dukungan optimlaisasi penyelenggaraan Trantibumlinmas dalam hal pengawasan terhadap pemanfaatan ruang Kota Tarakan dan kawasan strategis	Transformasi layanan Trantibumlinmas berbasis teknologi informasi sebagai dasar perencanaan, pelaporan dan layanan pengaduan masyarakat dan publik	Kelembagaan Satpol PP dan PMK sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas sosial urusan trantibumlinmas di Kota Tarakan

Penjelasan:

- 1) Penguatan terhadap Pelayanan Ketentrman dan Ketertiban Umum melalui penyediaan tempat pengaduan laporan masyarakat secara online maupun offline, membentuk tim yang responsif, cepat tanggap dan akurat Sedangkan untuk Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kabakaran (DAMKAR) disikapi dengan pelaporan online maupun offline, dan respon time kebakaran dan evakuasi penyelamatan serta monitoring hasil evaluasi
- 2) Percepatan pelaksanaan kegiatan agar tujuan SPM dan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tercapai
- 3) Peningkatan kapasitas aparatur dengan mengikutsertakan Pendidikan dan Pelatihan baik Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran maupun Anggota Satlinmas
- 4) Pencapaian tujuan yaitu terwujudnya Kota Tarakan aman sesuai dengan RPJMD, serta terciptanya ketentrman dan ketertiban umum
- 5) Evaluasi dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan terkait ketentrman dan ketertiban umum serta menindaklanjuti dan memitigasi risiko yang terjadi.

3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dari sasaran selanjutnya diperoleh beberapa solusi berupa pilihan strategis arah kebijakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah direncanakan yakni:

- 1) Meningkatkan koordinasi sinergisitas ketentrman dan ketertiban umum lintas sektor kecamatan
- 2) Mengoptimalkan pengamanan dan patroli ketertiban umum, pengamanan pejabat negara dan VIP
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran untuk mengurangi dampak dari bahaya kebakaran
- 4) Meningkatkan aparatur perlindungan masyarakat yang tanggap bencana ketertiban umum dan ketentrman masyarakat
- 5) Meningkatkan kesadaran/kepatuhan masyarakat untuk tidak melanggar sehingga menurunnya tindak pelanggaran
- 6) Meningkatkan SDM aparatur dengan jabatan fungsional PPNS dan aparatur PMK yang bersertifikat.

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Renstra 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
		Pengelolaan Ketertiban Umum dan Penegakan Hukum	Peningkatan Operasi Penertiban	
			Peningkatan pendampingan dan pembinaan	
			Peningkatan Sarana/Prasarana Trantibum	
			Peningkatan Pembinaan Terhadap Pelanggaran Perda/Perkada	
			Penguatan SOP Penegakan Perda dan Perkada	
			Penguatan Yustisi Terhadap Perda/Perkada	
			Peningkatan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada	
			Peningkatan Pengawasan Perda/Perkada	
			Peningkatan kapasitas PPNS	
		Meningkatkan Ketangguhan dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana	Peningkatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran	
			Penguatan pembinaan aparaturnya pemadam kebakaran	
			Peningkatan sosialisasi dan edukasi Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran	
			Peningkatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	
			Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
			Peningkatan Kegiatan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program;

Dalam mewujudkan capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029 dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, diantaranya:

a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini bertujuan menciptakan situasi yang kondusif, aman, dan tertib di lingkungan masyarakat melalui pengawasan, penegakan hukum, serta peningkatan kapasitas aparatur dengan indikator kinerja :

- 1) Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas: Mengukur tingkat pelaksanaan tugas ketentraman dan ketertiban masyarakat (Tibumtranmas) dalam bentuk kegiatan patroli, penertiban, dan pengawasan.
- 2) Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan: Bertujuan membangun kepatuhan masyarakat dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- 3) Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya: Bertujuan meningkatkan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan keahlian.
- 4) Persentase Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat: Menunjukkan seberapa luas masyarakat yang telah mendapatkan perlindungan melalui sistem pengamanan atau partisipasi dalam kegiatan linmas.

b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini bertujuan untuk :

- 1) Mencegah terjadinya kebakaran dan kejadian darurat non-kebakaran melalui edukasi, pengawasan, dan standar keselamatan.
- 2) Mengurangi risiko dan dampak korban jiwa, kerugian harta benda, serta kerusakan lingkungan akibat kebakaran maupun bencana non-kebakaran.
- 3) Meningkatkan kecepatan dan ketepatan respon dalam operasi penyelamatan dan pemadaman kebakaran.
- 4) Meningkatkan kapasitas masyarakat agar sadar dan siap siaga menghadapi potensi kebakaran dan kejadian darurat lain.
- 5) Memberikan pelayanan penyelamatan non kebakaran (misalnya: evakuasi hewan, kecelakaan lalu lintas, pertolongan di ketinggian, banjir, gempa, dan kondisi darurat lain).

Dengan Indikator Kinerja meliputi :

a) Pencegahan Kebakaran

- 1) Jumlah/sasaran peningkatan kesadaran masyarakat melalui pembentukan Relawan kebakaran, sosialisasi, simulasi, dan pelatihan (RT, sekolah, kantor, dll).
- 2) Persentase bangunan/fasilitas umum yang memenuhi standar proteksi kebakaran.
- 3) Jumlah inspeksi proteksi kebakaran (APAR, hydrant, jalur evakuasi, dsb).

b) Penanggulangan Kebakaran

- 1) Waktu tanggap (response time) rata-rata 15 menit sejak laporan diterima hingga unit tiba di lokasi.
- 2) Jumlah kebakaran yang berhasil ditangani.

- 3) Persentase penurunan kerugian jiwa dan materi akibat kebakaran.
 - c) Penyelamatan Kebakaran
 - 1) Jumlah korban kebakaran yang berhasil diselamatkan.
 - 2) Persentase keberhasilan evakuasi dalam operasi kebakaran.
 - d) Penyelamatan Non Kebakaran
 - 1) Jumlah kejadian non-kebakaran yang ditangani (banjir, gempa, evakuasi hewan, kecelakaan, dll).
 - 2) Jumlah/tingkat keberhasilan evakuasi korban non-kebakaran.
 - e) Kelembagaan & Kapasitas
 - 1) Rasio kecukupan armada dan peralatan damkar sesuai standar (misalnya 1 unit pompa per 10.000 - 15.000 penduduk menurut NFPA (National Fire Protection Association) no. 1710 & 1720).
 - 2) Persentase personel damkar yang memiliki sertifikasi kompetensi.
 - 3) Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan damkar.
 - c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program ini mendukung pelaksanaan tugas-tugas administratif dan kelembagaan agar pelaksanaan pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien dengan indikator kinerja :
 - 1) Persentase Indikator Program yang Tercapai. Menunjukkan tingkat keberhasilan pencapaian target dalam berbagai program kegiatan yang dijalankan pemerintah provinsi.
 - 2) Persentase Realisasi Anggaran Mengukur efektivitas penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan pemerintahan.
- 4.2. Uraian Kegiatan;
- Sedangkan dalam melaksanakan program dengan pencapaian indikator kinerja program yang telah ditetapkan dilaksanakan melalui kegiatan :
- a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum :
 - 1) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota
 - 2) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
 - 3) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
 - b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - 1) Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
 - 3) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
 - 4) Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
 - c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

TABEL 4.2
Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Rancangan Akhir Renstra Pd
Pemerintah Kota Tarakan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN IKU	SASARAN IKU - PK	OUTCOME	OUTPUT (KASI/ES.IV/Ketua Tim)	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
Meningkatnya Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Kota	Meningkatnya Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Kota dan Meningkatnya efektivitas penanggulangan kebakaran				Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum			
					Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran			
		Meningkatnya Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Penegakan Perda yang dimaksud adalah segala tahapan penegakan perda yang dimulai dari inventaris perda, sosialisasi, pembinaan, penyuluhan, pelaksanaan penegakan perda sesuai ketentuan yang diatur dalam perda dan perkada dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Rumus : Persentase = (Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakan dibagi Jumlah Perda dan Perkada yang sesuai dengan Tusi Satpol PP) X100%		
					Persentase Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang terselesaikan	ukuran kinerja yang menunjukkan seberapa besar proporsi jumlah kasus/kejadian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang berhasil ditangani atau diselesaikan oleh Satpol PP dibandingkan dengan total kasus/kejadian yang ditangani dalam periode tertentu. Rumus Persentase = (Jumlah Laporan Gangguan Tibum yang Terselesaikan dibagi Jumlah Laporan Gangguan Tibum) X 100%		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN IKU	SASARAN IKU - PK	OUTCOME	OUTPUT (KASI/ES.IV/Ketua Tim)	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
					Persentase Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat	Mengukur seberapa luas atau seberapa banyak masyarakat yang telah mendapatkan perlindungan dari suatu program atau layanan tertentu. Rumus : Jumlah Penyelenggaraan Linmas yang dilaksanakan dibagi Jumlah Penyelenggaraan Linmas Satgas Linmas Kecamatan anggotanya minimal 10 orang dalam 1 kecamatan, Jumlah Satlinmas di setiap Kelurahan minimal 6 orang (1 orang komandan regu dan minimal 5 orang anggota) Yang ada saat ini adalah 1 orang setiap Kelurahan berarti masih ada kekurangan 5 orang setiap kelurahan Tarakan Barat : 5 tarakan utara : 3 tarakan tengah : 5 tarakan timur : 7 Jml Satlinmas saat ini : 20 orang Jumlah minimal : 120 orang Kekurangan : 100 orang rumus : jumlah Satlinmas yang ada/ jumlah Satlinmas minimal		
			Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Penegakan Peraturan daerah yang Terselesaikan		1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
					Persentase Kasus Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Terselesaikan			
					Persentase Penanganan Perlindungan Masyarakat			
				Terlaksananya operasi penertiban			1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan		1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN IKU	SASARAN IKU - PK	OUTCOME	OUTPUT (KASI/ES.IV/Ketua Tim)	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
							Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan		1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	
				Terlaksananya pendampingan dan pembinaan			1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum		1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja		1.05.02.2.01.0010 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	
					Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		1.05.02.2.01.0013 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	
					Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas		1.05.02.2.01.0014 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	
				Terlaksananya Sarana/Prasarana Trantibum			1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia		1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN IKU	SASARAN IKU - PK	OUTCOME	OUTPUT (KASI/ES.IV/Ketua Tim)	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
			Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada		Persentase Kepatuhan Terhadap Perda dan Perkada		1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
					Persentase Masyarakat yang Teredukasi Perda dan Perkada			
				Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pelanggaran Perda/Perkada			1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		1.05.02.2.02.0004 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
				Tersedianya SOP Penegakan Perda dan Perkada			1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
					Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		1.05.02.2.02.0005 Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Yustisi Terhadap Perda/Perkada			1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
					Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan		1.05.02.2.02.0008 Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP		1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	
				Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada			1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN IKU	SASARAN IKU - PK	OUTCOME	OUTPUT (KASI/ES.IV/Ketua Tim)	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terlaksananya Pengawasan Perda/Perkada			1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
				Terlaksananya peningkatan kapasitas PPNS			1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	
					Jumlah SK Pembentukan Sekretariat PPNS		1.05.02.2.03.0002 Pembentukan Sekretariat PPNS	
					Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah		1.05.02.2.03.0004 Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS		1.05.02.2.03.0005 Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	
		Meningkatnya Pelayanan Pemadam Kebakaran dan non kebakaran			Persentase Kasus Kebakaran yang tertangani dalam waktu tanggap (respon time)	Suatu kondisi yang menunjukkan adanya peningkatan kapasitas, kecepatan, efektivitas, serta kualitas upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lembaga pemadam kebakaran, maupun masyarakat dalam merespons, mengendalikan, dan menanggulangi kejadian kebakaran sehingga menurunkan risiko kerugian jiwa, harta benda, maupun lingkungan. Capaian % = Jumlah Kejadian kebakaran yang tertangani dibagi dengan jumlah Kejadian kebakaran x 100%		
					Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Non Kebakaran)	Kondisi ketika unit pemadam kebakaran dan penyelamatan mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, aman, dan meningkat kualitas serta kuantitasnya dalam menanggapi kejadian non kebakaran. Capaian (%) Jumlah ODNK tertangani dibagi Jumlah ODNK terlapor x 100%		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN IKU	SASARAN IKU - PK	OUTCOME	OUTPUT (KASI/ES.IV/Ketua Tim)	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
			Meningkatnya Pencegahan, Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran		Persentase kejadian kebakaran yang ditangani		1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
					Capaian penyebaran informasi dan edukasi pencegahan kebakaran			
					Persentase Layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan jiwa (non kebakaran)			
				Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran			1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya		1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran		1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota		1.05.04.2.01.0004 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal		1.05.04.2.01.0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait		1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
				Terlaksananya pembinaan aparatur pemadam kebakaran			1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN IKU	SASARAN IKU - PK	OUTCOME	OUTPUT (KASI/ES.IV/Ketua Tim)	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
							Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran		1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	
					Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran		1.05.04.2.01.0012 Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran	
				Terlaksananya sosialisasi dan edukasi Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran			1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga		1.05.04.2.01.0019 Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	
				Terlaksananya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran		1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
					Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya		1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN IKU	SASARAN IKU - PK	OUTCOME	OUTPUT (KASI/ES.IV/Ketua Tim)	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
					Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya		1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar		1.05.04.2.04.0003 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	
				Terlaksananya Kegiatan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia		1.05.04.2.05.0001 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal		1.05.04.2.05.0004 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis		1.05.04.2.05.0005 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran		1.05.04.2.05.0006 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	
		Meningkatnya Tata Kelola Satpol PP dan PMK			Nilai SAKIP	LHE AKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Tarakan		
					Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Satpol PP dan PMK	Nilai SKM		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN IKU	SASARAN IKU - PK	OUTCOME	OUTPUT (KASI/ES.IV/Ketua Tim)	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
			Meningkatnya Penguatan Internal Akuntabilitas Kinerja		Persentase LHE APIP yang ditindaklanjuti		1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu			1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1. Walidata Pendukung adalah Sekretariat Dinas/Perangkat Daerah yang membantu pelaksanaan tugas Walidata tingkat Daerah 2. Walidata pendukung pada tahap perencanaan pengumpulan DSSD: menyerahkan Daftar data yang dilakukan disabled kepada walidata tingkat Daerah. 3. Walidata pendukung pada tahap pengumpulan DSSD: Merekapitulasi data pada masing-masing bidang (Produsen Data) dalam perangkat daerah 4. Walidata pendukung pada tahap pemeriksaan DSSD: memeriksa jumlah hasil DSSD yang telah dikumpulkan oleh masing-masing bidang (Produsen Data) untuk selanjutnya disampaikan kepada walidata tingkat daerah 5. Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah dapat berupa Laporan/Berita Acara/Surat yang merupakan hasil dari koordinasi dan konsultasi dengan Walidata, dan membantu Walidata mengumpulkan, memeriksa, dan mengelola Data pada Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN IKU	SASARAN IKU - PK	OUTCOME	OUTPUT (KASI/ES.IV/Ketua Tim)	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Jumlah Laporan Keuangan sesuai SAP			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Meningkatnya Kinerja Kesekretariatan		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan		1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Persentase layanan administrasi umum yang tersedia			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1. instalasi listrik 2. komponen listrik 3. bohlam 4. kabel listrik 5. terminal, dll	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1. dispenser 2. kulkas 3. gorden 4. lain- lain tergantung spesifikasi perangkat daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1. Alat Tulis Kantor 2. Alat dan Bahan Kebersihan 3. Apar 4. dan lain-lain	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1. Fotokopi (per-lembar) 2. Cetak NCR 3. Cetak Map	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. perjalanan dinas dalam daerah 2. perjalanan dinas luar daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase Barang Milik Daerah yang terinput dalam aplikasi e-BMD			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN IKU	SASARAN IKU - PK	OUTCOME	OUTPUT (KASI/ES.IV/Ketua Tim)	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1. Meja Kerja 2. Meja Rapat 3. Meja Makan 4. Kursi Kerja 5. Kursi Rapat 6. rak buku/rak tv/rak kembang meja gambar 7. almari 8. brankas 9. filling kabinet 10. white board 11. dan lain - lain	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	bangunan gedung kantor permanen, semi permanen, darurat, bangunan tempat tinggal, menara, parkir	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor / Bangunan Lainnya yang disediakan	sarana : peralatan yang bergerak dan umumnya bisa digunakan secara langsung (penunjuk waktu, laptop, printer, pencacah kertas, scanner, camera, sound system, LCD, Proyektor dll) prasaran : peralatan yang tidak bergerak (AC, tiang bendera, Genset)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	
				Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. materai 2. jasa pengiriman	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1. bayar bulanan 2. penambahan kapasitas internet (jasa) 3. penambahan daya listrik (jasa)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase Barang Milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN IKU	SASARAN IKU - PK	OUTCOME	OUTPUT (KASI/ES.IV/Ketua Tim)	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	sarana : peralatan yang bergerak dan umumnya bisa digunakan secara langsung (penunjuk waktu, laptop, printer, pencacah kertas, scanner, camera, sound system, LCD, Proyektor dll) prasaran : peralatan yang tidak bergerak (AC, tiang bendera, Genset)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	rehab bangunan gedung kantor permanen, semi permanen, darurat, bangunan tempat tinggal, menara, parkir	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

3. Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

Tabel 4.3

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				31.691.433.106,00		31.667.433.106,00		31.568.433.106,00		31.706.433.106,00		31.692.033.106,00		
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				27.468.433.106,00		27.474.433.106,00		27.593.433.106,00		27.466.433.106,00		27.467.033.106,00		
Meningkatnya Kualitas Layanan Keseekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan (Indeks)	0	100	1.580.280.500,00	100	1.580.280.500,00	100	1.580.280.500,00	100	1.580.280.500,00	100	1.580.280.500,00	1.05.0.00.0.00.01.000 0 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				113.000.000,00		113.000.000,00		113.000.000,00		113.000.000,00		113.000.000,00		
Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	234	113.000.000,00	234	113.000.000,00	234	113.000.000,00	234	113.000.000,00	234	113.000.000,00		
1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				113.000.000,00		113.000.000,00		113.000.000,00		113.000.000,00		113.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	234	113.000.000,00	234	113.000.000,00	234	113.000.000,00	234	113.000.000,00	234	113.000.000,00		
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		
Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5	5	125.000.000,00	5	125.000.000,00	5	125.000.000,00	5	125.000.000,00	5	125.000.000,00		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	7		7		7		7		7			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	9		9		9		9		9			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	6	2		2		2		2		2			
1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	9	5.000.000,00	9	5.000.000,00	9	5.000.000,00	9	5.000.000,00	9	5.000.000,00		
1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	6	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00		
1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	13	58	50.000.000,00	58	50.000.000,00	58	50.000.000,00	58	50.000.000,00	58	50.000.000,00		
1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	7	25.000.000,00	7	25.000.000,00	7	25.000.000,00	7	25.000.000,00	7	25.000.000,00		
1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00		
1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				360.000.000,00		360.000.000,00		360.000.000,00		360.000.000,00		360.000.000,00		
Persentase Barang Milik Daerah yang terinput dalam aplikasi e-BMD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	2	360.000.000,00	2	360.000.000,00	2	360.000.000,00	2	360.000.000,00	2	360.000.000,00		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	4		4		4		4		4			
1.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00		
1.05.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.05.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00		
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				587.280.500,00		587.280.500,00		587.280.500,00		587.280.500,00		587.280.500,00		
Persentase layanan jasa penunjang yang tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48	12	587.280.500,00	12	587.280.500,00	12	587.280.500,00	12	587.280.500,00	12	587.280.500,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	35	5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00		
1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				135.280.500,00		135.280.500,00		135.280.500,00		135.280.500,00		135.280.500,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48	12	135.280.500,00	12	135.280.500,00	12	135.280.500,00	12	135.280.500,00	12	135.280.500,00		
1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	35	5	450.000.000,00	5	450.000.000,00	5	450.000.000,00	5	450.000.000,00	5	450.000.000,00		
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				395.000.000,00		395.000.000,00		395.000.000,00		395.000.000,00		395.000.000,00		
Persentase Barang Milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	395.000.000,00	3	395.000.000,00	3	395.000.000,00	3	395.000.000,00	3	395.000.000,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	22	29		29		29		29		29			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	30		30		30		30		30			
1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	16	16	30.000.000,00	16	30.000.000,00	16	30.000.000,00	16	30.000.000,00	16	30.000.000,00		
1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				325.000.000,00		325.000.000,00		325.000.000,00		325.000.000,00		325.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	22	29	325.000.000,00	29	325.000.000,00	29	325.000.000,00	29	325.000.000,00	29	325.000.000,00		
1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	25.000.000,00	3	25.000.000,00	3	25.000.000,00	3	25.000.000,00	3	25.000.000,00		
1.05.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	30	15.000.000,00	30	15.000.000,00	30	15.000.000,00	30	15.000.000,00	30	15.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya Penguatan Internal Akuntabilitas Kinerja	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	20.476.116.000,00	100	20.476.116.000,00	100	20.476.116.000,00	100	20.476.116.000,00	100	20.476.116.000,00	1.05.0.00.0.00.01.000 0 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	1		4		4		4		4			
1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
1.05.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				20.473.116.000,00		20.473.116.000,00		20.473.116.000,00		20.473.116.000,00		20.473.116.000,00		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	20.473.116.000,00	12	20.473.116.000,00	12	20.473.116.000,00	12	20.473.116.000,00	12	20.473.116.000,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	111	238		238		238		238		238			
1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				20.400.000.000,00		20.400.000.000,00		20.400.000.000,00		20.400.000.000,00		20.400.000.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	111	238	20.400.000.000,00	238	20.400.000.000,00	238	20.400.000.000,00	238	20.400.000.000,00	238	20.400.000.000,00		
1.05.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				73.116.000,00		73.116.000,00		73.116.000,00		73.116.000,00		73.116.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	73.116.000,00	12	73.116.000,00	12	73.116.000,00	12	73.116.000,00	12	73.116.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				770.000.000,00		750.000.000,00		765.000.000,00		750.000.000,00		765.000.000,00		
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Kasus Pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang Terselesaikan (%)	100	100	505.000.000,00	100	505.000.000,00	100	505.000.000,00	100	505.000.000,00	100	505.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.000 0 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
	Persentase Penanganan Perlindungan Masyarakat (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase Penegakan Peraturan daerah yang Terselesaikan (%)	100	100		100		100		100		100			
1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				505.000.000,00		505.000.000,00		505.000.000,00		505.000.000,00		505.000.000,00		
Terlaksananya Operasi Penertiban	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	3	6	115.000.000,00	6	115.000.000,00	6	115.000.000,00	6	115.000.000,00	6	115.000.000,00		
	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (laporan)	36	12		12		12		12		12			
1.05.02.2.01.0003 - Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	6	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00		
1.05.02.2.01.0006 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	3	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00		
1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (laporan)	36	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00	12	35.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawasan														
Terlaksananya Pendampingan dan Pembinaan	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	0	2	170.000.000,00	2	170.000.000,00	2	170.000.000,00	2	170.000.000,00	2	170.000.000,00		
	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Orang)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	0	120		120		120		120		120			
Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
1.05.02.2.01.0010 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP bagi Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Orang)	0	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00		
1.05.02.2.01.0013 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	0	120	35.000.000,00	120	35.000.000,00	120	35.000.000,00	120	35.000.000,00	120	35.000.000,00		
1.05.02.2.01.0014 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	0	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
Terlaksananya Sarana/Prasarana Trantibum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	20	1	220.000.000,00	1	220.000.000,00	1	220.000.000,00	1	220.000.000,00	1	220.000.000,00		
1.05.02.2.01.0018 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentrman dan Ketertiban Umum				220.000.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Keteritban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Keteritban Umum yang Tersedia (Unit)	20	1	220.000.000,00	1	220.000.000,00	1	220.000.000,00	1	220.000.000,00	1	220.000.000,00		
Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada	Capaian masyarakat yang tereduksi perda/perkada (%)	100	100	265.000.000,00	100	245.000.000,00	100	260.000.000,00	100	245.000.000,00	100	260.000.000,00		
	Persentase Kepatuhan Terhadap Perda dan Perkada (%)	100	100		100		100		100		100			
1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				205.000.000,00		190.000.000,00		205.000.000,00		190.000.000,00		205.000.000,00		
Tersedianya SOP Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (dokumen)	0	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00		
1.05.02.2.02.0005 - Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (dokumen)	0	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00		
1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				25.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	4	1	25.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00		
Terlaksananya Pengawasan Perda/Perkada	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	8	12	30.000.000,00	14	25.000.000,00	16	30.000.000,00	18	25.000.000,00	20	30.000.000,00		
1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				30.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		
TTerlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	8	12	30.000.000,00	14	25.000.000,00	16	30.000.000,00	18	25.000.000,00	20	30.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pelanggaran Perda/Perkada	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (laporan)	120	225	30.000.000,00	250	25.000.000,00	275	30.000.000,00	300	25.000.000,00	325	30.000.000,00		
1.05.02.2.02.0004 - Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				30.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (laporan)	120	225	30.000.000,00	250	25.000.000,00	275	30.000.000,00	300	25.000.000,00	325	30.000.000,00		
Terlaksananya Yustisi Terhadap Perda/Perkada	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	12	12	110.000.000,00	12	110.000.000,00	12	110.000.000,00	12	110.000.000,00	12	110.000.000,00		
	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)	12	12		12		12		12		12			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.05.02.2.02.0008 - Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah				85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		
Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)	12	12	85.000.000,00	12	85.000.000,00	12	85.000.000,00	12	85.000.000,00	12	85.000.000,00		
1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	12	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00		
1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				60.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
Terlaksananya peningkatan kapasitas PPNS	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)	0	1	60.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (Laporan)	0	12		12		12		12		12			
1.05.02.2.03.0002 - Pembentukan Sekretariat PPNS				20.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terbentuknya Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS (Dokumen)	0	1	20.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
1.05.02.2.03.0004 - Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)	0	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
1.05.02.2.03.0005 - Dukungan Operasional Sekretariat PPNS				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS (Laporan)	0	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00		
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				1.925.000.000,00		1.955.000.000,00		1.925.000.000,00		1.955.000.000,00		1.925.000.000,00		
Meningkatnya Pencegahan, Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan jiwa (non kebakaran) (%)	100	100	1.925.000.000,00	100	1.955.000.000,00	100	1.925.000.000,00	100	1.955.000.000,00	100	1.925.000.000,00	1.05.0.00.0.00.01.000 0 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.530.000.000,00		1.555.000.000,00		1.530.000.000,00		1.555.000.000,00		1.530.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	0	100	1.370.000.000,00	100	1.395.000.000,00	100	1.370.000.000,00	100	1.395.000.000,00	100	1.370.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	2	1		1		1		1		1			
1.05.04.2.01.0001 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	0	100	70.000.000,00	100	70.000.000,00	100	70.000.000,00	100	70.000.000,00	100	70.000.000,00		
1.05.04.2.01.0004 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00		
1.05.04.2.01.0005 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				50.000.000,00		75.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)	0	5	50.000.000,00	5	75.000.000,00	5	50.000.000,00	5	75.000.000,00	5	50.000.000,00		
1.05.04.2.01.0017 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	2	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.000.000.000,00		
Terlaksananya pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	0	2	125.000.000,00	2	125.000.000,00	2	125.000.000,00	2	125.000.000,00	2	125.000.000,00		
	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran (laporan)	0	3		3		3		3		3			
1.05.04.2.01.0007 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	0	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
1.05.04.2.01.0012 - Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran (laporan)	0	3	75.000.000,00	3	75.000.000,00	3	75.000.000,00	3	75.000.000,00	3	75.000.000,00		
1.05.04.2.01.0019 - Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga (Keluarga)	0	300	35.000.000,00	300	35.000.000,00	300	35.000.000,00	300	35.000.000,00	300	35.000.000,00		
1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				60.000.000,00		65.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen)	250	250	60.000.000,00	250	65.000.000,00	250	60.000.000,00	250	65.000.000,00	250	60.000.000,00		
	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen)	250	250		250		250		250		250			
1.05.04.2.02.0001 - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				30.000.000,00		35.000.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen)	250	250	30.000.000,00	250	35.000.000,00	250	30.000.000,00	250	35.000.000,00	250	30.000.000,00		
1.05.04.2.02.0002 - Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen)	250	250	30.000.000,00	250	30.000.000,00	250	30.000.000,00	250	30.000.000,00	250	30.000.000,00		
1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	0	4	110.000.000,00	4	110.000.000,00	4	110.000.000,00	4	110.000.000,00	4	110.000.000,00		
	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	300	300	35.000.000,00	300	35.000.000,00	300	35.000.000,00	300	35.000.000,00	300	35.000.000,00		
1.05.04.2.04.0002 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran				45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	0	4	45.000.000,00	4	45.000.000,00	4	45.000.000,00	4	45.000.000,00	4	45.000.000,00		
1.05.04.2.04.0003 - Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Dokumen yang Memuat SKKL Pada Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar (Dokumen)	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia				225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		
Terlaksananya Kegiatan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Laporan)	0	12	225.000.000,00	12	225.000.000,00	12	225.000.000,00	12	225.000.000,00	12	225.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis (Unit)	133	10		10		10		10		10			
Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan)	12	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00		
1.05.04.2.05.0004 - Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan)	0	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.05.04.2.05.0005 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Sesuai dengan Standar Teknis (Unit)	133	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00		
1.05.04.2.05.0006 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran				70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Laporan)	0	12	70.000.000,00	12	70.000.000,00	12	70.000.000,00	12	70.000.000,00	12	70.000.000,00		

4.3. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;

Kebijakan penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) yang merupakan urusan wajib pemerintahan berkaitan dengan pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tidak terlepas dari dokumen yang berisi data jumlah gangguan, jumlah pelanggar, jenis pelanggaran, jumlah peraturan, hingga pemetaan daerah rawan gangguan Trantibum Linmas.

Permasalahan selama ini, bahwa dokumen tersebut belum tersusun secara sistematis, terintegrasi dan valid, sehingga sering menimbulkan kesimpangsiuran/inkonsistensi data. Selain itu, belum ada Satu Data yang bisa disajikan untuk memetakan daerah rawan gangguan Trantibumlinmas di Kalimantan Utara sebagai dasar penyusunan kebijakan penyelenggaraan Trantibumlinmas. Selanjutnya pengaduan masyarakat/instansi terhadap adanya gangguan Trantibumlinmas belum bisa dipantau penanganannya, mulai proses akhir diterimanya pengaduan, proses tindak lanjut, hingga kasus tersebut selesai.

Dari permasalahan tersebut diatas perlu ditingkatkannya integrasi antar perangkat daerah dan masyarakat Kota Tarakan guna mewujudkan Tarakan yang aman tertib dan tentram. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Tarakan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan melaksanakan Program Peningkatan Ketertiban Umum dan ketentraman dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah Kota Tarakan sesuai visi dan misi Walikota Tarakan tahun 2025 - 2029. adapun program dan kegiatan yang dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini,

Tabel 4.4

Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kota Tarakan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
	pemberdayaan rukun tetangga : Pos Kamling	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.05.02.2.01.0018 Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	

4.4. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;

Tabel 4.5

Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra Pd Satpol Pp Dan Pmk Kota Tarakan

INDIKATOR	BASELINE	TARGET TAHUN						KET.
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Persentase Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang Terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Persentase Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat		70%	75%	78%	80%	85%	90%	
Persentase Kasus Kebakaran yang tertangani dalam waktu tanggap (respon time)	93.30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (Non Kebakaran)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Nilai SAKIP	76.67	76.7	76.73	76.76	76.79	76.82	76.85	
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Satpol PP dan PMK		94,91	94,93	94,95	94,97	94,99	95	

4.5. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra Satpol PP Dan PMK
Kota Tarakan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	IKK								
1	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	
3	Jumlah PPNS pada Satpol PP	Orang	6	8	10	12	14	15	
4	Presentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	100	100	100	100	100	100	
5	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	

BAB V PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan Tahun 2025–2029 ini disusun sebagai acuan akhir dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selama lima tahun ke depan, dalam rangka mendukung visi, misi, dan arah pembangunan Kota Tarakan. Renstra ini menjadi pedoman strategis dalam perencanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil (outcome), serta mencerminkan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan Urusan Kebakaran.

Penyusunan rancangan akhir ini telah mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk evaluasi terhadap kinerja periode sebelumnya, isu-isu strategis yang berkembang, serta dinamika sosial yang memerlukan perhatian khusus dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai garda terdepan dalam penegakan Perda dan Perkada dan Penyelenggaraan Urusan Kebakaran.

Dengan disusunnya Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tarakan Tahun 2025-2029 ini, dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, dengan memperhatikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program-program prioritas yang telah ditetapkan, untuk mencapai target kinerja penyelenggaraan bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan urusan kebakaran.

22. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan Tahun 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan tahapan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, setiap perangkat daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai pedoman dalam mencapai visi, misi dan tujuan perangkat daerah, serta untuk merespons perkembangan dan tantangan di masa mendatang yang terintegrasi dan selaras dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan juga sebagai pedoman kerja lima tahunan perangkat daerah, serta menjadi instrumen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penyusunan Dokumen Rencana Strategis ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 359 yang sejalan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, dimana proses penyusunan Renstra Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2025-2029 dilakukan dengan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak penyusunan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025-2029.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah selama lima tahun. Renstra disusun berdasarkan RPJMD dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Fungsi Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah
- b. Menjadi alat ukur kinerja perangkat daerah berdasarkan target yang ditetapkan
- c. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah
- d. Menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (RKT)
- e. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi karena merupakan dokumen publik.

Dalam konteks Kota Tarakan, visi pembangunan daerah tahun 2025–2029 yang diusung oleh Kepala Daerah Terpilih adalah “Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Cerdas yang bertumpu pada sektor Jasa, Perdagangan, Perikanan Kelautan, dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Maju menuju Masyarakat Sejahtera.” Visi tersebut dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi

pembangunan daerah, yang salah satunya di misi keempat adalah “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif dan nasional serta Menjaga Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman Kota” menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, beroperasi sesuai nilai-nilai kebangsaan dan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib di Kota Tarakan.

Sebagai perangkat daerah yang memegang peran strategis dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, Bappeda Litbang memiliki tanggung jawab besar untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, fokus sasaran dalam misi ini adalah penguatan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang diukur melalui indikator SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Selama periode 2019–2024, Bappeda Litbang Kota Tarakan berhasil memperoleh nilai SAKIP 80,74 dengan predikat “A” dalam evaluasi SAKIP dari Inspektorat Kota Tarakan nomor: 700.1.2.1/3/VI/2025/LHE tanggal 4 Juni 2025 berdasarkan LHE Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan Tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari seluruh perangkat daerah, termasuk Bappeda Litbang, dalam mendukung pengelolaan pembangunan yang efektif, efisien, dan berbasis hasil (*result-based management*).

Capaian tersebut menjadi pijakan penting dalam penyusunan Renstra Bappeda Litbang tahun 2025–2029. Dokumen ini disusun tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga sebagai strategi untuk memperkuat peran Bappeda dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan, termasuk tuntutan akan integrasi sistem digital, pengelolaan data yang adaptif, serta kolaborasi lintas sektor yang semakin kompleks.

Gambar 1.1.

Keterkaitan Tahap Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD



Renstra Bappeda Litbang Kota Tarakan memiliki keterkaitan erat secara vertikal dan horizontal dengan dokumen perencanaan lainnya (Gambar 1.1). Secara vertikal, Renstra ini merupakan penjabaran langsung dari RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025–2029, khususnya dalam misi keempat yang menekankan Transformasi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik berbasis Digital. Renstra Bappeda Litbang Kota Tarakan juga mengacu pada Renstra Bappenas dan Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara sebagai upaya memastikan sinergi kebijakan dan arah pembangunan antar level pemerintahan,

khususnya dalam isu strategis lintas wilayah dan prioritas nasional yang diturunkan ke daerah.

Sementara itu, secara horizontal, Renstra Bappeda Litbang menjadi pedoman utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Bappeda Litbang. Renja disusun setiap tahun sebagai penjabaran operasional dari Renstra, mencakup target tahunan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dibiayai oleh APBD, sehingga memastikan kesinambungan antara rencana jangka menengah dan pelaksanaan tahunan. Dengan demikian, keterpaduan antara RPJMD, Renstra, dan Renja menjadi kunci dalam menjaga arah pembangunan yang terencana, terukur, dan berkelanjutan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA LITBANG) Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029;
19. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2025- 2029 adalah untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan di lingkungan Bappeda Litbang guna mendukung visi dan misi pembangunan Pemerintah Kota Tarakan. Rencana Strategis ini juga dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai serta arah perubahan yang diharapkan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025–2029.

Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan antara lain:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Bappeda Litbang dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan berdasarkan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029;
- b. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Bappeda Litbang Kota Tarakan dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah;
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas Bappeda Litbang;
- d. Mempermudah monitoring dan evaluasi kinerja Bappeda Litbang.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan 2025 – 2029 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD 2025–2029
- 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Renstra PD 2025 – 2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN SASARAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra PD
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

BAB II GAMBARAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGSI

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Peraturan Daerah 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Nomenklatur Organisasi Bappeda Litbang Kota Tarakan mengalami perubahan menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 68 tahun 2021, telah ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan.

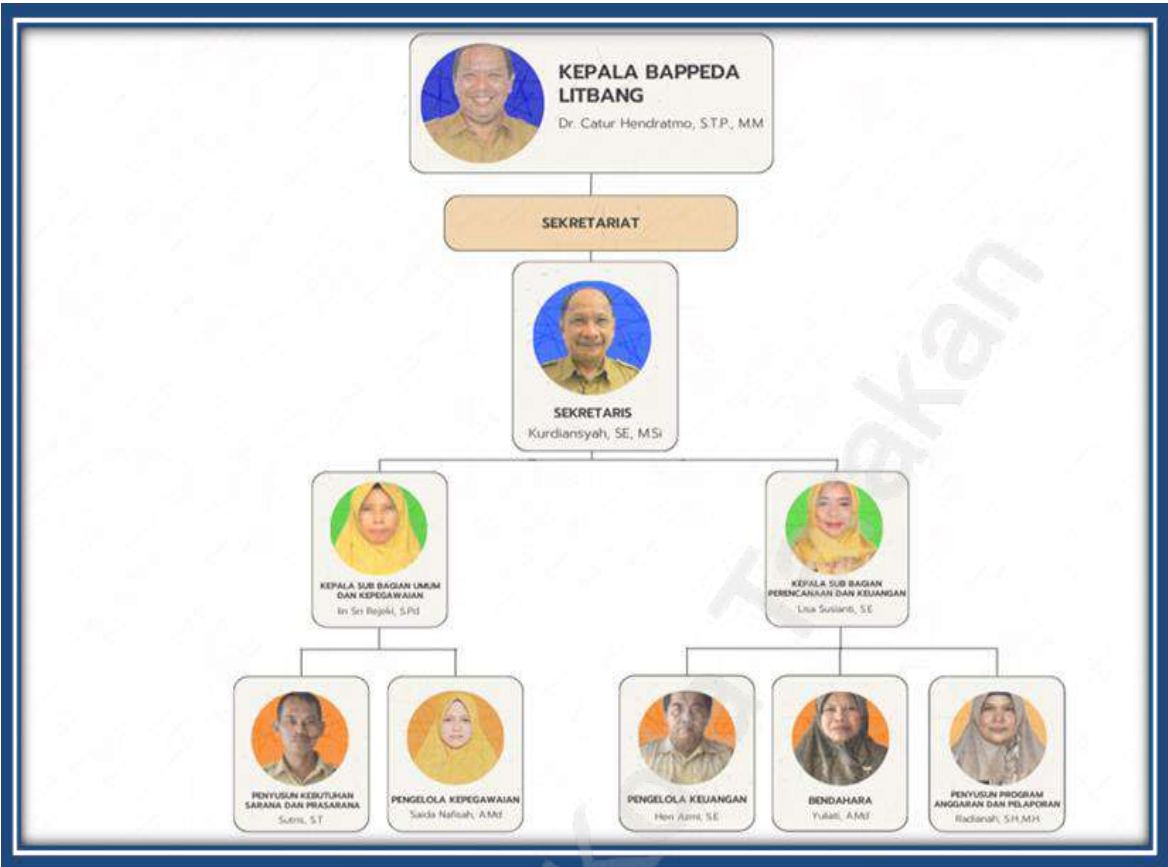
Tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota nomor 80 tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota Tarakan melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bappeda menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang perencanaan pemerintahan, kesejahteraan rakyat, sumber daya manusia, infrastruktur sumber daya alam, ekonomi, penelitian dan pengembangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang perencanaan pemerintahan, kesejahteraan rakyat, sumber daya manusia, infrastruktur sumber daya alam, ekonomi, penelitian dan pengembangan;
- c. Pembantuan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pemerintahan, kesejahteraan rakyat, sumber daya manusia, infrastruktur sumber daya alam, ekonomi, penelitian dan pengembangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah dibidang perencanaan pemerintahan, kesejahteraan rakyat, sumber daya manusia, infrastruktur sumber daya alam, ekonomi, penelitian dan pengembangan;
- e. Pelaksanaan administrasi Badan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.1 Susunan Organisasi

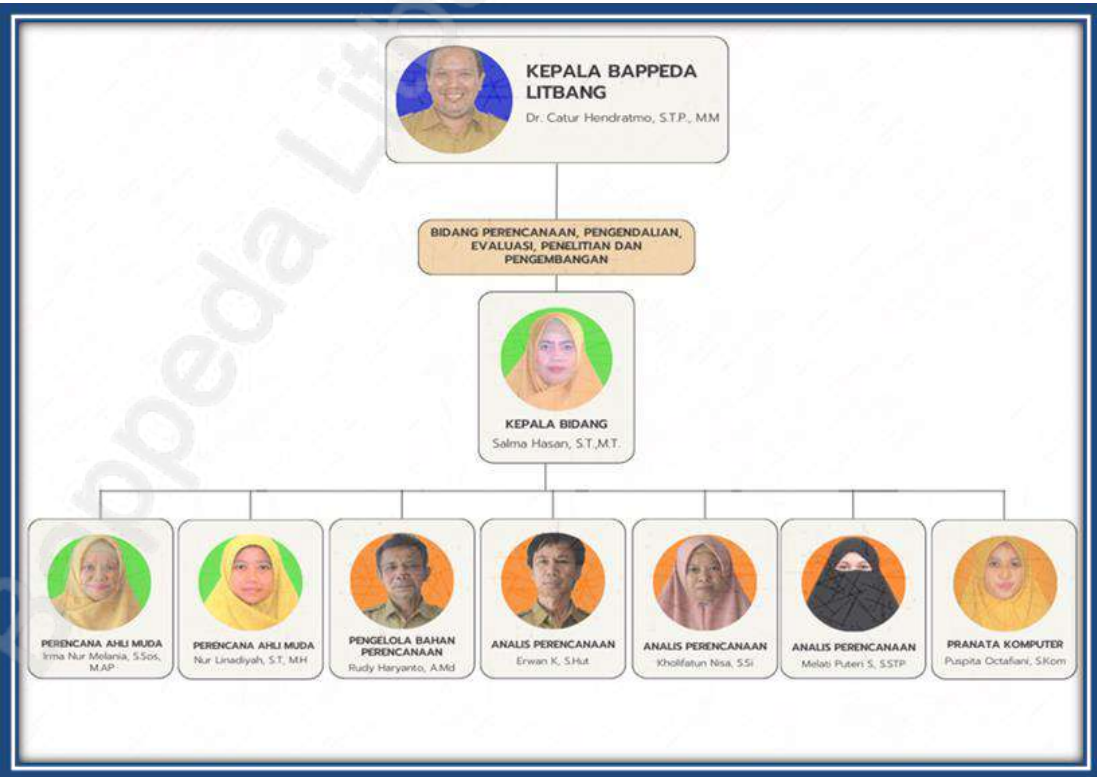
Tugas Pokok Dan Fungsi Bappeda Litbang diatur Dalam Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 68 tahun 2021, telah ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan, yaitu terdiri atas :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.



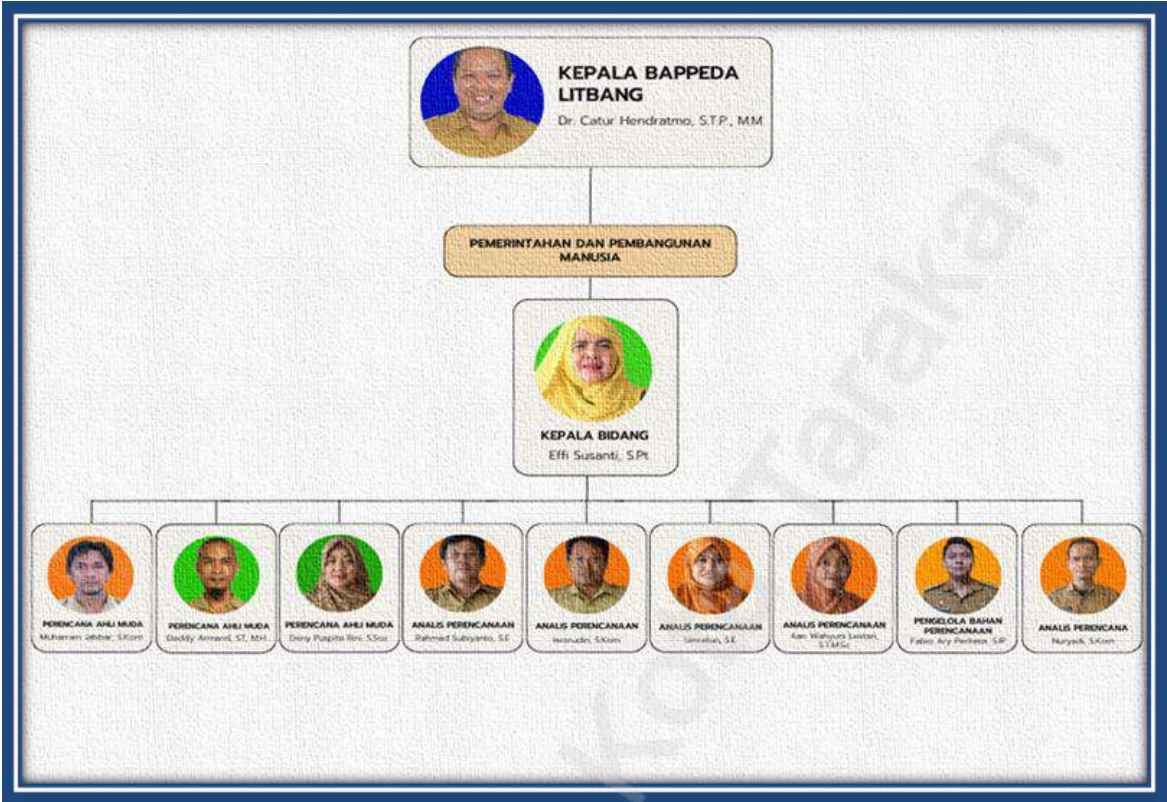
Gambar 2.1
Bagan Struktur Sekretariat Bappeda Litbang

3. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan yang terdiri dari ;
- a. Jabatan Fungsional
 - b. Jabatan Pelaksana



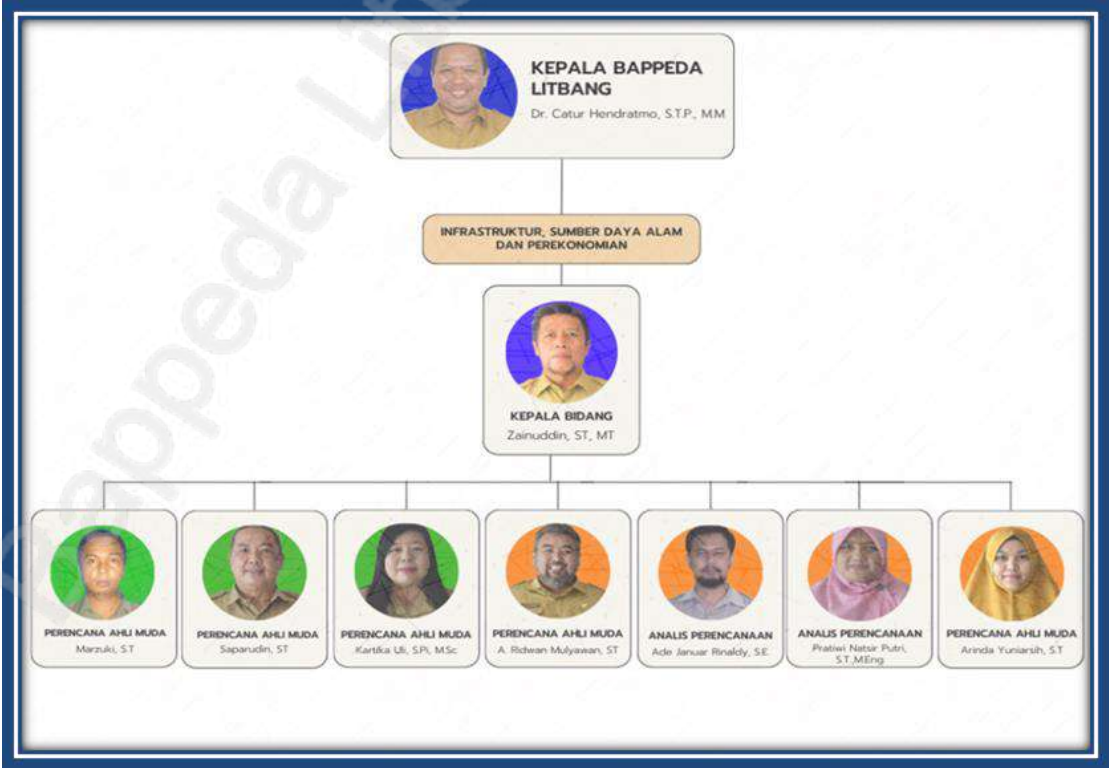
Gambar 2.2
Bagan Struktur Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan

4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang terdiri dari;
- a. Jabatan Fungsional
 - b. Jabatan Pelaksana



Gambar 2.3
Bagan Struktur Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

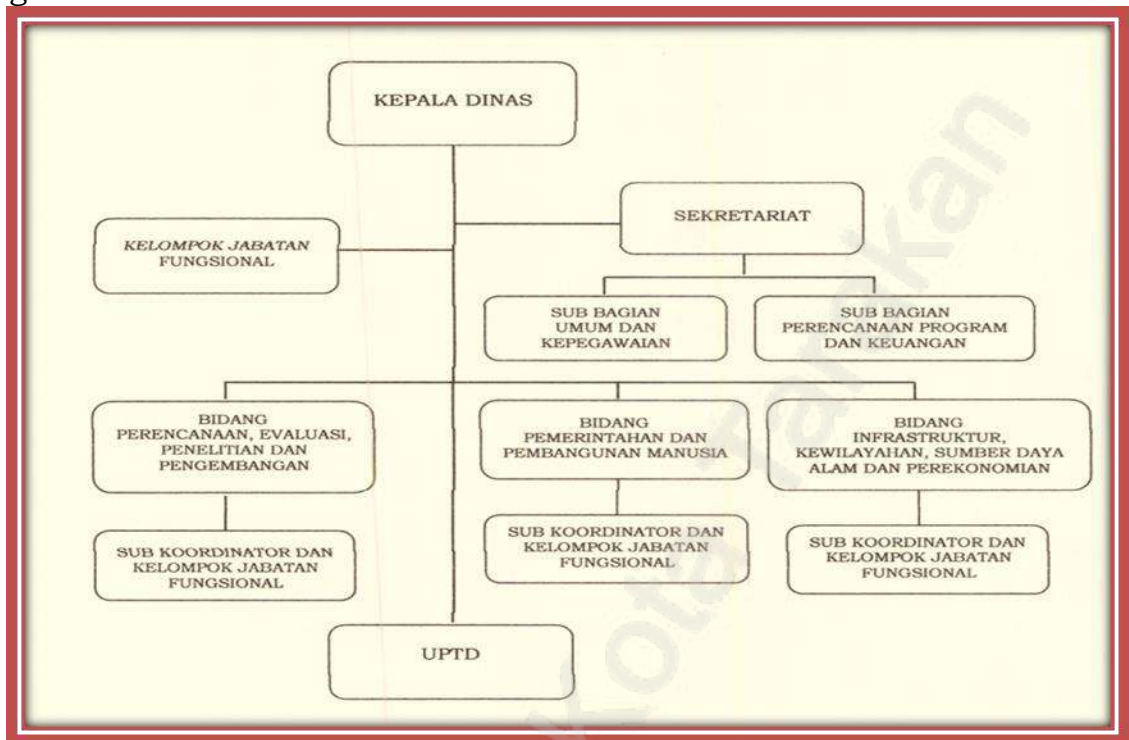
5. Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Sumber Daya Alam dan Perekonomian yang terdiri dari ;
- a. Jabatan Fungsional
 - b. Jabatan Pelaksana



Gambar 2.4
Bagan Struktur Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Sumber Daya Alam dan Perekonomian

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun susunan organisasi Bappeda Litbang dapat dilihat pada gambar bagan di bawah ini :



Gambar 2.5
Bagan Struktur Organisasi Bappeda Litbang

Kepala mempunyai tugas:

- Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkondisikan dan bertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Sekretaris mempunyai tugas:

- Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

Sekretaris dalam menjalankan tugasnya di bantu oleh:

- 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan memberikan dukungan administrasi umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.
- 2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:
 - Melaksanakan Sebagian tugas Sekretariat dalam koordinasi kegiatan Badan, kordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran dan pengkoordinasian pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas:

- Melaksanakan Sebagian tugas Badan di bidang Penyusunan Rencana, Pelaksanaan Rencana, Penetapan Rencana, Evaluasi Rencana serta Penelitian, Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas:

- Melaksanakan Sebagian tugas Badan di bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang menjadi kewenangan Daerah.

Kepala Bidang Infrastruktur, Kewilayahan, Sumber Daya Alam, SDA dan Perekonomian mempunyai tugas:

- Melaksanakan Sebagian tugas Badan di bidang Perencanaan Infrastruktur, Kewilayahan, SDA dan Perekonomian yang menjadi kewenangan Daerah.

Serta Kelompok Jabatan Fungsional:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional sesuai dengan jenjang jabatannya
- b. Kelompok Jabatan Fungsional melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari beberapa pejabat fungsional dapat diberi tugas tambahan untuk melaksanakan tugas sebagai Sub Koordinator melalui penetapan surat tugas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

2.1.2. Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan
2.1.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya Aset utama yang dimiliki oleh Bappeda Litbang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah Sumber Daya Manusia jumlah ASN Bappeda Litbang pada tahun 2024 berjumlah 33 (tiga puluh tiga) orang Aparatur Sipil Negara dan 6 (enam) orang tenaga kontrak. Berdasarkan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia Bappeda Litbang Kota Tarakan merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu dan pangkat/golongan kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029.

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Bappeda Litbang Kota Tarakan Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	15	18	33
2	Tenaga Kontrak Kerja	5	1	6
Total		20	19	39

Pada Tabel 2.1, berdasarkan data jumlah pegawai menurut status kepegawaian dan jenis kelamin, diketahui bahwa total pegawai adalah sebanyak 33 orang, terdiri dari 15 laki-laki (46%) dan 18 perempuan (54%). Komposisi ini menunjukkan bahwa perempuan masih mendominasi keseluruhan pegawai di lingkungan ini.

Selain itu, status kepegawaian Tenaga Kontrak Kerja terdiri dari

laki-laki sebanyak 5 orang (84%) dan 1 perempuan (16%).
Komposisi dan jumlah Aparatur Sipil Negara pada unit kerja Bappeda Litbang Kota Tarakan berdasarkan tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2 Data Aparatur Sipil Negara dan Non ASN Di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan Berdasarkan tingkat pendidikan per 31 Oktober 2024

No.	BAGIAN / BIDANG	JUMLAH ASN / NON ASN	L	P	TINGKAT PENDIDIKAN							
					SD	SLTP	SLTA	D-3	D-4	S1	S2	S3
1	Kepala Badan	1	1									1
2	Sekretariat	8	3	5				2		4	2	
3	Bidang Perencanaan, Pengendalain, Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan	8	2	6				1	1	3	3	
4	Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	8	4	4						7	1	
5	Bidang Infrastruktur Kewilayahan, Sumber Daya Alam Dan Perekonomian	8	5	3						4	4	
6	Penjaga Kantor (Tenaga Kontrak)	2	2			1	1					
7	Petugas Kebersihan (Tenaga Kontrak)	3	2	1	1		2					
8	Caraka	1	1				1					
	Total	39	20	19	1	1	4	3	1	18	10	1

Pada Tabel 2.2, mayoritas pegawai telah menempuh pendidikan tinggi, dengan 18 orang (54,54%) berpendidikan sarjana dan 11 orang (33,33%) telah melanjutkan ke jenjang pascasarjana (S-2 dan S-3) serta D-3 dan D-4 sejumlah 4 orang atau (12.12%). Hal ini menunjukkan bahwa SDM di Bappeda Litbang Kota Tarakan termasuk berkualifikasi tinggi dan memiliki potensi untuk ditempatkan pada peran-peran strategis atau pengambilan keputusan. Sedangkan pendidikan menengah hanya mencakup 4 orang atau (12,12%) dari total pegawai.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bappeda Litbang dalam menunjang program pembangunan daerah Kota Tarakan didukung oleh Aparatur Sipil Negara pada berdasarkan Pangkat Golongan sebagaimana tersebut pada tabel ini :

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Bappeda Litbang Kota Tarakan Berdasarkan Pangkat Golongan

No	Status Kepegawaian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	<i>Golongan IV</i>	3	5	8
	IV/D			
	IV/C	1	0	1
	IV/B	1	0	1
	IV/A	1	5	6
2	<i>Golongan III</i>	12	13	25
	III/D	8	7	15
	III/C	2	2	4
	III/B	1	3	4
	III/A	1	1	2
3	<i>Golongan II</i>			
	II/D	0	0	0
	II/C	0	0	0
	II/B	0	0	1
Total		15	18	33

Pada Tabel 2.3, Golongan III merupakan golongan yang paling dominan, menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berada di tahap menengah karir. Lebih rinci, mayoritas pegawai berada di Golongan III/D (75,75%), menandakan banyak pegawai telah mencapai ujung jenjang golongan ini dan menunggu promosi ke Golongan IV. Selain itu, perempuan mendominasi semua jenjang golongan, terutama pada Golongan III dan pada Golongan tertinggi (IV) sejumlah 5 (lima) orang. Laki-laki lebih banyak berada pada Golongan Menengah (III), namun belum banyak yang berada di Golongan IV hanya berjumlah 3 (tiga) orang pada Golongan IV.

Tabel 2.4 Komposisi Pegawai Bappeda Litbang Kota Tarakan Berdasarkan Eselon

No	Jabatan	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1.	Kepala (Eselon II/a)	1	0	1
2.	Sekretaris (Eselon III/a)	1	0	1
3.	Kepala Bidang (Eselon III/a)	1	2	3
4.	Kepala Sub Bagian (Eselon IV/a)	0	2	2
	Jumlah	3	4	

Selain sumber daya manusia, perlengkapan juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target kinerja berdasarkan RPJM Kota Tarakan Tahun 2025-2029.

2.1.2.2. Aset Sarana dan Prasarana Penunjang

Aset sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan Bappeda Litbang Kota Tarakan adalah berupa gedung, kendaraan roda dua, kendaraan roda empat, peralatan dan mesin serta asset tetap lainnya.

Pada Tabel 2.5 disajikan rincian mengenai perlengkapan yang

dimiliki Bappeda Litbang Kota Tarakan.

Tabel 2.5 Daftar Aset Bappeda Litbang Kota Tarakan

No.	Nama Barang	Jumlah	Keterangan	
			Baik	Rusak
1	Kendaraan Roda 4	7	7	0
2	Kendaraan Roda 2	8	8	0
3	AC Split	26	23	3
4	Alat Penghancur Kertas	4	4	0
5	CCTV	8	3	5
6	Dispenser	6	5	1
7	Facsimile	6	1	5
8	Filing Besi	10	10	0
9	Filling Kayu	1	1	0
10	P.C / Computer All In One	23	26	7
11	Mini Computer	15	14	1
12	Printer	23	0	0
13	Scanner	6	5	1
14	Televisi	7	6	1
15	Kursi Kerja	37	30	7
16	Kursi Rapat	88	86	2
17	Buffet Kayu	6	0	0
18	Lemari Kayu	19	18	1
19	Lemari Arsip	4	0	0
20	Meja Kerja	36	0	0
21	Meja Rapat	26	0	0
22	White Boart	3	0	0

2.1.3. Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Kinerja pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan berdasarkan pengukuran terhadap indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Dokumen Rencana Strategis Perubahan Tahun 2019-2024 seiring dengan perubahan RPJMD Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024.

2.2. Kondisi Umum Pelayanan

Sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Bappeda Litbang berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 68 Tahun 2021, Bappeda Litbang merupakan unsur perencanaan dan penelitian penyelenggaraan pemerintah daerah, secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian.

Fungsi utama Bappeda Litbang Kota Tarakan dalam perencanaan pembangunan adalah menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan yang dihasilkan, antara lain :

1. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Murni dan RKPD Perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota, sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni dan APBD Perubahan;
2. Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian pembangunan

- daerah (antara lain LKPJ, laporan monev, dan laporan evaluasi dokumen perencanaan);
3. Dokumen-dokumen kajian strategis perencanaan pembangunan di Daerah Kota Tarakan yang meliputi dokumen kajian bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang sarana prasarana serta dokumen perencanaan bidang pemerintahan.sesuai dengan Isu dan Permasalahan Daerah
 4. Dokumen Analisis Data dan Statistik guna menunjang perencanaan pembangunan yang berkualitas, yang bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kota Tarakan;
 5. Dokumen hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah

Pelayanan di bidang perencanaan dan penelitian pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), untuk itu Bappedalitbang Wajib menyusun Dokumen-dokumen tersebut disusun setiap tahun dan disosialisasikan kepada seluruh stakeholders (pemangku kepentingan) pembangunan di Kota Tarakan.

Selain itu juga disusun dokumen–dokumen yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, yaitu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tarakan yang berlaku selama 20 tahun serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan yang disusun selama 5 tahun sekali bersamaan dengan masa jabatan Kepala Daerah. Semua dokumen tersebut menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota Tarakan serta stakeholders dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan lainnya maupun dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Tarakan.

Fungsi lain dari Bappeda Litbang Kota Tarakan adalah sebagai pelaksana monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan. Pengendalian dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan. Bappeda Litbang menghimpun dan menganalisis hasil monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator kinerja sasaran yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan. Indikator kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit), dan dampak (impact).

Monitoring, evaluasi dan pengendalian Bappeda Litbang Kota Tarakan mempermudah dalam pencapaian target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu berdasarkan Renstra.

2.2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Bappeda Litbang merupakan capaian keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan penyusunan dokumen perencanaan. Tingkat kinerja pelayanan Bappeda Litbang dapat diukur berdasarkan sasaran dan target yang tertuang di dalam dokumen renstra Bappeda Litbang dan RPJMD Kota Tarakan periode sebelumnya Tahun 2019-2024. Sasaran dan target dimaksud adalah indikator kinerja yang sesuai dan bersumber dari MDGs, target IKK dan target indikator lainnya. Berdasarkan tupoksi Bappeda Litbang maka indikator yang dipergunakan untuk mengukur kinerja adalah Indikator Kinerja Kunci (IKK) sedangkan NSPK belum ada di dalam indikator pengukuran kinerja Bappeda

Litbang.

Pada tahun 2020–2021, indikator yang digunakan meliputi: persentase capaian program daerah di RKPD; konsistensi program RKPD dengan RPJMD; konsistensi program renstra PD dengan RPJMD; konsistensi program renja PD dengan renstra PD; konsistensi program renja PD dengan RKPD; persentase penyelesaian dokumen perencanaan daerah yang disampaikan tepat waktu; persentase data/informasi pembangunan yang dibutuhkan dapat tersedia dan tepat waktu; persentase aparatur yang mempunyai kompetensi perencanaan; nilai/predikat AKIP oleh APIP dan persentase temuan yang ditindak lanjuti. terpenuhinya persentase *policy brief* bidang perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan Wali Kota dalam perumusan kebijakan. Seluruh indikator tersebut menunjukkan capaian sebesar 100%, yang menandakan bahwa realisasi telah sepenuhnya memenuhi target.

Memasuki tahun 2022-2023, indikator kinerja Bappeda Litbang mengalami perubahan, menjadi: Persentase layanan penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi; persentase ketersediaan dokumen perencanaan Daerah yang tepat waktu; persentase konsistensi RPJMD, RKPD, RENSTRA dan Renja OPD; dan Persentase implementasi rencana kelitbangan. Sebagian besar indikator ini menunjukkan capaian yang sangat baik, dengan realisasi 100%, keberhasilan ini diperoleh berkat pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan dan kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

Tahun 2024, indikator kinerja Bappeda Litbang yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Bappeda Litbang Kota Tarakan tahun 2024 disusun dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategis Perubahan Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Kerja Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2024 selain itu terdapat rekomendasi untuk perbaikan indikator kinerja strategis berdasarkan evaluasi SAKIP Kota tahun 2023 sehingga indikator kinerja menjadi : Indeks sinergitas; indeks kualitas perencanaan; persentase Implementasi rencana kelitbangan; predikat AKIP dan nilai IKM.

Khusus untuk indikator nilai komponen perencanaan kinerja dalam SAKIP, meskipun realisasinya belum mencapai 100%, pencapaian tersebut menunjukkan tren yang positif dan memberikan keyakinan bahwa dengan upaya yang lebih terstruktur dan kolaboratif, target maksimal sangat mungkin dicapai. Hal ini terbukti dengan capaian tahun 2024, di mana Bappeda Litbang meraih predikat SAKIP (A) dengan nilai 80,74.

Keberhasilan yang dicapai oleh Bappeda Litbang Kota Tarakan didukung oleh sinergi yang kuat antara perencana, dan pengambil kebijakan di lingkungan Bappeda Litbang, serta adanya mekanisme koordinasi yang terstruktur dan berkelanjutan, terutama dengan perangkat daerah yang lain. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi perencanaan dan pelaporan kinerja turut mempercepat proses penyusunan dokumen dan penyampaian informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan. Kapasitas SDM yang mumpuni serta komitmen pimpinan daerah dalam mendorong *evidence-based policy* juga menjadi faktor penentu dalam optimalnya pemanfaatan kebijakan yang disusun.

Sasaran dan target dimaksud adalah indikator kinerja yang sesuai dan bersumber dari MDGs, target IKK dan target indikator lainnya. Berdasarkan tupoksi Bappeda Litbang maka indikator yang dipergunakan untuk mengukur kinerja adalah Indikator Kinerja Kunci (IKK) sedangkan NSPK belum ada di dalam indikator pengukuran kinerja Bappeda Litbang. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang selama lima tahun kebelakang (N-5) merupakan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil

pelaksanaan Renstra dan Renja Bappeda Litbang. Pencapaian kinerja Bappeda Litbang Kota Tarakan tidak dapat dilepaskan dari adanya sumberdaya yang dimiliki Bappeda Litbang Kota Tarakan baik sumber daya manusia, aset maupun dukungan anggaran yang memadai, dalam rangka implementasi program dan kegiatan yang telah direncanakan, demi pencapaian target dan sasaran berdasarkan Visi dan Misi Tujuan dan Sasaran RPJMD tahun 2025 – 2029. Selanjutnya pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan Renstra periode sebelumnya dengan cara mengukur capaian target kinerja sasaran dan program didapatkan rumusan permasalahan dan potensi yang akan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Renstra Bappeda Litbang pada periode 5 tahun berikutnya.

Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, Bappeda Litbang Kota Tarakan menyusun dan menyajikan capaian kinerja serta capaian anggaran secara periodik seperti yang disajikan pada Tabel 2.5 dan Tabel 2.6.

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang Kota Tarakan

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase ketercapaian indikator sasaran pembangunan pada RPJMD				85 %	90 %	95 %	97 %	98 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Persentase konsistensi RPJMD, RKPD, RENSTRA dan Renja PD				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Persentase Implementasi rencana kelitbangan				n/a	25 %	50 %	75 %	100 %		25 %	50 %	75 %	100 %	n/a	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Nilai IKM				n/a	80	80%	80%	80%			88,30	82,77	85,89	n/a		110,37 %	103,46 %	107,36 %
6	Predikat AKIP				73 (BB)	74 (BB)	74 (BB)	75 (BB)	75 (BB)	69 (BB)	67,24 (B)	77,50 (BB)	78,96 (BB)	80,74 (A)	94,52 %	90,86 %	104,72 %	105,28 %	107,65 %

Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Litbang Kota Tarakan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota		5.416.544.158,00	5,310,364,151	5,668,759,395	6,349,236,972		4.807.712.958	4,919,858,712	5,434,944,355	5,926,365,089		0.89	0.93	0.96	0.93	2.39%	6.40%
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		481.283.782	110,299,901	1,093,850,000	700,794,520		356.466.443	96,525,654	1,042,641,670	686,210,616		0.74	0.88	0.95	0.97	407.31%	453.62%
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah		531.588.950	214,999,660	262,603,490	757,780,790		513.843.500	175,033,963	244,704,049	714,954,913		0.97	0.81	0.93	0.94	-18.71%	-13.07%
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		115.780.600	165,000,000	685,060,000	1,120,641,301		99.992.340	155,955,781	665,004,893	953,690,856		0.86	0.95	0.97	0.85	178.85%	191.19%

KETERANGAN :

Untuk Tahun 2020 Tidak Dapat Dibandingkan Dengan Tahun 2021 S.D 2024, Karena Menyesuaikan Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Perubahan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Periode Tahun 2019-20248

2.2.2. Kelompok Sasaran Layanan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan sesuai tugas dan fungsinya dalam menjalankan pelayanan salah satu faktor yang mempengaruhi adalah sangat perlu menentukan obyek atau target sasaran yang merupakan sarana dalam mencapai tujuan. Sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab sebagai koordinator dalam perencanaan pembangunan daerah, Bappeda Litbang Kota Tarakan hadir sebagai mitra strategis bagi seluruh perangkat daerah. Pelayanan Bappeda Litbang berorientasi pada fasilitasi penyusunan perencanaan yang komprehensif, terukur, dan selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah. Bappeda Litbang menyediakan panduan teknis, data dan informasi yang relevan, serta asistensi dalam merumuskan program dan kegiatan yang efektif dan efisien. Proses konsultasi dan koordinasi yang terbuka dan konstruktif menjadi landasan utama dalam setiap interaksi dengan perangkat daerah, memastikan bahwa setiap usulan program dan kegiatan terintegrasi dengan baik dalam dokumen perencanaan yang holistik.

Lebih dari sekadar penyusunan dokumen, pelayanan Bappeda Litbang Kota Tarakan juga mencakup monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, aktif melakukan pemantauan terhadap progres pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan oleh masing-masing perangkat daerah. Melalui analisis data dan diskusi berkala, Bappeda Litbang memberikan umpan balik yang konstruktif serta rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan berjalan sesuai regulasi dan memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat, serta berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan. Selain beberapa hal tersebut di atas, Bappeda Litbang juga berperan sebagai katalisator inovasi dan pengembangan kapasitas perencanaan di tingkat perangkat daerah. Melalui berbagai forum diskusi, pelatihan, dan pendampingan, Bappeda berupaya meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur perangkat daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembangunan. Dengan demikian, diharapkan setiap perangkat daerah mampu menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Sinergi yang kuat antara Bappeda Litbang dan seluruh perangkat daerah pemerintah Kota Tarakan adalah kunci keberhasilan pembangunan daerah.

Kelompok sasaran layanan Bappeda Litbang Kota Tarakan adalah para pemangku kepentingan internal pemerintah daerah dan mitra strategis pembangunan yang secara langsung menggunakan atau menerima manfaat dari peran Bappeda Litbang dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, serta penelitian dan pengembangan. Selain layanan terhadap perangkat daerah, secara umum Bappeda Litbang memiliki peran terhadap kelompok layanan lainnya seperti pada Tabel berikut :

Tabel 2.8 Kelompok Sasaran Layanan

KELOMPOK SASARAN LAYANAN	PERAN DAN KEPENTINGAN	JENIS LAYANAN BAPPEDA LITBANG
Pemerintah Daerah (Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah)	Pembuat kebijakan tertinggi di daerah yang bertanggung jawab atas arah pembangunan. Membutuhkan dokumen perencanaan yang komprehensif dan akuntabel	Penyusunan, koordinasi, dan fasilitasi dokumen RPJMD dan RKPD; Pelaporan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan yang menggunakan rujukan data yang komprehensif dan akuntabel. Menyiapkan Data dan Informasi sebagai rujukan dalam penentuan kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pelaksanaan pembangunan daerah. Pelaporan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah
Perangkat Daerah (PD) Lainnya	Pelaksana teknis program dan kegiatan pembangunan daerah. Membutuhkan pedoman dan sinkronisasi dalam penyusunan Renstra dan RKPD masing-masing	Bimbingan teknis penyusunan Renstra dan RKPD PD; Koordinasi dan harmonisasi program/kegiatan lintas PD; Verifikasi dan evaluasi dokumen perencanaan PD dan Pembangunan Nasional
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	Lembaga legislatif yang memiliki fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan. Membahas dan menyetujui dokumen RPJMD	Penyediaan data dan informasi terkait rencana pembangunan; Fasilitasi pembahasan dan persetujuan RPJMD
Pemangku Kepentingan (Masyarakat, Akademisi, Swasta, LSM, dll.)	Pihak-pihak yang memiliki kepentingan, aspirasi, dan potensi kontribusi dalam pembangunan daerah. Partisipasi aktif dalam proses perencanaan ditekankan dalam Inmendagri	Fasilitasi forum konsultasi publik dan Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan); Penyebaran informasi rencana pembangunan; Penerimaan masukan dan aspirasi
Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga terkait)	Lembaga pemerintah di tingkat pusat yang merumuskan kebijakan nasional dan mengalokasikan sumber daya. RPJMD daerah harus selaras dengan RPJPN dan RPJMN	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan daerah dengan perencanaan nasional; Pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah

Bappeda Litbang dalam menjalankan fungsi perencanaannya akan selalu berhubungan dengan seluruh perangkat daerah yang ada di Kota Tarakan. Bentuk dukungan dan layanan pada tiap perangkat daerah berbeda berdasarkan tugas dan fungsi dari masing-masing perangkat daerah tersebut. Setiap perangkat daerah akan selalu berinteraksi dengan Bappeda Litbang melalui SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggarannya berupa Renja (Rencana Kerja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Pelaporan untuk memastikan keterpaduan perencanaan dan penganggaran. Selain itu Forum OPD dan Musrenbang juga menjadi ajang sinkronisasi program dan kegiatan baik dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota, provinsi maupun sampai pada tingkat pusat.

Suatu perencanaan yang disusun tanpa memperhatikan dimensi kerangka konsepsional terhadap banyak kasus yang sering menimbulkan permasalahan-permasalahan yang antara lain kurangnya daya guna dan hasil guna dari pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dari pengalaman menunjukkan bahwa tanpa disadari sering muncul kendala-kendala dalam melaksanakan kebijaksanaan pembangunan karena faktor internal dari aparat perencanaan pelaksana, sehingga hasil yang diharapkan tidak mencapai tujuan dan sasaran yang optimal Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna suatu perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BappedaLitbang) memiliki peran sentral sebagai lembaga perencana dalam menentukan muatan-muatan perencanaan yang strategis, mendesak, potensial dan prioritas dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang

dinamis dan partisipasi masyarakat yang terus berkembang maka aparat perencana harus meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga sebagai Pemerintah yang baik.

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis di lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan. Kondisi yang diinginkan dan proyeksinya ke depan adalah merupakan tujuan dari pembangunan baik dalam lingkungan internal Bappeda Litbang maupun lingkungan eksternal Bappeda Litbang yang keseluruhannya tertuju kepada pembangunan daerah di Kota Tarakan. Terwujudnya kondisi kedepan sesuai dengan yang diharapkan, hanya dapat tercapai melalui perencanaan pembangunan yang terkoordinasi sehingga keberhasilan nyata pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat dapat dirasakan, oleh karenanya Bappeda Litbang harus dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara profesional. Untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitas, sinergis, dan kredibilitas. Sesuai dengan mandat yang diberikan, Bappeda Litbang harus memperkuat peran dan fungsinya sebagai perencana dan peneliti agar mencapai tujuan pembangunan daerah. Tujuan dari pembangunan daerah yaitu masyarakat yang adil dan makmur melalui perencanaan pembangunan yang mampu memberikan arah yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan. Namun, dalam perumusan Renstra Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2025-2029 membutuhkan telaahan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi berupa tantangan dan peluang secara internal dan eksternal. Salah satu upaya akhir proses perencanaan adalah produk perencanaan yang berkesinambungan dan dapat menjadi tolok ukur keberhasilan seluruh proses dalam penyusunan proses perencanaan. Oleh karenanya, Bappeda Litbang harus dapat menghasilkan produk perencanaan yang berkualitas melalui pemanfaatan sumber daya atau potensi daerah secara optimal dan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan riil masyarakat. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan.

Dimana satuan kerja perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap atau formalitas dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. si terhadap kebenaran pernyataan di atas. Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam

bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut di atas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini yang membantu Kepala Daerah dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya.

Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance, sebagaimana yang ingin diwujudkan dalam Misi IV RPJMD Kota Tarakan 2025-2029 adalah “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif serta menjaga stabilitas ketertiban dan ketentraman kota” dengan tujuan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan. Dalam suatu kegiatan perencanaan pembangunan merupakan kunci utama dari siklus manajemen pembangunan. Perencanaan pembangunan harus berjalan secara obyektif, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara optimal dan sesuai dengan harapan.

Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna suatu perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan memiliki peran sentral sebagai lembaga perencana dalam menentukan muatan-muatan perencanaan yang strategis, mendesak, potensial dan prioritas dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan partisipasi masyarakat yang terus berkembang maka aparat perencana harus meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga sebagai Pemerintah yang baik.

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik dilingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis dilingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

Secara umum, pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Litbang Kota Tarakan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan intensitas pelaksanaan tugas yang semakin meningkat. Hal ini menjadi nilai tambah tersendiri bagi Bappeda Litbang namun jika tidak terkelola dengan baik akan menyebabkan semakin bertambahnya beban kerja SDM yang ada. Tantangan yang masih dihadapi Bappeda Litbang Kota Tarakan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Belum maksimalnya partisipasi dan peran masyarakat pemangku kepentingan di Kota Tarakan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan;
2. Belum maksimalnya pelaksanaan mekanisme penjangkaran aspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pembangunan yang dilaksanakan melalui Musrenbang Kota dan Provinsi dengan pelaksanaan penjangkaran aspirasi masyarakat oleh pihak legislatif;
3. Adanya berbagai Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tupoksi Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Masih terdapatnya ketidakselarasan kebijakan antar Lembaga di Pemerintah Pusat;
5. Masih kuatnya peran legislatif dalam mewarnai arah kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Tarakan;
6. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam mendukung proses perencanaan pembangunan;

7. Semakin meningkatnya penegakan hukum disegala bidang pembangunan;
8. Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat meningkatkan kinerja aparatur;
9. Tuntutan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel;
10. Perencanaan dan penganggaran dengan “e-performance based budgeting”. Perencanaan dan penganggaran yang baik adalah yang menganut “e-performance based budgeting” sehingga sepenuhnya menerapkan money follow program dalam perencanaan anggarannya. Dengan demikian perangkat daerah tidak hanya sekedar menghabiskan anggaran namun dapat memberikan hasil / dampak yang mampu memberikan perubahan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
11. Terbatasnya akses masyarakat untuk berperan aktif dalam perencanaan pembangunan, terutama informasi usulan yang terrealisasi pada saat setelah Musrenbang RKPD/KUA-PPAS dan APBD di tetapkan.

Selain tantangan, terdapat pula ancaman dari luar organisasi, yaitu:

- a. Ketidakpastian pendanaan pembangunan daerah sehingga dalam penentuan program prioritas mana yang akan dialokasikan pendanaanya. Hal ini dapat dibantu dengan dukungan pendanaan dari Non APBD (APBN. dan APBD Provins). Keterbatasan anggaran menyebabkan perlunya melakukan prioritas dan melakukan kegiatan dengan efektif dan efisien.
- b. Kondisi eksternal yang terjadi pada saat ini adalah sulitnya pengintegrasian kepentingan Politis, Sosial dan Instisional dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, hal ini dapat dibantu dengan adanya sistem Perencanaan dan Penganggaran yang terintegrasi.
- c. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi oleh dunia usaha, masyarakat dan pemerintah dalam mendukung daya saing daerah. Hal tersebut sangat perlu perhatian dan upaya lebih lanjut dengan dukungan Kepala Daerah serta dinamika tuntutan dan harapan
- d. Belum sinergisnya perencanaan pembangunan dengan adanya ego sektoral perencanaan pembangunan daerah baik pada tingkat daerah dan nasional serta perubahan peraturan perundang- undangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan perlu untuk diatasi dengan berbagai aktivitas koordinasi baik dengan pusat maupun dengan kabupaten kota.

Disamping tantangan tersebut diatas, masih terdapat peluang yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas Bappeda Litbang Kota Tarakan. Adapun beberapa *peluang* dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju dan tak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya;
2. Diterapkannya Permendagri 86 Tahun 2017 dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan di Kota Tarakan diharapkan mampu meningkatkan sinergitas antar dokumen yang disusun;

3. Adanya sarana prasarana yang memadai dan komitmen Kepala Daerah dalam mendukung meningkatkan pelaksanaan tupoksi Bappeda Litbang;
4. Ditetapkannya regulasi terkait Aparatur Sipil Daerah dan regulasi yang mengatur kinerja pegawai diharapkan mampu meningkatkan dan memaksimalkan tupoksi Bappeda Litbang Kota Tarakan;
5. Mengembangkan dan menerapkan manajemen kinerja, yang mengkaitkan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja individu; Manajemen kinerja tersebut mencakup: indikator kinerja lembaga, unit kerja dan individu/pegawai, pengukuran dan evaluasi kinerjanya, serta penerapan penghargaan dan sanksi (reward dan punishment) termasuk penerapan “remunerasi”/tunjangan kinerja secara akuntabel.
6. Penyusunan rencana pembangunan dengan pendekatan penelitian dan pengembangan mendapat dukungan prioritas;
7. Telah dilaksanakannya audit kinerja instansi pemerintah daerah dan penilaian organisasi pemerintah berdasarkan kinerja;
8. Pesatnya perkembangan teknologi informasi di Indonesia.

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis Bappeda Litbang

2.3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan isu strategis. Selain itu isu strategi juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Informasi kunci dimaksud merupakan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan Renstra PD propinsi, telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Dengan menganalisa berbagai sumber informasi secara lengkap, diharapkan diperoleh identifikasi rumusan isu strategis yang tepat dan strategis yang dapat mengantisipasi gap / kesenjangan pelayanan perangkat daerah, dan untuk menentukan tujuan dan sasaran perangkat daerah secara tepat. Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Bappeda Litbang, dilakukan identifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan Bappeda Litbang yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencana pembangunan daerah, Bappeda Litbang bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah pembangunan sekarang dan ke depan di daerah dengan mengacu pada RPJMD Kota Tarakan dan memperhatikan aspirasi dan kondisi objektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan baik faktor internal maupun eksternal dalam pelayanan Bappeda Litbang Kota Tarakan seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.7. Faktor Internal dan Eksternal Pelayanan Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Permasalahan	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi	
		Internal	Eksternal
Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah			
1	Keterbatasan ketersediaan data untuk dijadikan dasar perencanaan yang komprehensif	Kapasitas SDM dalam pengelolaan data belum merata	Kurangnya koordinasi dengan antar lembaga penyedia data
2	Sulitnya menyelaraskan rencana pembangunan antar tingkatan pemerintahan	Perencanaan belum berbasis RPJMD/Renja yang konsisten	Adanya perubahan kebijakan pusat/daerah yang tidak sinkron
3	Tingkat partisipasi aktif pemangku kepentingan yang belum optimal dalam proses perencanaan	Kurangnya mekanisme pelibatan masyarakat dalam musrenbang	Minimnya kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi
4	Rencana pembangunan yang kurang adaptif dengan perubahan	Tidak ada sistem monitoring yang responsif terhadap perubahan	Dinamika global dan nasional (ekonomi, politik, bencana) yang cepat berubah
Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan			
1	Kurangnya mekanisme komunikasi yang efektif antar OPD dalam proses penyusunan perencanaan	Belum optimalnya koordinasi internal dan forum lintas OPD belum berjalan efektif	Minimnya arahan/pedoman teknis dari pemerintah pusat terkait koordinasi OPD
2	Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi	Belum adanya pelatihan yang komprehensif terkait dengan sistem informasi perencanaan	Sistem informasi yang belum terintegrasi antara satu sama lain
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan			
1	Sistem pemantauan pelaksanaan rencana yang belum optimal	Ketiadaan <i>dashboard</i> monitoring yang <i>real-time</i>	Tidak ada pelaporan dari mitra eksternal pelaksana kegiatan
2	Hasil evaluasi kurang optimal dimanfaatkan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan di masa mendatang	Evaluasi tidak ditindaklanjuti dengan rekomendasi perbaikan yang jelas	Minimnya masukan dari stakeholders luar seperti masyarakat dan DPRD
Inovasi dan Pengembangan Daerah			
1	Keterbatasan Sumber Daya untuk Inovasi dan Pengembangan Daerah	Keterbatasan anggaran, terutama dengan adanya Inpres No. 2 Tahun 2025 terkait dengan efisiensi anggaran	Minimnya kolaborasi dengan perguruan tinggi atau sektor swasta
2	Tantangan dalam mengimplementasikan hasil-hasil inovasi menjadi kebijakan atau program	Tidak ada regulasi internal tentang adopsi inovasi	Perubahan regulasi pusat yang membatasi ruang gerak implementasi inovasi

Perumusan Masalah dalam Renstra Bappeda Litbang Kota Traakan yang berfokus dan bersifat makro bagi daerah, kemudian dipersempit pada lingkup tugas dan fungsi Bappeda Litbang Kota Tarakan sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini ;

Tabel 2.8
Tabel Perumusan Masalah

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Belum terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas		
	Masih rendahnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	
		Dokumen perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya selaras dan disusun tepat waktu.
		Belum lengkapnya data perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
		Belum optimalnya implementasi SIPD
		Belum optimalnya koordinasi perencanaan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Belum optimalnya koordinasi perencanaan di bidang Perekonomian dan SDA
		Belum optimalnya koordinasi perencanaan di bidang Infrastruktur
	Masih rendahnya kinerja pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		Belum optimalnya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
		Belum optimalnya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		Belum optimalnya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA
		Belum optimalnya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
	Masih rendahnya kualitas hasil inovasi	
		Belum optimalnya penelitian dan pengembangan
		Belum optimalnya pengembangan inovasi dan teknologi
		Belum optimalnya pengembangan inovasi dan teknologi
		Belum optimalnya invensi dan inovasi
	Masih rendahnya tata kelola Bappeda Litbang	Masih rendahnya penguatan internal akuntabilitas kinerja
		Masih rendahnya layanan kesekretariatan

2.3.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan isu strategis. Selain itu isu strategi juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Informasi kunci dimaksud merupakan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan Renstra PD propinsi, telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Dengan menganalisa berbagai sumber informasi secara lengkap, diharapkan diperoleh identifikasi rumusan isu strategis yang tepat dan strategis yang dapat mengantisipasi gap / kesenjangan pelayanan perangkat daerah, dan untuk menentukan tujuan dan sasaran perangkat daerah secara tepat.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencana pembangunan daerah, Bappeda Litbang bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian masalah-masalah pembangunan sekarang dan ke depan di daerah dengan mengacu pada RPJMD Kota Tarakan dan memperhatikan aspirasi dan kondisi objektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Bappeda Litbang Kota Tarakan, isu strategis ini dirumuskan melalui telaah mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan Perangkat Daerah, termasuk kesesuaian dengan sasaran jangka menengah nasional dan daerah serta implikasi tata ruang dan lingkungan hidup. Hasil penelaahan tersebut menjadi landasan utama dalam merumuskan arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Mengacu pada RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2029, isu strategis yang perlu mendapat perhatian bersama pada urusan perencanaan adalah optimalisasi tata kelola pemerintahan yang baik yang diimplementasikan melalui : akuntabilitas kinerja pembangunan yang dimulai dari proses perencanaan partisipatif dan terukur, penganggaran, implementasi, evaluasi sampai pada pelaporan kinerja.

Terkait analisis isu-isu strategis yang merupakan bagian terpenting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah, maka untuk melengkapi tahapan- tahapan yang telah dilakukan harus dilakukan identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis yang akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu strategis Bappeda Litbang Kota Tarakan berdasarkan tugas dan fungsinya adalah:

1). Gambaran pelayanan Bappeda Litbang Kota Tarakan;

Dalam menjalankan fungsi pelayanan bidang urusan perencanaan Bappeda Litbang telah melaksanakan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Namun demikian tantangan perencanaan kedepan akan lebih dinamis sehingga Bappeda harus dapat merumuskan strategi yang tepat dalam rangka menghadapi tantangan tersebut

2). Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda;

Terdapat beberapa faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeda Litbang, antara lain :

- Belum optimalnya monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan;
- Masih adanya kesenjangan pemahaman antar para pemangku kepentingan terhadap rencana program dan kegiatan pembangunan;
- Belum optimalnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat dasar yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan.

Selain faktor penghambat terdapat pula faktor pendukung dalam pencapaian sasaran jangka menengah Renstra Bappeda Litbang, yaitu :

- Telah dilakukan sinergi dan sinkronisasi antar daerah (antar Provinsi, Kab/Kota) dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah;
- Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal;
- Sudah dilakukan pelibatan stakeholder terkait dan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan dari uraian diatas maka dapat dirumuskan isu strategis Bappeda Litbang Kota Tarakan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.9 Isu Strategis Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2025-2029

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Kewenangan koordinasi lintas sektor dan perencanaan berbasis data untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	Belum tingginya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis ekologis	• Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs 2030) • Perubahan iklim global dan transisi menuju pembangunan hijau • Digitalisasi dan keterbukaan data global (open government data)	• Implementasi RPJPN/RPJMN 2025–2045 berbasis pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim • Integrasi KLHS dalam perencanaan pembangunan daerah • Penguatan Satu Data Indonesia dan sistem perencanaan berbasis kinerja	• Ketimpangan pembangunan antarwilayah dan akses pelayanan dasar • Degradasi lingkungan pesisir dan daerah aliran sungai • Kerentanan terhadap bencana iklim (banjir, abrasi, kebakaran lahan)	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD 2025 – 2029

Dalam perencanaan strategis, penetapan tujuan merupakan langkah awal yang krusial karena menentukan arah pelaksanaan. Adapun sasaran menggambarkan hasil konkret yang ingin dicapai melalui berbagai upaya atau tindakan yang ditujukan untuk merealisasikan tujuan tersebut. Sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi strategis dalam perencanaan pembangunan daerah, Bappeda Litbang Kota Tarakan berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan berjalan secara terukur, terintegrasi, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025–2029.

Dalam mendukung visi Kota Tarakan, yakni “Terwujudnya Tarakan Sebagai Kota Cerdas yang Bertumpu Pada Sektor Jasa, Perdagangan, Perikanan Kelautan, dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Maju Menuju Masyarakat Sejahtera”. yang terdiri dari 5 misi pembangunan antara lain:

- 1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- 2. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan infrastruktur pelayanan yang handal;
- 3. Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui dukungan kemudahan berusaha yang berkeadilan dan bertumpu pada sektor Jasa, perdagangan, Perikanan Kelautan, Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Kerakyatan (UMKM);
- 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif serta menjaga stabilitas ketertiban dan ketentraman kota;
- 5. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh menghadapi bencana.

Bappeda Litbang secara khusus mengambil bagian dalam menjalankan Misi Keempat yaitu *Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif serta menjaga stabilitas ketertiban dan ketentraman kota*. Dalam rangka mencapai Misi Pembangunan 4, maka tujuan pembangunan yang ditetapkan adalah Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, dengan sasaran pembangunan antara lain:

- 1. Meningkatnya akuntabilitas
- 2. Meningkatnya akuntabilitas keuangan
- 3. Meningkatnya kualitas digitalisasi pelayanan publik

Berdasarkan Tabel 3.1, dari tujuan Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, Bappeda Litbang Kota Tarakan mengampu satu sasaran pembangunan yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja yang berfokus pada urusan perencanaan, serta urusan Penelitian dan Pengembangan.

Tabel 3.1. *Cascading* pada Misi Keempat RPJMD Kota Tarakan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan (nilai)	Keuangan
			Nilai SAKIP (nilai)	Perencanaan
				Sekretariat
				Pengawasan
			Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-1	Keuangan
				Pengawasan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Urusan
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Pengawasan
			Kapasitas APIP	Pengawasan
			Persentase Penambahan nilai asset tetap	Keuangan
			Persentase nilai Laporan Keuangan OPD yang tertib administrasi	Keuangan
			Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Keuangan
		Meningkatnya Kualitas Digitalisasi Pelayanan Publik	Indeks SPBE (indeks)	Pemerintahan
			Indeks Pelayanan Publik (%)	Layanan Publik

Sasaran-sasaran yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Litbang Kota Tarakan sesuai dengan tugas pokok, dan fungsinya dengan selanjutnya merumuskan tujuan Bappeda Litbang Kota Tarakan, yang mana tujuan tersebut berupa pernyataan yang berisi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan guna dapat memecahkan masalah dan menangani isu strategis yang ada, sebagaimana dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Litbang Kota Tarakan

Visi RPJMD : Terwujudnya Tarakan Sebagai Kota Cerdas yang Bertumpu Pada Sektor Jasa, Perdagangan, Perikanan Kelautan, dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Maju Menuju Masyarakat Sejahtera”										
Misi RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif serta menjaga stabilitas ketertiban dan ketentraman kota	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Capaian komponen perencanaan kinerja (persentase) (%)	74,5	74,6	74,7	74,8	74,9	75
			Meningkatnya kinerja pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Capaian komponen pengukuran kinerja (persentase) (%)	60	60,1	60,2	60,3	60,4	60,5
			Meningkatnya kualitas hasil inovasi	Persentase kebijakan inovasi daerah yang ditetapkan (%)	80	82	84	86	88	90
			Meningkatnya tata kelola Bappedalitbang	Nilai SAKIP (Nilai)	80.74 A	81.00 A	81.50 A	82.00 A	83.00 A	84.00 A
				Capaian komponen perencanaan kinerja (persentase) (%)	86	88	90	92	94	96

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Renstra PD 2025 – 2029

Strategi dan arah kebijakan disusun sebagai panduan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Litbang secara efektif dan efisien. Hal ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan, tetapi juga menjadi alat penting dalam mendorong transformasi, reformasi, serta peningkatan kinerja birokrasi. Selain itu, strategi ini juga berperan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi jalannya pembangunan secara berkelanjutan. Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 serta tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Litbang Kota Tarakan, dirumuskan strategi pembangunan sebagai langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi dan kebijakan dilandasi oleh pertimbangan mengenai konsep dan pendekatan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemilahan urusan yang menjadi kewenangan dan dijadikan dasar dalam menyusun program-program, kegiatan dan sub kegiatan dalam lima tahun ke depan.

Pendataan, legalisasi, dan penyiapan dasar kebijakan Implementasi awal dan kolaborasi lintas pihak Inovasi berbasis masyarakat dan teknologi Integrasi program dan perluasan capaian. Pencapaian target Strategi pembangunan Bappeda Litbang Kota Tarakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan dapat diformulasi berdasarkan pada identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan terkait informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra OPD tahun 2025-2029. Agar pelaksanaan renstra dapat berjalan secara terarah dan terukur maka diperlukan penahapan yang sistematis dan terencana. Penahapan dalam konteks dimaksud sebagai pengelompokan atau pengurutan pelaksanaan strategi, program, dan kegiatan kedalam tahapan tahunan yang logis dan realitis disesuaikan dengan kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya, serta dinamika lingkungan yang strategis. Berdasarkan pada analisis tersebut, maka dapat dirincikan strategi Bappeda Litbang Kota Tarakan adalah sebagai berikut pada tabel 3.6.

Tabel 3.3.
Strategi Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2025-2029

TAHAP 1 (2026)	TAHAP 2 (2027)	TAHAP 3 (2028)	TAHAP 4 (2029)	TAHAP 5 (2030)
Penguatan Dasar Perencanaan dan Tata Kelola Pembangunan Daerah	Pemantapan Integrasi Perencanaan dan Data Pembangunan	Peningkatan Kualitas dan Konsistensi Dokumen Perencanaan	Transformasi Digital dan Inovasi Perencanaan Daerah	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

Merujuk pada strategi-strategi tersebut diatas, maka dapat dirumuskan beberapa kebijakan Bappeda Litbang Kota Tarakan. Arah kebijakan Adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategis. Adapun definisi masing masing tersebut dapat dilihat tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4 . Arah Kebijakan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan Tahun 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET.
	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Tata Kelola Pemerintahan	Penyediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang selaras dan disusun tepat waktu	
	UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SINT)	Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Pemerintahan	Penyediaan data perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	
	Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Peningkatan Koordinasi Antara Pemerintah Kota dan Pusat	Pelaksanaan implementasi SIPD	
	Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Pemantauan, Evaluasi, dan Transparansi Kebijakan	Pelaksanaan koordinasi perencanaan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
	Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 2025–2029		Pelaksanaan koordinasi perencanaan di bidang Perekonomian dan SDA	
	Permendagri No. 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kemendagri dan Pemerintahan Daerah		Pelaksanaan koordinasi perencanaan di bidang Infrastruktur	
			Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
			Pelaksanaan penelitian dan pengembangan	
			Pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi	
			Pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi	
			Pelaksanaan invensi dan inovasi	

Dari tabel arah kebijakan Renstra Bappeda Litbang Kota Tarakan diatas maka dapat dibuat matriks arah kebijakan Renstra Bappeda Litbang Kota Tarakan yang merinci kesediaan capaian selama 5 tahun dengan tujuan untuk memastikan keselarasan dan sinergi perencanaan pembangunan daerah (RPJMD) dengan Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan tahunan (Renja) dan penganggaran sebagaimana matrik dibawah ini ;

Tabel 3.6.
Matriks acuan Renja pada Arah Kebijakan Renstra Bappeda Litbang Kota Tarakan

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	2026	2027	2028	202G	2030
1	UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Tata Kelola Pemerintahan	Penyediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang selaras dan disusun tepat waktu	✓	✓	✓	✓	✓
2	UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SINT)	Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Pemerintahan	Penyediaan data perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	✓	✓	✓	✓	✓
3	Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Peningkatan Koordinasi Antara Pemerintah Kota dan Pusat	Pelaksanaan implementasi SIPD	✓	✓	✓	✓	✓
4	Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Pemantauan, Evaluasi, dan Transparansi Kebijakan	Pelaksanaan koordinasi perencanaan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	✓	✓	✓	✓	✓
5	Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 2025–2029		Pelaksanaan koordinasi perencanaan di bidang Perekonomian dan SDA	✓	✓	✓	✓	✓
6	Permendagri No. 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kemendagri dan Pemerintahan Daerah		Pelaksanaan koordinasi perencanaan di bidang Infrastruktur	✓	✓	✓	✓	✓
			Pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	✓	✓	✓	✓	✓
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	✓	✓	✓	✓	✓
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	✓	✓	✓	✓	✓
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	✓	✓	✓	✓	✓
			Pelaksanaan penelitian dan pengembangan	✓	✓	✓	✓	✓
			Pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi	✓	✓	✓	✓	✓
			Pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi	✓	✓	✓	✓	✓
			Pelaksanaan invensi dan inovasi	✓	✓	✓	✓	✓

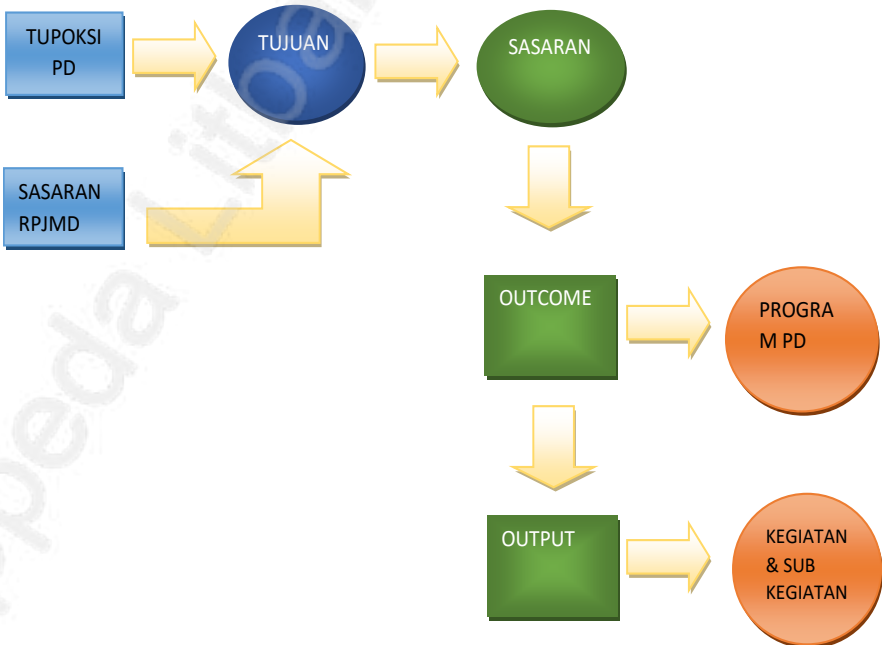
BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN SASARAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Bappeda Litbang

Dalam rangka untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan di atas, perlu disusun program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang Kota Tarakan. Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan ini disusun sebagai upaya penerjemahan visi, misi, tujuan, dan sasaran ke dalam bentuk operasional yang terukur dan sistematis. Program, kegiatan dan sub kegiatan Bappeda Litbang Kota Tarakan menggunakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada unsur penunjang urusan pemerintahan Bidang Perencanaan dan urusan pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan. Selanjutnya, pencapaian target kinerja program (outcome) di masing- masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Tarakan, tetapi juga dari sumber pendanaan lainnya (APBD Provinsi, APBN dan Sumber-sumber pendanaan lainnya). Namun demikian, pencantuman pendanaan di dalam Tabel Program Perangkat Daerah hanya yang bersumber dari APBD Kota Tarakan dan bersifat indikatif. Penyusunan komponen ini bertujuan untuk memastikan keterpaduan antara rencana strategis perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta untuk mendorong pencapaian target kinerja secara terukur dan efektif dalam periode perencanaan.

Dapat dilihat kerangka perumusan program/kegiatan/subkegiatan Renstra pada gambar 4.1 di bawah ini :

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan RENSTRA PD



Sebagai tindak lanjut dari rumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, perangkat daerah menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai bentuk implementasi operasional. Setiap program disertai dengan indikator kinerja dan target yang jelas, serta didukung oleh kegiatan dan sub kegiatan yang relevan.

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan, maka disusunlah program di dalamnya memuat kegiatan dan sub kegiatan yang

secara keseluruhan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Litbang Kota Tarakan, maka disusunlah Program dan Kegiatan beserta Pendanaannya yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 sebagai berikut; Program dan Kegiatan beserta Pendanaannya yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 sebagai berikut :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 4.1.
Perumusan Program, Kegiatan/Sub kegiatan Renstra Bappeda Litbang Kota Tarakan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan						
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Selarasnya dokumen perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang selaras dan disusun tepat waktu	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan (Indeks)	
					Capaian komponen perencanaan kinerja (persentase) (%)	
					Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	5.01.02 - Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
					Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	5.01.02 - Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
					Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
					Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
					Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
					Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	5.01.02.2.01.0001 - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
					Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	5.01.02.2.01.0002 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
					Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
					Tersedianya data perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
					Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	5.01.02.2.02.0003 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
				Terlaksananya implementasi SIPD		5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
						5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
			Selarasnya dokumen perencanaan pembangunan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Terlaksananya koordinasi perencanaan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
					Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd) (Dokumen)	5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
					Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd) (Dokumen)	5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
			Selarasnya dokumen perencanaan pembangunan daerah pada bidang Infrastruktur, SDA dan Perekonomian		Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur (%)	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
					Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Terlaksananya koordinasi perencanaan di bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.2.02.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
				Terlaksananya koordinasi perencanaan di bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
					Capaian komponen pengukuran kinerja (persentase) (%)	
		Meningkatnya kinerja pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah		Capaian Kinerja Pembangunan daerah (persentase) (%)	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
				Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
			Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia		Capaian Kinerja Pembangunan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (persentase) (%)	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
					Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
					Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
			Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pada bidang Infrastruktur, Kewilayahan, SDA dan Perekonomian		Capaian kinerja Pembangunan pada bidang Infrastruktur, SDA dan Perekonomian (%)	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.2.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
		Meningkatnya kualitas hasil inovasi	Meningkatnya kualitas Kajian kelibangan		Persentase kebijakan inovasi daerah yang ditetapkan (%)	
					Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
				Terlaksananya penelitian dan pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	5.05.02.2.02.0001 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)	5.05.02.2.02.0010 - Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
				Terlaksananya pengembangan inovasi dan teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	5.05.02.2.04.0003 - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	5.05.02.2.04.0004 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan		Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
			Terlaksananya pengembangan inovasi dan teknologi		Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Dokumen)	5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
					Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Dokumen)	5.05.03.2.01.0006 - Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah
			Terlaksananya invensi dan inovasi		Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi innovator) (Laporan)	5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi innovator) (Laporan)	5.05.03.2.02.0008 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02.0012 - Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi
		Meningkatnya tata kelola Bappeda Litbang			Nilai SAKIP (Nilai)	
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	
			Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja		Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	5.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
				Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			Meningkatnya layanan kesekretariatan	Tersedianya Layanan Administrasi kepegawaian	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	5.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	5.01.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	5.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
				Tersedianya layanan administrasi umum	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	5.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
				Terkelolanya data Barang Milik Daerah dalam aplikasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Tersedianya layanan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Berikut adalah program dan kegiatan yang dijalani oleh Bappeda Litbang Kota Tarakan untuk lima tahun ke depan antara lain:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dengan kegiatan:
 - a) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.
 - b) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - c) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan:
 - a) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
 - b) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).
 - c) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan kegiatan:
 - a) Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan.
 - b) Pengembangan Inovasi dan Teknologi.
4. Program Riset dan Inovasi Daerah dengan kegiatan:
 - a) Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan
 - b) Inovasi dan Inovasi

Seluruh program dan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program prioritas pembangunan daerah yang dirancang untuk mendorong tercapainya target-target pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD. Pada tabel 4.1 Tabel Perumusan tersebut menunjukkan keterkaitan yang kuat antara sasaran strategis RPJMD, tujuan, sasaran dan program/kegiatan/subkegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan. Setiap tahapan dari tujuan hingga output tersusun hierarkis dan saling mendukung.

Untuk menggambarkan seberapa jauh kinerja Bappeda Litbang Kota Tarakan, indikator kinerja utama ditampilkan pada Tabel 4.2. Sementara itu, indikator kinerja kunci yang mendukung pencapaian kinerja secara lebih spesifik dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.2.
Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2025–2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
5.01 - PERENCANAAN				8.011.763.322,00		7.826.263.322,00		7.888.463.322,00		7.772.763.322,00		8.049.963.322,00		
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.338.863.382,00		6.153.363.382,00		6.165.363.382,00		6.119.863.382,00		6.146.863.382,00		
Meningkatnya layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	92,27	92,27	850.782.000,00	92,5	665.282.000,00	93	677.282.000,00	93,5	631.782.000,00	94	658.782.000,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	
5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				60.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Tersedianya Layanan Administrasi kepegawaian	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	3	60.000.000,00	3	40.000.000,00	3	40.000.000,00	3	60.000.000,00	3	60.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	15	15		15		15		15		15			
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	33	33		38		38		40		33			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	33	38		38		38		40		42			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	34	1						1		1			
5.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				20.000.000,00		0,00		0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	34	1	20.000.000,00		0,00		0,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
5.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
5.01.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	33	38	0,00	38	0,00	38	0,00	40	0,00	42	0,00		
5.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	33	33	0,00	38	0,00	38	0,00	40	0,00	33	0,00		
5.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	3	40.000.000,00	3	40.000.000,00	3	40.000.000,00	3	40.000.000,00	3	40.000.000,00		
5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				246.650.000,00		246.650.000,00		246.650.000,00		246.650.000,00		246.650.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya layanan administrasi umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	2	246.650.000,00	2	246.650.000,00	2	246.650.000,00	2	246.650.000,00	2	246.650.000,00		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	6	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				61.650.000,00		61.650.000,00		61.650.000,00		61.650.000,00		61.650.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	3	61.650.000,00	3	61.650.000,00	3	61.650.000,00	3	61.650.000,00	3	61.650.000,00		
5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00		
5.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00		
5.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
5.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				148.000.000,00		104.500.000,00		74.500.000,00		59.000.000,00		36.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terkelolanya data Barang Milik Daerah dalam aplikasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	15	7	148.000.000,00	7	104.500.000,00	7	74.500.000,00	7	59.000.000,00	7	36.000.000,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	17	15		8		7		5		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		0		0		0			
5.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	15	7	35.000.000,00	7	35.000.000,00	7	35.000.000,00	7	35.000.000,00	7	35.000.000,00		
5.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				113.000.000,00		69.500.000,00		39.500.000,00		24.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	17	15	113.000.000,00	8	69.500.000,00	7	39.500.000,00	5	24.000.000,00	1	1.000.000,00		
5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				216.132.000,00		216.132.000,00		216.132.000,00		216.132.000,00		216.132.000,00		
Tersedianya layanan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	216.132.000,00	12	216.132.000,00	12	216.132.000,00	12	216.132.000,00	12	216.132.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
5.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.000.000,00		
5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				180.632.000,00		180.632.000,00		180.632.000,00		180.632.000,00		180.632.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	180.632.000,00	12	180.632.000,00	12	180.632.000,00	12	180.632.000,00	12	180.632.000,00		
5.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00		
5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.500.000,00	12	2.500.000,00	12	2.500.000,00	12	2.500.000,00	12	2.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				180.000.000,00		58.000.000,00		100.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	180.000.000,00	0	58.000.000,00	1	100.000.000,00	0	50.000.000,00	1	100.000.000,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	3		0		0		0		0			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	23	1		1		1		1		1			
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0		1		0		0		0			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	12	14		0		0		0		0			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	30		30		30		30		30			
5.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				10.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				70.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	3	70.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0,00		8.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	0,00	1	8.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000,00		0,00		50.000.000,00		0,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	50.000.000,00	0	0,00	1	50.000.000,00	0	0,00	1	50.000.000,00		
5.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	30	35.000.000,00	30	35.000.000,00	30	35.000.000,00	30	35.000.000,00	30	35.000.000,00		
5.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	23	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	78	78,01	5.488.081.382,00	78,10	5.488.081.382,00	78,15	5.488.081.382,00	78,20	5.488.081.382,00	100	5.488.081.382,00		
5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
5.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
5.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.478.081.382,00		5.478.081.382,00		5.478.081.382,00		5.478.081.382,00		5.478.081.382,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.423.835.382,00		5.423.835.382,00		5.423.835.382,00		5.423.835.382,00		5.423.835.382,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	38	38	5.423.835.382,00	38	5.423.835.382,00	38	5.423.835.382,00	38	5.423.835.382,00	38	5.423.835.382,00		
5.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				54.246.000,00		54.246.000,00		54.246.000,00		54.246.000,00		54.246.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	54.246.000,00	12	54.246.000,00	12	54.246.000,00	12	54.246.000,00	12	54.246.000,00		
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				760.000.000,00		760.000.000,00		760.000.000,00		760.000.000,00		760.000.000,00		
Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Capaian Kinerja Pembangunan daerah (persentase) (%)	98,85	98,85	200.000.000,00	98,85	200.000.000,00	99	200.000.000,00	99,05	200.000.000,00	99,1	200.000.000,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	
5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	2	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00		
5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	2	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00		
Selarasnya dokumen perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	100	100	560.000.000,00	100	560.000.000,00	100	560.000.000,00	100	560.000.000,00	100	560.000.000,00		
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100	100		100		100		100		100			
5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				430.000.000,00		430.000.000,00		430.000.000,00		430.000.000,00		430.000.000,00		
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang selaras dan disusun tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	4	2	430.000.000,00	2	430.000.000,00	2	430.000.000,00	2	430.000.000,00	3	430.000.000,00		
	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	5	3		3		3		3		6			
	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	2	5		5		5		5		5			
5.01.02.2.01.0001 - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah				255.000.000,00		255.000.000,00		255.000.000,00		255.000.000,00		255.000.000,00		
Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	5	2	255.000.000,00	2	255.000.000,00	2	255.000.000,00	3	255.000.000,00	3	255.000.000,00		
5.01.02.2.01.0002 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	2	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00		
5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		
Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	5	3	85.000.000,00	3	85.000.000,00	3	85.000.000,00	3	85.000.000,00	6	85.000.000,00		
5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	4	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	3	40.000.000,00		
5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya data perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	1	1	130.000.000,00	1	130.000.000,00	1	130.000.000,00	1	130.000.000,00	1	130.000.000,00		
5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		
Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	1	1	130.000.000,00	1	130.000.000,00	1	130.000.000,00	1	130.000.000,00	1	130.000.000,00		
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				912.899.940,00		912.899.940,00		963.099.940,00		892.899.940,00		1.143.099.940,00		
Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pada bidang Infrastruktur, Kewilayahan, SDA dan Perekonomian	Capaian kinerja Pembangunan pada bidang Infrastruktur, SDA dan Perekonomian (%)	99,19	99,21	177.500.000,00	99,22	177.500.000,00	99,23	177.500.000,00	99,24	177.500.000,00	99,25	177.500.000,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	
5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				252.000.000,00		252.000.000,00		336.000.000,00		292.000.000,00		336.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5	5	104.000.000,00	5	104.000.000,00	5	104.000.000,00	5	104.000.000,00	5	104.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				52.000.000,00		52.000.000,00		52.000.000,00		52.000.000,00		52.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5	5	52.000.000,00	5	52.000.000,00	5	52.000.000,00	5	52.000.000,00	5	52.000.000,00		
5.01.03.2.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				52.000.000,00		52.000.000,00		52.000.000,00		52.000.000,00		52.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5	5	52.000.000,00	5	52.000.000,00	5	52.000.000,00	5	52.000.000,00	5	52.000.000,00		
5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				155.900.000,00		155.900.000,00		202.100.000,00		175.900.000,00		202.100.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5	5	73.500.000,00	5	73.500.000,00	5	73.500.000,00	5	73.500.000,00	5	73.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)													
5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				73.500.000,00		73.500.000,00		73.500.000,00		73.500.000,00		73.500.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5	5	73.500.000,00	5	73.500.000,00	5	73.500.000,00	5	73.500.000,00	5	73.500.000,00		
Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Capaian Kinerja Pembangunan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (persentase) (%)	0	0	15.000.000,00	0	15.000.000,00	0	15.000.000,00	0	15.000.000,00	0	15.000.000,00		
5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				504.999.940,00		504.999.940,00		424.999.940,00		424.999.940,00		604.999.940,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00		
5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00		
Selarasnya dokumen perencanaan pembangunan daerah pada bidang Infrastruktur, SDA dan Perekonomian	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur (%)	100,00	100,00	230.400.000,00	100,00	230.400.000,00	100,00	360.600.000,00	100,00	290.400.000,00	100,00	360.600.000,00		
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				252.000.000,00		252.000.000,00		336.000.000,00		292.000.000,00		336.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya koordinasi perencanaan di bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	12	8	148.000.000,00	8	148.000.000,00	12	232.000.000,00	8	188.000.000,00	12	232.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	12	8		8		12		8		12			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4	2		2		3		3		3			
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	12	8		8		12		8		12			
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	12	8		8		12		8		12			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4	2		2		3		3		3			
5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				40.000.000,00		40.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	3	60.000.000,00	3	60.000.000,00	3	60.000.000,00		
5.01.03.2.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				4.800.000,00		4.800.000,00		7.200.000,00		4.800.000,00		7.200.000,00		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	12	8	4.800.000,00	8	4.800.000,00	12	7.200.000,00	8	4.800.000,00	12	7.200.000,00		
5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian				29.200.000,00		29.200.000,00		48.800.000,00		29.200.000,00		48.800.000,00		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	12	8	29.200.000,00	8	29.200.000,00	12	48.800.000,00	8	29.200.000,00	12	48.800.000,00		
5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				40.000.000,00		40.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	3	60.000.000,00	3	60.000.000,00	3	60.000.000,00		
5.01.03.2.02.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan				4.800.000,00		4.800.000,00		7.200.000,00		4.800.000,00		7.200.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	12	8	4.800.000,00	8	4.800.000,00	12	7.200.000,00	8	4.800.000,00	12	7.200.000,00		
5.01.03.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA				29.200.000,00		29.200.000,00		48.800.000,00		29.200.000,00		48.800.000,00		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	12	8	29.200.000,00	8	29.200.000,00	12	48.800.000,00	8	29.200.000,00	12	48.800.000,00		
5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				155.900.000,00		155.900.000,00		202.100.000,00		175.900.000,00		202.100.000,00		
Terlaksananya koordinasi perencanaan di bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	9	6	82.400.000,00	6	82.400.000,00	9	128.600.000,00	6	102.400.000,00	9	128.600.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4	2		2		3		3		3			
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	9	6		6		9		6		9			
5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				40.000.000,00		40.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	4	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	3	60.000.000,00	3	60.000.000,00	3	60.000.000,00		
5.01.03.2.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				10.800.000,00		10.800.000,00		16.200.000,00		10.800.000,00		16.200.000,00		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	9	6	10.800.000,00	6	10.800.000,00	9	16.200.000,00	6	10.800.000,00	9	16.200.000,00		
5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur				31.600.000,00		31.600.000,00		52.400.000,00		31.600.000,00		52.400.000,00		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	9	6	31.600.000,00	6	31.600.000,00	9	52.400.000,00	6	31.600.000,00	9	52.400.000,00		
Selarasnya dokumen perencanaan pembangunan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100	100	489.999.940,00	100	489.999.940,00	100	409.999.940,00	100	409.999.940,00	100	589.999.940,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				504.999.940,00		504.999.940,00		424.999.940,00		424.999.940,00		604.999.940,00		
Terlaksananya koordinasi perencanaan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	8	8	489.999.940,00	8	489.999.940,00	8	409.999.940,00	8	409.999.940,00	8	589.999.940,00		
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	3	4		4		2		2		5			
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	2		2		3		3		3			
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	24	16		16		16		24		24			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	2		2		2		3		3			
	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	30	20		20		30		30		30			
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	30	20		20		30		30		30			
5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				68.402.940,00		68.402.940,00		68.402.940,00		68.402.940,00		68.402.940,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	2	68.402.940,00	2	68.402.940,00	3	68.402.940,00	3	68.402.940,00	3	68.402.940,00		
5.01.03.2.01.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	30	20	5.000.000,00	20	5.000.000,00	30	5.000.000,00	30	5.000.000,00	30	5.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	30	20	5.000.000,00	20	5.000.000,00	30	5.000.000,00	30	5.000.000,00	30	5.000.000,00		
5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan				41.597.000,00		41.597.000,00		41.597.000,00		41.597.000,00		41.597.000,00		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	3	3	41.597.000,00	3	41.597.000,00	3	41.597.000,00	3	41.597.000,00	3	41.597.000,00		
5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00		
5.01.03.2.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	24	16	10.000.000,00	16	10.000.000,00	16	10.000.000,00	24	10.000.000,00	24	10.000.000,00		
5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	8	8	10.000.000,00	8	10.000.000,00	8	10.000.000,00	8	10.000.000,00	8	10.000.000,00		
5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				200.000.000,00		200.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		300.000.000,00		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	3	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00	5	300.000.000,00		
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				745.000.000,00		745.000.000,00		745.000.000,00		745.000.000,00		745.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				610.000.000,00		610.000.000,00		610.000.000,00		610.000.000,00		610.000.000,00		
Meningkatnya kualitas Kajian kelibangan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	100	100	610.000.000,00	100	610.000.000,00	100	610.000.000,00	100	610.000.000,00	100	610.000.000,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	
5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				490.000.000,00		490.000.000,00		490.000.000,00		490.000.000,00		490.000.000,00		
Terlaksananya penelitian dan pengembangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)	6	2	490.000.000,00	1	490.000.000,00	1	490.000.000,00	1	490.000.000,00	1	490.000.000,00		
5.05.02.2.02.0010 - Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				490.000.000,00		490.000.000,00		490.000.000,00		490.000.000,00		490.000.000,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)	6	2	490.000.000,00	1	490.000.000,00	1	490.000.000,00	1	490.000.000,00	1	490.000.000,00		
5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi				120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		
Terlaksananya pengembangan inovasi dan teknologi	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	1	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
5.05.02.2.04.0003 - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
5.05.02.2.04.0004 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				135.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		135.000.000,00		
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	80	82	135.000.000,00	84	135.000.000,00	86	135.000.000,00	88	135.000.000,00	90	135.000.000,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	
5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya pengembangan inovasi dan teknologi	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Dokumen)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
5.05.03.2.01.0006 - Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah untuk menghasilkan dokumen Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Dokumen)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
5.05.03.2.02 - Inovensi dan Inovasi				85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		
Terlaksananya invensi dan inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi innovator) (Laporan)	1	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00	1	85.000.000,00		
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
5.05.03.2.02.0008 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi innovator) (Laporan)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
5.05.03.2.02.0012 - Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	0	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00		

Tabel 4.4
Daftar SubKegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kota Tarakan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan				
1.	5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			5.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
			5.01.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
			5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
		Meningkatnya layanan kesekretariatan	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			5.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			5.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2.	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
		Selarasnya dokumen perencanaan pembangunan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
			5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
		Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
		Meningkatnya kualitas monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pada bidang Infrastruktur, Kewilayahan, SDA dan Perekonomian	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
			5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
			5.01.03.2.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
		Selarasnya dokumen perencanaan pembangunan daerah pada bidang Infrastruktur, SDA dan Perekonomian	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
			5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
			5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
3.	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya kualitas Kajian kelibangan	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
			5.05.02.2.02.0001 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	
			5.05.02.2.02.0010 - Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	
4.	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
			5.05.03.2.01.0006 - Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	
			5.05.03.2.02 - Invensi dan Inovasi	
			5.05.03.2.02.0008 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	

Seluruh program prioritas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan bukan hanya berdiri sendiri, tetapi membentuk rantai logis dari kebijakan hingga dampak di lapangan serta mewujudkan kota Sebagai Kota Cerdas yang Bertumpu Pada Sektor Jasa, Perdagangan, Perikanan Kelautan, dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Maju Menuju Masyarakat Sejahtera.

4.5. Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.. Penetapan indikator ini dimaksudkan untuk memastikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, program, dan kegiatan dengan target pembangunan daerah serta kebijakan nasional.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator yang dipilih mencerminkan prioritas pembangunan lima tahun ke depan, Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ante), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post).

Target capaian indikator ditetapkan secara bertahap dari tahun 2025 hingga 2030 dengan memperhatikan kondisi eksisting, potensi, serta keterbatasan sumber daya yang ada. Dengan demikian, indikator kinerja ini tidak hanya menjadi alat ukur keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, serta penelitian dan pengembangan tetapi juga menjadi instrumen akuntabilitas yang dapat memberikan gambaran capaian pembangunan daerah secara komprehensif.

Tabel 4.5.
Indikator Kinerja Utama Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2025–2030

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target						Ket.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan										
1	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan	Indeks	92,24	92,5	93	93,5	94	94,5	95	
2	Persentase kebijakan inovasi daerah yang ditetapkan	%	75	80	82	84	86	88	90	
3	Capaian komponen pengukuran kinerja (persentase)	%	58,2	60	60,1	60,2	60,3	60,4	60,5	
4	Capaian komponen perencanaan kinerja (persentase)	%	72,83	74,5	74,6	74,7	74,8	74,9	75	
5	Nilai SAKIP	Nilai	78.96 BB	80.74 A	81.00 A	81.50 A	82.00 A	83.00 A	84.00 A	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,89	86	88	90	92	94	96	

4.6. Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Kunci (IKK) juga merupakan parameter pengukuran kinerja penyelenggaraan urusan, penentuan target penyelenggaraan urusan dilakukan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap pemerintah daerah wajib menyusun LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) yang dibuat dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan dan gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. LPPD menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah, untuk itu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah daerah harus mengisi realisasi capaian dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Dalam menyusun LPPD, kepala daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD. Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi atau divalidasi oleh Inspektorat dan BPKP daerah yang bersangkutan. Terdapat 4 (empat) IKK Outcome yang harus dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tarakan di Tahun 2025 dan 2029 mendatang.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersebut menjadi acuan strategis untuk memantau kemajuan pembangunan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan di Kota Tarakan periode 2025–2030. Melalui pengukuran yang sistematis, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memberi dampak nyata bagi masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan RPJMD serta agenda pembangunan nasional. Secara keseluruhan, tabel IKK ini menunjukkan kerangka kerja pengukuran kinerja yang menyeluruh, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6.
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2025–2030

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	5.01 - PERENCANAAN									
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah		%	100	100	100	100	100	100	100
	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
2	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan		Persentase	86	100	100	100	100	100	100
3	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah		Rasio	74	80	82	84	86	88	90

BAB V PENUTUP

5.1. Penutup

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Tarakan Tahun 2025-2029 merupakan komitmen Bappeda Litbang dalam menerjemahkan visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029. Renstra ini telah merumuskan secara sistematis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Bappeda Litbang yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Melalui Renstra ini, Bappeda Litbang Kota Tarakan bertekad untuk:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang adaptif, partisipatif, dan berkelanjutan, selaras dengan dinamika pembangunan nasional dan global serta karakteristik lokal Kota Tarakan.
2. Mengoptimalkan fungsi pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan, guna memastikan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya serta akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
3. Mendorong inovasi dan pengembangan kapasitas daerah melalui kajian, penelitian, dan penerapan teknologi, demi mendukung pembangunan yang berbasis pengetahuan dan mampu menjawab tantangan masa depan.
4. Memperkuat peran koordinasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, baik di internal pemerintah daerah maupun dengan sektor swasta, akademisi, dan masyarakat, dalam upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan merata di Kota Tarakan.

Dokumen ini menjadi pedoman utama bagi seluruh jajaran Bappeda Litbang Kota Tarakan dalam merumuskan rencana kerja tahunan, mengalokasikan anggaran, serta mengevaluasi capaian kinerja secara berkala.

Sebagai dokumen yang bersifat dinamis, Renstra perlu diadaptasi apabila terjadi perubahan signifikan pada lingkungan strategis, kebijakan nasional, atau kondisi lokal yang menuntut penyesuaian tujuan dan sasaran pembangunan. Oleh karena itu, mekanisme review secara periodik maupun insidentil perlu disiapkan untuk memastikan keselarasan arah kebijakan.

Dengan terselesaikannya Renstra Bappeda Litbang Kota Tarakan Tahun 2025- 2029 ini, diharapkan Bappeda Litbang dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih terarah, efektif, dan efisien dalam mendukung terwujudnya visi Kota Tarakan: “Terwujudnya Tarakan Sebagai Kota Cerdas yang Bertumpu Pada Sektor Jasa, Perdagangan, Perikanan Kelautan, dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Maju Menuju Masyarakat Sejahtera”.

Keberhasilan implementasi Renstra ini tidak lepas dari dukungan seluruh pihak dan partisipasi aktif, dengan kerja sama dan komitmen yang tinggi, pencapaian target-target strategis diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah kota Tarakan secara keseluruhan.

23. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan RENSTRA ini menjadi penting karena berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sekaligus sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja Pembangunan.

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) melalui pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif. BPKPAD bertanggung jawab dalam urusan menyelenggarakan urusan pendapatan daerah, anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pengelolaan aset daerah.

Penyusunan RENSTRA BPKPAD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu RENSTRA ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029. Penyusunan ini juga merupakan upaya untuk menjawab tantangan yang dihadapi, seperti Optimalisasi PAD, Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, penertiban administrasi aset dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dengan tersusunnya RENSTRA BPKPAD Kota Tarakan memiliki pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi dan misi Pembangunan Kota Tarakan dalam 5 (lima) tahun ke depan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029;
19. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2024 tentang RPJPD Kota Tarakan Tahun 2025–2045;
21. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2025–2029;
22. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BPKPAD Kota Tarakan;
23. Surat Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusunan RENSTRA BPKPAD;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Adapun maksud disusunnya Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan (BPKPAD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran BPKPAD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama 5 (lima) tahun ke depan. RENSTRA ini menjadi acuan dalam penyusunan program, kegiatan serta penganggaran tahunan agar sejalan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Kota Tarakan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan sebagai berikut:

1. Memberikan arah dan pedoman strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPKPAD khususnya di bidang pengelolaan pendapatan, anggaran, perbendaharaan, akuntansi, pelaporan keuangan dan aset daerah.
2. Menjamin keselarasan antara kebijakan BPKPAD dengan kebijakan pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029.
3. Menjadi instrumen pengendalian, evaluasi, dan pengukuran kinerja BPKPAD secara sistematis, terarah dan berkelanjutan.
4. Menjawab tantangan dan permasalahan strategis yang dihadapi BPKPAD seperti optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan kualitas laporan keuangan serta penataan barang milik daerah.
5. Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang transparan, akuntabel, efektif, efisiensi dan berorientasi pada pelayanan publik.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan RENSTRA BPKPAD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Bab I	Pendahuluan Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
Bab II	Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Bab ini membahas gambaran pelayanan perangkat daerah yang paling sedikit memuat tugas, fungsi, dan struktur perangkat daerah; sumber daya perangkat daerah; kinerja pelayanan perangkat daerah; dan kelompok sasaran layanan. Selain itu juga membahas permasalahan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan dan Isu Strategis.
Bab III	Tujuan, Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan Bab ini paling sedikit memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan.
Bab IV	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kineja penyelenggaraan bidang urusan

Bab ini paling sedikit memuat uraian program; uraian kegiatan; uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator target dan pagu indikatif; uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah; target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029.

Bab V Penutup

Bappeda Litbang Kota Tarakan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Tarakan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 81 Tahun 2020 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Kedudukan BPKPAD Kota Tarakan yaitu sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Keuangan pada Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset yang menjadi kewenangan daerah. BPKPAD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Tarakan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perbendaharaan, Akuntansi, Anggaran, Pendapatan dan Pengelolaan Aset;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perbendaharaan, Akuntansi, Anggaran, Pendapatan dan Pengelolaan Aset;
- c. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perbendaharaan, Akuntansi, Anggaran, Pendapatan dan Pengelolaan Aset;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang Perbendaharaan, Akuntansi, Anggaran, Pendapatan dan Pengelolaan Aset;
- e. Pelaksanaan administrasi Badan;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 69 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 81 Tahun 2020 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Tarakan dipimpin oleh Seorang Kepala Badan yang membawahi 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang di dalam struktur organisasinya sebagai berikut:

a. KEPALA BADAN

Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan, akuntansi, anggaran, pendapatan dan pengelolaan aset Daerah;
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perbendaharaan, akuntansi, anggaran, pendapatan dan pengelolaan aset Daerah;
- 3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perbendaharaan, akuntansi, anggaran, pendapatan dan Pengelolaan aset Daerah;

- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang perbendaharaan, akuntansi, anggaran, pendapatan dan pengelolaan aset Daerah;
- 5) Pelaksanaan administrasi Badan; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksana koordinasi kegiatan Badan;
- 2) Pelaksana koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran Badan;
- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan;
- 4) Pelaksana koordinasi pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Badan;
- 5) Penyusunan produk hukum Daerah pada Badan;
- 6) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik atau kekayaan daerah di Badan;
- 7) Pelayanan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan;
- 8) Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Badan;
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sekretariat membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam pengoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan;
- 2) Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Badan;
- 3) Pengoordinasian dan penyusunan produk hukum daerah pada Badan;
- 4) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik atau kekayaan daerah di Badan;
- 5) Pelayanan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam koordinasi kegiatan Badan, koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, dan pengoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengoordinasian kegiatan Badan;

- 2) Pengoordinasian penyusunan rencana program dan anggaran Badan;
- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
- 4) Penyiapan bahan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Badan;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

c. BIDANG PERBENDAHARAAN

Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang perbendaharaan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan kebijakan teknis di bidang penerimaan, pembiayaan dan pengeluaran kas;
- 2) pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penerimaan, pembiayaan dan pengeluaran kas;
- 3) penyusunan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran kas;
- 4) pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran Daerah yang berupa kas dan yang setara kas;
- 5) pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum Daerah;
- 6) pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang Daerah;
- 7) pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas;
- 8) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penerimaan, pembiayaan dan pengeluaran kas;
- 9) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang penerimaan, pembiayaan dan pengeluaran kas;
- 10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Perbendaharaan membawahi:

1. Sub bidang Penerimaan dan Pembiayaan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang penerimaan dan pembiayaan daerah.

Sub Bidang Penerimaan dan Pembiayaan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang penerimaan kas dan yang setara kas serta pembiayaan daerah;
- 2) penyiapan bahan dan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penerimaan kas dan yang setara kas serta pembiayaan daerah;
- 3) pelaksanaan penelitian dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah;
- 4) pelaksanaan penyusunan anggaran kas;
- 5) pelaksanaan penyiapan SPD untuk pengendalian pelaksanaan anggaran kas;
- 6) pelaksanaan penelitian dan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Gaji;

- 7) pelaksanaan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan Pungutan Pihak Ketiga;
 - 8) pelaksanaan penelitian kelengkapan dokumen dan penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran;
 - 9) pelaksanaan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas dalam bentuk buku kas;
 - 10) pelaksana pemeriksa, analisa dan evaluasi pertanggung jawaban pendapatan atau penerimaan kas;
 - 11) penyusunan dan penyediaan laporan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - 12) pelaksanaan rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas;
 - 13) penerima, pemeriksa dan peneliti dokumen Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan Belanja/SP3B penerimaan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional/JKN dari Unit Pelaksana Teknis Kesehatan dan Rumah Sakit Daerah;
 - 14) pelaksanaan rekap dan pencatatan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan Belanja/SP3B penerimaan dana kapitasi JKN dan membuat bukti rekonsiliasi SP3B dari Unit Pelaksana Teknis Kesehatan dan Rumah Sakit Daerah;
 - 15) pelaksanaan proses penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan Belanja/SP2B penerimaan dana kapitasi JKN dari Unit Pelaksana Teknis Kesehatan dan Rumah Sakit Daerah;
 - 16) pelaksanaan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah melalui investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan daerah;
 - 17) pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - 18) penyusunan dan penyediaan laporan aliran kas secara periodik;
 - 19) penyiapan bahan dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penerimaan kas dan yang setara kas serta pembiayaan daerah;
 - 20) penyiapan bahan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang penerimaan kas dan yang setara kas serta pembiayaan daerah; dan
 - 21) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan.
2. Sub Pengeluaran dipimpin oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengeluaran daerah berupa kas dan setara kas.
- Sub Bidang Pengeluaran dalam menyelenggarakan fungsi:
- 1) penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengeluaran daerah berupa kas dan yang setara kas;
 - 2) penyiapan bahan dan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengeluaran daerah berupa kas dan yang setara kas;
 - 3) penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pengeluaran;
 - 4) penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengeluaran;
 - 5) penyiapan bahan dan perumusan petunjuk teknis penatausahaan SPBD;
 - 6) penerima, pemeriksa dan peneliti SPJ fungsional dari bendahara pengeluaran seluruh SKPD;

- 7) pelaksanaan rekap dan pencatatan SPJ fungsional dan membuat bukti rekonsiliasi SPJ fungsional dari bendahara pengeluaran seluruh SKPD;
- 8) pelaksanaan pengerekapan SPJ Fungsional penerimaan dari seluruh SKPD;
- 9) pelaksanaan register atas SPM dan SP2D belanja SKPD;
- 10) pelaksanaan pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti dokumen SPM;
- 11) penerima, pemeriksa dan peneliti dokumen Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan Belanja/SP3B pengeluaran dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional/JKN dari Unit Pelaksana Teknis Kesehatan dan Rumah Sakit Daerah;
- 12) pelaksanaan rekap dan pencatatan SP3B pengeluaran dana kapitasi JKN dan membuat bukti rekonsiliasi SP3B dari Unit Pelaksana Teknis Kesehatan dan Rumah Sakit Daerah;
- 13) pelaksanaan proses penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan Belanja/SP2B pengeluaran dana kapitasi JKN dari Unit Pelaksana Teknis Kesehatan dan Rumah Sakit Daerah;
- 14) pelaksanaan penelitian dan memberikan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ Non Gaji;
- 15) pelaksanaan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas;
- 16) penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D;
- 17) pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait serta melakukan pembinaan perbendaharaan terhadap SKPD;
- 18) pembinaan teknis kepada bendahara penerimaan dan pengeluaran;
- 19) penyiapan bahan dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengeluaran daerah berupa kas dan setara kas;
- 20) penyiapan bahan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengeluaran daerah berupa kas dan setara kas;
- 21) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan.

d. BIDANG AKUNTANSI

Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang akuntansi yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Akuntansi dalam menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan kebijakan teknis di bidang pengolahan data dan pelaporan keuangan;
- 2) pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengolahan data dan pelaporan keuangan;
- 3) perumusan prosedur penatausahaan keuangan daerah;
- 4) penyusunan kebijakan akuntansi dan pedoman teknis penatausahaan;
- 5) pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 6) pelaksanaan pembinaan teknis penatausahaan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan daerah;
- 7) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengolahan data dan pelaporan keuangan;

- 8) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang pengolahan data dan pelaporan keuangan;
- 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi.

Bidang Akuntansi membawahi:

1. Sub Bidang Pengolah Data Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengolahan data keuangan daerah.

Sub Bidang Pengolahan Data Keuangan dalam melaksanakan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengolahan data keuangan daerah;
- 2) penyiapan bahan dan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengolahan data keuangan daerah;
- 3) penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis penatausahaan keuangan daerah;
- 4) pelaksanaan evaluasi laporan pertanggungjawaban fungsional;
- 5) pelaksanaan rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban fungsional;
- 6) penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD;
- 7) pelaksanaan pembinaan teknis penatausahaan keuangan daerah;
- 8) penyiapan bahan pemberian peringatan/teguran atas keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban fungsional;
- 9) penyiapan bahan penyelesaian permasalahan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi/TPTGR Keuangan dan Barang Milik Daerah;
- 10) penyiapan bahan penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
- 11) pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah;
- 12) penyiapan bahan dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengolahan data keuangan Daerah;
- 13) penyiapan bahan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang pengolahan data keuangan daerah;
- 14) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi.

2. Sub Bidang Pelaporan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pelaporan keuangan daerah.

Sub Bidang Pelaporan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang pelaporan keuangan daerah;
- 2) penyiapan bahan dan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pelaporan keuangan daerah;
- 3) penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pelaporan keuangan daerah;
- 4) penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaporan keuangan daerah;

- 5) penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis penatausahaan keuangan daerah;
- 6) penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD;
- 7) penyiapan bahan dan penyusun Neraca;
- 8) pelaksanaan rekonsiliasi laporan keuangan;
- 9) pelaksanaan pembinaan teknis penatausahaan keuangan daerah;
- 10) penyiapan bahan dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pelaporan keuangan daerah;
- 11) penyiapan bahan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang pelaporan keuangan daerah; dan
- 12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi.

e. BIDANG ANGGARAN

Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang tugas Badan di bidang anggaran yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan kebijakan teknis di bidang sistem penganggaran, anggaran dan penyusunan APBD;
- 2) pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang sistem penganggaran, anggaran dan penyusunan APBD;
- 3) perumusan kebijakan di bidang anggaran, sistem penganggaran, perencanaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta penyusunan APBD;
- 4) pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran, sistem penganggaran, perencanaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta penyusunan APBD;
- 5) perumusan prosedur penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
- 6) penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran;
- 7) pengendalian penyusunan anggaran;
- 8) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang sistem penganggaran, anggaran dan penyusunan APBD;
- 9) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang penganggaran, anggaran dan penyusunan APBD;
- 10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Anggaran membawahi:

1. Sub Bidang Sistem Penganggaran dipimpin oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang sistem penganggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Sistem Penganggaran menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang sistem penganggaran pendapatan dan belanja daerah;
- 2) penyiapan bahan dan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang sistem penganggaran pendapatan dan belanja daerah;

- 3) penyiapan bahan penyusunan kebijakan perencanaan anggaran daerah;
- 4) penyiapan bahan penyusunan rancangan pendapatan dan belanja daerah;
- 5) penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA-SKPD;
- 6) penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan;
- 7) penyiapan bahan penyusunan kebijakan perencanaan anggaran daerah;
- 8) penyiapan bahan dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang sistem penganggaran pendapatan dan belanja daerah;
- 9) penyiapan bahan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang penerimaan sistem penganggaran pendapatan dan belanja daerah;
- 10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.

2. Sub Bidang Anggaran dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pelaksanaan evaluasi dan pelapor dan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan di bidang anggaran dan penyusunan APBD.

Sub Bidang Anggaran dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang anggaran dan penyusunan APBD;
- 2) penyiapan bahan dan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang anggaran dan penyusunan APBD;
- 3) penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan;
- 4) penyiapan bahan penyusunan kebijakan perencanaan anggaran Daerah;
- 5) penyiapan bahan penyusunan rancangan pendapatan dan belanja Daerah;
- 6) pelaksanaan verifikasi RKA/RKPA-SKPD dan DPA/DPPA-SKPD;
- 7) penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA-SKPD;
- 8) penyiapan bahan penyusunan Anggaran Pembiayaan Daerah;
- 9) pelaksanaan penyusunan dan administrasi anggaran daerah;
- 10) perumusan bahan rancangan peraturan Daerah tentang APBD rancangan peraturan daerah perubahan APBD; dan
- 11) pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan penyusunan dan administrasi anggaran;
- 12) penyiapan bahan dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang anggaran dan penyusunan APBD;
- 13) penyiapan bahan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang anggaran dan penyusunan APBD;

- 14) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.

f. BIDANG PENDAPATAN

Bidang Pendapatan dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pendapatan asli daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendapatan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, keberatan, pengawasan kepatuhan dan pelaporan pendapatan asli daerah;
- 2) pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, keberatan, pengawasan kepatuhan dan pelaporan pendapatan asli daerah;
- 3) pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, keberatan, pengawasan kepatuhan dan pelaporan pendapatan asli daerah;
- 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, keberatan, pengawasan kepatuhan dan pelaporan pendapatan asli daerah;
- 5) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, keberatan, pengawasan kepatuhan dan pelaporan pendapatan asli daerah;
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Pendapatan membawahi:

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.
2. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang penagihan, keberatan dan pengurangan pendapatan asli daerah.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Penagihan dan Keberatan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang penagihan, keberatan dan pengurangan pendapatan asli daerah;
2. penyiapan bahan dan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penagihan, keberatan dan pengurangan pendapatan asli daerah;
3. penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penagihan, keberatan dan pengurangan pendapatan asli daerah;
4. pelaksanaan penagihan, keberatan dan pengurangan pajak daerah;
5. penyiapan bahan dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penagihan, keberatan dan pengurangan pendapatan asli daerah;
6. penyiapan bahan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang penagihan, keberatan dan pengurangan pendapatan asli daerah;

7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan.

3. Sub Bidang Pengawasan Kepatuhan dipimpin oleh Kepala sub Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan kepatuhan pendapatan asli daerah.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Pengawasan Kepatuhan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengawasan kepatuhan pendapatan asli daerah;
2. penyiapan bahan dan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengawasan kepatuhan pendapatan asli daerah;
3. penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan kepatuhan pendapatan asli daerah;
4. penyiapan bahan dan pemantauan, dan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengawasan kepatuhan pendapatan asli daerah;
5. penyiapan bahan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengawasan kepatuhan pendapatan asli daerah;
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendapatan.

g. BIDANG PENGELOLA ASET

Bidang Pengelola Aset dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang pengelolaan aset barang milik daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengelola Aset menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan, pemindahtanganan, penghapusan, pengamanan, pengawasan dan pengendalian aset barang milik daerah;
- 2) pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan, pemindahtanganan, penghapusan, pengamanan, pengawasan dan pengendalian aset barang milik daerah;
- 3) penyelenggaraan perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan, pemindahtanganan, penghapusan, pengamanan, pengawasan dan pengendalian aset barang milik daerah;
- 4) penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah berupa rumah negara;
- 5) penyelenggaraan pengelolaan ganti rugi dan sanksi terkait aset barang milik daerah;
- 6) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan, pemindahtanganan, penghapusan, pengamanan, pengawasan dan pengendalian aset barang milik daerah;
- 7) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan, pemindahtanganan, penghapusan,

pengamanan, pengawasan dan pengendalian aset barang milik daerah;

8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Pengelola Aset membawahi:

1. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.

2. Sub Bidang Penatausahaan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset dipimpin oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang penatausahaan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan aset barang milik daerah.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Penatausahaan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang penatausahaan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan aset barang milik daerah;
- 2) penyiapan bahan dan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penatausahaan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan aset barang milik daerah;
- 3) pelaksanaan penatausahaan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan aset barang milik daerah;
- 4) penyiapan bahan dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penatausahaan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan aset barang milik daerah;
- 5) penyiapan bahan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan pemerintahan Daerah di bidang penatausahaan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan aset barang milik daerah;
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Aset.

3. Sub Bidang Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Aset dipimpin oleh Kepala Sub Bidang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengamanan dan pemeliharaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset barang milik daerah.

Dalam melaksanakan tugas Sub Bidang Pengamanan, Pengawasan dan Pengendalian Aset menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengamanan dan pemeliharaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset barang milik daerah;
- 2) penyiapan bahan dan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengamanan dan pemeliharaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset barang milik daerah;
- 3) pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset barang milik daerah;

- 4) pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan ganti rugi dan sanksi terkait aset barang milik daerah;
- 5) pelaksanaan koordinasi pengamanan dan pemeliharaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset barang milik daerah;
- 6) penyiapan bahan dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengamanan dan pemeliharaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset barang milik daerah;
- 7) penyiapan bahan dan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengamanan dan pemeliharaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset barang milik daerah;
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Aset.

h. Kelompok Jabatan Fungsional
Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah menurut Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BPKPAD seperti yang tertera dibawah ini yaitu:

Gambar 2.1
Struktur Organisasi BPKPAD



2.1.2 Sumber Daya Manusia Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Tarakan, maka diperlukan adanya dukungan baik berupa Sumber Daya Manusia (SDM)

maupun sarana dan prasarananya. Adapun sumber daya yang dimiliki tersebut adalah sebagai berikut:

1. Data Kepegawaian

Tabel 2.1
Jumlah PNS, PPPK dan Non PNS
BPKPAD Kota Tarakan

Pegawai	Jumlah
Struktural	18
Jabatan Fungsional Khusus	2
Jabatan Fungsional Umum	63
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja (P3K)	9
Non ASN Daerah	3
Jumlah	95

Sumber Data Subbag Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.2
Data Aparatur Sipil Negara
BPKPAD Kota Tarakan
(Berdasarkan Pangkat/Golongan)

Jabatan	Pangkat	Gol.	Jumlah	Jenis Kelamin	
				Laki-laki	Perempuan
Kepala	PembinaTK I	IV/b	1	1	-
Sekretaris	-	-	-	-	-
Kepala Bidang	Pembina	IV/a	4	-	4
Kepala Bidang	Penata Tk.I	III/d	1	1	-
Kepala Subbag/Sub.Bidang	Pembina	IV/a	5	4	1
	Penata Tk.I	III/d	6	3	3
	Penata	III/c	1	1	-
Jabatan Fungsional	Pembina	IV/a	2	2	-
Staf	Penata Tk.I	III/d	17	10	7
	Penata	III/c	5	3	2
	Penata Muda Tk.I	III/b	21	12	9
	Penata Muda	III/a	13	8	5
	Pengatur Tk.I	II/d	6	5	1
	Pengatur	II/c	1	1	-
Jumlah			83	51	32

Tabel 2.3
Data Aparatur Sipil Negara dan Non ASN BPKPAD Kota Tarakan

NO	BAGIAN/BIDANG	ASN	PPPK	NON ASN	L	P	TINGKAT PENDIDIKAN						
							SLTP	SLTA	D-3	D-4	S1	S2	S3
1	Kepala Badan	1	-		1	-	-	-	-	-	1	-	-
2	Sekretaris	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Subbag. Umum dan Kepegawaian	5	-	3	6	2	1	2	-	-	4	1	-
4	Subbag. Perencanaan dan Keuangan	6	-	-	2	4	-	-	2	-	4	-	-
5	Bidang Perbendaharaan	14	1	-	7	8	-	2	3	-	8	2	-
6	Bidang Akuntansi	10	2	-	5	7	-	1	-	-	9	2	-
7	Bidang Anggaran	5	-	-	4	1	-	-	-	-	3	2	-
8	Bidang Pendapatan	28	5	-	23	10	-	14	3	-	13	2	-
9	Bidang Pengelolaan Aset	14	1	-	12	3	-	3	1	-	8	3	-
	Jumlah	83	9	3	60	35	1	22	11	-	50	12	-

Sumber data Subbag Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.4
Data ASN Berdasarkan Eselon BPKPAD Kota Tarakan

Eselon	Formasi	Terisi	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
II/b	1	1	1	-
III/a	-	-	-	-
III/b	5	5	1	4
IV a	14	14	10	4
Jumlah	20	20	12	8

2. Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan serta program dan kegiatan yang dilaksanakan maka Kantor BPKPAD Kota Tarakan dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang kenyamanan kerja Sarpras tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.5 dibawah ini:

Tabel 2.5
Daftar Sarana dan Prasarana Pendukung

JENIS	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
Kendaraan roda empat	10	unit	Baik
Kendaraan roda dua	30	unit	Baik
Ruang rapat	3	buah	Baik
Mesin ketik	2	unit	Baik
PC Unit	15	buah	Baik
PC Server	1	buah	Baik
UPS	5	buah	Baik
Printer	50	unit	unit
White Board	2	buah	baik
LCD Proyektor	4	buah	Baik
Komputer/Note Book	32	unit	unit
Kamera Foto Digital	1	buah	Baik
Wireless Mic.	2	buah	Baik
Gambar presiden/Wapres	4	buah	Baik
Sofa	3	buah	Baik
Kursi Tamu	3	stel	Baik
Meja Rapat	49	buah	Baik
Meja ½ biro	100	buah	Baik
Kursi Putar	111	buah	Baik
Almari besi	2	buah	Baik
Almari Kayu/Arsip	10	buah	Baik
Almari Kaca	2	buah	Baik
Mesin Penghisap Debu	1	buah	Baik
AC	21	unit	Baik

Sumber data Sub.Bag.Umum dan Kepegawaian

2.1.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan

Capaian kinerja BPKPAD selama periode RENSTRA secara umum menunjukkan perkembangan positif. Indikator persentase laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban sebagian besar telah mencapai target diatas 90%, bahkan pada beberapa tahun mampu melampaui target yang ditetapkan. Sementara itu nilai SAKIP Perangkat Daerah juga mengalami peningkatan signifikan dari 60,56 pada awal periode menjadi 73,04 pada akhir periode, dengan rasio capaian yang terus naik dari 87% menjadi 104%. Hal ini menggambarkan adanya peningkatan kualitas tata Kelola keuangan daerah, ketaatan terhadap standar akuntansi pemerintahan, serta perbaikan akuntabilitas kinerja perangkat daerah secara berkesinambungan. Dapat dilihat Tabel T-C.23 dan T-C.24 sebagai berikut:

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKPAD Kota Tarakan

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang tertib administrasi sesuai dengan SAP			100	100	100	100	93	99	94	97	93	99	94	97
2	Persentase layanan penunjang perangkat daerah yang tepat waktu			100	100	100	100	100	91.54	100.58	109.20	100	91.54	100.58	109.2
3	Nilai SAKIP PD			70	70	70	70	65.54	68.53	71.1	73.04	94%	98%	102%	104%

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan
BPKPAD Kota Tarakan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke -				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata - rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
-1	-3	-4	-5	-6	-8	-9	-10	-11	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota	57.056.894.751,56	52.315.881.903,00	45.621.425.248,00	65.540.861.217,00	40.855.447.152,00	41.982.824.725,00	43.632.610.013,00	44.579.406.073,00	71,60	80,25	95,64	68,02	2.827.988.821,81	1.241.319.640,33
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	17.050.358.226,00	18.634.004.301,00	8.196.878.280,00	6.511.711.960,00	6.049.463.573,00	6.707.855.130,00	3.472.569.602,00	3.389.370.474,00	35,48	36,00	42,36	52,05	-3.512.882.088,67	- 886.697.699,67
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.376.562.761,00	1.756.433.420,00	2.143.167.860,00	2.985.743.230,00	1.218.155.213,17	1.476.258.771,00	1.739.305.246,00	2.379.277.015,00	88,49	84,05	81,16	79,69	536.393.489,67	387.040.600,61
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.497.705.996,44	1.789.815.701,00	2.042.693.220,00	2.381.938.142,00	1.251.131.768,00	1.341.850.839,00	1.595.988.977,00	1.750.368.144,00	83,54	74,97	78,13	73,49	294.744.048,52	166.412.125,33

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan

Kelompok sasaran layanan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan yang menjadi penerima manfaat utama dari tugas dan fungsi perangkat daerah. Penetapan kelompok sasaran ini dimaksudkan agar setiap program, kegiatan dan kebijakan yang dirancang dapat tepat guna, tepat sasaran serta memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas tata Kelola keuangan daerah. Adapun kelompok sasaran layanan BPKPAD meliputi:

- a. Masyarakat wajib pajak dan retribusi sebagai pengguna utama layanan adalah hal pembayaran, konsultasi maupun penyelesaian administrasi perpajakan daerah.
- b. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota yang memperoleh layanan terkait perencanaan anggaran, penyaluran dan pertanggungjawaban keuangan serta pengelolaan barang milik daerah.
- c. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai mitra koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan, transfer dana serta pelaporan kinerja pengelolaan keuangan daerah.
- d. Dunia usaha dan investor yang berhubungan dengan proses pemenuhan kewajiban pajak dan retribusi maupun pemanfaatan aset daerah dalam mendukung iklim investasi.
- e. Masyarakat luas sebagai penerima manfaat akhir dari tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta mendukung peningkatan pelayanan publik.

Dengan penetapan kelompok sasaran tersebut BPKPAD berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang efektif, adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan. Kelompok sasaran ini juga menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan Pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RENSTRA BPKPAD.

2.1.5 Mitra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan jangkauan pelayanan publik, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah membangun Kerjasama strategis dengan berbagai pihak sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah kota yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran serta pengelolaan barang milik daerah.
- b. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai pembina, pengawas, sekaligus mitra koordinasi dalam hal kebijakan fiskal, transfer keuangan dan pelaporan kinerja keuangan daerah.
- c. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dalam fungsi legislatif, penganggaran dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
- d. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Inspektorat sebagai mitra pengawasan dan penjaminan kualitas akuntabilitas keuangan daerah.
- e. Perbankan dan Lembaga Keuangan sebagai mitra dalam penyimpanan kas daerah, transaksi pembayaran pajak/retribusi serta pengelolaan system keuangan berbasis elektronik.
- f. Masyarakat Wajib Pajak dan Dunia Usaha sebagai mitra utama dalam pemenuhan kewajiban pajak dan retribusi daerah.
- g. Lembaga Swasta, Media dan Akademisi sebagai mitra dalam edukasi, sosialisasi dan penguatan kapasitas tata kelola keuangan daerah.

Dengan kemitraan yang baik BPKPAD diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, memperkuat akuntabilitas serta memberikan layanan yang semakin transparan dan profesional.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah masih dijumpai berbagai permasalahan yang perlu dilakukan salah satu permasalahan yaitu belum tingginya kualitas tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang disebabkan oleh terbatasnya pengawasan serta masih lemahnya sistem pengendalian internal, selain itu diseminasi regulasi dan sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah belum berjalan optimal sehingga masih diperlukan peningkatan intensitas sosialisasi serta fasilitasi kepada perangkat daerah pengguna, dan permasalahan juga terlihat pada keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi teknis yang berimplikasi terhadap efektivitas pelaksanaan tugas BPKPAD, sejalan dengan itu isu strategis yang perlu direspon mencakup penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset, peningkatan kapasitas SDM, integrasi kebijakan fiskal dengan isu pembangunan berkelanjutan, pada tabel 2.1

Tabel 2.6
Pemetaan Permasalahan dan Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN BPKPAD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Peningkatan pengawasan dan pembinaan sistem pengendalian internal	Belum tingginya kualitas tata kelola pemerintahan dan Keuangan	-	Green Financing & Anggaran Berkelanjutan	Mendorong green financing, pembiayaan rendah karbon, dan belanja daerah yang ramah lingkungan	Penyusunan strategi fiskal daerah untuk mendukung investasi energi bersih	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel
Peningkatan intensitas diseminasi kepada perangkat daerah			Pengelolaan Aset Daerah Berbasis Efisiensi Energi & Lingkungan	Mendorong efisiensi energi, energi terbarukan, dan green building	Alokasi anggaran daerah untuk pencegahan, penanggulangan, dan rehabilitasi lahan	
Pemenuhan jumlah dan kapasitas SDM			Transparansi & Akuntabilitas Anggaran dalam Adaptasi Perubahan Iklim	Integrasi indikator lingkungan dalam laporan akuntabilitas kinerja keuangan daerah	Perencanaan jangka panjang nilai aset daerah yang berdampak kenaikan muka laut	
Peningkatan intensitas fasilitasi terhadap perubahan sistem dan aplikasi kepada perangkat daerah						

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran BPKPAD merupakan perumusan strategis yang memiliki prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah sebagai dasar penyusunan kinerja BPKPAD selama periode 5 tahun (tahun 2025-2029) pada bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah sesuai dengan tujuan akhir dalam mewujudkan Visi Kepala Daerah yaitu:

“Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Cerdas yang bertumpu pada sektor Jasa, Perdagangan, Perikanan Kelautan dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Maju menuju Masyarakat Sejahtera.”

Dalam mewujudkan visi tersebut ditetapkan 5 misi serta ditetapkan tujuan untuk setiap misi dan sasaran untuk setiap tujuan yang diharapkan dapat diwujudkan untuk kesejahteraan masyarakat kota tarakan. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan dan petunjuk bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Misi yang selaras dengan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan adalah Misi Ke-4 (empat) yaitu: *“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang adatif dan responsif serta menjaga stabilitas ketertiban dan ketentraman kota”*.

Sejalan dengan hal tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan menetapkan dua tujuan strategis yang menjadi fokus dalam dokumen Rencana Strategis 2025–2029, yaitu:

- 1) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan, Penerimaan dan Tata Kelola Aset Daerah.
- 2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran memiliki korelasi dengan pernyataan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh kepala daerah. Tujuan sebagai arah untuk merumuskan sasaran dan kebijakan.

Sedang sasaran merupakan hasil nyata yang ingin dicapai oleh BPKPAD dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah BPKPAD disajikan pada tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan
dan Aset Daerah Kota Tarakan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
5.02.000.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah											
- Meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan, Perencanaan dan Tata Kelola Aset Daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah / IPKD (Indeks)	70,69	85	85	85	85	85	85	
			Rasio Realisasi Pendapatan Asli Daerah (%)	103,06	100	100	100	100	100	100	
			Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (IPABMD) (Indeks)	2,52	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	
			Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	22,26	23	24	25	26	27	28	
			Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	15,98	17	18	19	20	21	22	
		Meningkatnya Tata Kelola BPKPAD	Nilai SAKIP (Nilai)	73,04	73,05	73,06	73,07	73,08	73,09	73,10	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	88,46	90	91	92	93	94	95	

3.2 Strategi

Dalam rangka mewujudkan tata Kelola keuangan dan aset daerah yang transparan, akuntabel, adaptif serta berdaya saing Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan menyusun penahapan Pembangunan secara bertahap mulai tahun 2026 hingga 2030.

Strategi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan sebagai berikut:

- Tahap I (2026)
Fokus diarahkan pada penguatan tata Kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel melalui optimalisasi pendapatan, peningkatan pengendalian internal serta perbaikan basis data aset daerah secara terpadu.
- Tahap II (2027)
Menekankan pada pemanfaatan aset daerah secara lebih produktif dan berkelanjutan dengan dukungan teknologi digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan instrumen lingkungan hidup agar Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mampu berperan dalam mendorong efisiensi energi dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih modern.
- Tahap III (2028)
Diarahkan pada penerapan tata kelola berbasis digital yang terintegrasi penuh dengan memanfaatkan teknologi *big data* dan sistem informasi keuangan yang andal. Pada tahap ini BPKPAD dituntut untuk mempercepat pelayanan publik di bidang fiskal, meningkatkan transparansi, serta mendukung efisiensi belanja daerah.
- Tahap IV (2029)
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah melakukan konsolidasi pengelolaan aset dan keuangan daerah secara menyeluruh. Penerapan sistem pelaporan kinerja yang terintegrasi dengan *e-government* mendorong akuntabilitas fiskal yang lebih kuat, sekaligus memperkuat kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi dan transparansi yang lebih tinggi.
- Tahap V (2030)
Menjadi momentum transformasi BPKPAD menjadi pusat unggulan dalam tata kelola fiskal daerah yang modern. Dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta pemanfaatan teknologi informasi, BPKPAD diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap terciptanya *good governance*, kemandirian fiskal dan peningkatan daya saing daerah yang berkelanjutan

Tabel 3.2
Strategi Badan

Penahapan Pembangunan	TAHAP 1	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
	(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Renstra BPKPAD	Penguatan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi melalui optimalisasi pendapatan serta penataan database aset daerah secara terpadu	Pemanfaatan aset daerah diarahkan untuk menunjang layanan publik yang berbasis teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan BPKPAD agar mampu beradaptasi dengan literasi digital dan pengelolaan keuangan modern	BPKPAD memperkuat integrasi sistem keuangan dan aset daerah dengan memanfaatkan teknologi big data. Aset daerah mulai difokuskan sebagai instrumen strategis untuk mendorong investasi dan inovasi layanan publik. Analisis keuangan berbasis data dikedepankan untuk meningkatkan efisiensi belanja daerah.	Mengkonsolidasikan pengelolaan aset daerah agar lebih standar, terukur, dan mampu mendukung daya saing kota. Akuntabilitas fiskal diperkuat melalui sistem pelaporan keuangan yang semakin terintegrasi dan responsif terhadap tuntutan transparansi publik	BPKPAD bertransformasi menjadi pusat unggulan tata kelola fiskal daerah yang mendukung terwujudnya smart governance sejalan dengan visi Kota Cerdas yang berdaya saing dan maju

3.3 Arah Kebijakan

Arah kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam mengimplementasikan strategi yang selaras dengan Arah kebijakan RPJMD ada pada Tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan

	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
(1)	(1)	(3)	(4)
	Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yang menjadi payung hukum dasar bagi pengelolaan keuangan daerah, termasuk hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta kerangka penyusunan APBD	Penguatan Sumber Daya Manusia, difokuskan pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial dan budaya, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif	1. Peningkatan penindakan terhadap pelanggaran dan penyimpangan dalam pengelolaan aset dan pajak daerah
	PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan detail pelaksanaan oleh pejabat pengguna anggaran/ barang daerah, termasuk tugas mereka dalam perencanaan anggaran, pelaporan, pengelolaan utang dan piutang, serta prosedur pengelolaan barang milik daerah seperti pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, dan pemusnahan	Upaya pemenuhan Sarana dan Prasarana dasar (air bersih, sanitasi, rumah layak huni, energi) serta infrastruktur penunjang perekonomian	2. Peningkatan akses dengan pihak eksternal sebagai pengembang aplikasi SIPD yang menyebabkan keterlambatan proses di keuangan daerah
	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang menjadi dasar bagi regulasi pajak dan retribusi daerah serta distribusi keuangan pusat-daerah	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi, difokuskan pada percepatan pertumbuhan perekonomian industri dan UMKM, peningkatan kapasitas riset inovasi dan digitalisasi, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja	3. Peningkatan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak daerah

	PMK No. 67 Tahun 2024 mengatur penyelenggaraan pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum – mencakup perencanaan, penganggaran, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, hingga evaluasi dan pemantauan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, difokuskan pada penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas ASN berbasis Merit System, pondasi penataan regulasi, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	4. Optimalisasi validasi data piutang Pajak daerah
	PMK No. 25 Tahun 2024 mengatur secara mendetail pengelolaan DAK Fisik mulai dari perencanaan, penganggaran, penyaluran, penggunaan sisa, penatausahaan hingga pelaporan dan evaluasi	Pemantapan Ketahanan Alam dan Lingkungan, difokuskan pada optimalisasi peningkatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana, meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; penguatan standarisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup	5. Peningkatan SDM dalam pengelolaan pajak dan retribusi
	Permendagri No. 77 Tahun 2020 menjadi panduan teknis pelaksanaan hibah dan bansos dari APBD daerah – meliputi identifikasi kebutuhan, penganggaran, penyaluran, pengawasan, hingga evaluasi dan pertanggungjawaban secara		6. Peningkatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap pengelolaan keuangan daerah
			7. Peningkatan pemberian insentif dan sanksi yang belum efektif dalam mendorong tata kelola yang baik

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan Perangkat Daerah

Perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan Tahun 2025–2029 dilakukan untuk menjamin keterkaitan langsung antara arah kebijakan, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Tarakan, serta mendukung pencapaian kinerja organisasi.

Program-program yang ditetapkan disusun dengan pendekatan *cascading*, yaitu menurunkan tujuan dan sasaran ke dalam bentuk kegiatan dan subkegiatan yang memiliki *output* dan *outcome* yang terukur. Setiap program disusun berdasarkan tugas dan fungsi yang melekat pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan, serta merujuk pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, perumusan ini juga memperhatikan prioritas pembangunan daerah.

Seluruh elemen tersebut dijabarkan secara rinci dalam Tabel 4.1, Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 yang menggambarkan keterkaitan antara NSPK dan sasaran RPJMD dengan tujuan, sasaran, *outcome*, *output*, indikator kinerja, hingga struktur program, kegiatan, dan subkegiatan.

Berdasarkan pemetaan yang diuraikan dalam Tabel 4.1, Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Seluruh rencana program mengacu pada *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024* tentang Perubahan Kedua atas *Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021*, yang menetapkan pemutakhiran kodefikasi program dan kegiatan pembangunan daerah.

Perencanaan ini menjadi dasar dalam menentukan indikator kinerja, target capaian, serta estimasi kebutuhan anggaran atau pagu indikatif selama periode lima tahun. Dengan demikian, setiap intervensi yang dirancang bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang konkret, terukur, dan berkontribusi langsung terhadap prioritas pembangunan daerah.

Rincian program, kegiatan, subkegiatan, berikut target kinerja dan pembiayaan indikatifnya dapat dilihat pada Tabel 4.1, Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.02 - KEUANGAN					109.073.190.785,48		109.073.190.785,48		109.073.190.785,48		109.073.190.785,48		109.073.190.785,48	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					92.489.770.085,48		92.489.770.085,48		92.489.770.085,48		92.489.770.085,48		92.489.770.085,48	
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	Persentase tindaklanjut evaluasi SAKIP (%)	100	100	100	86.287.446.685,48	100	86.222.446.685,48	100	86.287.446.685,48	100	86.287.446.685,48	100	86.287.446.685,48	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Layanan Kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	88,46	89	90	6.202.323.400	91	6.267.323.400	92	6.202.323.400	93	6.202.323.400	94	6.202.323.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					9.186.220.990		9.186.220.990		9.186.220.990		9.186.220.990		9.186.220.990	
Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	95	95	95	5.682.221.000	95	5.682.221.000	95	5.682.221.000	95	5.682.221.000	95	5.682.221.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	37	40	40	2.780.012.720	40	2.780.012.720	40	2.780.012.720	40	2.780.012.720	40	2.780.012.720	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	33	40	40		40		40		40		40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	100	723.987.270	100	723.987.270	100	723.987.270	100	723.987.270	100	723.987.270	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					3.904.681.950		3.904.681.950		3.904.681.950		3.904.681.950		3.904.681.950	
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	100	100	100	3.904.681.950	100	3.904.681.950	100	3.904.681.950	100	3.904.681.950	100	3.904.681.950	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					3.492.517.760		3.492.517.760		3.492.517.760		3.492.517.760		3.492.517.760	
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	100	100	100	3.492.517.760	100	3.492.517.760	100	3.492.517.760	100	3.492.517.760	100	3.492.517.760	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan

TOTAL KESELURUHAN					109,073,190,785.48		109,073,190,785.48		109,073,190,785.48		109,073,190,785.48		109,073,190,785.48	

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 4.2
Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan RENSTRA Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah							
- Meningkatnya akuntabilitas keuangan pemerintah daerah	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel				Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)		
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan, Penerimaan dan Tata Kelola Aset Daerah			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah / IPKD (Indeks)		
					Rasio Realisasi Pendapatan Asli Daerah (%)		
					Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (IPA BMD) (Indeks)		
					Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)		
					Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)		
			Meningkatnya tata kelola perbendaharaan		Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Bidang Perbendaharaan
				Terlaksananya penatausahaan keuangan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)		
					Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)		
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)		
					Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	5.02.02.2.02.0003 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	5.02.02.2.02.0006 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	
					Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	5.02.02.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	
					Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	5.02.02.2.02.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya dana darurat	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
			Meningkatnya tata kelola aset daerah		Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Bidang aset
				Tersusunnya perencanaan pengelolaan BMD	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kegiatan
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)		
					Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)		
					Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)		
					Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga	Sub Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01.0002 - Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01.0003 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01.0004 - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				Tersusunnya penatausahaan pengelolaan BMD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kegiatan
					Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)		
					Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)		
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)		
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0006 - Inventarisasi Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0011 - Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	5.02.03.2.01.0012 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
				Terlaksananya pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kegiatan
					Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
				Terlaksananya pengamanan dan pengawasan pengelolaan BMD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kegiatan
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0009 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				Terlaksananya penilaian BMD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kegiatan
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Bidang Pendapatan
				Terwujudnya kepatuhan wajib pajak	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)		
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
				Tersedianya layanan dan konsultasi pajak daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan
					Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)		
					Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	
				Tersusunnya perencanaan, pendataan dan penilaian pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan
					Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)		
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)		
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
					Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
				Terlaksananya penagihan pajak daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)		
					Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Meningkatnya tata kelola anggaran		Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Bidang Anggaran
					Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kegiatan
					Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)		
					Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)		
					Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)		
				Tersusunnya Perda dan Perkada APBD	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)		
					Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)		
					Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)		
				Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
					Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
					Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01.0003 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	
					Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01.0004 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	
				Tersusunnya Perda dan Perkada APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
					Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
				Tersusunnya laporan penggunaan dana transfer (pendapatan dan belanja)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kegiatan
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (Dokumen)	5.02.02.2.01.0010 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.01.0011 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan		Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Bidang akuntansi
				Tersusunnya laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kegiatan
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)		
					Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)		
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)		
					Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)		
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)		
					Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)		
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	5.02.02.2.03.0001 - Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	5.02.02.2.03.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	
					Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	5.02.02.2.03.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.03.0009 - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	
					Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.03.0010 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.02.2.03.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	
					Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	5.02.02.2.03.0012 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Tata Kelola BPKPAD			Nilai SAKIP (Nilai)		
					Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)		
			Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja		Persentase tindakanlanjut evaluasi SAKIP (%)	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bidan Sekretariat
				Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	5.02.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Meningkatnya Layanan Kesekretariatan		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kinerja dan kompetensi ASN	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Tersedianya layanan administrasi umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5.02.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terkelolanya data Barang Milik Daerah dalam aplikasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya layanan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.02.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4.3
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
5.02 - KEUANGAN				109.073.190.785,48		109.073.190.785,48		109.073.190.785,48		109.073.190.785,48		109.073.190.785,48		
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				92.489.770.085,48		92.489.770.085,48		92.489.770.085,48		92.489.770.085,48		92.489.770.085,48		
Meningkatnya Layanan Keseekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan (Indeks)	88,46	90	6.202.323.400,00	91	6.267.323.400,00	92	6.202.323.400,00	93	6.202.323.400,00	94	6.202.323.400,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0,00		65.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Meningkatnya kinerja dan kompetensi ASN	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0,00	1	65.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		65.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0,00	1	65.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.320.000.000,00		1.320.000.000,00		1.320.000.000,00		1.320.000.000,00		1.320.000.000,00		
Tersedianya layanan administrasi umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	44	57	1.320.000.000,00	57	1.320.000.000,00	57	1.320.000.000,00	57	1.320.000.000,00	57	1.320.000.000,00		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	35	39		39		39		39		39			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	18	18		18		18		18		18			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	64	37		37		37		37		37			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	57	57		57		57		57		57			
5.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	18	18	20.000.000,00	18	20.000.000,00	18	20.000.000,00	18	20.000.000,00	18	20.000.000,00		
5.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	64	37	10.000.000,00	37	10.000.000,00	37	10.000.000,00	37	10.000.000,00	37	10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
5.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	10	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00		
5.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				375.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	57	57	375.000.000,00	57	375.000.000,00	57	375.000.000,00	57	375.000.000,00	57	375.000.000,00		
5.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	35	39	450.000.000,00	39	450.000.000,00	39	450.000.000,00	39	450.000.000,00	39	450.000.000,00		
5.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
5.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	44	57	350.000.000,00	57	350.000.000,00	57	350.000.000,00	57	350.000.000,00	57	350.000.000,00		
5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terkelolanya data Barang Milik Daerah dalam aplikasi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	25	25	200.000.000,00	25	200.000.000,00	25	200.000.000,00	25	200.000.000,00	25	200.000.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	37	30		30		30		30		30			
5.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	37	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00		
5.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	25	25	150.000.000,00	25	150.000.000,00	25	150.000.000,00	25	150.000.000,00	25	150.000.000,00		
5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.620.408.000,00		3.620.408.000,00		3.620.408.000,00		3.620.408.000,00		3.620.408.000,00		
Tersedianya layanan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	3.620.408.000,00	12	3.620.408.000,00	12	3.620.408.000,00	12	3.620.408.000,00	12	3.620.408.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
5.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00		
5.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				2.032.000.000,00		2.032.000.000,00		2.032.000.000,00		2.032.000.000,00		2.032.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.032.000.000,00	12	2.032.000.000,00	12	2.032.000.000,00	12	2.032.000.000,00	12	2.032.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	114.808.000,00	12	114.808.000,00	12	114.808.000,00	12	114.808.000,00	12	114.808.000,00		
5.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.453.600.000,00		1.453.600.000,00		1.453.600.000,00		1.453.600.000,00		1.453.600.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.453.600.000,00	12	1.453.600.000,00	12	1.453.600.000,00	12	1.453.600.000,00	12	1.453.600.000,00		
5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.061.915.400,00		1.061.915.400,00		1.061.915.400,00		1.061.915.400,00		1.061.915.400,00		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	7	1.061.915.400,00	34	1.061.915.400,00	34	1.061.915.400,00	34	1.061.915.400,00	34	1.061.915.400,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	73		73		73		73		73			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	59	153		21		21		21		21			
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2		2		2		2		2			
5.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	59	153	25.000.000,00	21	25.000.000,00	21	25.000.000,00	21	25.000.000,00	21	25.000.000,00		
5.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				223.000.000,00		223.000.000,00		223.000.000,00		223.000.000,00		223.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	7	223.000.000,00	34	223.000.000,00	34	223.000.000,00	34	223.000.000,00	34	223.000.000,00		
5.02.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				343.915.400,00		343.915.400,00		343.915.400,00		343.915.400,00		343.915.400,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	1	343.915.400,00	1	343.915.400,00	1	343.915.400,00	1	343.915.400,00	1	343.915.400,00		
5.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				420.000.000,00		420.000.000,00		420.000.000,00		420.000.000,00		420.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	420.000.000,00	2	420.000.000,00	2	420.000.000,00	2	420.000.000,00	2	420.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	73	50.000.000,00	73	50.000.000,00	73	50.000.000,00	73	50.000.000,00	73	50.000.000,00		
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	Persentase tindaklanjut evaluasi SAKIP (%)	100	100	86.287.446.685,48	100	86.222.446.685,48	100	86.287.446.685,48	100	86.287.446.685,48	100	86.287.446.685,48		
5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		
Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2	6.000.000,00	2	6.000.000,00	2	6.000.000,00	2	6.000.000,00	2	6.000.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
5.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	3	2.000.000,00	3	2.000.000,00	3	2.000.000,00	3	2.000.000,00	3	2.000.000,00		
5.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00		
5.02.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				86.281.446.685,48		86.216.446.685,48		86.281.446.685,48		86.281.446.685,48		86.281.446.685,48		
Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	86.281.446.685,48	12	86.216.446.685,48	12	86.281.446.685,48	12	86.281.446.685,48	12	86.281.446.685,48		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.330	1.456		1.456		1.456		1.456		1.456			
5.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				84.943.926.685,48		84.878.926.685,48		84.943.926.685,48		84.943.926.685,48		84.943.926.685,48		
5.02.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.337.520.000,00		1.337.520.000,00		1.337.520.000,00		1.337.520.000,00		1.337.520.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	1.337.520.000,00	12	1.337.520.000,00	12	1.337.520.000,00	12	1.337.520.000,00	12	1.337.520.000,00		
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				9.186.220.990,00		9.186.220.990,00		9.186.220.990,00		9.186.220.990,00		9.186.220.990,00		
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	100	100	723.987.270,00	100	723.987.270,00	100	723.987.270,00	100	723.987.270,00	100	723.987.270,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				723.987.270,00		723.987.270,00		723.987.270,00		723.987.270,00		723.987.270,00		
Tersusunnya laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	1	523.987.270,00	1	523.987.270,00	1	523.987.270,00	1	523.987.270,00	1	523.987.270,00		
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	37	37		37		37		37		37			
	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	38	38		38		38		38		38			
	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	3	1		1		1		1		1			
	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	98	98		98		98		98		98			
5.02.02.2.03.0001 - Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				69.000.010,00		69.000.010,00		69.000.010,00		69.000.010,00		69.000.010,00		
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	37	37	69.000.010,00	37	69.000.010,00	37	69.000.010,00	37	69.000.010,00	37	69.000.010,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
5.02.02.2.03.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban				105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	3	1	105.000.000,00	1	105.000.000,00	1	105.000.000,00	1	105.000.000,00	1	105.000.000,00		
5.02.02.2.03.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				249.999.860,00		249.999.860,00		249.999.860,00		249.999.860,00		249.999.860,00		
Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	38	38	249.999.860,00	38	249.999.860,00	38	249.999.860,00	38	249.999.860,00	38	249.999.860,00		
5.02.02.2.03.0009 - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				29.999.700,00		29.999.700,00		29.999.700,00		29.999.700,00		29.999.700,00		
Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	1	29.999.700,00	1	29.999.700,00	1	29.999.700,00	1	29.999.700,00	1	29.999.700,00		
5.02.02.2.03.0010 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				9.999.600,00		9.999.600,00		9.999.600,00		9.999.600,00		9.999.600,00		
Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	1	9.999.600,00	1	9.999.600,00	1	9.999.600,00	1	9.999.600,00	1	9.999.600,00		
5.02.02.2.03.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				29.988.300,00		29.988.300,00		29.988.300,00		29.988.300,00		29.988.300,00		
Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	98	98	29.988.300,00	98	29.988.300,00	98	29.988.300,00	98	29.988.300,00	98	29.988.300,00		
5.02.02.2.03.0012 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota				29.999.800,00		29.999.800,00		29.999.800,00		29.999.800,00		29.999.800,00		
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	8	8	29.999.800,00	8	29.999.800,00	8	29.999.800,00	8	29.999.800,00	8	29.999.800,00		
Tersusunnya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00		
5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00		
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	37	40	2.780.012.720,00	40	2.780.012.720,00	40	2.780.012.720,00	40	2.780.012.720,00	40	2.780.012.720,00		
5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				2.780.012.720,00		2.780.012.720,00		2.780.012.720,00		2.780.012.720,00		2.780.012.720,00		
Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	31	31	261.360.000,00	31	261.360.000,00	31	261.360.000,00	31	261.360.000,00	31	261.360.000,00		
Tersusunnya Perda dan Perkada APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	1	1	2.068.397.620,00	1	2.068.397.620,00	1	2.068.397.620,00	1	2.068.397.620,00	1	2.068.397.620,00		
Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	1	1	261.360.000,00	1	261.360.000,00	1	261.360.000,00	1	261.360.000,00	1	261.360.000,00		
	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
Tersusunnya Perda dan Perkada APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	1	1	2.068.397.620,00	1	2.068.397.620,00	1	2.068.397.620,00	1	2.068.397.620,00	1	2.068.397.620,00		
Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	31	31	261.360.000,00	31	261.360.000,00	31	261.360.000,00	31	261.360.000,00	31	261.360.000,00		
Tersusunnya Perda dan Perkada APBD	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	1	1	2.068.397.620,00	1	2.068.397.620,00	1	2.068.397.620,00	1	2.068.397.620,00	1	2.068.397.620,00		
5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	1	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	1	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00		
5.02.02.2.01.0003 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD				95.680.000,00		95.680.000,00		95.680.000,00		95.680.000,00		95.680.000,00		
Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	31	31	95.680.000,00	31	95.680.000,00	31	95.680.000,00	31	95.680.000,00	31	95.680.000,00		
5.02.02.2.01.0004 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD				95.680.000,00		95.680.000,00		95.680.000,00		95.680.000,00		95.680.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	31	31	95.680.000,00	31	95.680.000,00	31	95.680.000,00	31	95.680.000,00	31	95.680.000,00		
5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				840.445.700,00		840.445.700,00		840.445.700,00		840.445.700,00		840.445.700,00		
5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				840.445.700,00		840.445.700,00		840.445.700,00		840.445.700,00		840.445.700,00		
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	1	1	840.445.700,00	1	840.445.700,00	1	840.445.700,00	1	840.445.700,00	1	840.445.700,00		
5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				387.506.220,00		387.506.220,00		387.506.220,00		387.506.220,00		387.506.220,00		
Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	1	1	387.506.220,00	1	387.506.220,00	1	387.506.220,00	1	387.506.220,00	1	387.506.220,00		
Tersusunnya laporan penggunaan dana transfer (pendapatan dan belanja)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen)	1	1	450.255.100,00	1	450.255.100,00	1	450.255.100,00	1	450.255.100,00	1	450.255.100,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
5.02.02.2.01.0010 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				254.891.900,00		254.891.900,00		254.891.900,00		254.891.900,00		254.891.900,00		
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan (Dokumen)	1	1	254.891.900,00	1	254.891.900,00	1	254.891.900,00	1	254.891.900,00	1	254.891.900,00		
5.02.02.2.01.0011 - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				195.363.200,00		195.363.200,00		195.363.200,00		195.363.200,00		195.363.200,00		
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah (Dokumen)	1	1	195.363.200,00	1	195.363.200,00	1	195.363.200,00	1	195.363.200,00	1	195.363.200,00		
Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	95	95	5.682.221.000,00	95	5.682.221.000,00	95	5.682.221.000,00	95	5.682.221.000,00	95	5.682.221.000,00		
5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				682.221.000,00		682.221.000,00		682.221.000,00		682.221.000,00		682.221.000,00		
Terlaksananya penatausahaan keuangan daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	128	128	682.221.000,00	128	682.221.000,00	128	682.221.000,00	128	682.221.000,00	128	682.221.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)													
	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	4	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00		
5.02.02.2.02.0003 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				138.273.300,00		138.273.300,00		138.273.300,00		138.273.300,00		138.273.300,00		
Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	4	4	138.273.300,00	4	138.273.300,00	4	138.273.300,00	4	138.273.300,00	4	138.273.300,00		
5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				49.995.100,00		49.995.100,00		49.995.100,00		49.995.100,00		49.995.100,00		
Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	4	4	49.995.100,00	4	49.995.100,00	4	49.995.100,00	4	49.995.100,00	4	49.995.100,00		
5.02.02.2.02.0006 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank				78.984.200,00		78.984.200,00		78.984.200,00		78.984.200,00		78.984.200,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
dan Lembaga Keuangan Bukan Bank														
Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	1	1	78.984.200,00	1	78.984.200,00	1	78.984.200,00	1	78.984.200,00	1	78.984.200,00		
5.02.02.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				187.845.000,00		187.845.000,00		187.845.000,00		187.845.000,00		187.845.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	2	2	187.845.000,00	2	187.845.000,00	2	187.845.000,00	2	187.845.000,00	2	187.845.000,00		
5.02.02.2.02.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				60.768.100,00		60.768.100,00		60.768.100,00		60.768.100,00		60.768.100,00		
Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	1	1	60.768.100,00	1	60.768.100,00	1	60.768.100,00	1	60.768.100,00	1	60.768.100,00		
5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				156.355.300,00		156.355.300,00		156.355.300,00		156.355.300,00		156.355.300,00		
Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	128	128	156.355.300,00	128	156.355.300,00	128	156.355.300,00	128	156.355.300,00	128	156.355.300,00		
5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		
Tersedianya dana darurat	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1	1	5.000.000.000,00	1	5.000.000.000,00	1	5.000.000.000,00	1	5.000.000.000,00	1	5.000.000.000,00		
5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		5.000.000.000,00		
Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	1	1	5.000.000.000,00	1	5.000.000.000,00	1	5.000.000.000,00	1	5.000.000.000,00	1	5.000.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH				3.904.681.950,00		3.904.681.950,00		3.904.681.950,00		3.904.681.950,00		3.904.681.950,00		
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	100	100	3.904.681.950,00	100	3.904.681.950,00	100	3.904.681.950,00	100	3.904.681.950,00	100	3.904.681.950,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah				3.904.681.950,00		3.904.681.950,00		3.904.681.950,00		3.904.681.950,00		3.904.681.950,00		
Tersusunnya perencanaan pengelolaan BMD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	2	2	533.211.000,00	2	533.211.000,00	2	533.211.000,00	2	533.211.000,00	2	533.211.000,00		
	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga				308.267.600,00		308.267.600,00		308.267.600,00		308.267.600,00		308.267.600,00		
Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	2	2	308.267.600,00	2	308.267.600,00	2	308.267.600,00	2	308.267.600,00	2	308.267.600,00		
5.02.03.2.01.0002 - Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				19.982.200,00		19.982.200,00		19.982.200,00		19.982.200,00		19.982.200,00		
Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	1	19.982.200,00	1	19.982.200,00	1	19.982.200,00	1	19.982.200,00	1	19.982.200,00		
5.02.03.2.01.0003 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah				54.971.800,00		54.971.800,00		54.971.800,00		54.971.800,00		54.971.800,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	2	2	54.971.800,00	2	54.971.800,00	2	54.971.800,00	2	54.971.800,00	2	54.971.800,00		
5.02.03.2.01.0004 - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				149.989.400,00		149.989.400,00		149.989.400,00		149.989.400,00		149.989.400,00		
Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	3	3	149.989.400,00	3	149.989.400,00	3	149.989.400,00	3	149.989.400,00	3	149.989.400,00		
Tersusunnya penatausahaan pengelolaan BMD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	4	4	1.779.956.800,00	4	1.779.956.800,00	4	1.779.956.800,00	4	1.779.956.800,00	4	1.779.956.800,00		
	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah				740.000.000,00		740.000.000,00		740.000.000,00		740.000.000,00		740.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	2	2	740.000.000,00	2	740.000.000,00	2	740.000.000,00	2	740.000.000,00	2	740.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
5.02.03.2.01.0006 - Inventarisasi Barang Milik Daerah				295.000.000,00		295.000.000,00		295.000.000,00		295.000.000,00		295.000.000,00		
Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	10	10	295.000.000,00	10	295.000.000,00	10	295.000.000,00	10	295.000.000,00	10	295.000.000,00		
5.02.03.2.01.0011 - Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				494.986.000,00		494.986.000,00		494.986.000,00		494.986.000,00		494.986.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	4	4	494.986.000,00	4	494.986.000,00	4	494.986.000,00	4	494.986.000,00	4	494.986.000,00		
Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	1	1	249.970.800,00	1	249.970.800,00	1	249.970.800,00	1	249.970.800,00	1	249.970.800,00		
Terlaksananya pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	2	2	481.983.430,00	2	481.983.430,00	2	481.983.430,00	2	481.983.430,00	2	481.983.430,00		
5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				481.983.430,00		481.983.430,00		481.983.430,00		481.983.430,00		481.983.430,00		
Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	2	2	481.983.430,00	2	481.983.430,00	2	481.983.430,00	2	481.983.430,00	2	481.983.430,00		
Terlaksananya pengamanan dan pengawasan pengelolaan BMD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	1	1	959.542.400,00	1	959.542.400,00	1	959.542.400,00	1	959.542.400,00	1	959.542.400,00		
	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah				889.542.400,00		889.542.400,00		889.542.400,00		889.542.400,00		889.542.400,00		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	1	1	889.542.400,00	1	889.542.400,00	1	889.542.400,00	1	889.542.400,00	1	889.542.400,00		
5.02.03.2.01.0009 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	1	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00		
Terlaksananya penilaian BMD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	3	3	149.988.320,00	3	149.988.320,00	3	149.988.320,00	3	149.988.320,00	3	149.988.320,00		
5.02.03.2.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah				149.988.320,00		149.988.320,00		149.988.320,00		149.988.320,00		149.988.320,00		
Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	3	3	149.988.320,00	3	149.988.320,00	3	149.988.320,00	3	149.988.320,00	3	149.988.320,00		
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				3.492.517.760,00		3.492.517.760,00		3.492.517.760,00		3.492.517.760,00		3.492.517.760,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persentase)	100	100	3.492.517.760,00	100	3.492.517.760,00	100	3.492.517.760,00	100	3.492.517.760,00	100	3.492.517.760,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	
5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah				3.492.517.760,00		3.492.517.760,00		3.492.517.760,00		3.492.517.760,00		3.492.517.760,00		
Terwujudnya kepatuhan wajib pajak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	6	4	1.000.000.000,00	4	1.000.000.000,00	4	1.000.000.000,00	4	1.000.000.000,00	4	1.000.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	12	4		4		4		4		4			
5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				505.000.000,00		505.000.000,00		505.000.000,00		505.000.000,00		505.000.000,00		
5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah				495.000.000,00		495.000.000,00		495.000.000,00		495.000.000,00		495.000.000,00		
Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	12	4	495.000.000,00	4	495.000.000,00	4	495.000.000,00	4	495.000.000,00	4	495.000.000,00		
Tersedianya layanan dan konsultasi pajak daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	0	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	0	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000			
5.02.04.2.01.0009 - Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Layanan)	0	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00		
5.02.04.2.01.0015 - Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	0	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
Tersusunnya perencanaan, pendataan dan penilaian pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	1.000	1.000	955.817.960,00	1.000	955.817.960,00	1.000	955.817.960,00	1.000	955.817.960,00	1.000	955.817.960,00		
	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	200	500		500		500		500		500			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	8	20		20		20		20		20			
5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				254.319.420,00		254.319.420,00		254.319.420,00		254.319.420,00		254.319.420,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	8	20	254.319.420,00	20	254.319.420,00	20	254.319.420,00	20	254.319.420,00	20	254.319.420,00		
5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah				489.186.440,00		489.186.440,00		489.186.440,00		489.186.440,00		489.186.440,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	1.000	1.000	489.186.440,00	1.000	489.186.440,00	1.000	489.186.440,00	1.000	489.186.440,00	1.000	489.186.440,00		
5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)				212.312.100,00		212.312.100,00		212.312.100,00		212.312.100,00		212.312.100,00		
Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	200	500	212.312.100,00	500	212.312.100,00	500	212.312.100,00	500	212.312.100,00	500	212.312.100,00		
Terlaksananya penagihan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	500	500	1.486.699.800,00	500	1.486.699.800,00	500	1.486.699.800,00	500	1.486.699.800,00	500	1.486.699.800,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	100	100		100		100		100		100			
5.02.04.2.01.0010 - Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	1	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah				1.157.949.800,00		1.157.949.800,00		1.157.949.800,00		1.157.949.800,00		1.157.949.800,00		
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	500	500	1.157.949.800,00	500	1.157.949.800,00	500	1.157.949.800,00	500	1.157.949.800,00	500	1.157.949.800,00		
5.02.04.2.01.0012 - Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				128.750.000,00		128.750.000,00		128.750.000,00		128.750.000,00		128.750.000,00		
Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	100	100	128.750.000,00	100	128.750.000,00	100	128.750.000,00	100	128.750.000,00	100	128.750.000,00		

Setelah penetapan program prioritas melalui Dokumen RPJMD serta perumusan kegiatan dan subkegiatan dalam Dokumen RENSTRA, tahapan selanjutnya adalah melakukan seleksi terhadap kegiatan dan subkegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian program prioritas dimaksud. Pemilihan ini dilakukan secara cermat dengan memperhatikan keselarasan antara program prioritas dan arah pembangunan daerah, efektivitas pemanfaatan sumber daya yang tersedia, serta kapasitas Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan dalam melaksanakan pendekatan tersebut, diharapkan kegiatan dan subkegiatan yang terpilih mampu memberikan dampak nyata dalam mendorong pencapaian sasaran dan tujuan strategis perangkat daerah secara terukur. Untuk lebih jelasnya, rincian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah				
1.	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya tata kelola aset daerah	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bidang Pengelolaan Aset Daerah
			5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga	
			5.02.03.2.01.0004 - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0006 - Inventarisasi Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0009 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	
2.	5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	5.02.04.2.01 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bidang Pendapatan
			5.02.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0005 - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0007 - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	
			5.02.04.2.01.0011 - Penagihan Pajak Daerah	
			5.02.04.2.01.0013 - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.2.1 Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RENSTRA PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Bagian penting dalam proses penyusunan RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah.

Indikator Kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional dan merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan.

Penetapan Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tarakan telah menetapkan Indikator Kinerja yang akan dicapai untuk 5 (lima) tahun mendatang, yang ditampilkan dalam tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah									
2.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	
3.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah / IPKD	Indeks	70,6	85	85	85	85	85	85	
4.	Nilai SAKIP	Nilai	73,04	73	73	73	73	73	73	
5.	Rasio Realisasi Pendapatan Asli Daerah	%	103,06	100	100	100	100	100	100	
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	-	90	91	92	93	94	95	
7.	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (IPA BMD)	Indeks	2,52	2,6	2,7	2,8	2,9	3	3,1	
8.	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persentase	22,26	23	24	25	26	27	28	
9.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	15,97	17	18	19	20	21	22	

4.2.2 Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator Kinerja Kunci atau disebut juga IKK adalah Indikator Kerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan keberhasilan suatu urusan Pemerintah. Indikator kinerja juga dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu target, baik dengan menggunakan ukuran kualitatif maupun kuantitatif.

Berdasarkan dokumen RPJMD Kota Tarakan maka Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dapat ditampilkan pada tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	5.02 - KEUANGAN								
2.	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Persentase	33%	41	40	40	40	40	40
3.	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase	15,97	17	18	19	20	21	22
4.	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persentase	37%	34	40	40	40	40	40
5.	Persentase Penurunan SILPA	Persentase	-28%	5	5	5	5	5	5
6.	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persentase	95%	90	91	92	93	94	95
7.	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persentase	22,26	23	24	25	26	27	28

BAB V PENUTUP

Rancangan Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Tarakan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai pedoman arah kebijakan, program dan kegiatan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan serta aset daerah yang transparan, akuntabel serta efesiensi dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.

Penyusunan RENSTRA BPKPAD berlandaskan pada visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan. Dengan demikian RENSTRA ini tidak hanya menjadi instrumen perencanaan internal perangkat daerah, tetapi juga bagian dari upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Dengan tersusunnya RENSTRA ini, BPKPAD berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien, sehingga dapat mendukung terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

24. Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tarakan Tahun 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tarakan merupakan salah satu Instansi Pemerintah yang melayani masyarakat terhadap pelayanan Kepegawaian baik dari mulai penerimaan ASN sampai dengan proses pensiun.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dimana setiap Perangkat Daerah wajib Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan teknis operasional Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra PD memuat tentang visi, misi Kepala Daerah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan/sub kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tarakan merupakan rangkaian kegiatan yang berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas organisasi, efisiensi anggaran, optimalisasi SDM, dan pengawasan kinerja. Dalam rencana strategis ini diformulasikan perwujudan pandangan ideal yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Untuk itu dibutuhkan dukungan dari seluruh komponen, dari unsur pimpinan dan staf, dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Untuk merealisasikan keinginan dan harapan, rencana tersebut dituangkan dalam visi, misi, tujuan, dan pengukuran kinerja yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, secara jelas dan praktis, serta didasarkan pada hasil pengujian faktor internal dan eksternal, sehingga didapatkan rumusan tujuan, alokasi sumber daya, dan pencapaian sasaran yang berguna bagi organisasi dalam kurun waktu yang ditentukan.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, diperlukan upaya peningkatan kapasitas SDM, peningkatan sarana dan prasarana, perbaikan kualitas kinerja dan penyempurnaan sistem, serta intensitas koordinasi dan sosialisasi untuk meningkatkan tentang pentingnya administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal diperlukan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai pedoman dan arah dalam melaksanakan tujuan dan sasaran, sehingga Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tarakan dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia didasarkan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan dengan memperhatikan adanya

kekuatan, kelemahan peluang yang ada, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.

Adapun proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi :

- 1. Persiapan penyusunan renstra
- 2. Penyusunan rancangan awal renstra perangkat daerah
- 3. Penyusunan rancangan renstra perangkat daerah
- 4. Pelaksanaan forum perangkat daerah
- 5. Perumusan rancangan akhir renstra perangkat daerah
- 6. Penetapan renstra perangkat daerah

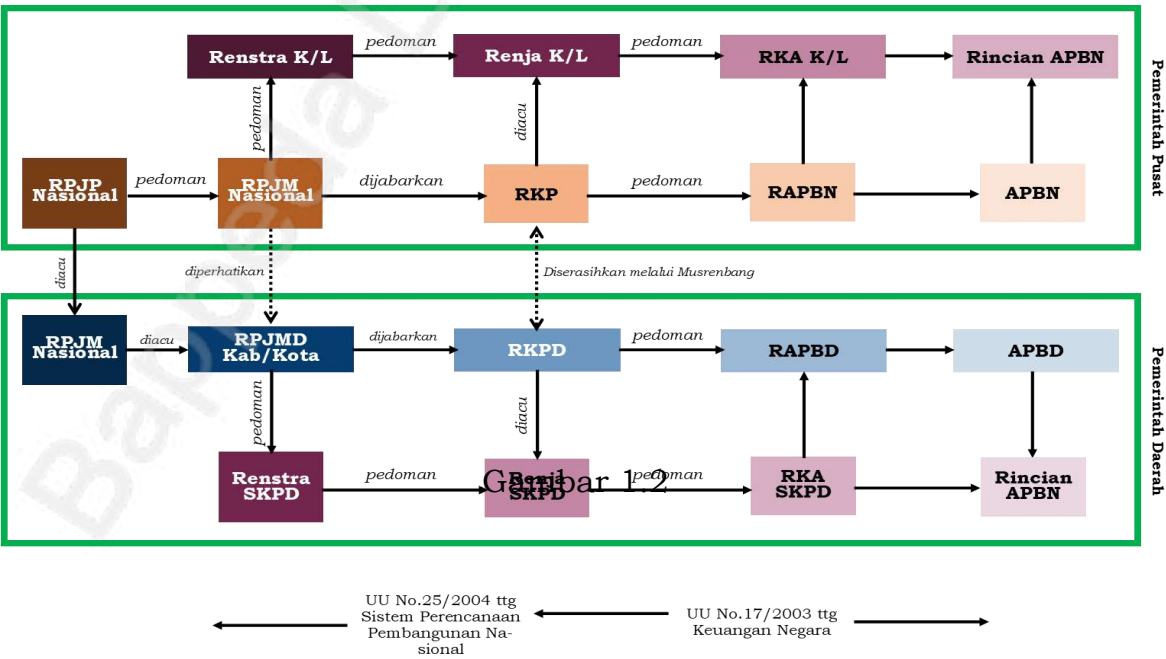
Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tarakan memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis dan renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun dalam

kurun waktu 5 (lima) tahun. Selain itu Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai acuan dalam pengendalian dan evaluasi terhadap kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia baik berupa Dokumen Sakip dan Laporan Dalev Renja.

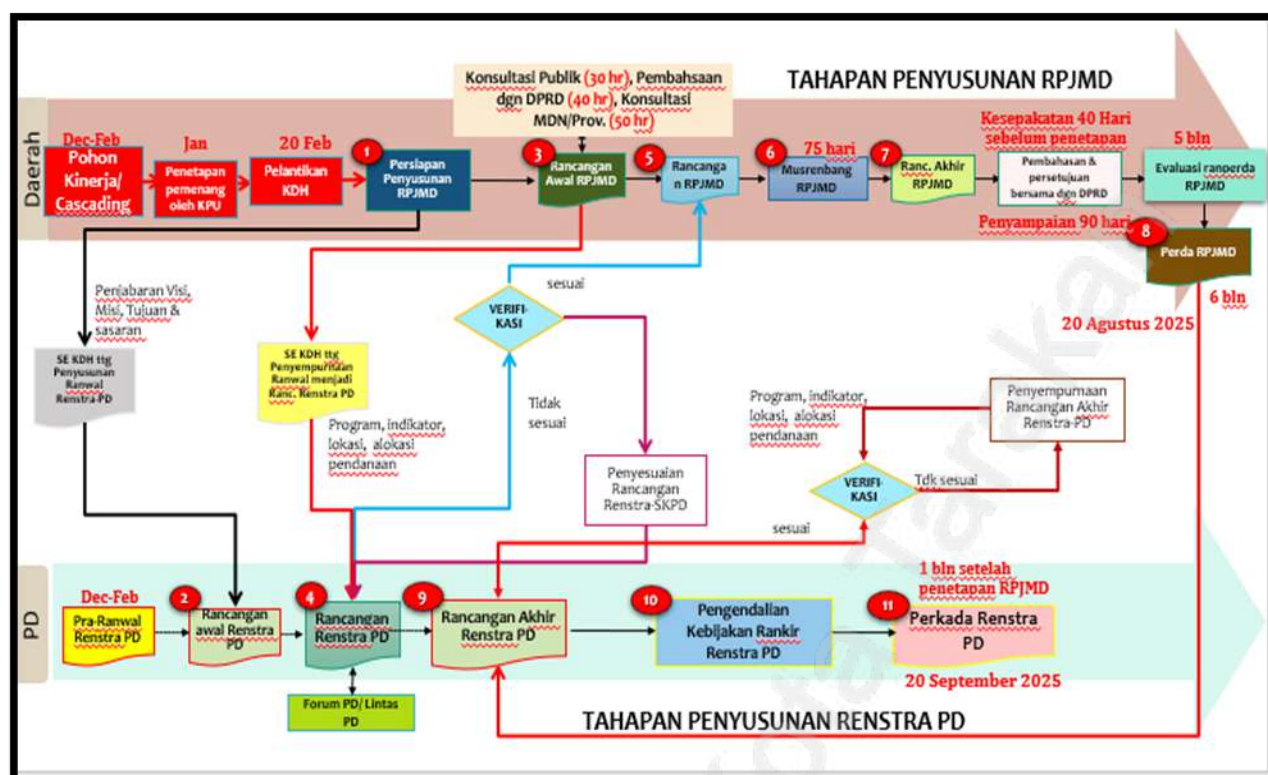
Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keberadaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tarakan akan menjadi pedoman bagi penyusunan rancangan RKA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tarakan yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Gambaran tentang hubungan antara Renstra Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Bagan Alir Proses Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah



Rencana Strategis Perangkat Daerah atau lebih dikenal dengan Renstra merupakan instrumen untuk merumuskan dan mencapai tujuan organisasi serta menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pada periode rencana jangka menengah, sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas suatu institusi pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan. Renstra ini dirumuskan dalam kerangka pandangan yang strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Fungsi penyusunan Renstra adalah sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, rencana tersebut tidak semata-mata hanya disusun dan didiamkan, tapi melainkan rencana yang telah dibuat harus dilaksanakan sebagai acuan bahwa organisasi tersebut adalah organisasi yang bekerja efektif dan berkinerja, dalam menilai apakah organisasi tersebut memiliki kinerja yang baik, maka bisa dilihat dari seberapa banyak rencana strategi yg dilaksanakan dalam rangka mencapai visi jangka menengah sesuai dengan Inmendagri No. 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Wali Kota Tarakan memiliki periode RPJMD berakhir Tahun 2029, untuk menyusun Dokumen RPJMD 2025-2029, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Renstra PD Kota Tarakan Tahun 2025-2029.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra BKPSDM Kota Tarakan Tahun 2025-2029 berdasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029;

20. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia;
21. Surat Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 100.3.3/HK- IV/215/2025 Tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tarakan Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Kota Tarakan tahun 2025 – 2029 adalah:

1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan urusan pemerintahan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta menyediakan tolak ukur dalam penetapan kinerja selama 5 (lima) tahun.
2. Menjamin keterkaitan, keserasian serta harmonisasi antara perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan program kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan.
3. Menyesuaikan rencana target capaian Renstra PD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025 – 2029.
4. Memberikan arah dan pedoman bagi Aparatur Sipil Negara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan program prioritas sesuai dengan urusan pemerintahan dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga tujuan program dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.
5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana pembangunan tahunan.
6. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan Tahun 2025-2029 yaitu sebagai berikut:

1. Menterjemahkan dan menjabarkan visi misi Kepala Daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Tarakan periode 2025-2029 dalam bentuk tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang lebih spesifik dan terarah serta yang bersifat operasional
2. Sebagai kerangka acuan dalam menyusun rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 5 (lima) tahun
3. Sebagai dasar penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi serta penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan dan melaksanakan kegiatan sesuai tupoksinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tarakan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini paling sedikit memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

- BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN
Bab ini paling sedikit memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tarakan
- BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Bab ini paling sedikit memuat uraian program; uraian kegiatan; uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator target dan pagu indikatif; uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah; target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tarakan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama; dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci.
- BAB V PENUTUP
Bab ini memuat kesimpulan penting substansial kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1 Gambaran Pelayanan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber daya Manusia Kota Tarakan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tarakan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi kewenangan daerah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tarakan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Tugas:

BKPSDM mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusi yang menjadi kewenangan daerah

Fungsi:

Untuk menyelenggarakan Tupoksi sebagaimana tersebut diatas BKPSDM mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, mutasi, pengembangan, disiplin dan kesejahteraan, dokumentasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan ASN;
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, mutasi, pengembangan, disiplin dan kesejahteraan, dokumentasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan ASN;
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, mutasi, pengembangan, disiplin dan kesejahteraan, dokumentasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan ASN;
- 4) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-ungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah di bidang perencanaan, mutasi, pengembangan, disiplin dan kesejahteraan, dokumentasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan ASN;
- 5) Pelaksanaan administrasi Badan; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Struktur Perangkat Daerah

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, BKPSDM Kota Tarakan dilengkapi dengan perangkat organisasi dapat dilihat pada Gambar II-1, adapun susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkondisikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan mempunyai fungsi :

- Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris mempunyai fungsi:

- Koordinasi kegiatan Badan;
- Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Badan;
- Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan;
- Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Badan;
- Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada Badan;
- Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Badan;
- Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Badan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sekretaris dibantu oleh 2 Sub Bagian, yaitu :

1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam pengkoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan;

- Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Badan;
 - Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada Badan;
 - Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Badan;
 - Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Sekretariat dalam koordinasi kegiatan Badan, koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, dan pengkoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Badan.

Dalam menjalankan tugasnya Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi : Koordinasi kegiatan Badan

- Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran badan; Pemberian dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
 - Pelaksanaan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan;
 - Penyiapan bahan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja badan; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.
3. Bidang Perencanaan dan Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang perencanaan dan mutasi kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah.
- Dalam menjalankan tugasnya Sub Bidang Perencanaan dan Mutasi mempunyai fungsi :
- Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan mutasi kepegawaian;
 - Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan mutasi kepegawaian;
 - Penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai ASN;
 - Pelaksanaan pengadaan ASN;
 - Penyiapkan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, pemberhentian dan penetapan pensiun;
 - Penyelenggaraan purna tugas;
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan mutasi kepegawaian; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Perencanaan dan Mutasi Kepegawaian di bantu 2 Bidang, yaitu :

1. Sub Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara; dan
2. Sub Bidang Mutasi Kepegawaian.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

1. Sub Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Pemberhentian Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan ASN mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan evaluasi

dan pelaporan di bidang perencanaan, pengadaan dan pemberhentian ASN.

Dalam menjalankan tugasnya Sub Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Pemberhentian mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengadaan dan pemberhentian ASN;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengadaan dan pemberhentian ASN;
- Penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai ASN;
- Pelaksanaan pengadaan pegawai ASN;
- Pelaksanaan pemberhentian pegawai ASN;
- Penyiapan dan pelaksanaan Pengangkatan;
- Pelaksanaan administrasi pendidikan ikatan dinas;
- Pelaksanaan administrasi kepegawaian
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di sub bidang perencanaan, pengadaan dan pemberhentian ASN; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Mutasi Kepegawaian

2. Sub Bidang Mutasi Kepegawaian

Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan ASN mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pelaksanaan dan evaluasi dan pelaporan di bidang mutasi kepegawaian.

Dalam menjalankan tugasnya Sub Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Pemberhentian mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang mutasi kepegawaian;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang mutasi kepegawaian;
- Penyiapan dan pelaksanaan administrasi kepangkatan, pindah wilayah kerja, pemberhentian, peninjauan masa kerja dan mutasi lainnya;
- Penyiapan dan pelaksanaan purna tugas;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di sub bidang mutasi kepegawaian; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Mutasi Kepegawaian.

4. Bidang Pengembangan, Disiplin dan Kesejahteraan ASN mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan di bidang pengembangan, disiplin dan kesejahteraan ASN yang menadi kewenangan daerah.

Dalam menjalankan tugasnya Bidang Pengembangan, Disiplin dan Kesejahteraan ASN mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan, disiplin dan kesejahteraan ASN;
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengembangan, disiplin dan kesejahteraan ASN;
- Penyusunan dan pelaksanaan penempatan dalam jabatan;
- Pengelolaan pelaksanaan pengembangan karier pegawai ASN;
- Pengelolaan pelaksanaan disiplin dan kedudukan hukum pegawai ASN;

- Pengelolaan pelaksanaan kinerja, kesejahteraan dan penghargaan pegawai ASN;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan, disiplin dan kesejahteraan ASN; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Pengembangan, Disiplin dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara dipimpin seorang kepala Bidang dan dibantu 3(tiga) orang Sub Bidang yaitu :

1. Sub Bidang Pengembangan Karier ASN;
2. Sub Bidang Disiplin dan Kedudukan Hukum Aparatur ASN; dan
3. Sub Bidang Kinerja, Kesejahteraan dan Penghargaan ASN

Masing-masing Sub Bidang dipimpin seorang Kepala Sub Bidang yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang antara lain :

1. Sub Bidang Pengembangan Karier ASN mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan karier ASN.
Dalam menjalankan tugasnya Sub Bidang Pengembangan karier ASN mempunyai fungsi
 - Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan karier ASN;
 - Penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan karier ASN;
 - Penyusunan dan pelaksanaan pengangkatan, penempatan, pemberhentian dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional;
 - Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah;
 - Pelaksanaan administrasi tugas belajar dan ijin belajar pegawai ASN;
 - Pelaksanaan administrasi pencatuman gelar;
 - Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di sub bidang pengembangan karier ASN; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Pengembangan, Disiplin dan Kesejahteraan ASN.
2. Sub Bidang Disiplin dan Kedudukan Hukum Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kegiatan, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang disiplin dan kedudukan hukum ASN.
Dalam menjalankan tugasnya Sub Bidang Disiplin dan Kedudukan Hukum Aparatur Sipil Negara mempunyai fungsi :
 - Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang disiplin dan kedudukan hukum ASN;
 - Penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang disiplin dan kedudukan hukum ASN;
 - Pembinaan etika dan perilaku pegawai ASN;
 - Pemberian pertimbangan dan penetapan masalah pegawai, kedudukan hukum dan kewajiban pegawai;

- Pelaksanaan proses dan penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi administratif pegawai ASN;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di sub bidang disiplin dan kedudukan hukum pegawai ASN; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan, Disiplin dan Kesejahteraan ASN.

3. Sub Bidang Kinerja, Kesejahteraan dan Penghargaan ASN mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kinerja, kesejahteraan dan penghargaan ASN.

Dalam menjalankan tugasnya Sub Bidang Kinerja, Kesejahteraan dan Penghargaan ASN mempunyai fungsi

- Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang kinerja, kesejahteraan dan penghargaan ASN;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kinerja, kesejahteraan dan penghargaan ASN;
- Pelayanan dan pengelolaan penilaian prestasi kerja pegawai;
- Pelayanan dan pengelolaan kenaikan gaji berkala;
- Pelayanan dan proses kesejahteraan pegawai ASN;
- Penyiapan dan penetapan tunjangan dan kesejahteraan Pegawai;
- Pelaksanaan proses pemberian tanda jasa dan penghargaan pegawai;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di sub bidang kinerja, kesejahteraan dan penghargaan ASN; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan, Disiplin dan Kesejahteraan ASN.

5. Bidang Informasi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Informasi kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam menjalankan tugasnya Sub Bidang Informasi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi

- Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang dokumentasi kepegawaian pendidikan dan pelatihan;
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang dokumentasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- Pelaksanaan pengelolaan dokumen dan informasi kepegawaian;
- Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian;
- Penyusunan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan ASN;
- Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN;
- Pelaksanaan monitoring pasca pendidikan dan pelatihan;
- Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional ASN;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang dokumentasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam menjalankan Tupoksi diatas, Bidang Informasi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dipimpin seorang kepala Bidang dan dibantu 2(dua) orang Sub Bidang yaitu :

1. Sub Bidang Informasi Kepegawaian; dan
2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara

Masing-masing Sub Bidang dipimpin seorang Kepala Sub Bidang yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

1. Sub Bidang Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang dokumentasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Dalam menjalankan tugasnya Sub Bidang Informasi kepegawaian mempunyai fungsi

- Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang dokumentasi dan sistem informasi kepegawaian;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang dokumentasi dan sistem informasi kepegawaian;
- Penyusunan, pengelolaan dan analisa data kepegawaian;
- Penyajian informasi kepegawaian;
- Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di sub bidang dokumentasi dan sistem informasi kepegawaian; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Dokumentasi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan pelatihan ASN.

Dalam menjalankan tugasnya Sub Bidang Pengembangan karir ASN mempunyai fungsi

- Penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan ASN;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan ASN;
- Penyusunan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan ASN;
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN;
- Penyusunan kualifikasi dan nominasi pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan ASN;
- Pelaksanaan seleksi diklat kepemimpinan;
- Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional;
- Pelaksanaan monitoring pasca pendidikan dan pelatihan;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di sub bidang pendidikan dan pelatihan ASN; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Dokumentasi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

- 6. Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 2.1.
Bagan Struktur Organisasi BKPSDM Kota Tarakan



2.1.2. Sumber Daya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Data Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tarakan Pada Awal Tahun 2025 secara keseluruhan jumlah ASN BKPSDM Kota Tarakan sebanyak 37 orang dan jumlah Pegawai Kontrak sebanyak 1 orang, dengan komposisi pegawai dalam organisasi BKPSDM.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur
TAHUN 2025

No	Unit Kerja	Usia (Tahun)							Jumlah
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Sekretariat					3	4	3	10
2	Bidang Perencanaan dan Mutasi Kepegawaian						1	3	4
3	Bidang Pengembangan, Disiplin dan Kesejahteraan ASN					1	2		3
4	Kepala Bidang informasi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1			2	2	1	2	8
5	Kelompok Jabatan fungsional		2	1	1	4	2	3	13
	JUMLAH								38

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan
TAHUN 2025

No	Unit Wilayah	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat		1	7	2	10
2	Bidang Perencanaan dan Mutasi Kepegawaian			3	1	4
3	Bidang Pengembangan, Disiplin dan Kesejahteraan ASN			2	1	3
4	Kepala Bidang informasi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan			6	2	8
5	Kelompok Jabatan fungsional			13		13
	JUMLAH					38

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
TAHUN 2025

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		SD	SLTP	SMA/SPK	D3	S1	S2	
1	Sekretariat			2		8		10
2	Bidang Perencanaan dan Mutasi Kepegawaian			1		3		4
3	Bidang Pengembangan, Disiplin dan Kesejahteraan ASN			1		2		3
4	Kepala Bidang informasi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan			2		6		8
5	Kelompok Jabatan fungsional					13		13
	JUMLAH							38

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan
TAHUN 2025

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Eeson II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	2
4	Fungsional Tertentu	13
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	18
TOTAL		38

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin
TAHUN 2025

NO	UNIT WILAYAH	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		P	L	
1	Sekretariat	6	4	10
2	Bidang Perencanaan dan Mutasi Kepegawaian	2	2	4
3	Bidang Pengembangan, Disiplin dan Kesejahteraan ASN	2	1	3
4	Kepala Bidang informasi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	4	4	8
5	Kelompok Jabatan fungsional	6	7	13
TOTAL				38

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan
TAHUN 2025

NO	UNIT WILAYAH	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		P	L	
1	Eselon II		1	1
2	Eselon III	1	3	4
3	Eselon IV	2		2
TOTAL				7

Tabel 2.7 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
TAHUN 2025

NO	JENIS ASET SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH (UNIT)	KONDISI BAIK (UNIT)	KONDISI RUSAK (UNIT)
A.	BANGUNAN GEDUNG			
1	Gedung 1 lantai	1	1	-
B.	SARANA TRANSPORTASI			
1	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	3	3	-
2	Kendaraan dinas Roda 2 (dua)	6	6	-
C.	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KERJA			
1	Alat Kantor Lainnya (Lain-Lain)/Proyektor Dan Mesin Laminating	1	1	1
2	Alat Rumah Tangga Lain-Lain (Banner, Bingkai Figura, vertikal Blind, Locker)	33	33	-
3	AC Window	17	13	4
4	Mesin Penghancur Kertas	2	2	-
5	Cpu	17	7	10
6	Dispenser	1	1	-
7	Filing Besi/Metal	8	7	1
8	Jeep	2	2	-
9	Kursi Besi/Metal	47	32	15

NO	JENIS ASET SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH (UNIT)	KONDISI BAIK (UNIT)	KONDISI RUSAK (UNIT)
10	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon Ii	3	3	-
11	Kursi Putar	45	27	18
12	Kursi Rapat	19	11	8
13	Kamera Digital	1	1	-
14	LCD Projector/Infocus	1	1	-
15	Lap Top	23	20	3
16	Lemari Besi	2	2	-
17	Lemari Es	1	1	-
18	Lemari Kaca	9	9	-
19	Lemari Kayu	7	7	-
20	Lemari Sorok	4	4	-
21	Meja Kerja Pejabat Eselon Ii	1	1	-
22	Meja Komputer	1	1	-
23	Meja Panjang	-	-	-
24	Meja Rapat	2	2	-
25	Meja Reseption	7	7	-
26	Meja Tambahan	7	7	-
27	Meja ½ Biro	32	32	-
28	Mesin Absen (Time Recorder)	2	1	1
29	Mesin Fax	2	1	1
30	Mesin Fotocopy Dengan Kertas Folio	2	1	1
31	Mesin Ketik Listrik Standar	1	1	-
32	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	2	-	2
33	Monitor	7	6	1
34	Note Book	6	6	6
35	P.C Unit	10	8	2
36	Papan Pengumuman	-	-	-
37	Peralatan Jaringan Lain-Lain (Lan Card Server)	4	4	4
38	Personel Kantor	4	4	-
39	Printer	17	14	3
40	Scanner	5	4	1
41	Server	3	3	-
42	Station Wagon	1	1	-
43	Televisi	3	1	2

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah suatu Perangkat Daerah telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara keseluruhan dan merupakan perpaduan dari hasil kerja dan kompetensi atau alat untuk mengecek apakah organisasi dapat melaksanakan program dengan baik dan mengukur seberapa jauh target-target kinerja dapat dicapai oleh SKPD dalam kurun waktu tertentu. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Keputusan menteri dalam negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Oleh karena itu Renstra BKPSDM Kota Tarakan juga harus dilakukan evaluasi. Hal ini dimaksudkan untuk :

- a. Mengevaluasi hasil capaian kinerja Tahun 2025-2029 sebagai entry point dalam penyusunan Renstra 2025-2029;
- b. Memeperhatikan keberlanjutan untuk stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 70 tahun 2021 tentang tugas pokok dan fungsi serta tata laksana organisasi Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan dibidang Kepegawaian.

Selama periode 2025-2029, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tarakan telah menyelenggarakan beberapa program kegiatan guna menunjang pencapaian visi misi Kota Tarakan di Bidang Kepegawaian. Capaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan realisasi capaian Indikator Kinerja Utama selama kurun waktu 2025-2029 dapat dilihat selengkapnya pada Tabel T-C.23.

Tabel T-C.23
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BKPSDM

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)
-1	-2	-3	-4	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
1	Persentase administrasi kepegawaian ASN yang dapat diselesaikan	-	-	100	100	100	100	100	80	100	82,35	100	93,75	80	100	82,35	100	93,75
2	Persentase ASN yang datanya akurat	-	-	100	100	100	100	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	105,26
3	Persentase ASN yang terbina	-	-	100	100	100	100	98	87	99	99	99,28	99,76	87	99	99	99,28	101,80
4	Persentase ASN yang telah memenuhi target kinerja individu	-	-	100	100	90	90	90	98	95	91	94,28	98,95	98	95	101,11	104,75	109,94
5	Persentase pemenuhan penghargaan ASN	-	-	100	100	90	90	90	97	100	100	110,49	99,93	97	100	111,11	122,76	111,03
6	Persentase ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensinya	-	-	95	95	95	95	95	91	100	100	100	100	96	100	105,26	105,26	105,26
7	Persentase CPNS/ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi	-	-	95	95	95	95	50	87	74	100	99,82	50	92	79	105,26	105,07	100
8	Nilai SAKIP	-	-	65/B	65/B	65/B	65/B	70/B B	73,59 /BB	70,11 /BB	71,75 /BB	71,56 /BB	79,98 /BB	113,2	107,9	110,4	110,1	-114,3

Sumber data : Bagian Perencanaan dan Keuangan BKPSDM

Berdasarkan data capaian pada masing-masing indikator pada Tabel 2.3 menunjukkan pola kinerja yang dinamis dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, hal tersebut didasari oleh beberapa kyang mempengaruhi nilai tersebut yang telah di Analisa pada masing-masing indikator sebagai berikut :

1. Persentase Administrasi Kepegawaian ASN yang dapat diselesaikan
Rasio Capaian Administrasi Kepegawaian ASN yang dapat diselesaikan dengan rasio capaian sampai dengan akhir Tahun 2024 mencapai nilai sebesar 93,75% dari target 100% hal ini disebabkan karena ada beberapa kegiatan yang belum bisa dilaksanakan pada Tahun 2024.
2. Persentase ASN yang datanya akurat
Rasio capaian ASN yang datanya akurat untuk Tahun 2024 mencapai 105,26% dari Target 95%. Selama Tahun 2019-2024 indikator kinerja telah mencapai target yang telah di tetapkan, hal ini karena Data Kepegawaian terus di update melalui SIMPEG.
3. Persentase ASN yang terbina
Rasio capaian ASN yang terbina mencapai nilai 101,80% dari target 98%. Selama Tahun 2019-2024 indikator kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan dan kasus yang ada sdh diselesaikan sesuai dengan aturan yang ada.
4. Persentase ASN yang telah memenuhi target kinerja individu
Rasio capaian untuk ASN yang telah memnuhi target kinerja individu mencapai nilai 109,94% dari target 90%. Untuk Tahun 2019-2024 indikator kinerja telah mencapai target. Terbukti dengan kesadaran ASN yang Menyusun SKP tiap Tahunnya dengan nilai baik ataupun sangat baik
5. Persentase pemenuhan penghargaan ASN
Rasio capaian akhir tahun untuk pemenuhan penghargaan ASN mencapai nilai 111,03% dari target 90%. Untuk Tahun 2019-2024 rasio capaian untuk indikator pemenuhan penghargaan ASN setiap tahunnya meningkat, hal ini disebabkan BKPSM telah memfasilitasi penyampaian data ke Sekretariat Negara untuk ASN yang mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karyasatya bekerja mengabdikan sebagai ASN di Kota tarakan
6. Persentase ASN yang menduduki jabatan sesuai dengan kompetensinya
Rasio capaian akhir tahun untuk ASN yang menduduki jabatan sesuai kompetensinya mencapai 105,26% dari target 95%. Capaian Rasio selama Tahun 2019-2024 meningkat karena indikator tersebut sangat mendukung untuk pelaksanaan Ujian Dinas, Tugas belajar, Uji kompetensi untuk ASN, dan pengembangan karir lainnya.
7. Persentase CPNS/ASN yang mendapatkan Pengembangan kompetensi
Rasio capaian akhir Tahun untuk CPNS/ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi mencapai 100% dari target 50%. Untuk indikator tersebut selama Tahun 2019-2024 rasio capaian selalu meningkat, karena kesesuaian anggaran yang ada dengan pelaksanaan kediklatan yang sudah mendapatkan persetujuan dari Walikota Tarakan.

Dalam peningkatan pelayanan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelayanan baik eksternal maupun internal dalam mencapai tujuan yaitu Terwujudnya Profesionalitas ASN dengan sasaran meningkatnya kualitas ASN berbasis sistem merit juga memiliki kekuatan,

peluang, kelemahan dan ancaman dan juga strategi dalam meningkatkan pelayanan yaitu :

2.2.1 Kekuatan dan peluang yang dimiliki Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Adalah sebagai berikut :

- SDM yang berkompeten
- Sistem database yang terintegrasi
- Regulasi yang mendukung untuk perbaikan pelayanan kepegawaian
- Kerjasama lintas sektoral
- Komitmen pimpinan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan profesional

2.2.2 Kelemahan

Kelemahan yang ada di dalam meningkatkan kualitas layanan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Adalah sebagai berikut :

- Budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung meritokrasi
- Kurangnya sarana dan prasarana
- Kualitas ASN yang belum merata
- Sistem penilaian kinerja yang belum optimal
- Pelatihan dan pengembangan kompetensi yang kurang efektif
- Integritas dan etika ASN yang bervariasi
- Manajemen talenta yang belum terstruktur

2.2.3 Ancaman

Beberapa ancaman yang mungkin terjadi dalam peningkatan pelayanan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia sebagai berikut :

- Adanya perubahan kebijakan dari pusat
- Penyalahgunaan jabatan dalam membuat keputusan
- Adanya bencana alam dan non alam

2.2.4 Strategi

Strategi yang dimiliki oleh Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mencapai tujuan dan sasaran meningkatnya kualitas ASN berbasis sistem merit Adalah sebagai berikut :

- Menyamakan persepsi terkait meritokrasi
- Membuat kebijakan daerah terkait penerapan sistem merit
- Melakukan koordinasi ke Menpan terkait penguatan penerapan sistem merit
- Melakukan pengawasan berkala
- Penguatan SDM
- Penguatan Sarana dan Prasarana
- Penguatan Sistem Informasi yang berbasis IT

Pencapaian Kinerja Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kota Tarakan, jika dilihat dari hasil capaian pada indikator kinerja selama 5 (lima) Tahun masa RENSTRA Tahun 2019-2024 menunjukkan hasil yang sangat baik, hal ini disebabkan karena adanya dukungan Kepala Daerah kepada BKPSDM di dalam mendukung kegiatan peningkatan kualitas dan pengembangan kompetensi ASN, salah satunya mendukung inovasi SIMDIKLAT sebagai salah satu sistem yang dibuat untuk mendata ASN yang wajib mengikuti diklat sebagai salah satu syarat untuk peningkatan pengembangan karir ASN.

Tabel T-C 24
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
KEPEGAWAIAN DAN KEDIKLATAN					-					-					
Belanja Tidak Langsung	6.016.898.530	7.337.412.017	7.345.592.017	7.337.742.017	7.629.047.717	5.930.450.737	6.227.888.420	5.412.678.474	5.272.865.560	5.722.097.019	95,6%	84,9%	73,7%	71,9%	75,0%
Belanja Barang jasa	12.671.468.388	11.961.796.332	12.894.107.652	11.409.202.982	11.946.401.187	10.044.795.746	10.345.544.736	10.902.252.815	10.626.094.289	10.957.524.559	79,3%	86,5%	84,6%	93,1%	91,7%
Belanja Modal	114.109.200	104.989.090	-	50.866.618	161.811.770	111.358.500	100.435.000	-	48.570.000	160.905.500	97,6%	95,7%	-	95,5%	99,4%
					-					-					
					-					-					

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok. Fungsi dan wewenang sebagaimana di atur Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2021 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tarakan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam kurun waktu tahun 2025-2029 BKPSDM telah melaksanakan 3 (tiga) program yaitu;

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- b. Program Kepegawaian Daerah
- c. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

2.2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran Layanan mencakup kelompok- kelompok yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) aparatur negara di Tingkat pemerintah daerah maupun instansi terkait dan Masyarakat.

2.2.5 Mitra Perangkat Daerah

Mitra Perangkat Daerah merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa setiap Perangkat Daerah yang terlibat dalam Pemerintahan dapat berkolaborasi secara efektif dan efesien dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Mitra Perangkat Daerah juga bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan, program dan kegiatan sebagai prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan Masyarakat.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan pelayanan perangkat daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tarakan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan kinerja.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dijabarkan mengenai permasalahan pelayanan yang ditemui dalam penyelenggaraan pelayanan urusan kepegawaian dalam tabel 2.2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.2.1
Perumasan Masalah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya kualitas Profesionalitas ASN	Belum tingginya kualitas ASN berbasis sistem merit	Belum optimalnya layanan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional
		Belum optimalnya layanan pengembangan kompetensi Teknis
		Belum optimalnya layanan penjaminan mutu serta sertifikasi kompetensi
		Belum optimalnya dokumen perencanaan kebutuhan ASN
		Belum optimalnya dokumen pengadaan ASN
		Belum optimalnya dokumen layanan Pensiun, Kenaikan Pangkat dan Pindah Wilayah Kerja
		Belum optimalnya pelayanan mutasi dan kenaikan pangkat ASN

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya dokumen sistem informasi Kepegawaian
		Belum optimalnya dokumen/Laporan pengembangan kompetensi/Jumlah ASN
		Belum optimalnya pelayanan Promosi ASN
		Belum optimalnya dokumen penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
		Belum optimalnya dokumen penghargaan dan disiplin ASN

2.2.2. Isu Strategis

Isu Strategis adalah salah satu yang perlu diperhatikan dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan perangkat Daerah secara teknokratik, selain mempedomani Prioritas Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Lembaga terkait. Dengan telah ditentukannya isu – isu strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tarakan tahun 2025 – 2029, maka hal ini akan menjadi fokus utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tarakan untuk bisa menangani Isu – isu strategis tersebut dengan strategi dan arah kebijakan yang didukung dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta sub kegiatan yang tertuang dalam Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tarakan.

Perumusan isu strategis dilakukan dengan acuan berdasarkan kewenangan, permasalahan yang dihadapi, serta dinamika lingkungan global, nasional, dan regional. KLHS tidak dijadikan acuan karena tidak ada rencana yang berdampak atau berkaitan langsung dengan lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil review dari penjelasan pada poin-poin sebelumnya maka diperoleh informasi untuk menentukan isu strategis. Maka ditentukan isu strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tarakan tahun 2025 – 2029 adalah seperti pada tabel 2.2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2.2
ISU STRATEGIS

Potensi daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	Belum optimalnya penerapan sistem merit untuk meningkatkan profesionalitas ASN		Penerapan sistem meritokrasi yang belum optimal dalam rekrutmen, promosi, dan pengembangan karier.	Sistem Meritokrasi yang Belum Sepenuhnya Berjalan	Integritas dan Pengawasan Meritokrasi yang Lemah	Peningkatan penerapan sistem merit untuk profesionalitas ASN yang berkualitas

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra BKPSDM Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan Capaian Strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun. Perumusan Tujuan Pembangunan Kota Tarakan secara teknokratik ditempuh dengan menelaah arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kota Tarakan Tahun 2025 – 2029, Kebijakan Jangka Menengah Nasional dan Isu-isu Strategis Pembangunan Kota Tarakan yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Selanjutnya, tujuan tersebut dikolaborasi dengan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Tarakan terpilih untuk menghasilkan rumusan tujuan pembangunan Kota Tarakan sampai dengan Tahun 2029.

Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) Program Perangkat Daerah. Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Tarakan Tahun 2025 – 2029 berisi sasaran pokok RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kota Tarakan Tahun 2025 – 2045 periode berkenaan.

Hal ini dimaksudkan agar sasaran pembangunan Daerah Kota Tarakan merupakan sarana untuk melaksanakan dan sekaligus upaya untuk mewujudkan sasaran pembangunan Kota Tarakan 2005-2029.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran , maka perlu penyelarasan tujuan dan Sararan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Tarakan Tahun 2025–2029. Tujuan dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Tarakan Tahun 2025 – 2029 adalah pada tujuan ke 4 yaitu Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, dengan sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah

Dalam menentukan tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia maka telah dirumuskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah dengan Indikator Tujuan yaitu Nilai SAKIP.

3.2 Sasaran Renstra BKPSDM Tahun 2025-2029

Berdasarkan tujuan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 – 2029 maka di tetapkan sasaran Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2025 – 2029 yaitu :

1. Meningkatnya kualitas ASN berbasis sistem merit dengan Indikator :
 - a. Indeks Sistem Merit
2. Meningkatnya Tata Kelola BKPSDM dengan Indikator :
 - a. Nilai SAKIP
 - b. IKM

Sebagaimana dengan indikator tujuan yaitu Indeks pelayanan publik maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah menetapkan target dari Indikator terhadap Tujuan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tarakan

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Profesionalitas ASN	Meningkatnya kualitas ASN berbasis sistem merit	Indeks sistem merit	250	250	255	255	260
2	Terwujudnya kualitas tata Kelola BKPSDM	Meningkatnya Tata Kelola BKPSDM	Nilai SAKIP	80,15	80,30	80,45	80,75	81,00
			IKM	90,25	90,30	90,50	90,75	91,00

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan.

3.3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasu (PANRB)

Tujuan yang ingin di capai Kementrian pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang berkaitan dengan strategi arah kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegrasi, dan berdaya saing. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa Manajemen ASN didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja tanpa membedakan latar belakang politik, ras maupun gender.

Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut diatas, maka dirumuskan sasaran strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yaitu mewujudkan birokrasi berkelas dunia yang profesional dan berintegrasi melalui manajemen ASN yang berbasis pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian PANRB maka arah kebijakan yang difokuskan adalah:

1. Penyelarasan Regulasi dan Tata Kelola
2. Penguatan Sistem Informasi Manajemen ASN
3. Pengembangan Talenta dan manajemen kinerja
4. Kolaborasi dan Pengawasan

3.3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tarakan memiliki beberapa Strategi dan arah kebijakan dalam lima tahun mendatang yaitu Peningkatan penerapan sistem merit untuk profesionalitas ASN yang berkualitas.

Dimana kualitas pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia perlu ditingkatkan sejalan dengan tuntutan perbaikan sistem pelayanan Kepegawaian yang dikeluarkan Kementerian PANRB sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB nomor 40 Tahun 2018 tentang pedoman sistem merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Menteri ini dikeluarkan dengan maksud agar sistem merit ini diterapkan diseluruh siklus manajemen ASN, mulai dari awal hingga akhir. Sebagai langkah tindak lanjut dalam pelaksanaan strategi secara teknis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berusaha melaksanakan kebijakan yaitu dengan cara:

1. Peningkatan layanan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional
2. Peningkatan layanan pengembangan kompetensi teknis
3. Peningkatan layanan penjaminan mutu serta sertifikasi kompetensi
4. Pemenuhan dokumen perencanaan kebutuhan ASN
5. Pemenuhan dokumen pengadaan ASN
6. Pemenuhan dokumen layanan pensiun, kenaikan pangkat dan pindah wilayah kerja
7. Peningkatan pelayanan mutasi dan kenaikan pangkat ASN
8. Pemenuhan dokumen sistem informasi Kepegawaian
9. Pemenuhan dokumen/Laporan pengembangan kompetensi/Jumlah ASN
10. Peningkatan pelayanan Promosi ASN
11. Pemenuhan dokumen penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
12. Pemenuhan dokumen penghargaan dan disiplin ASN

Arah Kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Dumber
Daya Manusia dituangkan dalam tabel 3.3.2 dibawah ini:

Tabel 3.3.2
ARAH KEBIJAKAN

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KENIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perkuatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan	Penguatan partisipasi masyarakat dalam Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan layanan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional
			Peningkatan layanan pengembangan kompetensi Teknis
			Peningkatan layanan penjaminan mutu serta sertifikasi kompetensi
			Pemenuhan dokumen perencanaan kebutuhan ASN
			Pemenuhan dokumen pengadaan ASN
			Pemenuhan dokumen layanan Pensiun, Kenaikan Pangkat dan Pindah Wilayah Kerja
			Peningkatan pelayanan mutasi dan kenaikan pangkat ASN
			Pemenuhan dokumen sistem informasi Kepegawaian
			Pemenuhan dokumen/Laporan pengembangan kompetensi/Jumlah ASN
			Peningkatan pelayanan Promosi ASN
			Pemenuhan dokumen penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
			Pemenuhan dokumen penghargaan dan disiplin ASN

BAB IV
PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

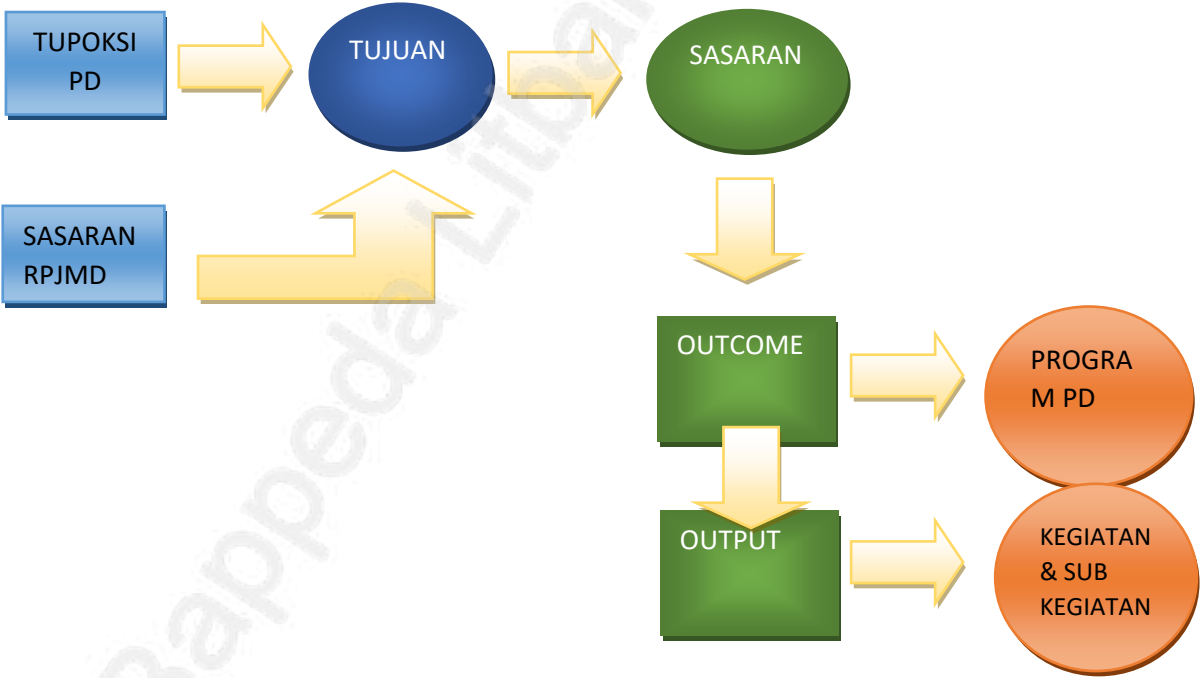
4.1 Program, Kegiatan, Sub kegiatan

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Lingkungan Hidup dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Tarakan 2025- 2029.

Bab ini menyajikan arah operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi kebijakan yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya, serta mengacu pada struktur program yang ditetapkan secara nasional. Penyusunan komponen ini bertujuan untuk memastikan keterpaduan antara rencana strategis perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta untuk mendorong pencapaian target kinerja secara terukur dan efektif dalam periode perencanaan.

Dapat dilihat kerangka perumusan program/kegiatan/subkegiatan Renstra pada gambar 4.1 di bawah ini:

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan RENSTRA PD



Sebagai tindak lanjut dari rumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, perangkat daerah menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai bentuk implementasi operasional. Setiap program disertai dengan indikator kinerja dan target yang jelas, serta didukung oleh kegiatan dan sub kegiatan yang relevan.

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tarakan, maka disusunlah Program dan Kegiatan beserta Pendanaannya yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 sebagai berikut :

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 4.2
PERUMUSAN PROGRAM, KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENSTRA PD/
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	ROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Terwujudnya Profesionalitas ASN				IP ASN		
	Meningkatnya kualitas ASN berbasis sistem merit			Sistem merit		
		Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, fungsional dan teknis		Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional dan Teknis
			Terlaksananya layanan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional	Jumlah Laporan hasil pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional	Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah layanan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsiona
			Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
			Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga
			Terlaksananya Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama
			Terlaksananya layanan pengembangan kompetensi Teknis	Jumlah Laporan hasil pengembangan kompetensi Teknis	Pengembangan kompetensi Teknis	Jumlah Laporan hasil pengembangan kompetensi Teknis
			Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi
			Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	ROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
			Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
		Meningkatnya layanan penjaminan mutu dan sertifikasi kompetensi		Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang memiliki sertifikasi kompetensi
			Terlaksananya layanan penjaminan mutu serta sertifikasi kompetensi	Jumlah laporan ASN yang memiliki sertifikat kompetensi	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah laporan ASN yang memiliki sertifikat kompetensi
			Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional yang Disusun	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi
			Terkelolanya Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/ Kota yang Terkelola dengan Baik	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik
			Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota
		Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian Pemerintah kota		Persentase layanan administrai kepegawaian terselesaikan tepat waktu sesuai SOP	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase layanan administrai kepegawaian terselesaikan tepat waktu sesuai SOP
			Tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan ASN	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan
			Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
			Tersedianya dokumen pengadaan ASN	Jumlah dokumen pengadaan ASN	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen pengadaan ASN
			Terlaksananya Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN
			Terlaksananya penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, Jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, Jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN
			Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
			Terlaksananya Evaluasi Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN
			Terfasilitasinya dokumen layanan Pensiun, Kenaikan Pangkat dan Pindah Wilayah Kerja	Jumlah dokumen/laporan /Jumlah ASN yang mendapatkan layanan pensiun, kenaikan pangkat dan pindah wilayah Kerja	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen/laporan /Jumlah ASN yang mendapatkan layanan pensiun, kenaikan pangkat dan pindah wilayah Kerja
			Dirumuskannya Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN
			Terlaksananya Koordinasi	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan	Koordinasi Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	ROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
			Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Administrasi Pemberhentian	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
			Terlaksananya Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN
			Terlaksananya mutasi dan kenaikan pangkat ASN	Jumlah dokumen mutasi dan kenaikan pangkat ASN	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah dokumen mutasi dan kenaikan pangkat ASN
			Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah
			Terlaksananya pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Jumlah kenaikan pangkat ASN	Pengelolaan Kenaikan Pangkat AS	Jumlah kenaikan pangkat ASN
		Meningkatnya kualitas pengelolaan sistem informasi kepegawaian		Persentase data ASN yang diupdate	PROGRAM KEPEGAWAIAN	Persentase data ASN yang diupdate
			Tersedianya dokumen sistem informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen sistem informasi kepegawaian	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah dokumen sistem informasi kepegawaian
			Terfasilitasnya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi
			Terlaksananya Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN
			Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
			Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian
			Terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
		Meningkatnya pengembangan Karir ASN		Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	PROGRAM KEPEGAWAIAN	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya
			Tersedianya dokumen/Laporan pengembangan kompetensi/Jumlah ASN	Jumlah dokumen/laporan pengembangan kompetensi/Jumlah ASN	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah dokumen/laporan pengembangan kompetensi/Jumlah ASN
			Meningkatnya Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya
			Terkelolanya Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center
			Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan
			Terlaksananya Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
			Terlaksananya Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina
			Meningkatnya Karir ASN Jabatan fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir
			Terlaksananya Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional
			Tersedianya dokumen Promosi	Jumlah dokumen promosi ASN	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah dokumen promosi ASN

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	ROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
			Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN
		Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN		Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	PROGRAM KEPEGAWAIAN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik
			Tersedianya dokumen penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah dokumen penilaian dan evaluasi kinerja aparatur		Jumlah dokumen penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
			Tersusunnya Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
			Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
			Terlaksananya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
			Tersedianya dokumen penghargaan dan disiplin ASN	Jumlah dokumen/laporan /Jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan dan disiplin ASN	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen/laporan /Jumlah ASN yang mendapatkan penghargaan dan disiplin ASN
			Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan
			Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa
			Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur
			Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan
			Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
			Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani
			Terlaksananya Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan			Nilai/Predikat SAKIP		
				Nilai IKM		
		Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja		Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti
				Capaian Kinerja Organisasi		Capaian Kinerja Organisasi
			Tersedianya dokumen perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah layanan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah layanan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	ROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
			Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
			Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
			Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
			Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah
			Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun
			Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu
			Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan
			Tersedianya dokumen administrasi keuangan	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Yang diselesaikan tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Yang diselesaikan tepat waktu
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
			Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	ROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
			Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan
			Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
			Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
		Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan
			Terlaksananya administrasi kepegawaian	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Yang Terlaksana		Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Yang Terlaksana
			Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
			Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
			Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian ⁴	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian ⁴
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
			Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan
			Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
			Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
			Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
			Terlaksananya administrasi umum	Jumlah Layanan Administrasi Umum Yang Terlaksana	Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Yang Terlaksana
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	ROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
			Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
			Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
			Terkelolanya data Barang Milik Daerah dalam aplikasi	Jumlah Aset /BMD Yang diadakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aset /BMD Yang diadakan
			Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
			Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan
			Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan
			Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan
			Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
			Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan
			Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan
			Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
			Tersedianya layanan jasa penunjang	Jumlah Aset /BMD Yang diadakan	penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Aset /BMD Yang diadakan
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
			Tersedianya Jasa Peralatan dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Penyediaan Jasa Peralatan dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	ROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
			Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
			Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Aset /BMD Yang dipelihara	pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Aset /BMD Yang dipelihara
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya
			Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara
			Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi

TABEL 4.3
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN TAHUN 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
5.03 - KEPEGAWAIAN				15.190.104.697,00		15.190.104.697,00		15.190.104.697,00		15.190.104.697,00		15.190.104.697,00		
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				14.193.202.797,00		14.193.202.797,00		14.193.202.797,00		14.193.202.797,00		14.193.202.797,00		
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	0	78	464.907.270,00	80	464.907.270,00	81	464.907.270,00	82	464.907.270,00	85	464.907.270,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	
5.03.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				26.250.000,00		26.250.000,00		36.250.000,00		26.250.000,00		26.250.000,00		
Tersedianya dokumen administrasi kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	45	26.250.000,00	45	26.250.000,00	45	36.250.000,00	45	26.250.000,00	45	26.250.000,00		
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	0		0		1		0		0			
5.03.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0,00		0,00		10.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	1	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
5.03.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				26.250.000,00		26.250.000,00		26.250.000,00		26.250.000,00		26.250.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	45	26.250.000,00	45	26.250.000,00	45	26.250.000,00	45	26.250.000,00	45	26.250.000,00		
5.03.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				213.998.120,00		213.998.120,00		213.998.120,00		213.998.120,00		213.998.120,00		
Tersedianya dokumen administrasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6	4	213.998.120,00	4	213.998.120,00	4	213.998.120,00	4	213.998.120,00	4	213.998.120,00		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6	4		4		4		4		4			
5.03.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.977.600,00		1.977.600,00		1.977.600,00		1.977.600,00		1.977.600,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1.977.600,00	1	1.977.600,00	1	1.977.600,00	1	1.977.600,00	1	1.977.600,00		
5.03.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				80.003.500,00		80.003.500,00		80.003.500,00		80.003.500,00		80.003.500,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	4	80.003.500,00	4	80.003.500,00	4	80.003.500,00	4	80.003.500,00	4	80.003.500,00		
5.03.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				27.017.020,00		27.017.020,00		27.017.020,00		27.017.020,00		27.017.020,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6	4	27.017.020,00	4	27.017.020,00	4	27.017.020,00	4	27.017.020,00	4	27.017.020,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
5.03.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
5.03.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00		
5.03.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				118.042.150,00		118.042.150,00		108.042.150,00		118.042.150,00		118.042.150,00		
Terkelolanya data Barang Milik Daerah dalam aplikasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1	118.042.150,00	1	118.042.150,00	1	108.042.150,00	1	118.042.150,00	1	118.042.150,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	5		5		5		5		5			
5.03.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				69.250.000,00		69.250.000,00		59.250.000,00		69.250.000,00		69.250.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1	69.250.000,00	1	69.250.000,00	1	59.250.000,00	1	69.250.000,00	1	69.250.000,00		
5.03.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				48.792.150,00		48.792.150,00		48.792.150,00		48.792.150,00		48.792.150,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	5	48.792.150,00	5	48.792.150,00	5	48.792.150,00	5	48.792.150,00	5	48.792.150,00		
5.03.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				62.128.000,00		62.128.000,00		62.128.000,00		62.128.000,00		62.128.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
5.03.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	5	2.400.000,00	5	2.400.000,00	5	2.400.000,00	5	2.400.000,00	5	2.400.000,00		
5.03.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				59.728.000,00		59.728.000,00		59.728.000,00		59.728.000,00		59.728.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	59.728.000,00	12	59.728.000,00	12	59.728.000,00	12	59.728.000,00	12	59.728.000,00		
5.03.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				44.489.000,00		44.489.000,00		44.489.000,00		44.489.000,00		44.489.000,00		
Tersedianya dokumen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	13	12	44.489.000,00	12	44.489.000,00	12	44.489.000,00	12	44.489.000,00	12	44.489.000,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	9	9		9		9		9		9			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
5.03.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		4.500.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	9	9	4.500.000,00	9	4.500.000,00	9	4.500.000,00	9	4.500.000,00	9	4.500.000,00		
5.03.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				19.989.000,00		19.989.000,00		19.989.000,00		19.989.000,00		19.989.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	2	19.989.000,00	2	19.989.000,00	2	19.989.000,00	2	19.989.000,00	2	19.989.000,00		
5.03.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	13	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00		
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	13.728.295.527,00	100	13.728.295.527,00	100	13.728.295.527,00	100	13.728.295.527,00	100	13.728.295.527,00		
5.03.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.998.560,00		8.998.560,00		8.998.560,00		8.998.560,00		8.998.560,00		
Tersedianya dokumen perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	8.998.560,00	1	8.998.560,00	1	8.998.560,00	1	8.998.560,00	1	8.998.560,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
5.03.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.999.520,00		1.999.520,00		1.999.520,00		1.999.520,00		1.999.520,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	1	1.999.520,00	1	1.999.520,00	1	1.999.520,00	1	1.999.520,00	1	1.999.520,00		
5.03.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.999.520,00		1.999.520,00		1.999.520,00		1.999.520,00		1.999.520,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	1	1.999.520,00	1	1.999.520,00	1	1.999.520,00	1	1.999.520,00	1	1.999.520,00		
5.03.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				4.999.520,00		4.999.520,00		4.999.520,00		4.999.520,00		4.999.520,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	4.999.520,00	1	4.999.520,00	1	4.999.520,00	1	4.999.520,00	1	4.999.520,00		
5.03.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				13.719.296.967,00		13.719.296.967,00		13.719.296.967,00		13.719.296.967,00		13.719.296.967,00		
Tersedianya dokumen administrasi keuangan yang sesuai SAP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	45	45	13.719.296.967,00	45	13.719.296.967,00	45	13.719.296.967,00	45	13.719.296.967,00	45	13.719.296.967,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	48	48		48		48		48		48			
5.03.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.673.031.865,00		5.673.031.865,00		5.673.031.865,00		5.673.031.865,00		5.673.031.865,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	45	45	5.673.031.865,00	45	5.673.031.865,00	45	5.673.031.865,00	45	5.673.031.865,00	45	5.673.031.865,00		
5.03.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				8.046.265.102,00		8.046.265.102,00		8.046.265.102,00		8.046.265.102,00		8.046.265.102,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	48	48	8.046.265.102,00	48	8.046.265.102,00	48	8.046.265.102,00	48	8.046.265.102,00	48	8.046.265.102,00		
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				996.901.900,00		996.901.900,00		996.901.900,00		996.901.900,00		996.901.900,00		
Meningkatnya kualitas pengelolaan sistem informasi kepegawaian	Persentase data ASN yang diupdate (%)	95	95	57.051.000,00	95	57.051.000,00	95	57.051.000,00	95	57.051.000,00	95	57.051.000,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	
5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				346.955.500,00		346.955.500,00		346.955.500,00		346.955.500,00		346.955.500,00		
Tersedianya dokumen sistem informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	1	1	57.051.000,00	1	57.051.000,00	1	57.051.000,00	1	57.051.000,00	1	57.051.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
5.03.02.2.01.0011 - Pengelolaan Data Kepegawaian				19.851.000,00		19.851.000,00		19.851.000,00		19.851.000,00		19.851.000,00		
Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	1	1	19.851.000,00	1	19.851.000,00	1	19.851.000,00	1	19.851.000,00	1	19.851.000,00		
5.03.02.2.01.0012 - Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				17.200.000,00		17.200.000,00		17.200.000,00		17.200.000,00		17.200.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian (Laporan)	1	1	17.200.000,00	1	17.200.000,00	1	17.200.000,00	1	17.200.000,00	1	17.200.000,00		
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	98	98	108.470.900,00	98	108.470.900,00	98	108.470.900,00	98	108.470.900,00	98	108.470.900,00		
5.03.02.2.04 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				108.470.900,00		108.470.900,00		108.470.900,00		108.470.900,00		108.470.900,00		
Tersedianya dokumen penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	1	1	108.470.900,00		108.470.900,00	1	108.470.900,00	1	108.470.900,00	1	108.470.900,00		
	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	8	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (Orang)	227	100		70		70		70		70			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)	0	3.872		3.872		3.872		3.872		3.872			
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
5.03.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				8.014.800,00		8.014.800,00		8.014.800,00		8.014.800,00		8.014.800,00		
Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	1	1	8.014.800,00	1	8.014.800,00	1	8.014.800,00	1	8.014.800,00	1	8.014.800,00		
5.03.02.2.04.0003 - Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				26.262.800,00		26.262.800,00		26.262.800,00		26.262.800,00		26.262.800,00		
Terlaksananya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Laporan)	1	1	26.262.800,00	1	26.262.800,00	1	26.262.800,00	1	26.262.800,00	1	26.262.800,00		
5.03.02.2.04.0004 - Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
5.03.02.2.04.0005 - Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai				23.903.100,00		23.903.100,00		23.903.100,00		23.903.100,00		23.903.100,00		
Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (Orang)	227	100	23.903.100,00	70	23.903.100,00	70	23.903.100,00	70	23.903.100,00	70	23.903.100,00		
5.03.02.2.04.0007 - Pembinaan Disiplin ASN				10.607.400,00		10.607.400,00		10.607.400,00		10.607.400,00		10.607.400,00		
Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	8	3	10.607.400,00	3	10.607.400,00	3	10.607.400,00	3	10.607.400,00	3	10.607.400,00		
5.03.02.2.04.0008 - Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				23.182.800,00		23.182.800,00		23.182.800,00		23.182.800,00		23.182.800,00		
Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	1	1	23.182.800,00		23.182.800,00	1	23.182.800,00	1	23.182.800,00	1	23.182.800,00		
5.03.02.2.04.0010 - Evaluasi Disiplin ASN				6.500.000,00		6.500.000,00		6.500.000,00		6.500.000,00		6.500.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN (Laporan)	0	1	6.500.000,00	1	6.500.000,00	1	6.500.000,00	1	6.500.000,00	1	6.500.000,00		
Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian pemerintah kota	Persentase layanan administrai kepegawaian terselesaikan tepat waktu sesuai SOP (%)	90	90	324.874.300,00	95	324.874.300,00	95	324.874.300,00	95	324.874.300,00	95	324.874.300,00		
5.03.02.2.01 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				346.955.500,00		346.955.500,00		346.955.500,00		346.955.500,00		346.955.500,00		
Tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	1	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00		
5.03.02.2.01.0002 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan	1	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Pengadaan ASN (Dokumen)													
Tersedianya dokumen pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	1	1	234.904.500,00	1	234.904.500,00	1	234.904.500,00	1	234.904.500,00	1	234.904.500,00		
	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	41	89		96		130		113		120			
5.03.02.2.01.0003 - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				220.000.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	1	1	220.000.000,00	1	220.000.000,00	1	220.000.000,00	1	220.000.000,00	1	220.000.000,00		
5.03.02.2.01.0006 - Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				14.904.500,00		14.904.500,00		14.904.500,00		14.904.500,00		14.904.500,00		
5.03.02.2.02 - Mutasi dan Promosi ASN				421.775.500,00		421.775.500,00		421.775.500,00		421.775.500,00		421.775.500,00		
Terlaksananya mutasi dan kenaikan pangkat ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	24	20	34.969.800,00	20	34.969.800,00	20	34.969.800,00	20	34.969.800,00	20	34.969.800,00		
	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
5.03.02.2.02.0001 - Pengelolaan Mutasi ASN				14.969.800,00		14.969.800,00		14.969.800,00		14.969.800,00		14.969.800,00		
Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	24	20	14.969.800,00	20	14.969.800,00	20	14.969.800,00	20	14.969.800,00	20	14.969.800,00		
5.03.02.2.02.0002 - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	4	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00		
Meningkatnya pengembangan Karir ASN	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya (%)	90	90	506.505.700,00	90	506.505.700,00	95	506.505.700,00	95	506.505.700,00	100	506.505.700,00		
5.03.02.2.02 - Mutasi dan Promosi ASN				421.775.500,00		421.775.500,00		421.775.500,00		421.775.500,00		421.775.500,00		
Tersedianya dokumen Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	2	4	386.805.700,00	4	386.805.700,00	4	386.805.700,00	4	386.805.700,00	4	386.805.700,00		
5.03.02.2.02.0003 - Pengelolaan Promosi ASN				386.805.700,00		386.805.700,00		386.805.700,00		386.805.700,00		386.805.700,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	2	4	386.805.700,00	4	386.805.700,00	4	386.805.700,00	4	386.805.700,00	4	386.805.700,00		
5.03.02.2.03 - Pengembangan Kompetensi ASN				119.700.000,00		119.700.000,00		119.700.000,00		119.700.000,00		119.700.000,00		
Tersedianya dokumen/Laporan pengembangan kompetensi/Jumlah ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	0	71	119.700.000,00	71	119.700.000,00	71	119.700.000,00	71	119.700.000,00	71	119.700.000,00		
	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
Terkelolanya Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen)	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
5.03.02.2.03.0004 - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN				109.700.000,00		109.700.000,00		109.700.000,00		109.700.000,00		109.700.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	0	71	109.700.000,00	71	109.700.000,00	71	109.700.000,00	71	109.700.000,00	71	109.700.000,00		
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				855.000.000,00		855.000.000,00		855.000.000,00		855.000.000,00		855.000.000,00		
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				855.000.000,00		855.000.000,00		855.000.000,00		855.000.000,00		855.000.000,00		
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase)	50	50	795.000.000,00	50	795.000.000,00	50	795.000.000,00	50	795.000.000,00	50	795.000.000,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	
5.04.02.2.01 - Pengembangan Kompetensi Teknis				95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		
Terlaksananya layanan pengembangan kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	30	20	95.000.000,00	20	95.000.000,00	20	95.000.000,00	20	95.000.000,00	20	95.000.000,00		
5.04.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		95.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	30	20	95.000.000,00	20	95.000.000,00	20	95.000.000,00	20	95.000.000,00	20	95.000.000,00		
5.04.02.2.02 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				760.000.000,00		760.000.000,00		760.000.000,00		760.000.000,00		760.000.000,00		
Terlaksananya layanan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)	1	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00		
5.04.02.2.02.0007 - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		
Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)	1	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00		

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.2.1 Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra BKPSDM Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja Pembangunan daerah.

Indikator Kinerja Utama Adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional dan merupakan alata tau media yang digunakan untuk mengukur Tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukur telah berhasil dilaksanakan atyau dicapai sesuai dengan yang direncanakan

Penetapan Indikator Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah menetapkan Indikator Kinerja yang akan dicapai untuk 5 (lima) tahun mendatang, yang ditampilkan dalam tabel 4.5 berikut:

TABEL 4.5
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Sistem merit	Indeks	182	250	250	255	255	260	265	
2	Nilai SAKIP	Nilai	79,98	80,15	80,30	80,45	80,75	81,00	81,15	
3	IKM	Nilai	89,61	90,25	90,30	90,50	90,75	91,00	91,25	

4.2.2 Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kunci (IKK)\

Indikator Kinerja Kunci atau disebut juga IKK Adalah indikator Kerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan keberhasilan suatu urusan pemerintah. Indikator Kinerja juga dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu target, baik dengan menggunakan ukuran kualitatif maupun kuantitatif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka Indikator Kunci (IKK) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat ditampilkan pada tabel 4.6 berikut :

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Nilai Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	Nilai	75	80	85	90	95	95	

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tarakan Tahun 2025-2029 telah disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Tarakan. Dokumen ini dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan di bidang administrasi kepegawaian selama lima tahun ke depan.

Tantangan dan dinamika diperkirakan akan dihadapi dalam pelaksanaan rencana ini. Oleh karena itu, dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh jajaran Badan, pemangku kepentingan, serta masyarakat sangat diharapkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan kerja sama dan komitmen yang tinggi, pencapaian target-target strategis diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Demikianlah Rencana Strategis ini disusun dengan harapan dapat menjadi landasan yang kuat dalam mewujudkan pelayanan administrasi kepegawaian yang profesional, transparan, dan akuntabel.

25. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan Tahun 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional, bertujuan memperkuat kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri. Pembangunan bidang tersebut dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan tersebut secara cermat, tepat, dan akurat maka diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik.

Di Indonesia sistem perencanaan pembangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari kebijakan desentralisasi dengan adanya pemberian otonomi daerah, daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut merupakan suatu sistem perencanaan pembangunan yang dibuat oleh daerah, yang merupakan satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional. Dengan kata lain, perencanaan pembangunan daerah merupakan sub-sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa setiap perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan dalam jangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka disusunlah Renstra Badan Kesatuan Bangsa sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota yang diwujudkan dalam satu periode masa jabatan.

Mengacu pada hal tersebut diatas maka disusun Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan Tahun 2025-2029. Selanjutnya digunakan

sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penyusunan anggaran.

Selanjutnya rancangan akhir renstra Badan Kesbangpol disahkan dengan keputusan Wali Kota menjadi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Berdasarkan keputusan Wali Kota tentang pengesahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tersebut, Sekretariat Badan Kesbangpol menetapkan Renstra Badan Kesbangpol yang lebih lanjut akan menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Badan Kesbangpol dalam menyusun Rancangan Renja Badan Kesbangpol.

Renstra sebagai pedoman perencanaan 5 tahunan berfungsi:

- a. Sebagai pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan di masa depan;
- b. Sebagai acuan dan pedoman penyusunan rencana kerja (renja) PD dan sebagai dokumen operasional tahunan PD.

1.1.1 Proses Penyusunan Proses Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan dilaksanakan melalui :

Adapun tahapan proses penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan 2025-2029 sebagai berikut:

1. Tahap persiapan

Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusunan Renstra Perangkat Daerah, tim penyusun dipersiapkan oleh kepala Perangkat Daerah dan diusulkan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan surat keputusan kepala daerah, orientasi mengenai Renstra PD, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan penyiapan data dan informasi.

2. Tahap penyusunan rancangan Renstra PD

Penyusunan rancangan Renstra Badan Kesbangpol Kota Tarakan meliputi:

- a. Pengolahan data dan informasi, yang bertujuan untuk memenuhi tabel-tabel yang di sajikan dalam rancangan renstra PD, termasuk di dalamnya analisis gambaran pelayanan Badan Kesbangpol yang dilakukan dengan melakukan pengukuran terhadap kinerja Badan Kesbangpol pada periode renstra sebelumnya.
- b. Perumusan deployment Badan Kesbangpol yaitu: tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaan indikatif 5 (lima) tahun dan indikator kinerja yang mengacu pada sasaran dan program RPJMD Kota Tarakan:

3. Penyusunan rancangan akhir Renstra PD

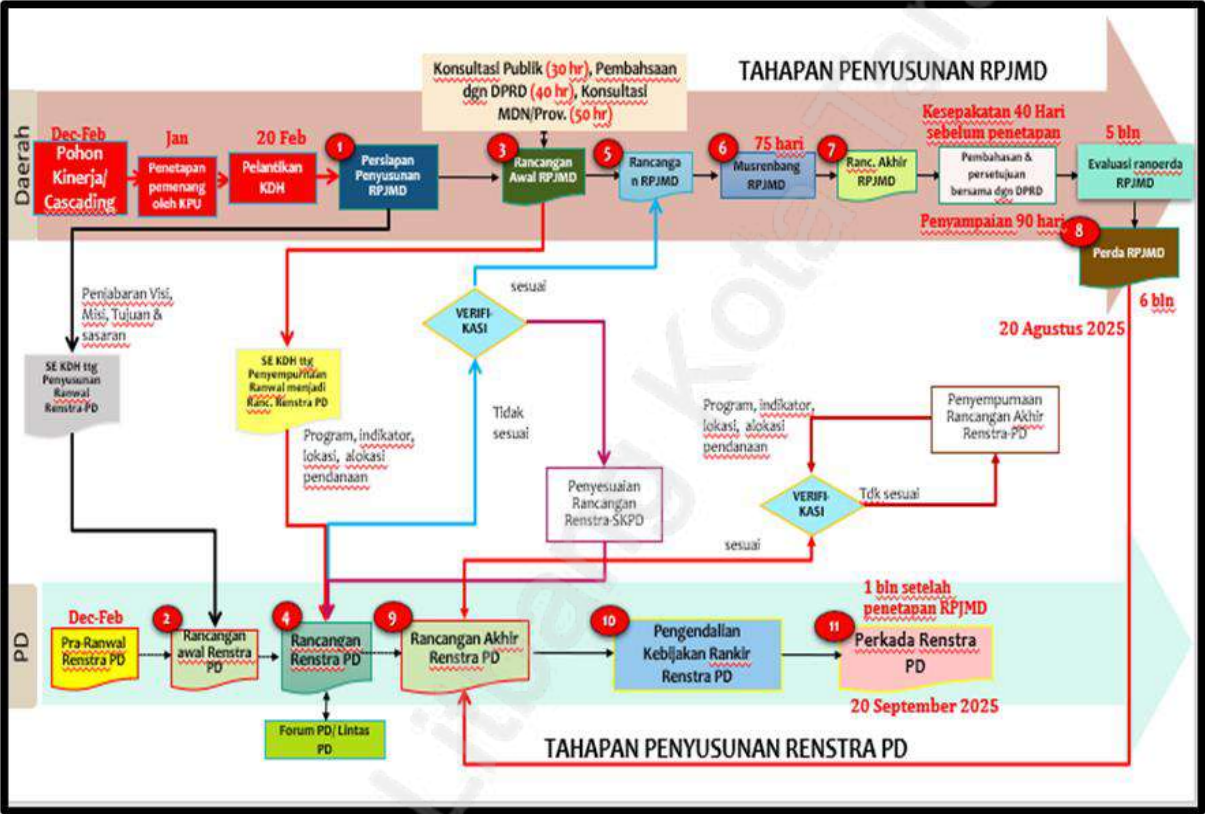
Rancangan akhir Renstra Badan Kesbangpol merupakan rancangan Badan Kesbangpol yang telah disempurnakan dengan mengacu kepada peraturan daerah tentang RPJMD Kota Tarakan tahun 2025-2029. Penyempurnaan yang dimaksud bertujuan untuk mempertajam tujuan dan sasaran serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Tarakan tahun 2025-2029.

4. Tahapan penetapan Renstra PD

Rancangan akhir Renstra Badan Kesbangpol untuk menjamin kesesuaian tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Badan Kesbangpol dengan RPJMD serta keterpaduan dengan rancangan akhir renstra lainnya.

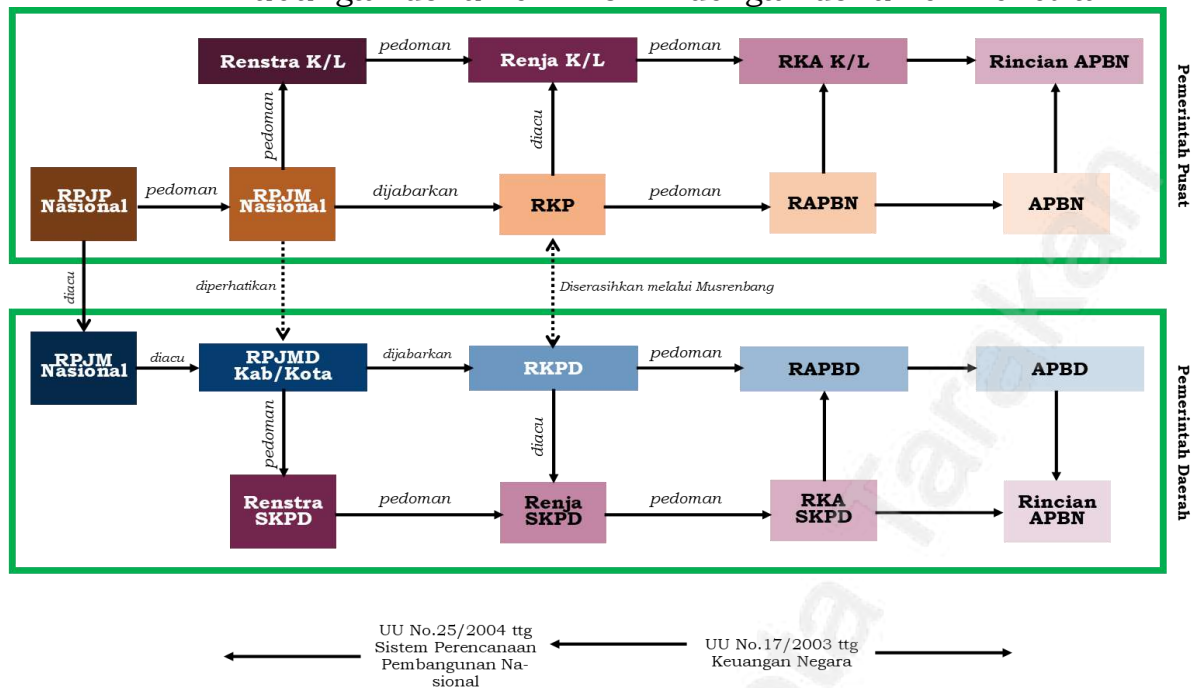
Renstra Badan Kesbangpol Kota Tarakan yang telah melalui verifikasi akhir disahkan dengan Perkada/Wali Kota Tarakan paling lambat 1 (satu) Bulan setelah peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Renstra Badan Kesbangpol Kota Tarakan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota/Kepala Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan rencana strategis yang dijabarkan dokumen perencanaan tahunan Badan Kesbangpol Kota Tarakan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Kesbangpol Kota Tarakan. Tahapan dan tata cara penyusunan Renstra perangkat daerah dapat digambarkan dalam gambar 1.1 dibawah ini.

Gambar 1.1
bagan alur tahapan dan tata cara penyusunan renstra perangkat daerah.



Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mengisyaratkan bahwa dokumen Renstra PD merupakan penjabaran visi dan misi dari RPJMD, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen Renstra PD dapat dijelaskan pada gambar 1.2:

Gambar 1.2.
Hubungan dokumen RPJMD dengan dokumen Renstra PD



1.1.2 Keterkaitan antara Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Keberadaan Renstra PD yang telah ditetapkan dengan keputusan Wali Kota akan dijadikan pedoman bagi penyiapan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama periode perencanaannya, yang dalam penyusunannya juga mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Tarakan. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang di amanatkan dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, keberadaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Tarakan akan menjadi pedoman bagi penyusunan rancangan RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Tarakan yang dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) kota Tarakan. RPJMD Kota Tarakan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dalam hal ini Walikota Tarakan yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

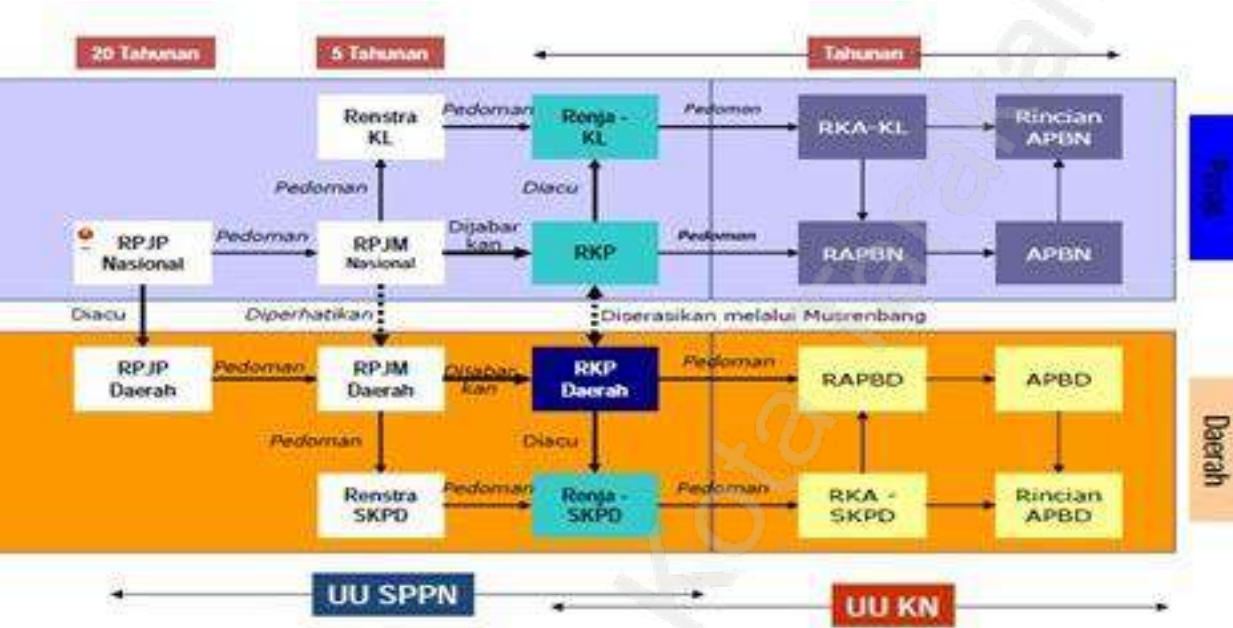
Rencana Kerja Pemerintah Kota Tarakan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi Masyarakat.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan adalah turunan dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan yang merupakan dokumen perencanaan Badan Kesbangpol Kota Tarakan untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh

Pemerintah Kota Tarakan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

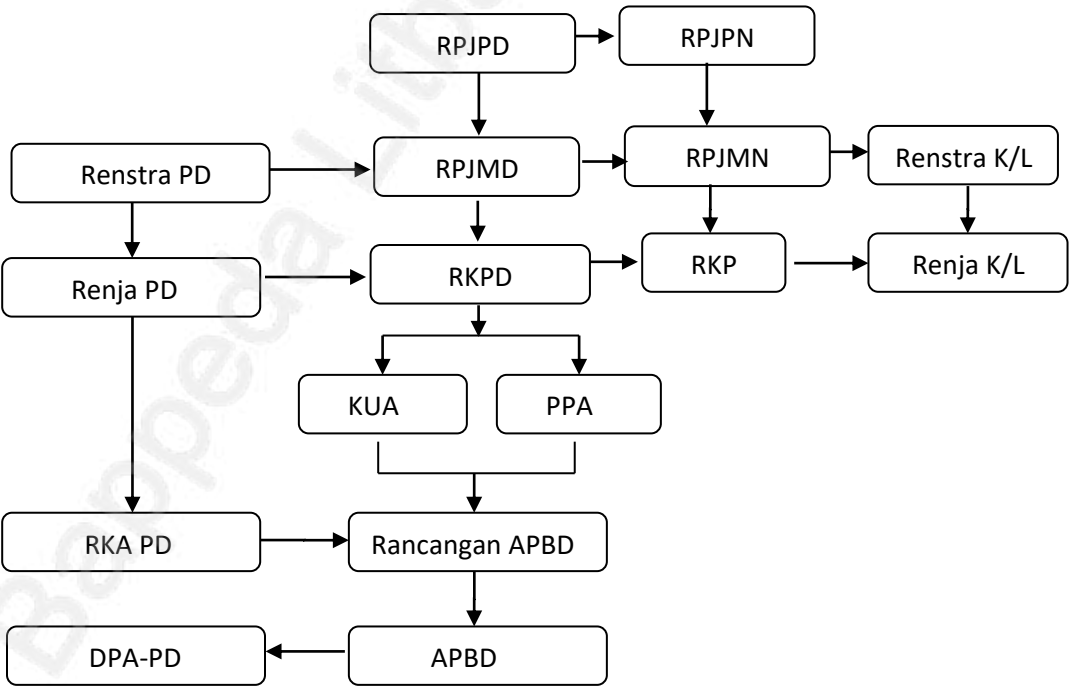
Gambar tentang hubungan antara Renstra tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.3

Gambar 1.3. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Selanjutnya hubungan antara sistem perencanaan nasional dan daerah dapat dilihat pada gambar 1.4

Gambar 1.4.
Hubungan Sistem Perencanaan Nasional dan Daerah



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan rencana strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan berdasarkan landasan kebijakan atau dasar hukum yang meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
7. Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029;
18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

19. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Wali Kota Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan Tahun 2025-2029 adalah untuk :

1. Menyelaraskan Renstra Kesbangpol 2025-2029 dengan Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029.
2. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan urusan Badan Kesbangpol Kota Tarakan serta menyediakan tolak ukur dalam penetapan kinerja selama 5 (lima) tahun.
3. Menjamin keterkaitan, keserasian serta harmonisasi antara perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan program kegiatan setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ke depan.
4. Memberikan arah dan pedoman bagi Aparatur Sipil Negara Badan Kesbangpol Kota Tarakan dalam melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan program prioritas sesuai dengan urusan Badan Kesbangpol Kota Tarakan sehingga tujuan program dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.
5. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana pembangunan tahunan.
6. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Kesbangpol Kota Tarakan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Tujuan dari penyusunan Renstra Badan Kesbangpol Kota Tarakan Tahun 2025 – 2029 adalah :

1. Menterjemahkan dan menjabarkan visi misi Kepala daerah yang termuat dalam RPJMD Kota Tarakan Periode 2025-2029 dalam bentuk tujuan sasaran, program dan kegiatan yang lebih spesifik dan terarah serta bersifat operasional.
2. Sebagai kerangka acuan dalam menyusun rencana kerja Badan Kesbangpol Kota Tarakan selama 5 (lima) tahun.
3. Sebagai dasar penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi serta penilaian kinerja Badan Kesbangpol dalam menjalankan dan melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA TARAKAN

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2. Sumber Daya SKPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1 Gambaran Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Bab II pasal 2 disebutkan bahwa :

- 1) Badan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Badan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang politik dalam negeri;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- c. Pengoordinasian, pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
- d. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi masyarakat;
- e. Perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
- f. Penyusunan pedoman petunjuk pelaksanaan tugas dan fungsi;
- g. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, pelaksanaan kesekretariatan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 71 Tahun 2021, Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan terdiri dari :

1. Sekretariat;
2. Bidang Politik Dalam Negeri, Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
3. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat

- 1) Sekretariat sebagaimana dimaksud merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- 2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi kegiatan Badan;
- b. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Badan.
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Badan;
- e. Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada Badan;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Badan;
- g. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- h. Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Badan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat menyurat, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, organisasi, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, dan perlengkapan di lingkungan Badan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 1). Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan;
- 2). Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Badan;
- 3). Koordinasi dan penyusunan produk hukum daerah pada Badan;
- 4). Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Badan;
- 5). Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan; dan
- 6). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang perencanaan dan keuangan meliputi koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, keuangan, pembukuan, dan pengelolaan sistem informasi di lingkungan Badan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- 1). Koordinasi kegiatan Badan;
- 2). Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Badan;
- 3). Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
- 4). Penyiapan bahan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Badan; dan
- 5). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bidang Politik Dalam Negeri, Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa :

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri, Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas Pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang politik dalam negeri, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa serta melaksanakan sebagian tugas Badan.
- (2) Bidang Politik Dalam Negeri, Bina Ideologi, wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawahi kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Bidang Politik Dalam Negeri, Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Politik dalam negeri, bina ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
- b. Melaksanakan kebijakan pemerintah tentang fasilitasi pelaksanaan bina ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; dan
- c. Melaksanakan kebijakan Pemerintah tentang Pembinaan Politik dan Pemilu.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan :

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Bidang Kewaspadaan Nasional dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan; dan;
- c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

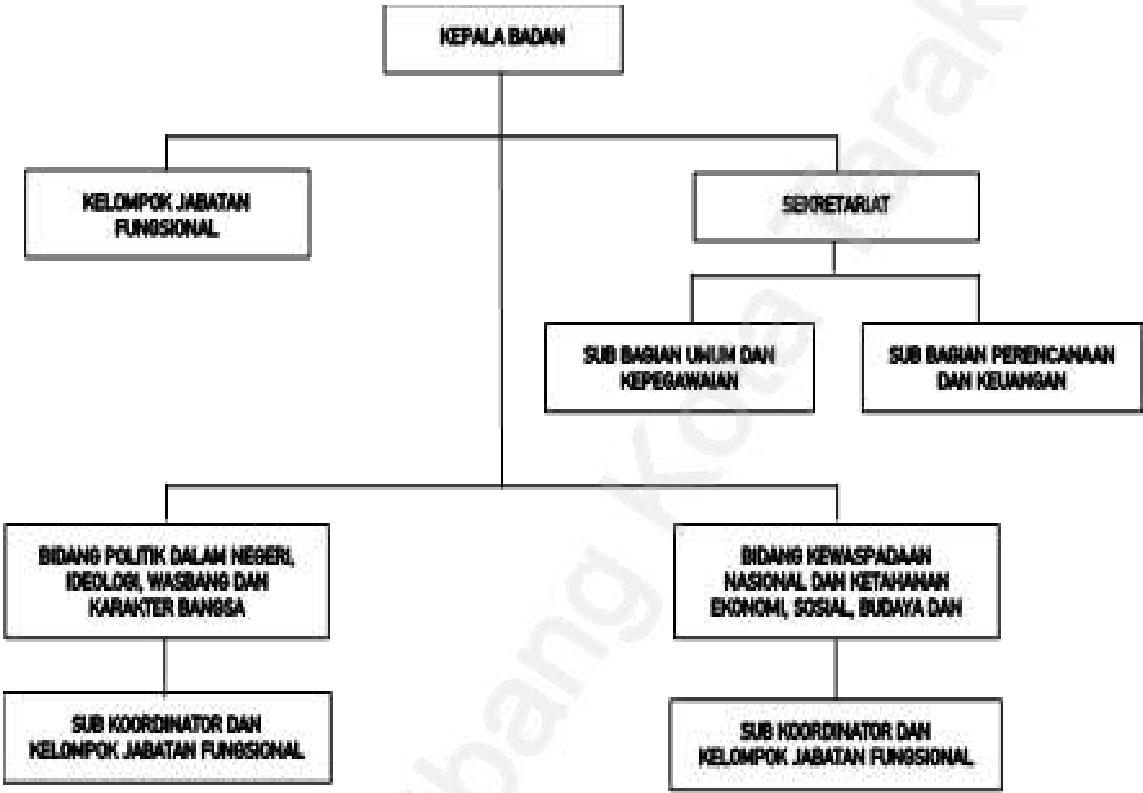
Kelompok Jabatan Fungsional :

- 1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional sesuai dengan bidang dan keterampilannya.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari beberapa pejabat fungsional dapat diberikan tugas tambahan yang melaksanakan tugas

sebagai sub koordinator melalui penetapan surat tugas oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan. Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Badan Kesbangpol Kota Tarakan



Sumber : *Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan, Tahun 2025.*

b. Sumber Daya Perangkat Daerah

Data Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan bulan Oktober Tahun 2025, secara keseluruhan jumlah PNS sebanyak 20 orang dan jumlah Pegawai Kontrak sebanyak 4 orang , dengan komposisi pegawai sebagai berikut :

Tabel 2.1
Keadaan Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Tarakan

	KOMPOSISI		
	LAKI-	PEREMPU	
1. Kepala Badan	1	-	1
2. Sekretariat			
2. 1. Sekretaris	-	-	-
Kepala Sub Bagian Umum	1	-	1
2. 2. 1. Staf Pendukung			
2. 3. 1. 1. Pegawai Negeri Sipil	1	1	2
2. 3. 1. 2. Honorarium Daerah	3	1	4
2. 3. 1. 2. Honorarium Daerah	1	-	1
Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan			
2. 3. 1. Staf Pendukung	1	2	3
2. 3. 1. 1. Pegawai Negeri Sipil	-	-	-
2. 3. 1. 2. Honorarium Daerah	1	-	1
3. Kepala Bidang Ketahanan Idiologi dan Politik	1	-	1
3. 1. Kepala Sub Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karbang.			
3. 1. 1. Staf Pendukung	1	-	1
3. 1. 1. 1. Pegawai Negeri Sipil	-	-	-
3. 1. 1. 1. Pegawai Negeri Sipil	1	-	1
3. 1. 1. 2. Honorarium Daerah			
3. 1. 1. 2. Honorarium Daerah	-	2	2

Sumber : *Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan Tahun 2025.*

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol
Menurut Status, Pangkat dan Golongan

Status Kepegawaian/ Pangkat	Gol. /Ruang	Unit Kerja di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			Total
		Sekretariat	Poldagri, Bina Ideologi, Wasbang & Karbang	Wasnas, Ketahanan EkoSosbud dan Ormas	
A Pegawai Negeri Sipil (PNS)					
1. Pembina Utama Muda	IV/c	1	-	-	1
2. Pembina Tk. I	IV/b	-		-	-
3. Pembina	IV/a	-	1	2	3
4. Penata Tk.I	III/d	3	2	2	7
5. Penata	III/c	1	1	-	2
6. Penata Muda Tk. I	III/b	2	1	2	5
7. Penata Muda	III/a	1	1	-	2
8. Pengatur Tk. I	II/d	-	-	-	-
9. Pengatur	II/c	-	-	-	-
10. Pengatur Muda Tk. I	II/b	-	-	-	-
11. Pengatur Muda	II/a	-	-	-	-
12. Juru Tk. I	I/d	-	-	-	-
13. Juru	I/c	-	-	-	-
14. Juru Muda Tk. I	I/b	-	-	-	-
15. Juru Muda Tk. I	I/a	-	-	-	-
B. Tenaga Kontrak	-	4	-	-	4
				Total	24

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan Tahun 2025.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Kota Tarakan
Menurut Latar Belakang Pendidikan

Status Kepegawaian/Pendidikan Akhir	Ka.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Unit kerja dilingkungan Badan (Bidang)			Total
		Sekretariat	Poldagri,Bina Ideologi, Wasbang & Karbang Idpol	Wasnas, Ketahanan EkoSosbud dan Ormas	
A Pegawai Negeri Sipil (PNS)					
1. S-3	-	-	-	-	-
2. S-2	1	2	-	1	4
3. S-1	-	2	6	4	12
4. D-3	-	2	-	1	3
5. SLTA/Sederajat	-	1	-	-	1

Status Kepegawaian/Pendidikan Akhir	Ka.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Unit kerja dilingkungan Badan (Bidang)			Total
		Sekretariat	Poldagri,Bina Ideologi, Wasbang & Karbang Idpol	Wasnas, Ketahanan EkoSosbud dan Ormas	
6. SLTP/Sederajat	-	-	-	-	-
7. SD/Sederajat	-	-	-	-	-
B. Tenaga Kontrak					
1 S-1	-	-	-	-	-
2 D-3	-	-	-	-	-
3 SLTA/Sederajat	-	3	-	-	3
4 SLTP/Sederajat	-	1	-	-	1
Total	1	12	5	6	24

Sumber : *Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan Tahun 2025.*

Untuk menunjang kegiatanpelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa tanah dan bangunan, inventaris, kendaraan dinas, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi cukup baik dan dapat dimanfaatkan, Sampai dengan akhir Januari 2025 sarana kerja yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan adalah seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Keadaan Barang Inventaris Badan Kesbangpol Kota Tarakan

No.	Sarana Kerja yang tersedia	Jumlah	Keterangan
1.	Tanah	1	
2.	Bangunan Gedung	1	Kurang Memadai
3.	Kendaraan Roda 4	2 unit	
4.	Kendaraan Roda 2	15 unit	
5.	Komputer	6 unit	
6	Laptop	9 unit	
7	Printer	8 unit	Rusak
8	Lemari	15 unit	
9	Meja	40 unit	
10	Kursi	70 unit	
11	Sofa	3 unit	
12	Mesin Fotocopy	1 unit	
13	Mesin Tik Manual	2 unit	
14	Dispenser	6 unit	
15	Telepon	2 unit	
16	Faximile	1 unit	
17	Ac	10 unit	
18	Alat studio	1 set	
19	Mesin rumput	1 unit	
20	Lemari Es	3 unit	
21	Televisi	5 unit	

Sumber : *Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan, Tahun 2025.*

c. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pencapaian kinerja adalah suatu proses telaahan yang sistematis terhadap program dengan menganalisa sampai sejauh mana sasaran program kegiatan dapat dicapai dengan membandingkan target dan realisasi. Pencapaian kinerja yang ditampilkan dalam bentuk matrik pengukuran pencapaian sasaran yang dapat menghasilkan nilai-nilai kuantitatif.

Secara garis besar pencapaian sasaran dalam rangka pencapaian tujuan Badan Kesbangpol Kota Tarakan yang tertuang dalam rencana Strategis Badan Kesbangpol Kota Tarakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dapat dicapai dengan baik dan berhasil diukur dengan menggunakan pembanding antara target dan realisasi.

Adapun pelayanan yang diberikan oleh Badan Kesbangpol Kota Tarakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, adapun kinerja yang dimaksud adalah:

- 1) Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai Badan Kesbangpol Kota Tarakan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab, tugas dan fungsinya yang diberikan dengan hasil kinerja yang baik.
- 2) Kinerja Badan Kesbangpol Kota Tarakan tidak terlepas dari sumber daya manusia, peningkatan kinerja juga sangat tergantung pada kompetensi, kesungguhan dan motivasi kerja pegawai sebagai aparatur daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Tingkat kinerja pelayanan Badan Kesbangpol ditunjukkan dengan tingkat capaian kinerja Badan Kesbangpol berdasarkan target Renstra Badan Kesbangpol periode sebelumnya. Secara terperinci evaluasi pelaksanaan kinerja Badan Kesbangpol berdasar Renstra ditunjukkan pada Tabel 2.5 yang berisi Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/ target Renstra SKPD periode sebelumnya menurut indikator kinerja pelayanan SKPD yang telah di ratifikasi oleh Pemerintah.

Bappeda Litbang Kota Tarakan

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja Badan Kesbangpol	Target NSPK	Target IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Badan Kesbangpol Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Predikat SAKIP		63/B		50/C	55/CC	60/CC	61,5/B	63/B	35,77/C	56,10/CC	60,25/ B	63,36/B	74,35/ BB	71,54%	102%	100,41%	103,03%	118,01%
2	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Partai Politik yang Lolos verifikasi dan mendapatkan Bantuan Keuangan		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	92%	100%	100%	100%	100%	92%	100%	100%	100%
4	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu/Pemilukada		71,50%		n.a	n.a	n.a	n.a	71,50%	n.a	n.a	n.a	n.a	78,43%	-	-	-	-	109,69%
5	Persentase Capaian Kinerja Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		75%		72.50 %	73,00%	73,50%	74,00%	75%	83,52%	88,69%	91,53%	95,62%	98,01%	115,2%	121,5%	124,5%	129,2%	130.7%
6	Persentase Potensi dan Konflik Sosial yang diidentifikasi dan difasiltasi		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Cakupan Bina Kerukunan Umat Beragama dan Aliran Kepercayaan di Daerah dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Hasil Analisis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan Tahun 2025

Berdasarkan data capaian pada masing-masing indikator pada tabel 2.5, menunjukkan pola kinerja yang dinamis Badan Kesbangpol dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, hal tersebut didasari oleh beberapa faktor yang mempengaruhi dan telah dianalisa pada masing-masing indikator :

1. Meningkatnya Predikat SAKIP

Indikator nilai SAKIP menunjukkan tren positif dan meningkat. Target Renstra ditetapkan pada level “B” dengan skor 63, namun realisasi sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 selalu melampaui target, bahkan mencapai predikat “BB” dengan skor 74,35 pada tahun 2024. Rasio capaian terhadap target berada pada kisaran 71,54%-118,01%.

2. Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi

Indikator Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi, seluruhnya telah tercapai penuh (100%) dan konsisten sampai akhir periode Renstra 2020-2024.

3. Persentase Partai Politik yang Lolos Verifikasi dan Mendapatkan Bantuan Keuangan

Indikator Persentase Partai Politik yang Lolos Verifikasi dan Mendapatkan Bantuan Keuangan menunjukkan konsistensi positif 100%, walaupun sempat terjadi penurunan capaian pada tahun 2021 sebesar 92%. Hal tersebut disebabkan karena ada Partai Politik yang tidak menyampaikan Laporan sehingga tidak lolos verifikasi.

4. Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu/Pemilukada

Indikator Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu/Pemilukada pada periode Renstra Tahun 2020-2024 memenuhi dan bahkan melampaui target hingga mencapai Rasio 109,69%. Hal tersebut menggambarkan koneksitas dan sinergi Badan Kesbangpol dengan KPU, Bawaslu, serta lembaga lain yang terkait Pemilu/Pemilukada.

5. Persentase Capaian Kinerja Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Indikator Persentase Capaian Kinerja Penguatan Ideologi dan Karakter Kebangsaan telah memenuhi target dan selalu mengalami peningkatan yang positif dari tahun ketahun. Dari target 75%, capaian diakhir periode Renstra 2020-2024 sebesar 98,01%. Hal tersebut disebabkan masifnya Kegiatan Bina Ideologi dan Karakter Bangsa serta Paskibraka. Rasio capaian terhadap target berada pada kisaran 115,2%-130,7%

6. Persentase Potensi dan Konflik Sosial yang diidentifikasi dan difasilitasi

Indikator Persentase Potensi dan Konflik Sosial yang diidentifikasi dan difasilitasi tercapai maksimal dengan konsistensi Rasio 100%. Terpenuhinya capaian indikator tersebut merupakan sinergi Badan Kesbangpol dengan Kodim 0907, Polres dan BIN Kaltara.

7. Persentase Cakupan Bina Cakupan Bina Kerukunan Umat Beragama dan Aliran Kepercayaan di Daerah dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

Indikator Cakupan Bina Kerukunan Umat Beragama dan Aliran Kepercayaan di Daerah dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika tercapai maksimal 100%.

Dalam peningkatan pelayanan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelayanan, baik eksternal maupun internal dalam mencapai tujuan dan sasaran. Adapun peluang dan tantangan serta permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

a. Tantangan

1. Tuntutan kebutuhan dan harapan akan masyarakat Indonesia Baru yang ditandai dengan iklim demokratis dan keterbukaan, belum dapat diikuti sama cepatnya dengan nilai-nilai dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan.

2. Adanya kecenderungan sikap kurang menghargai orang lain, menyampaikan keinginan dan harapan cenderung dengan cara sebebas-bebasnya.
3. Adanya kecenderungan unjuk rasa yang disertai kekerasan, intimidasi, perebutan kekuasaan politik, nasional dan daerah.

b. Peluang

1. Memberdayakan masyarakat menuju partisipasi aktif dalam upaya ikut mewujudkan rasa ketentraman dan kenyamanan.
2. Kemudahan memperoleh akses informasi
3. Dukungan Organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan kelembagaan lainnya dalam menciptakan kondisi yang kondusif sehingga terciptanya rasa aman dan nyaman.

Pencapaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan dimasa yang akan datang dari kekuatan dan kelemahan yang ada pada organisasi, oleh karena itu diperlukan upaya untuk memperbesar peranan kekuatan dan memperkecil kelemahan.

a. Kekuatan

1. Perumusan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan sesuai dengan RPJMD Kota Tarakan
2. Sumberdaya Aparatur memiliki potensi dan kemauan untuk berkembang

b. Kelemahan

1. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam politik
2. Isu sara masih dan sering menjadi pemicu konflik
3. Kuantitas Aparatur belum memadai

Sebagai langkah tindak lanjut, strategi yang ditempuh Badan Kesbangpol untuk mencapai tujuan dan sasaran mewujudkan Kondusivitas Daerah adalah sebagai berikut :

1. Melakukan optimalisasi dengan pemanfaatan sumberdaya yang ada
2. Memacu peluang kerjasama dalam segala bidang dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas
3. Meningkatkan kerjasama lintas sektor dengan inovasi
4. Penguatan SDM
5. Peningkatan sarana dan prasarana secara berkelanjutan.

d. Kelompok Sasaran Layanan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan memberikan layanan kepada :

1. Masyarakat

Kelompok sasaran masyarakat yang dimaksud disini adalah masyarakat umum terkait penyelenggaraan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik serta masyarakat yang secara khusus mendapatkan pelayanan urusan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan.

2. Stakeholder

Kelompok sasaran stakeholder merupakan pihak-pihak, baik itu kelompok masyarakat, pihak swasta ataupun instansi pemerintahan lain yang berkepentingan, serta perangkat daerah lain yang memiliki kepentingan dalam urusan kewenangan terkait penyelenggaraan urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

e. Mitra Badan dalam pemberian Pelayanan

Mitra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan dalam pemberian pelayanan antara lain :

1. Bersama dengan Kantor Kementerian Agama R.I terkait dengan pembinaan Kerukunan Beragama.

2. Komisi Pemilihan Umum terkait dengan Pembinaan Parpol dan Lembaga Politik serta urusan Pemilu/Pemilu Kepala Daerah.
3. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dalam menjaga stabilitas dan menjaga keamanan serta ketertiban
4. Badan Intelijen Negara, Kodim 0907, Kepolisian Resort Tarakan terkait menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban serta pembinaan Ormas

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Permasalahan

Pada bagian ini dijelaskan isu-isu strategis berdasarkan permasalahan yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan dengan melalui langkah strategis untuk mendorong upaya perbaikan dalam peningkatan kualitas pelayanan yang prima dengan memberikan stimulasi, semangat perbaikan dan melakukan penilaian untuk mengetahui gambaran kinerja yang objektif. Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan hal yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi yang ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh perkembangan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Analisis Isu-isu Strategis tersebut dapat berupa informasi-informasi, kejadian-kejadian, fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi demikian juga dengan faktor internal dan eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja organisasi.

Karakteristik masyarakat Kota Tarakan yang heterogen dengan multi kultur merupakan khasanah kekayaan budaya, letak Kota Tarakan yang sangat strategis secara geopolitik berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia yang merupakan pintu gerbang wilayah utara dan lalu lintas perdagangan Internasional.

Dari dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat Indonesia pada umumnya dan Kota Tarakan pada khususnya, maka masalah-masalah yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan berdasarkan tugas, pokok dan fungsi dalam lima tahun ke depan adalah :

1. Belum optimalnya proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi
2. Capaian tingkat partisipasi politik masyarakat masih dibawah target nasional
3. Masih terjadi konflik politik dalam pelaksanaan pemilu
4. Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan nasionalisme
5. Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi unjukrasa atau demonstrasi
6. Masih munculnya konflik dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang salah
7. Masih banyaknya penyalahgunaan narkoba
8. Derasnya arus budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat
9. Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan

- 10. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokratisi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi social
- 11. Adanya kesenjangan ekonomi di daerah, yang bisa menimbulkan kerawanan konflik di masyarakat

Dari Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dapat dirumuskan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya Kinerja dan Tata Kelola Badan Kesbangpol	Kurangnya Kesadaran beberapa personil ASN Kesbangpol untuk bekerja secara profesional	Banyaknya Pekerjaan yang tidak memenuhi target sesuai rencana
		Masih rendahnya Nilai SAKIP Badan Kesbangpol	Menumpuknya pekerjaan di personil-personil tertentu sehingga lambat dalam penyelesaian dan mengakibatkan menghambat pencapaian tujuan Perangkat Daerah.
			Penyusunan SAKIP mulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaporan tidak dilakukan dengan benar, sering terjadi permintaan Laporan dan Data dikirim tidak sesuai target waktu yang telah ditentukan dan bahkan tidak dikirim/tidak dipenuhi
2	Masih Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu /Pemilukada	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Kesatuan Bangsa	Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme
			Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi
			Deras masuknya arus budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai- nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat.
3	Belum Optimalnya pencegahan Konflik	Kurangnya personil dan anggaran kegiatan terkait peningkatan pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidak harmonisan hubungan antar umat beragama /penghayat kepercayaan
			Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokratisi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial
			Berkurangnya ketahanan ekonomi masyarakat, yangbisa menimbulkan kerawanan sosial dan Menjadi pemicu kerawanan tindak kejahatan.
		Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap politik	Belum optimalnya peran partai politik dalam proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi
			Rendahnya pemahaman tentang etika dan budaya politik Demokratis
			Masih rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat
			Masih terjadinya konflik kepentingan politik dalam pelaksanaan pemilu
		Kurangnya pemahaman dan kesadaran pengurus Ormas untuk mendaftarkan Ormasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Rendahnya persentase Ormas yang terdaftar dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
			Minimnya sarana dan prasarana terkait pendaftaran Ormas secara digital (on line) dan harus dikirimkan ke Kemendagri untuk penerbitan SKT.
			Belum tersedianya ASN yang terdidik dan mempunyai skill khusus dalam menangani Aplikasi Ormas on line

b. Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan, telaah visi- misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam menyusun Rencana Strategis untuk kurun waktu 5 (lima) Tahun mendatang maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik Kota Tarakan untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Kondusivitas Wilayah : Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelesaian dan pencegahan konflik guna menjaga kondusivitas wilayah;
2. Toleransi : Penguatan kerukunan antar umar beragama dalam menjaga ketahanan bangsa;
3. Demokrasi : Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila

Permasalahan dan Isu Strategis dalam pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdapat pada Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2.
Pemetaan Permasalahan Dan Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Mewujudkan Kondusivitas Daerah	Belum optimalnya penyelenggaraan Kinerja Perangkat Daerah	-	Geo politik dunia yang tidak menentu	Pendidikan tentang nilai-nilai luhur budaya bangsa dan wawasan kebangsaan masih kurang	Belum optimalnya pemahaman terhadap rasa nasionalisme dan wawasan kebangsaan	Masih rendahnya partisipasi Masyarakat dalam pemilu/ pemilukada, rendahnya rasa nasionalisme dan toleransi dalam kehidupan beragama dan berdemokrasi.
	Masih rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilu Kepala Daerah				Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik.	
	Masih Rendahnya Keterlibatan Lembaga Politik dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan				Sukses pemilu dan pilkada serentak tahun 2029	
	Belum maksimalnya deteksi dini dan cegah dini dalam pencegahan konflik sosial dan kerawanan penyakit masyarakat				Isu sara sering menjadi pemicu konflik sosial.	
					Belum optimalnya masyarakat dalam menciptakan dan memelihara keamanan dan kenyamanan lingkungan	

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Tarakan serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintahan Daerah Kota Tarakan tahun 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Tarakan Sebagai Kota Cerdas Yang Bertumpu Pada Sektor Jasa, Perdagangan, Perikanan Kelautan, Dan Ekonomi Kreatif Yang Berdaya Saing Dan Maju Menuju Masyarakat Sejahtera"

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kota Tarakan 2025-2029, yaitu:

1. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan infrastruktur layanan dasar yang handal
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui dukungan kemudahan berusaha yang berkeadilan dan bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, perikanan kelautan, ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan (UMKM).
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif serta menjaga stabilitas ketertiban dan ketentraman kota.
5. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh menghadapi bencana.

3.1. Tujuan Renstra Tahun 2025-2029

Terkait dalam mengupayakan terwujudnya visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan Tahun 2025-2029, secara umum Badan kesbangpol memiliki kontribusi dalam mendukung dan mengkoordinasikan pencapaian lima misi yang ditetapkan. Namun secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Badan Kesbangpol mendukung pencapaian Misi Keempat, yaitu Misi : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif serta menjaga stabilitas ketertiban dan ketentraman kota.

Dalam mewujudkan Misi keempat tersebut, terdapat 1 sasaran Pembangunan dimana Badan Kesbangpol mendukung pencapaian tujuan yaitu "Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif yang menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan, keamanan nasional tangguh dan demokrasi substansial. Selaras dengan tujuan Untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, maka Badan Kesbangpol menetapkan tujuan Rencana Strategis yakni "Terwujudnya Kondusivitas Daerah", dengan 1 (satu) indikator tujuan yaitu "Indeks Harmoni Indonesia (Ihai)".

3.2. Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada periode Renstra Tahun 2025-2029 ada 3 (tiga) sasaran yaitu :

Sasaran 1 :

"Meningkatnya Pembangunan Demokrasi dan Politik di Daerah"

Sasaran ini menjelaskan dengan tegas tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk menjadikan Demokrasi dan Politik di Kota Tarakan lebih baik.

Indikator Sasaran 1 :

"Persentase partisipasi lembaga politik dalam melaksanakan pendidikan

politik kepada masyarakat”.

Pada Indikator Sasaran Persentase partisipasi lembaga politik dalam melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat ini diukur :

1. Capaian pembinaan dan pendidikan politik yang outputnya adalah terlaksananya pendidikan politik.
2. Persentase lembaga politik yang menyampaikan laporan kegiatan yang outputnya adalah terlaksananya pembinaan lembaga politik.
3. Capaian Nilai Pembinaan Ideologi Pancasila dan keaktifan pembauran kebangsaan dengan output terlaksananya pendidikan ideologi kebangsaan serta terlaksananya pembinaan Paskibraka.

Sasaran 2 :

“Meningkatnya Pencegahan Konflik di Daerah”

Dengan penetapan sasaran ini, diharapkan terjadinya peningkatan pencegahan konflik di daerah yang bermuara pada peningkatan keamanan dan ketertiban.

Indikator Sasaran 2 :

“Persentase Potensi Konflik yang dicegah”

Pada indikator sasaran Meningkatkan Pencegahan Konflik di Daerah ini diukur :

1. Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif yang outputnya adalah terlaksananya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan.
2. Capaian pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat yang outputnya diharapkan adalah terlaksananya pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.
3. Persentase Laporan deteksi dini yang ditindaklanjuti yang outputnya adalah terlaksananya kegiatan deteksi dini konflik sosial.

Sasaran 3 :

“Meningkatnya Tata Kelola Badan Kesbangpol Kota Tarakan”

Sasaran ini bermakna Tata Kelola yang baik merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi agar seluruh program dan kegiatan berjalan efektif, efisien dan akuntabel.

Indikator Sasaran 3 :

“Nilai/Predikat SAKIP” dan Indeks Kepuasan Masyarakat :

1. Nilai/Predikat SAKIP, mengukur sejauh mana kinerja berbasis perencanaan, penganggaran dan pelaporan terintegrasi
2. IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), mengukur kualitas pelayanan publik.

Matriks Tujuan dan Sasaran serta target Kinerja Tahun 2025-2029 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan terdapat pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan dan Politik Kota Tarakan
Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	T1: Terwujudnya Kondusivitas Daerah		T1: Indikator Tujuan 1: Indeks Harmoni Indonesia (IHAI)	7,02	7,05	7,08	7,13	7,17	7,2	
S-4 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan adaptif dalam menegakkan supremasi hukum yang berkeadilan		S1.1: Sasaran 1: Meningkatnya Pembangunan Demokrasi dan Politik di Daerah	S1.1: Indikator Sasaran 1: Persentase Partisipasi Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		S1.2: Sasaran 2: Meningkatnya Pencegahan Konflik di Daerah	S1.2: Indikator Sasaran 2: Persentase Potensi Konflik yang dicegah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
S-10 Meningkatnya akuntabilitas kinerja		S1.2: Sasaran 3: Meningkatnya Tata Kelola Badan Kesbangpol Kota Tarakan	S1.2.1: Nilai/Predikat SAKIP	75,85	77,35	78,85	80,35	81,85	83,85	
			S1.2.2: IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	86,5	87,5	88,5	89,5	90,5	91,5	

- Strategi
Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 serta Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dirumuskan Strategi Pembangunan sebagai langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi dan kebijakan dilandasi oleh pertimbangan mengenai konsep dan pendekatan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemilahan urusan yang menjadi kewenangan dan dijadikan dasar dalam penyusunan program-program, kegiatan dan sub kegiatan dalam lima tahun kedepan.

Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu :

- Tahap I (2026)
Penguatan dan meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah.
- Tahap II (2027)
Pemantapan Sistem Kelembagaan Badan Kesbangpol
- Tahap III (2028)
Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program dan Anggaran
- Tahap IV (2029)
Percepatan dan Tranformasi Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan Menuju Tata Kelola Badan Kesbangpol yang adaptif, responsif dan berdaya saing
- Tahap V (2030)
Perwujudan dan Akselerasi Peningkatan Kondusivitas Daerah.

Tabel 3.2
Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
Penguatan dan meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah.	Pemantapan Sistem Kelembagaan Badan Kesbangpol	Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program dan Anggaran	Integrasi Percepatan dan Tranformasi Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan Menuju Tata Kelola Badan Kesbangpol yang adaptif, responsif dan berdaya saing	Perwujudan dan Akselerasi Peningkatan Kondusivitas Daerah.

- 3.4. Arah Kebijakan
- Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mengimplementasikan strategi yang selaras dengan Arah Kebijakan RPJMD terdapat pada Tabel 3.3. berikut ini.

Tabel 3.1 Arah Kebijakan

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tantang Partai Politik	Mendorong keikutsertaan Lembaga politik dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan serta menjaga keamanan dan ketertiban	Pengembangan demokratisasi melalui pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat (pemula, perempuan, marginal, dan disabilitas)	
			Sosialisasi UU tentang Pemilu secara terstruktur, intensif dan komprehensif;	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
			Pemetaan Politik dan monitoring situasi Politik di Daerah	
			Fasilitasi, Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Organisasi Partai Politik	
2	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara	Peningkatan Responsivitas Terhadap Isu Sosial dan Keamanan	Peningkatan Kapasitas Personil dan kerjasama dengan Pihak Terkait	
			Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;	
			Memperbaiki kualitas Kerja dan Kinerja ASN Badan Kesbangpol	
			Memenuhi kebutuhan Administrasi Pelayanan Perkantoran, Kepegawaian dan Keuangan Badan Kesbangpol serta memperbaiki Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Badan Kesbangpol Kota Tarakan.	
			Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai - nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur	
			Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Timdu PKS dan Forum/Tim lain-lainnya hingga kab/kota;	
			Penguatan ketahanan ekonomi dan pemantapan P4GN;	
			Optimalisasi dan penggunaan media sosial untuk melakukan sosialisasi dan meredam konflik di masyarakat.	
			Identifikasi Potensi daerah dan Potensi Kerawanan Konflik	
			Penguatan Tim Pengawasan Orang Asing dengan instansi terkait dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum;	
3	Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan	Penguatan partisipasi masyarakat dalam Tata Kelola Pemerintah	Sinergitas bersama Ormas dalam menjaga Toleransi beragama dan etnisitas serta pengembangan seni dan budaya;	
			Penguatan GNRM (Gerakan Nasional Revolusi Mental) meliputi 5 (lima) gerakan nasional (Melayani, bersih, tertib, mandiri, bersatu);	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN
DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kota Tarakan 2025- 2029.

Bab ini menyajikan arah operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang politik dan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Program, kegiatan, dan sub kegiatan dirumuskan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi kebijakan yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya, serta mengacu pada struktur program yang ditetapkan secara nasional. Penyusunan komponen ini bertujuan untuk memastikan keterpaduan antara rencana strategis perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta untuk mendorong pencapaian target kinerja secara terukur dan efektif dalam periode perencanaan.

Sebagai tindak lanjut dari rumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, perangkat daerah menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai bentuk implementasi operasional. Setiap program disertai dengan indikator kinerja dan target yang jelas, serta didukung oleh kegiatan dan sub kegiatan yang relevan.

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan, maka disusunlah Program dan Kegiatan beserta Pendanaannya yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 4.1. Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Rencana Strategis

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
Terwujudnya Kondusivitas Daerah				Indeks Harmoni Indonesia (Ihai)	
	Meningkatnya Tata Kelola Badan Kesbangpol Kota Tarakan			Nilai SAKIP	
		Meningkatnya Penguatan Internal Akuntabilitas Kinerja		Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti	8.01.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu		8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	8.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	8.01.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Sesuai SAP		8.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Peningkatan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
			Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			Tersedianya Layanan Administrasi Umum		8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan
			Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	8.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Tersedianya Barang Milik Daerah		8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Tersedianya Layanan Jasa Penunjang		8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.01.01.2.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8.01.01.2.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8.01.01.2.09.0006- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Meningkatnya Pembangunan Demokrasi dan Politik di Daerah			Persentase Partisipasi Lembaga Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat	
		Meningkatnya pembinaan dan pendidikan politik		Capaian pembinaan dan pendidikan politik	8.01.03 - Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
			Terlaksananya pendidikan politik		8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
			Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		Meningkatnya Ketertiban Lembaga Politik		Persentase lembaga politik yang menyampaikan laporan kegiatan	8.01.03 - Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
			Terlaksananya pembinaan lembaga politik		8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
			Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI		Nilai Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP)	8.01.02 - Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
			Terlaksananya pendidikan ideologi kebangsaan		8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
			Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
			Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	8.01.02.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
			Terlaksananya pembinaan paskibraka		8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
			Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	8.01.02.2.01.0008 - Pembentukan Paskibraka
	Meningkatnya Pencegahan Konflik di Daerah			Persentase potensi konflik yang dicegah	
		Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan		Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	8.01.04. - Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
			Terlaksananya pemberdayaan dan pengawasan ormas		8.01.04.02.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
			Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	8.01.04.02.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	8.01.04.02.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
		Meningkatnya pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat		Capaian pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	8.01.05 - Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
			Terlaksananya pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya		8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
			Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	8.01.05.2.01.004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	8.01.05.2.01.005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
		Meningkatnya deteksi dini konflik sosial		Persentase laporan deteksi dini yang ditindaklanjuti	8.01.06 - Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
			Terlaksananya kegiatan deteksi dini konflik sosial		8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
			Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8.01.06.2.01.004 - Pelaksanaan Koordinasi dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah
			Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	8.01.06.2.01.005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah
			Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	8.01.06.2.01.006 - Pelaksanaan Forkompimda

Tabel 4.1 tersebut diatas menunjukkan keterkaitan yang kuat antara sasaran strategis RPJMD, NSPK, dan program/kegiatan/subkegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan. Setiap tahapan dari tujuan hingga output tersusun hierarkis dan saling mendukung. Program teknis berfokus pada terwujudnya kondusivitas daerah, politik dan kebangsaan serta peningkatan deteksi dini dalam rangka pencegahan konflik didaerah, sedangkan program penunjang memperkuat tata kelola, akuntabilitas, dan pengelolaan aset. Sinergi ini memastikan pencapaian tujuan RPJMD secara terukur, berkelanjutan, dan sesuai standar pelayanan minimal.

Selanjutnya Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan disajikan pada Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2.
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan
Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				8.504.443.629,00		8.504.443.629,00		8.504.443.629,00		8.504.443.629,00		8.504.443.629,00		
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.551.928.254,00		3.551.928.254,00		3.551.928.254,00		3.551.928.254,00		3.551.928.254,00		
Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan	Indeks kepuasan masyarakat (Indeks)	68	72	312.111.240,00	74	312.111.240,00	76	312.111.240,00	78	312.111.240,00	80	312.111.240,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				18.700.000,00		18.700.000,00		18.700.000,00		18.700.000,00		18.700.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Peningkatan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	0	18.700.000,00	4	18.700.000,00	0	18.700.000,00	4	18.700.000,00	0	18.700.000,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	20	20		0		20		0		20			
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	20	20	18.700.000,00	0	0,00	20	18.700.000,00	0	0,00	20	18.700.000,00		
8.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0,00		18.700.000,00		0,00		18.700.000,00		0,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	0	0,00	4	18.700.000,00	0	0,00	4	18.700.000,00	0	0,00		
8.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				87.703.400,00		86.969.600,00		86.969.600,00		86.969.600,00		86.969.600,00		
Tersedianya Layanan Administrasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	16	16	87.703.400,00	16	86.969.600,00	16	86.969.600,00	16	86.969.600,00	16	86.969.600,00		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	35	35		35		35		35		35			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
8.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	8	3.500.000,00	8	2.500.000,00	8	2.500.000,00	8	2.500.000,00	8	2.500.000,00		
8.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				2.033.800,00		2.300.000,00		2.300.000,00		2.300.000,00		2.300.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	16	16	2.033.800,00	16	2.300.000,00	16	2.300.000,00	16	2.300.000,00	16	2.300.000,00		
8.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				13.374.640,00		13.374.640,00		13.374.640,00		13.374.640,00		13.374.640,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	35	35	13.374.640,00	35	13.374.640,00	35	13.374.640,00	35	13.374.640,00	35	13.374.640,00		
8.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				13.400.000,00		13.400.000,00		13.400.000,00		13.400.000,00		13.400.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	13.400.000,00	4	13.400.000,00	4	13.400.000,00	4	13.400.000,00	4	13.400.000,00		
8.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				5.500.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	5.500.000,00	1	5.500.000,00	1	5.500.000,00	1	5.500.000,00	1	5.500.000,00		
8.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				49.894.960,00		49.894.960,00		49.894.960,00		49.894.960,00		49.894.960,00		
8.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				80.429.200,00		81.163.000,00		81.163.000,00		81.163.000,00		81.163.000,00		
Tersedianya Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	8	10	80.429.200,00	10	81.163.000,00	10	81.163.000,00	10	81.163.000,00	10	81.163.000,00		
8.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				80.429.200,00		81.163.000,00		81.163.000,00		81.163.000,00		81.163.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	8	10	80.429.200,00	10	81.163.000,00	10	81.163.000,00	10	81.163.000,00	10	81.163.000,00		
8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100.990.000,00		100.990.000,00		100.990.000,00		100.990.000,00		100.990.000,00		
Tersedianya Layanan Jasa Penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	180	100	100.990.000,00	100	100.990.000,00	100	100.990.000,00	100	100.990.000,00	100	100.990.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
8.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	180	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100	1.000.000,00		
8.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				99.990.000,00		99.990.000,00		99.990.000,00		99.990.000,00		99.990.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	99.990.000,00	12	99.990.000,00	12	99.990.000,00	12	99.990.000,00	12	99.990.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
8.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				24.288.640,00		24.288.640,00		24.288.640,00		24.288.640,00		24.288.640,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	2	24.288.640,00	2	24.288.640,00	2	24.288.640,00	2	24.288.640,00	2	24.288.640,00		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	4		4		4		4		4			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	12	12		12		12		12		12			
8.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				5.078.640,00		5.078.640,00		5.078.640,00		5.078.640,00		5.078.640,00		
8.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	2	13.000.000,00	2	13.000.000,00	2	13.000.000,00	2	13.000.000,00	2	13.000.000,00		
8.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.210.000,00		6.210.000,00		6.210.000,00		6.210.000,00		6.210.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2	4	6.210.000,00	4	6.210.000,00	4	6.210.000,00	4	6.210.000,00	4	6.210.000,00		
Meningkatnya Penguatan Internal Akuntabilitas Kinerja	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	3.239.817.014,00	100	3.239.817.014,00	100	3.239.817.014,00	100	3.239.817.014,00	100	3.239.817.014,00		
8.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.260.000,00		8.260.000,00		8.260.000,00		8.260.000,00		8.260.000,00		
Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	8.260.000,00	1	8.260.000,00	1	8.260.000,00	1	8.260.000,00	1	8.260.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
8.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	3	2.500.000,00	3	2.500.000,00	3	2.500.000,00	3	2.500.000,00	3	2.500.000,00		
8.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
8.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				3.260.000,00		3.260.000,00		3.260.000,00		3.260.000,00		3.260.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1	3.260.000,00	1	3.260.000,00	1	3.260.000,00	1	3.260.000,00	1	3.260.000,00		
Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Sesuai SAP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	6	6	3.231.557.014,00	6	3.231.557.014,00	6	3.231.557.014,00	6	3.231.557.014,00	6	3.231.557.014,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	22	20		20		20		20		20			
8.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.188.711.014,00		3.188.711.014,00		3.188.711.014,00		3.188.711.014,00		3.188.711.014,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	22	20	3.188.711.014,00	20	3.188.711.014,00	20	3.188.711.014,00	20	3.188.711.014,00	20	3.188.711.014,00		
8.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				42.846.000,00		42.846.000,00		42.846.000,00		42.846.000,00		42.846.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	6	6	42.846.000,00	6	42.846.000,00	6	42.846.000,00	6	42.846.000,00	6	42.846.000,00		
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				1.592.664.975,00		1.592.664.975,00		1.592.664.975,00		1.592.664.975,00		1.592.664.975,00		
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Pancasila, UUD 1945 , Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI	Nilai PIP (Angka)	66,00	70,00	1.592.664.975,00	72,50	1.592.664.975,00	75,00	1.592.664.975,00	77,50	1.592.664.975,00	80,00	1.592.664.975,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Persentase keaktifan pembauran kebangsaan (%)	78,43	80,00		81,50		83,00		84,50		86,00			
8.01.02.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				1.592.664.975,00		1.592.664.975,00		1.592.664.975,00		1.592.664.975,00		1.592.664.975,00		
Terlaksananya Pendidikan Ideologi Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	32	32	1.033.294.445,00	32	1.033.294.445,00	32	1.033.294.445,00	32	1.033.294.445,00	32	1.033.294.445,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	3.500	4.800		4.800		4.800		4.800		4.800			
8.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1.001.113.645,00		1.001.113.645,00		1.001.113.645,00		1.001.113.645,00		1.001.113.645,00		
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	3.500	4.800	1.001.113.645,00	4.800	1.001.113.645,00	4.800	1.001.113.645,00	4.800	1.001.113.645,00	4.800	1.001.113.645,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
8.01.02.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				32.180.800,00		32.180.800,00		32.180.800,00		32.180.800,00		32.180.800,00		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	32	32	32.180.800,00	32	32.180.800,00	32	32.180.800,00	32	32.180.800,00	32	32.180.800,00		
Terlaksananya Pembinaan Kepaskibrakaan	Jumlah Paskibraka (Orang)	34	34	559.370.530,00	34	559.370.530,00	34	559.370.530,00	34	559.370.530,00	34	559.370.530,00		
8.01.02.2.01.0008 - Pembentukan Paskibraka				559.370.530,00		559.370.530,00		559.370.530,00		559.370.530,00		559.370.530,00		
Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka (Orang)	34	34	559.370.530,00	34	559.370.530,00	34	559.370.530,00	34	559.370.530,00	34	559.370.530,00		
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				1.219.450.000,00		1.219.450.000,00		1.219.450.000,00		1.219.450.000,00		1.219.450.000,00		
Meningkatnya Pembinaan dan Pendidikan Politik	Capaian pembinaan pendidikan politik (%)	100	100	1.219.450.000,00	100	1.219.450.000,00	100	1.219.450.000,00	100	1.219.450.000,00	100	1.219.450.000,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Persentase Lembaga Politik yang Menyampaikan Laporan Kegiatan (%)	100	100		100		100		100		100			
8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				1.219.450.000,00		1.219.450.000,00		1.219.450.000,00		1.219.450.000,00		1.219.450.000,00		
Terlaksananya Pendidikan Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	90	90	1.219.450.000,00	90	1.219.450.000,00	90	1.219.450.000,00	90	1.219.450.000,00	90	1.219.450.000,00		
8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				1.219.450.000,00		1.219.450.000,00		1.219.450.000,00		1.219.450.000,00		1.219.450.000,00		
Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai	90	90	1.219.450.000,00	90	1.219.450.000,00	90	1.219.450.000,00	90	1.219.450.000,00	90	1.219.450.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)													
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN				1.450.000.000,00		1.450.000.000,00		1.450.000.000,00		1.450.000.000,00		1.450.000.000,00		
Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Yang Tertib Admnistrasi dan Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan (%)	80	81,50	1.450.000.000,00	83,00	1.450.000.000,00	84,50	1.450.000.000,00	86,00	1.450.000.000,00	87,50	1.450.000.000,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.04.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				1.450.000.000,00		1.450.000.000,00		1.450.000.000,00		1.450.000.000,00		1.450.000.000,00		
Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang tertib administrasi dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	12	12	1.450.000.000,00	12	1.450.000.000,00	12	1.450.000.000,00	12	1.450.000.000,00	12	1.450.000.000,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	52	55		55		55		55		55			
8.01.04.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1.432.471.000,00		1.432.471.000,00		1.432.471.000,00		1.432.471.000,00		1.432.471.000,00		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	52	55	1.432.471.000,00	55	1.432.471.000,00	55	1.432.471.000,00	55	1.432.471.000,00	55	1.432.471.000,00		
8.01.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				17.529.000,00		17.529.000,00		17.529.000,00		17.529.000,00		17.529.000,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	12	12	17.529.000,00	12	17.529.000,00	12	17.529.000,00	12	17.529.000,00	12	17.529.000,00		
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat	Capaian pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat (%)	100	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.05.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Capaian pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	27	27	500.000.000,00	27	500.000.000,00	27	500.000.000,00	27	500.000.000,00	27	500.000.000,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	27	30		30		30		30		30			
8.01.05.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				481.900.000,00		481.900.000,00		481.900.000,00		481.900.000,00		481.900.000,00		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	27	30	481.900.000,00	30	481.900.000,00	30	481.900.000,00	30	481.900.000,00	30	481.900.000,00		
8.01.05.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				18.100.000,00		18.100.000,00		18.100.000,00		18.100.000,00		18.100.000,00		
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				190.400.400,00		190.400.400,00		190.400.400,00		190.400.400,00		190.400.400,00		
Meningkatnya Deteksi Dini Konflik Sosial	Persentase laporan deteksi dini yang ditindaklanjuti (%)	100	100	190.400.400,00	100	190.400.400,00	100	190.400.400,00	100	190.400.400,00	100	190.400.400,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.01.06.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				190.400.400,00		190.400.400,00		190.400.400,00		190.400.400,00		190.400.400,00		
Persentase Laporan deteksi dini yang ditindaklanjuti	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	3	190.400.400,00	3	190.400.400,00	3	190.400.400,00	3	190.400.400,00	3	190.400.400,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	91	91		91		91		91		91			
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
8.01.06.2.01.0004 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				64.713.700,00		64.713.700,00		64.713.700,00		64.713.700,00		64.713.700,00		
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	91	91	64.713.700,00	91	64.713.700,00	91	64.713.700,00	91	64.713.700,00	91	64.713.700,00		
8.01.06.2.01.0005 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				22.100.500,00		22.100.500,00		22.100.500,00		22.100.500,00		22.100.500,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	12	12	22.100.500,00	12	22.100.500,00	12	22.100.500,00	12	22.100.500,00	12	22.100.500,00		
8.01.06.2.01.0006 - Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				103.586.200,00		103.586.200,00		103.586.200,00		103.586.200,00		103.586.200,00		
Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	3	103.586.200,00	3	103.586.200,00	3	103.586.200,00	3	103.586.200,00	3	103.586.200,00		

Seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada:

- RPJMD Kota Tarakan 2025–2029.
- NSPK Kementerian Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum.
- Permendagri tentang Pedoman Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- Dokumen tata ruang dan rencana pembangunan lain yang relevan.

4.2. Uraian Subkegiatan Program Prioritas

Subkegiatan (*output*) yang mendukung Program Prioritas (*outcome*) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdapat pada Tabel 4.4, sebagai berikut :

Tabel 4.2.
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
1	8.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	1. Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			8.01.01.2.01.6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			8.01.01.2.01.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			8.01.01.2.02.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
		2. Meningkatnya layanan kesekretariatan	8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			8.01.01.2.05.2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	
			8.01.01.2.05.9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			8.01.01.2.06.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			8.01.01.2.06.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			8.01.01.2.06.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			8.01.01.2.06.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			8.01.01.2.06.8 Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			8.01.01.2.06.9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			8.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			8.01.01.2.08.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			8.01.01.2.08.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			8.01.01.2.09.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			8.01.01.2.09.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			8.01.01.2.09.6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
2	8.01.02 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.Nilai PIP 2.Persentase Keaktifan Pembauran Kebangsaan	8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
			8.01.02.2.01.3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
			8.01.02.2.01.4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
			8.01.02.2.01.8 Pembentukan Paskibraka	
3	8.01.03 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	1. Meningkatnya Ketertiban Lembaga Politik 2. Meningkatnya Pembinaan Pendidikan Politik	8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan situasi Politik	
			8.01.03.2.01.3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan situasi Politik	
			8.01.03.2.01.5 Pelaksanaan Monitoring di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan situasi Politik	
4	8.01.04 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang tertib administrasi dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
			8.01.04.2.01.4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Orang Asing di Daerah	
			8.01.04.2.01.5 Pelaksanaan Monitoring di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Orang Asing di Daerah	
5	8.01.05 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Capaian Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
			8.01.05.2.01.4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
			8.01.05.2.01.5 Pelaksanaan Monitoring di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	
6	8.01.06 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Laporan Deteksi Dini yang ditindaklanjuti	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
			8.01.06.2.01.4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, TKA dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			8.01.06.2.01.5 Pelaksanaan Monitoring di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, TKA dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
			8.01.06.2.01.6 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	

4.3. Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah.

Indikator Kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis opsional dan merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Indikator Kinerja utama (IKU) akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Penetapan Indikator Kinerja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan telah menetapkan Indikator Kinerja yang akan dicapai untuk 5 (Lima) tahun mendatang, yang ditampilkan dalam tabel 4.3 berikut ;

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran Rpjmd Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Partisipasi Lembaga Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Potensi Konflik yang dicegah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Nilai SAKIP	Nilai	63,36	75,85	77,35	78,85	80,35	81,85	83,85
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	85,5	86,5	87.5	88,5	89.5	90,5	91.5

BAB V PENUTUP

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya Perubahan Renstra ini akan menjadi kerangka dasar bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2025-2029, serta untuk mengelola upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan Tahun 2025-2029 ini merupakan komitmen perencanaan yang sekaligus memberikan arah kepada pemangku kepentingan (stakeholders) untuk berperan aktif dalam penguatan dan pembangunan kesatuan bangsa dan politik di Kota Tarakan. Sasaran Rencana Strategis ini fleksibel dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi objektif yang berkembang dan selalu berkaitan dengan keperluan strategis yang mendesak. Target dan sasaran pada Renstra ini meliputi sasaran Pemerintah Kota Tarakan dan juga merupakan sasaran kerja seluruh unit kerja di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan. Oleh karena itu, setiap unit kerja harus menjabarkan sasaran-sasaran tersebut menjadi kegiatan yang layak dan dapat diterapkan sesuai dengan tugas masing-masing menjadi Rencana Kinerja (Renja) Tahunan. Sasaran Renstra ini diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam pelaksanaan sehari-harinya, Kepala Badan dibantu oleh seluruh jajaran di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan.

Dokumen ini masih memungkinkan diadakannya perbaikan-perbaikan dalam rangka penyempurnaan kekurangan-kekurangan dalam perencanaan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik di Kota Tarakan. Semua target dari capaian yang telah disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan pastinya akan tercapai dengan dukungan pihak-pihak terkait. Semoga dokumen ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan sehingga dalam pelaksanaan tugas memiliki arah dan tujuan yang jelas. Terima kasih.

26. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah sebuah lembaga khusus yang menangani penanggulangan bencana (PB) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. BNPB dan BPBD dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU 24/2007). Fungsi BPBD adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan PB dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta melakukan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan PB secara terencana, terpadu, dan menyeluruh (Pasal 20 UU 24/2007).

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan disusun sebagai pedoman arah kebijakan, strategi, serta prioritas pengawasan dalam periode rencana jangka menengah. Renstra ini bukan hanya menjadi dokumen perencanaan, melainkan instrumen penguatan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam memastikan perangkat daerah melaksanakan program dan kegiatan sesuai prinsip good governance, serta sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat.

Kedudukan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah semakin strategis karena selaras dengan visi Wali Kota Tarakan, yaitu “mewujudkan Tarakan sebagai kota cerdas yang bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, perikanan kelautan, dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan maju menuju masyarakat sejahtera.” Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkontribusi melalui pengawasan yang efektif, serta mendukung misi “Mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh menghadapi bencana.” Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah memerlukan pengawasan yang kuat guna memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai koridor hukum dan prinsip akuntabilitas.

Sejalan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan diarahkan untuk memperkuat peran pengawasan internal yang adaptif terhadap perubahan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan berorientasi pada hasil. Dengan Renstra ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan memiliki acuan yang jelas sehingga dapat berkontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Instruksi Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Wali Kota Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
22. Surat Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 100.3.3.3/HK-IV/201/2025 Tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kota Tarakan adalah untuk memberikan pedoman perencanaan program dan kegiatan pengawasan internal pemerintah daerah. Renstra ini disusun dengan tetap mengakomodir kebijakan nasional maupun kebijakan daerah, serta diarahkan untuk merumuskan strategi, arah kebijakan, dan program pengawasan yang lebih terarah, efektif, efisien, dan terpadu. Dengan demikian, Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah berfungsi sebagai acuan dalam memperkuat peran pengawasan, pembinaan, dan konsultasi guna mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, adaptif, dan responsif.

Tujuan penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kota Tarakan adalah untuk mewujudkan output dan outcome pengawasan yang direncanakan secara bertahap, terukur, dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra dapat dilihat melalui pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Dengan demikian, pelaksanaan rencana, program, dan kegiatan pengawasan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diharapkan dapat berjalan terpadu, efektif, efisien, serta memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kinerja perangkat daerah dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	Bab ini paling sedikit memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS Badan Penanggulangan Bencana Daerah DAERAH KOTA TARAKAN
	Bab ini membahas gambaran pelayanan perangkat daerah yang paling sedikit memuat tugas, fungsi, dan struktur perangkat daerah; sumber daya perangkat daerah; kinerja pelayanan perangkat daerah; dan kelompok sasaran layanan. Selain itu juga membahas permasalahan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kota Tarakan dan Isu Strategis.
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	Bab ini paling sedikit memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kota Tarakan.
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
	Bab ini paling sedikit memuat uraian program; uraian kegiatan; uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator target dan pagu indikatif; uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama, dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci.
BAB V	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TARAKAN

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Tugas

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara,
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan,
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana,
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana,
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana,
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang,
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang - undangan.

Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugasnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana daerah;
4. Pelaksanaan administrasi BPBD; dan
5. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah terdiri atas :

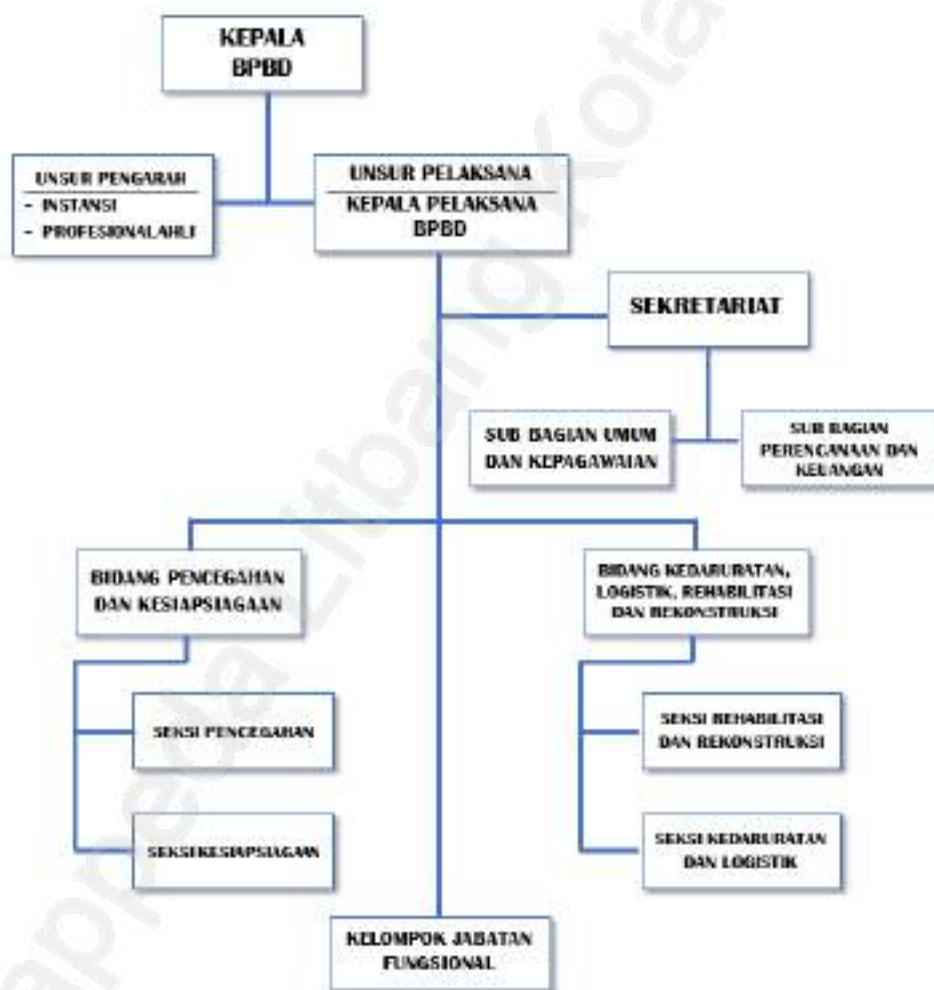
1. Kepala;
2. Unsur Pengarah; dan
3. Unsur Pelaksana

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana :

1. Sekretariat:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan:
 - a. Seksi Pencegahan; dan
 - b. Seksi Kesiapsiagaan
3. Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi:
 - a. Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
 - b. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Sumber : Peraturan Wali Kota Nomor 83 Tahun 2020

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kota Tarakan dilengkapi dengan perangkat organisasi dapat dilihat pada Gambar II-1, adapun susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota;
2. Kepala Pelaksana, merupakan pimpinan Unsur Pelaksana yang

melaksanakan pengkoordinasian, komando dan pelaksanaan dalam penanggulangan bencana dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Sekretaris Daerah);

3. Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPBD. Sekretariat terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam pengkoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam koordinasi kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran, pengkoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
4. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan merupakan unsur pelaksana di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang menjadi kewenangan Daerah. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :
 - Seksi Pencegahan unsur pelaksana di bidang pencegahan bencana Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Seksi Pencegahan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pencegahan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan penyajian kebijakan, koordinasi, pembinaan dan bimbingan, pengendalian di bidang pencegahan dan mitigasi bencana Daerah di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - Seksi Kesiapsiagaan unsur pelaksana di bidang kesiapsiagaan bencana Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Seksi Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan penyajian kebijakan, koordinasi, pembinaan dan bimbingan, pengendalian di bidang kesiapsiagaan penanggulangan bencana daerah dan pemberdayaan masyarakat.
5. Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi merupakan unsur pelaksana di bidang kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD di bidang kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana yang menjadi kewenangan Daerah.
 - Seksi Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam unsur

pelaksana di bidang kedaruratan dan logistik bencana Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Seksi Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang kedaruratan dan logistik.

- Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi merupakan unsur pelaksana di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan, kebijakan, inventarisir data pasca bencana, pembinaan, bimbingan dan pengendalian di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pemulihan pasca bencana.

6. Kelompok Jabatan Fungsional :

- Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;
- Dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional;

2.1.2 Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kota Tarakan

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur penting dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan, karena kualitas kinerja pegawai akan menentukan keberhasilan perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kota Tarakan menempatkan penguatan sumber daya manusia sebagai faktor utama untuk mendukung efektivitas pengawasan, pembinaan, dan konsultasi yang menjadi mandat organisasi.

Hingga Agustus 2025, jumlah pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kota Tarakan sebanyak 42 Pegawai. Dengan Rincian ASN (PNS dan P3K) sebanyak 33 Orang dan Non ASN sebanyak 9 Orang. Adapun Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan, jenis kelamin dan tingkat Pendidikan disajikan dalam Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai BPBD
Berdasarkan Jabatan, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

STATUS KEPEGAWAIAN		NO	NAMA JABATAN	S2		S1		DIV		DIII		SMA		<SMA		JUMLAH
				L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
APARATUR SIPIL NEGARA	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	1	KEPALA PELAKSANA	1												1
		2	SEKRETARIS	1												1
		3	KABID PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN			1										1
		4	KABID KEDARURATAN, LOGISTIK, REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI			1										1
		5	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN		1											1
		6	KASUBAG PERENCANAAN PROGRAM DAN KEUANGAN				1									1
		7	KASI PENCEGAHAN	1												1
		8	KASI KESIAPSIAGAAN				1									1
		9	KASI KEDARURATAN DAN LOGISTIK			1										1
		10	KASI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI													0
		11	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI			3			1	2						6
		12	PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN			4	2									6
		13	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN									1				1
		14	PENATA LAYANAN OPERASIONAL			2										2
	PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (P3K)	15	PENATA LAYANAN OPERASIONAL			2										2
		16	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL								1					1
		17	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL									5	1			6
NON ASN		18	TENAGA KHUSUS			1						4				5
		19	PENJAGA MALAM									2				2
		20	CS			1					1					2
JUMLAH				3	1	16	4	0	1	2	2	12	1	0	0	42

Sumber : Data BPBD Kota Tarakan bulan Juli 2025

2. Aset/Modal

Aset atau modal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kota Tarakan merupakan sarana dan prasarana penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah menempati Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota

Tarakan sebagai pusat kegiatan kerja dan pelayanan pengawasan intern. Selain gedung kantor, terdapat beberapa inventaris kendaraan dan peralatan kebencanaan yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan yang diperoleh baik dari pengadaan BPBD maupun dari hasil hibah barang yang diberikan kepada BPBD. Adapun aset BPBD berupa peralatan kebencanaan kendaraan darat, dan juga laut dimuat dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 2.2.
Aset Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Kategori Aset	Jumlah (Unit)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Alat Angkutan darat bermotor	22	2 unit station wagon, 7 unit mobil operasional, 13 unit sepeda motor
2	Alat Angkutan darat tak bermotor	4	4 unit gerobak
3	Alat Angkutan Apung bermotor	8	4 unit motor boat , 3 unit mesin perahu, 1 unit amphi
4	Alat Angkutan Apung tak bermotor	4	4 unit perahu karet
5	Alat Bengkel & Alat Ukur	± 50	3 unit mesin pompa air, 6 unit chainsaw, 2 unit gerinda, 1 unit bor tangan, 32 unit perkakas lain-lain, 5 unit lampu solar cell, 1 unit GPS
6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	81	2 unit kamera, 1 unit tripod, 1 slide proyektor, 1 unit telescope, 37 unit HT, 1 unit Radio SS,1 unit Radio RIG, 21 unit lain-lain, dan16 unit Tranciever VHF
7	Alat Kantor dan Rumah Tangga	± 563	10 unit lemari, 6 unit rak kayu, 8 unit Filling cabinet besi, 1 unit brankas, 2 unit lemari kaca, 2 unit mesin absensi,1 unit papan nama instansi,1 unit Scanner, 12 unit printer,1 unit PC,8 unit laptop, 15 unit meja kerja/rapat, 17 unit kursi rapat, 3 unit kursi tamu, 10 unit AC, 2 unit Tandon, 1 unit lemari es, 5 unit TV, 4 unit dispenser, ± 146 unit lain-lain, ± 296 unit peralatan pemadam
8	Alat Kedokteran, Kesehatan dan Laboratorium	33	1 unit alat lab microbiologi, 2 unit alat penjernih air, 1 unit tangki bahan baku, 29 unit peralatan lab lainnya
9	Alat Bantu dan Alat Keselamatan Kerja	126	2 unit Genset, 10 unit Portable water pump, 5 unit pompa tangan, 1 unit mesin bor beton, 5 unit pompa punggung kecil, 5 unit Noozle, 69 unit Selang, 5 unit alat bantu lainnya, 13 unit peralatan vertical rescue, 1 unit tenda posko, 3 unit tenda pengungsian, 12 unit tenda keluarga, 2 unit tenda komando

Sumber : Data Bendahara Barang per tahun 2024

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja BPBD didasarkan pada SPM BPBD yang diatur dalam Permendagri 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana daerah kab/kota yang menjadi Standar Pelayanan Minimal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tarakan terdiri atas Pelayanan informasi rawan bencana, Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan Pelayanan

penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Pada tahun akhir perencanaan, yaitu 2024, capaian kinerja secara umum menunjukkan hasil yang positif. Pada akhir 2024 kinerja perangkat daerah dapat dinilai berhasil secara keseluruhan dikarenakan telah memenuhi target yang ditetapkan dalam Renstra. Peningkatan Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dari tahun 2020 – 2024 disebabkan beberapa faktor diantaranya: terjalannya koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan stakeholder dalam memberikan pelayanan informasi rawan bencana kepada masyarakat di Kota Tarakan, terdapat perhatian dari pemerintah provinsi dalam hal bantuan anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Utara melalui Bantuan Keuangan Transfer Anggaran Pemerintah Provinsi berbasis Ekologi (BANKEU-TAPE) Tahun 2024, Pemanfaatan sosial media BPBD Kota Tarakan (Whatsapp Grup) sebagai wadah atau platform edukasi dalam rangka peningkatan jangkauan penyebaran kewaspadaan masyarakat terhadap bencana.

Terdapat konsistensi capaian kinerja pada Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dari tahun 2021 – 2024. Hal ini dikarenakan BPBD Kota Tarakan telah merespon seluruh laporan yang telah masuk terkait pengaduan bencana dan telah memberikan pelayanan kepada seluruh korban baik yang terdampak langsung maupun tidak langsung pada saat terjadi bencana.

Secara umum kinerja pelayanan dapat dilihat pada kinerja sasaran yang berada dalam BPBD seperti berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

O	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Tercapainya penanggulangan bencana yang optimal	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	√	√		100%	100%	100%	100%	100%	73%	82.53%	84.96%	89.23%	100%	0.73	0.83	0.85	0.89	1.00
2	Tercapainya penanggulangan bencana yang optimal	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	√	√		100%	100%	100%	100%	100%	77%	80.78%	86.08%	89.64%	100%	0.77	0.81	0.86	0.90	1.00
3	Tercapainya penanggulangan bencana yang optimal	Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	√	√		100%	100%	100%	100%	100%	93%	100%	100.00 %	100%	100%	0.93	1.00	1.00	1.00	1.00

Tabel 2.4.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
***)														
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,888,473,000	4,843,886,000	4,441,880,000	4,418,380,000	3,887,074,361	4,095,006,586	4,266,886,584	4,756,998,223	1.00	0.85	0.96	1.08	5.25	7.01
Program Penanggulangan Bencana	419,913,000	1,245,000,000	1,032,000,000	660,000,000	611,252,921	944,886,282	1,127,154,180	1,519,706,088	1.46	0.76	1.09	2.30	47.78	36.23

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kota Tarakan

Kelompok Sasaran layanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah individu atau kelompok yang dapat terdampak langsung oleh bencana dan menjadi fokus utama dari penanggulangan yang dilakukan oleh BPBD. BPBD bertanggung jawab untuk melindungi, memberikan pelayanan dan memastikan keselamatan kelompok-kelompok ini selama bencana. Kelompok Sasaran Pelayanan BPBD meliputi:

1. Masyarakat umum yang berada di lokasi terdampak
2. Pengungsi yang dievakuasi dari lokasi bencana
3. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan orang dengan disabilitas yang memerlukan perhatian khusus

2.1.5 Mitra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kota Tarakan dalam memberikan layanan

Mitra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan dalam memberikan pelayanan merupakan pihak atau organisasi yang bekerja sama dengan BPBD dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penanggulangan bencana. Mitra ini memberikan dukungan, sumber daya atau keahlian khusus yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan bencana. Adapun Mitra Badan penanggulangan Bencana Daerah meliputi:

1. Pihak Swasta: Perusahaan dan industri yang dapat memberikan bantuan finansial, logistik, atau sumber daya lainnya.
2. Lembaga Pemerintah Lainnya: Kolaborasi dengan instansi pemerintah lain seperti TNI/POLRI, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Kesehatan, Kecamatan dan lainnya untuk koordinasi dalam respons bencana.
3. Lembaga Pendidikan: Kerjasama dengan sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan untuk penyelenggaraan program edukasi dan pelatihan terkait bencana.
4. Organisasi Non-Pemerintah (NGO): Organisasi sukarelawan dan non-profit yang dapat memberikan bantuan langsung kepada korban bencana atau mendukung kegiatan penanggulangan.
5. Media Massa: Kerjasama dengan media untuk menyampaikan informasi yang akurat dan cepat kepada masyarakat.
6. Relawan: Keterlibatan sukarelawan dalam kegiatan penanggulangan bencana.

Kerjasama ini memperluas jangkauan dan kapasitas BPBD dalam menghadapi bencana serta memastikan pelayanan yang lebih komprehensif dan efektif kepada masyarakat yang terdampak.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kota Tarakan

Sebelum merumuskan tujuan dan sasaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kota Tarakan perlu melakukan analisis permasalahan dan isu strategis yang relevan. Analisis ini penting agar langkah yang ditempuh selaras dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta menjawab harapan pemangku kepentingan. Permasalahan dan isu strategis tersebut dapat bersumber dari faktor internal maupun eksternal, sehingga pemetaan diperlukan untuk menetapkan prioritas pengawasan.

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kurang optimalnya kinerja pelayanan BPBD diantaranya

keterbatasan sumber daya manusia dan dukungan anggaran terkait penanggulangan bencana, perbandingan jumlah petugas, kejadian dan wilayah yang terdampak serta jumlah penduduk yang menjadi korban langsung maupun terdampak, keterbatasan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana, serta masih kurangnya pedoman dalam penanggulangan bencana. Pemetaan mengenai masalah pokok, masalah turunan, dan akar masalah ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya kapasitas penanggulangan bencana di daerah	Kapabilitas daerah dalam penanggulangan bencana belum optimal	Masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan bencana
		Kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam penanggulangan bencana
		Belum optimalnya koordinasi dan komunikasi antar lembaga
		Keterbatasan anggaran untuk kegiatan penanggulangan bencana
		Belum optimalnya fasilitasi pasca bencana

Selain pemetaan masalah internal, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kota Tarakan juga perlu mengantisipasi isu-isu strategis yang berkembang dari dinamika eksternal. Isu tersebut muncul dari level global, nasional, maupun regional, yang keseluruhannya menuntut penerapan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pencegahan korupsi. Bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, hal ini menghadirkan potensi sekaligus tantangan, baik berupa peluang sinergi dengan lembaga pengawas eksternal maupun meningkatnya ekspektasi publik terhadap kualitas pengawasan. Hasil identifikasi isu strategis tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6
Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Struktur Organisasi dan tata Kelola BPBD; 2. Peraturan Daerah Kota Tarakan terkait Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 3. Pengelolaan pengaduan melalui media sosial; 4. Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana	Masih rendahnya kapasitas penanggulangan bencana di daerah	Belum optimalnya upaya pembangunan iklim dan tangguh bencana berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	1. Demografi Global 2. Perubahan Iklim Global	1. Penguatan Kerangka Regulasi untuk Mewujudkan Sistem Penanggulangan Bencana yang Efisien dan Efektif 2. Penguatan Kelembagaan, Pendanaan, dan Peningkatan Kolaborasi MultiPihak dalam Penanggulangan Bencana 3. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas dalam Kesiapsiagaan dan Penanganan Kedaruratan 4. Peningkatan Kualitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	1. Rendahnya kapasitas daerah 2. Penguatan Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan dalam penanggulangan bencana 3. Belum optimalnya upaya edukasi masyarakat dalam membangun mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana 4. Perlu adanya revisi dan penguatan kebijakan daerah terkait penanggulangan bencana	1. Masih rendahnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana 2. Keterbatasan sumber daya manusia dan kompetensi aparatur serta relawan kebencanaan 3. Perubahan iklim dan degradasi lingkungan memperbesar risiko bencana 4. Rendahnya kesiapsiagaan masyarakat

Dengan mempertimbangkan hasil analisis permasalahan dan isu strategis di atas, dapat disimpulkan bahwa fokus utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kota Tarakan ke depan adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan ancaman bencana serta edukasi mengenai langkah-langkah mitigasi yang dapat dilakukan, menyediakan dan meningkatkan infrastruktur serta sumber daya yang diperlukan untuk respons cepat dan efektif terhadap bencana, memperkuat kerjasama dengan lembaga terkait, termasuk pemerintah daerah, instansi terkait, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat lokal untuk meningkatkan koordinasi dalam penanggulangan bencana, Meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap berbagai bencana seperti banjir, kebakaran hutan, dan bencana alam lainnya yang sering terjadi.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Hasil analisis terhadap permasalahan dan isu strategis pada Bab II menunjukkan bahwa tantangan utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan terletak pada peningkatan kapabilitas Kota Tarakan dalam penanggulangan bencana. Tantangan tersebut meliputi peningkatan layanan informasi rawan bencana, peningkatan kesiapsiagaan dan pelatihan terhadap bencana, pelaksanaan penanganan bencana dan peningkatan layanan pasca bencana. Dengan memahami kondisi tersebut, maka arah pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu dirumuskan secara lebih terarah melalui tujuan dan sasaran yang jelas untuk lima tahun mendatang.

Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan adalah Terwujudnya lingkungan hidup berkelanjutan dan resiliensi terhadap bencana. Tujuan ini menjadi pijakan utama dalam melaksanakan misi Wali Kota, khususnya mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh menghadapi bencana, sekaligus menjawab isu-isu strategis yang telah diidentifikasi.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menetapkan beberapa sasaran strategis yang terukur dan dapat dicapai dalam periode Renstra 2025–2029, yaitu:

1. Meningkatnya kapabilitas penanggulangan bencana daerah.
2. Meningkatnya tata kelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dengan penetapan tujuan dan sasaran tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan diharapkan dapat berperan lebih optimal sebagai koordinator, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana, dan mendukung terwujudnya visi Kota Tarakan sebagai kota cerdas yang berdaya saing menuju masyarakat sejahtera.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;	Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana daerah		Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0.712	0.724	0.736	0.748	0.760	0.772	
2. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;		Meningkatnya kapabilitas penanggulangan bencana daerah	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan bencana	40	45	50	55	60	65	
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100.4.3 - 669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		Meningkatnya tata kelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nilai SAKIP	79.08	79.1	79.4	79.6	79.8	80.0	
4. Perda Kota Tarakan No. 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89.0	89.1	89.15	89.2	89.25	89.30	

3.2. Strategi

Tahapan strategi pengawasan 2026–2030 menggambarkan tujuan bertingkat yang ingin dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam lima tahun ke depan. Setiap tahapan memuat arah pencapaian yang semakin meningkat, dimulai dari Penguatan kelembagaan BPBD, Pengembangan kapasitas aparatur dan relawan kebencanaan, Peningkatan sarana prasarana mitigasi dan kesiapsiagaan, Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, dan Penguatan koordinasi multi sektor. Adapun pentahapan dari tahun ke tahun tercantum pada Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2
Penahapan Renstra

TAHAP 1	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
Penguatan kelembagaan BPBD	Penguatan kelembagaan BPBD	-	Penguatan kelembagaan BPBD	-
Pengembangan kapasitas aparatur dan relawan kebencanaan	Pengembangan kapasitas aparatur dan relawan kebencanaan	Pengembangan kapasitas aparatur dan relawan kebencanaan	Pengembangan kapasitas aparatur dan relawan kebencanaan	Pengembangan kapasitas aparatur dan relawan kebencanaan
Peningkatan sarana prasarana mitigasi dan kesiapsiagaan	Peningkatan sarana prasarana mitigasi dan kesiapsiagaan	Peningkatan sarana prasarana mitigasi dan kesiapsiagaan	-	-
Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat	Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat	Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat	Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat	Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat
Penguatan koordinasi multi sektor	-	Penguatan koordinasi multi sektor	-	Penguatan koordinasi multi sektor

Untuk mencapai tahapan tujuan tersebut, seluruh arah kebijakan dilaksanakan secara simultan dan berkesinambungan setiap tahun. Dengan cara ini, arah kebijakan berfungsi sebagai fondasi operasional yang menopang tahapan strategi, sehingga pada akhirnya seluruh tujuan yang ditetapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat diwujudkan secara bertahap hingga mencapai puncak sasaran di tahun 2030.

3.3. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Upaya ini mencakup Penyediaan layanan informasi rawan bencana bagi masyarakat melalui sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi khususnya pada daerah rawan bencana, Penyusunan Dokumen Kebencanaan, Penyediaan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Kolaborasi multi sektor dalam Penanganan kebencanaan , Fasilitasi pelaksanaan layanan pasca bencana.

Arah kebijakan pengawasan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kota Tarakan disusun sebagai satu rangkaian kerja yang menyeluruh, konsisten, dan berkesinambungan setiap tahun perencanaan. Seluruh kebijakan diarahkan untuk memperkuat fungsi penanggulangan bencana (pra bencana, saat bencana dan pasca bencana). Rangkaian arah kebijakan tersebut diselaraskan dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pengawasan serta kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3
Arah Kebijakan

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;	1. Peningkatan Ketangguhan dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana; 2. Peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan sektor swasta	Penyediaan layanan informasi rawan bencana bagi masyarakat melalui sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi khususnya pada daerah rawan bencana	
2	2. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;		Penyusunan Dokumen Kebencanaan	
3	3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100.4.3 - 669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		Penyediaan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	
4	4. Perda Kota Tarakan No. 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah		Kolaborasi multi sektor dalam Penanganan kebencanaan	
			Fasilitasi pelaksanaan layanan pasca bencana	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Program, kegiatan, dan subkegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Seluruhnya disusun berdasarkan nomenklatur resmi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta hasil pemutakhiran kodefikasi dan klasifikasi pembangunan daerah. Dengan pendekatan tersebut, perencanaan operasional ini mampu menggambarkan keterhubungan antara arah kebijakan dengan implementasi program secara lebih terstruktur.

Untuk menjamin konsistensi pencapaian target, daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dirancang tidak hanya untuk periode 2025–2029, tetapi juga diarahkan sebagai bagian dari kesinambungan perencanaan hingga tahun 2030 sebagai pijakan penyusunan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2030. Rangkaian perumusan tersebut dituangkan dalam Tabel 4.1 yang memuat keterkaitan antara tujuan, sasaran, outcome, dan output dengan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan perangkat daerah.

Selanjutnya, guna mendukung kejelasan alokasi sumber daya, rencana ini dilengkapi dengan kerangka pendanaan indikatif. Tabel 4.2 menyajikan rincian nomenklatur program, indikator kinerja, target tahunan, serta pagu indikatif sebagai dasar pengelolaan pembiayaan yang berkesinambungan.

Tabel 4.1.
Perumusan Program/kegiatan/Subkegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah							
Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana daerah	Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana daerah				Indeks Ketahanan Daerah (IKD) (Indeks)		
		Meningkatnya kapabilitas penanggulangan bencana daerah			Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana (Indeks)		
			Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Persentase Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana (%)	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Persentase Layanan informasi rawan bencana	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	
					Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.01.0008 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
				Persentase layanan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
					Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	1.05.03.2.02.0013 - Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
					Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	
					Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	1.05.03.2.02.0020 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	
					Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	1.05.03.2.02.0021 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan	1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
					Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	
			Tertanganinya Bencana		Persentase penanganan bencana (%)	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Persentase Layanan Penanganan Bencana	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota (Laporan)	1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	1.05.03.2.03.0001 - Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	
					Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota (Laporan)	1.05.03.2.03.0012 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	
			Terfasilitasinya Penanganan Pasca Bencana		Persentase penanganan pasca bencana yang terfasilitasi (%)	1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
				Persentase layanan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
					Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
					Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	1.05.03.2.04.0008 - Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	1.05.03.2.04.0010 - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1.05.03.2.04.0015 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	
		Meningkatnya tata kelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah			Nilai SAKIP (Nilai)		
					Indeks kepuasan masyarakat (Indeks)		
			Meningkatnya Penguatan Internal Akuntabilitas Kinerja		Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1.05.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	
				Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Sesuai SAP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.05.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

Tabel 4.2.
Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				1.528.000.000,00		1.488.000.000,00		1.285.000.000,00		1.535.000.000,00		1.535.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana (%)	0	100	1.179.000.000,00	100	1.069.000.000,00	100	866.000.000,00	100	1.116.000.000,00	100	1.116.000.000,00	1.05.0.00.0.00.02.000 0 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.03.2.01 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				293.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		330.000.000,00		80.000.000,00		
Tersedianya Layanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	1	293.000.000,00	0	80.000.000,00	0	80.000.000,00	1	330.000.000,00	0	80.000.000,00		
	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	230	400		400		400		400		400			
1.05.03.2.01.0007 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)				80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	230	400	80.000.000,00	400	80.000.000,00	400	80.000.000,00	400	80.000.000,00	400	80.000.000,00		
Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	1	213.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	250.000.000,00	0	0,00		
1.05.03.2.02 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				886.000.000,00		989.000.000,00		786.000.000,00		786.000.000,00		1.036.000.000,00		
Tersedianya layanan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	3	2	886.000.000,00	2	989.000.000,00	2	786.000.000,00	2	786.000.000,00	2	1.036.000.000,00		
	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	1		1		0		0		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	40	50		50		50		50		50			
	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	50	50		50		50		50		50			
	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	1	2		2		2		2		2			
1.05.03.2.02.0013 - Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	0	0	0,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.05.03.2.02.0015 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	40	50	50.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00		
1.05.03.2.02.0018 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	250	60	100.000.000,00	80	100.000.000,00	80	100.000.000,00	80	100.000.000,00	80	100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana														
1.05.03.2.02.0020 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				195.000.000,00		195.000.000,00		195.000.000,00		195.000.000,00		195.000.000,00		
Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan- kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	0	2	195.000.000,00	2	195.000.000,00	2	195.000.000,00	2	195.000.000,00	2	195.000.000,00		
1.05.03.2.02.0021 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	50	50	75.000.000,00	50	75.000.000,00	50	75.000.000,00	50	75.000.000,00	50	75.000.000,00		
1.05.03.2.02.0022 - Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
1.05.03.2.02.0026 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	1	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
1.05.03.2.02.0027 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				250.000.000,00		203.000.000,00		0,00		0,00		250.000.000,00		
Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	1	250.000.000,00	1	203.000.000,00	0	0,00	0	0,00	1	250.000.000,00		
1.05.03.2.02.0028 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				96.000.000,00		96.000.000,00		96.000.000,00		96.000.000,00		96.000.000,00		
Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	1	2	96.000.000,00	2	96.000.000,00	2	96.000.000,00	2	96.000.000,00	2	96.000.000,00		
Terfasilitasinya Penanganan Pasca Bencana	Persentase penanganan pasca bencana yang terfasilitasi (%)	0	100	30.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00		
1.05.03.2.04 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				30.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya layanan pasca bencana	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	0	20	30.000.000,00		50.000.000,00	20	50.000.000,00		50.000.000,00	20	50.000.000,00		
	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
1.05.03.2.04.0008 - Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	0	20	0,00		0,00	20	0,00		0,00	20	0,00		
1.05.03.2.04.0010 - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				10.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	0	1	10.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00		
1.05.03.2.04.0015 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
Tertanganinya Bencana	Persentase penanganan bencana (%)	0	100	319.000.000,00	100	369.000.000,00	100	369.000.000,00	100	369.000.000,00	100	369.000.000,00		
1.05.03.2.03 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				319.000.000,00		369.000.000,00		369.000.000,00		369.000.000,00		369.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Penanganan Bencana	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1	1	319.000.000,00	1	369.000.000,00	1	369.000.000,00	1	369.000.000,00	1	369.000.000,00		
	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	692	300		300		300		300		300			
	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	572	50		50		50		50		50			
	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
1.05.03.2.03.0001 - Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	0	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00		
1.05.03.2.03.0002 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
1.05.03.2.03.0003 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	572	50	10.000.000,00	50	15.000.000,00	50	15.000.000,00	50	15.000.000,00	50	15.000.000,00		
1.05.03.2.03.0009 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				300.000.000,00		345.000.000,00		345.000.000,00		345.000.000,00		345.000.000,00		
Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	692	300	300.000.000,00	300	345.000.000,00	300	345.000.000,00	300	345.000.000,00	300	345.000.000,00		
1.05.03.2.03.0012 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				6.500.000,00		6.500.000,00		6.500.000,00		6.500.000,00		6.500.000,00		
Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota (Laporan)	0	1	6.500.000,00	1	6.500.000,00	1	6.500.000,00	1	6.500.000,00	1	6.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya Kualitas Layanan Keseekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan (Indeks)	0	78	554.400.000,00	78,5	560.400.000,00	79	679.400.000,00	79,5	552.400.000,00	80	552.400.000,00	1.05.0.00.0.00.02.000 0 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				1.000.000,00		1.000.000,00		101.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya layanan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	101.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		37		37		37		37		37			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		0		0		38		0		0			
1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		0,00		100.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		0	0,00	0	0,00	38	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)		1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00		
1.05.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				105.100.000,00		103.100.000,00		105.100.000,00		103.100.000,00		103.100.000,00		
Tersedianya layanan administrasi umum	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)		1	105.100.000,00	1	103.100.000,00	1	105.100.000,00	1	103.100.000,00	1	103.100.000,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	14		14		14		14		14			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	62	55		55		55		55		55			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7	8		8		8		8		8			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	6		6		6		6		6			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		1		0		1		0		0			
1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00		
1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.000.000,00		0,00		2.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)		1	2.000.000,00	0	0,00	1	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	62	55	25.000.000,00	55	25.000.000,00	55	25.000.000,00	55	25.000.000,00	55	25.000.000,00		
1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7	8	15.000.000,00	8	15.000.000,00	8	15.000.000,00	8	15.000.000,00	8	15.000.000,00		
1.05.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				3.100.000,00		3.100.000,00		3.100.000,00		3.100.000,00		3.100.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)		1	3.100.000,00	1	3.100.000,00	1	3.100.000,00	1	3.100.000,00	1	3.100.000,00		
1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	14	50.000.000,00	14	50.000.000,00	14	50.000.000,00	14	50.000.000,00	14	50.000.000,00		
1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				53.800.000,00		61.800.000,00		58.800.000,00		53.800.000,00		53.800.000,00		
Terkelolanya data Barang Milik Daerah dalam aplikasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	18	0	53.800.000,00	0	61.800.000,00	1	58.800.000,00	0	53.800.000,00	0	53.800.000,00		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		0		1		0		0		0			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	3		3		3		3		3			
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	18	0	0,00	0	0,00	1	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		8.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		0	0,00	1	8.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				53.800.000,00		53.800.000,00		53.800.000,00		53.800.000,00		53.800.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	3	53.800.000,00	3	53.800.000,00	3	53.800.000,00	3	53.800.000,00	3	53.800.000,00		
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				130.500.000,00		130.500.000,00		130.500.000,00		130.500.000,00		130.500.000,00		
Tersedianya layanan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	130.500.000,00	12	130.500.000,00	12	130.500.000,00	12	130.500.000,00	12	130.500.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				128.500.000,00		128.500.000,00		128.500.000,00		128.500.000,00		128.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	128.500.000,00	12	128.500.000,00	12	128.500.000,00	12	128.500.000,00	12	128.500.000,00		
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				264.000.000,00		264.000.000,00		284.000.000,00		264.000.000,00		264.000.000,00		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0	264.000.000,00	0	264.000.000,00	1	284.000.000,00	0	264.000.000,00	0	264.000.000,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	39	17		17		17		17		17			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7	7		7		7		7		7			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	22	20		20		20		20		20			
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2	2	4.000.000,00	2	4.000.000,00	2	4.000.000,00	2	4.000.000,00	2	4.000.000,00		
1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				235.000.000,00		235.000.000,00		235.000.000,00		235.000.000,00		235.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	39	17	235.000.000,00	17	235.000.000,00	17	235.000.000,00	17	235.000.000,00	17	235.000.000,00		
1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7	7	12.000.000,00	7	12.000.000,00	7	12.000.000,00	7	12.000.000,00	7	12.000.000,00		
1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		20.000.000,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0	0,00	0	0,00	1	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
1.05.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		13.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	22	20	13.000.000,00	20	13.000.000,00	20	13.000.000,00	20	13.000.000,00	20	13.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya Penguatan Internal Akuntabilitas Kinerja	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	4.857.636.606,00	100	4.857.636.606,00	100	4.857.636.606,00	100	4.857.636.606,00	100	4.858.236.606,00	1.05.0.00.0.00.02.000 0 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				600.000,00		600.000,00		600.000,00		600.000,00		1.200.000,00		
Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat waktu	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	1	600.000,00	1	600.000,00	1	600.000,00	1	600.000,00	1	1.200.000,00		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	2		2		2		2		3			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	3	600.000,00		
1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
1.05.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
1.05.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00		
1.05.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				600.000,00		600.000,00		600.000,00		600.000,00		600.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	1	600.000,00	1	600.000,00	1	600.000,00	1	600.000,00	1	600.000,00		
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.857.036.606,00		4.857.036.606,00		4.857.036.606,00		4.857.036.606,00		4.857.036.606,00		
Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Sesuai SAP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	4.857.036.606,00	12	4.857.036.606,00	12	4.857.036.606,00	12	4.857.036.606,00	12	4.857.036.606,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25	37		37		37		37		37			
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	25	37	4.562.036.606,00	37	4.562.036.606,00	37	4.562.036.606,00	37	4.562.036.606,00	37	4.562.036.606,00		
1.05.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				295.000.000,00		295.000.000,00		295.000.000,00		295.000.000,00		295.000.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	295.000.000,00	12	295.000.000,00	12	295.000.000,00	12	295.000.000,00	12	295.000.000,00		
1.05.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00		
1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00		

Program Prioritas

Meskipun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah tidak memiliki program prioritas secara khusus, peran pengkoordinasian, komando dan pelaksanaan kebencanaan tetap diarahkan untuk mendukung pencapaian program prioritas

Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Indikator Kinerja Utama

Untuk mengukur capaian dari tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kota Tarakan merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai tolok ukur keberhasilan.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah									
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Nilai	0,7	0.712	0.724	0.736	0.748	0.760	0.772	Tujuan : Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana daerah
2	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan bencana	Indeks	n.a	40	45	50	55	60	65	Sasaran 1 : Meningkatnya kapabilitas penanggulangan bencana daerah
3	Nilai SAKIP	Nilai	79.04	79.08	79.1	79.4	79.6	79.8	80.0	Sasaran 2 : Meningkatnya tata kelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	88.93	89.0	89.1	89.15	89.2	89.25	89.30	Sasaran 2 : Meningkatnya tata kelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Indikator Kinerja Kunci

Jika Indikator Kinerja Utama (IKU) berfungsi sebagai tolok ukur strategis untuk mengukur keberhasilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, maka Indikator Kinerja Kunci (IKK) lebih menekankan pada penilaian capaian kinerja urusan pemerintahan sesuai kewenangan daerah. Adapun Indikator Kinerja Kunci urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tabel berikut :

Tabel 4.5.
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	positif	Orang	2.508	320	320	320	320	320	320	
2.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	positif	Orang	572	50	50	50	50	50	50	
3.	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	positif	Orang	62.177	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6.	Persentase penanganan pra bencana	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	positif	%	0	100	100	0	0	80	100	
8.	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	komulatif	%	1	0,13	0,26	0,38	0,5	0,62	0,73	
9.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	komulatif	%	36,7	0,58	0,8	1,18	1,56	1,93	2,29	
10.	Persentase penanganan pasca bencana yang terfasilitasi	positif	%	0	0	100	100	100	100	100	

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana ditetapkan dalam dokumen ini berlaku mulai tahun 2025 hingga tahun 2030.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Kota Tarakan Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman sekaligus arah strategis bagi seluruh kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah, serta acuan bagi para pemangku kepentingan dalam mendukung fungsi pengawasan.

Pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang termuat dalam Renstra ini tentu sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya pendanaan yang memadai. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen, semangat, tekad, dan kedisiplinan untuk memprioritaskan setiap program sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia.

Selain sebagai panduan kerja, Renstra ini juga berfungsi sebagai tolok ukur evaluasi tahunan terhadap kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tarakan dalam melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, Renstra ini diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

27. Rencana Strategis Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan Tahun 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Menindaklanjuti Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas Kepala Daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan melaksanakan pasal 10 Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang mengamanatkan Penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang di dalamnya memuat Asta Cita sebagai Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029, dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah dan kearifan lokal serta untuk memastikan kesinambungan Pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada Masyarakat, pasca pemilihan kepala daerah serentak.

Selanjutnya, RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025 - 2029 yang disusun akan menjadi dasar bagi seluruh perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Kecamatan Tarakan Timurtahun 2025-2029. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara Perencanaan Strategi di RPJMD dengan perencanaan operasional di perangkat Daerah, dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Kota Tarakan.

Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Tarakan Timurserta dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah yang dirubah menjadi Perda Nomor 9 Tahun 2020 maka disusunlah Renstra Kecamatan Tarakan Timursebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi dan program Wali Kota yang diwujudkan dalam satu periode masa jabatan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja perangkat daerah serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja perangkat daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra Kecamatan Tarakan Timur dilaksanakan dengan mengacu kepada RPJMD kota Tarakan tahun 2025-2029. Renstra Kecamatan Tarakan Timur merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan gambaran arahan kebijakan dan strategis pembangunan pada tahun 2025-2029 sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Tarakan Timur dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan melalui tahapan : persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah

/ lintas perangkat daerah, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra perangkat daerah. Pengembangan Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan sampai tahun 2029 diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan nasional sesuai dengan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan yaitu Camat dengan kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tarakan Timur Tahun 2025-2026 yaitu sebagai berikut:

Penyusunan rencana strategis (Renstra) Kecamatan Tarakan Timur kota Tarakan berdasarkan landasan kebijakan atau dasar hukum yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029;
18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Kecamatan Tarakan Timur;
22. Surat Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 100.3.3.3/HK-IV/239/2025 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Tarakan Timur Tahun 2025-2029 di maksudkan untuk menyesuaikan dengan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 dengan peraturan perundangan yang berlaku dan permasalahan/isu strategis pembangunan paling mutakhir dengan memperbaharui kebijakan pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah Kota Tarakan 5 (lima) tahun kedepan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap hasil RPJMD.

Adapun Tujuan dari penyusunan renstra Kecamatan Tarakan Timur 2025-2029 adalah : menerjemahkan dan menjabarkan tujuan dan sasaran yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan 2025-2029 dalam bentuk tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang lebih spesifik dan terarah serta yang bersifat operasional :

1. Sebagai kerangka acuan dalam menyusun rencana kerja Kecamatan Tarakan Timur selama kurun waktu 5 (lima) tahun.
2. Sebagai dasar penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi serta penilaian kinerja kecamatan Tarakan Timur dalam menjalankan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Tarakan Timur Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan sistematika.

- Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah
Menguraikan tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, uraian tugas, sumber daya, kinerja , kelompok sasaran identifikasi permasalahan dan penentuan isu strategis serta layanan Kecamatan Tarakan Timur
- Bab III Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan
Menguraikan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Tarakan Timur, strategi dan arah kebijakan Pembangunan jangka menengah.
- Bab IV Program, kegiatan subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan
Menguraikan tentang rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pendanaan indikatif, indikator kinerja kecamatan mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Tarakan Timur Tahun 2025-2029
- Bab V Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN TARAKAN TIMUR

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Umum, Pemberdayaan Masyarakat, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah. Inspektorat Daerah Kota Tarakan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas dan fungsi Kecamatan Tarakan Timur mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas fungsi serta tata kerja kecamatan Tarakan Timur.

- Tugas

Tugas pokok Kecamatan Tarakan Timur antara lain:

1. Kecamatan merupakan perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan;
2. Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- Fungsi

Fungsi Kecamatan Tarakan Timur Tarakan antara lain:

1. Penyusunan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
4. Pelaksanaan administrasi Kecamatan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Struktur Organisasi Kecamatan Tarakan Timur

Susunan organisasi Kecamatan Tarakan Timur mengacu pada Peraturan Walikota Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas fungsi serta tata kerja kecamatan Tarakan Timur.

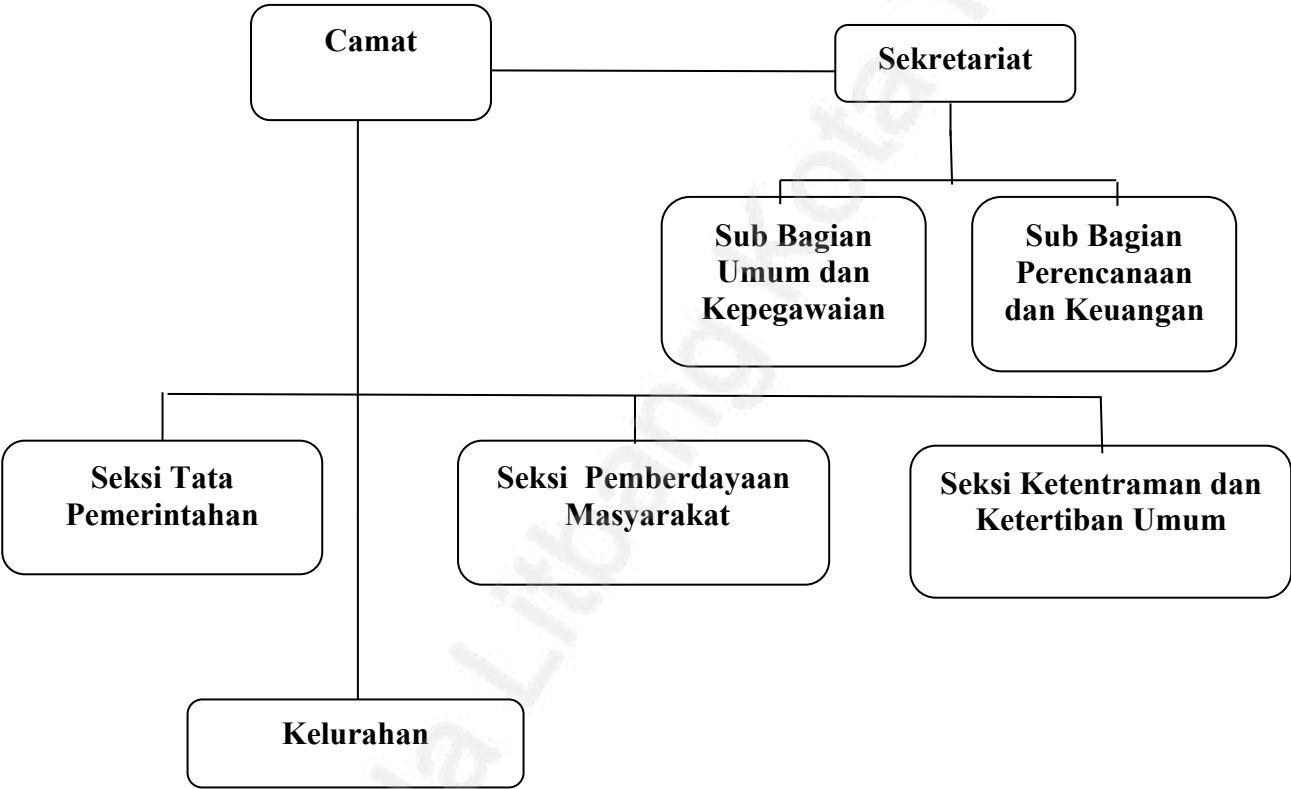
Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tarakan Timur, terdiri antara lain sebagai berikut:

1. Camat;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

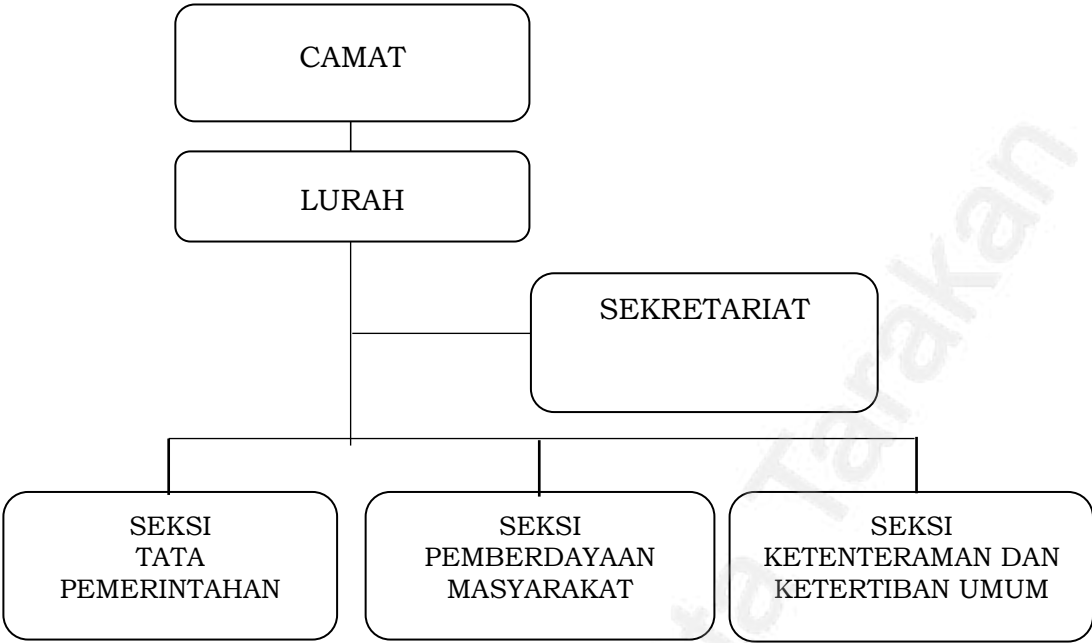
- 3. Seksi Tata Pemerintahan;
- 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- 5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- 6. Kelurahan, terdiri dari:
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Lebih jelas Struktur Organisasi Kecamatan Tarakan Timur dapat dilihat pada lampiran Bagan Strukur Organisasi terlampir.

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi
Kecamatan Tarakan Timur Tahun 2025



Gambar 2.2
Struktur Organisasi Kelurahan Pada Kecamatan Tarakan Timur Tahun 2025



SUMBER DAYA SKPD

Bagan struktur organisasi dan ASN yang menjabat adalah formasi yang terbaru dalam melaksanakan roda pemerintahan di Kecamatan Tarakan Timur, sesuai Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 88 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan Tarakan Timur.

1. Kecamatan
 - a. Camat adalah orang yang memimpin kecamatan. Camat mempunyai tugas umum pemerintahan meliputi:
 - 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - 2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - 3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - 4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 - 5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - 6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
 - 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
 - 8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - 9) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - b. Selain tugas diatas Camat juga mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;

- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
- 4) Pelaksanaan administrasi Kecamatan; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

- a. Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan.
- b. Selain tugas diatas Sekretaris juga mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - 1) Koordinasi kegiatan Kecamatan;
 - 2) Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kecamatan;
 - 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kecamatan;
 - 4) Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Kecamatan;
 - 5) Koordinasi dan penyusunan produk hukum pada Kecamatan;
 - 6) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah di Kecamatan;
 - 7) Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
 - 8) Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Kecamatan; dan
 - 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretariat terdiri dari 2 subbag:

- 1) Subbag umum
 - a) mempunyai tugas mengelola surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, protokol dan administrasi kepegawaian
 - b) Serta fungsi
 - pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kecamatan;
 - pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Kecamatan;
 - koordinasi dan penyusunan produk hukum pada Kecamatan;
 - penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah di Kecamatan;
 - pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- 2) Subbag Perencanaan Program dan Keuangan
 - a) mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan masalah keuangan dan pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan program Kecamatan.
 - b) Serta fungsi
 - koordinasi kegiatan Kecamatan;
 - koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kecamatan;

- pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
- penyiapan bahan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Kecamatan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

3. Seksi Tata Pemerintahan

a. Seksi tata Pemerintahan merupakan unsur pelaksana di bidang Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam:

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- 2) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan pada bidang tata pemerintahan;
- 3) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan di bidang tata pemerintahan dan pelayanan administrasi kepada masyarakat;
- 4) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota pada bidang tata pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kota yang ada di Kecamatan;
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang - undangan.

b. Selain tugas diatas Kasi Tata Pemerintahan juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) penyusunan kebijakan di bidang tata pemerintahan dan pelayanan administrasi Kecamatan kepada masyarakat di wilayahnya;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang tata pemerintahan dan pelayanan administrasi Kecamatan kepada masyarakat di wilayahnya;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan dan pelayanan administrasi Kecamatan kepada masyarakat di wilayahnya; dan
- 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pelaksana di bidang pemberdayaan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam:

- 1) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 3) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan pada bidang pemberdayaan masyarakat;
- 4) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- 5) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada bidang pemberdayaan masyarakat yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

- b. Selain tugas diatas Kasi Pemberdayaan juga mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat di wilayahnya;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat di wilayahnya;
 - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat di wilayahnya; dan
 - 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.
5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban umum
 - a. Seksi ketertiban umum merupakan unsur pelaksana di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam:
 - 1) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - 2) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 - 3) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan pada bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - 4) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - 5) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada bidang ketenteraman dan ketertiban umum yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
 - 6) Mengawasi dan mengendalikan perizinan di wilayah Kecamatan; dan
 - 7) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - b. Selain tugas diatas Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum juga mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - 1) penyusunan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
 - 2) pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
 - 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya; dan
 - 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.
6. Kelurahan
 - a. Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang mempunyai tugas membantu Camat dalam:
 - 1) Melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 - 2) Melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - 3) Melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - 4) Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
 - 5) Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
 - 7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Selain tugas diatas Lurah juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) penyusunan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
- 4) pelaksanaan administrasi Kelurahan; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Adapun Kelurahan yang di bawah naungan Kecamatan Tarakan Timurada 5 (lima) kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Pamusian
2. Kelurahan Sebengkok
3. Kelurahan Selumit
4. Kelurahan Selumit Pantai
5. Kelurahan Kampung I Skip

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir Desember Tahun 2024, kondisi pegawai pada Kantor Kecamatan Tarakan Timur dan Kelurahan Se-Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan, Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan pada Kantor Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan Tahun 2024

Jenis kepegawaian	Pangkat/ Golongan Ruang				Jenis Kelamin		Pendidikan						Jumlah Pegawai
	IV	III	II	I	L	P	S2	S1/DIV	DIII	SLTA	SLTP	SD	
PNS Kec. Tarakan Timur	1	15	2	0	12	6	1	14	1	2	0	0	18
Tenaga Honor Kec. Tarakan Timur	0	0	0	0	4	2	0	1	1	4	0	0	6
PNS Kel.Lingkas Ujung	0	8	2	0	5	5	0	7	0	3	0	0	10
Tenaga Honor Kel. Lingkas Ujung	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3	0	0	3
PNS Kel.Gunung Lingkas	0	8	4	0	4	8	0	7	1	4	0	0	12
Tenaga Honor Kel. Gng. Lingkas	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	2
PNS Kel.Kampung Empat	0	7	4	0	7	4	0	6	0	5	0	0	11
Tenaga Honor Kel.Kampung Empat	0	0	0	0	4	1	0	0	0	5	0	0	5
PNS Kel.Kampung Enam	0	11	2	0	7	6	0	8	1	4	0	0	13
Tenaga Honor Kel.Kampung Enam	0	0	0	0	2	2	0	0	0	1	2	1	4
PNS Kel.Mamburu ngan	0	11	1	0	6	6	0	9	0	3	0	0	12
Tenaga Honor Kel. Mamburungan	0	0	0	0	4	0	0	0	1	1	2	0	4
PNS Kel. Mamburungan Timur	0	7	2	0	5	4	0	6	0	3	0	0	9
Tenaga Honor Kel. Mamburungan Timur	0	0	0	0	3	1	0	2	0	2	0	0	4
PNS Kel.Pantai Amal	0	9	2	0	11	0	1	6	0	4	0	0	11
Tenaga Honor Kel.Pantai Amal	0	0	0	0	2	1	0	1	0	2	0	0	3
JUMLAH	1	76	19	0	78	49	2	67	5	48	4	1	127

Sumber : Kantor Kecamatan Tarakan Timur

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan dengan banyaknya pegawai, maka jumlah SDM tersebut masih belum memenuhi jumlah minimal ASN dengan jabatan yang ada, namun cukup untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Kecamatan secara umum, jadi jumlah seluruh SDM yang ada di Kantor Kecamatan Tarakan Timur berjumlah 127 (seratus dua puluh tujuh) orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 96 (sembilan puluh enam) orang dan Tenaga Honorer sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang.

Asset/Modal

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.2
Aset Tanah Kantor Kecamatan Tarakan Timur

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5.375,00	1983	Jl. Sei. Mahakam RT. 10 Kel. Kampung Empat	Hibah	537.500,00	028/190/PLK-XII/1998 NJOP Tanah yang lama pada Kantor Camat Tarakan Timur, Sebesar Rp. 1.000.000,- / Meter
Jumlah Harga						537.500,00	

Sumber: Simda Barang Kec. Tarakan Timur Tahun 2023

Tabel 2.3
Aset Peralatan dan Mesin Kantor Kecamatan Tarakan Timur

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembelian	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
1	1.3.2.05.001.004.007	Brandkas	1994	Pembelian	1.500,00	Brankas (Ruang Pembantu pemegang kas)
1	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	1999	Pembelian	2.000,00	2 Buah
1	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2000	Pembeli an	1.700,00	Rak Piring (1 buah)
1	1.3.2.05.002.001.035	Bangku Tunggu	2001	Pembelian	1.000,00	2 Buah (Ruang Tunggu)
2	1.3.2.05.002.004.001	Lemari Es	2001	Pembelian	1.700,00	1 Buah (Rumah Dinas Camat)
3	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	2001	Pembelian	4.000,00	1 Buah (Rumah Dinas Camat)
4	1.3.2.05.002.006.002	Televisi	2001	Pembelian	1.244,10	Ruang Sekretaris amat
5	1.3.2.05.002.006.002	Televisi	2001	Pembelian	1.700,00	Rumah Dinas Camat
6	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2001	Pembelian	1.000,00	Korden (5 Buah)
7	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2001	Pembelian	1.500,00	korden (10 lembar)
8	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2001	Pembelian	1.000,00	SPRING BAD
9	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2001	Pembelian	1.500,00	korden 9 lembar
10	1.3.2.06.003.010.001	Antene SHF Portable	2001	Pembelian	1.000,00	Baik (Rumah Dinas Camat)
11	1.3.2.06.003.010.001	Antene SHF Portable	2001	Pembelian	1.000,00	Parabola (1 Buah)
1	1.3.2.05.002.001.027	Meja Makan Besi	2002	Pembelian	2.000,00	1 SET
2	1.3.2.05.002.001.031	Kursi Tamu	2002	Pembelian	3.000,00	1 set (Ruang Camat)
3	1.3.2.05.002.001.039	Meja Komputer	2002	Pembelian	1.500,00	1 Buah (Ruang Umum)
4	1.3.2.05.002.003.004	Mesin Cuci	2002	Pembelian	1.000,00	1 Buah
5	1.3.2.05.002.004.001	Lemari Es	2002	Pembeli an	1.600,00	1 Buah (Rusak Berat)
6	1.3.2.05.002.006.038	Dispenser	2002	Pembeli an	1.500,00	1 Buah
7	1.3.2.05.003.001.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2002	Pembeli an	2.000,00	1 Buah
8	1.3.2.08.003.001.003	Papan Panel	2002	Pembelian	1.737,00	Bagan Struktur (1 Buah)
9	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2002	Pembelian	7.000,00	Seperangkat Komputer (1 Unit)
1	1.3.2.04.001.004.005	Lemari Penyimpan	2003	Pembelian	1.500,00	Lemari Buku (1 Buah) Warna Hijau
2	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	2003	Pembelian	2.000,00	1 Buah
3	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	2003	Pembelian	2.000,00	Lemari untuk Arsip merk " Olympic" Sebanyak 2 (Dua) Buah
4	1.3.2.05.001.005.009	Peta	2003	Pembelian	1.000,00	Peta Pantai Amal - Tarakan
5	1.3.2.05.002.001.008	Meja Rapat	2003	Pembelian	2.000,00	Meja Panjang (Ruang Pertemuan)
6	1.3.2.05.002.001.016	Meja Tambahan	2003	Pembelian	2.000,00	Meja Pelayanan (1 Buah)
7	1.3.2.05.002.001.031	Kursi Tamu	2003	Pembeli an	2.000,00	1 set (Rumah Dinas Camat)
8	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	2003	Pembeli an	9.000,00	AC Split Merk "National" 0,5 PK
9	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	2003	Pembelian	12.500,00	1 Buah (Ruang Umum)
10	1.3.2.08.001.056.081	Meja Kerja	2003	Pembeli an	1.500,00	Meja Kerja 1 Biro
11	1.3.2.08.001.056.081	Meja Kerja	2003	Pembeli an	1.000,00	2 Buah
12	1.3.2.08.001.056.081	Meja Kerja	2003	Pembeli an	1.500,00	1 Buah
13	1.3.2.08.003.001.006	Gambar Total	2003	Pembeli an	1.000,00	Gambar Pantai Amal (1 Buah)
1	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	2004	Pembeli an	2.000,00	1 Buah
2	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2004	Pembeli an	7.000,00	1 Unit (Trantibum)
3	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2004	Pembeli an	8.000,00	Seperangkat komputer (1 unit)
1	1.3.2.05.002.001.035	Bangku Tunggu	2005	Pembeli an	1.000,00	2 buah (Ruang Tunggu)
2	1.3.2.08.003.011.004	alat peraga praktek sekolah bidang studi : olahraga lainnya (dst)	2005	Pembeli an	2.000,00	Tenis Meja (1 Buah)

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembelian	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
1	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	2006	Pembeli an	2.000,00	1 Buah
2	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	2006	Pembeli an	8.000,00	1 Buah
3	1.3.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2006	Pembeli an	4.000,00	1 Buah
4	1.3.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2006	Pembelian	1.000,00	Lemari Penyimpanan Berkas 3 Pintu Warna Coklat Merah
5	1.3.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2006	Pembelian	1.000,00	Lemari Penyimpanan 3 Pintu Warna Coklat Merah
6	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2006	Pembeli an	7.000,00	Seperangkat Komputer (1 Unit)
7	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2006	Pembeli an	7.000,00	Seperangkat Komputer (1 unit)
1	1.3.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2007	Pembeli an	2.000,00	1 Buah
2	1.3.2.10.001.002.002	Laptop	2007	Pembeli an	12.815,00	Laptop Toshiba Sebanyak 1(Satu) Buah Ruang Bendahara (Rusak Beat)
1	1.3.2.02.001.003.002	Pick Up	2008	Pembeli an	169.707,00	Kendaraan Operasional (Berganti dari KT 8370 FC)
2	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2008	Pembeli an	16.225,00	Eks KT 5484 JE Kendaraan Dinas Jabatan Kasi.Pemberdayaan & Kemasyarakatan
3	1.3.2.05.001.001.012	mesin ketik lainnya (dst)	2008	Pembeli an	1.500,00	1 Buah (Ruang Pelayanan)
4	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2008	Pembeli an	5.999,95	1 Buah di Ruang Kasi.Pemerintahan
5	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2008	Pembeli an	1.999,90	Filling Kabinet (Ruang Pelayanan)
6	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2008	Pembelian	1.999,90	Filling Kabinet (Ruang Kesra)
7	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2008	Pembeli an	1.999,90	Filling Kabinet (Ruang Umum)
8	1.3.2.05.001.004.028	Lemari Makan	2008	Pembeli an	2.299,00	
9	1.3.2.05.002.001.031	Kursi Tamu	2008	Pembeli an	3.499,98	1 Set
10	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	2008	Pembeli an	1.199,00	1 Buah
11	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	2008	Pembeli an	1.199,00	Kursi Kerja Putar Merk "Malvin" 1 (Satu) Buah
12	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	2008	Pembeli an	1.199,00	Kursi Kerja Putar Merk "Malvin" 1 (Satu) Buah
13	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	2008	Pembeli an	4.000,00	1 Buah
14	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	2008	Pembeli an	4.000,00	1 Buah
15	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	2008	Pembeli an	4.000,00	1 Buah (Ruang Kasi.Pemerintahan)
16	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	2008	Pembeli an	4.000,00	1 Buah
17	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	2008	Pembeli an	4.000,00	1 Buah (Ruang Pertemuan)
18	1.3.2.05.002.006.002	Televisi	2008	Pembeli an	1.991,00	TV 21" In Merk Sharp 1 (Satu) Buah
19	1.3.2.05.002.006.038	Dispenser	2008	Pembeli an	1.979,45	Dispenser Merk "MIYAKO" 389 HC
20	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2008	Pembeli an	2.964,45	Profil Tank 2200 (1Buah)
21	1.3.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2008	Pembeli an	4.950,00	1 Buah
22	1.3.2.06.001.002.003	Camera Electronic	2008	Pembeli an	3.000,00	1 Buah (Ruang Simduk)
23	1.3.2.06.001.002.042	Rak Peralatan	2008	Pembeli an	1.250,00	Ruang Dapur
24	1.3.2.06.002.001.001	Telephone (PABX)	2008	Pembeli an	1.800,00	1 Buah (Ruang Camat)
25	1.3.2.08.001.037.052	Alat Press Laminasi	2008	Pembeli an	1.500,00	Ruang Pelayan
26	1.3.2.10.001.002.002	Laptop	2008	Pembelian	12.815,00	Spesifikasi : Intel Core 2 Duo, Processor, T5550, 1.83 GHz, 667 Mhz FSB, 2 MB L2 Cache, 1 GB DDR2, 12" In WXGA, 160 GB HDD (1 Buah) (Rusak Berat)

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembelian	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
27	1.3.2.10.002.001.002	Magnetic Tape Unit (Peralatan Mainframe)	2008	Pembeli an	12.760,00	Warless (1 Buah) Ruang Umum
28	1.3.2.10.002.001.006	CPU (Peralatan Mainframe)	2008	Pembeli an	2.269,60	CPU ASUS Sebanyak 1(Satu) Buah Ruang Pemb & Kesra
29	1.3.2.10.002.003.002	Monitor	2008	Pembeli an	4.726,40	Monitor Samsung Sebanyak 1(Satu) Buah Ruang Pemb & Kesra
30	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2008	Pembeli an	2.942,50	1 Buah
1	1.3.2.02.001.001.003	Station Wagon	2009	Pembeli an	146.300,00	Kendaraan Dinas Untuk Jabatan Sekretaris Camat
2	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2009	Pembeli an	23.870,00	Eks KT 5974 JE Kendaraan Dinas Jabatan Kasi. Pemerintahan
3	1.3.2.03.001.009.010	Reciver	2009	Pembeli an	3.690,00	Parabola lengkap dengan receiver ditempatkan di Ruang Tunggu
4	1.3.2.05.001.001.002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	2009	Pembeli an	3.300,00	Ruang Pelayanan (Rusak Berat)
5	1.3.2.05.001.001.012	mesin ketik lainnya (dst)	2009	Pembeli an	3.300,00	Ruang Umum
6	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2009	Pembeli an	3.927,27	Lemari Besi Sebanyak 1 (Satu) Buah Ruang Umum
7	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2009	Pembeli an	3.927,27	Lemari Besi Sebanyak 1 (Satu) Buah Ruang Pelayanan
8	1.3.2.05.001.004.008	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	2009	Pembeli an	8.500,00	Brankas Uang
9	1.3.2.05.002.001.039	Meja Komputer	2009	Pembeli an	1.210,00	Ruang Umum
10	1.3.2.05.002.001.039	Meja Komputer	2009	Pembeli an	1.210,00	Ruang Pemerintahan
11	1.3.2.05.002.001.039	Meja Komputer	2009	Pembeli an	1.210,00	Ruang Trantib
12	1.3.2.05.002.001.039	Meja Komputer	2009	Pembeli an	1.210,00	Ruang Kesra
13	1.3.2.05.002.001.039	Meja Komputer	2009	Pembeli an	1.210,00	
14	1.3.2.05.002.001.039	Meja Komputer	2009	Pembeli an	1.210,00	Ruang Kasubbag Umum
15	1.3.2.05.002.001.039	Meja Komputer	2009	Pembeli an	1.210,00	
16	1.3.2.05.002.001.039	Meja Komputer	2009	Pembeli an	1.210,00	
17	1.3.2.05.002.003.003	Mesin Pemotong Rumput	2009	Pembeli an	4.000,00	
18	1.3.2.05.002.003.003	Mesin Pemotong Rumput	2009	Pembeli an	4.750,00	
19	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	2009	Pembeli an	22.000,00	
20	1.3.2.05.002.006.002	Televisi	2009	Pembeli an	1.400,00	Televisi Merk "SHARP" Piccolo
21	1.3.2.05.002.006.012	Wireless	2009	Pembeli an	9.900,00	
22	1.3.2.05.002.006.013	Megaphone	2009	Pembeli an	1.100,00	
23	1.3.2.05.002.006.048	Handy Cam	2009	Pembeli an	8.910,00	Camera Handycam 60 GB Merk "SONY" 1 (Satu) Buah
24	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2009	Pembeli an	2.286.900,00	Korden Kantor Sebanyak 79 lembar terdiri dari 39 Lembar Korden Putih dan 40 Lembar Korden Kuning
25	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2009	Pembeli an	29.700,00	Korden Kantor Sebanyak 79 lembar terdiri dari 39 Lembar Korden Putih dan 40 Lembar Korden Kuning. @ Ruang Studio Foto 2 Lembar korden Kuning & 2 lembar Korden Putih.
26	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2009	Pembeli an	29.700,00	Korden Kantor Sebanyak 79 lembar terdiri dari 39 Lembar Korden Putih dan 40 Lembar Korden Kuning (Ruang Tunggu 5 Lembar Korden Kuning & 5 Lembar Korden Putih)
27	1.3.2.06.001.002.003	Camera Electronic	2009	Pembeli an	3.190,00	Camera Digital Merk "SONY" 1 (Satu) Buah
28	1.3.2.06.001.005.053	Alat Studio Pemetaan lainnya	2009	Pembeli an	5.000,00	Alat Ukur Titik Koordinat Tanah (GPS) untuk Seksi Pemerintahan
29	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2009	Pembeli an	6.985,00	1 Unit PC CPU ASUS +1 Monitor Acer
30	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2009	Pembeli an	6.985,00	Ruang Pemerintahan 1 Unit PC CPU ASUS + 1 Monitor Acer X173w+ 1 Printer Canon

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembelian	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
31	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2009	Pembeli an	6.985,00	1 Unit PC CPU ASUS +1 Monitor Acer X173w+ 1 Printer Canon Ruang Trantib
32	1.3.2.10.001.002.002	Laptop	2009	Pembeli an	13.090,00	Laptop Compaq HP Sebanyak 1 (Satu) Buah
33	1.3.2.10.001.002.002	Laptop	2009	Pembeli an	26.180,00	Spesifikasi : Intel Core 2 Duo, Prosessor T6400, 2,0 GHz, 800 Mhz FSB, 2 MB L2 Cache, 1 GB DDR2, 12'1 In WXGA Acer Crystal Brite LCD, 250 GB HDD, DVD Super Multi DL, 802.11 a/b/g Draft-N WLAN
34	1.3.2.10.002.001.012	Hard Disk	2009	Pembeli an	1.350,00	Harddisk Drive Portable Merk "Rock Mobile Disk" 320 GB 1 (Satu) Buah
35	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2009	Pembeli an	8.550,00	
1	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2010	Pembeli an	16.500,00	Eks KT 5766 JJ Kendaraan Dinas Jabatan Kasi Trantibum
2	1.3.2.05.001.002.010	Mesin Absen (Time Recorder)	2010	Pembeli an	4.782,50	(Rusak Berat)
3	1.3.2.05.001.004.001	Lemari Besi/Metal	2010	Pembeli an	4.000,00	
4	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	2010	Pembeli an	2.000,00	
5	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	2010	Pembeli an	2.000,00	Kursi Kerja Ruang Sekretaris Camat
6	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	2010	Pembeli an	4.000,00	
7	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	2010	Pembeli an	2.000,00	1 Buah
8	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	2010	Pembeli an	4.000,00	
9	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	2010	Pembeli an	6.500,00	
10	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	2010	Pembeli an	2.600,00	Warna Biru
11	1.3.2.05.002.001.039	Meja Komputer	2010	Pembeli an	3.000,00	Meja Komputer Ukuran Kecil Warna Kuning Cream
12	1.3.2.05.002.001.039	Meja Komputer	2010	Pembeli an	1.500,00	Meja Komputer Ukuran Kecil Warna Kuning Cream
13	1.3.2.05.002.003.003	Mesin Pemotong Rumput	2010	Pembeli an	4.900,00	Mesin Pemotong Rumput Kecamatan Tarakan Timur Tahun 2010
14	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	2010	Pembeli an	6.000,00	
15	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	2010	Pembeli an	8.000,00	
16	1.3.2.05.002.005.026	Alat Dapur lainnya	2010	Pembeli an	3.000,00	
17	1.3.2.05.002.006.008	Sound System	2010	Pembeli an	19.000,00	Stereo Mixing Amplifier (Soundcraftsmen) SA-1070 Pro
18	1.3.2.05.002.006.038	Dispenser	2010	Pembeli an	5.000,00	
19	1.3.2.05.003.001.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2010	Pembeli an	1.500,00	Meja Kerja 1 Biro Warna Hitam
20	1.3.2.05.003.001.009	Meja Kerja Pejabat lain-lain	2010	Pembeli an	10.500,00	Meja Kerja 1/2 Biro Warna Hitam
21	1.3.2.06.001.001.048	Uninterruptible Power Supply	2010	Pembeli an	3.000,00	(Rusak Berat)
22	1.3.2.06.001.001.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2010	Pembeli an	1.500,00	
23	1.3.2.06.001.001.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2010	Pembeli an	1.500,00	(Rusak Berat)
24	1.3.2.06.001.001.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2010	Pembeli an	3.000,00	
25	1.3.2.06.001.002.003	Camera Electronic	2010	Pembeli an	2.800,00	
26	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2010	Pembeli an	7.250,00	Spesifikasi : Monitor Flat 17" In Samsung SyncMaster 943, CPU Pentium R Dual Core E5400 @2,70 GHz (2CPUs) - (1Buah)
27	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2010	Pembeli an	7.250,00	Spesifikasi : Monitor Flat 17" In Samsung SyncMaster 943, CPU Pentium R Dual Core E5400 @2,70 GHz (2CPUs) - (1Buah)
28	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2010	Pembeli an	1.800,00	
29	1.3.2.10.002.003.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2010	Pembeli an	9.000,00	

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembelian	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
1	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2011	Pembeli an	16.040,00	Eks KT 4463 FY Kendaraan Roda 2 (Dua) Merk "Honda" Type Vario Techno Warna Putih-Violet (Skuter Matic)
2	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	2011	Pembeli an	29.400,00	Eks KT 2099 FB Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) Jenis Trail Kawasaki KLX 150 CC dengan Nomor Polisi Kendaraan Sementara
3	1.3.2.04.001.004.005	Lemari Penyimpan	2011	Pembeli an	4.375,00	Lemari Penyimpanan Plakat/Buku/ Arsip Model Panjang
4	1.3.2.05.001.001.002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	2011	Pembeli an	3.600,00	Mesin Ketik Portable Merk "Brother" Warna Putih
5	1.3.2.05.001.003.011	Mesin Fotocopy Lainnya	2011	Pembeli an	31.000,00	
6	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2011	Pembeli an	4.500,00	Lemari Arsip Filling Cabinet 4 Pintu Merk "Brother"
7	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2011	Pembeli an	2.250,00	Lemari Arsip Filling Cabinet 4 Pintu Merk "Brother"
8	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2011	Pembeli an	2.250,00	Lemari Arsip Filling Cabinet Merk "Brother"
9	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	2011	Pembeli an	8.910,00	Filling Cabinet 4 Pintu Sliding
10	1.3.2.05.001.005.003	Papan Visual/Papan Nama	2011	Pembeli an	4.900,00	Papan Struktur Organisasi, Papan Visi & Misi Kecamatan, Papan Tupoksi Kecamatan Tarakan Timur
11	1.3.2.05.001.005.010	Alat Penghancur Kertas	2011	Pembeli an	2.875,00	Mesin Penghancur Kertas Merk "Gemet" 500 CD Abu-abu Silver
12	1.3.2.05.001.005.076	Papan Nama Instansi	2011	Pembeli an	19.800,00	Neon Box Instansi Kecamatan Tarakan Timur & Logo Pemkot Proporsional
13	1.3.2.05.002.001.002	Meja Kerja Kayu	2011	Pembeli an	1.490,00	Meja Anak-anak Ukuran Kecil 2 Pintu 2 Laci Warna Coklat Hijau Muda
14	1.3.2.05.002.001.003	Kursi Besi/Metal	2011	Pembeli an	11.000,00	Kursi Tunggu 4 Set Merk "Malvin"
15	1.3.2.05.002.001.009	Tempat Tidur Besi	2011	Pembeli an	3.450,00	Spring Bed Double Bed Ukuran Besar 1 Set
16	1.3.2.05.002.001.017	Meja Panjang	2011	Pembeli an	5.875,00	Meja Pelayanan Model Panjang
17	1.3.2.05.002.001.031	Kursi Tamu	2011	Pembeli an	5.500,00	Kursi Tamu Bentuk Ukir Kepala Burung Garuda
18	1.3.2.05.002.001.048	Sofa	2011	Pembeli an	3.400,00	Kursi Tamu/Sofa Merk "Siro" Warna Coklat Hitam 1 Set + Meja Tamu
19	1.3.2.05.002.001.050	Meubeler lainnya	2011	Pembeli an	2.420,00	Lemari Pakaian 3 Pintu Model Sliding + Cermin
20	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	2011	Pembeli an	3.388,00	Rumah Dinas Jabatan Camat Tarakan Timur
21	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	2011	Pembeli an	10.890,00	AC Split 1 PK Merk SHARP
22	1.3.2.05.002.006.002	Televisi	2011	Pembeli an	10.890,00	Televisi Flat Monitor SHARP AQUOS 32" In
23	1.3.2.05.002.006.002	Televisi	2011	Pembeli an	4.235,00	Rumah Dinas Jabatan Camat Tarakan Timur
24	1.3.2.05.002.006.008	Sound System	2011	Pembeli an	8.910,00	1 Buah Stereo Mixing Amplifier + 2 Buah Speaker System L & R
25	1.3.2.05.002.006.038	Dispenser	2011	Pembeli an	1.782,00	Dispenser Merk "POLYTRON" PWC 603 S/N : 21G00911 (Rusak Berat)
26	1.3.2.05.002.006.038	Dispenser	2011	Pembeli an	1.782,00	Dispenser Merk "POLYTRON" PWC 603 S/N:21C00708
27	1.3.2.05.003.001.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2011	Pembeli an	2.500,00	Meja Kerja Pimpinan Ukuran Besar Warna Coklat Hitam
28	1.3.2.05.003.002.005	Meja Rapat Pejabat Eselon III	2011	Pembeli an	4.350,00	Meja Rapat Bentuk Oval Warna Coklat Merah
29	1.3.2.05.003.003.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2011	Pembeli an	1.900,00	Kursi Kerja Pimpinan Warna Hitam Merk "Big Boss"
30	1.3.2.06.001.002.013	Video Tape Recorder Portable	2011	Pembeli an	1.815,00	1 Set DVD Mini Hi-Fi System
31	1.3.2.06.002.001.010	Facsimile	2011	Pembeli an	2.400,00	Mesin Facsimili Merk "Panasonic" Type KX- FT983 Warna Putih (Rusak Berat)
32	1.3.2.08.001.037.052	Alat Press Laminasi	2011	Pembeli an	1.595,00	Mesin Press Laminating Merk "LPF" Warna Putih-Hitam (Rusak Berat)
33	1.3.2.08.003.001.003	Papan Panel	2011	Pembeli an	12.870,00	Papan Daftar Urutan Kepangkatan Kecamatan Tarakan Timur

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembelian	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
34	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2011	Pembeli an	8.900,00	Spesifikasi 5: OS Windows Seven Home Basic 32 Bit (3.1, Build7600), Processor Type : Intel®Core™ i3-540, Video Type : Intel® GMA HD Graphics, Processor Onboard : 550@3.20 GHz(4CPUs)-3.2 GHz, Standard Memory : 2048 MB DDR3, Hard Driver Type : 500 GB3G Ser
35	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2011	Pembeli an	17.800,00	Spesifikasi 5: OS Windows Seven Home Basic 32 Bit (3.1, Build7600), Processor Type : Intel®Core™ i3-540, Video Type : Intel® GMA HD Graphics, Processor Onboard : 550@3.20 GHz(4CPUs)-3.2 GHz, Standard Memory : 2048 MB DDR3, Hard Driver Type : 500 GB3G Ser
36	1.3.2.10.001.002.002	Laptop	2011	Pembeli an	23.800,00	Spesifikasi : Platform Windows Seven Premium 32 Bit, Processor Type : Intel Core i5 CPU M 460, Processor Onboard : Intel@2.53 GHz, Standard Memory : 4 GB, Hard Drive Type : 450 GB Serial-ATA, Interface Provided : 3X USB 2.0,VGA,HDMI,LAN,Audio, Web-Camera
37	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2011	Pembeli an	1.450,00	Printer Canon Pixma iP2770 Inktube/Inpus Warna Hitam
38	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2011	Pembeli an	1.450,00	Printer Canon Pixma iP2770 Inktube/Inpus Warna Hitam
39	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2011	Pembeli an	1.450,00	Printer Canon Pixma iP2770 Inktube/ Inpus Warna Hitam Kondisi Kurang Baik
40	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2011	Pembeli an	2.900,00	Printer Canon Pixma iP2770 Inktube/Inpus Warna Hitam
41	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2011	Pembeli an	7.300,00	Printer Epson Ribbon LQ-2190 Warna Abu- abu
42	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2011	Hibah	4.000,00	Printer HP Merk "Laser Jet 1160" 1 (Satu) Buah Hiba dari PT.Medco E & P
1	1.3.2.06.001.002.003	Camera Electronic	2012	Pembeli an	3.795,00	Kamera Digital Optical - Fuji Film
1	1.3.2.01.003.004.002	Portable Generating Set	2013	Pembelian	14.300,00	Mesin Generator Setting Merk HIGHLANDER KHG 9900E, Rated Output 5.5 KW, Rated AC Voltage 220 V, Rated AC Circuit 25A, Fuel Gasoline, Jumlah 1 (Satu) Buah
2	1.3.2.01.003.005.010	Pompa Air	2013	Pembeli an	1.980,00	Pengadaan Mesin Pompa Air Listrik Merk "SANYO" Daya Keluarahn 125 Watt, Arus Masukan 1,4 A, Tegangan 220V - 50Hz, Daya Hisap 9 Meter, Tinggi Aliran (Ht) Maks 27 M, Sebanyak 1 (Satu) Buah
3	1.3.2.02.001.001.003	Station Wagon	2013	Pembeli an	226.500,00	Kendaraan Dinas Roda Empat Merk Toyota Rush TRD Sportivo sebanyak 1 (Satu) Unit TA.2013
4	1.3.2.03.001.009.017	Bak Air	2013	Pembeli an	2.860,00	Profil Tank / Tangki Air Merk "PROFIL 77" dengan daya tampung 2200 Liter bahan HDPE Asli sebanyak 1 (Satu) Buah
5	1.3.2.05.001.001.002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	2013	Pembeli an	4.340,60	Pengadaan Mesin Ketik Manual Standar Olympia sebanyak 2 (Dua) Buah dengan harga @Rp. 2.170.300,-
6	1.3.2.05.001.002.003	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	2013	Pembeli an	7.763,00	Mesin Hitung Uang "Bill Counter" LD-26M Sebanyak 1 (Satu) Buah

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembelian	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
7	1.3.2.05.001.004.008	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	2013	Pembeli an	6.429,50	Pengadaan Brankas / Peti Uang Sebanyak 1 (Satu) Buah dengan harga @Rp.6.429.500
8	1.3.2.05.001.005.010	Alat Penghancur Kertas	2013	Pembeli an	9.972,60	Pengadaan Mesin Penghancur Kertas Merk SECURE Max.15 Shetts Sebanyak 3 (Tiga) Buah
9	1.3.2.05.001.005.088	Alat Kantor Lainnya	2013	Pembeli an	148.500,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan Panggung Besi Ukuran 12 x 8 Meter
10	1.3.2.05.002.001.027	Meja Makan Besi	2013	Pembeli an	3.025,00	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan Dinas Kecamatan Tarakan Timur berupa Meja Makan sebanyak 1 (Satu) Set
11	1.3.2.05.002.001.048	Sofa	2013	Pembeli an	4.400,00	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan Dinas Kecamatan Tarakan Timur berupa Sofa sebanyak 1 (Satu) Buah
12	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	2013	Pembeli an	2.475,00	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan Dinas Kecamatan Tarakan Timur berupa Lemari Pakaian sebanyak 1 (Satu) Buah
13	1.3.2.05.002.003.003	Mesin Pemotong Rumput	2013	Pembeli an	3.000,00	Mesin Pemotong Rumput Pengadaan Tahun Anggaran 2013 sebanyak 1 (Satu) Buah
14	1.3.2.05.002.004.001	Lemari Es	2013	Pembeli an	3.795,00	Penyediaan Pengadaan Lemari Es Rumah Dinas Kecamatan Tarakan Timur TA.2013 sebanyak 1(Satu) Buah
15	1.3.2.05.002.005.005	Rice Cooker (Alat Dapur)	2013	Pembeli an	3.300,00	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemanas Air untuk tempat kopi / teh Sebanyak 2 (Dua) Buah dengan Jumlah Harga Rp.3.300.000,- . Harga Perbuah Rp. 1.650.000,- TA.2013
16	1.3.2.05.002.006.002	Televisi	2013	Pembeli an	15.537,50	Belanja Modal Pengadaan Televisi Sebanyak 1 (Satu) Buah TA.2013
17	1.3.2.05.002.006.036	Tangga Aluminium	2013	Pembeli an	1.166,00	Pengadaan Tangga Alumunium Sebanyak 1 (Satu) Buah dengan harga @Rp. 1.166.000,-
18	1.3.2.05.003.001.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2013	Pembeli an	4.950,00	Pengadaan Meubeler Perlengkapan Kantor Berupa Meja Kerja 1 (Satu) Biro Sebanyak 3 (Tiga) Buah dengan Nilai Total Rp.4.950.000,-
19	1.3.2.05.003.003.006	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2013	Pembeli an	2.640,00	Pengadaan Meubeler Perlengkapan Kantor Berupa Kursi Kerja Putar Merk MALVIN Sebanyak 2 (Dua) Buah dengan Nilai Total Rp. 2.640.000,-
20	1.3.2.05.003.003.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2013	Pembeli an	3.280,50	Belanja Pengadaan Kursi Kerja Kantor Model Putar dengan Sandaran lengan warna hitam ukuran 1 (satu) biro sebanyak 4 (Empat) Buah dengan harga perbuah Rp.820.125,- TA.2013
21	1.3.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2013	Pembeli an	5.390,00	Lemari Penyimpanan Arsip Sebanyak 2 (Dua) Buah, dengan harga Rp.5.390.000
22	1.3.2.06.001.001.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2013	Pembeli an	2.200,00	Pengadaan UPS Merk "ICA" CP700 sebanyak 1 (Satu) Buah dengan harga @Rp. 2.200.000,-
23	1.3.2.06.001.002.126	Camera Digital	2013	Pembeli an	27.632,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera Digital DSLR Nikon D3100 18-55 Sebanyak 4 (Empat) Buah dengan jumlah harga Rp.27.632.000,-. Harga Perbuah Rp. 6.908.000,-
24	1.3.2.06.001.004.013	Mesin Jilid Besar	2013	Pembeli an	4.400,00	Wired Binding Mahine Ukuran 40 Lubang (Besar) sebanyak 1(Satu) Buah
25	1.3.2.06.001.004.013	Mesin Jilid Besar	2013	Pembeli an	11.410,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Jilid Sebanyak 1 (Satu) Buah TA.2013

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembelian	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
26	1.3.2.06.001.005.053	Alat Studio Pemetaan lainnya	2013	Pembeli an	4.922,50	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Pemetaan GPS Sebanyak 1 (Satu) Buah dengan Harga Rp. 4.922.500,- TA.2013
27	1.3.2.06.002.001.001	Telephone (PABX)	2013	Pembeli an	15.400,00	Belanja Modal Pengadaan Mesin Telepon PABX Merk "Panasonic" Sebanyak 1 (Satu) TA.2013 (Rusak Berat)
28	1.3.2.06.002.001.006	Handy Talky (HT)	2013	Pembeli an	30.492,00	Belanja Modal Pengadaan Radio HT Sebanyak 1 (Satu) Set , dengan harga Rp. 30.492.000,- TA. 2013
29	1.3.2.08.001.017.023	Video Printer	2013	Pembeli an	14.219,70	Pengadaan Printer Multimedia Merk HP Deskjet 7610 Sebanyak 3 (Tiga) buah dengan harga @Rp. 4.739.900,-
30	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2013	Pembeli an	7.975,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan KOMPUTER PC Kecamatan Tarakan Timur. Spesifikasi : BIOSTAR GROUP, System Model G41D3C, Processor : Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2180 @2.00 GHz (2 CPUs) - 2.0 GHz, 2048 RAM, DirectX 11, Intel (R) G4
31	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	2013	Pembeli an	15.199,80	Pengadaan Komputer PC/Flat Ukuran 23" sebanyak 1 (Satu) Buah dengan harga @Rp.15.199.800,-
32	1.3.2.10.001.002.002	Laptop	2013	Pembeli an	5.775,00	Penyediaan Peralataan dan Perlengkapan Kantor Pengadaan Laptop (Rusak Berat)
33	1.3.2.10.001.002.002	Laptop	2013	Pembeli an	21.742,60	Pengadaan Laptop Merk "Acer" ukuran 14" Ultrabook sebanyak 2 (Dua) Unit dengan harga @Rp.10.871.300,-
34	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2013	Pembeli an	1.485,00	Printer Multimedia Merk Canon PIXMA MP237 + Infus Ukuran Folio - A4 sebanyak 1 (Satu) Buah
35	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2013	Pembeli an	12.641,20	Pengadaan Printer Epson Dotmatic LQ 310 Sebanyak 2 (Dua) Buah dengan harga @Rp. 6.320.600
36	1.3.2.15.003.002.005	Tenda	2013	Pembeli an	142.653,00	Belanja Modal Pengadaan Tenda Panggung Kegiatan Kantor Kecamatan Tarakan Timur TA.2013
1	1.3.2.04.001.004.005	Lemari Penyimpan	2014	Pembeli an	3.000,00	Pengadaan Meubelair Lemari Kecamatan Tarakan Timur sebanyak 2 (Dua) Buah
2	1.3.2.05.001.005.088	Alat Kantor Lainnya	2014	Pembeli an	17.710,00	Tripod mek Victory = 3 Buah Kain Background Polos Warna Merah dan Biru = 2 Buah
3	1.3.2.05.002.001.035	Bangku Tunggu	2014	Pembeli an	3.566,20	Ambal / Karpas sebanyak 2 (Dua) buah harga per satuan Rp. 1.783.100,-
4	1.3.2.05.002.003.004	Mesin Cuci	2014	Pembeli an	2.948,00	Mesin Cuci Merk LG Sebanyak 1 (Satu) Buah
5	1.3.2.05.002.005.002	Kompas Gas (Alat Dapur)	2014	Pembeli an	1.925,00	Kompas Gas + Tabung Gas (Pertamina) 12 Kg + Selang Regulator Quantum sebanyak 1 (Satu) Set
6	1.3.2.05.002.006.038	Dispenser	2014	Pembeli an	1.950,00	Pengadaan Dispenser Miyako Sebanyak 1 (Satu) Unit
7	1.3.2.05.002.006.038	Dispenser	2014	Pembeli an	2.953,50	Dispenser Merk Sharp Galon Bawah Sebanyak 1(Satu) Buah
8	1.3.2.06.001.001.036	Microphone/Wire less MIC	2014	Pembeli an	1.185,00	Wireless Microphone UGX4 System Vocal Sebanyak 1 (Satu) Set terdiri dari 2 Mic dan 1 Receiver
9	1.3.2.06.001.001.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2014	Pembeli an	1.336,50	UPS Sebanyak 1 (Satu) Buah
10	1.3.2.06.001.001.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2014	Pembeli an	7.821,00	APC BR1500GI Line Interactive, UPS Pro 1500VA/856W, 230V, UPS with AVR, Single- Phase, Tower, Extended Runtime.

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembelian	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
11	1.3.2.06.001.001.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2014	Pembeli an	8.448,00	APC SUA1000i Line Interactive, UPS 1000VA/670W, 230V, Single-Phase, Tower, RS-232 Serial Port, USB, sebanyak = 1 (Satu) Unit
12	1.3.2.06.001.002.126	Camera Digital	2014	Pembeli an	20.460,00	Canon EOS 1100D, Lens 18-55 Sebanyak = 3 Unit Dengan harga keseluruhan Rp. 20.460.000,-
13	1.3.2.08.001.026.013	Drawing Equipment	2014	Pembeli an	2.640,00	Spesifikasi : Wacom Creative Intuos Pen & Touch Tablet Sebanyak 1 (Satu) Buah
14	1.3.2.10.001.001.008	Komputer Jaringan lainnya	2014	Pembeli an	56.100,00	HP Envy 23-d040D Touchsmart All-in-One Intel Core i5-3470S, 4GB, (1x4GB) DDR3, 1TB HDD, DVD+RW, VGA AMD Radeon HD 7650A, 2GB, Gbe NIC, Wifi, TV Tuner, Camera, 23" WXGA,Multitouch, Win8, 64- bit, Sebanyak 3(Tiga) Unit, dengan harga per unit Rp. 18.700.000
15	1.3.2.10.001.002.002	Laptop	2014	Pembeli an	21.736,00	Hp Envy TouchSmart- 15", J018TX Ultrabook- Silver, IntelCore i7- 4700MQ, 16GB DDR3,1TB HDD, Gbe NIC, Wifi, Bluetooth, VGA NVIDIA GeForce GT740M, 2GB, Camera, 15.6" HD, TouchScreen, Win8, 64-Bit. (Jumlahnya = 1 (Satu) Unit dengan harga Per Unit Rp. 21.736.00
16	1.3.2.10.001.002.002	Laptop	2014	Pembeli an	8.250,00	Spesifikasi : Dell INSP 3421, 14", 2GB, 1x2GB, 1600Mhz, DDR3, HDD 320GB, Sebanyak 1 (Satu) Buah
17	1.3.2.10.002.001.012	Hard Disk	2014	Pembeli an	5.940,00	Western Digital My Passport Ultra, 2 TB, USB 3.0 Windows/Mac Sebanyak = 2 (Dua) Buah dengan harga keseluruhan Rp.5.940.000,-
18	1.3.2.10.002.001.012	Hard Disk	2014	Pembeli an	1.435,50	Harddisk Drive Portable Merk "Western Digital" 1 TB sebayak 1 (Satu) Buah
19	1.3.2.10.002.004.001	Server	2014	Pembeli an	42.240,00	Server IBM System X3650M4-A2A, Xeon E5-2620, 8GB DDR3- 1333 ECC RDIMM, VGA Matrox G200e, 4x Gb3 NIC, Rackmount 2UCase, sebanyak 1(Satu) Buah
1	1.3.2.05.001.005.012	Mesin Absensi	2016	Pembeli an	12.496,00	Mesin Absen Sidik Jari/Face Recognition
1	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2017	Pembeli an	29.107,00	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Berupa Gordyn
1	1.3.2.05.001.005.012	Mesin Absensi	2021	Pembeli an	6.000,00	SP2D 06601/SP2D/2021 tgl 17 Des 2021 Penyerahan BAST tgl 03 Des 2021
2	1.3.2.10.001.002.002	Laptop	2021	Pembeli an	15.000,00	Pem. Laptop 13 Unit Bid Aset No.06432/ SP2D/2021 (Mutasi Dari BPKPAD)
1	1.3.2.10.002.002.010	Computer Compatible	2022	Pembeli an	15.000,00	No. SP2D: 00542/SP2D/2022 Tanggal 29 Maret 2022
2	1.3.2.10.002.005.001	Peralatan Komputer lainnya	2022	Pembeli an	3.000,00	No. SP2D: 00542/SP2D/2022 Tanggal 29 Maret 2022
1	1.3.2.04.001.004.004	Rak-Rak Penyimpan	1983	Pembeli an	250,00	Perbaikan Tahun 2002 (Ruang Kasi.Pemerintahan)
2	1.3.2.04.001.004.004	Rak-Rak Penyimpan	1983	Pembeli an	250,00	Perbaikan Th.2002 (Ruang Simduk)
3	1.3.2.04.001.004.004	Rak-Rak Penyimpan	1983	Pembeli an	250,00	Perbaikan Th.2002
4	1.3.2.04.001.004.004	Rak-Rak Penyimpan	1983	Pembeli an	250,00	Perbaikan Th.2002-Ruang pemerintahan
5	1.3.2.05.002.006.028	Lambang Garuda Pancasila	1983	Pembeli an	500,00	1 Buah
1	1.3.2.05.001.004.008	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	1986	Pembeli an	250,00	Ruang Bendahara
1	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	1999	Pembeli an	700,00	1 Buah (Ruang Camat)
2	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	1999	Pembeli an	450,00	1 Buah

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembelian	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
3	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	1999	Pembeli an	250,00	
4	1.3.2.05.002.001.036	Kursi Lipat	1999	Pembeli an	210,00	3 Buah
5	1.3.2.05.002.001.036	Kursi Lipat	1999	Pembeli an	210,00	2 Buah
6	1.3.2.08.003.002.008	Papan Berpaku	1999	Pembeli an	100,00	1 Buah (Telah dihapus) Papan data
1	1.3.2.04.001.004.004	Rak-Rak Penyimpan	2001	Pembeli an	300,00	Lemari TV
2	1.3.2.05.001.005.078	Papan Tulis	2001	Pembeli an	300,00	1 Buah (Ruang Pertemuan)
3	1.3.2.05.002.001.036	Kursi Lipat	2001	Pembeli an	210,00	2 Buah
4	1.3.2.05.002.001.036	Kursi Lipat	2001	Pembeli an	210,00	1 Buah
5	1.3.2.05.002.001.036	Kursi Lipat	2001	Pembeli an	1.050,00	Kursi Lipat Merk "Chitose"
6	1.3.2.05.002.001.036	Kursi Lipat	2001	Pembeli an	420,00	
7	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2001	Pembeli an	500,00	Korden (4 Buah)
8	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2001	Pembeli an	150,00	Korden (2 lembar)
9	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2001	Pembeli an	150,00	Korden (2 lembar)
10	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2001	Pembeli an	300,00	4 lembar
11	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2001	Pembeli an	450,00	Korden 10 Lembar
12	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2001	Pembeli an	500,00	Korden (4 Lembar)
13	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2001	Pembeli an	300,00	Korden (4 Lembar) Ruang Tunggu
14	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2001	Pembeli an	150,00	Korden (4 Buah)
15	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2001	Pembeli an	500,00	Korden (4 Lembar)
16	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2001	Pembelian	850,00	Profil Tank 1100 L (1 buah)
17	1.3.2.08.003.002.043	Model Jam Bentuk Dasar	2001	Pembelian	250,00	Telah Dihapus (1 Buah)
1	1.3.2.05.002.004.006	Kipas Angin	2002	Pembeli an	400,00	1 Buah
2	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2002	Pembeli an	750,00	Kompur Hock (2 Buah)
1	1.3.2.03.001.009.013	Tabung NH3	2003	Hibah	250,00	Dry Chemical Fire Extinguisher AT-6 Kg P
2	1.3.2.03.001.009.013	Tabung NH3	2003	Hibah	250,00	1 Buah
3	1.3.2.05.001.004.002	Lemari Kayu	2003	Pinjam	250,00	Milik LPM
4	1.3.2.05.001.005.077	Papan Pengumuman	2003	Pembeli an	250,00	
5	1.3.2.05.002.001.008	Meja Rapat	2003	Pembeli an	650,00	10 Buah (Ruang Pertemuan)
6	1.3.2.05.002.001.030	Kursi Rapat	2003	Pembeli an	210,00	1 Buah
7	1.3.2.05.002.001.030	Kursi Rapat	2003	Pembeli an	210,00	75 Buah
8	1.3.2.05.002.001.030	Kursi Rapat	2003	Pembeli an	1.260,00	Kursi Rapat Merk " Futura " 6 (Enam) Buah
9	1.3.2.05.002.001.036	Kursi Lipat	2003	Pembeli an	210,00	3 Buah
10	1.3.2.05.002.004.006	Kipas Angin	2003	Pembeli an	500,00	Kipas Angin Baling - Baling (1 Buah)
11	1.3.2.05.002.004.006	Kipas Angin	2003	Pembeli an	550,00	kipas angin baling- baling (1Buah)
12	1.3.2.08.001.056.081	Meja Kerja	2003	Pembeli an	1.000,00	1 Buah
13	1.3.2.08.001.056.081	Meja Kerja	2003	Pembeli an	500,00	3 Buah
14	1.3.2.08.003.002.043	Model Jam Bentuk Dasar	2003	Pembeli an	100,00	1 Buah Jam Dinding (Telah dihapus)
15	1.3.2.08.003.012.003	Alat Peraga PMP Lain-lain Dst-.	2003	Pembeli an	94,00	1 Buah
16	1.3.2.08.003.012.003	Alat Peraga PMP Lain-lain Dst-.	2003	Pembeli an	94,00	1 Buah
1	1.3.2.05.002.001.039	Meja Komputer	2004	Hibah	250,00	3 Buah (Dari Capil)

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembelian	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
2	1.3.2.06.002.001.003	Pesawat Telephone	2004	Pembelian	300,00	1Buah (Rumah Dinas Camat)
3	1.3.2.08.003.002.043	Model Jam Bentuk Dasar	2004	Pembeli an	100,00	Jam Dinding (1 Buah) (Ruang Camat)
4	1.3.2.08.003.002.043	Model Jam Bentuk Dasar	2004	Pembeli an	75,00	Jam dinding (1 Buah)
5	1.3.2.08.003.012.003	ALat Peraga PMP Lain-lain Dst-	2004	Pembeli an	93,00	
6	1.3.2.08.003.012.003	ALat Peraga PMP Lain-lain Dst-	2004	Pembeli an	186,00	1 Buah
7	1.3.2.08.003.012.003	ALat Peraga PMP Lain-lain Dst-	2004	Pembeli an	93,00	
1	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	2005	Pembeli an	450,00	2 Buah
2	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	2005	Pembeli an	450,00	1 Buah
3	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	2005	Pembeli an	450,00	1 buah
4	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	2005	Pembeli an	450,00	1 Buah
5	1.3.2.05.002.001.033	Kursi Biasa	2005	Pembeli an	210,00	1 Buah
6	1.3.2.05.002.006.028	Lambang Garuda Pancasila	2005	Pembeli an	250,00	1 Buah
7	1.3.2.05.002.006.028	Lambang Garuda Pancasila	2005	Pembeli an	250,00	
8	1.3.2.05.002.006.032	Tiang Bendera	2005	Pembeli an	300,00	tiang bendera duduk 1buah
9	1.3.2.06.002.001.003	Pesawat Telephone	2005	Pembeli an	373,00	1 Buah
10	1.3.2.08.001.056.081	Meja Kerja	2005	Pembeli an	1.000,00	1 Buah
11	1.3.2.08.001.056.081	Meja Kerja	2005	Pembeli an	500,00	1 Buah
12	1.3.2.08.001.056.081	Meja Kerja	2005	Pembeli an	500,00	1 Buah
13	1.3.2.08.003.002.043	Model Jam Bentuk Dasar	2005	Pembeli an	100,00	Jam Dinding (1 Buah)
14	1.3.2.08.003.002.043	Model Jam Bentuk Dasar	2005	Hibah	250,00	Hibah dri KPUD (1 Buah) Jam Dinding
15	1.3.2.08.003.002.043	Model Jam Bentuk Dasar	2005	Pembeli an	100,00	Jam Dinding 1 Buah
1	1.3.2.05.001.005.009	Peta	2006	Hibah	250,00	Peta Wilayah Kota Tarakan
2	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2006	Pembeli an	400,00	1 Buah
3	1.3.2.08.001.056.081	Meja Kerja	2006	Pembeli an	500,00	1 Buah
4	1.3.2.08.003.005.067	Pot Besar	2006	Pembeli an	150,00	9 Buah
1	1.3.2.05.001.002.003	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	2008	Pembeli an	396,00	1 Buah
2	1.3.2.05.001.002.003	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	2008	Pembeli an	198,00	1 Buah (Ruang Pelayanan)
3	1.3.2.05.001.002.003	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	2008	Pembeli an	198,00	1 Buah (Raung Kesra)
4	1.3.2.05.001.002.003	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	2008	Pembeli an	198,00	1 Buah (Ruang Trantib)
5	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	2008	Pembeli an	110,00	Kaca Meja (3 Buah)
6	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	2008	Pembeli an	110,00	Kaca Meja (1 Buah)
7	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	2008	Pembelian	110,00	Kaca Meja (1 Buah)
8	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	2008	Pembelian	110,00	Kaca Meja (2 Buah)
9	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	2008	Pembeli an	220,00	Kaca Meja (1 Buah)
10	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	2008	Pembeli an	110,00	Kaca Meja
11	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	2008	Pembeli an	220,00	Kaca riben untuk meja kerja
12	1.3.2.05.002.001.050	Meubeleur lainnya	2008	Pembeli an	330,00	Kaca riben untuk meja kerja (Ruang Bendahara)
13	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2008	Pembeli an	186,90	Piring Makan (2 Lusin) Ruang Dapur
14	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2008	Pembeli an	93,45	Sendok Makan (Ruang Dapur)
15	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2008	Pembelian	356,00	Talam (Ruang Dapu)
16	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2008	Pembelian	178,00	Panci (2 Buah) Ruang Dapur

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Tahun Pembelian	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
17	1.3.2.05.002.006.077	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2008	Pembeli an	250,00	Wajan (Ruang Dapur)
18	1.3.2.06.001.002.057	Slide Projector	2008	Pembeli an	250,00	
19	1.3.2.08.003.004.066	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa lanjutan lainnya (dst)	2008	Pembeli an	186,90	2 (Lusin)
20	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2008	Pembeli an	800,00	1 Buah
1	1.3.2.05.002.001.008	Meja Rapat	2009	Pembeli an	16.690,92	Meja Rapat Sebanyak 30 (Tiga Puluh) Buah, Harga Per Meja Rp.556.364,-
2	1.3.2.05.002.001.030	Kursi Rapat	2009	Pembeli an	24.500,00	Kursi Rapat Sebanyak 50 (Lima Puluh) Buah, Harga Per Kursi Rp.490.000,- (Rp. 24.545.450,-)
3	1.3.2.05.002.004.006	Kipas Angin	2009	Pembeli an	450,00	
1	1.3.2.05.001.002.003	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	2010	Pembeli an	280,00	
2	1.3.2.05.001.002.003	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	2010	Pembeli an	840,00	(Rusak Berat)
3	1.3.2.05.001.002.003	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	2010	Pembeli an	560,00	
4	1.3.2.05.003.001.009	Meja Kerja Pejabat lain-lain	2010	Pembeli an	5.950,00	Meja Kerja Staf Warna Kuning
5	1.3.2.08.003.002.043	Model Jam Bentuk Dasar	2010	Pembeli an	300,00	
6	1.3.2.08.003.002.043	Model Jam Bentuk Dasar	2010	Pembeli an	300,00	Jam Dinding (Trantibum)
7	1.3.2.08.003.002.043	Model Jam Bentuk Dasar	2010	Pembeli an	600,00	
1	1.3.2.05.002.001.031	Kursi Tamu	2011	Pembeli an	1.200,00	Kursi Tamu Tunggal Pelayanan Warna Hitam
2	1.3.2.05.002.001.032	Kursi Putar	2011	Pembeli an	1.180,00	Kursi Kerja Putar Petugas Pelayanan Merk "Malvin" Warna Hitam
3	1.3.2.05.002.004.006	Kipas Angin	2011	Pembeli an	907,50	2 Kipas Angin Decorative Model Gantung Merk "UCHIDA" & 1 Kipas Angin Model Gantung Merk PANASONIC
4	1.3.2.05.002.004.006	Kipas Angin	2011	Pembeli an	1.815,00	Kipas Angin Decorative Model Gantung Merk "UCHIDA"
5	1.3.2.10.002.003.004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2011	Pembeli an	750,00	Alat Support Scanner Mikrotek
1	1.3.2.05.002.006.015	Microphone Floor Stand	2012	Pembeli an	530,00	Microphone Stand MS601B Merk Hercules
2	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2012	Pembeli an	990,00	Printer Canon PIXMA iP 2770 + Infuss 4 Colour
1	1.3.2.05.002.005.002	Kompore Gas (Alat Dapur)	2013	Pembeli an	973,00	Belanja Modal Pengadaan Kompore Gas Sebanyak 1 (Satu) Buah, TA. 2013
2	1.3.2.05.002.005.009	Tabung Gas	2013	Pembeli an	979,00	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas Sebanyak 1 (Satu) Buah, TA. 2013

Sumber: Simda Barang Kec. Tarakan Timur Tahun 2024

Tabel 2.9
Gedung dan Bangunan

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Status Tanah	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung	620	Jl. Sei. Mahakam RT. 10 Kel. Kampung Empat	Tanah Milik Pemda	3.195.451,89	2013 + Rp 203.202.000
Jumlah Harga					3.195.451,89	

2.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Akhir Tahun 2024 dan awal 2025 merupakan tahun Pertama RPJMD Pemerintah Kota Tarakan. Kinerja kecamatan dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, faktor kunci keberhasilan yang turut mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Tersedianya mekanisme koordinasi yang sesuai dengan sistem kerja yang ada.
2. Tersedianya aparatur yang berkualitas
3. Tersedianya sarana transportasi
4. Adanya kesadaran terhadap pentingnya ketertiban
5. Tersedianya perangkat pelayanan administrasi
6. Tersedianya data umum yang akurat

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

Akuntabilitas tiap instansi merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi public atau OPD yang terakumulasi pada pencapaian akuntabilitas Kota, Kabupaten atau provinsi. Pencapaian akuntabilitas merupakan tanggung jawab kepala OPD yang di dalamnya terdapat komponen individu-individu yang turut mendukung dalam pencapaian akuntabilitas suatu instansi

Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 900.1317 tahun 2023 mempengaruhi indikator sasaran dan akuntabilitas kinerja kecamatan Tarakan Timur. Pengukuran akuntabilitas di Kecamatan Tarakan Timurdapat dilihat dari pengukuran indikator kinerja utama yang tertuang dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang ada di Kecamatan. Berikut ini adalah tabel tingkat Capaian IKU pada Kecamatan Tarakan Timur:

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian kinerja indikator pada tahun 2024 menunjukkan pencapaian yang baik. Nilai predikat Sakip dengan capaian 74,00/BB. Ini menunjukkan bahwa dokumen sakip yang telah di periksa Inspektorat mendapat Nilai yang baik dan mencapai lebih dari target yang sudah di tetapkan. Nilai Sakip tahun 2024 masih memakai nilai Tahun 2023 hal ini dikarena belum adanya penilain Sakip di tahun 2024. Adapun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan juga mencapai lebih dari target yaitu 93,20 hal ini dikarenakan banyaknya warga yang datang ke Kecamatan dan mendapatkan pelayanan yang maksimal. Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dengan capain kinerja sesuai target yaitu 100% hal ini di karenakan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebanding dengan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif. Indikator Persentase Kegiatan Keagamaan mencapai target yang telah di tetapkan yaitu 100% hal ini di karenakan Kegiatan keagamaan yang di laksanakan sebanding dengan kegiatan keagamaan yang ada di Kecamatan Tarakan Timur. Indikator Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat mencapai target 100%. Hal ini karena jumlah penataan/pemeliharaan Kawasan public sebanding dengan jumlah Kawasan public di Kecamatan Tarakan Timur. Indikator persentase Fasilitasi penyelesaian masalah kerukunan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan juga mencapai target capaian kinerja yaitu 100% hal ini dikarenakan jumlah aduan yang di fasilitasi sebanding dengan jumlah aduan yang diterima Kecamatan Tarakan Timur.

Secara umum yang mempengaruhi keberhasilan Capain Kinerja Tahun 2024 adalah adanya ketersediaan Sumber Daya (uang, tenaga, waktu dan teknologi), motivasi/komitmen Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), kepemimpinan yang baik dan efektif dan lingkungan kerja yang kondusif. Indikator yang baik harus spesifik, terukur, bisa dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu yang jelas.

2.3 Anggaran Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Pemerintahan Kecamatan Tarakan Timur telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra Kecamatan Tarakan 2019-2024. Sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Perubahan (renstra) Kecamatan Tarakan tahun 2025-2029. Uraian lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Capaian kinerja pada Tahun 2024 secara umum menunjukkan hasil yang baik. Semua program kegiatan hampir mencapai target. Hal ini terlihat dari Program Penunjang Umum Pemerintahan Daerah/Kota dengan capain 98,3 %. Ini dikarenakan semua kegiatan dan sub kegiatan pada program tersebut telah di laksanakan. Untuk program Penyelenggaraan dan pelayanan public dengan capaian 80,6. Hal ini dikarenakan tidak setiap tahun program ini terdapat anggarannya. Untuk program pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan persentase realisasi anggaran 99%, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban dan sehingga bila di dibandingkan dengan realisasi kinerja kelisemua di tersebut dengan capaian persentase anggaran 97,3%.

2.5. Kelompok Sasaran layanan

Mitra Kecamatan Tarakan Timur dalam memberikan pelayanan merupakan kelompok penerima kemanfaatan program dan kegiatan secara langsung maupun tidak langsung guna meningkatkan kapasitasnya. Kelompok sasaran ini dalam renstra kecamatan Tarakan Timursecara umum di kelompokkan menjadi Polsek, Koramil dan Linmas, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Inspektorat, Bappeda, Puskesmas Gunung Lingkas dan Sebengkok, Satpol PP,Kantor Urusan Agama,RT, RW dan Dasawisma, Aparat Penegak Hukum, Masyarakat Umum

2.6 Permasalahan dan Isu Strategis

Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Untuk hal tersebut di dibutuhkan sebuah analisis yang komperhensif untuk memperoleh hasil yang optimal. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan.

2.6.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tarakan Timur

Kecamatan Tarakan Timurtelah melakukan evaluasi terhadap Renstra Kecamatan Tarakan TimurTahun 2019-2024. Berdasarkan evaluasi, ekspektasi berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

TB-35

Analisis Pohon Masalah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Pelayanan Publik Kecamatan	Belum Tingginya Pembangunan di Kecamatan	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Musrenbang
		Belum Optimalnya Pemberdayaan di Kelurahan
		Belum Optimalnya Penyelenggaraan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan
		Belum optimalnya fasilitasi pelaku usaha kawasan kuliner
	Belum Optimalnya Kualitas Penyelenggaran Kecamatan	Belum Optimalnya Pelayanan Administratif Masyarakat
		Belum Optimalnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Belum Optimalnya Penyelenggaraan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Belum Optimalnya Pelaksanaan Mediasi dan Fasilitasi Konflik
		Belum Optimalnya Penyelenggaraan MTQ wilayah
	Belum tingginya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Belum Optimalnya Penguatan Internal Akuntabilitas Kinerja
		Belum Optimalnya Layanan Kesekretariatan

2.7. Penentuan Isu Strategis

Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Berikut Isu strategis yang ada di Kecamatan Tarakan Timur:

TABEL 2.1
ISU STRATEGIS

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Kelembagaan masyarakat (RT, PKK, Karang Taruna, LPM,) yang dapat dilibatkan dalam pelayanan publik	Belum Tingginya Pembangunan di Kecamatan	Perlunya peningkatan akses informasi dan layanan kesehatan masyarakat	Pelayanan berbasis teknologi AI	Pembangunan Sekolah rakyat,	peningkatan partisipasi sekolah di wilayah kecamatan (untuk pemberian bantuan pendidikan)	Terwujudnya Pelayanan Publik Kecamatan yang Berkualitas
Babinsa, Babinkamtibmas, Balakar yang dapat dilibatkan dalam ketentraman dan ketertiban umum wilayah	Belum Optimalnya Kualitas Penyelenggaraan layanan kecamatan	Perlunya peningkatan kualitas hidup masyarakat pemukiman pesisir	Transformasi digital dalam layanan publik	Percepatan SPBE dan pelayanan publik berbasis elektronik	Penerapan aplikasi layanan kecamatan berbasis lokal (contoh: layanan antrean, e-dokumen)	
	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Belum optimalnya upaya pembangunan berketahanan iklim dan tangguh bencana berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Tuntutan transparansi dan akuntabilitas global	Peningkatan kualitas SAKIP dan reformasi birokrasi	Peningkatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas perangkat kecamatan	
		Belum terpenuhi dan meratanya infrastruktur air bersih dan sanitasi secara menyeluruh		Pembentukan koperasi merah putih	Peningkatan pemeliharaan kawasan kuliner	
		Belum optimalnya peningkatan kesadaran dan pengelolaan sampah berkelanjutan		Satu data untuk regsosek (registrasi sosial ekonomi)		
		Penguatan penegakan hukum dan perlindungan masyarakat.				

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tarakan Timur

Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Kecamatan Tarakan Timur Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur.

Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai Kecamatan Tarakan Timur dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : *Terwujudnya pelayanan publik Kecamatan yang berkualitas*. Tujuan tersebut selaras dengan Visi Kota Tarakan Yaitu *Terwujudnya Tarakan Sebagai Kota Cerdas Yang Bertumpu Pada Sektor Jasa, Perdagangan, Perikanan Kelautan dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Maju menuju Masyarakat Sejahtera* dan Misi ke- 4 RPJMD Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2025-2029, yaitu: *“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Adaptif dan Responsif serta menjaga Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman Kota”*.

Sasaran

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Tarakan Timur menetapkan sasaran strategis *“Meningkatnya Pembangunan Kecamatan, Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kecamatan dan Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan”*. Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Tarakan Timur tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya.

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal , diantaranya Visi dan misi kepala daerah, Tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan, dan Program prioritas. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Tarakan Timur yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

Penyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Tarakan Timur beserta indikator kinerjanya di sajikan dalam tabel sebagai berikut .:

Tabel 3.3
Tujuan Dan Sasaran Renstra
Kecamatan Tarakan Timur Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Tarakan Timur											
- Meningkatnya kualitas digitalisasi pelayanan publik	Terwujudnya pelayanan publik Kecamatan yang berkualitas		Indeks kepuasan masyarakat (Indeks)	92	93	93,03	93,05	93,07	93,07	93,08	
		Meningkatnya pembangunan kecamatan	Persentase Usulan Pembangunan yang Terealisasi (%)	27,78	27,78	27,78	27,80	27,85	27,90	27,95	
		Meningkatnya kualitaas penyelenggaraan kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan (%)	89,31	89,31	89,50	89,50	89,70	89,70	89,95	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP (Angka)	74,7	74,75	74,79	74,80	74,84	74,87	74,90	

3.2. Strategi

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kecamatan Tarakan Timur, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi secara efektif dan berkelanjutan.

Berikut tahapan Strategi Renstra Kecamatan Tarakan Timur:

Tabel 3.4
Penahapan Renstra Kecamatan Tarakan Timur

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan Pelayanan Publik Kecamatan	Pemantapan Pelayanan Publik Kecamatan	Peningkatan Pelayanan Publik Kecamatan	Percepatan Pelayanan Publik Kecamatan	Terciptanya keamanan dan ketertiban

Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. . Dalam konteks Pemerintah Kecamatan Tarakan Timur, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan

3.3 Arah Kebijakan

Kebijakan Adalah pedoman yang wajib di patuhi dalam melakukan Tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi Adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Arah Kebijakan

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Tata Kelola Pemerintahan	Penyelenggaraan Musrenbang	
2	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan (Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah)	Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Pemerintahan	Pemberdayaan di Kelurahan	
3	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di	Peningkatan Responsivitas Terhadap Isu Sosial	Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
	Kelurahan. (Permendagri Nomor 130 Tahun 2018)	dan Keamanan		
4	Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa)	Pengelolaan Ketertiban Umum dan Penegakan Hukum	Pelayanan Administratif Masyarakat	
5	Pelayanan Administratif Masyarakat (Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang PATEN; PermenPAN-RB No. 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan)		Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
6	Fasilitasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Permendagri No. 26 Tahun 2020 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum; Permendagri No. 84 Tahun 2014 tentang Organisasi Kecamatan)		Penyelenggaraan MTQ Wilayah	
7	Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan (SK Walikota Tarakan tentang Penyelenggaraan MTQ Kecamatan)		Pelaksanaan Mediasi dan Fasilitasi Konflik Sosial	
8	Penanganan Konflik Sosial dan Mediasi Warga (Permendagri No. 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah)			

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategis, maka langkah operasional harus dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Tarakan Timur. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sedangkan sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas dari suatu kegiatan. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan baik kualitatif maupun kuantitatif yang dapat menggambarkan capaian kinerja.

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Tarakan Timur merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Tarakan Timur juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Tarakan Timurserta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Tarakan Timur dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Tabel 4.2
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Tarakan Timur

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terwujudnya pelayanan publik Kecamatan yang berkualitas				IKM		
		1. Meningkatnya pembangunan kecamatan			Persentase usulan pembangunan yang terealisasi		
		1. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan	1. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan		1. Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam Musrenbang di kecamatan 2. Persentase kelembagaan masyarakat yang aktif	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terfasilitasinya musrenbang		7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
				Terlaksananya pemberdayaan di kelurahan		7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
				Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun/ dikembangkan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
				Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	
				Terfasilitasinya lembaga kemasyarakatan		7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan	7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
				Terfasilitasinya pelaku usaha kawasan kuliner		7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
				Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.01.03.2.03.0004 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
		2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kecamatan	2. meningkatnya layanan Kecamatan		Capaian kinerja penyelenggaraan kecamatan		
					Persentase layanan kecamatan terselesaikan tepat waktu sesuai SOP	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya pelayanan administratif masyarakat		7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Nonperizinan	Non Perizinan	Nonperizinan	
			3. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum		Persentase aduan yang terselesaikan	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiba		7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Terfasilitasinya ketentraman dan ketertiban umum		7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			4. Terfasilitasinya konflik pertanahan		Persentase aduan pertanahan yang difasilitasi	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terlaksananya mediasi dan fasilitasi		7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan Konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
			5. Meningkatnya kualitas kafilah MTQ		Persentase kafilah yang mengikuti MTQ di tingkat kota	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terselenggaranya MTQ wilayah		7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
		3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Nilai SAKIP KECAMATAN TARAKAN TIMUR	Nilai SAKIP merupakan nilai evaluasi atas implementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah) meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja oleh evaluator SAKIP (APIP Inspektorat)	
				6. Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	Presentase LHE Akip yang ditindaklanjuti	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Capaian Kinerja Organisasi		
				Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu		7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP		7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			7. Meningkatnya layanan kesekretariatan	Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya layanan administrasi kepegawaian		7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	7.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Tersedianya layanan administrasi umum		7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terkelolanya data Barang Milik Daerah dalam aplikasi		7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya layanan jasa penunjang		7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah		7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)		90,02	1.225.214.630,00	90,03	1.225.214.630,00	90,05	1.225.214.630,00	90,06	1.225.214.630,00	90,07	1.225.214.630,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Tarakan Timur	
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				97.750.000,00		97.750.000,00		97.750.000,00		97.750.000,00		97.750.000,00		
Tersedianya layanan administrasi kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	117	97.750.000,00	117	97.750.000,00	117	97.750.000,00	117	97.750.000,00	117	97.750.000,00		
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	2		2		2		2		2			
7.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00		
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				87.750.000,00		87.750.000,00		87.750.000,00		87.750.000,00		87.750.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	117	87.750.000,00	117	87.750.000,00	117	87.750.000,00	117	87.750.000,00	117	87.750.000,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				142.500.000,00		142.500.000,00		142.500.000,00		142.500.000,00		142.500.000,00		
Tersedianya layanan administrasi umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5	5	142.500.000,00	5	142.500.000,00	5	142.500.000,00	5	142.500.000,00	5	142.500.000,00		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	8	12		12		12		12		12			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8	8		8		8		8		8			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	8	5.000.000,00	8	5.000.000,00	8	5.000.000,00	8	5.000.000,00	8	5.000.000,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8	8	60.000.000,00	8	60.000.000,00	8	60.000.000,00	8	60.000.000,00	8	60.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	8	8	22.500.000,00	8	22.500.000,00	8	22.500.000,00	8	22.500.000,00	8	22.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	8	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5	5	35.000.000,00	5	35.000.000,00	5	35.000.000,00	5	35.000.000,00	5	35.000.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				210.626.630,00		210.626.630,00		210.626.630,00		210.626.630,00		210.626.630,00		
Terkelolanya data Barang Milik Daerah dalam aplikasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4	7	210.626.630,00	7	210.626.630,00	7	210.626.630,00	7	210.626.630,00	7	210.626.630,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	15		15		15		15		15			
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4	7	10.000.000,00	7	10.000.000,00	7	10.000.000,00	7	10.000.000,00	7	10.000.000,00		
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.626.630,00		200.626.630,00		200.626.630,00		200.626.630,00		200.626.630,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	15	200.626.630,00	15	200.626.630,00	15	200.626.630,00	15	200.626.630,00	15	200.626.630,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				431.338.000,00		431.338.000,00		431.338.000,00		431.338.000,00		431.338.000,00		
Tersedianya layanan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3	3	431.338.000,00	3	431.338.000,00	3	431.338.000,00	3	431.338.000,00	3	431.338.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.150.000,00		3.150.000,00		3.150.000,00		3.150.000,00		3.150.000,00		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				280.900.000,00		280.900.000,00		280.900.000,00		280.900.000,00		280.900.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	280.900.000,00	12	280.900.000,00	12	280.900.000,00	12	280.900.000,00	12	280.900.000,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				147.288.000,00		147.288.000,00		147.288.000,00		147.288.000,00		147.288.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	147.288.000,00	12	147.288.000,00	12	147.288.000,00	12	147.288.000,00	12	147.288.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				343.000.000,00		343.000.000,00		343.000.000,00		343.000.000,00		343.000.000,00		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	36	30	343.000.000,00	30	343.000.000,00	30	343.000.000,00	30	343.000.000,00	30	343.000.000,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	70	61		61		61		61		61			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	13	17		17		17		17		17			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2		2		2		2		2			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	70	61	20.000.000,00	61	20.000.000,00	61	20.000.000,00	61	20.000.000,00	61	20.000.000,00		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	13	17	45.000.000,00	17	45.000.000,00	17	45.000.000,00	17	45.000.000,00	17	45.000.000,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				28.000.000,00		28.000.000,00		28.000.000,00		28.000.000,00		28.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	36	30	28.000.000,00	30	28.000.000,00	30	28.000.000,00	30	28.000.000,00	30	28.000.000,00		
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	14.739.209.644,0 0	100	14.739.209.644,0 0	100	14.739.209.644,0 0	100	14.739.209.644,0 0	100	14.739.209.644,0 0	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Tarakan Timur	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		
Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	9.000.000,00	2	9.000.000,00	2	9.000.000,00	2	9.000.000,00	3	9.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realsasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	3	2.000.000,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14.730.209.644,00		14.730.209.644,00		14.730.209.644,00		14.730.209.644,00		14.730.209.644,00		
Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	96	117	14.730.209.644,00	117	14.730.209.644,00	117	14.730.209.644,00	117	14.730.209.644,00	117	14.730.209.644,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	96	117	14.562.368.644,00	117	14.562.368.644,00	117	14.562.368.644,00	117	14.562.368.644,00	117	14.562.368.644,00		
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				167.841.000,00		167.841.000,00		167.841.000,00		167.841.000,00		167.841.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	167.841.000,00	12	167.841.000,00	12	167.841.000,00	12	167.841.000,00	12	167.841.000,00		
Meningkatnya layanan kecamatan	Persentase Layanan Kecamatan Terseslesaikan Tepat Waktu sesuai SOP (%)		100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Tarakan Timur	
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya pelayanan administratif masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam musrenbang di Kecamatan (%)	94	95	4.661.165.020,00	95	4.661.165.020,00	95	4.661.165.020,00	95	4.661.165.020,00	95	4.661.165.020,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Tarakan Timur	
	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				2.181.365.020,00		2.181.365.020,00		2.181.365.020,00		2.181.365.020,00		2.181.365.020,00		
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Aduan yang Terselesaikan (%)	100	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Tarakan Timur	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terfasilitasinya ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				320.000.000,00		320.000.000,00		320.000.000,00		320.000.000,00		320.000.000,00		
Terselenggaranya MTQ wilayah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	218	218	300.000.000,00	218	300.000.000,00	218	300.000.000,00	218	300.000.000,00	218	300.000.000,00		
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Meningkatnya kualitas kafilah MTQ	Persentase Kafilah yang Mengikuti MTQ di Tingkat Kota (%)	21,1	21,5	300.000.000,00	21,6	300.000.000,00	21,7	300.000.000,00	21,8	300.000.000,00	22	300.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Tarakan Timur	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				320.000.000,00		320.000.000,00		320.000.000,00		320.000.000,00		320.000.000,00		
Terselenggaranya MTQ wilayah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	218	218	300.000.000,00	218	300.000.000,00	218	300.000.000,00	218	300.000.000,00	218	300.000.000,00		
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	218	218	300.000.000,00	218	300.000.000,00	218	300.000.000,00	218	300.000.000,00	218	300.000.000,00		
Terfasilitasinya konflik pertanahan	Persentase Aduan Pertanahan yang Difasilitasi (%)	100	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Tarakan Timur	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				320.000.000,00		320.000.000,00		320.000.000,00		320.000.000,00		320.000.000,00		
Terlaksananya mediasi dan fasilitasi	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	10	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00		
7.01.05.2.01.0005 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	10	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00		

SubKegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada table dibawah ini :

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			7.01.03.2.03 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tarakan Timursebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Tarakan Timur									
2	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	92	93	93,03	93,05	93,07	93,07	93,08	
3	Persentase Usulan Pembangunan yang Terealisasi	%	27,78	27,78	27,78	27,80	27,85	27,90	27,95	
4	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan	%	89,31	89,31	89,50	89,50	89,70	89,70	89,95	
5	Nilai SAKIP	Angka	74,7	74,75	74,79	74,80	74,84	74,87	74,90	

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Tarakan Timursebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci

[illegible]

BAB V PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2025-2029. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategik ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kecamatan Tarakan Timur Tahun 2025-2029 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kantor Kecamatan Tarakan Timur.

Meskipun Renstra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas. Sehingga dalam pelaksanaannya secara berkala dilakukan pengendalian dan evaluasi pencapaian target renstra, evaluasi efektifitas kebijakan serta tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai target.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh stake holders yang ada di lingkungan Kecamatan Tarakan Timur.

28. Rencana Strategis Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Tahun 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah atau lebih dikenal dengan Renstra merupakan instrumen untuk merumuskan dan mencapai tujuan organisasi serta menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pada periode rencana jangka menengah, sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas suatu institusi pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan. Renstra ini dirumuskan dalam kerangka pandangan yang strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Fungsi penyusunan Renstra adalah sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, rencana tersebut tidak semata-mata hanya disusun dan didiamkan, tapi melainkan rencana yang telah dibuat harus dilaksanakan sebagai acuan bahwa organisasi tersebut adalah organisasi yang bekerja efektif dan berkinerja, dalam menilai apakah organisasi tersebut memiliki kinerja yang baik, maka bisa dilihat dari seberapa banyak rencana strategi yg dilaksanakan dalam rangka mencapai visi jangka menengah sesuai dengan Inmendagri Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024.

Walikota yang daerahnya memiliki periode RPJMD berakhir Tahun 2024, untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut sebagai rencana Pembangunan Daerah Kota Tahun 2025-2029, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan rencana strategis (Renstra) Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan berdasarkan landasan kebijakan atau dasar hukum yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029;
17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Pada Kecamatan;
21. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Kecamatan Tarakan Barat;
22. Surat Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 100.3.3.3/HK-IV/237/2025 Tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Tarakan Barat Tahun 2025-2029 di maksudkan untuk menyesuaikan dengan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 dengan peraturan perundangan yang berlaku dan permasalahan/isu strategis pembangunan paling mutakhir dengan memperbaharui kebijakan

pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah Kota Tarakan 5 (lima) tahun kedepan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap hasil RPJMD.

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Tahun 2025-2029 adalah :

1. Sebagai kerangka acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan Kecamatan Tarakan Barat kota Tarakan selama 5 (lima) tahun
2. Sebagai dasar penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi serta penilaian kinerja Kecamatan Tarakan Barat dalam menjalankan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sistematika penulisan Renstra Kecamatan Tarakan Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini paling sedikit memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN TARAKAN BARAT KOTA TARAKAN

Bab ini membahas gambaran pelayanan perangkat daerah yang paling sedikit memuat tugas, fungsi, dan struktur perangkat daerah; sumber daya perangkat daerah; kinerja pelayanan perangkat daerah; dan kelompok sasaran layanan. Selain itu juga membahas permasalahan pelayanan Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan dan Isu Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini paling sedikit memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini paling sedikit memuat uraian program; uraian kegiatan; uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator target dan pagu indikatif; uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah; target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama; dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci.

BAB V PENUTUP

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TARAKAN BARAT

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Tarakan Barat merupakan salah satu dari empat kecamatan di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Pembentukan kecamatan dapat dilakukan melalui pemekaran atau penggabungan wilayah dalam satu daerah kabupaten/kota.

Kecamatan Tarakan Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 23 Tahun 1999, yang menetapkan pemekaran Kota Tarakan dari tiga menjadi empat kecamatan, yaitu Tarakan Utara, Tarakan Barat, Tarakan Timur, dan Tarakan Tengah. Sejak saat itu, Kecamatan Tarakan Barat tidak mengalami perubahan wilayah. Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kelurahan Baru, wilayah Kecamatan Tarakan Barat tetap terdiri dari lima kelurahan, yaitu:

1. Kelurahan Karang Anyar
2. Kelurahan Karang Anyar Pantai
3. Kelurahan Karang Balik
4. Kelurahan Karang Harapan
5. Kelurahan Karang Rejo

Kota Tarakan memiliki luas wilayah 657,33 km², yang terdiri dari 250,8 km² (38,2%) daratan dan 406,53 km² (61,8%) lautan. Kecamatan Tarakan Barat memiliki luas 27,89 km², atau sekitar 11,12% dari total luas daratan Kota Tarakan. Secara geografis, kecamatan ini terletak di bagian barat daya Pulau Tarakan, dan memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan. Kecamatan ini berbatasan dengan:

- Sebelah utara: Kecamatan Tarakan Tengah
- Sebelah selatan: Laut Sulawesi
- Sebelah timur: Kecamatan Tarakan Timur
- Sebelah barat: Kecamatan Tarakan Utara

Wilayah Kecamatan Tarakan Barat merupakan daerah perkotaan yang mayoritas kegiatan ekonominya bergerak di sektor perdagangan dan jasa.

Di wilayah ini banyak terdapat jasa penginapan berupa hotel dan guest house dengan beragam kelas. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan Bandara Internasional Juwata, yang berada di wilayah kecamatan ini dan melayani penerbangan domestik serta rute internasional ke Tawau, Malaysia. Keberadaan bandara menjadikan kawasan ini sebagai lokasi strategis bagi para pelaku perjalanan bisnis maupun penumpang yang transit di Kota Tarakan.

Selain itu, di Kecamatan Tarakan Barat terdapat berbagai pusat kegiatan ekonomi seperti pasar tradisional, restoran, serta toko-toko yang menjual kebutuhan pokok masyarakat. Tidak hanya itu, berbagai kantor penting dan strategis juga berada di kecamatan ini, seperti:

- Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Utara
- Kepolisian Resor (Polres) Tarakan, serta kantor-kantor perbankan swasta dan instansi pemerintahan lainnya.

Berdasarkan data terakhir, jumlah penduduk Kecamatan Tarakan Barat mencapai ±85.230 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 2.993,69 jiwa/km². Komposisi penduduk terdiri dari berbagai kelompok usia dan latar belakang sosial, dengan mayoritas bekerja di sektor perdagangan, jasa, dan usaha mikro kecil (UMK).

Fasilitas umum dan pelayanan dasar di kecamatan ini cukup lengkap, termasuk sarana pendidikan, puskesmas, posyandu, pasar, dan tempat ibadah. Namun, beberapa infrastruktur lingkungan seperti drainase, sanitasi, dan penerangan jalan masih memerlukan peningkatan, terutama di wilayah padat penduduk.

Dalam aspek sosial, masyarakat Kecamatan Tarakan Barat relatif aktif dalam kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi melalui RT, PKK, dan posyandu. Namun, tingkat partisipasi organisasi seperti Karang Taruna dan LPM masih tergolong rendah di sebagian kelurahan. Potensi wilayah ini terletak pada pengembangan sektor perdagangan, jasa, dan pemberdayaan masyarakat, dengan tantangan utama berupa penanganan banjir, pengelolaan sampah, dan penguatan partisipasi warga dalam pembangunan.

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Kota Tarakan Nomor 87 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan.

Fungsi Kecamatan Tarakan Barat dalam menjalankan tugasnya antara lain:

1. Perumusan Kebijakan teknis bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum di wilayahnya sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah Daerah
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum.
3. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan
4. Pelaksanaan pelayanan umum
5. Pembinaan kelompok jabatan fungsional
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah

Tugas Kecamatan Tarakan Barat sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, termasuk koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Menyelenggarakan pelayanan publik, baik administratif maupun fasilitasi kegiatan masyarakat.
3. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan lembaga kemasyarakatan, pembinaan kelompok masyarakat, dan koordinasi pembangunan wilayah.

Struktur Organisasi Kecamatan Tarakan Barat

Susunan organisasi Kecamatan Tarakan Barat mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tarakan Barat , terdiri antara lain sebagai berikut:

- a. Camat
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - (1) Kasubbag Bagian Umum
 - (2) Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
- c. Kasi Tata Pemerintahan
- d. Kasi Pemberdayaan Masyarakat
- e. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- f. Kelurahan

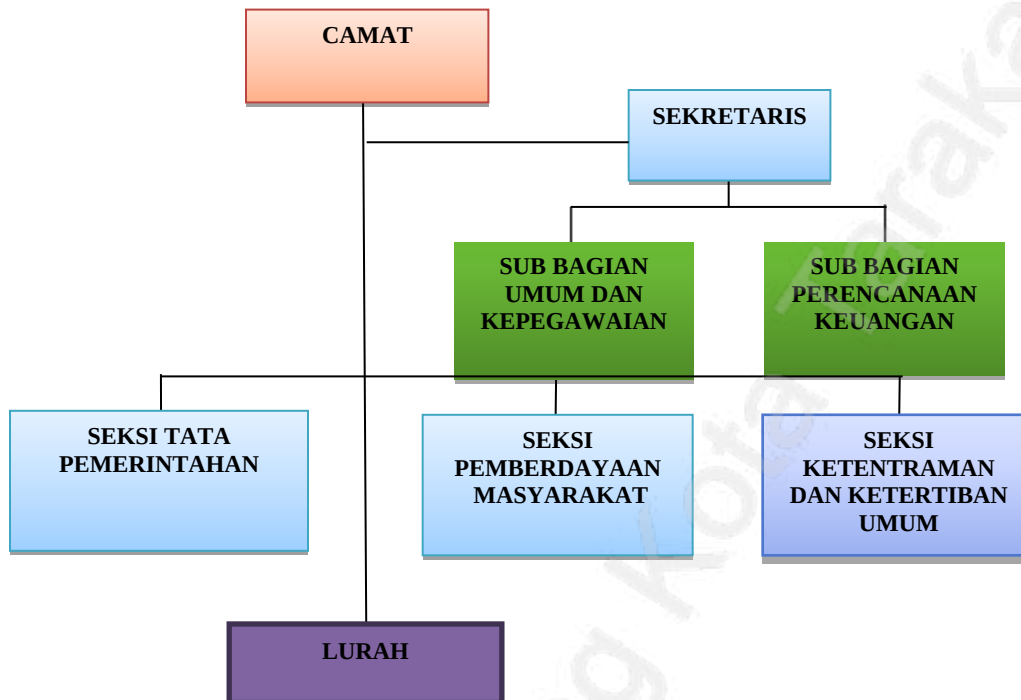
Kelurahan, terdiri dari:

- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Tata Pemerintahan;

- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
- e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Lebih jelas Struktur Organisasi Kecamatan Tarakan Barat dapat dilihat pada lampiran Bagan Strukur Organisasi terlampir.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Tarakan Barat



Bagan struktur organisasi dan ASN yang menjabat adalah formasi yang terbaru dalam melaksanakan roda pemerintahan di Kecamatan Tarakan Barat, sesuai Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 87 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan.

1. Kecamatan

Camat adalah orang yang memimpin kecamatan. Camat mempunyai tugas umum pemerintahan meliputi:

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- 2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- 5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- 8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain tugas diatas Camat juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;

- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
- 4) Pelaksanaan administrasi Kecamatan; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan.

Sekretaris juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi kegiatan kecamatan;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran kecamatan;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kecamatan;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Kecamatan;
5. Koordinasi dan penyusunan produk hukum pada Kecamatan;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di Kecamatan;
7. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
8. Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Kecamatan; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretariat terdiri dari 2 subbag:

1) Subbag Umum

Mempunyai tugas mengelola surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, protokol dan administrasi kepegawaian serta fungsi Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kecamatan;

Fungsi lain dari Kasubag Kepegawaian :

1. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Kecamatan;
2. Koordinasi dan penyusunan produk hukum pada Kecamatan;
3. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah di Kecamatan;
4. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2) Subbag Perencanaan Program dan Keuangan

Mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan masalah keuangan dan pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan program Kecamatan.

Mempunyai fungsi :

1. Koordinasi kegiatan Kecamatan;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kecamatan;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan;

4. Penyiapan bahan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Kecamatan;
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- Masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi tata Pemerintahan merupakan unsur pelaksana di bidang Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam:

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- 2) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan pada bidang tata pemerintahan;
- 3) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan di bidang tata pemerintahan dan pelayanan administrasi kepada masyarakat;
- 4) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota pada bidang tata pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kota yang ada di Kecamatan;
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang - undangan.

Kasi Tata Pemerintahan juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan kebijakan di bidang tata pemerintahan dan pelayanan administrasi Kecamatan kepada masyarakat di wilayahnya;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang tata pemerintahan dan pelayanan administrasi Kecamatan kepada masyarakat di wilayahnya;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan dan pelayanan administrasi Kecamatan kepada masyarakat di wilayahnya; dan
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pelaksana di bidang pemberdayaan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam:

- 1) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 3) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan pada bidang pemberdayaan masyarakat;
- 4) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- 5) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada bidang pemberdayaan masyarakat yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kasi Pemberdayaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat di wilayahnya;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat di wilayahnya;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat di wilayahnya; dan
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban umum

Seksi ketertiban umum merupakan unsur pelaksana di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam:

- 1) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 2) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- 3) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan pada bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- 4) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- 5) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada bidang ketenteraman dan ketertiban umum yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- 6) Mengawasi dan mengendalikan perizinan di wilayah Kecamatan; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya; dan
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

6. Kelurahan

Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang mempunyai tugas membantu Camat dalam:

- 1) Melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- 2) Melakukan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- 4) Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- 5) Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas diatas Lurah juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
- 4) Pelaksanaan administrasi Kelurahan; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Tarakan Barat

Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan tugas umum pemerintahan maupun pelimpahan sebagian urusan kepada Camat dan Lurah diiringi dengan sarana, prasarana, pembiayaan, dan personil guna memenuhi maksud dan tujuan dibentuknya Kecamatan dan Kelurahan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pengisian personil ditujukan untuk menjalankan roda organisasi kecamatan dan kelurahan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Kecamatan Tarakan Barat sampai pada Susunan kepegawaian Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan posisi Bulan Desember 2024 berjumlah 76 orang pegawai dengan rincian 30 (Tiga Puluh) orang laki-laki dan 46 (Empat Puluh Enam) orang perempuan.

Adapun persentase Jumlah ASN di Kecamatan Tarakan Barat berdasarkan berdasarkan jenis kelamin, golongan, eselon dan tingkat pendidikan Se Kecamatan Tarakan Barat dapat dilihat dari tabel – tabel berikut ini.

Tabel 2.1.2
Rincian Jumlah Pegawai Se-Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan
berdasarkan Eselon

No	Unit Kerja	Eselon				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Kecamatan Tarakan Barat	-		2	5	7
2	Kel. Karang Harapan	-			5	5
3	Kel. Karang Balik	-			5	5
4	Kel. Karang Anyar Pantai	-			5	5
5	Kel. Karang Anyar	-			5	5
6	Kel. Karang Rejo	-			5	5
	Jumlah			2	30	32

Jumlah total pejabat eselon di Kecamatan Tarakan Barat adalah 64 orang, yang terdiri dari 2 orang eselon II, 30 orang eselon III, dan 32 orang eselon IV. Jika dihitung dalam persentase, maka: Eselon II berjumlah 2 orang atau sekitar 3,13% dari total pejabat eselon, Eselon III berjumlah 30 orang atau sekitar 46,88%, Eselon IV berjumlah 32 orang atau sekitar 50,00%.



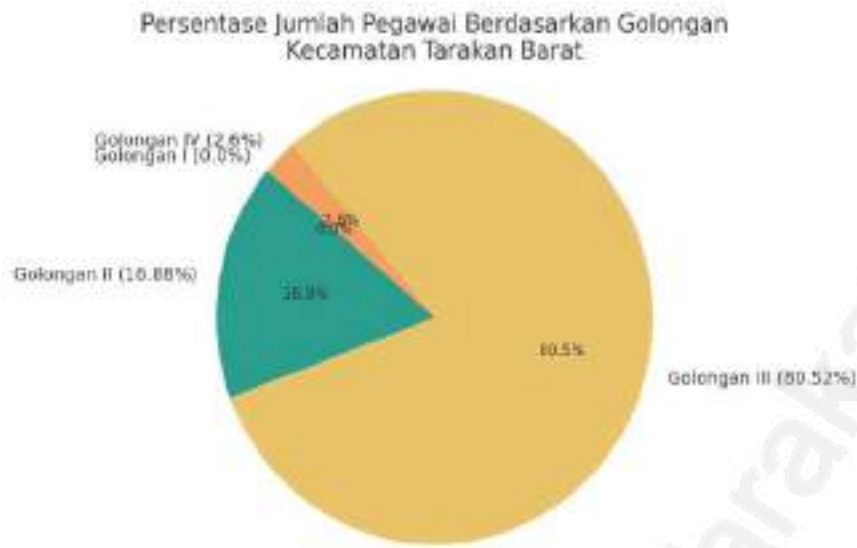
Tabel 2.2.2
Rincian Jumlah Pegawai Se-Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan
berdasarkan golongan

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Kecamatan Tarakan Barat	-	-	16	2	18
2	Kel. Karang Harapan	-	2	7	-	9
3	Kel. Karang Balik	-	2	12	-	14
4	Kel. Karang Anyar Pantai	-	2	11	-	13
5	Kel. Karang Anyar	-	1	11	-	12
6	Kel. Karang Rejo	-	2	9	-	11
	Jumlah	0	13	62	2	77

Sumber : Kecamatan Tarakan Barat Dalam Angka Bulan Desember 2024 (diolah)

Jumlah total pegawai di seluruh unit kerja Kecamatan Tarakan Barat adalah 77 orang, yang terbagi berdasarkan golongan sebagai berikut: Golongan I: 0 orang (0,00%), Golongan II: 13 orang (16,88%), Golongan III: 62 orang (80,52%), Golongan IV: 2 orang (2,60%)

Dari data tersebut terlihat bahwa mayoritas pegawai berada di Golongan III, yang mencakup lebih dari 80% dari seluruh pegawai. Golongan II menyumbang sekitar 17%, sementara Golongan IV hanya sekitar 3%. Tidak ada pegawai yang berada di Golongan I.



Tabel 2.2.3
Rincian Jumlah Pegawai Se-Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan berdasarkan jenjang Pendidikan

NO	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		S2	S1/D4	D3	SMA	
1	Kecamatan Tarakan Barat	3	12	1	2	18
2	Kel. Karang Harapan	-	7	-	2	9
3	Kel. Karang Balik	-	8	1	5	14
4	Kel. Karang Anyar Pantai	-	8	1	4	13
5	Kel. Karang Anyar	1	6	1	4	12
6	Kel. Karang Rejo	-	8	-	3	11
	Jumlah	4	48	4	23	77

Sumber : Kecamatan Tarakan Barat Dalam Angka Bulan Desember 2024

Jumlah total pegawai adalah 77 orang, dengan rincian berdasarkan jenjang pendidikan sebagai berikut: Pendidikan S2: 4 orang (5,19%), Pendidikan S1/D4: 48 orang (62,34%), Pendidikan D3: 4 orang (5,19%), Pendidikan SMA: 23 orang (29,87%)

Dari data ini terlihat bahwa mayoritas pegawai di wilayah Kecamatan Tarakan Barat telah menempuh pendidikan Strata 1 (S1/D4), mencakup lebih dari 60% dari keseluruhan pegawai. Sebagian lainnya berlatar belakang pendidikan menengah (SMA), dan hanya sebagian kecil yang memiliki pendidikan D3 maupun S2.

Selain personil , sumberdaya lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah sarana dan prasarana yang cukup sehingga bisa mendukung kinerja pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Alat dukung utama tersebut yaitu aset yang dimiliki oleh pemerintah yang digunakan semaksimal mungkin digunakan untuk menunjang operasional pemerintahan di Kecamatan Tarakan Barat.

Aset / Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran,

pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Tarakan Barat masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, sehingga pelayanan kepada masyarakat belum berjalan secara optimal. Beberapa peralatan kantor mengalami kerusakan, sedangkan gedung kantor sering terdampak banjir, yang berpotensi menghambat kelancaran pelayanan dan mengganggu keamanan berkas serta arsip kantor.

Untuk mendukung mobilitas kinerja, Kecamatan dan Kelurahan memiliki 40 unit kendaraan dinas, terdiri dari 7 (tujuh) unit roda empat dan 33 (tiga puluh tiga) unit roda dua yang mana dalam kondisi banyak yang sudah rusak berat dan rusak ringan. Dari jumlah tersebut, hanya 8 (delapan) unit yang digunakan sebagai kendaraan operasional dan masuk dalam pemeliharaan kantor, sedangkan sisanya dibebankan kepada pejabat pengguna.

Tabel 2.2.4
Daftar Inventarisasi Aset Kecamatan Tarkan Barat Tahun 2024

NO	JENIS ASET	NILAI ASET
1	TANAH	14.549.280.000,00
2	PERALATAN DAN MESIN	7.218.306.977,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	19.223.454.054,00
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	3.091.685.675,00
5	JUMLAH ASET TETAP	44.082.726.706,00
6	ASET TAK BERWUJUD	285.449.999,00

Tabel 2.2.5
Sarana dan Prasarana Kerja Kecamatan Tarakan Barat

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi Barang		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Lemari Kayu	7	Buah	4	2	1
2	Rak Besi	4	Buah	3	1	-
3	Rak Kayu	3	Buah	2	1	-
4	Filling Cabinet Besi	1	Buah	1	-	-
5	Brandkas	1	Buah	1	-	-
6	Mesin Absensi	2	Unit	1	1	-
7	LCD Proyektor	2	Unit	1	1	-
8	Layar LCD Proyektor	2	Unit	1	1	-
9	Papan Pengumuman	1	Buah	1	-	-
10	Laptop	16	Unit	6	4	6
11	Papan DUK	1	Buah	-	-	1
12	Meja Kerja1/2 Biro	4	Buah	3	1	
13	Kursi Rapat Chitose	35	Buah	25	5	5
14	Kursi Rapat Tanpa Merk	13	Buah	8	2	3
15	Kursi Ruang Tunggu Pelayanan	2	Unit	1	1	-
16	Sofa	2	Set	-	1	1
17	Jam Elektronik	6	Unit	2	-	4
18	Mesin Potong Rumput	2	Unit	1	1	-
19	Lemari Es	2	Unit	1	1	-
20	Kipas Angin	2	Unit	2	-	-
21	AC	13	Unit	9	2	2
22	Televisi	3	Unit	2	-	1
23	Tangga Aluminium	1	Unit	-	1	-
24	Dispenser	4	Unit	2	2	-
25	Gorden	3	Set	1	2	-

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi Barang		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
26	Meja Kerja Pejabat (Camat)	1	Buah	-	1	-
27	Meja Kerja Pejabat (Sekcam)	1	Buah	-	1	-
28	Meja Kerja Merk Active	10	Buah	7	1	2
29	Meja Kerja Pejabat	1	Buah	1	-	-
30	Kursi Pejabat (Camat)	1	Buah	1	-	-
31	Kursi Pejabat (Sekcam)	1	Buah	1	-	-
32	Kursi Pejabat Lain	8	Buah	5	-	3
33	Kursi Pegawai Non Struktural	7	Buah	-	7	-
34	Lemari Buku Arsip Dinamis	7	Buah	-	-	-
35	Tripod Camera	6	Buah	5	1	-
36	Camera Digital	3	Unit	1	2	-
37	Meja Kerja	4	Buah	2	1	1
38	Sound System	1	Unit	-	-	1
39	Komputer PC Desktop	11	Unit	3	3	5
40	Printer Dot Metrik	2	Unit	1	-	1
41	Printer	15	Unit	8	1	6

Sarana dan Prasarana Kerja Kelurahan karang Anyar Pantai

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi Barang		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Kursi Rapat	20	Buah	6	4	15
2	Kipas Angin	1	Unit	-	1	-
3	Peta	2	Buah	2	-	-
4	Lemari Besi/Metal	1	Buah	1	-	-
5	Computer Compatible	5	Unit	2		3
6	Mesin Ketik Listrik Standard (14-16 Inci)	1	Unit	-	1	-
7	Filing Cabinet Besi	3	Buah	3	-	-
8	Kursi Tamu	3	Buah	3		
9	A.C. Sentral	2	Unit	-	-	2
10	A.C. Split	11	Unit	8	2	1
11	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	11	Buah	11	-	-
12	Mesin Absensi	1	Unit	1	-	1
13	Lap Top	5	Unit	1	1	3
14	Printer (Peralatan Personal Komputer)	15	Unit	2	1	12
15	Scanner (Universal Tester)	1	Unit	1	-	-
16	Kursi Putar	3	Buah	2	-	1
17	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4	Buah	4	-	-
18	Camera Video	1	Unit	-	1	-
19	Lemari Kaca	3	Buah	3	-	-
20	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	Buah	4	-	-
21	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	Buah	1	-	-
22	Meja Panjang	3	Buah	2	-	1
23	Loudspeaker	1	Unit	1	-	-
24	Monitor	1	Unit	1	-	-
25	Sound System	1	Unit	1	-	-
26	Layar Film/Projector	1	Buah	1	-	-
27	Meja Kerja Kayu	1	Buah	1	-	-
28	Lemari Kaca	1	Buah	1	-	-
29	Tenda	3	Buah	-	-	3
30	Kursi Plastik	200	Buah	80	-	120
31	Kulkas	2	Unit	2	-	-
32	Dispenser	3	Unit	1	-	2

Sarana dan Prasarana Kerja Kelurahan Karang Balik

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi Barang		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Lap Top	4	Unit	2	2	-
2	Lemari Arsip	4	Buah	4	-	-
3	Lemari kayu	8	Buah	7	1	-
4	Lemari Besi	3	Buah	3	-	-
5	Lemari arsip Aluminium	4	Buah	2	2	-
6	Lemari/ rak piring	1	Buah	1	-	-
7	Meja Pejabat	5	Buah	5	-	-
8	Meja Rapat panjang	2	Buah	2	-	-
9	Meja kerja 1/2 biro	12	Buah	10	2	-

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi Barang	No	Jenis Barang
11	Meja besi	1	Buah	1	-	-
12	AC Split	9	Unit	4	1	4
13	Kursi pejabat	5	Buah	5	-	-
14	Kursi rapat	45	Buah	32	9	4
15	Kursi besi	1	Buah	-	1	-
16	Kursi Putar	6	Buah	5	-	1
17	Kursi biasa (plastik)	42	Buah	-	42	-
18	PC / komputer	7	Unit	5	1	1
19	Kipas angin	3	Unit	1	-	2
20	Monitor Led (TV)	2	Unit	1	1	-
21	Lemari pendingin (kulkas)	2	Unit	1	-	1
22	Dispenser	1	Unit	1	-	-
23	Papan peta	4	Buah	4	-	-
24	Papan Struktur	1	Buah	1	-	-
25	Papan pengumuman	2	Buah	1	1	-
26	Printer	7	Unit	4	1	2
27	Sound Sistem	1	Unit	1	-	-
28	Audio Amplifier	2	Set	1	-	1
29	Proyektor LCD	1	Unit	-	-	1
30	Korden Jendela	44	Buah	39	5	-

Sarana dan Prasarana Kerja Kelurahan karang Rejo

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi Barang		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Lemari es	2	Unit	2	-	-
2	Sofa	2	Set	2	-	-
3	Lemari buku	1	Buah	1	-	-
4	Kursi Kerja pejabat	22	Buah	18	4	-
5	Meja Kerja	16	Buah	16	-	-
6	AC	9	Unit	6	1	2
7	cctv	1	Set	-	-	1
8	Laptop	9	Unit	6	-	3
9	Mesin ketik elektrik	1	Unit	1	-	-
10	Mesin cetak ncr	1	Unit	1	-	-
11	Lemari Arsib	1	Buah	1	-	-
12	Lemari Besi Brother	1	Buah	1	-	-
13	Lemari kamera	1	Buah	1	-	-
14	Filing kabinet	2	Buah	2	-	-
15	Lemari kayu	3	Buah	3	-	-
16	Printer Canon	2	Unit	1	-	1
17	Komputer PC	4	Unit	2	2	-
18	Meja Komputer	2	Buah	1	1	-
19	Printer Epson	1	Unit	1	-	-
20	Kursi Tunggu Stainles	5	Buah	3	-	2
21	Televisi	1	Unit	-	-	1
No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi Barang	No	Jenis Barang
23	Dispenser	1	Unit	-	-	1
24	Sound System	1	Set	1	-	-
25	Kursi Rapat	22	Buah	22	-	-
26	Kursi Chitos	46	Buah	46	-	-
27	Meja Rapat Bundar	1	Buah	1	-	-

Sarana dan Prasarana Kerja Kelurahan karang Harapan

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi Barang		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Meja 1 Biro	12	Buah	12	-	-
2	AC	12	Unit	9	1	2
3	Meja 1/2 Biro	24	Buah	24	-	-
4	Lemari Arsip	4	Buah	4	-	-
5	Sofa Tamu Lengkap	1	Set	1	-	-
6	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4	Buah	-	3	1
7	Meja Pas Bunga	1	Buah	1	-	-
8	Televisi LCD	3	Unit	1	1	1
9	Garuda Pancasila	4	Buah	4	-	-
10	Gambar Presiden dan Wakil Presiden	4	Set	4	-	-
11	Gambar Wlikota dan Wakil Walikota	2	Set	2	-	-
12	Peta Lokasi Karang Harapan	3	Set	3	-	-
13	Rak Arsip Kayu	7	Buah	7	-	-
14	Meja Komputer	3	Buah	2	1	-

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi Barang	No	Jenis Barang
16	Laptop	2	Unit	2	-	-
17	Printer	5	Unit	3	-	2
18	Komputer PC Desktop	4	Unit	4	-	-
19	Printer Epson Dot Metrik	1	Unit	1	-	-
20	Jam Dinding	1	Buah	1	-	-
21	Rak Arsip Besi	2	Buah	2	-	-
22	Lemari Brosur	1	Buah	1	-	-
23	Papan DUK	2	Buah	-	-	2
24	Meja Resepsionis	1	Buah	1	-	-
25	Papan Pengumuman	1	Buah	1	-	-
26	Global Positioning System	1	Unit	-	-	1
27	Filing Kabinet	3	Buah	3	-	-
28	Kulkas	1	Unit	1	-	-
29	Lemari Kayu Gantung	1	Buah	1	-	-
30	Kipas Angin	1	Unit	1	-	-
31	Meja Panjang	1	Buah	1	-	-
32	Brankas	1	Buah	1	-	-
33	Meja Laci Kecil	1	Buah	1	-	-
34	Kursi Plastik	100	Buah	97	-	3
35	Camera	1	Unit	1	-	-
36	Meja Panjang	1	Buah	1	-	-
37	Layar LCD	1	Buah	-	1	-
38	Podium	1	Buah	1	-	-
39	Gambar Gubernur dan Wakil Gubernur	1	Set	1	-	-
40	Meja Kayu	6	Buah	6	-	-
41	Bendera Merah putih, Lambang Pemkot	1	Set	1	-	-
42	Papan Spanduk	1	Buah	1	-	-
43	Sound System	1	Set	1	-	-
44	Stand Mic Meja	2	Buah	2	-	-
45	Wireless Mic	1	Set	1	-	-
46	Tiang Bendera	1	Set	1	-	-

Sumber Data: Bag umum Kecamatan Tarakan Barat Tahun 2024

Unit Usaha yang masih operasional

Sampai dengan akhir Desember 2025 terdapat unit usaha yang disewakan yaitu Gedung dan lahan Kantor Kelurahan Karang Rejo, hal ini terkait dengan tersedianya aturan yang mengatur pemanfaatan lahan yang disewakan dan lain sebagainya yaitu Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 7 Tahun 2017 Tetang Retribusi Jasa Usaha.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Tarakan Barat

Selama periode 2020–2024, Kecamatan Tarakan Barat menunjukkan konsistensi yang tinggi dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Berbagai indikator kinerja utama yang menjadi tugas dan fungsi kecamatan sebagian besar tidak hanya mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen Renstra, tetapi bahkan melampauinya. Hal ini menandakan semakin menguatnya tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Adapun jenis pelayanan yang diberikan Kecamatan Tarakan Barat kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Kapal ;
2. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris;
3. Pembuatan Surat Keterangan Tukang;
4. Dispensasi Nikah;
5. Surat Keterangan
6. Surat Rekomendasi
7. Surat Pengantar
8. Legalisasi
9. Legalisir

Akuntabilitas tiap instansi merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi public atau OPD yang terakumulasi pada pencapaian akuntabilitas Kota, Kabupaten atau propinsi. Pencapaian akuntabilitas merupakan tanggung jawab kepala OPD yang di dalamnya terdapat komponen individu-individu yang turut mendukung dalam pencapaian akuntabilitas suatu instansi.

Pengukuran akuntabilitas di Kecamatan Tarakan Barat dapat dilihat dari pengukuran Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah pada Periode Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut;

Tabel T.C-23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tarakan Barat

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
1	Predikat Sakip Kecamatan				50	60	60	62	63	50,1	73,62	74,97	74,97	75,56	100,20%	122,70%	124,95%	120,92%	119,94%
2	IKM				80	81	83	84	85	97,53	85,53	91,36	92,57	93	121,91%	105,59%	110,07%	110,20%	109,41%
3	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif				na	na	94%	95%	96%			98%	99%	97			104,26%	103,89%	101,04
4	Persentase Kegiatan Keagamaan				na	na	100%	100%	100%			100%	98,78%	100%			100%	98,78%	100,00%
5	Persentase Fasilitas Penyelesaian Masalah Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang tertangani				na	na	100%	100%	100%			100%	100%	100%			100%	100,00%	100,00%

Sumber Data: Renstra Kecamatan Tarakan Barat Tahun 2020-2024

Berdasarkan data pencapaian kinerja Kecamatan Tarakan Barat, secara keseluruhan, kinerja pelayanan publik menunjukkan tren yang positif dan terus meningkat selama periode 2020–2024. Berikut evaluasi per indikator:

1. Predikat SAKIP Kecamatan

Predikat SAKIP Kecamatan meningkat dari target 50 pada 2020 menjadi 63 pada 2024. Realisasi capaian selama periode tersebut selalu melebihi target, mulai dari 50,1 pada 2020 hingga 75,56 pada 2024, dengan rasio capaian antara 100,20% hingga 124,95%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja pemerintah kecamatan berjalan efektif, dan strategi perbaikan manajemen kinerja telah berhasil diterapkan. Capaian di atas 100% juga menandakan target awal cukup konservatif, sehingga keberhasilan ini patut diapresiasi. SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) menilai efektivitas pengelolaan kinerja instansi. Kinerja Kecamatan Tarakan Barat yang konsisten melebihi target menunjukkan koordinasi internal yang baik dan pencapaian target strategis yang efektif.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

IKM menunjukkan peningkatan yang signifikan. Target Renstra meningkat dari 80 pada 2020 menjadi 85 pada 2024, sedangkan realisasi capaian selalu berada di atas target, yaitu dari 97,53 pada 2020 hingga 93 pada 2024. Rasio capaian berkisar 105,59% hingga 121,91%, yang menandakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan sangat tinggi.

3. Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif

Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif juga menunjukkan kinerja yang baik. Target Renstra pada 2022–2024 berkisar 94%–96%, sementara realisasi capaian berada di atas target (97%–99%). Rasio capaian antara 101,04%–104,26% menunjukkan partisipasi masyarakat dalam organisasi kemasyarakatan relatif tinggi dan stabil. Aktivitas lembaga kemasyarakatan seperti LPM, RT, Karang Taruna, dan PKK sangat penting untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat. Capaian di atas target menandakan keterlibatan warga cukup tinggi, namun perlu pemantauan agar aktivitas lembaga tidak menurun di masa mendatang.

4. Persentase Kegiatan Keagamaan

Target persentase kegiatan keagamaan di Kecamatan Tarakan Barat selalu ditetapkan sebesar 100% pada tahun 2022–2024, dan realisasi capaian berhasil mencapai target penuh setiap tahun. Rasio capaian 100% menunjukkan bahwa Kecamatan Tarakan Barat berhasil memfasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan yang menjadi program dan kegiatan resmi kecamatan, yaitu Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ).

Pelaksanaan kegiatan keagamaan yang tercapai secara penuh mencerminkan koordinasi yang baik antara pemerintah kecamatan, perangkat kelurahan, dan masyarakat. Keberhasilan ini juga berkontribusi pada pembinaan kerukunan umat beragama, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan, serta harmonisasi sosial di wilayah Kecamatan Tarakan Barat.

5. Persentase Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Persentase fasilitasi penyelesaian masalah ketertiban dan ketenteraman di wilayah Kecamatan Tarakan Barat mencapai target 100% sepanjang periode 2022–2024. Rasio capaian 100% menunjukkan bahwa Kecamatan Tarakan Barat berhasil memfasilitasi proses penyelesaian permasalahan yang muncul di masyarakat melalui koordinasi dengan perangkat kelurahan, aparat keamanan, dan instansi terkait.

Capaian ini menegaskan peran Kecamatan Tarakan Barat sebagai ujung tombak pelayanan publik yang mampu mendukung penanganan masalah sosial dan keamanan secara tepat waktu dan terkoordinasi, sekaligus meningkatkan efektivitas kolaborasi antara pemerintah kecamatan dan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman wilayah.

Secara keseluruhan, pencapaian kinerja Kecamatan Tarakan Barat periode 2020–2024 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan tren capaian yang konsisten melampaui target Renstra pada hampir semua indikator. Peningkatan predikat SAKIP mencerminkan penguatan akuntabilitas dan manajemen kinerja yang efektif, sementara indeks kepuasan masyarakat serta keaktifan lembaga kemasyarakatan menunjukkan partisipasi dan respon positif dari masyarakat. Di sisi lain, pelaksanaan kegiatan keagamaan serta fasilitasi penyelesaian masalah ketenteraman dan ketertiban umum selalu tercapai sesuai target, sehingga menggambarkan pelayanan kecamatan yang responsif, berkualitas, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Tabel T.C-24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tarakan Barat

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
***) Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.824.494.322	9.810.052.261	10.056.013.691	10.786.063.224	9.533.959.674	9.507.080.157	9.762.850.628	10.600.690.198	97,04%	96,91%	97,08%	98,28%	3,21%	1,20%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.327.296.823	2.334.098.580	3.510.359.430	4.504.894.520	2.311.776.000	2.325.769.400	3.364.419.761	4.470.985.897	99,33%	99,64%	95,84%	99,25%	26,34%	22,63%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	204.992.910	221.451.110	234.999.640	251.483.100	168.234.300	208.733.050	232.199.200	245.761.400	82,07%	94,26%	98,81%	97,72%	7,05%	17,66%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			29.992.660	29.992.660			29.992.000	29.974.000			100,00%	99,94%	0,024%	0,00%

Berdasarkan data Tabel T.C-24, anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tarakan Barat menunjukkan tren positif dengan efisiensi yang cukup baik. Berikut evaluasi per program:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran meningkat dari 9,824 miliar pada 2021 menjadi 10,786 miliar pada 2024. Realisasi capaian hampir mendekati anggaran, yaitu dari 9,534 miliar menjadi 10,601 miliar, dengan rasio realisasi terhadap anggaran 97,04% hingga 98,28%. Rata-rata pertumbuhan anggaran 3,21% dan realisasi 1,20%. Realisasi yang mendekati anggaran menunjukkan pengelolaan keuangan yang efisien dan minim pemborosan. Program ini dikelola dengan baik dan memanfaatkan dana secara optimal.

2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Anggaran meningkat signifikan dari 2,327 miliar pada 2021 menjadi 4,505 miliar pada 2024, dengan realisasi 2,312 miliar hingga 4,471 miliar. Rasio realisasi terhadap anggaran tetap tinggi (95,84%–99,64%), dan rata-rata pertumbuhan anggaran 26,34%, realisasi 22,63%. Peningkatan anggaran menunjukkan fokus pada pemberdayaan masyarakat. Pada 2023, realisasi mencapai 95,84%, sedikit di bawah target, namun secara keseluruhan dana terserap dengan baik. Tren ekspansi program menunjukkan efektivitas pengelolaan pendanaan..

3) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Anggaran meningkat dari 205 juta menjadi 251,5 juta, sementara realisasi meningkat dari 168 juta menjadi 245,8 juta. Rasio realisasi terhadap anggaran awalnya 82,07% pada 2021 dan meningkat menjadi 97,72% pada 2024, dengan rata-rata pertumbuhan anggaran 7,05% dan realisasi 17,66%. Pada 2021, program ini jelas tidak memenuhi target (rasio 82,07%), namun tahun-tahun berikutnya meningkat signifikan. Hal ini menunjukkan perbaikan pengelolaan keuangan dan peningkatan efektivitas penggunaan anggaran.

4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Anggaran dan realisasi tersedia untuk 2023–2024 sebesar ±29,99 juta, dengan rasio realisasi hampir 100% (100% pada 2023 dan 99,94% pada 2024). Pertumbuhan anggaran dan realisasi sangat kecil. Program ini memiliki alokasi terbatas namun realisasi optimal, menunjukkan pengelolaan dana yang efektif meski skala dana relatif kecil.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Tarakan Barat

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Tarakan Barat merupakan pihak-pihak yang menerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari penyelenggaraan pelayanan kecamatan. Adapun kelompok sasaran tersebut antara lain:

1. Masyarakat Umum. Seluruh warga yang berdomisili di wilayah Kecamatan Tarakan Barat, baik secara individu maupun kelompok, terutama penerima layanan administrasi kependudukan, rekomendasi, dan pelayanan umum lainnya.
2. Pemerintahan Kelurahan/Perangkat kelurahan (lurah dan staf kelurahan) sebagai mitra teknis kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta RT/RW yang menjadi ujung tombak pelayanan pemerintahan di tingkat masyarakat.
3. Lembaga Kemasyarakatan/ PKK, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Posyandu, dan organisasi kemasyarakatan lainnya

yang berperan dalam pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat.

4. Pelaku Ekonomi dan Dunia Usaha/UMKM, koperasi, pelaku usaha lokal, dan dunia usaha yang memerlukan dukungan fasilitasi, pembinaan, maupun kemudahan akses layanan.
5. Lembaga Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial/Sekolah, madrasah, puskesmas, posyandu, dan lembaga sosial kemasyarakatan yang turut berperan dalam peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial.
6. Kelompok Rentan/Lansia, penyandang disabilitas, fakir miskin, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya yang memerlukan perhatian khusus dalam pelayanan publik.

2.1.5 Mitra Kecamatan Tarakan Barat dalam Memberikan Layanan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Tarakan Barat tidak dapat berjalan sendiri, melainkan membutuhkan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak sebagai mitra kerja. Mitra-mitra tersebut meliputi:

1. Pemerintah Kelurahan/Seluruh kelurahan di wilayah Kecamatan Tarakan Barat yang berperan sebagai mitra utama dalam pelaksanaan pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Lembaga Kemasyarakatan/RT, RW, PKK, Karang Taruna, LPM, Posyandu, dan organisasi masyarakat lainnya yang menjadi mitra penting dalam menggerakkan partisipasi masyarakat.
3. Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal/Perangkat Daerah Kota Tarakan, instansi vertikal, serta aparat keamanan (TNI/Polri) yang berperan dalam koordinasi lintas sektor, menjaga ketertiban, dan mendukung kelancaran pembangunan di wilayah kecamatan.
4. Dunia Usaha dan Lembaga Ekonomi/UMKM, koperasi, dunia usaha, dan lembaga keuangan yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
5. Lembaga Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial/Sekolah, madrasah, puskesmas, rumah ibadah, serta organisasi sosial yang mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial.
6. Tokoh dan Kelompok Masyarakat/Tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta relawan sosial yang menjadi mitra strategis dalam menjaga kerukunan, nilai budaya, serta memperkuat ketahanan sosial di wilayah Kecamatan Tarakan Barat.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Tarakan Barat

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 87 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota serta menyelenggarakan pelayanan publik di wilayahnya. Dalam konteks ini, Kecamatan Tarakan Barat memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak pemerintahan daerah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, sekaligus berperan penting dalam menjamin kualitas pelayanan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat wilayah.

Namun, dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut, Kecamatan Tarakan Barat masih menghadapi berbagai permasalahan yang berdampak pada efektivitas pelayanan publik dan pembangunan wilayah. Permasalahan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga aspek utama, yaitu pembangunan

Wilayah, penyelenggaraan pelayanan kecamatan, dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Pertama, aspek pembangunan wilayah. Capaian pembangunan di Kecamatan Tarakan Barat belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh belum maksimalnya pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), rendahnya pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan, serta belum optimalnya fasilitasi terhadap lembaga kemasyarakatan. Kondisi ini berimplikasi pada terbatasnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan rendahnya keselarasan program dengan kebutuhan riil warga.

Kedua, aspek penyelenggaraan pelayanan kecamatan. Kualitas layanan publik yang diberikan kecamatan masih menghadapi sejumlah kendala. Permasalahan yang muncul meliputi belum optimalnya pelayanan administratif masyarakat, lemahnya koordinasi dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, serta terbatasnya fasilitasi kecamatan dalam penyelesaian konflik sosial. Selain itu, kegiatan sosial-keagamaan seperti Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) di tingkat wilayah belum dapat terlaksana secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa peran kecamatan dalam memberikan layanan langsung maupun fasilitasi kegiatan sosial kemasyarakatan masih perlu diperkuat.

Ketiga, aspek tata kelola pemerintahan. Akuntabilitas kinerja perangkat daerah di Kecamatan Tarakan Barat masih belum berjalan optimal. Beberapa persoalan yang dihadapi mencakup lemahnya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja, pengelolaan administrasi keuangan yang belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta keterbatasan dalam layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum, dan jasa penunjang. Selain itu, pengelolaan data serta pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD) belum dilakukan secara optimal, sehingga menimbulkan risiko inefisiensi dan berkurangnya efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa akar permasalahan utama dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tarakan Barat adalah belum optimalnya pelayanan publik kecamatan. Kondisi ini berdampak pada belum maksimalnya capaian pembangunan, rendahnya kualitas pelayanan masyarakat, serta lemahnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa penguatan tata kelola berbasis digital, peningkatan kapasitas aparatur, serta pemberdayaan masyarakat agar Kecamatan Tarakan Barat mampu mewujudkan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Tabel T-B.35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Pelayanan Publik Kecamatan	Belum Tingginya Pembangunan di Kecamatan	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Musrenbang
		Belum Optimalnya Pemberdayaan di Kelurahan
		Belum Optimalnya Penyelenggaraan Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan
	Belum Optimalnya Kualitas Penyelenggaran Kecamatan	Belum Optimalnya Pelayanan Administratif Masyarakat
		Belum Optimalnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Belum Optimalnya Penyelenggaraan Fasilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Belum Optimalnya Pelaksanaan Mediasi dan Fasilitas Konflik
		Belum Optimalnya Penyelenggaraan MTQ wilayah
	Belum tingginya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Belum Optimalnya Penguatan Internal Akuntabilitas Kinerja
		Belum Optimalnya Layanan Kesekretariatan

Tabel 2.2
Isu Strategis Kecamatan Tarkan Barat

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kelembagaan masyarakat (RT, PKK, Karang Taruna, LPM,) yang dapat dilibatkan dalam pelayanan publik	Belum Tingginya Pembangunan di Kecamatan	Perlunya peningkatan akses informasi dan layanan kesehatan masyarakat	Pelayanan berbasis teknologi AI	Pembangunan Sekolah rakyat,	peningkatan partisipasi sekolah di wilayah kecamatan (untuk pemberian bantuan pendidikan)	Terwujudnya Pelayanan Publik Kecamatan yang Berkualitas
Babinsa, Babinkamtibmas, Balakar yang dapat dilibatkan dalam ketentraman dan ketertiban umum wilayah	Belum Optimalnya Kualitas Penyelenggaraan layanan kecamatan	Perlunya peningkatan kualitas hidup masyarakat pemukiman pesisir	Transformasi digital dalam layanan publik	Percepatan SPBE dan pelayanan publik berbasis elektronik	Penerapan aplikasi layanan kecamatan berbasis lokal (contoh: layanan antrean, e-dokumen)	
	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Belum optimalnya upaya pembangunan berketahanan iklim dan tangguh bencana berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Tuntutan transparansi dan akuntabilitas global	Peningkatan kualitas SAKIP dan reformasi birokrasi	Peningkatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas perangkat kecamatan	
		Belum terpenuhi dan meratanya infrastruktur air bersih dan sanitasi secara menyeluruh		pembentukan koperasi merah putih		
		Belum optimalnya peningkatan kesadaran dan pengelolaan sampah berkelanjutan		satu data untuk regsosek (registrasi sosial ekonomi)		
		Penguatan penegakan hukum dan perlindungan masyarakat.				

Berdasarkan identifikasi potensi, permasalahan, serta dinamika lingkungan strategis, Kecamatan Tarakan Barat memiliki sejumlah isu strategis yang perlu mendapat perhatian.

Potensi utama yang dimiliki Kecamatan Tarakan Barat adalah keberadaan kelembagaan masyarakat seperti RT, PKK, Karang Taruna, dan LPM yang dapat dilibatkan dalam pelayanan publik. Namun, permasalahan yang muncul adalah pembangunan di kecamatan yang belum optimal, sehingga berdampak pada rendahnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung pelayanan. Dari sisi isu lingkungan strategis, terdapat kebutuhan peningkatan akses informasi dan layanan kesehatan masyarakat, serta dorongan untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif.

Selain itu, perkembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) menjadi peluang dalam pelayanan publik. Akan tetapi, masih terdapat tantangan berupa pembangunan sekolah rakyat dan peningkatan partisipasi sekolah di wilayah kecamatan untuk mendukung akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu, isu strategis yang muncul adalah terwujudnya pelayanan publik kecamatan yang berkualitas, berkeadilan, serta mampu memfasilitasi kebutuhan dasar masyarakat.

Kecamatan Tarakan Barat juga memiliki potensi kolaborasi dengan Babinsa, Babinkamtibmas, dan Balakar dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya kualitas penyelenggaraan layanan kecamatan. Dari sisi isu lingkungan, terdapat kebutuhan peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir, transformasi digital, serta percepatan penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Oleh sebab itu, isu strategis yang diangkat adalah penerapan aplikasi layanan kecamatan berbasis lokal, seperti layanan antrean dan e-dokumen, untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik.

Selanjutnya, masih terdapat permasalahan terkait akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang belum optimal. Hal ini dipengaruhi pula oleh belum maksimalnya upaya pembangunan berketahanan iklim dan tangguh bencana sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan. Isu lingkungan global menuntut transparansi dan akuntabilitas, yang di tingkat nasional tercermin dalam peningkatan kualitas SAKIP dan reformasi birokrasi. Dengan demikian, isu strategis yang dihadapi adalah peningkatan integritas, transparansi, serta akuntabilitas perangkat kecamatan.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah belum terpenuhi dan meratanya infrastruktur air bersih serta sanitasi secara menyeluruh. Masalah ini berkaitan erat dengan kebutuhan pembangunan berkelanjutan serta pemerataan akses layanan dasar. Upaya yang dapat dilakukan antara lain pembentukan koperasi merah putih sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah berkelanjutan masih belum optimal. Dinamika nasional yang berkembang adalah penguatan satu data melalui registrasi sosial ekonomi (Regsosek), yang dapat menjadi instrumen dalam perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Terakhir, isu penting yang juga muncul adalah penguatan penegakan hukum dan perlindungan masyarakat sebagai upaya menciptakan kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh warga

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sementara sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Tarakan BaratDaerah Kota Tarakan dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Dengan ditetapkan tujuan dan sasaran maka dapat diketahui secara jelas apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk 5 (lima) tahun kedepan. “Tujuan Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan adalah Terwujudnya Pelayanan Publik Kecamatan yang Berkualitas”

Adapun Sasaran Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Pembangunan Kecamatan
- 2) Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kecamatan
- 3) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE DATA	TARGET TAHUN						KET.
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik Kecamatan yang Berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93	93	93,01	93,02	93,03	93,04	93,06	Tujuan
		Meningkatnya Pembangunan Kecamatan	Persentase Usulan Pembangunan yang Terealisasi	18,9	19,1	19,8	20,2	20,8	21,5	22,2	Sasaran
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan	82,79	82,79	82,90	82,95	82,96	83,01	83,06	Sasaran
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP	76,00	76,01	76,02	76,03	76,04	76,05	76,06	Sasaran

3.2. Strategi

Tahapan strategi pengawasan 2026–2030 menggambarkan tujuan bertingkat yang ingin dicapai Kecamatan Tarakan Barat dalam lima tahun ke depan. Setiap tahapan memuat arah pencapaian yang semakin meningkat, dimulai dari penguatan dasar sistem pengawasan pada tahun 2026, pemantapan sistem pemantauan dan evaluasi pada tahun 2027, peningkatan efektivitas pengawasan dan integritas pada tahun 2028, percepatan transformasi menuju tata kelola yang terbuka dan responsif pada tahun 2029, hingga pada akhirnya mewujudkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas pada tahun 2030.

Tabel 3.2
Penahapan Renstra

TAHAP 1	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
Penguatan Pelayanan Publik Kecamatan	Pemantapan Pelayanan Publik Kecamatan	Peningkatan Pelayanan Publik Kecamatan	Percepatan Pelayanan Publik Kecamatan	Perwujudan Pelayanan Publik Kecamatan yang Berkualitas

Untuk mencapai tahapan tujuan tersebut, seluruh arah kebijakan dilaksanakan secara simultan dan berkesinambungan setiap tahun. Pada Tahap I (2026), fokus diarahkan pada penguatan pelayanan publik kecamatan, yaitu memperkuat fondasi kelembagaan, tata kelola, dan kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, pada Tahap II (2027) dilakukan pemantapan pelayanan publik kecamatan, dengan menekankan konsistensi pelaksanaan pelayanan yang sudah diperkuat sebelumnya agar semakin terstruktur, efektif, dan efisien.

Memasuki Tahap III (2028), sasaran pembangunan adalah peningkatan pelayanan publik kecamatan, melalui pengembangan inovasi pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kualitas SDM aparatur agar pelayanan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pada Tahap IV (2029), fokus diarahkan pada percepatan pelayanan publik kecamatan, yaitu memperluas cakupan layanan dan mempercepat proses pelayanan agar lebih mudah diakses oleh masyarakat.

Akhirnya, pada Tahap V (2030) ditargetkan tercapainya perwujudan pelayanan publik kecamatan yang berkualitas, yang ditandai dengan pelayanan yang transparan, akuntabel, cepat, mudah, serta mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai penerima layanan.

3.3. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan RPJMD Kota Tarakan berfokus pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, penguatan partisipasi masyarakat, responsivitas terhadap isu sosial dan keamanan, serta pengelolaan ketertiban umum. Arah kebijakan tersebut kemudian dioperasionalkan oleh Kecamatan Tarakan Barat melalui Renstra yang menekankan pada fungsi pelayanan, koordinasi, serta pemberdayaan masyarakat di tingkat wilayah.

Dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan, Kecamatan Tarakan Barat menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kecamatan. Musrenbang menjadi wadah utama dalam menjaring aspirasi masyarakat, menyusun prioritas pembangunan, serta memastikan keterpaduan program antara kelurahan, kecamatan, hingga pemerintah kota.

Sejalan dengan kebijakan penguatan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan, kecamatan mengembangkan berbagai program pemberdayaan di kelurahan. Melalui dukungan terhadap kegiatan masyarakat, pembinaan kelembagaan, serta fasilitasi kegiatan ekonomi dan sosial, kecamatan berperan dalam memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan wilayah.

Menindaklanjuti arah peningkatan responsivitas terhadap isu sosial dan keamanan, Kecamatan Tarakan Barat mengarahkan kebijakan pada pembinaan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan. Peran lembaga seperti RT, PKK, Karang Taruna, dan LPM diperkuat agar lebih aktif dalam menjaga keharmonisan sosial, meningkatkan rasa aman, serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat.

Kebijakan pengelolaan ketertiban umum dan penegakan hukum diterjemahkan kecamatan melalui beberapa langkah strategis, antara lain pelayanan administratif masyarakat (seperti administrasi kependudukan, surat keterangan, dan layanan umum lainnya), koordinasi ketentraman dan ketertiban umum bersama kelurahan, Satpol PP, serta aparat keamanan, penyelenggaraan kegiatan MTQ wilayah untuk memperkuat nilai religius dan kerukunan umat beragama, serta pelaksanaan mediasi dan fasilitasi konflik sosial agar potensi permasalahan di masyarakat dapat diredam dan diselesaikan secara damai.

Tabel 3.3
Arah Kebijakan

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
1	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Tata Kelola Pemerintahan	Penyelenggaraan Musrenbang
2	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan (Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah)	Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Pemerintahan	Pemberdayaan di Kelurahan
3	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. (Permendagri Nomor 130 Tahun 2018)	Peningkatan Responsivitas Terhadap Isu Sosial dan Keamanan	Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan
4	Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa)	Pengelolaan Ketertiban Umum dan Penegakan Hukum	Pelayanan Administratif Masyarakat
5	Pelayanan Administratif Masyarakat (Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang PATEN; PermenPAN-RB No. 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan)		Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6	Fasilitasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Permendagri No. 26 Tahun 2020 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum; Permendagri No. 84 Tahun 2014 tentang Organisasi Kecamatan)		Penyelenggaraan MTQ Wilayah
7	Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan (SK Walikota Tarakan tentang Penyelenggaraan MTQ Kecamatan)		Pelaksanaan Mediasi dan Fasilitasi Konflik Sosial
8	Penanganan Konflik Sosial dan Mediasi Warga (Permendagri No. 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah)		

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN KECAMATAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan,

Program, kegiatan, dan subkegiatan Kecamatan Tarakan Barat Daerah Kota Tarakan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Seluruhnya disusun berdasarkan nomenklatur resmi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta hasil pemutakhiran kodefikasi dan klasifikasi pembangunan daerah. Dengan pendekatan tersebut, perencanaan operasional ini mampu menggambarkan keterhubungan antara arah kebijakan dengan implementasi program secara lebih terstruktur.

Untuk menjamin konsistensi pencapaian target, daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dirancang tidak hanya untuk periode 2025–2029, tetapi juga diarahkan sebagai bagian dari kesinambungan perencanaan hingga tahun 2030 sebagai pijakan penyusunan rencana kerja Kecamatan Tarakan Barat tahun 2030. Rangkaian perumusan tersebut dituangkan dalam Tabel 4.1 yang memuat keterkaitan antara tujuan, sasaran, outcome, dan output dengan nomenklatur program/kegiatan/subkegiatan perangkat daerah.

Selanjutnya, guna mendukung kejelasan alokasi sumber daya, rencana ini dilengkapi dengan kerangka pendanaan indikatif. Tabel 4.2 menyajikan rincian nomenklatur program, indikator kinerja, target tahunan, serta pagu indikatif sebagai dasar pengelolaan pembiayaan yang berkesinambungan.

Tabel 4.1
Perumusan Program/kegiatan/Subkegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Tarakan Barat							
Meningkatnya kualitas digitalisasi pelayanan publik	Terwujudnya pelayanan publik Kecamatan yang berkualitas				Indeks kepuasan masyarakat (Indeks)		
		Meningkatnya pembangunan kecamatan			Persentase Usulan Pembangunan yang Terealisasi (%)		
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan		Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam musrenbang di Kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terfasilitasinya musrenbang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
				Terlaksananya pemberdayaan di kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
				Terfasilitasinya lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kecamatan			Capaian Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan (%)		
			Meningkatnya layanan kecamatan		Persentase Layanan Kecamatan Terselenggarakan Tepat Waktu sesuai SOP (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya pelayanan administratif masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum		Persentase Aduan yang Terselenggarakan (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terfasilitasinya ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya kualitas kafilah MTQ		Persentase Kafilah yang Mengikuti MTQ di Tingkat Kota (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terselenggaranya MTQ wilayah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
			Terfasilitasinya konflik pertanahan		Persentase Aduan Pertanahan yang Difasilitasi (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terlaksananya mediasi dan fasilitasi	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	7.01.05.2.01.0005 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan			Nilai SAKIP (Angka)		
			Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja		Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya layanan administrasi kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	7.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Tersedianya layanan administrasi umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terkelolanya data Barang Milik Daerah dalam aplikasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya layanan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

4.2. Rencana Pendanaan Program, Kegiatan, Subkegiatan

Rencana pendanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Kecamatan Tarakan Barat disusun berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, serta arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025–2029. Rencana pendanaan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kebutuhan anggaran yang bersifat indikatif dalam lima tahun ke depan, sehingga dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan maupun dalam proses penganggaran di APBD.

Pendanaan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis kecamatan melalui penyediaan sumber daya keuangan yang memadai, efisien, serta berkelanjutan. Dalam hal ini, rencana pendanaan tidak hanya mencakup besaran anggaran, tetapi juga memperhatikan keterkaitan antara program, kegiatan, subkegiatan, serta indikator kinerja yang diharapkan tercapai.

Tabel 4.2
Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)		80,2	1.127.890.000,00	80,3	1.116.160.000,00	80,4	1.126.660.000,00	80,5	1.123.790.000,00	80,6	1.116.160.000,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Tarakan Barat	
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				86.130.000,00		0,00		49.500.000,00		42.630.000,00		0,00		
Tersedianya layanan administrasi kepegawaian	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1	0	86.130.000,00	0	0,00	1	49.500.000,00	0	42.630.000,00	0	0,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	174		0		87		87		0			
7.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0,00		0,00		6.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1	0	0,00	0	0,00	1	6.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				86.130.000,00		0,00		43.500.000,00		42.630.000,00		0,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	174	86.130.000,00	0	0,00	87	43.500.000,00	87	42.630.000,00	0	0,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				215.000.000,00		215.000.000,00		215.000.000,00		215.000.000,00		215.000.000,00		
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	18		18		18		18		18			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	55	65		65		65		65		65			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5	11		11		11		11		11			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6	8		8		8		8		8			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	9	7	10.000.000,00	7	10.000.000,00	7	10.000.000,00	7	10.000.000,00	7	10.000.000,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	55	65	90.000.000,00	65	90.000.000,00	65	90.000.000,00	65	90.000.000,00	65	90.000.000,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6	8	30.000.000,00	8	30.000.000,00	8	30.000.000,00	8	30.000.000,00	8	30.000.000,00		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	18	30.000.000,00	18	30.000.000,00	18	30.000.000,00	18	30.000.000,00	18	30.000.000,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5	11	55.000.000,00	11	55.000.000,00	11	55.000.000,00	11	55.000.000,00	11	55.000.000,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				217.600.000,00		292.000.000,00		253.000.000,00		257.000.000,00		292.000.000,00		
Terkelolanya data Barang Milik Daerah dalam aplikasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	100	217.600.000,00	100	292.000.000,00	100	253.000.000,00	100	257.000.000,00	100	292.000.000,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	11	15		20		15		15		20			
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				100.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		104.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	100	100.000.000,00	100	105.000.000,00	100	105.000.000,00	100	105.000.000,00	100	104.000.000,00		
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				117.600.000,00		187.000.000,00		148.000.000,00		152.000.000,00		188.000.000,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				373.500.000,00		373.500.000,00		373.500.000,00		373.500.000,00		373.500.000,00		
Tersedianya layanan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	373.500.000,00	12	373.500.000,00	12	373.500.000,00	12	373.500.000,00	12	373.500.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00	2	1.500.000,00		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				285.000.000,00		285.000.000,00		285.000.000,00		285.000.000,00		285.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	285.000.000,00	12	285.000.000,00	12	285.000.000,00	12	285.000.000,00	12	285.000.000,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				87.000.000,00		87.000.000,00		87.000.000,00		87.000.000,00		87.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	87.000.000,00	12	87.000.000,00	12	87.000.000,00	12	87.000.000,00	12	87.000.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				235.660.000,00		235.660.000,00		235.660.000,00		235.660.000,00		235.660.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	40	40	235.660.000,00	40	235.660.000,00	40	235.660.000,00	40	235.660.000,00	40	235.660.000,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18	7		7		7		7		7			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	36	36		36		36		36		36			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	2		2		2		2		2			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	40	40	12.000.000,00	40	12.000.000,00	40	12.000.000,00	40	12.000.000,00	40	12.000.000,00		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				93.660.000,00		93.660.000,00		93.660.000,00		93.660.000,00		93.660.000,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	36	36	30.000.000,00	36	30.000.000,00	36	30.000.000,00	36	30.000.000,00	36	30.000.000,00		
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	10.412.326.000,00	100	10.411.926.000,00	100	10.411.926.000,00	100	10.411.926.000,00	100	10.411.926.000,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Tarakan Barat	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11.400.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		
Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)		1	11.400.000,00	1	11.000.000,00	1	11.000.000,00	1	11.000.000,00	1	11.000.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		3			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	3	2.000.000,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				5.400.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)		1	5.400.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.400.926.000,00		10.400.926.000,00		10.400.926.000,00		10.400.926.000,00		10.400.926.000,00		
Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	80	87	10.400.926.000,00	87	10.400.926.000,00	87	10.400.926.000,00	87	10.400.926.000,00	87	10.400.926.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				10.296.730.000,00		10.296.730.000,00		10.296.730.000,00		10.296.730.000,00		10.296.730.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	80	87	10.296.730.000,00	87	10.296.730.000,00	87	10.296.730.000,00	87	10.296.730.000,00	87	10.296.730.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	104.196.000,00	12	104.196.000,00	12	104.196.000,00	12	104.196.000,00	12	104.196.000,00		
Meningkatnya layanan kecamatan	Persentase Layanan Kecamatan Terselesaikan Tepat Waktu sesuai SOP (%)		100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Tarakan Barat	
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya pelayanan administratif masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	9	9	5.000.000,00	9	5.000.000,00	9	5.000.000,00	9	5.000.000,00	9	5.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	9	9	5.000.000,00	9	5.000.000,00	9	5.000.000,00	9	5.000.000,00	9	5.000.000,00		
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Aduan yang Terselesaikan (%)	100	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	7.01.0.00.0.00.02. 0000 - Kecamatan Tarakan Barat	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terfasilitasinya ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	5	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	5	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00		
Meningkatnya kualitas kafilah MTQ	Persentase Kafilah yang Mengikuti MTQ di Tingkat Kota (%)	31,17	31,58	270.000.000,00	31,79	270.000.000,00	31,82	270.000.000,00	32,03	270.000.000,00	32,24	270.000.000,00	7.01.0.00.0.00.02. 0000 - Kecamatan Tarakan Barat	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				280.000.000,00		280.000.000,00		280.000.000,00		280.000.000,00		280.000.000,00		
Terselenggaranya MTQ wilayah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku	48	48	270.000.000,00	52	270.000.000,00	52	270.000.000,00	54	270.000.000,00	53	270.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)													
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				270.000.000,00		270.000.000,00		270.000.000,00		270.000.000,00		270.000.000,00		
Terfasilitasinya konflik pertanahan	Persentase Aduan Pertanahan yang Difasilitasi (%)	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.02. 0000 - Kecamatan Tarakan Barat	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				280.000.000,00		280.000.000,00		280.000.000,00		280.000.000,00		280.000.000,00		
Terlaksananya mediasi dan fasilitasi	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	22	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00		
7.01.05.2.01.0005 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	22	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00		
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam musrenbang di Kecamatan (%)	99,2	99,4	3.998.985.600,00	99,6	3.998.985.600,00	99,7	3.998.985.600,00	99,7	3.998.985.600,00	99,7	3.998.985.600,00	7.01.0.00.0.00.02. 0000 - Kecamatan Tarakan Barat	
	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif (%)	97	97,8		98		98,2		98,6		98,8			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.155.985.600,00		1.155.985.600,00		1.155.985.600,00		1.155.985.600,00		1.155.985.600,00		
Terfasilitasinya musrenbang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	5	5	45.000.000,00	5	45.000.000,00	5	45.000.000,00	5	45.000.000,00	5	45.000.000,00		
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	5	5	45.000.000,00	5	45.000.000,00	5	45.000.000,00	5	45.000.000,00	5	45.000.000,00		
Terlaksananya pemberdayaan di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5	5	1.110.985.600,00	5	1.110.985.600,00	5	1.110.985.600,00	5	1.110.985.600,00	5	1.110.985.600,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	15	15		15		15		15		15			
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				348.985.600,00		348.985.600,00		348.985.600,00		348.985.600,00		348.985.600,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5	5	348.985.600,00	5	348.985.600,00	5	348.985.600,00	5	348.985.600,00	5	348.985.600,00		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	1	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.843.000.000,00		2.843.000.000,00		2.843.000.000,00		2.843.000.000,00		2.843.000.000,00		
Terfasilitasinya lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	0	2	2.843.000.000,00	2	2.843.000.000,00	2	2.843.000.000,00	2	2.843.000.000,00	2	2.843.000.000,00		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	1	2		2		2		2		2			
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.838.000.000,00		2.838.000.000,00		2.838.000.000,00		2.838.000.000,00		2.838.000.000,00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	1	2	2.838.000.000,00	2	2.838.000.000,00	2	2.838.000.000,00	2	2.838.000.000,00	2	2.838.000.000,00		
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	0	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00		

Program Prioritas.

Program prioritas yang termasuk dalam Sasaran pembangunan RPJMD Kota Tarakan yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tarakan Barat adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan outcome yang diharapkan berupa meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan. Untuk mendukung hal tersebut, dilaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan melalui Alokasi Dana Kelurahan (ADK) yang difokuskan pada pembangunan dan perbaikan sarana prasarana, seperti jalan lingkungan, penerangan, drainase, posyandu, pos kamling, serta dukungan kegiatan hari besar nasional, keagamaan, dan sosial kemasyarakatan. Melalui program ini diharapkan kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi lebih cepat dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Kedua, Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan subkegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan . Kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk pemberian insentif bagi RT dan Dasawisma sebagai apresiasi sekaligus dukungan terhadap peran mereka dalam memperkuat kelembagaan masyarakat, meningkatkan partisipasi warga, serta menjaga keberlanjutan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di lingkungan.

Dengan pelaksanaan kedua kegiatan tersebut, diharapkan sinergi antara pemerintah kecamatan, kelurahan, dan masyarakat semakin kuat, sehingga pembangunan partisipatif di tingkat kelurahan dapat berjalan lebih optimal.

Tabel 4.3.

Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN
1	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			7.01.03.2.03 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
			7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan Tarakan Barat

Indikator Kinerja Utama

Untuk mengukur capaian dari tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai tolok ukur keberhasilan.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	7.01.0.00.0.00.02.0000 - Kecamatan Tarakan Barat									
2	IKM	Indeks	93	93	93,1	93,2	93,3	93,4	93,5	
3	Persentase usulan pembangunan yang terealisasi	Persen	18,9	19,1	19,8	20,2	20,8	21,5	22,2	
4	Capaian kinerja penyelenggaraan kecamatan	Persen	82,79	82,79	82,90	82,95	82,96	83,01	83,06	
5	Nilai SAKIP	Nilai	76,00	76,01	76,02	76,03	76,04	76,05	76,06	

Indikator Kinerja Kunci

Kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan tidak memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana perangkat daerah teknis. Hal ini sejalan dengan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, yang menegaskan bahwa kecamatan berfungsi sebagai perangkat daerah kewilayahan dengan tugas koordinatif, fasilitatif, dan administratif.

Oleh karena itu, dalam tabel Indikator Kinerja Kunci ditetapkan nihil. Pengukuran kinerja kecamatan tetap dilaksanakan melalui indikator tujuan, sasaran, serta indikator program dan kegiatan yang relevan sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Tabel 4.5.
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	NIHIL						0			0	
							0			0	

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman sekaligus arah strategis bagi seluruh kegiatan Kecamatan Tarakan BaratDaerah, serta acuan bagi para pemangku kepentingan dalam mendukung fungsi pengawasan.

Pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang termuat dalam Renstra ini tentu sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya pendanaan yang memadai. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen, semangat, tekad, dan kedisiplinan untuk memprioritaskan setiap program sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia.

Selain sebagai panduan kerja, Renstra ini juga berfungsi sebagai tolok ukur evaluasi tahunan terhadap kinerja Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan dalam melaksanakan tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, Renstra ini diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

29. Rencana Strategis Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan Tahun 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Menindaklanjuti Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas Kepala Daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan melaksanakan pasal 10 Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang mengamanatkan Penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang di dalamnya memuat Asta Cita sebagai Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029, dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah dan kearifan lokal serta untuk memastikan kesinambungan Pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada Masyarakat, pasca pemilihan kepala daerah serentak.

Selanjutnya, RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025 - 2029 yang disusun akan menjadi dasar bagi seluruh perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Kecamatan Tarakan Tengah tahun 2025-2029. Dengan demikian, tercipta keselarasan antara Perencanaan Strategi di RPJMD dengan perencanaan operasional di perangkat Daerah, dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Kota Tarakan.

Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Tarakan Tengah serta dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah yang diubah menjadi Perda No. 9 Tahun 2020 maka disusunlah Renstra Kecamatan Tarakan Tengah sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi dan program Wali Kota yang diwujudkan dalam satu periode masa jabatan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja perangkat daerah serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja perangkat daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra Kecamatan Tarakan Tengah dilaksanakan dengan mengacu kepada RPJMD kota Tarakan tahun 2025-2029. Renstra Kecamatan Tarakan Tengah merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan gambaran arahan kebijakan dan strategis pembangunan pada tahun 2025-2029 sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Tarakan Tengah dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan melalui tahapan : persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra

perangkat daerah. Pengembangan Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan sampai tahun 2029 diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan nasional sesuai dengan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan yaitu Camat dengan kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tarakan Tengah Tahun 2025-2026 yaitu sebagai berikut:

Penyusunan rencana strategis (Renstra) Kecamatan Tarakan Tengah kota Tarakan berdasarkan landasan kebijakan atau dasar hukum yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029;
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tarakan;
17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2045;
18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 88 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Kecamatan Tarakan Tengah;
21. Surat Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 100.3.3.3/HK-IV/239/2025 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Tarakan Tengah Tahun 2025-2029 di maksudkan untuk menyesuaikan dengan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025-2029 dengan peraturan perundangan yang berlaku dan permasalahan/isu strategis pembangunan paling mutakhir dengan memperbaharui kebijakan pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah Kota Tarakan 5 (lima) tahun kedepan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial sebagai tindak lanjut evaluasi terhadap hasil RPJMD.

Adapun Tujuan dari penyusunan rensta Kecamatan Tarakan Tengah 2025-2029 adalah : menerjemahkan dan menjabarkan tujuan dan sasaran yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan 2025-2029 dalam bentuk tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang lebih spesifik dan terarah serta yang bersifat operasional :

1. Sebagai kerangka acuan dalam menyusun rencana kerja Kecamatan Tarakan Tengah selama kurun waktu 5 (lima) tahun.
2. Sebagai dasar penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi serta penilaian kinerja kecamatan tarakan tengah dalam menjalankan dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Tarakan Tengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan sistematika.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah

Menguraikan tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, uraian tugas, sumber daya, kinerja, kelompok sasaran identifikasi permasalahan dan penentuan isu strategis serta layanan Kecamatan Tarakan Tengah

- Bab III Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan
Menguraikan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Tarakan Tengah, strategi dan arah kebijakan Pembangunan jangka menengah.
- Bab IV Program, kegiatan subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan
Menguraikan tentang rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pendanaan indikatif, indikator kinerja kecamatan mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Tarakan Tengah Tahun 2025-2029
- Bab V Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN TARAKAN TENGAH DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan Tarakan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pemerintahan Umum, Pemberdayaan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah. Inspektorat Daerah Kota Tarakan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas dan fungsi Kecamatan Tarakan Tengah mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas fungsi serta tata kerja kecamatan Tarakan Tengah.

- Tugas

Tugas pokok Kecamatan Tarakan Tengah antara lain:

1. Kecamatan merupakan perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan;
2. Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- Fungsi

Fungsi Kecamatan Tarakan Tengah Tarakan Tengah antara lain:

1. Penyusunan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
4. Pelaksanaan administrasi Kecamatan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Struktur Organisasi Kecamatan Tarakan Tengah

Susunan organisasi Kecamatan Tarakan Tengah mengacu pada Peraturan Walikota Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas fungsi serta tata kerja kecamatan Tarakan Tengah.

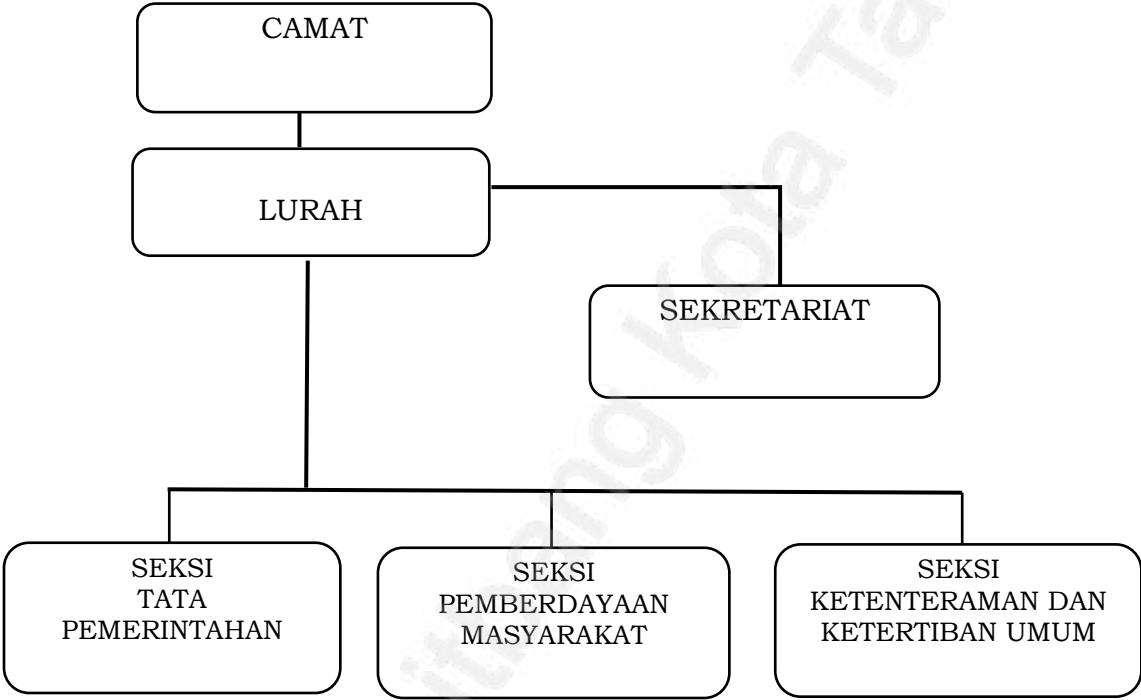
Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tarakan Tengah, terdiri antara lain sebagai berikut:

1. Camat;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Seksi Tata Pemerintahan;

- 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- 5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- 6. Kelurahan, terdiri dari:
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Lebih jelas Struktur Organisasi Kecamatan Tarakan Tengah dapat dilihat pada lampiran Bagan Strukur Organisasi terlampir.

Gambar 2.2
Struktur Organisasi Kelurahan Pada Kecamatan Tarakan Tengah Tahun 2025



SUMBER DAYA SKPD

Bagan struktur organisasi dan ASN yang menjabat adalah formasi yang terbaru dalam melaksanakan roda pemerintahan di Kecamatan Tarakan Tengah, sesuai Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 88 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan Tarakan Tengah.

- 1. Kecamatan
 - a. Camat adalah orang yang memimpin kecamatan. Camat mempunyai tugas umum pemerintahan meliputi:
 - 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - 2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - 3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - 4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 - 5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - 6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;

- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
 - 8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - 9) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Selain tugas diatas Camat juga mempunyai fungsi sebagai berikut:
- 1) Penyusunan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
 - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
 - 4) Pelaksanaan administrasi Kecamatan; dan
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

- a. Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan.
- b. Selain tugas diatas Sekretaris juga mempunyai fungsi sebagai berikut:
- 1) Koordinasi kegiatan Kecamatan;
 - 2) Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kecamatan;
 - 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kecamatan;
 - 4) Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Kecamatan;
 - 5) Koordinasi dan penyusunan produk hukum pada Kecamatan;
 - 6) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah di Kecamatan;
 - 7) Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
 - 8) Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Kecamatan; dan
 - 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretariat terdiri dari 2 subbag:

1) Subbag umum

- a) Mempunyai tugas mengelola surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, protokol dan administrasi kepegawaian
- b) Serta fungsi
 - Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kecamatan;
 - Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Kecamatan;
 - Koordinasi dan penyusunan produk hukum pada Kecamatan;
 - Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah di Kecamatan;
 - Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2) Subbag Perencanaan Program dan Keuangan

- a) mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan masalah keuangan dan pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan program Kecamatan.
- b) Serta fungsi
 - Koordinasi kegiatan Kecamatan;
 - Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kecamatan;
 - Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
 - Penyiapan bahan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Kecamatan; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

3. Seksi Tata Pemerintahan

a. Seksi tata Pemerintahan merupakan unsur pelaksana di bidang Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam:

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- 2) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan pada bidang tata pemerintahan;
- 3) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan di bidang tata pemerintahan dan pelayanan administrasi kepada masyarakat;
- 4) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota pada bidang tata pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kota yang ada di Kecamatan;
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang - undangan.

b. Selain tugas diatas Kasi Tata Pemerintahan juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) penyusunan kebijakan di bidang tata pemerintahan dan pelayanan administrasi Kecamatan kepada masyarakat di wilayahnya;
- 2) pelaksanaan kebijakan di bidang tata pemerintahan dan pelayanan administrasi Kecamatan kepada masyarakat di wilayahnya;
- 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan dan pelayanan administrasi Kecamatan kepada masyarakat di wilayahnya; dan
- 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pelaksana di bidang pemberdayaan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam:

- 1) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- 3) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan pada bidang pemberdayaan masyarakat;
 - 4) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - 5) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada bidang pemberdayaan masyarakat yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - 6) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Selain tugas diatas Kasi Pemberdayaan juga mempunyai fungsi sebagai berikut:
- 1) Penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat di wilayahnya;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat di wilayahnya;
 - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat di wilayahnya; dan
 - 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.
5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban umum
- a. Seksi ketertiban umum merupakan unsur pelaksana di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam:
- 1) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - 2) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 - 3) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan pada bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - 4) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - 5) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada bidang ketenteraman dan ketertiban umum yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
 - 6) Mengawasi dan mengendalikan perizinan di wilayah Kecamatan; dan
 - 7) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Selain tugas diatas Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum juga mempunyai fungsi sebagai berikut:
- 1) penyusunan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
 - 2) pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
 - 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya; dan
 - 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

6. Kelurahan

- a. Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang mempunyai tugas membantu Camat dalam:
- 1) Melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 - 2) Melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - 3) Melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - 4) Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
 - 5) Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
 - 7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Selain tugas diatas Lurah juga mempunyai fungsi sebagai berikut:
- 1) penyusunan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
 - 2) pelaksanaan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
 - 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
 - 4) pelaksanaan administrasi Kelurahan; dan
 - 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Adapun Kelurahan yang di bawah naungan Kecamatan Tarakan Tengah ada 5 (lima) kelurahan yaitu :

- 1. Kelurahan Pamusian
- 2. Kelurahan Sebengkok
- 3. Kelurahan Selumit
- 4. Kelurahan Selumit Pantai
- 5. Kelurahan Kampung I Skip

2.1. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir Desember Tahun 2024, kondisi pegawai pada Kantor Kecamatan Tarakan Tengah dan Kelurahan Se-Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur
Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan Tahun 2024

NO	UNIT KERJA	USIA (Tahun)							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	≥ 50	
1	KECAMATAN TARAKAN TENGAH	0	0	1	3	3	6	4	17
2	KELURAHAN KAMPUNG I SKIP	0	0	0	2	0	6	2	10
3	KELURAHAN PAMUSIAN	0	0	0	2	0	2	7	11
4	KELURAHAN SEBENGKOK	0	0	0	2	1	3	4	10
5	KELURAHAN SELUMIT	0	0	0	0	3	3	3	9
6	KELURAHAN SELUMIT PANTAI	0	0	0	2	3	4	3	12
7	NON ASN	0	2	5	8	6	5	3	29
JUMLAH									98

Sumber : Kantor Kecamatan Tarakan Tengah

Sampai akhir tahun 2024 Jumlah seluruh SDM yang ada di Kecamatan Tarakan Tengah berjumlah 98 (sembilan puluh delapan) orang. ASN sebanyak

69 (enam puluh sembilan) orang. Non ASN sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) orang,

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Menurut Golongan
Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan Tahun 2024

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Kecamatan Tarakan Tengah			15	2	17
2	Kelurahan Kampung I Skip		2	8		10
3	Kelurahan Pamusian		2	9		11
4	Kelurahan Sebengkok			10		10
5	Kelurahan Selumit		2	7		9
6	Kelurahan Selumit Pantai		3	9		12
	Total	0	9	58	2	69

Sumber : Kantor Kecamatan Tarakan Tengah

Berdasarkan Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan. Golongan I tidak ada, Golongan II berjumlah 9 (sembilan) orang, golongan III berjumlah 58 (lima puluh delapan) orang dan golongan IV berjumlah 2 (dua) orang.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Kecamatan Tarakan Tengah Tahun 2024

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		SD	SMP	SMA / SPK	D3	S1	S2	
1	Kecamatan Tarakan Tengah			2	1	12	2	17
2	Kelurahan Kampung I Skip			4	1	5		10
3	Kelurahan Pamusia			6		5		11
4	Kelurahan Sebengkok			3		6	1	10
5	Kelurahan Selumit			3		6		9
6	Kelurahan Selumit Pantai			5	1	6		12
7	Non ASN	1		19	1	8		29
	Total	1	0	42	4	48	3	98

sumber : Kantor Kecamatan Tarakan Tengah

Berdasarkan Tabel 2.3 Jumlah Pegawai dengan tingkat pendidikan SD berjumlah 1 (satu) orang, SMA/SPK 42 (empat puluh dua) orang, D-3 berjumlah 4 (empat) orang, S-1 berjumlah 48 (empat puluh delapan) orang dan S-2 berjumlah 3 (tiga) orang.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan
Kecamatan Tarakan Tengah Tahun 2024

No	Unit Kerja	Eselon				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Kecamatan Tarakan Tengah			2	5	7
2	Kelurahan Kampung I Skip				5	5
3	Kelurahan Pamusian				5	5
4	Kelurahan Sebengkok				5	5
5	Kelurahan Selumit pantai				5	4
6	Kelurahan Selumt Pantai				5	5
	Total			2	30	32

Sumber : Kantor Kecamatan Tarakan Tengah

Berdasarkan Tabel 2.4 Jumlah Pegawai dengan tingkat Eselon 2 tidak ada Eselon 3 sebanyak 2 (dua) orang, eselon 4 sebanyak 30 (tiga puluh) orang. Sehingga total pejabat Eselon di Kecamatan Tarakan tengah berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang.

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Kecamatan Tarakan Tengah Tahun 2024

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Kecamatan Tarakan Tengah	6	11	17
2	Kelurahan Kampung I Skip	6	4	10
3	Kelurahan Pamusian	7	4	11
4	Kelurahan Sebengkok	7	3	10
5	Kelurahan Selumit pantai	5	4	9
6	Kelurahan Selumt Pantai	7	5	12
7	Non ASN	23	6	29
	Total	61	37	98

Sumber : Kantor Kecamatan Tarakan Tengah

Berdasarkan Tabel 2.5 Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin. Pegawai berjenis kelamin laki-laki sebanyak 61 (enam puluh satu) dan jenis kelamin perempuan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang.

Tabel 2.6
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan
Kecamatan Tarakan Tengah Tahun 2024

No	Unit kerja	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	Kecamatan Tarakan Tengah	Eselon 3	1	1	2
		Eselon IV	3	2	5
2	Kelurahan Kampung I Skip	Eselon IV	4	1	5
3	Kelurahan Pamusian	Eselon IV	5	0	5
4	Kelurahan Sebengkok	Eselon IV	4	1	5
5	Kelurahan Selumit	Eselon IV	4	1	5
6	Kelurahan Selumit Pantai	Eselon IV	3	2	5
	Total		24	8	32

Sumber : Kantor Kecamatan Tarakan Tengah

Berdasarkan Tabel 2.6 Jumlah Pegawai menurut Jenis Kelamin dan Jabatan. Pegawai laki-laki berjumlah 24 (dua puluh empat) orang dan jenis kelamin perempuan berjumlah 8 (delapan) orang. Sehingga total jenis kelamin berdasarkan jabatan berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang.

2.2.2 Asset/Modal

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.7
Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis Pada Kantor Kecamatan Tarakan Tengah
Tahun 2024

No	Jenis Aset / Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak / Berat	
1	Alat Angkutan				
a	Kendaraan Roda 4	7	6	1	
b	Kendaraan Roda 2	34	24	10	
2	Alat bengkel dan alat ukur	12	8	4	
3	Alat - alat kantor dan alat rumah tangga				
a	Alat kantor	408	348	60	
b	Meubeler	917	726	191	
c	Personal Komputer	98	57	41	
d	Peralatan Personal Komputer	63	39	24	
4	Alat studio dan alat Komunikasi	41	19	22	

Tabel 2.9
Gedung dan Bangunan
Daftar Bmd Pada Pengguna Barang Aset Tetap Gedung Dan Bangunan Intrakomptabel Dan Ekstrakomptabel Pemerintah
Kota Tarakan Tahun 2024

Pengguna Barang : Kec. Tarakan Tengah
Kode Lokasi : 27.00.00

Penggolongan dan Kodefikasi Barang							Spesifikasi Lainnya	Lokasi	Jumlah	Satuan	Nilai Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	
Kode Barang						Nama Barang									
1	3	3					GEDUNG DAN BANGUNAN		15		19.627.102.753,14				
1	3	3	01				BANGUNAN GEDUNG		14		19.235.744.500,14				
1	3	3	01	01			BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA		14		19.235.744.500,14				
1	3	3	01	01	01		BANGUNAN GEDUNG KANTOR		10		18.640.116.500,14				
1	3	3	01	01	01	001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Luas Bangunan 356.00 Luas Tanah 0.00	Jl. P. Halmahera No. 1 Tarakan Tengah	1	Meter	3.412.807.965,59	Pengadaan APBD	31/12/1999	Kec. Tarakan Tengah
1	3	3	01	01	01	001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Luas Bangunan 772.00 Luas Tanah 0.00	Jl. Hang Tuah RT. 10 NO. 01 Kel. Selumit	1	Meter	2.760.153.654,18	Pengadaan APBD	11/07/2001	Kel. Selumit
1	3	3	01	01	01	001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Luas Bangunan 304.00 Luas Tanah 0.00	Jl. P. Antasari RT 11 Kel. Pamusian Tarakan	1	Meter	2.747.068.873,63	Hibah	31/12/1999	Kel. Pamusian
1	3	3	01	01	01	001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Luas Bangunan: 3.30 Luas Tanah: 0.00	Jl. Pulau Banda RT. 11	1	Meter	329.433.000,00	Pengadaan APBD	31/12/1998	Kel. Kampung I SKIP
1	3	3	01	01	01	001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Luas Bangunan: 54.00 Luas Tanah: 0.00	Jl. P. Irian, Kel Kampung I/SKIP	1	Meter	227.805.000,00	Pengadaan APBD	31/12/1999	Kel. Kampung I SKIP
1	3	3	01	01	01	001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	Jl. P. Irian RT. 1 Skip	1	Meter	2.466.713.267,96	Pengadaan APBD	30/12/2008	Kel. Kampung I SKIP
1	3	3	01	01	01	001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	Jl. Sebengkok AL RT. 06 Kelurahan Sebengkok	1	Meter	484.202.000,00	Pengadaan APBD	31/12/1999	Kel. Sebengkok
1	3	3	01	01	01	002	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	Luas Bangunan: 105.00 Luas Tanah: 0.00	RT XXI	1	Meter	303.695.000,00	Hibah	31/12/1998	Kel. Pamusian
1	3	3	01	01	01	999	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	KEL.SELUMIT PANTAI TARAKAN	1	Meter	2.265.081.254,51	Pengadaan APBD	01/07/2013	Kel. Selumit Pantai
Penggolongan dan Kodefikasi Barang							Spesifikasi Lainnya	Lokasi	Jumla h	Satuan	Nilai Perolehan (Rp)	Cara Perolehan	Tanggal Perolehan	Status Penggunaan	

Kode Barang							Nama Barang								
1	3	3	01	01	01	99 9	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Luas Bangunan 0.00 Luas Tanah:	Jl. P. Diponegoro RT. 22 Kel. Sebengkok	1	Meter	3.643.156.484,27	Pengadaan APBD	13/06/2013	Kel. Sebengkok
1	3	3	01	01	02		BANGUNAN GUDANG			1		74.888.000,00			
1	3	3	01	01	02	00 1	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	Jl. Cendawan RT. 11 Kel. Selumit Pantai	1	Meter	74.888.000,00	Pengadaan APBD	21/12/2012	Kel. Selumit Pantai
1	3	3	01	01	04		BANGUNAN GEDUNG INSTALASI			1		19.930.000,00			
1	3	3	01	01	04	01 1	Bangunan Gedung Instalasi Semi Permanen	Luas Bangunan: 6.00 Luas Tanah: 0.00	Jl. P. Halmahera No. 1 RT. 7 Kel. Pamusian	1	Meter	19.930.000,00	Pengadaan APBD	26/08/2014	Kec. Tarakan Tengah
1	3	3	01	01	09		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN			1		203.310.000,00			
1	3	3	01	01	09	00 2	Bangunan Gedung Pertemuan Semi Permanen	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	RT. 03 Kelurahan Selumit Pantai	1	Meter	203.310.000,00	Pengadaan APBD	13/12/2013	Kel. Selumit Pantai
1	3	3	01	01	36		TAMAN			1		297.500.000,00			
1	3	3	01	01	36	00 2	Taman Semi Permanen	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	Jln. P. diponegoro Kel. Sebengkok	1	Meter	297.500.000,00	Pengadaan APBD	23/12/2021	Kel. Sebengkok
1	3	3	02				MONUMEN			1		391.358.253,00			
1	3	3	02	01			CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI			1		391.358.253,00			
1	3	3	02	01	03		BANGUNAN PENINGGALAN			1		391.358.253,00			
1	3	3	02	01	03	00 1	Istana Peninggalan	Luas Bangunan: 0.00 Luas Tanah: 0.00	JL.Pesisir Indah RT.10 Kel.Selumit	1	Meter	391.358.253,00	Pengadaan APBD	26/05/2014	Kel. Selumit Pantai

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Akhir Tahun 2024 dan awal 2025 merupakan tahun Pertama RPJMD Pemerintah Kota Tarakan. Kinerja kecamatan dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, faktor kunci keberhasilan yang turut mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Tersedianya mekanisme koordinasi yang sesuai dengan sistem kerja yang ada.
2. Tersedianya aparatur yang berkualitas
3. Tersedianya sarana transportasi
4. Adanya kesadaran terhadap pentingnya ketertiban
5. Tersedianya perangkat pelayanan administrasi
6. Tersedianya data umum yang akurat

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

Akuntabilitas tiap instansi merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi public atau OPD yang terakumulasi pada pencapaian akuntabilitas Kota, Kabupaten atau provinsi. Pencapaian akuntabilitas merupakan tanggung jawab kepala OPD yang di dalamnya terdapat komponen individu-individu yang turut mendukung dalam pencapaian akuntabilitas suatu instansi.

Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 900.1317 tahun 2023 mempengaruhi indikator sasaran dan akuntabilitas kinerja kecamatan tarakan tengah. Pengukuran akuntabilitas di Kecamatan Tarakan Tengah dapat dilihat dari pengukuran indikator kinerja utama yang tertuang dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang ada di Kecamatan. Berikut ini adalah tabel tingkat Capaian IKU pada Kecamatan Tarakan Tengah :

Tabel T.C-23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tarakan Tengah
Kota Tarakan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
-1	-2	#	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
1	Nilai / Predikat Sakip Kecamatan			60/C C	61/C C	62/C C	63/C C	-	51,15/C C	60/B	71,99/BB	71,99 /BB	0	85,25	98,36	116,11	0
2	Ikml Kecamatan		78/B	78/B	80	80	80	82,81	86,90	86,52	90,38	91.67	106,1	111,4	108,15	113.0	110.7
3	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif			100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	0	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Kegiatan Keagamaan			100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	0	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat			100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	0	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Fasilitas Penyelesaian Masalah Kerukunan, Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan			100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	0	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian kinerja indikator pada tahun 2024 menunjukkan pencapaian yang baik. Nilai predikat Sakip dengan capaian 71,9/BB. Ini menunjukkan bahwa dokumen sakip yang telah di periksa Inspektorat mendapat Nilai yang baik dan mencapai lebih dari target yang sudah di tetapkan. Nilai Sakip tahun 2024 masih memakai nilai Tahun 2023 hal ini dikarenakan belum adanya penilain Sakip di tahun 2024. Adapun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan juga mencapai lebih dari target yaitu 90,38 hal ini dikarenakan banyaknya warga yang datang ke Kecamatan dan mendapatkan pelayanan yang maksimal. Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif dengan capain kinerja sesuai target yaitu 100% hal ini di karenakan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebanding dengan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif. Indikator Persentase Kegiatan Keagamaan mencapai target yang telah di tetapkan yaitu 100% hal ini di karenakan Kegiatan keagamaan yang di laksanakan sebanding dengan kegiatan keagamaan yang ada di Kecamatan Tarakan Tengah. Indikator Persentase Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat mencapai target 100%. Hal ini karena jumlah penataan/pemeliharaan Kawasan public sebanding dengan jumlah Kawasan public di Kecamatan Tarakan Tengah. Indikator persentase Fasilitasi penyelesaian masalah kerukunan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan juga mencapai target capaian kinerja yaitu 100% hal ini dikarenakan jumlah aduan yang di fasilitasi sebanding dengan jumlah aduan yang diterima Kecamatan Tarakan Tengah.

Secara umum yang mempengaruhi keberhasilan Capain Kinerja Tahun 2024 adalah adanya ketersediaan Sumber Daya (uang, tenaga, waktu dan teknologi), motivasi/komitmen Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), kepemimpinan yang baik dan efektif dan lingkungan kerja yang kondusif. . Indikator yang baik harus spesifik, terukur, bisa dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu yang jelas.

2.4 Anggaran Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Pemerintahan Kecamatan Tarakan Tengah telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra Kecamatan Tarakan 2019-2024. Sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Perubahan (renstra) Kecamatan Tarakan tahun 2019-2024. Uraian lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel T-C-24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021 1	2022 2	2023	2024	Anggaran	Realisasi
***) Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.012.865.319	9.891.724.013,00	9.636.673.482	10.415.915.989	8.844.115.674	8.662.604.553	9.076.548.416	10.236.424.718	88,3	87,6	94,2	98,3	1,43	5,15
Program Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik	369.542.000			50.000.000	366.030.000			40.284.995	99,0			80,6		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	2.117.999.718	2.122.999.880	4.049.563.080	5.506.592.580	2.106.654.700	2.112.433.600	3.909.620.047	5.453.665.390	99,5	99,5	96,5	99,0	42,32	41,61
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	204.992.634	224.999.780		283.699.459	199.525.700	217.508.150	255.842.020	263.774.200	97,3	96,7		93,0	12,41	9,66
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			29.956.330	29.986.330			29.556.000	29.186.000			98,66	97,3		

Capaian kinerja pada Tahun 2024 secara umum menunjukkan hasil yang baik. Semua program kegiatan hampir mencapai target. Hal ini terlihat dari Program Penunjang Umum Pemerintahan Daerah/Kota dengan capain 98,3 %. Ini dikarenakan semua kegiatan dan sub kegiatan pada program tersebut telah di laksanakan. Untuk program Penyelenggaraan dan pelayanan public dengan capaian 80,6. Hal ini dikarenakan tidak setiap tahun program ini terdapat anggarannya. Untuk program pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan persentase realisasi anggaran 99%, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban dan sehingga bila di dibandingkan dengan realisasi kinerja kelisemua di tersebut dengan capaian persentase anggaran 97,3% hal

2.5. Kelompok Sasaran layanan

Mitra Kecamatan Tarakan Tengah dalam memberikan pelayanan merupakan kelompok penerima kemanfaatan program dan kegiatan secara langsung maupun tidak langsung guna meningkatkan kapasitasnya. Kelompok sasaran ini dalam renstra kecamatan Tarakan Tengah secara umum di kelompokkan menjadi Polsek, Koramil dan Linmas, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Inspektorat, Bappeda, Puskesmas Gunung Lingkas dan Sebengkok, Satpol PP,Kantor Urusan Agama,RT, RW dan Dasawisma, Aparat Penegak Hukum, Masyarakat Umum

2.6 Permasalahan dan Isu Strategis

Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Untuk hal tersebut di dibutuhkan sebuah analisis yang komperhensif untuk memperoleh hasil yang optimal. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan.

2.6.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tarakan Tengah

Kecamatan Tarakan Tengah telah melakukan evaluasi terhadap Renstra Kecamatan Tarakan Tengah Tahun 2019-2024. Berdasarkan evaluasi, ekspektasi berkaitan dengan tugas dan fungsi pelayanan diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

TB-35

Analisis Pohon Masalah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Pelayanan Publik Kecamatan	Belum Tingginya Pembangunan di Kecamatan	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Musrenbang
		Belum Optimalnya Pemberdayaan di Kelurahan
		Belum Optimalnya Penyelenggaraan Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan
		Belum optimalnya fasilitas pelaku usaha kawasan kuliner
	Belum Optimalnya Kualitas Penyelenggaran Kecamatan	Belum Optimalnya Pelayanan Administratif Masyarakat
		Belum Optimalnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Belum Optimalnya Penyelenggaraan Fasilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Belum Optimalnya Pelaksanaan Mediasi dan Fasilitas Konflik
		Belum Optimalnya Penyelenggaraan MTQ wilayah
	Belum tingginya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Belum Optimalnya Penguatan Internal Akuntabilitas Kinerja
		Belum Optimalnya Layanan Kesekretariatan

2.7. Penentuan Isu Strategis

Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Berikut Isu strategis yang ada di Kecamatan Tarakan Tengah :

Tabel 2.1
Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Kelembagaan masyarakat (RT, PKK, Karang Taruna, LPM,) yang dapat dilibatkan dalam pelayanan publik	Belum Tingginya Pembangunan di Kecamatan	Perlunya peningkatan akses informasi dan layanan kesehatan masyarakat	Pelayanan berbasis teknologi AI	Pembangunan Sekolah rakyat,	peningkatan partisipasi sekolah di wilayah kecamatan (untuk pemberian bantuan pendidikan)	Terwujudnya Pelayanan Publik Kecamatan yang Berkualitas
Babinsa, Babinkamtibmas, Balakar yang dapat dilibatkan dalam ketentraman dan ketertiban umum wilayah	Belum Optimalnya Kualitas Penyelenggaraan layanan kecamatan	Perlunya peningkatan kualitas hidup masyarakat pemukiman pesisir	Transformasi digital dalam layanan publik	Percepatan SPBE dan pelayanan publik berbasis elektronik	Penerapan aplikasi layanan kecamatan berbasis lokal (contoh: layanan antrean, e-dokumen)	
	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Belum optimalnya upaya pembangunan berketahanan iklim dan tangguh bencana berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Tuntutan transparansi dan akuntabilitas global	Peningkatan kualitas SAKIP dan reformasi birokrasi	Peningkatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas perangkat kecamatan	
		Belum terpenuhi dan meratanya infrastruktur air bersih dan sanitasi secara menyeluruh		Pembentukan koperasi merah putih	Peningkatan pemeliharaan kawasan kuliner	
		Belum optimalnya peningkatan kesadaran dan pengelolaan sampah berkelanjutan		Satu data untuk regsosok (registrasi sosial ekonomi)		
		Penguatan penegakan hukum dan perlindungan masyarakat.				

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tarakan Tengah

Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Kecamatan Tarakan Tengah Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur.

Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai Kecamatan Tarakan Tengah dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : *Terwujudnya pelayanan publik Kecamatan yang berkualitas. Tujuan tersebut selaras dengan Visi Kota Tarakan Yaitu Terwujudnya Tarakan Sebagai Kota Cerdas Yang Bertumpu Pada Sektor Jasa, Perdagangan, Perikanan Kelautan dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Maju menuju Masyarakat Sejahtera* dan Misi ke- 4 RPJMD Pemerintah Kota Tarakan Tahun 2025-2029, yaitu: *“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Adaptif dan Responsif serta menjaga Stabilitas Ketertiban dan Ketentraman Kota”*.

Sasaran

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Tarakan Tengah menetapkan sasaran strategis *“Meningkatnya Pembangunan Kecamatan, Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Kecamatan dan Meningkatkan Tata Kelola Kecamatan”*. Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Tarakan Tengah tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya.

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal , diantaranya Visi dan misi kepala daerah, Tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan, dan Program prioritas. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Tarakan Tengah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

Penyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Tarakan Tengah beserta indikator kinerjanya di sajikan dalam tabel sebagai berikut .:

Tabel 3.3
Tujuan Dan Sasaran Renstra
Kecamatan Tarakan Tengah Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE DATA (2024)	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik Kecamatan yang Berkualitas		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	90,85	91,00	91,89	92,00	92,50	92,75	Tujuan
		Meningkatnya Pembangunan Kecamatan	Persentase Usulan Pembangunan yang Terealisasi	33,33%	33,50%	33,70%	34,00%	34,50%	34,75%	35%	Sasaran
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan	90,48%	90,50%	90,55%	90,85%	91%	91,15%	91,55%	Sasaran
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	73,66	73,85	73,85	73,90	74	74,10	74,20	Sasaran

3.4. Strategi

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara apa yang ingin dicapai (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis data, strategi pembangunan daerah diharapkan mampu mewujudkan visi dan misi secara efektif dan berkelanjutan.

Berikut tahapan Strategi Renstra Kecamatan Tarakan Tengah :

Tabel 3.4
Penahapan Renstra Kecamatan Tarakan Tengah

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan Pelayanan Publik Kecamatan	Pemantapan Pelayanan Publik Kecamatan	Peningkatan Pelayanan Publik Kecamatan	Percepatan Pelayanan Publik Kecamatan	Terciptanya keamanan dan ketertiban

Selanjutnya, strategi pembangunan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan, yaitu pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah-langkah implementatif yang harus dijalankan oleh setiap perangkat daerah. . Dalam konteks Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan

3.5 Arah Kebijakan

Kebijakan Adalah pedoman yang wajib di patuhi dalam melakukan Tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi Adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Arah Kebijakan

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Tata Kelola Pemerintahan	Penyelenggaraan Musrenbang	
2	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan (Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah)	Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Pemerintahan	Pemberdayaan di Kelurahan	
3	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. (Permendagri Nomor 130 Tahun 2018)	Peningkatan Responsivitas Terhadap Isu Sosial dan Keamanan	Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	
4	Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa)	Pengelolaan Ketertiban Umum dan Penegakan Hukum	Pelayanan Administratif Masyarakat	
5	Pelayanan Administratif Masyarakat (Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang PATEN; PermenPAN-RB No. 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan)		Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
6	Fasilitasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Permendagri No. 26 Tahun 2020 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum; Permendagri No. 84 Tahun 2014 tentang Organisasi Kecamatan)		Penyelenggaraan MTQ Wilayah	
7	Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan (SK Walikota Tarakan tentang Penyelenggaraan MTQ Kecamatan)		Pelaksanaan Mediasi dan Fasilitasi Konflik Sosial	
8	Penanganan Konflik Sosial dan Mediasi Warga (Permendagri No. 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah)			

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategis, maka langkah operasional harus dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kecamatan Tarakan Tengah. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sedangkan sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas dari suatu kegiatan. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan baik kualitatif maupun kuantitatif yang dapat menggambarkan capaian kinerja.

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Tarakan Tengah merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Tarakan Tengah juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Tarakan Tengah serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Tarakan Tengah dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Tabel 4.2
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Tarakan Tengah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Terwujudnya pelayanan publik Kecamatan yang berkualitas	1. Meningkatkan pembangunan kecamatan	1. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan		IKM		
					Persentase usulan pembangunan yang terealisasi		
					1. Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam Musrenbang di kecamatan 2. Persentase kelembagaan masyarakat yang aktif	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terfasilitasinya musrenbang		7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
				Terlaksananya pemberdayaan di kelurahan		7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
				Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun/ dikembangkan	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan masyarakat Kelurahan	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
				Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan	
				Terfasilitasinya lembaga kemasyarakatan		7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diselenggarakan	7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan	7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
				Terfasilitasinya pelaku usaha kawasan kuliner		7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
		2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kecamatan		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
					Capaian kinerja penyelenggaraan kecamatan		
			2. meningkatnya layanan Kecamatan		Persentase layanan kecamatan terselesaikan tepat waktu sesuai SOP	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya pelayanan administratif masyarakat		7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah laporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			3. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum		Persentase aduan yang terselesaikan	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiba		7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Terfasilitasinya ketentraman dan ketertiban umum		7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian	7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
			4. Terfasilitasinya konflik pertanahan		Persentase aduan pertanahan yang difasilitasi	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terlaksananya mediasi dan fasilitasi		7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan Konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
			5. Meningkatnya kualitas kafilah MTQ		Persentase kafilah yang mengikuti MTQ di tingkat kota	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terselenggaranya MTQ wilayah		7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	7.01.05.2.01.0004 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
		3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Nilai SAKIP KECAMATAN TARAkan TENGAH	Nilai SAKIP merupakan nilai evaluasi atas implementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah) meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja oleh evaluator SAKIP (APIP Inspektorat)	
		6. Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja			Presentase LHE Akip yang ditindaklanjuti	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Capaian Kinerja Organisasi		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu		7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	7.01.01.2.01.0008 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP		7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			7. Meningkatnya layanan kesekretariatan	Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya layanan administrasi kepegawaian		7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	7.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Tersedianya layanan administrasi umum		7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	7.01.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terkelolanya data Barang Milik Daerah dalam aplikasi		7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya layanan jasa penunjang		7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah		7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

TABEL 4.3
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)		90,25	1.047.037.700,00	90,55	1.047.037.700,00	90,75	1.047.037.700,00	91	1.047.037.700,00	91,15	1.047.037.700,00	7.01.0.00.0.00.01.000 0 - Kecamatan Tarakan Tengah	
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				47.000.000,00		47.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya layanan administrasi kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	84	47.000.000,00	84	47.000.000,00	0	5.000.000,00	0	5.000.000,00	0	5.000.000,00		
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				42.000.000,00		42.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	84	42.000.000,00	84	42.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				136.400.400,00		136.400.400,00		136.400.400,00		136.400.400,00		136.400.400,00		
Tersedianya layanan administrasi umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	30	32	136.400.400,00	32	136.400.400,00	32	136.400.400,00	32	136.400.400,00	32	136.400.400,00		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	7		7		7		7		7			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	2		2		2		2		2			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	7.000.000,00	5	7.000.000,00	5	7.000.000,00	5	7.000.000,00	5	7.000.000,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	30	32	50.000.000,00	32	50.000.000,00	32	50.000.000,00	32	50.000.000,00	32	50.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	8	8	10.000.000,00	8	10.000.000,00	8	10.000.000,00	8	10.000.000,00	8	10.000.000,00		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				49.400.400,00		49.400.400,00		49.400.400,00		49.400.400,00		49.400.400,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				88.000.900,00		98.694.000,00		97.569.490,00		97.569.490,00		97.569.490,00		
Terkelolanya data Barang Milik Daerah dalam aplikasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	1	88.000.900,00	1	98.694.000,00	1	97.569.490,00	1	97.569.490,00	1	97.569.490,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	27	14		14		24		24		24			
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				86.000.900,00		96.694.000,00		95.569.490,00		95.569.490,00		95.569.490,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	27	14	86.000.900,00	14	96.694.000,00	24	95.569.490,00	24	95.569.490,00	24	95.569.490,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				396.471.200,00		396.471.200,00		396.471.200,00		396.471.200,00		396.471.200,00		
Tersedianya layanan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	396.471.200,00	12	396.471.200,00	12	396.471.200,00	12	396.471.200,00	12	396.471.200,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.780.000,00		3.780.000,00		3.780.000,00		3.780.000,00		3.780.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2	2	3.780.000,00	2	3.780.000,00	2	3.780.000,00	2	3.780.000,00	2	3.780.000,00		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				270.000.000,00		270.000.000,00		270.000.000,00		270.000.000,00		270.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	270.000.000,00	12	270.000.000,00	12	270.000.000,00	12	270.000.000,00	12	270.000.000,00		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				122.691.200,00		122.691.200,00		122.691.200,00		122.691.200,00		122.691.200,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	122.691.200,00	12	122.691.200,00	12	122.691.200,00	12	122.691.200,00	12	122.691.200,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				379.165.200,00		368.472.100,00		411.596.610,00		411.596.610,00		411.596.610,00		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9	3	379.165.200,00	3	368.472.100,00	3	411.596.610,00	3	411.596.610,00	3	411.596.610,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	44	81		81		81		81		81			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	33	31		31		31		31		31			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	6		6		6		6		6			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	33	31	10.000.000,00	31	10.000.000,00	31	10.000.000,00	31	10.000.000,00	31	10.000.000,00		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				70.202.100,00		70.202.100,00		70.202.100,00		70.202.100,00		70.202.100,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9	3	70.202.100,00	3	70.202.100,00	3	70.202.100,00	3	70.202.100,00	3	70.202.100,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				244.473.100,00		233.780.000,00		276.904.510,00		276.904.510,00		276.904.510,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	6	244.473.100,00	6	233.780.000,00	6	276.904.510,00	6	276.904.510,00	6	276.904.510,00		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				54.490.000,00		54.490.000,00		54.490.000,00		54.490.000,00		54.490.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	44	81	54.490.000,00	81	54.490.000,00	81	54.490.000,00	81	54.490.000,00	81	54.490.000,00		
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		
Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		3			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	10.223.387.798,0 0	100	10.223.387.798,0 0	100	10.223.387.798,0 0	100	10.223.387.798,0 0	100	10.223.387.798,0 0	7.01.0.00.0.00.01.000 0 - Kecamatan Tarakan Tengah	
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	3	2.000.000,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.214.387.798,00		10.214.387.798,00		10.214.387.798,00		10.214.387.798,00		10.214.387.798,00		
Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	70	84	10.214.387.798,00	84	10.214.387.798,00	84	10.214.387.798,00	84	10.214.387.798,00	84	10.214.387.798,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				10.126.531.798,00		10.126.531.798,00		10.126.531.798,00		10.126.531.798,00		10.126.531.798,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	70	84	10.126.531.798,00	84	10.126.531.798,00	84	10.126.531.798,00	84	10.126.531.798,00	84	10.126.531.798,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				87.856.000,00		87.856.000,00		87.856.000,00		87.856.000,00		87.856.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	87.856.000,00	12	87.856.000,00	12	87.856.000,00	12	87.856.000,00	12	87.856.000,00		
Meningkatnya layanan kecamatan	Persentase Layanan Kecamatan Terselenggarakan Tepat Waktu sesuai SOP (%)		100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.01.000 0 - Kecamatan Tarakan Tengah	
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
terlaksananya pelayanan administratif masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	0	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam musrenbang di Kecamatan (%)	100	100	3.734.330.000,00	100	3.734.330.000,00	100	3.734.330.000,00	100	3.734.330.000,00	100	3.734.330.000,00	7.01.0.00.0.00.01.000 0 - Kecamatan Tarakan Tengah	
	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.097.210.000,00		1.097.210.000,00		1.097.210.000,00		1.097.210.000,00		1.097.210.000,00		
Terfasilitasinya musrenbang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	6	6	40.000.000,00	6	40.000.000,00	6	40.000.000,00	6	40.000.000,00	6	40.000.000,00		
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	6	6	40.000.000,00	6	40.000.000,00	6	40.000.000,00	6	40.000.000,00	6	40.000.000,00		
Terlaksananya pemberdayaan di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5	5	1.057.210.000,00	5	1.057.210.000,00	5	1.057.210.000,00	5	1.057.210.000,00	5	1.057.210.000,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	15	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		750.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	15	1	750.000.000,00	1	750.000.000,00	1	750.000.000,00	1	750.000.000,00	1	750.000.000,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				302.210.000,00		302.210.000,00		302.210.000,00		302.210.000,00		302.210.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	5	5	302.210.000,00	5	302.210.000,00	5	302.210.000,00	5	302.210.000,00	5	302.210.000,00		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				2.637.120.000,00		2.637.120.000,00		2.637.120.000,00		2.637.120.000,00		2.637.120.000,00		
Terfasilitasinya lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	2	6	2.612.120.000,00	6	2.612.120.000,00	6	2.612.120.000,00	6	2.612.120.000,00	6	2.612.120.000,00		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	3	3		3		3		3		3			
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				2.607.120.000,00		2.607.120.000,00		2.607.120.000,00		2.607.120.000,00		2.607.120.000,00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	3	3	2.607.120.000,00	3	2.607.120.000,00	3	2.607.120.000,00	3	2.607.120.000,00	3	2.607.120.000,00		
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	2	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00	6	5.000.000,00		
Terfasilitasinya pelaku usaha kawasan kuliner	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Aduan yang terselesaikan (%)	100	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Tarakan Tengah	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terfasilitasinya ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
Meningkatnya kualitas kafilah MTQ	Persentase Kafilah yang Mengikuti MTQ di Tingkat Kota (%)	29,58	29,70	301.627.780,00	29,75	301.627.780,00	29,82	301.627.780,00	30	301.627.780,00	30,25	301.627.780,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - Kecamatan Tarakan Tengah	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				311.627.780,00		311.627.780,00		311.627.780,00		311.627.780,00		311.627.780,00		
Terselenggaranya MTQ wilayah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	40	40	301.627.780,00	40	301.627.780,00	40	301.627.780,00	40	301.627.780,00	40	301.627.780,00		
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				301.627.780,00		301.627.780,00		301.627.780,00		301.627.780,00		301.627.780,00		
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	40	40	301.627.780,00	40	301.627.780,00	40	301.627.780,00	40	301.627.780,00	40	301.627.780,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terfasilitasinya konflik pertanahan	Persentase Aduan Pertanahan yang Difasilitasi (%)	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	7.01.0.00.0.00.01.000 0 - Kecamatan Tarakan Tengah	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				311.627.780,00		311.627.780,00		311.627.780,00		311.627.780,00		311.627.780,00		
Terlaksananya mediasi dan fasilitasi	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	15	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00		
7.01.05.2.01.0005 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	15	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00		

SubKegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada table dibawah ini :

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			7.01.03.2.03 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tarakan Tengah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tarakan Tengah

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	IKM		90	90,85	91,00	91,89	92,00	92,50	92,75	Tujuan
1	Persentase usulan pembangunan yang terealisasi		80%	81%	81%	82%	82,50 %	82,75 %	83%	Sasaran
2	Capaian kinerja penyelenggara n kecamatan		90,48%	78%	80%	80,85 %	81%	81,75 %	82%	Sasaran
3	Nilai SAKIP PD		73,66	73,85	73,85	73,9	74	74,10	74,2	Sasaran

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Tarakan tengah sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini:

BAB V PENUTUP

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Pengukuran kinerja dimaksud untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategi ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2025-2029. Strategi atau cara pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rencana strategik ini berisikan tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Kecamatan Tarakan Tengah Tahun 2025-2029 dan merupakan sebuah produk kesepakatan dan komitmen bersama bagi seluruh komponen organisasi Kantor Kecamatan Tarakan Tengah.

Meskipun Renstra sudah mencakup berbagai kebijaksanaan, program dan kegiatan yang direncanakan, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan pula dengan situasi dan kondisi yang ada serta selalu memperhatikan arah kebijakan umum pemerintah di tingkat atas. Sehingga dalam pelaksanaannya secara berkala dilakukan pengendalian dan evaluasi pencapaian target renstra, evaluasi efektifitas kebijakan serta tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai target.

Seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis ini, mustahil dapat dicapai tanpa koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh stake holders yang ada di lingkungan Kecamatan Tarakan Tengah.

30. Rencana Strategis Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan Tahun 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan adanya pemerintahan baru di wilayah Kecamatan Tarakan Utara, arah pembangunan dan pelayanan publik diharapkan dapat semakin meningkat, sejalan dengan semangat perubahan yang dibawa oleh kepemimpinan baru baik di tingkat kota maupun kecamatan. Pergantian kepemimpinan ini membawa konsekuensi pada penyesuaian visi, misi, serta strategi pembangunan yang harus diterjemahkan secara tepat dalam program dan kegiatan di kecamatan.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan untuk memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi, serta pelayanan publik di wilayah kecamatan selama lima tahun ke depan. Renstra ini juga menjadi instrumen penting bagi Kecamatan Tarakan Utara dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kota Tarakan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2025–2029.

Kecamatan Tarakan Utara sebagai salah satu wilayah strategis menghadapi berbagai dinamika pembangunan, seperti pertumbuhan jumlah penduduk, peningkatan kebutuhan pelayanan dasar, perkembangan kawasan permukiman, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Selain tantangan tersebut, Kecamatan Tarakan Utara juga memiliki potensi besar berupa sumber daya manusia, sosial budaya, serta perekonomian lokal yang dapat menjadi penggerak peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan, kesenjangan pembangunan antarwilayah, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan.

Dengan demikian, Renstra Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2025–2029 hadir untuk memperkuat peran kecamatan sebagai garda terdepan pelayanan publik, memastikan kesinambungan pembangunan, serta mengawal pelaksanaan visi-misi pemerintahan baru di wilayah Kecamatan Tarakan Utara agar tercipta pemerintahan yang responsif, pelayanan yang berkualitas, dan pembangunan yang berkelanjutan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan rencana strategis (Renstra) Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan berdasarkan landasan kebijakan atau dasar hukum yang meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kota Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 -2029;
12. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 89 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan;
16. Surat Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 100.3.3.3/HK-IV/229/2025 Tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan Tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. MAKSUD

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai:

1. Pedoman bagi Kecamatan Tarakan Utara dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan selama lima tahun ke depan agar lebih terarah, terukur, dan berkesinambungan.
2. Acuan dalam mengintegrasikan visi, misi, dan arah kebijakan pemerintahan baru Kota Tarakan dengan kebutuhan nyata masyarakat di wilayah Kecamatan Tarakan Utara.
3. Instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan, sesuai dengan tuntutan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
4. Landasan dalam melaksanakan evaluasi kinerja kecamatan guna memastikan ketercapaian tujuan pembangunan daerah.

1.3.2. Penyusunan Renstra Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2025–2029 bertujuan untuk:

1. Menjabarkan visi dan misi Pemerintah Kota Tarakan ke dalam arah pembangunan dan strategi pelayanan publik di tingkat kecamatan.
2. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tarakan Utara sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kota Tarakan.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah, sumber daya manusia, dan sosial budaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Menjawab berbagai tantangan dan permasalahan pembangunan, khususnya di bidang pelayanan dasar, sarana prasarana, dan partisipasi masyarakat.
5. Mewujudkan pemerintahan baru yang responsif, inovatif, serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat di Kecamatan Tarakan Utara.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2025–2029 disusun secara sistematis dengan memuat lima bab utama, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab ini paling sedikit memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan

membahas gambaran pelayanan perangkat daerah yang paling sedikit memuat tugas, fungsi, dan struktur perangkat daerah; sumber daya perangkat daerah; kinerja pelayanan perangkat daerah; dan kelompok sasaran layanan. Selain itu juga membahas permasalahan pelayanan Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan dan Isu Strategis.

Bab III Tujuan, Sasaran, Stratewgis dan Arah Kebijakan

Bab ini paling sedikit memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Bab ini paling sedikit memuat uraian program; uraian kegiatan; uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator target dan pagu indikatif; uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah; target keberhasilan pencapaian tujuan dan

sasaran Renstra Kecamatan Tarakan UtaraDaerah Kota Tarakan Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama; dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029

Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan penegasan kembali mengenai pentingnya Renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di Kecamatan Tarakan Utara, sekaligus harapan terhadap keberhasilan implementasi Renstra.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN TARAKAN UTARA KOTA TARAKAN

2.1. GAMBARAN UMUM KECAMATAN TARAKAN UTARA

Kecamatan Tarakan Utara merupakan salah satu kecamatan di Kota Tarakan yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah. Secara geografis, wilayah ini memiliki karakteristik yang beragam, baik dari segi kependudukan, tata ruang wilayah, maupun potensi sumber daya yang dapat dikembangkan.

Kecamatan Tarakan Utara memiliki jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya, dengan struktur masyarakat yang heterogen dan dinamis. Pertumbuhan permukiman baru, peningkatan aktivitas ekonomi, serta mobilitas masyarakat yang tinggi menjadikan wilayah ini sebagai salah satu kawasan yang berkembang pesat di Kota Tarakan. Kondisi tersebut menuntut tersedianya pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berkualitas.

Dari sisi pemerintahan, Kecamatan Tarakan Utara berfungsi sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kota Tarakan dalam melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan umum dan pelayanan masyarakat. Fungsi ini menempatkan kecamatan sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, sekaligus menjadi simpul koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan di tingkat lokal.

2.2. TUGAS, FUNGSI DAN PELAYANAN KECAMATAN TARAKAN UTARA

2.2.1. TUGAS

Kecamatan Tarakan Utara memiliki tugas utama sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan dan dibentuk dengan tujuan memperkuat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Kecamatan juga menjalankan tugas-tugas yang dilimpahkan langsung oleh Wali Kota sebagai representasi pemerintah daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota.

2.2.2. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan Tarakan Utara mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, meliputi pembinaan wawasan kebangsaan, persatuan, kerukunan sosial, penanganan konflik, koordinasi antarinstansi, dan penguatan demokrasi di tingkat kecamatan.
3. Koordinasi pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam forum Musrenbang, sinkronisasi program kerja, efektivitas kegiatan pemberdayaan, serta pelaporan kepada Wali Kota.
4. Koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum, melalui sinergi dengan aparat keamanan, instansi vertikal, tokoh masyarakat, serta tokoh agama.
5. Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah, bersama perangkat daerah terkait dan aparat penegak hukum.
6. Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum, dengan melibatkan perangkat daerah, instansi vertikal, maupun pihak swasta.
7. Koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, untuk memastikan efektivitas program dan sinkronisasi antarinstansi.

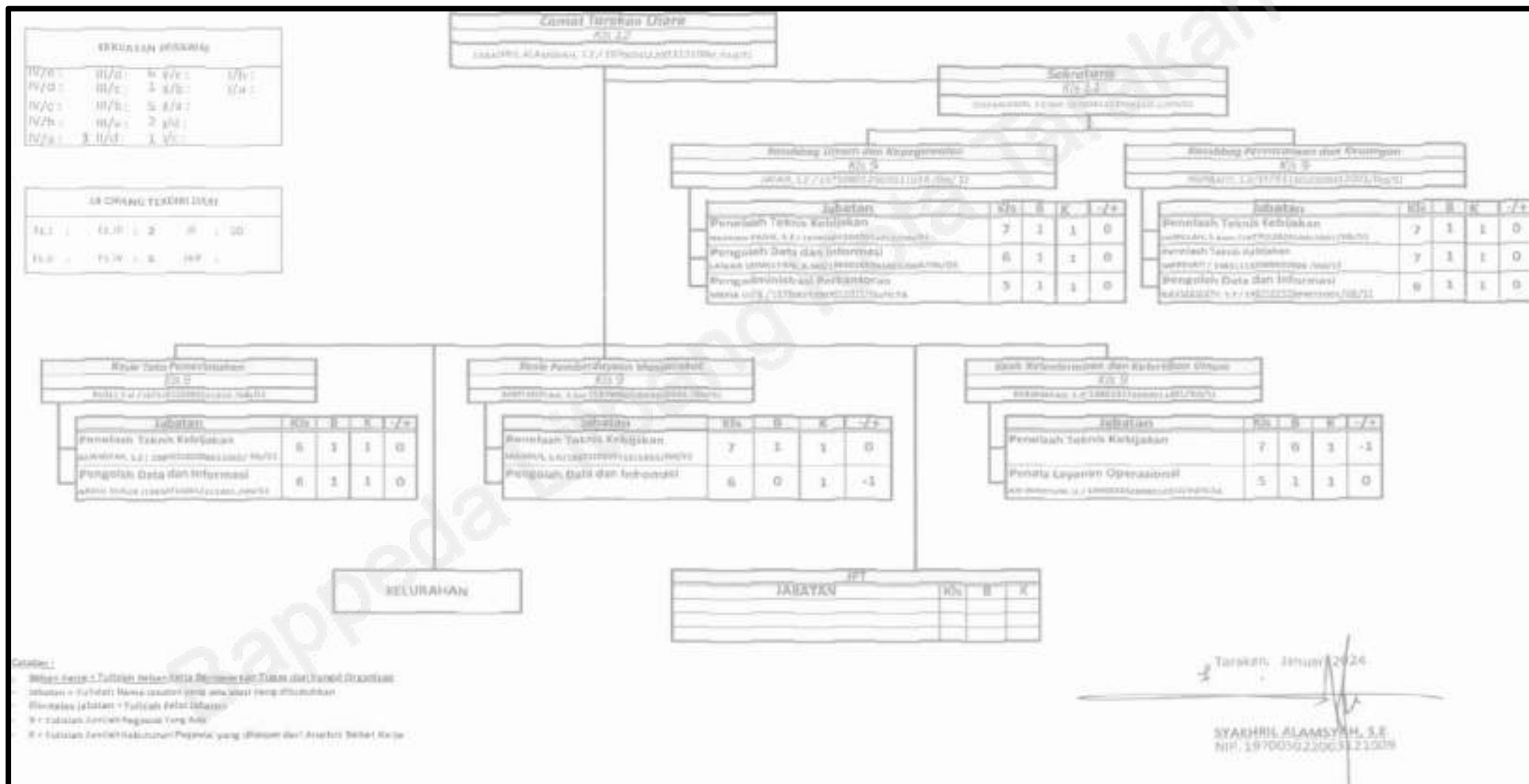
8. Pembinaan dan pengawasan kelurahan, agar pelayanan masyarakat berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
9. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi, termasuk perencanaan, percepatan standar pelayanan minimal, serta pelaporan tertib administrasi.
10. Pelaksanaan fungsi pendukung lainnya, meliputi perencanaan, keuangan, organisasi, kepegawaian, hukum, kehumasan, kearsipan, dan fungsi pelayanan administrasi lainnya sesuai arahan Wali Kota.

2.3. STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TARAKAN UTARA

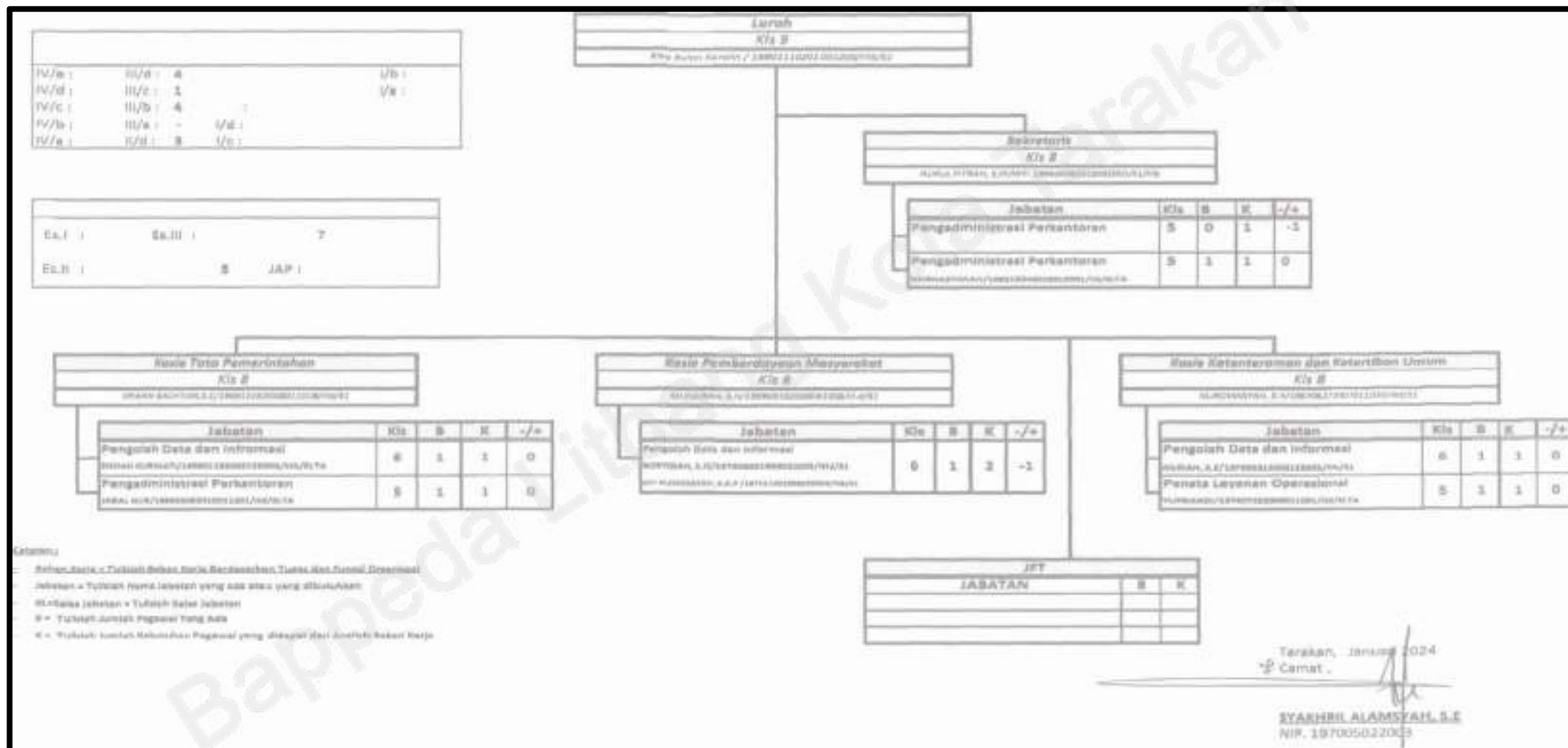
Susunan organisasi Kecamatan Tarakan Utara berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tarakan Utara , Maka susunan Organisasi Kecamatan Tarakan Utara sebagai berikut:

1. Camat;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
5. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
6. Kelurahan, terdiri dari:
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Gambar 2.3.1
Struktur Organisasi Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2024



Gambar 2.3.2
Struktur Organisasi Kelurahan Tarakan Utara Tahun 2024



Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan dilengkapi dengan Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dapat dilihat pada Gambar 2.3.1 dan Gambar 2.3.2 dan adapun susunan organisasi sebagai berikut:

1. Camat

a. Camat adalah orang yang memimpin kecamatan. Camat mempunyai tugas umum pemerintahan meliputi:

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 4) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- 5) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- 8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Selain tugas diatas Camat juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
- 4) Pelaksanaan administrasi Kecamatan; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Kecamatan

a. Sekretaris Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan.

b. Selain tugas diatas Sekretaris juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Koordinasi kegiatan Kecamatan;
- 2) Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kecamatan;
- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kecamatan;
- 4) Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Kecamatan;
- 5) Koordinasi dan penyusunan produk hukum pada Kecamatan;
- 6) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah di Kecamatan;
- 7) Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan;
- 8) Penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Kecamatan; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretariat terdiri dari atas:

1) Sub Bagian umum dan Kepegawaian

- a) Mempunyai tugas mengelola surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, protokol dan administrasi kepegawaian
- b) Serta fungsi
 - Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kecamatan;
 - Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Kecamatan;
 - Koordinasi dan penyusunan produk hukum pada Kecamatan;
 - Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah di Kecamatan;
 - Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kecamatan; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

- a) Mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan masalah keuangan dan pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan program Kecamatan.
- b) Serta fungsi
 - Koordinasi kegiatan Kecamatan;
 - Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kecamatan;
 - Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan;
 - Penyiapan bahan penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Kecamatan; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Masing-masing dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

3. Seksi Pemerintahan

- a. Seksi Pemerintahan merupakan unsur pelaksana di bidang Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam:

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- 2) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan pada bidang tata pemerintahan;
- 3) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan di bidang tata pemerintahan dan pelayanan administrasi kepada masyarakat;
- 4) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota pada bidang tata pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kota yang ada di Kecamatan;
- 5) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang - undangan.

- b. Selain tugas diatas Kasi Pemerintahan juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan kebijakan di bidang tata pemerintahan dan pelayanan administrasi Kecamatan kepada masyarakat di wilayahnya;

- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang tata pemerintahan dan pelayanan administrasi Kecamatan kepada masyarakat di wilayahnya;
 - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan dan pelayanan administrasi Kecamatan kepada masyarakat di wilayahnya; dan
 - 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pelaksana di bidang pemberdayaan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam:
 - 1) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - 2) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - 3) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan pada bidang pemberdayaan masyarakat;
 - 4) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - 5) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada bidang pemberdayaan masyarakat yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - 6) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
 - b. Selain tugas diatas Kasi Pemberdayaan juga mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat di wilayahnya;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat di wilayahnya;
 - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat di wilayahnya; dan
 - 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum
- a. Seksi Ketertiban Umum merupakan unsur pelaksana di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam:
 - 1) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - 2) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 - 3) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan pada bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - 4) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
 - 5) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada bidang ketenteraman dan ketertiban umum yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
 - 6) Mengawasi dan mengendalikan perizinan di wilayah Kecamatan; dan

- 7) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
 - b. Selain tugas diatas Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum juga mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - 1) penyusunan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
 - 2) pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
 - 3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya; dan
 - 4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.
6. Kelurahan
- a. Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang mempunyai tugas membantu Camat dalam:
 - 1) Melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 - 2) Melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - 3) Melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - 4) Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
 - 5) Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - 6) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
 - 7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Selain tugas diatas Lurah juga mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
 - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum di wilayahnya;
 - 4) Pelaksanaan administrasi Kelurahan; dan
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat.
 - c. Pada Kecamatan Tarakan Utara sesuai Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 89 Tahun 2020, telah dibentuk Kelurahan terdiri dari:
 - 1. Kelurahan Juata Laut
 - 2. Kelurahan Juata Permai
 - 3. Kelurahan Juata Krikil

2.4. Sumber Daya Kecamatan Tarakan Utara

2.4.1. Sumber Daya Manusia

Pegawai di Lingkungan kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan dan 3 Kelurahan Tahun 2024 sebanyak 72 Orang, terdiri dari 50 PNS dan 22 Non PNS, jumlah pegawai pada Kantor Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No	Unit Kerja	Pendidikan						
		S2	S1	D4	D3	SLTA	SLTP	SD
1.	Camat	-	1		-	-	-	-
2.	Sekretariat	-	8		-	1	-	-
3.	Pemerintahan	-	3		-	-	-	-
4.	Pemberdayaan	-	2		-	-	-	-

No	Unit Kerja	Pendidikan						
		S2	S1	D4	D3	SLTA	SLTP	SD
5.	Trantibum	-	1		-	1	-	-
6.	Kelurahan Juata laut	-	7		1	3	-	-
7.	Kelurahan Juata Permai	-	7		-	4	-	-
8.	Keluarahan Juata Krikil	-	5	1	1	4	-	-
	Jumlah	-	34	1	2	13	-	-

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2024

Dilihat dari golongan pada Tahun 2024, Pegawai PNS golongan II berjumlah 6 orang, pegawai PNS golongan III berjumlah 43 orang dan paling banyak, pegawai PNS Golongan IV berjumlah 2 orang seperti pada table berikut ini :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Kecamatan Tarakan Utara
Kota Tarakan Berdasarkan Golongan Tahun 2024

No	Unit Kerja	Golongan						
		II	III	D4	D3	SLTA	SLTP	SD
1.	Camat	-	1		-	-	-	-
2.	Sekretariat	-	8		-	1	-	-
3.	Pemerintahan	-	3		-	-	-	-
4.	Pemberdayaan	-	2		-	-	-	-
5.	Trantibum	-	1		-	1	-	-
6.	Kelurahan Juata laut	-	7		1	3	-	-
7.	Kelurahan Juata Permai	-	7		-	4	-	-
8.	Keluarahan Juata Krikil	-	5	1	1	4	-	-
	Jumlah	-	34	1	2	13	-	-

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2024

2.4.2. Sarana dan Prasarana (Aset)

Sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan meliputi Peralatan dan Mesin, Tanah dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Daftar Aset Tetap Tanah

No	Nama Barang	Alamat / Lokasi	Luas (M2)
1	Kec. Tarakan Utara		
	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan	Jl. P Aji iskandar RT. 18 Kel Juata laut Kec, Tarakan Utara	10500
2	Kel. Juata Laut		
	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan	Jl. Padat Karya RT. 10 Kelurahan Juata Laut	800,00
3	Kel. Juata Kerikil		
	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan	Jl. P. Aji Iskandar RT. 05 Juata Kerikil	660,00
4	Kel. Juata Permai		
	- Tanah Bangunan Kantor Pemerintahan	Jalan Seranai 3 RT. 20 Kel. Juata Permai	4.200,00

Tabel 2.4
Daftar Aset Tetap Peralatan Dan Mesin

No	Jenis / Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
1	Kendaraan Bermotor Roda 4	2 Unit	-	2 Unit	-	
2	Kendaraan Bermotor Roda 2	5 Unit	1 Unit	1 Unit	3 Unit	
3	Gedung Kantor	1 Unit	1 Unit	-	-	
4	Gedung Serbaguna	1 Unit	1 Unit	-	-	
5	Instalasi PLTD Kapasitas Lain - Lain	1 Paket	1 Paket	-	-	
6	Instalasi Penangkal Petir Manual	1 Paket	-	-	-	
7	Jaringan Transmisi Tegangan Diatas 300 KVA	1 Paket	-	1 Paket	-	
8	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Lain - Lain	1 Paket	1 Paket	-	-	
9	Jaringan Istalasi Listrik	1 Paket	-	-	-	
10	Portable Generating Set	1 Unit	-	-	1 Unit	
11	Global Positioning System	1 Unit	-	-	1 Unit	
12	Scanner (Universal Tester)	1 Unit	1 Unit	-	-	
13	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	4 Unit	4 Unit	-	-	
14	Rak-Rak Penyimpan	1 Unit	1 Unit	-	-	
15	Termos A.J	2 Buah	2 Buah	-	-	
16	Mesin Ketik Listrik Potable (11-13 Inchi)	1 Unit	-	-	1 Unit	
17	Lemari Besi/Metal	1 Unit	-	-	1 Unit	
18	Lemari Kayu	7 Unit	2 Unit	5 Unit	-	
19	Rak Kayu	1 Unit	-	1 Unit	-	
20	Filing Cabinet Besi	8 Unit	5 Unit	2 Unit	-	
21	Lemari Kaca	2 Unit	-	1 Unit	1 Unit	
22	Lemari Makan	1 Unit	1 Unit	-	-	
23	White Board	1 Buah	1 Buah	-	-	
24	Peta	1 Buah	1 Buah	-	-	
25	Alat Penghancur Kertas	2 Unit	2 Unit	-	-	
26	Mesin Absensi	1 Unit	1 Unit	-	-	
27	Papan Pengumuman	1 Buah	1 Buah	-	-	
28	Laptop	3 Unit	3 Unit	-	-	
29	Kursi Besi/Metal	7 Unit	7 Unit	-	-	
30	Meja Rapat	7 Unit	6 Unit	1 Unit	-	
31	Meja Ketik	3 Unit	3 Unit	-	-	
32	Meja Resepsionis	3 Unit	2 Unit	1 Unit	-	
33	Meja 1/2 Biro	5 Unit	-	5 Unit	-	
34	Kursi Fiber Glas/Plastik	53 Buah	-	10 Buah	43 Buah	
35	Kursi Rapat	40 Unit	29 Unit	-	11 Unit	
36	Kursi Tamu	9 Unit	8 Unit	-	1 Unit	
37	Kursi Komputer	6 Unit	3 Unit	3 Unit	-	
38	Sofa	3 Unit	2 Unit	1 Unit	-	
39	Meubelair Lain-Lain	2 Unit	2 Unit	-	-	Lemari Kayu
40	Mesin Pemotong Rumput	1 Unit	-	-	1 Unit	
41	Lemari Es	1 Unit	-	1 Unit	-	
42	A.C. Sentral	2 Unit	-	-	2 Unit	
43	A.C. Window	7 Unit	3 Unit	3 Unit	1 Unit	
44	A.C. Split	5 Unit	2 Unit	3 Unit	-	
45	Rice Cooker (Alat Dapur)	1 Unit	-	-	1 Unit	
46	Kitchen Set	1 Set	-	-	1 Set	
47	Sound System	1 Unit	-	-	1 Unit	
48	Mic Conference	1 Buah	1 Buah	-	-	
49	Tiang Bendera	1 Buah	1 Buah	-	-	
50	Dispenser	1 Unit	-	-	1 Unit	
51	Rak Sampah	1 Buah	-	-	-	
52	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home use) Lain-Lain	1 Set	-	1 Set	-	Gorden Kantor
53	Lain-lain Alat Pemadam Kebakaran	1 Unit	-	-	1 Unit	
54	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3 Unit	2 Unit	1 Unit	-	
55	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	11 Unit	8 Unit	3 Unit	-	
56	Lain-lain Meja Kerja Pejabat	5 Unit	4 Unit	1 Unit	-	
57	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4 Unit	3 Unit	1 Unit	-	
58	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	3 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
59	Kursi Kerja Pejabat Lain-Lain	13 Unit	7 Unit	3 Unit	3 Unit	
60	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	3 Unit	2 Unit	1 Unit	-	
61	Buffet Kaca	3 Unit	-	3 Unit	-	
62	Layar Film/Projector	1 Unit	-	-	1 Unit	
63	Printer	2 Unit	2 Unit	-	-	
64	Facsimile	1 Unit	1 Unit	-	-	
65	Kursi Dorong	1 Buah	1 Buah	-	-	
66	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	5 Unit	-	5 Unit	-	Alat Pemadam Kebakaran
67	Meja Kerja	6 Unit	3 Unit	3 Unit	-	
68	Layar	1 Unit	-	-	1 Unit	Laya Projektor
69	Serial Scanner/Printer	1 Unit	1 Unit	-	-	
70	Profilometer	1 Unit	-	1 Unit	-	
71	Tape Recorder (Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran)	1 Unit	-	-	1 Unit	
72	Kamera Digital	3 Unit	2 Unit	-	1 Unit	
73	P.C Unit	7 Unit	1 Unit	2 Unit	4 Unit	
74	Lap Top	3 Unit	2 Unit	-	1 Unit	
75	Note Book	5 Unit	1 Unit	2 Unit	2 Unit	

No	Jenis / Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
76	Monitor	2 Unit	-	1 Unit	1 Unit	
77	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2 Unit	-	-	2 Unit	
78	Hard disk Eksternal	2 Unit	2 Unit	-	-	
79	Router	1 Unit	1 Unit	-	-	
80	Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	-	-	1 Unit	ditarik ke Bagian Umum Pemkot
81	Kendaraan Dinas Roda 3	1 Unit	-	-	1 Unit	Bentor Sampah
82	Kendaraan Dinas Roda 2	9 Unit	2 Unit	-	7 Unit	
83	Electric Generating Set	1 Unit	-	-	1 Unit	Genset
84	Alat Pengukur Garis Tengah	1 Unit	-	-	1 Unit	
85	Mesin Pemotong Rumput	1 Unit	-	-	1 Unit	
86	Mesin Ketik Manual	1 Unit	-	-	1 Unit	
87	Mesin Ketik Listrik	1 Unit	1 Unit	-	-	
88	Lemari Kayu	13 Unit	-	12 Unit	1 Unit	
89	Filling Kabinet	4 Unit	-	4 Unit	-	
90	Brandkas	1 Unit	-	-	1 Unit	
91	Stabilizer	3 Unit	-	-	3 Unit	
92	Meja Rapat	1 Unit	-	-	1 Unit	
93	Kursi Rapat Chitose Biru	4 Unit	-	-	4 Unit	
94	Kursi Rapat Chitose Abu - Abu	6 Unit	-	-	6 Unit	
95	Kursi Fiber Glas/ Plastik	2 Unit	-	-	2 Unit	
96	Bangku Tunggu	2 Unit	2 Unit	-	-	
97	Meja Komputer	3 Unit	-	-	3 Unit	
98	Sofa	2 Unit	1 Unit	-	1 Unit	
99	Meubelair Lain - Lain	1 Paket	-	1 Paket	-	Kain Korden
100	Meubelair Lain - Lain	20 Paket	-	20 Paket	-	Rel Korden
101	Lemari Es	5 Unit	-	5 Unit	-	
102	A.C Split	8 Unit	6 Unit	-	2 Unit	
103	Kipas Angin	4 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	
104	Exhaust Fan	8 Unit	-	8 Unit	-	
105	Kompos Gas 2 Tugku	1 Unit	-	1 Unit	-	
105	Sound System	2 Unit	1 Unit	-	1 Unit	
106	Wireless	1 Unit	-	-	1 Unit	
107	Power Supply	1 Unit	-	-	1 Unit	
108	Camera Video	1 Unit	-	-	1 Unit	
109	Tangga Aluminium	1 Unit	1 Unit	-	-	
110	Mimbar / Podium	1 Unit	-	-	1 Unit	
111	Alat Pembantu Kebakaran	1 Unit	1 Unit	-	-	
112	Tabung Gas	1 Unit	1 Unit	-	-	
113	Meja Kerja Pejabat Eselon IV 1 Biro	1 Unit	2 Unit	-	-	
114	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5 Unit	5 Unit	-	-	Activ
115	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	4 Unit	3 Unit	-	1 Unit	Activ
116	Meja Kerja 1/2 Biro	8 Unit	7 Unit	-	1 Unit	
117	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4 Unit	-	3 Unit	1 Unit	
118	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2 Unit	-	2 Unit	-	
119	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	5 Unit	5 Unit	1 Unit	2 Unit	Ushito
120	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat	30 Unit	30 Unit	-	15 Unit	Polaris
121	Microphone/Wireless MIC	1 Unit	-	1 Unit	-	
122	Telephone (PABX)	6 Unit	-	-	6 Unit	Intercom
123	Facsimile	1 Unit	-	-	1 Unit	
124	Mainframe (Komputer Jaringan)	1 Unit	-	-	1 Unit	
125	P.C Unit	8 Unit	-	2 Unit	6 Unit	
126	Laptop	6 Unit	6 Unit	-	5 Unit	
127	Personal Komputer	1 Unit	-	-	1 Unit	Speeker Aktif SIMBADA
128	Monitor	1 Unit	-	-	1 Unit	Samsung
129	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6 Unit	6 Unit	-	5 Unit	
130	Scanner	1 Unit	-	-	1 Unit	
131	Peralatan Personal Komputer Lain-Lain	1 Unit	-	-	1 Unit	
132	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home use) Lain-Lain	1 Unit	-	-	1 Unit	
133	Alat Kantor Lainnya Lain-Lain	6 Unit	-	-	6 Unit	
134	Papan Nama Instansi	1 Unit	-	1 Unit	-	
135	Sumur Resapan	1 Unit	1 Unit	-	-	Instalasi PDAM
136	Jaringan Transmisi	1 Unit	1 Unit	-	-	Perbaikan Jaringan Instalasi Listrik
137	Kendaraan Roda 4	1 Unit	-	1 Unit	-	
138	Kendaraan Roda 2	9 Unit	1 Unit	4 Unit	4 Unit	
139	Gedung Kantor	1 Unit	-	1 Unit	-	
140	Komputer	3 Unit	2 Unit	1 Unit	-	
141	Laptop	5 Unit	1 Unit	4 Unit	-	
142	Printer	2 Unit	1 Unit	-	1 Unit	
143	Kamera	1 Unit	-	-	1 Unit	
144	Proyektor	1 Unit	-	-	1 Unit	
145	Penyempnot Tangan (Hand Sprayer)	3 Unit	-	-	3	
146	Lemari Kayu	3 Unit	1 Unit	2 Unit	-	
147	Rak Kayu	2 Unit	-	-	2 Unit	
148	Filing Cabinet Besi	2 Unit	-	-	2 Unit	
149	Mesin Pemotong Rumput	2 Unit	-	1 Unit	1 Unit	

No	Jenis / Nama Barang	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
150	A.C. Window	7 Unit	3 Unit	4 Unit		
151	Sound System	1 Unit			1 Unit	
152	meja kerja	12 Unit	3 Unit	7 Unit	2 Unit	
153	kursi kerja	12 Unit		8 Unit	4 Unit	
154	kursi pelayanan	1 Unit		1 Unit		
155	sofa	1 Unit		1 Unit		

Tabel 2.5
Daftar Aset Gedung Dan Bangunan

No	Nama Barang	Alamat / Lokasi
1	Kecamatan Tarakan Utara	
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jln. P. Aji Iskandar RT. 18
	- Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	
	- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	
	- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	
2	Kelurahan Juata Laut	
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jalan Padat Karya RT. 10
3	Kel. Juata Permai	
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jalan Seranai 3 RT. 20
4	Kel. Juata Kerikil	
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. P. Aji Iskandar RT. 05

2.5. Kinerja Pelayanan Kecamatan Tarakan Utara

Kecamatan Tarakan Utara sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan memiliki peran utama sebagai ujung tombak pelayanan publik. Selama ini, kinerja pelayanan kecamatan dapat dilihat dari berbagai aspek, di antaranya: Pelayanan Administrasi, Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembinaan Kelurahan, Pemberdayaan Masyarakat, Ketenteraman dan Ketertiban, Inovasi Layanan Publik. Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tarakan Utara tertuang dalam Tabel 2.6 (T.C-23) :

Tabel 2.6 (T.C-23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tarakan Utara

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Prediktor Sakip Kecamatan				50	50	51	52	53	45,56	57,09	63,60	75,36	75,36	91,12%	95,16%	104,26%	121,55%	119,62%
2	IKM				84	88	86	87	88	100	89,47	90	90	91,84	128%	108%	108%	103%	104%
3	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Kegiatan Keagamaan				na	100%	100%	100%	100%	na	100%	100%	100%	100%	na	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Fasilitas Penyelesaian Masalah Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang tertangani				na	na	na	100%	100%	na	na	na	100%	100%	na	na	na	100%	100%

Pada tahun akhir perencanaan, yaitu tahun 2024, kinerja Kecamatan Tarakan Utara secara umum menunjukkan capaian yang positif dan progresif. Berdasarkan indikator-indikator utama yang telah ditetapkan dalam Renstra, sebagian besar target dapat dicapai bahkan melampaui ekspektasi yang telah ditentukan. Hal ini mencerminkan adanya komitmen yang kuat dari aparatur kecamatan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat tata kelola pemerintahan di wilayahnya.

Salah satu indikator yang menonjol adalah Predikat SAKIP Kecamatan, yang mengalami peningkatan konsisten dari tahun ke tahun. Pada awal periode, capaian SAKIP masih berada di bawah target (91,12% pada tahun 2020 dan 95,15% pada tahun 2021). Namun, berkat berbagai upaya perbaikan, termasuk peningkatan sistem akuntabilitas dan efektivitas perencanaan program, capaian SAKIP pada tahun 2022 berhasil melampaui target (104,26%) dan terus meningkat hingga mencapai 121,55% pada tahun 2023 dan 119,62% pada tahun 2024. Peningkatan ini tidak hanya menunjukkan perbaikan kualitas perencanaan dan pelaporan, tetapi juga menggambarkan semakin kuatnya budaya kinerja yang terbangun di lingkungan Kecamatan Tarakan Utara. Indikator lain yang sangat penting adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pada tahun 2024, capaian IKM mencapai 104% dari target yang ditetapkan, menandakan bahwa pelayanan publik yang diberikan aparatur kecamatan mampu memenuhi bahkan melampaui ekspektasi masyarakat. Tren positif ini juga konsisten terlihat pada tahun-tahun sebelumnya, dengan capaian di atas target sejak tahun 2020 hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik di Kecamatan Tarakan Utara semakin responsif, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

Selain itu, indikator yang terkait dengan kepatuhan prosedural dan pembinaan masyarakat, seperti Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif, Persentase Kegiatan Keagamaan, serta Persentase Fasilitasi Penyelesaian Masalah Ketenteraman dan Ketertiban Umum, semuanya tercapai 100% sesuai target yang telah ditetapkan. Konsistensi capaian ini mencerminkan bahwa peran kecamatan sebagai fasilitator, koordinator, dan pembina masyarakat berjalan dengan efektif. Fungsi kecamatan dalam membangun kerukunan, menjaga ketenteraman, serta memperkuat kohesi sosial di tingkat lokal dapat dikatakan telah terlaksana dengan baik dan stabil.

Walaupun secara umum capaian kinerja sangat menggembirakan, tetap terdapat tantangan yang harus diperhatikan. Pada awal periode perencanaan, capaian SAKIP sempat belum mencapai target, yang mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Namun, dinamika ini justru menunjukkan adanya proses pembelajaran organisasi yang kemudian mendorong peningkatan signifikan pada tahun-tahun berikutnya.

Dengan capaian yang ada, dapat disimpulkan bahwa pada akhir tahun 2024, Kecamatan Tarakan Utara telah berhasil menunjukkan kinerja yang solid, baik dalam aspek akuntabilitas pemerintahan maupun kualitas pelayanan publik. Keberhasilan ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan dengan memperkuat inovasi pelayanan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Dengan demikian, kinerja Kecamatan Tarakan Utara tidak hanya dapat terus menjaga keberhasilan yang sudah ada, tetapi juga mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tarakan Utara

Uraian Angg	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				o antara Realisasi dan Anggaran Tahun				rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
-1	-3	-4	-5	-6	-8	-9	-10	-11	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.759.513.345,00	7.059.316.875,00	7.116.330.545,00	7.541.262.474,00	6.602.708.261,00	6.548.242.026,00	6.600.874.117,00	6.876.889.143,00	97,54%	93,97%	92,73%	91,22%	3,69%	1,39%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	797.500.000,00	792.500.000,00	1.547.467.960,00	2.017.743.860,00	797.500.000,00	792.500.000,00	1.414.014.676,00	2.009.356.460,00	100,00%	100,00%	91,36%	99,56%	41,68%	39,97%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	148.151.925,00	164.992.000,00	208.999.450,00	210.108.860,00	127.600.000,00	176.962.000,00	193.766.920,00	209.090.625,00	85,13%	95,66%	92,71%	99,52%	12,79%	15,10%
Program Koordinasi Ketertarikan dan Ketertiban Umum			19.986.440,00	20.978.440,00			19.984.960,00	20.926.390,00			99,96%	99,75%	0	0

2.6. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Tarakan Utara merupakan bagian penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan. Pada dasarnya, sasaran layanan Kecamatan Tarakan Utara mencakup seluruh pihak yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pengawasan, serta pembinaan masyarakat.

- Pertama, Kepala Daerah (Wali Kota Tarakan) menjadi sasaran utama karena hasil dari kinerja kecamatan, baik berupa laporan, pengawasan, maupun rekomendasi, akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Hasil kerja kecamatan turut berkontribusi dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang efektif dan tepat sasaran.
- Kedua, Perangkat Daerah (OPD), termasuk dinas, badan, kelurahan, hingga unit kerja teknis lainnya, menjadi kelompok sasaran penting. Kecamatan memiliki peran dalam melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan sehingga OPD dapat menjalankan program secara tertib, transparan, dan sesuai dengan rencana pembangunan daerah.
- Ketiga, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di lingkungan Kecamatan Tarakan Utara merupakan kelompok sasaran layanan yang tidak dapat diabaikan. ASN perlu mendapatkan pembinaan agar semakin profesional, berintegritas, dan patuh terhadap aturan. Hal ini berpengaruh pada kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan, yang menjadi garda terdepan dalam melayani masyarakat.
- Keempat, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi sasaran layanan, terutama dalam hal pengawasan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan akuntabilitas, serta peningkatan kinerja usaha. Dengan demikian, BUMD dapat mendukung pembangunan ekonomi daerah sekaligus memperkuat pendapatan asli daerah (PAD).

2.7. Mitra Kecamatan Tarakan Utara Dalam Memberikan Layanan

Dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik, Kecamatan Tarakan Utara tidak bekerja sendiri, melainkan menjalin kerja sama dan koordinasi dengan berbagai mitra. Mitra ini berperan dalam mendukung, mengawasi, maupun memperkuat kualitas layanan kepada masyarakat.

- Pertama, Pemerintah Kota Tarakan melalui perangkat daerah (dinas, badan, dan lembaga) menjadi mitra utama kecamatan dalam pelaksanaan program pembangunan. Kecamatan berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah kota dengan pelaksanaan di tingkat wilayah.
- Kedua, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tarakan turut menjadi mitra dalam menyerap aspirasi masyarakat dan memastikan bahwa program pembangunan di wilayah Tarakan Utara sesuai kebutuhan masyarakat.
- Ketiga, masyarakat dan lembaga kemasyarakatan berperan sebagai mitra dalam mendukung pelaksanaan program pemberdayaan, menjaga keamanan lingkungan, serta meningkatkan partisipasi dalam pembangunan. Peran aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan pelayanan kecamatan.
- Keempat, aparat penegak hukum dan lembaga keamanan seperti kepolisian, TNI, dan Satpol PP merupakan mitra dalam menjaga ketentraman, ketertiban, serta keamanan di wilayah kecamatan. Sinergi ini penting agar tercipta lingkungan yang kondusif bagi masyarakat.
- Kelima, pihak swasta, dunia usaha, LSM, dan media massa juga menjadi mitra strategis yang berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, penguatan kontrol sosial, serta penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat.

2.8. Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan

Sebelum merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan, perlu dilakukan analisis mengenai permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Kecamatan Tarakan Utara. Analisis ini penting untuk memahami kondisi aktual, tantangan, serta peluang yang dapat mempengaruhi kinerja pelayanan kecamatan di era pemerintahan baru.

Pemerintahan baru Kota Tarakan membawa semangat perubahan, dengan fokus pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik yang lebih transparan dan berbasis teknologi, serta percepatan pembangunan wilayah. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Kecamatan Tarakan Utara sebagai perangkat daerah yang menjalankan sebagian kewenangan pemerintah kota di tingkat kecamatan.

Dalam konteks tersebut, Kecamatan Tarakan Utara memiliki sejumlah potensi yang dapat menjadi faktor pendorong peningkatan kualitas pelayanan, seperti adanya dukungan regulasi, semangat reformasi birokrasi dari pemerintahan baru, tersedianya sumber daya aparatur, serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan. Namun demikian, terdapat pula permasalahan baik dari sisi internal maupun eksternal yang harus diantisipasi agar tidak menghambat pencapaian target pembangunan di periode ini.

- Permasalahan Utama

1. Keterbatasan sumber daya manusia aparatur di tingkat kecamatan dan kelurahan, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi, yang menghambat optimalisasi pelayanan publik.
2. Sarana dan prasarana pelayanan belum memadai, khususnya fasilitas perkantoran, pelayanan terpadu, serta pemanfaatan teknologi digital yang masih terbatas.
3. Tingkat partisipasi masyarakat belum merata, terutama dalam perencanaan pembangunan, sehingga masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan riil masyarakat dengan program yang dijalankan.
4. Koordinasi antar perangkat daerah belum sepenuhnya optimal, menyebabkan adanya potensi tumpang tindih program maupun keterlambatan pelaksanaan kegiatan.
5. Permasalahan sosial kemasyarakatan, seperti ketertiban umum, pengelolaan lingkungan, dan kesenjangan ekonomi antarwilayah, yang masih membutuhkan solusi berkelanjutan.

- Isu Strategis

1. Penguatan kapasitas aparatur kecamatan dan kelurahan untuk mendukung agenda pemerintahan baru dalam menciptakan pelayanan publik yang cepat, responsif, dan akuntabel.
2. Modernisasi layanan berbasis digital sejalan dengan visi pemerintahan baru yang menekankan inovasi teknologi dan reformasi birokrasi.
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan wilayah, agar lebih inklusif dan sesuai kebutuhan lokal.
4. Penguatan koordinasi lintas sektor dengan perangkat daerah, DPRD, aparat keamanan, dan mitra strategis lainnya untuk menciptakan sinergi pembangunan yang efektif.
5. Penanganan masalah sosial dan ketertiban umum, dengan pendekatan kolaboratif antara kecamatan, kelurahan, masyarakat, dan aparat penegak hukum.
6. Pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal, agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan warga di era pemerintahan baru.

Dengan pemetaan ini, Kecamatan Tarakan Utara dapat menyusun prioritas pembangunan yang tidak hanya menyelesaikan masalah yang ada, tetapi juga memanfaatkan peluang dari kebijakan pemerintahan baru. Strategi ini diharapkan mampu memperkuat peran kecamatan sebagai garda terdepan pelayanan publik dan penghubung antara pemerintah kota dengan masyarakat.

Tabel 2.8
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Pelayanan Publik Kecamatan	Belum Tingginya Pembangunan di Kecamatan	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Musrenbang
		Belum Optimalnya Pemberdayaan di Kelurahan
		Belum Optimalnya Penyelenggaraan Fasilitas Lembaga Kemasyarakatan
	Belum Optimalnya Kualitas Penyelenggaraan Kecamatan	Belum Optimalnya Pelayanan Administratif Masyarakat
		Belum Optimalnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Belum Optimalnya Penyelenggaraan Fasilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Belum Optimalnya Pelaksanaan Mediasi dan Fasilitas Konflik
		Belum Optimalnya Penyelenggaraan MTQ wilayah
	Belum tingginya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Belum Optimalnya Penguatan Internal Akuntabilitas Kinerja
		Belum Optimalnya Layanan Kesekretariatan

2.9. Penentuan Isu-Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (Lima) tahun kedepan, dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik tingkat lokal, regional dan nasional. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya maka isu-isu strategis yang berkembang dan dihadapi adalah:

1. Pentingnya citra pelayanan yang prima dalam pelaksanaan Peraturan mengenai pelayanan yang dilimpahkan pada Kecamatan dan Kelurahan se-Kecamatan Tarakan Utara;
2. Pentingnya konsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan dan komitmen untuk melaksanakannya. Serta pemanfaatan sumberdaya perencanaan, baik *hardware*, *software*, maupun *brainware*;
3. Penampungan aspirasi masyarakat sebagai wujud dari *bottom up* planning dari Musrenbang harus mendapatkan perhatian yang lebih, untuk meningkatnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan hasil Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan;
4. Perlunya menjaga keharmonisan kewilayahan dengan kondisi yang beragam etnis, budaya dan agama di dalamnya;
5. Optimalisasi sinergitas dengan lembaga kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan, Kelurahan hingga tingkat RT dan RW, agar tercipta koneksi kedekatan antara pemerintahan dan masyarakat;
6. Pentingnya pemahaman ASN, dan tersosialisasikannya penerbitan urusan pelayanan di lingkup Kecamatan dan Kelurahan sesuai peraturan yang berlaku;
7. Meningkatnya kualitas data mandiri yang andal tentang kewilayahan dalam bentuk profil Kecamatan dan Kelurahan, sehingga memiliki keakuratan data tentang potensi wilayah; dan
8. Pentingnya kehadiran Pemerintah dalam fasilitasi penyelesaian konflik-

konflik sosial dan konflik pertanahan, yang di antaranya mengenai perambahan kawasan mangrove, kawasan pesisir, serta kawasan yang berkaitan dengan pertahanan militer. Termasuk juga masalah ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tarakan Utara dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan Kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9
Isu Strategis Kecamatan Tarakan Utara

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Kelembagaan masyarakat (RT, PKK, Karang Taruna, LPM,) yang dapat dilibatkan dalam pelayanan publik	Belum Tingginya Pembangunan di Kecamatan	Perlunya peningkatan akses informasi dan layanan kesehatan masyarakat	Pelayanan berbasis teknologi AI	Pembangunan Sekolah rakyat,	peningkatan partisipasi sekolah di wilayah kecamatan (untuk pemberian bantuan pendidikan)	Terwujudnya Pelayanan Publik Kecamatan yang Berkualitas
Babinsa, Babinkamtibmas, Balakar yang dapat dilibatkan dalam ketentraman dan ketertiban umum wilayah	Belum Optimalnya Kualitas Penyelenggaraan layanan kecamatan	Perlunya peningkatan kualitas hidup masyarakat pemukiman pesisir	Transformasi digital dalam layanan publik	Percepatan SPBE dan pelayanan publik berbasis elektronik	Penerapan aplikasi layanan kecamatan berbasis lokal (contoh: layanan antrean, e-dokumen)	
	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Belum optimalnya upaya pembangunan berketahanan iklim dan tangguh bencana berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Tuntutan transparansi dan akuntabilitas global	Peningkatan kualitas SAKIP dan reformasi birokrasi	Peningkatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas perangkat kecamatan	
		Belum terpenuhi dan meratanya infrastruktur air bersih dan sanitasi secara menyeluruh		pembentukan koperasi merah putih		
		Belum optimalnya peningkatan kesadaran dan pengelolaan sampah berkelanjutan		satu data untuk regsossek (registrasi sosial ekonomi)		
		Penguatan penegakan hukum dan perlindungan masyarakat.				

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi kota tarakan, Kecamatan Tarakan Utara menetapkan tujuan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Tujuan ini mencerminkan komitmen Kecamatan Tarakan Utara untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan merata.

Adapun Tujuan Kecamatan Tarakan Utara adalah:

“Terwujudnya Pelayanan Publik Kecamatan yang Berkualitas.”

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka ditetapkan beberapa Sasaran Pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pembangunan Kecamatan

Upaya ini diarahkan untuk memperkuat peran kecamatan dalam mendukung pembangunan wilayah, baik melalui penyediaan sarana dan prasarana maupun penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan.

2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kecamatan

Fokus utama sasaran ini adalah meningkatkan kualitas layanan administrasi dan pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari keberadaan kecamatan sebagai garda terdepan pemerintahan.

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan integritas aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas pemerintahan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin meningkat.

Dengan tujuan dan sasaran tersebut, Kecamatan Tarakan Utara diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan di wilayah pemerintahan baru, serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, tepat, dan berkeadilan, Maka dapat di lihat dalam tabel 3.3

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tarakan Utara

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
- Meningkatnya kualitas digitalisasi pelayanan publik	Terwujudnya pelayanan publik Kecamatan yang berkualitas		Indeks kepuasan masyarakat (Indeks)	91,84	92,17	92,2	92,23	92,27	92,3	92,33	
		Meningkatnya pembangunan kecamatan	Persentase Usulan Pembangunan yang Terealisasi (%)	22,22	23,02	23,03	23,04	23,05	23,06	23,07	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kecamatan	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan (%)	85,62	85,65	85,68	85,71	85,74	85,77	85,8	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai SAKIP (Angka)	74,01	74,03	74,04	74,05	74,06	74,07	74,08	

3.2. Strategis

Dalam rangka mendukung arah pembangunan Kota Tarakan dan sejalan dengan semangat pemerintahan baru yang menekankan transformasi pelayanan publik berbasis transparansi, akuntabilitas, dan digitalisasi, Kecamatan Tarakan Utara menetapkan strategi pembangunan pelayanan publik secara bertahap sebagai berikut:

Tahap I (2026): Penguatan Dasar Pelayanan Publik Kecamatan

Pada masa awal pemerintahan baru, fokus utama diarahkan pada penguatan fondasi pelayanan publik. Hal ini meliputi pembenahan sistem administrasi dasar, peningkatan kapasitas aparatur, serta penataan mekanisme pelayanan yang sederhana, cepat, dan mudah diakses masyarakat. Penguatan dasar ini menjadi pijakan penting untuk menghadapi transformasi pelayanan publik yang lebih modern pada tahap berikutnya.

Tahap II (2027): Pengembangan Layanan Administrasi Masyarakat Berbasis Digital

Memasuki tahun kedua pemerintahan baru, strategi diarahkan pada digitalisasi layanan administrasi. Penerapan sistem layanan berbasis teknologi informasi mulai dikembangkan, seperti layanan surat-menyurat elektronik, antrean online, serta aplikasi pelayanan kecamatan. Langkah ini bertujuan meningkatkan efisiensi, mengurangi praktik birokrasi berbelit, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Tahap III (2028): Konsolidasi Transparansi Layanan Publik

Selaras dengan visi pemerintahan baru yang menekankan akuntabilitas, tahap ketiga difokuskan pada penguatan transparansi layanan. Kecamatan Tarakan Utara akan mendorong keterbukaan informasi publik, menyediakan kanal pengaduan masyarakat yang terintegrasi, serta memastikan setiap proses layanan dapat dipantau oleh masyarakat. Konsolidasi ini menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap kinerja kecamatan.

Tahap IV (2029): Penyatuan Layanan Kecamatan Berbasis Teknologi

Strategi tahap keempat menekankan integrasi seluruh layanan kecamatan ke dalam satu sistem berbasis teknologi. Penyatuan ini memungkinkan masyarakat mengakses berbagai jenis layanan dalam satu pintu digital yang lebih efisien dan terhubung dengan sistem pelayanan kota. Pemerintahan baru mendorong inovasi dan sinergi lintas sektor agar layanan kecamatan lebih cepat, transparan, dan responsif.

Tahap V (2030): Terwujudnya Pelayanan Publik Kecamatan yang Prima, Partisipatif, Transparan, dan Berkelanjutan

Sebagai puncak dari strategi lima tahun, Kecamatan Tarakan Utara menargetkan tercapainya pelayanan publik yang berkualitas prima. Layanan diharapkan tidak hanya cepat dan transparan, tetapi juga partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Penerapan prinsip berkelanjutan memastikan pelayanan publik tetap relevan, adaptif, dan mampu mendukung pembangunan jangka panjang sejalan dengan arah pemerintahan baru yang tertuang dalam tabel 3.4

Tabel 3.1

Tahapan - Tahapan

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan Dasar Pelayanan Publik Kecamatan	Pengembangan Layanan Administrasi Masyarakat berbasis digital	Konsolidasi transparansi layanan publik (informasi publik & pengaduan masyarakat).	Penyatuan layanan kecamatan berbasis teknologi	Terwujudnya pelayanan publik kecamatan yang prima, partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.

Dengan arah kebijakan ini, Kecamatan Tarakan Utara menempatkan diri berperan sebagai pelopor/pendahulu dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan baru yang terbuka, berintegritas, dan partisipatif. Seluruh instrumen kebijakan ini berfungsi sebagai fondasi operasional yang menopang implementasi strategi, sehingga tujuan besar “Terwujudnya Pelayanan Publik Kecamatan yang Prima, Partisipatif, Transparan, dan Berkelanjutan” dapat dicapai secara bertahap hingga tahun 2030.

3.3. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Kecamatan Tarakan Utara disusun sebagai rangkaian kerja yang menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan dalam setiap tahun perencanaan. Seluruh kebijakan diarahkan untuk memperkuat kualitas pelayanan publik kecamatan, meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta mendorong terwujudnya tata kelola kecamatan yang transparan, responsif, partisipatif, dan berintegritas.

Upaya tersebut diwujudkan melalui beberapa langkah strategis, antara lain: Penguatan sistem pelayanan publik yang berbasis pada pemantauan, evaluasi, dan peningkatan kualitas kerja aparatur kecamatan, sehingga masyarakat mendapatkan layanan yang cepat, mudah, dan terstandar. Pengembangan layanan administrasi berbasis digital untuk mendukung transformasi menuju pelayanan publik yang modern, efisien, dan selaras dengan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Konsolidasi transparansi dan akuntabilitas melalui perluasan akses masyarakat terhadap informasi publik, penguatan kanal pengaduan masyarakat, serta tindak lanjut yang terukur terhadap setiap masukan yang diberikan. Penguatan manajemen risiko dan pengendalian internal pada setiap program dan kegiatan kecamatan guna menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan serta mencegah terjadinya penyimpangan. Peningkatan profesionalisme aparatur kecamatan, baik dari sisi kompetensi teknis maupun etika pelayanan, agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pembangunan Zona Integritas di tingkat kecamatan sebagai wujud komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berorientasi pada kepentingan publik. Optimalisasi partisipasi masyarakat dengan melibatkan kelembagaan lokal seperti RT, PKK, Karang Taruna, LPM, Babinsa, Babinkamtibmas, dan Balakar, agar tercipta sinergi dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Transparansi capaian kinerja kecamatan melalui publikasi hasil pembangunan dan pelayanan, sehingga pemerintah kecamatan tidak hanya menjadi pelaksana layanan, tetapi juga instrumen akuntabilitas publik.

Dengan arah kebijakan yang dijalankan secara konsisten setiap tahun, Kecamatan Tarakan Utara membangun fondasi operasional yang kuat dalam mewujudkan visi pelayanan publik kecamatan yang berkualitas. Kebijakan ini menjadi pedoman utama dalam mendukung tahapan strategi pembangunan hingga tahun 2030, sejalan dengan semangat pemerintahan baru yang menempatkan kecamatan sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat lihat tabel 3.2 tersebut.

Tabel 3.2
Arah Kebijakan

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
1	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Tata Kelola Pemerintahan	Penyelenggaraan Musrenbang	Mendukung peran aktif LPM, Karang Taruna, PKK, RT/RW, dan Posyandu
2	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan (Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah)	Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Tata Kelola Pemerintahan	Pemberdayaan di Kelurahan	Penyampaian informasi kinerja, keuangan, dan program secara berkala
3	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan serta Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. (Permendagri Nomor 130 Tahun 2018)	Peningkatan Responsivitas Terhadap Isu Sosial dan Keamanan	Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan	Partisipasi masyarakat dalam siklus pembangunan daerah
4	Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan (Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa)	Pengelolaan Ketertiban Umum dan Penegakan Hukum	Pelayanan Administratif Masyarakat	Dukungan terhadap kanal aduan, kotak saran, dan forum warga
5	Pelayanan Administratif Masyarakat (Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang PATEN; PermenPAN-RB No. 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan)		Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Insentif, pelatihan, dan pendampingan untuk RT/RW
6	Fasilitasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Permendagri No. 26 Tahun 2020 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum; Permendagri No. 84 Tahun 2014 tentang Organisasi Kecamatan)		Penyelenggaraan MTQ Wilayah	
7	Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan (SK Walikota Tarakan tentang Penyelenggaraan MTQ Kecamatan)		Pelaksanaan Mediasi dan Fasilitasi Konflik Sosial	
8	Penanganan Konflik Sosial dan Mediasi Warga (Permendagri No. 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah)			

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi dan arah kebijakan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, Kecamatan Tarakan Utara menyusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025–2029). Rencana operasional ini mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, yang merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Kecamatan Tarakan Utara dengan tetap mengacu pada arah pembangunan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2025–2029.

Perencanaan lima tahunan ini sekaligus menjadi tahapan strategis Kecamatan Tarakan Utara menuju pencapaian target akhir tahun 2030, yaitu *terwujudnya pelayanan publik kecamatan yang prima, partisipatif, transparan, dan berkelanjutan*. Oleh karena itu, program, kegiatan, dan subkegiatan disusun secara sistematis untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kecamatan.

Penyusunan program dan kegiatan tidak hanya memuat rincian kerja tahunan, tetapi juga dilengkapi dengan kerangka pendanaan indikatif yang menggambarkan kebutuhan sumber daya secara berkelanjutan. Selain itu, ditetapkan pula subkegiatan prioritas yang mendukung program prioritas kecamatan, sehingga arah pembangunan tetap fokus pada aspek pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketertiban umum, serta penguatan kelembagaan.

Untuk menjamin keterukuran hasil dan akuntabilitas kinerja, perencanaan ini disertai dengan indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci. Kedua indikator tersebut berfungsi sebagai tolok ukur untuk memantau perkembangan pencapaian tujuan, sekaligus menjadi acuan dalam evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan di masa mendatang.

Dengan demikian, rangkaian tabel berikut menyajikan keterhubungan antara kebijakan, program, kegiatan, pendanaan, serta ukuran kinerja yang diharapkan. Seluruhnya diharapkan dapat menjadi instrumen kerja nyata Tabel 4.1 Perumusan Program/kegiatan/Subkegiatan

Tabel 4.1
Perumusan Program/kegiatan/Subkegiatan kecamatan Tarakan Utara

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
- Meningkatnya kualitas digitalisasi pelayanan publik	Terwujudnya pelayanan publik Kecamatan yang berkualitas				Indeks kepuasan masyarakat (Indeks)		
		Meningkatnya pembangunan kecamatan			Persentase Usulan Pembangunan yang Terealisasi (%)		
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan		Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
					Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam musrenbang di Kecamatan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terfasilitasinya musrenbang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
				Terlaksananya pemberdayaan di kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan	
				Terfasilitasinya lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kecamatan			Capaian Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan (%)		
			Meningkatnya layanan kecamatan		Persentase Layanan Kecamatan Terselesaikan Tepat Waktu sesuai SOP (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya pelayanan administratif masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum		Persentase Aduan yang Terselesaikan (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Terfasilitasinya ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya kualitas kafilah MTQ		Persentase Kafilah yang Mengikuti MTQ di Tingkat Kota (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terselenggaranya MTQ wilayah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan	7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
			Terfasilitasinya konflik pertanahan		Persentase Aduan Pertanahan yang Difasilitasi (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terlaksananya mediasi dan fasilitasi	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	7.01.05.2.01.0005 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan			Nilai SAKIP (Angka)		
			Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja		Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersedianya layanan administrasi kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	7.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Tersedianya layanan administrasi umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
				Terkelolanya data Barang Milik Daerah dalam aplikasi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya layanan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Rencana program, kegiatan, subkegiatan, serta kebutuhan pendanaan indikatif Kecamatan Tarakan Utara selama periode perencanaan 2025–2029. Rencana ini merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, serta arah kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga memiliki keterkaitan langsung dengan upaya mewujudkan pelayanan publik kecamatan yang berkualitas, partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.

Program dan kegiatan yang dirumuskan dalam tabel ini mencakup bidang-bidang utama yang menjadi kewenangan Kecamatan Tarakan Utara, meliputi pelayanan administrasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Setiap program dijabarkan ke dalam kegiatan, kemudian dirinci kembali ke dalam subkegiatan, sehingga arah pelaksanaannya lebih jelas dan terukur.

Selain itu, rencana pendanaan indikatif disusun untuk memberikan gambaran mengenai kebutuhan sumber daya dalam lima tahun ke depan. Penyusunan pendanaan dilakukan dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan agar seluruh target pembangunan kecamatan dapat tercapai secara optimal.

Melalui Tabel 4.1 ini, terlihat keterhubungan antara kebijakan strategis dengan implementasi nyata di lapangan. Dengan demikian, Kecamatan Tarakan Utara memiliki pedoman yang jelas dalam mengelola program dan kegiatan, sekaligus memastikan bahwa seluruh alokasi sumber daya benar-benar diarahkan untuk mendukung terwujudnya sasaran pembangunan kecamatan.

Tabel 4.2
Rencana Program/Kegiatan/SubKegiatan dan Pendanaan Kecamatan Tarakan Utara

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)		91,94	773.459.900,00	92,09	757.459.900,00	92,24	733.459.900,00	92,53	733.459.900,00	92,84	733.459.900,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Tarakan Utara	
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				40.000.000,00		24.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya layanan administrasi kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	64	40.000.000,00	0	24.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
7.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0,00		24.000.000,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	0	0,00	4	24.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				40.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	64	40.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				100.479.500,00		100.479.500,00		100.479.500,00		100.479.500,00		100.479.500,00		
Tersedianya layanan administrasi umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	100.479.500,00	2	100.479.500,00	2	100.479.500,00	2	100.479.500,00	2	100.479.500,00		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	6		6		6		6		6			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	45.000.000,00	2	45.000.000,00	2	45.000.000,00	2	45.000.000,00	2	45.000.000,00		
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	4	4	6.000.000,00	4	6.000.000,00	4	6.000.000,00	4	6.000.000,00	4	6.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24.479.500,00		24.479.500,00		24.479.500,00		24.479.500,00		24.479.500,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2	6	24.479.500,00	6	24.479.500,00	6	24.479.500,00	6	24.479.500,00	6	24.479.500,00		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				148.772.400,00		148.772.400,00		148.772.400,00		148.772.400,00		148.772.400,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	32		32		32		32		32			
7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00		
7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				31.170.400,00		31.170.400,00		31.170.400,00		31.170.400,00		31.170.400,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	1	31.170.400,00	1	31.170.400,00	1	31.170.400,00	1	31.170.400,00	1	31.170.400,00		
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				37.602.000,00		37.602.000,00		37.602.000,00		37.602.000,00		37.602.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	32	37.602.000,00	32	37.602.000,00	32	37.602.000,00	32	37.602.000,00	32	37.602.000,00		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				264.000.000,00		264.000.000,00		264.000.000,00		264.000.000,00		264.000.000,00		
Tersedianya layanan jasa penunjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	264.000.000,00	12	264.000.000,00	12	264.000.000,00	12	264.000.000,00	12	264.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	204.000.000,00	12	204.000.000,00	12	204.000.000,00	12	204.000.000,00	12	204.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				57.000.000,00		57.000.000,00		57.000.000,00		57.000.000,00		57.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	57.000.000,00	12	57.000.000,00	12	57.000.000,00	12	57.000.000,00	12	57.000.000,00		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				220.208.000,00		220.208.000,00		220.208.000,00		220.208.000,00		220.208.000,00		
Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	29	29	220.208.000,00	29	220.208.000,00	29	220.208.000,00	29	220.208.000,00	29	220.208.000,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	45		45		45		45		45			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9	9		9		9		9		9			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	29	29	15.000.000,00	29	15.000.000,00	29	15.000.000,00	29	15.000.000,00	29	15.000.000,00		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	9	9	50.000.000,00	9	50.000.000,00	9	50.000.000,00	9	50.000.000,00	9	50.000.000,00		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				55.208.000,00		55.208.000,00		55.208.000,00		55.208.000,00		55.208.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	45	55.208.000,00	45	55.208.000,00	45	55.208.000,00	45	55.208.000,00	45	55.208.000,00		
Meningkatnya penguatan internal akuntabilitas kinerja	Persentase LHE AKIP yang ditindaklanjuti (%)	100	100	7.645.058.443,00	100	7.645.058.443,00	100	7.645.058.443,00	100	7.645.058.443,00	100	7.645.058.443,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Tarakan Utara	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		9.000.000,00		
Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	9.000.000,00	2	9.000.000,00	2	9.000.000,00	2	9.000.000,00	3	9.000.000,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	3	2.000.000,00		
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00		
7.01.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.636.058.443,00		7.636.058.443,00		7.636.058.443,00		7.636.058.443,00		7.636.058.443,00		
Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan sesuai SAP	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	50	61	7.636.058.443,00	61	7.636.058.443,00	61	7.636.058.443,00	61	7.636.058.443,00	61	7.636.058.443,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	10	10		10		10		10		10			
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	50	61	7.566.302.443,00	61	7.566.302.443,00	61	7.566.302.443,00	61	7.566.302.443,00	61	7.566.302.443,00		
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				69.756.000,00		69.756.000,00		69.756.000,00		69.756.000,00		69.756.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	10	10	69.756.000,00	10	69.756.000,00	10	69.756.000,00	10	69.756.000,00	10	69.756.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Meningkatnya layanan kecamatan	Persentase Layanan Kecamatan Terselesaikan Tepat Waktu sesuai SOP (%)		100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Tarakan Utara	
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya pelayanan administratif masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)		1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)		1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif (%)	100	100	1.699.120.000, 00	100	1.699.120.000, 00	100	1.699.120.000, 00	100	1.699.120.000, 00	100	1.699.120.000, 00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Tarakan Utara	
	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam musrenbang di Kecamatan (%)	100	100		100		100		100		100			
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				732.320.000,00		732.320.000,00		732.320.000,00		732.320.000,00		732.320.000,00		
Terfasilitasinya musrenbang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00		
7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	7	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	9	9		9		9		9		9			
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	26	3		3		3		3		3			
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	9	9	450.000.000,00	9	450.000.000,00	9	450.000.000,00	9	450.000.000,00	9	450.000.000,00		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				247.320.000,00		247.320.000,00		247.320.000,00		247.320.000,00		247.320.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	26	3	247.320.000,00	3	247.320.000,00	3	247.320.000,00	3	247.320.000,00	3	247.320.000,00		
7.01.03.2.02.0004 - Evaluasi Kelurahan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)		1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				966.800.000,00		966.800.000,00		966.800.000,00		966.800.000,00		966.800.000,00		
Terfasilitasinya lembaga kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)		1	966.800.000,00	1	966.800.000,00	1	966.800.000,00	1	966.800.000,00	1	966.800.000,00		
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	2	2		2		2		2		2			
7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				946.800.000,00		946.800.000,00		946.800.000,00		946.800.000,00		946.800.000,00		
Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	2	2	946.800.000,00	2	946.800.000,00	2	946.800.000,00	2	946.800.000,00	2	946.800.000,00		
7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)		1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Aduan yang Terselesaikan (%)	100	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Tarakan Utara	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terfasilitasinya ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
7.01.04.2.02.0001 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	1	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
Meningkatnya kualitas kafilah MTQ	Persentase Kafilah yang Mengikuti MTQ di Tingkat Kota (%)	42,48	50	230.000.000,00	51	230.000.000,00	52	230.000.000,00	53	230.000.000,00	54	230.000.000,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Tarakan Utara	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				245.000.000,00		245.000.000,00		245.000.000,00		245.000.000,00		245.000.000,00		
Terselenggaranya MTQ wilayah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	40	45	230.000.000,00	45	230.000.000,00	45	230.000.000,00	45	230.000.000,00	45	230.000.000,00		
7.01.05.2.01.0004 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	40	45	230.000.000,00	45	230.000.000,00	45	230.000.000,00	45	230.000.000,00	45	230.000.000,00		
Terfasilitasinya konflik pertanahan	Persentase Aduan Pertanahan yang Difasilitasi (%)	100	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Tarakan Utara	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				245.000.000,00		245.000.000,00		245.000.000,00		245.000.000,00		245.000.000,00		
Terlaksananya mediasi dan fasilitasi	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	10	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00		
7.01.05.2.01.0005 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	10	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00		

Pada Tabel 4.2 telah disusun rencana program, kegiatan, serta sub kegiatan beserta perkiraan pendanaan yang menjadi kerangka dasar pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Tarakan Utara selama periode 2025–2029. Tabel tersebut menggambarkan arah pembangunan secara menyeluruh dengan memperhatikan visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis yang telah dirumuskan sebelumnya. Namun, mengingat keterbatasan sumber daya, baik dari aspek pendanaan, waktu, maupun kapasitas pelaksana, maka diperlukan penajaman terhadap kegiatan yang benar-benar memiliki tingkat urgensi tinggi serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kecamatan Tarakan Utara, ditetapkan berbagai program prioritas yang menjadi fokus utama selama periode perencanaan tahun 2025–2029. Untuk mendukung pencapaian program prioritas tersebut, disusun daftar sub kegiatan prioritas yang bersifat strategis, terukur, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah kecamatan.

Sub kegiatan prioritas merupakan penjabaran operasional dari program dan kegiatan yang telah dirumuskan sebelumnya. Daftar ini tidak hanya menjadi pedoman kerja bagi perangkat kecamatan, tetapi juga sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta pengalokasian anggaran.

Pemilihan sub kegiatan dilakukan melalui pertimbangan terhadap isu strategis, permasalahan yang ada, ketersediaan sumber daya, serta urgensi pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, subkegiatan yang ditetapkan memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan wilayah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas merupakan dokumen penting yang berfungsi sebagai rencana aksi terukur dan terarah untuk memastikan program pembangunan kecamatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Tarakan Utara dengan Tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3

Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1.	7.01.03 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
			7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0001 - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	

Dengan disusunnya Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas. Daftar ini merupakan bentuk penyaringan (filtering) dari berbagai kegiatan yang ada, dengan mempertimbangkan isu-isu strategis, kebutuhan mendesak masyarakat, serta arah kebijakan

pembangunan daerah. Subkegiatan prioritas yang tercantum dalam tabel ini berfungsi sebagai fokus utama dalam implementasi program, sehingga pemerintah kecamatan dapat melaksanakan pembangunan secara lebih terarah, terukur, serta memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan wilayah.

Dengan adanya pemetaan sub kegiatan prioritas tersebut, diharapkan alokasi sumber daya dapat lebih efisien dan tepat sasaran. Selain itu, penetapan daftar sub kegiatan prioritas juga memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan benar-benar berkontribusi langsung pada pencapaian sasaran strategis, serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi Kecamatan Tarakan Utara. Dengan demikian, Tabel 4.3 tidak hanya sekadar daftar teknis, tetapi juga merupakan instrumen strategis yang menjadi penghubung antara perencanaan dan pelaksanaan program prioritas pembangunan di tingkat kecamatan.

Penyusunan indikator kinerja juga merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa perencanaan pembangunan di Kecamatan Tarakan Utara periode 2025–2029 dapat dilaksanakan secara terukur, sistematis, dan berorientasi pada hasil (outcome). Dengan adanya indikator kinerja utama, setiap tahapan pelaksanaan pembangunan dapat dievaluasi tingkat keberhasilannya, sekaligus memberikan gambaran mengenai sejauh mana tujuan dan sasaran strategis telah tercapai.

Indikator Kinerja Utama dirancang untuk memenuhi prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound), sehingga dapat menjadi alat ukur yang objektif dalam menilai capaian pembangunan. Selain itu, indikator tersebut juga mempertimbangkan kondisi riil wilayah, potensi lokal, serta kapasitas sumber daya yang tersedia di Kecamatan Tarakan Utara,

Indikator kinerja utama juga berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui indikator yang terukur, masyarakat dapat menilai sejauh mana kinerja pemerintah kecamatan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, penguatan tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indikator Kinerja Utama tidak hanya menjadi bagian teknis dari dokumen Renstra, tetapi juga merupakan instrumen pengendalian dan evaluasi pembangunan yang strategis dalam rangka mendukung visi dan misi Kecamatan Tarakan Utara yang teruang dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tarakan Utara

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kecamatan Tarakan Utara									
2.	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	91,84	92,17	92,2	92,23	92,27	92,3	92,33	
3.	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan	%	85,62	85,65	85,68	85,71	85,74	85,77	85,8	
4.	Nilai SAKIP	Angka	74,01	74,03	74,04	74,05	74,06	74,07	74,08	
5.	Persentase Usulan Pembangunan yang Terealisasi	%	22,22	23,02	23,03	23,04	23,05	23,06	23,07	

Pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang seharusnya menjadi ukuran utama keberhasilan pelaksanaan Renstra Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2025–2029. Namun, berdasarkan hasil identifikasi pada tahap penyusunan, indikator kinerja kunci untuk kecamatan masih belum ditetapkan (nihil). Hal ini dikarenakan belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur indikator kinerja kunci pada level kecamatan, serta masih terbatasnya instrumen pengukuran yang dapat digunakan untuk menilai capaian secara spesifik di tingkat kecamatan.

Kondisi ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kecamatan Tarakan Utara bahwa pada periode perencanaan berikutnya perlu dilakukan penguatan sistem pengukuran kinerja, baik melalui penetapan indikator kunci yang relevan, peningkatan kualitas data, maupun penyelarasan dengan indikator kinerja di tingkat kota. Dengan adanya indikator kinerja kunci yang jelas, diharapkan pada masa mendatang pelaksanaan Renstra kecamatan dapat lebih terukur, akuntabel, serta memudahkan proses monitoring dan evaluasi pembangunan.

Meskipun saat ini indikator kinerja kunci belum tersedia, pemerintah kecamatan tetap berkomitmen untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis yang telah dirumuskan, sambil terus mendorong pengembangan instrumen pengukuran kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang yang tertuang dalam Tabel berikut :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Tarakan Utara

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	NIHIL						0			0	
							0			0	

Dengan selesainya penyusunan indikator kinerja pada tabel-tabel sebelumnya dan penegasan kondisi pada Tabel 4.5, maka rangkaian perumusan Renstra Kecamatan Tarakan Utara telah disusun secara menyeluruh. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang memastikan pembangunan berjalan secara konsisten, terarah, dan akuntabel.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah di tingkat kecamatan. Dokumen ini tidak hanya menjadi pedoman teknis pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang efektif, efisien, serta akuntabel.

Renstra Kecamatan Tarakan Utara disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan daerah, arah kebijakan Kota Tarakan, serta kebutuhan nyata masyarakat di wilayah Kecamatan Tarakan Utara. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Renstra ini akan sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah kecamatan, perangkat daerah terkait, para pemangku kepentingan, serta seluruh lapisan masyarakat.

Dokumen ini juga berfungsi sebagai tolak ukur kinerja pemerintah kecamatan, sehingga capaian pembangunan dapat dievaluasi secara berkala setiap tahunnya. Dengan adanya evaluasi tersebut, diharapkan program, kegiatan, dan subkegiatan dapat selalu disesuaikan dengan tantangan serta peluang pembangunan yang berkembang, sehingga tetap relevan dan tepat sasaran.

Selain itu, penyusunan Renstra ini menegaskan komitmen Kecamatan Tarakan Utara untuk mendukung terwujudnya visi pembangunan Kota Tarakan, sekaligus memperkuat identitas wilayah sebagai bagian penting dari kemajuan kota secara keseluruhan. Dengan semangat kebersamaan, disiplin, serta tekad yang kuat, seluruh pihak diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan yang berkeadilan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Akhirnya, melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan Tarakan Utara Tahun 2025–2029, diharapkan lahir berbagai capaian yang signifikan dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat, sekaligus menjadi tonggak penting dalam perjalanan pembangunan Kecamatan Tarakan Utara menuju masyarakat yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.